



Rencana Kerja
Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2020

RKPD^{DIY} 2020





GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3),

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611)

10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, dan Lembaga Lain di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2020.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB 1 : PENDAHULUAN
- b. BAB 2 : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB 3 : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB 4 : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- e. BAB 5 : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
- f. BAB 6 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- g. BAB 7 : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- h. BAB 8 : PENUTUP

(2) Rincian uraian RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi :

- a. pedoman bagi OPD dalam menyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- b. dasar penyusunan Rancangan KUA Tahun Anggaran 2020 dan PPAS Tahun Anggaran 2020

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA,

Ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA,

Ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
2019 NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

RINCIAN URAIAN RKPD TAHUN 2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	6
1.3 Hubungan Antar Dokumen	10
1.4 Maksud dan Tujuan.....	11
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	11
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	13
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah	13
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	13
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	32
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	61
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	232
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	256
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	337
2.3.1 Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	338
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	349
BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	371
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	371
3.1.1 PDRB dan Struktur Ekonomi	371
3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	373
3.1.3 Struktur Pengeluaran Dalam PDRB	374
3.1.4 Inflasi.....	375
3.1.5 ICOR	375
3.1.6 Ketenagakerjaan.....	377
3.1.7 Kemiskinan	378
3.1.8 Ketimpangan Regional.....	378
3.1.9 Ketimpangan Pendapatan	379
3.1.10 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2020	379
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	382

3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	382
3.2.2	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	385
3.2.3	Arah Kebijakan Belanja Daerah	391
3.2.4	Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah .	396
3.2.5	Strategi Keuangan Daerah	397
BAB 4	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	401
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	401
4.2	Perumusan Tema RKPD 2020	407
4.2.1	Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Tema RKPD Tahun 2020	408
4.2.2	Internalisasi Tema dan Sasaran Rencana Kerja Pemerintah 2020 dengan Tema RKPD DIY tahun 2020	414
4.2.3	Internalisasi Paradigma Abad Samudra Hindia dalam Visi-Misi Gubernur DIY dengan Tema RKPD Tahun 2020: Kawasan Selatan Sebagai Basis Kewilayahan yang diperhatikan	415
4.2.4	Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Tema RKPD Tahun 2020	416
4.2.5	Internalisasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>).....	419
4.2.6	Internalisasi Deklarasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Jawa-Bali Tahun 2018.....	420
4.2.7	Tema RKPD DIY 2020	422
4.3	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020	426
4.4	Proritas dan Sasaran Pembangunan Kewilayahan Tahun 2020.....	429
4.4.1	Proyeksi Nilai PDRB Kabupaten-Kota	431
4.4.2	Proyeksi Nilai IPM Kabupaten dan Kota Se-DIY.....	434
4.4.3	Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota Se-DIY.....	435
4.4.4	Pendekatan Tematik.....	436
4.5	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	440
4.5.1	Maksud dan Tujuan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	441
4.5.2	Permasalahan Pembangunan DIY dari Sudut Pandang DPRD.....	442
4.5.3	Rekomendasi dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY	446
4.5.4	Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran	458
4.5.5	Penelaahan Usulan Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran melalui E-planning/ Jogjaplan (E-Pokir)	509
BAB 5	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA	511
5.1	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Yogyakarta 2020.....	511
5.1.1	Indeks Pembangunan Manusia.....	511
5.1.2	Pertumbuhan Ekonomi	511
5.1.3	Kemiskinan	512
5.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bantul 2020.....	512
5.2.1	Indeks Pembangunan Manusia.....	512
5.2.2	Pertumbuhan Ekonomi	513

5.2.3	Kemiskinan	513
5.3	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kulon Progo 2020	514
5.3.1	Indeks Pembangunan Manusia	515
5.3.2	Pertumbuhan Ekonomi	515
5.3.3	Kemiskinan	516
5.4	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul 2020	517
5.4.1	Indeks Pembangunan Manusia	517
5.4.2	Pertumbuhan Ekonomi	518
5.4.3	Kemiskinan	518
5.5	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sleman 2020.....	519
5.5.1	Indeks Pembangunan Manusia	519
5.5.2	Pertumbuhan Ekonomi	519
5.5.3	Kemiskinan	520
5.6	Pendekatan Fokus Tematik.....	521
5.6.1	Program/ Kegiatan Tematik Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan.....	521
5.6.2	Program/ Kegiatan Tematik Penurunan Ketimpangan Wilayah.....	527
5.6.3	Program/ Kegiatan Dukungan Pembangunan Yogyakarta International Airport (Bandar Udara Internasional Yogyakarta).....	543
5.6.4	Program/ Kegiatan Tematik Pembiayaan Pembangunan.	546
BAB 6	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	549
6.1	Strategi Pembangunan RKPD DIY 2020	549
6.1.1	Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2020	549
6.1.2	Internalisasi Deklarasi Musrenbangreg DIY, 2018 dalam RKPD DIY Tahun 2020.....	563
6.2	Rencana Program dan Kegiatan.....	569
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	570
	Dinas Kesehatan	588
	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral.....	599
	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.....	613
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	619
	Satuan Polisi Pamong Praja.....	624
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	629
	Dinas Sosial.....	636
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	654
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.....	662
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	666
	Dinas Perhubungan.....	682
	Dinas Komunikasi dan Informatika	690
	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	699
	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	704
	Dinas Kebudayaan.....	709
	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.....	711
	Dinas Kelautan dan Perikanan.....	718

Dinas Pariwisata.....	727
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	732
Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	744
Sekretariat Daerah	752
Biro Tata Pemerintahan.....	754
Biro Hukum	760
Biro Bina Mental Spiritual.....	770
Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	776
Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	780
Biro Organisasi.....	792
Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	800
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	806
Badan Penghubung Daerah	810
Sekretariat DPRD	813
Inspektorat	819
Paniradya Kaistimewan	825
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	827
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.....	840
Badan Kepegawaian Daerah	855
Badan Pendidikan dan Pelatihan.....	861
6.3 Pendekatan Tematik di Kabupaten/ Kota.....	902
6.3.1 Kegiatan Tematik Kota Yogyakarta.....	902
6.3.2 Kegiatan Tematik Kabupaten Bantul	859
6.3.3 Kegiatan Tematik Kabupaten Kulon Progo	874
6.3.4 Kegiatan Tematik Kabupaten Gunungkidul.....	904
6.3.5 Kegiatan Tematik Kabupaten Sleman.....	918
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	955
BAB 8 PENUTUP.....	963

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Jumlah Desa Menurut Kabupaten/ Kota dan Letak Geografis....	15
Tabel 2-2	Pulau-Pulau di Wilayah Kabupaten Gunungkidul DIY	15
Tabel 2-3	Debit Rerata Sungai di DIY	22
Tabel 2-4	Penggunaan Lahan DIY	24
Tabel 2-5	Rincian Evaluasi Kesesuaian Pola Ruang Kawasan Lindung.....	26
Tabel 2-6	Rincian Evaluasi Kesesuaian Pola Ruang Kawasan Budidaya dan Total Nilai Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.....	26
Tabel 2-7	Tingkat Ancaman Bencana di Wilayah DIY.....	28
Tabel 2-8	Data Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2014 - 2018.....	30
Tabel 2-9	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2014- 2018 dalam persen	34
Tabel 2-10	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DIY Menurut Tipe Daerah, 2014-2017	35
Tabel 2-11	Garis Kemiskinan DIY dan Indonesia Menurut Tipe Daerah Tahun 2014-2018	36
Tabel 2-12	Persentase Komoditas Garis Kemiskinan berdasarkan Jenis Komoditas Makanan dan Non Makanan Menurut Tipe Daerah September 2018 (%).....	36
Tabel 2-13	Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi di Jawa dan Nasional Tahun 2014-2018.....	38
Tabel 2-14	Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi di Jawa dan Nasional Tahun 2014-2018.....	38
Tabel 2-15	Perkembangan PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2018 (Juta Rp).....	39
Tabel 2-16	Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2018 (%).....	40
Tabel 2-17	Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2018 (%).....	40
Tabel 2-18	Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota DIY ADHB Tahun 2014-2018	43

Tabel 2-19	Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018.....	43
Tabel 2-20	Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2014-2018	45
Tabel 2-21	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2014-2017.....	49
Tabel 2-22	Perkembangan Angka Melek Huruf menurut Jenis Kelamin di DIY (%), 2014-2018.....	49
Tabel 2-23	Perkembangan Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Usia di DIY (%), 2014-2018	50
Tabel 2-24	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota di DIY (Tahun), 2014-2017.....	50
Tabel 2-25	Perkembangan Angkatan Kerja di DIY, 2014 - 2018.....	56
Tabel 2-26	SDM Olahraga DIY Tahun 2017.....	60
Tabel 2-27	Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga di DIY, Tahun 2014-2017.....	61
Tabel 2-28	Persentase Sekolah Jenjang SD, SMP dan SMA Berakreditasi A di DIY Tahun 2014-2018.....	64
Tabel 2-29	Rasio Siswa per Ruang Kelas SD, SMP, SMA, SMK DIY Tahun 2014 - 2018	66
Tabel 2-30	Kondisi Fisik Ruang Kelas Jenjang SD – SMA Sederajat di DIY Tahun 2015-2018	66
Tabel 2-31	Jumlah Sekolah di DIY yang Memiliki Laboratorium Komputer Tahun 2014 – 2018	67
Tabel 2-32	Persentase Guru Tersertifikasi di DIY Tahun 2014-2018.....	67
Tabel 2-33	Persentase Keterserapan di Dunia Kerja melalui Pendidikan Formal dan Informal Tahun 2014-2018.....	68
Tabel 2-34	Layanan di BTKP DIY dan Persentase Penggunaan Layanan BTKP DIY Tahun 2018	69
Tabel 2-35	Temuan Kasus Berdasarkan Tahun Penemuan 2014-2018.....	72
Tabel 2-36	Jenis Penyakit Tidak Menular dengan Prevalensi Tinggi	74
Tabel 2-37	Perkembangan Jumlah Kematian Bayi dan Kelahiran Hidup DIY Tahun 2012-2017	76
Tabel 2-38	Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kelas di DIY Tahun 2017.....	77
Tabel 2-39	Daerah Irigasi di DIY.....	79
Tabel 2-40	Prasarana Irigasi/Pengairan	79

Tabel 2-41	Kondisi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan Pemda Diy 2018	80
Tabel 2-42	Cakupan Pelayanan Air Minum Kabupaten Kota di DIY, Tahun 2018	83
Tabel 2-43	Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Pada Sistem IPAL Terpusat Sewon Sampai Dengan Tahun 2018.....	84
Tabel 2-44	Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik DIY Tahun 2018.....	85
Tabel 2-45	Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan per Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018	86
Tabel 2-46	Daftar Ruas Jalan Provinsi, Tahun 2016	88
Tabel 2-47	Kondisi Jalan Provinsi 2018	88
Tabel 2-48	Realisasi Kinerja Urusan Tata Ruang Tahun 2018	93
Tabel 2-49	Penanganan Kawasan Kumuh Berdasarkan Kewenangan.....	95
Tabel 2-50	kondisi Gatra Ketahanan Nasional di DIY.....	97
Tabel 2-51	Perkembangan Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS) di DIY tahun 2016 - 2018	100
Tabel 2-52	Jenis dan Jumlah PSKS di DIY Tahun 2014-2018	103
Tabel 2-53	Data PSKS yang Memperoleh Peningkatan Kapasitas dan Kualitas di DIY Tahun 2015-2018	104
Tabel 2-54	Nama Balai/ Panti Sosial dan Daya Tampungnya di DIY Tahun 2014 - 2018	105
Tabel 2-55	Presentase PMKS yang Memperoleh Bantuan di DIY tahun 2014 - 2018	107
Tabel 2-56	Persentase PMKS Skala Provinsi yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di DIY Tahun 2015 - 2017	108
Tabel 2-57	Jumlah dan Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat di DIY Tahun 2015 - 2018	110
Tabel 2-58	Tabel Jumlah dan Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat di DIY Tahun 2015 - 2017	110
Tabel 2-59	Perkembangan Penduduk Usia Kerja di DIY (dalam ribu orang), Tahun 2013 - 2018.....	112
Tabel 2-60	Tingkat Penangguran Terbuka di DIY Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2014 - 2018.....	116

Tabel 2-61	Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY Menurut Pendidikan Agustus Tahun 2016 – Agustus 2018.....	117
Tabel 2-62	Jumlah Perusahaan dan Perangkat Hubungan Industrial di DIY Tahun 2018.....	119
Tabel 2-63	Data Jumlah Tenaga Kerja Terlatih dan Jenis Pelatihannya.....	120
Tabel 2-64	Tabel Indeks Pembangunan Gender DIY 2013 - 2017.....	123
Tabel 2-65	Capaian IDG DIY Tahun 2013-2017	123
Tabel 2-66	Jumlah Desa Prima Kabupaten/Kota di DIY	124
Tabel 2-67	Anggota DPRD DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014 – 2018 Berdasarkan Jenis Kelamin	125
Tabel 2-68	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Usia dan Lokasi Lembaga Layanan 2016-2017	128
Tabel 2-69	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Usia dan Lokasi Lembaga Layanan 2017-2018.....	129
Tabel 2-70	Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Lokasi pada Tahun 2017	130
Tabel 2-71	Rekap Inventarisasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten s.d Tahun 2019.....	138
Tabel 2-72	Nilai Indeks Kualitas Air 10 Sungai di DIY tahun 2018.....	139
Tabel 2-73	Nilai Indeks Kualitas Udara di DIY tahun 2018.....	140
Tabel 2-74	Data Luas Tutupan Vegetasi dan Hasil Konversinya.....	141
Tabel 2-75	Jumlah Penduduk Wajib KTP dan Jumlah Penduduk yang telah Melakukan Perekaman KTP EL di DIY, 2014-2018.....	142
Tabel 2-76	Jumlah Anak yang Memiliki Akta dan Belum Memiliki Akta, 2018	143
Tabel 2-77	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah, September 2017-September 2018.....	144
Tabel 2-79	Jumlah PKK Aktif di DIY Tahun 2017.....	146
Tabel 2-80	Proyeksi Parameter Kependudukan Tahun 2010-2035.....	149
Tabel 2-81	<i>Unmet Need</i> KB di DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2017	150
Tabel 2-82	Angka Perceraian di DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2017	152
Tabel 2-83	Jumlah Putusan Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama di DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2017.....	153
Tabel 2-84	Jumlah Penumpang Perkotaan Terangkut Tahun 2008-2018	154

Tabel 2-85	Perangkingan Urutan Daerah Rawan Kecelakaan pada Ruas Jalan Provinsi.....	156
Tabel 2-86	Kualifikasi Badan Publik Kategori Pemerintah Provinsi 2018	157
Tabel 2-87	Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2014-2018.....	159
Tabel 2-88	Perkembangan Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2014-2018	159
Tabel 2-89	Perkembangan Jumlah UKM Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2013-2018	160
Tabel 2-90	Perkembangan Jumlah UKM Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2013-2018	160
Tabel 2-91	Perkembangan Investasi di DIY Tahun 2013-2018	162
Tabel 2-92	Rekap Data Investasi Perusahaan PMDN Tahun 2018 (Kumulatif) Berdasarkan Kabupaten/Kota	162
Tabel 2-93	Rekap Data Investasi Perusahaan PMA Tahun 2018 (Kumulatif) Berdasarkan Kabupaten/Kota	163
Tabel 2-94	10 Besar Provinsi dengan Indeks Daya Saing Tertinggi di Indonesia Hasil Kajian Asia Competitiveness Institute	163
Tabel 2-95	Jumlah Atlet di DIY Tahun 2017	165
Tabel 2-96	Capaian Prestasi Atlet DIY di Ajang Kompetisi Olahraga.....	165
Tabel 2-97	Fasilitas Olahraga di DIY.....	166
Tabel 2-98	Jumlah Kelembagaan Pemuda dan Olahraga serta Sarana bagi Pemuda di DIY.....	168
Tabel 2-99	Budaya Benda di DIY.....	173
Tabel 2-100	Daftar Kawasan Cagar Budaya di DIY	173
Tabel 2-101	Jenis Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Tahun 2012-2017	175
Tabel 2-102	Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY tahun 2012-2018	178
Tabel 2-103	Organisasi Seni dan Budaya di DIY.....	182
Tabel 2-104	Pelaku Seni dan Budaya di DIY Tahun 2012-2017	182
Tabel 2-105	Peringkat TGM Kabupaten/Kota di DIY	183
Tabel 2-106	Data Perpustakaan per Jenis Perpustakaan Tahun 2018	183
Tabel 2-107	Data Perpustakaan per Kabupaten/Kota Tahun 2018	184
Tabel 2-108	Data Kearsipan di DIY 2014-2018.....	186
Tabel 2-109	Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY.....	192
Tabel 2-110	Lama Tinggal Wisatawan	193
Tabel 2-111	Jumlah Usaha Perjalanan Wisata.....	193
Tabel 2-112	Luas Lahan Sawah Beririgasi dan Non Irigasi di DIY.....	194

Tabel 2-113	Produksi Tanaman Pangan di DIY (dalam ton), Tahun 2014-2018	195
Tabel 2-114	Populasi Ternak di DIY per Kelompok Ternak (dalam ekor), Tahun 2014-2018	197
Tabel 2-115	Perkembangan Produksi Komoditas Perkebunan Strategis di DIY 2014-2018 (dalam ton)	198
Tabel 2-116	Luas Hutan di DIY Berdasarkan Kewilayahan Tahun 2018	199
Tabel 2-117	Produksi Minyak Kayu Putih di DIY Tahun 2014-2018	201
Tabel 2-118	Data Status Permohonan WIUP	204
Tabel 2-119	IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi	205
Tabel 2-120	Data Jenis Energi Baru Terbarukan 2015 - 2018	207
Tabel 2-121	Perkembangan Jumlah SIUP di DIY Berdasarkan Golongan Usaha, Tahun 2013 - 2017	209
Tabel 2-122	Perkembangan Jumlah Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di DIY Per Kabupaten Kota, Tahun 2013-2018	209
Tabel 2-123	Perkembangan Toko Modern dan Pasar Tradisional, Tahun 2013-2017	210
Tabel 2-124	Perkembangan Ekspor di DIY Tahun 2014-2018	210
Tabel 2-125	Komoditas Ekspor di DIY Tahun 2014-2018 (dalam Juta US \$)	211
Tabel 2-126	Persentase Kontribusi Ekspor Non Migas Berdasarkan Provinsi di Indonesia 2018	211
Tabel 2-127	Perkembangan IKM di DIY, Tahun 2013-2018	212
Tabel 2-128	Data Sentra IKM di DIY per Kabupaten/Kota Tahun 2018	213
Tabel 2-129	Jumlah Animo Masyarakat dan Pendaftar Transmigrasi di DIY Tahun 2013-2018	215
Tabel 2-130	Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi Menurut Daerah Asal di DIY, Tahun 2013-2018	216
Tabel 2-131	Perkembangan dan Distribusi Transmigran Asal DIY Menurut Provinsi Tujuan, Tahun 2013-2018	216
Tabel 2-132	Distribusi Transmigran Asal DIY Menurut Provinsi Tujuan dan Kabupaten/Kota Asal, Tahun 2018	218
Tabel 2-133	Perkembangan dan Distribusi Transmigran Asal DIY Menurut Provinsi Tujuan dan Kabupaten/Kota Asal, Tahun 2017	219
Tabel 2-134	Perkembangan dan Distribusi Transmigran Asal DIY Menurut Provinsi Tujuan dan Kabupaten/Kota Asal, Tahun 2016	219

Tabel 2-135	Perkembangan dan Distribusi Transmigran Asal DIY Menurut Provinsi Tujuan dan Kabupaten/Kota Asal, Tahun 2015	220
Tabel 2-136	Pendapatan Daerah DIY	227
Tabel 2-137	Jumlah aset yang di Pengguna dan Pengelola.....	227
Tabel 2-138	Jumlah Aset yang Dioptimalkan	227
Tabel 2-139	Penjagaan Pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) di DIY, 2019-2022	229
Tabel 2-140	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di DIY, Tahun 2013-2017.....	232
Tabel 2-141	Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di DIY, Tahun 2013-2017	234
Tabel 2-142	Nilai Tukar Petani (NTP) 2013-2018.....	235
Tabel 2-143	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di DIY, Tahun 2013-2017.....	237
Tabel 2-144	Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di DIY, Tahun 2012-2017	237
Tabel 2-145	Pembangunan Jaringan Fiber Optik Pemda DIY	242
Tabel 2-146	Langganan Bandwidth Pemda DIY	243
Tabel 2-147	Jumlah Penumpang dan Besaran Penerimaan Pendapatan Operasional Trans Jogja 2011-2017	248
Tabel 2-148	Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan	251
Tabel 2-149	Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan	251
Tabel 2-150	Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan per 100.000 Penduduk DIY.....	251
Tabel 2-151	Jumlah Demonstrasi di DIY Tahun 2013-2018	252
Tabel 2-152	Data Tindak Pidana Narkoba di DIY	253
Tabel 2-153	Target dan Capaian IKU Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 dan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019.....	257
Tabel 2-154	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran s.d Tahun 2018 terhadap target Akhir RPJMD.....	259
Tabel 2-155	Capaian Kinerja Program Pemda Tahun 2018.....	261
Tabel 2-156	Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Pemda DIY Tahun 2018.....	263
Tabel 2-157	Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	270

Tabel 3-1	PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran, 2012-2018 (Juta Rupiah)	374
Tabel 3-2	Struktur PDRB DIY menurut Pengeluaran, 2012-2018 (%) ...	374
Tabel 3-3	Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2015-2019	377
Tabel 3-4	Kemiskinan di DIY Tahun 2015-2019	378
Tabel 3-5	Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun 2020.....	380
Tabel 3-6	Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2018- 2020	382
Tabel 4-1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	406
Tabel 4-3	Sasaran Makro Ekonomi Pembangunan Nasional dan Daerah Istimewa Yogyakarta	414
Tabel 4-4	Sasaran Urusan Keistimewaan pada Misi ke-1 RPJMD DIY 2017- 2022	417
Tabel 4-5	Sasaran Urusan Keistimewaan pada Misi ke-2 RPJMD DIY 2017- 2022	418
Tabel 4-6	Rumusan Prioritas Daerah	426
Tabel 4-7	Tema dan Prioritas pembangunan DIY	427
Tabel 4-8	Target Pengembangan Wilayah Jawa Bali dan DIY pada tahun 2020	429
Tabel 4-9	Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah DIY-Kabupaten Kota Tahun 2020	430
Tabel 4-10	Proyeksi PDRB Kota Yogyakarta (juta rupiah)	431
Tabel 4-11	Proyeksi PDRB Kabupaten Bantul (juta rupiah)	432
Tabel 4-12	Proyeksi PDRB Kabupaten Kulon Progo (juta rupiah)	433
Tabel 4-13	Proyeksi PDRB Kabupaten Gunungkidul (juta rupiah)	433
Tabel 4-14	Proyeksi PDRB Kabupaten Sleman (juta rupiah).....	434
Tabel 4-15	Proyeksi IPM Kabupaten dan Kota se-DIY	434
Tabel 4-16	Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota se-DIY (dalam persen)	435
Tabel 4-17	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	446
Tabel 4-18	Rekapitulasi dari Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	459
Tabel 6-1	Tema RKPD DIY, Sasaran dan Program Pemda	549
Tabel 6-2	Strategi RKPD DIY 2020 dan Program Pemda.....	551

Tabel 6-4	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendapatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	866
Tabel 6-5	Kegiatan Tematik Kota Yogyakarta.....	903
Tabel 6-6	Kegiatan Tematik Kabupaten Bantul.....	859
Tabel 6-7	Kegiatan Tematik Kabupaten Kulon Progo.....	874
Tabel 6-8	Kegiatan Tematik Kabupaten Gunungkidul.....	905
Tabel 6-9	Kegiatan Tematik Kabupaten Sleman	918
Tabel 7-1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Istimewa Yogyakarta	955
Tabel 7-2	Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Istimewa Yogyakarta	956

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD DIY.....	6
Gambar 2-1	Peta Administrasi DIY.....	14
Gambar 2-2	Persentase Luas Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota.....	14
Gambar 2-3	Peta Satuan Fisiografis DIY.....	18
Gambar 2-4	Peta Geologi DIY.....	19
Gambar 2-5	Persentase Luas Wilayah DIY menurut Jenis Tanah.....	20
Gambar 2-6	Peta Aliran Sungai DIY.....	21
Gambar 2-7	Peta Tutupan Lahan DIY.....	25
Gambar 2-8	Peta Perencanaan Kawasan Strategis DIY Tahun 2019.....	28
Gambar 2-9	Grafik korban Bencana DIY tahun 2017 - 2018.....	31
Gambar 2-10	Piramida Penduduk DIY Tahun 2016.....	31
Gambar 2-11	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah DIY, 2016-2018.....	32
Gambar 2-12	Tingkat Kemiskinan DIY dan Nasional tahun 2014-2018.....	34
Gambar 2-14	Indeks Williamson DIY Tahun 2014-2018.....	42
Gambar 2-15	Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2014-2018.....	44
Gambar 2-17	Nilai Tukar Petani DIY Per Sub Sektor , Tahun 2014-2018.....	47
Gambar 2-18	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di DIY (Tahun), 2013-2017.....	51
Gambar 2-19	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah DIY Menurut Kabupaten/Kota di DIY (Tahun), 2016-2017.....	52
Gambar 2-20	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan di DIY (%), 2014 - 2018.....	53
Gambar 2-21	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) DIY Menurut Jenjang Pendidikan di DIY (%), 2014-2018.....	54
Gambar 2-22	Perkembangan Angka Kematian Bayi di DIY, 2000-2017.....	55
Gambar 2-23	Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di DIY (Tahun), 2010-2017.....	56

Gambar 2-25	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2014 - 2017.....	62
Gambar 2-26	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) DIY Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2014-2017.....	63
Gambar 2-29	Perkembangan Jumlah Kasus Malaria DIY Tahun 2012-2017 ...	73
Gambar 2-32	Pembangunan Saluran Drainase di Jalan Kaliurang Simpang MM UGM Kabupaten Sleman.....	87
Gambar 2-33	Pembangunan Jalan/Jembatan Ngalang-Nguwot-Gading, Kab. Gunungkidul.....	89
Gambar 2-34	Peningkatan kualitas prasarana sarana dan utilitas (PSU) di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.....	96
Gambar 2-35	Pengadaan Barang Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Kokap Kab. Kulonprogo.....	97
Gambar 2-37	Grafik Perkembangan Aspek IDI DIY 2013-2017	98
Gambar 2-38	Grafik Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba DIY 2013 - 2017	99
Gambar 2-41	Grafik Persentase WKSMB yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesos di DIY Tahun 2015 - 2018.....	109
Gambar 2-43	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Tahun 2013-2018.....	114
Gambar 2-44	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2013-2018	114
Gambar 2-45	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Menurut Kabupaten Kota 2018.....	115
Gambar 2-46	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIY dan Nasional, Tahun 2013-2018 (%)......	116
Gambar 2-47	TPT menurut Kabupaten Kota di DIY Tahun 2018 (Agustus). ..	118
Gambar 2-49	Grafik Ketersediaan Energi di DIY Tahun 2014-2018	132
Gambar 2-50	Grafik ketersediaan Protein di DIY Tahun 2014-2018.....	132
Gambar 2-51	Grafik Jumlah Desa Rawan Pangan Tahun 2013-2018.....	133
Gambar 2-52	Grafik Jumlah Perkembangan Konsumsi Enerdi Penduduk DIY Tahun 2014-2018	134
Gambar 2-53	Grafik Perkembangan Konsumsi Protein Penduduk di DIY Tahun 2014-2018.....	134
Gambar 2-54	Grafik Skor Pola Pangan Harapan di DIY Tahun 2014-2018 ...	135
Gambar 2-55	Persentase penduduk Miskin di DIY, September 2012- September 2018.....	143

Gambar 2-57	<i>Park and Ride</i> Gamping	156
Gambar 2-59	Grafik Proporsi Nelayan DIY Tahun 2018.....	187
Gambar 2-60	Perkembangan Jumlah Nelayan dan Rumah Tangga Perikanan Tangkap Laut DIY Tahun 2014-2018.....	188
Gambar 2-61	Grafik Perkembangan Armada Penangkapan Ikan DIY Tahun 2014-2018.....	189
Gambar 2-62	Produksi Perikanan Tangkap DIY Tahun 2014 – 2018.....	189
Gambar 2-63	Produksi Perikanan Budidaya DIY Tahun 2014-2018.....	190
Gambar 2-64	Tingkat Konsumsi dan Ketersediaan Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), tahun 2013-2017.....	191
Gambar 2-66	Perkembangan Produksi Hortikultura DIY Tahun 2014-2018 (dalam ton).....	196
Gambar 2-67	Perkembangan Populasi Ternak DIY Tahun 2014-2018 (dalam animal unit).....	197
Gambar 2-71	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita 2013-2017	233
Gambar 2-74	PDRB ADHB dan ADHK DIY (Triliun Rupiah), 2013-2017.....	238
Gambar 2-75	Kontribusi Terbesar terhadap PDRB ADHB DIY menurut Sektor (%), 2013-2017.....	239
Gambar 2-76	Skema Jaringan Fiber Optik Mandiri Pemerintah DIY.....	244
Gambar 2-77	Rencana sistem jaringan jalan.....	245
Gambar 2-78	Rencana sistem jaringan jalan Rencana JORR	246
Gambar 2-79	Kawasan Perkotaan dan Bentuk Interaksi dengan Kota-kota di Sekitarnya.....	246
Gambar 2-80	Sistem Operasional Bus Trans Jogja	247
Gambar 2-81	Presentase Angkatan Kerja DIY Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017	254
Gambar 2-82	Angka Beban Tanggungan Penduduk DIY Tahun 2013-2017..	256
Gambar 3-2	Kontribusi Empat Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY menurut Sektor (%), 2015 - 2019	372
Gambar 3-3	Kontribusi Tiga Sektor Terendah terhadap PDRB ADHK DIY menurut Sektor (%), Tahun 2015-2019.....	372
Gambar 3-4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) DIY (%), 2015-2019.....	373
Gambar 3-5	Pertumbuhan Ekonomi per Tahun 2019 menurut Sektor (%)	373
Gambar 3-6	Laju Inflasi IHK DIY (%), 2015-2019.....	375
Gambar 3-7	Perkembangan ICOR DIY (PMTB + Perubahan Inventori), 2015-2019	376

Gambar 3-8	Perkembangan ICOR (PMTB + Perubahan Inventori) Kabupaten/Kota di DIY, 2012-2016.....	377
Gambar 3-9	Indeks Williamson DIY, Tahun 2015-2019	378
Gambar 3-10	Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2015 - 2019	379
Gambar 3-11	Peta Sebaran Pembangunan Infrastruktur DIY	398
Gambar 4-1	Arsitektur Kinerja RPJMD DIY 2017-2022 Cascade Perencanaan	410
Gambar 4-2	Diagram Proporsi E-Pokir	509
Gambar 4-3	Grafik Proporsi Pokir Memungkinkan dan OPD.....	510

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik, sampai pada perkembangan mutakhir adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan untuk mendorong pembangunan yang bersifat berkelanjutan serta semangat untuk menempatkan manusia sebagai tujuan pembangunan. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang dilakukan di daerah juga harus mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional untuk mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa. Implikasinya pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga harus diselaraskan dengan skema pembangunan Republik Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan oleh semua daerah dan nasional tertuang dalam konsitusi yang merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan yang telah diamanatkan secara lebih tegas dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan telah ditindaklanjuti dengan beberapa aturan-aturan pelaksanaan dan teknis.

Khusus untuk DIY, pembangunan juga mengacu pada semangat *renaissance* dan mengakomodir pelaksanaan urusan keistimewaan dengan membawa filosofi yang mendasari pembangunan DIY yaitu *Hamemayu Hayuning Bawana*. Filosofi itu adalah cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya. *Hamemayu Hayuning Bawana* mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat dari pada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh peri kehidupan baik dalam skala kecil (keluarga), ataupun masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri. Lebih lanjut lagi, pembangunan DIY juga membawa mandat pelaksanaan keistimewaan DIY yang tertuang dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengacu visi pembangunan DIY yang akan dicapai selama dua puluh tahun mendatang adalah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. RKPD 2020 merupakan tahun awal dari RPJMD 2018 – 2022, dikaitkan dengan tahapan pembangunan jangka panjang berada pada tahapan lima tahun ketiga dari RPJP dengan penekanan pada pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah.

Seperti halnya dengan daerah lain, DIY juga menghadapi kompleksitas permasalahan di berbagai sektor dan kepentingan, di samping itu DIY juga harus mewujudkan cita-cita akhir pembangunan yang harus dicapai yaitu berkarakter, berbudaya, maju, dan makmur. Oleh karenanya proses pembangunan membutuhkan suatu landasan pemikiran yang komprehensif untuk meraih peluang dan tantangan yang ada dimana landasan ini mampu memetakan kerangka permasalahan secara jelas dan terukur dan juga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan di tengah kompleksitas.

Terkait dengan input pembangunan, proses pembangunan juga mempertimbangkan optimalisasi sumber daya-sumber daya yang dimiliki daerah dan peningkatan pemahaman kebutuhan masyarakat dan daerah setempat digunakan sebagai acuan untuk menyelenggarakan program pembangunan. Hal-hal tersebut telah menjadi tantangan yang harus diantisipasi di setiap proses pembangunan. Tantangan tersebut menuntut proses pembangunan di DI Yogyakarta untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan sebuah agenda pembangunan yang tepat, efektif, efisien, dan memiliki dampak yang nyata terhadap seluruh bagian masyarakat dan sektor di dalam DI Yogyakarta. Lebih lanjut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X (2012) dalam rangka menyongsong peradaban baru perlu kebijakan konkret untuk melaksanakan pembangunan yang fokus, terarah, dan efektif melalui prioritas sektor yang dijelaskan di 9 bidang strategis dalam Arah Kebijakan Renaisans Yogyakarta. Prioritas Renaisans Yogyakarta terdiri dari: (1) Pendidikan, (2) Pariwisata, (3) Teknologi, (4) Ekonomi, (5) Energi, (6) Pangan, (7) Kesehatan, (8) Keterlindungan Warga, dan (9) Tata Ruang dan Lingkungan. Kesembilan sektor ini akan menjadi prioritas pembangunan dengan berpegang kepada Budaya Sebagai Payung dan Arus Utama dalam Pembangunan.

Pada struktur dan tatanan pembangunan tahunan, dokumen perencanaan daerah dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD). Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD.
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat kedudukan strategis RKPD, perhatian yang besar dan komprehensif seyogyanya diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD mengingat pentingnya RKPD secara strategis dalam keseluruhan tahap pembangunan daerah. Proses yang terdiri dari beberapa tahapan dan cakupan yang komprehensif dimaksudkan agar dapat menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk program dan indikator kinerja keluaran (*output*) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.

5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dokumen RKPD disusun melalui proses bertahap selama kurang lebih empat bulan dengan melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD.

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi :

- a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan rancangan awal RKPD.

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.

- a. Perumusan rancangan awal RKPD.

Dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

- 1) Pengolahan data dan informasi.
- 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah.
- 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah.
- 4) Evaluasi kinerja tahun lalu.
- 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional.
- 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY.
- 7) Perumusan permasalahan pembangunan DIY.
- 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah.
- 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif.
- 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.
- 11) Pelaksanaan forum konsultasi publik.
- 12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

- b. Penyajian rancangan awal RKPD.

Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan.
- 2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu.
- 3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

- 4) Prioritas dan sasaran pembangunan.
- 5) Rencana program prioritas daerah.
3. Penyusunan rancangan RKPD.

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja Perangkat Daerah DIY sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD DIY.
4. Pelaksanaan musrenbang RKPD.

Musrenbang RKPD dalam pelaksanaannya dilakukan penggabungan antara pelaksanaan musrenbang dengan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah. Selain itu juga diadakan kesepakatan bersama antara Perangkat Daerah, Bappeda DIY dan Bappeda Kabupaten-kota mengenai kegiatan *sharing*. Proses dan tahapan pelaksanaan yang cukup banyak serta panjang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup :

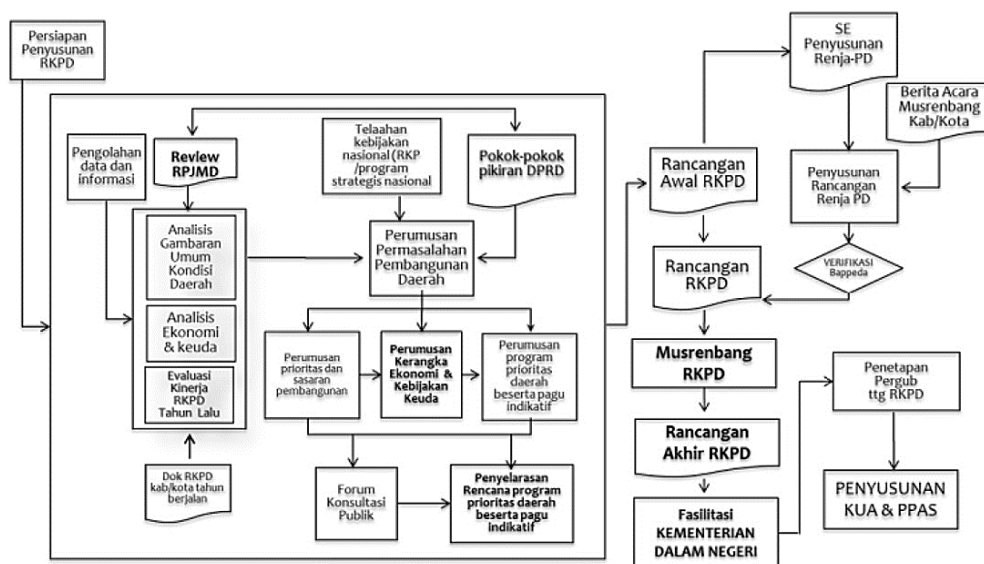
 - a. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah DIY dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota.
 - b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah DIY pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD DIY dilaksanakan.
 - c. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan DIY.
 - d. Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.
 - e. Sinergi dengan RKP.
5. Perumusan rancangan akhir RKPD.

Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.
6. Penetapan RKPD.

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan ditingkat pusat dengan daerah.

Rancangan RKPD disusun berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RPJMN -yang saat ini masih dalam proses penyusunan naskah Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024. Penyusunan RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun ke-3 dari RPJMD DIY 2018 - 2022. RKPD yang telah ditetapkan

digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan prioritas pembangunan nasional. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Gambar 1-1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD DIY

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD DIY Tahun 2019 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang no 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

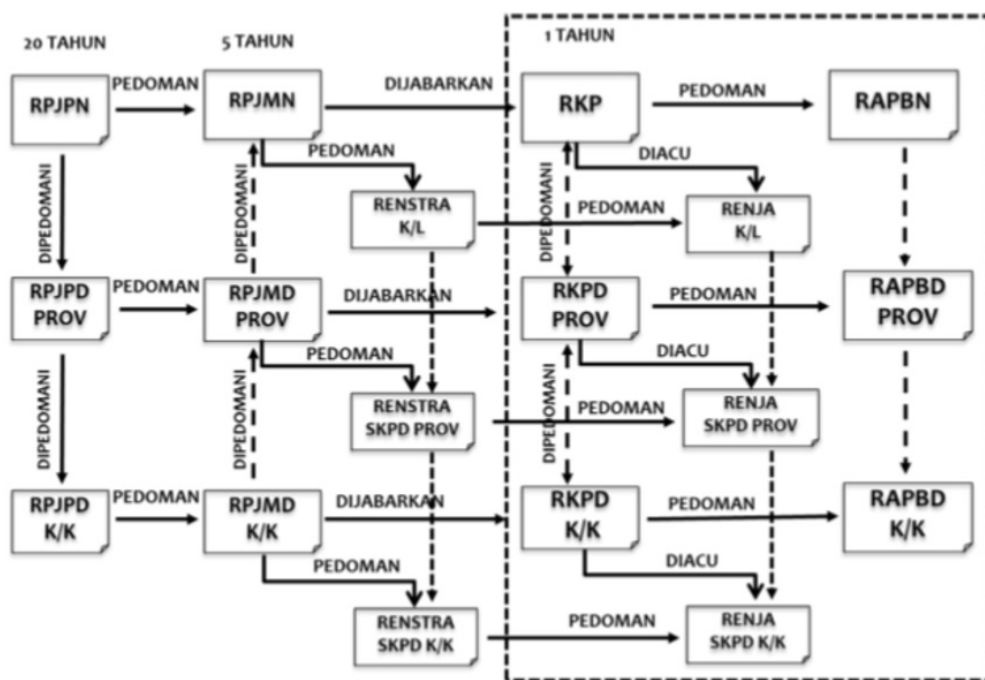
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009;
21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
23. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DIY;
24. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi DIY; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY;
25. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3)

27. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Keistimewaan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Keistimewaan;
28. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7)
31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
32. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
33. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 45);
34. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 117);
35. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 34);
36. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 34);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan merupakan satu kesatuan proses pembangunan dalam skema pembangunan dalam jangka yang lebih panjang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), RKPD, dan Renja Perangkat Daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.



Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Gambar 1-2 Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan di daerah berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi

dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan lingkungan internal maupun eksternal baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

RKPD Tahun 2020 merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan peralihan antara periode RPJMD 2012 – 2017 dan RPJMD 2017 – 2022. Sebagai tahapan tahun kedua RPJMD 2017 – 2022, penyusunan RKPD tahun 2018 dilaksanakan dengan mengakomodir upaya penyesuaian materi awal RPJMD 2017 – 2022 dengan menyesuaikan konten RKPD tahun 2018 dengan dokumen background study RPJMD terkait. Penyesuaian ini dilakukan dengan maksud untuk menjaga keselarasan RKPD tahun 2018 dengan calon dokumen perencanaan jangka menengah yang akan dijabarkan.

1.4 Maksud dan Tujuan

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju,

Tujuan penyusunan RKPD adalah untuk acuan bagi seluruh Instansi/ Kantor Wilayah/ Lembaga Teknis Daerah/ Dinas Daerah/ Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2020.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan
Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
2. Bab II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.
3. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
 4. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
 6. Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
Mengemukakan arah kebijakan pembangunan untuk Kabupaten/Kota terutama terkait penyesuaian sasaran pembangunan makro/ strategis.
 7. Bab VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
 8. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Mengemukakan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditargetkan pada tahun perencanaan RKPD.
 9. Bab VIII Penutup

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

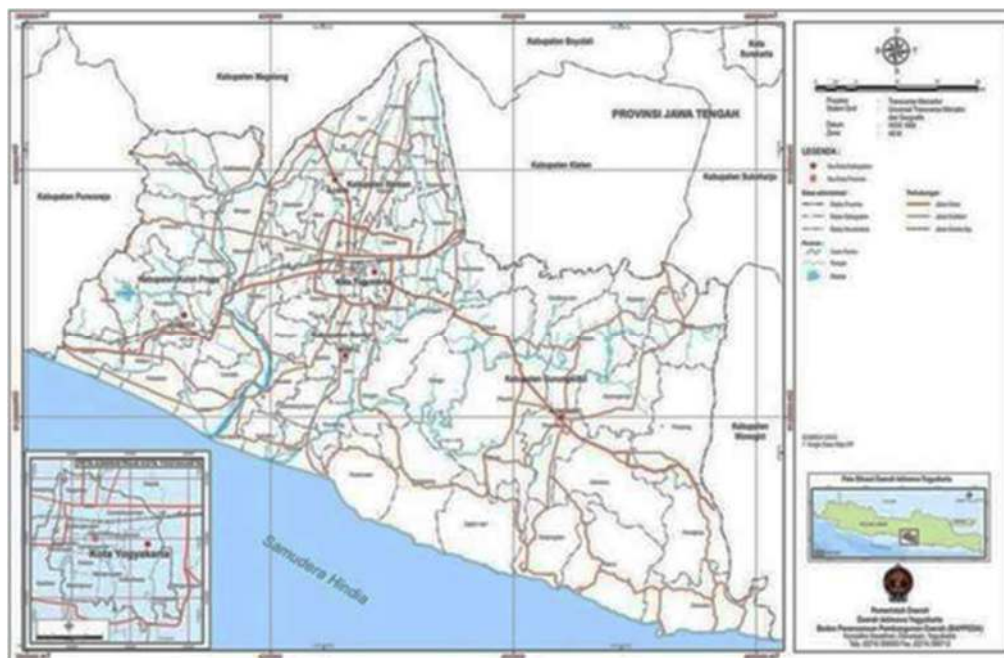
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

Secara astronomis, DIY terletak diantara 7^o33'-8^o12' Lintang Selatan dan 110^o00'-110^o50' Bujur Timur sedangkan secara geografis, DIY berada di bagian tengah Pulau Jawa sisi selatan dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan sebelah selatan dengan Samudra Hindia.

2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

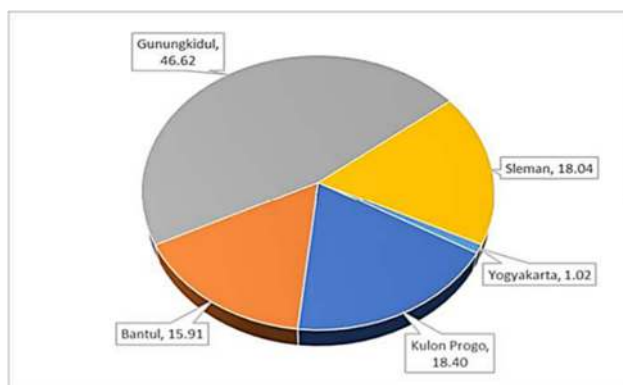
Luas wilayah DIY adalah 3.185,80 km² atau 0,17% dari total luas Indonesia (1.860.359,67 km²) dan merupakan provinsi dengan luas terkecil setelah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Apabila ditinjau menurut kabupaten dan kota, wilayah di DIY yang terluas adalah Kabupaten Gunungkidul, yaitu meliputi 46,63% dari luas DIY sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 1,02%.



Sumber: Bappeda DIY, RTRW Provinsi DIY Tahun 2009-2029

Gambar 2-1 **Peta Administrasi DIY**

Secara Administratif, DIY terbagi menjadi empat kabupaten dan satu kota dengan 78 kecamatan dan terdapat 438 desa/kelurahan.



Sumber: BPS, Statistik Daerah DIY 2018

Gambar 2-2 **Persentase Luas Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota**

DIY tidak memiliki kawasan pedalaman maupun kawasan terpencil. Menurut kondisi geografis, desa-desa di DIY terletak di daerah pesisir, lereng/punggung bukit, dan daerah dataran. Jumlah desa di DIY menurut letak geografis tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2-1 Jumlah Desa Menurut Kabupaten/ Kota dan Letak Geografis

Kabupaten/ Kota	Ibukota	Kecamatan	Kelurahan /Desa	Pesisir	Lembah /DAS	Lereng/ Punggung Bukit	Dataran
Kulon Progo	Wates	12	88	10	-	22	66
Bantul	Bantul	17	75	5	-	13	62
Gunungkidul	Wonosari	18	144	18	2	55	87
Sleman	Sleman	17	86	-	-	15	71
KotaYogyakarta	Yogyakarta	14	45	-	-	-	45
DIY	Yogyakarta	78	438	33	0	105	331

Sumber: BPS, DIY dalam Angka 2018

2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, DIY terletak diantara 7°33'-8°12' Lintang Selatan dan 110°00'-110°50' Bujur Timur sedangkan secara geografis, DIY berada di bagian tengah Pulau Jawa sebelah Selatan dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan sebelah selatan dengan Samudra Hindia.

Ditinjau dari posisi geostrategis, DIY terletak dibagian tengah Pulau Jawa bagian Selatan, hal ini menjadikan DIY berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia yang kaya akan sumberdaya laut dan menjadikan DIY memiliki wilayah berupa kepulauan. DIY memiliki 28 pulau yang masuk dalam wilayah Kabupaten Gunungkidul yang tersebar pada lima kecamatan, yaitu Purwosari, Panggang, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo. Daftar pulau di wilayah DIY tersebut disajikan seperti dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2-2 Pulau-Pulau di Wilayah Kabupaten Gunungkidul DIY

No	Kecamatan	Desa	Nama Pulau
1	Purwosari	Giricahyo	Gunungsemar
2	Panggang	Giriwungu	Payung
3	Tanjungsari	Kemadang	Ngrawe Jumpina Lawang
		Banjarejo	Drini
		Ngestirejo	Watupayungsiratan
4	Tepus	Sidoharjo	Watulawang
		Tepus	Timang
		Purwodadi	Ngondo
			Watupayungsiyung
			Watupanjang
		Watunglambor	

No	Kecamatan	Desa	Nama Pulau
5	Girisubo		Watuganten Lor
			Watuganten Kidul
			Watubebek
		Jepitu	Watutogog
			Jungwok
			Watutopi
		Tileng	Ngusalan
			Kalong
			Amben
		Pucung	Watugrek
		Songbanyu	Gununggandul
			Godeg
			Baron
			Layar
			Krokoh

2.1.1.1.3 Topografi

Topografi merupakan studi tentang bentuk permukaan bumi. Topografi menampilkan relief permukaan, model tiga dimensi, dan identitas jenis lahan. Relief merupakan bentuk permukaan lahan yang dikelompokkan berdasarkan perbedaan ketinggian (*amplitude*) dari permukaan bumi suatu bentang lahan (*landform*).

Topografi secara kualitatif adalah bentang lahan (*landform*) dan secara kuantitatif dinyatakan dalam satuan kelas lereng (% atau derajat), arah lereng, panjang lereng dan bentuk lereng. Keadaan relief suatu daerah akan mempengaruhi tebal atau tipisnya lapisan tanah dan sistem pengaliran. Daerah yang memiliki topografi miring dan berbukit memiliki lapisan tanah yang lebih tipis karena tingkat erosi lebih tinggi, sedangkan daerah dengan topografi datar memiliki lapisan tanah yang tebal karena tingkat sedimentasi lebih tinggi. Kecepatan pengaliran air pada topografi datar lebih kecil daripada topografi yang lebih miring.

Topografi DIY dibagi menjadi kemiringan lahan dan ketinggian lahan dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Kemiringan lahan

Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional DIY, kemiringan lahan di DIY dikelompokkan menjadi empat kategori kemiringan, yaitu lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 1.223,47 km², lahan dengan kemiringan 3-15% seluas 767,46 km², lahan dengan kemiringan 16-40% seluas 806,17 km², dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 388,21 km².

b. Ketinggian lahan

Wilayah DIY dibagi menjadi empat kategori ketinggian lahan, yaitu wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl sebesar 28,84%, wilayah dengan ketinggian 100—499 mdpl sebesar 65,65%, wilayah dengan ketinggian 500—999 mdpl sebesar 5,04%, dan wilayah dengan ketinggian di atas 1000 mdpl sebesar 0,47%. Wilayah DIY terdiri dari ekosistem gunung api, karst, dataran aluvial, dan samudra Hindia yang kesemuanya memiliki potensi sumberdaya alam. Dengan penampang topografis yang dimiliki, wilayah DIY terbagi menjadi beberapa satuan fisiografis sebagai berikut:

1. Satuan Pegunungan Selatan, seluas $\pm 1.656,25 \text{ km}^2$, ketinggian 150–700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran basin Wonosari. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;
2. Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas $\pm 582,81 \text{ km}^2$, ketinggian 80–2.911m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air.
3. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas $\pm 215,62 \text{ km}^2$, ketinggian 0–80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu, daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam *marine* dan *aeolin* yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir;
4. Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas $\pm 706,25 \text{ km}^2$, ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.



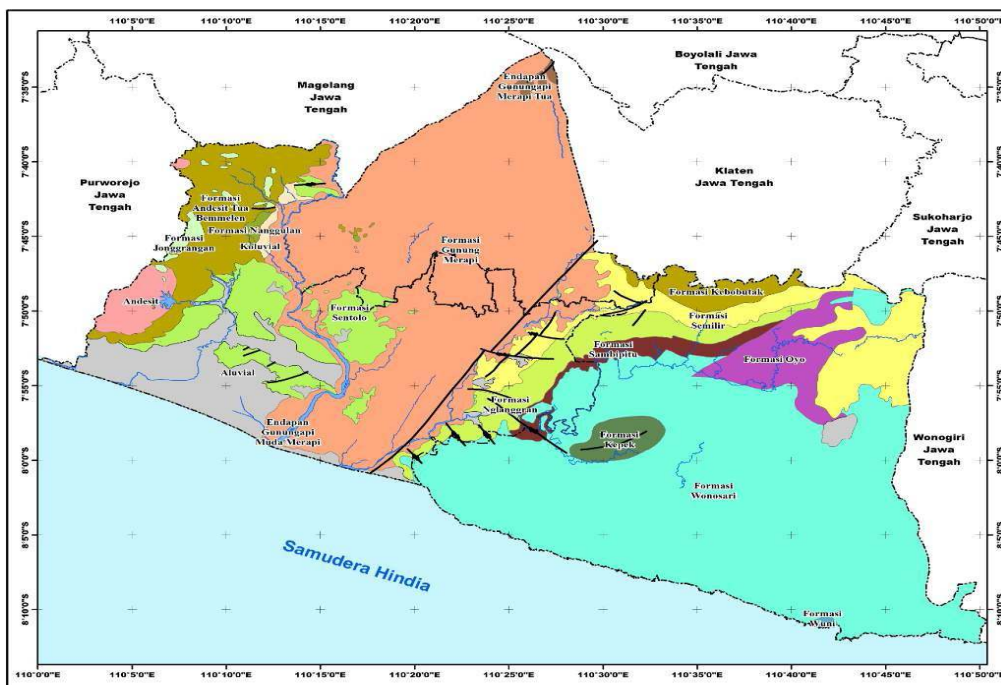
Sumber: Bappeda DIY, Tahun 2014

Gambar 2-3 Peta Satuan Fisiografis DIY

2.1.1.1.4 Geologi

Informasi geologi DIY diperoleh dari Peta Geologi DIY skala 1:100.000. Formasi DIY terdiri dari Aluvium (Qa), Formasi Gunungapi Merapi (Qvm), Endapan Vulkanik Merapi Muda (Qmi), Endapan Vulkanik Merapi Tua (Qmo), Formasi Kepek (Tm_{pk}), Formasi Wonosari - Punung (Tm_{wl}), Formasi Sentolo (Tm_{ps}), Formasi Oyo (Tm_o), Formasi Wuni (Tm_w), Formasi Sambipitu (Tm_{ss}), Formasi Semilir (Tm_s), Formasi Nglanggran (Tm_{ng}), Formasi Kebo-Butak (Tm_{kb}), dan Formasi Mandalika (Tm_{md}).

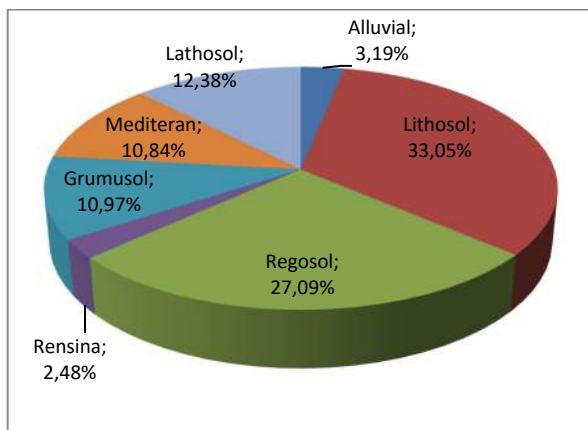
Daerah ini mempunyai struktur geologi lipatan dan patahan. Lipatan terdiri dari antiklin dan sinklin terdapat pada Formasi Semilir (Tm_s), Formasi Oya (Tm_o), Formasi Wonosari-Punung (Tm_{wl}) dan Formasi Kepek (Tm_{pk}). Patahan berupa sesar turun dengan pola antithetic fault block, terdapat antara lain pada terban Bantul.



Sumber: Bappeda DIY, Tahun 2017

Gambar 2-4 Peta Geologi DIY

Secara umum kondisi tanah di DIY tergolong cukup subur sehingga memungkinkan untuk ditanami berbagai tanaman pertanian. Hal ini disebabkan karena letak DIY yang berada di dataran lereng Gunung Api Merapi yang mengandung tanah regosol seluas 863,06 km² atau sekitar 27,09%. Tanah regosol adalah tanah berbutir kasar dan berasal dari material gunung api dan merupakan tanah aluvial yang baru diendapkan. Sementara jenis tanah lain di DIY berupa tanah aluvial seluas 101,74 km², lithosol 1.052,93 km², resina 78,83km², grumusol 349,35 km², mediteran 345,40 km², dan lathosol 394,49 km².

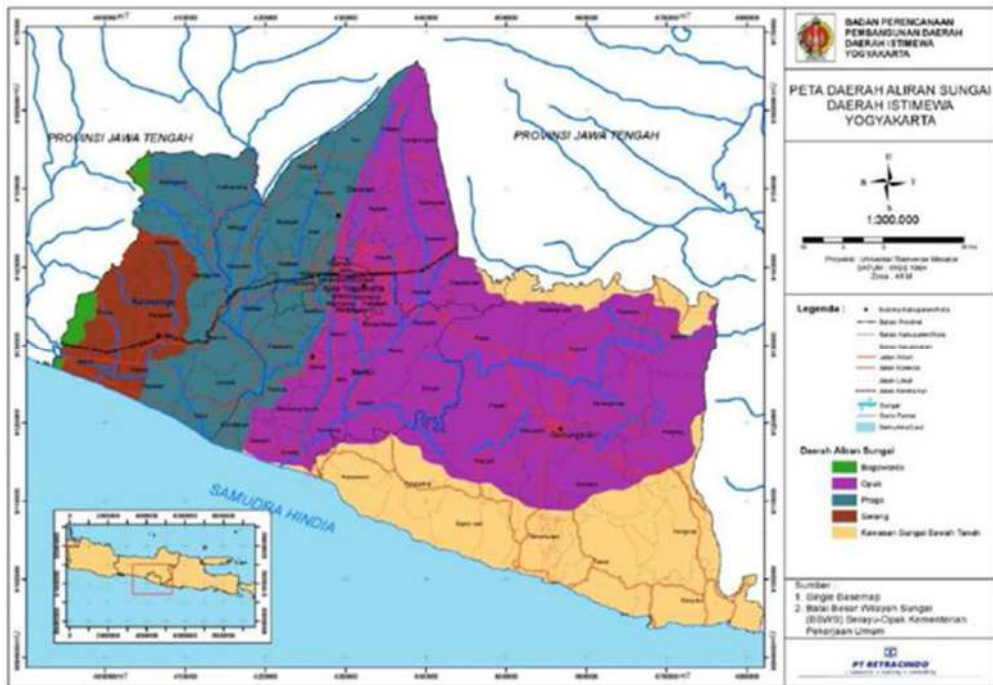


Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2018

Gambar 2-5 Persentase Luas Wilayah DIY menurut Jenis Tanah

2.1.1.1.5 Hidrologi

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terbagi menjadi 4 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Opak-Oyo, DAS Progo, DAS Serang dan sedikit DAS Bogowonto. Hanya DAS Serang yang seluruh wilayahnya berada di DIY sedangkan DAS lainnya sebagian wilayahnya terutama bagian hulunya berada di Provinsi Jawa Tengah. Peta pembagian DAS ini dapat dilihat pada Gambar Peta Aliran Sungai dibawah ini:



Sumber : Bappeda DIY, Roadmap pengelolaan dan Pengendalian LH, 2014

Gambar 2-6 **Peta Aliran Sungai DIY**

DAS tersebut yang bagian hilirnya langsung berakhir di Samudra Indonesia melalui wilayah Kabupaten Bantul, Kulon Progo atau Gunungkidul adalah:

- a. DAS Progo melintasi wilayah Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), Kabupaten Temanggung (Jawa Tengah), Kabupaten dan Kota Magelang (Jawa Tengah), Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Bantul.
- b. DAS Opak-Oyo melintasi wilayah Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), Kabupaten Sukoharjo (Jawa Tengah), Kabupaten Klaten (Jawa Tengah), Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
- c. DAS Serang berada di Kabupaten Kulon Progo dimana Sungai Serang berfungsi untuk menyediakan air untuk Bendung Pengasih dan Pekikjamal, yang mempunyai areal pelayanan masing-masing 2.757 ha dan 1.006 ha.

Kondisi cadangan air tanah di wilayah DIY, dapat dilihat dari kondisi *aquifer* yang ada di wilayah tersebut. Pada prinsipnya, *aquifer* di wilayah DIY dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) *aquifer*, yaitu:

- a. *Mayor Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan besar, dan jumlah air diperkirakan dapat mencukupi banyak tujuan (irigasi dan air baku). Termasuk daerah *mayor aquifer* adalah: Formasi Merapi Muda, Yogyakarta dan Sleman.
- b. *Minor Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan cukup, dan dapat melayani kebutuhan air irigasi sangat terbatas dan air minum. Termasuk daerah *minor aquifer* : Formasi Wates, Gumuk pasir.
- c. *Poor Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan kecil, dan hanya dapat memenuhi kebutuhan air minum. Termasuk daerah *poor aquifer* adalah Formasi Jonggrangan dan Sentolo, Formasi Sambipitu dan Oyo, dan Andesite tua.
- d. *Non Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan sangat kecil, dan praktis tidak ada air tanah. Termasuk daerah *non aquifer* adalah: Formasi Kepek, Formasi Kebo, Butak, Semilir, dan Nglanggeran, serta Formasi Nanggulan.

Beberapa sungai yang melintas di wilayah DIY memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan wilayah antara lain karena memiliki potensi ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan domestik, perkotaan, industri maupun untuk irigasi pertanian. Secara kuantitas masing-masing sungai tersebut mempunyai debit berikut ini.

Tabel 2-3 Debit Rerata Sungai di DIY

Sungai	Debit Rerata Bulanan (m ³ /det)									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks
Sungai Progo (Duwet)	1,26	148,45	0,03	120,83	0,60	149,50	0,35	209,79	0,35	246,8
Sungai Bedog (Guwosari)	2,66	12,71	1,75	10,36	0,44	10,85	0,95	15,84	0,33	17,32
Sungai Code (Kaloran)	1,09	3,71	0,99	2,76	0,25	4,26	0,51	4,16	0,57	3,91
Sungai Winongo (Padokan)	0,21	5,01	0,26	4,59	0,53	7,17	0,27	6,94	0,16	7,68
Sungai Gadjahwong (Papringan)	0,43	2,67	0,26	2,48	0,42	2,46	0,22	2,35	0,31	5,25
Sungai Opak (Pulo)	0,02	0,89	0,05	0,74	0,07	1,52	0,10	2,70	0,29	1,36

Sumber: Bidang SDA, Dinas PUP ESDM 2018

Untuk sungai bawah tanah, debit rerata untuk sungai bawah tanah (SBT) Bribin sebesar 0,95 m³/det, SBT Ngobaran 0,70 m³/det, SBT Seropan 0,80 m³/det, dan SBT Baron debit rerata 0,10 m³/det.

Berdasarkan Permen ESDM No.02 Th.2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia, terdapat 3 (tiga) Cekungan Air Tanah (CAT) di DIY yaitu CAT Yogyakarta-Sleman, CAT Wates dan CAT Wonosari.

CAT Yogyakarta-Sleman terletak pada lereng selatan Gunung Merapi yang dibatasi oleh Sungai Progo di sebelah barat dan Sungai Opak di sebelah timur dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia. Cekungan ini merupakan cekungan air tanah (CAT) yang sangat penting untuk menyediakan kebutuhan air DIY dan memiliki luas kurang lebih 1200 km², meliputi tiga wilayah kabupaten/kota di DIY yakni: Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. CAT Wates terletak di sisi selatan Kulon Progo untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan CAT Wonosari berada di sisi selatan Gunungkidul, untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Gunungkidul.

2.1.1.1.6 Klimatologi

Kondisi iklim sangat berpengaruh pada suatu daerah, baik pada potensi sumberdaya alam maupun dalam potensi kebencanaan alam. DIY terletak pada wilayah yang dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Iklim musim sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya satu periode perubahan angin adalah 6 bulan. Iklim musim terdiri dari 2 jenis, yaitu angin musim barat daya (Muson Barat) dan angin musim timur laut (Muson Timur). Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga April yang basah sehingga menyebabkan hujan. Angin muson timur bertiup sekitar bulan April hingga bulan Oktober yang sifatnya kering yang mengakibatkan wilayah mengalami musim kering/kemarau.

Sebagai daerah yang berada pada iklim tropis, kondisi iklim di DIY juga dipengaruhi oleh iklim tropis yang bersifat panas sehingga menyebabkan curah hujan tinggi. Di samping itu, karena letaknya yang sangat dekat dengan Samudera Indonesia, terjadi banyak penguapan air laut menjadi udara lembab dan mengakibatkan curah hujan tinggi.

Parameter iklim, seperti curah hujan, suhu udara, kelembaban udara dan arah angin, sangat berpengaruh pada potensi pengembangan sumberdaya alam, baik dilihat sebagai potensi cadangan alamiah maupun potensi alam berkesinambungan. Pada tahun 2017, DIY tercatat memiliki: a). suhu udara

minimum 21,3°C di bulan Agustus dan maksimum 31,9°C di bulan Mei; b). jumlah curah hujan perbulan terbesar sebanyak 693 mm³ pada bulan November dan terendah sebanyak 0 mm³ pada bulan Agustus; c). kelembaban udara minimum 45,8% di bulan Agustus dan maksimum 97,1% d bulan Maret d). tekanan udara antara 1011,8 mb – 1015,7 mb; e). kecepatan angin minimum 0,7 knot dan maksimum 1,1 knot (Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2018).

2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan

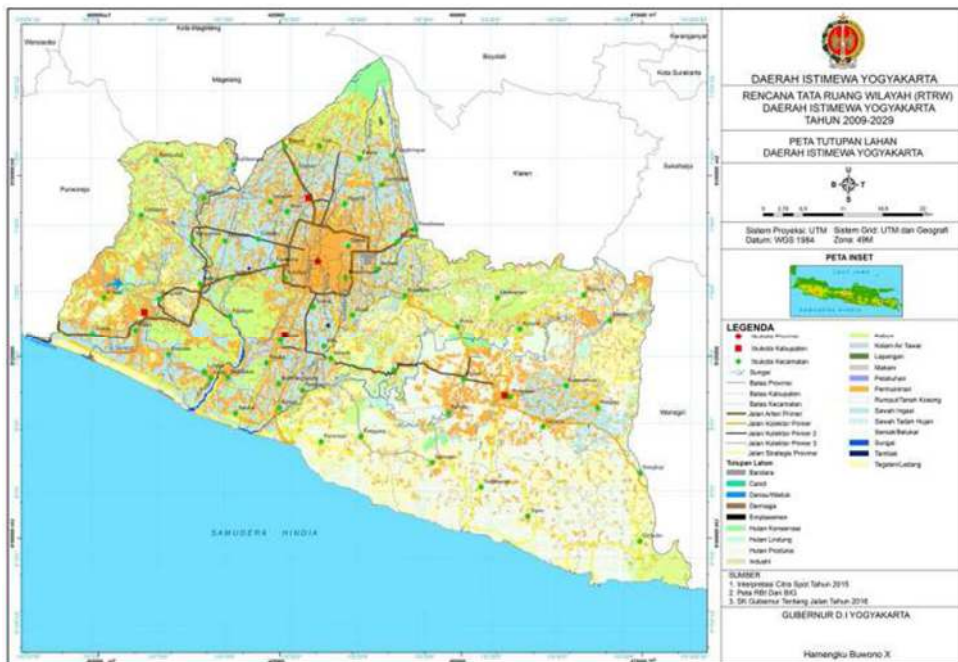
Berdasarkan data tutupan lahan tahun 2015 yang terdapat pada kajian peninjauan Perda DIY No 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY, penggunaan lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi permukiman, semak/belukar, pertanian, perkebunan dan hutan. Dominasi penggunaan lahan terbesar yaitu permukiman seluas 86,634.80 Ha atau sebesar 27.321%, diikuti semak/belukar seluas 63,227.04 Ha atau sebesar 19.939%. Pertanian yang didominasi sawah irigasi dan tegalan/lading yaitu 17.547% atau sekitar 55,640.93 Ha untuk sawah irigasi dan 13.497% atau seluas 42,797.81 Ha untuk tegalan/lading, sedangkan sawah tadah hujan hanya sekitar 0.940% atau 2,980.58 Ha. Perkebunan di wilayah DIY masih cukup luas yaitu sebesar 14.535% atau 46,089.80 Ha. Hutan yang terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi hanya sekitar 4.668% atau seluas 14,803.56 Ha. Penggunaan lahan lainnya selebihnya terdiri dari bandara, candi, danau/waduk, dermaga, emplasemen, industri, kolam, lapangan, makam, pelabuhan, tanah kosong, sungai dan tambak, seperti tabel berikut :

Tabel 2-4 Penggunaan Lahan DIY

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
Bandara	295.08	0.093%
Candi	32.61	0.010%
Danau/Waduk	253.91	0.080%
Dermaga	57.22	0.018%
Emplasemen	138.76	0.044%
Hutan Konservasi	3,295.11	1.039%
Hutan Lindung	2,201.22	0.694%
Hutan Produksi	9,307.23	2.935%
Industri	35.82	0.011%
Kebun	46,089.80	14.535%
Kolam Air Tawar	39.61	0.012%
Lapangan	1.63	0.001%
Lapangan Olah Raga	111.49	0.035%
Makam	41.74	0.013%
Pelabuhan	2.81	0.001%
Permukiman	86,634.80	27.321%

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
Rumput/Tanah Kosong	1,193.52	0.376%
Sawah Irigasi	55,640.93	17.547%
Sawah Tadah Hujan	2,980.58	0.940%
Semak/Belukar	63,227.04	19.939%
Sungai	2,609.94	0.823%
Tambak	107.23	0.034%
Tegalan/Ladang	42,797.81	13.497%

Sumber : Peninjauan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY



Sumber : Peninjauan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY

Gambar 2-7 Peta Tutupan Lahan DIY

Berdasarkan perhitungan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang, kesesuaian penggunaan lahan di DIY pada tahun 2017 terhadap pola ruang RTRW DIY Perda Nomor 2 tahun 2010 seluas 205.504,6 Ha, atau sebesar 64,79% dengan tingkat kesesuaian paling tinggi pada kawasan cagar alam dan kawasan pertanian lahan kering. Kesesuaian pemanfaatan ruang secara detil ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 2-5 Rincian Evaluasi Kesesuaian Pola Ruang Kawasan Lindung

Kawasan	Sesuai	Tidak Sesuai	Belum Terwujud	Grand Total
Cagar Alam	124,5	1163,8		1288,3
Cagar Alam Geologi	64432,9	20700,3		85133,2
Cagar Budaya	13,5	283,4		296,9
Hutan-Lindung	5020,0	39636,4		44656,4
Sekitar-danau/waduk	1001,2	111,4		1112,6
Sempadan Pantai	752,1	427,7		1179,8
Sempadan Sungai	6976,0	5791,3		12767,2
Sempadan Waduk	46,5	155,7		202,2
Taman Ht Ry & HL	1456,9	3,9		1460,9
Waduk Tinalah	162,0	109,6		271,7
Kawasan Resapan Air	36645,7	0,0		36645,7
Total	116631,3	68383,6		185014,9
Persentase	63,04%	36,96%		

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2017

Tabel 2-6 Rincian Evaluasi Kesesuaian Pola Ruang Kawasan Budidaya dan Total Nilai Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Kawasan	Sesuai	Tidak Sesuai	Belum Terwujud	Grand Total
Hutan Penelitian	394,5	11,8	2,4	408,7
Hutan Produksi	5403,4	1045,3	4407,5	10856,2
Industri	0,0	179,5	639,5	819,0
Militer dan Kepolisian	1,1	193,5	417,2	611,8
Pariwisata	27,9	38,9	176,1	242,9
Pendidikan Tinggi	615,6	0,4	117,4	733,3
Permukiman Desa	24304,5	292,7	19265,0	43862,1
Permukiman Kota	9840,2	10,4	5793,4	15644,0
Pertambangan	518,5	1404,3		1922,8
Pertanian Lahan Basah	19622,5	4107,5	1759,0	25489,1
Pertanian Lahan Kering	27569,9	3821,5	987,0	32378,4
Suaka Marga Satwa	575,4	21,4		596,8
Total	88873,3	11127,4	33564,4	133565,1
Persentase	66,54%	8,33%	25,13%	
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	= (63,04 % + 66,54 %) : 2 = 64,79 %			

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2017

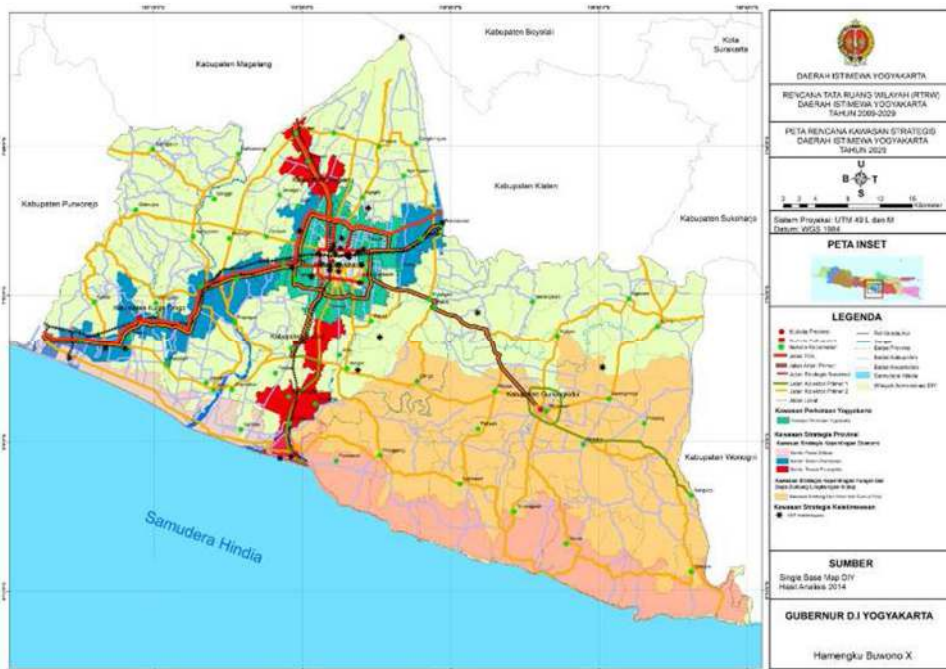
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY, berada pada kawasan budidaya dan kawasan strategis provinsi. Berdasarkan kajian peninjauan Perda DIY No 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY, potensi pengembangan wilayah sesuai dengan rencana pola ruang kawasan budidaya terdiri dari : kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan budidaya lainnya. Sedangkan potensi pengembangan wilayah sesuai dengan kawasan strategis provinsi terdiri atas: kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya terdiri atas kawasan strategis kasultanan dan kawasan strategis kadipaten. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas Kawasan Perkotaan Yogyakarta, Kawasan Temon-Prambanan, Kawasan Tempel- Parangtritis, dan Kawasan Pantai Selatan DIY. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi terdiri atas Kawasan Pantai Selatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dan Gelombang Laut di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul.

Sesuai dengan materi review RTRW DIY terdapat beberapa perubahan yang mempengaruhi perubahan potensi pengembangan wilayah. Perubahan yang terdapat materi review RTRW DIY diantaranya adanya perubahan sistem perkotaan, dimana Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang semula ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Wates dan Wonosari, menjadi ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Temon – Wates dan Kawasan Perkotaan Wonosari. Perubahan signifikan lainnya yaitu dengan adanya pengembangan bandar udara baru dan kota bandara (Airport City) serta Aerotropolis di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian bandar udara baru Yogyakarta di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo,

pelabuhan laut di Pantai Selatan, serta pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional.



Sumber: Peninjauan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY

Gambar 2-8 Peta Perencanaan Kawasan Strategis DIY Tahun 2019

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Pada rancangan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana DIY 2018 – 2022 dijelaskan tentang potensi ancaman bencana yang menyajikan rincian indeks bahaya dengan luas daerah terpapar (hektar) untuk bencana yang berpotensi di wilayah DIY sebagai berikut :

Tabel 2-7 Tingkat Ancaman Bencana di Wilayah DIY

No	Jenis Ancaman Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas Risiko
1	Banjir	158.551	Tinggi
2	Banjir Bandang	3.059	Tinggi
3	Cuaca Ekstrim	287.466	Sedang
4	Epidemi Dan Wabah Penyakit	20.317	Rendah
5	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	2.476	Sedang
6	Gempa bumi	313.315	Tinggi
7	Kebakaran Hutan Dan Lahan	12.757	Tinggi

No	Jenis Ancaman Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas Risiko
8	Kegagalan Teknologi	1.901	Tinggi
9	Kekeringan	313.315	Tinggi
10	Letusan Gunungapi Merapi	7.755	Tinggi
11	Tanah Longsor	44.458	Tinggi
12	Tsunami	7.522	Tinggi

Sumber: *Kajian Rencana Pengurangan Risiko Bencana DIY 2018-2022*

Tabel di atas memperlihatkan bahwa kelas resiko bahaya di DIY berada pada rentang kelas rendah, sedang, hingga tinggi. Adapun bencana dengan kelas bahaya rendah yaitu epidemi dan wabah penyakit, bencana yang memiliki kelas bahaya sedang yaitu cuaca ekstrim dan gelombang ekstrim dan abrasi. Sedangkan bencana yang memiliki kelas bahaya tinggi yaitu banjir bandang, gempabumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kegagalan teknologi, letusan gunungapi, kebakaran hutan dan lahan dan tsunami. Penentuan indeks tersebut diperoleh berdasarkan luas terpapar bahaya yang paling besar, selain itu juga mengacu pada peta bahaya untuk tiap potensi bencana yang mengancam di wilayah DIY.

Potensi bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial di DIY antara lain konflik antar kelompok masyarakat dan terorisme. Sementara itu, potensi bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam antara lain, gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan. Namun demikian frekuensi dan kerawanan bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial dan non alam, selama ini masih relatif kecil.

Risiko bencana harus tetap menjadi perhatian dalam pembangunan wilayah. Wilayah rawan bencana telah diidentifikasi. Kawasan rawan bencana gunung berapi di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Sleman. Kawasan yang terdampak mencakup hampir seluruh wilayah DIY terutama Kabupaten Sleman bagian utara dan wilayah-wilayah sekitar sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul. Gerakan tanah/batuan dan erosi berpotensi terjadi pada kawasan lereng pegunungan di Kulon Progo yang mengancam wilayah Kulon Progo bagian utara dan barat serta pada lereng pegunungan selatan (Baturagung) yang mengancam wilayah Gunungkidul bagian utara dan Kabupaten Bantul bagian timur.

Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Banjir terutama berpotensi mengancam daerah pantai selatan Kabupaten Bantul

dan Kulon Progo. Kawasan rawan bencana kekeringan di Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Sleman dan Kulon Progo. Bahaya kekeringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian selatan khususnya pada wilayah dengan bentang alam karst. Kawasan rawan bencana angin topan berpotensi terjadi di wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan daerah- daerah di Kabupaten Sleman bagian utara serta wilayah perkotaan Yogyakarta.

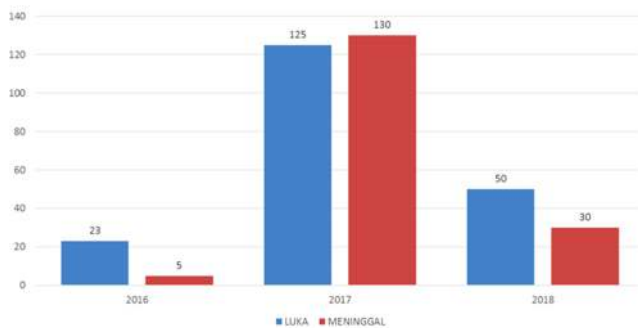
Kawasan rawan gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan zona subduksi (kawasan tumbukan antar lempeng) di dasar samudera Indonesia yang berada di sisi selatan DIY. Di samping itu, secara geologi, di wilayah DIY terdapat beberapa sesar yang diduga aktif. Wilayah dataran rendah yang tersusun oleh sedimen lepas, terutama hasil endapan sungai merupakan wilayah yang rentan mengalami guncangan akibat gempabumi. Kawasan rawan bencana tsunami di sepanjang pantai Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul khususnya pada pantai dengan elevasi kurang dari 30 m dari permukaan air laut.

Selama tahun 2014-2018, bencana alam yang cukup sering terjadi di DIY adalah kebakaran hutan/lahan, tanah longsor dan banjir. Pada tahun 2017 sebanyak 1097 kejadian longsor terjadi di wilayah DIY. Selanjutnya pada tahun 2017 dan 2018 kejadian bencana justru lebih sering terjadi masing-masing 1860 kali dan 874 kali kejadian. Total kerugian yang diakibatkan pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 520.734.985.600 dan Rp. 12.206.980.000.

Tabel 2-8 Data Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2014 - 2018

Nama Kejadian	2014	2015	2016	2017	2018
Banjir	58	1	18	24	12
Tanah Longsor	46	17	179	1097	216
Kebakaran	NA	NA	150	343	217
Angin Kencang	206	35	99	89	147
Gelombang Pasang	NA	NA	4	2	1
Laka	NA	NA	52	160	56
Pohon Tumbang	NA	NA	116	1442	88
Gempa	3	8	21	0	124
Kekeringan	1	1	1	1	1
Gunung Meletus	1	0	0	0	12
JUMLAH	315	63	640	1860	874

Sumber: Media Center BPBD DIY, 2018

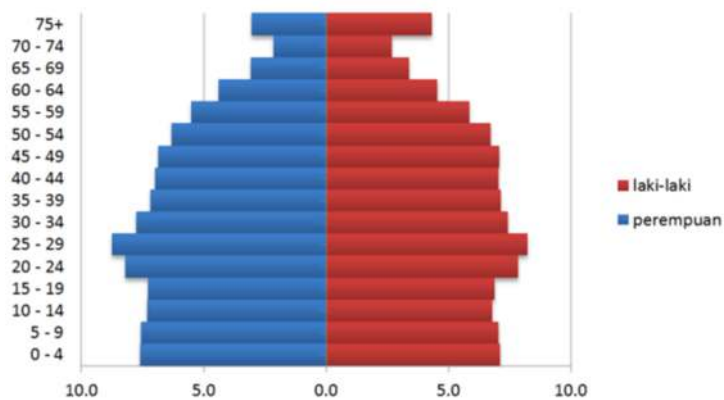


Sumber: Media Center BPBD DIY, 2018

Gambar 2-9 Grafik korban Bencana DIY tahun 2017 - 2018

2.1.1.4 Demografi

Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta menurut BPS Provinsi DIY pada tahun 2017 sebanyak 3.762.167 jiwa dengan persentase jumlah penduduk laki-laki 49,46 persen atau sebanyak 1.860.869 jiwa dan penduduk perempuan 50,54 persen atau sebanyak 1.901.298 jiwa. Jumlah penduduk DIY terbesar tercatat berada di Kabupaten Sleman sebesar 1.193.512 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil sebanyak 421.295 jiwa berada di Kabupaten Kulon Progo. Komposisi penduduk berdasarkan umur dapat terlihat dalam gambar piramida penduduk berikut :



Sumber : BPS, DIY Dalam Angka 2018

Gambar 2-10 Piramida Penduduk DIY Tahun 2016

Pertumbuhan jumlah penduduk DIY dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi. Dari data BPS (DIY Dalam Angka 2018), tercatat bahwa laju pertumbuhan penduduk di DIY tahun 2010 – 2017 sebesar 1,17, dengan laju pertumbuhan terkecil di Kabupaten Gunungkidul sebesar 0.98 dan tertinggi di Kabupaten Bantul sebesar 1,22.

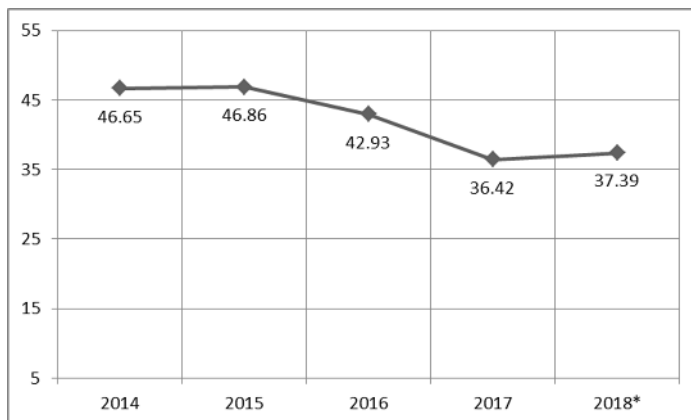
Secara umum, kepadatan penduduk DIY pada tahun 2017 mencapai 1.181 jiwa per km². Tingkat kepadatan penduduk di masing-masing kabupaten/kota dari tingkat kepadatan tertinggi ke terendah berturut-turut sebagai berikut: 1) Kota Yogyakarta, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 13.007 jiwa per km², 2) Kabupaten Sleman, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2.076 jiwa per km², 3) Kabupaten Bantul, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.964 jiwa per km², 4) Kabupaten Kulon Progo, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 719 jiwa per km², dan 5) Kabupaten Gunungkidul, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 491 jiwa per km².

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemandirian dan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki guna meningkatkan pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar proporsi PAD terhadap pendapatan daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mandiri dan maju.

Perkembangan persentase PAD terhadap pendapatan daerah DIY selama periode 2014-2018 menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2014 persentase tersebut mencapai 46,65% turun menjadi 37,39% tahun 2018. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 46,86%.



Sumber: BPKA DIY, 2019

*)unaudited (SIPKD per 15 Januari 2019)

Gambar 2-11 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah DIY, 2016-2018

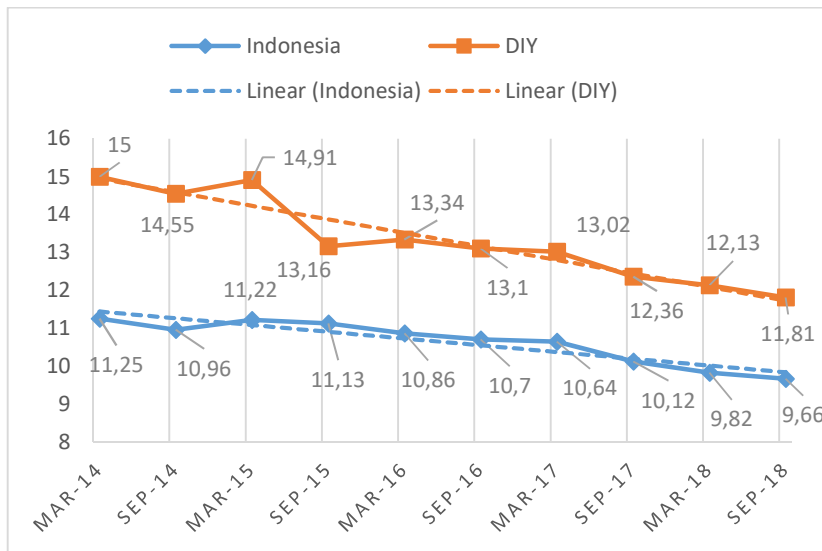
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan penduduk suatu wilayah dari aspek ekonomi dapat diukur dengan menggunakan indikator tingkat kemiskinan dan pendapatan perkapita. Tingkat kemiskinan yang datanya diperoleh dari survei SUSENAS menggambarkan persentase jumlah penduduk suatu wilayah yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, indikator pendapatan perkapita yang diperoleh dari data PDRB wilayah menunjukkan besarnya rata-rata pendapatan tiap penduduk suatu wilayah dalam waktu satu tahun. Selanjutnya, untuk melihat kondisi perekonomian yang utuh, diperlukan juga ukuran-ukuran yang menggambarkan distribusi kesejahteraan suatu wilayah. Indikator ketimpangan terbagi menjadi ketimpangan pendapatan antar penduduk yang ditunjukkan dengan Indeks Gini dan ketimpangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson.

2.1.2.2.1 Penduduk Miskin

Meskipun cenderung menurun dari tahun ke tahun, tingkat kemiskinan di DIY yang mencapai 11,81% pada tahun 2018 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional (9,66%). Bahkan jika dibandingkan dengan provinsi lain di regional Jawa-Bali, tingkat kemiskinan DIY merupakan yang tertinggi. DKI Jakarta yang mempunyai tingkat kemiskinan terendah pada September 2018 tercatat hanya sebesar 3,55%. Sementara itu, Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah berturut-turut sebesar 3,91%, 5,25%, 7,25%, 10,85%, 11,19%.

Penurunan kemiskinan DIY diduga mempunyai kaitan erat dengan semakin meningkatnya kondisi perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi DIY terus meningkat dari tahun ke tahun, bahkan lebih tinggi dibandingkan nasional. Selain itu, dalam periode lima tahun terakhir, tingkat inflasi di DIY juga relatif terkendali. Dengan terkendalinya harga maka diduga daya beli penduduk miskin dapat terjaga sehingga mereka mampu mengkonsumsi aneka barang dan jasa. Penurunan penduduk miskin di juga sejalan dengan meningkatnya tingkat pendapatan petani di perdesaan yang ditunjukkan dengan membaiknya Nilai Tukar Petani (NTP).



Sumber: BPS DIY, 2014-2019

Gambar 2-12 Tingkat Kemiskinan DIY dan Nasional tahun 2014-2018

Apabila dilihat antar kabupaten/kota di DIY, tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan DIY. Seperti yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya, kondisi ini sejalan dengan ketimpangan PDRB antar wilayah.

Tabel 2-9 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2014- 2018 dalam persen

Nama Wilayah	2014 (Maret)	2015 (Maret)	2016 (Maret)	2017 (Maret)	2018 (Maret)
DIY	14,55	14,91	13,34	13,02	12,13
Kulon Progo	20,64	21,40	20,30	20,03	18,30
Bantul	15,89	16,33	14,55	14,07	13,43
Gunung Kidul	20,83	21,73	19,34	18,65	17,12
Sleman	9,50	9,46	8,21	8,13	7,65
Kota Yogyakarta	8,67	8,75	7,70	7,64	6,98

Sumber : BPS DIY, 2019

Ditinjau dari tipe daerah, tingkat kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan terus menurun dalam periode 2014 hingga 2018. Namun, tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan wilayah perkotaan. Hal tersebut konsisten dengan data Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul yang masih didominasi wilayah pedesaan yang memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Namun demikian, yang perlu menjadi perhatian juga adalah besarnya jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan jauh lebih besar dari jumlah penduduk

miskin di pedesaan. Tahun 2018 terdapat sekitar 10,73% penduduk miskin di wilayah perkotaan atau setara dengan 298,47 ribu penduduk. Sementara itu, di wilayah pedesaan hanya sekitar 151,78 ribu jiwa (14,71%). Tingginya jumlah penduduk di wilayah perkotaan sejalan dengan tingginya jumlah penduduk yang tinggal di kawasan tersebut dengan luas wilayah yang relatif lebih kecil.

Tabel 2-10 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DIY Menurut Tipe Daerah, 2014-2017

Periode	Perkotaan		Pedesaan	
	Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin(%)	Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin(%)
Maret 2014	333,03	13,81	211,84	17,36
September 2014	324,43	13,36	208,15	16,88
Maret 2015	329,65	13,43	220,57	17,85
September 2015	292,64	11,93	192,91	15,62
Maret 2016	297,71	11,71	197,23	16,63
September 2016	301,25	11,68	187,58	16,27
Maret 2017	309,03	11,72	179,51	16,11
September 2017	298,39	11,00	167,94	15,86
Maret 2018	305,24	11,03	154,86	15,12
September 2018	298,47	10,73	151,78	14,71

Sumber: BPS DIY, 2014-2019

Garis Kemiskinan (GK) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Adapun GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Adapun Garis Kemiskinan Non Makanan menunjukkan banyaknya rupiah yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan pokok bukan makanan seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Secara nasional maupun di DIY, terdapat pola peningkatan garis kemiskinan dari tahun ke tahun yang didorong oleh peningkatan harga-harga. Peningkatan garis kemiskinan jika tidak diiringi dengan peningkatan daya beli tentu berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin di DIY. Hal ini perlu menjadi perhatian dan diantisipasi dengan upaya pengendalian harga-harga terutama bahan kebutuhan pokok.

Dibandingkan dengan wilayah perdesaan, garis kemiskinan di kota lebih tinggi. Garis kemiskinan perkotaan DIY selama lima tahun terakhir juga hampir selalu lebih besar dibandingkan garis kemiskinan perkotaan nasional. Sementara itu, garis kemiskinan perdesaan DIY lebih rendah daripada nasional.

Tabel 2-11 Garis Kemiskinan DIY dan Indonesia Menurut Tipe Daerah Tahun 2014-2018

Periode	Perkotaan		Perdesaan	
	DIY	Indonesia	DIY	Indonesia
Maret 2014	327.273	318.514	286.137	286.097
September 2014	333.561	326.853	296.429	296.681
Maret 2015	347.787	342.541	312.249	317.881
September 2015	359.470	356.378	324.386	333.034
Maret 2016	364.786	364.527	331.308	343.647
September 2016	370.510	372.114	337.230	350.420
Maret 2017	385.308	385.621	348.061	361.496
September 2017	413.631	400.995	352.861	370.910
Maret 2018	426.580	415.614	366.256	383.908
September 2018	432.018	425.770	369.606	392.154

Sumber: BPS DIY, 2014 - 2019

Lima komoditas makanan yang memberikan kontribusi terbesar pada garis kemiskinan makanan di perkotaan maupun di perdesaan yaitu beras, daging sapi, rokok kretek filter, telur ayam ras, dan daging ayam ras walaupun dengan komposisi yang berbeda-beda. Hal ini sedikit berbeda dengan kondisi pada tahun 2017 dimana keberadaan gula pasir sebagai bagian dari lima komoditas terbesar penyumbang garis kemiskinan tergeser oleh daging ayam ras. Sementara itu, Beras masih memberikan kontribusi tertinggi dalam garis kemiskinan di perkotaan dan perdesaan. Oleh karena itu, program-program terkait operasi pasar beras dalam rangka menjaga kestabilan harga beras maupun beras untuk masyarakat miskin masih perlu dilanjutkan dengan memperhatikan ketepatan sasaran penerima. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah pengeluaran untuk rokok kretek filter yang masih menempati urutan atas. Upaya-upaya promosi kesehatan untuk masyarakat perihal bahaya rokok harus terus diupayakan.

Tabel 2-12 Persentase Komoditas Garis Kemiskinan berdasarkan Jenis Komoditas Makanan dan Non Makanan Menurut Tpe Daerah September 2018 (%)

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
Garis Kemiskinan Makanan			
Beras	22,44	Beras	24,87
Daging sapi	11,30	Telur ayam ras	6,71
Rokok kretek filter	9,46	Daging ayam ras	5,45

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
Telur ayam ras	6,34	Rokok kretek filter	4,52
Daging ayam ras	4,71	Daging sapi	4,43
Garis Kemiskinan Non Makanan			
Bensin	30,18	Perumahan	28,33
Perumahan	24,07	Bensin	19,11
Listrik	10,10	KayuBakar	5,91
Pendidikan	5,04	Listrik	5,36
Perlengkapan Mandi	3,47	Kesehatan	4,90

Sumber: BPS DIY, 2019

Terkait dengan kemiskinan, indikator lain yang perlu diperhatikan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) digunakan untuk mengukur kesenjangan antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat homogenitas pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P2 menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar diantara penduduk miskin itu sendiri.

Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY menunjukkan adanya penurunan yang sangat signifikan. Pada September 2017, indeks P1 tercatat sebesar 2,091. Pada September 2018, nilai indeks P1 turun menjadi 1,650 atau turun lebih dari 21%. Hal tersebut menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang semakin mendekati garis kemiskinan. Dengan semakin berkurangnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan mengindikasikan bahwa pendapatan penduduk miskin mengalami peningkatan yang diindikasikan dengan peningkatan pengeluarannya.

Indeks Keparahan Kemiskinan justru sedikit berfluktuasi pada rentang waktu yang sama. Pada September 2017 - Maret 2018 terlihat bahwa indeks P2 di D.I. Yogyakarta mengalami peningkatan dari 0,462 menjadi 0,504. Sebaliknya, hasil Susenas Maret 2018 memperlihatkan situasi dimana terlihat adanya penurunan indeks P2 menjadi 0,349. Meskipun menunjukkan adanya fluktuasi secara keseluruhan, tingkat kesenjangan diantara penduduk miskin menunjukkan adanya penurunan.

Tabel 2-13 Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi di Jawa dan Nasional Tahun 2014-2018

Prov	Maret 2014	Sept 2014	Maret 2015	Sept 2015	Maret 2016	Sept 2016	Maret 2017	Sept 2017	Maret 2018	Sept 2018
DKI Jakarta	0,39	0,6	0,52	0,27	0,46	0,43	0,49	0,61	0,51	0,50
Jawa Barat	1,52	1,39	1,63	1,67	1,49	1,28	1,45	1,39	1,32	1,13
Jawa Tengah	2,25	2,09	2,44	2,17	2,37	2,12	2,21	2,11	1,85	1,63
DI Yogyakarta	2,19	2,35	2,93	2,32	2,3	1,75	2,19	2,09	2,07	1,65
Jawa Timur	1,85	1,86	2,06	2,13	1,99	1,95	1,87	2,09	1,95	2,07
Banten	0,83	0,79	0,94	0,9	0,8	0,76	0,86	0,78	0,82	0,91
Indonesia	1,75	1,75	1,97	1,84	1,94	1,74	1,83	1,79	1,71	1,63

Sumber: BPS, 2014 – 2018

Tabel 2-14 Indeks Kearifan Kemiskinan Provinsi di Jawa dan Nasional Tahun 2014-2018

Prov	Maret 2014	Sept 2014	Maret 2015	Sept 2015	Maret 2016	Sept 2016	Maret 2017	Sept 2017	Maret 2018	Sept 2018
DKI Jakarta	0,17	0,07	0,07	0,13	0,1	0,04	0,08	0,08	0,10	0,15
Jawa Barat	0,3	0,44	0,38	0,33	0,43	0,49	0,37	0,28	0,37	0,35
Jawa Tengah	0,54	0,59	0,56	0,51	0,65	0,59	0,63	0,54	0,57	0,55
DI Yogyakarta	0,55	0,46	0,48	0,61	0,83	0,63	0,59	0,36	0,55	0,46
Jawa Timur	0,43	0,5	0,44	0,45	0,52	0,61	0,47	0,47	0,45	0,56
Banten	0,16	0,29	0,19	0,18	0,23	0,21	0,17	0,17	0,19	0,16
Indonesia	0,43	0,48	0,43	0,44	0,53	0,51	0,53	0,44	0,48	0,46

Sumber: BPS, 2014 – 2019

Apabila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa, dapat diketahui bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY termasuk tinggi, walaupun masih lebih baik dibandingkan Jawa Timur. Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY juga masih berada di atas rata-rata nasional. Di sisi lain, Indeks Kearifan Kemiskinan DIY sama dengan rata-rata nasional, serta lebih baik dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur.

2.1.2.2.2 Pendapatan Perkapita

Kinerja perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB DIY selama kurun waktu 2014-2018 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp 92,829 triliun dan pada tahun 2018 sudah mencapai Rp 119,172 triliun atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,76% per tahun. Nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Tabel 2-15 Perkembangan PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2018 (Juta Rp)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.769.112	10.793.840	11.456.173	11.933.401	12.708.219
Pertambangan dan Penggalian	537.600	573.133	593.156	615.943	687.661
Industri Pengolahan	12.614.921	13.303.468	14.547.753	15.636.603	16.869.996
Pengadaan Listrik dan Gas	101.944	118.012	141.794	173.689	186.513
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	102.670	109.697	114.765	121.272	128.125
Konstruksi	8.722.682	9.499.917	10.286.734	11.303.630	13.354.792
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.681.035	8.342.646	9.332.038	10.241.621	11.156.434
Transportasi dan Pergudangan	5.313.233	5.763.846	6.251.304	6.783.681	7.469.964
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.324.121	10.383.402	11.255.100	12.304.099	13.273.486
Informasi dan Komunikasi	7.897.507	8.244.242	8.957.494	9.789.586	10.523.890
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.602.561	4.022.438	4.334.288	4.640.944	5.106.466
Real Estate	6.497.272	7.116.820	7.808.289	8.382.668	9.022.612
Jasa Perusahaan	956.391	1.048.359	1.115.194	1.207.970	1.309.148
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.492.246	8.379.232	9.217.108	10.213.350	10.949.666
Jasa Pendidikan	7.600.855	8.598.744	9.013.442	9.711.308	10.533.809
Jasa Kesehatan & kegiatan Sosial	2.276.361	2.553.551	2.759.865	3.004.112	3.220.940
Jasa Lainnya	2.351.975	2.589.171	2.824.990	3.109.029	3.375.735
PDRB	92.842.484	101.440.518	110.009.487	119.172.906	129.877.458

Sumber: BPS DIY, 2019

PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, selain diperlukan upaya

dalam rangka optimalisasi faktor produksi untuk meningkatkan output, juga diperlukan upaya pengendalian jumlah penduduk.

Peningkatan secara nyata nilai PDRB per kapita DIY atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun terus dirasakan hingga tahun 2018. Selama periode tahun 2014-2018 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tumbuh rata-rata sebesar 7,44%. Nilai PDRB per kapita tahun 2014 tercatat sebesar Rp. 25,526 juta, kemudian meningkat sebesar Rp. 8,49 juta (33,26%) hingga mencapai Rp. 34,015 juta di tahun 2018.

Tabel 2-16 Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2018 (%)

Uraian	2014	2015	2016	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	92.842.484	101.440.518	110.009.487	119.172.906	129.877.458
Penduduk pertengahan tahun (orang) ¹⁾	3.637.116	3.679.176	3.720.912	3.762.167	3.802.872
PDRB per kapita ADH Berlaku: (juta rupiah)	25,526	27,572	29,553	31,666	34,152
Pertumbuhan PDRB per kapita ADH berlaku (%)	8,05	8,01	7,18	7,15	7,85

Keterangan: 1) Hasil Backstacking dan Proyeksi SP 2010

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Sumber : BPS DIY, 2019

Sementara untuk kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan 2010. Nilai riil PDRB per kapita dalam periode 2014 hingga 2018 tumbuh rata-rata sebesar 4,09%. PDRB perkapita tahun 2018 meningkat sebesar 17,4% dibandingkan tahun 2014. PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan.

Tabel 2-17 Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2018 (%)

Uraian	2014	2015	2016	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}
PDRB adh. konstan 2010 (juta rupiah)	79.536.082	83.474.452	87.688.200	92.302.022	98.026.564
Penduduk pertengahan tahun (orang) ¹⁾	3.637.116	3.679.176	3.720.912	3.762.167	3.802.872

Uraian	2014	2015	2016	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}
PDRB per kapita ADH konstan 2010 (juta rupiah)	21,868	22,688	23,566	24,534	25,777
Pertumbuhan PDRB per kapita ADH konstan (%)	3,95	3,75	3,87	4,11	5,07

Keterangan: 1) Hasil Backstacking dan Proyeksi SP 2010

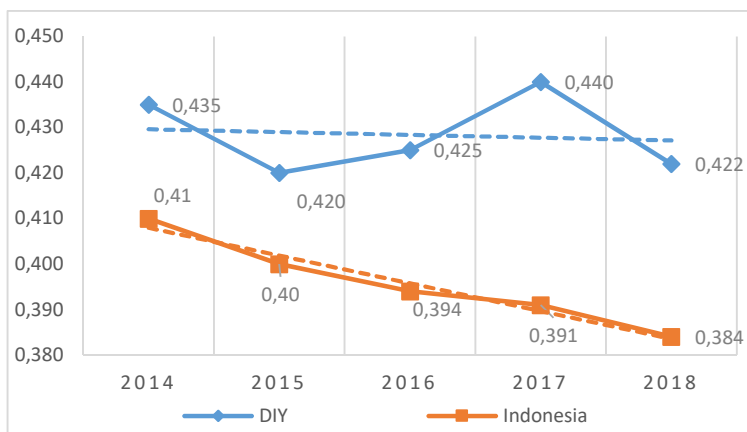
*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sumber : BPS DIY, 2019

2.1.2.2.3 Indeks Ketimpangan Pendapatan Dan Ketimpangan Regional

Angka Rasio Gini DIY menurut kriteria Bank Dunia masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Pada bulan September 2018 ketimpangan pendapatan DIY menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan menurunnya angka Rasio Gini sebesar 0,018 dibanding tahun sebelumnya. Meskipun perkembangan rasio gini DIY dari tahun 2014 hingga tahun 2018 cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan -0,70%, namun masih jauh tertinggal dibandingkan nasional, sehingga perlu perhatian lebih lanjut. Oleh karenanya masih perlu terobosan kebijakan untuk lebih meningkatkan pendapatan masyarakat golongan bawah dalam rangka mengurangi kesenjangan dengan pendapatan masyarakat golongan atas.

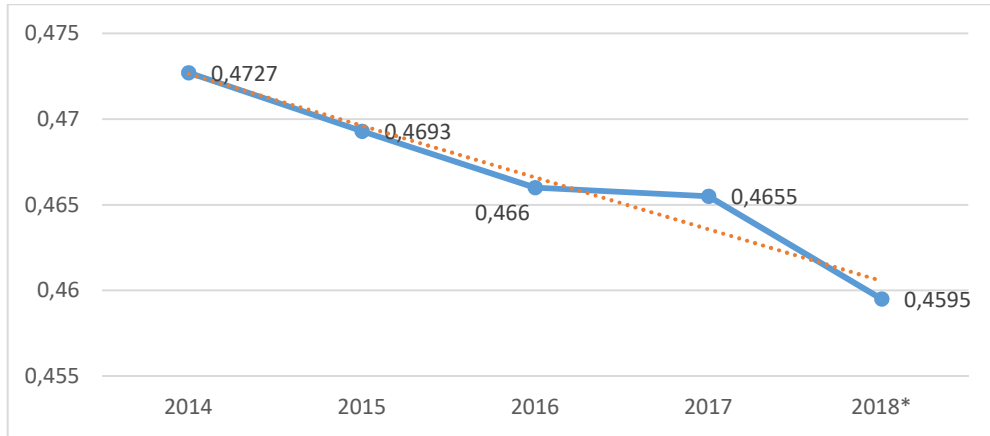


Sumber: BPS DIY, 2019

Gambar 2-13 Rasio Gini di DIY dan Indonesia, Tahun 2014-2018

Indeks Williamson pada periode 2014-2018 menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 0,02%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan perekonomian antar region (kabupaten/kota) di wilayah DIY masih cukup tinggi. Oleh karena itu, pembangunan jangka menengah ataupun jangka panjang ke depan lebih

diarahkan untuk pemerataan ekonomi antar kabupaten/kota. Perlu adanya kebijakan afirmatif untuk mendorong program pembangunan di arahkan ke daerah-daerah yang tertinggal.



Keterangan: *) Angka sementara
 Sumber : BPS DIY, 2019

Gambar 2-14 Indeks Williamson DIY Tahun 2014-2018

Berdasarkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku per kabupaten/kota, dapat diketahui bahwa Kota Yogyakarta merupakan kontributor utama perekonomian DIY dengan nilai PDRB terbesar. Sementara Gunungkidul dengan luas wilayah hampir setengah wilayah DIY, ternyata sampai dengan tahun 2017 hanya menempati urutan keempat dalam hal besaran nilai PDRB yang dihasilkan. Kondisi ini juga tercermin dari sektor pertanian sebagai kontributor utama perekonomian Gunungkidul menghasilkan nilai tambah yang relatif lebih kecil.

Bila dilihat dari sisi pertumbuhan, Bantul merupakan daerah yang pertumbuhan ekonominya tercepat dalam periode lima tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,40%. Sementara Kota Yogyakarta yang mempunyai nilai PDRB terbesar justru pertumbuhannya merupakan yang terkecil. Hal ini disebabkan pemanfaatan sumberdaya di daerah Kota sudah hampir mendekati optimal. Sedangkan di sisi lain, perekonomian di kabupaten lain cenderung mengalami peningkatan seiring bertumbuhnya pusat kegiatan perekonomian baru.

Tabel 2-18 Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota DIY ADHB Tahun 2014-2018

Kabupaten /Kota	2014	2015	2016	2017*)	2018***)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Kulonprogo	7.056.572	7.671.548	8.312.455	9.063.335	10.281.013	9,88
Bantul	17.682.925	19.325.203	20.919.336	22.633.737	24.480.270	8,47
Gunungkidul	12.557.371	13.798.657	14.980.281	16.199.842	17.538.629	8,71
Sleman	30.912.239	33.826.505	36.937.043	40.063.434	43.803.585	9,11
Kota Yogyakarta	24.664.285	26.791.936	28.895.413	31.309.045	33.818.853	8,21
DIY	92.842.484	101.440.518	110.009.486	119.172.905	129.877.458	8,76

Keterangan: *) Angka sementara ***) Angka sangat sementara
sumber : BPS DIY, 2019

2.1.2.2.4 Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga, sehingga tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Perhitungan laju inflasi DIY diwakili oleh inflasi Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa.

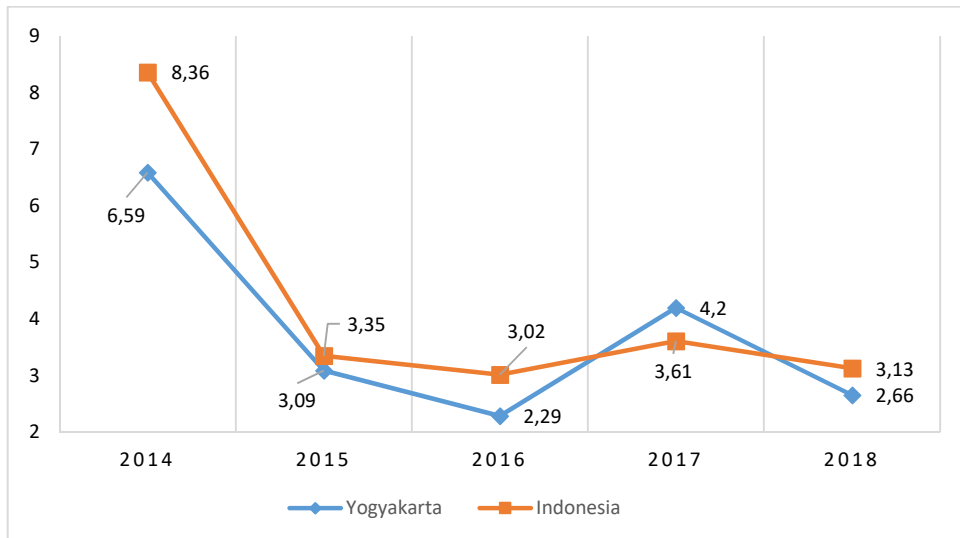
Tabel 2-19 Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018

Bulan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jan	1,05	0,13	0,53	1,24	0,55
Feb	0,07	-0,40	-0,09	0,36	-0,05
Mar	0,14	0,15	0,02	-0,06	0,15
Apr	0,07	0,38	-0,16	0,28	0,10
Mei	0,05	0,36	0,08	0,33	0,08
Jun	0,43	0,35	0,43	0,69	0,46
Jul	0,85	0,63	0,94	0,43	0,56
Agt	0,09	0,33	-0,04	-0,45	-0,26
Sep	0,49	0,04	-0,16	0,13	-0,11
Okt	0,28	0,01	0,05	0,16	0,13
Nov	1,13	0,13	0,32	0,2	0,46
Des	1,76	0,96	0,35	0,9	0,57
Inflasi Tahunan	6,59	3,09	2,29	4,20	2,66

Sumber: BPS DIY, 2019

Inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan (*demand side*) di mana terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi suplai (*supply side*) yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi. Dari sisi permintaan, terlihat bahwa pola inflasi Kota Yogyakarta

mengalami angka tertinggi pada masa hari raya lebaran, serta liburan tengah tahun dan akhir tahun. Sementara dari sisi suplai, inflasi di Yogyakarta juga dipengaruhi oleh faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang. Faktor cuaca yang tidak menentu dapat mendorong peningkatan harga komoditas, terutama sayur dan buah yang produksinya terganggu akibat hama penyakit serta gugur bunga.



Sumber: BPS DIY, 2019

Gambar 2-15 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2014-2018

Pola inflasi tahunan Yogyakarta selama tahun 2014-2018 selalu dapat dikendalikan lebih rendah daripada tingkat nasional, kecuali pada tahun 2017 yang menunjukkan angka 4,2. Secara umum, inflasi Yogyakarta memiliki kecenderungan menurun dengan rata-rata pertumbuhan -8,07% selama lima tahun terakhir.

Kelompok bahan makanan masih menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar pada tahun 2018. Hal ini berbeda dengan tahun 2017 yang merupakan kontributor terkecil inflasi. Kurangnya ketersediaan produk bahan pangan sepanjang tahun menyebabkan terganggunya stabilitas harga. Beberapa komoditas pangan yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi tahun 2018 antara lain telur ayam ras, bawang merah, daging ayam ras, dan beras.

Tabel 2-20 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2014-2018

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Bahan Makanan	7,70	4,64	4,77	2,71	3,15
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	2,95	5,04	3,84	2,79	2,63
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	8,92	4,41	1,64	5,63	2,43
4	Sandang	3,61	5,87	3,04	3,84	3,61
5	Kesehatan	5,49	4,21	4,17	2,76	1,19
6	Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	2,37	1,36	2,40	2,81	3,34
7	Transportasi & komunikasi	9,36	-2,51	-2,06	6,72	2,46
	Inflasi Kota Yogyakarta	6,59	3,09	2,29	4,20	2,66

Sumber: BPS DIY, 2019

Sementara itu, terdapat dua kelompok pengeluaran yang inflasinya mengalami titik terendah dalam periode lima tahun terakhir, yaitu kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau, serta kelompok Kesehatan. Masing-masing nilai inflasinya adalah sebesar 2,63% dan 1,19%. Bila melihat rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir, dapat diketahui bahwa kelompok transportasi dan komunikasi mengalami kecenderungan penurunan terbesar, yaitu -158,59%. Sedangkan kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar yang sebagian besar merupakan komponen yang harganya diatur oleh pemerintah mempunyai kecenderungan meningkat inflasinya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 18,27%.

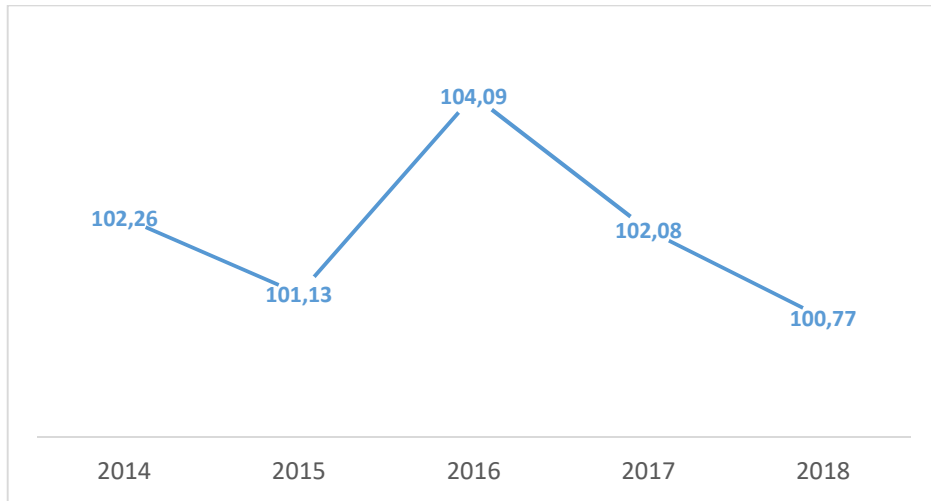
Di sisi lain, bila melihat inflasi menurut komponen, dapat diketahui bahwa Inflasi komponen inti dan komponen yang harganya diatur pemerintah dari tahun ke tahun (Desember 2017 – Desember 2018) masing-masing mengalami inflasi sebesar 2,64% dan 2,28%, sementara komponen yang bergejolak mengalami inflasi sebesar 3,21%

2.1.2.2.5 Nilai tukar petani

Tingkat kesejahteraan petani dapat diketahui dengan menggunakan pendekatan indikator. Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) dimana produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Dengan demikian, semakin tinggi nilai NTP menunjukkan petani menikmati selisih antara penjualan komoditas dengan harga biaya input produksi.

NTP DIY selama kurun waktu 2014-2018 menunjukkan kecenderungan menurun dengan rata-rata pertumbuhan -0,35%. Walaupun sempat tercatat

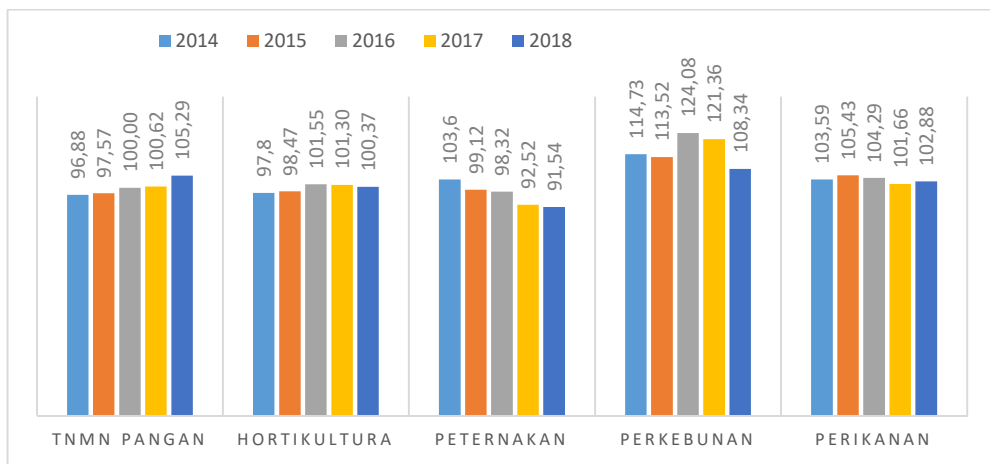
sedikit kenaikan pada tahun 2016 sebesar 104,09, namun pada tahun 2018 mencapai titik terendah dalam lima tahun yaitu 100,77. Produksi beberapa komoditas yang menurun pada tahun 2018 dan fluktuasi harga komoditas sepanjang tahun mempengaruhi indeks harga yang diterima petani. Sementara itu, konsisten dengan inflasi bahan makanan serta harga barang/jasa lain yang dibutuhkan petani untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya berpengaruh terhadap indeks harga yang dibayar petani.



Sumber: BPS DIY, 2019

Gambar 2-16 Nilai Tukar Petani DIY, Tahun 2014-2018

Sub Sektor Perkebunan Rakyat memiliki angka NTP terbesar pada tahun 2018 sebesar 108,34, walaupun terjadi kecenderungan penurunan dalam lima tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -1,17%. Secara umum dapat diketahui bahwa petani yang bekerja di sub sektor tersebut dapat diasumsikan kesejahteraannya relatif lebih besar dibandingkan sub sektor lainnya. Sementara itu, sub sektor tanaman pangan mempunyai angka NTP terbesar kedua, dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah Sub sektor peternakan yang merupakan satu-satunya sub sektor dengan nilai indeks NTP dibawah 100. Bahkan terus menurun dari tahun ke tahun. Hal ini berarti peningkatan pengeluaran yang harus dibayarkan petani lebih cepat dibanding dengan penerimaannya. Kenaikan harga-harga produk peternakan tidak mampu mengimbangi kenaikan harga-harga barang konsumsi dan biaya produksi pada sub sektor tersebut, sehingga petani yang bekerja di sub sektor peternakan selalu mengalami defisit. Dapat diartikan pula bahwa daya saing produk peternakan relatif lebih rendah dibandingkan produk lain.



Sumber: BPS DIY, 2019

Gambar 2-17 Nilai Tukar Petani DIY Per Sub Sektor , Tahun 2014-2018

2.1.2.3 Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus berikutnya pada aspek kesejahteraan masyarakat adalah fokus kesejahteraan sosial. Fokus ini memotret kondisi kesejahteraan masyarakat terutama dari segi pendidikan dan kesehatan. Analisis fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa capaian indikator untuk mendapatkan gambaran kondisi saat ini dan menemukenali permasalahan yang ada. Indikator-indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator pembangunan pendidikan (Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni), indikator pembangunan kesehatan (Angka kematian bayi dan angka harapan hidup) dan rasio penduduk yang bekerja.

Berdasarkan capaian indikator IPM, hal yang perlu diperhatikan adalah upaya untuk meningkatkan kinerja faktor-faktor yang dapat mendorong peningkatan capaian IPM khususnya di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, perlu diperhatikan juga upaya untuk mendorong kenaikan peningkatan capaian IPM setiap tahunnya terutama untuk wilayah yang kenaikan capaian IPM-nya masih di bawah kenaikan provinsi. Hal tersebut perlu koordinasi lintas sektor antara OPD-OPD pengampu di provinsi dan kabupaten/kota.

Dilihat dari capaian angka Harapan Lama Sekolah menurut kabupaten/kota, Pembangunan pendidikan di tiga kabupaten/kota, yaitu Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul masih perlu ditingkatkan. Selain itu, capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan terdapat disparitas yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di DIY. Hal ini merupakan tantangan

bagi Pemda DIY dalam meningkatkan dan pemeratakan kualitas dan akses pendidikan di DIY.

Berdasarkan perkembangan data Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan disimpulkan bahwa diperlukan upaya untuk meningkatkan capaian Angka Partisipasi Murni pada jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat. Lebih lanjut, hasil identifikasi terhadap penduduk berusia 16-18 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang SMA diantaranya menunjukkan bahwa 14,4% masih bersekolah pada jenjang SMP dan 7% berstatus putus sekolah. Hal ini berarti masih diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan putus sekolah, keterlambatan anak bersekolah pada umur seharusnya dan tinggal kelas.

Capaian indikator pembangunan kesehatan ditinjau dari dua (2) indikator, yaitu angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Perkembangan angka kematian bayi berfluktuatif selama periode 2000-2017 sehingga perlu perhatian lebih mendalam tentang penyebab kenaikan dan penurunannya sebagai bahan kebijakan untuk mengantisipasi kenaikan angka kematian bayi pada masa mendatang. Sementara itu, capaian angka harapan hidup DIY pada tahun 2017 tercatat paling tinggi. Upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian angka harapan hidup harus diiringi dengan upaya untuk menyediakan fasilitas dan menetapkan peraturan terkait kesejahteraan penduduk lanjut usia.

Rasio penduduk bekerja terhadap angkatan kerja selama 2014-2018 relatif tidak berubah secara signifikan tetapi terdapat penurunan capaian pada tahun 2018. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa kemungkinan penambahan angkatan kerja tidak diikuti penambahan lapangan pekerjaan sehingga terdapat peningkatan jumlah pengangguran.

2.1.2.3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia dari sisi pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Secara umum, angka IPM DIY mengalami kenaikan selama periode 2014-2017. Pada tahun 2014 IPM DIY mencapai 76,81 naik menjadi 78,89 tahun 2017. Capaian IPM tahun 2017 merupakan tertinggi kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta (80,06).

Capaian nilai IPM menurut kabupaten/kota di DIY bervariasi. Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang memiliki nilai IPM tertinggi diikuti oleh Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan terendah adalah Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2017, IPM Kota Yogyakarta dan Sleman berstatus sangat tinggi sedangkan Bantul dan Kulon Progo masuk dalam kategori tinggi. Sementara itu, Gunungkidul dengan nilai IPM 68,73 berada pada kategori sedang.

Berdasarkan perkembangan nilai IPM tersebut dapat diketahui juga bahwa dari tahun 2016 ke 2017 kenaikan nilai IPM Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul dan Sleman lebih tinggi dibandingkan kenaikan IPM provinsi (0,51). Kenaikan IPM ketiga kabupaten tersebut berturut-turut adalah 1,17%, 1,34% dan 0,85%.

Tabel 2-21 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2014-2017

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Kota Yogyakarta	83,78	84,56	85,32	85,49	86,11
Kabupaten Bantul	77,11	77,99	78,42	78,67	79,45
Kabupaten Kulon Progo	70,68	71,52	72,38	73,23	73,76
Kabupaten Gunungkidul	67,03	67,41	67,82	68,73	69,24
Kabupaten Sleman	80,73	81,20	82,15	82,85	83,42
DIY	76,81	77,59	78,38	78,89	79,53

Sumber : BPS DIY 2019.

2.1.2.3.2 Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) menjadi tolak ukur penting untuk melihat kualitas sumber daya manusia. Dalam perkembangannya, AMH di DIY mengalami peningkatan dari 2014 hingga 2018. Pada tahun 2014 AMH tercatat sebesar 94,44% naik menjadi 94,83% tahun 2018. Menurut kelompok jenis kelamin, AMH laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada tahun 2018 AMH laki-laki tercatat sebesar 97,09% sedangkan AMH perempuan sebesar 92,66%.

Tabel 2-22 Perkembangan Angka Melek Huruf menurut Jenis Kelamin di DIY (%), 2014-2018

Angka Melek Huruf	2014	2015	2016	2017	2018
Laki-Laki	96,99	97,35	97,21	97,34	97,09
Perempuan	91,98	91,78	92,07	92,05	92,66
Total	94,44	94,50	94,59	94,64	94,83

Sumber : BPS DIY, 2018

Menurut kelompok usia, AMH tertinggi berada pada kelompok usia 15-44 tahun. Sementara itu, kelompok usia 45 tahun keatas cenderung memiliki AMH paling rendah. Hal ini mencerminkan bahwa penduduk yang tidak melek huruf banyak dialami oleh penduduk usia lanjut, fenomena ini dipengaruhi oleh besarnya komposisi penduduk usia tua. Namun demikian, AMH penduduk berusia tua akan cenderung meningkat secara alami.

Tabel 2-23 Perkembangan Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Usia di DIY (%), 2014-2018

Angka Melek Huruf	2014	2015	2016	2017	2018
15+ Tahun	94,44	94,5	94,59	94,64	94,83
15-44 Tahun	99,91	99,81	99,87	99,8	99,91
45+ Tahun	86,29	87,2	87,37	87,62	87,94

Sumber : BPS DIY, 2018

2.1.2.3.3 Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat capaian pembangunan pendidikan adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS mencerminkan kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Selama 2014-2017 perkembangan capaian angka HLS DIY cenderung memiliki tren yang meningkat meskipun relatif kecil. Kenaikan angka HLS tersebut berarti bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2014 angka HLS DIY mencapai 14,85 tahun meningkat sebesar 0,57 poin menjadi 15,42 tahun tahun 2017. Capaian 2017 tersebut menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus D3 atau D4.

Menurut kabupaten/kota, angka HLS tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta diikuti Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul. Capaian angka HLS Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman relatif tinggi dan berada di atas capaian provinsi sedangkan capaian tiga kabupaten lainnya masih di bawah capaian provinsi. Tahun 2017, angka HLS Kota Yogyakarta mencapai 16,82 tahun, Kabupaten Sleman 16,48 tahun, Kabupaten Bantul 14,73 tahun, Kabupaten Kulon Progo 14,23 tahun dan Kabupaten Gunungkidul 12,94 tahun.

Tabel 2-24 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota di DIY (Tahun), 2014-2017

Kabupaten/kota	2014	2015	2016	2017
Kulon Progo	13.27	13.55	13.97	14.23
Bantul	14.62	14.72	14.73	14.74
Gunungkidul	12.82	12.92	12.93	12.94
Sleman	15.64	15.77	16.08	16.48
Kota Yogyakarta	15.97	16.32	16.81	16.82
DIY	14.85	15.03	15.23	15.42

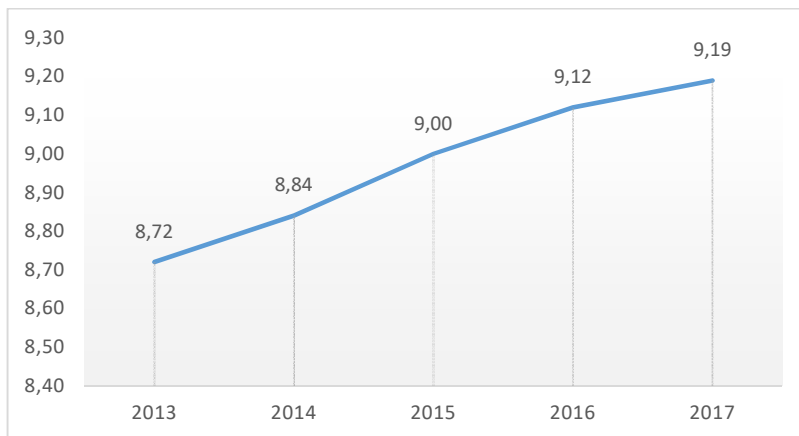
Sumber : BPS DIY, 2018

Berdasarkan perkembangan capaian angka HLS tersebut diketahui bahwa masih diperlukan upaya untuk mendorong kemajuan pembangunan pendidikan. Capaian angka HLS DIY dapat ditingkatkan dengan mendukung Kota

Yogyakarta dan Kabupaten Sleman untuk mempertahankan dan meningkatkan capaiannya serta fokus mendorong pembangunan pendidikan pada tiga kabupaten lainnya terutama Kabupaten Gunungkidul.

2.1.2.3.4 Rata Rata Lama Sekolah (RLS)

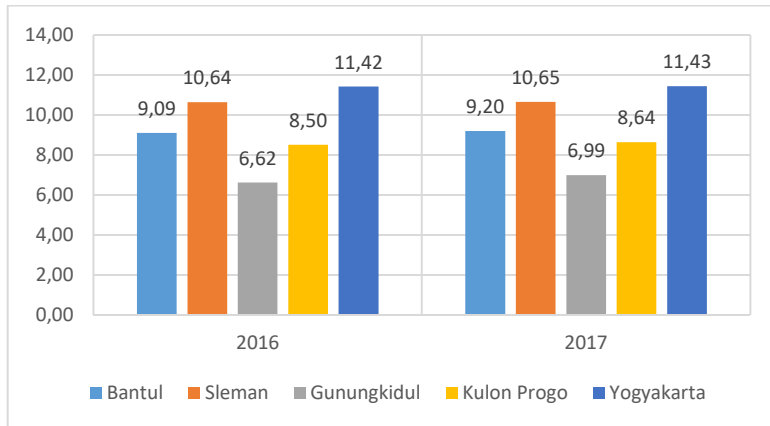
Indikator pembangunan pendidikan selanjutnya adalah Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Angka ini menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Perkembangan RLS DIY selama periode 2013-2017 menunjukkan kecenderungan meningkat. Capaian angka RLS tahun 2013 yaitu 8,72 tahun naik mencapai 9,19 tahun pada tahun 2017. Capaian tahun 2017 tersebut berarti bahwa secara rata-rata lama sekolah penduduk DIY usia 25 tahun ke atas mencapai 9,19 tahun atau telah menyelesaikan pendidikan hingga lulus SMP.



Sumber : BPS DIY, 2018

Gambar 2-18 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di DIY (Tahun), 2013-2017

Angka RLS kabupaten/kota menunjukkan capaian yang bervariasi. Namun secara umum, capaian RLS seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian angka RLS tertinggi tahun 2017 terdapat pada Kota Yogyakarta (11,43 tahun) diikuti capaian Kabupaten Sleman (10,65 tahun), Kabupaten Bantul (9,20 tahun), Kabupaten Kulon Progo (8,64 tahun) dan terendah capaian Kabupaten Gunungkidul (6,99 tahun). Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Yogyakarta menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang menengah, sedangkan rata-rata penduduk Kabupaten Gunungkidul hanya mampu menyelesaikan pendidikan di tingkat dasar. Perkembangan capaian RLS tersebut menunjukkan bahwa terdapat disparitas yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di DIY.



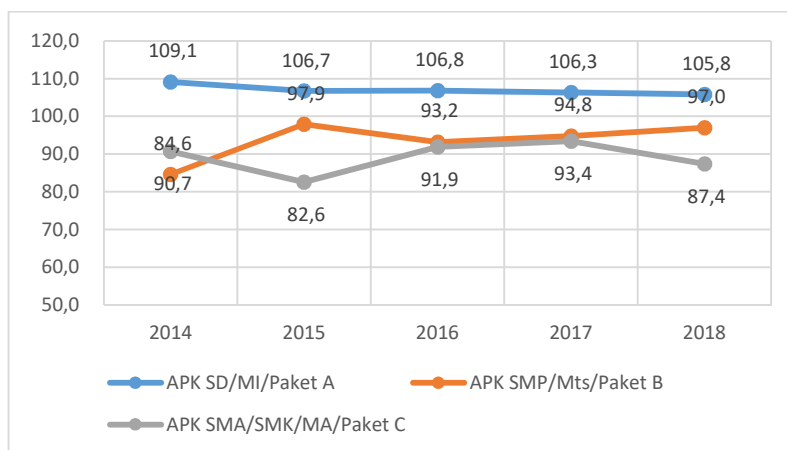
Sumber : Dataku BPPSD Bappeda DIY, 2019

Gambar 2-19 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah DIY Menurut Kabupaten/Kota di DIY (Tahun), 2016-2017

2.1.2.3.5 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator pembangunan pendidikan yang digunakan untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah pada tiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi capaian APK semakin tinggi tingkat partisipasi sekolah pada suatu jenjang pendidikan.

Perkembangan APK DIY menurut jenjang pendidikan bervariasi. Capaian APK jenjang SD/MI/ sederajat lebih tinggi dibandingkan capaian pada jenjang SMP/MTs/ sederajat dan SMA/SMK/MA/ Paket C. Selama kurun 2014-2018 APK jenjang SD/MI/ sederajat memiliki tren menurun. Pada tahun 2014 APK SD sederajat mencapai 109,1% turun menjadi 105,8% pada tahun 2018. Sementara itu, APK SMP sederajat dan SMA sederajat cenderung berfluktuasi. Namun pada tahun 2018, capaian APK SMP sederajat mengalami kenaikan dari 94,8% menjadi 97% sedangkan APK SMA sederajat mengalami penurunan dari 93,4% menjadi 87,4%.



Sumber : BPS DIY, 2018

Gambar 2-20 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan di DIY (%), 2014 - 2018

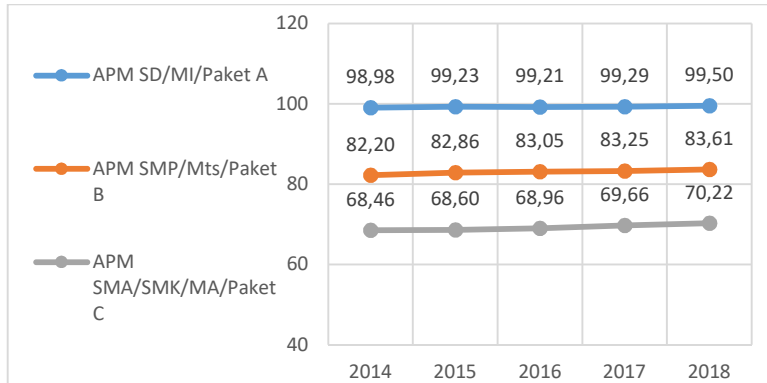
Capaian APK SD sederajat berada di atas 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang bersekolah pada jenjang SD tidak hanya penduduk yang bersekolah pendidikan SD (7-12 tahun) tetapi mencakup penduduk berusia di atas 12 tahun dan di bawah 7 tahun. Capaian APK tidak mencerminkan bahwa penduduk usia 7-12 tahun sudah bersekolah semua. Sementara itu, APK jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat berada di bawah 100% berarti bahwa jumlah penduduk yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang tersebut proporsinya kurang dari jumlah penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tersebut.

2.1.2.3.6 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan atau mengakses fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya. Jika seluruh penduduk yang berusia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100.

Perkembangan APM semua jenjang pendidikan di DIY selama 2014-2018 memiliki pola yang sama dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018, APM SD sederajat mencapai 99,50%, APM SMP sederajat mencapai 83,61% dan APM SMA sederajat sebesar 70,22%. Capaian APM SD sederajat 99,5% menunjukkan bahwa masih ada 0,5% penduduk berusia 7-12 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang SD karena terlambat masuk sekolah atau sudah bersekolah di jenjang SLTP. Sementara itu, capaian APM SMP sederajat dan SMA sederajat berarti bahwa masih ada 16,4% penduduk berusia 13-15 tahun yang

statusnya tidak bersekolah pada jenjang SMP dan terdapat 29,8% penduduk berusia 16-18 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang SMA. Pada jenjang SMA sederajat teridentifikasi bahwa sebesar 14,4% masih bersekolah pada jenjang SMP, 7,4% bersekolah pada jenjang perguruan tinggi dan 7% berstatus putus sekolah.



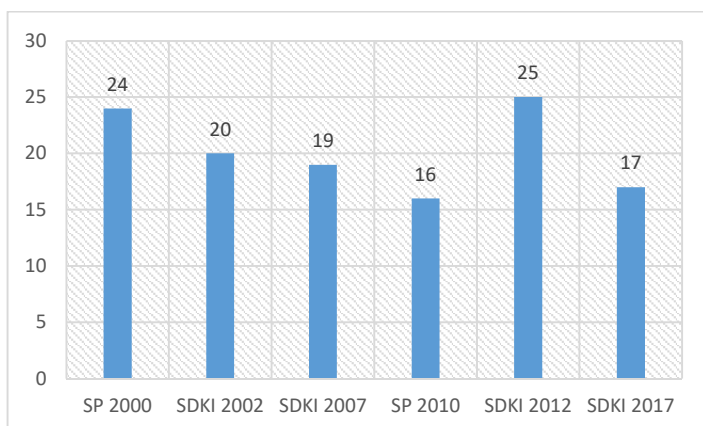
Sumber : BPS DIY, 2018

Gambar 2-21 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) DIY Menurut Jenjang Pendidikan di DIY (%), 2014-2018

Berdasarkan perkembangan data APM menurut jenjang pendidikan tersebut dapat disimpulkan bahwa diperlukan upaya untuk meningkatkan capaian APM pada jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat. Upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar berkemauan untuk bersekolah pada jenjang yang lebih tinggi serta upaya-upaya untuk menambah fasilitas dan kemudahan bagi masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi perlu ditingkatkan.

2.1.2.3.7 Jumlah Kematian Bayi

Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan penduduk secara umum adalah angka kematian bayi. Perkembangan angka kematian bayi di DIY dari tahun 2000 hingga 2017 berfluktuasi. Data dari Sensus Penduduk (SP) tahun 2000 menunjukkan bahwa angka kematian bayi sebesar 24 kemudian mengalami penurunan hingga pada tahun 2010 mencapai 16. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 terjadi kenaikan angka kematian bayi yang mencapai 25 tetapi kemudian pada tahun 2017 tercatat turun menjadi 17. Angka kematian bayi sebesar 17 berarti bahwa terdapat 17 kasus kematian bayi untuk 1000 kelahiran hidup.



Sumber: BPS DIY, 2018

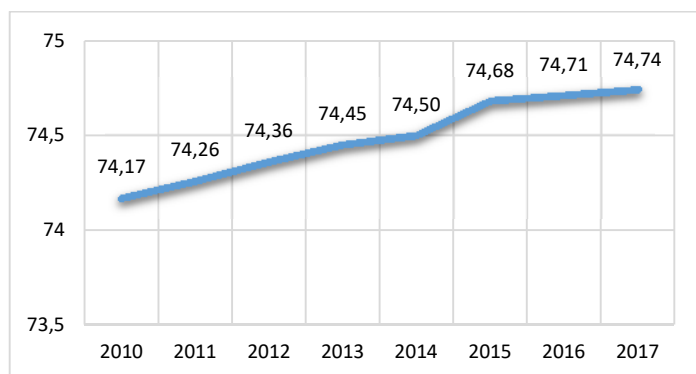
Gambar 2-22 Perkembangan Angka Kematian Bayi di DIY, 2000-2017

Perkembangan angka kematian bayi yang fluktuatif tersebut perlu diperhatikan dan dipelajari lebih lanjut apa penyebab kenaikan dan penurunannya sehingga hal tersebut dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kenaikan angka kematian bayi pada masa mendatang.

2.1.2.3.8 Angka Harapan Hidup (AHH)

Indikator berikutnya yang menggambarkan derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup (AHH). AHH pada saat lahir (*life expectancy at birth*) adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Selama periode 2010-2017, AHH DIY menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. Pada tahun 2010 AHH DIY mencapai 74,17 tahun terus mengalami kenaikan hingga mencapai 74,74 tahun pada 2017.

Perkembangan AHH di DIY dalam kurun waktu 2010-2017 menunjukkan peningkatan. Dari 74,17 tahun di tahun 2010 meningkat menjadi 74,74 tahun di tahun 2017. Angka 74,74 tahun tersebut menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang lahir pada tahun 2017 hingga akhir hayatnya. Capaian AHH dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu kesehatan, ekonomi, budaya dan pendidikan sehingga untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian AHH diperlukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap upaya-upaya dari berbagai faktor tersebut.



Sumber: BPS DIY, 2018

Gambar 2-23 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di DIY (Tahun), 2010-2017

2.1.2.3.9 Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau menggambarkan permintaan tenaga kerja.

Tabel 2-25 Perkembangan Angkatan Kerja di DIY, 2014 - 2018

Ketenagakerjaan	2014	2015	2016	2017	2018
Angkatan Kerja (Ribuan Orang)	2.023,46	1.971,46	2.099,44	2.117,19	2.191,74
Bekerja (Ribuan Orang)	1.956,04	1.891,22	2.042,40	2.053,17	2.118,39
Persentase penduduk bekerja terhadap angkatan kerja	96,67	95,93	97,28	96,98	96,65

Sumber : BPS DIY, 2018 diolah.

Persentase penduduk bekerja terhadap angkatan kerja tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,32 poin dari 96,98% tahun 2017 menjadi 96,65%. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa penambahan angkatan kerja tidak diikuti penambahan lapangan pekerjaan sehingga meskipun jumlah orang bekerja mengalami peningkatan, jumlah pengangguran juga meningkat.

2.1.2.4 Fokus Seni Budaya Dan Olahraga

2.1.2.4.1 Budaya

Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menggariskan bahwa Kewenangan kebudayaan DIY diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Hal ini ditegaskan

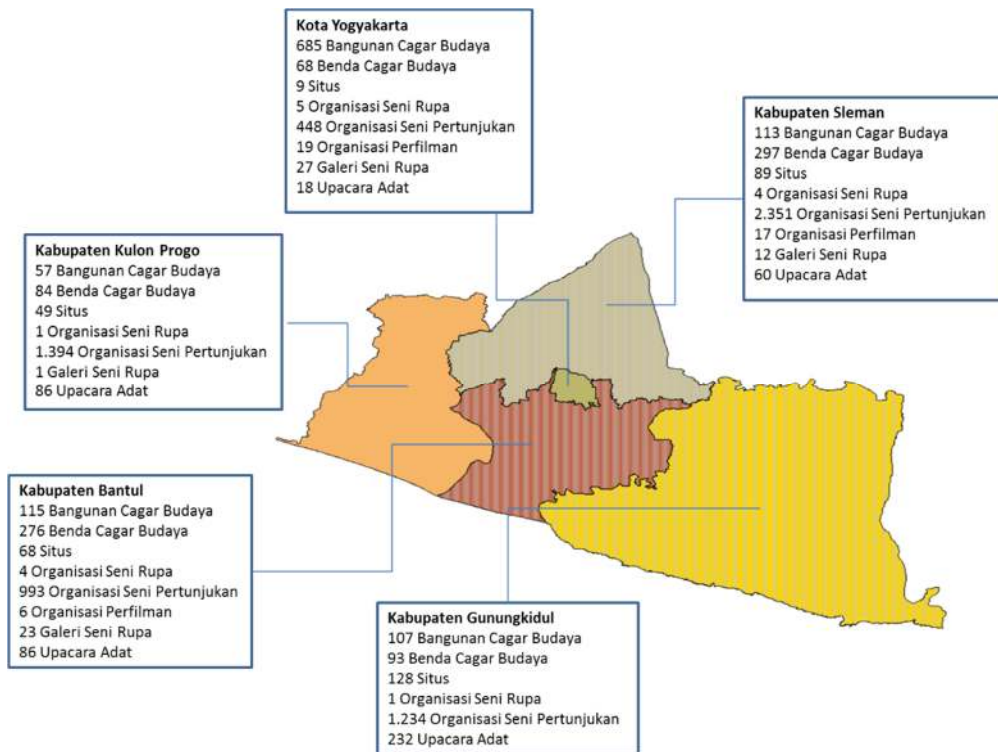
dalam Perdas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan, bahwa kebudayaan dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengaturan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip : keterbukaan terhadap budaya lain; kemampuan mengolah budaya; kesadaran dialogis; kepribadian kuat; kesinambungan; dan kesatuan budaya mandiri.

Tujuan dari pengaturan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan adalah untuk: menguatkan karakter dan jati diri masyarakat; mewujudkan pemeliharaan nilai-nilai budaya DIY dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah; mengembangkan kebudayaan DIY untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya DIY di tengah peradaban dunia; mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan dan peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemeliharaan Kebudayaan dilakukan sebagai upaya mempertahankan Objek Kebudayaan agar tetap berada pada sistem budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengembangan Kebudayaan adalah upaya untuk memberikan pemaknaan dan fungsi baru kepada Objek Kebudayaan agar sesuai dengan tuntutan alam dan zaman dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat masa kini dan mendatang. Penguatan Objek Kebudayaan dilakukan dengan cara: penyebarluasan; penelitian; pengayaan keberagaman; revitalisasi; adaptasi; reaktualisasi; rekayasa; pembudayaan; dan/atau internalisasi. Pemanfaatan melalui pendayagunaan dilakukan untuk memenuhi kepentingan meliputi: agama; sosial; ekonomi; pendidikan; ilmu pengetahuan dan teknologi; kebudayaan; dan pariwisata.

Yogyakarta memiliki Kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur tersebut telah dijadikan landasan filosofis oleh Sultan Hamengku Buwono I ketika beliau mulai membangun Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pemerintahan, masyarakat, dan wilayah yang mandiri. Nilai-nilai adiluhung seperti Hamemayu Hayuning Bawana, Mangasah Mingising Budi, Memasuh Malaning Bumi, Golong Gilig, serta sifat-sifat satriya yang berpegang pada etos Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh telah terwujud dalam kehidupan masyarakat maupun penataan ruang wilayah yang kini dikenal sebagai DIY. Nilai-nilai luhur yang juga dipercayai sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) selain memiliki cakupan keberlakuan di DIY, juga dapat disejajarkan sebagai nilai-nilai budaya nasional atau bangsa.

Upaya pelestarian nilai-nilai luhur budaya di DIY nampak pada jumlah dan keragaman potensi budaya yang ada baik budaya benda maupun budaya tak benda. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dan peran serta semua pihak terutama masyarakat menjadi hal penting dalam upaya pelestarian nilai-nilai budaya di DIY. Dinas Kebudayaan DIY mencatat terdapat ribuan potensi budaya di DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :



Sumber: Statistik Budaya, Dinas Kebudayaan DIY, 2018

Gambar 2-24 Potensi Budaya DIY Tahun 2018

Ruang ekspresi publik untuk mempertunjukkan kemampuan dan hasrat seni, sekaligus arena untuk berperanaktif dalam pelestarian budaya bagi masyarakat sedang diupayakan pembangunan Taman Budaya di Kabupaten/Kota dan rencana pembangunan pusat kebudayaan berkelas internasional di Yogyakarta. Ekspresi tersebut diwadahi melalui serangkaian gelaran even seni dan budaya seperti : Festival Kebudayaan Yogyakarta, Festival Adat, Gelar Budaya Yogyakarta, Gelar Seni Desa Budaya, Dialog Budaya Yoga Semesta, Fasilitasi Adat Istiadat, Festival Jogja Tempo Dulu, Festival Dhaksinarga di Gunungkidul, Festival Menoreh di Kulon Progo, Festival Paseban di Bantul dan Festival Godong Opo-Opo di Kota, Festival Garis Imajiner di Sleman, Kompetisi Bahasa dan Sastra, dan lain-lainnya.

Pelestarian budaya benda berkolaborasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam penanganan budaya klasik yang berupa candi-candi dan situs. Budaya benda ini merupakan bukti nyata perjalanan bersejarah masyarakat DIY sejak zaman prasejarah hingga sekarang, yang akan menjadi jatidiri bangsa. Tahun 2017 ruas jalan antara Tugu – Kraton – Panggung Krapyak yang dikenal dengan Sumbu Filosofi telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Nasional dan masuk tentatif list Warisan Budaya Dunia UNESCO. Penyiapan teknis dan masyarakat dalam menghadapi Jogja sebagai Kota Warisan Budaya Dunia dengan Sumbu Filosofinya telah dilakukan. Keberadaan filosofi kehidupan yang terkandung dalam Sumbu Filosofi ini sangat langka di dunia. Apabila DIY berhasil masuk dalam Daftar Tetap Kota Warisan Budaya Dunia melalui Kawasan Sumbu Filosofi antara Tugu-Kraton-Panggung Krapyak, dimungkinkan komitmen pihak internasional untuk turut menjaga kelestarian kawasan ini.

2.1.2.4.2 Olah Raga

Olahraga memiliki peran strategis dalam pembangunan untuk meningkatkan kualitas fisik (kesehatan) dan karakter bangsa, mengharumkan nama bangsa di kancah internasional, meningkatkan roda ekonomi. Olahraga adalah alat untuk melaksanakan tiga tujuan revolusi Indonesia, yaitu: Negara Kesatuan RI yang kuat, masyarakat adil dan makmur, dan tata dunia baru. Dengan kata lain, olahraga adalah alat untuk melaksanakan amanat (amanat penderitaan rakyat). Olahraga akan menjadi lokomotif ekonomi baru.

Kegiatan olahraga pada hakikatnya merupakan miniatur kehidupan. Dikatakan demikian karena di dalam aktifitas olahraga terkandung banyak nilai, disamping orang yang melakukan kegiatan olahraga memiliki tujuan seperti untuk kesehatan, kesenangan dan pengisi waktu luang, adalah juga secara universal dalam olahraga melekat nilai-nilai perjuangan, kepeloporan, kerjasama, persaingan, respek, komunikasi dan integrasi, ketahanan fisik dan daya tahan mental, kebersamaan, sikap responsif, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, kejujuran dan sportifitas, dan lain-lain.

Pembangunan olahraga daerah sebagai bagian dalam sistem keolahragaan nasional yang saling mengait antar subsistem secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud, antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga.

Majunya perkembangan daerah dapat dilihat dari majunya perkembangan olah raga di daerah. Kalau olah raga maju, tentunya daerah tersebut pasti maju dengan baik.

2.1.2.4.2.1 Sumber Daya Manusia Dan Olah Raga

Tabel 2-26 SDM Olahraga DIY Tahun 2017

No	Kabupaten /Kota	Pelatih	Wasit	Pembina	Klub Olahraga	Atlet
1	Kota Yogyakarta	109	56	80	120	621
2	Kab Bantul	150	100	1	45	805
3	Kabupaten Gunungkidul	106	95	76	78	589
4	Kab Kulon Progo	218	136	42	134	515
5	Kab Sleman	210	141	120	130	765
	DIY	793	528	319	507	3295

Sumber : <https://www.bpo-diy.or.id/sport/crclub.php>

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mampu menembus posisi 10 besar PON ke XIX di Jabar dengan perolehan total medali sebanyak 56 medali. Rinciannya yakni 16 medali emas, 15 medali perak dan 25 medali perunggu. Prestasi atlet DIY diajang PON ke XIX memang dapat dikatakan mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah medali emas yang diperoleh pada PON ke XIX mampu melampaui jumlah medali emas yang ditargetkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DIY sebanyak 15 medali emas. DIY mendapat rangking 9, dengan prestasi 7 emas, 6 perak, 18 perunggu.

2.1.2.4.2.2 Sarana Dan Prasarana Olahraga

Prasarana dan sarana olahraga memiliki arti penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Belum semua desa memiliki prasarana dan sarana olahraga. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga perlu memperhatikan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Prasarana dan sarana keolahragaan belum sepenuhnya memadai, lengkap dan terstandardisasi.

Sarana olahraga berjumlah 285 buah. Sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga yang sangat potensial untuk pengembangan olahraga ke depan antara lain adalah Mandala Krida, Youth Center, Amongrogo, Pondok Pemuda Ambarbinangun, GOR Sorowajan, dan Graha Bakti Wanayasa. Selain itu DIY memiliki GOR UNY, Stadion Maguwoharjo, Kridosono, Stadion Tridadi yang sering dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga dan budaya. Stadion Maguwoharjo termasuk stadion olahraga yang besar tingkat nasional dengan kapasitas penonton 30.000 orang.

Tabel 2-27 Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga di DIY, Tahun 2014-2017

Capaian Pembangunan	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	0,019	0,019	0,48	0,48	2,28
Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	0,0008	0,0008	0,91	0,91	2,78

Sumber: www.jogjabudaya.com; DatakuBappeda, diolah

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.3.1.1 Urusan Pendidikan

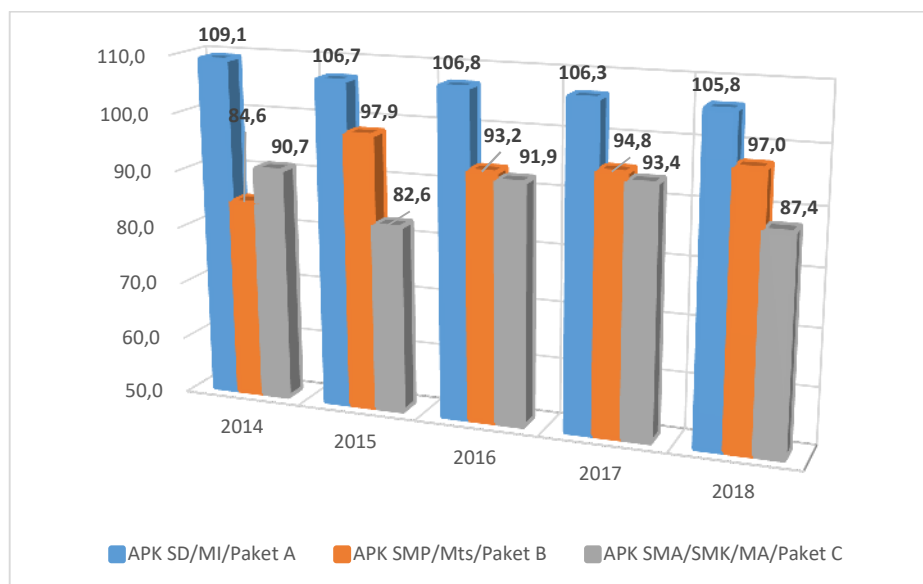
Peran pendidikan sangat strategis dalam menciptakan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan sebagai sebuah investasi SDM memberikan berbagai manfaat bagi individu maupun pembangunan sebuah bangsa secara keseluruhan. Melalui pendidikan, seseorang mendapatkan bekal kemampuan intelektual baik psikomotorik, kognitif, maupun afektif yang bermanfaat dalam menjawab beragam tantangan kehidupan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan.

Dalam konteks DIY, pendidikan menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat DIY yang berkualitas, berdaya saing, sejahtera dan berkarakter sesuai nilai-nilai dasar budaya yang telah berkembang di masyarakat. Melalui modal dasar kebudayaan dan pendidikan ini pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada tercapainya peradaban baru unggul yang menghasilkan 'manusia yang utama' (jalmâ kang utâmâ), yang berasaskan 'rasa ke-Tuhan-an, rasa kemanusiaan dan rasa keadilan'. Basis pembangunan tersebut merupakan pengembangan dari konsep semangat *renaissance* di DIY.

2.1.3.1.1.1 Angka Partisipasi Kasar

APK adalah proporsi siswa sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) pun turut diperhitungkan dalam penghitungan APK. Capaian APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Capaian APK yang mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target

yang sesungguhnya. Capaian APK DIY tahun 2014 hingga 2017 dapat dilihat dari gambar berikut:



Sumber: BPS, DIY dalam angka 2018

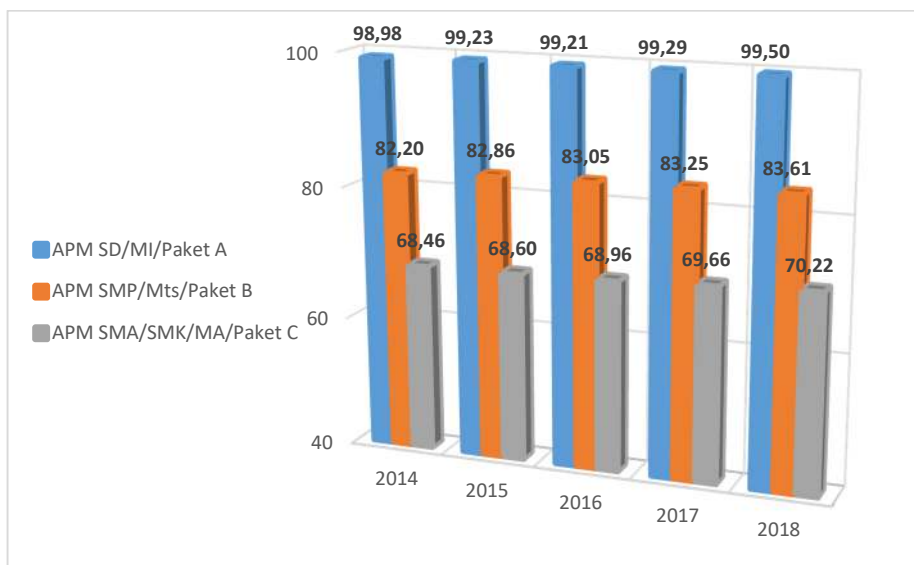
Gambar 2-25 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2014 - 2017

Grafik di atas menunjukkan bahwa selama periode 2014 sampai dengan periode 2017, capaian APK seluruh jenjang pendidikan di DIY mendekati 100. Bahkan, capaian APK SD DIY/ sederajat menunjukkan capaian diatas 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk DIY memiliki kesadaran yang tinggi untuk bersekolah sesuai usianya, dan Pemerintah Daerah berhasil mempermudah akses masyarakat terhadap pendidikan dan membentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadikan pendidikan sebagai prioritas hidup pada rentang usia sekolah.

2.1.3.1.1.2 Angka Partisipasi Murni

Partisipasi sekolah di suatu wilayah juga bisa dilihat dari capaian Angka Partisipasi Murni (APM) di wilayah tersebut. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Berbeda dengan APK, APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Oleh karena itu, nilai APM umumnya lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Capaian APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Secara rinci, capaian Angka Partisipasi Murni (APM) DIY tingkat SD, SLTP, dan SLTA periode 2014 sampai dengan periode 2017 dapat dilihat pada grafik berikut



Sumber: BPS, DIY dalam angka 2018

Gambar 2-26 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) DIY Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2014-2017

Secara umum capaian APM DIY Tahun 2017 untuk semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Capaian APM tingkat SD Tahun 2017 meningkat sebesar 0,01 poin dari capaian tahun sebelumnya. Untuk tingkat SMP, capaian APM tahun 2017 mengalami peningkatan tertinggi dengan angka sebesar 0,26 poin dari tahun sebelumnya, meskipun capaian 84,61 ini lebih rendah bila dibandingkan capaian tahun 2014 yang menunjukkan angka 85,69. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA mengalami peningkatan sebesar 0,16 poin dari tahun 2016.

Selain itu, data capaian APM ini pun menunjukkan bahwa semakin besar selisih capaian APM dengan angka ideal pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Ini berarti, semakin tinggi jenjang pendidikan maka proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah semakin besar. Penyelenggaraan program akselerasi pada beberapa sekolah menjadi salah satu penyebab dari selisih ini. Program ini yang memungkinkan siswa berprestasi untuk

mempercepat proses pendidikannya sehingga dapat lulus masing-masing jenjang tersebut satu tahun lebih awal. Akibatnya, jumlah siswa yang terlalu cepat bersekolah pada jenjang pendidikan selanjutnya semakin tinggi.

Perkembangan pembangunan pendidikan saat ini seperti penerapan sistem zonasi, perkembangan IT dalam proses pendidikan, dan pemenuhan hak pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus membutuhkan dukungan layanan pendidikan yang memadai dan berkualitas. Dalam menjawab tantangan tersebut kebutuhan akan penyediaan infrastruktur pendidikan yang aksesibel dan memadai, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, serta penyelenggaraan pendidikan yang berbasis pada budaya lokal merupakan hal yang membutuhkan intervensi. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam menjawab tantangan tersebut antara lain :

- a) Sebagai konsekuensi dari penerapan sistem zonasi sekolah dibutuhkan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata di DIY. Kualitas layanan pendidikan diukur dengan Akreditasi sekolah. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Hasil analisis akreditasi sekolah DIY ditemukan bahwa komponen standar yang memiliki nilai rata-rata tertinggi pada semua satuan pendidikan hampir di tiap-tiap kabupaten/kota adalah standar pembiayaan. Pada jenjang SD capaian akreditasi tertinggi di Kota Yogyakarta dan terendah di Kabupaten Gunungkidul. Pada Jenjang SMP capaian akreditasi tertinggi di Kota Yogyakarta dan terendah di Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan di jenjang SMA/SMK capaian akreditasi tertinggi di Kabupaten Bantul dan terendah di Kabupaten Sleman.

Tabel 2-28 Persentase Sekolah Jenjang SD, SMP dan SMA Berakreditasi A di DIY Tahun 2014-2018

Kab/Kota	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
SD						
Kota Yogyakarta	%	79,17	87,50	89,29	89,29	89,29
Kab. Bantul	%	48,72	59,95	69,13	78,32	80,36
Kab. Kulon Progo	%	13,70	23,84	43,29	53,70	57,53
Kab. Gunungkidul	%	26,76	34,72	53,71	56,06	56,24
Kab. Sleman	%	36,13	43,39	58,85	63,50	66,67
SMP						
Kota Yogyakarta	%	74,24	75,76	75,76	75,76	77,27
Kab. Bantul	%	66,37	67,26	70,80	71,68	71,68

Kab. Kulon Progo	%	62,03	64,56	65,82	64,56	64,56
Kab. Gunungkidul	%	51,77	53,19	59,57	60,28	60,28
Kab. Sleman	%	68,57	71,43	73,57	72,86	73,57
SMA						
Kota Yogyakarta	%	71,88	75,00	75,00	75,00	75,00
Kab. Bantul	%	74,47	80,85	80,85	76,60	76,60
Kab. Kulon Progo	%	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Kab. Gunungkidul	%	48,39	51,61	64,52	67,74	67,74
Kab. Sleman	%	52,31	52,31	53,85	56,92	55,38

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2019

Pemerintah provinsi/kab/kota perlu segera memperbaiki standar nasional pendidikan yang masih rendah nilainya. Untuk meningkatkan standar kompetensi lulusan perlu dilakukan perbaikan metode mengajar guru agar siswa

mampu menyerap dengan baik materi maupun keterampilan yang diajarkan. Standar proses dapat ditingkatkan melalui perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan penguasaan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Sedangkan standar sarana dan prasarana dengan meratakan alat bantu media pembelajaran pada tiap sekolah dan terus melakukan pemantauan terhadap pengelolaan media dan alat bantu belajar.

- b) Salah satu faktor pendukung proses pembelajaran adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai salah satu input yang menunjang dalam pengembangan pengetahuan dan ketrampilan siswa didik, sarana dan prasarana pendidikan harus disiapkan dengan cermat dan berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan belajar mengajar. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa sarana pendidikan meliputi peralatan pendidikan, perabotan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan peralatan penunjang lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana pendidikan meliputi lahan, ruang kelas, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.

Dalam konteks DIY, ketersediaan ruang kelas pada jenjang SD sampai dengan SMA/K telah memenuhi standar (maksimum ruang kelas sebesar 32 peserta didik per kelas), namun masih terdapat ruang kelas yang mengalami kerusakan baik ringan maupun berat.

Tabel 2-29 Rasio Siswa per Ruang Kelas SD, SMP, SMA, SMK DIY Tahun 2014 - 2018

Rasio Siswa per Ruang Kelas	2014	2015	2016	2017	2018*
SD	22	22	22	22	21
SMP	29	28	27	27	27
SMA	25	25	26	26	26
SMK	31	30	31	31	29

Sumber : Dinas Dikpora DIY, 2018; * Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2018

Tabel 2-30 Kondisi Fisik Ruang Kelas Jenjang SD – SMA Sederajat di DIY Tahun 2015-2018

Jenjang Sekolah	2015			2016			2017			2018		
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
MI	683	265	75	763	263	70	833	252	64	842	221	69
SD	11.274	2.586	620	11.037	1.949	386	11.404	1.732	353	11.358	1.795	346
MTs	10.591	2.321	545	850	93	26	899	77	14	871	69	24
SMP	4.239	276	77	4.242	388	62	3.894	759	73	3.891	801	121
SMA	1.937	124	16	1.946	124	4	1.977	149	35	1973	132	13
SMK	2.482	99	32	2.606	115	22	2.672	136	20	2.644	202	28
MA	502	15	-	538	11	4	2.672	136	20	585	19	2

Sumber : Dinas Dikpora DIY, 2019

Dari data yang ada sebagian besar sudah memenuhi standar nasional tetapi masih terdapat permasalahan terkait ada ruang sekolah yang rusak berat karena faktor bencana/letak geografis. Hal ini harus menjadi prioritas dalam penanganan pembangunan pendidikan terutama fokus pada ruang kelas yang kondisinya rusak berat karena selain kenyamanan dalam belajar, juga terkait dengan aspek keselamatan insan pembelajar.

Selain penyediaan ruang kelas yang representatif, penyediaan sarana komputer yang memadai dan bermutu juga merupakan komponen yang penting dalam proses pembelajaran. Karena dengan sarana pendidikan yang lengkap dan bermutu kualitas pembelajaran akan semakin baik, dan motivasi belajar siswa akan meningkat. Hal itu akan meningkatkan daya serap yang pada akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan. Untuk jenjang SD lebih dari 55% memiliki laboratorium komputer, sedangkan untuk jenjang SMP sudah mencapai 91% lebih yang laboratorium komputer, hanya saja masih terdapat komputer yang sudah tidak memenuhi standar untuk pembelajaran.

Tabel 2-31 Jumlah Sekolah di DIY yang Memiliki Laboratorium Komputer Tahun 2014 - 2018

Jenjang Sekolah	2014	2015	2016	2017	2018
MI	65	43	35	43	42
SD	1.068	1.069	1.044	1.022	958
MTs	67	64	62	72	87
SMP	356	357	357	396	436
SMA	164	160	162	183	190
SMK	203	207	245	301	397
MA	37	36	35	46	56
Total	1.960	1.936	1.940	2.063	2166

Sumber : Dinas Dikpora DIY, 2019

- c) Keberhasilan kualitas pendidikan sangat ditentukan dengan kualitas guru. Untuk itu, guru perlu meningkatkan kompetensinya dalam pengajaran. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Guru menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) kompetensi yang harus dipenuhi guru yaitu : kompetensi paedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial. Sebagai bentuk pengakuan formal terhadap profesionalitas guru diberikan dalam bentuk sertifikasi.

Persentase guru yang bersertifikasi di DIY rata-rata sudah lebih dari 50% guru dan tiap tahun mengalami kenaikan. Sebagai upaya dalam meningkatkan persentase guru yang tersertifikasi, Pemerintah Daerah DIY mendorong dengan:

- a. Pendataan sertifikasi guru;
- b. Pendidikan guru dalam jabatan untuk meningkatkan kompetensi dalam mengajar.

Tabel 2-32 Persentase Guru Tersertifikasi di DIY Tahun 2014-2018

Jenjang Sekolah	2014	2015	2016	2017	2018*
SD	46,09	44,12	43,46	51,28	51,90
SMP	58,52	59,98	59,35	65,92	69
SMA	65,53	63,31	60,83	59,52	67,80
SMK	43,07	41,39	41,52	47,25	55,30

Sumber : Dinas Dikpora DIY, 2018; * Neraca Pendidikan Daerah Provinsi DIY Tahun 2018

- d) Pendidikan merupakan sebuah proses pengembangan diri seseorang untuk berkontribusi dalam semua aspek pembangunan. Tingkat pendidikan seseorang bertujuan untuk meningkatkan intelektualitas dan kompetensi dalam menghadapi kompetisi di dunia kerja. Berbagai upaya dilakukan sektor pendidikan seperti kurikulum

berbasis kompetensi dan pengembangan *life skill* yang dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan dunia kerja.

Upaya tersebut dilaksanakan berdasar kondisi penyerapan peserta didik dalam dunia kerja dilihat dari lulusan SMK yang diterima di dunia kerja dan lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha yang dapat memasuki dunia kerja yang dapat digambarkan sebagai berikut,

Tabel 2-33 Persentase Keterserapan di Dunia Kerja melalui Pendidikan Formal dan Informal Tahun 2014-2018

Lulusan pendidikan informal/formal yang memasuki dunia kerja	2014	2015	2016	2017	2018
Lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha yang dapat memasuki dunia kerja	73,18	73,18	86,49	76,94	n/a*
Lulusan SMK diterima di dunia kerja	48,82	45,22	44,16	51,08	54,63

Sumber : Dinas Dikpora DIY, 2019; data dari Kabupaten/ Kota belum tersedia.

- e) Perkembangan teknologi informasi (IT) memberikan pengaruh yang besar dalam semua aspek pembangunan termasuk sektor pendidikan. Keberadaan IT selain bermanfaat dalam dalam mengupdate informasi dan pengetahuan global, juga sebagai sarana untuk menunjang proses belajar mengajar itu sendiri. Manfaat dari IT dalam sektor pendidikan antara lain : a) memungkinkan untuk diselenggarakannya pendidikan terbuka dan jarak jauh, b) *sharing* sumberdaya dan informasi antar penyelenggara pendidikan, dan c) penggunaan media interaktif dalam proses belajar mengajar.

Dinas Dikpora DIY melalui Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan telah menyediakan beberapa layanan teknologi pendidikan yang aksesibel bagi guru dan siswa dalam penyediaan informasi pendidikan sekaligus media interaktif pendukung pembelajaran. Akan tetapi penyediaan layanan tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh guru dan siswa di DIY. Pada tahun 2018, dari total 39.596 guru di DIY baru sebanyak 4.675 guru (11,81%) yang memanfaatkan layanan BTKP dan dari 572.703 siswa di DIY baru sebanyak 23.274 siswa (4,06%) yang memanfaatkan layanan BTKP.

Tabel 2-34 Layanan di BTKP DIY dan Persentase Penggunaan Layanan BTKP DIY Tahun 2018

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH GURU PARTISIPASI	JUMLAH SISWA PARTISIPASI
1	Diseminasi	500	500
2	Kihajar	237	978
3	Bimbingan Teknis	1586	0
4	Lokakarya	100	0
5	Buletin dan Warta Guru	74	0
6	Mobile Learning Service	300	200
7	Layanan Jogjabelajar	1878	21596
TOTAL GURU PARTISIPASI			4.675
TOTAL GURU DIY			39.596
PROSENTASE PENGGUNA LAYANAN			11.81%
TOTAL SISWA PARTISIPASI			23.274
TOTAL SISWA DIY			572.703
PROSENTASE PENGGUNA LAYANAN			4.06%

Sumber : Dinas Dikpora DIY, 2019

Persentase pengguna layanan BTKP masih rendah dikarenakan siswa dan guru yang mengikuti pelatihan pendidikan dan kegiatan berbasis IT di BTKP masih sangat terbatas. Walaupun demikian banyak dari siswa dan guru lain diluar yg mengikuti kegiatan di BTKP juga menggunakan aplikasi atau produk yang dikembangkan oleh BTKP.

Guru memiliki kompetensi yang bagus dan inovatif dalam menerapkan media berbasis komputer dengan ditunjukkan oleh keterampilan dan inovasi media yang sudah digunakan guru dalam pembelajaran tematik. Guru cenderung memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di kelas dengan mengintegrasikan media melalui jaringan internet yang sudah disediakan oleh sekolah sehingga guru lebih mudah mengakses materi maupun jenis media berbasis komputer lainnya.

- f) Pendidikan dan kebudayaan merupakan aspek utama dalam pembangunan SDM di DIY untuk menciptakan 'manusia yang utama' (jalmâ kang utâmâ). Pendidikan berperan dalam mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat DIY yang berkualitas, berdaya saing, sejahtera, dan berkarakter sesuai nilai-nilai dasar budaya.

Pendidikan berbasis budaya merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasar nilai-nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat

mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia. Berdasarkan data jumlah sekolah di DIY yang telah menyelenggarakan pendidikan berbasis budaya kategori maju sebanyak 25,34% dari 446 sekolah SLB, SMA dan SMK.

- g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur Pelaksanaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang salah satunya terkait dengan urusan pendidikan. Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu di semua jenjang pendidikan.

Pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus diselenggarakan melalui pendidikan khusus dan pendidikan inklusif. Data dari Dinas Dikpora DIY menyebutkan bahwa masih terdapat 1.592 anak berkebutuhan khusus di DIY yang belum mengakses layanan pendidikan. Beberapa faktor penyebabnya selain akses juga disebabkan oleh keluarga dan lingkungan. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain : peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai, pengembangan kurikulum, pengembangan manajemen sekolah, dan peningkatan pemahaman kepada orang tua dan masyarakat tentang perlindungan dan pemenuhan hak siswa berkebutuhan khusus.

2.1.3.1.2 Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan sebuah investasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan tujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Pembangunan kesehatan DIY yang tercermin melalui capaian komponen pembangunan kesehatan dalam Indikator Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan hasil yang baik. Angka Harapan Hidup (AHH) DIY merupakan yang terbaik secara nasional dengan capaian 74,74 tahun di tahun 2017 dan selalu meningkat dari kurun 2010 sampai dengan 2017 (BPS DIY, 2018). Capaian tersebut tidak berarti pembangunan kesehatan DIY tanpa permasalahan. Beberapa indikator kesehatan masih memerlukan perhatian khusus.

2.1.3.1.2.1 Pengendalian Penyakit Menular

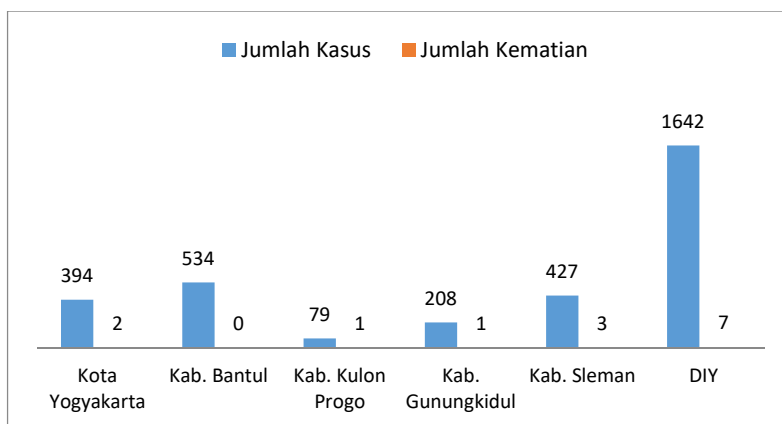
Penyakit menular yang perlu menjadi perhatian di DIY karena angka prevalensinya diatas angka nasional berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018 adalah Hepatitis. Prevalensi hepatitis berdasarkan diagnosis dokter di DIY Tahun 2013 adalah sekitar 0,1% dan di Tahun 2018 meningkat sebesar 400% menjadi 0,4. Angka prevalensi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan angka prevalensi nasional yang sekitar 0,2.

Penanganan Penyakit menular lain seperti TBC di Tahun 2017 menunjukkan perkembangan yang baik. Kondisi ini terlihat pada angka kesembuhan TBC sebesar 85,56 % meningkat dibanding tahun 2016 sebesar 84,37 %. (Dinas Kesehatan DIY, Profil Kesehatan DIY 2017). Beberapa penyakit menular masih memerlukan perhatian khusus karena angka kejadiannya yang tergolong tinggi seperti Demam Berdarah Dengue (DBD), HIV AIDS, dan Malaria.

a. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Menurut *World Health Organization* (WHO), Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk *Aedes* yang terinfeksi salah satu dari empat tipe virus dengue dengan manifestasi klinis demam, nyeri otot dan/atau nyeri sendi yang disertai leukopenia, ruam, limfadenopati, trombositopenia dan diathesis hemoragik.

DIY tergolong daerah dengan tingkat kejadian kasus yang tinggi. Data dari Dinas Kesehatan DIY menyebutkan bahwa pada tahun 2017 terjadi 1.642 kasus dengan 7 kasus kematian akibat DBD.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2018

Gambar 2-27 Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) DIY Tahun 2017

Angka kematian akibat DBD tercatat fluktuatif dari kurun 2014 – 2017. Pada tahun 2014, kasus kematian akibat DBD tercatat sejumlah 13 orang. Angka tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi sejumlah 35 orang, kemudian menurun pada tahun 2016 sejumlah 31 orang dan di tahun 2017 sebesar 7 orang.

b. Penyakit HIV/AIDS

Penyakit HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV dan menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) adalah sindrom atau kumpulan gejala yang timbul karena sangat turunnya kekebalan tubuh penderita HIV dan merupakan stadium akhir dari HIV. Penularan penyakit ini di DIY tidak bisa dianggap sepele sebab temuan kasus HIV setiap tahunnya tidak menunjukkan penurunan dan penderitanya berasal dari berbagai pekerjaan dan kelompok usia. Berdasarkan data dari KPA tahun 2018 empat jenis golongan pekerjaan terbesar yang menderita HIV/AIDS adalah profesional non medis, wiraswasta, Ibu Rumah Tangga dan pelajar

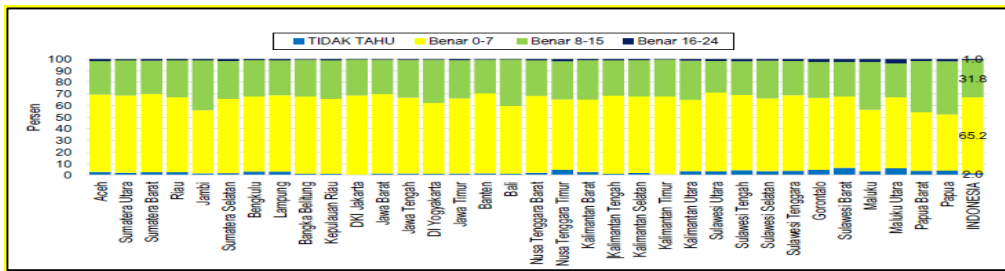
Tabel 2-35 Temuan Kasus Berdasarkan Tahun Penemuan 2014-2018

Tahun	AIDS	HIV
2014	199	532
2015	91	311
2016	209	617
2017	27	398
2018	140	512

Sumber: Komisi Penanggulangan AIDS/HIV 2018

Kasus HIV/AIDS baru yang terjadi setiap tahun dan dengan jumlah yang tidak sedikit tersebut diduga salah satu penyebabnya adalah pengetahuan tentang HIV/AIDS. Hasil Riskesdas Tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat DIY terhadap AIDS/HIV dibawah angka nasional.

Akumulasi kasus HIV/AIDS dilihat dari data Dinas Kesehatan DIY sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2018, tercatat kasus HIV sebanyak 4.781 kasus, dan 1.647 diantaranya telah memasuki fase AIDS.

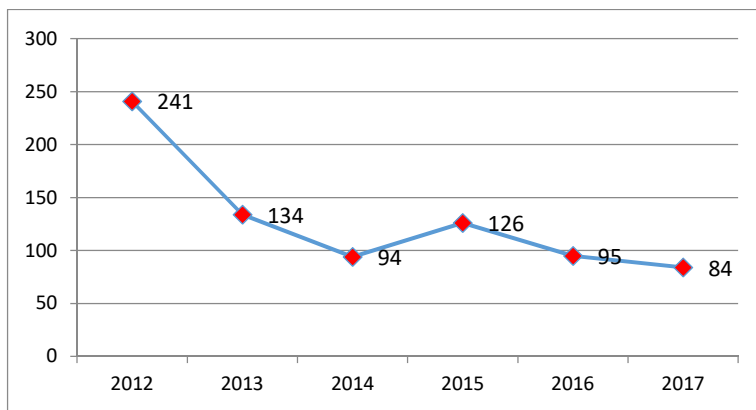


Sumber: Hasil Laporan Riskesdas 2018

Gambar 2-28 Pengetahuan Tentang AIDS/HIV Menurut Provinsi

c. Malaria

Kasus malaria yang terjadi di DIY hanya terjadi di Kabupaten Kulon Progo dengan penyebaran pada 6 kecamatan. Kasus terbanyak ada di Kecamatan Kokap (71 kasus) dan yang paling sedikit di Kecamatan Sentolo (1 kasus). Sedangkan untuk perkembangan kasus malaria dalam kurun 2012-2017 di DIY adalah sebagai berikut :



Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2018

Gambar 2-29 Perkembangan Jumlah Kasus Malaria DIY Tahun 2012-2017

Penyebab Kabupaten Kulon Progo sebagai wilayah endemis malaria dikarenakan kondisi topografi dari perbukitan menoreh dimana dijumpai nyamuk anopheles sebagai vektor dari penyakit ini. Posisi perbukitan menoreh yang berada pada perbatasan daerah (Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Purworejo), membutuhkan intervensi yang sinergis dari masing-masing daerah untuk mewujudkan eliminasi malaria.

2.1.3.1.2.2 Penyakit Tidak Menular

Prevalensi penyakit tidak menular layak mendapat perhatian sebab ini merupakan gambaran perilaku hidup sehat masyarakat di DIY. Jenis penyakit tidak menular di DIY yang memiliki angka prevalensi tinggi atau diatas angka nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-36 Jenis Penyakit Tidak Menular dengan Prevalensi Tinggi

Penyakit	Prevalensi DIY*	Prevalensi Nasional	Satuan	Posisi Nasional
Asma	4,5	2,4	persen	1
Kanker	4,9	1,8	Permil	1
Stroke	14,6	10,9	Permil	2
Ginjal Kronis	>3,8	3,8	Permil	12
Diabetes Melitus	2,6	2	Persen	3
Jantung	1,5<DIY<2,2	1,5	Persen	3
Hipertensi	8,8<DIY<13,5	8,8	Persen	4
ART dengan Gangguan Jiwa Skizofrenia	10,36	7	Permil	2

Sumber: Riset Kesehatan Daerah 2018, diolah

Penyakit tidak menular terkait erat dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat. Kondisi ini juga dialami oleh DIY dimana capaian prevalensi beberapa penyakit tidak menular sebanding dengan capaian PHBS DIY. DIY telah memiliki indikator untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan PHBS di tingkat rumah tangga. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY, penerapan PHBS di tingkat rumah tangga baru mencapai 45,32%. Indikator PHBS yang masih perlu perhatian adalah perilaku merokok.

Pada tahun 2016 pemerintah meluncurkan sebuah gerakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Gerakan tersebut dikenal dengan nama Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Pada tahun 2017, gerakan ini mendapatkan payung hukum melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Germas dengan harapan gerakan ini didukung oleh kebijakan lintas sektor dan menjadi aksi bersama.

Germas meliputi beberapa kegiatan yaitu : a) Peningkatan aktifitas fisik, b) Peningkatan perilaku hidup sehat, c) Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, d) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, e) Peningkatan kualitas lingkungan, dan f) Peningkatan edukasi hidup sehat.

Pemda DIY telah memiliki panduan dalam penyelenggaraan Germas yang tercantum dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 44 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yogyakarta Sehat Lestari. Penyusunan RAD tersebut bertujuan untuk : a) meningkatkan kapasitas, komitmen dan keperansertaan semua unsur masyarakat dalam pelaksanaan Germas, b) menggali, mengkaji dan menerapkan nilai serta kearifan lokal sebagai bagian dari upaya pelaksanaan Germas, c) membangun dan menjalin kerjasama, koordinasi dan hubungan kerja yang baik dengan semua unsur masyarakat dalam pelaksanaan Germas, d) mendorong terwujudnya kondisi di masyarakat yang dengan sadar, mau dan mampu berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

2.1.3.1.2.3 Status Gizi Balita

Permasalahan terkait status gizi balita di DIY adalah *stunting*. Stunting atau balita pendek merupakan gangguan pertumbuhan yang menyebabkan dikemudian hari anak bertubuh lebih pendek dari teman seusianya atau sewajarnya. Stunting merupakan indikasi adanya kekurangan gizi pada balita dan apabila tidak segera tertolong akan berdampak buruk pada kecerdasan anak. Hasil Riskesdas Tahun 2018 menunjukkan bahwa proporsi status gizi sangat pendek dan pendek pada balita di DIY mengalami penurunan yang sebelumnya di tahun 2013 sebesar 27,5% menjadi sebesar 21,5%. Pencapaian penurunan stunting ini merupakan peringkat dua secara nasional setelah DKI Jakarta yang mencapai 17,7%. Sedangkan angka nasional untuk stunting adalah 30,8%. Penurunan angka stunting ini tentu saja kabar gembira namun angka 21,5% ini berarti 1 dari 5 anak di DIY adalah stunting cukup mengkhawatirkan. Kekhawatiran tersebut karena anak stunting akan memiliki fisik yang lemah, mudah sakit dan memiliki kecerdasan yang kurang dengan demikian ini adalah ancaman bagi kualitas daya saing dan produktivitas di masa mendatang. Oleh sebab itu perlu perhatian khusus dan penanganan secara terpadu antar pihak agar angka stunting terus menurun.

2.1.3.1.2.4 Tingkat Kematian (*Mortalitas*) Ibu dan Bayi

a. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Merujuk pada target *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk indikator Angka Kematian Bayi yang sebesar 12 per 1.000 kelahiran hidup, tren jumlah kematian bayi DIY menunjukkan hasil yang baik. Pada tahun 2017, jumlah kasus kematian bayi di

DIY sejumlah 313 dari 42.438 kelahiran hidup. Perkembangan jumlah kematian bayi di DIY dalam kurun waktu 2012-2017 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2-37 Perkembangan Jumlah Kematian Bayi dan Kelahiran Hidup DIY Tahun 2012-2017

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kematian Bayi	400	449	405	329	278	313
Jumlah Lahir Hidup	45.843	45.436	45.592	43.704	43.026	42.348

Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2018

Penyebab umum kematian bayi di DIY adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), sepsis, dan asfiksia pada saat lahir.

b. Angka Kematian Ibu

Kematian ibu atau maternal adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan.

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI menjadi indikator dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) juga masih fokus dalam upaya penurunan AKI. Komitmen global menyepakati dalam SDGs untuk mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Berdasarkan Survei Demografi dan Kependudukan (SDKI) Tahun 2012, AKI di Indonesia masih tinggi yaitu sebesar 390 per 100.000 kelahiran hidup. Di DIY sendiri perkembangan AKI dimonitor dengan kejadian jumlah kasus kematian ibu. Perkembangan jumlah kasus kematian ibu di DIY dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 meskipun fluktuatif tetapi cenderung mengalami penurunan dengan kisaran 29 – 56 kasus kematian ibu. Tahun 2013 kasus kematian ibu sebanyak 46 kasus, menurun di tahun 2014 menjadi sebanyak 40 kasus dan kembali menurun di tahun 2015 menjadi 29 kasus. Namun pada tahun 2016 terjadi kenaikan jumlah kematian ibu sebanyak 39 kasus. Pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah kasus kematian ibu menjadi 34 kasus.

2.1.3.1.2.5 Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di wilayah DIY meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Pelayanan kesehatan dasar dilaksanakan oleh Puskesmas, sedangkan pelayanan kesehatan rujukan diampu oleh Rumah Sakit.

Pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan oleh Puskesmas mengalami peningkatan kualitas dari tahun ke tahun. Dari 121 Puskesmas yang terdapat di DIY, pada tahun 2017 seluruhnya telah terakreditasi dengan kategori akreditasi yang beragam dari dasar sampai utama.

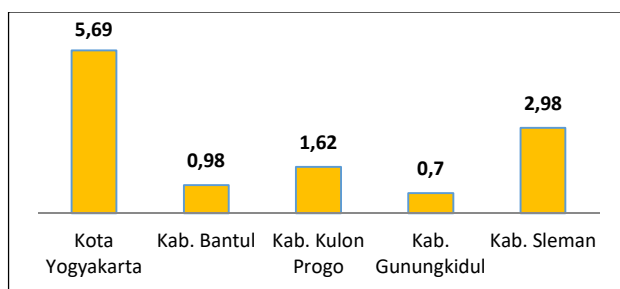
Sedangkan untuk pelayanan kesehatan rujukan, jumlah Rumah Sakit yang ada di DIY berjumlah 76 Rumah Sakit yang terdiri dari 54 RS Umum dan 22 RS Khusus. Jumlah Rumah Sakit berdasarkan kelas di DIY dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2-38 Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kelas di DIY Tahun 2017

Kelas RS	RS Umum	RS Khusus	Jumlah
Kelas A	1	2	3
Kelas B	10	1	11
Kelas C	6	19	25
Kelas D	37	0	37
Jumlah	54	22	76

Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2018

Long of Stay (LOS) untuk Rumah Sakit di DIY sebesar 2,81 hari dengan rasio tempat tidur sebesar 2,23 yang berarti bahwa 1000 penduduk DIY dilayani dengan 2,23 tempat tidur. Meskipun sudah masuk dalam kategori ideal, akan tetapi untuk distribusi per wilayah masih terjadi ketimpangan. Dari 5 kabupaten/kota yang ada di DIY, terdapat 3 kabupaten (Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul). Sebaran rasio tempat tidur rumah sakit di DIY dapat dilihat dari gambar berikut :



Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2018

Gambar 2-30 Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit di Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017

Terkait beroperasinya Yogyakarta International Airport (YIA) atau Bandar Udara Internasional Yogyakarta, perlu adanya antisipasi terhadap kejadian-kejadian kegawatdaruratan yang juga berstandar internasional. Untuk itu perlu adanya fasilitas kesehatan yang mampu memberikan layanan tersebut baik dari aspek fisik, peralatan, tenaga kesehatan, maupun manajemen pengelolanya. Selain itu perlu adanya sistem rujukan antar fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam memberikan respon yang cepat terhadap kejadian-kejadian kegawatdaruratan.

2.1.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan Sumber Daya Air, Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Keciptakarya, serta Sub Urusan Jasa Konstruksi.

2.1.3.1.3.1 Urusan Pekerjaan Umum

2.1.3.1.3.1.1 Sub Urusan Sumber Daya Air

Arah kebijakan pembangunan sub urusan sumber daya air (SDA) harus bisa menjawab isu strategis yang berkembang ditingkat lokal yang dalam masa 5 tahun keduanya pasca keistimewaan mengangkat tema “Menyongsong Abad Samudra Untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”, serta mengikuti arah kebijakan nasional terkait pembangunan sektor sumber daya air, antara lain target Sustainable Development Goals (SDGs), dan Nawacita.

Sub urusan SDA dalam lingkup kegiatan pemda DIY adalah melaksanakan ketugasan di dalam peningkatan kinerja sistem irigasi, peningkatan kondisi jaringan irigasi dan penambahan kapasitas air baku. Jaringan irigasi merupakan salah satu infrastruktur dalam mencapai ketahanan pangan yaitu untuk melayani ketersediaan air di lahan basah/sawah. Layanan penyediaan air irigasi di DIY tidak hanya dilakukan oleh pemerintah DIY, namun dilakukan juga oleh pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Pembagian kewenangan dalam layanan penyediaan irigasi berdasarkan luasan daerah irigasi. Daerah irigasi di DIY Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2-39 Daerah Irigasi di DIY

No	Kewenangan	DI Permukaan	DI Air Tanah	DI Pompa	Jumlah DI	Luas(Ha)
1.	BBWSO	3	-	-	3	12.460
2.	DIY	41	-	-	41	13.987
3.	Bantul	100	18	-	118	9.368
4.	GunungKidul	182	55	-	237	7.722
5	Sleman	853	-	75	928	25.814
6	Kulon Progo	90	-	3	93	1.583
7	Kota Yogyakarta	10	-	-	10	49
		1.279	73	78	1.430	70.983

Sumber: Permen PI dan PR Nomor 14/PRT/M/2015

Luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemda DIY sebesar 13.987 Ha yang terbagi menjadi satuan Daerah Irigasi (DI) sejumlah 41 DI yang merupakan DI permukaan. DI kewenangan Pemda DIY terdiri dari daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota sejumlah 35 DI dengan luas 4.909 Ha dan daerah irigasi utuh di Kabupaten sejumlah 6 DI dengan luas 9.078 Ha.

Tabel 2-40 Prasarana Irigasi/Pengairan

No	Bidang Urusan	Sub Elemen	Tahun				Satuan
			2015	2016	2017	2018	
1	Pekerjaan Umum	Non Teknis	n/a	n/a	n/a	n/a	m
2	Pekerjaan Umum	Teknis	171.562,72	169.082,72	255.883,19	255.883,190 *	m
3	Pekerjaan Umum	Primer	57.192,24	57.192,24	78.589,59	78.589,59 *	m
4	Pekerjaan Umum	Sekunder	114.390,48	111.890,48	177.284,59	177.284,59 *	m
5	Pekerjaan Umum	Tersier	171.582,72	417.559,39	906.198,08	906.198,08 *	m
6	Pekerjaan Umum	Luas Irigasi	13.987,19	13.987,00	12.158,11	12.158,11 *	Ha
7	Pekerjaan Umum	Panjang jaringan sarana irigasi dalam kondisi baik	45.532,32	44.219,390	93.096,04	93.096,04 *	m
8	Pekerjaan Umum	Persentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	26,54	31,02	35,77	35,77 *	%
9	Pekerjaan Umum	Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik	4.348,06	4.339,26	4.348,98	4.348,98 *	Ha

Sumber : BPPSD 2019

Dari tabel Prasarana Irigasi/Pengairan secara umum setiap tahun mengalami penurunan dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Dari tahun 2015 panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik selalu mengalami penurunan setiap tahunnya sedangkan untuk luas daerah irigasi dalam kondisi baik mengalami fluktuasi luasannya. Kebutuhan air untuk irigasi mengalami penurunan dari

tahun ke tahun. Hal ini terjadi antara lain karena adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian, diversifikasi tanaman dari padi ke non padi, peningkatan efisiensi yang menyebabkan penghematan penggunaan air.

Tabel 2-41 Kondisi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan Pemda Diy 2018

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	Luas Sesuai Permen PUPR 14/2015	Panjang Saluran Primer dan Sekunder	INDEKS JARINGAN IRIGASI	TINGKAT KONDISI (BS, B, S, J)	INDEKS KERUSAKAN	TINGKAT KERUSAKAN (B, RR, RS, RB)
			(Ha)	(m)	(%)		(%)	
1	Tirtorejo/Grembyangan	DIY/Sleman-Bantul	541	8.424	73,00	S	27,00	RS
2	Semoya	Sleman-Bantul	30	1.606	74,90	S	25,10	RS
3	Kucir	Sleman-Bantul	61	2.299	72,80	S	27,20	RS
4	Kuton	Sleman-Bantul	113	2.357	72,40	S	27,60	RS
5	Madugondo	Sleman-Bantul	104	3.361	73,10	S	26,90	RS
6	Dadapan	Sleman-Bantul	38	1.572	72,70	S	27,30	RS
7	Pulodadi	Sleman-Bantul	176	5.329	72,90	S	27,10	RS
8	Glendongan	Sleman-Bantul	209	3.611	72,30	S	27,70	RS
9	Klampok	Sleman-Bantul	295	4.424	72,00	S	28,00	RS
10	Sekarsuli	Sleman-Bantul	145	2.678	72,50	S	27,50	RS
11	Nologaten	Sleman - Kota	27	2.896	71,90	S	28,10	RS
12	Ngebruk	Sleman - Kota	41	2.964	72,30	S	27,70	RS
13	Trini	Sleman-Kota	152	5.237	72,51	S	27,49	RS
14	Cokro Bedog	Sleman-Bantul	194	2.075	73,40	S	26,60	RS
15	Gamping	Sleman-Bantul	532	5.267	73,50	S	26,50	RS
16	Brongkol	Sleman-Bantul	16	3.654	73,20	S	26,80	RS
17	Tumut	Sleman-Bantul	44	1.100	71,72	S	28,28	RS
18	Timoho	Sleman-Bantul	121	3.362	72,80	S	27,20	RS
19	Engkuk-engkukan	Sleman-Bantul	14	1.897	73,74	S	26,26	RS
20	Sambeng	Sleman-Bantul	60	6.030	71,74	S	28,26	RS
21	Mojo	Sleman-Bantul	48	2.474	71,00	S	29,00	RS
22	Sembuh	Sleman-Bantul	33	799	75,80	S	24,20	RS
23	Ponggok	Sleman-Bantul	132	1.922	76,90	S	23,10	RS
24	Kanoman	Kota - Bantul	16	2.870	70,80	S	29,20	RS
25	Tanjung	Kota - Bantul	776	232	68,18	S	31,82	RS
26	Bangeran	Kota - Bantul	138	3.940	79,10	B	20,90	RS
27	Mrican	Kota - Bantul	162	5.143	72,50	S	27,50	RS
28	Sidomulyo	Kota-Bantul	160	5.214	78,72	S	21,28	RS
29	Prangkok	Sleman -Bantul	81	1.329	71,30	S	28,70	RS
30	Sidoraharjo	Sleman-Bantul	98	3.547	73,10	S	26,90	RS
31	Madean	Sleman-Bantul	328	7.228	69,20	S	30,80	RS
32	Pogung	Sleman - Kota	1	6.176	72,30	S	27,70	RS
33	Minggiran	Kota - Bantul	4	2.242	68,64	S	31,36	RS
34	Mendungan	Kota - Bantul	4	1.505	67,91	S	32,09	RS
35	Mergangsan	Kota - Bantul	15	2.541	71,30	S	28,70	RS
36	Blawong	Bantul	1.077	14.554	65,84	S	34,16	RS
37	Pendowo	Bantul	1.251	19.696	61,78	S	38,22	RS

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	Luas Sesuai Permen PUPR 14/2015	Panjang Saluran Primer dan Sekunder	INDEKS JARINGAN IRIGASI	TINGKAT KONDISI (BS, B, S, J)	INDEKS KERUSAKAN	TINGKAT KERUSAKAN (B, RR, RS, RB)
			(Ha)	(m)	(%)		(%)	
38	Pijenan	Bantul	2.563	39.214	53,70	J	46,30	RB
40	Simo	Gunungkidul	1.247	17.867	77,75	S	22,25	RS
39	Payaman	Gunungkidul	1.040	9.281	70,73	S	29,27	RS
41	Sapon	Kulon Progo	1.900	37.968	76,11	S	23,89	RS
RERATA					71,90		28,10	RS
TOTAL			3.987	55.883				

Sumber : Dinas PUP ESDM, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata kondisi saluran irigasi dalam kondisi sedang sehingga untuk melayani daerah irigasi saluran masih dapat berfungsi dengan baik.



Gambar 2-31 Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Kewenangan Pemda DIY

Kebijakan Pemda DIY dalam penyediaan air baku dilakukan melalui pembangunan embung yang berfungsi sebagai penampung air sekaligus untuk mempertahankan stabilitas muka air tanah dan dengan sumur bor. Pembangunan embung telah dimulai pada tahun 2005 dan terus ditambah sampai tahun 2018 telah dibangun 24 embung yang tersebar di beberapa kabupaten di DIY. Di dalam pencapaian target RPJMD pada penyediaan air baku sebesar 2.100 Liter/detik juga didukung dari pembangunan bendung Kamijoro, SPAM Regional Kebon Agung, SPAM Regional Karangtalun dan sumur bor dari bidang ESDM. Capaian pada akhir tahun 2017 adalah debit air baku sebesar

2.168,73 liter/detik. Tahun 2018 ditargetkan penambahan debit air baku sebesar 35 liter/detik adapun realisasinya hanya sebesar 16,10 liter/detik dengan rincian:

- a. Pembangunan 6 Unit Embung dengan dana APBD kabupaten Bantul sebanyak 5 buah dan di Kulonprogo 1 buah dengan debit kumulatif sebesar 0,41 liter/detik.
- b. Pembangunan 1 Unit Embung di daerah Playen Gunung Kidul di hutan wanagama dengan dana APBN melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dengan kapasitas debit sebesar 7 liter/detik.
- c. Pembangunan 8 Unit Sumur Bor dengan dana APBD DIY melalui dengan kapasitas debit sebesar 8,68 liter/detik. Pembangunan dilakukan antara lain di:
 1. Kabupaten Gunung Kidul yaitu diantaranya: Patuk (0,5 lt/det), Gedangsari (0,6 lt/det), Semin (0,5 lt/det), Playen (0,78 lt/det);
 2. Kabupaten Bantul: Karangkulon Wukirsari (1,6 lt/det), Lemahrubuh Selopamioro (1,6 lt/det), Jetis Selopamioro (1,7 lt/det), Seropan Dlingo (1,4 lt/det);

2.1.3.1.3.1.2 Sub Urusan Air Minum

Penyediaan air minum dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan persentase penduduk berakses air minum. Pencapaian indikator persentase penduduk *berakses* air minum dihitung dengan membandingkan jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan total penduduk DIY.

Pada akhir tahun 2018 jumlah rumah tangga DIY sebanyak 1.202.240 Rumah tangga (BSD, 2018). Melalui Program Pengelolaan Persampahan, Air Minum dan Air Limbah Regional dan Program Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman serta dukungan APBN Ditjend Cipta Karya, Kementerian PUPR melalui kegiatan pembangunan SPAM Regional, SPAM IKK, Optimalisasi SPAM IKK dan swadaya masyarakat, hingga tahun 2018 jumlah penduduk berakses air minum secara kumulatif mencapai 1.103.295 Rumah tangga atau 91,77% dari jumlah rumah tangga DIY. Sampai dengan akhir tahun 2018 capaian penduduk berakses air minum telah mencapai 100,51 % dari target sebesar 86,98% Dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2022 telah tercapai dengan presentase sebesar 97,48%. Data cakupan pelayanan air minum per kabupaten/kota di DIY disajikan dalam tabel sebagai berikut ini.

Tabel 2-42 Cakupan Pelayanan Air Minum Kabupaten Kota di DIY, Tahun 2018

No	Kabupaten	Pelayanan PDAM		Pelayanan Non PDAM						Jumlah Jiwa Terlayani Jaringan Perpipaan
		SR	Jumlah Jiwa	SR SPAMDes	Jumlah Jiwa	SR PAMSIMAS	Jumlah Jiwa	HU	Jumlah Jiwa	
1	Sleman	32.929	214.039	21.690	108.450	868	4.340	847	42.350	369.179
2	Kulon Progo	27.545	212.097	6.442	32.210	5136	25.680	349	17.450	287.437
3	Bantul	30.982	198.285	6.155	30.775	6843	34.215	93	4.650	267.925
4	Gunungkidul	47.268	401.778	22.641	113.205	2162	10.810	179	8.950	534.743
5	Kota Yogyakarta	28.857	155.828	-	-	-	-	-	-	-
DI Yogyakarta		167.581	1.182.026	56.928	284.640	15.009	75.045	1.468	73.400	1.459.283

Sumber: Satker PSPAM DI Yogyakarta, 2018

Sebagai penunjang penyediaan air minum dianggarkan dengan APBN, sertas dilakukannya melalui:

1. Pembangunan IPA SPAM Regional Kartamantul kapasitas 200 liter/detik dan JDU termasuk jaringan perpipaan distribusi utama, Rencana jumlah penduduk yang akan dilayani program ini berjumlah 350.000 jiwa.
2. Optimalisasi SPAM Kawasan Kalibawang, Kab. Kulon Progo dengan jaringannya pipa dia.300mm, sepanjang 8.300 m.
3. Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Panjatan Kab. Kulonprogo, berupa pemasangan pipa distribusi utama dia.300mm dan dia.250mm, Reservoir 500 m³.
4. Pembangunan jaringan perpipaan Dlingo, berupa pemasangan pipa distribusi utama ø100mm sepanjang 2202 m.

2.1.3.1.3.1.3 Sub Urusan Air Limbah

Penyediaan layanan Limbah DIY disediakan oleh sistem terpusat melalui IPAL Sewon, sistem komunal dan sistem setempat. Sistem terpusat IPAL Sewon berlokasi di Sewon, Bantul melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang terdiri wilayah Kota Yogyakarta, sebagian wilayah Kabupaten Bantul dan sebagian wilayah Kabupaten Sleman.

Pelaksanaan Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah merupakan upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur dalam mendukung perluasan cakupan pelayanan air limbah di DIY dengan fokus penanganan pada wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta melalui pelayanan sistem terpusat oleh IPAL Sewon.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk maka potensi jumlah air limbah domestik akan semakin bertambah. Penanganan air limbah domestik dimaksudkan agar tidak mencemari sumber air dan lingkungan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat terutama dari penyakit yang disebabkan oleh air limbah. Pengelolaan limbah cair domestik di DIY dapat dibagi menurut teknologi pengelolaan yang dilakukan yaitu teknologi *off site system* dan *on site system* berupa individual atau komunal.

Penambahan layanan jaringan infrastruktur jaringan limbah terpusat di prioritaskan pada daerah-daerah yang sudah terlewati jaringan limbah terpusat namun Sambungan Rumah (SR) nya belum ada. Prioritas penambahan layanan jaringan infrastruktur limbah terpusat tersebut dibagi menjadi 2 skala yaitu skala desa dan skala kecamatan. Penanganan limbah komunal diprioritaskan pada daerah dengan kepadatan penduduk lebih dari 100 jiwa/ha, dan merupakan daerah yang tidak terlayani jaringan pipa limbah terpusat dan berada pada daerah cekungan.

Untuk mengurangi pencemaran air tanah dari limbah rumah tangga di KPY telah dibangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sewon beserta jaringan perpipaanya. Layanan jaringan air limbah terpusat di KPY dicapai melalui pelaksanaan program Program Pengelolaan Persampahan, Air Minum dan Air Limbah Regional. Pada tahun 2018, melalui koordinasi intensif dengan kabupaten kota dan dukungan APBD DIY berupa pembangunan pipa lateral, pipa service beserta operasi pemeliharaannya dan APBD Kabupaten/Kota jumlah sambungan rumah yang terpasang secara kumulatif mencapai 23.821 SR. Jumlah sambungan rumah air limbah cair rumah tangga pada sistem IPAL terpusat sewon disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2-43 Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Pada Sistem IPAL Terpusat Sewon Sampai Dengan Tahun 2018

No	Wilayah KPY	Jumlah Sambungan Rumah (SR)
1	Kota Yogyakarta	17.768
2	Kabupaten Bantul	2.776
3	Kabupaten Sleman	3.277
Jumlah Total		23.821

Sumber: Dinas PUP ESDM 2018

Data cakupan pelayanan air limbah domestik DIY disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2-44 Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik DIY Tahun 2018

No	Kabupaten Kota	Tanpa Akses	Akses Dasar	Akses Sanitasi Layak						Jumlah
				SPALD- Setempat				SPALD -Terpusat		
				Sistem Individual		Sistem Komunal		SPALD-T Permukiman	SPALD-T Perkotaan	
				BABS	Cublul/Tangki Septik Individual Tidak Layak	Jamban Keluargadgn Tangki Septik Aman	Memiliki Akses ke jamban bersama "layak"	MCK Komunal	Tangki Septik Komunal (5-10 KK)	
	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	
1	Yogyakarta	-	1.211	105.093	4.295	957	128	2.271	17.768	131.723
2	Sleman	-	9.482	284.738	17.285	114	-	14.791	2.776	329.186
3	Bantul	-	48.542	246.134	7.376	-	-	12.463	3.277	317.792
4	Kulonprogo	-	18.477	91.982	8.357	-	26	3.525	-	122.367
5	Gunungkidul	-	32.622	141.685	19.632	-	-	2.969	-	196.908
		-	110.334	869.632	56.945	1.071	154	36.019	23.821	1.097.976

Sumber: Dinas PUP ESDM 2018

Untuk menambah kapasitas cakupan layanan Air Limbah pada tahun 2018 dilakukan melalui pembangunan IPAL Komunal dan peningkatan infrastruktur yang sudah ada antara lain:

1. Pembangunan SPAL Kawasan Berbah Sleman, memiliki kapasitas 390m³/hari dan mampu melayani 1000SR dengan cakupan wilayah pelayanan adalah Kecamatan Berbah, dengan capaian 200 SR.
2. Peningkatan Infrastruktur Air Limbah Terpusat IPAL Sewon Kab. Bantul, berupa Penambahan peralatan mekanikal dan elektrikal IPAL Sewon, optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dan Pembangunan Gedung laboratorium
3. Pembangunan jaringan pipa induk di Jl. Kaliurang (575m).

4. Pembangunan Sanimas Kab. Sleman, Kab. Bantul dan Kab. Kulonprogo berupa Penyediaan sarana sanitasi Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman berbasis masyarakat.

2.1.3.1.3.1.4 Sub Urusan Persampahan

Pelayanan persampahan DIY terdiri dari pelayanan melalui TPST 3R dan pelayanan pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan menuju TPA. Terdapat 3 TPA di wilayah DIY yaitu TPA Piyungan melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Kartamantul: Yogyakarta, Sleman dan Bantul), TPA *Sanitary Landfill* Kulon Progo dan TPA *Sanitary Landfill* Gunungkidul. Cakupan pelayanan persampahan perkotaan DIY dijelaskan melalui tabel berikut ini.

Tabel 2-45 Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan per Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018

No.	Kabupaten /Kota	Jumlah Penduduk 2018	Timbunan Sampah (m ³ / hari)	Pengelolaan Mandiri		3R (TPS3R+Bank Sampah, dll)		Volume Sampah yang terangkut ke TPA	
				(%)	(m ³ / hari)	(%)	(m ³ / hari)	(%)	(m ³ / hari)
1	Kabupaten Bantul	936.408	1940.75	4.28	83	10.68	91.39	24.5	476.48
2	Kabupaten Gunungkidul	763.814	1950.15	22.76	443.86	29.5	51.8	9.43	183.82
3	Kabupaten Kulon Progo	447.057	779.98	23.99	187.1	7.64	30.2	23.08	180
4	Kabupaten Sleman	1.058.368	2648.73	9.18	243.17	19.14	279.33	29.01	768.46
5	Kota Yogyakarta	410.921	1477.44	25.74	380.26	1.82	26.89	70.74	1045.11
Jumlah		3.616.568	8797.05	15.2	1337.39	5.45	479.61	30.17	2653.87

Sumber : *Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sanitasi DI Yogyakarta, Satker PSPLP DIY, 2018; * data jumlah penduduk dari Biro Tata Pemerintahan, Setda DIY 2019.*

Pada akhir tahun 2018 penduduk DIY sejumlah 3.616.568 Jiwa (Biro Tata Pemerintahan, Setda DIY, 2019). Melalui program penanganan sanitasi, Jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak sejumlah 3.486.074 jiwa atau sama dengan 96,39% dari jumlah penduduk DIY. Selain melalui program APBD, peningkatan penduduk berakses sanitasi juga didukung melalui kegiatan APBN, yaitu:

1. Peningkatan Kinerja TPA Wukirsari Kabupaten Gunungkidul, berupa perluasan areal TPA seluas 3000 m² yang diharapkan dapat memperpanjang umur TPA dengan kinerja 125 m³/hari.

2. Peningkatan Kinerja TPA Banyuroto Kabupaten Kulonprogo, berupa perkuatan *retaining wall* dan pembangunan jembatan timbang agar TPA dapat berfungsi optimal dengan kinerja 70-90 m³/hari.
3. Pembangunan TPS 3R di Kab. Sleman dan Kab. Kulonprogo, ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

2.1.3.1.3.1.5 Sub Urusan Drainase

Fokus penanganan drainase adalah permasalahan genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY). Penyelesaian permasalahan genangan di KPY bersifat lintas subbidang dan lintas wilayah, sehingga koordinasi dan sinkronisasi penanganan perlu dilakukan agar hasilnya optimal. Pada tahun 2016 kegiatan perencanaan penanganan genangan dilakukan untuk menghasilkan perencanaan penanganan genangan di KPY secara keseluruhan termasuk identifikasi aset dan kelembagaan.

Jumlah genangan pada KPY berdasarkan hasil Identifikasi dan Evaluasi Penanganan Genangan di KPY oleh Bidang Cipta Karya pada tahun 2016 sebanyak 57 titik yaitu 29 titik lokasi (sisa target RPJMD 2013 s.d. 2017) dan 28 titik lokasi genangan baru. Sampai dengan tahun 2018 baru tertangani 2 titik yaitu di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Bantul dan Jalan Kaliurang Simpang MM UGM, Sleman.



Gambar 2-32 Pembangunan Saluran Drainase di Jalan Kaliurang Simpang MM UGM Kabupaten Sleman

2.1.3.1.3.1.6 Sub Urusan Jalan

Sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 118/KEP/2016 tentang Penetapan Status Ruas *Jalan* Provinsi terjadi perubahan panjang total ruas jalan provinsi menjadi sepanjang 760,45 Km. Ruas jalan tersebut bertambah dari kondisi sebelumnya karena ada ruas-ruas jalan yang beralih status dari jalan

Kabupaten menjadi jalan Provinsi dan ada pula ruas jalan provinsi yang menjadi jalan nasional. Berikut disajikan daftar ruas jalan Provinsi tahun 2016.

Tabel 2-46 Daftar Ruas Jalan Provinsi, Tahun 2016

No	Lokasi Ruas Jalan Provinsi	Panjang Ruas (Km)
1	Kota Yogyakarta	-
2	Kabupaten Bantul	162,150
3	Kabupaten Kulon Progo	175,140
4	Kabupaten Gunungkidul	306,840
5	Kabupaten Sleman	116,320
	Total Panjang Ruas Jalan	760,450

Sumber: Keputusan Gubernur DIY Nomor 118/KEP/2016

Di DIY telah terbangun jaringan Jalan Provinsi sepanjang 760,45 Km dan jembatan sejumlah 249 buah sepanjang 5.752 m. Sampai dengan tahun 2018 persentase jaringan Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) telah mencapai 72,92% atau sepanjang 554,530 km. Pencapaian jalan dalam kondisi mantap 72,92% dilakukan melalui kegiatan peningkatan jalan dan jembatan, rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan dan jembatan, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dan peningkatan jalan yang didukung Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan.

Berdasarkan hasil inspeksi jalan dan jembatan terhadap seluruh ruas jalan dan jembatan (100%), pada akhir tahun 2018 diketahui jalan dalam kondisi mantap sepanjang 554,53 km atau 72,92%. Kondisi jalan mantap tersebut telah melampaui target yang dicapai melalui program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dan program peningkatan jalan dan jembatan. Kondisi Jalan Provinsi hingga akhir tahun 2018 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2-47 Kondisi Jalan Provinsi 2018

No	Kondisi Jalan	2018				
		Panjang Jalan		Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
		KM	%		KM	%
1	Mantap	554,53	72,92	Baik	333,205	43,82
				Sedang	221,325	29,10
2	Tidak Mantap	205,92	27,08	Rusak Ringan	140,370	18,46
				Rusak Berat	65,550	8,62
		760,45	100,00		760,45	100,00

Sumber: DinasPUP & ESDM 2018

Sampai dengan akhir tahun 2018 pengembangan aksesibilitas jalan di wilayah DIY difokuskan pada percepatan penyelesaian pembangunan Jalur jalan Pantai Selatan (Pansela) dan pembangunan Jalan Prambanan – Gading. Pembangunan Jalur Jalan Pantai Selatan (Pansela) sejalan dengan konsep

“Among Tani Dagang Layar” yang membentang di sepanjang Pantai Selatan Yogyakarta dari Congot (Kabupaten Kulon Progo) melintasi Parangtritis (Kabupaten Bantul) sampai dengan Duwet (Kabupaten Gunungkidul) sepanjang 116,07 KM. Pembangunan JJLS dilaksanakan secara bersama - sama oleh Pemda DIY (melalui Dana Kesitimewaan DIY untuk penyediaan lahan) dan Kementerian PUPR (melalui dana APBN untuk pembangunan fisik konstruksi).

Pembangunan jalan Prambanan – Gading (Prambanan – Gayamharjo (Jembatan Sembada Handayani) – Tawang (Ngoro Oro) – Ngalang – Nguwot – Gading) sepanjang 28 KM merupakan jalur alternatif jalan nasional Yogyakarta – Piyungan – Patuk – Gading – Wonosari. Pembangunan ruas jalan Prambanan – Gading dilaksanakan bersama oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Sleman (untuk penyediaan lahan) dan Pemda DIY (melalui APBD dan Dana Keistimewaan DIY untuk pembangunan fisik konstruksi).



Gambar 2-33 Pembangunan Jalan/Jembatan Ngalang-Nguwot-Gading, Kab. Gunungkidul

Panjang jalan yang telah terbangun sampai dengan tahun 2018 adalah sepanjang 970,81 KM atau 97,46% dari kebutuhan panjang jalan yang direncanakan untuk menghubungkan pusat pusat produksi sepanjang 996,16 Km (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017–2022) yang terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 247,91 Km, Jalan Provinsi sepanjang 716,90 KM dan jalan Prambanan – Gading yang terbangun sepanjang 6 Km, sehingga masih terdapat 25,35 KM panjang jalan yang perlu dibangun dari target yang direncanakan. Capaian tersebut (97,46% pada akhir tahun 2018) telah melampaui target aksesibilitas jalan pada RPJMD 2017 – 2022 sebesar 103,37% dari target sebesar 94,28%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2022 telah mencapai 97,46%.

2.1.3.1.3.1.7 Sub Urusan Jasa Konstruksi

UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, mencantumkan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi pada sektor Jasa Konstruksi meliputi : penyelenggaraan pelatihan Tenaga Ahli konstruksi, dan penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi. Selain hal tersebut, terdapat pula kewenangan tambahan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan tujuan yang akan dicapai, salah satu di antaranya adalah : dalam rangka meningkatkan kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri, kewenangan gubernur antara lain yaitu: meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan SNI.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di DIY bertujuan, juga untuk mewujudkan infrastruktur yang memiliki nilai manfaat terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, selain untuk memenuhi mandat tersebut. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ini dilakukan dengan :

- 1) pengendalian mutu produk konstruksi melalui pengujian bahan bangunan maupun komponen konstruksi oleh Laboratorium Pengujian Konstruksi yang terakreditasi;
- 2) penyebarluasan informasi ke-PU-an serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi, pameran, Klinik Konstruksi, pengembangan muatan materi sistem informasi ke-PU-an, dan;
- 3) pembinaan jasa konstruksi melalui fasilitasi pelatihan serta sertifikasi keahlian bagi para tenaga kerja konstruksi. Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi diukur berdasarkan pembobotan secara proporsional persentase kinerja : Pelayanan Jasa Pengujian, Pembinaan Jasa Konstruksi, dan Pengkajian & Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum.

Hingga akhir tahun 2018 kinerja Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi sebesar 63,26 % (bobot 50%) dan kinerja Pelayanan Jasa Pengujian Konstruksi sebesar 70,42% (bobot 50%), sehingga kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mencapai 66,84%. Capaian ini telah melampaui target sebesar 140,16% dari target sebesar 47,69%.

Kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi
 - a. Jumlah tenaga ahli bersertifikat sd. Tahun 2018 sebanyak 1.226 orang.
 - b. Jumlah orang yang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi sd. Tahun 2018 sebanyak 413.298 orang.

- c. Jumlah kegiatan pengembangan muatan materi sistem informasi jasa konstruksi sd. Tahun 2018 sebanyak 56 kegiatan.
2. Kegiatan Pelayanan Jasa Pengujian Kontruksi
Capaian indikator kinerja Pelayanan Jasa Pengujian pada tahun 2018 sebesar 2.360 LHU.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi masih harus dilakukan peningkatan dalam mendukung indikator sasaran nilai akuntabilitas pemerintah. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan pelayanan uji laboratorium yaitu akreditasi parameter. Laboratorium pengujian bahan bangunan memiliki 55 parameter dan laboratorium pengujian tanah dan batuan memiliki 45 parameter. Dari 100 parameter tersebut baru terakreditasi sebanyak 22 parameter.

2.1.3.1.3.2 Urusan Penataan Ruang

Amanat Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang seperti yang tersebut pada pasal 3 , bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Penyelenggaraan penataan ruang meliputi aspek-aspek pengaturan , pembinaan , pelaksanaan dan pengawasan , yang mana masing-masing aspektersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dalam mewujudkan ruang wilayah Nasional, provinsi, kabupaten kota dan Kawasan lainnya.

Adapun tujuan penataan ruang di DIY adalah mewujudkan DIY sebagai pusat Pendidikan, Budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor, berbasis mitigasi bencana, keistimewaan tata ruang DIY dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan.

Peninjauan Kembali (PK) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2009–2029 telah dilakukan pada tahun 2015. Fokus Program Perencanaan Tata Ruang setelah Peninjauan Kembali RTRW Provinsi DIY Tahun 2009–2029 yaitu pada perubahan struktur ruang, perubahan pola ruang dan simpul kegiatan utama. Adapun beberapa hal yang menjadi dasar peninjauan kembali RTRW Provinsi DIY Tahun 2009–2029 yaitu:

- 1) Adanya perubahan/penyempurnaan peraturan atau rujukan sistem penataan ruang yang berlaku mengikat bagi Pemerintah Daerah DIY dan belum pernah digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang sebelumnya. Salah satunya yaitu amanat dari Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, dimana salah satu keistimewaan DIY yang ditetapkan adalah urusan Tata Ruang sebagai dasar dalam pengaturan pengelolaan pemanfaatan ruang pada kawasan Kasultanan dan Kadipaten.

- 2) Terjadi perubahan kebijakan pemerintah/sektor untuk pembangunan skala besar atau kegiatan penting sehingga tidak dapat ditampung oleh pola dan struktur ruang RTRW Provinsi DIY Tahun 2009 - 2029 yang ada. Perubahan tersebut akan mengganggu rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang sehingga mungkin dapat menurunkan efisiensi pembangunan dan atau kerusakan lingkungan. Beberapa kebijakan tersebut antara lain penentuan kawasan cagar alam geologi oleh Kementerian ESDM, pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), dan rencana pembangunan bandara baru.
- 3) Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat dan seringkali radikal dalam hal memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan meminimalkan kerusakan lingkungan, sehingga kapasitas daya dukung lingkungan dapat ditingkatkan oleh karena hal ini harus selalu diantisipasi untuk keperluan optimasi pola dan struktur tata ruang yang ada.
- 4) Adanya bencana alam yang cukup besar sehingga mengubah struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ada, dan memerlukan relokasi kegiatan budidaya maupun lindung yang ada untuk kepentingan pembangunan pasca bencana tersebut. Salah satu bencana alam yang berpengaruh terhadap struktur dan pola ruang yaitu erupsi gunung merapi pada tahun 2010 yang berakibat pada penetapan kawasan rawan bencana.

Peninjauan Kembali (PK) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DIY Tahun 2009 – 2029 dilanjutkan pada tahun 2016 oleh Dinas PTR DIY, dan pada tahun 2019 ini sudah sampai pada tahap pembahasan di PANSUS DPRD DIY .

Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan untuk Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang dengan arah kebijakan penyusunan dokumen rencana tata ruang, penetapan dokumen rencana tata ruang, penguatan kelembagaan penataan ruang daerah , penyebarluasan informasi penataan Ruang dan pembinaan penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten /Kota.

Selanjutnya untuk strategi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang dengan arah kebijakan sinkronisasi regulasi penataan ruang (vertikal dan horisontal) , mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang antar wilayah dan sektoral, mengefektifkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW melalui monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang, menyusun instrument pengendalian pemanfaatan ruang dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan penataan ruang.

Adapun kinerja untuk sasaran pemanfaatan ruang, pencapaian untuk tahun 2018 mengalami peningkatan dan melampaui target, dari target kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW provinsi meningkat capaiannya sebesar 77,05%. Indikator ini diukur dari perbandingan luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW dibandingkan dengan luas total wilayah pemanfaatan ruang. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini berarti 93,39% dari target kinerja akhir RPJMD sebanyak 82,5%, sehingga kinerja untuk IKU DIY tahun 2018 masuk dalam kriteria tinggi. Capaian ini menjadi tantangan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mempertahankan maupun meningkatkan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang seiring dengan banyaknya kawasan yang berkembang dengan pesat antara lain kegiatan perdagangan dan jasa, industri, pembangunan perumahan, dan aktivitas sosial ekonomi lainnya.

Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat dengan penjelasan sebagai berikut:

Berdasarkan Permen ATR No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Permen ATR No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Audit Tata Ruang maka capaian indikator prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2018 diperoleh dari hasil perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan perwujudan program pemanfaatan ruang dan berdasarkan perbandingan antara peta pola ruang dengan penggunaan lahan eksisting.

Berikut adalah tabel target dan realisasi kinerja untuk tahun 2018.

Tabel 2-48 Realisasi Kinerja Urusan Tata Ruang Tahun 2018

No	Indikator	Capaian 2017	2018			Target akhir RPJMD (2022)	Capaian s/d 2018 terhadap 2022 (%)
			Target	Realisasi	% realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang	75,09	76,5	77,05	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} = \frac{77,05}{76,5} = 100,72$	82,5	93,39

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2017 lalu adalah sebesar 75,09% sedangkan pada tahun 2018 ini mencapai 77,05% atau lebih tinggi dari target tahun 2018 sebesar 76,5% sehingga prosentase realisasi tahun 2018 adalah 100,72%. Dengan target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 82,5% maka capaian tahun 2018 terhadap target akhir RPJMD tahun 2022 adalah sebesar 93,39%.

2.1.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Kebijakan pembangunan nasional sektor perumahan yang diamanatkan melalui Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat menyatakan bahwa Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota melakukan pelayanan dasar meliputi:

1. Rumah layak huni dan terjangkau;
2. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Dalam Pasal 97, Undang-Undang No.1 Tahun 2011 ditegaskan bahwa pada tahap pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh perkotaan. Dalam hal penetapan tersebut, pemerintah Kabupaten/Kota wajib memenuhi persyaratan yang telah tercantum dalam pasal 98 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi serta RTRW Kabupaten/Kota, yang berarti sesuai dengan arahan lokasi permukiman yang telah ditetapkan dalam RTRW terkait;
- b. Sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan yang telah ditetapkan dalam rencana detail tata ruang wilayah, maupun menurut Peraturan Menteri PU No.06/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
- c. Memiliki prasarana dan sarana dasar serta utilitas umum yang baik kondisi dan kualitasnya, atau minimal memenuhi Permen PU No.14/2010 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Memenuhi kesesuaian koefisien dasar bangunan (KDB) dan koefisien lantai bangunan (KLB) dengan persyaratan yang ditetapkan oleh setiap daerah, atau berpedoman pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan;
- e. Memenuhi kualitas bangunan yang baik sesuai dengan SNI yang terkait;
- f. Memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dapat berkesinambungan.

Di Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, lokasi Permukiman Kumuh Perkotaan telah ditetapkan dengan SK Bupati/ Walikota yang juga telah dilengkapi dengan profil kawasan kumuh. SK Bupati tersebut yaitu:

- SK Bupati Sleman Nomor 14.31/Kep.KDH/A/2016 tentang Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan.
- Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 132/KPTS/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 287/KPTS/2014 tentang Kawasan Permukiman Kumuh dan Tahapan Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2019.
- SK Bupati Kulon Progo No. 224/A/2016 tentang Lokasi Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2019.
- SK Bupati Bantul Nomor 220 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 364 Tahun 2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul.
- SK Walikota Yogyakarta Nomor 216 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kota Yogyakarta.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 - 15 hektar merupakan tanggung jawab dari pemerintah provinsi. Penanganan kumuh sesuai dengan “Gerakan Nasional 100-0-100” yaitu tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%, dilakukan melalui identifikasi sampai dengan penanganan kawasan kumuh yang telah ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota di DIY. Telah dipilah penanganan kawasan kumuh tersebut berdasar regulasi yang ada serta penanganan yang telah dilakukan sebagai berikut.

Tabel 2-49 Penanganan Kawasan Kumuh Berdasarkan Kewenangan

No	Kewenangan	Luas (Ha)	Penanganan (Ha)		Sisa Kawasan Kumuh di akhir 2018 (Ha)
			2017	2018	
1	Pusat (Luasan > 15 ha)	682,02	371,49	39,09	271,44
2	Provinsi (Luasan 10 - 15 ha)	110,39	31,97	72,04	6,38
3	Kabupaten/Kota (Luasan < 10 ha)	173,1	65,82	0	107,28
Total		965,51	993,46	965,51	385,10

Sumber: Dinas PUP ESDM, 2018



Gambar 2-34 Peningkatan kualitas prasarana sarana dan utilitas (PSU) di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul

Kebutuhan rumah bagi penduduk dari waktu ke waktu bertambah sesuai dengan peningkatan jumlah KK, karena rumah merupakan kebutuhan pokok penduduk disamping kebutuhan pangan dan sandang. Derajat kesehatan penghuni rumah dapat ditentukan dari tingkat kualitas rumah. Rumah yang sehat dan baik maka akan dapat memberikan rasa nyaman bagi penghuninya dan sekaligus membentuk rumah tangga yang sehat dan sejahtera. Untuk mewujudkan rumah layak huni harus dipenuhi dengan beberapa syarat. Syarat tersebut antara lain seperti luas lantai, jenis atap rumah, dinding dan atap yang digunakan, serta kelengkapan lainnya seperti sumber penerangan, sumber air minum dan fasilitas air minum, serta fasilitas sanitasi.

Pada tahun 2018 terdapat backlog hunian sebesar 481.852 unit (BPS, 2018) (Kepemilikan : 294.285 unit dan Penghunian : 127.567 unit), backlog RTLH 65.578 unit. Untuk mengurangi backlog kepemilikan tersebut dilakukan penyediaan rumah swadaya dan rumah umum serta peningkatan kualitas RTLH. Penanganan rumah tidak layak huni tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah pusat juga memiliki andil dalam mengatasi permasalahan ini. Penanganan RTLH tahun 2018 sebanyak 7.722 didanai melalui anggaran DAK, BPS, APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi dan CSR. Sehingga tahun 2018 target penduduk dengan hunian yang layak telah mencapai 95,79% atau sejumlah 1.151.593 Rumah tangga dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2017-2022 yang sebesar 97,50%, telah tercapai 98,24% dari total rumah tangga DIY yaitu sebanyak 1.202.240 jiwa (BSD, 2018).



Gambar 2-35 Pengadaan Barang Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Kokap Kab. Kulonprogo

2.1.3.1.5 Urusan Ketenteraman Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari capaian Indeks Ketahanan Nasional di Daerah, ukuran yang menggambarkan ketahanan daerah pada hasta-gatra (8 gatra) ketahanan nasional yang meliputi: 3 (tiga) Gatra Alamiah berupa geografi, demografi dan sumber kekayaan alam sebagai "modal dasar" pembangunan dan 5 (lima) Gatra Sosial (dinamis) berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya (sosbud) dan pertahanan keamanan (Hankam). Pada tahun 2018, DIY memiliki nilai indeks 3,085 (sangat baik) dan menempati ranking 1 se-Indonesia. Kondisi pada 8 gatra ketahanan nasional di DIY terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2-50 kondisi Gatra Ketahanan Nasional di DIY

Gatra	Rangking Nasional	Skor Indeks
Geografi	8	3,27
Demografi	3	3,45
Sumber Kekayaan Alam	24	2,13
Ideologi	1	2,94
Politik	1	3,45
Ekonomi	16	2,87
Sosial Budaya	3	3,08
Pertahanan dan Keamanan	5	2,8

Sumber: Labkurtannas Lemhannas RI, 2018

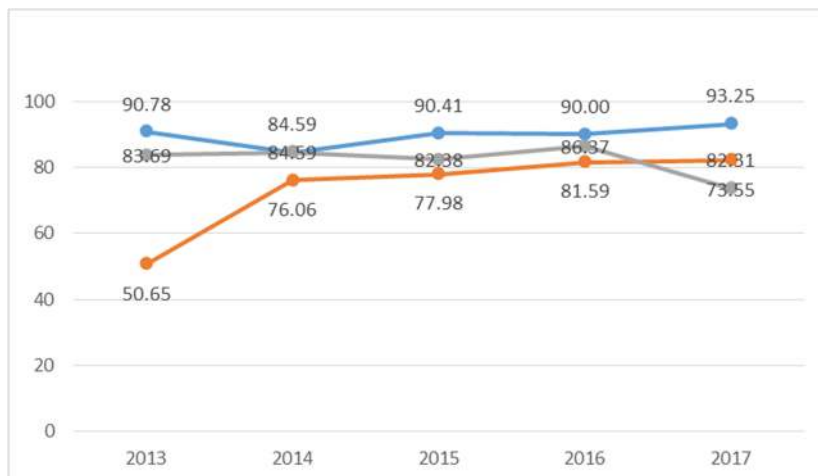
Sementara itu, perkembangan capaian IDI selama periode 2013-2017 menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2013 capaian IDI DIY mencapai 72,36

kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai 85,58 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 (yang dirilis pada Oktober 2018), Angka IDI DIY tercatat sebesar 83,61 turun sebesar 1,97 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya tetapi masih berada dalam kategori “baik”. Dari 3 aspek penilaian IDI, 2 aspek mengalami peningkatan, yaitu Aspek Kebebasan Sipil dan Aspek Hak-hak Politik dan 1 aspek mengalami penurunan drastis, yaitu Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi.



Sumber: BPS, 2018

Gambar 2-36 Grafik Indeks Demokrasi Indonesia DIY 2013-2017



Sumber: BPS, 2018

Gambar 2-37 Grafik Perkembangan Aspek IDI DIY 2013-2017

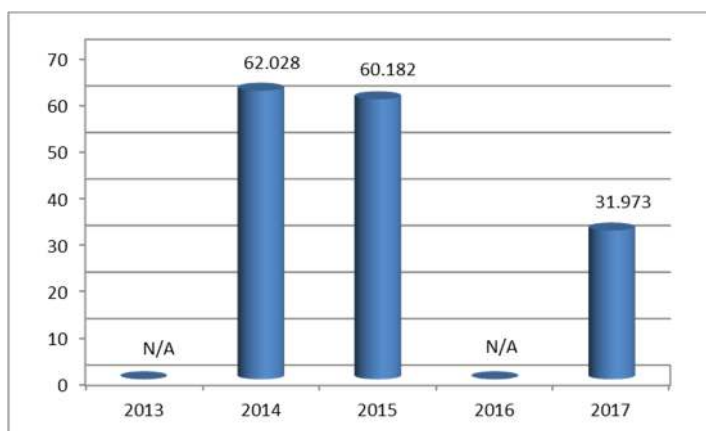
Jika dilihat dari Indeks variabel IDI, terdapat enam variabel penyusun IDI DIY yang mengalami peningkatan dan tiga variabel yang mengalami penurunan pada tahun 2017. Tiga variabel yang mengalami penurunan tersebut adalah

Kebebasan berpendapat, Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, dan Peradilan yang Independen. Penurunan tiga variabel tersebut cukup signifikan sehingga menurunkan nilai IDI secara keseluruhan.

Lebih lanjut, catatan penting lain terkait nilai IDI DIY tahun 2017 adalah terdapat lima indikator yang nilai capaiannya dibawah 60 dengan kategori buruk, yaitu a). Ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat (12,50); b).Persentase anggota perempuan DPRD provinsi (42,42); c).Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif (25,00); d).Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah (8,33); dan e).Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi (25,00).

Berkaca dari capaian lima indikator yang berkategori buruk tersebut, pemerintah semakin dituntut agar dapat menjamin kebebasan berpendapat masyarakat tanpa disertai ancaman kekerasan dalam rangka meningkatkan kehidupan berdemokrasi di D.I. Yogyakarta. Kerjasama lembaga eksekutif dan

Kondisi masyarakat lainnya yang juga patut diperhatikan adalah kasus penyalahgunaan narkoba. Permasalahan ini menjadi penting untuk ditangani karena berkaitan dengan kelangsungan generasi bangsa ke depan.



Sumber: BNN, 2018(Bakesbangpol)

*) 2013 dan 2016 tidak ada survey

Gambar 2-38 Grafik Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba DIY 2013 - 2017

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (BNN), perkembangan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di DIY menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2014 kasus penyalahgunaan narkoba tercatat sebanyak 62.028 orang. Selama periode 2015-2017, terjadi penurunan signifikan kasus penyalahgunaan narkoba, yaitu sebesar 46,87% atau sebanyak 28.209 orang dari 60.182 orang

tahun 2015 menjadi 31.973 orang tahun 2017. Penurunan angka prevelansi penggunaan narkoba ini masih harus di dukung dengan peningkatan pengetahuan mengenai bahaya narkoba dari sedini mungkin. Sosialisasi dan edukasi terkait hal tersebut masih bersifat insidental dimana tingkat keberlangsungan program rendah dan efektifitas program masih dipertanyakan. Selain itu kemungkinan munculnya *New Psychoactive Substances* atau narkoba sintetis jenis baru juga patut diwaspadai.

2.1.3.1.6 Urusan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut Undang-undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial yang dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ditempuh melalui pengembangan kemampuan dan profesionalitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang dikenal dengan istilah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) . Selain itu, perlu menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial untuk mendukung penanganan permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

2.1.3.1.6.1 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tabel 2-51 Perkembangan Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS) di DIY tahun 2016 - 2018

No	Jenis PMKS	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Anak Balita Terlantar	1.826	1.309	762
2	Anak Terlantar	14.450	13.960	11.009
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	184	219	101
4	Anak Jalanan	327	348	67
5	Anak dengan Kedisabilitas	3.095	2.983	1.931
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	18	11	11
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus	18	101	6
8	Lanjut Usia Terlantar	46.242	45.765	42.417
9	Penyandang Disabilitas	26.177	26.547	27.094
10	Tuna Susila	385	406	290

No	Jenis PMKS	Tahun		
		2016	2017	2018
11	Gelandangan	171	236	190
12	Pengemis	150	170	134
13	Pemulung	450	511	467
14	Kelompok Minoritas	1.541	1.168	2.313
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan	209	170	247
16	Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)	2.834	3.104	3.712
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	468	500	466
18	Korban Trafficking	1	2	2
19	Korban Tindak Kekerasan	735	829	762
20	Pekerja Migran Bermasalah	329	361	303
21	Korban Bencana Alam	1.050	433	61
22	Korban Bencana Sosial	115	29	0
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	12.840	12.405	12.454
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	4.932	4.943	4.960
25	Keluarga Fakir Miskin	367.540 (PBDT 2015)	367.540 (PBDT 2015)	550.868 (BDT up date Mei 2018)

Sumber: Dinas Sosial DIY 2019

Data PMKS di DIY dari tahun 2016-2018 terus mengalami peningkatan pada Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakakatan, Orang dengan HIV/AIDS, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis dan Fakir Miskin. Pemberian jaminan sosial rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial perlu diprioritaskan untuk kelompok tersebut tanpa mengesampingkan intervensi untuk PMKS lainnya.

Layanan publik tersedia bagi semua warga masyarakat termasuk mereka yang menyandang disabilitas. Akan tetapi, bagi para penyandang disabilitas ada masalah aksesibilitas.. Ini mencakup hambatan arsitektural, hambatan informasi dan komunikasi, dan hambatan internal diri penyandang disabilitas sendiri serta kurangnya dukungan masyarakat bagi pengembangan diri para penyandang

disabilitas, yang secara keseluruhan telah memperburuk akses para penyandang disabilitas ke layanan publik.

Penyandang Disabilitas mengalami keterbatasan dalam hambatan untuk melakukan aktifitas penyandang disabilitas fisik : (tubuh, netra, rungu, wicara), penyandang disabilitas mental : (mental retardasi dan eks psikotik), dan penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda. Dari data tahun 2017 sebanyak 26.547 orang dan di tahun 2018 sebanyak 27.094 orang. Peningkatan ini disebabkan kecelakaan yang menyebabkan cacat permanen dan kondisi kedisabilitasan dari lahir.

Pada aspek pekerjaan, menurut data Riskesdas 2018, di DIY proporsi Penyandang Disabilitas Usia Produktif cukup tinggi, berada di urutan ke-3 nasional.



Sumber : Riskesdas 2018

Gambar 2-39 Proporsi Disabilitas Usia Produktif di Indonesia Tahun 2018

Dari data grafik diatas dapat dilihat bahwa penyandang disabilitas pada usia produktif (18-59) Nasional berada pada angka 22 % dimana angka untuk DIY lebih tinggi (di atas 30 %). Akan tetapi pemberdayaan penyandang disabilitas di DIY masih belum optimal, karena baru terdapat 20 perusahaan di DIY (Desember 2018) yang memperkerjakan penyandang disabilitas. Menurut UU No 8 thn 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 53 ayat 1 dan 2 memuat tentang kewajiban Pemerintah/pemerintah Daerah, BUMN/BUMD untuk memeperkerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Sedangkan untuk perusahaan swasta diwajibkan mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari seluruh karyawan.

Untuk Kelompok Minoritas di DIY adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosial akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga rentan mengalami masalah sosial. Contoh : Perilaku seks

menyimpang (Gay, Waria dan Lesbian). Angka ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi dimana data tahun 2015-2016 sebanyak 1.541 kasus, pada tahun 2017 sebanyak 1.168 kasus dan di tahun 2018 sebanyak 2.313 kasus.

Permasalahan yang terjadi pada Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan adalah kesulitan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan bermasyarakat dan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupan secara normal. Sehingga data tahun 2017 sebanyak 170 orang meningkat menjadi 247 orang pada tahun 2018.

Terkait HIV/AIDS, pada tahun 2014 berjumlah 2.045 dan mengalami peningkatan di tahun 2015 sebanyak 3.491 orang. Sedangkan di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 2.834 orang. Peningkatan terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah 3.104 dan meningkat kembali di tahun 2018 dengan jumlah 3.712 orang.

Pada Fakir Miskin di DIY terlihat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 berdasarkan data dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 menunjukkan jumlah fakir miskin di DIY sebanyak 288.391 keluarga. Tahun 2015-2017 menggunakan data dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 sebanyak 367.540 keluarga dan mengalami peningkatan jumlah fakir miskin di DIY tahun 2018 sebanyak 550.868 keluarga berdasarkan data dari PBDT 2015 yang sudah di update per Mei 2018. Intervensi terhadap fakir miskin sudah banyak dilakukan melalui perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat miskin yang sudah tidak produktif, dan bagi merek yang masih produktif diintervensi melalui pemberdayaan sosial dalam bentuk pelatihan berusaha dan bantuan permodalan.

2.1.3.1.6.2 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Tabel 2-52 Jenis dan Jumlah PSKS di DIY Tahun 2014-2018

No	Jenis PSKS	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pekerja Sosial Profesional/ Pekerja sosial fungsional	37	35	35	34	36
2	Tenaga kesejahteraan Sosial Masyarakat / PSM	4.534	4.534	4.767	4.960	5.020
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	505	837	1.034	1.058	1.030
4	LKS / Orsos	395	403	370	372	381
5	Karang Taruna Desa/Kel	438	438	438	438	438
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	15	14	12	11	12

No	Jenis PSKS	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
7	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	124	138	163	193	223
8	Penyuluh Sosial	5	5	5	59	53
9	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK),	78	78	78	78	78
10	Dunia usaha Yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	26	42	42	42	45

Sumber: Dinas Sosial DIY 2019

Keberadaan PSKS penting sebagai mitra pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap PMKS. Pembinaan terhadap PSKS penting terutama untuk mengantisipasi kejadian kebencanaan dan kerawanan sosial. Data PSKS di DIY dari tahun 2014-2018 secara umum mengalami peningkatan karena pembinaan terhadap PSKS terus dilakukan dan partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial juga meningkat.

2.1.3.1.6.3 Data PSKS yang memperoleh peningkatan kapasitas dan kualitas (rabu, 6 februari 2019)

Tabel 2-53 Data PSKS yang Memperoleh Peningkatan Kapasitas dan Kualitas di DIY Tahun 2015-2018

No	Uraian	Tahun				Satuan
		2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah PSKS	6.711	6.974	7.274	7.349	Orang
2	PSKS Yang Tertangani	10	9	8	7	Jenis
3	PSKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas	6.711	6.974	7.274	7.349	Orang
4	PSKS Yang Diberikan Bantuan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas	2.992	2.140	1.940	2.211	Orang
5	Prosentase PSKS yang memperoleh Bantuan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas (%)	44,58	30,69	26,67	30,09	persen

Sumber : Dinas Sosial 2019

Dari data diatas menunjukkan bahwa masih kurangnya PSKS yang mendapatkan bantuan untuk Peningkatan Kapasitas dan Kualitas dari tahun ke tahun. Bantuan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas PSKS terlihat meningkat dari tahun 2017 sebanyak 1.940 orang menjadi 2.211 orang di tahun 2018.

2.1.3.1.6.4 Panti sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial apabila dilihat dari aspek lokus nya, lazim dikelompokkan dalam dua kategori yaitu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di dalam panti dan di luar panti. Dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial

terhadap PMKS melalui panti, Pemda DIY mempunyai UPT yang berada di bawah Dinas Sosial DIY yang bertugas melaksanakan pelayanan perlindungan, rehabilitasi sosial/ rehabilitasi medis yang terdiri dari: (a) Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD); (b) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW); (c) Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL); (d) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR); (e) Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA); (f) Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW).

Tabel 2-54 Nama Balai/ Panti Sosial dan Daya Tampungnya di DIY Tahun 2014 - 2018

No	Nama Balai / Panti	Daya Tampung				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	BRPTD	185	185	185	185	185
2	BRSBKL					
	a. Gepeng	50	50	50	50	50
	b. Eks psikotik	50	100	100	100	250
3	BPRSW	50	50	60	60	60
4	BPSTW	214	214	214	214	214
5	BRSPA	140	140	120	120	140
6	BPRSR	100	100	100	100	80

Sumber: Dinas Sosial DIY 2019

Tabel di atas menunjukkan daya tampung di 6 Balai/Panti sosial milik Dinas Sosial DIY. Dalam realitanya masih ada Balai yang menampung lebih dari pada kapasitasnya.

Untuk Sarana dan Prasarana di Balai-balai juga cukup memprihatinkan untuk menampung PMKS di DIY ini, dari yang rusak ringan hingga rusak sedang. Berikut tampilan Sarana dan Prasarana yang rusak di Balai-balai milik Dinas Sosial DIY.



Sumber: Dinas Sosial 2019

Gambar 2-40 Kondisi salah satu gedung BPRSW

Gedung ini digunakan untuk berbagai kegiatan yaitu: Ruang ketrampilan Jahit, Ruang Ketrampiln Bordir, Shelter dan Poliklinik menjadi satu.

Dalam penyelenggaraan pelayanan sosial di Balai/ Panti Sosial terdapat beberapa permasalahan, di antaranya:

1. Kurangnya SDM dimana jumlah pekerja sosial rasio nya cukup kecil dalam penanganan klien di antaranya:
 - a. Pada BRSBKL jumlah pramusosial hanya 13 orang untuk mendampingi 250 eks psikotik, tugas mereka setiap harinya melayani warga binaan sosial eks psikotik. Idealnya 1 pramu sosial mendampingi 10 eks psikotik
 - b. Pekerja Sosial di BRSBKL ada 6 Peksos yang harus menangani Gelandangan dan eks psikotik berjumlah total 300 orang.
 - c. BPRSR ada 4 Peksos menangani ABH dan Remaja Terlantar sebanyak 80 orang.
 - d. BRSPA ada 4 Peksos menangani Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Membutuhkan Perlakuan Khusus sebanyak 140 anak.
 - e. BRTPD ada 4 Peksos menangani Penyandang Disabilitas sebanyak 185 orang.
 - f. BPRSW ada 5 Peksos menangani Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Korban Tindak Kekerasan sebanyak 60 orang.
 - g. BPSTW ada 3 Peksos menangani Lanjut Usia Terlantar sebanyak 230 orang.
2. Kondisi bangunan balai mengalami kerusakan ringan dan sedang;
3. keterbatasan ruang wisma di BPRSW untuk penanganan warga binaan tindak kekerasan yang memiliki anak balita;
4. Klien BRSBKL mengalami kesulitan mendapatkan identitas kependudukan ;
5. Kurangnya peralatan CCTV pada BPRSR guna memantau/mengawasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH);

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di dalam panti, selain dilakukan oleh pemerintah juga dilakukan oleh masyarakat/non-pemerintah. Dari data Dinas Sosial tahun 2019, Panti non-pemerintah di DIY berjumlah 130 panti, yang terdiri dari Kabupaten Sleman terdapat 46 Panti, Kabupaten Bantul sebanyak 27 Panti, Kabupaten Kulonprogo sebanyak 25 Panti, Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 17 Panti dan Kota Yogyakarta sebanyak 15 Panti.

2.1.3.1.6.5 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan

Jumlah PMKS yang diberikan bantuan cenderung lebih sedikit dari pada Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan, berikut penghitungan persentase PMKS yang memperoleh bantuan.

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan =	Jumlah PMKS yang Diberikan Bantuan	x 100%
	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	

Tabel 2-55 Presentase PMKS yang Memperoleh Bantuan di DIY tahun 2014 - 2018

No	Sub Elemen	Tahun					Satuan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah PMKS Yang Diberikan Bantuan	27.137	27.332	22.624	13.278	19.087	Orang
2	Jumlah PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan	489.129	477.683	486.087	484.050	660.627	Orang
3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan	5.55	5.72	4.65	2.74	2.89	persen

Sumber : Dinas Sosial 2018, diolah

Berdasarkan penghitungan rumus, dapat kita lihat pada tabel diatas bahwa terjadi peningkatan dari tahun 2014 sebesar 5,55 % menjadi 5,72 % di tahun 2015, dan terdapat trend penurunan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Persentase tersebut masih sangat kecil untuk PMKS yang memperoleh bantuan di DIY. Bantuan dari pemerintah tersebut berupa bantuan dalam bentuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP), permakanan, Bantuan Sosial (Bansos) dan Jaminan Hidup (Jadup).

Data Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan di DIY tahun 2014-2018 yang dimaksud adalah PMKS yang memperoleh bantuan dari APBD dan APBN dari tahun 2014-2018.

2.1.3.1.6.6 Persentase PMKS Skala Provinsi yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Tabel data di bawah ini menunjukkan persentase PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Jenis PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar yaitu lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas. Peran provinsi dalam pemberian

bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebagai bentuk afirmasi terhadap penyelesaian permasalahan PMKS sesuai kemampuan keuangan daerah. Di samping itu kewenangan pemberian bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar terhadap PMKS di luar panti merupakan kewenangan kabupaten/kota.

Tabel 2-56 Persentase PMKS Skala Provinsi yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di DIY Tahun 2015 - 2017

No	Sub Elemen	Tahun			Satuan
		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah PMKS (Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas) yang memperoleh bantuan untuk kebutuhan dasar	9.879	6.561	75.295	orang
2	Populasi PMKS (Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas) yang memperoleh bantuan untuk kebutuhan dasar	58.802	72.419	75.295	orang
3	Persentase PMKS (Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas) yang memperoleh bantuan untuk kebutuhan dasar	16,81	9,06	7,95	persen

Sumber : Dinas Sosial DIY 2018

2.1.3.1.6.7 Persentase WKSBM yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesos

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah alat, wadah, saran maupun media yang digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan usaha kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Wahana ini berupa jaringan kerja kelembagaan sosial komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk untuk mensinergikan pelaksanaan tugas dibidang usaha kesejahteraan sosiai seperti kelompok arisan, kelompok usaha bersama, lumbung desa dan nilai budaya lokal. Tujuan dari WKSBM yaitu : (1) Meningkatnya kepekaan, kepedulian dan kesetiakawanan sosial, (2) Meningkatnya peran aktif masyarakat dibidang kesejahteraan sosial, dan (3) Terciptanya pelebagaan kesejahteraan sosial oleh kelompok masyarakat secara berkelanjutan di tingkat lokal.



Sumber: Dinas Sosial 2019

Gambar 2-41 Grafik Persentase WKSBM yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesos di DIY Tahun 2015 - 2018

Model pelayanan sosial berbasiskan masyarakat melalui WKSBM sebagai salah satu program pemerintah daerah DIY, dalam rangka untuk mengatasi meningkatnya PMKS di tingkat lokal wilayah. Model pelayanan ini dengan cara menghimpun potensi daya dan dana masyarakat untuk, oleh, dan dari masyarakat sendiri. WKSBM ini cenderung adaptif dengan kemampuan lokal, dengan mempertahankan dan melestarikan nilai – nilai sosial budaya lokal, tradisi dan kebiasaan, serta sumber daya lokal. Di DIY WKBSM aktif berperan dalam membantu kemajuan masyarakatnya dan aktif menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dari tahun ke tahun mencapai 100 %.

2.1.3.1.6.8 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Penanggulangan Bencana di DIY mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah DIY No. 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Pemda DIY untuk penanggulangan bencana di bantu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, sedangkan untuk bantuan sosial kepada korban bencana di ambil alih oleh Dinas Sosial DIY. Berikut data Jumlah dan Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat.

Tabel 2-57 Jumlah dan Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat di DIY Tahun 2015 - 2018

Indikator	Tahun				Ket
	2015	2016	2017	2018	
Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	71	1.050	433	61	KK
Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	71	1.050	433	61	KK
Persentase (%) korban bencana dalam 1 tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	Persen

Sumber : Dinas Sosial 2019

Jumlah Korban Bencana tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 1.050 KK dan sudah tertangani. Jumlah korban bencana alam mengalami penurunan pada tahun 2018 karena secara keseluruhan cuaca cukup baik di DIY, selain itu kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang cukup baik untuk meminimalisir korban ketika bencana datang. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di DIY dari tahun 2015 sampai dengan 2018 sudah tertangani sebesar 100 %.

2.1.3.1.6.9 Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Penanggulangan Bencana di DIY mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah DIY No. 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Pemda DIY untuk penanggulangan bencana di bantu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, sedangkan untuk bantuan sosial kepada korban bencana di ambil alih oleh Dinas Sosial DIY. Berikut data Jumlah dan Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat.

Tabel 2-58 Tabel Jumlah dan Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat di DIY Tahun 2015 - 2017

Indikator	Tahun			Satuan
	2015	2016	2017	
Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	71	1.050	433	KK

Indikator	Tahun			Satuan
	2015	2016	2017	
Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	71	1.050	433	KK
Persentase (%) korban bencana dalam 1 tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%	Persen

Sumber : Dinas Sosial 2018

Jumlah Korban Bencana tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 1.050 KK dan sudah tertangani. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di DIY dari tahun 2015 sampai dengan 2017 sudah tertangani sebesar 100 %.

2.1.3.1.7 Urusan Tenaga Kerja

Sumber daya manusia atau juga sering disebut sebagai human capital memiliki dua peran baik sebagai tujuan pembangunan maupun sebagai input pembangunan. Sebagai input pembangunan, kualitas tenaga kerja menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja menjadi faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas-aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia atau tenaga menjadi salah satu fokus RPKD tahun 2020. Tujuannya adalah penyiapan dan ketersediaan SDM atau tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing yang dapat memenuhi permintaan dunia usaha baik di tingkat lokal, nasional hingga pasar global. dapat mendukung ketercapaian program pembangunan di pusat maupun di daerah. Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara sinergis oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya melalui pendidikan, latihan dan pemagangan. Berikut ini akan diuraikan kondisi umum terkini pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan di DIY.

2.1.3.1.7.1 Urusan Penduduk Usia Kerja (PUK)

Konsep ketenagakerjaan menurut ILO (International Labor Organization) membagi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) berdasarkan aktivitas utamanya menjadi dua kelompok yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dilihat dari komponennya, angkatan kerja dapat dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja (penganggur terbuka). Pertumbuhan angkatan kerja memiliki arah yang sama dengan pertumbuhan penduduk, tetapi pertumbuhan penciptaan kesempatan kerja baru lebih lambat. Hal ini menyebabkan tidak semua angkatan kerja mampu terserap oleh pasar tenaga kerja karena ketidakseimbangan antara supply dan demand tenaga kerja sehingga terjadilah pengangguran.

Jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di DIY selama periode 2013–2018, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Sakernas, PUK DIY pada tahun 2013 adalah sebesar 2,813 juta orang dan pada tahun 2018 diperoleh data PUK DIY mencapai 2,987 juta orang.

Data Sakernas pada tahun 2013-2018 menunjukkan bahwa penduduk usia kerja yang tergolong angkatan kerja mempunyai proporsi mencapai lebih dari 70% setiap tahunnya dimana dari jumlah angkatan kerja ini lebih dari 90% merupakan angkatan kerja yang bekerja sehingga menghasilkan penganggur terbuka yang jumlahnya relatif kecil. Sedangkan kelompok penduduk bukan usia kerja memberikan proporsi berkisar 30% dari penduduk usia kerja. Hal ini mengindikasikan cukup banyak penduduk usia kerja yang memilih untuk tidak bekerja. Kelompok ini didominasi oleh kelompok yang memilih untuk mengalokasikan sebagian besar waktunya demi mengurus rumah tangganya (umumnya ibu rumah tangga) dan bersekolah. Sebagian besar anggota kelompok bukan angkatan kerja ini memang cenderung tidak menghasilkan pendapatan nominal dan mungkin dianggap sebagai kelompok yang tidak produktif. Meskipun demikian, mereka melakukan aktivitas investasi pendidikan bagi keluarganya (dengan menjadi ibu rumah tangga) dan bagi dirinya sendiri (dengan menjadi siswa sekolah formal pada jenjang SD hingga Universitas).

Tabel 2-59 Perkembangan Penduduk Usia Kerja di DIY (dalam ribu orang), Tahun 2013 – 2018

JENIS KEGIATAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Angkatan Kerja	1.949,243	2.023,461	2.882,98	2.099,44	2.117,19	2.191,74
- Bekerja	1.886,071	1.956,043	1.891,22	2.042,40	2.053,17	2.118,39
- Penganggur	63,172	67,418	80,25	57,04	64,02	73,35
Bukan Angkatan Kerja*)	863,845	824,293	911,517	807,436	823,03	795,59
- Sekolah	201,760	270,545	297,972	264,858	456,92	247,191
- Rumah Tangga	479,109	439,522	475,397	400,382	261,08	452,31
- Lainnya	182,976	114,226	138.148	142,196	105,03	96,287
PENDUDUK USIA KERJA	2.813,088	2.847,754	2.882,980	2.904,301	2.939,003	2.987,330
TPAK (Persen)	69,29	71,05	68,38	71,96	71,52	73,37
TPT(Persen)	3,24	3,33	4,07	2,72	3,02	3,35

Sumber: BPS, Statistik DIY 2018

Ditinjau dari aspek gender, data jumlah penduduk usia kerja laki-laki tercatat sebanyak 1,463 juta (49%) lebih rendah dari PUK perempuan yaitu 1,523 juta atau 51% dari keseluruhan penduduk usia kerja.



Sumber: BPS, Statistik Ketenagakerjaan DIY 2016-2017

Gambar 2-42 Penduduk Usia Kerja DIY Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Tahun 2018

2.1.3.1.7.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK dapat digunakan untuk melihat potensi penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja (labor supply) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa.

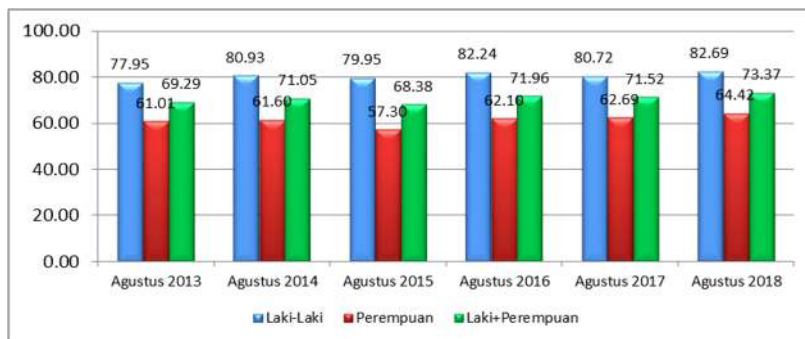
TPAK DIY pada periode 2013 hingga 2018 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2013, TPAK DIY adalah sebesar 69,29%, dan kemudian mengalami fluktuasi hingga pada tahun 2018 mencapai angka sebesar 73,37%. Angka TPAK sebesar 73,37% mengandung arti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) 73 orang adalah angkatan kerja. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan angka sebelumnya (tahun 2017) yaitu 71,52%.



Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik November 2013 s.d November 2018

Gambar 2-43 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Tahun 2013-2018

Sementara bila TPAK dibedakan menurut jenis kelamin terdapat kecenderungan TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan. Pola perkembangan TPAK menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa TPAK laki-laki lebih dominan (berfluktuasi pada kisaran 77-82%) dibandingkan TPAK perempuan (berada pada kisaran 57-64%). Fenomena ini menunjukkan keterlibatan penduduk laki-laki dalam aktivitas perekonomian di DIY lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar aktivitas mengurus rumah tangga di DIY dilakukan oleh perempuan dan adanya pandangan bahwa kewajiban mencari nafkah adalah tanggungjawab laki-laki. TPAK laki-laki pada Agustus 2018 mencapai sekitar 82,69%, sementara TPAK perempuan sebesar 64,42%.



Sumber: Statistik Ketenagakerjaan DIY 2016-2018, BPS Provinsi DIY

Gambar 2-44 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2013-2018



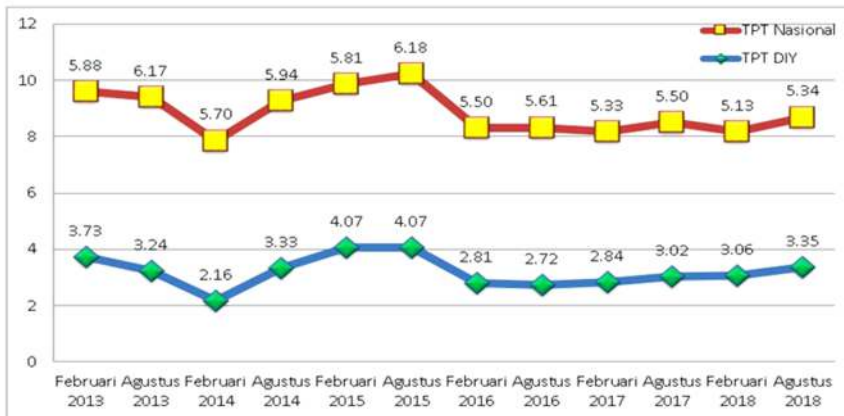
Sumber: BRS November 2018, BPS Provinsi DIY

Gambar 2-45 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Menurut Kabupaten Kota 2018

Sedangkan jika dilihat menurut Kabupaten/Kota, TPAK tertinggi berada di Kabupaten Kulon Progo (76,50 persen) diikuti masing-masing oleh Gunungkidul (76,81 persen), Kabupaten Bantul (73,87 persen), Sleman (71,22 persen) dan terendah di Kota Yogyakarta (69,33 persen).

2.1.3.1.7.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. TPT bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran karena merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Perkembangan angka pengangguran terbuka di DIY pada Februari tahun 2013 hingga Februari 2014 menunjukkan trend menurun, namun kemudian mengalami peningkatan pada Agustus 2014 menjadi 3,33% dan mencapai 4,07% pada Agustus 2015. Pada tahun 2016 TPT mengalami penurunan cukup drastis yaitu menjadi 2,72 % dan cenderung meningkat pada periode berikutnya hingga mencapai 3,35 pada tahun 2018.. Angka ini mengandung pengertian bahwa terdapat sekitar 3 orang pengangur dari 100 angkatan kerja DIY. Angka TPT DIY ini selalu lebih rendah dibandingkan TPT Nasional dimana pada Agustus 2018 mencapai 5,34 naik 0,21 point dibandingkan TPT Februari 2018.



Sumber :BRS November 2013 - 2018, BPS Provinsi DIY

Gambar 2-46 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIY dan Nasional, Tahun 2013-2018 (%)

Pengangguran atau ketiadaan pekerjaan serta standar upah yang rendah merupakan salah satu akar dari kemiskinan. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, cenderung mengalami tren penurunan, angka pengangguran terbuka di DIY masih dinilai cukup tinggi. Hal ini menunjukkan, bahwa potensi wilayah yang tersedia di Yogyakarta ternyata belum semua mampu memberi peluang kerja bagi penduduk usia kerjanya.

Apabila dilihat menurut jenis kelamin, TPT perempuan lebih tinggi dari TPT laki-laki. Pada Februari 2018, TPT masing-masing sebesar 2,88 untuk laki-laki dan 3,28 untuk perempuan. Berdasarkan kelompok umur, Tingkat Pengangguran Terbuka sangat menonjol pada kelompok usia muda, antara 20-24 tahun.

Tabel 2-60 Tingkat Penangguran Terbuka di DIY Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2014 - 2018

Gol . Umur	Agustus 2014			Agustus 2015			Agustus 2016			Februari 2017			Februari 2018		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
15-19	27,14	13,27	21,59	27,14	13,27	21,59	31,79	0,00	20,53	5,29	4,83	5,10	0,00	10,08	4,24
20-24	9,34	11,22	10,19	9,34	11,22	10,19	12,35	8,37	10,41	6,67	15,81	10,86	12,58	17,85	14,75
25-29	8,30	5,07	6,91	8,30	5,07	6,91	5,39	0,00	3,27	3,93	4,95	4,35	6,61	14,51	9,84
30-34	1,80	2,56	2,11	1,80	2,56	2,11	5,03	1,83	3,64	3,08	0,00	1,82	5,36	0,00	3,21
35-39	1,43	1,17	1,33	1,43	1,17	1,33	3,86	0,00	2,19	1,41	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00

Gol Umur	Agustus 2014			Agustus 2015			Agustus 2016			Februari 2017			Februari 2018		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
40-44	1,06	0,73	0,90	1,06	0,73	0,90	0,00	2,06	0,84	2,69	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00
45-49	2,74	0,50	1,75	2,74	0,50	1,75	0,00	1,84	0,82	1,47	1,56	1,51	1,49	0,00	0,79
50+	1,28	0,47	0,90	1,16	0,74	0,90	0,00	0,49	0,23	2,09	1,46	1,80	0,00	0,00	0,00
DIY	3,88	2,65	3,33	3,72	4,54	4,07	3,68	1,50	2,72	2,86	2,81	2,84	2,88	3,28	3,06

Sumber :BRS November 2013 - 2018, BPS DIY

Jika dilihat dari status pendidikan terakhir yang ditempuh, sebagian besar pengangguran terbuka di DIY merupakan pengangguran terdidik karena didominasi oleh lulusan SMA, SMK dan universitas, dengan TPT tertinggi pada Agustus 2018 terjadi pada angkatan kerja dengan tingkat pendidikan universitas (8,28 persen) dan diikuti SMA dan SMK masing-masing sebesar 4,91 persen dan 2,87persen. Data TPT pada Februari 2018 menunjukkan lonjakan pada tingkat pendidikan universitas yaitu sebesar 9,56 persen. Pengangguran terdidik akan berusaha mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan ijazah ataupun keahlian yang mereka miliki dengan harapan gaji yang akan diterima juga sesuai. Sedangkan TPT terendah terjadi pada angkatan kerja dengan tingkat pendidikan tertingginya SD ke bawah (1,08 persen) diikuti tingkat pendidikan SMP sebesar 1,83 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka pada tingkat pendidikan yang lebih rendah terlihat mengalami trend menurun karena mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, seiring pula dengan kompetisi dalam mendapatkan pekerjaan yang semakin sulit. Hal tersebut dapat dilihat dari data terakhir pada tahun 2018 (Februari dan Agustus) TPT SD paling kecil di antara semua tingkat pendidikan, yaitu lebih kecil dari 1 persen.

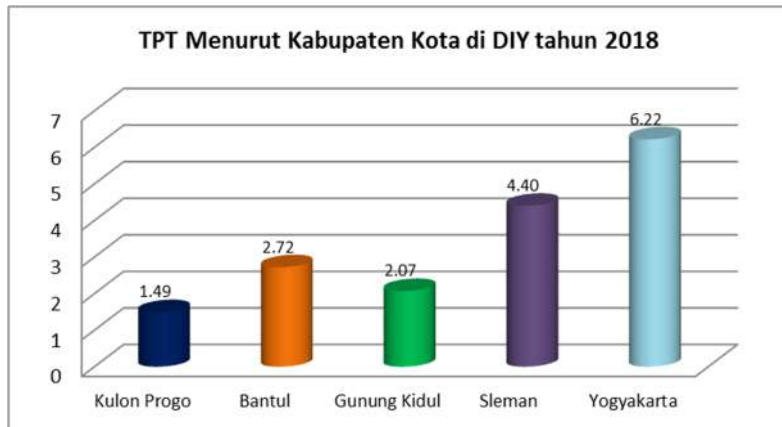
Tabel 2-61 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY Menurut Pendidikan Agustus Tahun 2016 – Agustus 2018

Tingkat Pendidikan	Agustus 2016	Februari 2017	Agustus 2017	Februari 2018	Agustus 2018
1 ≤ SD	1,1	3,74	1,08	0,47	0,74
2 SMP	3,07	2,05	1,83	0,00	2,10
3 SMA	1,05	9,71	4,39	5,67	2,87
4 SMK	5,76	3,57	4,38	3,23	4,91
5 Universitas	2,83	4,81	4,9	9,56	8,28

Sumber: BPS DIY, BRS November 2018 dan Sakernas 2018

Dilihat menurut kabupaten kota di DIY, TPT tertinggi pada Agustus 2018 terjadi di Kota Yogyakarta (6,22 persen) diikuti Kabupaten Sleman dan Bantul

masing- masing sebesar 4,40 persen dan 2,72 persen. Dan data terbaru tahun 2018 menunjukkan bahwa TPT terendah ada di Kabupaten Kulon Progo dengan angka sebesar 1,49 persen. Data sebelumnya pada tahun 2017, TPT terendah adalah di Kabupaten Gunung Kidul dengan angka 1,65 persen.



Sumber: BPS DIY, BRS November 2018 dan Sakernas 2018

Gambar 2-47 TPT menurut Kabupaten Kota di DIY Tahun 2018 (Agustus)

2.1.3.1.7.4 Hubungan Industrial

Hubungan yang harmonis, dinamis, kondusif dan berkeadilan antara pengusaha dan pekerja menjadi salah satu aspek penentu iklim berusaha di daerah. Oleh karena itu, pengelolaan hubungan industrial menjadi salah satu perhatian dalam pembangunan ketenagakerjaan. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah. Pengaturan hubungan industrial ini dilakukan untuk mencegah timbulnya dampak buruk akibat perbedaan pendapat atau bahkan konflik dalam hubungan kerja. Sarana Hubungan industrial dilaksanakan melalui Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Serikat Pekerja, Lembaga Tripartit, Bipartit, Organisasi Pengusaha, Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan Peraturan Ketenagakerjaan. Kesemua itu untuk menjamin adanya kepastian dan perlindungan di dalam hubungan kerja, sehingga dapat tercipta ketenangan kerja dan berusaha.

Di DIY, pemahaman dan pelaksanaan hubungan industrial yang mantap dan dinamis dalam rangka mensejahterakan karyawan di perusahaan masih belum sepenuhnya dilaksanakan baik oleh pengusaha maupun karyawan sehingga masih sering dijumpai adanya masalah perselisihan hubungan industrial. Belum optimalnya fungsi sarana hubungan industrial di DIY dapat

diamati dari masih sedikitnya perangkat hubungan industrial dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang sudah melapor di Disnakertrans DIY sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2-62 Jumlah Perusahaan dan Perangkat Hubungan Industrial di DIY Tahun 2018

Kab/Kota	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja		Kategori Perusahaan			Perangkat Hubungan Industrial			
		WNI	WNA	Kecil < 25 org	Sedang (26-99 org)	Besar (> 100 org)	PP	PKB	SP	Lbg. Tripartit
DIY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kota YK	1.689	67.889	42	1.110	392	187	433	139	224	1
Sleman	1.624	105.750	143	951	449	224	482	176	106	1
Bantul	701	44.138	125	416	216	69	37	3	41	1
Kulon Progo	301	8.694	3	247	51	12	30	15	17	1
Gunung Kidul	295	5.471	1	230	57	8	2	1	34	1
Jumlah	4.619	23.2212	314	2.954	1.165	500	945	321	422	6

Keterangan: PP= Peraturan Perusahaan; PKB= Perjanjian Kerja Bersama; SP= Serikat Pekerja

Sumber: Disnakertrans DIY, 2018

Dari total 4.619 perusahaan yang lapor di Disnakertrans, baru kurang lebih 20,46 persen atau hanya 945 perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan hanya 6,95 persen atau hanya 321 perusahaan yang melaksanakan Perjanjian kerja Bersama. Sedangkan perusahaan yang mempunyai Serikat Pekerja (SP) hanya 422 perusahaan atau hanya 9,14 persen. Sehubungan dengan hal itu perlu adanya pembinaan rutin dan berkelanjutan baik terhadap karyawan dan pengusaha serta peningkatan kinerja pengawas ketenagakerjaan baik di tingkat Pemda maupun kabupaten/kota, apalagi dengan terbitnya UU 23 tahun 2014 tugas pengawas ketenagakerjaan telah dialihkan menjadi kewenangan Provinsi.

2.1.3.1.7.5 Data Pelatihan

Era revolusi industri 4.0 membuka kesempatan bagi sumber daya manusia (SDM) di sektor manufaktur untuk memiliki keahlian yang sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Untuk itu, diperlukan pelaksanaan program peningkatan keterampilan (up-skilling) atau pembaruan keterampilan (reskilling) para tenaga kerja berdasarkan kebutuhan dunia industri saat ini.

Di dalam roadmap Making Indonesia 4.0, salah satu program prioritasnya adalah peningkatan kualitas SDM. Sebab, talent menjadi kunci atau faktor penting untuk kesuksesan implementasi industri 4.0, Salah satunya dengan penguatan sekolah vokasi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian

Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah membuat Grand Design Pelatihan Vokasi. Pemerintah memberikan akses yang seluas-luasnya untuk tenaga kerja atau pencari kerja mengikuti pelatihan baik di Balai Latihan Kerja (BLK), industri, atau program magang yang diharapkan bisa masuk ke pasar kerja dan berwirausaha.

Namun pada kenyataannya Keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) saat ini dinilai belum cukup untuk menyiapkan usia kerja menghadapi era revolusi industri 4.0. Saat ini, era industri berbasis teknologi memang sangat penting bagi keberlangsungan usaha agar dapat bersaing secara maksimal. Sampai dengan saat ini BLK belum memiliki program khusus untuk menghadapi era industrialisasi berbasis teknologi. Sehingga dikhawatirkan, tanpa penguasaan teknologi semacam ini, nantinya masyarakat di usia kerja akan kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan. Hal tersebut terlihat dari tabel di bawah ini di mana Kejuruan atau program pelatihan yang ada di BLK masih belum mengadopsi kebutuhan industrialisasi berbasis teknologi.

Tabel 2-63 Data Jumlah Tenaga Kerja Terlatih dan Jenis Pelatihannya

Kejuruan	Jumlah Tenaga Kerja Terlatih					Jumlah
	BLKPP DIY	BLK Gunung Kidul	BLK Bantul	BLK Sleman	BLK Kulonprogo	
Otomotif	152	128	176	224	96	766
Teknik Listrik	68	32	64	128	-	292
Aneka Kerajinan	548	-	-	-	-	548
Perhotelan	500	-	-	-	-	500
Tataniaga	120	-	-	-	-	120
Bahasa Asing	56	-	-			56
Teknologi Mekanik	32	-	-	-	-	32
Elektronika	88			96	64	248
Teknik Las	64	64	80	64	80	352
Teknik Refrigerasi Komersial	-	32	64	48	80	224
Bangunan	-	48	64	64	132	308
TIK	-	128	96	272	192	688
Garmen	-	128	112	202	80	522
Pengolahan hasil Pertanian	-	48	48	80	192	368
Teknik Ukir Kayu	-	48	-	-	-	48
Bisnis dan Manajemen	-	-	64	32	144	240
Tata Boga	-	-	96	122	64	282
Desain Batik	-	-	16	-	48	64
Teknik Manufaktur	-	-	-	64	16	80

Kejuruan	Jumlah Tenaga Kerja Terlatih					Jumlah
	BLKPP DIY	BLK Gunung Kidul	BLK Bantul	BLK Sleman	BLK Kulonprogo	
Tata Kecantikan	-	-	-	112	48	160
Kebandarudaraan	-	-	-	-	160	160
Jumlah	1.628	656	880	1.508	1.396	6.068

Sumber: Disnakertrans DIY, 2018

2.1.3.1.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan kaum perempuan di DIY telah lama diupayakan bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Kongres Perempuan I pada 22 Desember 1928 di DIY memperlihatkan bagaimana pemberdayaan kaum perempuan di daerah ini telah dilakukan. Oleh karena itu, wajar kiranya pembangunan bidang pemberdayaan perempuan di DIY hingga saat ini telah menunjukkan hasil yang lebih baik daripada rata-rata nasional.

Pembahasan mengenai pemberdayaan perempuan tidak dapat dilepaskan dari perlindungan anak. Terlebih, kedua hal ini menjadi agenda pembangunan yang perlu mendapat perhatian besar karena merupakan bentuk pengejawantahan dari Nawacita, khususnya sub agenda prioritas 8 dari agenda prioritas keempat yang berbunyi “melindungi anak, perempuan, dan kelompok masyarakat marjinal”.

Lebih lanjut, pengkajian mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di DIY perlu memperhatikan beberapa indikator utama yang dapat menggambarkan kondisi pembangunan dalam bidang ini, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah, proporsi kursi perempuan dalam lembaga perwakilan yang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, dan angka kekerasan terhadap perempuan di DIY.

2.1.3.1.8.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kondisi adil yang ingin diwujudkan dalam visi pembangunan nasional ditandai dengan adanya persamaan peranan dan tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia berbasis gender. Indeks ini memperhitungkan indikator-indikator yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan. IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar

pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Pada tahun 2014, dilakukan penyempurnaan metodologi penghitungan IPM yang selanjutnya mempengaruhi metodologi penghitungan IPG. Perubahan ini membawa konsekuensi perubahan interpretasi angka IPG. Dengan adanya metodologi penghitungan baru, perbandingan angka IPG dengan IPM untuk melihat indikasi tentang adanya kesenjangan gender tidak lagi diperlukan. Hal ini dikarenakan kondisi ideal kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dinilai dengan angka 100. Dengan demikian, kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari jarak antara angka IPG dengan nilai 100.

Pada tahun 2015 IPG DIY berada pada angka 94,41. Ini berarti IPG DIY mengalami kenaikan sebesar 0,10 bila dibandingkan dengan IPG DIY tahun 2014 yang tercatat berada pada angka 94,31. Dengan angka ini, IPG DIY berada pada urutan tertinggi keempat nasional dan secara konsisten selama kurun waktu 2010-2015 terus berada di atas rata-rata nasional. Hal ini berarti bahwa kapabilitas pembangunan perempuan yang terangkum dalam dimensi kesehatan, pendidikan maupun standar hidup layak selama kurun waktu tersebut lebih baik dari capaian nasional. Sedangkan IPG DIY pada tahun 2016 menurun pada angka 94,0 dan kembali naik pada tahun 2017 menjadi 94,39. Meskipun secara rata-rata masih tinggi dan di atas IPG Nasional yaitu di angka 90,96 di tahun 2017, namun dapat dinyatakan bahwa DIY masih belum dapat mewujudkan tujuannya untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender secara paripurna.

IPG di DIY manakala dilihat per kabupaten/kota menunjukkan capaian antara Kabupaten Gunungkidul tertinggal dengan 4 kabupaten/kota lain di DIY. IPG kabupaten Gunungkidul pada kurun waktu 2013-2015 dan 2017 berada di bawah rata-rata provinsi, atau yang paling kecil capaiannya. Oleh sebab itu, Pemerintah DIY perlu melakukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan kemampuan dasar pembangunan manusia berbasis gender di wilayah Gunungkidul. Namun demikian, disadari bahwa upaya tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Upaya untuk mewujudkan

kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat di DIY perlu dilaksanakan secara bertahap, terencana, sistematis dan berkesinambungan.

Tabel 2-64 Tabel Indeks Pembangunan Gender DIY 2013 - 2017

Lokasi	IPG				
	2013	2014	2015	2016	2017
Yogyakarta	98,48	99,27	98,78	n/a	98,26
Sleman	95,50	96,09	96,08	n/a	95,62
Kulon Progo	94,23	94,65	94,73	n/a	94,93
Bantul	94,33	94,41	94,42	n/a	94,98
Gunungkidul	81,76	82,27	83,10	n/a	84,03
DIY	94,15	94,31	94,41	94,27	94,39
Indonesia	90,19	90,34	91,03	90,82	90,96

Sumber : Kementerian PP & PA. 2018

2.1.3.1.8.2 Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur indeks ini meliputi partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, IDG DIY pada kurun waktu 2013-2017 memperlihatkan perkembangan yang fluktuatif.

Pada tabel di bawah diperlihatkan bagaimana capaian IDG DIY terkuat pada tahun 2013 dan pada tahun-tahun setelah itu mengalami naik turun. Apabila dibandingkan dengan IDG nasional, pada kurun waktu 2013-2017 capaian IDG DIY selalu di bawah IDG nasional. perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik di DIY masih diperlukan.

Capaian IDG di DIY tahun 2017 manakala dilihat per kabupaten/kota menunjukkan kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta berada di atas rata-rata DIY, sedangkan tiga kabupaten lain yakni kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul di bawah rata-rata di provinsi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya berkesinambungan untuk mendorong partisipasi.

Tabel 2-65 Capaian IDG DIY Tahun 2013-2017

Provinsi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sleman	72.30	79.37	77,61	-	79.51
Kota Yogyakarta	71.75	79.44	79,33	-	78.94
Gunungkidul	66.01	68.27	64,48	-	68.7
Kulon Progo	59.26	63.68	67,26	-	68.42
Bantul	68.88	61.18	61,77	-	61.99

Provinsi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
	2013	2014	2015	2016	2017
INDONESIA	70,46	70,68	70,83	71,39	71,74
D I YOGYAKARTA	76.36	66.90	68,75	66.96	69.37

Sumber : Kementerian PP & PA. 2018 diolah

Dari data di atas bisa disimpulkan bahwa ketimpangan IDG terjadi antar daerah. Lokus prioritas intervensi untuk meningkatkan IDG perlu dilakukan di Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul untuk mengejar *gap* dengan kabupaten Sleman dan kota Yogyakarta.

Hingga saat ini Pemda DIY telah menyelenggarakan banyak program yang mendorong partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, Pemda DIY menginisiasi 70 kelompok pemberdayaan ekonomi perempuan dengan nama Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) yang dilakukan pada tahun 2008-2017. Pengembangan Desa PRIMA merupakan alternatif upaya peningkatan taraf hidup perempuan dengan mengkoordinasikan berbagai program pemberdayaan perempuan dari berbagai instansi terkait, LSM, Organisasi Perempuan dan Organisasi Masyarakat. Melalui cara ini diharapkan perempuan dari keluarga miskin di DIY dapat menjadi sosok yang lebih mandiri sehingga dapat mengurangi beban biaya kesehatan dan pendidikannya dalam keluarga. Selain itu, demi mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik, Pemda DIY dan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak pun telah menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Bagi Perempuan di seluruh kecamatan di DIY. Dalam acara tersebut, para peserta pelatihan diberikan materi yang berkaitan dengan strategi pencalonan, strategi kampanye, strategi meraih dan mengawal suara, serta teknik menyusun kebijakan pembangunan yang berkeadilan.

Tabel 2-66 Jumlah Desa Prima Kabupaten/Kota di DIY

Kab Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
Yogyakarta	2	1					1	4
Bantul	4	2	1	1	3	3	6	20
Kulon Progo	8	3	1	1	2	2	3	20
Gunungkidul	9	3	2	2	4	5	1	26
Sleman	7	2	1		1		4	15
Jumlah Desa Prima								85

2.1.3.1.8.3 Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Pemerintah

Keterwakilan perempuan di lingkungan birokrasi diperlukan untuk mengawal pembangunan sehingga pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah DIY lebih responsif gender. Keterwakilan ini idealnya bukan

hanya pada aparatur di garda terdepan, namun juga pada level pengambilan keputusan. Keberadaan perempuan pada posisi strategis ini diperlukan agar kaum perempuan dapat menyuarakan aspirasi kaumnya sehingga kebijakan pembangunan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah DIY dapat mengatasi berbagai permasalahan spesifik gender yang dihadapi oleh warga perempuan dan kelompok minoritas lainnya.

2.1.3.1.8.4 Proporsi Perempuan Dalam Lembaga Perwakilan

Data anggota legislatif perempuan di DIY maupun Kabupaten/Kota memperlihatkan bahwa wilayah ini belum berhasil mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu) yang mewajibkan terselenggaranya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dengan kuota sebesar 30%. Pada Pemilu 2014, proporsi tertinggi keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif terdapat di DPRD Kabupaten Sleman yakni sebesar 26%, disusul DPRD Kota Yogyakarta dengan proporsi keterwakilan perempuan sebesar 25%, DPRD Kabupaten Kulon Progo sebesar 17,50%, DPRD Kabupaten Gunung Kidul dengan proporsi keterwakilan perempuan sebesar 15,5%, dan DPRD Kabupaten Bantul dengan proporsi keterwakilan perempuan sebesar 6,67%. Sementara, rata-rata proporsi keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif di DIY hanya berada pada angka 12,73%. Proporsi tersebut cenderung tetap pada tahun-tahun selanjutnya. Perubahan terjadi di Kabupaten Kulon Progo dengan kenaikan proporsi sehingga mencapai angka 18,42% pada tahun 2016 namun kembali turun pada tahun 2017 dan stagnan pada tahun 2018 di angka 17,50%. di Kabupaten Bantul pada tahun 2017 ke tahun 2018 tidak terjadi perubahan proporsi yaitu masih pada angka 6,82%. Pada Kabupaten Gunungkidul capaian proporsi keterwakilan perempuan pada tahun 2016 berada pada angka 13,33% dan naik di tahun 2017 di angka 15,56% dan pada tahun 2018 stagnan di angka 15,56%. Kenaikan terjadi di DPRD DIY pada tahun 2018, dari angka 12,73% di tahun 2017 meningkat menjadi 14,55% di tahun 2018.

Tabel 2-67 Anggota DPRD DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014 – 2018 Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	DPRD	TAHUN	JUMLAH		%P
			L	P	
1.	DPRD Kulon Progo	2014	33	7	17,50
		2015	33	7	17,50
		2016	31	7	18,42
		2017	33	7	17,50
		2018	33	7	17,50
2.	DPRD Bantul	2014	42	3	6,67

No.	DPRD	TAHUN	JUMLAH		%P
			L	P	
		2015	42	3	6,67
		2016	42	3	6,67
		2017	41	3	6,82
		2018	41	3	6,82
3.	DPRD Gunungkidul	2014	38	7	15,50
		2015	39	6	13,33
		2016	38	6	13,64
		2017	38	7	15,56
		2018	38	7	15,56
4.	DPRD Sleman	2014	37	13	26,00
		2015	37	13	26,00
		2016	37	13	26,00
		2017	38	12	24,00
		2018	38	12	24,00
5.	DPRD Yogyakarta	2014	30	10	25,00
		2015	30	10	25,00
		2016	30	10	25,00
		2017	31	9	22,50
		2018	31	9	22,50
6	DPRD DIY	2014	48	7	12,73
		2015	48	7	12,73
		2016	48	7	12,73
		2017	48	7	12,73
		2018	47	8	14,55

Sumber: BPPM, 2019

Selain tingkat elektabilitas yang rendah, beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif adalah masih adanya keengganan perempuan untuk tampil dalam bidang politik dan kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk berpartisipasi lebih dalam ranah politik. Hal ini dikarenakan masih adanya stigma bahwa ranah politik adalah ranah laki-laki. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa strategi untuk menumbuhkan kesadaran dan strategi pembelajaran politik bagi warga perempuan di DIY masih diperlukan sehingga selanjutnya mampu mendorong peningkatan partisipasi perempuan di DIY dalam politik baik secara kuantitas maupun kualitas.

2.1.3.1.8.5 Partisipasi Perempuan Dalam Bidang Ekonomi Dan Ketenagakerjaan

Keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja di DIY semakin memperlihatkan perkembangan positif dari waktu ke waktu. Beberapa sektor ekonomi yang strategis pun kini banyak bertumpu pada peran perempuan. Namun, persoalan

gender masih acap kali dijumpai. *Gender stereotype* bahwa laki-laki adalah pencari nafkah yang utama dan bahwa beberapa pekerjaan hanya patut dilakukan oleh laki-laki menyebabkan banyak perempuan bekerja tanpa mendapatkan bayaran dan lebih terbatasnya akses perempuan terhadap kesempatan kerja.

Partisipasi perempuan sebagai karyawan dan wirausaha telah menunjukkan geliat yang positif. Bahkan, jumlah perempuan pelaku wirausaha sudah melebihi jumlah wirausaha laki-laki. Namun, perlu juga diperhatikan bahwa mayoritas pekerja tidak dibayar di DIY adalah perempuan. Kondisi ini berarti Pemerintah Daerah DIY perlu berupaya lebih serius dalam melindungi hak-hak pekerja perempuan, disamping terus berikhtiar mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi.

2.1.3.1.8.6 Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak tahun 2016-2017

Hal yang paling mengakibatkan ketidakseimbangan hubungan antar gender adalah tindak kekerasan berbasis gender. Meskipun tindakan ini sering kali dipakai dengan alasan tindakan pendisiplinan, namun nalar di balik tindakan kekerasan ini sering kali menggambarkan ketidaksetaraan gender dan ketidakadilan relasi antara perempuan dan laki-laki.

Perempuan di DIY masih rentan menjadi korban kekerasan. Kondisi ini terekam dari data tahunan Sekretariat Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) DIY yang mendokumentasikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi selama 2017. Hasilnya, terdapat 1.227 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 414 kasus kekerasan terhadap anak selama tahun 2017. Jika dibandingkan dengan data tahun 2016 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sebanyak 1.268 kasus, dan kekerasan terhadap anak sebesar 484 kasus. data ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan angka kekerasan pada perempuan dan kepada anak di DIY pada tahun 2017. Peningkatan kasus kekerasan tahun 2017 dibanding tahun 2016 dialami perempuan pada kelompok umur 25 tahun ke atas. Oleh sebab itu perlu peningkatan upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif demi melindungi kaum perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, sehingga kasus kejadian bisa ditekan.

Tabel 2-68 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Usia dan Lokasi Lembaga Layanan 2016-2017

No.	LOKASI LEMBAGA	Jenis Kelamin	TAHUN 2016				TAHUN 2017			
			Kelompok Umur			Total	Kelompok Umur			Total
			0-17 Th	18-25 Th	25 Tahun ke atas		0-17 Th	18-25 Th	25 Tahun ke atas	
1.	Kulon progo	Laki-laki	23	2	4	29	17	1	2	20
		Perempuan	22	19	64	105	19	8	14	41
2.	Bantul	Laki-laki	35	1	1	37	24	4	4	32
		Perempuan	35	11	48	94	30	19	82	131
3.	Gunung kidul	Laki-laki	2	1	3	6	10	2	2	14
		Perempuan	67	11	34	112	17	9	17	43
4.	Sleman	Laki-laki	34	4	14	52	60	6	14	80
		Perempuan	60	46	126	232	79	39	155	273
5.	Yogyakarta	Laki-laki	24	5	7	36	20	2	6	28
		Perempuan	46	119	332	497	50	79	342	471
6.	Provinsi	Laki-laki	65	1	15	81	27	0	12	39
		Perempuan	71	68	89	228	61	65	142	268
Jumlah		Laki-laki	183	14	44	241	158	15	40	213
		Perempuan	301	274	693	1.268	256	219	752	1.227
		Total	484	288	737	1.509	414	234	792	1.440

Sumber Data: Sekretariat Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY, 2018

Data merupakan data laporan penanganan korban kekerasan di lembaga layanan yang ada di DIY

2.1.3.1.8.7 Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak tahun 2017-2018

Hal yang paling mengakibatkan ketidakseimbangan hubungan antar gender adalah tindak kekerasan berbasis gender. Meskipun tindakan ini sering kali dipakai dengan alasan tindakan pendisiplinan, namun nalar di balik tindakan kekerasan ini sering kali menggambarkan ketidaksetaraan gender dan ketidakadilan relasi antara perempuan dan laki-laki.

Perempuan di DIY masih rentan menjadi korban kekerasan. Kondisi ini terekam dari data tahunan Sekretariat Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) DIY yang mendokumentasikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi selama 2018. Hasilnya, terdapat 1.344 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 439 kasus kekerasan terhadap anak selama tahun 2018. Jika dibandingkan dengan data tahun 2017, data ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan angka kekerasan pada perempuan dan angka kasus kekerasan pada anak di DIY. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selain terus melakukan berbagai upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif demi melindungi kaum perempuan berbagai tindak kekerasan, dan Pemda DIY pun perlu meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak agar upaya pencegahan,

pelayanan, dan pemberdayaan korban kekerasan dapat berjalan secara komprehensif.

Tabel 2-69 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Usia dan Lokasi Lembaga Layanan 2017-2018

No	LOKASI LEMBAGA	Jenis Kelamin	TAHUN 2017				TAHUN 2018			
			Kelompok Umur			Total	Kelompok Umur			Total
			0-17 Th	18-25 Th	25 Tahun ke atas		0-17 Th	18-25 Th	25 Tahun ke atas	
1	Kulon progo	Laki-laki	17		2	20	15	0	0	15
		Perempuan	19		14	41	18	23	30	71
2	Bantul	Laki-laki	24		4	32	33	2	5	40
		Perempuan	30		82	131	48	19	100	167
3	Gunung kidul	Laki-laki	10		2	14	6	0	1	7
		Perempuan	17		17	43	29	1	19	49
4	Sleman	Laki-laki	60		14	80	52	4	25	81
		Perempuan	79		155	273	106	38	176	320
5	Yogyakarta	Laki-laki	20		6	28	12	1	6	19
		Perempuan	50		342	471	52	76	311	439
6	Provinsi	Laki-laki	27		12	39	30	0	8	38
		Perempuan	61		142	268	38	78	182	298
Jumlah		Laki-laki	158		40	213	148	7	45	200
		Perempuan	256		752	1.227	291	235	818	1.344
		Total	414		792	1.440	439	242	863	1.544

Sumber Data : Sekretariat Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY, 2019

Data merupakan data laporan penanganan korban kekerasan di lembaga layanan yang ada di DIY

Pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak banyak dilakukan oleh laki-laki dan pelaku tersebut merupakan orang-orang terdekat dari korban. Pada Tahun 2017, jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak sejumlah 258 dilakukan oleh laki-laki dan 34 dilakukan oleh perempuan. Dari 258 pelaku tersebut, sebanyak 158 pelaku adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban, baik orang tua, keluarga atau pasangan menikah.

Tabel 2-70 Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Lokasi pada Tahun 2017

No	LOKASI LEMBAGA	Jenis Kelamin	2017					
			PELAKU					
			Pekerjaan		Hubungan dengan Korban			
			Tdk Bekerja	Bekerja	Orang Tua	Keluarga	Suami/istri	Lainnya
1.	Kulonprogo	Laki-laki	1	3	1	0	1	2
		Perempuan	0	0	0	0	0	0
2.	Bantul	Laki-laki	12	27	2	0	19	18
		Perempuan	0	1	0	0	0	1
3.	Gunungkidul	Laki-laki	1	12	0	0	8	5
		Perempuan	3	0	0	0	0	3
4.	Sleman	Laki-laki	11	26	1	1	12	23
		Perempuan	1	2	1	1	1	0
5.	Yogyakarta	Laki-laki	5	27	2	1	20	9
		Perempuan	2	2	0	0	0	4
6	Provinsi	Laki-laki	16	117	11	2	77	43
		Perempuan	11	12	8	0	9	6
Jumlah		Laki-laki	46	212	17	4	137	100
		Perempuan	17	17	9	1	10	14
		Total	63	229	26	5	147	114

Sumber Data: Sekretariat Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY, 2018

2.1.3.1.9 Urusan Pangan

Kondisi Umum

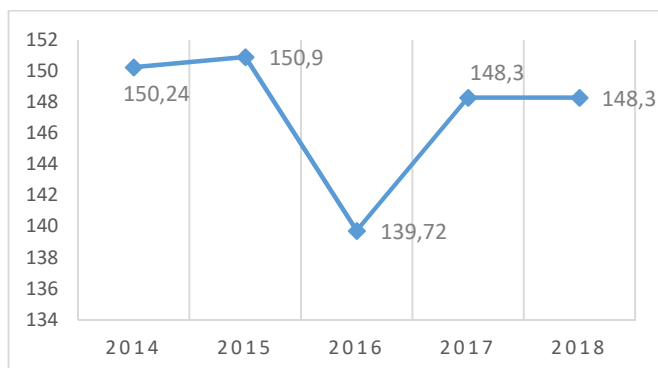
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Penyelenggaraan pangan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Ketahanan pangan terdiri dari tiga aspek yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan. Pembangunan ketahanan pangan ditujukan untuk memastikan terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Terdapat empat jenis pelayanan dasar yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses

pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan.

2.1.3.1.9.1 Ketersediaan Pangan

Indikator ketersediaan pangan perkapita digunakan untuk mengetahui tingkat ketersediaan pangan hingga tiap individu pada suatu wilayah. Ketersediaan pangan per kapita diperoleh dari ketersediaan bahan makanan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Ketersediaan pangan perkapita tahun 2018 (angka sementara) sebesar 148,3 kal/kap/hari, sama dengan pada tahun 2017. Sementara rata-rata pertumbuhan dalam periode lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan sebesar 0,21%. Hal ini diduga disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang kurang diimbangi dengan penyediaan pangan produksi dalam daerah.



Sumber: Dinas Pertanian dan KP DIY, 2019

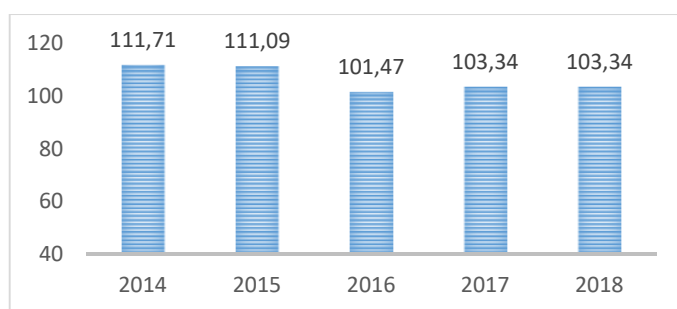
Gambar 2-48 Grafik Jumlah Ketersediaan Pangan Perkapita di DIY Tahun 2014-2018

FAO telah menetapkan persyaratan standar ketersediaan pangan yang terdiri dari ketersediaan energi minimal 2400 Kkal/kapita/hari dan protein sebesar 63 gram/kapita/hari. Berdasarkan hal itu, maka ketersediaan energi dan protein DIY telah jauh melebihi standar tersebut. Ketersediaan pangan dalam ukuran energi DIY tahun 2018 sebesar 3.727 Kkal/kapita/hari, Sedangkan untuk protein ketersediannya sudah mencapai 103,34 gram/kapita/hari, namun lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2013 hingga 2015 yang menunjukkan tren menurun. Hal ini perlu menjadi perhatian karena terkait dengan penyediaan penghasil protein, diantaranya ternak.



Sumber : Dinas Pertanian dan KP DIY, 2019

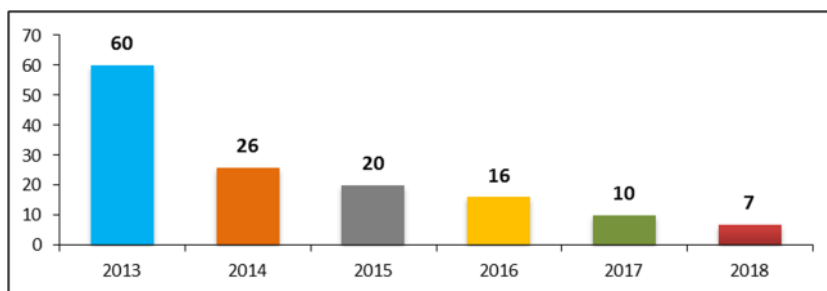
Gambar 2-49 Grafik Ketersediaan Energi di DIY Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Pertanian dan KP DIY, 2019

Gambar 2-50 Grafik ketersediaan Protein di DIY Tahun 2014-2018

Tingkat kerawanan pangan di tingkat desa dinilai dari tiga indikator yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, serta aspek pemanfaatan pangan. Jumlah desa rawan pangan di DIY terus menurun dari 103 desa pada tahun 2010 menjadi 7 desa rawan pangan pada tahun 2018. Sebagian besar desa rawan pangan di DIY disebabkan oleh aspek akses pangan yang terkait erat dengan kemiskinan. Desa rawan pangan tersebut tersebar di Kabupaten Bantul 2 desa (Trimurti dan Guwosari), Kabupaten Kulon Progo 2 desa (Kalirejo, Banjarsari, dan Kebonharjo), dan Kabupaten Gunungkidul 2 desa (Tegalrejo dan Watugajah). Berbagai intervensi kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penurunan jumlah desa rawan pangan diantaranya peningkatan produksi pertanian dan peternakan, pemeliharaan kesehatan, pengembangan kelembagaan distribusi pangan dan keuangan desa, serta penggiatan usaha ekonomi produktif di desa tersebut.



Sumber : Dinas Pertanian dan KP DIY, 2019

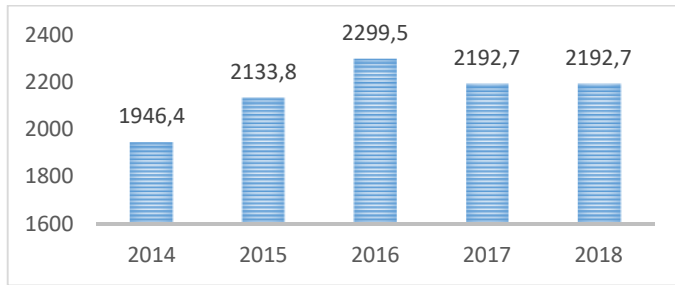
Gambar 2-51 Grafik Jumlah Desa Rawan Pangan Tahun 2013-2018

2.1.3.1.9.2 Distribusi Pangan

Distribusi antar waktu dan antar wilayah dari produksi setempat sudah dilaksanakan secara baik di DIY. Selain itu, pasokan bahan pangan juga terselenggara dengan lancar sebagai dampak tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai. Upaya pengendalian harga bahan pangan strategis dilaksanakan melalui fasilitasi stabilisasi harga bahan pangan dan peningkatan ketersediaan pangan setempat melalui pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat untuk wilayah yang surplus bahan pangan serta Lembaga Akses Pangan Masyarakat untuk daerah rawan pangan. Selain itu, pelaksanaan operasi pasar dilakukan melalui koordinasi dengan OPD terkait bersama BULOG. Sampai dengan saat ini, sudah difasilitasi sebanyak 104 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari target 392 Gapoktan untuk stabilisasi harga komoditas gabah/beras, jagung, kedelai dan ubi kayu/gaplek, 31 Gapoktan dari target 94 Gapoktan untuk mendukung ketersediaan bahan pangan di tingkat rumah tangga. Meskipun pengendalian harga ini masih belum dapat dilaksanakan secara optimal, tetapi upaya-upaya yang sudah dilaksanakan ini dapat mendukung stabilisasi harga yang terjadi baik di tingkat petani selaku produsen sekaligus di tingkat konsumen.

2.1.3.1.9.3 Konsumsi dan Pengawasan Pangan

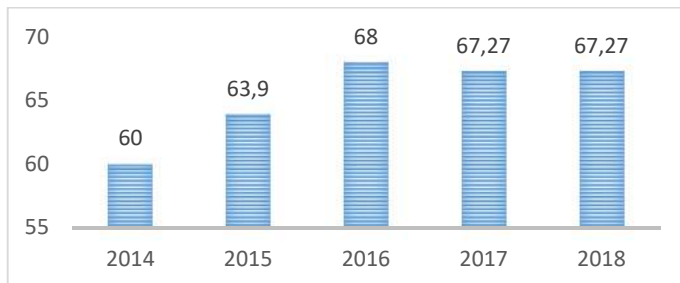
Berdasarkan standar Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.150 Kkcal/kapita/hari, jumlah konsumsi energi penduduk DIY pada tahun 2018 sebesar 2192,7 Kkcal/kapita/hari sudah melampaui standar konsumsi energi. Konsumsi energi penduduk DIY cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun angka tahun 2017 dan 2018 masih lebih rendah di bandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 2299,5 Kkcal/kapita/hari.



Sumber : Dinas Pertanian dan KP DIY, 2019

Gambar 2-52 Grafik Jumlah Perkembangan Konsumsi Enerdi Penduduk DIY Tahun 2014-2018

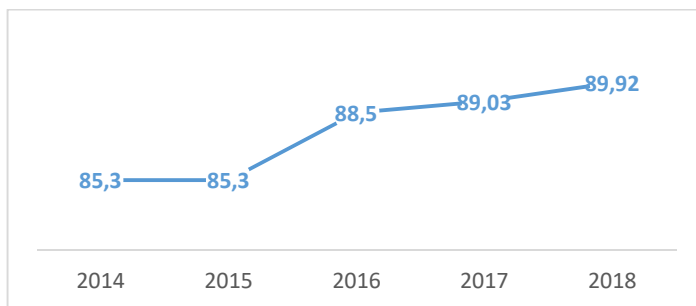
Konsumsi protein penduduk DIY juga terus meningkat mulai tahun 2014 hingga 2018. Nilai konsumsi protein penduduk DIY selama lima tahun terakhir juga telah melampaui standar Angka Kecukupan protein yang dianjurkan 52 gr/kapita/hari. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan penduduk DIY dalam mengkonsumsi sumber protein seperti daging, telur, susu terus meningkat, sehingga dapat diasumsikan bahwa daya beli masyarakat meningkat.



Sumber: Dinas Pertanian dan KP DIY, 2019

Gambar 2-53 Grafik Perkembangan Konsumsi Protein Penduduk di DIY Tahun 2014-2018

Tingkat dan kualitas konsumsi pangan tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH DIY pada tahun 2018 adalah 89,3. Meskipun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas konsumsi pangan semakin meningkat, namun masih terdapat asupan gizi dari beberapa kelompok bahan makanan berada dibawah rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII tahun 2004.



Sumber: Dinas Pertanian dan KP DIY, 2019

Gambar 2-54 Grafik Skor Pola Pangan Harapan di DIY Tahun 2014-2018

Tingkat asupan konsumsi pangan masyarakat DIY masih didominasi konsumsi pangan kelompok padi-padian terutama beras dan kelompok gula. Di sisi lain konsumsi pangan lainnya diantaranya umbi-umbian, kacang-kacangan, serta buah dan sayuran kurang dari yang dianjurkan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya dalam rangka penganekaragaman pangan, terutama berbasis sumberdaya pangan lokal DIY.

Selain itu, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah aspek keamanan pangan. Hal ini dikarenakan kondisi keamanan pangan sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat di seluruh lapisan. Permasalahan yang terkait dengan keamanan pangan disebabkan oleh produk pangan yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang mengandung bahan berbahaya, cemaran mikroba melebihi batas, serta menggunakan bahan tambahan pangan melebihi batas yang diijinkan. Oleh karena itu, upaya pengawasan keamanan pangan terus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Berbagai upaya tersebut diantaranya adalah pengawasan di pasar dan sekolah serta pembinaan produsen pangan dalam rangka sertifikasi keamanan pangan.

2.1.3.1.10 Urusan Pertanahan

Pemerintah Daerah DIY sebagai daerah Otonom melaksanakan urusan wajib pertanahan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Selain kedudukan sebagai daerah otonom, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemda DIY juga berkedudukan sebagai daerah istimewa dimana Urusan Pertanahan menjadi salah satu urusan yang diamanahkan sebagai urusan keistimewaan.

Urusan pertanahan di DIY bersifat khusus karena merupakan daerah bekas Swapraja. Pada masa Swapraja, Kasultanan Nyagogyakarta Hadiningrat (selanjutnya disebut Kasultanan) dan Kadipaten Pakualaman (selanjutnya

disebut Kadipaten) memberikan hak pemanfaatan tanah kepada masyarakat dan Kelurahan (penyebutan Desa pada waktu itu) dengan sejumlah hak pemanfaatan adat, seperti magersari, ngindhung, hanganggo turun-temurun, dan hanggaduh (atau anggadhuh) melalui serat kekancingan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Pasal 7 ayat (2) mengatur tentang 5 (lima) kewenangan istimewa bagi DIY, salah satunya kewenangan istimewa bidang Pertanahan. Kewenangan istimewa adalah kewenangan tambahan tertentu bagi DIY di samping wewenang yang sudah ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Sebagai tindaklanjut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Pemerintah Daerah DIY mengundang Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 45 Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang kewenangan umum Pemerintah Daerah DIY dalam urusan pertanahan, diantaranya izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan, dan perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Selanjutnya pada Pasal 50 Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang kewenangan khusus Pemerintah Daerah DIY dalam pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, dilakukan dengan :

1. Memfasilitasi penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; dan
2. Memfasilitasi pembentukan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Dalam UU No 13/2012 dan Perdais DIY No 1/2013 urusan Pertanahan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Seluruh bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten pada dasarnya dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dalam peraturan perundangan. Pasal 3 Perdais DIY No. 1/2017 menjelaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten ditujukan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan/atau untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yang dimaksud dengan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten terdiri dari penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Sedang yang dimaksud dengan pemanfaatan berupa perlindungan, penggunaan dan pelepasan tanah kasultanan dan tanah kadipaten.

Sampai dengan tahun 2019 pada posisi bulan Januari, jumlah total bidang tanah SG, PAG hasil inventarisasi sebanyak 13.944 bidang tanah, yang telah didaftarkan sebanyak 7928 bidang dan yang telah terbit sertifikatnya

sebanyak 3177 bidang. Sedang yang belum terbit sertifikatnya sebanyak 4751 bidang. Adapun untuk proses pendaftaran tanah Kasultanan dan Kadipaten dirinci seperti dalam tabel dibawah ini .

Tabel 2-71 Rekap Inventarisasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten s.d Tahun 2019

NO	KAB/ KOTA	INVENTARISASI			PENDAFTARAN								TERBIT SERTIFIKAT								BELUM TERBIT SERTIFIKAT								Belum Terbit Sertifikat Diperbandingkan Dengan Hasil Inventarisasi	Ket
		SG	PAG	JML	2013	2014	2015	2016	2017	2018	JML	2013	2014	2015	2016	2017	2018	JML	2013	2014	2015	2016	2017	2018	JML					
		BID	BID	BID																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 (6-13)	21 (7-14)	22 (8-15)	23 (9-16)	24 (10-17)	25 (11-18)	26	27 (5-19)	28			
1	Yogya	338	68	406	45	166	75	50	70	50	456	45	116	72	50	45	0	328	0	50	3	0	25	50	128	78				
2	Bantul	3432	0	3432	0	171	1367	300	350	359	2547	0	168	1313	151	0	0	1632	0	3	54	149	350	359	915	1800				
3	Kulon Progo	1286	288	1574	0	216	176	240	350	400	1382	0	215	2	0	0	0	217	0	1	174	240	350	400	1165	1357				
4	Gunung kidul	4046	0	4046	0	54	300	300	250	750	1654	0	54	300	300	0	0	654	0	0	0	0	250	750	1000	3392				
5	Sleman	4486	0	4486	0	137	252	250	250	1000	1889	0	93	89	164	0	0	346	0	44	163	86	250	1000	1543	4140				
	Jumlah	13588	356	13944	45	744	2170	1140	1270	2559	7928	45	646	1776	665	45	0	3177	0	98	394	475	1225	2559	4751	10767				

2.1.3.1.11 Urusan Lingkungan Hidup

Indikator sasaran Pemerintah Daerah DIY dalam RPJMD tahun 2017 – 2022 untuk urusan lingkungan hidup yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH terdiri dari 3 indeks yaitu:

$$\text{IKLH Provinsi} = (30\% \times \text{IKA}) + (30\% \times \text{IKU}) + (40\% \times \text{IKTL})$$

1. Indeks Kualitas Air (IKA), berupa hasil pengukuran kualitas air di 10 sungai untuk 7 parameter yaitu DO, TSS, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform. Sungai yang menjadi lokasi pengukuran yaitu S. Winongo, S. Code, S. Gajah Wong, S. Tambakbayan, S. Kuning, S. Konteng, S. Bedog, S. Beli, S. Bulus, dan S. Oyo.
2. Indeks Kualitas Udara (IKU), berupa hasil pengukuran kualitas udara pada kawasan transportasi, industri, perkantoran/komersial, dan permukiman untuk 2 parameter yaitu SO₂ dan NO₂.
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), berupa hasil pengukuran luas tutupan lahan berupa hutan dan vegetasi.

2.1.3.1.11.1 Indeks Kualitas Air

IKA didapatkan melalui pengukuran 7 parameter kualitas air yang dilakukan 3 kali dalam setahun yaitu bulan Februari mewakili musim hujan, bulan Mei mewakili perubahan dua musim dan bulan Agustus mewakili musim kemarau. Dalam tiap periode pengukuran diambil sampel di 50 titik sehingga data yang ada sebanyak 150 titik.

Tabel 2-72 Nilai Indeks Kualitas Air 10 Sungai di DIY tahun 2018

Nama Sungai	Nilai IKA					
	2016	2017	2018	Feb 2018 (Hujan)	Mei 2018 (Peralihan)	Agu 2018 (Kemarau)
Winongo	32,50	33,33	37,50	32,50	35,00	45,00
Code	35,83	33,33	41,67	35,00	45,00	45,00
Gajahwong	33,33	31,67	38,33	30,00	37,50	47,50
Tambakbayan	31,67	40,00	35	30,00	30,00	45,00
Kuning	33,33	33,33	36,67	30,00	40,00	40,00
Konteng	31,67	36,67	43,33	40,00	45,00	45,00
Bedog	27,33	31,33	43,33	38,00	46,00	46,00
Belik	14,44	27,78	43,33	36,66	43,33	50,00
Bulus	23,33	43,33	50,00	50,00	50,00	50,00
Oyo	28,33	28,33	33,33	30,00	35,00	35,00
Rerata	29,18	33,91	40,25	35,22	40,68	44,85

Sumber: Laporan IKLH DIY tahun 2018

Dari pemantauan 10 sungai di DIY, IKA semakin meningkat dari sebesar 29,18 pada tahun 2016 menjadi 33,91 pada tahun 2018 dan 40,25 pada tahun 2018. Hasil pemantauan tahun 2018 periode Februari, Mei dan Agustus tahun 2018, dapat dilihat bahwa indeks kualitas air terus mengalami kenaikan dari musim hujan (Februari) menuju musim peralihan (Mei) dan musim kemarau (Agustus). Hal ini kemungkinan disebabkan oleh turunnya kadar parameter pencemar air sungai dari *point source* dan *non point source*.

2.1.3.1.11.2 Indeks Kualitas Udara

IKU didapatkan melalui pengukuran 2 parameter kualitas udara (SO₂ dan NO₂) dengan menggunakan metode *Passive Sampler* dengan titik pemantauan di kawasan transportasi, industri, perkantoran/komersial, dan permukiman. SO₂ bersumber dari emisi industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar dan sulfur, sedangkan NO₂ bersumber dari emisi kendaraan bermotor berbahan bakar bensin.

Tabel 2-73 Nilai Indeks Kualitas Udara di DIY tahun 2018

No	Kota	Peruntukan	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 1	TAHAP 2
			Kadar NO2	Kadar NO2	Kadar SO2	Kadar SO2
			µg/Nm3	µg/Nm3	µg/Nm3	µg/Nm3
1	KULON PROGO (3401)	Transportasi	17,90	15,00	<2.57	3,09
		Industri	8,10	5,10	<2.57	4,03
		Pemukiman	8,40	7,50	<2.57	3,32
		Perkantoran/ Komersial	9,80	9,40	<2.57	5,57
2	BANTUL (3402)	Transportasi	17,90	15,40	7,71	11,07
		Industri	27,40	23,30	5,72	9,09
		Pemukiman	11,30	9,30	5,14	4,01
		Perkantoran/ Komersial	11,30	12,90	<2.57	5,63
3	GUNUNG KIDUL (3403)	Transportasi	11,00	8,40	33,39	13,47
		Industri	11,40	2,20	<2.57	13,06
		Pemukiman	7,30	8,90	22,29	8,06
		Perkantoran/ Komersial	11,10	3,40	10,70	8,97
4	SLEMAN (3404)	Transportasi	21,40	25,30	12,85	9,02
		Industri	12,00	9,20	38,69	13,58
		Pemukiman	14,10	12,20	<2.57	7,14
		Perkantoran/ Komersial	8,00	9,70	3,02	11,68
5	KOTA Yogyakarta (3471)	Transportasi	21,00	23,40	4,86	3,86
		Industri	20,50	25,60	4,38	4,06
		Pemukiman	21,30	24,20	11,56	10,60
		Perkantoran/ Komersial	22,80	17,90	<2.57	3,24
		Rata - rata	14.06		8.32	

Berdasarkan pemantauan kualitas udara *passive sampler*, diperoleh kadar NO₂ sebesar 14,06 µg/Nm₃ (Baku Mutu 40 µg/Nm₃) dan kadar SO₂

sebesar 8,32 µg/Nm³ (Baku Mutu 20 µg/Nm³). Selanjutnya melalui konversi diperoleh IKU DIY tahun 2018 sebesar 84,24 tidak mencapai target tahun 2018 sebesar 87,06 dan menurun dari capaian tahun 2017 sebesar 88,08. Penurunan IKU ini dapat disebabkan kenaikan emisi dari transportasi dan industri serta belum optimalnya penyerapan emisi melalui peningkatan tutupan vegetasi. Kenaikan emisi kendaraan bermotor dapat disebabkan kurangnya pemeliharaan rutin mesin serta penggunaan bahan bakar beroktan rendah mengandung timbal yang menghasilkan pembakaran tidak sempurna dan emisi NO₂ lebih tinggi. Kenaikan emisi industri dapat disebabkan belum optimalnya penerapan teknologi untuk mengurangi serta jenis bahan bakar yang kurang baik kualitasnya.

2.1.3.1.11.3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan

IKTL didapatkan dari perhitungan tutupan vegetasi dibandingkan dengan luas wilayah administrasi. Jenis tutupan vegetasi yang dapat dihitung adalah hutan negara, hutan rakyat, perkebunan, pertanian lahan kering, kebun campuran, semak, ruang terbuka hijau perkotaan dan taman keanekaragaman hayati, dengan melalui konversi untuk jenis tutupan vegetasi selain hutan.

Rumus perhitungan IKTL adalah :

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3)$$

Angka 84,3 adalah nilai konstanta yang merupakan persentase luasan tutupan vegetasi ideal.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2018 adalah sebesar 60,68 melebihi target dalam RPJMD 55,5. IKTL ini diperoleh dari luasan tutupan vegetasi di DIY yang telah dikonversi berdasarkan ketentuan dari kementerian Lingkungan Hidup (KLHK). Data tutupan vegetasi di DIY, sebagai berikut:

Tabel 2-74 Data Luas Tutupan Vegetasi dan Hasil Konversinya

Jenis tutupan vegetasi	Luas (Ha)	Faktor konversi	Hasil Konversi
Hutan Negara	19.133,89	1	19.133,89
Hutan Rakyat	78.400,27	1	78.400,27
Perkebunan	64.491,91	0,4	25.796,76
Pertanian lahan kering	38.620,00	0,1	3.862,00
Kebun campuran	162,00	0,4	64,80
Semak dan RTH	9.818,78	0,6	5.891,27
Taman Kehati	16,80	0,6	10,08
JUMLAH	210.643,65		133.159,072

Jenis tutupan vegetasi	Luas (Ha)	Faktor konversi	Hasil Konversi
LUAS DIY		318.600,00	

Sumber data : BLH DIY dan Dishutbun DIY tahun 2019

2.1.3.1.12 Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dimana hasil kinerja pada urusan tersebut menjadi dasar untuk penyediaan pelayanan dasar, khususnya bidang kesehatan dan pendidikan.

Selama periode 2014-2018, cakupan perekaman penduduk KTP-EL di DIY sudah baik dimana capaiannya di atas 90% dan lebih tinggi dibanding cakupan nasional.

Pada tahun 2018, jumlah penduduk wajib memiliki KTP sebanyak 2.763.181 orang dari total jumlah penduduk sebanyak 3.616.568 orang. Sementara itu, jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman sebanyak 2.728.559 orang atau sebesar 98,75%

Tabel 2-75 Jumlah Penduduk Wajib KTP dan Jumlah Penduduk yang telah Melakukan Perekaman KTP EL di DIY, 2014-2018

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Wajib KTP Telah Perekaman	Angka Perekaman
2014	3.551.679	2.598.163	2.464.342	94,85%
2015	3.595.256	2.785.718	2.569.245	92,23%
2016	3.587.758	2.717.385	2.640.612	97,17%
2017	3.606.111	2.754.232	2.695.705	97,88%
2018	3.616.568	2.763.181	2.728.559	98,75%

Sumber: Biro Tata Pemerintahan, Setda DIY 2019

Pada tahun 2018, dari jumlah anak usia di bawah 18 tahun di DIY sebanyak 856.464 anak memiliki akta dan sebanyak 58.442 anak belum memiliki akta. Jumlah anak yang tidak berakta sebagian besar berada di Kabupaten Sleman (28.050 anak) diikuti Kabupaten Gunungkidul (14.330 anak), Kabupaten Bantul (8.293 anak), Kota Yogyakarta (5.532 anak), dan Kabupaten Kulon Progo (2.237 anak). Penyebab dari masalah tidak memiliki akta antara lain ketiadaan biaya pengurusan akta, rendahnya pemahaman warga dan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah.

Tabel 2-76 Jumlah Anak yang Memiliki Akta dan Belum Memiliki Akta, 2018

Kabupaten/Kota	Jumlah Anak (usia di bawah 18 Tahun)	Memiliki Akta		Belum Memiliki Akta	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Kulon Progo	110.567	108.330	97,98	2.237	2,02
Bantul	238.968	230.675	96,53	8.293	3,47
Gunungkidul	176.079	161.749	91,86	14.330	8,14
Sleman	274.549	246.499	89,78	28.050	10,22
Kota Yogyakarta	114.743	109.211	95,18	5.532	4,82
Total	914.906	856.464	93,61	58.442	6,39

Sumber: Biro Tata Pemerintahan, Setda DIY 2019

2.1.3.1.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang harus dilakukan oleh semua Pemerintah Daerah di Indonesia. Bahkan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa pemberdayaan masyarakat juga menjadi kewajiban pemerintah desa.

Pemberdayaan masyarakat di DIY dihadapkan pada beberapa masalah. Masalah pertama adalah masih tingginya angka kemiskinan di DIY, yang bahkan berada di atas rata-rata nasional. Selama periode September 2012 sampai dengan September 2018, persentase penduduk miskin di D.I. Yogyakarta berkurang dari 15,88 persen menjadi 11,81 persen.



Gambar 2-55 Persentase penduduk Miskin di DIY, September 2012- September 2018

Berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di D.I. Yogyakarta paling banyak terdapat di daerah perkotaan. Pada September 2018, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan D.I. Yogyakarta tercatat sebanyak 298,47 ribu orang atau hampir dua kali lipat jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan yang banyaknya 151,78 ribu orang. Meskipun demikian, secara persentase jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan, angkanya mencapai 14,71. Adapun persentase penduduk miskin di perkotaan sebanyak 10,73 persen.

Tabel 2-77 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah, September 2017-September 2018

Daerah/Tahun	Jumlah penduduk miskin (000)	Persentase penduduk miskin
<i>Perkotaan</i>		
September 2017	298,39	11,00
Maret 2018	305,24	11,03
September 2018	298,47	10,73
<i>Perdesaan</i>		
September 2017	167,94	15,86
Maret 2018	154,86	15,12
September 2018	151,78	14,71
<i>Kota+Desa</i>		
September 2017	466,33	12,36
Maret 2018	460,10	12,13
September 2018	450,25	11,81

Sumber : BPS, Susenas September 2017, Maret 2018, September 2018

Masalah selanjutnya yang harus dihadapi adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pemberdayaan masyarakat. Padahal, pemberdayaan masyarakat bergerak dengan prinsip demokrasi. Konsep pemberdayaan masyarakat memerlukan partisipasi masyarakat secara langsung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program karena pemberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat diantaranya diwujudkan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat baik di bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kesejahteraan keluarga.

2.1.3.1.13.1 Lembaga pemberdayaan masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang

pemerintahan. Jumlah LPM aktif menggambarkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah.

Kelompok binaan LPM merupakan kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Pemda DIY melibatkan LPM dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat diantaranya kegiatan revitalisasi Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta (*Segoro Amarto*) dan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMMD). Kegiatan Revitalisasi Segoro Amarto dilakukan sejak tahun 2018 di enam kelurahan di Kota Yogyakarta (Gedongkiwo, Terban, Prenggan, Pandeyan, Prawirodirjan, Pringgokusuman) dengan konsep *community development* penguatan kegotongroyongan melalui usaha ekonomi berbasis komunitas. Peran LPM dalam kegiatan fasilitasi TMMMD adalah dengan pembelanjaan bantuan hibah Pemda DIY dalam wujud bahan material untuk pembangunan fisik melalui program TMMMD.

2.1.3.1.13.2

2.1.3.1.13.2 Posyandu aktif

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) masuk dalam ranah pemberdayaan masyarakat karena berbagai kegiatan yang dilaksanakan diprakarsai oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Penyelenggaraan Posyandu berkonsep demokrasi, dimana pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat. Keberadaan posyandu memiliki nilai strategis dalam pembangunan kualitas manusia sejak dini karena di dalam posyandu diberikan layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini. Tabel berikut menunjukkan persentase posyandu aktif di DIY.

Tabel 2-78 Posyandu Aktif di DIY Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Man diri	Purna ma	Mad ya	Prata ma	Total	Posyandu aktif (strata Mandiri dan Purnama)	Persentase
1	Kota Yogyakarta	78	43	455	47	623	121	19,42
2	Kabupaten Bantul	390	523	188	40	1141	913	80,02
3	Kabupaten Sleman	648	608	183	53	1492	1256	84,18
4	Kabupaten Kulon Progo	604	226	110	22	962	830	86,28

No	Kabupaten/Kota	Mandiri	Purnama	Madya	Pratama	Total	Posyandu aktif (strata Mandiri dan Purnama)	Persentase
5	Kabupaten Gunungkidul	660	586	221	0	1467	1246	84,94

Sumber: BPPM DIY, 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Posyandu yang aktif di DIY rata-rata cukup tinggi, di atas 80%. Persentase posyandu aktif paling tinggi di Kabupaten Kulon Progo dengan angka 86,28%, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo paling berhasil mendorong Posyandu untuk menjalankan perannya secara aktif sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Sedangkan persentase posyandu aktif paling rendah adalah Kota Yogyakarta yaitu pada angka 19,42%. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi Kota Yogyakarta agar meningkatkan komitmennya dalam mendorong peran aktif Posyandu sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

2.1.3.1.13.3 PKK Aktif

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui Gerakan PKK. Gerakan ini, merupakan sebuah gerakan yang memberdayakan perempuan sebagai kekuatan penggerak keluarga. Dalam praktiknya, gerakan ini dikelola dan digerakkan oleh Tim Penggerak PKK (TP PKK) yang berada di tingkat pusat sampai dengan desa/kelurahan. Pada level daerah, TP PKK yang diketuai oleh isteri Pimpinan Daerah.

Cakupan PKK aktif di DIY sejak tahun 2016 menunjukkan angka yang mengembirakan dimana dari 522 kelompok PKK seluruhnya tergolong aktif (100%) seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-79 Jumlah PKK Aktif di DIY Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Jumlah PKK	Jumlah PKK Aktif	%
Yogyakarta	60	60	100
Bantul	93	93	100
Kulonprogo	101	101	100
Gunungkidul	163	163	100
Sleman	104	104	100
DIY	1	1	100
Jumlah DIY	522	522	100

Sumber: BPPM pada Dataku, 2018

Gerakan PKK menjangkau keluarga melalui “Kelompok Dasawisma”, yaitu kelompok 10–20 KK yang berdekatan. Ketua Kelompok Dasawisma dipilih

dari dan oleh anggota kelompok. Ketua Kelompok Dasawisma membina sepuluh rumah dan mempunyai tugas menyuluh, menggerakkan dan mencatat kondisi keluarga yang ada dalam kelompoknya, seperti adanya ibu hamil, ibu menyusui, balita, orang sakit, orang yang buta huruf dan sebagainya. Informasi dari semuanya ini selanjutnya disampaikan kepada kelompok PKK setingkat di atasnya, yang akhirnya sampai di Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan.

2.1.3.1.14 Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kependudukan merupakan aspek penting dalam pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan harus meletakkan penduduk sebagai target dan juga sebagai pelaku pembangunan. Ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang mengatur agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip “Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan” dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Lebih lanjut, Undang-Undang ini pun mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, sebagai turunan UU No 52/2009, pasal 5 menyebutkan bahwa arah kebijakan nasional perkembangan kependudukan mencakup 4 hal pokok, yaitu (a) menjamin tercapainya bonus demografi, (b) meningkatkan kualitas penduduk untuk memanfaatkan bonus demografi, (c) memberdayakan penerapan fungsi-fungsi keluarga, dan (d) memperkuat gotong royong berbasis keluarga. Diantara keempat hal tersebut, dua diantaranya terkait dengan bonus demografi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Perpres No 153 Tahun 2014 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan sebagai turunan dari UU No 52 Tahun 2009, kebijakan kependudukan dibagi menjadi 5 (lima) kluster, yaitu :

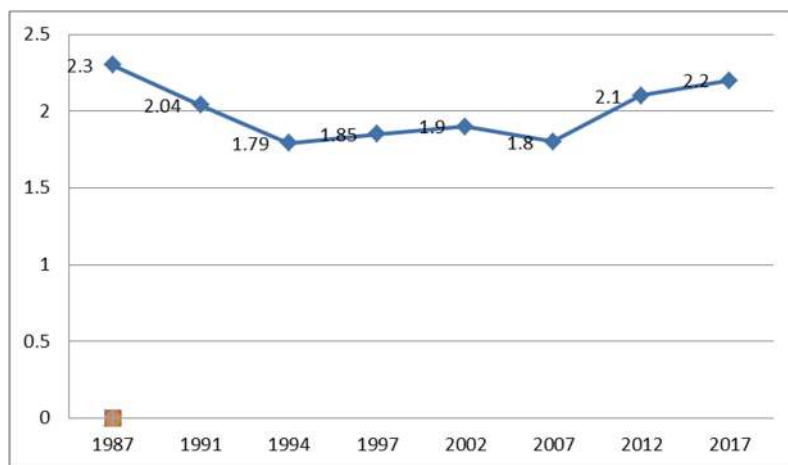
- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;
- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- e. penataan administrasi kependudukan.

Beberapa indikator utama yang dapat menggambarkan pengendalian kuantitas penduduk, yaitu angka fertilitas dan perubahan komposisi penduduk yang menyebabkan perubahan angka ketergantungan penduduk. Sementara itu,

pembahasan mengenai keluarga berencana perlu meliputi beberapa pencapaian utama dan isu strategis dalam pembangunan bidang ini, yakni akseptor KB dan *unmet need*.

2.1.3.1.14.1 Angka Fertilisasi dan Total Fertility Rate

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah dengan pencapaian angka kelahiran yang sangat rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Berdasarkan hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), setelah mengalami penurunan secara terus menerus sejak tahun 1987 hingga tahun 1994, Total Fertility Rate (TFR) DIY kembali mengalami kenaikan perlahan mulai tahun 1997 hingga tahun 2017. Peningkatan inilah yang disinyalir menjadi penyebab utama terjadinya peningkatan pertumbuhan penduduk di DIY. Angka TFR 2,2 dipandang oleh ahli kependudukan masih dalam kategori *on track* dalam menuju penduduk tumbuh seimbang, tetapi perlu intervensi agar angka TFR tidak terus meningkat dan menyebabkan deviasi terhadap target RPJMD DIY untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dengan TFR 2,1.



Sumber: SDKI 1987-2017

Gambar 2-56 Perubahan TFR di DIY Berdasarkan SDKI

2.1.3.1.14.2 Perubahan Komposisi Penduduk

Berdasarkan proyeksi penduduk periode 2010-2035 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya dalam hal komposisi umur penduduk, penduduk usia muda (<15 tahun) atau penduduk yang belum produktif akan semakin menurun jumlahnya dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 jumlahnya tercatat sekitar 22,1 persen dari total keseluruhan penduduk dan diproyeksikan

mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai 18,6 persen pada tahun 2035. Jumlah penduduk muda yang semakin rendah ini merupakan akibat dari angka kelahiran DIY yang relatif rendah. Sementara itu, proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang pada 2010 tercatat sekitar 68,6 persen akan menurun perlahan pada kisaran 67,4 di tahun 2035 mendatang. Penurunan yang cukup pelan namun pasti pada kelompok umur ini akan memberikan dampak terhadap beban ketergantungan yang semakin meningkat di tahun-tahun mendatang. Selain masalah tersebut, terdapat pula peningkatan jumlah penduduk usia lanjut (65 ke atas) yang juga meningkatkan beban ketergantungan.

Tabel 2-80 Proyeksi Parameter Kependudukan Tahun 2010-2035

Parameter	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Penduduk						
Laki-laki	1710,9	1818,8	1921,6	2013,2	2090,7	2153,8
Perempuan	1756,6	1860,4	1960,7	2051,4	2129,5	2194,7
Total	3467,5	3679,2	3882,3	4064,6	4220,2	4348,5
<i>Komposisi Umur</i>						
0-14	22,1	21,8	21,5	20,9	19,8	18,6
15-64	68,6	69,0	68,7	68,1	67,7	67,4
65+	9,3	9,2	9,8	11,0	12,5	14,0
DR	45,8	44,9	45,6	46,8	47,7	48,4
<i>Fertilitas</i>						
TFR	1,91	1,87	1,82	1,75	1,69	1,62
GRR	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
NRR	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
CBR	15,2	14,7	13,9	12,8	12	11,4
Jumlah Kelahiran (000)	52,6	53,9	54	52,1	50,5	49,7
<i>Mortalitas</i>						
e0 Laki-laki	72,4	72,9	73,2	73,5	73,6	73,7
e0 Perempuan	76,1	76,5	76,8	77,2	77,2	77,3
e0 L + P	74,2	74,6	75	75,2	75,4	75,5
IMR Laki-laki	16,2	14,8	13,8	13,3	13	12,7
IMR Perempuan	11	10,4	9,9	9,6	9,5	9,4
IMR L+P	13,7	12,7	11,9	11,5	11,2	11,1
CDR	8	7,9	8	8,3	8,8	9,6
Jumlah Kematian	27,7	29	30,9	33,6	37,2	41,7
<i>Migrasi</i>						
Net Migration Rate	4,7	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa angka ketergantungan atau *dependency ratio* (DR) di DIY sudah menurun dan mencapai angka terendah pada tahun 2015 tetapi diproyeksikan meningkat hingga tahun 2035. Peningkatan

angka ketergantungan ini disebabkan karena peningkatan penduduk lanjut usia yang sangat tajam disertai melambatnya peningkatan jumlah penduduk usia produktif.

2.1.3.1.14.3 Unmet Need

Unmet need adalah perempuan berstatus menikah yang kebutuhan pelayanan KBnya tidak terpenuhi. Hasil SDKI 2012 menunjukkan bahwa 11% perempuan berstatus menikah di Indonesia mempunyai kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi. Di antara mereka, 4% sesungguhnya ingin menunda kelahiran berikutnya untuk jangka waktu 2 tahun atau lebih, dan 7% sebenarnya tidak ingin mempunyai anak lagi. Namun, mereka memiliki beberapa alasan yang menyebabkan tidak melakukan KB, yang antara lain meliputi kekhawatiran terhadap kegagalan kontrasepsi dan kesulitan dalam mengakses pelayanan kontrasepsi.

Secara keseluruhan, *unmet need* DIY tahun 2017 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan *unmet need* DIY tahun 2016. Pada tahun 2016 *unmet need* DIY adalah 8,01 persen. Kemudian pada tahun 2017 *unmet need* DIY tercatat 10,08 persen. Capaian *Unmet Need* DIY yang semakin naik menandakan semakin rendahnya kesadaran wanita usia subur untuk menggunakan kontrasepsi dan semakin sulitnya akses terhadap pelayanan kontrasepsi di DIY. Dengan demikian, masih dibutuhkan upaya ekstra keras untuk memenuhi kebutuhan kontrasepsi DIY, terlebih karena *unmet need* ini berkorelasi dengan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) yang pada level tertentu dapat mendorong peningkatan angka kematian ibu khususnya yang disebabkan oleh praktik aborsi yang tidak aman.

Tabel 2-81 Unmet Need KB di DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2017

Lokasi	Unmet Need			
	2014	2015	2016	2017
DIY	7,39	7,73	8,01	10,08
Kulon Progo	6,45	7,16	6,84	13,32
Bantul	6,17	5,72	5,87	8,42
Gunungkidul	7,10	8,27	7,93	8,43
Sleman	8,67	8,68	9,73	10,64
Kota Yogyakarta	9,25	10,39	11,40	13,72

Sumber : BKKBN Perwakilan DIY Tahun 2018

2.1.3.1.14.4 Ketahanan Keluarga

Pembangunan keluarga merupakan salah satu bentuk upaya untuk mencari jalan penyelesaian banyak masalah di dalam upaya perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan dan perwujudan kesetaraan gender. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, keluarga memberi corak pada masyarakat dan di dalamnya dikembangkan Sumber Daya Manusia (SDM). Baik buruknya SDM dan juga masyarakat, ikut ditentukan oleh bagaimana keluarga. Keluarga juga merupakan faktor pendukung untuk keberhasilan anggotanya dan masyarakatnya. Keluarga juga merupakan wahana utama untuk penyelesaian banyak masalah yang dialami oleh individu.

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting di dalam lingkungan, masyarakat dan bangsa. Di Indonesia, pembangunan keluarga diamanatkan dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan bathin. Ketahanan Keluarga menjadi salah satu sub-urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib untuk menyelenggarakannya. ketahanan keluarga perlu ditingkatkan di dalam pembangunan keluarga agar mampu menghadapi berbagai tantangan menuju terciptanya keluarga yang sejahtera dan tantangan era globalisasi.

Dalam hal ketahanan keluarga, hal yang menjadi permasalahan utama adalah perceraian. Perceraian pasangan menikah akan memberikan dampak baik bagi pasangan tersebut, anak, maupun dampak sosial di masyarakat. Tabel berikut menunjukkan bahwa angka perceraian di DIY masih sangat tinggi. Meskipun data perceraian tahun 2014 - 2017 menunjukkan trend penurunan di masing-masing kabupaten/kota (kecuali Bantul), namun penurunan tersebut belum signifikan dan masih sangat tinggi.

Tabel 2-82 Angka Perceraian di DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2017

N o.	Kab/Kota	2014		2016		2017		2018		Trend
		Pengadila n Agama	Pengadila n Negeri	Pengadila n Agama	Pengadila n Negeri	Pengadila n Agama	Pengadila n Negeri	Pengadila n Agama	Pengadila n Negeri	
1	Kulon progo	611	10	582	11	514	25	602	12	Turun
2	Bantul	1381	41	1240	-	1279	43	1423	39	Naik
3	Gunung kidul	1557	27	1447	24	1303	33	1254	28	Turun
4	Sleman	1389	91	1360	119	1516	-	1267	132	Turun
5	Yogyakarta	660	33	592	87	548	80	564	72	Turun
6	D I Yogyakarta	5589	202	5221	241	5160	181	5110	283	Turun

Sumber : BPPM DIY, 2019

2.1.3.1.14.5 Perkawinan Usia Anak

Kematian ibu dilaporkan meningkat 2-4 kali lipat pada kehamilan usia dini dibandingkan dengan kehamilan di atas usia 20 tahun. Badan Pusat Statistik melaporkan pada 2016, sekitar 26,16% perempuan yang melahirkan anak pertama mereka berada pada usia di bawah 20 tahun. Dengan kata lain, lebih dari seperempat perempuan usia subur di Indonesia, melahirkan pada usia di bawah 20 tahun.

Perkawinan usia anak merupakan masalah serius di mana akan berujung pada kehamilan anak, yang selanjutnya, anak akan melahirkan anak. Kehamilan atau persalinan pada usia sangat dini akan berisiko si ibu mempunyai anak terlalu banyak dan jarak antara kehamilan yang terlalu dekat. Ini terjadi karena mereka memiliki masa usia subur yang lebih panjang dibandingkan bila mereka menikah pada usia dewasa. Selain masalah kesehatan, pernikahan usia anak akan membawa dampak atau permasalahan dalam hal pemenuhan hak anak baik pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Tingginya angka perkawinan anak tidak terlepas dari rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, norma sosial budaya dan keluarga didominasi oleh peran ayah. Norma itu, misalnya, pemahaman atau rasa malu jika anak perempuan mereka terlambat menikah atau menikahkan cepat untuk menghindari perzinahan.

Perkawinan usia anak diketahui dari adanya putusan pengadilan agama tentang dispensasi kawin. Dari data tahun 2014 sampai dengan tahun 2017

dispensasi kawin di DIY masih sangat tinggi, meskipun trend nya menurun. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2-83 Jumlah Putusan Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama di DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2017

No.	PA	DISPENSASI KAWIN				Trend
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
1.	PA Wates	54	45	41	38	Turun
2.	PA Bantul	131	116	87	69	Turun
3.	PA Wonosari	141	109	79	65	Turun
4.	PA Sleman	115	122	103	89	Turun
5.	PA Yogyakarta	41	26	36	33	Turun
6	D.I. Yogyakarta	482	418	346	294	Turun

Sumber: BPPM DIY, 2019

2.1.3.1.15 Urusan Perhubungan

Dalam konteks pembangunan di wilayah DI Yogyakarta, transportasi direncanakan tidak hanya sekedar mendukung pembangunan di DI Yogyakarta tetapi harus mampu menjadi bagian dari arah pembangunan di DI Yogyakarta, yang mengedepankan sektor wisata, pendidikan dan budaya, artinya transportasi harus menjadi bagian dari pendidikan, wisata dan budaya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2018 hingga 2022 sehingga Rancangan RKPD Tahun 2020 harus disusun dengan memperhatikan target indikator yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pembangunan sektor transportasi dalam RPJMD 2017-2022 bukan hanya diukur dari ketersediaan layanan ataupun terbangunnya infrastruktur transportasi seperti jalan, jalan rel, terminal penumpang atau barang, stasiun, bandara dan infrastruktur lainnya (output) tetapi bagaimana memastikan layanan dan infrastruktur yang terselenggara atau terbangun dapat digunakan dan memberikan nilai tambah bagi penggunaannya (*outcome*), serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di DI Yogyakarta (*Impact*).

Dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJMD-DIY) tahun 2017-2022 sektor perhubungan masuk dalam misi ke-1 dan mempunyai sasaran pembangunan pemerintah daerah untuk menurunkannya kesenjangan ekonomi antar wilayah dengan indikator prosentase penyediaan sarana dan prasarana transportasi.

Tujuan pembangunan urusan perhubungan tersebut memiliki 4 (empat) indikator besar yakni :

- Penyediaan Pelayanan Angkutan Umum;
- Penerapan manajemen lalulintas perkotaan pada kawasan prioritas;
- Keselamatan Transportasi;
- Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Transportasi dan Perparkiran.

Penyediaan layanan angkutan umum merupakan upaya pemerintah untuk memfasilitasi mobilitas orang maupun barang. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk menekan tingginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi di jalan yang menyebabkan kemacetan lalulintas. Pelayanan angkutan umum dalam trayek diselenggarakan untuk melayani perkotaan dan kota-kota sekitarnya. Pemerintah Daerah DIY melalui layanan Trans Jogja dengan konsep *buy the service*-nya diselenggarakan untuk melayani kawasan perkotaan Yogyakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sampai dengan tahun 2018 cakupan layanan Trans Jogja telah menjangkau 23 kecamatan dari keseluruhan 25 kecamatan di area Kawasan Perkotaan Yogyakarta dengan operasionalisasi 128 armada pada 17 jalur. Selain layanan Trans Jogja tersebut, masih terdapat operator swasta yang melayani angkutan perkotaan reguler.

Sampai dengan tahun 2018, penumpang yang terlayani oleh angkutan umum perkotaan, baik angkutan perkotaan reguler maupun Trans Jogja adalah sebagai berikut.

Tabel 2-84 Jumlah Penumpang Perkotaan Terangkut Tahun 2008-2018

No.	TAHUN	PENUMPANG TERANGKUT		
		Trans Jogja		Reguler
		penumpang/hari	penumpang/tahun	penumpang/hari
1.	2008	5.172	3.785.964	n/a
2.	2009	7.007	5.114.809	n/a
3.	2010	7.993	5.834.976	n/a
4.	2011	8.239	6.014.334	n/a
5.	2012	8.720	6.382.802	n/a
6.	2013	8.365	6.106.162	n/a
7.	2014	8.913	6.506.290	n/a
8.	2015	9.335	6.468.678	274
9.	2016	8.824	6.409.205	222
10.	2017	7.321	5.317.484	270
11.	2018	8.056	5.880.610	102

Sumber : Dinas Perhubungan DIY, Tahun 2017

Tingginya angka kepemilikan kendaraan bermotor dan tidak adanya kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor di jalan, menyebabkan masyarakat masih leluasa untuk menggunakan kendaraan pribadi dalam melakukan aktivitas dan mobilitas mereka. Dengan kata lain, penyediaan sarana angkutan umum yang baik, tidak akan pernah berhasil jika tidak didukung oleh adanya pengaturan dan penataan manajemen rekayasa lalu lintas yang ber-sinergi pada layanan angkutan umum, termasuk didalamnya adalah mengurangi pergerakan kendaraan bermotor pribadi di jalan.

Berdasarkan Perpres No. 98 tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa Bandar Udara Internasional Yogyakarta (Yogyakarta Internasional Airport / YIA) di Kabupaten Kulon Progo yang mulai beroperasi pada bulan April tahun 2019, maka perlu dipersiapkan moda transportasi yang mendukung konektivitas dari Kota Yogyakarta, serta kawasan kawasan pariwisata dan budaya menuju Bandar Udara atau sebaliknya melalui perencanaan multimoda. Selanjutnya untuk mendukung operasional penuh YIA pada tahun 2020 perlu dilengkapi dengan infrastruktur pendukung khususnya pada jaringan pergerakan dan infrastruktur dasar.

Untuk mempermudah pergerakan angkutan umum dan mengatur pergerakan lalu lintas di persimpangan, telah dilakukan penanganan pada kawasan-kawasan prioritas melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas. Sampai dengan tahun 2011 telah dikembangkan pengaturan lampu lalu lintas di persimpangan dengan konsep ATCS (*area traffic control systems*) dimana dalam konsep ATCS, beberapa persimpangan diatur dalam satu sistem dan saling berkoordinasi. Sampai dengan Tahun 2018 telah terpasang 78 unit ATCS di wilayah Perkotaan DIY yang dianggarkan melalui APBD DIY sebanyak 58 unit dan APBD Kota Yogyakarta sebanyak 20 unit. Sistem pengaturan simpang dengan konsep ATCS ini, didukung dengan *sinyal bus priority*, sehingga memudahkan beberapa angkutan umum yang lewat untuk mendapatkan waktu hijau di persimpangan. Sampai saat ini terdapat 3 (tiga) simpang ATCS di Perkotaan Yogyakarta yang didukung *sinyal bus priority*. Integrasi sistem pengaturan lampu lalu lintas ini, dikendalikan dan dipantau sepenuhnya di Dinas Perhubungan DIY.

Dalam rangka penurunan rasio kecelakaan di wilayah DIY, telah dilakukan Studi tentang Daerah Rawan Kecelakaan yang ditindaklanjuti dengan penanganan pada daerah yang berpotensi menimbulkan kecelakaan melalui penerapan manajemen rekayasa dan pemenuhan fasilitas keselamatan lalu

lintas pada kawasan tersebut. Berdasarkan dari analisis hasil identifikasi data IRSMS maka penanganan Daerah Rawan Kecelakaan dengan kriteria Blackspot banyaknya kejadian kecelakaan per km untuk nilai tertinggi di tiap kabupaten yaitu:

Tabel 2-85 Perangkingan Urutan Daerah Rawan Kecelakaan pada Ruas Jalan Provinsi

Ruas Jalan	Kabupaten	Panjang Jalan	ΣKejadian Kecelakaan	ΣKejadian laka/km	Ranking
Yogyakarta – Barongan	Bantul	9,80	75	7,65	1
Gading – Playen	Gunung Kidul	2,95	17	5,76	2
Denggung – Wonorejo	Sleman	2,50	3	1,20	3
Sentolo – Brosot	Kulonprogo	16,85	4	0,24	4

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2018

Dalam rangka mendukung integrasi pelayanan angkutan umum di DIY, sampai dengan tahun 2018 terbangun Transfer Point/Park and Ride di Gamping dan Dongkelan sebagai simpul integrasi antar moda angkutan umum perkotaan dan AKDP. Transfer Point/Park and Ride di DIY sampai berakhirnya RPJMD DIY tahun 2017 – 2022 ditargetkan ada penambahan pada 3 lokasi.



Gambar 2-57 Park and Ride Gamping

2.1.3.1.16 Urusan Komunikasi Dan Informatika

Pada era digital sekarang ini, pemerintah dituntut untuk dapat memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada publik. Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik level Provinsi di apresiasi oleh Komisi Infomrasi Pusat. Namun demikian, menurut table dibawah ini DIY dipandang masih perlu meningkatkan akses keterbukaan informasi dimaksud:

Tabel 2-86 Kualifikasi Badan Publik Kategori Pemerintah Provinsi 2018

Rank	Nama Badan Publik	Kualifikasi
1	Jawa Tengah	Informatif
2	DKI Jakarta	Informatif
3	Kalimantan Barat	Informatif
4	Jawa Barat	Informatif
5	Aceh	Menuju Informatif
6	Nusa Tenggara Barat	Menuju Informatif
7	Kalimantan Tengah	Menuju Informatif
8	Sumatera Barat	Menuju Informatif
9	Sumatera Selatan	Menuju Informatif
10	Jawa Timur	Cukup Informatif
11	Kalimantan Timur	Cukup Informatif
12	Banten	Cukup Informatif
13	Sumatera Utara	Cukup Informatif
14	Papua	Cukup Informatif
15	Bali	Cukup Informatif
17	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kurang Informatif

Sumber: Komisi Informasi Pusat, 2018 (*Diskominfo*)

DIY mendapatkan penilaian kualifikasi kurang informatif karena peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kurang optimal. Selain itu, DIY belum memiliki website PPID Pemda yang dikelola mandiri. Sementara itu, keterbukaan informasi menjadi kontrol terhadap fungsi badan publik bagi masyarakat terutama sebagai pengguna layanan. Informasi yang terbuka menjadi cerminan sejauh mana akuntabilitas badan publik bekerja. Peranan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di masing-masing badan publik beserta aparatur yang ada di dalamnya menentukan arus informasi bekerja sebagaimana mestinya.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, Pemerintah Daerah DIY mengadopsi konsep *smart city/region* dan menyesuaikannya menjadi *smart province*. Orientasi kepada warga dan masyarakat, pendekatan komprehensivitas, dan cara inovatif berbasis TIK menjadi landasan untuk mengembangkan solusi-solusi bagi berbagai persoalan kompleks yang dihadapi oleh DIY. Dalam pandangan ini, konsep *smart province* diposisikan sebagai akselerator bagi arah, strategi, dan program-program pembangunan yang telah ditetapkan di RPJMD DIY 2017-2022. Sebagai akselerator artinya konsep *smart province* yang diterapkan harus mengacu pada spesifikasi RPJMD DIY 2017-2022, serta mencari peluang-peluang untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pada RPJMD secara lebih cerdas (*smart*).

Meskipun dalam lansekap konsep *smart city/province* sudah ada *best practices* yang dapat diadopsi untuk penerapannya di DIY, Pemerintah DIY mengadopsi konsep *smart province* secara kritis dan menyesuaikannya dengan kondisi khas DIY. Hal ini penting dilakukan karena: 1) secara formal, DIY diakui sebagai daerah istimewa menurut Undang-Undang nomor 13/2012, dan ini membedakannya dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, dan 2) secara faktual, implementasi konsep *smart province* harus benar-benar terinternalisasi dalam keseharian semua pihak yang terlibat. Internalisasi hanya akan efektif jika konsep *smart province* memiliki ciri yang sama dengan identitas yang dimiliki oleh segenap komponen pemangku kepentingan di DIY.

Implementasi *Jogja Smart Province* dalam periode RPJMD 2017-2022 mendapat penguatan legitimasi dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tantangan pelaksanaannya di DIY pada 2020 adalah dalam upaya meningkatkan maturitas (tingkat kematangan/kemantapan) kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis dari *Jogja Smart Province* sebagai wujud dari SPBE di DIY.

2.1.3.1.17 Urusan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan penopang kegiatan perekonomian di DIY. Data sensus ekonomi tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah usaha mikro dan kecil mencapai 98,36% dari total usaha ekonomi di DIY. Sementara itu, Koperasi merupakan bentuk usaha yang secara eksplisit dalam undang-undang dasar diarahkan untuk menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai keterbatasan bagi Koperasi dan UKM dalam menghadapi perkembangan perekonomian daerah maupun nasional.

Terdapat peningkatan koperasi aktif dari tahun 2017 sebesar 1.782 menjadi 1.926 pada tahun 2018. Peningkatan koperasi aktif juga diikuti dengan peningkatan volume usaha yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 3.679.342 juta rupiah pada tahun 2017 menjadi sebesar 4.394.362 juta rupiah pada tahun 2018. Namun demikian, kinerja pencapaian volume usaha tersebut masih dibawah capaian tahun 2016 sebesar 4.473.800 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja volume usaha masih rawan berfluktuasi. Pembinaan koperasi masih perlu ditingkatkan mengingat masih terdapat 63 koperasi pasif hingga tahun 2018. Selain itu, belum seluruh koperasi menyelenggarakan RAT. Dari 1.989 koperasi di DIY, baru sekitar 72% yang menyelenggarakan RAT.

Tabel 2-87 Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Koperasi Aktif	2.269	2.369	2.427	1.782	1.926
Koperasi Pasif	341	316	311	598	63
Koperasi Beku	-	-	-	-	-
Modal Sendiri (Rp Juta)	594.124	1.318.800	1.139.942	1.200.158	1.425.918
Modal Luar (Rp Juta)	830.210	2.320.866	1.835.173	2.085.166	2.262.263
Volume Usaha (Rp Juta)	2.586.506	3.599.547	4.473.800	3.679.342	4.394.362

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, Tahun 2018 dataku 2019

Berdasarkan jenis usaha, Koperasi di DIY didominasi oleh Koperasi konsumen dan koperasi simpan pinjam. Gabungan kedua jenis koperasi ini memberikan kontribusi sebesar 77% dari total koperasi. Sementara itu, koperasi produsen masih relatif kecil jumlahnya. Bahkan dibandingkan dengan tahun 2014, terdapat penurunan koperasi produsen dari 285 unit menjadi 212 unit koperasi

Tabel 2-88 Perkembangan Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2014-2018

Jenis Usaha	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Koperasi Produsen	285	311	314	273	212
Koperasi Konsumen	1.512	1.286	1.283	1.073	882
Koperasi Jasa	88	124	128	121	105
Koperasi Simpan Pinjam	538	773	806	711	658
Koperasi Pemasaran	-	191	207	202	132

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, Tahun 2018 dataku 2019

Usaha Kecil Menengah (UKM) di DIY mengalami pertumbuhan positif rata-rata 5% dalam lima tahun terakhir. Tercatat jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di DIY pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 2.206 unit usaha (4,02%) dari semula 248.217 unit usaha pada tahun 2017 menjadi 259.581 unit usaha pada tahun 2018. Apabila dinilai dari aspek jenis usaha, sebaran terbanyak Usaha Kecil Menengah (UKM) berasal dari sektor perdagangan sebesar 28,52% dari total UKM di DIY dengan jumlah usaha sebanyak 73.970 unit usaha, diikuti oleh diikuti oleh sektor Industri Pertanian (27,20%), sektor Industri non Pertanian (22,61%), serta sektor aneka usaha sebesar (21,67%).

Tabel 2-89 Perkembangan Jumlah UKM Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2013-2018

No	Jenis Usaha	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Aneka Usaha	44.452	47.808	49.923	51.780	54.649	56.753
2	Perdagangan	58.601	63.026	65.610	68.054	69.486	73.970
3	Industri Pertanian	55.767	59.977	62.519	64.857	64.523	67.007
4	Industri Non Pertanian	46.390	49.892	51.995	53.928	59.559	61.851
	Jumlah	205.210	220.703	230.047	238.619	248.217	259.581

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, Tahun 2018 dataku 2109

Sementara apabila diukur dari aspek skala usaha, pada tahun 2018 kelompok usaha mikro mendominasi jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan jumlah 141.991 unit usaha (54,71%) dari total jumlah UKM di DIY. Diikuti oleh kelompok usaha kecil 64.896 unit (24,99%), kelompok usaha menengah 39.196 unit (15,10%), dan yang terkecil berasal dari sektor usaha besar dengan persentase sebesar 13.498 unit (5,20%). Hal tersebut menunjukkan peran strategis usaha mikro dan kecil dalam struktur perekonomian DIY di mana sekitar 79,80% unit bisnis di DIY merupakan usaha mikro dan kecil. Keberadaan UMKM dirasa mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar dan menghidupkan usaha-usaha lokal pendukung lainnya. Selain itu, UMKM dipercaya memiliki ketahanan ekonomi atau resiliensi yang tinggi, sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Meskipun memiliki jumlah unit usaha yang cukup besar, jika dilihat dari nilai omsetnya, total omset Usaha Kecil masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan usaha menengah dan besar. Hal ini perlu menjadi perhatian, bahwa selain menumbuhkan kuantitas usaha kecil, perlu adanya upaya peningkatan kelas dari UKM. Berdasarkan data dari dinas Koperasi dan UKM, total omset usaha mikro di DIY mencapai 8,1 Milyar dan usaha kecil mencapai 29,5 milyar. Sementara itu, untuk usaha kelas menengah mencapai 109 milyar dan usaha besar mencapai 683,5 milyar

Tabel 2-90 Perkembangan Jumlah UKM Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2013-2018

No	Skala Usaha	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Usaha Mikro	111.912	120.725	125.836	130.525	135.799	141.991
2	Usaha Kecil	51.459	55.176	57.512	59.655	62.041	64.896
3	Usaha Menengah	31.121	33.326	34.737	36.031	37.472	39.196
4	Usaha Besar	10.718	11.476	11.962	12.408	12.904	13.498
	Jumlah	205.210	220.703	230.047	238.619	248.216	259.581

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, Tahun 2018 dataku 2019

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dan Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Penumbuhan dan pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah perlu didorong dan diarahkan agar segera membentuk atau tergabung dalam sebuah wadah koperasi karena kedepannya peran koperasi akan dioptimalkan sebagai wadah untuk menampung dan mengembangkan hasil produksi sektor UKM termasuk pengadaan bahan baku.

2.1.3.1.18 Urusan Penanaman Modal

Investasi atau penanaman modal adalah salah satu variabel pendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Kegiatan penanaman modal dapat berupa pembukaan kegiatan industri baru atau perluasan kegiatan usaha seperti peremajaan dan penambahan alat-alat produksi. Kegiatan investasi juga dapat diwujudkan dengan pembelian-pembelian teknologi baru yang menjadikan proses produksi menjadi lebih efisien atau meningkat produktifitasnya. Dengan adanya tambahan investasi, produksi barang atau jasa yang dihasilkan suatu daerah menjadi bertambah yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan luas wilayah yang terbatas, investasi di DIY harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Selain itu investasi DIY diutamakan untuk industri-industri berbasis keunggulan lokal seperti pariwisata dan industri kreatif

Perkembangan investasi di DIY dalam kurun lima terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Tahun 2018 secara kumulatif total investasi tumbuh cukup signifikan. Total investasi di DIY tahun sampai dengan tahun 2018 adalah Rp. 19,506 trilyun. Pertumbuhan investasi yang meningkat pesat tersebut dikarenakan adanya aktivitas konstruksi pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport di Kulon Progo. Kegiatan pembangunan bandara di Kulon Progo ini secara umum memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi DIY. Pada tahapan selanjutnya, dengan beroperasionalnya bandara baru ini diharapkan dapat membangkitkan kegiatan-kegiatan ekonomi lokal di DIY secara khusus di Kulon Progo.

Tabel 2-91 Perkembangan Investasi di DIY Tahun 2013-2018

Tahun	Investasi PMDN (Rp000)	Investasi PMA (Rp000)	Total Investasi (Rp000)	Growth (Rp000)	Investation Growth (%)
s.d 2014	3.568.546.291	5.955.853.842	9.524.400.134	1.456.630.000	18,05
s.d 2015	3.951.662.458	7.271.740.783	11.223.403.242	1.699.003.107	17,83
s.d 2016	4.522.819.693	7.554.841.971	12.077.661.664	854.258.422.	7,61
s.d 2017	4.817.449.093	8.036.525.281	12.853.974.374	776.312.710	6,42
s.d 2018	10.949.163.293	9.126.508.081	20.075.671.374	7.221.697.000	56,18

Sumber: BPPSD DIY 2019

Peningkatan pertumbuhan nilai realisasi investasi DIY pada tahun 2018 mengubah peta persebaran nilai realisasi investasi apabila dilihat dari segi lokasi investasi di kabupaten/kota. Lokasi bandara baru yang ada di Kabupaten Kulon Progo menjadikan Kabupaten Kulon Progo kini menempati posisi ketiga nilai realisasi investasi se-DIY dengan nilai realisasi investasi total sebesar Rp. 5.771.863.000.000. Namun demikian, kondisi untuk realisasi investasi di empat wilayah lain masih relatif sama dengan kondisi lima tahun terakhir yaitu dengan realisasi investasi total tertinggi adalah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Gunungkidul. Dari tabel di bawah akan terlihat kesenjangan nilai realisasi investasi di DIY masih cukup tinggi.

Pemerataan investasi menjadi penting mengingat kegiatan investasi akan diikuti dengan pembukaan kesempatan kerja. Sampai dengan tahun 2018, tenaga kerja Indonesia yang terserap dalam kegiatan investasi di wilayah Kulon Progo dan Gunungkidul masih tertinggal. Investasi di wilayah Sleman dan Bantul yang kebanyakan adalah di sektor industri pengolahan menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Kegiatan investasi PMDN di Sleman misalnya, mampu menyerap tenaga kerja hingga 15.979 orang. Sementara itu, kegiatan investasi PMDN di Gunungkidul baru bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 694 orang.

Tabel 2-92 Rekap Data Investasi Perusahaan PMDN Tahun 2018 (Kumulatif Berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/ Kota	Rencana				Realisasi			
		Jumlah Perusahaan	Investasi (Rp Juta)	Tenaga Kerja		Jumlah Perusahaan	Investasi (Rp Juta)	Tenaga Kerja	
				TKI	TKA			TKI	TKA
1	Yogyakarta	123	2.339.012	18.593	66	55	1.970.531	7.049	11
2	Sleman	74	3.218.310	21.392	74	67	3.364.303	15.979	6
3	Bantul	29	773.237	22.404	7	26	409.824	6.585	1
4	Kulon Progo	36	4.298.806	9.261	6	18	5.093.777	750	0
5	Gunungkidul	16	341.760	1.878	8	13	110.727	694	1
Jumlah		278	10.971.125	73.528	161	179	10.949.162	31.057	19

Sumber: BKPM DIY, 2019

Investasi pada Kabupaten Kulon Progo cukup tinggi karena didorong oleh aktivitas pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA). Pada tahun 2019, kegiatan investasi masih dititikberatkan pada pembangunan konstruksi yang bersifat padat modal. Selanjutnya, setelah pembangunan konstruksi diselesaikan dan Bandar Udara YIA beroperasi penuh, diharapkan penyerapan tenaga kerja dapat terrealisasi sesuai rencana.

Tabel 2-93 Rekap Data Investasi Perusahaan PMA Tahun 2018 (Kumulatif) Berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/ Kota	Rencana				Realisasi			
		Jumlah Perusahaan	Investasi (Rp Juta)	Tenaga Kerja		Jumlah Perusahaan	Investasi (Rp Juta)	Tenaga Kerja	
				TKI	TKA			TKI	TKA
1	Yogyakarta	67	3.327.787	6.281	118	47	4.267.773	3.403	39
2	Sleman	116	3.241.623	16.390	164	74	3.351.861	7.786	67
3	Bantul	64	619.191	14.843	134	49	668.764	13.966	96
4	Kulon Progo	10	289.217	2.198	16	9	678.086	2.340	12
5	Gunungkidul	10	283.079	6.507	37	10	160.024	1.166	4
Jumlah		267	7.760.897	46.219	469	189	9.126.508	28.661	218

Sumber: BKPM DIY, 2019

Isu lain yang perlu diantisipasi adalah terkait dengan persaingan antar daerah. Didorong oleh kesadaran akan pentingnya kegiatan investasi, saat ini tiap-tiap daerah berupaya memromosikan potensi wilayahnya. Indeks daya saing yang dikeluarkan Asia Competitiveness Institute dapat menjadi indikator seberapa kuatnya DIY dalam bersaing dengan daerah lain dalam hal penciptaan iklim investasi yang menarik. Pada tahun 2017, DIY menempati peringkat ke 9 atau turun dari tahun sebelumnya yang mencapai peringkat ke 6. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, daya saing DIY masih relatif tertinggal. Aspek stabilitas makro ekonomi serta kondisi keuangan, tenaga kerja dan iklim bisnis yang dinilai masih relatif tertinggal dengan provinsi lain.

Tabel 2-94 10 Besar Provinsi dengan Indeks Daya Saing Tertinggi di Indonesia Hasil Kajian Asia Competitiveness Institute

	Peringkat				Provinsi	Skor
	2014	2015	2016	2017		
1	1	1	1	1	DKI Jakarta	3.459
2	2	2	2	2	East Java	1.723
3	3	3	5	3	East Kalimantan (inc.North Kalimantan)	1.303
4	5	5	3	4	Central Java	1.035
5	4	4	4	5	West Java	0.946
12	9	9	11	6	Banten	0.741

Peringkat				Provinsi	Skor
2014	2015	2016	2017		
14	12	7	7	Bali	0.687
7	10	6	8	South Sulawesi	0.557
6	6	10	9	DI Yogyakarta	0.423
11	7	12	10	Riau Islands	0.399

Sumber: *Asia Competitiveness Institute, 2018*

2.1.3.1.19 Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan. Sektor olahraga dan pemuda mengajarkan nilai-nilai positif seperti kreatif, disiplin, tanggung jawab, kritis, sportif, kompetitif dan mendukung pembentukan karakter manusia. Keolahragaan dan kepemudaan yang dikelola dan dibina dengan baik akan mendatangkan banyak manfaat bagi warga masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan, ekonomi dan psikologis yang merupakan landasan yang kuat untuk menyatakan bahwa sektor tersebut merupakan instrumen yang ampuh untuk melaksanakan pembangunan yang seimbang antara material dan spiritual.

Dari sisi sosial diakui bahwa sektor keolahragaan merupakan sebuah aktivitas dinilai potensial untuk memperkuat integrasi daerah. Keolahragaan mengajarkan dari sebuah kelompok kecil seperti misalnya sebuah tim sepakbola, sebuah komitmen bersama pada satu tujuan bersama yang dapat ditingkatkan ke tingkat kerjasama dalam cakupan yang lebih besar seperti kehidupan bermasyarakat sebuah daerah. Itulah sebabnya keolahragaan, seperti yang sering kita alami dalam olah raga kompetitif, dipandang ampuh untuk membangun persatuan dan kesatuan nasional.

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Upaya pemerintah ini sangat penting dalam memajukan kegiatan di bidang olahraga, selain merupakan sarana peningkatan prestasi baik untuk lokal, regional, nasional maupun internasional. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan

Olahraga dalam konteks pembinaan keolahragaan di DIY. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi keolahragaan yang cukup menjanjikan dengan sumber daya manusia khususnya untuk mencetak atlet-atlit yang berbakat. Pada tahun 2017, DIY melakukan pembinaan sebanyak 210 atlet adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel 2.78.

Tabel 2-95 Jumlah Atlet di DIY Tahun 2017

Cabang Olahraga	Jumlah Atlet
Atlet Angkat Besi	2
Atlet Atletik	12
Atlet Bola Basket Putra	12
Atlet Bola Basket Putri	12
Atlet Bola Voli Putra	12
Atlet Bola Voli Putri	12
Atlet Bulutangkis	8
Atlet Dayung	4
Atlet Gulat	4
Atlet Judo	9
Atlet Karate	6
Atlet Panahan	18
Atlet Pencak Silat	17
Atlet Renang	8
Atlet Senam	4
Atlet Sepak Bola	18
Atlet Sepak Takraw	17
Atlet Tae Kwon Do	12
Atlet Tarung Drajat	7
Atlet Tennis	8
Atlet Tinju	4
Atlet Voli Pasir Putra	2
Atlet Voli Pasir Putri	2
Grand Total	210

Sumber: Disdikpora DIY, 2017

Pembinaan olahraga yang berkelanjutan diharapkan mampu mendorong dan mengoptimalkan potensi-potensi atlet di daerah sehingga mampu bersaing dalam even-even olahraga baik di level lokal sekaligus mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional. Berikut capaian prestasi atlet DIY di ajang kompetisi olahraga :

Tabel 2-96 Capaian Prestasi Atlet DIY di Ajang Kompetisi Olahraga

Prestasi Atlet pada Kejuaraan POPWIL					
Tahun	2010	2012	2014	2016	2018
Tuan Rumah	Jawa Tengah	Banten	Bali	DIY	Surakarta

Jumlah Medali	-	29	20	34	20
*) Jumlah Cabor yang dipertandingkan ada 8 Cabang Olahraga (Bola Voli Indoor, Tenis Lapangan, Bola Basket, Tenis Meja, Sepak Bola, Bulu Tangkis, Pencak Silat, Sepak Takraw)					
Prestasi Atlet pada Kejuaraan POPNAS					
Tahun	2009	2011	2013	2015	2017
Tuan Rumah	DIY	Riau	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah
Jumlah Medali	30	30	18	26	31
*) Jumlah Cabor yang dipertandingkan ada 21 Cabor					
Prestasi Atlet pada Kejuaraan PEPARNAS					
Tahun	2011	2013	2015	2017	
Tuan Rumah	Riau	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	
Jumlah Medali	13	12	17	20	
Prestasi Atlet pada Kejuaraan Nasional antar PPLP					
Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Medali	19	22	16	26	32
*) Cabor yang di PPLP kan ada 5 Cabor (Atletik, Voli Pasir, Panahan, Pencak Silat dan Balap Sepeda)					
Prestasi Atlet pada Kejuaraan ASEAN School					
Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Tuan Rumah	Vietnam	Brunei	Thailand	Singapura	Malaysia
Jumlah Atlet DIY				5	
Medali				2	

Sumber : Disdikpora DIY, 2019

Penyediaan fasilitas atau sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan untuk mengembangkan sektor olahraga baik skala/ taraf nasional maupun internasional. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga sangat penting untuk menunjang prestasi bagi atlet-atlet daerah di DIY, maka hal ini seharusnya juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah diantaranya penyelesaian Stadion Mandala Krida (pembangunan tribun VIP dan pengadaan elektrifikasi).

Tabel 2-97 Fasilitas Olahraga di DIY

Tipe Standard		Nama Fasilitas Olahraga			
1	Internasional	1	Stadion Mandala Krida		
		2	GOR Amongraga		
2	Nasional	1	Stadion Mandala Krida		
		2	GOR Amongraga		
		3	Gedung Graha Wana Bhaktiyasa		
		4	Circuit BMX Youth Centre		
		5	Gelanggang Pemuda Sorowajan		
		6	Lapangan Panahan Jalan Kenari		

Sumber : Disdikpora DIY, 2019

Pada masa pembangunan sekarang ini fungsi dan peran pemuda sangat strategis yaitu sebagai kekuatan moral, agen perubahan dan kontrol sosial dalam proses pembangunan sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya. Namun seiring perkembangan jaman, membangun pemuda bukanlah hal yang mudah dalam era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Kemudahan akses dalam segala bidang kehidupan telah mengubah gaya hidup dan pola pikir pemuda menjadi generasi yang malas berpikir dan bekerja keras karena dimanjakan oleh teknologi, apatis terhadap lingkungan. Jika kondisi ini terus “dibiarkan dan dibenarkan” pemuda Indonesia akan kehilangan jati dirinya sendiri yang berimplikasi pada semakin kaburnya arah pembangunan bangsa di masa depan, untuk itu karakter pemuda Indonesia harus terus dikuatkan dan diberdayakan agar mampu memiliki karakter kepemimpinan yang kuat serta memiliki daya saing guna menghadapi segala tantangan, kebutuhan, tuntutan di era *revolusi industri 4.0* seperti saat ini.

Undang-Undang no. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa untuk membangun pemuda diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Adapun tujuan pembangunan di bidang kepemudaan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang tersebut adalah untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang-undang itu pula mengamanatkan Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

Pengelolaan sektor pemuda tidak kalah penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Pembangunan Kepemudaan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan karena diyakini bahwa produksi sumber daya manusia dihasilkan pada tahap usia produktif antara 16-30 tahun (pemuda). Beberapa ahli telah menyampaikan bahwa pengelolaan kepemudaan merupakan modal SDM (*human capital*) sebuah bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mengelola *human capital* dengan baik. Upaya

pengelolaan kepemudaan dilakukan dengan pembinaan kelompok pemuda yang meliputi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

Tabel 2-98 Jumlah Kelembagaan Pemuda dan Olahraga serta Sarana bagi Pemuda di DIY

Uraian	Tahun				Satuan
	2015	2016	2017	2018	
Jumlah Klub Olahraga	1.197	1.205	1.207	1.207	Buah
Jumlah Organisasi Pemuda	40	40	50	74	Buah
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	11	11	12	11	Buah
Jumlah Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta)	10	10	10	10	Buah

Sumber : BPPSD 2019

Generasi muda merupakan penerus perjuangan bangsa yang wajib dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Maka pembinaan/pengembangan/pemeberdayaan terhadap pemuda menjadi hal yang sangat penting guna memberikan motivasi dan arahan bagi pemuda agar lebih giat berprestasi. Pembinaan generasi muda merupakan tanggung jawab semua pihak, baik itu pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan masyarakat. Pembinaan pemuda bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui keluarga, sekolah, maupun kegiatan di masyarakat.

2.1.3.1.20 Urusan Statistik

Data dan informasi yang terpercaya dan dapat diandalkan adalah salah satu unsur penting untuk mewujudkan pembangunan yang berhasil. Data dan informasi dibutuhkan pada semua tahapan manajemen pembangunan. Pada tahap perencanaan, data yang berkualitas menjadi sumber informasi tentang kondisi yang dapat diketahui oleh semua pemangku kepentingan untuk mengetahui dan memahami masalah pembangunan. Sedangkan pada tahap pengendalian, data dan informasi dalam rangka melakukan evaluasi agar sasaran untuk memperbaiki keadaan maupun mengatasi masalah yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Proses pengumpulan sampai dengan penyediaan data dan informasi merupakan aspek penting dalam pembangunan pada urusan Statistik.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, penyelenggaraan statistik sektoral dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai

dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS. Sedangkan statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu institusi pendidikan, instansi/perusahaan dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.

Bappeda DIY merupakan instansi Pemerintah Daerah DIY yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 7 Tahun 2008. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, khususnya jenis statistik sektoral, Bappeda melakukan koordinasi dengan BPS, instansi vertikal lain dan Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota di DIY. Penyelenggaraan kegiatan statistik ini dituangkan dalam program Pengembangan Statistik Daerah melalui kegiatan Pengelolaan Data dan Statistik Daerah serta Penyajian dan Informasi Data Statistik yang dilaksanakan secara teknis oleh Balai Statistik Daerah yang merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) dari Bappeda DIY.

Belum optimalnya ketersediaan data yang aktual, valid dan aksesibel masih menjadi salah satu isu strategis pada perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, Pemda melaksanakan program yang mendukung optimalnya ketersediaan data yang dibutuhkan. Upaya peningkatan kualitas data DIY dalam rangka menysasar isu strategis tersebut menghadapi beberapa masalah baik permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal yang menonjol adalah terbatasnya SDM statistik profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. Lebih lanjut lagi, permasalahan terkait urusan statistik dalam mendukung proses perencanaan dan pengendalian pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Ketersediaan data statistik yang tidak tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan perencanaan maupun pengendalian pembangunan daerah karena beberapa data dirilis oleh sumber data pada saat yang tidak selaras dengan agenda pembangunan serta beberapa data ketersediaannya bergantung pada pihak di luar kewenangan Pemerintah;
- b. Pada beberapa data, terdapat perbedaan nilai antar data yang dihasilkan oleh beberapa sumber data. Hal tersebut disebabkan antara lain karena perbedaan metodologi, waktu pengambilan data dan definisinya.

Pemda telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, yaitu:

1. Melakukan koordinasi yang intensif dan berkesinambungan dengan Perangkat Daerah pengampu data agar terjadi komunikasi yang jelas dalam rangka peningkatan ketepatan, kecepatan dan keakuratan penyediaan data statistik serta menyediakan data proyeksi;
2. Membentuk UPT yang secara khusus menangani kegiatan teknis terkait statistik daerah di Perangkat Daerah Bappeda DIY, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Mewujudkan kebijakan satu data pembangunan untuk dalam rangka menyediakan satu data base pembangunan yang dapat diacu oleh berbagai pemangku kepentingan yang membutuhkan data dengan menyediakan data seragam untuk menghindari duplikasi dan redundansi data.

2.1.3.1.21 **Urusan Persandian**

Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data / informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Urusan persandian bersama dengan urusan komunikasi dan informasi berperan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah DIY melalui penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pada tahun 2019, urusan persandian di DIY diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informasi DIY dimana sebelumnya diampu oleh Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY.

Urusan persandian pada Dinas Komunikasi dan Informasi DIY dituangkan melalui program pengembangan aplikasi informatika dan persandian yang dilaksanakan pada kegiatan pengelolaan persandian. Pada era digitalisasi saat ini, urusan persandian memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan data dan informasi pemerintah yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara dan bangsa. Untuk memenuhi layanan urusan persandian di DIY masih diperlukan dukungan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi pada bidang persandian dan teknologi informasi serta peralatan persandian sesuai standar Badan Siber dan Sandi Negara.

2.1.3.1.22 Urusan Kebudayaan

Bangsa Indonesia dianugerahi kekayaan atas keberagaman warisan budaya bangsa yang bernilai tinggi sebagai bentuk identitas bangsa di tengah peradaban dunia. Dalam rangka meningkatkan ketahanan budaya dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa diperlukan upaya-upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Sebagai bagian dari kebudayaan nasional Indonesia, Yogyakarta memiliki Kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur, Nilai-nilai luhur tersebut telah dijadikan landasan filosofis oleh Sultan Hamengku Buwono I ketika beliau mulai membangun Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pemerintahan, masyarakat, dan wilayah yang mandiri, Nilai-nilai adiluhung seperti *Hamemayu Hayuning Bawana*, *Mangasah Mingising Budi*, *Memasuh Malaning Bumi*, *Golong Gilig*, serta sifat-sifat satriya yang berpegang pada etos *Sawiji*, *Greget*, *Sungguh*, *Ora Mingkuh* telah terwujud dalam kehidupan masyarakat maupun penataan ruang wilayah yang kini dikenal sebagai DIY.

Kebudayaan Yogyakarta dipahami sebagai nilai-nilai dasar yang luhur hasil cipta dan rasa yang mewujud dalam karsa dan karya yang menjadi jati diri masyarakat Yogyakarta, Dari sejarah terbentuknya, Kebudayaan Yogyakarta dirintis dan diperkaya oleh berbagai sumber, seperti: nilai-nilai luhur Kerajaan Mataram Islam di Kotagede; desain tata kota pemerintahan yang diciptakan oleh Pangeran Mangkubumi yang dikenal dengan saujana asosiatif (*associate cultural landscape*) yang merujuk pada sumbu imajiner dua kekuatan alam besar, yaitu Segara Kidul di selatan dan Gunung Merapi di utara; unsur-unsur budaya asing seperti budaya Kolonial, Indis, maupun Cina, Sumber utama yang memperkaya Kebudayaan Yogyakarta dari sejarahnya hingga kini adalah Kebudayaan Kasultanan dan Kadipaten,

Kebudayaan Kasultanan dan Kadipaten yang sarat dengan karsa dan karya yang berupa Kebudayaan benda maupun Kebudayaan tak benda yang menjadi ciri khas Yogyakarta, perlu dilestarikan dan menjadi nafas, baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, untuk memperkuat jati diri masyarakat dan Pemerintahan DIY, dalam rangka menciptakan tata masyarakat dan pemerintahan yang sejahtera lahir maupun batin.

Kebudayaan sebagai *mainstream* di segala bidang telah menjadi spirit pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Sejumlah kemajuan kebudayaan baik yang sifatnya kebendaan maupun bukan kebendaan di berbagai sektor telah dihasilkan, Kemajuan kebudayaan terus berpacu dengan dinamika perkotaan dan masyarakatnya yang terus diuji ketahanan budayanya oleh arus perubahan,

2.1.3.1.22.1 Budaya Benda

Para ahli sejarah membagi fase-fase perjalanan peradaban di DIY dalam periode prasejarah, Matarm Kuno, Mataram Islam, Kolonial, Pasca Kemerdekaan (Kontemporer), Setiap fase peradaban meninggalkan simbol-simbol eksistensi sebagai warisan budaya benda (*tangible cultural heritage*). Kepeloporan DIY dalam penyusunan kebijakan pelestarian cagar budaya dapat dilihat dari telah dijabarkannya UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ke dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Upaya pelestarian cagar budaya di DIY diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang dijabarkan ke dalam Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah, Pergub DIY No, 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya, Pergub DIY No, 56 Tahun 2014 tentang Penghargaan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Pelestarian kawasan cagar budaya ini juga diperkuat oleh UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, Perdais No 1 Tahun 2013.

Upaya awal perlindungan cagar budaya dilakukan dengan Kepala Dinas Kebudayaan DIY membuat surat ketetapan tentang cagar budaya, yaitu SK Kepala Dinas Kebudayaan DIY Nomor 188/38,A,/2014, Hal ini untuk memastikan semua objek benda yang bernilai sejarah dan kebudayaan dapat terpelihara, dan diakuisisi pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga objek ini dinamakan warisan budaya, Masih dimungkinkan penemuan-penemuan kembali cagar budaya, namun ancaman terhadap keberadaan cagar budaya tersebut tentu juga besar, Kemunculan kelompok radikal, kapitalisme, laju demografi, belum lagi kekuatan alam yang sangat ekstrem tidak diragukan akan menggerus aset-aset budaya bendawi tersebut dan kekuatan ketahanan budaya masyarakat DIY.

Tabel 2-99 Budaya Benda di DIY

Aset Budaya	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Struktur				0	34	34
Situs	176	184	343	339	343	343
Benda Cagar Budaya	762	763	764	807	808	834
Bangunan Cagar Budaya	947	877	881	1042	1041	1082
Kawasan budaya cagar	13	13	15	17	17	17
Jumlah Benda Budaya	1898	1837	2003	2205	2243	2310

Sumber: www.jogjabudaya.com

Untuk menjaga kelestarian kelestarian warisan budaya benda dari ancaman kerusakan alamiah dan dinamika perkotaan, pada tahun 2018 dilakukan sejumlah kegiatan pelestarian dan pengelolaan. Obyek sasaran pelestarian dan pengelolaan sebanyak 578 buah yang terdiri dari : 1 struktur cagar budaya, 2 situs, 396 Benda Cagar Budaya, 176 Bangunan Cagar Budaya, dan 3 kawasan Cagar Budaya.

Rehabilitasi terhadap 1 struktur cagar budaya yaitu Benteng Kraton Yogyakarta, 2 situs yang ditangani meliputi Situs Kauman dan Situs Makam Girigondo. Benda Cagar Budaya yang dilakukan registasi dan perawatan sebanyak 396 buah. Bangunan Cagar Budaya sebanyak 176 buah dilakukan kajian, penelitian, pemeliharaan, dan rehabilitasi. Penataan terhadap 3 kawasan Cagar Budaya (Imogiri, Kotagede, dan Kraton) dimaksudkan untuk semakin memperkuat nuansa budaya di kawasan tersebut.

Pada tahun 2011 Pemda DIY melalui SK Gubernur No 186/Kep/2011 menetapkan Kawasan Cagar Budaya yang masuk kewenangan provinsi yaitu antara lain : Kraton, Puro Pakualaman, Malioboro, Imogiri, Kotagede, Kotabaru yang mewakili masa peradaban klasik Islam, tradisional Jawa, kolonialisme, Pecinan, Pada tahun 2014 melalui SK Kepala Dinas Kebudayaan No 188/38,A telah menetapkan warisan budaya sebagai perlindungan pertama terhadap aset-aset budaya DIY, Tahapan untuk menjadi cagar budaya harus melalui kajian dan registrasi yang prosedural, sedangkan DIY sangat kaya akan aset budaya bendawi, sehingga perlu dibuat penetapan warisan budaya,

Tabel 2-100 Daftar Kawasan Cagar Budaya di DIY

No	Kawasan Cagar Budaya	Kabupaten/Kota	SK Penetapan
1	Kawasan Kraton	Yogyakarta	SK Kadis, No, 188/ 38,A

No	Kawasan Cagar Budaya	Kabupaten/Kota	SK Penetapan
2	Kawasan Malioboro	Yogyakarta	SK Kadis, No, 188/ 38,A
3	Kawasan Pakualaman	Yogyakarta	SK Kadis, No, 188/ 38,A
4	Kawasan Kotagede	Yogyakarta dan Bantul	SK Kadis, No, 188/ 38,A
5	Kawasan Kotabaru	Yogyakarta	SK Kadis, No, 188/ 38,A
6	Kawasan Imogiri	Bantul	SK Kadis, No, 188/ 38,A
7	Kawasan Parangtritis	Bantul	SK Kadis, No, 188/ 38,A
8	Kawasan Pleret	Bantul	SK Kadis, No, 188/ 38,A
9	Kawasan Jetis	Yogyakarta	SK Kadis, No, 188/ 38,A
10	Kawasan Pengok	Yogyakarta	SK Kadis, No, 188/ 38,A
11	Kawasan Baciro	Yogyakarta	SK Kadis, No, 188/ 38,A
12	Kawasan Prambanan	Sleman	SK Kadis, No, 188/ 38,A
13	Kawasan Ratu Boko	Sleman	SK Kadis, No, 188/ 38,A
14	Kawasan Sokoliman	Gunungkidul	SK Kadis, No, 188/ 38,A
15	Kawasan Ambarbinangun	Yogyakarta	
16	Kawasan Bintaran	Yogyakarta	
17	Kawasan Ambarketawang	Sleman	

Sumber: www.jogjabudaya.com; Dinas Kebudayaan DIY

Budaya benda ini merupakan bukti nyata perjalanan bersejarah masyarakat DIY sejak zaman prasejarah hingga sekarang, yang akan menjadi jatidiri bangsa, Tahun 2017 ini ruas jalan antara Tugu – Kraton – Panggung Krapyak yang dikenal dengan Sumbu Filosofi telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Nasional dan masuk tentatif list Warisan Budaya Dunia UNESCO, Penyiapan teknis dan masyarakat dalam menghadapi Jogja sebagai Kota Warisan Budaya Dunia dengan Sumbu Filosofinya telah dilakukan, Keberadaan filosofi kehidupan yang terkandung dalam Sumbu Filosofi ini sangat langka di dunia, Apabila DIY berhasil masuk dalam Daftar Tetap Kota Warisan Budaya Dunia melalui Kawasan Sumbu Filosofi antara Tugu-Kraton-Panggung Krapyak, dimungkinkan komitmen pihak internasional untuk turut menjaga kelestarian kawasan ini,

2.1.3.1.22.2 Budaya Tak Benda

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sejak tahun 2009 telah melakukan kegiatan Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Karya budaya yang ditetapkan meliputi : a) tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa, b) seni pertunjukan , c) adat istiadat, d) pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, d) ritus dan perayaan, dan e) kemahiran kerajinan tradisional.

Tujuan dari penetapan tersebut adalah : a) untuk menjamin dan melindungi warisan budaya takbenda Indonesia yang merupakan milik berbagai komunitas, kelompok, dan perseorangan, b) meningkatkan harkat dan martabat bangsa serta memperkuat karakter, identitas, dan kepribadian bangsa, c)

meningkatkan apresiasi dan kebanggaan masyarakat Indonesia terhadap keunikan dan kekayaan ragam budaya Indonesia, d) meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya warisan budaya takbenda, e) saling menghargai terhadap warisan budaya bangsa, dan f) mempromosikan warisan budaya takbenda bangsa Indonesia kepada masyarakat luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Nilai Kesejarahan

Sejarah sebagai sebuah catatan peradaban suatu bangsa berkontribusi dalam membentuk identitas suatu bangsa sekaligus memberikan informasi yang menggugah kesadaran untuk melakukan tindakan demi masa depan yang lebih baik. Sehingga upaya-upaya pelestarian nilai kesejarahan merupakan hal penting agar tetap tersampaikan pada generasi mendatang.

Berbagai peristiwa sejarah pun baik yang sifatnya nasional maupun kedaerahan telah terjadi di DIY, Setiap catatan peristiwa bersejarah tertuang dalam naskah-naskah baik yang berbahasa Jawa Kuno maupun bahasa Belanda tersimpan di berbagai perpustakaan di DIY seperti Perpustakaan Keraton, Puro Pakualaman, Museum Sonobudoyo, Perpustakaan Daerah, Kantor Arsip, dan lainnya, Saksi-saksi sejarah atas berbagai tema kesejarahan belum semuanya terekam cerita-ceritanya,

Tabel 2-101 Jenis Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Tahun 2012-2017

Jenis Data	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Monumen Sejarah Perjuangan	44	52	65	70	70	70
Museum	42	42	43	47	47	47
Pelaku sejarah	16	22	22	21	21	21
Peristiwa Sejarah	94	95	95	130	130	144
Naskah Kuno	n/a	509	509	509	509	509

Sumber: www.jogjabudaya.com (Dinas Kebudayaan), Barahmus

Permuseuman

Lembaga atau wadah permanen yang melaksanakan fungsi pelestarian dan menyajikan berbagai koleksi dan bukti-bukti material manusia dan lingkungannya untuk tujuan studi, pendidikan, dan rekreasi berada di tangan museum, Museum dapat bermakna sebagai lembaga tempat penyimpanan, perawatan, dan pengamanan dan pemanfaatan benda-benda materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa, Museum juga

merupakan merupakan lembaga non profit yang terbuka untuk umum, tempat memamerkan dan mengkomunikasikan benda-benda bukti keberadaan manusia dan lingkungannya guna kepentingan pendidikan dan edukasi kultural, serta rekreasi,

DIY berkontribusi pada perkembangan permuseuman nasional, 14 % museum di Indonesia berada di Yogyakarta, Museum Negeri Sonobudoyo merupakan museum tertua kedua setelah Museum Radya Pustaka Surakarta dan terbanyak koleksinya kedua setelah museum nasional, Museum Negeri Sonobudoyo direncanakan menjadi museum internasional, Revitalisasi museum negeri Sonobudoyo dilakukan secara multiyears, Museum di DIY cenderung bertambah walaupun banyak menemui permasalahan dalam aspek kelembagaan pengelola dan SDM. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan DIY, sampai tahun 2018 tercatat ada 46 museum. Asosiasi yang beranggotakan museum-museum di DIY disebut BARAHMUS, sebagai paguyuban museum tertua di Indonesia, Saat ini sejumlah 36 museum telah menjadi anggota BARAHMUS.

Museum negeri yang berada di bawah Pemda DIY: Sonobudoyo, Purbakala Pleret; yang di bawah Kemendikbud: Benteng Vredeburg, Perjuangan; yang di bawah TNI adalah Museum TNI AD, Museum Sudirman, Museum Diponegoro, Museum TNI AU, Museum Sandi, Museum Istana Negara Gedung Agung, Museum MMTC, Museum Gedung Bank Indonesia, Pemerintah kabupaten Sleman memiliki Museum Gunung Merapi, Museum milik Pemerintah Kulon Progo masih dalam proses studi, Pemerintah Kabupaten Bantul sedang mengupayakan pendirian Museum Sumber Karahayon, Pemerintah Kota telah mengembangkan Museum Taman Pintar.

Beberapa museum juga dikembangkan oleh lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan juga mengembangkan museum, UGM yang memiliki museum UGM, Biologi, Peta, Geospasial, Paleoantropologi, Wanagama, UII yang diuntungkan dengan ditemukannya candi kimpulan, UPN Veteran telah mengembangkan Geoteknologi Mineral dan mereka juga mengadakan penelitian tentang geoheritage, UNY memiliki museum pendidikan Indonesia, Museum di lembaga pendidikan belum memiliki lembaga yang mengurus museum, belum memiliki pengelola khusus, kepala museum, tetapi yang ada hanya tenaga administratif dan hanya dititipkan di Fakultas,

Perjuangan pengembangan museum masih memerlukan strategi yang tepat karena diindikasinya berbagai persoalan yang mengurangi daya tarik

dan daya saing museum sebagai tempat tujuan kunjungan yang favorit bagi semua lapisan masyarakat, yaitu sebagai berikut: citra Museum yang masih rendah, museum masih dianggap sekedar memelihara barang tidak terpakai atau sekedar menjadi gudang penyimpan, museum disejajarkan obyek wisata alam atau wisata lainnya, banyak museum kekurangan anggaran operasional, belum adanya standar pelayanan, kurangnya informasi keberadaan museum, belum terpadunya aspek pembelajaran museum dengan kurikulum di sekolah, belum adanya kebijakan terpadu antar instansi terkait, perlu adanya Grand Disain Permuseuman DIY yang melibatkan seluruh stakeholder,

Adat Istiadat, Tradisi dan Sistem Nilai Budaya Lainnya

Peradaban baru yang hendak diwujudkan bagi masyarakat DIY yang memiliki keunggulan dalam nilai mental dan tata laku adalah peradaban yang dijiwai dan digerakkan oleh visi akbar yang dilandasi filosofi universal “Hamêmayu-Hayuning Bawânâ”, yang di dalamnya terkandung kewajiban Tri Satyâ Brâtâ, Pertama, rahayuning buwânâ kapurbâ waskitaning manungsâ (kesejahteraan dunia tergantung manusia yang memiliki ketajaman rasa), harmoni hubungan manusia dengan alam, baik dalam lingkup dunia (world) sebagai kewajiban “Hamangku Buwânâ”, maupun seluruh alam semesta (universe) sebagai kewajiban “Hamêngku Bawânâ”,

Kedua, darmaning manungsâ mahanani rahayuning nêgârâ (tugas hidup manusia adalah menjaga keselamatan negara), sebagai kewajiban manusia selama hidup di dunia, dimana kehidupan merupakan dinamika manusia, yaitu “Hamêngku Nagârâ”, Ketiga, rahayuning manungsâ dumadi karânâ kamanungsané (keselamatan manusia oleh kemanusiaannya sendiri),

Sehingga dapat dimengerti jika filosofi itu menyandang misi akbar bagi manusia dalam tiga substansi tersebut, yaitu: “Hamêngku Nagârâ, Hamangku Buwânâ, Hamêngku Bawânâ”, Bahwa kewajiban “Hamêngku Nagârâ” itu, karena Tuhan menciptakan manusia yang berbeda-beda, bergolong-golong dan bersuku-suku, sehingga diperlukan eksistensi negara dan pemerintahan yang mengaturnya, agar tidak terjadi seling-surup dan saling-silang antarmanusia,

Basis keunggulan sebuah bangsa, atau komunitas, nyata-nyata dan tak bisa lain, ialah manusia yang unggul spiritualitas, intelektualitas, dan etos kerjanya, Manusia-manusia unggul demikianlah yang menghasilkan kitab Sutasoma, Nêgarakêrtagama, Sêrat Cênthini, candi Borobudur dan Prambanan, Dan manusia-manusia unggul itulah kini yang menghasilkan invensi di bidang

sains dan teknologi, inovasi di bidang industri, masterpiece di bidang seni, serta tata kelola yang baik di bidang pemerintahan,

Nilai-nilai tersebut telah diwujudkan dalam adat istiadat, tradisi, dan sistem nilai budaya lainnya dan telah mendarah daging dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan di DIY. Masyarakat DIY masih mempertahankan beragam wujud adat istiadat dan tradisinya, tercatat terdapat 479 upacara adat, 35 tradisi, 58 permainan tradisional, 233 jenis makanan tradisional, walaupun dilaksanakan tidak secara merata, Daerah-daerah tertentu mengupayakan dapat mengaplikasikan beberapa jenis adat dan tradisi, Upacara adat yang sangat menarik masyarakat antara lain tradisi nguras enech atau mengganti air gentong di Kompleks Makam Raja-Raja Imogiri, saparan bekakak, upacara Grebeg, tradisi cupu panjala, jamanan kereta pusaka.

Penghargaan atas upaya pelestarian adat istiadat dilakukan salah satunya dengan Festival baik terhadap komunitas atau kelompok pemerhati upacara adat, karena banyak nilai keluhuran dalam upacara adat tersebut yang ditinggalkan, Setiap perwakilan dari lima kabupaten/kota di DIY menampilkan upacara adat yang menjadi tradisi di masing-masing wilayah.

Tabel 2-102 Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY tahun 2012-2018

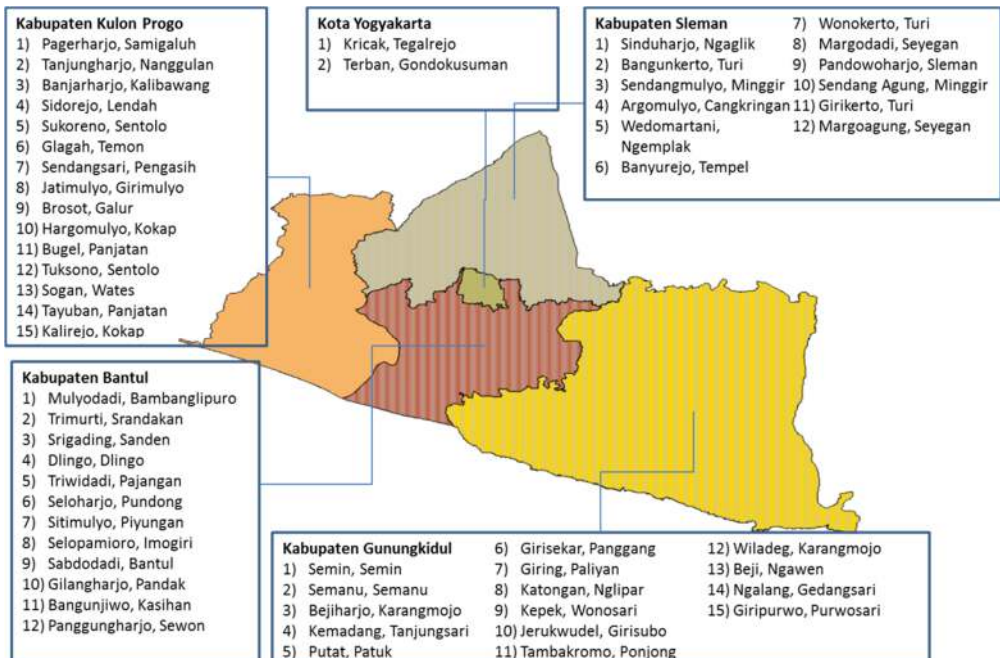
Jenis Data	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Upacara Adat	447	447	459	473	475	478	479
Upacara Tradisi	35	35	35	35	35	35	35
Jenis Permainan Tradisional	34	34	34	34	58	58	58
Cerita rakyat	33	33	33	33	33	33	80

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY (www.jogjabudaya.com)

Desa Budaya

Desa/Kelurahan Budaya merupakan desa/kelurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, penataan ruang, dan warisan budaya. Daerah Istimewa Yogyakarta terus meningkatkan potensi dan eksistensi desa budaya sebagai sarana untuk memperkuat nilai budaya yang telah melekat pada masyarakat setempat. Pengelolaan desa budaya yang sudah eksis dan rintisan-rintisan desa budaya dilakukan secara bersama-sama oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pembinaan desa/kelurahan budaya meliputi : a) peningkatan manajemen, b) peningkatan wawasan dna ketrampilan teknis, c) Dukungan promosi dan informasi, d)

fasilitasi sarana dan prasarana, e) fasilitasi penyelenggaraan event dan kompetisi, f) pengkajian pengembangan, dan g) pendampingan tenaga teknis. Pada tahun 2016 telah membentuk tim akreditasi untuk menilai kelayakan sebuah desa ditetapkan sebagai Desa Budaya sesuai dengan Peraturan Gubernur No 36 tahun 2014 tentang Desa/kelurahan Budaya.



Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2018

Gambar 2-58 Desa dan Kelurahan Budaya di DIY Menurut SK Gub DIY Nomor 262/KEP/2016 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Budaya

Kesenian

Kegiatan berkesenian di DIY telah dieksplorasi dengan berbagai cara dan media, diwujudkan dalam berbagai bentuk dan ragam, entah berupa seni rupa, seni sastra, seni pertunjukan, seni perfilman, bahkan terkadang campuran berbagai bentuk dan ragam, atau apa pun namanya, Semua itu berakar pada rasa, dan diwujudkan untuk melayani rasa pula, yakni rasa keindahan, Sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia menghasilkan berbagai corak kesenian mulai dari yang sederhana hingga perwujudan kesenian yang kompleks, Dalam pengkategorian cabang seni sampai saat ini belum ada pembakuan yang pasti, Untuk kepentingan penyusunan sistem informasi budaya, data yang akan dilihat adalah organisasi seni, usaha kerajinan,

permainan tradisional, tokoh seniman dan budayawan, penghargaan seniman dan budayawan, dan gallery seni rupa,

Beberapa tahun terakhir semarak even seni sangat menonjol sekali di DIY, Perhelatan seni dapat disaksikan di lingkungan Kraton, Kampus, Kampung maupun Keprajan, Lomba, festival, karnaval, pameran sebagai wadah kreativitas dan inovasi seni masyarakat, Bentuk-bentuk seni yang biasanya berkembang di Kraton, biasanya hanya dipertunjukkan bagi kalangan tertentu, kini sudah dapat ditonton oleh seluruh anggota masyarakat, Tempat-tempat yang tidak mungkin dimasuki seni tradisional pun sudah mulai ada penjajagan untuk ruang budaya tradisional, Festival Kebudayaan Yogyakarta diproyeksikan agar menjadi event yang lebih spektakuler,

Kerjasama-kerjasama dengan kelompok orkestra dari luar negeri sering menghasilkan konser musik kolaborasi, Musik yang selama ini dianggap hanya konsumsi orang kelas menengah atas juga sudah merambah ke pedesaan, yaitu Ngayogjazz, Seni rupa mengalami perkembangan pesat, Para seniman seni rupa telah menunjukkan kiprahnya dalam dunia internasional, Mereka berusaha menerobos event-event seni rupa di luar negeri,

Karya seni yang telah menjadi warisan budaya dunia adalah batik, keris, wayang, gamelan, Selain sebagai karya seni, warisan karya tersebut juga merupakan pusaka Indonesia yang diakui dunia internasional, Wayang kulit sebagai seni pertunjukan tradisional yang sangat populer di kalangan masyarakat Jawa dimainkan oleh seorang dalang dengan menggerakkan karakter-karakter tertentu yang terdapat dalam Kitab Mahabarata dan Ramayana telah diakui UNESCO pada tahun 2008, Keris diakui dunia pada tahun 2005, Batik tercatat dalam daftar UNESCO pada tahun 2009, Gamelan diakui dunia internasional sebagai karya budaya Indonesia pada tahun 2014, bersamaan waktunya dengan penetapan Sekaten,

Seni yang juga berkembang pesat saat ini di DIY adalah dunia film, Banyak film yang telah diproduksi di DIY baik nasional maupun internasional, seperti film Sang Pencerah, film Turis Romantis, Surga yang Tak Dirindukan, Java Heat, The Philosophers yang mengambil lokasi di kawasan-kawasan cagar budaya, Pada tahun 2015 DIY telah memproduksi karya budaya film unggul yaitu antara lain : Amarta (Gadis dan Air), Bawang Kembar, Ilalang ingin Hilang Waktu Siang, Jaranan, Kirana, Kitorang Basudara, Natalan, Neng Kene Aku Ngenteni Kowe, Pulang Tanpa Alamat, Sasi Takon, Pada tahun 2016 Film yang diproduksi Dinas Kebudayaan terdiri dari Film Dokumenter (Jamu (Saking Wingking

Mengajeng), Jogja kembali, Sosrokusuman), dan Film Fiksi (Happy Family, Kleang Kabur Kanginan, Ruah),

Kelompok pembuat film di Yogyakarta beragam dari segi umur, organisasi, bentuk organisasi, maupun ukuran organisasi, Dari segi umur, hampir semua kelompok pembuat film didirikan pasca reformasi, Komunitas film sangat mempengaruhi perkembangan perfilman di DIY, Beberapa contoh komunitas yang menyelenggarakan program pelatihan kine klub yang berbasis kampus seperti di UGM, ISI Yogyakarta, APMD, UAJY, UIN, dan UMY, Komunitas apresiasi dan kajian film yang tidak berbasis kampus antara lain : De Javu, Ki noki, Montase, Rumah Sinema, Forum Film Dokumenter, Komunitas film yang sudah berorientasi pada produksi misalnya Limaenam Films, Studio Kasat Mata dan Fourcolours Films,

Daerah Istimewa Yogyakarta diuntungkan dengan keberadaan 129 perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa lebih dari 200 ribu orang, Keberadaan perguruan tinggi seperti universitas, akademi dan berbagai sekolah vokasi tersebut memungkinkan perjumpaan orang-orang yang berminat pada produksi film dan mendukung kemunculan kelompok-kelompok film yang berorientasi pada seni, selain untuk mencari pendapatan, Film bagi kelompok pembuat film di DIY bukan saja soal ekonomi, tetapi juga soal ungkapan seni budaya, Hasil produksi film di Yogyakarta tidak melayani pasar bioskop sebagaimana industri perfilman nasional yang banyak berbasis di Jakarta, Film produksi Yogyakarta lebih banyak melayani berbagai kebutuhan dari rumah produksi luar negeri, perusahaan iklan, instansi pemerintah, festival film, hingga lembaga swadaya masyarakat internasional, Pemda DIY mestinya mengintervensi melalui aspek distribusi dan eksibisi yang masih jarang mendapat perhatian banyak pihak, Produktivitas kelompok pembuat film di DIY harus dipertemukan dengan pasar sebagai cara mempertemukan film dan penontonnya, Kelompok pembuat film di DIY membutuhkan perluasan pasar dari aspek distribusi maupun eksibisi yang perlu disediakan bersama oleh para pihak baik swasta maupun Pemda,

Pemetri budaya, fasilitator pendidikan, tenaga ahli warisan budaya dan cagar budaya, seniman, budayawan, pamong budaya, kurator, kritikus, komunitas budaya, dan penggiat budaya,

Tabel 2-103 Organisasi Seni dan Budaya di DIY

Aset Budaya	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
organisasi seni rupa	8	16	17	17	17	17	15
org seni pertunjukan	4231	5226	5241	5434	5543	6361	6420
org perfilman	12	42	42	42	42	42	42
lembaga budaya	105	105	82	98	180	181	78
lembaga pendidikan budaya	31	32	43	49	49	49	49
Desa/kelurahan budaya	32	32	32	43	43	56	56
Organisasi kepercayaan	90	94	94	112	120	137	135

Sumber : Dinas Kebudayaan DIY, 2018

Tabel 2-104 Pelaku Seni dan Budaya di DIY Tahun 2012-2017

Jenis Data	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tokoh Seniman Budayawan	486	486	487	489	496	504
Penghargaan seniman Budayawan	260	275	290	295	351	271

Sumber: www.jogjabudaya.com (Dinas Kebudayaan)

Penyebarluasan dilakukan antara lain melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, festival, serta penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri, Event-event internasional yang selalu diikuti oleh DIY antara lain melalui Bienalle, Sister Province, Europhalia, MSO,

2.1.3.1.23 Urusan Perpustakaan

Keberadaan perpustakaan memiliki peran strategis di tengah masyarakat karena selain fungsi informatif, perpustakaan juga memiliki fungsi edukatif. Sebagai agen informasi, pendidikan sekaligus kebudayaan, penyediaan perpustakaan yang memadai (baik secara kualitas dan kuantitas) menjadi hal mutlak dalam meningkatkan frekuensi kunjungan pemustaka. Hal ini terkait dengan permasalahan masih rendahnya minat baca di Indonesia.

Menurut penilaian *World's Most Literate Nations Ranked*, Indonesia menempati peringkat ke 60 dari 61 negara yang dilibatkan (*Central Connecticut State University*, 2016). Survey ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu *literacy achievement test* dan *literate behavior characteristics*.

Untuk kategori tingkat literasi orang dewasa, skor nasional Indonesia adalah 99.4. Tingkat literasi diartikan sebagai kemampuan memahami pernyataan sederhana di kehidupan sehari-hari baik secara tertulis maupun lisan (*United Nations Development Programme*, 2016). Jika dilihat dari minat baca nasional, DIY memiliki minat baca 91,00 % atau rangking 4 setelah Riau (94,01%), DKI (93,10%) dan Bali (92,44%).

Sedangkan dari hasil Kajian Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) oleh Perpustakaan Nasional RI dan BPAD Tahun 2018, Skor TGM Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebesar 46,13. Angka ini merupakan rerata dari TGM di 5 (lima) wilayah kabupaten/kota dan angka ini lebih tinggi dari TGM Nasional tahun 2017 sebesar 36,48 pada tahun 2017.

Tingkat kegemaran membaca tertinggi menurut kabupaten/kota di DIY dicapai oleh Kabupaten Kulon Progo dengan skor 50,86 dan terendah di Gunungkidul dengan skor 39,00.

Tabel 2-105 Peringkat TGM Kabupaten/Kota di DIY

No	Kabupaten/Kota	TGM
1	Kulon Progo	50,86
2	Sleman	50,51
3	Bantul	48,03
4	Yogyakarta	42,24
5	Gunungkidul	39,00

Sumber: Kajian Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) DIY Tahun 2018

Upaya-upaya untuk meningkatkan budaya baca di Daerah Istimewa Yogyakarta akan terus dilakukan. Kampanye sedekah buku, gerakan membaca, bedah buku, inovasi pelayanan, kerjasama dengan lembaga lain dan peningkatan penyediaan sarana prasarana terus diusahakan agar masyarakat DIY memiliki budaya baca. Dalam mendukung gerakan literasi ini perpustakaan memegang peran yang sangat penting. Data jumlah perpustakaan di DIY dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-106 Data Perpustakaan per Jenis Perpustakaan Tahun 2018

No	Jenis	Jumlah
1	Umum	6
2	Desa	438
3	SD/MI	2.011
4	SMP/MTs	537
5	SMA/SMK/MA	426
6	Perguruan Tinggi	112
7	Komunitas	29
8	SLB	78
	TOTAL	3.637

Sumber: BPAD DIY 2019

Dilihat dari persebarannya, dari total 3.637 perpustakaan jumlah perpustakaan terbanyak ada di Kabupaten Sleman yaitu sejumlah 963 unit. Persebaran perpustakaan di kabupaten/kota DIY tahun 2018 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2-107 Data Perpustakaan per Kabupaten/Kota Tahun 2018

No	Jenis	Jumlah
1	Bantul	722
2	Gunungkidul	938
3	Kota Yogyakarta	402
4	Kulon Progo	612
5	Sleman	963
	TOTAL	3.637

Sumber: BPAD DIY 2019

Dari data tersebut sebanyak 142 unit perpustakaan sudah terakreditasi dan sisanya sebanyak 3.495 unit perpustakaan belum terakreditasi. Jika dilihat persentasenya, perpustakaan yang sudah terakreditasi di DIY masih sangat kecil, masih sekitar 4% dari keseluruhan perpustakaan yang ada di DIY. Perpustakaan yang memadai diukur dengan perpustakaan yang telah mendapatkan akreditasi perpustakaan. Dengan demikian masih terdapat lebih dari 96% perpustakaan bisa dikatakan belum memadai. Untuk itu diperlukan adanya stimulasi untuk mengakselerasi peningkatan kualitas perpustakaan sehingga memenuhi standard.

Tantangan terbesar pada masa sekarang adalah perkembangan perilaku membaca literatur digital seiring dengan berkembangnya teknologi informasi. Kehadiran layanan pustaka digital menjadi mutlak diselenggarakan untuk memudahkan pembaca dalam mengakses koleksi buku digital. Untuk menjawab tantangan tersebut BPAD DIY meluncurkan layanan pustaka digital i-Jogja di mana pembaca bisa meminjam buku dalam bentuk digital yang dikoleksi oleh Grhatama Pustaka. Tantangan berikutnya adalah pengembangan konten dan koleksi dalam aplikasi tersebut baik kualitas maupun kuantitas sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat DIY.

Jogja Library for All (JLA) merupakan jaringan berbagai perpustakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyediakan akses informasi koleksi perpustakaan secara online bagi masyarakat, beranggotakan 39 perpustakaan pemerintah dan Lembaga Pendidikan yang memungkinkan saling silang layanan pustaka. Jaringan yang sebenarnya memiliki peran strategis ini dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Komitmen berjejaring dari anggota JLA tidak dibarengi dengan pelaksanaannya di lapangan, dari 39 anggota baru 4 perpustakaan yang sudah bekerjasama dalam layanan saling silang pustaka di tahun 2018.

2.1.3.1.24 Urusan Kearsipan

Arsip sebagai sebuah informasi yang terekam dari sebuah kegiatan atau peristiwa merupakan sumber informasi obyektif dalam berbagai bidang yang dapat meningkatkan kesadaran nasional dan pemahaman jati diri bangsa. Melalui arsip dapat dipelajari dinamika perubahan yang terjadi sebagai bahan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa ke depan.

Arsip berdasarkan jenisnya terdiri dari arsip dinamis dan statis. Arsip dinamis sendiri dibagi menjadi dua yaitu dinamis aktif dan dinamis inaktif. Arsip dinamis aktif merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya masih tinggi sedangkan arsip dinamis inaktif merupakan arsip yang sudah berkurang frekuensi penggunaannya. Pemusnahan arsip merupakan suatu fase dalam manajemen kearsipan yang kedudukannya pada siklus hidup arsip (archive life cycle) merupakan jembatan lain bagi akhir riwayat arsip dinamis yang tidak masuk dalam kategori arsip permanen. Secara teoritis, kurang lebih sembilan puluh persen arsip dinamis akan dimusnahkan dan hanya sekitar sepuluh persen yang dipermanenkan menjadi arsip statis.

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Nasional dan/atau lembaga kearsipan. Oleh karena itu arsip statis tidak dikelola oleh pencipta melainkan oleh lembaga kearsipan. Pengelolaan arsip statis dilakukan melalui kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi, akses dan pelayanan arsip statis dalam suatu sistem kearsipan nasional.

Untuk lingkup DIY, khasanah arsip yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY meliputi khasanah arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Jumlah arsip yang dilayankan pada tahun 2018 baik di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, di Keraton maupun di Puro Pakualaman sejumlah 5.782 berkas. Data kearsipan DIY dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2018 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2-108 Data Kearsipan di DIY 2014-2018

Elemen	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah arsiparis						
Kulon Progo	Orang	3	3	3	3	10
Bantul	Orang	18	17	16	16	15
Gunungkidul	Orang	10	7	16	16	16
Sleman	Orang	21	22	22	22	21
Kota Yogyakarta	Orang	21	20	20	20	15
Jumlah Arsip yang dimanfaatkan	Berkas	685	1.297	1.713	1.114	5.782
Jumlah pengunjung layanan arsip statis	Orang	1.357	1.217	33.412	21.720	2.533
Pengelolaan arsip secara baku	Unit dan presentase					40

Sumber: BPAD DIY, 2019

Keberhasilan Pemerintah Daerah DIY dalam mengelola kearsipan mendapatkan apresiasi yang tinggi dari Pemerintah Pusat dalam ANRI AWARD pada Tahun 2017 sebagai Juara I Lembaga Kearsipan daerah Terbaik nasional. Penyadaran publik akan nilai kandungan arsip beserta penyelamatan fisiknya terus dilakukan melalui pameran, workshop, publikasi buku naskah sumber.

Meskipun sudah mendapatkan apresiasi secara nasional terkait urusan kearsipan, masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian baik dalam hal pengelolaan, penyediaan sarana layanan arsip, hingga aspek pemanfaatannya. Dari sisi pengelolaan, dari 52 instansi yang diberikan pembinaan, masih terdapat 12 instansi atau sekitar 23% instansi yang belum memenuhi standar. Sedangkan dari aspek pemanfaatan, dari 47.738 berkas arsip atau 523.860 lembar yang sudah diolah, baru sekitar 39,2% yang dimanfaatkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi beberapa permasalahan tersebut adalah terkait penyediaan sarana layanan arsip yang belum memadai. Kondisi ini terjadi akibat keterbatasan tempat penyimpanan arsip di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, sehingga terdapat 1.500 boks arsip dari 10 OPD belum bisa dipindahkan dan statusnya masih dititipkan di OPD tersebut.

2.1.3.2 FOKUS LAYANAN PILIHAN

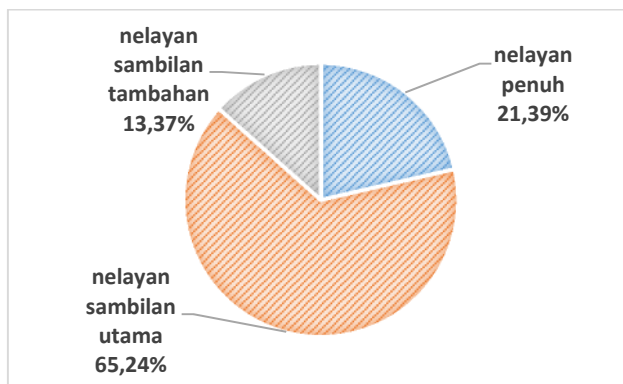
2.1.3.2.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

DIY mempunyai pantai sepanjang 113 Km yang membentang dari ujung barat dan meliputi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul. Dengan kondisi alam tersebut, DIY mempunyai potensi perikanan

tangkap laut yang besar. Potensi perikanan tangkap lestari di laut di selatan DIY mencapai 320.600 ton per tahun, sedangkan potensi yang lebih luas di Samudera Hindia mencapai 906.340 ton per tahun.

Perikanan tangkap laut di DIY didukung dengan keberadaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng di Kabupaten Gunungkidul dan 18 lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan. Produksi perikanan tangkap laut mengalami fluktuasi dikarenakan kondisi cuaca dan perairan laut yang berubah- ubah setiap tahunnya. Selain itu, belum beroperasinya Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto yang diproyeksikan sebagai sentra perikanan tangkap juga berpengaruh pada belum optimalnya produksi perikanan tangkap DIY.

Nelayan di DIY terdiri atas nelayan penuh, nelayan sambilan utama dan nelayan sambilan tambahan. Berdasarkan definisi, nelayan penuh merupakan nelayan yang dijadikan sebagai profesi dan tidak memiliki keahlian lain. Sementara itu, nelayan sambilan utama masih mendominasi jumlah nelayan di DIY. Hal ini berarti walaupun sebagian besar pendapatannya diperoleh dari hasil penangkapan ikan di laut, namun masih memiliki pekerjaan lain selain nelayan, seperti bertani. selain itu masih terdapat nelayan andon yang datang dari luar DIY dan mendaratkan ikannya di pangkalan pendaratan ikan di wilayah DIY.

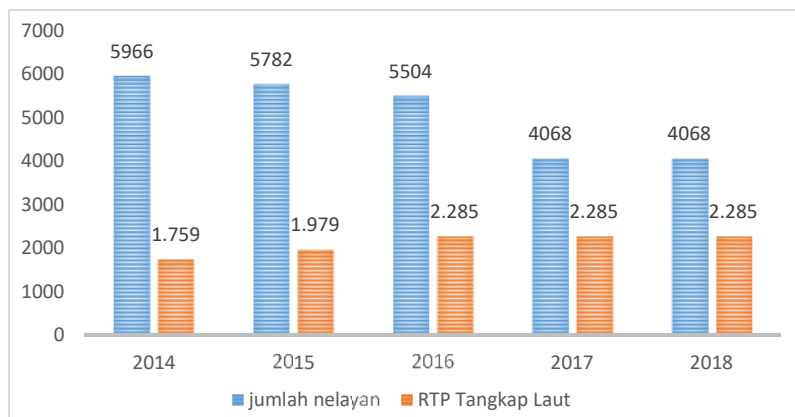


Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2019

Gambar 2-59 Grafik Proporsi Nelayan DIY Tahun 2018

Jumlah nelayan DIY selama lima tahun terakhir cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan -8,5%. Namun, bila dirinci lebih lanjut, terlihat bahwa jumlah nelayan penuh dan nelayan sambilan utama cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing 47,93% dan 53,11%. Sedangkan, nelayan sambilan tambahan terus menurun dengan rata-rata penurunan 32,47%. Sementara itu, bila dibandingkan dengan perkembangan Rumah Tangga

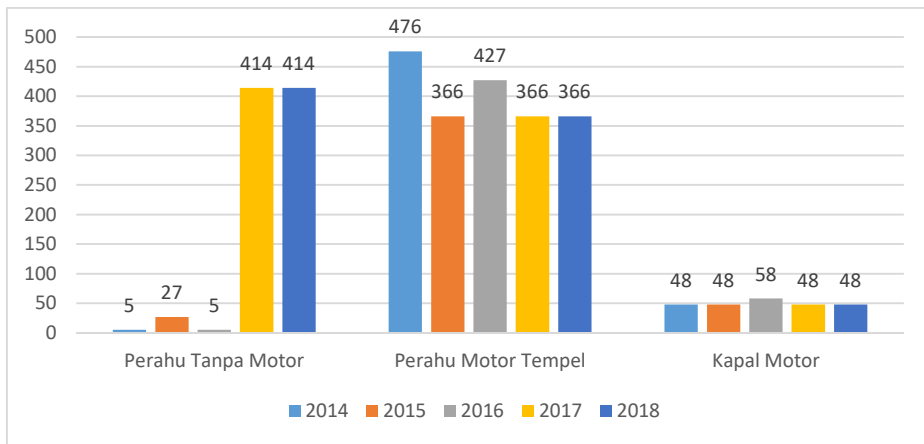
Perikanan (RTP) Tangkap Laut, dapat diketahui bahwa jumlah RTP cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 6,99%.



Sumber: *Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2019*

Gambar 2-60 Perkembangan Jumlah Nelayan dan Rumah Tangga Perikanan Tangkap Laut DIY Tahun 2014-2018

Armada kapal penangkapan ikan DIY didominasi oleh perahu tanpa motor yang mencapai 50%. Perahu tanpa motor meningkat sangat signifikan pada tahun 2017. Meningkatnya minat penggunaan perahu tanpa motor karena tidak memerlukan biaya operasional yang tinggi dan jangkauannya hanya di sekitar pantai. Hal ini berbanding terbalik dengan keberadaan perahu motor tempel yang dalam lima tahun terakhir cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan -5,18%. Jumlah kapal penangkap ikan inkamina yang berkapasitas 30 GT (Gross Ton) tahun 2018 sebanyak sembilan kapal yang beroperasi. Peningkatan jumlah perahu tanpa motor perlu mendapat perhatian karena resiko eksploitasi berlebihan sumberdaya ikan di daerah sekitar pantai

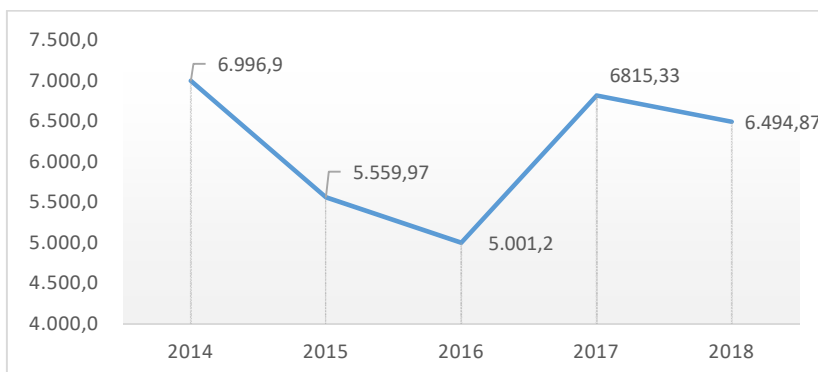


Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2019

Gambar 2-61 Grafik Perkembangan Armada Penangkapan Ikan DIY Tahun 2014-2018

Produksi perikanan tangkap DIY juga didukung oleh produksi perikanan tangkap perairan umum (PU) di sungai, waduk, dan telaga. Penangkapan ikan di sungai mendominasi produksi perairan umum dengan kontribusi hampir mencapai 95%. Komoditas yang banyak ditangkap di sungai adalah nila dan lele.

Produksi perikanan tangkap DIY cenderung berfluktuasi dalam lima tahun terakhir mengikuti pola perkembangan produksi perikanan tangkap laut. Hal ini dikarenakan produksi perikanan tangkap laut mendominasi sumbangan terhadap produksi perikanan tangkap secara keseluruhan. Perkembangan produksi perikanan tangkap DIY disajikan dalam grafik di bawah ini



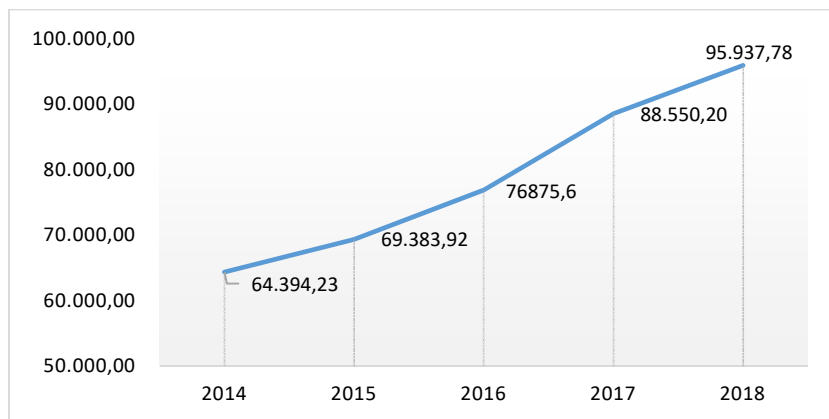
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2019

Gambar 2-62 Produksi Perikanan Tangkap DIY Tahun 2014 – 2018

Selain memiliki perairan laut dan umum yang cukup potensial, DIY juga memiliki luas daratan yang dapat dimanfaatkan untuk pembudidayaan perikanan darat, baik air tawar maupun air payau. Budidaya perikanan air tawar didominasi oleh budidaya sistem kolam, baik kolam permanen atau kolam terpal yang mencapai lebih dari 96% kontribusi produksi perikanan budidaya. Selain di kolam, budidaya perikanan air tawar juga memanfaatkan sawah dengan sistem tumpangsari atau dikenal dengan minapadi dan udang galah padi (ugadi). Sementara itu, budidaya di air payau dilakukan di tambak yang merupakan kontributor terbesar kedua produksi perikanan budidaya DIY.

Lele merupakan komoditas yang paling banyak dihasilkan pada tahun 2018. Hal ini dikarenakan pembudidayaannya yang relatif lebih mudah serta permintaan untuk konsumsi yang tinggi sehingga harganya stabil. Selain lele, komoditas nila dan gurami juga penyumbang terbesar produksi perikanan budidaya di kolam. Sementara itu, komoditas udang vaname merupakan hasil produksi budidaya air payau di tambak.

Produksi perikanan budidaya dalam lima tahun terakhir terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 10,52%. Untuk mengetahui pertumbuhan produksi perikanan budidaya di DIY dapat dilihat pada gambar berikut ini.



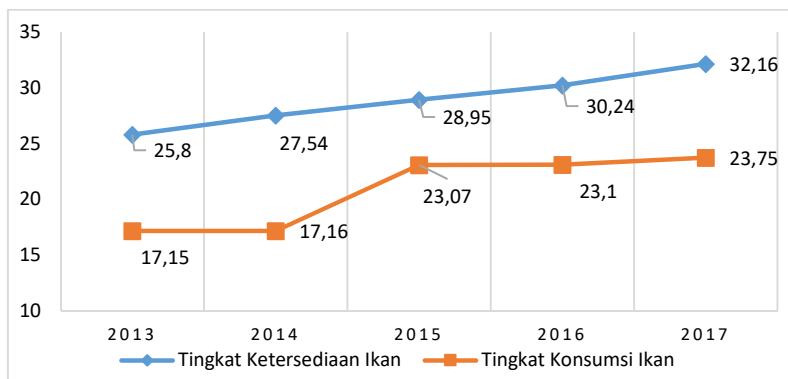
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2019

Gambar 2-63 Produksi Perikanan Budidaya DIY Tahun 2014-2018

Ketersediaan ikan per kapita DIY mengalami kecenderungan meningkat dalam periode 2013 hingga 2017 dengan rata-rata pertumbuhan 5,67%.

Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh produksi ikan di DIY yang terus tumbuh terutama pada budidaya perikanan. Walaupun demikian, ketersediaan ikan di DIY masih disertai dengan adanya pasokan ikan dari luar daerah.

Tingkat konsumsi ikan perkapita juga cenderung meningkat dalam periode 2013 hingga 2017 dengan rata-rata pertumbuhan 9,36%. Namun demikian, konsumsi ikan DIY masih jauh berada di bawah tingkat konsumsi ikan nasional 46,49 kg/kapita/tahun. Peningkatan konsumsi ikan sejalan dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya asupan kebutuhan protein dari ikan. Penggiatan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang diinisiasi Pemda DIY melalui Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memegang peranan penting dalam upaya peningkatan konsumsi ikan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengolahan ikan.



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2019

Gambar 2-64 Tingkat Konsumsi dan Ketersediaan Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), tahun 2013-2017

2.1.3.2.2 Urusan Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan DIY. Tercermin dalam lapangan usaha Akomodasi dan Makan Minum pada PDRB DIY, sektor ini menempati peringkat ke-3 dalam struktur perekonomian DIY atau sebesar 10,22%. Jika dilihat dari laju pertumbuhannya, pada tahun 2018 sektor ini tumbuh mencapai 6,77% atau berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi DIY. Visi pembangunan kepariwisataan DIY adalah mewujudkan Yogyakarta sebagai Destinasi Pariwisata berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara, berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Salah satu indikator perhitungan perkembangan pariwisata DIY yang digunakan adalah dengan peningkatan jumlah wisawatan di DIY. Dalam 5 tahun terakhir, perkembangan jumlah wisatawan di DIY mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada jumlah wisawatan nusantara. Pada tahun 2018 Jumlah Wisatawan yang Menggunakan Jasa Akomodasi di DIY sebanyak 5.689.093 orang terdiri dari wisatawan mancanegara sebesar 416.374 orang dan wisatawan nusantara sebesar 5.272.719 wisatawan orang. Meskipun jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat, namun dari sisi besaran pertumbuhannya mengalami pelambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, kunjungan wisman tumbuh mencapai 14,8%. Sementara itu, tahun 2018, kunjungan wisman hanya tumbuh 8,8%. Pelambatan pertumbuhan kunjungan wisman sangat dipengaruhi kondisi nasional seperti kejadian bencana alam baik di Bali maupun NTB

Tabel 2-109 Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY

	2014	2015	2016	2017	2018
Wisman	254.213	308.485	355.313	397.951	416.374
Wisnus	3.091.967	3.813.720	4.194.261	4.831.347	5.272.719
Total	3.346.180	4.122.205	4.549.574	5.229.298	5.689.093

Sumber : Dinas Pariwisata DIY Tahun 2016, BPPSD DIY 2019

Sektor pariwisata tengah menjadi sektor yang diusung oleh berbagai daerah. Persaingan antar daerah tentu menjadi tantangan bagi DIY dalam menempatkan posisinya sebagai tujuan pariwisata favorit. Di sisi lain tentu saja persaingan antar daerah ini juga memunculkan inovasi dalam pengembangan daya tarik wisata baik yang berupa objek wisata maupun penyelenggaraan atraksi. Dalam Calendar of Event tahun 2019 yang dirilis Kementerian Pariwisata melalui proses seleksi dan kurasi, event di DIY yang masuk dalam COE hanya ada sejumlah 3 event. Jumlah tersebut lebih rendah dari Bali yang mencapai 6 event atau Jawa Tengah dengan 5 event. Hal ini patut menjadi perhatian bahwa dalam pengembangan event atau festival pariwisata DIY perlu berorientasi pada daya tarik yang berkelas dunia.

Lama tinggal wisatawan yang menunjukkan rata-rata lama hari yang dihabiskan wisatawan di DIY baik untuk Wisman maupun wisnus mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara di DIY pada tahun 2018 mencapai 2,15 hari dan lama tinggal wisatawan nusantara mencapai mencapai 1,99 hari. Peningkatan Lama Tinggal Wisawatan Mancanegara dipengaruhi oleh ragam destinasi dan atraksi yang ada dan dilaksanakan di DIY di sepanjang tahun 2018. Penyelenggaraan

event pariwisata yang diagendakan pada bulan Juli-September, memperkirakan lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara pada saat liburan musim panas di eropa dan amerika adalah kunci keberhasilan dalam meningkatkan lama tinggal wisatawan mancanegara di DIY. Meskipun lama tinggal wisatawan mengalami peningkatan, namun jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, capaian tersebut masih relatif rendah. Rata-rata nasional untuk lama tinggal mencapai 2,8 hari. Selain itu, daerah tujuan wisata lain seperti Bali mampu mencapai lebih dari 3 hari untuk Wisman.

Tabel 2-110 Lama Tinggal Wisatawan

Tahun	Wisman	Wisnus
2014	1,95	1,58
2015	2,07	1,85
2016	2,00	1,95
2017	2,13	1,98
2018	2.15	1.99

Sumber : Dinas Pariwisata DIY Tahun 2016, BPPSD DIY 2019

Meskipun secara umum perkembangan kepariwisataan menunjukkan perkembangan yang positif, namun beberapa keterbatasan serta tantangan perlu menjadi perhatian dalam pembangunan. Sebagai contoh adalahantisipasi terhadap perkembangan yang dibangkitkan oleh operasional bandara baru di Kulon Progo. Jumlah usaha jasa pariwisata masih belum berimbang antara kabupaten/kotya. Keterbatasan usaha jasa pariwisata terutama dirasakan di kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul dan Bantul. Kulon Progo sebagai lokasi bandara baru, hanya memiliki 17 Usaha Perjalanan Wisata. Angka tersebut cukup jauh jika dibandingkan dengan Sleman yang memiliki 305 usaha.

Tabel 2-111 Jumlah Usaha Perjalanan Wisata

	Biro Perjalanan / Wisata	Cabang Biro Perjalanan/Wisata	Agen Perjalanan Wisata
Sleman	269	19	17
Bantul	66	0	35
Kulon Progo	5	0	12
Gunungkidul	21	0	2
Kota Yogyakarta	190	16	206

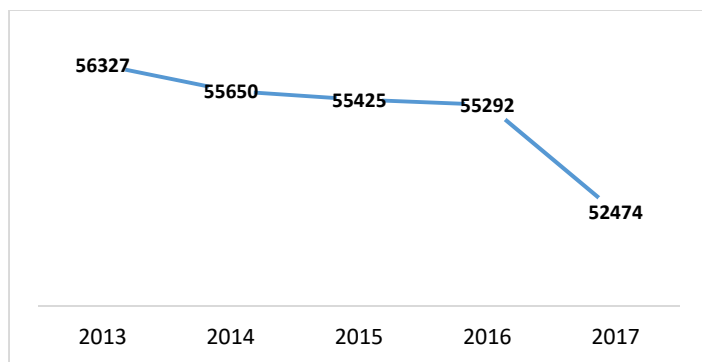
2.1.3.2.3 Urusan Pertanian

2.1.3.2.3.1 Sub Sektor Pertanian

Kontribusi sektor pertanian PDRB DIY pada tahun 2018 masih merupakan salah satu yang terbesar dengan sumbangan 9,78%. Namun kontribusinya cenderung

mengalami penurunan dalam kurun waktu 2014 hingga 2018, bahkan tergeser menjadi kontributor terbesar keempat pada tahun 2018. Penurunan kontribusi pertanian selain disebabkan oleh kurangnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian, juga disebabkan terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian rata-rata sebesar -1,74% per tahun selama kurun waktu 2013-2017. Alih fungsi lahan lebih banyak terjadi pada lahan sawah beririgasi, sebagaimana banyak ditemui pada lahan sawah di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

Perkembangan lahan sawah di DIY dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS DIY, 2018

Gambar 2-65 Perkembangan Luas Lahan Sawah di DIY

Penurunan luas sawah yang signifikan terjadi pada tahun 2017 dikarenakan alih fungsi lahan yang diperuntukkan pembangunan bandara baru di Kulon Progo dan pengembangan kawasan di sekitarnya. Bila diperinci, dapat diketahui bahwa lahan sawah beririgasi turun sebesar 6,55%, sebaliknya lahan tadah hujan naik sebesar 5,15% pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Data luas lahan sawah irigasi dan non irigasi/tadah hujan dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-112 Luas Lahan Sawah Beririgasi dan Non Irigasi di DIY

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan
Sawah Beririgasi	47.133	46.300	45.976	45.880	42.877	-2,31
Sawah Non Irigasi	9.406	9.350	9.449	9.412	9.897	1,31

Sumber : Dinas Pertanian dan KP, 2019

Produksi tanaman pangan DIY mengalami kecenderungan peningkatan pada kurun waktu 2014-2018 dengan rata-rata pertumbuhan 3,71%. Ketiga komoditas strategis, yaitu padi dan kedelai cenderung menurun selama lima

tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar -4,56% dan -56,06%. Sedangkan jagung mengalami kecenderungan meningkat, walaupun rata-rata pertumbuhannya dalam lima tahun hanya 0,08%. Sementara itu, komoditas yang cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun adalah kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar.

Pada tahun 2018 secara keseluruhan jumlah produksi padi mengalami penurunan cukup besar bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 19.580 ton. Bila dilihat lebih rinci, produksi padi sawah mengalami penurunan sebesar 31.891 ton, sedangkan padi ladang mengalami peningkatan sebesar 12.311 ton bila dibandingkan dengan tahun 2017. Produksi padi sawah pada tahun 2018 merupakan yang terendah dalam lima tahun, sedangkan sebaliknya produksi padi ladang justru yang tertinggi dalam lima tahun. Produksi padi sawah yang menurun disebabkan penurunan luas panen.

Sementara produksi jagung, kedelai, dan kacang tanah mengalami peningkatan pada tahun 2018 dikarenakan curah hujan yang cukup. Peningkatan produksi jagung disebabkan peningkatan produktivitas. Sedangkan komoditas kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar mengalami penurunan. Bahkan ubi kayu mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 120.175 ton.

Produksi tanaman pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2018 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2-113 Produksi Tanaman Pangan di DIY (dalam ton), Tahun 2014-2018

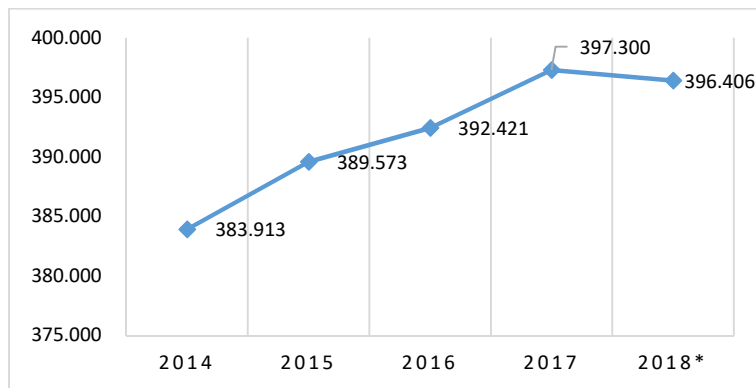
No	Jenis Tanaman	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018*)
1	Padi Sawah	719.194	746.810	712.285	678.530	646.639
2	Padi Ladang	200.379	198.326	170.417	202.576	214.887
	Total Padi	919.573	945.136	882.702	881.106	861.526
3	Jagung	312.236	299.084	310.257	311.764	312.683
4	Kedelai	19.579	18.822	16.763	8.656	11.117
5	Kacang Tanah	71.582	83.300	75.816	79.907	115.257
6	Kacang Hijau	261	230	289	301	244
7	Ubi Kayu	884.931	873.362	1.125.375	1.025.641	905.466
8	Ubi Jalar	5.237	6.070	3.256	5.289	3.730

Sumber: Dinas Pertanian dan KP, 2019

*) angka sementara

Produksi tanaman hortikultura di DIY dalam periode 2014 hingga 2018 cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,81%. Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan produksi selama lima tahun maka komoditas cabai

merah, cabai rawit, bawang merah, mangga, jahe menunjukkan trend yang semakin meningkat, sedangkan durian, pisang, anggrek, dan manggis trend-nya cenderung menurun.



*) Angka Sementara

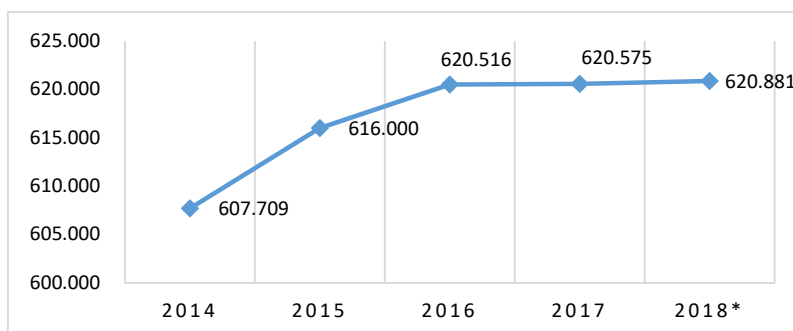
Sumber : Dinas Pertanian dan KP, 2019

Gambar 2-66 Perkembangan Produksi Hortikultura DIY Tahun 2014-2018 (dalam ton)

Bila diperinci lebih lanjut, dapat diketahui bahwa komoditas cabe besar merupakan kontributor terbesar kelompok buah dan sayur semusim. Sementara itu, kontributor terbesar kelompok buah dan sayur tahunan adalah komoditas Salak yang banyak dikembangkan di daerah Sleman bagian Utara (Turi, Cangkringan, Pakem). Sedangkan Jahe merupakan kontributor terbesar kelompok tanaman biofarmaka. Hal ini dikarenakan komoditas tersebut mudah dikembangkan serta permintaan pasarnya sebagai bahan farmasi herbal cukup tinggi.

2.1.3.2.3.2 Sub Sektor Peternakan

Jumlah populasi ternak dalam kurun waktu 2014 hingga 2018 cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,54%. Komoditas kelompok ternak besar dan ternak kecil cenderung menurun dengan rata-rata masing-masing sebesar -0,84% dan -0,2%. Produksi kelompok ternak besar dan ternak kecil pada tahun 2018 bahkan merupakan yang terkecil dalam lima tahun terakhir. Sementara kelompok ternak unggas cenderung meningkat dalam periode 2014 hingga 2018 dikarenakan kebutuhan unggas sebagai salah satu sumber pangan terus bertambah.



**) Angka Sementara*

Sumber : Dinas Pertanian dan KP DIY, 2019

Gambar 2-67 Perkembangan Populasi Ternak DIY Tahun 2014-2018 (dalam animal unit)

Tabel 2-114 Populasi Ternak di DIY per Kelompok Ternak (dalam ekor), Tahun 2014-2018

Kelompok	2014	2015	2016	2017	2018*
Ternak Besar	309.037	307.418	311.766	316.740	298.165
Ternak Kecil	565.786	576.697	585.622	612.641	558.206
Ternak Unggas	13.535.473	15.047.604	15.465.288	16.071.142	15.962.168

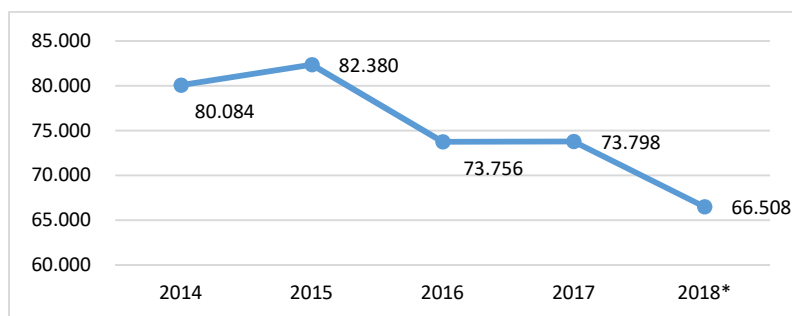
**) Angka Sementara*

Sumber : Dinas Pertanian dan KP DIY, 2019

Populasi ternak besar DIY didominasi oleh Sapi Potong yang banyak dikembangkan di Gunungkidul. Sementara kambing yang juga banyak dihasilkan di Gunungkidul juga merupakan kontributor terbesar kelompok ternak kecil. Di sisi lain, ayam ras pedaging merupakan kontributor terbesar kelompok ternak unggas. Kabupaten Sleman adalah produsen dari ayam ras pedaging terbesar di DIY.

2.1.3.2.3.3 Sub Sektor Perkebunan

Produksi perkebunan DIY dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2018 cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan -4,36%. Hal ini disebabkan oleh alih fungsi lahan maupun alih komoditas ke komoditas lain, serta penurunan produksi beberapa komoditas strategis, seperti kopi dan tebu. Perkembangan produksi perkebunan disajikan dalam grafik di bawah ini.



*) Angka Sementara

Sumber : Dinas Pertanian dan KP DIY, 2019

Gambar 2-68 Produksi Perkebunan DIY Tahun 2014-2018 (dalam ton)

Tabel 2-115 Perkembangan Produksi Komoditas Perkebunan Strategis di DIY 2014-2018 (dalam ton)

Komoditas Perkebunan Strategis (Ha)	2014	2015	2016	2017	2018*
Kelapa	53.775,40	58.725,92	54.606,52	47.318,93	55.078,30
Kakao	865,23	766,00	584,67	2.933,75	508,54
Kopi	452,36	567,90	421,29	277,78	294,12
Tembakau	1.597,67	2.540,79	1.608,96	1.896,12	1.678,10
Tebu	14.896,78	11.251,80	10.206,37	7.988,90	6.731,80

*) Angka Sementara

Sumber : Dinas Pertanian dan KP DIY, 2019

Sementara bila dilihat lebih rinci, dapat diketahui bahwa komoditas kelapa merupakan kontributor utama yang mendominasi produksi perkebunan di DIY pada tahun 2018 dengan peranan melebihi 75%. Rata-rata pertumbuhan produksi kelapa dalam lima tahun terakhir sebesar 1,31%. Sedangkan komoditas strategis kakao merupakan penyumbang terbesar kedua dengan rata-rata pertumbuhan dalam periode 2014-2018 sebesar 70,99% disebabkan peningkatan produksi yang sangat signifikan pada tahun 2017. Di sisi lain, komoditas tebu produksinya terus menurun dalam lima tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan -17,81%. Bahkan pada tahun 2018 mencapai produksi terendah sebesar 6.731,8 ton.

2.1.3.2.4 Urusan Kehutanan

Menurut analisis data Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, wilayah hutan DIY pada tahun 2018 seluas 97.534,22 Ha yang terdiri atas hutan rakyat seluas 78.400,27 Ha dan hutan negara seluas 19.133,95 Ha. Luasan hutan di Kabupaten

Gunungkidul sangat strategis karena memiliki proporsi dominan sebesar 60,61% dari luas hutan total di DIY dan didominasi oleh hutan rakyat seluas 45,23% dari luas hutan total DIY. Luas hutan rakyat di Gunungkidul meningkat pada tahun 2018 seluas 1.540,91 Ha dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, Kontribusi hutan di kabupaten Bantul dan Kulon Progo terhadap total luas hutan DIY justru menurun dibanding tahun 2017. Kontribusi luas hutan di Bantul menurun dari 10,11% menjadi 9,87% dan kontribusi hutan di Kulon Progo menurun dari 22,85% menjadi 22,39%.

Tabel 2-116 Luas Hutan di DIY Berdasarkan Kewilayahan Tahun 2018

Kabupaten	Hutan Negara (ha)	Hutan Rakyat (ha)	Total Hutan (ha)	% Total Hutan
Gunungkidul	15.001,15	44.110,87	59.112,02	60,61
Bantul	1.035,18	8.595,50	9.630,68	9,87
Sleman	2.051,13	4.898,30	6.949,43	7,13
Kulon Progo	1.046,49	20.795,60	21.842,09	22,39
Hutan di DIY	19.133,95	78.400,27	97.534,22	100,00

Sumber : analisis data Dishutbun DIY & BPS DIY, 2018

Berdasarkan wilayah administrasi kehutanan, kawasan hutan negara tersebar pada 4 wilayah kabupaten. Kabupaten Gunungkidul memiliki luasan terbesar, yaitu 78,40% dari luas hutan negara DIY (termasuk 1.773 ha yang merupakan hutan AB). Sementara Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kulon Progo memiliki kontribusi terhadap luas hutan negara DIY masing-masing sebesar 5,41%, 10,72%, dan 5,47%.

Sedangkan berdasarkan tata guna hutan negara, kawasan hutan negara terbagi atas: hutan produksi 13.519,470 Ha, Hutan lindung 2.312,80 Ha, Hutan konservasi 2.990,56 Ha (TNGM 1.728,906 Ha, Tahura Bunder 634,10 Ha, Cagar alam 11,4375 Ha, Taman wisata alam 1,0465 Ha, Suaka Margasatwa 615,60 Ha). Mengacu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 197/Kpts-II/2000 tertanggal 12 Juli 2000, hutan AB dikelompokkan menjadi hutan produksi.

Pengelolaan hutan produksi di DIY memiliki kekhususan dibandingkan wilayah lain karena dikelola oleh Balai KPH Yogyakarta (UPTD Dishutbun DIY). Potensi hutan produksi (13.411,70 ha) di DIY didominasi oleh tanaman jati (50,79%) dan tanaman kayu putih (34,32%). Saat ini, hasil tanaman kayu putih yang diolah menjadi minyak kayu putih memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi Pemda DIY. Problem pengembangan tanaman kayu putih di DIY adalah produktivitas yang rendah karena jumlah populasi tegakan yang

kurang memadai. Upaya pemenuhan populasi tegakan tanaman kayu putih senantiasa dilakukan secara bertahap dan diimplementasikan sinergis melalui skema kemitraan bersama masyarakat setempat dalam desain terpadu untuk pengentasan kemiskinan.

Kerusakan hutan terjadi akibat adanya kebakaran hutan, bencana alam dan pencurian kayu. Jumlah kerusakan hutan di Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul dari tahun 2014–2018 mengalami fluktuasi dengan Kabupaten Gunungkidul memiliki kasus terbanyak. Kasus pencurian kayu tertinggi terjadi pada tahun 2014, sebanyak 81 kasus dengan volume kayu yang dicuri sebanyak 353 meter kubik. Luas hutan yang terbakar terbesar terjadi pada tahun 2015 yaitu seluas 128,5 hektar. Jumlah titik lokasi kebakaran hutan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebanyak 19 titik. Di sisi lain, deforestasi tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 40,49 hektar, sedangkan pada tahun 2017 hanya sebesar 0,710 hektar. Penurunan kerusakan hutan diwujudkan melalui peningkatan upaya perlindungan dan pengamanan hutan. Selain itu, didukung dengan upaya pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam rangka peningkatan pendapatannya melalui skema tumpangsari maupun pola kerjasama lain.

Selain pencurian kayu, hutan di DIY masih menghadapi persoalan tekanan sosial masyarakat. Masalah mendasar di kawasan hutan disebabkan ketidakjelasan batas kawasan, sehingga kepastian wilayah kelola juga belum bisa terpenuhi. Di sisi lain, pemanfaatan hutan oleh masyarakat sekitar kawasan untuk keperluan pertanian, permukiman maupun sektor lain di luar kepentingan sektor kehutanan juga menimbulkan tekanan terhadap hutan.

Sementara itu, DIY masih memiliki lahan kritis di kawasan hutan yang tersebar di empat kabupaten dengan luasan paling besar berada di Gunungkidul (± 18.000 ha). Lahan kritis antara lain disebabkan faktor alam, seperti yang terjadi di Gunungkidul, terutama bagian Selatan yang strukturnya didominasi bebatuan kapur. Tren wisata alam yang terus berkembang di DIY menjadikan jasa lingkungan yang berasal dari sektor kehutanan berkontribusi cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di DIY. Selama tahun 2018, realisasi pendapatan yang diperoleh dari jasa lingkungan mencapai Rp. 2.260.603.250,- yang berasal dari karcis masuk, parkir, dan kegiatan lainnya. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2017 yakni sebesar Rp. 1.962.831.125,-.

Pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan juga disumbang oleh produksi minyak kayu putih dimana pada tahun 2018 produksinya dapat melampaui target yaitu sebesar 44.296 liter. Jumlah produksi minyak kayu putih pada tahun 2018 sudah sesuai dengan taksasi dengan pelaksanaan kegiatan mengacu pada dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT). Jumlah produksi minyak kayu putih dari tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2-117 Produksi Minyak Kayu Putih di DIY Tahun 2014-2018

Tahun	Target Produksi (liter)	Realisasi Produksi (liter)	PAD (Rp)
2014	47.633	47.641	9.973.126.000
2015	43.785	43.825	8.374.957.500
2016	43.785	31.247	5.311.990.000
2017	44.285	44.297	8.420.859.700
2018	44.285	44.296	10.458.285.600

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, 2018

Sedangkan hasil hutan kayu di DIY pada tahun 2018 berhasil menyumbangkan pendapatan sebesar Rp. 1.063.086.074,- yang berasal dari tebangan kayu jati bulat dan kayu bulat campuran seama 1 tahun. Angka pendapatan ini meningkat jika dibandingkan tahun 2017 dimana relaisasi pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 661.161.046,-.

Pengelolaan hutan di DIY tidak hanya dilihat dari aspek ekonominya melalui peningkatan produksinya saja tetapi juga memperhatikan aspek ekologi dan sosialnya agar tercipta pengelolaan hutan yang lestari sehingga pemanfaatan hutan menjadi lebih optimal guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.2.5 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan energi sumberdaya mineral (ESDM) merupakan urusan pilihan dan terbagi menjadi 5 sub urusan, yaitu ; geologi, mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan.

2.1.3.2.5.1 Sub Urusan Geologi

Pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam sub urusan geologi, pemerintah daerah provinsi mempunyai ketugasan :

- a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi.

- b. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi.
- c. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, terdapat 3 Cekungan Air Tanah (CAT) yang berada di DIY yakni ; CAT Yogyakarta-Sleman, CAT Wates, dan CAT Wonosari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan pengelolaan pemerintah daerah DIY adalah terhadap cekungan air tanah yang berada dalam provinsi saja, meliputi CAT Yogyakarta-Sleman yang mempunyai luasan 916 km² dan liputannya meliputi Kab. Sleman, Kota Yogyakarta, Kab. Bantul, dan Kab. Kulon Progo serta CAT Wates dengan luasan 150 km² yang berlokasi di Kab. Kulon Progo.

Pelaksanaan sub urusan geologi di DIY terkait dengan air tanah dimaksudkan untuk mempertahankan rerata penurunan muka air tanah yang diprioritaskan dengan upaya peningkatan konservasi air tanah melalui pembuatan sumur resapan, pemantauan muka air tanah melalui pembuatan sumur pantau dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian perizinan air tanah. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan muka air tanah di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Yogyakarta-Sleman tetap dalam kondisi aman yaitu penurunan muka air tanah <20% terhadap tebal rata-rata akuifer yaitu sebesar 100 meter.

Kondisi muka air tanah pada musim hujan terbasah di CAT Yogyakarta-Sleman pada tahun 2014 adalah sebesar 7,28 meter atau 7,28% terhadap rata-rata tebal akuifer dan pada musim kemarau terkering sebesar 9,35 meter atau 9,35% terhadap rata-rata tebal akuifer. Sedangkan pada tahun 2015 adalah sebesar 6,81 meter (6,81% terhadap rata-rata tebal akuifer) atau terjadi tingkat kenaikan sebesar 6,46% pada musim hujan terbasah dan sebesar 9,22 meter (9,22% terhadap rata-rata tebal akuifer) atau terjadi tingkat kenaikan sebesar 1,39% pada musim kemarau terkering. Dengan melihat kondisi muka air tanah pada musim kemarau dan musim hujan di tersebut di atas, rerata muka air tanah di CAT Yogyakarta – Sleman tahun 2015 masih <20% terhadap tebal rata-rata akuifer sesuai target tahun 2015. Kondisi ini juga dapat dipertahankan hingga tahun 2018, di mana penurunan muka air tanah <20% terhadap tebal rata-rata akuifer.

Pada tahun 2018 dilakukan peningkatan upaya konservasi dan pemantauan muka air tanah untuk mempertahankan rerata penurunan muka air tanah tetap pada kondisi <20%, melalui kegiatan :

- Pembangunan 160 unit sumur resapan untuk imbuhan air tanah;
- Pembangunan 5 unit sarana pemantauan air tanah dalam;
- Pemeliharaan/perbaikan AWLR dan sumur pantau air tanah dalam;
- Pengaturan Pelaksanaan dewatering sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah di CAT Yogyakarta – Sleman;
- Penyusunan Zona Perlindungan Sumber Air Tanah di CAT Yogyakarta – Sleman.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih di daerah sulit air (daerah rawan kekeringan) pemda DIY melakukan pembangunan sumur bor. Kegiatan ini mendukung capaian target indikator RPJMD DIY 2017-2022 yaitu cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air. Pada tahun 2018 telah dibangun 4 sumur bor di Kabupaten Gunungkidul dan 4 sumur bor di Kabupaten Bantul. Hingga di tahun 2018 pemda DIY telah membangun sumur bor di 75 dusun dari 245 dusun yang merupakan daerah rawan kekeringan.



Gambar 2-69 Pembangunan sumur bor air tanah dalam di daerah sulit air di Kabupaten Gunungkidul

Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan air tanah dan geologi yang telah diterbitkan oleh KP2TSP berupa Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah dan Surat Izin Pengeboran Air Tanah. Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan akan dikenakan berupa pemberian sanksi administratif. Di tahun 2018 telah diterbitkan 6 izin pengusahaan air tanah dengan status perpanjangan 2 izin di Kota Yogyakarta dan 4 izin baru di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

2.1.3.2.5.2 Sub Urusan Mineral dan Batubara

Peningkatan kinerja pengelolaan usaha pertambangan dilakukan melalui akselerasi peningkatan nilai tambah mineral dan batuan dengan mewajibkan melakukan pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, khususnya bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan maupun dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Pengolahan. Hal ini diharapkan akan berdampak kepada peningkatan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB DIY. Tertib ijin dan pelaksanaan ijin pertambangan merupakan salah satu hal yang dilakukan Pemda DIY untuk mengeliminir persoalan lingkungan dan tata ruang sebagai dampak dari aktivitas pertambangan.

Wilayah DIY secara potensi alam tidak banyak memiliki potensi tambang yang besar, sebagian besar potensi yang dimanfaatkan adalah mineral bukan logam dan batuan seperti pasir, batu, kerikil dan lainnya. Dalam pelaksanaan tertib perijinan, dapat terlihat bahwa sebanyak 268 dari 733 pemohon WIUP sudah mendapatkan ijin, sedangkan sisanya belum dapat memenuhi persyaratan perijinan yang dibutuhkan.

Tabel 2-118 Data Status Permohonan WIUP

	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH PERMOHONAN	WIUP
			SK PERSETUJUAN WIUP
1	Kabupaten Kulon Progo	415	149
2	Kabupaten Gunungkidul	79	31
3	Kabupaten Sleman	157	42
4	Kabupaten Bantul	68	25
5	Lintas Kabupaten	14	21
TOTAL		733	268

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2018

Berdasarkan data yang ada sampai dengan Desember 2018, terdapat 212 Ijin Usaha Pertambangan eksplorasi yang telah diterbitkan oleh Pemda DIY,

sedangkan untuk Ijin Usaha Pertambangan operasi produksi telah dikeluarkan sebanyak 70 ijin.

Tabel 2-119 IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi

IUP EKSPLORASI (Prov)		IUP OPERASI PRODUKSI (Prov & Kab) Kab = 9; Prov = 61	
DARAT	SUNGAI	DARAT	SUNGAI
110	102	38	32
212		70	

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2018

Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan dilakukan melalui evaluasi terhadap laporan berkala dan laporan khusus; pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan (permen ESDM No 26 Tahun 2018), dengan tujuan Peningkatan Perizinan Pengusahaan Pertambangan yaitu IUP eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Untuk penjualan, IUP Khusus Pengangkutan dan Penjualan dan IUP Khusus Pengolahan dan Pemurnian sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2.1.3.2.5.3 Sub Urusan Ketenagalistrikan

Sasaran pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral adalah Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik dengan indikator kinerja Persentase rumah tangga berakses listrik dan indikator capaian program Penduduk berakses energi dan Peningkatan jumlah rumah tangga berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan di masyarakat dapat dipenuhi melalui penyediaan listrik serta pemenuhan akan bahan bakar minyak dan gas di masyarakat.

Ketersediaan energi listrik adalah salah satu parameter yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah, Pengelolaan energi listrik yang benar dan terarah merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, Hal ini sejalan dengan makin meningkatnya peran pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumber daya energi, termasuk di dalamnya sektor ketenagalistrikan, Hal ini terlihat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yaitu Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana pembangunan sarana dan prasarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok tidak mampu,

Sasaran perangkat daerah yaitu meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik pada tahun 2018 adalah 99,9 % atau setara dengan 1.202.119 Rumah

Tangga dari total rumah tangga DIY sebanyak 1.202.240 jiwa (BSD, 2018). Rumah Tangga berakses listrik adalah rumah tangga yang telah menikmati listrik baik dari PLN (yang ber KWH meter) maupun non PLN. Sumber listrik non PLN bisa dari menyalur, PLTS dan sumber lainnya. Peningkatan Rumah tangga berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan dicapai dengan memperhatikan 3 aspek keselamatan ketenagalistrikan, yaitu aman, andal dan ramah lingkungan.

Rumah tangga sasaran adalah rumah tangga miskin belum berlistrik atau menyalur dalam Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Upaya yang dilakukan adalah pemberian bantuan berupa pemasangan instalasi listrik 3 titik lampu dan 1 stop kontak, pemberian Sertifikat Laik Operasi, dan pembayaran biaya sambungan baru PLN daya 450 VA. Sampai dengan akhir tahun 2018 sudah ada 6.577 rumah tangga miskin berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan dari total 61.999 rumah tangga miskin yang terdapat dalam Basis Data Terpadu TNP2K 2015. Pelaksanaan penyediaan SR untuk masyarakat miskin di DIY, direncanakan pemasangan SR sampai dengan tahun 2019 dengan target menuntaskan rumah tangga yang belum berlistrik sama sekali. Selanjutnya mulai tahun 2020 sampai dengan 2022 akan dilakukan pemasangan SR bagi rumah tangga yang masih menyalur (belum memiliki meteran sendiri).

Peraturan Pemerintah melalui PP No. 70/2009 tentang Konservasi Energi menyatakan bahwa Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pengusaha dan masyarakat. Selain itu, mengacu pada Rencana Umum Energi Daerah (RUED), pelaksanaan konservasi energi di DIY diarahkan untuk mengurangi konsumsi energi sebesar 12,5 % di tahun 2025 dan 24 % di tahun 2050. Dalam rangka melaksanakan penghematan energi dan pelaksanaan konservasi maka, pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan konservasi energi melalui kegiatan audit energi. Kegiatan audit energi ini dimaksudkan untuk mendorong organisasi pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat untuk berperan aktif dalam penerapan konservasi energi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan energi dengan menerapkan prinsip-prinsip hemat energi dan berbagai inovasi pada skala ekonomis. Pelaksanaan audit energi tersebut menghasilkan rekomendasi yang berisi arahan untuk melakukan efisiensi dalam pemanfaatan energi listrik. Audit Energi yang dilaksanakan sampai dengan

tahun 2018 di 52 unit bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri berfokus pada segi kelistrikan (*power quality*), sistem pencahayaan dan sistem tata udara.

2.1.3.2.5.4 Sub Urusan Energi Baru Terbarukan

Kebijakan diversifikasi energi atau penganeekaragaman energi melalui pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang telah dilakukan di DIY antara lain dengan pemanfaatan tenaga air, tenaga angin, tenaga surya dan biogas. Pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di DIY yang dilakukan pada tahun 2015 hingga saat ini melalui optimalisasi pemanfaatan mikro hidro untuk pembangkit listrik skala kecil terutama pada wilayah-wilayah yang mempunyai kondisi kelistrikan yang kurang baik, mendorong pemanfaatan tenaga surya untuk wilayah perkotaan dan pemanfaatan bio energi khususnya biogas rumah tangga sebagai pengganti bahan bakar minyak atau LPG tabung 3 Kg bagi lokasi yang mempunyai potensi biogas yang cukup besar.

Pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan merupakan langkah menuju keamanan energi berdasarkan produksi energi setempat. Berikut data jenis energi baru terbarukan di DIY.

Tabel 2-120 Data Jenis Energi Baru Terbarukan 2015 – 2018

JENIS EBT	POTENSI		TERPASANG							
			2015		2016		2017		2018	
	Kapasitas	TOE	Kapasitas	TOE	Kap	TOE	Kap	TOE	Kap	TOE
PLTS	10MWp	301	200 kWp	0,32	253 kwp	0,4048	258 kwp	0,4128	258 kwp	0,4128
PLTMH	2MW	817	882 kW	358	882 kW	358	882 kW	358	882 kW	358
PLT Bayu	100MW	165.920	131 kW	24,6	131 kW	24,60	131 kW	24,60	131 kW	24,60
PLT Bagasse	3.6 MVA / 2.5 MW	929	3.6 MVA / 2.5 MW	873	3.6 MV A / 2.5 MW	873	3.6 MV A / 2.5 MW	873	3.6 MV A / 2.5 MW	873
PLT Sampah	30 MW	9,04	5 kW	2	5 kW	2	5 kW	2	5 kW	2
Bioethanol	36 Juta Liter	18.060	5 juta	2.508	5 juta	2508	5 juta	2508	5 juta	2508

JENIS EBT	POTENSI		TERPASANG							
			2015		2016		2017		2018	
	Kapasitas	TOE	Kapasitas	TOE	Kap	TOE	Kap	TOE	Kap	TOE
Biogas Ternak Sapi	15,000 unit	2.768	1.500 Unit	328	2.100 Unit	459,20	2.425 Unit	530,267	2.979 Unit	651.408
Biogas Sanitasi	500 unit	92	100 Unit	11	100 Unit	11	100 Unit	11	100 Unit	11
Biogas Ampas Tahu	500 Unit	91	10 Unit	2	10 Unit	2	10 Unit	2	10 Unit	2
Biomassa Pellet	1,500 Ton	548	600 Ton	219	600 Ton	219	600 Ton	219	600 Ton	219
DME	20 Lokasi (<i>kajian</i>)		1 Lokasi		1 Lokasi		1 Lokasi		1 Lokasi	
Total Energi (TOE)	98.567		4.388		4.457,20		4.528,28		4.649,42	

sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2018

2.1.3.2.6 Urusan Perdagangan

DIY sebagai pusat kegiatan pariwisata dan pendidikan mendorong munculnya permintaan atas layanan sektor perdagangan baik perdagangan besar maupun yang dilakukan oleh usaha mikro dan kecil. Tercatat dalam sensus ekonomi 2016, sektor usaha perdagangan besar dan eceran mendominasi jumlah Usaha Mikro dan Kecil dengan persentase mencapai 35,4%. Secara makro, sektor perdagangan menempati urutan ke lima dalam struktur PDRB DIY dan tumbuh secara positif dari tahun ke tahun. Di dibandingkan dengan tahun 2014 yang kontribusinya mencapai 8,3% terhadap total PDRB DIY, pada tahun 2018 kontribusi sektor ini meningkat menjadi 8,59%.

Perkembangan sektor perdagangan dalam negeri dapat dilihat dari banyaknya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Peningkatan jumlah SIUP maupun TDP ini menunjukkan dua hal yaitu perkembangan unit usaha dan kepedulian pelaku usaha untuk mencatatkan kegiatannya dalam perijinan formal. Tercatat pada tahun 2013 - 2017 jumlah Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang terdaftar di DIY mengalami pertumbuhan tiap tahunnya. Realisasi jumlah kumulatif penerbitan SIUP pada tahun 2017 tercatat sebanyak 52.044 SIUP, meningkat sebesar 7,27% dibandingkan dengan realisasi SIUP pada tahun sebelumnya sebesar 48.517 SIUP. Dilihat dari golongan usahanya, usaha perdagangan di DIY didominasi oleh golongan pengusaha kecil sebesar 86,01%, sementara persentase terkecil dimiliki oleh golongan pengusaha besar dengan persentase sebesar 2,14%.

Tabel 2-121 Perkembangan Jumlah SIUP di DIY Berdasarkan Golongan Usaha, Tahun 2013 - 2017

No	Golongan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pengusaha Besar	1.057	1.067	1.076	1.094	1.116
2	Pengusaha Menengah	2.629	2.717	2.684	2.872	3.070
3	Pengusaha Kecil	40.132	40.710	40.861	42.217	44.763
4	Pengusaha Mikro	1.644	1.821	1.986	2.334	3.095
Jumlah		45.462	46.315	46.607	48.517	52.044

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2018

Jumlah Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sepanjang 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata 4,57% tiap tahunnya. Realisasi jumlah Tanda Daftar Perusahaan (TDP) DIY Per Kabupaten / Kota pada tahun 2018 sebanyak 56.011 unit, tumbuh sebesar 2,12% dari tahun sebelumnya. Mayoritas TDP pada tahun 2018 dimiliki oleh pengusaha di Kota Yogyakarta sebesar 28,82%, diikuti oleh pengusaha di Kab. Sleman (27,82%), dan pengusaha di Kab. Bantul (22,59%).

Tabel 2-122 Perkembangan Jumlah Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di DIY Per Kabupaten Kota, Tahun 2013-2018

No	Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bantul	9.571	10.152	10.627	11.163	12.130	12.653
2	Sleman	13.308	13.815	14.294	14.737	15.243	15.584
3	Kulonprogo	3.875	3.880	4.598	5.316	5.796	5.824
4	Gunungkidul	5.144	5.430	5.578	5.676	5.791	5.808
5	Yogyakarta	13.689	14.448	14.879	15.250	15.888	16.142
Jumlah		45.587	47.725	49.976	52.142	54.848	56.011

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2019

Perkembangan sektor perdagangan DIY juga didukung dengan tersedianya pasar sebagai sarana perdagangan. Keberadaan pasar baik toko modern maupun tradisional mempunyai tiga fungsi utama dalam perdagangan yaitu sebagai sarana distribusi, pembentuk harga, dan sarana promosi. Jumlah sarana perdagangan di DIY mengalami pertumbuhan pesat di DIY selama tiga tahun terakhir. Tercatat jumlah toko modern yang berdiri hingga tahun 2017 sejumlah 825 unit, tumbuh sebesar 6,17% dibanding tahun sebelumnya. Namun untuk pasar tradisional tidak ada kenaikan dari tahun 2016, tetap sejumlah 349 unit. Oleh karena itu, kedepannya upaya revitalisasi pasar harus terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat atau pasar tradisional yang dinilai memiliki fungsi strategis sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat.

Program revitalisasi pasar dapat dilakukan menggunakan dua pendekatan yakni fisik dan nonfisik. Secara fisik, pengelolaan pasar perlu didorong dalam hal kebersihan, kenyamanan, penataan los hingga keamanan. Sementara itu, secara nonfisik perlu didorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini pedagang. Pedagang diharapkan memahami cara pengelolaan keuangan untuk meningkatkan transaksi hingga mendapatkan permodalan dari perbankan.

Tabel 2-123 Perkembangan Toko Modern dan Pasar Tradisional, Tahun 2013-2017

Jenis Toko	2013	2014	2015	2016	2017
Toko Modern	644	661	710	777	818
Pasar Tradisional	532	361	361	349	349
Jumlah	1.176	1.022	1.071	1.126	1.167

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2018

Perkembangan yang positif juga ditunjukkan pada sisi perdagangan luar negeri DIY. Secara umum, perkembangan ekspor di DIY selama 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan. Tercatat, Nilai Ekspor DIY pada tahun 2018 sebesar 338,02 Juta US\$. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 41,41 Juta US\$ atau sebesar 13,96% jika dibandingkan pada tahun 2017. Peningkatan ekspor DIY didukung oleh 5 (lima) komoditas utama ekspor yaitu Pakaian Jadi Tekstil, Mebel Kayu, Sarung Tangan Kulit, Biji Vanila dan Minyak Atsiri. Komoditas biji vanila muncul sebagai salah satu komoditas ekspor yang tinggi di tahun 2018. Biji vanila basah didatangkan dari Papua Nugini dan setelah melalui proses pengeringan di DIY kemudian diekspor kembali dengan nilai tambah yang tinggi ke Eropa dan Amerika. Sementara tujuan utama ekspor komoditas DIY tahun 2018 adalah Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Belanda, Australia dan Perancis.

Tabel 2-124 Perkembangan Ekspor di DIY Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Volume (Juta kg)	57,51	56,9	57,01	59,24	53,57
Nilai (Juta US \$)	233,25	242,47	252,18	296,61	338,02
Komoditi	166	110	88	78	88
Negara	114	115	112	112	115
Eksportir	310	325	286	314	360

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2019

Tabel 2-125 Komoditas Ekspor di DIY Tahun 2014-2018 (dalam Juta US \$)

No	Komoditi	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pakaian Jadi Tekstil	49.77	56.88	48.55	67.17	87.77
2	Mebel Kayu	37.45	54.52	47.04	59.07	64.54
3	Sarung Tangan Kulit	35.56	26.37	31.11	42.63	36.03
4	Biji Vanila	-	0.5	1.61	10.45	27.37
5	Minyak Atsiri	7.29	15	27.41	23.01	25.65
6	STK Sintetis	11.87	9.47	9.13	10.33	12.79
7	Kerajinan Kayu	12.25	10.65	7.15	8.39	7.87
8	Produk Tekstil Lainnya	3.14	3.23	10.83	8.54	6.85
9	Kerajinan Kertas	2.62	3.76	4.81	9.15	5.77
10	Kerajinan Batu	5.13	5.13	5.13	5.13	5.13
Sub Total		165.08	180.38	187.64	238.74	274.64
Komoditi lainnya		76.27	62.09	64.54	57.87	63.38
Total		236.22	242.47	252.18	296.61	338.02

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2019

Meskipun ekspor DIY tumbuh secara positif, namun jika dibandingkan dengan angka ekspor nasional, nilai ekspor DIY masih relatif kecil. Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa kontribusi nilai ekspor DIY terhadap total ekspor non migas nasional hanya 0.01%. Nilai tersebut cukup rendah jika dibandingkan dengan daerah lain. DIY menempati urutan ke 30. Sebagai perbandingan, capaian tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kontribusi Bali yang mencapai 0.18% atau Jawa Tengah yang mencapai 3,77%.

Tabel 2-126 Persentase Kontribusi Ekspor Non Migas Berdasarkan Provinsi di Indonesia 2018

No	Provinsi	Persentase Kontribusi Ekspor Non Migas	No	Provinsi	Persentase Kontribusi Ekspor Non Migas
1	D K I JAKARTA	33,44	18	SULAWESI SELATAN	0,71
2	JAWA TIMUR	11,72	19	KALIMANTAN BARAT	0,62
3	KALIMANTAN TIMUR	9,66	20	SULAWESI UTARA	0,41
4	R I A U	8,16	21	KALIMANTAN TENGAH	0,29
5	RIAU ISLANDS	5,51	22	B A L I	0,19
6	SUMATERA UTARA	5,41	23	MALUKU UTARA	0,42
7	KALIMANTAN SELATAN	5,38	24	SULAWESI TENGGARA	0,5
8	JAWA TENGAH	3,92	25	KALIMANTAN UTARA	0,18
9	LAMPUNG	2,04	26	BENGKULU	0,08
10	SUMATERA SELATAN	2,08	27	NANGROE ACEH DARUSALAM	0,09
11	PAPUA	2,51	28	JAWA BARAT	0,04
12	SULAWESI TENGAH	2,42	29	NUSA TENGGARA TIMUR	0,01
13	SUMATERA BARAT	0,99	30	D.I. YOGYAKARTA	0,01

No	Provinsi	Persentase Kontribusi Ekspor Non Migas	No	Provinsi	Persentase Kontribusi Ekspor Non Migas
14	BANTEN	1,29	31	PAPUA BARAT	0,01
15	BANGKA BELITUNG	0,97	32	GORONTALO	0,02
16	J A M B I	0,65	33	M A L U K U	0
17	NUSA TENGGARA BARAT	0,28	34	SULAWESI BARAT	0

Sumber: Kementerian Perdagangan, Tahun 2019

2.1.3.2.7 Urusan Perindustrian

Industri pengolahan merupakan sektor terbesar kontribusinya dalam pembentukan PDRB DIY. Pada tahun 2018, kontribusi industri pengolahan mencapai 12,99%. Namun demikian, peran sektor ini mulai mengalami perlambatan terutama karena perekonomian DIY sudah bergerak ke arah sektor-sektor tersier yaitu jasa-jasa. Tahun 2018, sektor industri pengolahan tumbuh positif pada angka 5,12% atau lebih lambat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi DIY yang mencapai sebesar 6,20%.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) penopang utama sektor industri di DIY. Jumlah IKM DIY yang terdiri dari industri pangan, sandang dan kulit, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronika, serta industri kerajinan pada tahun 2018 adalah sebanyak 94.840 unit usaha atau mengalami peningkatan sebesar 3.98% jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya sebanyak 91.214 unit usaha. IKM DIY didominasi oleh industri pangan dan industri kerajinan. Secara keseluruhan, IKM DIY mampu menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 351.425 tenaga kerja pada tahun 2018, atau meningkat 6,33% dari tahun 2017 yang menyerap sebanyak 330.508 tenaga kerja.

Tabel 2-127 Perkembangan IKM di DIY, Tahun 2013-2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Unit Usaha	84.234	86.087	88.637	90.906	91.214	94.840
Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	310.173	318.858	326.669	333.980	330.508	351.425
Nilai Investasi (Rp Juta)	1.064.180	1.151.443	1.187.754	1.269.897	1.208.563	1.943.721
Nilai Produksi (Rp Juta)	3.294.485	3.399.909	3.489.769	3.643.222	12.463.257	12.749.270
Nilai Bahan Baku dan Penolong (Rp Juta)	1.449.435	1.524.806	1.550.832	1.593.631	8.620.133	7.335.020

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2019

Untuk dapat bersaing dengan industri luar, produk-produk DIY harus memiliki nilai tambah yang lebih dari pesaingnya. Nilai tambah adalah selisih

antara nilai produksi (output) dengan nilai bahan baku dan penolong lainnya (input). Pada tahun 2018 total Nilai Bahan Baku dan Penolong IKM adalah sebesar Rp.7,3 triliun. Sementara itu, untuk Nilai Produksi ditaksir berjumlah sebesar Rp. 12,7 triliun. Dengan demikian nilai tambah produk IKM di DIY bernilai sebesar Rp. 5,4 triliun pada tahun 2017. Nilai tambah tersebut meningkat cukup pesat sebesar 44,58% dibandingkan dengan tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun ada peningkatan daya saing pada produk DIY dibanding pesaingnya. Kedepannya untuk mempertahankan daya saing tersebut, perlu dilakukan berbagai strategi antara lain melalui penguatan dan pengembangan Hak Kekayaan Intelektual serta peningkatan inovasi teknologi terapan yang dapat diaplikasikan secara komersial.

Industri-industri berkelompok pada suatu wilayah dan membentuk sentra. Tercatat ada sebanyak 313 sentra IKM yang tersebar di kabupaten/kota wilayah DIY dengan jumlah unit usaha sebanyak 17.866 unit dan serapan tenaga kerja sebanyak 55.891 orang. Jumlah sentra terbanyak dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo dengan persentase sebesar 30,67%, diikuti oleh Kabupaten Bantul (24,92%), Kabupaten Gunungkidul (21,41%), Kabupaten Sleman (16,61%), dan persentase terkecil dimiliki oleh Kota Yogyakarta (6,39%). Sementara itu, apabila ditilik dari kapasitas produksinya, Kabupaten Sleman memiliki persentase tertinggi sebesar 205.587.035 unit (55,54%) dengan nilai investasi sebesar 146.999.860 ribu rupiah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di wilayah DIY. Hal tersebut menandakan sentra IKM di Kabupaten Sleman lebih maju apabila dibandingkan dengan 4 Kabupaten/Kota lain. Kedepannya Kabupaten/Kota lainnya agar dapat mengikuti jejak Kabupaten Sleman dengan peningkatan investasinya akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru.

Tabel 2-128 Data Sentra IKM di DIY per Kabupaten/Kota Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Sentra	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp.000)	Kapasitas Produksi (Unit)
1	Kota Yogyakarta	20	340	1,884	22,367,922	3,924,900
2	Sleman	55	4,163	12,087	149,953,273	206,215,591
3	Bantul	78	5,745	15,658	27,333,455	11,404,687
4	Kulon Progo	96	6,244	19,148	141,197,110	130,590,829
5	Gunung Kidul	71	2,430	8,258	50,178,447	23,894,218
	Jumlah	320	18,922	57,035	391,030,208	379,030,225

Industri pengolahan di DIY didominasi oleh industri makanan dan kerajinan. Namun demikian, setiap kabupaten/kota memiliki karakter potensi industri masing-masing. Berdasarkan Sensus Ekonomi tahun 2016 golongan usaha industri yang cukup dominan di Bantul adalah industri makanan, industri barang dari kayu, industri pakaian jadi, industri gerabah, dan industri tekstil. Pada umumnya, industri yang berkembang di Bantul merupakan industri kerajinan lokal yang menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat, tapi memiliki daya saing yang cukup tinggi. Sementara itu, untuk Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh industri berbasis pertanian (agroindustri) dan industri makanan. Usaha industri yang cukup strategis bagi Gunungkidul adalah pengolahan barang dari kayu, anyaman bambu, dan lainnya.

Jenis usaha industri yang paling banyak di Kabupaten Kulon Progo adalah industri gula kelapa/gula jawa/gula merah/gula semut. Usaha industri ini menggunakan bahan baku utama dari nira/aren kelapa lokal yang banyak diusahakan di wilayah Kulon Progo. Sentra jenis usaha ini banyak dijumpai di wilayah kecamatan Kokap dan kecamatan lain seperti Girimulyo, Lendah, dan Kalibawang. Meskipun seringkali adalah usaha sampingan, permintaan ekspor komoditas ini cukup besar dan berpotensi untuk dikembangkan. Jenis industri makanan. Selanjutnya, untuk wilayah Kota Yogyakarta dan Sleman, perekonomian sudah didominasi oleh sektor jasa seperti penyediaan jasa akomodasi, transportasi dan perdagangan. Namun demikian, beberapa industri makanan masih cukup banyak ditemui di kawasan perkotaan seperti industri bakpia di kawasan Pathuk

2.1.3.2.8 Urusan Transmigrasi

Penyelenggaraan transmigrasi semestinya memberikan manfaat bagi dua daerah yang terlibat. Bagi daerah tujuan, dengan adanya transmigrasi maka potensi lahan yang sebelumnya belum tergarap dapat bernilai tambah oleh aktivitas pertanian atau perkebunan yang dilakukan oleh para transmigran. Sementara itu, bagi DIY penyelenggaraan transmigrasi menjadi salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan yang disebabkan keterbatasan kesempatan kerja atau keterbatasan lahan untuk dibudidayakan. Secara nasional kegiatan transmigrasi juga berdampak pada peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi harus memberikan tempat yang proporsional kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigran melalui kerjasama antar daerah. Oleh karena peran

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana, sedangkan Pemerintah Pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan (*steering*), maka dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilakukan dengan pendekatan *demand side*, yaitu pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat yang melibatkan Pemerintah Provinsi dengan dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah DIY sebagai daerah pengirim calon transmigran juga telah bekerjasama dengan provinsi daerah penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi melalui mekanisme KSAD (Kerjasama Antar Daerah). Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini mungkin. Hingga saat ini, animo masyarakat DIY untuk bertransmigrasi masih cukup tinggi melebihi kuota yang diberikan oleh Pemerintah Pusat namun dengan kecenderungan yang semakin menurun.

Tabel 2-129 Jumlah Animo Masyarakat dan Pendaftar Transmigrasi di DIY Tahun 2013-2018

KAB/KOTA	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Anim o	Pendaft ar	Anim o	Pendaft ar	Anim o	Pendaft ar	Anim o	Pendaft ar	Anim o	Pendaft ar	Anim o	Pendaft ar
	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)
Yogyakarta	74	48	59	39	71	47	55	41	64	42	67	43
Sleman	465	465	468	468	281	281	286	286	50	28	65	28
Bantul	260	130	334	167	210	105	172	81	76	4	33	33
Kulon Progo	312	122	338	133	343	137	270	117	165	91	97	70
Gunungkidul	104	50	155	98	40	30	70	44	29	7	71	10
Jumlah	1.215	815	1.354	905	945	600	853	569	384	172	333	184

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Menurunnya animo juga sejalan dengan menurunnya kuota yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Selama kurun 2013-2018, Pemerintah DIY memberangkatkan transmigran sebanyak 647 KK terdiri dari 2.015 jiwa. Jika dilihat dari daerah asal transmigran, selama kurun waktu 2013 hingga 2018 mayoritas transmigran berasal dari Kabupaten Bantul dengan jumlah 206 KK atau 643 jiwa, sedangkan terendah dari Kota Yogyakarta dengan jumlah 62 KK (192 jiwa). Angka ini jika dilihat per tahun cenderung fluktuatif. Fluktuasi disebabkan besaran kuota yang didapatkan oleh Pemda DIY dari pemerintah

pusat berbeda dari tahun ke tahun. Dari tahun 2013-2018 masing-masing besaran kuota adalah 150, 70, 116, 80, 48, dan 87 KK.

Tabel 2-130 Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi Menurut Daerah Asal di DIY, Tahun 2013-2018

Kabupaten/ Kota	Tahun												Total	
	2013		2014		2015		2016		2017		2018			
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
Yogyakarta	15	46	5	15	12	39	10	33	7	21	10	30	62	192
Sleman	10	31	11	36	22	82	9	27	7	22	23	72	97	307
Bantul	53	168	23	73	40	128	25	75	12	37	28	95	206	643
Kulon Progo	47	138	19	65	27	85	16	48	16	43	16	44	177	541
Gunungkidul	25	75	12	41	15	56	20	64	6	21	10	28	105	332
JUMLAH	150	458	70	230	116	390	80	247	48	144	87	269	647	2015

Sumber: BPS, DIY dalam Angka, beberapa tahun terbitan dan Disnakertrans DIY

Berdasarkan lokasi penempatan transmigran, Provinsi Sumatera Selatan tercatat menjadi tujuan utama transmigran asal DIY selama tahun 2013 hingga 2017. Jumlah transmigran yang ditempatkan di Sumatera selatan mencapai 153 KK. Meskipun demikian, realisasi jumlah transmigran ke Sumatera Selatan pada periode tahun 2013-2018 cenderung menurun, bahkan pada tahun 2016 dan 2018 tidak ada transmigran ke Sumatera Selatan. Hal ini karena ada beberapa lokasi tujuan transmigrasi alternatif lain yang disediakan oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2016 ada 3 lokasi tujuan alternatif transmigran asal DIY yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan dengan proporsi terbanyak di Kalimantan Utara (62,5%) dengan jumlah keluarga sebanyak 50 KK. Pada tahun 2017, lokasi alternatif tujuan transmigrasi difokuskan pada Pulau Sulawesi yaitu di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo; sedangkan pada tahun 2018 terdapat empat lokasi alternative baru yaitu Sumatera Barat, Aceh, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Barat. Dari 14 lokasi tujuan transmigrasi pada kurun waktu 2013-2018 terdapat 3 lokasi yang hanya sekali menjadi tujuan transmigrasi yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Bangka Belitung.

Tabel 2-131 Perkembangan dan Distribusi Transmigran Asal DIY Menurut Provinsi Tujuan, Tahun 2013-2018

Daerah Tujuan	Tahun											
	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	KK	%	KK	%	KK	%	KK	%	KK	%	KK	%
Sumatera Selatan	90	(60,00)	20	(28,6)	25	(21,6)	-	-	18	(37,5)	-	-
Sumatera Barat											10	(11,5)
Aceh											10	(11,5)

Daerah Tujuan	Tahun											
	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	KK	%	KK	%	KK	%	KK	%	KK	%	KK	%
Kalimantan Barat	10	(6,7)	15	21,4)	-	-	10	(12,5)	-	-	8	((9,2)
Kalimantan Tengah	25	(16,7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Utara	-	-	-	-	50	(43,1)	50	(62,5)	-	-	27	(31)
Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	20	(25,0)	-	-	-	-
Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	(11,5)
Sulawesi Selatan	15	(10,0)	-	-	25	(21,6)	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	10	(6,7)	25	(35,7)	16	(13,8)	-	-	12	(25)	5	(5,7)
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	(5,7)
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	9	(18,75)	4	(4,6)
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	9	(18,75)	8	(9,2)
Bangka Belitung	-	-	10	(14,3)	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	150	(100)	70	(100)	116	(100)	80	(100)	48	(100)	87	(100)

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Pada tahun 2018, terdapat 9 lokasi tujuan transmigrasi yaitu Sumatera Barat (10 KK), Aceh (10 KK), Kalimantan Barat (8 KK), Kalimantan Utara (27 KK), Kalimantan Timur (10 KK), Sulawesi Tenggara (5 KK), Sulawesi Barat (5 KK), Sulawesi Tengah (4 KK), dan Gorontalo (8 KK). Adapun rincian alokasi penempatan sebagai berikut.

Tabel 2-132 Distribusi Transmigran Asal DIY Menurut Provinsi Tujuan dan Kabupaten/Kota Asal, Tahun 2018

DAERAH TUJUAN	KABUPATEN/KOTA										JUMLAH REALISASI	
	KOTA		SLEMAN		BANTUL		KULON PROGO		GUNUNGKIDUL			
	Realisasi		Realisasi		Realisasi		Realisasi		Realisasi			
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
Sigulai, Kab. Siemeuleu, Aceh	0	0	0	0	0	0	4	8	6	19	10	27
Padang Tarok SP 1, Kab. Sijunjung, Sumbar	3	7	4	15	3	9	0	0	0	0	10	31
Keladen, Kab. Paser, Kaltim	2	6	3	8	5	13	0	0	0	0	10	27
Tanjung Satai SP 3, Kab. Kayong Utara, Kalbar	0	0	0	0	4	19	2	7	2	5	8	31
Tanjung Buka SP 6B, Kab. Bulungan, Kaltara	5	17	15	47	7	23	0	0	0	0	27	87
Kabera, KAB Morowali, Sulawesi Tengah	0	0	1	2	3	11	0	0	0	0	4	13
Raimuna, Kab. Muna, Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	2	9	3	10	0	0	5	19
Salondeang, Kab. Mamuju Tengah, Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	3	8	2	4	5	12
Bukit Aren, Kab Bukit Aren, Gorontalo	0	0	0	0	1	2	3	9	0	0	4	11
Sandalan, Kab. Pohuwato, Gorontalo	0	0	0	0	3	9	1	2	0	0	4	11

Tabel 2-133 Perkembangan dan Distribusi Transmigran Asal DIY Menurut Provinsi Tujuan dan Kabupaten/Kota Asal, Tahun 2017

DAERAH TUJUAN	KABUPATEN/KOTA										JUMLAH REALISASI	
	KOTA		SLEMAN		BANTUL		KULON PROGO		GUNUNGKIDUL			
	Realisasi		Realisasi		Realisasi		Realisasi		Realisasi			
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
Kabera, Kab. Morowali, Sulteng	0	0	2	7	2	6	3	7	2	6	9	26
Parudongka, Kab. Konawe, Sultra	2	8	0	0	5	17	5	17	0	0	12	42
Bukit Aren, Kab. Gorontalo, Gorontalo	2	5	3	9	2	3	2	3	0	0	9	20
Kaban Agung, Kab. Lahat, Sumsel	3	8	0	0	0	0	3	9	4	15	10	32
Simpang Tiga SPS, Ogan Komering Ilir, Sumsel	0	0	2	6	3	11	3	7	0	0	8	24
JUMLAH	7	21	7	22	12	37	16	43	6	21	48	144

Tabel 2-134 Perkembangan dan Distribusi Transmigran Asal DIY Menurut Provinsi Tujuan dan Kabupaten/Kota Asal, Tahun 2016

DAERAH TUJUAN	KABUPATEN/KOTA										JUMLAH REALISASI	
	KOTA		SLEMAN		BANTUL		KULON PROGO		GUNUNGKIDUL			
	Realisasi		Realisasi		Realisasi		Realisasi		Realisasi			
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
PROV. SUMATERA BARAT	-	-	-	-	-	-	--	5	-	-	5	-
PROVINSI RIAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROV. SUMATERA SELATAN	5	-	6	-	9	-	13	-	14	-	47	-
PROV. KALIMANTAN UTARA	5	-	9	-	15	-	11	-	10	-	50	-
PROV. GORONTALO	3	-	6	-	17	-	4	-	-	-	30	-
PROV. KALIMANTAN BARAT	-	-	3	-	5	-	7	-	5	-	20	-
PROV. SULAWESI TENGGARA	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	-
PROV. SULAWESI BARAT	-	-	-	-	4	-	4	-	8	-	16	-
Jumlah	13		24		50		52		37		176	

Tabel 2-135 Perkembangan dan Distribusi Transmigran Asal DIY Menurut Provinsi Tujuan dan Kabupaten/Kota Asal, Tahun 2015

NO MO R	LOKASI PROYEK	TANGGAL PENAMPUNGAN	KABUPATEN / KOTA										JUMLAH REALISASI	
			KOTA		SLEMAN		BANTUL		K.PROGO		GN.KIDUL			
			Reali sasi		Reali sasi		Reali sasi		Reali sasi		Reali sasi			
			KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
1	Laeya, Kab. Buton Utara, Sulawesi Tenggara	5 - 7 Nopember 2015	-	-	-	-	5	16	5	18	-	-	10	34
2	Anauwa, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara	5 - 7 Nopember 2015	-	-	3	11	3	10	-	-	-	-	6	21
3	Tanjung Buka SP 6, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara	9 - 11 Nopember 2015	5	20	10	39	15	47	10	32	10	37	50	175
4	Mahalona SP 4, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan	17 - 19 Desember 2015	3	8	3	11	6	20	5	17	-	-	17	56
5	Watu, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan	17 - 19 Desember 2015	1	2	2	7	3	9	2	3	-	-	8	21
6	Simpang Tiga SP 2, Kab. OKI, Sumsel	20 - 22 Desember 2015	3	9	4	14	8	26	5	15	5	19	25	83
J U M L A H			12	39	22	82	40	128	27	85	15	56	116	390

Besarnya animo masyarakat terhadap program transmigrasi dan jumlah pendaftar calon transmigrasi belum sebanding dengan kuota/alokasi penempatan transmigrasi oleh Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan pendaftar transmigrasi perlu dilakukan penambahan alokasi program penempatan dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, peninjauan kerjasama dengan daerah penempatan transmigrasi dan melakukan peninjauan pelaksanaan transmigrasi lokal.

2.1.3.3 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.3.1 Urusan Sekretariat Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah yang diisi oleh pegawai aparatur sipil negara, Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas; dan
- e. badan,

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh sekretaris Daerah, Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada gubernur,

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, serta melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan program lingkup Sekretariat Daerah;
- b. penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain;
- d. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur pemerintah daerah;
- f. pengelolaan sarana dan prasarana Sekretariat Daerah;
- g. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan keuangan Sekretariat Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Unsur organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Pimpinan : Sekretaris Daerah;
- b. Pembantu Pimpinan : Asisten Sekretariat Daerah;
- c. Pelaksana : Biro-Biro yang terdiri dari Bagian-bagian dan Bagian-bagian terdiri dari Subbagian-subbagian; dan
- d. kelompok jabatan fungsional,

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya,

2.1.3.3.2 Urusan Sekertariat DPRD

Sekretariat DPRD DIY merupakan unsur fasilitasi DPRD DIY yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah. Urusan Sekretariat DPRD dituangkan dalam 9 program dan 19 kegiatan.

Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai sasaran, yaitu a). meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD serta b). terfasilitasinya kinerja DPRD. Pada sasaran pertama, indikator sasarannya adalah skor indeks kepuasan masyarakat terhadap informasi DPRD dan skor indeks kepuasan layanan pimpinan dan anggota DPRD. Sementara itu, pada sasaran kedua indikator yang digunakan adalah persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu. Pada tahun 2018, capaian indikator sasaran telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun demikian kualitas layanan pada urusan ini harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Permasalahan yang menghambat pelaksanaan urusan ini tidak hanya berasal dari faktor internal tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dengan demikian, perlu koordinasi dan sinergisitas yang baik dengan pihak-pihak terkait agar permasalahan yang muncul dapat diatasi dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.

2.1.3.3.3 Urusan Inspektorat

Dalam rangka mewujudkan *clean government* di jajaran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dilakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain dimaksudkan bahwa :

1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pengawasan internal merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Inspektorat khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), Titik berat dari

pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu, Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), Sehingga penyesuaian terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan / kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu,

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik,

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan fungsinya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi, APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

Pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien,

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Inspektorat DIY Tahun 2018 telah melakukan :

- a. Pemeriksaan berkala, sewaktu-waktu dan pemeriksaan terpadu
- b. Pemeriksaan khusus dan pengembangan temuan

- c. Kegiatan pengusutan
- d. Melakukan Evaluasi LAKIP
- e. Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP)
- f. Review Atas Laporan Keuangan SKPD dan Pemda DIY
- g. Evaluasi AKIP Kabupaten/Kota
- h. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD),

Sedangkan bentuk dan hasil pengawasan lainnya meliputi :

- a. Pengujian laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari SKPD
- b. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijaksanaan, pelaksanaan program dan kegiatan
- c. Pencermatan RKA SKPD
- d. *Consulting* dan *Quality Assurance*
- e. Melakukan Kas Opname dan Stok Opname
- f. Pendampingan pengelolaan dana keistimewaan SKPD

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN serta agar mampu bersaing di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 akan terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja, Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada perubahan paradigma dari keberhasilan *input* menjadi tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*,

Pelaksanaan pengawasan perlu disusun melalui perencanaan yang matang, sehingga tidak lagi terjadi kegiatan pengawasan yang tumpang tindih ataupun pembatalan obyek pemeriksaan, Terkait dengan hal tersebut dan mengacu pada Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat DIY pada 2018 telah melaksanakan sinergitas kebijakan pengawasan di daerah dengan mengedepankan peran *consulting* dan *quality assurance* terhadap Obyek Pemeriksaan dan sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pemerintah Daerah DIY dapat dicapai secara optimal,

2.1.3.3.4 Urusan Perencanaan

Tahun 2020 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD DIY Tahun 2017-2022, dengan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan, harus berorientasi pada proses dan substansi, Perencanaan yang berorientasi pada proses, dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah atas, Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD, Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional, Keseluruhan pendekatan perencanaan tersebut secara kontinyu telah dilaksanakan oleh Pemerintah DIY,

Di samping perencanaan yang berorientasi pada proses, mengacu Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tersebut, perencanaan pembangunan juga harus berorientasi pada substansi yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan holistik tematik, integratif, dan spasial, Dengan pendekatan ini, perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, Pelaksanaan perencanaan pembangunan harus menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan pendekatan spasial yaitu dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

2.1.3.3.5 Urusan Keuangan

Secara umum Pendapatan daerah DIY mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, pendapatan daerah tercatat sebanyak 3,899 triliun rupiah naik menjadi 5,431 triliun rupiah tahun 2018. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nominal juga mengalami

kenaikan setiap tahunnya dimana pada tahun 2016 tercatat sebesar 1,673 triliun rupiah naik menjadi 2,031 triliun rupiah tahun 2018. Namun demikian, jika dilihat dari persentase perbandingan PAD terhadap pendapatan daerah memiliki tren yang menurun dimana pada tahun 2016 persentasenya mencapai 42,93% turun menjadi 37,39% tahun 2018.

Tabel 2-136 Pendapatan Daerah DIY

URAIAN	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018*
Pendapatan Daerah	3.899.192.985.313,51	5.085.241.219.288,27	5.431.677.219.464,27
Pendapatan Asli Daerah	1.673.749.196.521,51	1.851.973.396.065,27	2.031.019.470.595,27
PAD terhadap Pendapatan Daerah	42,93%	36,42%	37,39%

Sumber: BPKA DIY, 2019

*) unaudited (SIPKD per 15 Januari 2019)

Total jumlah aset mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Hal tersebut berasal dari kenaikan jumlah aset pengguna. Pada tahun 2016 total jumlah aset tercatat sebanyak 488.045 yang terdiri dari aset pengelola 2.306 dan aset pengguna 485.739 kemudian naik menjadi sebanyak 2.754.383 tahun 2017 yang didominasi oleh aset pengguna sebanyak 2.752.072.

Tabel 2-137 Jumlah aset yang di Pengguna dan Pengelola

Uraian	2016		2017	
	Jml Barang	Rp	Jml Barang	Rp
Pengelola	2,306	364,064,954,564	2,311	325,612,339,256
Pengguna	485,739	6,831,533,305,131	2,752,072	8,601,280,618,303
Total	488,045	7,195,598,259,695	2,754,383	8,926,892,957,559

Sumber: BPKA DIY, 2019

Berdasarkan jumlah aset yang dioptimalkan selama 2016-2017, aset berupa tanah tidak mengalami perubahan. Sementara itu, kenaikan jumlah aset yang dioptimalkan pada periode tersebut berasal dari peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan. Secara total pada tahun 2016 jumlah aset dioptimalkan sebanyak 267 aset dengan nilai 259,106 miliar rupiah dan tahun 2017 sebanyak 352 aset dengan nilai 261,216 miliar rupiah.

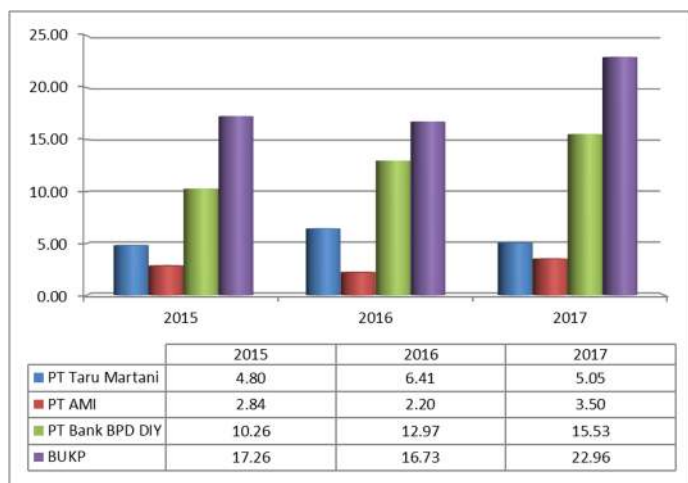
Tabel 2-138 Jumlah Aset yang Dioptimalkan

No	Jenis Aset	2016		2017	
		Jml	Rp	Jml	Rp
1	Tanah	191	180,160,573,382.00	191	180,160,573,382.00
2	Peralatan Dan Mesin	14	1,146,200,000.00	98	3,199,771,212.00
3	Gedung Dan Bangunan	62	77,800,090,637.00	63	77,855,952,637.00

No	Jenis Aset	2016		2017	
		Jml	Rp	Jml	Rp
4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	0	-	0	-
5	Aset Tetap Lainnya	0	-	0	-
6	Kostruksi Dalam Pengerjaan	0	-	0	-
		267	259,106,864,019.00	352	261,216,297,231.00

Sumber: BPKA DIY, 2019

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari laba BUMD, yaitu PT Taru Martani, PR AMI, PT Bank BPD DIY, dan BUKP. Persentase deviden masing-masing BUMD terhadap penyetaraan modal bervariasi. Persentase terbesar terdapat pada BUKP dan terkecil terdapat pada PT AMI. Pada tahun 2017, persentase deviden BUKP terhadap penyetaraan modalnya sebesar 22,96%, diikuti PT Bank BPD DIY sebesar 15,53%, PT Taru Martani sebesar 5,05%, dan PT AMI sebesar 3,50%.



Sumber: BPKA DIY, 2019

Gambar 2-70 Persentase Deviden BUMD terhadap Penyetaraan Modal, 2015-2017

2.1.3.3.6 Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Sumberdaya manusia menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal yang penting diperhatikan sebagai bentuk antisipatif agar tidak menjadi permasalahan yang mendalam adalah kebutuhan pengadaan ASN karena diindikasikan terdapat gap antara jumlah ASN yang ada terhadap kebutuhan. Disamping itu, terdapat kecenderungan meningkatnya jumlah pensiun selama periode 2019-2022. Pada tahun 2019, Jumlah ASN yang purna tugas sebanyak 749 orang dengan rincian 686 JFT dan

63 struktural dan tahun 2020 terdapat 842 pensiunan yang terdiri dari 742 JFT dan 100 struktural.

Tabel 2-139 Penjagaan Pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) di DIY, 2019-2022

Penjagaan Pensiun	2019	2020	2021	2022
Jabatan Fungsional Tertentu	686	742	772	689
Jabatan Struktural	63	100	112	89

Sumber: BKD DIY, 2019

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menandai momentum peningkatan profesionalisme birokrasi. Dalam UU ASN mengamanatkan pengembangan ASN melalui pendekatan *merit system*. Problem saat ini, Pemda belum memiliki prosedur sistematis (pola karir) yang mampu menyesuaikan kualifikasi dan kompetensi jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi pegawai. Salah satu sistem yang dapat digunakan dalam manajemen ASN secara terencana dan sistematis adalah manajemen talenta atau *talent management*.

Pemda DIY merumuskan kebijakan Manajemen Talenta sebagai bagian dari Kebijakan Strategis untuk Sektor Aparatur. Dalam manajemen talenta, Pemda DIY menyiapkan *database* potensi dan kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Administrator, dan Pengawas melalui penilaian Potensi dan Kompetensi (*talent pool*). Penilaian potensi dan kompetensi PNS melalui *Assessment Center* bukan hanya sekedar untuk promosi jabatan, melainkan berfungsi untuk mengetahui *profil individual competence* serta standar kompetensi jabatan dari masing-masing PNS. Adanya database profil potensi dan kompetensi masing-masing PNS ini akan memudahkan untuk perencanaan pengembangan SDM kedepan serta rentetan panjang seleksi terbuka untuk mengisi jabatan yang kosong tidak lagi diperlukan.

Permasalahan utama yang terdeteksi, yaitu masih rendahnya kompetensi dan profesionalisme serta belum sesuai kebutuhan atau penempatan dalam jabatan, kinerja/produktivitas yang belum optimal, integritas PNS, serta sistem remunerasi yang belum layak dan belum berbasis dari penilaian kinerja. Manajemen ASN dengan PNS sebagai unsur utamanya merupakan lokomotif untuk menggerakkan reformasi birokrasi. Karena itu, prasyarat reformasi birokrasi adalah adanya pengelolaan PNS yang efektif dan efisien, salah satunya dengan menciptakan pengelolaan kepegawaian yang berbasis merit. Dengan adanya reformasi birokrasi maka diharapkan akan mampu diciptakan tata pemerintahan yang efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan profesionalitas PNS, UU ASN telah menetapkan beberapa perubahan dalam manajemen ASN. Perubahan tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah dituntut untuk memiliki sumber daya manusia (PNS) yang berintegritas dan profesional.

Terkait dengan pembinaan profesionalitas PNS, salah satunya adalah melalui pengukuran yang jelas tentang aspek-aspek kemampuan kerja PNS sesuai dengan kebutuhan dalam setiap jabatan yang diembannya. Dalam kaitan ini, ternyata masih banyak perilaku kompetensi pekerjaan di lingkungan PNS yang belum terstandardisasi jika merujuk pada tugas dan fungsi organisasi. Pemetaan ASN yang meliputi informasi ASN yang berbasis pada aspek potensi dan kompetensi serta ukuran objektif diperlukan untuk mempermudah pemerintah dalam pendayagunaan pegawai ASN. Dengan adanya tuntutan kompetensi aparatur yang semakin tinggi dan semakin luas maka pendekatan-pendekatan dalam pengembangan SDM aparatur tidak cukup hanya dengan berbasis kompetensi (*competency based human resource development*) tapi lebih mengarah kepada pengembangan *talent pool* atau *talent based human resource development* yang akan mampu menghasilkan tidak hanya birokrat yang profesional tapi juga birokrat yang memiliki integritas, dedikasi dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai perkembangan jaman.

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana tuntutan masyarakat dan amanat peraturan perundangan, maka dibutuhkan berbagai upaya koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi yang efektif antar pengambil kebijakan dan antar pelaksana diklat aparatur, sehingga program-program diklat lebih terintegrasi dan dijamin mutu pelaksanaan maupun hasil-hasilnya. Dengan demikian ASN akan menjadi sumber daya utama pembangunan daerah serta dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang terumuskan di dalam RPJPD dan RPJMD.

2.1.3.3.7 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Program/kegiatan Litbang yang lebih efektif menunjang pembangunan daerah, membutuhkan upaya peningkatan jumlah dan kualitas program/kegiatan penelitian dan pengembangan yang lebih berbobot pula, sehingga diharapkan dapat memberi manfaat bagi upaya pemecahan masalah-masalah dalam pencapaian tujuan, Hal ini perlu disadari bersama, bahwa program/kegiatan pembangunan pada hakekatnya diselenggarakan untuk tujuan memecahkan

masalah-masalah yang terjadi dan dihadapi dalam lingkungan masyarakat bangsa.

Dalam kerangka mewujudkan fungsi dan tugas bidang kelitbang, peranan Unit Litbang Pemerintah Daerah antara lain adalah sebagai dapur kebijakan (*think tank*) penyelenggaraan pemerintah daerah dengan memfasilitasi berbagai langkah kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembangunan pada umumnya maupun secara khusus dalam kerangka peningkatan kinerja kelitbang di daerah, Dalam hal ini, upaya pengelolaan kegiatan penelitian dan pengembangan seharusnya dilakukan dalam sistem dan prosedur pengelolaan litbang satu pintu.

Untuk mewujudkan hal tersebut, disadari bahwa masih terdapat sejumlah masalah dan tantangan yang dihadapi berkaitan masalah bidang kelitbang, termasuk diantaranya adalah persoalan klasik berkenaan eksistensi dan peran litbang, Dalam hal ini, eksistensi dan peran unit kelembagaan Litbang di daerah pada umumnya dirasakan masih belum berdaya memenuhi ketentuan kebijakan bidang kelitbang dan ristek, antara lain Permendagri 20 Tahun 2011, Permendagri 36 Tahun 2012, Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri tentang Penguatan SIDA,

Dengan terbitnya Perpres No 32 Tahun 2011 tentang MP3EI, maka berimplikasi bahwa Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia berkewajiban melakukan pengembangan Sistem Informasi Daerah (SIDa), Bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas Pemda, daya saing daerah, dan pelaksanaan Masterplan MP3EI 2011-2025 diperlukan penguatan Sistem Informasi Daerah (SIDa) secara terarah dan berkesinambungan, Dengan adanya penguatan Sistem Informasi Daerah (SIDa), maka daerah-daerah diharapkan dapat mewujudkan interaksi kemitraan yang strategis diantara pelaku-pelaku inovasi (pemerintah, pebisnis, akademisi, dan masyarakat) dalam membangun sistem inovasi,

Sementara itu, kebijakan-kebijakan regulatif dan perangkat instrumen pendukung kebijakan di bidang Litbang dan Ristek secara umum belum kondusif dapat dimplementasikan secara efektif di daerah-daerah, Hal tersebut kiranya tidak dapat dipisahkan pula dengan persoalan komitmen dan persepsi yang muncul di kalangan aparatur daerah yang masih belum sesuai kehendak melakukan pemberdayaan unit kelembagaan Litbang di daerah-daerah, Dalam kondisi demikian sesungguhnya pula berhubungan erat dengan persoalan masih kurangnya informasi karena terbatasnya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang kelitbang dan ristek,

Pada sisi yang lain, di wilayah DIY terdapat banyak potensi kelitbangan baik berupa kelembagaan litbang, lemlit dan sumberdaya manusia tenaga ahli/peneliti dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi dengan beragam gagasan inovasi yang sangat kreatif, Kita juga telah banyak mendengar, mengetahui dan menyaksikan fenomena bermunculannya beragam hasil-hasil kajian teknologi tepat guna, produk inovasi baru dan industri kreatif yang dapat dikembangkan untuk kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat bangsa.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Salah satu unsur yang penting untuk mendukung daya saing daerah adalah faktor keamanan dan ketertiban. Kondisi daerah yang aman dari tindak kejahatan dan kekerasan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor dalam memutuskan untuk menanamkan modal dan membuka usaha di suatu daerah. Kondisi keamanan dan ketertiban suatu daerah dilihat dari angka kriminalitas/kejahatan dan jumlah demonstrasi. Di samping itu, daya saing daerah juga dapat dilihat dari aspek ekonomi, seperti daya beli masyarakat, aspek infrastruktur sebagai penghubung antar wilayah untuk mempermudah distribusi barang dan jasa, dan aspek sumber daya manusia sebagai faktor utama penggerak pembangunan.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Kemampuan ekonomi salah satunya diukur dengan tingkat pengeluaran rumah tangga. Indikator tersebut mencerminkan seberapa besar rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kemampuan ekonomi rumah tangga di DIY cenderung mengalami penguatan jika dilihat dari perkembangan pengeluaran rumah tangga. Konsumsi per kapita rumah tangga mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari tahun 2013 ke tahun 2017 yaitu dari Rp.765.714,- menjadi Rp.1.140.167,-, atau terjadi kenaikan sekitar 62,81%. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dari tahun 2012 hingga tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

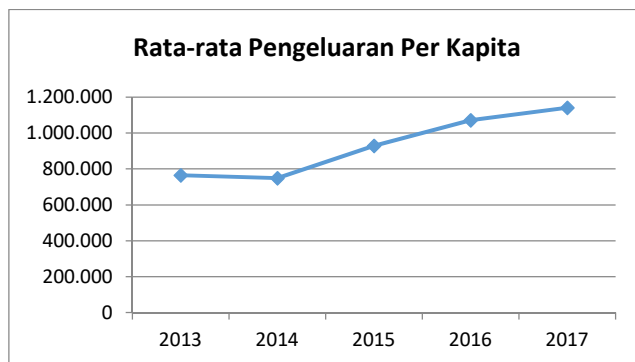
Tabel 2-140 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di DIY, Tahun 2013-2017

Tahun	Makanan	Non Makanan	Jumlah
2013	359.522	406.192	765.714
2014	355.504	392.800	748.304

Tahun	Makanan	Non Makanan	Jumlah
2015	365.011	563.590	928.601
2016	434.005	636.958	1.070.963
2017	490.249	649.918	1.140.167

Sumber: DDA, beberapa edisi, BPS Provinsi DIY (diolah)

Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk DIY dari tahun 2013 hingga 2017 dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : DDA, beberapa edisi, BPS Provinsi DIY (diolah)

Gambar 2-71 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita 2013-2017

Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk DIY cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan dari Rp.765.714,- ke Rp.748.304,-. Pengeluaran per kapita terdiri dari dua komponen pengeluaran, yaitu pengeluaran makanan dan pengeluaran non makanan. Pengeluaran non makanan meliputi : (1)perumahan, bahan bakar, penerangan, air; (2)aneka barang dan jasa; (3)biaya pendidikan; (4)biaya kesehatan; (5)pakaian, alas kaki dan tutup kepala; (6)barang yang tahan lama; (7)pajak pemakaian dan premi asuransi; dan (8)keperluan pesta dan upacara.

Jika diukur dari kelompok komoditas non makanan, pengeluaran rata-rata per kapita sebulan pada kurun waktu lima tahun terakhir lebih didominasi oleh Kelompok Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan & Air dengan rata-rata proporsi selama 5 tahun (2013–2017) sebesar 37,10%, Kemudian diikuti oleh Kelompok Barang-Barang & Jasa dengan rata-rata proporsi sebesar 22,85%, Proporsi ini menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi non makanan sebagian besar diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, Disisi lain, pada tahun 2016 terdapat penambahan jumlah klasifikasi kelompok yakni kelompok biaya pendidikan dan kelompok biaya kesehatan, yang hingga tahun 2015 masuk pada

kelompok barang dan jasa. Dengan adanya klasifikasi baru, terdapat penurunan nilai yang cukup drastis dari pengeluaran per kapita pada kelompok barang dan jasa dari tahun 2015 ke tahun 2016.

Tabel 2-141 Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di DIY, Tahun 2013-2017

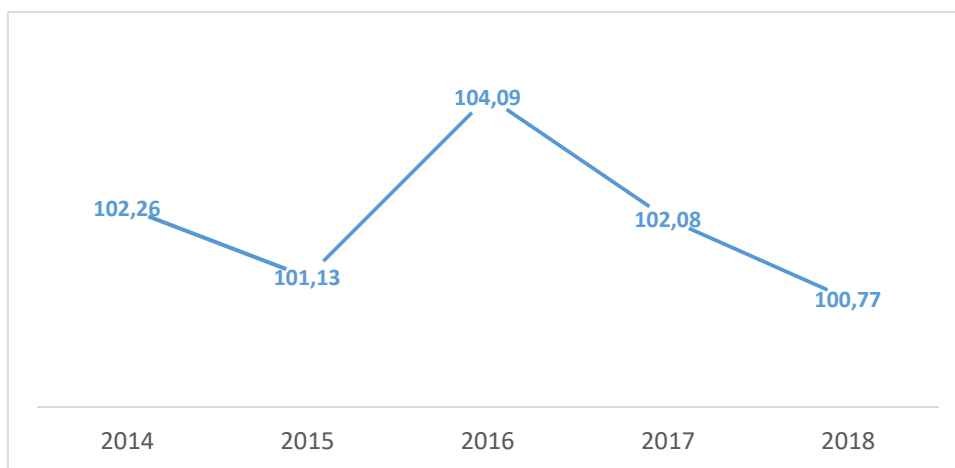
Kelompok	Nilai (Rupiah)				
	2013	2014	2015	2016	2017
1, Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan & Air	147,181	146,720	247,836	290,937	272,554
2, Barang-Barang & Jasa	170,005	166,528	165,253	80,181	69,095
3, Pakaian, Alas Kaki & Tutup Kepala	20,665	19,987	26,368	30,884	30.439
4, Barang Tahan Lama	37,403	29,126	75,981	69,848	101.702
5, Pajak Pemakaian & Premi Asuransi	13,557	12,604	29,583	32,976	43.492
6, Keperluan pesta dan upacara	17,361	17,835	18,569	25,573	19.348
7, Biaya pendidikan	-	-	-	68,885	65,682
8, Biaya kesehatan	-	-	-	37,674	47,606
	406,192	392,800	563,590	636,958	649.918

Sumber : DDA, beberapa edisi, BPS Provinsi DIY (diolah)

2.1.4.1.1 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang menjadi tolok ukur kesejahteraan petani, NTP adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) dimana produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani, Dengan demikian, semakin tinggi nilai NTP menunjukkan petani menikmati selisih antara penjualan komoditas dengan harga biaya input produksi,

NTP DIY selama kurun waktu 2013-2018 menunjukkan kecenderungan menurun, namun sempat tercatat sedikit kenaikan pada tahun 2016 sebesar 104,09 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 (102,08) hingga sebesar 100,77 pada tahun 2018, Pada tahun 2013 terdapat perbedaan metode penghitungan NTP sehingga menyebabkan angka NTP mulai tahun 2014 mengalami penurunan yang signifikan, Sementara itu, apabila mencermati komponen perhitungan NTP yaitu Indeks yang diterima (IT) dan indeks yang harus dibayar (IB), tampak bahwa terdapat faktor-faktor harga maupun biaya yang berada di luar jangkauan petani untuk mengendalikannya.



Sumber: DDA 2018, BPS Provinsi DIY, diolah

Gambar 2-72 Nilai Tukar Petani DIY, Tahun 2013-2018

Komponen penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP) terdiri dari indeks yang diterima (IT) dan indeks yang harus dibayar (IB). IT dan IB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

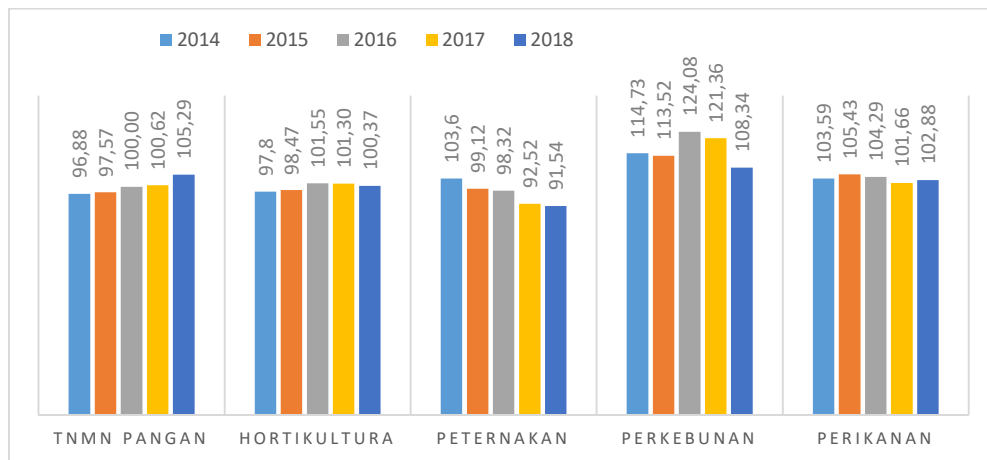
Tabel 2-142 Nilai Tukar Petani (NTP) 2013-2018

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
IT	163,16	114,39	119,51	128,07	129,82	131,32
IB	139,59	111,88	118,15	123,04	127,17	130,32
Rasio	116,89	102,26	101,13	104,09	102,08	100,77

Sumber : DDA 2018, BPS Provinsi DIY 2019, diolah

Bila diulas lebih lanjut per subsektor dapat diketahui bahwa Sub Sektor Perkebunan Rakyat memiliki angka NTP terbesar pada tahun 2018 sebesar 108,34, walaupun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 121,36, Secara umum dapat diketahui bahwa petani yang bekerja di sub sektor tersebut dapat diasumsikan kesejahteraannya relatif lebih besar dibandingkan sub sektor lainnya, Sementara itu, sub sektor tanaman pangan berada di peringkat kedua NTP terbesar pada tahun 2018 yaitu dengan nilai 105,29 atau meningkat signifikan dibandingkan nilai tahun 2017 yang sebesar 100,62, Sub sektor peternakan merupakan satu-satunya sub sektor dengan nilai indeks NTP dibawah 100, yang artinya peningkatan pengeluaran yang harus dibayarkan petani lebih cepat dibanding dengan penerimaannya, Artinya kenaikan harga-harga produk peternakan tidak mampu mengimbangi kenaikan harga-harga barang konsumsi dan biaya produksi pada sub sektor tersebut,

sehingga petani yang bekerja di sub sektor peternakan selalu mengalami defisit, Dapat diartikan pula bahwa daya saing produk peternakan relatif lebih rendah dibandingkan produk lain.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019, diolah

Gambar 2-73 Nilai Tukar Petani DIY Per Sub Sektor , Tahun 2016-2018

2.1.4.1.2 Aspek Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Kemampuan ekonomi salah satunya diukur dengan tingkat pengeluaran rumah tangga. Indikator tersebut mencerminkan seberapa besar rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kemampuan ekonomi rumah tangga di DIY cenderung mengalami penguatan jika dilihat dari perkembangan pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan per Kapita dari tahun 2013 hingga tahun 2017 mempunyai kecenderungan peningkatan. Pengeluaran Konsumsi per Kapita pada tahun 2017 meningkat sebesar 48,90% dibandingkan tahun 2013. Peningkatan tersebut karena terjadi kenaikan baik dari pengeluaran komoditas makanan maupun non makanan. Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita pada tahun 2017 tercatat naik sebesar Rp 69.203 per kapita per bulan (6,46%) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.070.963 per kapita per bulan.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga untuk komoditas non makanan selalu lebih besar dari komoditas makanan. Proporsi rata-rata pengeluaran non makanan selama kurun waktu lima tahun sebesar 56,30% dan sisanya sebesar 43,70% untuk komoditas makanan. Sementara pada tahun 2017 proporsi rata-rata pengeluaran non makanan naik menjadi Rp 649.918 per kapita per bulan

(2,03%) dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 636.958 per kapita per bulan. Untuk proporsi rata-rata pengeluaran makanan naik menjadi Rp 490.249 per kapita per bulan (12,96%) dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 434.005 per kapita per bulan.

Tabel 2-143 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di DIY, Tahun 2013-2017

Tahun	Makanan	Non Makanan	Jumlah
2013	359.522	406.192	765.714
2014	355.504	392.800	748.304
2015	365.011	563.590	928.601
2016	434.005	636.958	1.070.963
2017	490.249	649.918	1.140.166

Sumber: DDA, beberapa edisi, BPS Provinsi DIY (diolah)

Jika diukur dari kelompok komoditas non makanan, pengeluaran rata-rata per kapita sebulan pada kurun waktu lima tahun terakhir lebih didominasi oleh Kelompok Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan & Air dengan rata-rata proporsi selama 5 tahun (2013–2017) sebesar 41,72%. Kemudian diikuti oleh Kelompok Barang-Barang & Jasa dengan rata-rata proporsi sebesar 24,57%. Proporsi ini menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi non makanan sebagian besar diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan pada tahun 2017 meningkat sebesar 2,03% dari semula Rp 636.958 per kapita per bulan pada tahun 2016.

Tabel 2-144 Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di DIY, Tahun 2012-2017

Kelompok	Nilai (Rupiah)				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan & Air	147.181	146.720	247.836	290.937	272.554
2. Barang-Barang & Jasa	170.005	166.528	165.253	80.181	69.095
3. Pakaian, Alas Kaki & Tutup Kepala	20.665	19.987	26.368	30.884	30.439
4. Barang Tahan Lama	37.403	29.126	75.981	69.848	101.702
5. Pajak Pemakaian & Premi Asuransi	13.577	12.604	29.583	32.976	43.492
6. Keperluan pesta dan upacara	17.361	17.835	18.569	25.573	19.348
7. Biaya pendidikan	-	-	-	68.885	65.682
8. Biaya kesehatan	-	-	-	37.674	47.606
Jumlah	406.192	392.800	563.590	636.958	649.918

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2013-2018

2.1.4.1.3 Aspek Kemampuan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian DIY selama periode 2013-2017 menunjukkan perkembangan yang positif ditinjau dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2013 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 84,92 triliun rupiah meningkat sebesar 34,25 triliun rupiah menjadi 119,17 triliun rupiah pada tahun 2017. Selama periode lima tahun tersebut tercatat peningkatan nilai PDRB tertinggi terjadi dari tahun 2016 ke tahun 2017, yaitu sebesar 9,07 triliun rupiah. Perkembangan yang sama juga ditunjukkan oleh PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Menurut lapangan usaha, empat sektor penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB DIY adalah sektor industri pengolahan; pertanian, kehutanan, dan perikanan; penyediaan akomodasi dan makan minum; dan konstruksi. Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi tertinggi dimana pada tahun 2017 tercatat sebesar 13,12%. Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi memberikan kontribusi sebesar 10,32%, sektor pertanian dan sektor konstruksi berturut-turut penyumbang sebesar 10,01% dan 9,49%.



Sumber: BPS Provinsi DIY

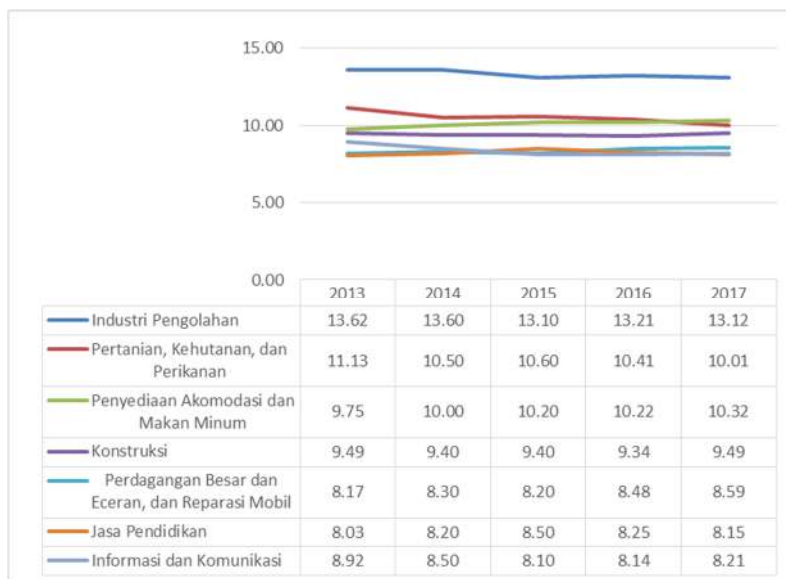
Gambar 2-74 PDRB ADHB dan ADHK DIY (Triliun Rupiah), 2013-2017

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pembentukan PDRB terutama berasal dari industri pengolahan makanan dan minuman. Industri berskala besar yang memberikan sumbangan terhadap perekonomian daerah diantaranya adalah PT Sarihusada dan PT Madukismo. Sementara itu, pada skala mikro, industri kecil dan rumah tangga mempunyai kontribusi penting dalam

perekonomian karena merupakan mata pencaharian utama penduduk DIY disamping pertanian.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh sebagai sektor penting dalam perekonomian seiring berkembangnya pariwisata DIY dan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Lebih lanjut, meskipun kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan tiap tahunnya, sektor ini masih memberikan sumbangan cukup besar dalam pembentukan PDRB. Subsektor yang memiliki kontribusi signifikan pada sektor ini adalah pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian.

Sektor konstruksi merupakan penyumbang terbesar keempat pembentukan PDRB dengan rata-rata kontribusi selama lima tahun sebesar 9,42%. Tiga sektor berikutnya adalah sektor perdagangan, sektor administrasi pemerintahan, sektor jasa pendidikan, dan sektor informasi dan komunikasi yang memberikan kontribusi terhadap PDRB sekitar lebih dari 8% tiap tahunnya.



Sumber : BPS Provinsi DIY

Gambar 2-75 Kontribusi Terbesar terhadap PDRB ADHB DIY menurut Sektor (%), 2013-2017

Tiga sektor yang memiliki kontribusi terendah dalam pembentukan PDRB adalah sektor pengadaan air; sektor pengadaan listrik dan gas; serta

sektor pertambangan dan penggalian. Kontribusi ketiga sektor tersebut tercatat kurang dari 1%.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Sistem infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Infrastruktur berperan penting sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dan lingkungan.

Infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (availability) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam mendukung daya saing daerah.

Pengelompokan sistem insfrastruktur dapat dibedakan menjadi:

- a. Kelompok keairan
- b. Kelompok distribusi dan produksi energi
- c. Kelompok komunikasi
- d. Kelompok transportasi (jalan, rel)

Perbaikan infrastruktur pada umumnya dapat meningkatkan mobilitas penduduk, mempercepat laju pengangkutan barang, memperbaiki kualitas dari jasa pengangkutan tersebut, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pembangunan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sarana pembangunan. Perbaikan infrastruktur akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi ini serta banyaknya investasi yang masuk akan menyerap tenaga kerja. Infrastruktur yang baik juga akan merangsang peningkatan pendapatan masyarakat, karena aktifitas ekonomi yang semakin meningkat sebagai akibat mobilitas faktor produksi dan aktivitas perdagangan yang semakin tinggi.

2.1.4.2.1 Penyediaan Air Minum

Penyediaan air minum dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan persentase penduduk berakses air minum. Peningkatan kebutuhan air minum akibat pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan aspek lainnya di DIY diproyeksikan kebutuhan air baku untuk air minum sebesar 6.998 L/det hingga tahun 2030.

Pencapaian indikator persentase penduduk berakses air minum dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk berakses air minum dengan total penduduk DIY. Bila asumsi laju pertumbuhan penduduk 1% per tahun dan jumlah penduduk DIY pada tahun 2015 sebesar 3.604.176 jiwa, maka estimasi penduduk DIY pada tahun 2018 sebesar 3.676.620 jiwa.

Sampai dengan tahun 2017, persentase penduduk berakses air minum sudah mencapai 90,93%. Dalam mencapai target tersebut intervensi yang menjadi prioritas SPAM MBR, SPAM IKK dan SPAM Perdesaan yang penekanannya pada keberfungsian (kapasitasproduksi, SR/HU, jumlah jiwa terlayani serta distribusi air mengalir).

Data sampai dengan tahun 2016 persentase rumah tangga menurut sumber air utama yang digunakan untuk minum di Daerah Istimewa Yogyakarta dari sumber air sumur Bor/Pompa adalah sebesar 11,37%, dari sumur terlindung sebesar 41,75 % dan dari perpipaan adalah sebesar 10,23%.

Pada daerah maju tapi tertekan (retarded region) seperti pada kawasan perkotaan Yogyakarta merupakan daerah-daerah yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Karena itu, walaupun daerah ini merupakan daerah telah maju tetapi dimasa mendatang diperkirakan pertumbuhannya tidak akan begitu cepat, walaupun potensi pembangunan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar. Pada daerah ini perlu dipikirkan langkah-langkah untuk menyediakan air minum layak dengan substitusi dari air tanah dangkal menjadi sistem perpipaan. Untuk melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta membutuhkan pengembangan SPAM Regional. Pada tahun 2015 telah disusun Rencana Induk SPAM DIY melalui kegiatan perencanaan pengelolaan SPAM pada Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum. Pada program yang sama melalui kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum telah dilaksanakan pemasangan pipa jaringan distribusi Kartamantul sepanjang 15 Km untuk melayani 160.000 jiwa. Untuk mendukung pengembangan SPAM Regional Kartamantul telah dibuat DED SPAM Regional Kartamantul Sistem Kebonagung dan dokumen AMDAL SPAM regional Kartamantul.

Daerah maju dan cepat tumbuh (rapid growth region) adalah daerah yang mengalami laju pertumbuhan PDRB dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata seluruh daerah. Pada dasarnya daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang paling maju, baik dari segi tingkat

pembangunan maupun kecepatan pertumbuhan dalam hal ini meliputi Kawasan Bandara Baru Yogyakarta International Airport (YIA) dan sekitarnya. Penyediaan air minum dipenuhi dengan pembangunan SPAM regional kapet kulonprogo (bandar udara; pelabuhan; pasirbesi) , kawasan industri Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan kapasitas 500 l/dt.

2.1.4.2.2 Penyediaan Komunikasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai akselerator pembangunan akan bisa terwujud apabila infrastruktur TIK sebagai tempat berjalannya lalu lintas data, tersedia dengan baik. Saat ini ada lebih dari 2.700 komputer yang terhubung dengan Jaringan Pemda DIY di 123 titik/lokasi dari 267 titik yang rencana terkoneksi (termasuk 118 titik baru SMU/SMK Negeri). Adapun rincian jalur koneksi di 123 titik yang terhubung dengan jaringan Pemda DIY adalah sebagai berikut:

1. 80 titik menggunakan jalur Fiber Optik (FO)
2. 42 titik menggunakan jalur Wireless, termasuk 12 BTS
3. 1 titik menggunakan VPN (Kaperda Jakarta)

Sesuai rencana awal, pemasangan jaringan Fiber Optik hanya dilaksanakan pada instansi yang berada di dalam kota tetapi seiring kebutuhan jaringan, instansi di pinggiran kota juga dipasang koneksi Fiber Optik. Sampai pada tahun 2017 sudah terpasang sejumlah 80 titik dan akan terus ditambah setiap tahunnya. Untuk tahun mendatang diharapkan masih akan dapat membangun Fiber Optik di Kantor Samsat Sleman dan Balai Respira Bantul. Adapun pertimbangannya adalah kedua instansi tersebut nantinya akan dijadikan sebagai BTS jaringan wireless untuk instansi sekitar. BTS Respira Bantul untuk mengampu jaringan wireless sampai sampai Samsat Kulonprogo dan BTS Samsat Sleman untuk mengampu jaringan wireless di Panti Sosial Bina Remaja dan beberapa instansi di Kulonprogo dan Cangkingan Sleman.

Tabel 2-145 Pembangunan Jaringan Fiber Optik Pemda DIY

Tahun	Panjang Kabel Fiber Optik (Meter)			Anggaran (Rp)
	Kabel Tanah	Kabel Udara	Total	
2013	12.227	-	12.227	3.993.879.251
2014	21.876	12.007	33.883	6.189.000.000
2015	3.140	13.154	16,294	2.365.000.000
2016	-	1.000	1.000	350.350.000
2017		702		

Tahun	Panjang Kabel Fiber Optik (Meter)			Anggaran (Rp)
	Kabel Tanah	Kabel Udara	Total	
Total	37.243	26.863	64.106	12.898.229.251

Sedangkan untuk bandwidth internet, besarnya selalu bertambah dari tahun ke tahun. Sebelum tahun 2015, Pemda DIY hanya menggunakan 1 ISP saja untuk mensuplai kebutuhan bandwidth, tetapi sejak tahun 2015 menggunakan 2 ISP. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar jika terjadi putus bandwidth pada 1 ISP masih bisa dibackup ISP yang lainnya sehingga ketersediaan bandwidth internet terutama untuk Data Center Pemda DIY tidak akan pernah terputus selama 1 x 24 jam. Alokasi bandwidth internet diatur oleh Dinas Kominfo Bidang Pengembangan Layanan Teknologi Informatika ke instansi Pemda DIY disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perangkat komputer yang ada.

Tabel 2-146 Langganan Bandwidth Pemda DIY

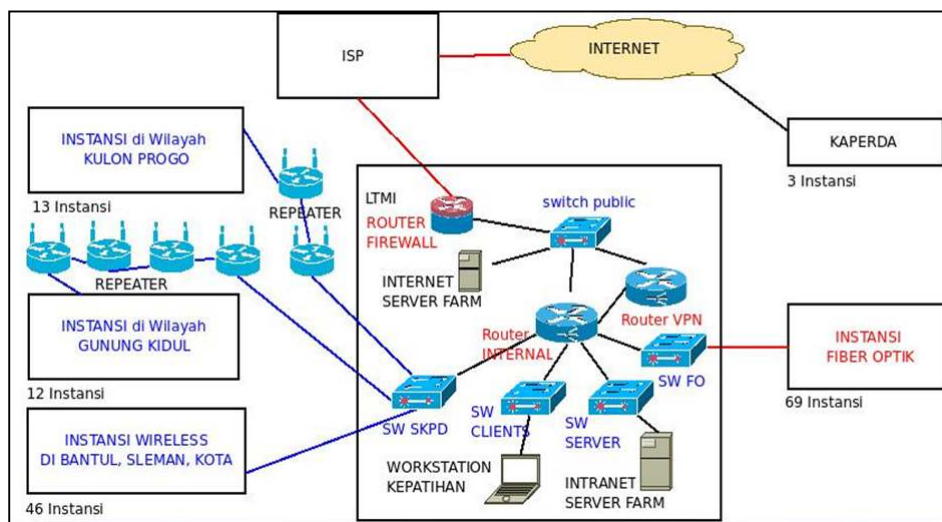
Tahun	Besaran Bandwidth (Mbps)			Anggaran (Rp)
	JMN	G Media	Total	
2013	40	-		1.695.550.000
2014	-	132	132	1.697.203.200
2015	155	190	345	3.116.208.260
2016	190	220	410	3.195.931.200
2017	300	350	650	3.486.470.400
2018	400	400	800	3.526.798.000

Rencana kegiatan jaringan tahun 2018 pada 3 bulan ke depan:

1. Melaksanakan pemeliharaan jaringan Fiber Optik OPD pemda DIY
2. Melaksanakan pemeliharaan jaringan Wireless OPD pemda DIY
3. Melaksanakan pemeliharaan jaringan intranet OPD di Kompleks Kepatihan
4. Pengadaan Interkoneksi OPD Pemda:
 - Pemasangan jaringan baru di 4 OPD dan 21 SMU/SMK Negeri
 - Sebanyak 3 titik menggunakan jaringan wireless dan 22 titik menggunakan jaringan fiber optic. Disamping itu juga akan melakukan interkoneksi jaringan Fiber Optik dengan kabupaten dan kota lewat Diskominfo Bantul, Diskominfo Sleman dan Diskominfo Kota Yogyakarta.
 - Revitalisasi peralatan jaringan di NOC Pemda DIY
 - Peralatan jaringan saat ini hanya bisa mengampu bandwidth internet di bawah 1 Gbps, sedangkan pada tahun 2019 bandwidth Pemda DIY diperkirakan lebih dari 1 Gbps untuk itu perlu dilakukan revitalisasi

peralatan jaringan. Pada tahun 2019 Pemda DIY akan mensuplai bandwidth desa di kabupaten bantul, kabupaten sleman dan kota Yogyakarta. Nantinya setiap desa akan mendapat alokasi bandwidth 10 Mbps lewat Dinas Kominfo masing-masing kab/kota.

- Sentralisasi WIFI terpadu di kompleks kepatihan (50 titik)
- Untuk mempermudah layanan koneksi internet dan keamanan informasi.
- Pemasangan CCTV di kompleks kepatihan (30 titik)
- Untuk pencegahan dan pengawasan keamanan di kompleks kepatihan



Gambar 2-76 Skema Jaringan Fiber Optik Mandiri Pemerintah DIY

2.1.4.2.3 Layanan Transportasi

Aksesibilitas memegang peranan penting dalam upaya perkembangan suatu daerah. Untuk meningkatkan ksesibilitas maka perlu dilakukan pengembangan baik jaringan jalan maupun sarana transportasi yang melayani suatu wilayah.

2.1.4.2.3.1 Pengembangan Jaringan Jalan

Sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 118/KEP/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi terjadi perubahan panjang total ruas jalan provinsi menjadi sepanjang 760,45 Km. Ruas jalan tersebut bertambah dari kondisi sebelumnya karena ada ruas-ruas jalan yang beralih status dari jalan

Kabupaten menjadi jalan Provinsi dan ada pula ruas jalan provinsi yang menjadi jalan nasional.

Pemerintah DIY telah mendesain Rencana Pengembangan Jaringan Jalan di DIY. Rencana pengembangan ini meliputi penyelesaian JJLS untuk mendukung Kawasan Selatan DIY dan Bandara Baru Yogyakarta International Airport (YIA). Untuk mendukung pengembangan wilayah Kulon Progo bagian utara sebagai penyangga KSPN Borobudur dan sebagai jalur konektivitas Bandara YIA – KSPN Borobudur akan dilakukan kajian aksesibilitas jalur Bedah Menoreh yang terdiri dari Jalan Provinsi dan kabupaten. Pengembangan Ruas Jalan Prambanan-Gading untuk mengembangkan jalur konektivitas antar Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) : KSPN Prambanan – Kawasan Gunung Api Purba – KSPN Karst Gunungkidul, disamping untuk membuka akses perbatasan Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Gunungkidul serta dalam rangka mendukung pertumbuhan dan bangkitan ekonomi di area yang dilalui.



Sumber : Bappeda DIY, 2017

Gambar 2-77 Rencana sistem jaringan jalan

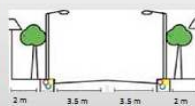
Jogjakarta Outer Ring Road (JORR)



JORR merupakan jaringan lintas utama angkutan barang, sehingga kendaraan angkutan bertonase besar tidak masuk ke Perkotaan Yogyakarta



DISTRIBUSI ANGKUTAN BARANG AKAN TERPUSAT DI INLANDPORT - SEDAYU

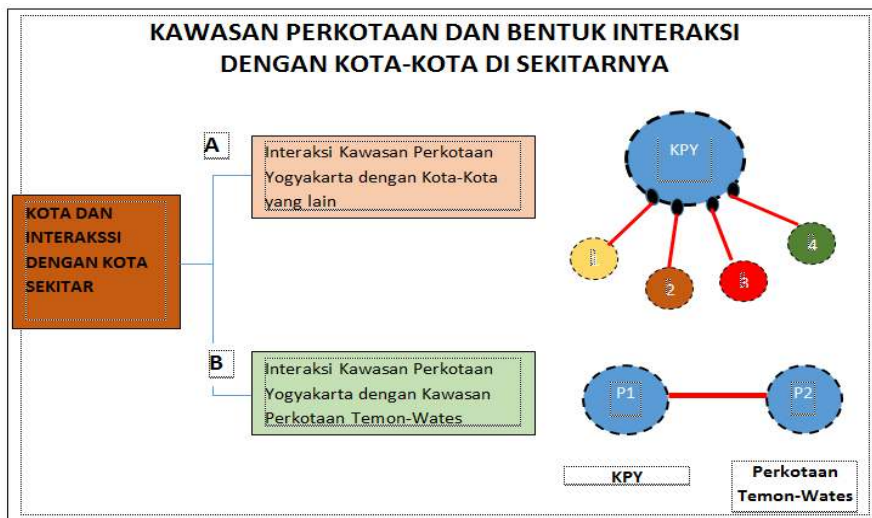


No.	Lokasi	Panjang Jalan (km)	Kebutuhan Lahan (m ²)
1.	Kabupaten Sleman	68,19	373.735
2.	Kabupaten Bantul	41,81	153.480
Jumlah		110,00	527.215

Sumber : Bappeda DIY, 2017

Gambar 2-78 Rencana sistem jaringan jalan Rencana JORR

2.1.4.2.3.2 Pengembangan Sarana Transportasi



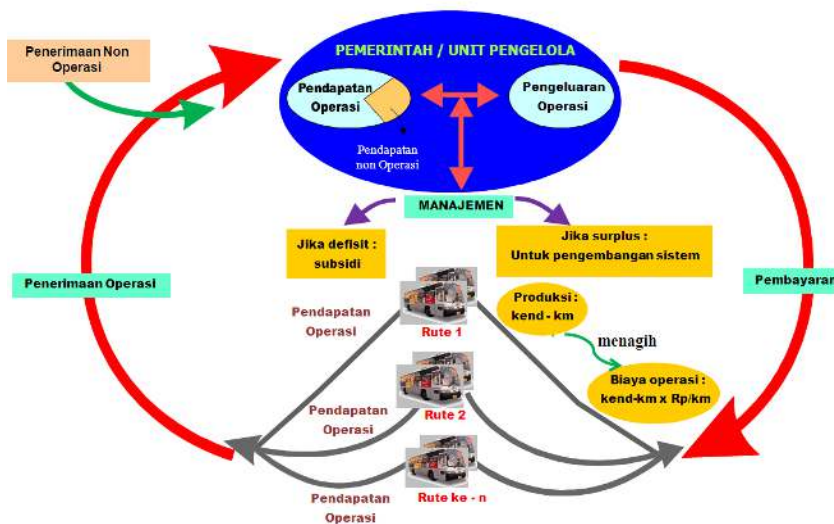
Gambar 2-79 Kawasan Perkotaan dan Bentuk Interaksi dengan Kota-kota di Sekitarnya

Memperhatikan gambar di atas, dan rencana pembangunan kedepan, hubungan perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta direncanakan dengan

pengembangan interaksi kawasan perkotaan dengan kota-kota lain (model A), yaitu: 1) Perkotaan Yogyakarta sebagai pusatnya dan perkotaan Kulonprogo, Bantul, Sleman dan Gunung Kidul sebagai kota satelitnya. Atau 2) tidak menutup kemungkinan ada dua kutub yang masa kuat yaitu Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Perkotaan Temon-Wates sebagai kawasan pendukung Bandara Baru.

Untuk pemenuhan kebutuhan transportasi perkotaan di kawasan Perkotaan Yogyakarta Pemda DIY telah menyelenggarakan angkutan dengan konsep dasar layanan “buy the service”. Konsep layanan “buy the service” ini dimaksudkan bahwa pemerintah yang akan menanggung segala kerugian yang timbul karena adanya pengoperasian angkutan umum. Pihak operator dibayar oleh pemerintah untuk menyediakan layanan angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM) yang telah disepakati dan mereka akan dikenakan denda jika melanggar kesepakatan tersebut.

Operasionalisasi Bus Trans Jogja oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah melewati tahun ketujuh. Sejak dioperasikan pada 18 Februari 2008, Bus Trans Jogja telah melalui babak baru sistem dan manajemen angkutan umum di wilayah perkotaan Yogyakarta dengan menggunakan sistem baru yang disebut Buy the Service atau sistem pembelian pelayanan menggantikan sistem angkutan umum lama yang berbasis setoran.



Gambar 2-80 Sistem Operasional Bus Trans Jogja

Pada awal beroperasinya Trans Jogja, Februari 2008, Trans Jogja beroperasi dengan 6 (enam) trayek sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur No. 132/KEP/2007 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Bus Perkotaan Trans Jogja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebanyak 54 bus disediakan untuk dapat melayani 6 (enam) jalur tersebut dengan kepemilikan armada sejumlah 34 bus milik PT. Jogja Tugu Trans selaku operator dan 20 bus milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang berasal dari hibah APBN. Sampai dengan tahun 2017 Trans Jogja sudah memiliki 128 armada dan melayani 17 jalur.

Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017, jumlah penumpang yang menggunakan moda transportasi umum Trans Jogja mengalami fluktuasi. Demikian juga halnya dengan jumlah pendapatan yang fluktuasinya tergantung pada jumlah penumpang terangkut.

Tabel 2-147 Jumlah Penumpang dan Besaran Penerimaan Pendapatan Operasional Trans Jogja 2011-2017

No.	TAHUN	Jumlah penumpang/hari	PENDAPATAN
1.	2011	6.014.334	Rp. 18.043.004.000,00
2.	2012	6.382.802	Rp. 17.407.646.993,80
3.	2013	6.106.162	Rp. 18.359.146.684,23
4.	2014	6.506.290	Rp. 20.177.264.827,00
5.	2015	6.468.678	Rp. 22.852.181.651,91
6.	2016	6.409.205	Rp. 21.397.770.707,76
7.	2017	5.317.484	Rp. 18.922.631.238,81

Sumber : UPT Trans Jogja, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY

Transportasi perkotaan dikembangkan bukan berdasarkan moda tetapi sistem jaringan layanan transportasi secara menyeluruh, artinya pengembangan angkutan umum massal tidak hanya fokus pada moda utamanya saja tetapi juga dengan layanan feeder. Pada interaksi Kawasan Perkotaan Yogyakarta dengan kota-kota lain maupun dengan kawasan perkotaan Temon-Wates, pengembangan angkutan feeder salah satunya adalah dengan perkuatan perencanaan penyelenggaraan AKDP sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemda DIY. Dalam integrasi angkutan umum secara menyeluruh maka peran pemerintah Kabupaten untuk dapat menyelenggarakan angkutan pedesaan harus secara simultan dilakukan agar kinerja angkutan AKDP dapat berjalan optimal.

2.1.4.2.4 Distribusi Dan Produksi Energi

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional maka Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menjabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Umum Energi Daerah yang akan digunakan sebagai acuan untuk penyelenggaraan energi di tingkat daerah. Pemda DIY pada tahun 2018 menargetkan dapat menyelesaikan penyusunan sekaligus penetapan Rencana Umum Energi Daerah DIY.

Kebutuhan tenaga listrik di DIY dipasok dari Perusahaan Listrik Negara Sistem Jawa Madura Bali. Kebutuhan tenaga listrik di DIY diperkirakan mencapai 5,722 GWh pada tahun 2025 dan untuk melayani kebutuhan tersebut, PLN telah merencanakan pengembangan 2 (dua) Gardu Induk baru dengan kapasitas 240 MVA dalam rangka memenuhi target penyediaan sebesar 660 MVA.

Rasio elektrifikasi di DIY pada tahun 2016 tercatat sebesar 88,66%. Dalam rangka mencapai target KEN dan RUEN yakni rasio elektrifikasi sebesar 100% pada tahun 2020 maka perlu upaya penyediaan listrik berupa pembangunan jaringan listrik perdesaan dan bantuan sambungan rumah bagi masyarakat kurang mampu.

Potensi energi baru terbarukan yang ada di DIY cukup terbatas dan beberapa sudah terbangun untuk menghasilkan tenaga listrik dalam skala kecil. Mempertimbangkan kondisi tersebut Pemda DIY akan mengoptimalkan pengembangan energi skala kecil dari potensi yang tersedia untuk meningkatkan target bauran energi bersumber dari EBT.

Elastisitas energi di DIY masih di atas 1. Bahkan di tahun 2016 nilai elastisitas energi di DIY sangat tinggi yaitu 1,7. Artinya konsumsi energi lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi atau boros energi. Dalam upaya mencapai target KEN dan RUEN yakni elastisitas energi di bawah 1 pada tahun 2025, penghematan energi harus dilakukan dan dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien di mana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit, ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Konservasi energi di DIY khususnya energi listrik belum dilakukan dilakukan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari konsumsi energi listrik di DIY, di mana sektor rumah tangga menjadi konsumen terbesar, yaitu 1.466,53 GWh di tahun 2016. Hal ini berdampak pada tingginya elastisitas energi.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multi dimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam keputusan untuk berinvestasi. Selain faktor-faktor ekonomi, faktor non ekonomi seperti kondisi politik, stabilitas keamanan dan penegakan hukum menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya dalam menarik minat investasi. Dalam bagian ini akan dijelaskan perkembangan situasi keamanan dan aspek lain yang berpengaruh terhadap iklim investasi di DIY.

2.1.4.3.1 Angka Kriminalitas

Kriminalitas merupakan salah satu indikator yang menggambarkan rasa aman bagi masyarakat. Terciptanya kondisi yang kondusif bagi masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas usaha ekonomi produktif. Tindak kejahatan yang dilaporkan dalam kurun lima tahun terakhir cenderung berfluktuatif. Sempat mengalami penurunan pada tahun 2012-2014, jumlah kejahatan yang dilaporkan kembali meningkat pada tahun 2015 dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2016. Meskipun jumlah kejahatan yang berhasil diselesaikan mengalami peningkatan pada tahun 2016, akan tetapi mengalami penurunan lagi pada tahun 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa laju kejahatan yang terjadi belum diimbangi dengan jumlah penyelesaian kasus kejahatan.

Secara umum situasi Kamtibmas sepanjang tahun 2018 wilayah hukum Polda D.I. Yogyakarta cenderung kondusif dan terkendali serta tidak ada kejadian yang perlu menjadi perhatian yang serius, kecuali beberapa kali peristiwa terror yang dilakukan oleh terduga teroris dan maraknya klitih. Jumlah Crime total Polda D.I. Yogyakarta ada 5.317 kasus dan crime clearan: 2.617 kasus (49,21%). Pada tahun 2017 telah berhasil mengungkap laporan tindak pidana sebanyak 5.194 kasus (crime total) dengan dapat diselesaikan 2.894 kasus (crime clearn) atau 55,71%. Bila dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah crime total Polda D.I. Yogyakarta naik 123 kasus, penyelesaian tindak pidana pada tahun 2017 sebanyak 56% namun pada tahun 2018 hanya 49% sehingga turun 7 poin. Upaya penyelesaian pengungkapan kasus tindak pidana dan menekan kasus tindak pidana menjadi prioritas dalam proses penegakan hukum oleh Polda D.I. Yogyakarta. Beberapa kasus kriminalitas yang terjadi seperti penipuan, kasus Curat, Curas, Curanmor, penganiayaan dengan pemberatan, Klitih, tawuran antar pelajar, kejadian perampokan pada super market/toko dan penyalahgunaan Narkoba masih bisa dicegah.

Tabel 2-148 Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Res. Kulon Progo	347	453	449	426	441
Res. Bantul	858	955	977	891	796
Res. Gunungkidul	303	362	353	273	287
Res. Sleman	1.843	2.259	2.161	1.723	2.020
Resta. Yogyakarta	1.883	1.947	1.802	1.196	1.178
Mapolda DIY	1.054	1.219	1.024	685	595
Jumlah	6.288	7.195	6.766	5.194	5.317

Sumber: Statistik Politik dan Keamanan DIY 2019

Tabel 2-149 Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Res. Kulon Progo	161	215	206	214	234
Res. Bantul	486	587	580	505	466
Res. Gunungkidul	171	204	147	158	159
Res. Sleman	771	950	915	878	719
Resta. Yogyakarta	936	848	807	680	645
Mapolda DIY	538	696	646	459	394
Jumlah	3.063	3.500	3.301	2.894	2.617

Sumber: Statistik Politik dan Keamanan DIY 2019

Indikator lain yang menunjukkan kriminalitas di DIY masih perlu menjadi perhatian adalah resiko penduduk terkena tindak kejahatan. Pada tahun 2016 jumlah orang yang beresiko terkena tindak kejahatan setiap 100.000 penduduk diperkirakan sebanyak 188 orang, walaupun angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari seluruh wilayah di DIY, penduduk Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman memiliki resiko paling tinggi terkena tindak kejahatan. Sementara itu, catatan lain yang perlu diperhatikan adalah DIY masuk dalam 10 tertinggi dalam tingkat resiko terkena kejahatan (Statistik Kriminal BPS RI 2016). Seiring mudahnya pemberitaan tersebar melalui sarana informasi, peningkatan keamanan lingkungan perlu ditingkatkan agar citra DIY tidak terganggu oleh kejadian kejahatan yang terjadi.

Tabel 2-150 Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan per 100.000 Penduduk DIY

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Kulon Progo	79	104	103	101	104
Bantul	93	104	106	90	80
Gunungkidul	40	48	47	37	39
Sleman	171	209	200	144	169
Yogyakarta	457	473	438	270	266

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
D.I.Yogyakarta	174	200	188	138	141

2.1.4.3.2 Jumlah Demonstrasi

Jumlah unjuk rasa atau demonstrasi yang berjalan dengan damai dapat menjadi indikator stabilitas keamanan wilayah. Berbagai aksi unjuk rasa yang selama ini terjadi di DIY relatif dapat berjalan dengan tertib sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai kerugian sebagaimana terjadi pada berbagai peristiwa demonstrasi yang terjadi di kota-kota besar lain di Indonesia. Penanganan aksi unjuk rasa di DIY (dalam kasus di Kota Yogyakarta) memiliki dampak positif terhadap stabilitas wilayah, yaitu tetap terselenggaranya aktivitas berbagai macam aspek kehidupan masyarakat. Dari data yang ada unjuk rasa di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar berlangsung damai.

Aksi unjuk rasa pada tahun 2018 sebanyak 155 kali atau menurun 52 kali bila dibanding tahun 2017 sebanyak 207 kali, sedangkan kelompok yang melakukan aksi unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa, Ormas/LSM, warga masyarakat, buruh, dan parpol. Adapun tempat-tempat yang menjadi sasaran untuk melakukan unjuk rasa antara lain kantor pemerintahan seperti Gedung Agung, Kantor DPRD, Kantor Bupati, Kantor Pemda, rumah pejabat, perusahaan swasta. Jalan umum yang sering digunakan sebagai tempat unjuk rasa adalah simpang empat kantor pos besar, bundaran UGM, simpang empat tugu dan simpang tiga UIN SUKA, serta tempat-tempat umum lainnya. Tuntutan yang diajukan berkisar pada masalah korupsi, pendidikan, perburuhan, pertanahan, kenaikan BBM dan TDL, SARA serta kebijakan yang dirasakan belum tepat. Kegiatan unjuk rasa pada umumnya berlangsung dengan kondusif, namun ada beberapa kelompok pengunjuk rasa melakukan pembakaran ban di tengah jalan serta penutupan jalan yang mengakibatkan terjadinya kemacetan di titik-titik jalan yang menuju ke arah lokasi unjuk rasa.

Tabel 2-151 Jumlah Demonstrasi di DIY Tahun 2013-2018

Kabupaten/Kota	Jumlah Unjuk Rasa
2013	244
2014	283
2015	204
2016	106
2017	207
2018	155

Sumber: Statistik Politik dan Keamanan DIY 2019

2.1.4.3.3 Peraturan Daerah (Perda) Yang Mendukung Iklim Usaha

Pemerintah Daerah dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui regulasi yang mendukung kemudahan dan kepastian usaha. Regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mencakup regulasi terkait kelembagaan perijinan terpadu satu pintu dan terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Peraturan Gubernur 36/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 36 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu pada prinsipnya memberikan jaminan layanan kepada pelaku usaha bahwa kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

Sementara itu, Perda 4/2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal bertujuan menarik minat investasi dengan memberikan insentif pajak atau retribusi daerah serta pemberian fasilitas kemudahan lainnya. Insentif yang diberikan dapat berupa pengurangan pajak daerah. Sementara bentuk kemudahan penanaman modal yang diberikan dapat berupa penyediaan informasi lahan atau lokasi, percepatan pemberian perizinan, pemberian fasilitasi promosi investasi, dan fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fiskal.

2.1.4.3.4 Tindak Pidana Narkoba

Jumlah tindak pidana Narkoba selama tahun 2018 sebanyak 468 kasus dan dapat diselesaikan 415 kasus (88,67%) meliputi Mapolda: lapor 113 kasus, selesai 119 kasus, Polres Bantul: lapor 78 kasus selesai 58 kasus, Polresta Yogyakarta: lapor 124 kasus, selesai 114 kasus, Polres Sleman: lapor 67 kasus, selesai 69 kasus, Polres Gunungkidul lapor: 48 kasus, selesai 25 kasus dan Polres Kulonprogo: lapor 40 kasus, selesai 30 kasus.

Tabel 2-152 Data Tindak Pidana Narkoba di DIY

Kab/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Res. Kulon Progo	21	24	49	36	40
Res. Bantul	88	85	115	80	76
Res. Gunungkidul	14	49	31	36	48
Res. Sleman	58	57	81	66	67
Resta. Yogyakarta	99	104	139	67	124
Mapolda DIY	109	107	78	100	113
Jumlah	389	426	493	385	468

Sumber: Statistik Politik dan Keamanan DIY 2019

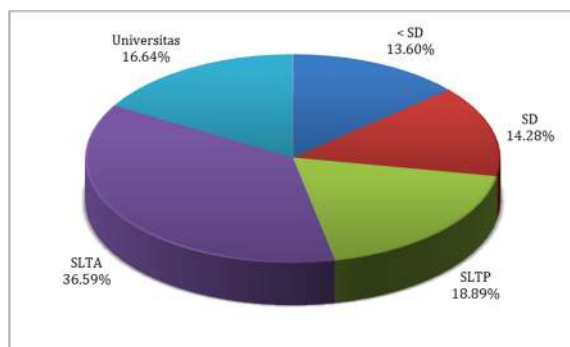
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan. Sumberdaya manusia yang tangguh, unggul, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya , memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Oleh karena itu, pembangunan SDM diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan daya saing dan investasi daerah. Indikator kualitas SDM dalam rangka daya saing daerah dapat dianalisis dengan melihat kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

2.1.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas sumber daya manusia (SDM) berhubungan dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia di suatu daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas, karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya membutuhkan spesifikasi kompetensi yang memadai.

Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Angkatan kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam mengisi kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri. Kondisi angkatan kerja di DIY berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Statistik Ketenagakerjaan DIY 2016-2017, Februari 2017, BPS DIY, 2017

Gambar 2-81 Presentase Angkatan Kerja DIY Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017

Gambar di atas menunjukkan bahwa struktur angkatan kerja di DIY didominasi oleh lulusan SMTA dan jenjang SD kebawah. Sedangkan lulusan universitas baru mencapai sekitar 16,64% di tahun 2017.

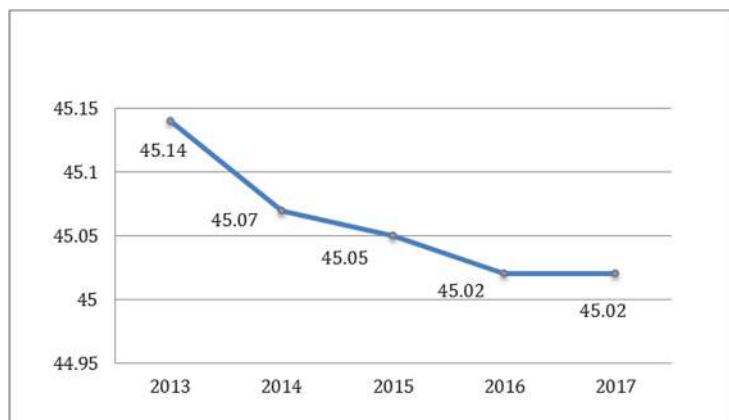
Sehingga program-program peningkatan kompetensi tenaga kerja seperti pelatihan kerja dan kewirausahaan mutlak diperlukan agar angkatan kerja di DIY mampu bersaing di dunia kerja.

2.1.4.4.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Sedangkan penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap produktif. Atas dasar konsep ini maka dapat digambarkan berapa jumlah penduduk yang memiliki ketergantungan pada penduduk usia produktif/usia kerja.

Konsep ini merupakan bagian dari analisis demografi untuk menjelaskan variasi standar kehidupan dalam pembangunan ekonomi. Rasio ketergantungan menjelaskan bahwa semakin tinggi angka *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, demikian sebaliknya. Tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30 - 40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41

Selama periode lima tahun terakhir, yaitu 2013 sampai dengan 2017, angka beban tanggungan penduduk DIY belum mengalami perubahan yang nyata dengan kisaran angka 45,02 sd 45,14 persen, dengan kecenderungan menurun. Angka ketergantungan DIY ini masuk dalam kelompok tinggi, karena lebih dari 41. Rasio beban tanggungan penduduk DIY yang cukup tinggi merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan ekonomi daerah, karena sebagian pendapatan yang diperoleh oleh golongan yang produktif harus dibagikan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum/tidak produktif.



Sumber: BPS DIY dalam Dataku Bappeda DIY

Gambar 2-82 Angka Beban Tanggungan Penduduk DIY Tahun 2013-2017

Rasio ketergantungan di DIY disebabkan karena karena peningkatan penduduk usia lanjut yang tidak disertai dengan kecepatan peningkatan jumlah penduduk usia produktif. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah terutama dalam pemenuhan layanan bagi lansia secara komprehensif untuk menciptakan lansia yang sehat dan produktif.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah merupakan bagian dari siklus manajemen pembangunan yang memiliki posisi strategis. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui bagaimana pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2018 bermuara pada sasaran pembangunan yang diharapkan yang dapat dikonfirmasi melalui capaian indikator (tolok ukur) kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah capaian dari sasaran pembangunan selama tahun 2018 yang diukur dari pencapaian indikator sasaran yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur DIY.

Tabel 2-153 Target dan Capaian IKU Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 dan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Target dalam PK Tahun 2019
				Target	Capaian	Tingkat Capaian(%)	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	80,29	79,59*	99,13	80,72
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	69,91	70,60*	100,98	70,02
2	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Indeks Gini	indeks	0,3917	0,422	92,26	0,3846
		Persentase Angka Kemiskinan	persen	11,23	11,81	94,84	10,19
3	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang Diapresiasi	persen	11,46	11,46	100,00	11,68
4	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,24	6,20	118,32	5,26
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka indeks	58,58	61,69	105,31	60,51
		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	persen	76,5	77,05	100,72	78
		Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	persen	21,11	21,54	102,04	30,42
5	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Indeks Williamson	indeks	0,4559	0,4641*	98,23	0,4552
6	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Opini BPK	opini	WTP	WTP	100	WTP
		Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	nilai	A	AA	100	A

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Target dalam PK Tahun 2019
				Target	Capaian	Tingkat Capaian(%)	
1	2	3	4	5	6	7	9
7	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Persentase Capaian Sasaran Program Urusan Keistimewaan	persen	65,22	100	153,33	73,91
8	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan	bidang	7.919	7.928	100,11	9.419

Ket: *) angka sementara

Capaian kinerja 2018 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD DIY 2017-2022, sebagian besar telah memenuhi target yang ditetapkan. Dari 14 indikator sasaran Pemda, beberapa indikator yang masih di bawah target yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Manusia
- b. Indeks Gini
- d. Angka Kemiskinan
- e. Indeks Williamson

Kinerja tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, telah melebihi separuh dari target tahun 2022. Rerata persentase capaian kinerja kumulatif sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target 2022 sebesar 85,21%. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target akhir RPJMD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2-154 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran s.d Tahun 2018 terhadap target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Target Akhir RPJMD 2018-2022	Tingkat Capaian s.d Thn Berjalan (%)
1	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	79,59	81,68	97,44
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	70,60	70,32	100,40
2	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Indeks Gini	indeks	0,422	0,3635	83,91
		Persentase Angka Kemiskinan	persen	11,81	7,00	31,29
3	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang Diapresiasi	persen	11,46	12,04	95,18
4	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	persen	6,20	5,34	116,10
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka indeks	61,69	66,15	93,26
		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	persen	77,05	82,5	93,39
		Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	persen	21,54	54,44	39,57
5	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Indeks Williamson	indeks	0,4595	0,4489	96,61
6	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Opini BPK	opini	WTP	WTP	100,00
		Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	nilai	AA	A	100,00
7	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Persentase Capaian Sasaran Program Urusan Keistimewaan	persen	100	91,3	109,53
8	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan	bidang	7.928	21.877	36,24
	Rerata persentase capaian kinerja kumulatif					84,99

Terdapat 5 indikator yang capaian sudah memenuhi target akhir RPJMD yaitu:

1. Indeks Pemberdayaan Gender
2. Pertumbuhan Ekonomi
3. Opini BPK
4. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)
5. Persentase Capaian Sasaran Pelaksanaan Keistimewaan

Kelima indikator tersebut, capaian tahun 2018 memang sudah memenuhi target akhir RPJMD, namun secara kualitas masih perlu ditingkatkan. Opini BPK dan Nilai AKIP, masih perlu peningkatan kualitas pada setiap aspek detail dalam indikator tersebut. Indikator Indeks Pemberdayaan Gender dan Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 memang sudah memenuhi target 2022, namun belum tentu kinerja tersebut secara konsisten dapat dipertahankan mengingat banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang bersifat dinamis. Demikian pula dengan indikator Persentase Capaian Sasaran Pelaksanaan Keistimewaan.

Capaian sasaran pembangunan pada tahun 2018 didukung oleh kinerja pada level Program Pemda. Desain Program Pemda di DIY merupakan program-program yang bersifat lintas sektor dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah. Terdapat 12 Program Pemda yang dilaksanakan pada tahun 2018 yang diukur dengan 34 indikator.

Tabel 2-155 Capaian Kinerja Program Pemda Tahun 2018

No	Program Pemda	Indikator	Satuan	Tahun 2018	
				Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	%	11	33,91
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,51	15,55*
		Peningkatan jumlah pemuda kader aktif	Orang	200	217
		Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju	persen	5,96	25
2	Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	tahun	75,06	74,87*
3	Program Pembangunan Sosial Masyarakat	Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas	Kab/ Kota	2	2
		Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif	persen	20,72	25
		Total Fertility Rate	Angka	2,1	2,2*
		Peningkatan jumlah desa/kelurahan cepat berkembang	Desa/ Kelurahan	36	36
		Angka Kejahatan per 100.000 penduduk (crime rate)	Angka	12,59	15,58*
4	Program penanggulangan kemiskinan	Persentase peningkatan Penumbuhan wirausaha baru	persen	0,2	0,277
		Jumlah penduduk miskin	(ribu jiwa)	484.947	450.250
		Pengeluaran per kapita masyarakat	(juta Rp/Th)	13.552	13,846
5	Program Pelestarian budaya benda dan tak benda	Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	Persen	11,22	11,58
		Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan	persen	12,99	13,25

No	Program Pemda	Indikator	Satuan	Tahun 2018	
				Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
6	Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)	Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY	persen	42,32	41,58
		Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persen	2,78	3,35
		Jumlah desa mandiri budaya (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima)	Desa	0	-
7	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Indeks Kualitas Air	Angka Indeks	34,2	40,25
		Indeks kualitas udara	Angka Indeks	87,06	84,24
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka Indeks	55,5	60,86
		Indeks Risiko Bencana	Angka Indeks	155	155,38
8	Program peningkatan keterpaduan program pemanfaatan ruang	Persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang	persen	74,7	75,2
9	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan	Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul)	persen	40,21	39,49
		Persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi	persen	61	71,90
10	Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Nilai	sedang	Sedang
		Optimalisasi aset-aset pemda DIY	Rupiah	9.424.672.744,00	19.033.326.876
		Nilai eksternal pelayanan public		8,5	8,28
		Nilai internal integritas organisasi (4,16)		4,2	4,86
		Nilai eksternal persepsi korupsi (5,21)		5,4	5,81
11	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan	persen	100	100
		Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdis kelembagaan	persen	NA	30

No	Program Pemda	Indikator	Satuan	Tahun 2018	
				Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
12	Program Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	prosentase Tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	persen	31,57	31,78
		Capaian pengelolaan (persen) ditambah capaian pemanfaatan (persen)		NA	-

Ket: *) Data sementara

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 pada level pemerintah daerah, didukung secara optimal oleh kinerja pada jenjang di bawahnya yaitu pada level perangkat daerah. Pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2018 secara umum berjalan dengan baik dan secara optimal menghasilkan outcome sebagaimana diharapkan. Berikut ini disajikan rekapitulasi capaian kinerja perangkat daerah di DIY berserta kinerja program-program di bawahnya yang menggambarkan kinerja pelaksanaan urusan pembangunan di DIY.

Tabel 2-156 Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Pemda DIY Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator	2018			Perangkat Daerah Pengampu
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak (rasio)	0,48	0,61	72,92	BPPM
	Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan	Umur menikah pertama perempuan (tahun)	24,4	25,32	103,77	
	Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia	Persentase legalitas keluarga (perkawinan dan kelahiran) (persen)	98	98,15	100,15	
	Meningkatnya keberdayaan Organisasi/ Lembaga masyarakat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan (lembaga)	4	4	100	
2	Terpenuhinya Kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh pemenuhan	42,38	43,74	103,21	Dinsos

No	Sasaran	Indikator	2018			Perangkat Daerah Pengampu
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
		kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial				
	Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keberintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	51,56	51,64	100,16	
3	Terwujudnya perilaku sadar sehat	Puskesmas melaksanakan Program Jogja Sehat dengan Pendekatan Keluarga (persen)	67,77	100	147,56	Dinkes
	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu	Pelayanan Kesehatan Yang Terakreditasi	64,83	66,41	102,44	
4	Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan	Prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan (persen)	23	23,16	100,7	BPAD
	Meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	Peningkatan arsip yang dimanfaatkan (berkas)	5.750	5.782	100,55	
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Peringkat Keterbukaan Informasi Bagi Badan Publik Level Provinsi (peringkat)	8	13	37,5	Diskominfo
	Meningkatnya Kualitas Informasi Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Pemerintah Daerah (nilai)	80	81,98	102,48	
6	Meningkatnya Kualitas Manajemen Aparatur Secara Efisien dan Efektif Dalam Pelayanan Publik Secara Profesional	Persentase Kualitas Manajemen SDM Aparatur (persen)	78	85,35	109,42	BKD
7	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan kediklatan	Akreditasi Badan Diklat (nilai/angka)	91	91	100	Bandiklat
8	Meningkatnya kepatuhan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Rerata Jumlah Desa/kelurahan yang Melakukan Upaya Menjaga Keamanan Lingkungan (desa/kel)	320	334	104,38	Satpol PP
9	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (%)	80	89,02	111,28	Inspektorat

No	Sasaran	Indikator	2018			Perangkat Daerah Pengampu
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
10	Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD	1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) 2. Skor Indeks Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (bobot 50%)	75	79,45	105,93	Setwan
	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu (%)				
11	Terfasilitasinya Kinerja Parampara Praja	Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja (%)	70	78,26	111,8	Sekre. Parampara Praja
12	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah	83	91,35	109,94	Bappeda
13	Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup	88,56	93,26	105,31	BLH
14	Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kinerja Penyediaan Layanan Angkutan Umum dan Tingkat Pelayanan Jalan	44,29	44,48	100,43	Dishub
15	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	88,6	88,75	100,17	Dinas PTR
	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pada Satuan Strategis Keistimewaan	Peningkatan Kinerja Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	24,84	28,14	113,28	
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Sesuai Regulasi	100	100	100	
	Meningkatnya Fasilitasi Tertib Administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa	Persentase Fasilitasi Tertib Administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	29,99	30,4	101,37	
16	Penduduk Berakses Sanitasi	Jumlah penduduk berakses sanitasi (%)	90,69	91,3	100,67	DPUPESDM
	Penduduk Berakses Air Minum	Jumlah penduduk berakses air minum (%)	86,98	91,77	105,51	
	Meningkatnya luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	Persentase luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi (%)	83,25	83,25	100	
	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Peningkatan aksesibilitas Jalan (%)	94,28	97,46	103,37	

No	Sasaran	Indikator	2018			Perangkat Daerah Pengampu
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan jasa Konstruksi	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi (%)	47,69	66,84	140,16	
	Penduduk dengan hunian yang layak	Persentasi penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak (%)	94,82	95,79	101,02	
	Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik	Persentase rumah tangga berakses listrik (%)	93,02	99,9	107,4	
	Meningkatnya Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang (izin)	27	29	107,41	
17	Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan Bidang Infrastruktur Daerah dan Pembangunan Berkelanjutan	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Ditindaklanjuti (%)	50	50	100	Biro Adpem
18	Meningkatnya realisasi investasi	nilai PMTB dalam PDRB DIY (Juta Rupiah)	36.855.448	43.173.678	117,14	BKPM
19	Terwujudnya Ketahanan Pangan	skor Pola Pangan Harapan (PPH) (skor)	89,92	89,92	100	BKPP
20	Meningkatnya nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY	nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY tahun n (ADHK) (juta rupiah)	318.947	320.348	100,44	Dislautkan
	Meningkatnya status kawasan konservasi	Persentase peningkatan status per tahapan kawasan konservasi (%)	20	20	100	
21	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan non diskriminatif	Rata-rata hasil ujian nasional SMA (rerata nilai ujian SMA)	57,45	62,5	108,79	Disdikpora
		Rata-rata hasil ujian nasional SMK (rerata nilai ujian SMK)	57,65	54,77	95	
		Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah (%)	96,91	97,17	100,27	
		Capaian APK pendidikan Menengah (%)	95,03	95,97	100,99	
		Capaian APK pendidikan khusus (%)	80,21	82,15	102,42	
	Terwujudnya pembinaan pemuda dan olahraga yang berkualitas	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan (%)	8,7	8,72	100,23	
		Prestasi cabang olah raga (peringkat)	Peringkat 2 POPWIL	Peringkat 3 POPWIL	50	

No	Sasaran	Indikator	2018			Perangkat Daerah Pengampu
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
22	Terpenuhinya standar mutu pelayanan rumah sakit	Presentase standar mutu pelayanan kesehatan jiwa (persen)	55	56	101,82	RSJ Grhasia
23	Terwujudnya pelayanan kesehatan paru yang bermutu	Persentase pemenuhan standar mutu pelayanan (%)	73,2	73,2	100	RS Paru Respira
24	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Kesejahteraan Rakyat	Persentase bahan kebijakan pengelolaan kesejahteraan rakyat yang menjadi rumusan kebijakan	70	133,33	190,47	Biro Adm. Kesra
		Persentase fasilitasi pembinaan kehidupan beragama	100	100	100	
25	Meningkatnya pengelolaan pelestarian kebudayaan	Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan	568	578	101,76	Disbud
		Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	5,12%	5,67%	111	
		Peningkatan penyelenggaraan even budaya tingkat Provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya	5,29%	5,58%	105	
		Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya DIY	4,13%	4,14%	100,24	
26	Meningkatkan kualitas daya saing tenaga kerja	Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan	524 orang	539 orang	102,86	Disnakertrans
	Terwujudnya kesempatan kerja	Jumlah kesempatan kerja	1,980,354 orang	2,118,392 orang	106,97	
	Terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja	Jumlah kasus yang diselesaikan di luar pengadilan hubungan industrial	10 kasus	10 kasus	100	
27	Meningkatnya produksi kehutanan	Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY (juta rupiah)	714.713	711.209	96,02	Dishutbun
	Meningkatnya luas tutupan vegetasi	Persentase tutupan vegetasi dibagi luas wilayah(%)	19,41	41,79	215,3	
	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (juta rupiah)	7.041.831	6.905.892	98,1	
28	Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UMKM	nilai omzet koperasi tahun n (juta rupiah)	3.697.739	4.394.362	118,84	Diskop UKM
		Meningkatnya nilai omzet UMKM yang dibina (Rp Milyar)	10.483	10.676	101,84	

No	Sasaran	Indikator	2018			Perangkat Daerah Pengampu
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
29	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian	nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY (Juta Rupiah)	9.297.230	9.383.603	100,93	Dispar
	Meningkatnya jumlah belanja wisatawan	spending money wisatawan (Juta Rupiah)	7.397.453	7.414.988	100,24	
30	Peningkatan produksi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (juta rupiah)	7.041.831,00	6.905.892	98,1	Distan
31	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY (Rp Juta)	7,368	8,219289	101,19	Disperindag
	Meningkatnya industri pengolahan	Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY (Rp Juta)	11,235	12,487005	102,76	
32	Rumusan kebijakan perekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (n+1)	persentase rumusan kebijakan menjadi bijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	80	80	100	Biro Adm. Perekonomian dan SDA
33	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100	Biro Hukum
	Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi produk hukum	Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi produk hukum	100%	100%	100	
34	Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	79%	92,53%*	117,13	Biro Organisasi
	Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik	Jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau	10	43	430	
35	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	4 OPD	4 OPD	100	Biro Tapem
	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	100%	109%	109	
36	Meningkatnya kualitas pelayanan tamu dan pimpinan	Nilai rerata pimpinan dan tamu terhadap layanan keprotokolan, kerumahtanggan, dan persandian serta persuratan	86%	88,19%	102,55	Biro Umum dan Protokol

No	Sasaran	Indikator	2018			Perangkat Daerah Pengampu
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
37	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	68	68,5	100,74	BPBD
38	Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan	Nilai indeks kepuasan masyarakat	82	84,5	103,5	Kantor PPTSP
		Peningkatan kepatuhan pelayanan perijinan dan non perijinan	85	97	114,12	
39	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor pelayanan daerah	Peningkatan kepuasan jumlah stakeholder yang mendapatkan pelayanan Kaperda	84	86,46	102,93	Kaperda
40	Meningkatnya Ketahanan Nasional di DIY	Skor Indeks Ketahanan Nasional di DIY di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya	3,02	3,085	102,15	Banquesbangpol
41	Peningkatan ualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	100	100	100	DPPKA
	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Nilai rupiah optimalisasi aset-aset Pemda DIY	5.950.608.853	6.505.543.500	109,33	

Dari total 82 indikator perangkat daerah yang ditetapkan, sebanyak 76 indikator atau 92,68% telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2018. Indikator perangkat daerah yang tidak memenuhi target yaitu:

1. Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak (BPPM)
2. Peringkat Keterbukaan Informasi Bagi Badan Publik Level Provinsi (Diskominfo)
3. Rata-rata hasil ujian nasional SMK (Disdikpora)
4. Prestasi cabang olahraga (peringkat POPWIL)
5. Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY (Dishutbun)
6. Nilai subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Distan, Dishutbun)

Tabel 2-157 Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Urusan Pemerintahan Wajib																
1		1			Pendidikan																
					Program Pendidikan Menengah	Persentase Sekolah menengah dengan akreditasi A (%)	83,00	3.734.99 4.321.00 0	80,07	188.323. 775.321	78,95	228.888. 701.740	76,79	27.561. 404.250	97,26	12,04	80,07	215.885. 179.571	96, 47	5,78	Dinas Pendidik an, Pemuda dan Olahrag a
					Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah (medali)	45,00		56,00		37,00		35		94,59		35,00		77, 78			
					Angka Putus Sekolah (%)	0,17		0,12		0,22		0,11		150,00		0,11		135 ,29			
					Program Layanan Pendidikan Khusus	Persentase Jumlah SLB dengan akreditasi A (%)	65,38	102.550. 043.500	87,32	23.475.5 15.534	46,15	26.562.7 53.680	87,32	3.747.7 73.760	189,21		87,32	23.475.5 15.534	133 ,56	22,89	Dinas Pendidik an, Pemuda dan Olahrag a
					Persentase Jumlah medali pada kompetisi nasional dan Internasional jenjang pendidikan khusus (%)	13,00		7,00		7,00		7		100,00		7,00		53, 85			
					Program Peningkatan	Angka Kelulusan	99,62		99,92		99,53		99,94		100,41	10,03	99,92		100 ,30	19,79	Dinas Pendidik

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%																		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																	
			Mutu Pendidikan		95.617.4 11.500		17.492.2 79.388		14.252.1 31.000		1.430.0 12.000				18.922.2 91.388			an, Pemuda dan Olahrag a																
			Jumlah medali lomba kompetisi nasional dan internasional (satuan medali)	65,00		49,00		52,00		49		94,23		49,00		75, 38																		
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		87,68		132.229. 328.000		96,65		37.783.8 51.666		87,46		52.417.7 10.400		10.813. 849.250		85,39		97,63		20,63		97,63		48.597.7 00.916		111 ,63		36,75	Dinas Pendidik an, Pemuda dan Olahrag a		
			Program Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		95,00		17.028.0 65.241		67,05		3.982.56 9.913		74,00		4.113.65 5.500		67,05		529.948 .000,00		67,05		90,61		12,88		67,05		4.512.51 7.913		26, 50		26,50	Dinas Pendidik an, Pemuda dan Olahrag a
			Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Pendidikan Teknik		2148,00		29.615.7 33.000		2401,0 0		7.151.23 7.739		2045,00		15.434.8 17.000		894.664 .003,00		288		14,08		5,80		288,00		8.045.90 1.742		27, 17		27,17	Dinas Pendidik an, Pemuda dan Olahrag a		
			Program Layanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		91,03		6.011.87 5.000		75,00		34.961.5 01.927		84,83		42.466.3 91.575		83,62		333494 5704		98,57		7,85		83,62		38.296.4 47.631		637 ,01		637,01	Dinas Pendidik an, Pemuda dan Olahrag a		

RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					Program Layanan Pendidikan Menengah Kab. Bantul	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kab. Bantul (%)	84,97	6.661.214.000	56,06	44.752.041.801	78,67	53.377.237.976	77,14	6.093.729.065	98,06	11,42	77,14	50.845.770.866	763,31	763,31	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
					Program Layanan Pendidikan Menengah Kab. Gunungkidul	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kab. Gunungkidul (%)	87,41	7.187.090.000	67,27	33.236.469.393	81,00	37.674.713.550	75,51	3.177.618.373	93,22	8,43	75,51	36.414.087.766	506,66	506,66	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
					Program Layanan Pendidikan Menengah Kab. Kulon Progo	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kab. Kulon Progo (%)	81,67	5.309.776.000	75,56	21.305.528.790	72,67	23.932.358.060	73,08	2.211.252.374	100,56	9,24	73,08	23.516.781.164	442,90	442,90	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
					Program Layanan Pendidikan Menengah Kab. Sleman	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kab. Sleman (%)	88,33	7.187.052.000	67,39	35.191.711.501	83,33	41.577.483.250	77,08	2.199.689.749	92,50	5,29	77,08	37.391.401.250	520,26	520,26	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	2				Kesehatan																
					Program Kesehatan Masyarakat	Persentase Balita Sehat (%)	41,22	14.418.205.000	40,28	2.712.660.668	39,48	4.280.023.650	6,67	1.116.565.840	16,89	26,09	40,28	3.829.226.508	97,72	26,56	Dinas Kesehatan
						Persentase Desa Sehat Mandiri (%)	58,21		43,46		52,83		63,5		120,20		43,46		74,66		
					Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian	62,84	15.581.850.000	54,77	2.204.129.760	56,33	3.157.298.600	0	393.253.604	0	12,46	54,77	2.597.383.364	87,16	16,67	Dinas Kesehatan

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Penyakit Menular dan Tidak menular (%)																
					Program Pelayanan Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan primer, kesehatan rujukan, dan Pelayanan Kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan (%)	54,85	613.142.637.000	39,27	2.716.871.198	41,08	3.704.917.200	40,4	408.060.468	98,34	11,01	39,27	3.124.931.666	71,60	0,51	Dinas Kesehatan
					Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Fasyankes kesehatan memenuhi standar sarpras perijinan SDMK dan Pembiayaan (%)	80,19	4.209.442.600	41,11	800.151.366	50,24	744.752.000	42,58	78.836.932	84,75	10,59	41,11	878.988.298	51,27	20,88	Dinas Kesehatan
						Persentase kefarmasian, perbekes dan makanan sesuai standar (%)	86,48		68,45		72,05		68,78		95,46		68,78		79,53		
					Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Balabkes	Jumlah layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program, rujukan dan kebutuhan masyarakat (layanan)	15,00	17.688.960.000	9,00	4.877.437.390	11,00	9.927.042.000	9	1.147.433.680	81,82	11,559	9,00	4.877.437.390	60,00	27,57	Dinas Kesehatan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Kesehatan pada BLUD Bapelkes	Persentase Mantan linatih yang meningkat kompetensinya (%)	68,00	20.215.954.000	83,33	7.224.607.402	62,00	25.861.562.000	0	1.040.910.883	0,00	4,025	83,33	7.224.607.402	122,54	35,74	Dinas Kesehatan
		Program Pelayanan Pada BLUD Bapel Jamkessos	Persentase penduduk miskin yang mendapatkan layanan jaminan kesehatan (%)	100,00	174.257.719.000	100,00	46.752.004.205	100,00	40.000.000.000	100,00	4.740.610.885	100,00	11,85	100,00	46.752.004.205	100,00	26,83	Dinas Kesehatan
			Jenis Layanan Jaminan Kesehatan Komplemen dan Suplemen Kesehatan	27,00		20,00		23,00		20		86,96		20,00		74,07		
		Program Pelayanan kesehatan pada BLUD RSJ Grhasia	Persentase pasien yang mampu ADL (activity daily living) (%)	90,00	104.824.381.000	91,46	22.177.953.657	87,00	25.710.777.000	87,00	3.803.842.322	100,00	14,79	91,46	25.981.795.979	101,62	24,79	RSJ GRHASIA
			Angka Pasien Cidera karena Fiksasi (%)	1,00		0,00		4,00		4,00		100,00		4,00		-200,00		
			Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi ≤ 30 menit (%)	90,00		81,97		84,00		84,00		100,00		84,00		93,33		
			Rata Rata Jam Pelatihan Karyawan per tahun (%)	80,00		102,00		72,00		72,00		100,00		72,00		90,00		
			Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan	75,00		42,00		66,00		66,00		100,00		66,00		88,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jiwa ≤ 60 menit (%)															
			Tingkat Penggunaan Tempat Tidur / Bed Occupancy Rate (BOR) (%)	65,00		49,29		60,00		60,00		100,00		60,00			92,31	
			Penyelesaian berkas pengajuan klaim pasien jaminan kesehatan (%)	80,00		77,00		77,00		77,00		100,00		77,00			96,25	
			Penyusunan laporan tahunan rumah sakit (%)	85,00		85,00		82,00		82,00		100,00		82,00			96,47	
			Pemenuhan sumber daya manusia sesuai analisis beban kerja (%)	90,00		80,30		87,00		87,00		100,00		87,00			96,67	
			Kesesuaian inventaris barang rumah sakit (%)	100,00		70,00		80,00		80,00		100,00		80,00			80,00	
		Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RS Paru Respira	Angka keberhasilan pengobatan (success rate) TB (%)	86,00	64.391.186.000	82,00	14.877.573.447	83,00	14.788.799.000	83,3	2.263.863.065	100,36	15,31	82,00	17.141.436.512	95,35	26,62	RS Paru Respira
			Angka kematian Pasien > 48 Jam (%)	1,00		0,70		2,00		2,28		114,00		0,70			130,00	
			Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari (orang)	80,00		76,00		80,00		96		120,00		76,00			95,00	
			Bed Occupancy Rate (BOR) (%)	60,00		36,04		60,00		56,55		94,25		36,04			60,07	

RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	
						Length of stay (LOS) (hari)	5,00		2,91		5,00		3,07		61,40		2,91		141,80			
3	3				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
					Program Pengelolaan Persampahan, Air Minum dan Air Limbah Regional	Peningkatan pengelolaan persampahan regional (ton/hari)	NA	24.420.975.000	569,00	9.566.108.840	NA	NA	NA	NA	NA	NA	569,00	9.566.108.840	NA	39,17		DPU ESDM
						ketersediaan air curah yang dikelola (SR)	NA		16750,00	3.587.675.825	NA	NA	NA	NA	NA	16750,00	3.587.675.825	NA	0,00		DPU ESDM	
						Layanan sistem air limbah yang terpusat yang dikelola (SR)	NA	6.214.811.000	23821,00	2.061.192.960	NA	NA	NA	NA	NA	23821,00	2.061.192.960	NA	33,17		DPU ESDM	
					Program Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Penyediaan air minum/air curah (L/detik)	NA	61.100.000.000	212,30	49.880.985.589	NA	NA	NA	NA	NA	212,30	49.880.985.589	NA	81,64		DPU ESDM	
						Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis (lokasi)	NA	17.000.000.000	5,00	15.866.847.250	NA	NA	NA	NA	5,00	15.866.847.250	NA	93,33		DPU ESDM		
						Peningkatan kinerjajapengembangan sistem air limbah terpusat (%)	NA	-	93,92	194.638.000	NA	NA	NA	NA	93,92	194.638.000	NA	0,00		DPU ESDM		
					Program Pengembangan Sarpras SDA dan Drainase	Peningkatan kondisi jaringan irigasi (%)	NA	15.878.450.000	16,09	843.121.400	NA	NA	NA	NA	16,09	843.121.400	NA	5,31		DPU ESDM		
						Penambahan kapasitas air baku (ltr/dtk)	NA	-	71,90	2.158.826.500	NA	NA	NA	NA	71,90	2.158.826.500	NA	0,00		DPU ESDM		
						Penanganan titik genangan (lokasi)	NA	6.650.000.000	2,00	5.436.520.500	NA	NA	NA	NA	2,00	5.436.520.500	NA	81,75		DPU ESDM		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Program Pengelolaan Sarpras SDA dan Drainase	Peningkatan sistem kinerja irigasi (%)	NA	23.661.500.000	66,50	15.326.179.841	NA	NA	NA	NA	NA	NA	66,50	15.326.179.841	NA	64,77	DPU ESDM
				Pemenuhan ketersediaan air baku (L/det)	NA	14.439.000.000	41,05	14.553.203.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	41,05	14.553.203.800	NA	100,79	DPU ESDM
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras Sanitasi	Penanganan sampah sistem regional (ton/hari)	780000,00	91.727.500.000	NA	NA	600,00	25.836.300.000	1.632.000	0	0	0,00	1.632.000	0,00	0,00	DPU ESDM	
				Penanganan lokasi genangan (lokasi)	6,00	50.288.000.000	NA	NA	1,00	10.835.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	DPU ESDM	
				Layanan sistem air limbah terpusat (SR)	27400,00	31.727.500.000	NA	NA	24100,00	6.836.300.000	23821	98,84	23821,00	86,94	0	86,94	0	DPU ESDM	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan air curah pada SPAM regional (L/det)	1150,00	264.700.000.000	NA	NA	450,00	62.700.000.000	212	662.000	47,11	0	212,00	662.000	18,43	0,00	DPU ESDM
				Panjang jaringan distribusi SPAM regional (m)	110074,00		NA	NA	81648,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	DPU ESDM
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Baku	Penyediaan air baku (L/det)	348,00	105.111.800.000	NA	NA	219,50	23.000.000.000	0	1.341.400.220	0,00	6	0,00	1.341.400.220	0,00	1,28	DPU ESDM
				Pengelolaan Air baku (L/det)	84,00	91.205.875.200	NA	NA	51,60	16.990.680.000	41,05		79,55	-	41,05	-	48,87	0,00	DPU ESDM
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi	Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY (%)	77,20	125.219.406.250	NA	NA	72,30	24.000.000.000	71,9	1.100.881.170	99,45	0,02	71,90	1.100.881.170	93,13	0,45	DPU ESDM

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Rerata hasil penilaian kinerja daerah irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY (%)	87,00	116.947.631.250	NA	NA	72,96	20.283.600.000	0		0,00		0,00		0,00		DPU ESDM	
				Program Penyelenggaraan Jalan	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	75,26	675.670.084.744	72,92	47.680.293.060	73,46	125.029.918.959	72,92	7.886.296.920	99,26	5,76	72,92	7.886.296.920	96,89	1,17	DPU ESDM	
					Penambahan jaringan jalan baru (%)	100,00	212.500.000.000	33,02	58.915.669.000	33,44	12.000.000.000	33,03		98,77	33,02		33,02			DPU ESDM	
				Program Pelayanan Jasa Pengujian dan Pembinaan Jasa Konstruksi	Peningkatan kinerja jasa konstruksi (%)	NA	27.666.495	63,26	3.676.955.424	NA	3.800.452.000	NA	206.359.000	NA	4	63,26	3.883.314.424	NA	35,38	DPU ESDM	
					Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi (%)	99,14	8.360.262.000			64,12	1.782.000.000	63,26		98,66	63,26		63,81			DPU ESDM	
					Peningkatan pelayanan jasa pengujian laboratorium (%)	NA	2.587.097.200			NA	NA	NA		NA	NA		NA			DPU ESDM	
					Sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan (LHU)	5544,00	18.916.233.823	2360,00		800,00	3.518.452.192	92		11,5	92,00		1,66			DPU ESDM	
				Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pengaturan dan	N/A	3.100.000.000	63,77	317.356.856	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	63,77	317.356.856	N/A	10,24	Dinas PTR	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					pembinaan Tata Ruang (%)																
					Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan tata ruang	98,99	2.700.000.000	N/A	NA	57,06	890.900.250	47,71	109.570.360	83,61	12	47,71	109.570.360	48,20	4,06		
				Program Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pelaksanaan dan pengawasan Tata Ruang (%)	N/A	N/A	27,85	279.129.732	NA	N/A	NA	N/A	NA	N/A	27,85	279.129.732	N/A	N/A	Dinas PTR	
					Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pelaksanaan dan pengawasan tata ruang	89,98	7.380.000.000	N/A	NA	75,17	1.949.739.500	64,14	133.171.600	85,33	7	64,14	133.171.600	71,28	1,80		
4		4		Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman																	
				Program pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Pengurangan RTLH (%)	NA	64.353.632.000	14,73	29.103.238.541	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14,73	29.103.238.541	NA	45,22	DPU ESDM	
					Penyediaan kawasan pengembangan perumahan(%)	NA	800.000.000	22,22	1.193.455.090	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22,22	1.193.455.090	NA	149,18	DPU ESDM	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penganggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Kawasan Kumuh	Penanganan Kawasan kumuh (%)	NA	35.553.632.000	46,13	27.493.705.345	NA	NA	NA	NA	NA	NA	46,13	27.493.705.345	NA	77,33	DPU ESDM
						Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman (%)	NA	16.000.000.000	20,00	17.882.356.700	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20,00	17.882.356.700	NA	111,76	DPU ESDM
					Program penyelenggaraan perumahan	Penanganan RTLH (%)	53,78	298.229.500.000	NA	NA	21,75	62.517.015.000	11,78	222.971.150	54	0	11,78	222.971.150	21,90	0,05	
						Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW (%)	20,00	127.627.500.000	NA	NA	8,00		5,46		68		5,46		27,30		
						Cakupan penanganan kawasan kumuh 9%)	100,00	-	NA	NA	58,22		46,13		79		46,13		46,13		
					Program Penyelenggara Prasarana Sarana Utilitas Kawasan	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman (titik)	212,00	79.500.000.000	NA	NA	48,00	46.300.000.000	0	5.177.865.414	-	11	0,00	5.177.865.414	0,00	3,49	
						Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis (titik)	128,00	69.000.000.000	NA	NA	32,00		-		0,00		0,00				
5	5				Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																
					Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Peningkatan Desa/KelurahanTanggubencana di Kawasan	301,00	14.327.854.520	25,00	5.048.160.038	25,00	5.141.583.000	4	1.184.383.400	16	23,04	29,00	6.232.543.438	9,63	43,50	BPBD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Rawan Bencana (desa)															
			Peningkatan Sekolah Aman (SSB) di Kawasan Rawan Bencana (sekolah)	181,00		13,00		25,00			0		13,00		7,18			
			Program Pengelolaan kedaruratan dan logistik bencana	10,00	30.038.0 25.190	20,00	9.236.52 0.250	16,00	8.107.42 4.470	20	1.899.1 39.250	125,00	23,42	20,00	10.006.5 63.720	50,00	33,31	BPBD
			Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	85,00	13.585.0 50.273	66,01	4.262.21 1.630	70,00	70.655.7 71.800	65	468.513 .564	92,86	0,66	65,00	71.124.2 85.364	76,47	523,55	BPBD
			Program Pembinaan Ideologi Dan Kewaspadaan Nasional	2,92	15.164.1 74.165	2,96	4.077.01 9.850	2,88	3.345.97 7.000	2,94	634.538 .200	102,08	18,96	2,94	3.980.51 5.200	100,68	26,25	Bakesbangpol
			Program Pendidikan Politik Masyarakat	3,36	16.771.9 11.057	3,45	304.147. 650	3,33	1.035.86 0.800	3,45	274.551 .300	103,60	26,50	3,45	1.310.41 2.100	102,68	7,81	Bakesbangpol
			Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi	2,90	1.437.66 5.000	NA	NA	2,87	853.026. 000	2,97	139.111 .790	103,48	16,31	2,97	992.137. 790			Bakesbangpol
			Program Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	75,00	6.374.06 6.000	36,59	1.612.25 1.500	40,00	1.180.14 7.500	0	310.967 .116	0,00	26,35	36,59	1.491.11 4.616	48,79	23,39	Satpol PP

RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1					Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Persentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif (%)	55,00	12.253.219.800	27,17	4.553.806.904	25,00	3.985.288.000	0	1.028.730.031	0,00	25,81	27,17	5.014.018.031	49,40	40,92	Satpol PP
					Program Pembinaan Pelaksanaan Dan Penegakan Perda Dan Perkada	Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang tertangani (%)	80,00	2.975.391.255	66,07	856.039.000	70,00	2.293.689.000	0	546.741.500	0,00	23,84	66,07	2.840.430.500	82,59	95,46	Satpol PP
6	6				Sosial	Prosentase Anak Balita Terlantar, Anak yang Berhadapan Hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitan, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Orang Dengan HIV AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh bimbingan keterampilan, mandiri dan mampu	6,70	17.852.212.525	8,65	3.936.441.118	5,49	4.879.608.200	1,78	867.380.110	32,42	17,78	8,65	4.803.821.228	129,10	26,91	Dinas Sosial

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat (%)																
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)	50,85	11.157.545.500	50,65	1.808.315.450	67,57	1.604.056.000	0	221.209.920	0,00	13,79	50,65	2.029.525.370	99,61	18,19	Dinas Sosial
					Persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga meningkat ekonominya (%)	NA	NA	0,23		NA	NA	NA		NA		0,23		NA			
					Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga pendapatannya meningkat (%)	1,01	16.372.612.000	NA	NA	1,01	4.514.097.000	0	1.030.638.250	0,00	22,83	0,00	1.030.638.250	0,00	6,29	Dinas Sosial
					Program Perlindungan dan Rehabilitasi	Persentase warga binaan yang terpenuhi dan terlindungi hak-haknya,	27,65	6.897.466.177	NA	NA	25,29	1.237.519.000	8,82	411.079.000	34,88	33	8,82	411.079.000	31,90	5,96	Dinas Sosial

RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Penyanggah Disabilitas	mampu hidup mandiri dan berfungsi sosial (%)															
					Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan Penyandang Masalah Sosial	persentase warga binaan yang memiliki kapasitas untuk mandiri dan berfungsi sosial (%)	48,33	3.748.589.269	NA	NA	43,33	1.480.640.000	0	298.163.610	0,00	20	0,00	298.163.610	0,00	7,95	Dinas Sosial
					Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik	persentase warga binaan yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga/masyarakat (%)	14,80	3.203.392.111	NA	NA	14,20	2.005.826.200	0	419.227.152	0,00	21	0,00	419.227.152	0,00	13,09	Dinas Sosial
					Program Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja Penyandang Masalah Sosial	Persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga (%)	85,00	3.206.432.081	NA	NA	77,50	727.655.800	15	333.320.500	19,35	46	15,00	333.320.500	17,65	10,40	Dinas Sosial
					Program Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Penyandang Masalah Sosial	Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial dalam	47,33	4.935.484.106	NA	NA	27,20	1.095.959.000	0	441.026.900	0,00	40	0,00	441.026.900	0,00	8,94	Dinas Sosial

No	Kode				Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						pengasuhan keluarga (%)															
						Program Perlindungan Lanjut Usia Terlantar	100,00	2.852.991.662	NA	NA	100,00	613.627.000	107,48	150.388.150	107,48	25	100,00	150.388.150	100,00	5,27	Dinas Sosial
						Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan	51,60	20.163.021.500	51,64	5.850.498.815	51,57	5.118.890.000	30,63	941.881.000	59,394.99709	18	30,63	6.792.379.815	59,36	33,69	Dinas Sosial
7		7				Ketengakerjaan															
						Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1688,00	2.724.586.800	1288,00	636.510.805	1388,00	812.136.000	1313	128.125.000	94,60	15,78	2601,00	764.635.805	154,09	28,06	Disnakertrans
						Program Pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan	64,00	2.130.749.000	62,99	466.401.775	61,00	748.410.000	62,99	171.725.000	103,26	22,95	62,99	638.126.775	98,42	29,95	Disnakertrans

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pengujian lingkungan kerja dan kesehatan kerja	Jumlah perusahaan besar dan menengah yang mempunyai kondisi lingkungan kerja dan kesehatan kerja sesuai standar (perusahaan)	533,00	3.122.356.000	376,00	741.297.300	398,00	909.840.000	376	403.045.400	94,47	44,30	376,00	1.144.342.700	70,54	36,65	Disnakertrans
					Program Pembinaan pelatihan standarisasi dan pemagangan	Jumlah tenaga kerja yang lulus sertifikasi dan pemagangan (orang)	2000,00	5.491.977.000	484,00	1.521.648.550	375,00	1.782.605.000	103	370.941.950	27,47	20,81	587,00	1.521.648.550	29,35	27,71	Disnakertrans
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi (lembaga)	90,00		72,00		77,00		72		93,51		72,00		80,00		
					Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil (%)	9,52	25.176.543.000	1,90	5.726.544.955	3,81	1.155.421.000	2,21	132.496.300	58,01	11,47	1,90	5.726.544.955	19,96	22,75	
8		8			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
					Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	70,00	1.430.583.000	71,42	1.277.847.025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	71,42	1.277.847.025	102,03	89,32	BPPM

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	85,00	4.591.206.000	NA	NA	73,00	872.650.950	75,78	72.643.225	103,81	8,32	75,78	72.643.225	89,15	1,58	DPPPA& DALDUK
					Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Prosentase Perempuan pengambil keputusan di ranah publik (%)	34,25	920.631.000	35,08	1.854.208.950	NA	NA	NA	NA	NA	NA	35,08	1.854.208.950	102,42	201,41	BPPM
					Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Prosentase Perempuan pengambil keputusan di ranah publik (%)	34,45	5.685.871.000	NA	NA	34,34	3.642.557.250	0	1.239.296.150	0	34	34,34	1.239.296.150	99,68	21,80	DPPPA& DALDUK
9		9			Pangan																
					Program Peningkatan Akses dan Ketersediaan Pangan	Cadangan Pangan (ton)	537,00	1.368.175.000	672,63	1.281.266.542	NA	NA	NA	NA	NA	NA	672,63	1.281.266.542	125,26	93,65	BKPP
					Program Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Konsumsi umbi meningkat (gr/kapita/tahun)	32,00	250.000.000	48,00	832.209.371	NA	NA	NA	NA	NA	NA	48,00	832.209.371	150,00	332,88	BKPP
						Konsumsi Sayur Meningkat (gr/kapita/tahun)	234,00		228,00		NA	NA	NA	NA	NA	NA	228,00		97,44		
					Program Peningkatan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan	Presentase peningkatan dan konsumsi energi (%)	0,40	9.200.000.000	NA	NA	0,08	2.136.336.100	0	617.425.500	0	28,90	0,00	617.425.500	0,00	6,71	DPKP

RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	Jumlah desa rawan pangan (desa)	0,00	4.700.000.000	NA	NA	6,00	525.000.000	7	64.864.500	116,67	12,36	7,00	64.864.500		1,38	DPKP
10		10			Pertanahan																
					Program tertib adm inistrasi pertanahan	Layanan adm pertanahan sesuai peraturan perundangan (%)	100,00	2.700.000.000	100,00	153.693.500	100,00	250.000.000	25	47.423.000	25	19	25,00	201.116.500	7,45	7,45	Dinas PTR
11		11			Lingkungan Hidup																
					Pogram pengkajian dan Penataan Lingkungan Hidup	Tingkat ketaatan usaha/Kegiatan dengan ijin lingkungan daNatau rekomendasi kelayakan lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY (%)	NA	1.979.332.000	41,25	1.918.607.575	NA	NA	NA	NA	NA	NA	41,25	1.918.607.575	NA	96,93	BLH
					Pelayanan Dokumen Lingkungan Usaha/Kegiatan dan Validasi KLHS Untuk KRP Kab/Kota (%)		100,00		0,00	100,00		NA		NA		0,00		0,00			BLH
					Program Pengkajian dan Penataan Lingkungan Hidup	Tingkat ketaatan usaha/Kegiatan dengan ijin lingkungan daNatau	56,25	11.000.000.000	NA	NA	45,00	1.904.284.350	5	173.623.300	11,11	9,12	5,00	173.623.300	8,89	1,58	DLHK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			rekomendasi kelayakan lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY (%)																
			Pelayanan Dokumen Lingkungan Usaha/Kegiatan dan Validasi KLHS Untuk KRP Kab/Kota (%)	100,00		NA		100,00		10		10,00		10,00		10,00		10,00	
			Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	7	NA	2.350.000.000	Kadar parameter tercemar air (TSS, BOD, COD, Fosfat, DO, Coli, Tinja, Total Koli) dan dua kadar parameter pencemaran udara SO2 dan NO2	2.777.031.996	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7	2.777.031.996	NA	1,18	BLH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Total Koli=9497.67 MPN/100ml) dan Kadar 2 parameter pencemar udara SO2=8.72 µg/Nm3; dan NO2=14.06 µg/Nm3)									er pencemar udara SO2=8.72 µg/Nm3; dan NO2=14.06 µg/Nm3)			
		Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Jumlah Sumber Pencemar Air Sungai (point source) yang ditangani di 10 sungai (usaha/kegiatan)	237,00	14.700.000.000	NA	NA	192,00	2.248.855.600	0	207.449.100	0	9,22	0,00	207.449.100	0,00	1,41	DLHK
			Jumlah Sumber Pencemaran Air Sungai (non point source) yang ditangani di 10 sungai (lokasi)	120,00		NA		72,00		0		0		0,00		0,00		
			Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang	80,00		NA		65,00		0		0		0,00		0,00		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1						ditangani di 5 kab/kota (usaha/kegiatan)															
					Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (penghargaan)	NA	1.870.668.000	7,00	3.919.580.404	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7,00	3.919.580.404	NA	2,10	BLH
					Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (penghargaan)	3,00	10.650.000.000	NA	NA	3,00	2.554.440.870	0	129.066.500	0	5,05	0,00	129.066.500	0,00	1,21	DLHK
					Program Peningkatan Tutupan Hutan dan Vegetasi	Persentase tutupan lahan (%)	NA	725.000.000	60,86	4.848.586.832	NA	NA	NA	NA	NA	NA	60,86	4.848.586.832	NA	668,77	DLHK
					Program Pengelolaan Tutupan Vegetasi dan Konservasi Sumberdaya Alam	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	175,00	24.248.033.709	NA	4.968.006.210	160,00	14.592.323.400	0	72.800.800	0	0,50	0,00	5.040.807.010	0,00	20,79	DLHK
					Program Pengelolaan Tutupan Vegetasi dan Konservasi Sumberdaya Alam	Persentase penurunan kerusakan hutan (%)	0,50		NA		0,10		0		0		0,00		0,00		
					Pengelolaan Persampahan Regional	Pengelolaan sampah di TPA Piyungan (ton/hari)	780,00	42.000.000.000	NA	NA	600,00	8.740.000.000	600	646.837.500	100	7,40	600,00	646.837.500	76,92	1,54	DLHK
12					Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil																

RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penganggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian) (%)	87,97	3.525.450.000	93,23	2.156.612.123	82,67	2.391.319.680	88,92	325.830.916	107,56	14	93,23	2.482.443.039	105,98	70,41	Biro Tata Pemerintahan
13	13				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
					Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan (Lembaga)	4,00	2.997.371.000	4,00	1.703.151.990	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,00	1.703.151.990	100,00	56,82	BPPM
					Program Keberdayaan Masyarakat	Desa/kelurahan model gerakan gotong-royong (jumlah)	8,00	900.000.000	8,00	703.543.400	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8,00	703.543.400	100,00	78,17	BPPM
14	14				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
					Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Rata-rata jumlah anak per keluarga (jumlah)	1,17	250.210.000	1,05	237.922.200	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,05	237.922.200	89,74	95,09	BPPM
					Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Rata-rata jumlah anak per keluarga (jumlah)	1,17	808.386.000	NA	NA	1,17	768.573.500	1,13	88.012.000	103,4188034	11,45	1,13	88.012.000	103,42	10,89	DPPPA & DALDUK
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	0,00	251.486.000	0,00	1.157.645.300	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,00	1.157.645.300	100,00	460,32	BPPM

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	0,00	3.820.420.000	0,00	1.157.645.300	0,00	1.789.372.000	0,0013	793.239.000	100	44	0,00	1.950.884.300	123,08	51,06	DPPPA & DALDUK
15		15			Perhubungan																
					Program Pengembangan keselamatan transportasi	Penurunan rasio jumlah kecelakaan	N/A	39.746.444.075	0,15	7.554.207.106	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,15	7.554.207.106	N/A	19,01	Dishub
						Penurunan rasio jumlah kecelakaan	0,90	35.525.000.000	0,15	7.554.207.106	0,96	13.976.393.780		216.261.740	0	2	0,15	7.770.468.846	16,67	21,87	
					Program peningkatan pelayanan angkutan	Peningkatan penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	N/A	132.949.011.350	76,76	2.646.069.099	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	76,76	2.646.069.099	N/A	1,99	Dishub
						Peningkatan tertib perijinan angkutan tidak dalam trayek	N/A		71,00	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	71,00			NA	Dishub	
						Penyiapan penyediaan sarpras angkutan perkeretaapian	N/A		30,00	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30,00			N/A	Dishub	
						Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek (%)	82,41	134.200.000.000	76,76	2.646.069.099	72,24	6.651.026.510	70,76	297.023.093	97,95	4,47	70,76	2.943.092.192	85,86	2,19	Dishub
						Peningkatan tertib perijinan angkutan tidak dalam trayek (%)	100,00		71,00	76,00		68		89,47		68,00			68,00		
						Penyiapan penyediaan	70,00		40,00			30		#DIV/0!		30,00			42,86		

RKPD DIY 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			sarpras angkutan perkeretaapian (%)																
			Program pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Penerapan manajemen Rekayasa Lalu lintas pada kawasan prioritas	41,00	1.124.500.000	41,00	4.614.985.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	41,00	4.614.985.000	100,00	410,40	Dishub
				Peningkatan pengendalian sistem simpang bersinyal di perkotaan Yk	62,71		62,71		NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	62,71		100,00		Dishub
				Penerapan manajemen Rekayasa Lalu lintas	67,00	22.700.000.000	NA	NA	48,00	3.575.620.000	41	49.437.000	85,42	1,38	41,00	49.437.000	61,19	0,22	Dishub
				Pengendalian sistem simpang bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	80,00		NA	NA	60,00		53		88,33		53,00		66,25		Dishub
			Program pengembangan dan pengelolaan Simpul Transportasi	Penumpang yang terlayani Angkutan Umum (orang/hari)	N/A	1.673.816.000	8119,00	1.498.531.380	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8119,00	1.498.531.380	N/A	89,53	Dishub
			Program pengembangan dan pengelolaan Simpul Transportasi dan perkakiran	Penumpang yang terlayani pada simpul transportasi dan perkakiran (orang/hari)	4700,00	8.900.000.000	N/A	N/A	4550,00	-	7395	92.946.000	162,5274725	#REF!	7395,00	#REF!	157,34	#REF!	Dishub
				Kendaraan yang terlayani pada tempat khusus parkir	830,00		N/A	N/A	69,00		0		0		0,00		0,00		Dishub

No	Kode			Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16	16			Komunikasi dan Informatika																
				Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani (%)	80,00	11.035.916.171	45,66	3.108.307.733	65,00	3.595.694.800	57,14	543.299.050	87,908	15,110	57,14	3.651.606.783	71,43	33,09	Dinas Kominfo
				Program Pengembangan Aplikasi Informatika dan Persandian	Persentase Urusan yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	62,50	9.088.119.400	12,50	2.411.896.302	25,00	4.428.851.720	12,5	382.546.786	50	9	25,00	2.794.443.088	40,00	30,75	Dinas Kominfo
				Program Layanan Teknologi Informasi	Persentase Jaringan Infrastruktur dalam Lingkup Pemda DIY yang Terintegrasi dalam Layanan TIK (%)	90,50	45.235.414.180	52,42	7.148.760.654	76,50	7.353.532.000	52,42	656.097.000	68,52	8,92	52,42	7.804.857.654	57,92	17,25	Dinas Kominfo
17	17			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																
				Pengembangan UKM	Nilai omzet UKM Tahun n (Rp Ribu)	96,49	8.355.000.000	80414,00	3.383.113.300	83,35	4.433.099.940	80483	400.924.200	96561,45	9,04	80483,00	3.784.037.500	834,13	0,45	Dinas Koperasi
				Program Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru	Jumlah Wirausaha Baru	1295,00	6.550.000.000	NA	NA	749,00	1.337.438.760	555	455.353.000	74,10	34,05	555,00	455.353.000	0,43	0,07	Dinas Koperasi

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pengembangan Perkoperasian	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n (Rp Juta)	2066336,00	6.000.000.000	NA	NA	2036097,00	3.378.864.660	2335312	442.588.000	114,6955179	13,10	2335312,00	442.588.000	113,02	7,38	Dinas Koperasi
					Penguatan SDM dan Kelembagaan Koperasi	nilai omzet koperasi produksi tahun n (RpRibu)	NA	550.000.000	2473645,00	2.360.347.504	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2473645,00	2.360.347.504	NA	4,29	Dinas Koperasi
					Peningkatan Akses Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan yang diperoleh koperasi dan UKM tahun n (Rp)	24136286250,00	14.050.000.000	NA	NA	15870000000,00	428.979.440	1,2645E+10	23.127.000	79,68	5,39	12645000000,00	23.127.000	52,39	0,16	Dinas Koperasi
					Peningkatan Akses Pembiayaan	Rasio Omzet Koperasi dan UKM terhadap Jumlah Pembiayaan (%)	18,82	200.000.000	19,53	275.879.500	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19,53	275.879.500	103,77	100,00	Dinas Koperasi
					Pengawasan Koperasi dan UKM	Persentase Jumlah Koperasi Sehat dan UKM yang Memiliki Ijin Formal (%)	22,16	250.000.000	22,16	240.873.100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22,16	240.873.100	100,00	100,00	Dinas Koperasi
18	18				Penanaman Modal																
					Program Promosi Investasi	Nilai Rencana Investasi yang Tercatat dalam Ijin Prinsip (Rp Juta)	1790824,00	5.850.000.000	NA	NA	863630,00	1.588.527.420	1947611,1	366.814.026	225,5145259	42473,51597	1947611,10	366.814.026	108,76	6,27	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
					Program Promosi Investasi	Nilai Rencana Investasi yang Tercatat dalam Ijin Prinsip (Rp Juta)	719692,00	750.000.000	1947611,10	734.174.693	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1947611,10	734.174.693	2,71	0,98	BKPM

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Peningkatan Iklim Investasi	nilai realisasinvestasi PMA & PMDN (Rp Juta)	918963,00	4.954.000.000	NA	NA	941819,00	1.216.240.220	7221697	105.838.263	766,78	8,70	7221697,00	105.838.263	785,85	2,14	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
					Program Perencanaan dan Peningkatan Iklim Investasi	nilai realisasinvestasi PMA & PMDN (RpJuta)	758857,00	877.843.000	6652446,00	1.013.693.946	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6652446,00	1.013.693.946	8,77	1,15	BKPM
					Program Pengawasan dan Pengendalian Investasi	Persentase permasalahan investasi yang diselesaikan	55,00	1.000.000.000	77,41	92.380.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	77,41	92.380.000	1,41	0,09	BKPM
					Pelayanan Perijinan	Presentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP (100%)	100,00	8.650.000.000	NA	NA	95,00	1.532.837.700	104,52	255.910.155	110,02	16,70	104,52	255.910.155	104,52	2,96	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
					Program Pelayanan Perijinan	Presentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP (%)	94,00	2.725.000.000	141,00	2.096.468.450	NA	NA	NA	NA	NA	NA	141,00	2.096.468.450	150,00	76,93	Kantor PPTSP
					Program Kemudahan berusaha dan Pelayanan Pengaduan	Waktu Penyelesaian Izin Usaha	1,00	9.300.000.000	NA	NA	5,00	984.875.000	15	193.730.364	-	100,00	15,00	193.730.364	-	130,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
					19	Kepemudaan dan Olahraga															

RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pembinaan Kepemudaan	persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan (%)	30,00	29.791.565.000	NA	NA	24,00	9.124.426.000		982.757.000	0	11	0,00	982.757.000	0,00	3,30	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
						Sentra pemuda yang mendapatkan pembinaan (sentra)	NA	NA	4,00	10.075.143.762	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,00	10.075.143.762	NA	NA	
					Program Pembinaan Olahraga	Jumlah medali dalam kompetisi POPWIL (medali)	7,00	203.273.672.000	20,00	39.913.648.794	5,00	11.634.760.000	20	161.049.350	400	1	20,00	40.074.698.144	285,71	19,71	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
						Jumlah medali dalam kompetisi POPNAS dan PEPARPENAS (medali)	13,00		NA		12,00		0		0		0,00				
20		20			Statistik																
					Program Pengembangan statistik daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah	100,00	7.703.131.293	100,00	380.228.113	100,00	2.117.234.500		28.002.700	0	1,32	100,00	408.230.813	100,00	5,30	BAPPEDA (BSD)
						Tingkat kepuasan pelanggan	72,00		68,00		69,00		76,73		111,2028986		76,73		106,57		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2		3				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
21					Persandian																
					Program Peningkatan Layanan Informasi dan Persandian	Kecepatan Informasi sandi kepada pimpinan dan informasi persuratan di lingkungan Pemda DIY	100,00	2.463.365.000	100,00	456.606.150	100,00	4.428.851.720		382.546.786	0	9	100,00	839.152.936	100,00	34,07	Dinas Kominfo
					Program Peningkatan Layanan Informasi Dan Persandian	Kecepatan Informasi sandi kepada pimpinan dan informasi persuratan di lingkungan Pemda DIY	100,00	707.679.500	100,00	456.606.150	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,00	456.606.150	100,00	64,52	Biro Umum dan Protokol
					Kebudayaan																
					Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100,00	22.310.873.000	100,00	1.739.133.992	100,00	2.090.957.445		250.905.305	0	12,00	0,00	1.990.039.297	0,00	8,92	Dinas Kebudayaan
					Program Peningkatan Saranaa dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00	4.232.594.000	100,00	611.439.055	100,00	658.663.500		62.003.362	0	9,41	0,00	673.442.417	0,00	15,91	Dinas Kebudayaan
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	1.746.713.000	100,00	254.149.210	100,00	260.699.500		14.608.500	0	5,60	0,00	268.757.710	0,00	15,39	Dinas Kebudayaan

RKPD DIY 2020

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penganggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
2	2	3		Perpustakaan																
				Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang terstandar	69 unit	6.162.28 6.582	29,00	2.211.42 9.975	39,00	2.477.06 2.000	29	965.953 .750	74,36	39,00	29,00	3.177.38 3.725	42, 03	51,56	DPAD
				Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi	Penambahan jumlah koleksi dan pengembangan informasi perpustakaan (exp)	50870,0 0	10.228.2 18.343	10174, 00	2.261.74 7.850	10174,00	2.625.00 0.000	400	49.556. 100	3,93	1,89	10174,0 0	2.311.30 3.950	20, 00	22,60	DPAD
				Program Layanan Perpustakaan	Jumlah anggota baru Perpustakaan (orang)	30000,0 0	20.084.5 37.428	7021,0 0	4.450.43 7.355	6000,00	4.112.35 3.000	1500	608.480 .310	25,00	14,80	7021,00	5.058.91 7.665	23, 40	25,19	DPAD
					Meningkatnya kualitas layanan JLA (perpus)	8,00		4,00		5,00		4		80,00		4,00		50, 00		
2	2	4		Kearsipan																
				Program Perlindungan dan Konservasi Arsip	Jumlah Arsip yang sudah diolah dan dilestarikan (berkas)	4000,00	987.354. 000	4000,0 0	945.595. 550	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4000,00	945.595. 550	100 ,00	95,77	DPAD
				Program Pelestarian dan Layanan Arsip	Jumlah Arsip yang sudah diolah dan dilestarikan (berkas)	32000,0 0	3.479.97 4.496	NA	NA	8000,00	849.940. 000	400	86.426. 900	5,00	10,17	400,00	86.426.9 00			DPAD
				Program Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan	Peningkatan jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan arsip sesuai	130,00	3.696.47 9.908	50,00	1.054.22 2.800	70,00	713.976. 000	50	91.584. 500	71,43	12,83	50,00	1.145.80 7.300	38, 46	31,00	DPAD

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					standar (OPD/UPTD)																
					Urusan Pemerintah Pilihan																
1	1				Kelautan dan Perikanan																
					Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	produksi perikanan budidaya (ton)	89700,00	13.850.000.000	89521,00	2.321.489.700	89400	3.887.016.000	28137	1.147.109.760	31,47	29,51	28137,00	3.468.599.460	31,37	25,04	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	produksi perikanan tangkap (ton)	7063,00	13.260.700.000	5932,00	1.030.480.720	6199,00	1.718.546.500	1312	220.993.000	31,47	12,86	5932,00	1.251.473.720	83,99	9,44	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	produksi produk perikanan olahan (ton)	8201,00	886.800.000	8242,00	2.568.340.184	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8242,00	2.568.340.184	100,50	289,62	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) Produksi	26,05	8.700.000.000	NA	NA	24,55	4.539.056.600	0	867.675.250	0	19,12	0,00	867.675.250	0,00	9,97	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	Produksi benih ikan yang bersertifikat (juta ekor)	31,30	2.650.000.000	31,46	2.644.679.300	NA	NA	NA	NA	NA	NA	31,46	2.644.679.300	99,80	1,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pengembangan perbenihan perikanan budidaya	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	90,00	14.300.000.000	NA	NA	84,00	3.562.333.897	0	693.110.840	0	19	0,00	693.110.840	0,00	4,85	Dinas Kelautan dan Perikanan

RKPD DIY 2020

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penganggung Jawab
						5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1				Konservasi Ekosistem dan Pengawasan	Persentase kawasan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan(%)	70,00	7.250.000.000	14,00	1.166.890.300	14,00	949.792.500	0	159.399.600	0	16,78	14,00	1.326.289.900	20,00	18,29	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan(%)	50,00		10,00		10,00		0		0		10,00		20,00		
				Pengelolaan Pelabuhan	Nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan/tempat pelelangan ikan (milyar rupiah)	36,73	2.950.000.000	56,79	147.018.700	33,31	178.000.000	24,3	31.922.877	72,951.06575	18	56,79	178.941.577	154,61	6,07	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	2			Pariwisata																
				Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	8377099,00	16.350.000.000	5405594,00	3.313.587.084	5926228,00	3.943.684.200	1190000	432.917.500	20,08	10,98	1190000,00	3.746.504.584	14,21	22,91	Dinas Pariwisata
				Pengembangan Industri Pariwisata	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	250,00	4.620.000.000	75,00	719.788.500	100,00	667.550.000	0	136.229.000	0,00	20,41	0,00	856.017.500	0,00	18,53	Dinas Pariwisata
				Peningkatan SDM dan Kelembagaan Pariwisata	Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata	23,04	10.200.000.000	13,69	3.079.984.675	17,00	3.135.510.000	8	450.635.000	47,06	14,37	8,00	3.530.619.675	34,72	34,61	Dinas Pariwisata
				Pengembangan Destinasi Pariwisata	LOS wisatawan mancanegara dan	2,45	77.000.000.000	2,05	22.636.953.450	2,14	22.347.928.760	1,5	589.826.001	70,09	2,64	1,50	23.226.779.451	61,22	30,16	Dinas Pariwisata

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					nusantara tahun n																
3		3			Pertanian																
					Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi tanaman pangan (ton)	2209769,00	50.853.760.800	2210046,00	45.152.087.122	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2210046,00	45.152.087.122	100,01	88,79	Dinas Pertanian
					Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi tanaman pangan (ton)	2313500,00	26.932.000.000	NA	NA	2312780,00	6.444.553.860	712831	196.620.000	30,82	3,05	712831,00	196.620.000	30,81	0,73	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Peningkatan Produksi Hortikultura	Produksi hortikultura (ton)	396375,00	2.885.902.200	396406,00	2.866.875.860	NA	NA	NA	NA	NA	NA	396406,00	2.866.875.860	100,01	99,34	Dinas Pertanian
					Peningkatan Produksi Hortikultura	Produksi hortikultura (ton)	402750,00	12.692.000.000	NA	NA	397965,00	1.786.193.000	112000	167.494.838	28,14	9,38	112000,00	167.494.838	27,81	1,32	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Peningkatan Populasi Peternakan	Populasi ternak (Animal Unit)	620869,00	450.000.000	620881,00	739.297.125	NA	NA	NA	NA	NA	NA	620881,00	739.297.125	100,00	5,82	Dinas Pertanian
					Peningkatan Populasi Peternakan	Populasi ternak (Animal Unit)	628870,00	13.600.000.000	NA	NA	622842,00	3.177.479.000	580190	105.338.750	93,15	3,32	580190,00	105.338.750	92,26	0,77	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi perkebunan (ton)	68740,00	2.605.490.000	66507,50	2.478.159.390	NA	NA	NA	NA	NA	NA	66507,50	2.478.159.390	96,75	95,11	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
					Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi perkebunan (ton)	69290,00	9.713.000.000	NA	NA	68877,00	1.584.262.000	10750	323.505.441	15,61	20,42	10750,00	323.505.441	15,51	3,33	Dinas Pertanian dan Ketahanan

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penganggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Pengembangan SDM pertanian dan penyuluhan	Jumlah Peserta Pelatihan SDM Pertanian (orang)		450.000.000	300,00	438.332.200	NA	NA	NA	NA	NA	NA	300,00	438.332.200	NA	97,41	Dinas Pertanian
					Pengembangan SDM pertanian dan penyuluhan	Tingkat pengetahuan dan ketrampilan sdm pertanian (%)	76,00	4.400.000.000	NA	NA	73,00	728.010.520	5,5	170.945.450	7,534246575	23	5,50	170.945.450	7,24	3,89	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Pengembangan Perbenihan	Jumlah perbanyakan benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersertifikat (benih)	81440,00	1.421.000.000	124417,60	1.343.131.627	NA	NA	NA	NA	NA	NA	124417,60	1.343.131.627	152,77	94,52	Dinas Pertanian
					Pengembangan perbenihan Pertanian	Persentase benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi(%)	91,00	7.694.000.000	NA	NA	85,00	1.997.869.274	30,68	547.349.095	36,09411765	27	30,68	547.349.095	33,71	7,11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Jumlah sertifikasi benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (hektar)	500,00	200.000.000	502,44	170.818.252	NA	NA	NA	NA	NA	NA	502,44	170.818.252	100,49	85,41	Dinas Pertanian
					Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian	Jumlah sertifikasi benih Tanaman Pangan,	900,00	2.150.000.000	NA	NA	600,00	393.648.540	427	37.366.500	71,1666667	9	427,00	37.366.500	47,44	1,74	Dinas Pertanian dan Ketahan

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Hortikultura, dan Perkebunan (hektar)															an Pangan	
					Perlindungan Tanaman Pertanian	95,00	265.000.000	99,91	264.604.700	NA	NA	NA	NA	NA	NA	99,91	264.604.700	105,17	99,85	Dinas Pertanian	
					Perlindungan Tanaman Pertanian	95,00	2.070.000.000	NA	NA	95,00	477.884.580	45,89	58.537.500	48,305.26316	12	45,89	58.537.500	48,31	2,83	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
					Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan	50,00	3.776.455.000	52,00	3.882.084.447	NA	NA	NA	NA	NA	NA	52,00	3.882.084.447	104,00	102,80	Dinas Pertanian	
					Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan	98,00	18.900.000.000	NA	NA	92,00	4.237.173.060	18,75	685.946.000	20,380.43478	16	18,75	685.946.000	19,13	3,63	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
4	4				Kehutanan																
					Perencanaan dan Bina Usaha Kehutanan	92,32	4.165.000.000	NA	NA	87,40	751.573.000	0	46.742.500	0	6,22	0,00	46.742.500	0,00	1,12	DLHK	
					Perencanaan dan Bina Usaha Kehutanan	8,00		NA	NA	2,00		0		0		0,00		0,00			
					Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	86,60	280.000.000	86,60	638.199.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	86,60	638.199.000	100,00	227,93	Dinas Kehutan an dan	

RKPD DIY 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																			Perkebunan
			Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Persentase peningkatan produksi hasil hutan (%)	0,10	5.453.670.000	4,65	5.469.588.911	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,65	5.469.588.911	465	100,29	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
			Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Rasio pemanfaatan hutan sumber daya	86,66	30.008.000.000	NA	NA	86,62	8.602.643.000	10,43	0	12,04109905	-	10,43	-	12,04	0,00	DLHK
			Konservasi dan perlindungan Hutan	Persentase Penurunan kerusakan hutan (%)	0,10	2.336.241.100	0,14	4.012.970.830	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,14	4.012.970.830	140,00	171,77	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
			Pengelolaan Hutan Konservasi	Persentase hutan konservasi terkelola(%)	77,09	3.642.872.000	NA	NA	75,86	1.573.774.500	0	57.060.000	0	3,63	0,00	57.060.000	0,00	1,57	DLHK
			Pengembangan Pembibitan Kehutanan	Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam (batang)	1665000,00	3.368.673.000	NA	NA	325000,00	562.148.000	0	233.943.000	0	41,62	0,00	233.943.000	0,00	6,94	DLHK
5	5		Energi dan Sumber Daya Alam																
			Program pengaturan dan pengembangan energi, air tanah, geologi dan pertambangan	Penduduk berakses energi (%)	N/A	40.255.370.000	99,95	23.698.874.818	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	99,95	23.698.874.818	NA	58,87	
				Penyediaan air bersih di daerah sulit air (dusun)	N/A		75,00		N/A		N/A		N/A		75,00		N/A		
				rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer (%)	N/A		20,00		N/A		N/A		N/A		20,00		N/A		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Peningkatan pengelolaan sumber daya mineral (ijin)	N/A		5,00		N/A		N/A		N/A		5,00		N/A		
			Peningkatan jumlah rumah tangga berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan (RT)	N/A		6577,00		N/A		N/A		N/A		6577,00		N/A		
		Program penyelenggaraan Energi dan kelistrikan	Penambahan jumlah rumah yang menikmati listrik (RT)	13848,00	56.953.964.800	N/A	N/A	7848,00	10.196.200.000		124.894.169	83,80	1	6577,00	124.894.169	47,49	0,22	
			bangunan/gedung pemerintah komersial dan industri yang telah diaudit energi (unit)	92,00		N/A	N/A	62,00		52		83,87		52,00		56,52		
			penambahan ijin ketenagalistrikan sesuai ketentuan (ijin)	75,00		N/A	N/A	30,00				0,00		0,00		0,00		
		Program pengelolaan air tanah dan geologi	Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air (dusun)	82,00	55.918.053.000	N/A	N/A	73,00	9.032.980.000		322.302.600	102,739726	4	75,00	322.302.600	91,46	0,58	
			rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer (%)	< 20		N/A	N/A	< 20		7520		100		20,00		100,00		
			penambahan jumlah ijin air tanah yang	75,00		N/A	N/A	30,00				0		0,00		0,00		

RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					sesuai dengan ketentuan (ijin)																
					Program Pengelolaan pertambangan	Penambahan jumlah ijin usaha pertambangan yang baik dan benar (ijin)	40,00	12.747.140.000	N/A	N/A	19,00	3.304.840.000		188.825.480	0	6	0,00	188.825.480	0,00	1,48	
						Persentase pengusaha kawasan peruntukan pertambangan (%)	7,80		N/A	N/A	7,50		7,41		98,8	7,41			95,00		
					program pengawasan dan pengendalian energi, geologi, air tanah dan pertambangan	Tertib ijin usaha pertambangan (ijin)	12,00	3.898.000.000	12,00	2.780.127.232	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12,00	2.780.127.232	100,00	71,32	
						Tertib ijin perusahaan air tanah (ijin)	15,00		15,00		N/A		N/A		N/A	15,00		100,00			
						Tertib ijin ketenagalistrikan (ijin)	15,00		15,00		N/A		N/A		N/A	15,00		100,00			
6	6				Perdagangan																
					Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor perdagangan luar negeri tahun (Ribuan US\$)	327,48	12.300.000.000	327,18	2.001.525.475	308,59	1.263.945.500	94,55	213.027.600	30,64	16,85	327,18	2.214.553.075	99,91	18,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah omzet usaha pelaku perdagangan yang dibina (Rp Miliar)	2,50	58.100.000.000	1,95	2.152.009.800	1,75	3.377.388.530	0,5525	246.723.250	31,57	7,31	1,95	2.398.733.050	77,88	4,13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Perlindungan dan Pengamanan Konsumen	Persentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standar (%)	5,46	4.300.000.000	5,69	602.420.892	5,61	554.036.000	0,7	147.542.217	12,48	26,63	5,69	749.963.109	104,21	17,44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	7			Perindustrian																	
				Peningkatan Teknologi Industri	Jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna(ATG) yang dimanfaatkan	30,00	4.350.000.000	NA	NA	21,00	1.004.448.120	6	327.833.160	28,57	33	6,00	327.833.160	20,00	7,54	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				Peningkatan Teknologi Industri	Jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan	18,00	900.000.000	18,00	876.864.138	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18,00	876.864.138	100,00	97,43	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Nilai Produksi IKM (Rp juta)	13773585,00	13.500.000.000	NA	NA	12979156,00	4.492.115.500	1062997,58	1.367.718.333	8,19003624	30	1062997,58	1.367.718.333	7,72	10,13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				Pembinaan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Telematika	Nilai Produksi IKM (Rp juta)	2632754,00	300.000.000	2637845,34	295.717.200	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2637845,34	295.717.200	100,19	98,57	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				Pembinaan Industri Agro, Tekstil, Kimia dan Aneka	Nilai Produksi IKM (Rp juta)	10091909,00	2.975.000.000	9684292,77	3.489.031.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9684292,77	3.489.031.000	95,96	117,28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah HAKI terdaftar dari atau Sentra yang dibina	180,00	1.650.000.000	NA	NA	100,00	300.000.000	24	17.848.000	24,00	5,95	24,00	17.848.000	13,33	1,08	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
8	8			Transmigrasi																	
				Program Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Perluasan Kerja dan Penempatan	53950,00	22.154.357.800	11823,00	4.854.039.970	10665,00	4.187.696.500	2000	901.284.900	18,75	21,52	11823,00	5.755.324.870	21,91	25,98	Disnakertrans	

RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penganggung Jawab	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					Penempatan Transmigran	Transmigran (orang)																
						Jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigrasi (KK)	NA	40,00		NA		NA	NA	NA	NA	NA	40,00		NA			
					Penunjang Urusan																	
					Keistimewaan																	
	1				Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur																	
					Program Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur	Terselesaikannya pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tepat pada waktunya(%)	100,00	1.500.000.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Sekretariat Daerah
	2				Kelembagaan Pemerintah Daerah																	
					Program Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional (%)	NA	16.632.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)
					Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		88,00		NA	NA	86,50	3.595.640.000	0	1.099.704.520	0	30,58	0,00	1.099.704.520	0,00	6611,98		

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penganggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					Program Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tingkat Penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY(%)	79,00	3.985.000.000	NA	NA	77,60	950.000.000	0	250.823.500	0	26,40	0,00	250.823.500	0,00	6,29	Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)
					Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas	95,00	4.800.000.000	NA	NA	75,00	500.000.000	0	75.313.300	0	15,06	0,00	75.313.300	0,00	1,89	Paniradyo Kaistimewan
					Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kebudayaan yang berkualitas	95,00	6.500.000.000	NA	NA	75,00	500.000.000	0	112.728.900	0	22,55	0,00	112.728.900	0,00	2,35	Paniradyo Kaistimewan
					Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang yang berkualitas	95,00	6.500.000.000	NA	NA	75,00	1.000.000.000	0	170.518.200	0	17,05	0,00	170.518.200	0,00	2,62	Paniradyo Kaistimewan
					Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas	100,00	15.721.412.000	NA	2.619.450.693	100,00	3.554.000.000	0	424.814.000	0	12		45.100.850.693		286,88	Paniradyo Kaistimewan
						Persentase pencapaian	75,00		100,00		67,00		0		0		100,00		133,33		

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			sasaran rencana jangka menengah daerah dengan realisasi tahunan ur. Keist																
			Program Penyusunan Kebijakan Urusan Keistimewaan	Presentase Rumusan Bahan Kebijakan yang menjadi Kebijakan	60,00	2.603.588.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Sekretariat Daerah	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Kebutuhan Sarpras Keistimewaan terpenuhi	60,00	1.878.000.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Sekretariat Daerah	
			Program Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Kebutuhan Sarpras Keistimewaan Urusan Kelembagaan terpenuhi	100,00	4.461.000.000	NA	NA	100,00	535.000.000	0	-	-	0,00	-	0,00	0,00	Sekretariat Daerah (biro Organisasi)	
			Program Peningkatan Pelayanan Paramaprajara	Indeks kepuasan layanan kepada Paramaprajara	78,00	10.500.000.000	89,00	1.345.348.650	72,00	1.750.000.000	0	113.828.770	-	6,50	89,00	1.459.177.420	114,10	13,90	Paniradyo Kaistimewan
			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	Persentase Efektivitas Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	95,00	4.210.000.000	NA	NA	93,00	400.000.000		33.146.500	-	8,29	0,00	33.146.500	0,00	0,79	Paniradyo Kaistimewan
	3		Kebudayaan																
			Program Sejarah, Bahasa, Sastra	Jumlah sumber sejarah direvitalisasi (tema)	15,00	206.243.944.000	NA	20.455.050.223	11,00	12.590.175.525	0	133.460.000	0	1,06	0,00	20.455.050.223	0,00	9,92	Dinas Kebudayaan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Dan Permuseuman	Jumlah sumber sejarah, karya bahasa sastra, koleksi permuseuman yang direvitalisasi dibanding yang tercatat (%)	NA		1,47		NA		NA		NA		1,47		NA		
			Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan	15,00		NA		6,00		0				0,00		0,00		
			Rasio kunjungan museum dibanding kunjungan ke ODTW lain	0,70		0,37		0,55		0				0,37		52,86		
		Program Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	Jumlah arsip kraton dan kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi (berkas)	2000,00	14.883.200.000	2000,00	2.056.894.718	2000,00	2.657.503.800	0	35.309.000	0	1	2000,00	2.092.203.718	100,00	14,06	Dinas Kebudayaan
		Program Penguatan Museum Sonobudoyo	Indeks Kepuasan Pengunjung Museum Sonobudoyo	0,90	61.765.280.000	0,80	7.581.358.212	0,60	54.022.051.450	0,8	416.205.800	133,33	1	0,80	7.997.564.012	88,89	12,95	Dinas Kebudayaan
			Persentase Benda Koleksi Museum (BKM) yang dinventarisasi dan didokumentasi dibanding	91,27		75,00		57,94		78,25		135,05		75,00		82,17		

RKPD DIY 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			seluruh koleksi (%)															
		Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan (%)	15,17	450.337.309.681	5,26	38.063.848.720	11,22	48.394.707.700	0	14.865.945.600	0	31	5,26	52.929.794.320	34,67	11,75	Dinas Kebudayaan
		Program Pengelolaan Taman Budaya	Persentase even budaya tingkat Provinsi, nasional, internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya (%)	12,79	762.000.000.000	5,30	9.329.293.016	5,79	11.000.000.000	0	884.594.200	0	8	5,30	10.213.887.216	41,44	1,34	Dinas Kebudayaan
			Jumlah Taman Budaya di Kab/Kota	2,00		NA		1,00				0		0,00		0,00		
		Program Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%)	100,00	40.184.640.000	99,68	4.653.582.727	99,08	4.500.000.000	0	36.016.150	0	0,80	99,68	4.689.598.877	99,68	11,67	Dinas Kebudayaan
			Realisasi jumlah kerjasama dengan mitra budaya (%)	35,00		15,00		20,00		0		0		15,00		42,86		
		Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	30,00	75.160.160.000	10,00	5.404.509.350	15,00	1.617.517.660		148.907.000	0		10,00	5.404.509.350	33,33	7,19	Dinas Kebudayaan
		Program Pengembangan Kearifan dan potensi Budaya	persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang	0,15	166.170.928.000	NA	371.129.435	0,08	1.100.000.000		Dinas Kesehatan 77.300.700 Disperin	0	#VALUE!	0,00	#VALUE!	0,00	#VALUE!	Dinas Kebudayaan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			berdaya saing (%)	NA		5,00		NA		1.331.678.400,00	NA		5,00		NA				
			Pemanfaatan lahan pekarangan (Kab/Kota)							42.292.000 dan Dinas Pariwisata 4.979.403.800									
			Program Pendidikan Berbasis Budaya	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berkarakter (%)	48,42	173.389.280.000	63,00	10.972.956.338	43,39	16.585.216.000		184.563.493	0	1	63,00	11.157.519.831	130,11	6,43	Dinas Kebudayaan
			Program Pembinaan dan Pengembangan Adat Dan Seni	Persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi (%)	26,21	100.188.000.000	26,21	63.152.022.745	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26,21	63.152.022.745	100,00	63,03	Dinas Kebudayaan
			Program Pelestarian Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju (%)	1,81	69.800.000.000	1,81	3.558.016.750	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,81	3.558.016.750	100,00	5,10	Dinas Kebudayaan
				Jumlah Kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya (kelompok)	310,00		35,00		NA		NA	NA	NA	NA	35,00		11,29		
				Jumlah desa mandiri budaya tahun n (desa)	NA		NA		NA		NA	NA	NA	NA	NA		NA		

RKPD DIY 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1				30,86	1.139.990	NA	NA	27,35	57.679.467.500		1.845.645.400	0	3	0,00	1.845.645.400	0,00	0,16	Dinas Kebudayaan
			Persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi (%)			NA	NA	1,87				0		0,00		0,00		
			Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju (%)	2,06		NA	NA					0		0,00		0,00		
			Jumlah Kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya (kelompok)	400,00		NA	NA	330,00				0		0,00		0,00		
			Jumlah desa mandiri budaya tahun n (desa)	20,00		NA	NA	5,00				0		0,00		0,00		
	4		Pertanahan															
			Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	NA	NA	7919,00	5.342.026.500	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7919,00	5.342.026.500	NA	NA	Dinas PTR
			Bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN															
			Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	13877,00	103.067.866.000	7919,00	5.342.026.500	9419,00	10.690.320.000	7928	540.058.453	84,17	5,05	7928,00	5.882.084.953	57,13	5,71	Dinas PTR
			Bidang Tanah kasultanan/ kadipaten yang sudah didaftarkan (bidang)															
			Dok. Tanah kasultanan/ kadipaten yang dipelihara (dokumen)	66,00		NA		23,00		0		0,00		0,00		0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11=10/5 x100%								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan/ kadipaten (bidang)	40,00		NA		60,00		10		16,67		10,00		25,00		
		Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Peningkatan pemanfaatan tanah desa (%)	NA	NA	5,10	270.102.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5,10	270.102.000	NA	NA	Dinas PTR
			Bidang Tanah desa yang didaftarkan di BPN (bidang)	800,00	34.405.270.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
		Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase desa yang sudah mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa (%)	20,41	10.000.000.000	NA	NA	5,10	2.408.500.000	3	88.045.550	58,82352941	4	3,00	88.045.550	14,70	0,88	Dinas PTR
			persentase pengajuan permohonan surat kekancingaan yang ditindaklanjuti (%)	100,00		NA	NA	100,00		25		25		25,00		25,00		
		Program Perencanaan dan Pengendalian Urusan Pertanahan	Persentase realisasi pelaksanaan program kegiatan ur. Pertanahan	100,00	1.367.252.000	100,00	1.470.763.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,00	1.470.763.800	100,00	107,57	Dinas PTR
		Program Sarpras Keistimewaan	Persentase pelayanan sarpras keist. Thd pelaks. Keg	100,00	2.200.000.000	100,00	566.023.100	100,00	300.000.000	30	0	30	-	100,00	566.023.100	100,00	25,73	Dinas PTR

RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					Urusan Pertanahan	keist. Ur pertanahan															
			5		Tata Ruang																
					Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan/ Kadipaten	Persentase kesediaan persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	17,78	35.650.000.000	17,78	2.643.942.707	NA	3.600.000.000	NA	NA	NA	NA	17,78	2.643.942.707	100,00	7,42	Dinas PTR
						Persentase kesediaan persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	46,11		17,78	22,78	22	112.077.123	97	3	22,00	2.756.019.830	47,71	7,73			
					Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	NA	NA	29,44	103.244.879.803	NA	NA	NA	NA	29,44	103.244.879.803	NA	NA		Dinas PTR	
					Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	21,67	3.574.442.329.719	29,44	103.244.879.803	15,83	4.044.315.000	0	2	29,44	103.332.925.353	135,86	2,89			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						ruang strategis kasultanan dan kadipaten															
						Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang satuan Ruang Strategis			7,78	291.418.926	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7,78	291.418.926	NA	NA	Dinas PTR
						Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	70,00	4.400.000.000	7,78	291.418.926	60,00	1.000.000.000	5	81.086.450	8	8	7,78	372.505.376	11,11	8,47	
						Program Perencanaan dan Pengendalian Urusan Tata Ruang	100,00	700.000.000	100,00	644.551.838	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,00	644.551.838	100,00	92,08	Dinas PTR
						Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	100,00	2.800.000.000	100,00	809.857.300	100,00	500.000.000	30	0	30	-	100,00	2.800.000.000	100,00	100,00	Dinas PTR
						Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang															

RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
	1	2	3	4			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Sekretariat Daerah																
					Program Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama	100,00	3.841.253.000	NA	NA	100,00	1.377.795.000	23,52	268.232.240	23,52	19	23,52	268.232.240	23,52	6,98	Biro Tata Pemerintahan
					Program Pengembangan Kerjasama dan Otonomi Daerah	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama	NA	1.330.977.900	100,00	863.241.100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,00	863.241.100	NA	64,86	Biro Tata Pemerintahan
					Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, dan Kecamatan	Persentase desa tertinggal yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik (%)	100,00	2.882.486.500	6,12	NA	33,33	941.200.000	100	250.486.000	300,030003	26,61	100,00	250.486.000	100,00	8,69	Biro Tata Pemerintahan
					Program Pembinaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	100,00	2.508.970.000	NA	NA	100,00	893.655.000	0	81.272.100	0	9,09	0,00	81.272.100	0,00	3,24	Biro Tata Pemerintahan
					Program Pemerintahan Umum dan Pembinaan Wilayah	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	NA	567.514.600	180,00	586.624.300	NA	NA	NA	NA	NA	NA	180,00	586.624.300	NA	103,37	Biro Tata Pemerintahan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Program Penataan Peraturan Perundang undangan	Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	100,00	5.059.45 6.540	100,00	1.081.80 1.175	100,00	1.359.73 8.220	0	285.183 .780	0,00	20,97	100,00	1.366.98 4.955	100 ,00	27,02	Biro Hukum
			Program Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Persentase Kewenangan, Substansi Materi, dan Legal Drafting Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Telah Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah Hukum Daerah	100,00	2.245.59 6.150	100,00	617.178. 105	100,00	609.432. 220	0	143.235 .072	0,00	23,50	100,00	760.413. 177	100 ,00	33,86	Biro Hukum
			Program Dokumentasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang Terpublikasikan	100,00	2.505.36 8.300	100,00	551.842. 586	100,00	1.162.27 5.000	0	486.581 .000	0,00	41,86	100,00	1.038.42 3.586	100 ,00	41,45	Biro Hukum
			Program Bantuan dan layanan hukum	Persentase bantuan dan Layanan hukum	100,00	8.426.38 0.600	100,00	2.264.32 3.676	100,00	1.996.95 8.220	0	492.880 .763	0,00	24,68	100,00	2.757.20 4.439	100 ,00	32,72	Biro Hukum
			Program Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Persentase jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik. Catatan : indikator baik adalah minimal melaksanakan 5 area perubahan	80,00	2.873.44 2.000	NA	NA	75,00	763.090. 000	0	122.877 .000	0,00	16,10		122.877. 000	0,0 0	4,28	Biro Organisasi

RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					reformasi birokrasi																
					Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengembangan Standarisasi	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional (inovasi)	1,00	6.563.055.500	1,00	964.756.262	1,00	1.867.325.000	0	201.139.212	0,00	10,77	1,00	1.165.895.474	100,00	17,76	Biro Organisasi
					Program Pelayanan Kerumahtanggaan	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan terhadap Pimpinan dan Tamu	81,00	2.856.550.500	81,00	3.125.435.697	NA	NA	NA	NA	NA	NA	81,00	3.125.435.697	100,00	109,41	Biro Umum dan Protokol
					Program Pelayanan Kerumahtanggaan	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan terhadap Pimpinan dan Tamu	85,00	10.852.640.000	NA	NA	82,00	3.028.035.950		537.302.852	0	18	0,00	537.302.852	0,00	4,95	Biro Umum, Humas dan Protokol
					Program Pelayanan Keprotokolanan	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Protokol terhadap Pimpinan dan Tamu	81,00	2.575.000.000	81,00	2.465.499.708	NA	NA	NA	NA	NA	NA	81,00	2.465.499.708	100,00	95,75	Biro Umum dan Protokol
					Program Pelayanan Keprotokolanan	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Protokol terhadap Pimpinan dan Tamu	85,00	7.181.090.000	81,00	2.465.499.708	82,00	2.778.248.850	85,12	203.933.782	103,804878	7	85,12	2.669.433.490	100,14	37,17	Biro Umum, Humas dan Protokol

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Pengelolaan Hubungan Masyarakat	peningkatan jumlah pengakses informasi pemda	270710,00	2.242.988.000	943967,00	1.628.763.276	NA	NA	NA	NA	NA	NA	943967,00	1.628.763.276	348,70	72,62	Biro Umum dan Protokol
							309975,00	6.887.210.000	943967,00	1.628.763.276	276936,00	2.161.543.500	112049	568.368.850	40,46025074	26	112049,00	2.197.132.126	36,15	31,90	Biro Umum, Humas dan Protokol
					Program Peningkatan Fasilitas Layanan Kantor Perwakilan daerah	Keinginan untuk mendapatkan pelayanan kembali di Kaperda (%)	84,00	526.832.000	85,89	571.792.120	NA	NA	NA	NA	NA	NA	85,89	571.792.120	102,25	108,53	Kantor Perwakilan Daerah
					Program Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah	Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah (%)	0,88	2.429.450.000	NA	NA	85,00	595.959.139	86,75	211.272.074	102,06	35,45	86,75	211.272.074	985,795	8,70	Badan Penghubung Daerah
					Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah dan Seni Budaya Daerah	Presentase peningkatan kualitas pelaksanaan promosi potensi dan budaya daerah	78,00	900.000.000	88,00	892.437.818	NA	NA	NA	NA	NA	NA	88,00	892.437.818	112,82	99,16	Kantor Perwakilan Daerah
					Program Peningkatan Kualitas Layanan Promosi Potensi dan Seni Budaya	peningkatan kualitas layanan promosi potensi dan seni budaya	38,00	3.237.880.000	NA	NA	85,00	1.313.583.000	86,9	137865963	102,24	10,50	86,90	137.865.963	228,68	4,26	Badan Penghubung Daerah
					Pengelolaan Kebijakan Stabilitas	Rumusan kebijakan stabilitas	40,00	2.830.000.000	25,00	349.522.500	40,00	670.294.660	4	44853900	10,00	6,69	4,00	394.376.400	10,00	13,94	Biro Administrasi

RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Perekonomian Daerah	perekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)															Perekonomian dan SDA
					Pengelolaan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian berkeadilan	Rumusan kebijakan rekayasa pertumbuhan perekonomian berkeadilan yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)	30,00	7.638.000.000	25,00	1.305.527.487	30,00	1.573.443.440	5	379221977	16,67	24,10	5,00	1.684.749.464	16,67	22,06	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA
					Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Perekonomian	Rumusan kebijakan perlindungan sumberdaya perekonomian yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)	30,00	1.460.000.000	25,00	195.549.212	30,00	237.000.000	2	22694000	6,67	9,58	2,00	218.243.212	6,67	14,95	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA
					Program Pengelolaan Kebijakan Sumberdaya Manusia	Rumusan bahan kebijakan sumber daya manusia (dok)	1,00	539.010.500	1,00	465.956.898	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,00	465.956.898	100,00	86,45	Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Program Pengelolaan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Sumberdaya Manusia	Rumusan bahan kebijakan penguatan kelembagaan sumberdaya manusia (dok)	1,00	98.000.000	1,00	123.999.211	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,00	123.999.211	100,00	126,53	Biro Administ rasi dan Kesejaht eraan Rakyat
			Program Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Daerah	Terlayannya lembaga keagamaan 5 agama (layanan)	4,00	7.508.966.500	4,00	7.599.251.841	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,00	7.599.251.841	100,00	101,20	Biro Administ rasi dan Kesejaht eraan Rakyat
			Program Pengelolaan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat	Rumusan bahan kebijakan peningkatan kapasitas sumberdaya masyarakat (dok)	1,00	150.473.000	1,00	143.848.729	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,00	143.848.729	100,00	95,60	Biro Administ rasi dan Kesejaht eraan Rakyat
			Program Pengelolaan Kebijakan Rekayasa Sosial Masyarakat	Rumusan bahan kebijakan rekayasa sosial masyarakat yang ditindaklanjuti (dok)	1,00	448.757.500	2,00	486.461.700	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2,00	486.461.700	200,00	108,40	Biro Administ rasi dan Kesejaht eraan Rakyat
			Program Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Pembinaan Sarana Keagamaan	Rumusan Bahan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan yang ditindaklanjuti (dok)	8,00	65.153.381.000	NA	NA	2,00	7.174.070.000	0	817937200	0,0	11,4	0,00	817.937.200	0,00	1,26	Biro Bina Mental Spiritual
				Terlayannya lembaga	4,00		NA	NA	4,00		2		50,0		2,00		50,00		

RKPD DIY 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			keagamaan 5 agama (lembaga)															
		Program Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Kesehatan Masyarakat	Rumusan Bahan Kebijakan Kesehatan Masyarakat yang ditindaklanjuti (dok)	8,00	1.295.271.000	NA	NA	2,00	419.793.000	0	44689900	0,0	10,6	0,00	44.689.900	0,00	3,45	Biro Bina Mental Spiritual
		Program Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Sumber Daya Manusia	Rumusan Bahan Kebijakan Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti (dok)	8,00	807.708.000	NA	NA	2,00	242.496.000	0	25274000	0,0	10,4	0,00	25.274.000	0,00	3,13	Biro Bina Mental Spiritual
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
		Program Pengelolaan Rekayasa Sosial Masyarakat	Desa/kelurahan model gerakan gotong royong (desa/kelurahan)	8,00	2.906.900.000	NA	NA	8,00	381.262.000		51135000	0	13	0,00	51.135.000	0,00	1,76	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat
		Program Perumusan Kebijakan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat	Rumusan Bahan Pengelolaan kebijakan penguatan sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti (dok)	16,00	4.332.254.000	NA	NA	4,00	978.762.000	1	36917000	25	4	1,00	36.917.000	6,25	0,85	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat
		Program Pengelolaan dan Penguatan Kelembagaan	Jumlah pembinaan dan fasilitasi lembaga	4,00	5.887.778.000	NA	NA	4,00	1.390.607.000	1	38466600	25	3	1,00	38.466.600	25,00	0,65	Biro Bina Pemberdayaan

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penganggung Jawab	
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Sumber Daya Masyarakat	kemasyarakatan (keg)															Masyarakat	
					Program Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah	Persentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti	50,00	205.907.000	50,00	200.425.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50,00	200.425.000	100,00	97,34		Adpem
							80,00	2.650.000.000	50,00	200.425.000	65,00	903.668.000	0	66.313.000	0	7,34	0,00	266.738.000	0,00	10,07		Biro Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
					Program Pengelolaan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	Persentase rumusan bahan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ditindaklanjuti	50,00	200.000.000	50,00	194.109.100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50,00	194.109.100	100,00	97,05		Adpem
							80,00	2.350.000.000	50,00	194.109.100	65,00	500.000.000			0	0	0,00	194.109.100	0,00	8,26		
					Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan	100,00	2.724.890.000	100,00	2.757.525.067	100,00	3.537.490.650	29,5	728.140.925	29,5	20.583.54345	100,00	3.485.665.992	100,00	101,20		Adpem
		2			Sekretariat DPRD																	
					Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Presentase Bahan Acara yang selesai dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda Program Kerja DPRD DIY (%)	95,00	155.880.183.500	100,00	31.406.601.214	95,00	42.865.230.600	30	5.035.627.639	31,58	11,75	100,00	36.442.228.853	105,26	23,38		Sekretariat DPRD
					Program Pengembara	Persentase Produk Hukum Daerah dan	98,00	52.230.529.000	100,00	7.042.491.156	97,00	13.326.757.000	28	2.414.042.331	28,87	18,11	100,00	9.456.533.487	102,04	18,11		Sekretariat DPRD

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
					n Regulasi Daerah	DPRD yang diselesaikan Tepat Waktu (%)																	
					Program Pelayanan Kerumahtanggaan	Indeks Hasil Survey Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan	96,00	3.867.600.000	100,00	3.071.492.700	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,00	3.071.492.700	104,17	79,42	Sekretariat DPRD		
					Program Peningkatan Kehumasan dan Keprotokolan	Persentase layanan aspirasi masyarakat, aksesibilitas informasi publik dan keprotokoleraan	90,00	84.133.375.500	79,45	17.679.130.912	80,00	19.937.145.500	20,95	4.261.665.179	26,19	21,38	79,45	21.940.796.091	88,28	26,08	Sekretariat DPRD		
					Inspektorat																		
					Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pemerintahan	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	90,00	15.111.945.701	NA	NA	82,00	8.065.982.000			0	-	0,00	-	0,00	0,00	Inspektorat		
						Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	90,00	29.532.979.900	NA	NA	82,00				0		0,00		0,00	0,00	Inspektorat		
						Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	90,00	29.532.979.900	NA	NA	82,00				0		0,00		0,00	0,00	Inspektorat		
						Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	90,00	29.532.979.900	NA	NA	82,00				0		0,00		0,00	0,00	Inspektorat		

No	Kode				Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	NA	5.506.522.000	89,42	7.017.490.598	NA	NA	NA	NA	89,42	7.017.490.598	NA	127,44	Inspektorat		
						Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	NA		86,51	NA	NA	NA	NA	86,51	NA		NA				
						Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	NA		89,03	NA	NA	NA	NA	89,03	NA		NA				
						Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	NA		91,20	NA	NA	NA	NA	91,20	NA		NA				
			4		Perencanaan																
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan yang berkualitas	100,00	13.440.795.000	100,00	3.433.857.861	100,00	2.309.219.200	100	219.466.535	100	10	100,00	3.653.324.396	100,00	27,18	BAPPEDA
						Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100,00		100,00		100,00		100		100		100,00		100,00		
					Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Sosial Budaya	93,67	8.618.452.500	91,30	1.630.793.961	89,87	1.357.159.000	91,3	117.290.366	101.5911873	9	91,30	1.748.084.327	97,47	20,28	BAPPEDA

RKPD DIY 2020

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Perekonomian	91,30	4.907.425.400	95,24	770.003.140	84,78	1.121.421.000	95,24	63.446.700	112,3378155	6	95,24	833.449.840	104,32	16,98	BAPPEDA
					Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Pemerintahan	92,96	5.405.324.836	96,83	855.850.930	90,50	704.925.060	96,83	97.529.646	106,9944751	14	96,83	953.380.576	104,16	17,64	BAPPEDA
					Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Sarana Prasarana	88,57	6.761.523.960	97,14	1.320.405.250	80,00	856.030.000	97,14	91.830.200	121,425	11	97,14	1.412.235.450	109,68	20,89	BAPPEDA
					Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase capaian kegiatan SKPD	92,00	11.400.608.000	92,64	2.068.254.645	89,00	1.928.582.500	92,64	565.475.000	104,0898876	29	92,64	2.633.729.645	100,70	23,10	BAPPEDA
						Persentase Evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku	100,00		100,00		100,00		100		100		100,00		100,00		
		5			Keuangan																
					Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi pendapatan pajak, retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, PAD lain yang	51,38	3.135.563.000	57,08	2.687.567.510	NA	NA	NA	NA	NA	NA	57,08	2.687.567.510	111,09	85,71	DPPKA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			sah terhadap pendapatan.															
		Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi pendapatan pajak, retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, PAD lain yang sah terhadap pendapatan.	60,06	15.692.710.000	57,08	2.687.567.510	53,99	3.173.473.000	13,6	650.153.348	25,18984997	20	13,60	3.337.720.858	22,64	21,27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
		Program Penganggaran Belanja Daerah	1. Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100,00	3.301.283.000	100,00	3.643.685.640	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,00	3.643.685.640	100,00	110,37	DPPKA
			2. Kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dan APBD.	100,00		100,00		NA	NA	NA	NA	100,00	100,00					
		Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah	1. Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100,00	13.877.220.000	100,00	3.643.685.640	100,00	4.197.670.000	6	67.258.000	6	2	6,00	3.710.943.640	6,00	26,74	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
			2. Kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dan APBD.	100,00		100,00		100,00	6	6	6,00							
		Program Pelaporan dan Pertanggungja	Ketepatan waktu penyampaian	100,00	2.119.050.000	100,00	2.030.314.922	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,00	2.030.314.922	100,00	95,81	DPPKA

RKPD DIY 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		waban Keuangan Daerah	dan kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah serta raperda pertanggungjawa waban APBD	100,00	9.549.450.000	100,00	2.030.314.922	100,00	2.127.324.000		359.157.000	0	17	100,00	2.389.471.922	100	25,02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
		Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Keakuratan dalam penatausahaan keuangan Daerah	100,00	812.000.000	100,00	884.223.649	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,00	884.223.649	100	108,89	DPPKA
				100,00	3.562.250.000	100,00	884.223.649	100,00	872.945.000			0			100,00		100	0,00
		Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100,00	1.417.656.000	100,00	1.663.275.494	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,00	1.663.275.494	100	117,33	DPPKA
				100,00	6.655.370.000	100,00	1.663.275.494	100,00	1.957.446.500			244.484.257	0	12	100,00	1.907.759.751	100	28,66
		Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kota Yogyakarta	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kota Yogyakarta	3,75	1.793.200.000	4,36	1.742.005.750	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,36	1.742.005.750	100	97,15	DPPKA
		Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kabupaten Bantul	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Bantul	1,29	2.104.038.000	4,48	2.093.021.212	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,48	2.093.021.212	100	99,48	DPPKA

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kabupaten Kulon Progo	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	0,86	1.190.994.000	2,48	1.220.633.600	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2,48	1.220.633.600	100,00	102,49	DPPKA
					Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kabupaten Gunungkidul	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	3,80	1.173.918.000	4,63	1.144.162.150	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,63	1.144.162.150	100,00	97,47	DPPKA
					Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kabupaten Sleman	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Sleman	3,29	2.462.642.000	4,23	2.091.133.700	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,23	2.091.133.700	100,00	84,91	DPPKA
					Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kota Yogyakarta	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kota Yogyakarta	37.158.446.429	7.111.460.000	NA	NA	27.504.784.539,00	1.854.203.660	650.153.348	-	35	0,00	650.153.348	0,00	9,14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
						Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Bantul	38.506.977.121	7.877.912.000	NA	NA	29.870.871.974,00	1.844.979.680	-	-	0,00	-	0,00	0,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset		
						Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Kulon Progo	12.537.252.508	4.093.032.000	NA	NA	10.026.836.031,00	1.379.917.620	-	-	0,00	-	0,00	0,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset		
						Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Gunungkidul	12.381.553.649	3.882.815.000	NA	NA	9.226.439.263,00	1.479.042.560	7252287400	-	78,60	7252287400,00	-	58,57	0,00	Badan Pengelola Keuangan	

RKPD DIY 2020

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kenaikan Pajak daerah KPPD Kab Sleman	78.538.848.031	7.833.950.000	NA	NA	59175201213,00	2.555.498.000			-	-	0,00	-	0,00	0,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
		Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Aset Daerah	Persentase pengelolaan asset yang dikelola sesuai dengan prosedur	100,00	4.497.000.000	100,00	4.473.108.878	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100,00	4.473.108.878	100,00	99,47	DPPKA
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	100,00	8.395.490.000	NA	NA	100,00	3.073.195.607	31,77	346.946.550	31,77	11	31,77	346.946.550	31,77	4,13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
		Program Pendayagunaan Barang Daerah	Jumlah potensi BMD yang didayagunakan	100,00	2.871.858.000	NA	NA	57,14	1.734.174.750	0	28.848.750	0	2	0,00	1.734.174.750	0,00	60,39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	6	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan																
		Program Perencanaan, Pengadaan Pegawai dan Pengelolaan Data	1) Persentase Pegawai sesuai Kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezzeting)	85,00	11.615.607.831	96,88	2.577.264.202	79,00	3.303.276.550	0	99.534.600	0	3	96,88	2.676.798.802	113,98	23,04	BKD
		Kepegawaian	2) Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data	92,20		84,66		80,80		0		0		84,66		91,82		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%							
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Kepegawaian Terintegrasi, Valid, dan Update																
		Program Peningkatan Kualitas SDM dan Pengembangan Karier Pegawai	Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	85,00	192.168.432.100	80,82	5.695.524.432	80,00	5.656.228.000	0	344.232.000	0	6	80,82	6.039.756.432	95,08	3,14	BKD	
		Program Pembinaan Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai	Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	93,00	9.173.290.355	87,15	1.900.058.737	89,00	2.590.232.000	0	402.139.900	0	16	87,15	2.302.198.637	93,71	25,10	BKD	
		Program Peningkatan Penatausahaan Kepegawaian	Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian	A(81,26)	477.416.500	78,00	122.413.984	77,00	1.433.302.560	0	180.001.850	0	13	78,00	302.415.834	95,99	63,34	BKD	
		Program Pengelolaan Pengukuran kompetensi pegawai	Persentase kompetensi individu yang terpetakan	49,76	9.857.631.831	48,49	2.335.974.871	23,09	1.840.216.500	0	489.894.300	0	27	48,49	2.825.869.171	97,45	28,67	BKD	
		Program Pendidikan Penjurangan	Presentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	20,00	29.023.672.026	51,50	5.862.860.194	10,00	10.542.111.160	0	613.329.776	0	6	51,50	6.476.189.970	257,50	22,31	Badan Diklat	
		Program Pendidikan Teknis Fungsional	Presentase ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan	20,00	11.758.914.342	18,32	2.701.415.180	10,00	2.064.411.660	0	458.908.338	0	22	18,32	3.160.323.518	91,60	26,88	Badan Diklat	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Predikat Memuaskan																
					Program Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama dan Kerjasama Kediklatan	Persentase Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama	90,00	837.701.688	138,01	195.959.500	81,00	247.767.220	0	42.801.490	0	17	138,01	238.760.990	153,34	28,50	Badan Diklat
					Program Peningkatan Standarisasi dan Penjaminan Mutu	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	82,00	3.998.123.675	78,05	899.426.350	78,00	1.010.667.220	0	158.413.430	0	16	78,05	1.057.839.780	95,19	26,46	Badan Diklat
			7		Penelitian dan Pengembangan																
					Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Persentase rumusan bahan kebijakan penelitian dan pengembangan (%)	50,00	300.000.000	50,00	593.582.500	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50,00	593.582.500	100,00	197,86	Biro Adpem
					Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah (%)	100,00	4.003.741.835	NA	NA	60,00	500.000.000		51.096.260	0	10	0,00	51.096.260	0	1,276212656	BAPPEDA

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam pelaksanaan Kick Off Meeting penyusunan RKPD DIY 2020 tanggal 4 Desember Tahun 2018, di Alana Hotel, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihadiri oleh segenap pemangku kepentingan, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, dan perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Gubernur DIY melalui Sekretaris Daerah DIY telah mengemukakan permasalahan-permasalahan pokok yang harus diperhatikan pada tahun perencanaan 2020 adalah sebagai berikut,

1. Ketimpangan Antar Wilayah yang diantaranya terkait dengan,
 - a. Ketimpangan kepemilikan SDA dan SDM.
 - b. Ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana.
 - c. Ketimpangan alokasi intervensi pemerintah.
2. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan yang diantaranya terkait dengan,
 - a. Struktur ekonomi dominan yang ada di sebuah daerah akan mempengaruhi kondisi ketimpangan, dimana daerah dengan struktur ekonomi dominan agraris cenderung mempunyai ketimpangan yang rendah dibandingkan daerah dengan struktur ekonomi dominan industri.
 - b. Ketimpangan aset terkait kepemilikan modal, tanah dan kapasitas SDM.
 - c. Intervensi pemerintah yang kurang tepat sasaran.
3. Disparitas indeks pembangunan manusia yang diantaranya terkait dengan,
 - a. Perbedaan nilai IPM antar Kabupaten/ Kota yang masing tinggi. Sesuai data yang tersedia, IPM Gunungkidul masih di bawah rata-rata nasional.
 - b. Penyebab ketimpangan IPM di DIY dipengaruhi kondisi kesejahteraan ekonomi yang masih timpang.
4. Keterbatasan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan Daerah yang terkait dengan Postur APBD DIY masih sangat mengandalkan dana transfer dari Pusat. Derajat otonomi fiskal menunjukkan proporsi PAD terhadap total pendapatan DIY masih di bawah rata-rata nasional sebesar 33,46%.

Selanjutnya permasalahan pokok yang telah disampaikan dalam Kick Off Meeting tersebut telah dilakukan identifikasi terhadap permasalahan pembangunan di DIY dan sebagai dasar pijakan dalam perencanaan ke depan. Adapun identifikasi permasalahan meliputi permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.3.1 Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah antara lain :

2.3.1.1 Sasaran Meningkatkan Derajat Kualitas SDM

2.3.1.1.1 Indikator Sasaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

- a. Capaian Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2018 (angka sementara) sebesar 75,59 dari target 80,29 (dengan tingkat capaian 99,13% dari target).
- b. Masih terjadinya kasus kematian ibu. Menurut data profil kesehatan DIY jumlah kematian ibu pada tahun 2015 sebesar 29 kasus, pada tahun 2016 sebesar 39 kasus, dan tahun 2017 sebesar 34 kasus.
- c. Dalam tiga tahun terakhir jumlah kematian bayi masih relatif tinggi. Menurut data profil kesehatan DIY jumlah kematian bayi berturut-turut pada tahun 2015 sebesar 329 kasus, pada tahun 2016 sebesar 278 kasus, dan tahun 2017 sebesar 313 kasus.
- d. Meskipun terjadi penurunan proporsi gizi buruk dan gizi kurang, tetapi angkanya masih tinggi. Data riskedas tahun 2013, proporsi gizi kurang dan gizi buruk pada angka 21,1 sedangkan hasil Riskedas pada tahun 2018 menurun menjadi 15,5.
- e. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa belum berjalan secara optimal. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mewajibkan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah untuk memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa. Namun dalam kenyataannya, beberapa lembaga kemasyarakatan desa belum berperan aktif dalam pembangunan.
- f. Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) per Kabupaten/Kota menunjukkan adanya ketimpangan antar wilayah pada pembangunan sektor pendidikan. Capaian RLS tahun 2017 tertinggi sebesar 11,43 tahun (Kota Yogyakarta) sedangkan capaian terendah sebesar 6,99 tahun (Kabupaten Gunungkidul). Hal ini berarti rata-rata penduduk Kota Yogyakarta menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang pendidikan menengah, sedangkan rata-rata penduduk Kabupaten Gunungkidul hanya mampu menyelesaikan pendidikan dasar. Hal ini memperlihatkan disparitas yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di DIY

- g. Masih terdapat 55 titik genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) pada tahun 2018.
- h. Optimalisasi sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang dilakukan sampai dengan tahun 2018 dapat menambah kapasitas 5.000 SR dari kapasitas rencana sebesar 25.000 SR. Sampai dengan tahun 2018 sudah tersambung 23.000 SR, sehingga masih ada kapasitas idle sebanyak 7.000 SR yang dapat dimanfaatkan.
- i. Masih ada 98.944 rumah tangga di DIY yang belum berakses air minum layak, sehingga diperlukan upaya peningkatan cakupan penduduk berakses air minum layak.

2.3.1.1.2 Indikator Sasaran Indeks Pemberdayaan Gender

- a. Data tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih fluktuatif. Dengan demikian, partisipasi perempuan DIY di ranah politik dan ekonomi perlu terus menerus ditingkatkan dan dijaga konsistensinya. Pada angka sementara 2018, IDG DIY mencapai 70,60 dari target 69,91 , atau tercapai 100,98.
- b. Kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung menunjukkan trend kenaikan. Berdasarkan data, sebagian besar pelaku kekerasan adalah orang terdekat korban, baik orang tua; keluarga; maupun pasangan menikah. Lebih lanjut, data pun menunjukkan bahwa mayoritas pelaku kekerasan tersebut berjenis kelamin pria.
- c. Total fertility rate (TFR) DIY sejak tahun 2007 menunjukkan trend kenaikan. Bahkan, Angka TFR 2,2 sebagaimana ditunjukkan pada tahun 2017 sudah tidak sesuai dengan misi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang 2015 yang ditandai dengan TFR 2,1 dan Net Reproduction Rate (NRR) sebesar 1.
- d. Tingginya angka perceraian. Meskipun data Pengadilan Agama tahun 2014-2017 menunjukkan telah ada penurunan jumlah perceraian, namun penurunan tersebut belum signifikan dan masih sangat tinggi.
- e. Tingginya angka perkawinan usia anak. Perkawinan di usia anak akan berlanjut pada kehamilan yang secara medis dapat meningkatkan resiko komplikasi kehamilan yang berujung kematian ibu berusia anak tersebut. Di samping itu, perkawinan usia anak ini pun membawa banyak permasalahan dalam pemenuhan hak anak akan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

2.3.1.2 Sasaran Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat

2.3.1.2.1 Indikator Sasaran Indeks Gini

- a. Distribusi pendapatan belum merata, Rasio Gini DIY cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2019. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang meningkat sebesar 0,12 poin dari 0,420 di tahun 2015. Pada tahun 2018, Rasio Gini meningkat sebesar 0,009 poin menjadi 0,450 dari tahun sebelumnya dan bertahan pada angka tersebut sampai tahun berikutnya.
- b. Terjadinya disparitas pembangunan, pemerataan pertumbuhan ekonomi masih kurang, minimnya penguatan terhadap industri-industri berbasis kerakyatan / industri rumah, serta masih minimnya pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di wilayah yang tertinggal. Berdasarkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku per kabupaten/kota, dapat diketahui bahwa Kota Yogyakarta merupakan kontributor utama perekonomian DIY dengan nilai PDRB terbesar. Sementara Gunungkidul dengan luas wilayah hampir setengah wilayah DIY, ternyata sampai dengan tahun 2017 hanya menempati urutan keempat dalam hal besaran nilai PDRB yang dihasilkan. Kondisi ini juga tercermin dari sektor pertanian sebagai kontributor utama perekonomian Gunungkidul menghasilkan nilai tambah yang relatif lebih kecil.
- c. Masih ada kesenjangan infrastruktur antar wilayah
- d. Perlunya pengelolaan pertumbuhan penduduk secara berkualitas.

2.3.1.2.2 Indikator Sasaran Persentase Angka Kemiskinan

- a. Persentase angka kemiskinan pada tahun 2018 belum memenuhi target. Pada RPJMD DIY 2017-2022 ditargetkan sebesar 11,23 dan tercapai sebesar 11,81 (94,84 dari target), dan jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) ditargetkan 484.947 serta tercapai 450.250.
- b. Upaya penegakan perda tentang PMKS masih belum optimal, data tahun 2017 menunjukkan jumlah permasalahan PMKS di DIY sebanyak 484.050 orang. Sedangkan data permasalahan PMKS di DIY pada tahun 2018 berjumlah 660.627 orang, hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah permasalahan PMKS di DIY dari tahun 2017 sampai dengan 2018.
- c. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh generasi muda /usia sekolah (fenomena “Klitih”) yang relatif tinggi. Hal ini dapat dilihat melalui data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang fluktuatif datanya, tahun

2016 jumlah ABH di DIY sebanyak 184 kasus, tahun 2017 meningkat menjadi 219 kasus dan tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 101 kasus.

- d. Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama penyandang disabilitas masih belum optimal. Berdasarkan hasil Riskedas 2018 menunjukkan untuk usia produktif (18-59) Nasional di Indonesia berada pada angka 22 %, sedangkan di DIY menunjukkan angka 38 % dan cukup tinggi. Akan tetapi didalam pemberdayaan penyandang disabilitas masih kurang optimal hal ini disebabkan perusahaan-perusahaan yang memberdayakan penyandang disabilitas baru 20 perusahaan di DIY (Desember 2018), yang idealnya berdasarkan UU No 8 thn 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 53 ayat 2 memuat tentang kewajiban perusahaan swasta mempekerjakan 1 persen dari seluruh karyawan.
- e. Masih ada 56.020 rumah tidak layak huni yang perlu ditingkatkan kualitasnya dari 65.578 Unit.
- f. Masih ada 520 hektar luasan kawasan kumuh yang belum tertangani dari 965,51 hektar.
- g. Persentase rumah tangga yang menikmati listrik pada tahun 2018 sebesar 99,9 %. Masih ada 1002 rumah tangga yang belum menikmati listrik dan 52.446 rumah tangga yang belum menikmati listrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan.
- h. Terdapat 170 dusun dari 245 dusun yang merupakan daerah sulit air di DIY dan memerlukan pemenuhan kebutuhan air bersih melalui pengambilan air tanah dalam berupa sumur bor.
- i. Luas penguasaan lahan petani sangat sempit sehingga tidak efisien dan menyulitkan upaya peningkatan kesejahteraan petani. Hal ini ditunjukkan dengan data bahwa sejumlah 88,72% rumah tangga petani merupakan golongan petani gurem dengan luas lahan yang dikuasai kurang dari 0,5ha.
- j. masih kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian besar desa rawan pangan DIY disebabkan oleh indikator akses pangan.

2.3.1.3 Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan

2.3.1.3.1 Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi

- a. Secara umum, sasaran Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan yang diukur melalui persentase peningkatan jumlah budaya benda dan tak benda yang diapresiasi tercapai sesuai target sebesar 11,46. Sasaran tersebut perlu ditingkatkan karena terdapat aspek-aspek kebudayaan yang perlu dioptimalkan.
- b. Belum optimalnya upaya penggalian reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya , adat istiadat, bahasa, seni dan tradisi luhur, dalam beberapa bagian pelaksanaan dianggap sebagai penyelenggaraan event semata.
- c. Terancamnya kelestarian cagar budaya dan warisan budaya oleh proses alamiah dan dinamika perkotaan.
- d. Sarana prasarana museum dan manajemen museum yang belum memadai sehingga kehadiran museum belum menyentuh masyarakat luas
- e. Kebudayaan lokal belum menjadi pandangan hidup masyarakat , sehingga perlu peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni, adat istiadat dan tradisi, serta kesejarah purbakalaan
- f. Modifikasi kebudayaan dalam pariwisata melampaui daya dukung ekologi cenderung tidak berkelanjutan
- g. Kurangnya produksi pengetahuan untuk mendukung pelestarian kebudayaan.
- h. Belum optimalnya pengembangan pendidikan budaya yang terintegrasi
- i. Belum terumuskannya formulasi habitus keistimewaan DIY yang terisistematisasi dan terlembagakan
- j. Belum optimalnya program Keistimewaan dalam mengakselerasi pencapaian kesejahteraan warga
- k. Belum optimalnya sinergisitas dan keberlanjutan tata kelola program among tani dagang layar
- l. Belum optimalnya program Jaga Warga

2.3.1.4 Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan

2.3.1.4.1 Indikator Sasaran Pertumbuhan Ekonomi

- a. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 melebihi target sebesar 6,2 (dari target 5,24, atau sebesar 118,32% dari target). Kegiatan

pembangunan bandara di Kulon Progo ini secara umum memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi DIY. Meskipun demikian perlu diperhatikan beberapa aspek pendukungnya.

- b. Sektor usaha bidang pertanian/perikanan secara umum kurang memiliki daya tarik bagi generasi muda. Hal ini terlihat dari 52,19% pelaku usaha pertanian dan perikanan berusia lebih dari 55 tahun.
- c. Peningkatan produksi pertanian dan perikanan belum berimplikasi pada kesejahteraan petani yang ditunjukkan dengan nilai NTP total pada tahun 2018 sebesar 100,91
- d. Kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada Daerah Irigasi (DI) kewenangan DIY pada tahun 2018 berada dalam kondisi sedangbaru mencapai 71,9 %. Kondisi ini perlu ditingkatkan menuju kategori baik (lebih dari 80%). Kinerja 41 DI kewenangan DIY seluas 13.987 Ha baru mencapai 66,50 % pada tahun 2018.
- e. Terbatasnya jumlah tenaga kerja terlatih yang sesuai dengan kebutuhan industri. Saat ini jumlah tenaga kerja terlatih dan jenis pelatihan pada Balai Latihan Kerja didominasi sektor otomotif sebesar 766 (Disnakertrans DIY, 2018). Sementara itu kurikulum balai latihan kerja dan jenis pelatihan merespon perkembangan revolusi industri 4.0 masih minim.

2.3.1.4.2 Indikator Sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

- a. Indeks kualitas lingkungan hidup (yang terdiri dari indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan) masih berada pada kategori buruk, yaitu sebesar 61,69 pada tahun 2018 meskipun melebihi target RPJMD pada tahun tersebut (dari target 58,58 atau melebihi target sebesar 105,31%).
- b. Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY masih rendah, yaitu sebanyak 33 dari 80 usaha/kegiatan yang taat (41,25 %). Pelayanan dan pengawasan dokumen lingkungan juga perlu ditingkatkan baik untuk dokumen AMDAI, UKL-UPL maupun SPPL.
- c. Validasi kualitas substansi dan pengintegrasian dokumen/kajian lingkungan hidup ke dalam dokumen KRP belum memadai sehingga perlu terus ditingkatkan.
- d. Indeks kualitas air pada tahun 2018 masih berada dalam kategori buruk yaitu sebesar 40,25 karena sumber pencemar sungai dari point source maupun non point source masih tinggi.

- e. Indeks kualitas udara pada tahun 2018 sebesar 40,25, meskipun masih berada dalam kategori baik tetapi turun dari tahun 2017 sebesar 86,39. Penurunan ini karena meningkatnya pencemaran udara dari sumber emisi bergerak (kendaraan bermotor) dan tidak bergerak (industri/usaha/kegiatan) semakin meningkat.
- f. Partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan melalui kolaborasi bersama dengan pemerintah dan perguruan tinggi.
- g. Daya tampung sampah di TPA Piyungan sudah mencapai batas kapasitas maksimal pada tahun 2019 dengan kemampuan pengelolaan sebesar 600 ton per hari. Pengurangan sampah yang masuk ke TPA Piyungan oleh masyarakat masih sangat rendah.
- h. Kualitas tutupan lahan sebesar 60,86 pada tahun 2018 belum memenuhi kategori cukup ditambah dengan alih fungsi lahan hijau menjadi non hijau yang terus berlangsung.
- i. Kerusakan hutan masih terus terjadi dengan persentase sebesar 7,08 % pada tahun 2018.
- j. Produksi bibit tanaman kehutanan berkualitas perlu dikelola melalui sertifikasi bibit.

2.3.1.4.3 Indikator Sasaran Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

- a. Indikator kesesuaian pemanfaatan ruang memiliki capaian melebihi target sebesar 77,05 (dari target 76,5 atau sebesar 105,31% dari target) pada tahun 2018. Namun demikian terdapat beberapa aspek yang perlu dioptimalkan.
- b. Dari keseluruhan wilayah DIY baru Kota Yogyakarta dan Kecamatan Kasihan serta Kecamatan Sewon yang telah mempunyai Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) sebagai instrumen pengendali pemanfaatan ruang dan acuan perijinan pemanfaatan ruang.
- c. Perlu upaya menjaga kondisi air tanah tetap dalam kategori aman (rerata muka air tanah <20% dari ketebalan akuifer).
- d. Perlu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap izin pengusahaan air tanah dan pertambangan yang telah diterbitkan. Akumulasi jumlah izin pengusahaan air tanah dan geologi sesuai ketentuan pada tahun 2018 sebanyak 69 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) dan 1 kontrak karya.

2.3.1.4.4 **Indikator Sasaran Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan**

- a. Capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan tahun 2018 melebihi target 21,11%, dengan capaian sebesar 21,54% (atau sebesar 102,04%).
- b. Satuan Ruang Strategis (SRS) yang sudah memiliki dokumen rencana tata ruang baru mencapai 7 SRS, Tahun 2019 akan disusun 5 SRS dan Tahun 2020 akan disusun 4 SRS dan 2021 akan disusun 2 SRS.
- c. Satuan Ruang Strategis (SRS) yang sudah dilakukan penataan rencana tata ruang baru mencapai 7 SRS atau mencapai 38% antara lain :
 - 1) Kraton
 - 2) Makam Raja-Raja Mataram Imogiri
 - 3) Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyakpada Koridor Malioboro
 - 4) Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede
 - 5) Kerto -Pleret
 - 6) Perbukitan Menoreh
 - 7) Puro Pakualaman

2.3.1.5 **Sasaran Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah**

2.3.1.5.1 **Indikator Sasaran Indeks Williamson**

- a. Berdasarkan data sementara, capaian indikator indeks williamson untuk mengukur penurunan kesenjangan ekonomi antar wilayah sebesar 0,4661 (2018, angka sementara) belum mencapai target sebesar 0,4559 (2018).
- b. Berdasarkan data kondisi jalan pada tahun 2018, terdapat 205,98 km (27,08 %) jalan provinsi dalam kondisi rusak berat dan sedang dari total keseluruhan 760,45 km.
- c. Masih terdapat 45,69 km dari total 116, km ruas Jalan Pantai Selatan dalam kondisi 2 lajur, sehingga diperlukan pembebasan lahan untuk memenuhi standar jalan 4 lajur.
- d. Masih diperlukan penambahan aksesibilitas jaringan jalan baru sepanjang 25,35 kilo meter untuk meningkatkan konektivitas di DIY.
- e. Pengelolaan aset (berupa alas hak/sertifikat kepemilikan, leger jalan) belum dilakukan secara tertib pada jalan provinsi sepanjang 739,785 KM yang telah dilaksanakan proses pensertifikatan tanah.

- f. Masih diperlukan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) layak di kawasan permukiman dan kawasan strategis provinsi untuk mengurangi ketimpangan wilayah.
- g. Belum adanya koordinasi integrasi antar moda dalam perencanaan sistem transportasi di DIY dalam upaya kemudahan perpindahan orang dan barang. Sehingga diperlukan Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum tertata dengan baik.
- h. Kinerja pelayanan angkutan umum di DIY dinilai dari kinerja Angkutan Perkotaan Trans Jogja. Saat ini trayek Trans Jogja sudah mencakup 22 kecamatan dari total 25 kecamatan yang ada di Kawasan Perkotaan Yogyakarta atau sekira 88% wilayah aglomerasi telah dilayani oleh Angkutan Perkotaan Trans Jogja dengan 17 jalur, dan menyisakan 3 (tiga) kecamatan yang belum terlayani yaitu Kecamatan Godean, Ngaglik dan Ngemplak. Hasil penilaian kualitas standar SPM (Standar Pelayanan Minimal) untuk angkutan umum pada Angkutan Perkotaan Trans Jogja mencapai angka 45%.
- i. Kualitas tingkat layanan angkutan umum perkotaan belum optimal pada 17 jalur dengan 128 armada di 23 Kecamatan dari 25 Kecamatan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY).
- j. Perlu adanya upaya untuk menurunkan atau mempertahankan angka kecelakaan serendah mungkin dalam rangka mencapai *zero accident*. Masih terjadi 116 kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun 2018, tingkat kerawanan tertinggi pada ruas jalan provinsi Yogyakarta – Barongan, Kabupaten Bantul sebanyak 75 kejadian kecelakaan (Dinas Perhubungan, 2018).
- k. Perlu regulasi di tingkat daerah terkait angkutan sewa khusus (angkutan sewa khusus dalam jaringan (daring) seperti Taksi Online) untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan No. 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Regulasi daerah tersebut diharapkan dapat efektif menjadi instrumen pengawasan dan pengendalian armada angkutan tidak dalam trayek agar beroperasi sesuai dengan ketentuan perizinan serta mendukung pariwisata di DIY.
- l. Kinerja ruas jalan dan simpang di perkotaan sudah berada pada tingkat pelayanan D (V/C Ratio 0,74 – 0,85) mendekati arus tidak stabil dimana seluruh pengemudi akan dibatasi volume pelayanan berkaitan dengan kapasitas yang dapat diterima, bahkan di beberapa simpang sudah pada

tingkat pelayanan E (V/C ratio 0.85 – 1.0) dimana volume lalu lintas mendekati atau berada pada kapasitasnya dan arus tidak stabil dengan kondisi yang sering berhenti.

- m. Penyebaran Investasi Antar Kabupaten/Kota yang Tidak Merata. Sekitar 82% kegiatan investasi masih terpusat di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

2.3.1.6 Meningkatkan Kapasitas Tata kelola Pemerintahan

2.3.1.6.1 Indikator Sasaran Opini BPK

- a. Pemerintah Daerah DIY secara konsisten meraih predikat Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2010, akan tetapi memerlukan perbaikan dan peningkatan terus menerus.
- b. Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan asetnya belum optimal.
- c. Kemampuan pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah di masing-masing pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran belum merata
- d. Integrasi sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan belum optimal.

2.3.1.6.2 Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Pemerintah

- a. Pada tahun 2018, Pemerintah Daerah DIY memperoleh predikat Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP) “AA” pertama kali untuk seluruh Provinsi se-Indonesia (dari target nilai “A”). Namun demikian, terdapat gap yang perlu dioptimalisasi.
- b. Perlunya optimalisasi ketercapaian program pembangunan OPD mitra di bidang perekonomian, sosial budaya, pengembangan sarana dan prasarana, dan pemerintahan yang saat ini baru mencapai 91,25%.
- c. Perlu optimalisasi Sistem satu data pembangunan dalam pemenuhan kebutuhan data dan analisis perencanaan pembangunan daerah, dimana pada tahun 2018 dari 36 agen data yang ada, terdapat 5 agen data (dari kabupaten/ kota) yang belum tersinkronisasi dengan baik.
- d. Perlu Integrasi sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, monitoring dan evaluasi.
- e. Hasil penelitian dan pengembangan belum optimal dimanfaatkan dalam proses perencanaan.
- f. Masih terdapat 78 parameter dari 100 parameter pada layanan publik pengujian bahan bangunan, tanah dan batuan, yang belum terakreditasi.

2.3.1.7 Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan

2.3.1.7.1 Indikator Sasaran Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan

- a. Capaian indikator sasaran persentase capaian program urusan keistimewaan melebihi target 65,22% (2018) dengan capaian sebesar 100% (153,33% dari target). Namun demikian dalam beberapa aspek perlu tindak lanjut.
- b. Keluaran dokumen rumusan tata hubungan antara kelembagaan kasultanan dan kelembagaan kadipaten agar optimal perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut
- c. Persentase partisipasi Masyarakat yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan kegiatan keistimewaan perlu ditingkatkan.
- d. Persentase efektivitas evaluasi dan pengawasan program urusan keistimewaan perlu ditingkatkan.
- e. Perlunya optimalisasi peran Pemerintah DIY dalam pengembangan program urusan kebudayaan.

2.3.1.8 Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa

2.3.1.8.1 Indikator Sasaran Bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan.

- a. Capaian indikator sasaran Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan mencapai 7.928 bidang dari 7.919 bidang (2018, atau mencapai 100,11 dari target), dengan beberapa aspek yang perlu dioptimalkan.
- b. Masih ada bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa pada tahun 2018 yang belum tersertifikasi sebanyak 10.867 bidang tanah (77,38%) dari jumlah bidang tanah yang terinventarisasi sebanyak 14.044, dimana pada tahun 2018 dari 7.919 bidang tanah yang didaftarkan baru tercapai 3.766 bidang tanah yang tersertifikasi, sehingga masih ada tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa yang belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik.
- c. Dari 392 desa yang ada di DIY belum ada yang memiliki Peraturan Desa terkait Pemanfaatan Tanah Desa. Pada saat ini terdapat 36 desa (9,18%)

yang sudah mempunyai Peraturan Pemanfaatan Tanah Desa tetapi baru sebatas Rancangan Peraturan Desa (Raperdes).

- d. Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah kas desa perlu dilakukan secara persuasif.
- e. Masih terdapat ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten, pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 60 bidang dan turun menjadi 55 bidang pada tahun 2020.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.2.1.1 Urusan Pendidikan

- a. Satuan pendidikan belum sepenuhnya menerapkan standard nasional pendidikan (SNP). Satuan pendidikan yang menerapkan dan memenuhi SNP (2018) sebesar 78.81 % pada tingkat SMA dan 61.586 % pada tingkat SMK.
- b. Akreditasi menjadi dasar jaminan mutu suatu lembaga pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga (2018), sekolah menengah yang memenuhi Akreditasi A sebesar 66.9 %. Hal ini memperlihatkan masih kurangnya kualitas layanan pendidikan di DIY
- c. Layanan pendidikan masih terkendala pada ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai. Dimana masih terdapat ruang kelas yang mengalami kerusakan baik itu kerusakan ringan maupun berat. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (2017) masih terdapat 352 SD, 87 SMP, dan 75 SMA/SMK yang memiliki kelas dengan kerusakan berat.
- d. Kompetensi pendidikan merupakan kunci keberhasilan pada proses pendidikan. Guna memberikan layanan pendidikan yang optimal maka semua guru diarahkan untuk memenuhi standar kompetensi (sertifikasi). Namun jumlah guru yang memenuhi standar kompetensi masih rendah. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga (2018) sebesar 51.3 % guru SD, 65.9 % guru SMP, 59.5 % guru SMA, dan 47.2 % guru SMK yang memenuhi standard kompetensi (memiliki sertifikasi guru).
- e. Kualitas layanan pendidikan juga dapat dilihat dari tingkat keterserapan siswa di dunia kerja. Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan dunia kerja belum optimal. Hal ini terlihat dari

data (2017), bahwa lulusan SMK yang diterima di dunia kerja sebesar 51.08 %, sedangkan lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha yang dapat memasuki dunia kerja sebesar 76.94 %.

- f. Masih terdapatnya anak berkebutuhan khusus yang belum mengakses pendidikan. Berdasarkan pendataan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (2017) sebanyak 1592 anak berkebutuhan khusus yang belum mengakses pendidikan.
- g. Pengembangan pendidikan berbasis IT belum menjadi *mainstreaming* pada proses belajar mengajar di sekolah. Hal ini terlihat pada masih rendahnya Guru dan siswa yang memanfaatkan layanan pendidikan berbasis teknologi Informasi. Berdasarkan data tahun 2018, sebanyak 11.81% guru dan 4.06% siswa yang memanfaatkan layanan pendidikan berbasis IT di DIY.
- h. Belum optimalnya penerapan pendidikan berbasis budaya. Tahun 2018 baru sebanyak 113 sekolah (25.34 %) yang menerapkan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju

2.3.2.1.2 Urusan Kesehatan

- a. Angka Stunting masih cukup tinggi. Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan angka Stunting DIY sebesar 21,5% meskipun masih di bawah angka nasional pada angka 30,8 % tetapi capaian angka stunting DIY 2018 masih belum mencapai target Rencana Aksi Daerah (RAD) DIY Pangan dan Gizi yaitu di angka 17%.
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan dasar kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sesuai permenkes 43 tahun 2016.
- c. Prevalensi beberapa Penyakit Menular di atas rata-rata nasional. Dari data Riskesdas 2018, Prevalensi Diare dan hepatitis.
- d. Gaya hidup sehat yang masih kurang. Ditunjukkan dengan angka prevalensi Penyakit tidak menular yang berada di atas rata-rata nasional. Penyakit yang dimaksud adalah penyakit asma, ginjal kronis, jantung, kanker, diabetes melitus, dan stroke(Riskedas, 2018).
- e. Masih tingginya kasus HIV/AIDS. Kondisi ini terlihat pada penambahan jumlah kasus HIV sebesar 512 dan penderita AIDS sebesar 140 orang pada tahun 2018. Data Dinkes menunjukkan akumulasi pengidap HIV AIDS dari tahun 1993 sampai dengan 2018 sebanyak 4.781 orang, dimana 1.647 orang diantaranya telah positif AIDS. Faktor penyebab utama adalah penularan melalui hubungan heteroseksual.

- f. Prevalensi gangguan jiwa Skizofrenia di DIY masih tinggi. Data Riskesdas 2018 menunjukkan angka 10,36 per mil rumah tangga masih lebih tinggi dengan angka nasional sebesar 7,0 per mil.
- g. Masih perlunya peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) untuk meningkatkan kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat. Dari data profil kesehatan DIY tahun 2017, persentase cakupan PHBS pada tahun 2017 sebesar 45,32%.
- h. Kawasan *aerotropolis* Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) perlu didukung dengan keberadaan fasilitas kesehatan yang memiliki manajemen internasional.

2.3.2.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Belum semua penduduk berakses sanitasi layak. Jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak sejumlah 3.486.074 jiwa atau sama dengan 91,30% dari jumlah penduduk DIY
- b. Jumlah penduduk berakses air minum layak secara kumulatif mencapai 1.103.295 rumah tangga atau 91,77% dari jumlah rumah tangga DIY. Sampai dengan akhir tahun 2018 capaian penduduk berakses air minum telah mencapai 100,51 % dari target sebesar 86,98%.
- c. Target luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi pada Tahun Anggaran 2018 sebesar 83,25% dari total luas layanan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan DIY. Realisasi sampai akhir tahun 2018 luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi sebesar 83,25%.
- d. Berdasarkan data kondisi jalan pada tahun 2018, terdapat 205,98km (27,08 %) jalan provinsi dalam kondisi rusak berat dan sedang dari total keseluruhan 760,45 km.
- e. Masih terdapat 45,69 km dari total 116,07 km ruas Jalan Pantai Selatan dalam kondisi 2 lajur, sehingga diperlukan pembebasan lahan untuk memenuhi standar jalan 4 lajur.
- f. Masih diperlukan penambahan aksesibilitas jaringan jalan baru sepanjang 25,35 kilo meter untuk meningkatkan konektivitas di DIY.
- g. Kinerja Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi sebesar 63,26 % dan kinerja Pelayanan Jasa Pengujian Kontruksi sebesar 70,42% sehingga kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mencapai 66,84%.

2.3.2.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

- a. Masih ada 56.020 rumah tidak layak huni yang perlu ditingkatkan kualitasnya dari 65.578 Unit.
- b. Masih ada 520 hektar luasan kawasan kumuh yang belum tertangani dari 965,51 hektar.

2.3.2.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- a. Penyelesaian tindak kejahatan yang belum optimal atau baru sekira 49,2 persen dimana 5.317 tindak kejahatan yang dilaporkan, sejumlah 2617 yang diselesaikan (Statistik Politik dan Keamanan DIY 2019)
- b. meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi (banjir, longsor, angin kencang, kekeringan) di DIY. Pada 2017, terdapat 18.600 kejadian bencana di DIY, 1.211 (65%) kejadian diantaranya adalah jenis bencana hidrometeorologi. Sementara itu, sistem peringatan dini (early warning system) yang ada di DIY belum merata (baru terintegrasi untuk EWS longsor di Bantul dan Kulon Progo). EWS dan diseminasi informasi kebencanaan kepada masyarakat belum cukup dioptimalkan sebagai bagian dari mitigasi bencana guna meminimalisir adanya korban, kerusakan, dan kerugian sebagai dampak dari kejadian bencana.

2.3.2.1.6 Urusan Sosial

- a. PMKS di DIY dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan. Peningkatan pada jenis PMKS Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, Orang dengan HIV/AIDS, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis dan Fakir Miskin. Pemberian jaminan sosial rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial perlu diprioritaskan untuk kelompok tersebut tanpa mengesampingkan intervensi untuk PMKS lainnya.
- b. Pada pelayanan melalui Balai ada sejumlah permasalahan diantaranya:
 1. Sarana prasarana balai yang kurang dan mengalami kerusakan. Enam balai mengalami kerusakan ringan dan sedang, kebutuhan kamera pemantau (CCTV) di BPRSR guna memantau/mengawasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH);
 2. Kurangnya SDM di balai sosial. Jumlah pekerja sosial di balai sosial rasio nya cukup kecil dibandingkan dengan klien yang harus dilayani sehingga pelayanan sosial kurang optimal.
 3. Kurangnya Fasilitas Pendukung Lainnya; Pada BRSBKL mengalami kesulitan untuk warga balai mendapatkan identitas kependudukan.

- c. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas masih belum optimal. jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas setidaknya 1 persen dari seluruh karyawan jumlahnya masih sangat sedikit.

2.3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.2.1 Urusan Tenaga Kerja

- a. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 3,02 pada agustus 2017 menjadi 3,35% pada agustus 2018
- b. Masih adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan dunia usaha dengan tenaga kerja yang dibutuhkan. Berdasarkan data dari lowongan kerja yang tercatat oleh dinas, dari 14.150 lowongan kerja yang tersedia pada tahun 2017 hanya dapat dipenuhi sejumlah 9.208. Ketidak terpenuhan lowongan kerja tersebut menunjukkan indikasi diantaranya adalah adanya ketidaksesuaian antara sisi penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja.
- c. Masih terbatasnya lapangan kerja pada wilayah-wilayah miskin. Data menunjukkan konsentrasi perusahaan ada di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Jumlah tenaga kerja formal pada wilayah Gunungkidul, Bantul dan Kulon Progo hanya sebesar 26% dari total tenaga kerja yang bekerja di perusahaan. Hal tersebut menunjukkan adanya keterbatasan lapangan kerja pada kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan relatif lebih tinggi.
- d. Masih terbatasnya keterampilan tenaga kerja dalam berwirausaha berbasis teknologi informasi dalam rangka mengantisipasi Revolusi Industri 4.0 (*Make Indonesia 4.0*). Kompetensi pelatihan tenaga kerja masih didominasi oleh ketrampilan bidang otomotif atau pertukangan. Tenaga kerja terlatih di bidang Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) masih hanya sekitar 11% dari tenaga kerja yang dilatih.

2.3.2.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Capaian IPG dan IDG yang belum optimal. IPG di DIY tahun 2017 berada pada 94,39% belum mencapai target 100%. manakala dilihat per kabupaten/kota menunjukkan Kabupaten Gunungkidul capaian IDG nya di bawah rata-rata DIY, sedangkan 4 kabupaten/kota lain di DIY berada di atas rata-rata DIY. Dalam hal IDG, capaian IDG DIY tahun 2013-2017 selalu berada di bawah rata-rata nasional. Sedangkan apabila dilihat per kabupaten, capaian IDG tahun 2017 kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul di bawah rata-rata DIY.

- b. Belum terwujudnya komitmen partisipasi perempuan di legislatif. Keterwakilan perempuan yang diharapkan pada angka 30 persen, pada kenyataannya belum mencapai target. Pada tahun 2018 capaiannya tertinggi 24 persen di kabupaten Sleman, dan terendah sebesar 6,82 persen di kabupaten Bantul.
- a. Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang belum optimal. Data 2018 menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan cukup tinggi dan terjadi peningkatan angka kekerasan pada perempuan dan angka kasus kekerasan pada anak di DIY di banding tahun 2017.

2.3.2.2.3 **Urusan Pangan**

- a. Belum adanya upaya pemerataan pemanfaatan hasil produksi pangan pada musim panen dan *paceklik*, terutama padi yang produksinya melimpah pada bulan Januari hingga April, namun produksinya relatif sedikit pada bulan September hingga Desember
- b. Tingkat konsumsi beras masyarakat masih tinggi, yaitu 92,7 kg/kapita/tahun
- c. Skor konsumsi kelompok pangan buah dan sayuran, umbi-umbian, serta kacang-kacangan masih lebih rendah dibandingkan nilai ideal. Skor konsumsi aktual buah dan sayuran, umbi-umbian, serta kacang-kacangan masing-masing sebesar 23, 1,4, 7,2 lebih rendah dari skor idealnya masing-masing sebesar 30, 2,5, 10
- d. Masih terdapat desa rawan pangan di DIY. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses dan ketersediaan pangan masyarakat karena tidak memiliki sumber produksi pangan, sehingga pemanfaatan pangan rendah
- e. Berkurangnya jumlah penyuluh pertanian karena pensiun. Berdasarkan data, dapat diketahui bahwa jumlah penyuluh PNS pada tahun 2018 menurun sebesar ... orang (...%) dibanding tahun 2017.

2.3.2.2.4 **Urusan Pertanahan**

- a. Masih ada bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa pada tahun 2018 yang belum tersertifikasi sebanyak 10.867 bidang tanah (77,38%) dari jumlah bidang tanah yang terinventarisasi sebanyak 14.044, dimana pada tahun 2018 dari 7.919 bidang tanah yang didaftarkan baru tercapai 3.766 bidang tanah yang tersertifikasi, sehingga masih ada tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa yang belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik.

- b. Dari 392 desa yang ada di DIY belum ada yang memiliki Peraturan Desa terkait Pemanfaatan Tanah Desa. Pada saat ini terdapat 36 desa (9,18%) yang sudah mempunyai Peraturan Pemanfaatan Tanah Desa tetapi baru sebatas Rancangan Peraturan Desa (Raperdes).
- c. Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah kas desa perlu dilakukan secara persuasive.

2.3.2.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

- a. Indeks kualitas lingkungan hidup (yang terdiri dari indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan) masih berada pada kategori buruk, yaitu sebesar 61,69 pada tahun 2018 (Target RPJMD DIY 2017-2022 pada tahun 2018: 58,58).
- b. Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY masih rendah, yaitu sebanyak 33 dari 80 usaha/kegiatan yang taat (41,25 %). Pelayanan dan pengawasan dokumen lingkungan juga perlu ditingkatkan baik untuk dokumen AMDAL, UKL-UPL maupun SPPL.
- c. Validasi kualitas substansi dan pengintegrasian dokumen/kajian lingkungan hidup ke dalam dokumen KRP belum memadai sehingga perlu terus ditingkatkan.
- d. Indeks kualitas air pada tahun 2018 masih berada dalam kategori buruk yaitu sebesar 40,25 karena sumber pencemar sungai dari point source maupun non point source masih tinggi.
- e. Indeks kualitas udara pada tahun 2018 sebesar 40,25, meskipun masih berada dalam kategori baik tetapi turun dari tahun 2017 sebesar 86,39. Penurunan ini karena meningkatnya pencemaran udara dari sumber emisi bergerak (kendaraan bermotor) dan tidak bergerak (industri/usaha/kegiatan) semakin meningkat.
- f. Partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan melalui kolaborasi bersama dengan pemerintah dan perguruan tinggi.
- g. Daya tampung sampah di TPA Piyungan sudah mencapai batas kapasitas maksimal pada tahun 2019 dengan kemampuan pengelolaan sebesar 600 ton per hari. Pengurangan sampah yang masuk ke TPA Piyungan oleh masyarakat masih sangat rendah.
- h. Kualitas tutupan lahan sebesar 60,86 pada tahun 2018 belum memenuhi kategori cukup ditambah dengan alih fungsi lahan hijau menjadi non hijau yang terus berlangsung.

- i. Kerusakan hutan masih terus terjadi dengan persentase sebesar 7,08 % pada tahun 2018

2.3.2.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Belum optimalnya ketertiban administrasi kependudukan yang ditandai dengan masih kurang optimalnya kepemilikan dokumen wajib kependudukan, utamanya: akta lahir, KIA (Kartu Identitas Anak), Kartu Keluarga, Akta/Surat Nikah, dan akta kematian. Untuk kepemilikan akta lahir, pada tahun 2018, dari jumlah anak usia di bawah 18 tahun di DIY sebanyak 856.464 anak memiliki akta dan sebanyak 58.442 (6,8%) anak belum memiliki akta lahir. Pelayanan dokumen kependudukan yang terintegrasi belum cukup optimal dan merata dalam mendukung kepemilikan dokumen kependudukan tersebut.

2.3.2.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Problem kemiskinan masih menjadi tantangan dalam pemberdayaan masyarakat desa. Dari data kemiskinan BPS 2018 Persentase penduduk miskin wilayah perdesaan lebih tinggi dari wilayah perkotaan.
- b. Kerbedaan Posyandu aktif di wilayah DIY sudah cukup bagus diatas 80% hanya saja persentase posyandu aktif di Kota Yogyakarta yang masih kurang yaitu pada angka 19,42% sehingga perlu upaya mendorong revitalisasi peran Posyandu.

2.3.2.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Pertumbuhan Penduduk yang dilihat melalui indikator Total Fertility Rate (TFR) yang capaiannya di tahun 2017 berada pada angka 2,2 menunjukkan trend meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Diperlukan upaya serius pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana Perubahan
- b. Tingginya Jumlah Pasangan Usia Subur yang Tidak Ber-KB (Kelompok *Unmet Need*). Secara keseluruhan, *unmet need* DIY tahun 2017 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan *unmet need* DIY tahun 2016. Pada tahun 2016 *unmet need* DIY adalah 8,01 persen. Kemudian pada tahun 2017 *unmet need* DIY tercatat 10,08 persen.
- c. Angka perceraian di DIY masih sangat tinggi. Meskipun data perceraian tahun 2014 - 2017 menunjukkan trend penurunan di masing-masing kabupaten/kota (kecuali Bantul), namun penurunan tersebut belum signifikan dan masih sangat tinggi.

- d. Perkawinan usia anak di DIY masih sangat tinggi. Meskipun *trend* nya turun tetapi jumlahnya masih cukup tinggi. Di tahun 2017 tercatat ada 294 dispensasi kawin.

2.3.2.2.9 Urusan Perhubungan

- a. Kinerja pelayanan angkutan umum di DIY dinilai dari kinerja Angkutan Perkotaan Trans Jogja. Saat ini trayek Trans Jogja sudah mencakup 22 kecamatan dari total 25 kecamatan yang ada di Kawasan Perkotaan Yogyakarta atau sekira 88% wilayah aglomerasi telah dilayani oleh Angkutan Perkotaan Trans Jogja dengan 17 jalur, dan menyisakan 3 (tiga) kecamatan yang belum terlayani yaitu Kecamatan Godean, Ngaglik dan Ngeplak. Hasil penilaian kualitas standar SPM (Standar Pelayanan Minimal) untuk angkutan umum pada Angkutan Perkotaan Trans Jogja mencapai angka 45%.
- b. Kualitas tingkat layanan angkutan umum perkotaan belum optimal pada 17 jalur dengan 128 armada di 23 Kecamatan dari 25 Kecamatan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY).
- c. Perlu adanya upaya untuk menurunkan atau mempertahankan angka kecelakaan serendah mungkin dalam rangka mencapai *zero accident*. Masih terjadi 116 kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun 2018, tingkat kerawanan tertinggi pada ruas jalan provinsi Yogyakarta – Barongan, Kabupaten Bantul sebanyak 75 kejadian kecelakaan (Dinas Perhubungan, 2018).
- d. Perlu regulasi di tingkat daerah terkait angkutan sewa khusus (angkutan sewa khusus dalam jaringan (daring) seperti Taksi Online) untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan No. 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Regulasi daerah tersebut diharapkan dapat efektif menjadi instrumen pengawasan dan pengendalian armada angkutan tidak dalam trayek agar beroperasi sesuai dengan ketentuan perizinan serta mendukung pariwisata di DIY.
- e. Belum adanya koordinasi integrasi antar moda dalam perencanaan sistem transportasi di DIY dalam upaya kemudahan perpindahan orang dan barang. Sehingga diperlukan Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum tertata dengan baik
- f. Kinerja layanan simpang dan ruas jalan pada perkotaan DIY berada dalam kondisi yang hampir tidak memadai sehingga perlu upaya penanganan lintas sektor.

- g. Operasional Penuh Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) pada tahun 2020 perlu dilengkapi dengan infrastruktur pendukung khususnya pada jaringan pergerakan dan infrastruktur dasar

2.3.2.2.10 **Urusan Komunikasi dan informatika**

- a. Dari data Komisi Informasi Pusat (2018), Kualifikasi Badan Publik Kategori Pemerintah Provinsi 2018 dinilai kurang informatif. Peranan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di masing-masing badan publik dirasa belum optimal karena tingkat keterbukaan informasi yang masih kurang. Masyarakat yang ingin mengakses informasi masih terkendala dengan prosedur yang panjang, tidak mudah dan dari sisi badan publik sendiri masih belum *aware* akan peranan pejabat PPID nya.

2.3.2.2.11 **Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

- a. Masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan Koperasi. Hal tersebut diindikasikan dengan belum sepenuhnya Koperasi yang melaksanakan RAT. Padahal Rapat Anggota Tahunan (RAT) menunjukkan salah satu wujud kualitas koperasi. Hanya ada 75% koperasi yang menyelenggarakan RAT pada tahun 2018. Angka tersebut belum beranjak jauh dari tahun sebelumnya yang sebesar 73%.
- b. Masih rendahnya koperasi produsen atau sektor riil. Koperasi di DIY didominasi oleh Koperasi Konsumen (44%) dan Koperasi Simpan Pinjam (33%). Jumlah Koperasi Produsen cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2014 terdapat 285 Koperasi Produsen, jumlah tersebut menurun pada tahun 2018 menjadi 212 koperasi.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk Koperasi dan UKM. Berdasarkan data dari Sensus Ekonomi Lanjutan tahun 2016 (SE 2016-Lanjutan), Pengelolaan usaha mikro dan kecil masih sederhana. Baru sekitar 18,34% usaha mikro dan kecil yang menggunakan internet dan 9,04% usaha mikro dan kecil yang menggunakan komputer.
- d. Masih rendahnya daya saing produk Usaha Kecil dan Menengah. Data SE 2016 Lanjutan menunjukkan aspek adanya pesaing menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro dan kecil baik di tingkat nasional maupun di DIY. Secara nasional, adanya pesaing menjadi kendala peringkat 2 setelah permasalahan permodalan. Untuk DIY, 14,95% pelaku usaha menganggap adanya pesaing menjadi salah satu kendala dalam usaha. Hal ini menunjukkan masih belum siapnya daya saing produk UKM.
- e. Masih rendahnya daya saing koperasi terutama dalam menanggapi tantangan perkembangan jaman/generasi milenial.

2.3.2.2.12 Urusan Penanaman modal

- a. Penyebaran Investasi Antar Kabupaten/Kota yang Tidak Merata. Sekitar 82% kegiatan investasi masih terpusat di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.
- b. Belum optimalnya dukungan infrastruktur dan kelembagaan dalam kegiatan investasi. berdasarkan survei yang dilakukan *Asia Competitiveness Institute* (2017), DIY menempati peringkat 9 dalam ranking daya saing atau tertinggal dari provinsi-provinsi di Jawa-Bali.
- c. Belum optimalnya penerapan *Online Single Submission* (OSS) dalam perijinan serta Masih rendahnya realisasi investasi jika dibandingkan dengan ijin yang diajukan.

2.3.2.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a. Capaian prestasi olahraga merupakan tolak ukur keberhasilan pembinaan olahraga pada berbagai kompetisi olahraga. Prestasi olahraga DIY pada beberapa kompetisi secara terus menerus perlu ditingkatkan. Sebagaimana terlihat pada capaian prestasi POPWIL tahun 2018 dimana DIY mendapat 20 medali (juara 3), 31 medali pada Kejuaraan POPNAS pada tahun 2017, 20 medali pada kejuaraan PEPARNAS tahun 2017, 30 medali pada Kejuaraan Nasional antar PPLP tahun 2018, dan 2 medali pada Kejuaraan ASEAN *School* tahun 2017
- b. Sentra pemberdayaan pemuda merupakan wadah untuk mengembangkan potensi pemuda agar terbentuk pemuda inovatif, kreatif, mandiri, dan berdaya saing. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (5), dan Pasal 35 ayat (4) dimana pemerintah daerah perlu menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda. Saat ini DIY telah memiliki 46 sentra pemuda. Namun sejak tahun 2017, perkembangan jumlah sentra pemberdayaan pemuda di DIY mengalami stagnasi

2.3.2.2.14 Urusan Statistik

- a. Optimalisasi implementasi sistem satu data pembangunan dalam pemenuhan kebutuhan data dan analisis perencanaan pembangunan daerah, dimana pada tahun 2018 dari 36 agen data yang ada, terdapat 5 agen data (dari kabupaten/ kota) yang belum tersinkronisasi dengan baik.
- b. Indikator sasaran program statistik yang kedua adalah tingkat kepuasan pelanggan yaitu sebesar 68%. Target tersebut telah dilampaui dengan

capaian sebesar 76,73%. Dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah melalui pencapaian target persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah, maka dilaksanakan Program Pengembangan Statistik Daerah yang kemudian dijabarkan dalam dua kegiatan yaitu: 1) Pengelolaan Data dan Statistik Daerah; dan 2) Penyajian dan Informasi Data Statistik. Hasil dari dua kegiatan itu adalah penyediaan bahan masukan yang digunakan dalam perencanaan, misalnya Analisis PDRB, ICOR, dan Makro Ekonomi.

2.3.2.2.15 Urusan Persandian

- a. Keterbatasan SDM Sandiman
- b. Pemutakhiran jaringan dan sistem pengamanan sandi belum optimal.

2.3.2.2.16 Urusan Kebudayaan

- a. Terancamnya kelestarian cagar budaya dan warisan budaya oleh proses alamiah dan dinamika perkotaan.
- b. Belum optimalnya upaya penggalian reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya, adat istiadat, bahasa, seni dan tradisi luhur
- c. Sarana prasarana museum dan manajemen museum yang belum memadai sehingga kehadiran museum belum menyentuh masyarakat luas
- d. Kebudayaan lokal belum menjadi pandangan hidup masyarakat, sehingga perlu peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni, adat istiadat dan tradisi, serta kesejarah purbakalaan.

2.3.2.2.17 Urusan Perpustakaan

- a. Belum optimalnya jumlah perpustakaan yang terakreditasi. Dari total 3.637 perpustakaan yang terdapat di DIY, tercatat baru terdapat 142 perpustakaan atau baru 3,9% perpustakaan yang sudah terakreditasi. Masih terdapat 3.495 atau 96,1% perpustakaan yang belum terakreditasi
- b. Rendahnya minat baca masyarakat. Tingkat kegemaran membaca di DIY, berdasarkan survey terakhir yang dilakukan oleh Tim BPAD DIY pada tahun 2018 menunjukkan skor yang masih kecil yaitu 46,13 dari skor tertinggi 100. Skor TGM Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan rerata dari rata-rata TGM di 5 (lima) wilayah kabupaten/kota.
- c. Belum optimalnya silang pinjam antar perpustakaan dalam Jogja Library for All. Jogja Library for All (JLA) merupakan jaringan kerjasama antar perpustakaan di Yogyakarta yang antara lain dalam bentuk catalog bersama dan silang pinjam. Hingga saat ini terdapat 39 anggota perpustakaan yang

tergabung dalam JLA namun sampai tahun 2018 baru 4 (empat) perpustakaan yang telah melakukan kerjasama silang pinjam yaitu perpustakaan UGM, UMY, UNY dan BPAD.

2.3.2.2.18 Urusan Kearsipan

- a. Penyelenggaraan kearsipan dan pemanfaatan arsip yang belum sesuai dengan standar pengelolaan arsip. Hasil pembinaan kearsipan tahun 2018, dari 52 instansi, terdapat 40 instansi yang dapat dikategorikan memenuhi standard dan masih terdapat 12 instansi atau sekitar 23% yang belum memenuhi standar.
- b. Belum optimalnya sarana layanan arsip. Saat ini layanan arsip belum berjalan dengan optimal karena Gedung arsip di Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 1 belum bisa dipindahkan. Hasil penilaian arsip di OPD belum bisa dipindahkan karena Penyimpanan arsip di DPAD sudah penuh. Saat ini terdapat sekitar 1500 boks arsip dari 10 OPD yang belum bisa dipindahkan karena keterbatasan tempat sehingga statusnya masih ditiptkan di OPD tersebut. Ke 10 OPD tersebut adalah BLH, BKPP, NAKERTRANS, BAPEDA, DINSOS, PERHUBUNGAN, DINKES, BKD, PERTANIAN, DISKANLA.
- c. Belum optimalnya layanan arsip statis. Jumlah arsip yang dimanfaatkan 5.782 berkas atau sebesar 205.304 lembar sedangkan arsip yang sudah diolah sebanyak 47.438 berkas atau 523.860 lembar. Berarti baru sebesar 39,2 persen dari arsip yang diolah yang bisa dimanfaatkan.

2.3.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.2.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Kurangnya kapasitas SDM dan kelembagaan perikanan. Jumlah kelompok budidaya perikanan pada tahun 2018 sejumlah 1.438 kelompok, namun kelompok yang bersertifikat CBIB baru 422 kelompok dan bersertifikat CPIB baru 28 kelompok.
- b. Produksi perikanan belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, sehingga menyebabkan rasio impor ikan antar daerah masih sekitar 15%
- c. masih rendahnya nilai tambah hasil olahan ikan. Hal ini ditunjukkan produksi ikan segar pada tahun 2018 sejumlah 102.432,65 ton, namun produk olahan ikan yang dihasilkan hanya 8.386,73 ton
- d. belum beroperasinya Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto karena terkendala pembangunan perpanjangan breakwater dari 220 meter

menjadi 390 meter di sisi Timur dan dari 250 meter menjadi 350 meter di sisi Barat

- e. Pemanfaatan kapal INKAMINA (>30GT) belum optimal disebabkan tingginya biaya operasional melaut dan kurangnya SDM nelayan untuk mengoperasikan kapal tersebut
- f. usaha perikanan belum menerapkan prinsip agribisnis yang menyebabkan tingkat kesejahteraan pembudidaya/nelayan masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai NTP perikanan sebesar 102,88.

2.3.2.3.2 Urusan Pariwisata

- a. Masih rendahnya lama tinggal wisatawan. Lama tinggal wisatawan khususnya Wisman di DIY relatif lebih rendah (2,1 hari) jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Bali yang mencapai lebih dari 3 hari untuk Wisman. Juga lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 2,8 hari.
- b. Belum berkembangnya destinasi dan event wisata berkelas dunia. Dalam Calendar of Event tahun 2019 yang dirilis Kementerian Pariwisata melalui proses seleksi dan kurasi, event di DIY yang masuk dalam COE hanya ada sejumlah 3 event. Jumlah tersebut lebih rendah dari Bali yang mencapai 6 event atau Jawa tengah dengan 5 event. Hal ini menunjukkan bahwa event atau festival di DIY belum banyak yang layak ditawarkan kepada Wisatawan Mancanegara.
- c. Masih terbatasnya kapasitas industri dan usaha jasa yang memenuhi kualifikasi standar. Keterbatasan usaha jasa pariwisata terutama dirasakan di kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul dan Bantul. Kulon Progo sebagai lokasi bandara baru, hanya memiliki 17 Usaha Perjalanan Wisata. Angka tersebut cukup jauh jika dibandingkan dengan Sleman yang memiliki 305 usaha.
- d. Masih terbatasnya kapasitas SDM pariwisata. Salah satu indikasi masih terbatasnya kapasitas SDM pariwisata adalah jumlah pramuwisata bersertifikasi internasional hanya 15 orang. Sementara itu, pramuwisata yang berkelas nasional jauh lebih besar yaitu 512 orang. Dengan demikian, perlu adanya peningkatan kapasitas SDM agar pramuwisata kelas nasional dapat meningkat menjadi kelas internasional.
- a. Belum optimalnya promosi pariwisata melalui teknologi informasi, layanan TIC dan pelibatan kedutaan besar RI di luar negeri. Terdapat penurunan jumlah Wisman yang menggunakan jasa TIC dari 13.795 pada tahun 2016

menjadi 11.317 orang pada tahun 2017. Data pengikut akun instagram Visting Jogja misalnya, per february 2019 baru mencapai sekitar 3 ribu, masih tertinggal jika dibandingkan dengan akun-akun lain seperti milik Banyuwangi sudah mencapai 56 ribu pengikut dan Pesona Indonesia milik Kementerian yang mencapai 167 ribu pengikut.

2.3.2.3.3 Urusan Pertanian

- a. Terjadinya konversi lahan pertanian terutama lahan sawah menjadi kawasan non pertanian dengan rata-rata 259 ha/tahun selama 5 tahun terakhir dikarenakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian belum berjalan efektif
- b. Kurangnya kapasitas SDM dan kelembagaan petani dalam mengakses informasi teknologi dan pemasaran produk pertanian.
- c. Luas lahan petani yang sempit berdampak pada tidak efisiennya usaha pertanian dalam skala usaha sehingga peningkatan kesejahteraan petani menjadi rendah. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata NTP subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan tahun 2018 sebesar 101,39
- d. Kurangnya infrastruktur pertanian serta belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, dan alat mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani
- e. Perubahan iklim berdampak terhadap serangan hama, penyakit tanaman/hewan, dan bencana banjir/kekeringan sehingga menyebabkan penurunan produksi pertanian.
- f. Kurangnya lahan untuk usaha peternakan dan penanaman hijauan pakan ternak

2.3.2.3.4 Urusan Kehutanan

- a. Pengelolaan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi secara berkelanjutan belum optimal. Masalah mendasar di kawasan hutan disebabkan ketidakjelasan batas kawasan, sehingga kepastian wilayah kelola juga belum bisa terpenuhi
- b. Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan belum optimal. Sementara itu, penurunan kerusakan hutan akan efektif diwujudkan melalui peningkatan upaya perlindungan dan pengamanan hutan serta didukung dengan upaya pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam rangka peningkatan pendapatannya melalui skema tumpangsari maupun pola kerjasama lain
- c. Perencanaan dan penataan kawasan hutan belum optimal

- d. Pengelolaan DAS Provinsi belum optimal
- e. Produksi bibit tanaman kehutanan berkualitas perlu dikelola melalui sertifikasi bibit.

2.3.2.3.5 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Persentase rumah tangga yang menikmati listrik pada tahun 2018 sebesar 99,9 %. Masih ada 1002 rumah tangga yang belum menikmati listrik dan 52.446 rumah tangga yang belum menikmati listrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan.
- b. Perlu upaya menjaga kondisi air tanah tetap dalam kategori aman (rerata muka air tanah <20% dari ketebalan akuifer).
- c. Perlu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap izin perusahaan air tanah dan pertambangan yang telah diterbitkan. Akumulasi jumlah izin perusahaan air tanah dan geologi sesuai ketentuan pada tahun 2018 sebanyak 69 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) dan 1 kontrak karya.

2.3.2.3.6 Urusan Perdagangan

- a. Adanya ancaman bagi pelaku usaha lokal atau pelaku usaha perdagangan di pasar tradisional dengan keberadaan toko modern. Keberadaan pasar tradisional cenderung stagnan sejak beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, jumlah pasar tradisional tinggal 349 unit. Sementara itu, toko modern tumbuh hingga sebanyak 825 unit.
- b. Belum optimalnya kerjasama dan promosi perdagangan luar negeri DIY dengan pelibatan kedutaan RI di luar negeri. Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa kontribusi nilai ekspor DIY terhadap total ekspor non migas nasional hanya 0.01%. Nilai tersebut cukup rendah jika dibandingkan dengan daerah lain. DIY menempati urutan ke 30. Capaian tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan kontribusi Bali yang mencapai 0.18% atau Jawa Tengah yang mencapai 3,77%
- c. Masih adanya potensi fluktuasi harga kebutuhan pokok dan strategis.
- d. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk

2.3.2.3.7 Urusan Perindustrian

- a. Masih rendahnya daya saing produk industri dan belum terpenuhinya standarisasi mutu produk IKM. Hanya 0,79% dari total seluruh industri skala

kecil yang memiliki Sertifikat Skala Nasional dan Internasional seperti SNI atau ISO (SE 2016-Lanjutan).

- b. Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku lokal sebagai produk IKM. Bahan baku masih menjadi kendala bagi IKM. Data SE 2016-Lanjutan menunjukan bahwa bahan baku menempati kendala peringkat ke-2 setelah permodalan. Sekitar 17,23% IKM di DIY menganggap bahan baku sebagai kendala utama.
- c. Masih adanya keterbatasan dalam pengembangan industri kreatif terutama yang berbasis IT. Baru ada sekitar 13,2% pelaku industri kecil yang menggunakan internet untuk usahanya(SE-2016 Lanjutan).
- d. Masih adanya keterbatasan kemampuan SDM dan teknologi produksi. Data Sensus Ekonomi menunjukan Industri kecil di DIY didominasi dikelola oleh SDM dengan latar pendidikan SMP, SD atau tidak tamatan SD yaitu sebesar 69,2%. Di sisi lain, 98% industri kecil di DIY belum berbadan usaha. Hal ini menunjukan bahwa industri kecil di DIY masih dikelola secara sederhana baik dari sisi manajerial maupun teknologi produksi.
- e. Masih rendahnya kepemilikan hak kekayaan intelektual oleh IKM. Hanya ada sekitar 0,5% pelaku industri kecil yang memiliki HKI (SE-2016 Lanjutan)
- f. Masih rendahnya pemanfaatan alat tepat guna. Pembuatan ATG masih terbatas pesanan dengan merekayasa alat yang sudah ada. Belum dilakukan penciptaan inovasi ATG berdasarkan kebutuhan IKM

2.3.2.3.8 Urusan Ketrasmigrasian

- a. Keterbatasan kuota transmigrasi dari pemerintah pusat. Animo penduduk yang ingin bertransmigrasi cukup besar namun tidak sepenuhnya dapat ditempatkan. Tahun 2017 terdapat 384 KK yang memiliki animo mengikuti transmigrasi namun hanya 192 KK yang dapat ditempatkan karena keterbatasan kuota dari pemerintah.

2.3.2.4 Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta Fungsi Penunjang

2.3.2.4.1 Sekretariat Daerah

Asimetri kebutuhan bahan kebijakan dengan ketersediaan bahan rumusan kebijakan

2.3.2.4.2 Sekretariat DPRD

Kesenjangan kebutuhan fasilitasi DPRD dengan kapasitas fasilitasi Sekretariat DPRD

2.3.2.4.3 Inspektorat

Pergeseran dari paradigma *watchdog* ke paradigma *consulting* dan *quality assurance*

2.3.2.4.4 Perencanaan

- a. Perlunya optimalisasi ketercapaian program pembangunan OPD mitra di bidang perekonomian, sosial budaya, pengembangan sarana dan prasarana, dan pemerintahan yang saat ini baru mencapai 91,25% (2018).
- b. Integrasi sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, monitoring dan evaluasi perlu disinkronkan dengan lebih baik.

2.3.2.4.5 Keuangan

- a. Kurangnya kreatifitas OPD berpendapatan dalam optimalisasi pendapatan
- b. Kurangnya efektivitas dan efisiensi pengalokasian belanja daerah
- c. Belum ada inventarisasi aset secara lengkap dan menyeluruh,
- d. Optimalisasi pengelolaan aset daerah masih kurang
- e. Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi permasalahan yang serius karena pada tahun 2018 dari 8,93triliun aset Pemerintah Daerah DIY terdiri dari 8,60triliun Aset Tupoksi/ ada di pengguna barang dan masih ada sekitar 325miliar Aset Pemda yang Non-Tupoksi ada di pengelola barang. Dari total Aset Pemda 8,93triliun sekitar 28 miliar yang kondisinya rusak berat dan yang dapat dimanfaatkan hanya sekitar 261 miliar.
- f. Perluasan cakupan pelayanan kepada masyarakat akan membawa konsekuensi pembiayaan yang semakin besar pula. Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap objek pendapatan daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal, Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah tahun 2018 sebesar 27,82%. Ditinjau dari komposisi kontribusi terhadap total Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut, Pajak Daerah 86.46 %, Retribusi Daerah 2,26 %, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 4,46 % dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6,19 %. Dari data tersebut tampak bahwa Pajak daerah masih dominan dalam menyumbang PAD dibanding dengan obyek pendapatan lainnya.
- g. Persoalan BUMD pada umumnya adalah mengenai implementasi regulasi, pengelolaan BUMD yang cenderung kurang profesional, kurang optimal dalam memberikan pelayanan publik, dan kontribusi yang kurang optimal sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

2.3.2.4.6 **Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

- a. Adanya kelembagaan baru berkaitan erat dengan ketersediaan aparatur. Terlebih lagi dengan jumlah arus purna tugas/pensiun ASN Pemda DIY khususnya Pejabat Struktural yang semakin tinggi, mengharuskan keterisian jabatan struktural yang kompeten dan juga penempatan aparatur sipil negara sesuai keahliannya. Untuk itu peranan *talent pool* harus lebih diperkuat lagi.

2.3.2.4.7 **Penelitian dan Pengembangan**

- a. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam proses perencanaan belum optimal

2.3.2.4.8 **Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

2.3.2.5 **Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Otonomi Khusus)**

2.3.2.5.1 **Urusan Kelembagaan**

Permasalahan terkait penyelenggaraan keistimewaan urusan Kelembagaan sebagai berikut:

- a. Munculnya sejumlah kendala kelembagaan paska implementasi UU Keistimewaan, adanya tumpang tindih kebijakan dan peran diantara tiga lembaga (Kraton, Puro Pakualaman dan Pemerintah DIY)
- b. Adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), implementasi UU Keistimewaan membawa implikasi perubahan Struktur Organisasi dan Tatakerja (SOTK) pada sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah di lingkup Pemda DIY.
- c. Perubahan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemda DIY dengan level dan kadar perubahan yang berbeda-beda
- d. Perubahan pola koordinasi antar OPD di lingkup Pemda DIY, perubahan ini meliputi intensifikasi koordinasi di antara sejumlah OPD.
- e. Pola hubungan OPD Pemda DIY dengan OPD Kabupaten Kota, perubahan ini meliputi intensifikasi koordinasi di antara sejumlah OPD Pemda DIY dengan OPD Kabupaten/Kota.
- f. Perubahan pola hubungan OPD Pemda DIY dengan Kraton/Kadipaten yang dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi dan sesuai dengan ketugasan masing-masing OPD.

2.3.2.5.2 **Urusan Kebudayaan**

Permasalahan terkait penyelenggaraan keistimewaan urusan Kebudayaan dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) aspek permasalahan, meliputi permasalahan Kebudayaan; pariwisata; pendidikan; ekonomi dan ketahanan pangan; dan pemberdayaan masyarakat dan keterlindungan warga.

- a. **Aspek Kebudayaan**
 - 1) Terancamnya kelestarian cagar budaya dan warisan budaya oleh proses alamiah dan dinamika perkotaan.
 - 2) Belum optimalnya upaya penggalian reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya , adat istiadat, bahasa, seni dan tradisi luhur, dalam beberapa bagian pelaksanaan dianggap sebagai penyelenggaraan event semata.
 - 3) Sarana prasarana museum dan manajemen museum yang belum memadai sehingga kehadiran museum belum menyentuh masyarakat luas
 - 4) Kebudayaan lokal belum menjadi pandangan hidup masyarakat , sehingga perlu peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni, adat istiadat dan tradisi, serta kesejarah purbakalaan
- b. **Aspek Pariwisata**
 - 1) Modifikasi kebudayaan dalam pariwisata melampaui daya dukung ekologi cenderung tidak berkelanjutan
- c. **Aspek Pendidikan**
 - 1) Kurangnya produksi pengetahuan untuk mendukung pelestarian kebudayaan.
 - 2) Belum optimalnya pengembangan pendidikan budaya yang terintegrasi
 - 3) Belum terumuskannya formulasi habitus keistimewaan DIY yang terisistematisasi dan terlembagakan
- d. **Aspek Ekonomi dan Ketahanan Pangan**
 - 1) Belum optimalnya program Keistimewaan dalam mengakselerasi pencapaian kesejahteraan warga
 - 2) Belum optimalnya sinergisitas dan keberlanjutan tata kelola program amongtani dagang layar
- e. **Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Keterlindungan Warga**
 - 1) Belum optimalnya program Jaga Warga
 - 2) Kerentanan Warga karena implementasi kebijakan yang bias pertumbuhan ekonomi

2.3.2.5.3 Urusan Tata Ruang

- a. Satuan Ruang Strategis (SRS) yang sudah memiliki dokumen rencana tata ruang baru mencapai 7 SRS ,Tahun 2019 akan disusun 5 SRS dan Tahun 2020 akan disusun 4 SRS dan 2021 akan disusun 2 SRS
- b. Satuan Ruang Strategis (SRS) yang sudah dilakukan penataan rencana tata ruang baru mencapai 7 SRS atau mencapai 38% antara lain :
 - 1) Kraton
 - 2) Makam Raja-Raja Mataram Imogiri
 - 3) Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung KrapyakpadaKoridor Malioboro
 - 4) Masjid dan Makam Raja Mataram Kotagede
 - 5) Kerto -Pleret
 - 6) Perbukitan Menoreh
 - 7) Puro Pakualaman

2.3.2.5.4 Urusan Pertanahan

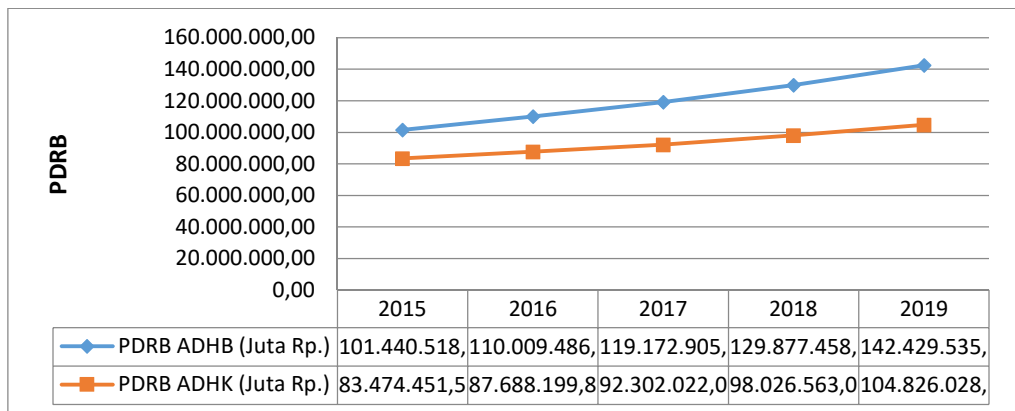
- a. Masih ada bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa pada tahun 2018 yang belum tersertifikasi sebanyak 10.867 bidang tanah (77,38%) dari jumlah bidang tanah yang terinventarisasi sebanyak 14.044, dimana pada tahun 2018 dari 7.919 bidang tanah yang didaftarkan baru tercapai 3.766 bidang tanah yang tersertifikasi, sehingga masih ada tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa yang belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik.
- b. Dari 392 desa yang ada di DIY belum ada yang memiliki Peraturan Desa terkait Pemanfaatan Tanah Desa. Pada saat ini terdapat 36 desa (9,18%) yang sudah mempunyai Peraturan Pemanfaatan Tanah Desa tetapi baru sebatas Rancangan Peraturan Desa (Raperdes).
- c. Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah kas desa perlu dilakukan secara persuasif.

BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 PDRB dan Struktur Ekonomi

Kondisi perekonomian DIY selama periode 2015-2019 menunjukkan perkembangan yang positif. Hal tersebut ditunjukkan oleh peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 101,48 triliun rupiah meningkat menjadi 142,43 triliun rupiah pada tahun 2019. Sedangkan PDRB ADHK meningkat sebesar 21,35 triliun rupiah selama tahun 2015 - 2019.



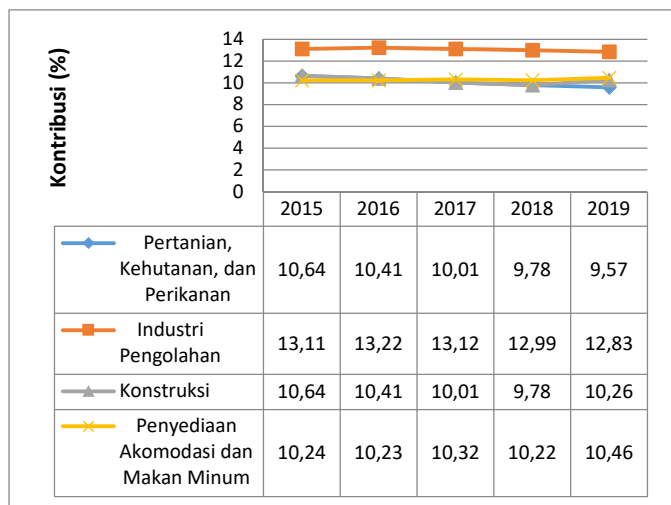
Sumber: BPS Provinsi DIY dan olahan

Keterangan: Angka tahun 2019 adalah proyeksi

Gambar 3-1 PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), 2015-2019

Empat lapangan usaha penyumbang terbesar pembentuk PDRB DIY adalah sektor industri pengolahan; penyediaan akomodasi dan makan minum; konstruksi serta pertanian, kehutanan dan perikanan. Kontribusi masing-masing sektor tersebut adalah sektor industri pengolahan memiliki kontribusi tertinggi dimana pada tahun 2019 diproyeksikan sebesar 12,83%. Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum berkontribusi sebesar 10,46%, sektor konstruksi 10,26% serta pertanian, kehutanan dan perikanan adalah 9,57%.

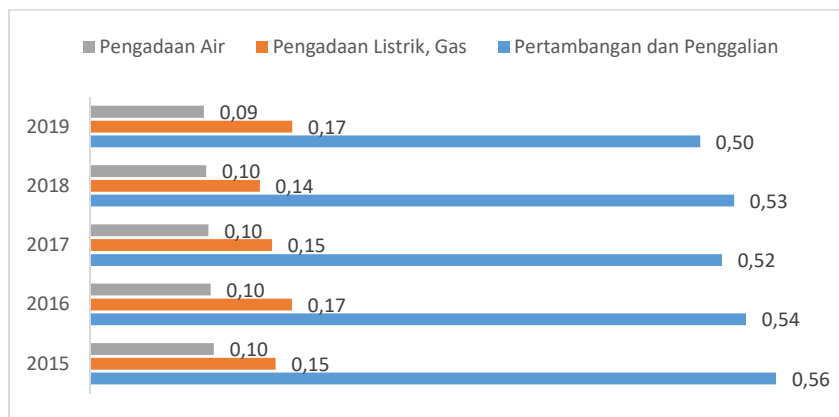
Kontribusi sektor industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami tren penurunan.



Sumber : BPS Provinsi DIY dan olahan
 Keterangan: Angka tahun 2019 adalah proyeksi

Gambar 3-2 Kontribusi Empat Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY menurut Sektor (%), 2015 - 2019

Tiga sektor yang memiliki kontribusi terendah dalam pembentukan PDRB adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor pengadaan air. Kontribusi ketiga sektor tersebut tercatat kurang dari 1%. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian cenderung menurun sementara kedua sektor lainnya relatif stabil dari waktu ke waktu,

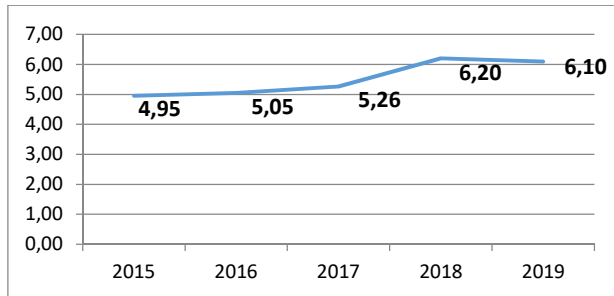


Sumber : BPS Provinsi DIY dan olahan
 Keterangan: Angka tahun 2018 dan 2019 adalah proyeksi

Gambar 3-3 Kontribusi Tiga Sektor Terendah terhadap PDRB ADHK DIY menurut Sektor (%), Tahun 2015-2019

3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

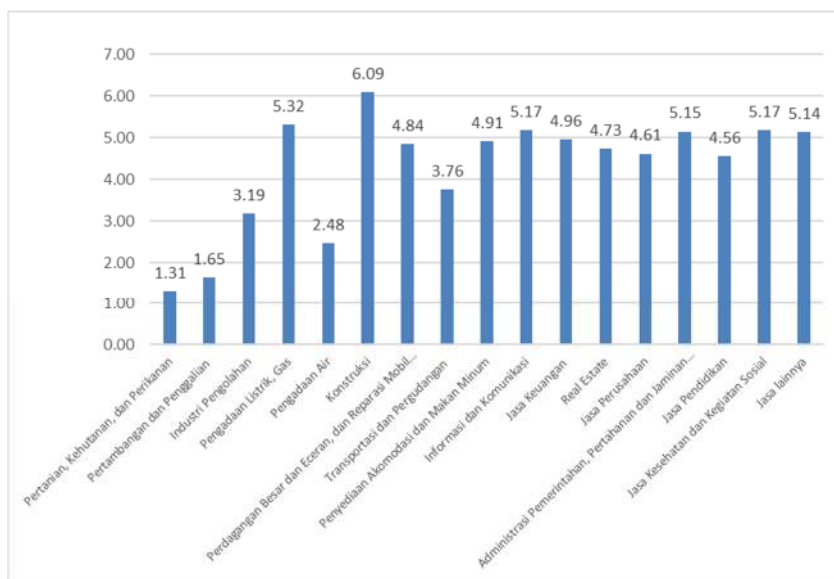
Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) DIY selama periode 2015-2019 menunjukkan tren meningkat. Bahkan LPE setelah tahun 2015 selalu di atas 5% tiap tahunnya. Kenaikan LPE terbesar terjadi pada tahun 2018 yang meningkat sebesar 0,94 poin dari tahun 2017 sementara itu peningkatannya mengalami perlambatan sampai tahun 2019.



Sumber: BPS Provinsi DIY dan olahan
Keterangan: Angka tahun 2019 adalah proyeksi

Gambar 3-4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) DIY (%), 2015-2019

Pertumbuhan ekonomi per sektor tahun 2019 menunjukkan bahwa semua sektor dalam perekonomian tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor konstruksi termasuk penyelesaian Bandara Udara Yogyakarta International Airport (YIA). Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 turun sebesar 0,10 poin menjadi 6,10%.



Sumber: Olahan

Gambar 3-5 Pertumbuhan Ekonomi per Tahun 2019 menurut Sektor (%)

3.1.3 Struktur Pengeluaran Dalam PDRB

Pembentukan PDRB menurut pengeluaran didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Selama periode 2014-2018, nilai konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan dari sebesar 62,875 triliun rupiah pada tahun 2014 menjadi sebesar 86,753 triliun rupiah pada tahun 2018. Namun, porsi nilai tersebut terhadap total nilai PDRB mengalami penurunan dari sebesar 67,72% pada tahun 2014 menjadi 66,80% pada tahun 2018.

Nilai PMTB yang memiliki kontribusi terbesar kedua dalam pembentukan PDRB mengalami kenaikan setiap tahunnya dan kontribusinya juga mengalami peningkatan. Nilai PMTB pada tahun 2014 sebesar 27.745 triliun rupiah yang meningkat di tahun 2018 menjadi sebesar 43,174 triliun rupiah.

Pengeluaran konsumsi pemerintah dalam pembentukan PDRB pada tahun 2014 sebesar 15,347 triliun rupiah (16,53%) meningkat menjadi sebesar 21.346 triliun rupiah (16,44%) pada tahun 2018. Selama periode lima tahun tersebut, kontribusi konsumsi pemerintah mengalami peningkatan dengan kecenderungan yang relatif datar, dan mengalami penurunan pada tahun 2018.

Nilai ekspor luar negeri DIY mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 mencapai 1,543 triliun rupiah. Pada periode 2014-2016, surplus perdagangan luar negeri menurun, namun meningkat

Tabel 3-1 PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran, 2012-2018 (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
Konsumsi RT	62.875.141	68.730.528	74.429.796	81.688.214	86.753.197
Konsumsi LNPRT	2.948.427	3.171.193	3.220.070	3.756.395	4.095.046
Konsumsi pemerintah	15.347.428	17.214.154	18.441.762	20.063.072	21.346.113
PMTB	27.744.794	30.798.881	33.428.978	37.147.936	43.173.678
Perubahan Inventori	980.197	1.151.797	1.295.788	1.368.184	1.435.491
Ekspor LN	5.465.423	6.266.265	6.495.282	7.436.959	8.749.632
Impor LN	4.085.245	5.066.145	5.922.732	6.540.719	7.206.068
Net Ekspor Antar daerah	- 18.433.682	-20.819.021	- 21.290.602	- 25.747.135	-28.469.631
PDRB	92.842.484	101.447.650	110.098.341	119.172.906	129.877.458

Sumber: BPS Provinsi DIY

Keterangan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 3-2 Struktur PDRB DIY menurut Pengeluaran, 2012-2018 (%)

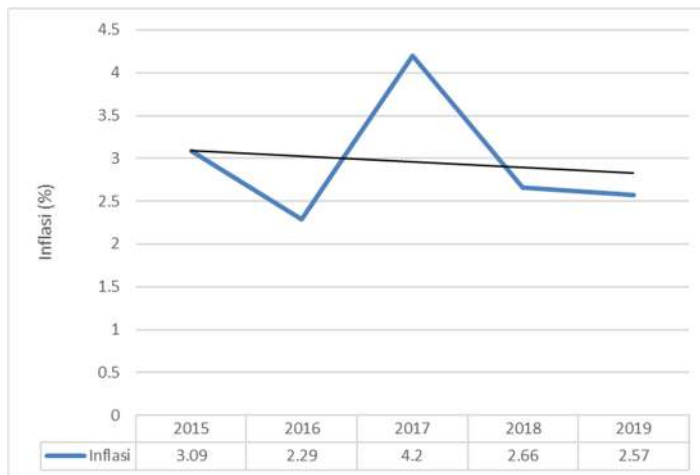
Jenis Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
Konsumsi RT	67,72	67,75	67,66	68,55	66,80
Konsumsi LNPRT	3,18	3,13	2,93	3,15	3,15
Konsumsi pemerintah	16,53	16,97	16,76	16,64	16,44

Jenis Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
PMTB	29,88	30,36	30,39	31,17	33,24
Perubahan Inventori	1,06	1,14	1,18	1,15	1,11
Ekspor LN	5,89	6,18	5,9	6,24	6,74
Impor LN	4,4	4,99	5,38	5,49	5,55
Net Ekspor Antar daerah	-19,85	-20,52	-19,44	-21,60	-21,92
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi DIY

3.1.4 Inflasi

Laju inflasi DIY selama kurun waktu lima tahun, 2012-2016, cenderung fluktuatif dengan tren menurun. Inflasi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 2.29%. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 4,2% kemudian menurun hingga tahun 2019 mencapai 2,57%.



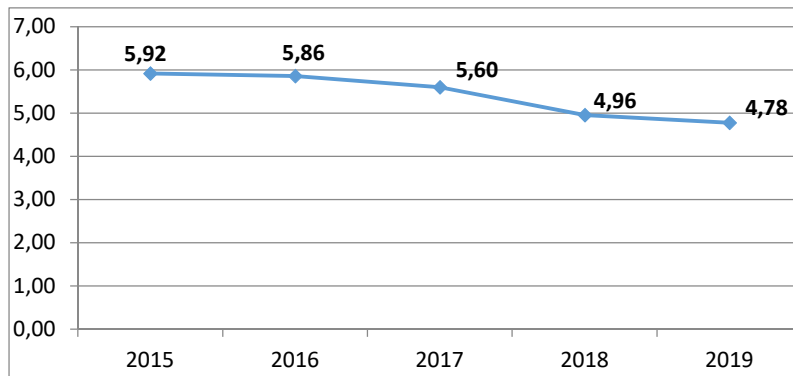
Sumber: BPS Provinsi DIY

Keterangan: Angka tahun 2019 adalah proyeksi

Gambar 3-6 Laju Inflasi IHK DIY (%), 2015-2019

3.1.5 ICOR

Pada periode 2015-2019, nilai ICOR DIY relatif tinggi namun menunjukkan perkembangan dengan trend yang menurun. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan meningkat efisiensinya. Nilai ICOR turun dari 5.92 di tahun 2015 menjadi 4,78 di akhir periode.

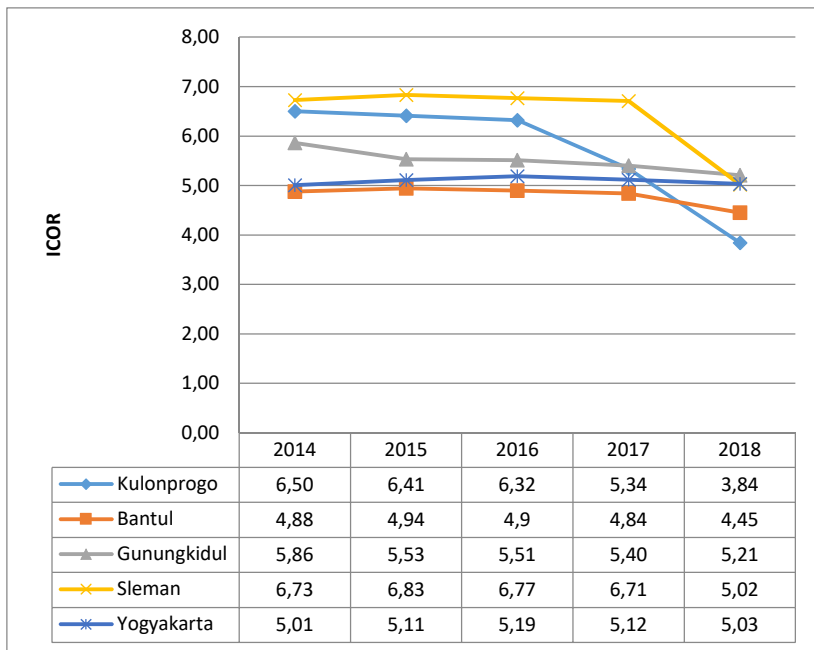


Sumber: BPS Provinsi DIY

Keterangan: Angka tahun 2018 dan 2019 adalah proyeksi

Gambar 3-7 Perkembangan ICOR DIY (PMTB + Perubahan Inventori), 2015-2019

Menurut kabupaten/kota di DIY, pada periode 2014 sampai 2018 nilai ICOR tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Sleman diikuti Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul, Kota Yogyakarta, dan terendah Kabupaten Bantul. Kabupaten Sleman memiliki nilai ICOR relatif tinggi dari kabupaten/kota lainnya karena jenis investasi yang ada bersifat padat modal dan lapangan usaha yang dominan adalah industri pengolahan, konstruksi, dan penyediaan akomodasi makan minum. Sementara itu, Kabupaten Bantul memiliki nilai ICOR yang relatif rendah karena lebih didominasi oleh sektor pertanian, industri kecil/rumah tangga, dan jasa akomodasi non-bintang.



sumber : BPS Provinsi DIY

Gambar 3-8 Perkembangan ICOR (PMTB + Perubahan Inventori) Kabupaten/Kota di DIY, 2012-2016

3.1.6 Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan DIY tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja sedangkan jumlah pengangguran terbuka menurun. Indikator ketenagakerjaan DIY tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3-3 Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Angkatan Kerja	1.995.949	2.099.440	2.117.190	2.191.740	2.252.361
Pengangguran Terbuka	48.664	57.036	64.020	73.350	75.229
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,43	2,71	3,02	3,35	3,34

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2017

Keterangan : Angka Tahun 2019 adalah Proyeksi

Angkatan kerja di tahun 2019 berjumlah 2.252.361 orang dan meningkat sebanyak 60.620 orang dari 2.191.740 orang dari tahu sebelumnya. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini diikuti dengan peningkatan perkiraan jumlah yang menganggur yaitu menjadi 75.229 pada tahun 2019 atau meningkat sebesar 2,56% dari tahun 2018. Perkembangan pertumbuhan ekonomi DIY kurang berpengaruh pada tingkat pengangguran di DIY. Selama lima tahun

terakhir pertumbuhan ekonomi DIY cenderung meningkat namun pengangguran terbuka juga mengalami peningkatan.

3.1.7 Kemiskinan

Dalam periode lima tahun terakhir (2015 – 2019) jumlah penduduk miskin di D.I. Yogyakarta telah berkurang sebanyak 120,98 ribu penduduk. Penurunan jumlah kemiskinan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2016 dengan penurunan sebanyak 55 ribu orang.

Tabel 3-4 Kemiskinan di DIY Tahun 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Orang Miskin (ribu orang)	550.23	494.94	488.53	460.1	429.25
Tingkat Kemiskinan (%)	14.91	13.34	13.02	12.13	11.26

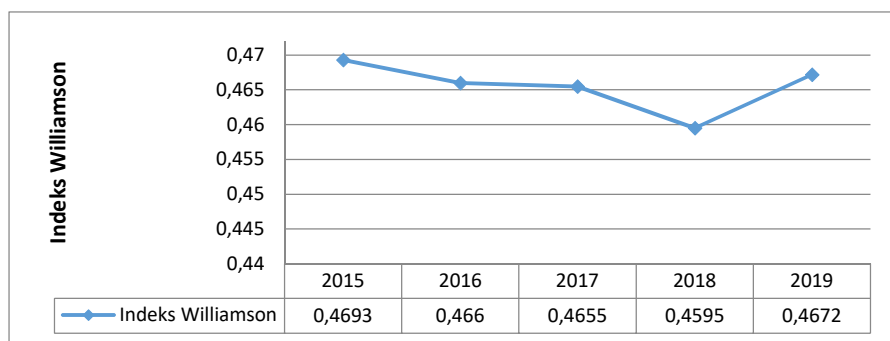
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2018

Keterangan : Angka Tahun 2019 adalah Proyeksi

Persentase penduduk miskin mengalami tren menurun sampai dengan 2019. Pada 2019, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di D.I. Yogyakarta sebanyak 11,26% yang menurun terus dari 14,91% di tahun 2015.

3.1.8 Ketimpangan Regional

Ketimpangan regional atau kesenjangan antar wilayah diukur menggunakan *Indeks Williamson (IW)*. Nilai IW berkisar antara 0 sampai dengan 1 dan semakin tinggi nilai IW menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar. Dari nilai IW DIY untuk tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi dan angka IW-nya masih di bawah 0,6. Pada tahun 2015, nilai IW adalah 0,4693 yang menurun sampai tahun 2018 menjadi 0,4595. Angka IW selanjutnya meningkat di tahun 2019.



Sumber: Bappeda DIY, 2018

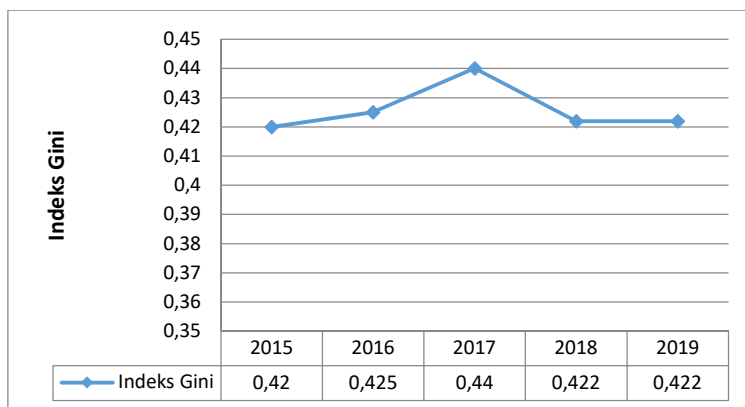
Keterangan: Angka 2019 adalah proyeksi

Gambar 3-9 Indeks Williamson DIY, Tahun 2015-2019

Kenaikan proyeksi Indeks Williamson ini salah satunya diindikasikan dengan pertumbuhan di sektor dan sub-sektor perekonomian yang berkembang tidak dalam tingkatan yang setara. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya ketimpangan antar wilayah. Faktor lainnya yang dapat menyebabkan naiknya Indeks Williamson diantaranya adalah pertumbuhan penduduk kabupaten/kota yang tidak sama sehingga PDRB perkapita di kabupaten/kota relatif belum setara. Faktor lain yang menyebabkan ketimpangan antar wilayah ini juga terkait dengan kapasitas ekonomi atau PDRB yang cukup berbeda karena perbedaan topografi dan lahan produktif. Angka Partisipasi Kerja (APK) dimasing-masing wilayah juga turut mempengaruhi angka ketimpangan antar wilayah tersebut.

3.1.9 Ketimpangan Pendapatan

Tingkat ketimpangan pendapatan ditunjukkan dengan Rasio Gini. Rasio Gini DIY cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2017. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yang meningkat sebesar 0,015 poin dari 0,425 di tahun 2016. Pada tahun 2019, Rasio Gini relatif sama dengan tahun sebelumnya.



Sumber : Bappeda 2018

Keterangan: Angka 2019 adalah proyeksi

Gambar 3-10 Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2015 - 2019

3.1.10 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2020

Proyeksi perkembangan beberapa indikator ekonomi makro tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3-5 Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun 2020

No.	Indikator	Nilai	Target RPJMD DIY 2017-2022
1.	PDRB ADHK	Rp110.237.702 juta	-
2.	Pertumbuhan Ekonomi	5,99%	5,29%
3.	Inflasi	2,21	-
4.	ICOR	4,59	-
5.	TPT	3,33%	2,42%
6.	Kemiskinan	10,71%	9,11%
7.	Indeks Gini	0,422	0,3776
8.	Indeks Williamson	0,4671	0,4524

a. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ADHK

Pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2020 diperkirakan tumbuh sebesar 5,99%. Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,20% yang didorong oleh pertumbuhan sektor konstruksi yang didominasi oleh dampak pembangunan YIA dan beberapa proyek fisik besar, namun telah selesainya proyek-proyek tersebut di tahun 2019 menyebabkan peran pertumbuhan sektor konstruksi mengalami penurunan sehingga pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 diperkirakan turun dibanding tahun 2018 dan 2019. Pertumbuhan sebesar 5,99% di tahun 2020 menyebabkan nilai PDRB ADHK di tahun berkaitan menjadi sebesar Rp110.237.702 juta.

b. Inflasi

Tingkat inflasi di DIY menunjukkan tren yang menurun selama tiga tahun terakhir ini. Hal ini menunjukkan efektifitas kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam melakukan monitoring dan pengendalian harga barang-barang terutama barang kebutuhan masyarakat. Kinerja TPID yang baik tersebut akan mendorong tetap rendahnya tingkat kenaikan harga umum di DIY dan angka inflasi cenderung terus menurun sampai tahun 2020 menjadi sekitar 2,21.

c. ICOR

Nilai ICOR DIY cenderung senantiasa menunjukkan penurunan yang mengindikasikan adanya kenaikan efisiensi proses produksi. Peningkatan efisiensi proses produksi di DIY dipengaruhi antara lain oleh peningkatan kualitas prasarana transportasi dengan membaiknya kualitas jalan di hampir seluruh daerah. Perbaikan jalan yang dilaksanakan setiap tahun terutama di dua tahun terakhir untuk mengantisipasi dampak keberadaan YIA akan mendorong semakin membaiknya tingkat efisiensi produksi dan akan menurunkan nilai ICOR menjadi 4,59 di tahun 2020 yang menurun dari 4,78 di tahun 2019

d. TPT

Tingkat pengangguran terbuka di tahun 2019 sempat mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Namun di tahun 2020, tingkat pengangguran akan mengalami penurunan sebesar 0,01 poin. Penurunan tersebut didorong oleh terbukanya lapangan kerja dari peningkatan aktivitas berbagai sektor terdampak oleh keberadaan dan operasionalisasi YIA. Semakin meningkatnya peluang kerja di tahun 2020 akan mendorong TPT turun menjadi 3,34% dari sekitar 3,35% di tahun sebelumnya

e. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di tahun 2020 akan menurun sekitar 0,45 poin. Penurunan tersebut didorong oleh kenaikan pendapatan per kapita masyarakat yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang mencapai lebih dari 6% selama dua tahun sebelumnya. Penurunan tingkat kemiskinan juga didukung oleh konsistennya intervensi pemerintah baik dari Pemerintah Pusat, Pemda DIY dan Pemda Kabupaten/kota untuk melakukan program dan kegiatan yang menasar kelompok warga miskin. Keefektifan intervensi tersebut didukung juga oleh semangat untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam penentuan kelompok sasaran baik dalam bentuk *inclusion and exclusion error*. Kondisi-kondisi tersebut mendorong penurunan kemiskinan menjadi sekitar 10,71% di tahun 2020.

f. Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan masyarakat di DIY tahun 2020 diperkirakan masih belum berubah selama dua tahun terakhir yaitu berkisar 0,422. Hal tersebut disebabkan oleh tetap lebih cepatnya peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas dibandingkan dengan kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.

g. Indeks Williamson

Ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson tahun 2020 mengalami penurunan di tahun 2020 dengan indeks sebesar 0,4671 yang menurun dari 0,4672 pada tahun sebelumnya. Pengurangan ketimpangan wilayah didorong oleh dampak keberadaan dan operasionalisasi YIA yang dapat di manfaatkan oleh daerah lain untuk meningkatkan aktivitas ekonominya. Penurunan ketimpangan hanya sekitar 0,001 poin mengingat jangka waktu tahun bersangkutan belum panjang dibandingkan dengan mulai beroperasinya bandara baru. Unit-unit usaha yang tercipta belum menunjukkan kinerja yang memuaskan karena masih relatif baru. Belum berkembangnya unit usaha baru

belum dapat mendorong *multiplier effect* lanjutan ke sektor lain maupun penyerapan tenaga kerja di daerah setempat sehingga belum dapat menunjukkan peningkatan pendapatan di daerah-daerah yang mulai berkembang.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Prediksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3-6 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2018-2020

Nomor Urut	Uraian	APBD Tahun 2018 (N-2)	APBD Tahun 2019 (N-1)	Proyeksi Tahun 2020 (N)
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	5.436.361.561.038,27	5.663.778.510.743,20	7.059.981.422.637,76
1.1	Pendapatan Asli Daerah	2.033.907.015.056,27	1.921.564.734.133,20	2.112.170.916.524,56
1.1.1	Pajak Daerah	1.716.883.108.838,00	1.720.036.541.180,35	1.872.103.158.467,48
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	43.758.363.895,16	33.288.220.925,00	39.904.262.771,63
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	85.097.737.606,37	85.874.687.657,66	99.701.450.059,25

Nomor Urut	Uraian	APBD Tahun 2018 (N-2)	APBD Tahun 2019 (N-1)	Proyeksi Tahun 2020 (N)
1	2	3	4	5
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	188.167.804.716,74	82.365.284.370,19	100.462.045.226,20
1.2	Dana Perimbangan	2.317.436.811.403,00	2.474.160.842.300,00	2.348.394.499.313,20
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	93.142.565.499,00	89.553.564.300,00	103.244.089.600,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.314.372.147.000,00	1.351.102.020.000,00	1.365.229.514.955,60
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	910.032.137.851,00	1.033.505.258.000,00	879.920.894.757,60
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.085.017.734.579,00	1.268.052.934.310,00	2.599.416.006.800,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	73.680.710.000,00	8.515.100.000,00	8.683.580.000,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0	0
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	1.010.685.532.429,00	1.258.831.799.000,00	2.590.067.576.800,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	651.492.150,00	706.035.310,00	664.850.000,00
	Jumlah Pendapatan	5.436.361.561.038,27	5.663.778.510.743,20	7.059.981.422.637,76
2	Belanja	5.303.003.830.096,88	5.968.673.012.642,25	7.236.859.582.669,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	2.647.004.868.728,38	3.186.737.950.794,45	2.484.695.520.869,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.285.004.433.871,00	1.416.494.422.321,00	1.694.127.439.110,00
2.1.2	Belanja Bunga	0	0	0
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	81.100.523.951,00	0
2.1.4	Belanja Hibah	589.168.197.500,00	671.906.016.500,00	21.310.200.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	450.000.000,00	1.402.000.000,00	1.000.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	692.463.991.175,38	704.917.367.626,25	758.257.881.759,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	79.918.246.200,00	288.285.076.440,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0	22.632.543.956,20	10.000.000.000,00
2.2	Belanja Langsung	2.830.019.619.852,00	2.781.935.061.847,80	4.752.164.061.800,00
2.2.1	Belanja Pegawai	227.831.450.018,00	292.934.140.331,80	
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	1.295.642.360.076,00	1.341.878.364.015,00	

RKPD DIY 2020

Nomor Urut	Uraian	APBD Tahun 2018 (N-2)	APBD Tahun 2019 (N-1)	Proyeksi Tahun 2020 (N)
1	2	3	4	5
2.2.3	Belanja Modal	1.132.525.151.274,00	1.147.122.557.501,00	
	Jumlah Belanja	5.303.003.830.096,88,00	5.968.673.012.642,25	7.236.859.582.669,00
	Surplus/(Defisit)	(133.357.730.941,39)	-304.894.501.899,05	-176.878.160.031,24
			-5,38%	-2,51%
3	Pembiayaan	324.618.217.637,18	304.894.501.899,05	176.878.160.031,24
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	346.618.217.637,18	485.334.501.899,05	415.418.160.031,24
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	344.066.436.138,18	485.334.501.899,05	410.916.199.731,24
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0	0
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	0,00	0	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0	0
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0	0
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0	0
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	2.551.781.499	0	4.501.960.300,00
3.1.8	Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan	0,00	0	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	346.618.217.637,18	485.334.501.899,05	415.418.160.031,24
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	22.000.000.000,00	180.440.000.000,00	238.540.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	22.000.000.000,00	180.440.000.000,00	238.540.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0	0
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0	0
3.2.5	Penyelesaian Kegiatan D P A - L	0,00	0	0
3.2.6	Pembayaran Kewajiban Tahun	0,00	0	0

Nomor Urut	Uraian	APBD Tahun 2018 (N-2)	APBD Tahun 2019 (N-1)	Proyeksi Tahun 2020 (N)
1	2	3	4	5
	Lalu Yang Belum Terselesaikan			
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	22.000.000.000,00	180.440.000.000,00	238.540.000.000,00
	Pembiayaan Neto	324.618.217.637,18	304.894.501.899,05	176.878.160.031,24
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa)	457.975.948.578,57	0	0,00

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;

2. Dana Perimbangan;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui,

- a. Perbaiki manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan;
- b. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah *door to door*, pelayanan dengan mobil keliling, pelayanan pada event tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan, pasar malam sekaten dan lain-lain.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

- a. Pajak Daerah merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah untuk kas Negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik berdasarkan undang-undang yang berlaku. Seperti halnya dengan pajak, pada umumnya pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- 1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*Budgetary*)
- 2) Sebagai alat pengatur (*Regulatory*)

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu.

Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

- b. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin yang diberikan untuk pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan yang mempunyai kepentingan, dan balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat dirasakan oleh mereka yang membayar retribusi tersebut.

Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Jasa-jasa pelayanan tersebut diantaranya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Retribusi yang dikenakan jasa umum
- 2) Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha
- 3) Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu

Retribusi yang merupakan Pendapatan Asli Daerah sendiri menjadi kewenangan propinsi/kabupaten kota. Retribusi yang menjadi kewenangan propinsi yaitu:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - 2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - 4) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
- a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam.
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah propinsi, bobot daerah propinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah propinsi.
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:
- a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja.

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) akan berkisar 33% dan Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus berkisar 36,68% pada tahun perencanaan 2020 menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2020 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut

3.2.2.1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

1. Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;

2. Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
3. Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Diharapkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
2. Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah
3. Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD, perusahaan milik swasta dan lembaga keuangan non bank, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal.
4. Peningkatan kualitas Pelayanan Perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah, seperti bus samsat keliling, pembayaran Pajak melalui ATM, dan sistem *online* kesamsatan yang telah dioperasikan saat ini (E-Posti), serta Samsat Desa untuk mendekatkan pelayanan. Selain itu, perlu pengembangan aplikasi STS *online* berbasis *accrual* pada SIPKD untuk memudahkan penatausahaan pendapatan daerah
5. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak
6. Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaran meningkatnya pengawasan pengelolaan PAD di DIY sehingga dapat diketahui permasalahan sejak dini, dan melaksanakan *reward and punishment*
7. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitasi kepada masyarakat

8. Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah
9. Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan Wajib Pajak melalui penguatan database pajak, optimalisasi penggunaan IT dan konfirmasi status Wajib Pajak

3.2.2.2 Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Adapun langkah kebijakan dalam upaya mengoptimalkan dana perimbangan sebagai berikut:

- (a) Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa optimal berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- (b) Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sementara itu sebagai upaya dalam mengoptimalkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota
- (b) Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dsb.), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan

hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, dan program/ kegiatan prioritas yang mendukung fokus tematik (1)Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan; 2) Penurunan Ketimpangan Wilayah; 3) Dukungan Pembangunan Yogyakarta International Airport (Bandar Udara Internasional Yogyakarta); dan 4) Pembiayaan Pembangunan). Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan kewilayahan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif.

Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dibagi atas kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Tidak langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. DIY tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak menganggarkan belanja bunga.

- 3) Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. DIY menganggarkan belanja subsidi untuk membantu biaya operasi Trans Jogja yang merupakan transportasi umum yang dibutuhkan masyarakat.
- 4) Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
- 5) Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertunuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
- 6) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada Kabupten/ Kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. DIY menganggarkan belanja bagi hasil yang bersumber dari penerimaan pajak daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di wilayah DIY yang besarnya proporsional dengan penerimaan pendapatan sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 7) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan fiskal bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.
- 8) Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- 2) Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- 3) Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sesuai dengan perencanaannya agar output dan outcome kegiatan tercapai. Penyusunan output dan outcome

pada tolok ukur kinerja disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar.

b. Efisiensi Anggaran

Kegiatan yang dalam pelaksanaannya memiliki belanja yang dianggap tidak diperlukan maka tidak harus dibelanjakan. Salah satu jenis belanja yang biasanya bersifat tentatif adalah belanja perjalanan dinas. Perjalanan Dinas dilakukan secara selektif. Belanja alat tulis kantor pun dapat diefisiensi dengan memperhatikan data barang persediaan. Selain itu belanja sarana prasarana kantor disesuaikan dengan rencana kebutuhan barang milik daerah.

c. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

d. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

3.2.4 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan DIY menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA). Penganggaran SILPA untuk tahun 2020 mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pada tahun 2020 pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMD diprioritaskan untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Total penyertaan modal pada tahun 2020, sebesar Rp238.540.000.000. Penyertaan modal pada BUMD di tahun 2020 bukan hanya untuk menambah penyertaan modal pada BUMD yang sudah ada, yaitu PT Bank BPD DIY tapi juga untuk penyertaan modal pada BUMD baru yaitu Perusahaan Daerah Air Bersih (PD Air Bersih) serta BUKP.

Penambahan setoran modal pada PT Bank BPD DIY didasarkan atas Perda DIY Nomor 14 Tahun 2018. Pemda DIY berkewajiban melakukan penambahan penyertaan modal yang belum disetor sebesar Rp1.530.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh miliar rupiah) bersumber dari APBD dilakukan secara bertahap untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun. Pada tahun 2020, Pemda DIY akan menambahkan penyertaan modal pada BPD DIY sebesar Rp.222.040.000.000 (Dua ratus dua puluh dua miliar empat puluh juta rupiah).

Berkaitan dengan PD Air Bersih, pada Tahun 2019 diharapkan telah berdiri. Sebelumnya, telah dilaksanakan kajian analisis kebutuhan daerah dan analisis kelayakan usaha pada tahun anggaran 2018. Triwulan I tahun anggaran 2019, PD Air Bersih (PDAB) tersebut direncanakan untuk dimintakan penilaian Menteri Dalam Negeri. Setelah selesai penilaian oleh Menteri Dalam Negeri dilakukan penyusunan Naskah Akademik untuk Perda Pendirian BUMD PD Air Bersih. Kemudian dilakukan penyusunan kajian investasi dan naskah akademik untuk Perda Penyertaan Modal BUMD PDAB. Pada tahun 2020 Pemda DIY diharuskan melakukan penyetoran modal sebesar Rp12.500.000.000. Besaran penyertaan modal tersebut berdasarkan asumsi modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 maka 25% dari modal dasar tersebut harus disetorkan pada saat pendirian

yakni sebesar Rp12.500.000.000,00 (pasal 33 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT).

Badan Usaha Kredit Pedesaan Milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BUKP) yang didirikan berdasarkan PERDA DIY Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan untuk mengembangkan perekonomian pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat pedesaan dengan menyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat dan murah. BUKP didirikan di tiap-tiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten dan Kota se Provinsi DIY yang pendiriannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. BUKP berkedudukan di ibukota kecamatan dengan wilayah usaha yang terbatas pada wilayah kecamatan dimana BUKP tersebut berkedudukan, sedangkan di tingkat desa dapat dibentuk unit-unit pelayanan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mendirikan BUKP yang berada dimasing-masing Kecamatan di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu tolok ukur keberhasilan Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan di pedesaan yaitu seluruh masyarakat dalam wilayah Kecamatan dalam meningkatkan usaha telah menggunakan jasa intermediasi Lembaga Keuangan Mikro BUKP. Untuk itu dalam mewujudkan usaha Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menjadikan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan di pedesaan dengan menggunakan LKM BUKP terutama untuk menabung dan meminjamkan untuk usaha-usaha yang produktif. Pada tahun 2020, Pemda DIY menganggarkan penyertaan modal BUKP sebesar Rp4.000.000.0000.

3.2.5 Strategi Keuangan Daerah

Dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019, maka perlu diperhatikan fokus pembangunan yang mengarah pada aspek infrastruktur sebagai bagian fokus pembangunan yang membutuhkan pendanaan cukup besar. Hal tersebut menjadi penting mengingat terdapat beberapa mega proyek infrastruktur yang akan dibangun dan dikembangkan pada Tahun 2017-2022 sebagai keberlanjutan implementasi perencanaan pembangunan jangka menengah pada Tahun 2012-2017 terkait 9 kawasan prioritas antara lain,

1. Penataan Kawasan Kraton,
2. Penataan Kawasan Sumbu Filosofi,

3. Pengembangan Kawasan Perbukitan Menoreh
4. Pengembangan Kawasan Pantai Samas – Parangtritis,
5. Pengembangan Kawasan Pantai Selatan DIY,
6. Penataan Kawasan Puro Pakualaman
7. Pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta
8. Pengembangan Kawasan Pantai Selatan Kulonprogo
9. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Bandara Baru Kulonprogo.

Serta 5 Infrastruktur prioritas antara lain

1. Pembangunan Jalan Akses Temon-Borobudur
2. Pembangunan Underpass Kentungan,
3. Pembangunan Underpass Gejayan
4. Pembangunan SPAM Regional Sistim Bener, Sistim Kapet Kulonprogo, Sistim Kartamantul
5. Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto.



Sumber: Dokumen Kajian Penyusunan Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Pembangunan Ekonomi DIY, BSD Bappeda DIY

Gambar 3-11 Peta Sebaran Pembangunan Infrastruktur DIY

Terdapat 2 (dua) strategi dalam pembiayaan pembangunan, yaitu:(1) PPP Konvensional dan (2) Aliansi Strategis. Sementara itu proyek-proyek yang layak secara ekonomi dan finansial dapat diserahkan sepenuhnya kepada

pembiayaan sektor swasta (*Private Financing Initiatives*, PFI), termasuk proyek-proyek khusus yang bersifat *unsolicited* dan tidak memerlukan lelang kompetitif. Namun pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan SDM kita masih langka dalam mempersiapkan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan proses dan prosedur PPP yang sesuai dengan prinsip-prinsip internasional. Pembangunan proyek-proyek PPP hampir selalu berkaitan dengan pembiayaan proyek modern (*Modern Project Financing*). Proyek skala besar membutuhkan *Equity Financing*, *Debt Financing* yang canggih, dan aliansi pendanaan global (konsorsium perbankan, *investment fund*, *bond*, dan rekayasa finansial lainnya).

Adapun beberapa skema pendanaan proyek-proyek investasi sebagai berikut:

1. **Investasi Pemerintah.** Pemerintah dalam melakukan investasi pada proyek-proyek yang dianggap layak secara ekonomi dengan memanfaatkan dana APBN/APBD; DAU, DAK, dan Dana Daerah; Pinjaman Luar Negeri dan Kredit Ekspor.
2. **Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS).** Skema pendanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan transportasi. Skema KPS difokuskan untuk pendanaan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur transportasi yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (*full cost recovery*) atau kelayakan marginal terkait kontribusi pemerintah dalam bentuk *government support*. Skema KPS juga dapat digabung dengan optimasi penggunaan pinjaman dan hibah luar negeri, khususnya untuk mendanai prasarana dasar.
3. **Investasi Swasta.** Pihak swasta dapat terlibat secara langsung berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, yaitu dapat melalui proyek KPS dengan skema *unsolicited*, *special purpose* ataupun melalui pemanfaatan hak kompensasi. Tentunya, proyek-proyek yang diminati oleh pihak swasta adalah sektor-sektor transportasi yang sudah bersifat komersial yang memiliki nilai kelayakan secara finansial.
4. **Creative financing sebagai pembiayaan alternatif adalah** sebagai berikut:
 - a. *Infrastructure Bond* yang penggunaannya dikhususkan hanya untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur;

- b. Penugasan BUMN/BUMD yang didukung melalui penyertaan modal pemerintah dan *direct-lending* yang dijamin oleh pemerintah;
- c. *Private Finance Initiative* (PFI)- *multi-year contract* 15 hingga 30 tahun;
- d. *Performance-Based Annuity Scheme* (PBAS) atau *Availability Payment*;
- e. Pengenaan tarif/biaya akses seperti *Electronic Road Pricing* (ERP);
- f. Infrastruktur swasta (*private infrastructure*);
- g. Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (*community-based infrastructure*).

Didalam skema pembiayaan infrastruktur memerlukan beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh SKPD pengampu. Kriteria pembiayaan infrastruktur yang disusun pada periode 2017-2022, meliputi:

1. Layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial dengan skema pembiayaan murni oleh pemerintah baik dari aspek operasi, pemeliharaan dan konstruksi yang diprioritaskan pada wilayah dengan ketimpangan infrastruktur cukup tinggi, perdesaan, dan perbatasan;
2. Layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial dengan skema pembiayaan *sharing* swasta (operasi dan pemeliharaan) dan pemerintah (konstruksi) khususnya dalam pembiayaan *hybrid financing*;
3. Layak secara ekonomi dan finansial marjinal dengan skema pembiayaan dominan dari swasta (operasi dan pemeliharaan) dan pemerintah yang dikerjasamakan/*sharing* pula dengan swasta lainnya dalam pelaksanaan konstruksi. Skema pembiayaan ini amenggunakan skema *Public Private Partnership* (PPP) dengan dukungan pemerintah (VGF) atau *creative financing* lainnya, seperti PFI, PBAS, Bank Infrastruktur, Bank Tanah, dan lain sebagainya;
4. Layak secara ekonomi dan finansial dengan skema pembiayaan swasta-swasta (operasi dan pemeliharaan maupun konstruksi) yang dikerjasamakan melalui model *Public Private Partnership* (PPP) regular;
5. Layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial dengan skema pembiayaan murni oleh BUMN/BUMD (operasi dan pemeliharaan maupun konstruksi) dengan prioritas pengembangan dan pembangunan proyek pada wilayah dengan kondisi infrastruktur cukup baik atau pada wilayah perkotaan Yogyakarta. Skema operasional dan teknis pelaksanaan pembiayaan tersebut melalui penugasan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD).

BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Gubernur DIY) dalam paparan visi dan misi pada tanggal 2 Agustus 2017 sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2017-2022 menyampaikan visi *“Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja,”* dan misi Panca Mulia yakni:

1. terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing,
2. terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,
3. terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
4. terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
5. terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tema visi tersebut menggambarkan makna pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah DIY pada tahun 2017-2022 yakni memanfaatkan momentum Abad Samudera Hindia untuk meningkatkan pemanfaatan potensi kelautan di sisi selatan DIY sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan

warga serta mengurangi angka kemiskinan. Tema visi Abad Samudera Hindia tersebut dilandasi dengan aspek kesejarahan, fenomena-fenomena Indian Ocean Rim Association (IORA), Kra-Canal/ Thai Canal Project serta Kemiskinan di Kawasan Jogja Selatan. Angka kemiskinan menunjukkan Kabupaten di Selatan DIY memiliki angka kemiskinan Gunungkidul (20,83 %), Kulon Progo(20,64 %) dan Bantul (15,89 %) yang relatif tinggi dibanding wilayah utara seperti Sleman (9,50 %) dan Yogyakarta (8,67 %); dimana angka kemiskinan DIY 12,36% (2017) lebih tinggi dari Nasional (10,96%) atau sekitar 488 ribu jiwa (BPS DIY, 2017).

Selain itu terdapat ketimpangan antar wilayah dimana PDRB Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menguasai 60% total PDRB DIY, sementara itu Kulon Progo dan Gunungkidul yang mencakup 65 persen dari luas wilayah DIY, hanya memiliki pangsa distribusi ekonomi sekitar 21%. Dua wilayah ini letaknya jauh dari pusat kota Yogyakarta dan belum adanya pusat kegiatan ekonomi yang besar di wilayah tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut masih lambat. Berkenaan dengan potensi kelautan kawasan selatan sebagai pengungkit kesejahteraan dapat dideskripsikan potensi sebagai berikut:

1. Perikanan tangkap laut, dimana terdapat nilai potensi lestari sebesar 320.000 ton/tahun.
2. Ekosistem terumbu karang pada 7 lokasi di Kabupaten Gunungkidul
3. Ekosistem Mangrove seluas 61 Ha (2012) yang menjadi habitat berbagai satwa dan biota perairan.
4. Ekosistem Gumuk Pasir tipe Barkhan di pesisir Parangtritis
5. Pariwisata di pesisir dan pulau-pulau kecil di DIY sejumlah 70 wisata pantai di DIY. Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan DIY Tahun 2012-2025 ditetapkan perwilayahan pembangunan destinasi wisata pesisir, yaitu Kawasan Glagah-Trisik dan sekitarnya; Kawasan Parangtritis-Depok dan sekitarnya; Kawasan Baron-Sundak dan sekitarnya; serta Kawasan Siung-Wediombo-Sadeng dan sekitarnya.
6. Potensi energi baru terbarukan di kawasan pesisir antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) mencapai 763,6 Kw, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 4,5kWh/m², serta Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 10 hingga 100 MW dengan kecepatan angin sebesar m/s.

Adapun tema misi “Panca Mulia” tersebut di atas, manusia Jogja yang bermartabat mulia digambarkan sebagai manusia sejahtera paripurna baik dari segi hidup-kehidupan-penghidupan sebagai individu, terlibat dan memperoleh manfaat dari ekonomi yang tumbuh dan berkeadilan, hidup dalam harmoni kolektif dan terlindungi oleh penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang dijalankan oleh aparatur yang berintegritas. Manusia Jogja yang bermartabat mulia merupakan substansi penting dari visi Gubernur DIY 2017-2022 yang menggambarkan adanya tujuan peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja. Peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja mencakup pengertian peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab. Untuk itu strategi kebudayaan untuk meningkatkan harmoni kehidupan bersama masyarakat Yogyakarta serta mengatasi kesenjangan dan kemiskinan di wilayah Yogyakarta dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja sangat perlu dikedepankan. Pembangunan ekonomi di wilayah Yogyakarta yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kurang beruntung.

Upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja meniscayakan perlunya kemantapan tatakelola pemerintahan yang demokratis dan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang memiliki etos, etika dan kualitas sebagai “Trilogi SDM-DIY”. Etos menyandang pesan perubahan persepsi (*mind set*) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantoran, menjadi tugas birokrasi sebagai “karya peradaban”. Karya Peradaban yang dimaksudkan adalah bahwa birokrasi tidak hanya menjalankan fungsinya sebagaimana adanya, namun mempunyai rasa memiliki atas apa yang dilaksanakan. Menjalankan fungsinya merupakan bagian dari pengembangan diri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut. Merubah *mind set* dari *business as usual* menjadi sebuah karya yang mempunyai dampak pada peningkatan layanan kepada masyarakat, penciptaan inovasi yang berguna untuk birokrasi dan pembangunan serta pengembangan kemampuan diri atas potensi yang dimiliki.

Etika, menyandang pesan “kemuliaan” dalam pengertian bersatunya “pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia”, dalam rangka menciptakan SDM yang “berintegritas” yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kualitas, menyandang pesan adanya pergeseran *mind set*, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsikan hanya sebagai “karya proyek berbasis kinerja

penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lain diluar DIY (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi".

Berangkat dari uraian diatas Tema Visi "***Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja***" kemudian dirumuskan Abad Samudera Hindia menjadi arah dari pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun ke depan untuk mengangkat potensi Selatan Yogyakarta khususnya dan Daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya dengan visi "***Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja***" Visi politis tersebut kemudian diselaraskan dengan data-data maupun analisa teknokratik untuk dapat dicapai melalui upaya-upaya yang tergambar dalam misi untuk memenuhi substansi tujuan dan sasaran dalam rangka:

1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. memajukan daerah;
3. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. menyelesaikan persoalan daerah;
5. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
6. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

Sehingga Panca Mulia dari Visi Gubernur DIY telah diejawantahkan dalam dalam rumusan 2 misi pembangunan DIY tahun 2017-2022 sebagai berikut:

1. ***Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban.*** Rumusan ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia 1,2 dan 3. Melalui misi pertama ini, Pemerintah Daerah DIY, segenap pemangku kepentingan dan masyarakat akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup-kehidupan dan penghidupan sekurangnya dari aspek
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan, akses infrastruktur dasar
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan

- c. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Gini Index), dan menurunkan ketimpangan antar wilayah (index williamson).
 - d. Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga.
2. **Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;** Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia ke-4 dan ke-5. Misi kedua tersebut akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas. Upaya pewujudan misi kedua sekurangnya dengan,
- a. Melakukan semangat perjumpaan dan silang birokrasi akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD).
 - b. Mendorong semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman- pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: ETOS, ETIKA, dan KUALITAS. Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan akan mempresentasikan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran akan menjabarkan tujuan dalam bentuk hasil yang

diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional (*specific, measurable, achievable, relevant, time bound dan continuously improve* (SMART-C)),

Berpijak dari visi dan misi pembangunan daerah, berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan DIY tahun 2017-2022 yang telah dirancang beserta target sebagai berikut:

Tabel 4-1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi: "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"							
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2017 (baseline)	2022 (akhir periode)
1.	Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	1. Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	Angka IGI (5,59) (2016) menjadi 6,2 (2022)	1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,73	81,68
					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,8	70,32
				1.2. Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat.	Indeks Gini	0,440	0.3635
					Persentase Angka Kemiskinan	12,36	7,0
				1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	10,98	12,04
				1.4. Meningkatkan aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi.	5.21	5.34
					IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	56.65	66.15
					Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	75	82.5
					Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang	11.11	54.44

Visi: "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"								
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2017 (baseline)	2022 (akhir periode)	
					Strategis Keistimewaan			
					1.5. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	Indeks Williamson	0.4577	0.4489
2.	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance)	Indikator Reformasi Birokrasi dari 73,07 (bb) (2016) menjadi 76 (a) (2022)	2.1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)	WTP A	WTP A	
				2.2. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Persentase capaian sasaran Pelaksanaan Keistimewaan	N/A	91,30	
				2.3. Meningkatkan Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	5.369	21.877	

4.2 Perumusan Tema RKPD 2020

Dalam konteks perencanaan pembangunan, tema pembangunan tahunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam hal ini tema pembangunan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan mempertimbangkan 2 (dua) hal tersebut, yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJPD DIY) Tahun 2005-2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJMD DIY) Tahun 2017-2022. Perumusan tema pembangunan daerah RKPD DIY 2020 mempedomani RKP 2020 , serta internalisasi aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah di DIY seperti Paradigma Abad Samudra Hindia, Keistimewaan DIY, Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDG's), dan Deklarasi Musrenbang Regional se-Jawa Bali 2018.

4.2.1 Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Tema RKPD Tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 merupakan irisan dari tahapan Lima Tahun III (2015–2019) dan Lima Tahun IV (2020–2025) Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2005–2025. Penekanan tahapan Lima Tahun III (2015–2019) adalah *“pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah.”* Sedangkan tahapan Lima Tahun IV (2020–2025) memiliki penekanan untuk *“penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi.”* RPJPD DIY Tahun 2005–2025 menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan periode kedua dari RPJMD DIY 2017–2022 yang memasuki masa transisional pada tahun 2017 dan tahun pertama tahun 2018. Dokumen RPJMD DIY 2017–2022 sendiri memiliki peran kritical dan penting karena berada menjelang berakhirnya tahapan RPJPD DIY 2005–2025 yang hendak mewujudkan Visi Pembangunan berupa *“Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”*.

Dalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 merupakan tahun ketiga dari periode RPJMD DIY 2017–2022 dengan arah kebijakan umum pembangunan **“Infrastruktur (Titik Pertumbuhan) untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan wilayah”**¹ yang meliputi:

1. Meningkatkan Kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY yang inklusif dan berkeadilan
2. Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta

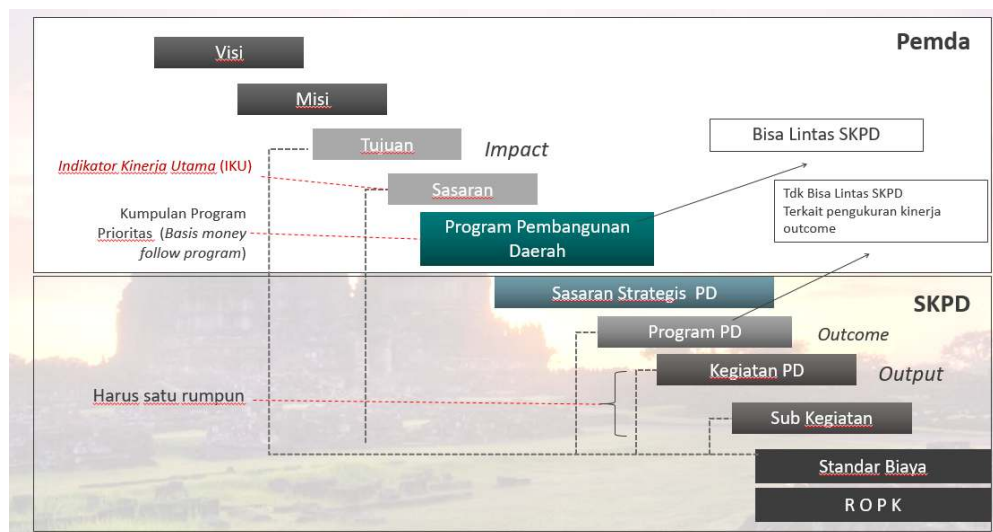
¹Road Map Tematik RPJMD DIY 2017–2022, Bappeda DIY, 2018.

3. Internalisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada ketahanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan
4. Memperkuat implementasi dan advokasi pengarusutamaan Gender
5. Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan
6. Mengendalikan pertumbuhan penduduk
7. Pengembangan keterlindungan warga, keamanan dan ketertiban umum Pemenuhan layanan Dasar masyarakat miskin
8. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar yang berketahanan dan berkelanjutan khususnya pada kawasan yang belum maju, maju tertekan, dan potensi cepat tumbuh
9. Meningkatkan pemeliharaan (pelindungan secara hukum dan fisik) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaan untuk aman, berketahanan dan berkelanjutan mewujudkan pemukiman yang inklusif
10. Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah
11. Peningkatan Pendapatan per Kapita Masyarakat
12. Penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru
13. Memperluas kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan proporsi angkatan kerja dan lulusan pendidikan tinggi.
14. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
15. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
16. Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengurangan resiko bencana

Berangkat dari arah kebijakan tersebut tema RKPD DIY Tahun 2020 dapat mengandung kata kunci Mendayagunakan dan Memantapkan SDM Unggul (pendidikan, kesehatan, kebudayaan, ekonomi) dan Infrastruktur (bandara NYIA beroperasi).

RPJMD DIY Tahun 2017-2022 yang dilengkapi dengan arsitektur kinerja berupa bagan alir visi misi s/d program perangkat daerah (*cascading*) yang menggambarkan bagaimana visi-misi tercapai dengan dukungan berjenjang secara terukur dan bagaimana organisasi perangkat daerah dibentuk untuk mendukung capaian visi misi (*vision driven organization*) dalam rangka mewujudkan pendekatan perencanaan dan penganggaran berbasis program (*money follow program*; lihat Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017). Keberadaan Program Pembangunan Daerah (Program Pemda) dalam arsitektur kinerja merupakan inovasi Pemerintah Daerah DIY dalam mewujudkan pendekatan *money follow program* dimana terdapat keterlibatan

lintas perangkat daerah/ lintas urusan untuk mendorong pencapaian sasaran Pemerintah Daerah sebagaimana digambarkan berikut,



Sumber : Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran. Bappeda DIY. 2018

Gambar 4-1 Arsitektur Kinerja RPJMD DIY 2017-2022 Cascade Perencanaan

Berkenaan dengan implementasi *cascading* dan arah kebijakan umum dalam RPJMD DIY untuk tahun 2020 tersebut dapat difokuskan lebih lanjut dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial sebagaimana kebijakan nasional terkait pendekatan perencanaan pembangunan dan (*lihat*. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017). Pendekatan tematik yang telah dirumuskan pada RPJMD DIY 2017-2022 berangkat pada permasalahan-permasalahan daerah yang menjadi prioritas dan perlu segera diakslerasi yaitu Fokus Tematik,

1. Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan,
2. Penurunan Ketimpangan Wilayah,
3. Dukungan Pembangunan Yogyakarta International Airport (Bandar Udara Internasional Yogyakarta)
4. Pembiayaan Pembangunan.

Fokus Tematik tersebut dapat dipetakan berdasarkan misi, sasaran dan Program Pembangunan Daerah serta alternatif strategi pada tahun 2020 sebagai berikut,

Tabel 4-2. Penyandingan Cascading RPJMD, Tematik dan Kriteria Program.

No	Misi	Tematik	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Alternatif Strategi
1.	Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM		(1) Menyelenggarakan pendidikan berbasis entrepreneurs hip dan budaya (2) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat fokus perlindungan dan pelayanan lansia dan keluarga miskin
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Target : 80,29 (2018) s/d 81,68 (2022)	a. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan b. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Target: 69,91 (2018) s/d 70,32 (2022)	Program Pembangunan Sosial Masyarakat	
			Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat		
			a. Indeks Gini Target: 0,3917 (2018) s/d 0,3635 (2022) b. Persentase Angka Kemiskinan ; Target : 11,23 (2018) s/d 7 (2022)	Program Penanggulangan Kemiskinan	
			Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan		
			Pertumbuhan Ekonomi Target: 5,24 (2018) s/d 5,34 (2022)	Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)	
			Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan		
			Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang diapresiasi Target: 11,46 (2018) s/d 7 (2022)	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	
2.		Ketimpangan Wilayah,	Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah		(1) penumbuhan pusat-pusat

No	Misi	Tematik	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Alternatif Strategi
			Indeks Williamson Target: 0,4559 (2018) s/d 0,4489 (2022)	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan	pertumbuhan baru dengan mengembangkan industri unggulan daerah skala kecil, menengah dan besar (2) meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
			Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan		
			a. Pertumbuhan Ekonomi Target: 5,24 (2018) s/d 5,34 (2022) b. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Target: 76,5 (2018) s/d 82,5 (2022) c. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Target: 58,58 (2018) s/d 66,15 (2022)	a. Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa) b. Program Peningkatan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang c. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	
			Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat		
			a. Indeks Gini Target: 0,3917 (2018) s/d 0,3635 (2022) b. Persentase Angka Kemiskinan Target : 11,23 (2018) s/d 7 (2022)	Program Penanggulangan Kemiskinan	
			Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan		
			Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang diapresiasi Target: 11,46	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	

No	Misi	Tematik	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Alternatif Strategi
			(2018) s/d 7 (2022)		
3.		Dukungan Pembangunan New Yogyakarta Internasional Airport	Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah Indeks Williamson Target: 0,4559 (2018) s/d 0,4489 (2022)	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan	(1) penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru; (2) meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Yang dapat dilaksanakan dengan (1) Mendorong kemudahan investasi, termasuk menyediakan infrastruktur pendukung, (2) pengembangan destinasi wisata skala nasional dan internasional, serta pembangunan fasilitas yang menguntungkan seperti RS;
			Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan		
			a. Pertumbuhan Ekonomi Target: 5,24 (2018) s/d 5,34 (2022) b. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Target: 76,5 (2018) s/d 82,5 (2022) c. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Target: 58,58 (2018) s/d 66,15 (2022)	a. Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa) b. Program Peningkatan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang c. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	
			Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat		
			a. Indeks Gini Target: 0,3917 (2018) s/d 0,3635 (2022) b. Persentase Angka Kemiskinan Target : 11,23 (2018) s/d 7 (2022)	Program Penanggulangan Kemiskinan	
4.		Pembiayaan Pembangunan.	Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah Indeks Williamson Target: 0,4559 (2018) s/d 0,4489 (2022)	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan	Mencari alternatif pembiayaan pembangunan pemerintah dan non-pemerintah, (termasuk dalam hal optimalisasi aset-aset daerah)
			Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan		
			Pertumbuhan Ekonomi Target: 5,24 (2018) s/d 5,34	Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian,	

No	Misi	Tematik	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Alternatif Strategi
	Misi 2. Mewujudkan Tata Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis		(2022) Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan a. Opini BPK Target: WTP (2018 s/d 2022) b. Nilai Akuntabilitas Pemerintahan (AKIP) Target: A (2018 s/d 2022)	Industri Pengolahan; Jasa Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	

Sumber: Road Map Tematik RPJMD DIY 2017-2022, Bappeda DIY, 2018.

4.2.2 Internalisasi Tema dan Sasaran Rencana Kerja Pemerintah 2020 dengan Tema RKPD DIY tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (RKP 2020) merupakan RKP tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024, dan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia. Tema RKP 2020 adalah “*Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas*”. RKP 2020 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi pemerataan yang dapat dideskripsikan dengan penyandingan indikator terkait pada RKPD DIY 2020 pada tabel sebagai berikut,

Tabel 4-3 Sasaran Makro Ekonomi Pembangunan Nasional dan Daerah Istimewa Yogyakarta

RKP 2020		RKPD DIY 2020		
Indikator Pembangunan	Skenario 2020	Sasaran RPJMD DIY 2017-2022	Indikator	Target 2020
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,6	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,29
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8 – 5,1		Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (indikator pada program Pemda Program Pengembangan sektor	2,42

RKP 2020		RKPD DIY 2020		
Indikator Pembangunan	Skenario 2020	Sasaran RPJMD DIY 2017-2022	Indikator	Target 2020
			Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa))	
Angka Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0	Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	Angka Kemiskinan (%)	9,11
Rasio Gini (indeks)	0,375 – 0,380		Rasio Gini (indeks)	0,3776
Indeks Pembangunan Manusia	72,51	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia	81,08

Sumber : Kementerian PPN/ Bappenas (diolah) 2019, dan RPJMD DIY 2017-2022

Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai, arah kebijakan pembangunan nasional yang ditempuh dalam RKP 2020 utamanya akan berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam lima Prioritas Nasional (PN) yaitu

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja;
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup;
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

4.2.3 Internalisasi Paradigma Abad Samudra Hindia dalam Visi-Misi Gubernur DIY dengan Tema RKPD Tahun 2020: Kawasan Selatan Sebagai Basis Kewilayahan yang diperhatikan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 disusun sebagai penjabaran dan pewujudan visi pembangunan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022 yaitu *Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja* (RPJMD DIY 2017-2022). Visi tersebut berangkat dari tema pidato Visi Misi Gubernur DIY 2017-2022 "*Menyongsong Abad Samudera Hindia Untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja*" dengan misi Panca Mulia untuk mewujudkan kemuliaan martabat tersebut. Dari aspek kewilayahan, tema *Menyongsong Abad Samudera Hindia* tersebut mengindikasikan upaya Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lebih memperhatikan pengembangan wilayah selatan dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada. Harapannya potensi-potensi tersebut dapat menjawab

tantangan untuk pemeratakan kesejahteraan masyarakat DIY pada umumnya dan kawasan selatan khususnya. Selain itu, pembangunan infrastruktur di Kawasan Selatan merupakan upaya untuk memberi perhatian pada basis kewilayahan tersebut untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Sesuai SK Gubernur DIY No. 163/KEP/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Program Prioritas Pembangunan:

1. Terdapat 4 dari 9 Kawasan² yang menjadi prioritas kawasan di Kawasan Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain:
 - a. Pengembangan Kawasan Pantai Samas – Parangtritis
 - b. Pengembangan Kawasan Pantai Selatan DIY
 - c. Pengembangan Kawasan Pantai Selatan Kulonprogo
 - d. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Bandara Baru Kulonprogo
2. Terdapat 3 dari 5 Infrastruktur³ yang menjadi prioritas antara lain :
 - a. Pembangunan Jalan Akses Temon-Borobudur
 - b. Pembangunan SPAM Regional Sistim Bener, Sistim Kapet Kulonprogo, Sistim Kartamantul
 - c. Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto

Selain itu terdapat proyek infrastruktur prioritas lainnya yaitu, Pembangunan International Hospital – RSUD Wates dan Pembangunan Jogjakarta Agro Techno Park (JATP).

4.2.4 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Tema RKPD Tahun 2020

Tema RKPD DIY 2020 akan menselaraskan dengan perencanaan urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan lima kewenangan Keistimewaan DIY dalam UU 13 Tahun 2012 (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur (2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (3) Kebudayaan; (4) Pertanahan; (5) tata ruang.

² Adapun 9 Kawasan tersebut selengkapnya antara lain (1) Penataan Kawasan Kraton, (2) Penataan Kawasan Sumbu Filosofi, (3) Pengembangan Kawasan Perbukitan Menoreh (4) Pengembangan Kawasan Pantai Samas – Parangtritis, (5) Pengembangan Kawasan Pantai Selatan DIY, (6) Penataan Kawasan Puro Pakualaman (6) Pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta (7) Pengembangan Kawasan Pantai Selatan Kulonprogo (8) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Bandara Baru Kulonprogo.

³ Adapun 5 Infrastruktur prioritas selengkapnya adalah (1) Pembangunan Jalan Akses Temon-Borobudur (2) Pembangunan Underpass Kentungan, (3) Pembangunan Underpass Gejayan (4) Pembangunan SPAM Regional Sistim Bener, Sistim Kapet Kulonprogo, Sistim Kartamantul (5) Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto.

Pelaksanaan Urusan Keistimewaan beraras pada tujuan keistimewaan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UU 13 Tahun 2012 yakni: (1) mewujudkan pemerintahan yang demokratis; (2) mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; (3) mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) menciptakan pemerintahan yang baik; dan (5) melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Dalam rangka pelaksanaan Urusan Keistimewaan Pemerintah Daerah DIY telah menuangkan rencana program dan kegiatan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD yang menjadi pedoman penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan RKPD yang melibatkan Perangkat Daerah, Masyarakat, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Kadipaten Pakualaman.⁴ Dalam RPJMD DIY 2017-2022 dan Renstra Perangkat Daerah terkait, urusan keistimewaan terintegrasi pada Sasaran, Indikator Sasaran, Program Pemda, Sasaran Perangkat Daerah, dan Program Perangkat Daerah serta Kegiatan Perangkat Daerah. Aras keistimewaan merupakan bagian inklusif dari perencanaan pembangunan daerah DIY yang termuat dalam RPJMD DIY 2017-2022 dan akan dijabarkan dalam RKPD Tahun 2020 yang dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut,

Tabel 4-4 Sasaran Urusan Keistimewaan pada Misi ke-1 RPJMD DIY 2017-2022

MISI 1 Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban				
TUJUAN 1 Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka tunggal ika-an serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta				
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PEMBENTUK	PROGRAM PEMDA	INDIKATOR PROGRAM PEMDA
Sasaran ke-3 Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	Memelihara, mengembangkan dan mempromosikan khazanah budaya benda dan tak benda	Program Pelestarian budaya benda dan tak benda	1. Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan. 2. Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan

⁴ Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 59.

MISI 1 Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban
TUJUAN 1 Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka tunggal ika-an serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PEMBENTUK	PROGRAM PEMDA	INDIKATOR PROGRAM PEMDA
Sasaran ke-4 Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Pada indikator ke-4: Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	1. Sultan Ground (keprabon dan non keprabon) 2. Pakualaman Ground (keprabon dan non keprabon) 3. Satuan Ruang Lain yang memiliki nilai keistimewaan	Program Peningkatan Keterpaduan program pemanfaatan Ruang	persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang

Sumber: RPJMD DIY 2017-2022

Tabel 4-5 Sasaran Urusan Keistimewaan pada Misi ke-2 RPJMD DIY 2017-2022

MISI 2 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis
TUJUAN 2 Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PEMBENTUK	PROGRAM PEMDA	INDIKATOR PROGRAM PEMDA
Sasaran ke-7 Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Capaian sasaran Pelaksanaan Keistimewaan	Capaian sasaran program keistimewaan	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	1. Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan. 2. Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdis kelembagaan
Sasaran ke-8 Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	Fasilitasi pengelolaan yang terukur	Program Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan,	Persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa.

Sumber: RPJMD DIY 2017-2022

Penggunaan dana keistimewaan (danais) dalam rangka pelaksanaan Urusan Keistimewaan oleh Pemerintah Daerah DIY pada RKPD Tahun 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian pembangunan yang tertuang dalam RPJMD DIY 2017-2022. Pelaksanaan Urusan Keistimewaan

Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2020 merupakan bagian dari keseluruhan sistem akuntabilitas pemerintah daerah yang tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4.2.5 Internalisasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Pemerintah Daerah DIY telah menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan menyusun Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022. Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2018 telah memuat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan antara lain :

1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan
2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan
3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender
6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau
8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
11. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim
14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan
15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan
16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Ketujuh belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD DIY 2017-2022 dan dapat menjadi pedoman penajaman tema pembangunan DIY serta penyusunan prioritas pembangunan tahun 2020

4.2.6 Internalisasi Deklarasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Jawa-Bali Tahun 2018

Indonesia menghadapi tantangan pembangunan global saat ini yaitu perubahan perekonomian dunia Revolusi Industri 4.0 (*Fourth Industrial Revolution/ Industrial Revolution 4.0*). Revolusi Industri 4.0 mengembangkan tahapan revolusi industri sebelumnya dengan otomatisasi dan digitalisasi berbasis cyber-physical dengan kemajuan teknologi internet serta munculnya kecerdasan buatan yang mengoperasikan robot. Revolusi Industri 4.0 merupakan babak baru perindustrian yang akan lebih banyak memberi peran kepada teknologi virtual dan bentuk-bentuk perindustrian yang kian canggih. Selain potensi kemajuan, World Economic Forum memperkirakan keberadaan Revolusi Industri 4.0 akan membawa beberapa akibat dalam proses industri dan kehidupan manusia antara lain disrupsi pekerjaan, inovasi dan daya produksi, ketimpangan, resiko keamanan dan konflik, disrupsi bisnis, kepaduan teknologi, serta isu etnis dan identitas.

Merespon tantangan Revolusi Industri 4.0 tersebut, Pemerintah Provinsi Se-Jawa-Bali melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Jawa – Bali Tahun 2018 (Musrenbangreg se-Jawa Bali Tahun 2018) dengan tema “*Strategi Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Melalui Penyiapan Sumber Daya Manusia*” di Yogyakarta pada 16 - 19 Oktober 2018. Tema Musrenbangreg tersebut berkesinambungan dengan tema Musrenbangreg se-Jawa Bali Tahun 2017 “Menjawab Peluang Bonus Demografi Melalui Akselerasi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia” yang diselenggarakan di Surakarta terutama dalam hal ketenagakerjaan dan pendidikan.

Isu strategis yang dirumuskan pada Musrenbangreg se-Jawa Bali Tahun 2018 adalah, sebagai berikut :

1. Perlunya antisipasi terhadap perubahan ketenagakerjaan karena disrupsi teknologi/ perubahan industri akan berdampak pada enam subsektor industri (besar dan sedang) antara lain Pakaian jadi, Tekstil, Karet, barang dari karet dan plastik, Pengolahan tembakau dan Kulit, barang dari kulit dan alas kaki Indonesia yang menyerap 60,2% (BPS, 2017). Hal tersebut mengingat masih tingginya angka pengangguran anak muda (usia 15-24 tahun) sebesar 52,3% dari total penganggur (BPS, Feb 2018).
2. Terjadinya mismatch antara lulusan sekolah dengan lapangan kerja yang tersedia, sekitar 53,33% *vertical mismatch* dan *horizontal mismatch* sebesar 60,52% (Lembaga Demografi UI, dalam Kontan 2018).
3. Perlunya antisipasi kebijakan untuk mengoptimalkan sektor perekonomian/ industri yang terdampak oleh Revolusi Industri 4.0.

Diharapkan kebijakan tersebut memiliki keberpihakan pada pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, melindungi golongan ekonomi lemah, serta penguatan lembaga-lembaga ekonomi lokal termasuk lembaga keagamaan) dalam rangka pemberdayaan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan menurunkan ketimpangan kesejahteraan.

4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan literasi keuangan dalam peningkatan kapasitas usaha UMKM dan penumbuhan wirausaha baru.
5. Kurangnya daya dukung untuk mengantisipasi Revolusi Industri 4.0 terutama terkait optimalisasi infrastruktur teknologi yang terintegrasi (konektivitas; Indonesia 64 dari 79 Negara; *Global Connectivity Index*, 2018), literasi digital masyarakat dan sinergi kebijakan pendukungnya.

Berkenaan dengan isu strategis tersebut serta memperhatikan kondisi pada masing-masing provinsi, Gubernur se-Jawa-Bali sepakat mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan langkah strategis dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 sekaligus sebagai langkah konkrit penyiapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Deklarasi Musrenbangreg se-Jawa Bali Tahun 2018 hal-hal sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan kebijakan antar lini pemerintah dalam mendukung implementasi *Making Indonesia 4.0* terutama terkait perindustrian, ketenagakerjaan, teknologi informasi dan sektor-sektor terkait dalam mengantisipasi perubahan ketenagakerjaan dan kondisi perekonomian Indonesia di masa yang akan datang dan melindungi kelompok rentan – terutama tenaga kerja perempuan.
2. Mengoptimalkan 5 Sektor Manufaktur *Making Indonesia 4.0* dan sektor lain sesuai potensi daerah untuk menyerap angkatan kerja produktif.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sesuai Standard Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Meningkatkan literasi keuangan petani/nelayan dan pelaku UMKM dengan mempermudah akses dana/modal dan sarana prasarana teknologi informasi untuk mengembangkan pasar, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing produk-produk lokal.
5. Memperkuat keberadaan kelembagaan ekonomi melalui peningkatan peranmasjid, pesantren dan tempat ibadah lainnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi umat.
6. Menyempurnakan kurikulum pendidikan yang adaptif serta merevitalisasi sekolah menengah dan vokasi sesuai dengan potensi dan kebutuhan pasar melalui kolaborasi antara pemerintah dan industri.
7. Membentuk ekosistem inovasi digital dan mengembangkan inkubasi bisnis/technopark yang ada di setiap daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan membentuk dan

menumbuhkembangkan *start up/creative hub* dan menjadikan perguruan tinggi sebagai *center of excellence and innovation*.

4.2.7 Tema RKPD DIY 2020

Penyusunan tema pembangunan RKPD DIY 2020 mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD DIY 2017-2022 pada tahun perencanaan bersangkutan, mempertimbangkan aspek tema indikatif yang telah dirumuskan didalam RPJPD DIY 2005-2025 dan tema indikatif pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta arah kebijakan umum pembangunan sebagai referensi tema indikatif. Pilihan tema pembangunan RKPD DIY 2020 yang ada memperhatikan internalisasi paradigma Abad Samudra Hindia dalam visi misi Gubernur DIY, aspek keistimewaan, mempedomani RKP 2020 beserta tema pembangunan nasional yang termuat, memperhatikan fokus tematik, serta identifikasi masalah yang telah dibahas pada awal bab dokumen ini sehingga diharapkan sinergitas perencanaan pembangunan Tahun 2020 di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat tercapai. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut Tema RKPD DIY Tahun 2020 dapat dirumuskan sebagai berikut,

“Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas”

Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:

1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Percepatan Pembangunan Infrastruktur diharapkan menjadi pendorong pengurangan ketimpangan antar wilayah dan meningkatkan kualitas hidup, penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta. Selain itu, fenomena kemiskinan dan kesenjangan di Kawasan Selatan DIY mendorong fokus dan perhatian terhadap pembangunan Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta selaras dengan Tema Visi untuk menyongsong "Abad Samudera Hindia" juga untuk meningkatkan "Harkat dan Martabat Warga Miskin di Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta khususnya, dan di seluruh Wilayah Yogyakarta pada umumnya." Prioritas penyelesaian infrastruktur antara lain terkait Yogyakarta International Airport (YIA), JJLS, JATP dan infrastruktur pendukung terkait.

Percepatan pembangunan infrastruktur dimaknai secara luas tidak hanya terkait dengan sarana prasarana tetapi juga aspek non sarana prasarana fisik. Diharapkan kata kunci tema ini dapat berkontribusi

dalam rangka pencapaian target sasaran Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan yang akan diukur dengan indikator :

- a. Pertumbuhan Ekonomi
- b. Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
- c. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan
- d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan kata kunci tema tersebut dirumuskan prioritas pembangunan pada tahun 2020 prioritas *Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan* yang berhubungan dengan prioritas RKP/ nasional dalam rangka *Pemantapan ketahanan pangan, air, energi dan pelestarian lingkungan hidup* dan prioritas *Peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja*.

2. Peningkatan SDM

Pada tahun 2018, perekonomian tumbuh melampaui target namun belum optimal mengurangi ketimpangan antar kelompok pendapatan dan angka kemiskinan. Pertumbuhan Ekonomi DIY belum dinikmati seluruh lapisan masyarakat secara merata. Indeks gini masih mencapai 0,441 dan Angka Kemiskinan 11,81% sementara itu IPM DIY melampaui rata-rata nasional. Ketimpangan juga terjadi pada capaian IPM yang masih timpang antar Kabupaten/Kota.

Kondisi tersebut memerlukan terobosan baru agar pembangunan daerah tidak hanya tumbuh, tetapi memperhatikan dimensi pemerataan dan meningkatkan meningkatkan kualitas hidup, penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta sesuai misi ke-1 RPJMD DIY 2017-2022.

Keyword tema tersebut Peningkatan SDM sekurangnya dapat mendukung pencapaian 3 Sasaran RPJMD DIY pada tahun 2020 :

- a. *Meningkatnya Derajat kualitas SDM dengan indikator sasaran:*
 - 1) IPM dan
 - 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- b. *Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat dengan indikator sasaran:*
 - 3) Indeks Gini
 - 4) Angka Kemiskinan
- c. *Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan* dengan indikator sasaran Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi.

Berdasarkan kata kunci tema dan penjelasan tersebut dirumuskan prioritas *Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan* yang sinergis dengan prioritas nasional *Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan*

3. Pertumbuhan Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi di DIY yang dicapai 6,20 (2018, BPS) belum merata apabila melihat capaian Indeks Williamson 0,4599 yang lebih tinggi dari target RPJMD sebesar 0,4559 (tercapai 99,12%). Tingkat kesenjangan ekonomi antarwilayah DIY tahun 2012-2016 dilihat dari Tipologi Klassen menunjukkan bahwa kesenjangan antarwilayah di DIY masih besar terlihat dari masuknya Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sebagai daerah maju dan cepat tumbuh, sementara Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah tertinggal, dan Kabupaten Bantul sebagai daerah berkembang cepat. Ini diperkuat dengan hasil persebaran kabupaten/kota di DIY menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2012 hingga 2015 yang menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul masuk kategori *low growth - pro poor* (kuadran II), Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman masuk kategori *high growth-less pro poor* (kuadran IV), sementara Kabupaten Kulon Progo masuk kategori *low growth - less pro poor* (kuadran I). Apabila didasarkan pada analisis *Shift Share* yang berguna untuk mengkaji pergeseran serta peran perekonomian di suatu daerah untuk mengetahui ketimpangan sektoral dapat disimpulkan bahwa tidak ada kabupaten/kota dengan pertumbuhan pesat (kuadran III). Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul masuk kelompok daerah yang sedang berkembang. Kota Yogyakarta hanya menempati daerah yang cenderung berpotensi dan Kabupaten Kulon Progo masih merupakan daerah yang mempunyai daya saing lemah (kuadran IV) (Road Map Tematik RPJMD DIY 2017-2022).

Masalah ketimpangan ekonomi antar daerah merupakan masalah yang cukup sulit diatasi karena merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Ketimpangan distribusi pendapatan di DIY masih tinggi terlihat dari 80 persen penduduk berpendapatan menengah ke bawah yang hanya memperoleh 51 persen dari total distribusi pendapatan dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi memperoleh 49 persen dari total distribusi pendapatan. Terkait dengan permasalahan tersebut perlu dirumuskan program pembangunan yang

mampu menggerakkan skala ekonomi di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo untuk mengurangi jurang ketimpangan ekonomi dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Oleh karenanya perlu dilakukan,

- a. perluasan sektor penggerak pertumbuhan dan area pembangunan mengarah ke wilayah yang relatif tertinggal, prioritas utamanya Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul;
- b. Membuat kebijakan yang mendorong laju pertumbuhan kesempatan kerja, terutama di sektor-sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa keuangan, real estate, dan jasa perusahaan,
- c. Meningkatkan kebutuhan investasi di kabupaten/kota secara proporsional dengan memperhitungkan potensi yang dimiliki tiap daerah,

Sesuai arahan Pemerintah, Pemerintah Daerah perlu mendorong terjadinya pertumbuhan berkualitas yakni pertumbuhan yang inklusif dimana hasil pembangunan adalah pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan akan menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi, serta memastikan akses yang lebih luas kepada semua lapisan masyarakat. Pembangunan inklusif merupakan peningkatan laju pertumbuhan dan perluasan skala ekonomi, serta penciptaan lapangan investasi yang merata dan peningkatan kesempatan kerja yang produktif (Bank Dunia). Pertumbuhan berkualitas juga diharapkan memperhatikan kelestarian lingkungan dan aspek kesesuaian pemanfaatan ruang dalam upaya pencapaiannya. Pertumbuhan berkualitas tersebut diharapkan dapat memenuhi capaian Sasaran RPJMD DIY “Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah yang diukur dengan Indeks williamson” diarahkan melalui strategi (1) penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru; (2) meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Adapun prioritas pembangunan pada tahun 2020 yang dirumuskan terkait kata kunci ini ialah prioritas *Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah* yang berhubungan dengan prioritas RKP/nasional *Penguatan Konektivitas dan Pemerataan*.

Ketiga Kata kunci tema tersebut masing-masing memiliki keterkaitan dengan prioritas daerah dan sasaran pembangunan DIY Tahun 2020 dan diselaraskan dengan tema RKP 2020 dan Prioritas Nasional. Ketiga kata kunci tersebut perlu didukung oleh Pendukung

Prioritas berupa Sasaran-Sasaran pendukung Misi ke-2 RPJMD DIY 2017-2022 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis antara lain:

- a. Meningkatnya Kapasitas Tata kelola Pemerintahan dengan Indikator sasaran
 - 1) Opini BPK
 - 2) Nilai Akuntabilitas Pemerintah
- b. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan dengan Indikator Persentase capaian program urusan keistimewaan
- c. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kesultanan, Kadipaten dan tanah desa dengan indikator Bidang tanah kesultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan.

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Berdasarkan tema RKPD DIY 2020 *Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas* dapat dirumuskan Prioritas Daerah DIY sebagai berikut,

Tabel 4-6 Rumusan Prioritas Daerah

No.	Kata Kunci Tema RKPD DIY 2020	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah
1.	Peningkatan SDM	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM
			1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat
			1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan
2.	Pertumbuhan Berkualitas	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah
3.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur (**Infrasuktur: Dimaknai luas tidak hanya terkait dengan sarpras tetapi juga aspek non sarpras).	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan
4.	Pendukung Prioritas Pembangunan	Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
			2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan
			2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan

No.	Kata Kunci Tema RKPD DIY 2020	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah
			pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa

Prioritas Daerah tersebut diselaraskan dengan mempedomani prioritas nasional sesuai Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Rancangan RKP Tahun 2020), beserta indikator dapat disampaikan penyelarasan dengan Tema dan Prioritas RKPD DIY beserta Sasaran-Indikator Sasaran dan Program Pemda DIY sebagai berikut :

Tabel 4-7 Tema dan Prioritas pembangunan DIY

Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas.	Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM untuk pertumbuhan berkualitas		Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pemda
	Prioritas Nasional	Key Word Tema DIY			
1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan SDM	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	1.1.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
				1.1.1.2. Indeks Pemberdayaan Gender	Program Peningkatan Usia Harapan Hidup
			1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	1.1.2.1. Indeks Gini	Program Penanggulangan Kemiskinan
				1.1.2.2. Persentase Angka Kemiskinan	
1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	1.1.3.1. Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	Program Pelestarian budaya benda dan tak benda			
2. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan	Pertumbuhan Berkualitas	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	1.1.5.1. indeks Williamson	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas.	Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM untuk pertumbuhan berkualitas		Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pemda
	Prioritas Nasional	Key Word Tema DIY			
3. Pemantapan ketahanan pangan, air, energi dan pelestarian lingkungan hidup. 4. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja	Percepatan Pembangunan Infrastruktur (***)Infrasuktur: Dimaknai luas tidak hanya terkait dengan sarpras tetapi juga aspek non sarpras).	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
				1.1.4.3. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Program peningkatan keterpaduan program pemanfaatan ruang
				1.1.4.4. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	
				1.1.4.1. Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan	Pendukung Prioritas Pembangunan	Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	2.1.1.1. Opini BPK	Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
				2.1.1.2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah	Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
			2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	2.1.2.1. Persentase capaian program urusan keistimewaan	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah
			2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	2.1.3.1. Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	Program Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa

4.4 Proritas dan Sasaran Pembangunan Kewilayahan Tahun 2020

RKPD DIY Tahun 2020 juga memperhatikan Rancangan RKP Tahun 2020 berkenaan dengan sasaran utama pengembangan wilayah Jawa-Bali pada tahun 2020 antara lain,

1. mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi wilayah;
2. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan;
3. memperluas kesempatan kerja; dan
4. meningkatkan pembangunan manusia

dengan target pengembangan wilayah yang disandingkan dengan target RKPD 2020 sebagai berikut,

Tabel 4-8 Target Pengembangan Wilayah Jawa Bali dan DIY pada tahun 2020

RKP 2020		RKPD DIY 2020		
Indikator Pembangunan	Target 2020	Sasaran RPJMD DIY 2017-2022	Indikator	Target 2020
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,7	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,29
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5		Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (indikator pada program Pemda Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa))	2,42
Angka Kemiskinan (%)	7,73	Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	Angka Kemiskinan (%)	9,11
Rasio Gini (indeks)	0,375 – 0,380		Rasio Gini (indeks)	0,3776
Indeks Pembangunan Manusia	72,51	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia	81,08

Sumber: Rancangan RKP 2020, dan RPJMD DIY 2017-2022 (diolah)

Pengembangan wilayah Jawa-Bali pada tahun 2020 terkait DIY (sesuai Rancangan RKP Tahun 2020) diprioritaskan antara lain pada:

1. pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Borobudur dan sekitarnya
2. pengembangan kawasan perdesaan; dan
3. penguatan ketahanan bencana di daerah rawan bencana sepanjang pantai selatan Jawa.

Prioritas Daerah DIY dapat disandingkan berdasarkan target indikator sasaran DIY dan kabupaten/ kota berdasar RPJMD DIY dan RPJMD Kabupaten/Kota di DIY sebagai berikut,

Tabel 4-9 Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah DIY-Kabupaten Kota Tahun 2020

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	DIY	Kota YK	Bantul	KP	GK	Sleman
1.	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	1.1.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,08	86.56	80.56	74.32	70.50	83.12
			1.1.1.2. Indeks Pemberdayaan Gender	70,12	-	-	-	-	95,89
		1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	1.1.2.1. Indeks Gini	0,3776	0,397	-	0,37 - 0,29	-	≤ 0,40
			1.1.2.2. Persentase Angka Kemiskinan	9,11%	6,15	9,59	12,94	12,56	6,36
		1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	1.1.3.1. Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	11.72%	-	-	-	-	-
2.	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	1.1.5.1. indeks Williamson	0,4524	-	-	-	-	-
3.	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4.4. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	40,69%	-	-	-	-	-
			1.1.4.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,44	51,24	63	63,58	54,47	41.33 (air) 72 (udara) 32,30 (tutupan lahan)
			1.1.4.3. Persentase Kesesuaian	79,5%	76,70%	75%	87,50	-	-

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	DIY	Kota YK	Bantul	KP	GK	Sleman
			Pemanfaatan Ruang						
			1.1.4.1. Pertumbuhan Ekonomi	5,29%	5,51%* (rerata)	5,49%* (rerata)	6,06%* (rerata)	5,49%* (rerata)	5,75%* (rerata)
4.	Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	2.1.1.1. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			2.1.1.2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah	A	BB	A	BB	BB	A
		2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	2.1.2.1. Persentase capaian program urusan keistimewaan	73,91%	-	-	-	-	-
		2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	2.1.3.1. Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	13.419	-	-	-	-	-

Sumber: RPJMD DIY dan RPJMD Kabupaten/ Kota di DIY, diolah

4.4.1 Proyeksi Nilai PDRB Kabupaten-Kota

4.4.1.1 Proyeksi Nilai PDRB Kota Yogyakarta

Nilai PDRB Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 diramalkan bahwa nilai PDRB Kota Yogyakarta akan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2022 nilai PDRB Kota Yogyakarta adalah senilai Rp. 32.725.315,18 juta. Peningkatan kinerja ekonomi selama periode 2017 – 2022 antara lain dapat didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana berupa pembangunan Kawasan Malioboro dan Kota Baru, Pembangunan Jaringan Distribusi Air Baku serta Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Jaringan Distribusi Utama. Pertumbuhan ekonomi rata-rata sepanjang tahun 2017 – 2022 diproyeksikan sebesar 5,51% per tahun,

Tabel 4-10 Proyeksi PDRB Kota Yogyakarta (juta rupiah)

Tahun	PDRB
2017	24.815.433,63
2018	26.143.059,33
2019	27.567.856,07
2020	29.125.439,93
2021	30.843.840,89
2022	32.725.315,18

Sumber: Bappeda, 2016

4.4.1.2 Proyeksi Nilai PDRB Kabupaten Bantul

PDRB Kabupaten Bantul senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, nilai PDRB Kabupaten Bantul akan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2022 nilai PDRB Kabupaten Bantul adalah senilai Rp23.010.149,87 rupiah dengan pertumbuhan rata-rata per tahun adalah 5,49%. Pertumbuhan ekonomi Bantul didukung dengan pembangunan beberapa infrastruktur strategis berupa Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Pansela dan Outer Ringroad dan akses menuju Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA), Pembangunan Kawasan Industri, Penyediaan Air Baku, Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Jaringan Distribusi Utama , Pembangunan SPAM Regional, Pengembangan Pengelolaan Sampah dan Pembangunan Stasiun *Interchange*. Proyek-proyek tersebut menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi kabupaten Bantul sehingga mencapai rata-rata 5,49% per tahun selama periode 2017 – 2022. Adapun PDRB atas harga konstan selama tahun 2016 – 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4-11 Proyeksi PDRB Kabupaten Bantul (juta rupiah)

Tahun	PDRB
2017	17.251.584,89
2018	18.217.673,65
2019	19.274.298,72
2020	20.421.119,49
2021	21.666.807,78
2022	23.010.149,87

Sumber: Bappeda, 2016

4.4.1.3 Proyeksi Nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo

Perkembangan PDRB riil di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dalam Tabel berikut. Nilai PDRB di Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan hingga pada tahun 2022 nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo adalah senilai Rp10.179.984,40 juta. Pertumbuhan ekonomi Kulonprogo mencapai tingkat paling tinggi dibandingkan ke empat daerah lainnya mengingat besaran nilai investasi proyek fisik terakumulasi paling tinggi di Kulonprogo yang berupa Pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Pansela dan akses menuju YIA, Pembangunan SPAM Regional, Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Jaringan Distribusi Utama, Pembangunan Stasiun *Interchange*, Pembangunan Terminal Barang dan Pembangunan Jalan Bebas Hambatan. Proyek-proyek tersebut dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi kabupaten Kulonprogo sehingga mencapai rata-rata 6,06% per tahun selama periode 2017 – 2022.

Adapun PDRB atas harga konstan selama tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4-12 Proyeksi PDRB Kabupaten Kulon Progo (juta rupiah)

Tahun	PDRB
2017	7.004.743,85
2018	7.495.075,92
2019	8.087.186,92
2020	8.730.118,28
2021	9.425.908,70
2022	10.179.981,40

Sumber: Bappeda, 2016

4.4.1.4 Proyeksi Nilai PDRB Kabupaten Gunungkidul

Nilai PDRB Kabupaten Gunungkidul juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. nilai PDRB Kabupaten Gunungkidul akan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2022 nilai PDRB Kabupaten Gunungkidul adalah senilai Rp16.182.963,23 juta. Pertumbuhan ini didorong antara lain oleh pelaksanaan proyek-proyek besar infrastruktur yaitu Pembangunan Jalan dan Jembatan berupa Pembangunan Jalur Pansela, Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Jaringan Distribusi Utama dan Pembangunan SPAM Regional. Pembangunan di berbagai sektor terutama infrastruktur mendorong pertumbuhan Kabupaten Gunungkidul mencapai rata-rata 5,49% per tahun selama periode 2017 – 2022 dengan rincian target PDRB tahunannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4-13 Proyeksi PDRB Kabupaten Gunungkidul (juta rupiah)

Tahun	PDRB
2017	12.288.875,81
2018	12.934.041,79
2019	13.645.414,09
2020	14.423.202,69
2021	15.259.748,45
2022	16.182.963,23

Sumber: Bappeda, 2016

4.4.1.5 Proyeksi Nilai PDRB Kabupaten Sleman

Nilai PDRB Kabupaten Sleman dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 akan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2022 nilai PDRB Kabupaten Sleman adalah senilai Rp. 42.002.330,98 juta. Proyek-proyek fisik besar memberikan kontribusi besar pada pencapaian kinerja ekonomi tersebut. Proyek-proyek tersebut adalah Pembangunan Jalan dan Jembatan berupa Pembangunan JORR, Pembangunan Underpass Gejayan, Monjali dan Kentungan

dan Pengembangan Jalan Selokan Mataram, Pengembangan SPAM Regional, Pembangunan Stasiun Interchange, Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Jaringan Distribusi Utama dan Pengembangan Jalan Bebas Hambatan. Pertumbuhan ekonomi rata-rata selama tahun 2017 – 2022 adalah 5,75%.

Tabel 4-14 Proyeksi PDRB Kabupaten Sleman (juta rupiah)

Tahun	PDRB
2017	31.342.392,99
2018	33.160.251,79
2019	35.116.706,64
2020	37.241.267,40
2021	39.531.605,34
2022	42.002.330,98

Sumber: Bappeda, 2016

4.4.2 Proyeksi Nilai IPM Kabupaten dan Kota Se-DIY

Proyeksi IPM Kabupaten dan Kota se-DIY menunjukkan bahwa IPM mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan IPM teratas tetap Kota Yogyakarta seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4-15 Proyeksi IPM Kabupaten dan Kota se-DIY

Daerah	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Yogyakarta	85.33	85.74	86.15	86.56	86.97	87.38
Bantul	78.98	79.51	80.03	80.56	81.08	81.61
Kulon Progo	72.65	73.21	73.77	74.32	74.88	75.43
Gunungkidul	68.64	69.26	69.88	70.50	71.12	71.74
Sleman	82.01	82.38	82.75	83.12	83.49	83.86

Pada akhir periode RPJMD, nilai IPM Kota Yogyakarta adalah 87,38 dan masih merupakan capaian tertinggi yang diikuti oleh Kabupaten Sleman sebesar 83,36. Sementara itu IPM Kabupaten Bantul berada di peringkat ketiga dengan nilai sebesar 81,61 yang diikuti oleh Kabupaten Kulonprogo sebesar 75,43. Sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 71,74. Perkembangan ketimpangan IPM menurun seperti kinerja pada tahun-tahun sebelumnya yang didorong dengan perbaikan kinerja pembangunan pada sektor lain di semua daerah. Lebih lanjut, kondisi IPM DIY juga didukung secara signifikan oleh indikator pendidikan dan daya beli. Pada aspek kesehatan salah satu factor pendorong perbaikan pembangunan manusia yaitu peningkatan cakupan pelayanan kesehatan. Melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Kesehatan (Jamkesta) yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 63 Tahun 2016. Pemda DIY berupaya menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) sebagai

upaya Jaminan Kesehatan Semesta. Pelaksanaan jamkesta ditujukan untuk mengintegrasikan kepesertaan jaminan kesehatan yang dikelola pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kepesertaan jamkesta dibagi menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesos, Mandiri Jamkesta, Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus), dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesda kabupaten/kota. Sasaran PBI Jamkesmas, PBI Jamkesos, dan PBI Jamkesda ditujukan untuk masyarakat miskin.

4.4.3 Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota Se-DIY

Tingkat kemiskinan Kabupaten dan Kota se-DIY menunjukkan bahwa persentase jumlah orang miskin mengalami penurunan dari tahun ke tahun seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4-16 Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota se-DIY (dalam persen)

Daerah	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kulon Progo	19,07	17,03	14,98	12,94	10,89	8,85
Bantul	13,40	12,13	10,86	9,59	8,32	7,05
Gunungkidul	17,77	16,03	14,30	12,56	10,83	9,09
Sleman	7,74	7,05	6,87	6,36	6,01	5,67
Yogyakarta	7,27	6,91	6,24	6,15	6,00	5,45

Pada akhir periode RPJMD, tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta adalah 5,45% dan masih merupakan persentase terendah yang diikuti oleh Kabupaten Sleman 5,67%. Sementara itu tingkat kemiskinan tertinggi diproyeksikan terdapat di Kabupaten Kulon Progo yaitu sebesar 8,85% (2022). Sementara itu tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul masing-masing sebesar 7,05% dan 9,09%. Adapun pada tahun 2020 tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta diproyeksikan sebesar 6,15; Bantul 9,59; Kulon Progo 12,94; Gunungkidul 12,56; dan Sleman sebesar 6,36.

Penurunan tingkat kemiskinan dapat didukung dengan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat sebagai hasil dari peningkatan PDRB serta relatif stabilnya tingkat inflasi DIY yang merupakan salah satunya hasil dari kinerja efektif dari TPID dalam mengendalikan harga. Serta dapat didukung dengan program/ kegiatan tematik Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan.

4.4.4 Pendekatan Tematik

Pendekatan tematik pada RKPD DIY 2020 dilaksanakan dalam rangka mengakslerasi dan permasalahan-permasalahan daerah yang menjadi prioritas dengan pendekatan tematik sebagai berikut,

1. Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan, Tematik Kemiskinan diangkat sebagai agenda pembangunan RPJMD DIY 2017-2022 berangkat dari angka kemiskinan DIY yang berada di atas rata-rata nasional dan sebaran masalah kemiskinan terutama pada kawasan selatan yang tersebar pada 15 kecamatan miskin di Kabupaten Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo. Pemerintah Daerah DIY memiliki komitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam rangka mendukung sasaran Tujuan pertama dalam sasaran Global SDGs/TPB. Sebagaimana disebutkan dalam sasaran global SDGs/TPB, pada Tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

Tematik kemiskinan dan ketimpangan antar kelompok pendapatan sebagaimana dituangkan dalam RPJMD telah diantisipasi dan dikelola melalui target capaian, strategi dan arah kebijakan yang jelas dan terukur. Pada sisi Roadmap tematik diarahkan melalui strategi (1) meningkatkan Kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY yang inklusif dan berkeadilan, (2) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan (3) internalisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada ketahanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Penanggulangan kemiskinan selain meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, perlu penanganan ketimpangan pendapatan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin yang disinergikan dengan pemerintah kab/kota dan desa. Percepatan penanggulangan kemiskinan diharapkan mampu menjadi target bersama sampai tingkat desa, dengan *sharing* target, kewenangan dan sumber daya. Perlu regulasi yang mendukung strategi tersebut yang harus disepakati bersama antara provinsi kabupaten/kota dan desa. Sasaran pengentasan masyarakat miskin dengan *sharing* kewenangan dan sumber daya sampai Tematik Kemiskinan

2. Penurunan Ketimpangan Wilayah
Tingkat kesenjangan ekonomi antarwilayah DIY tahun 2012-2016 dilihat dari Tipologi Klassen menunjukkan bahwa kesenjangan antarwilayah di DIY

masih besar terlihat dari masuknya Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sebagai daerah maju dan cepat tumbuh, sementara Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah tertinggal, dan Kabupaten Bantul sebagai daerah berkembang cepat. Ini diperkuat dengan hasil persebaran kabupaten/kota di DIY menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2012 hingga 2015 yang menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul masuk kategori *low growth - pro poor* (kuadran II), Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman masuk kategori *high growth - less pro poor* (kuadran IV), sementara Kabupaten Kulon Progo masuk kategori *low growth - less pro poor* (kuadran I). Rekomendasi solusi terkait dengan penurunan ketimpangan ialah sebagai berikut:

- a. Memperluas sektor penggerak pertumbuhan dan area pembangunan mengarah ke wilayah yang relatif tertinggal, prioritas utamanya Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul;
- b. Membuat kebijakan yang mendorong laju pertumbuhan kesempatan kerja, terutama di sektor-sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa keuangan, real estate, dan jasa perusahaan,
- c. Meningkatkan kebutuhan investasi di kabupaten/kota secara proporsional dengan memperhitungkan potensi yang dimiliki tiap daerah,

Tematik ketimpangan antar wilayah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD telah diantisipasi dan dikelola melalui target capaian, strategi dan arah kebijakan yang jelas dan terukur. Pada sisi Roadmap tematik diarahkan melalui strategi (1) penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru; (2) meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

Strategi RPJMD pertama yaitu meningkatkan penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru dan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan didukung dengan alternatif strategi ditahun pertama yaitu mengoptimalkan kinerja sektor Dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan dan ekonomi kreatif; alternatif strategi ditahun kedua yaitu mengembangkan ekonomi wilayah berbasis potensi unggulan daerah; alternatif strategi tahun ketiga (2020) yaitu: mengembangkan industri unggulan daerah skala kecil, menengah dan besar; Alternatif strategi tahun keempat yaitu memperluas kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan proporsi angkatan kerja dan lulusan

pendidikan tinggi; dan alternatif strategi kelima yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dan pengelolaan fasilitas kebudayaan.

3. Dukungan Pembangunan Yogyakarta International Airport (Bandar Udara Internasional Yogyakarta)

Sehubungan dengan visi 2025 D.I Yogyakarta untuk mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara maka diperlukan dukungan infrastruktur berupa sistem dan jaringan transportasi yang salah satunya dengan pembangunan kawasan bandar udara baru yang terintegrasi dengan angkutan bus dan kereta api. Oleh karena itu, berdasarkan SK Gubernur DIY No.163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan, pembangunan dan pengembangan kawasan bandara baru Kulon Progo masuk dalam daftar kegiatan prioritas sekaligus masuk dalam program prioritas infrastruktur. Pembangunan bandara Yogyakarta International Airport merupakan salah satu landasan pembangunan ekonomi yang memiliki ekspektasi yang cukup besar karena akan memberikan *multiplier effect* peningkatan skala aktivitas berbagai bidang ekonomi. Salah satu faktor mendukung terwujudnya pembangunan NYIA adalah pengembangan investasi baik investasi swasta, investasi pemerintah maupun kerjasama kedua pihak.(Analisis PDRB 2012-2016).

Tematik Dukungan Pembangunan Yogyakarta Internasional Airport sebagaimana dituangkan dalam RPJMD telah diantisipasi dan dikelola melalui target capaian, strategi dan arah kebijakan yang jelas dan terukur. Pada sisi Roadmap tematik diarahkan melalui strategi (1) penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru; (2) meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

Strategi RPJMD pertama yaitu meningkatkan penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru dan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan didukung dengan alternatif strategi di tahun pertama dan kedua yaitu Mempercepat kesiapan wilayah untuk mengambil manfaat dan mengantisipasi dampak negatif YIA melalui penataan ruang, penyediaan infrastruktur dasar yang berketahanan dan berkelanjutan khususnya pada kawasan yang belum maju, maju tertekan, dan potensi cepat tumbuh, membantu persiapan masyarakat dan swasta untuk dapat mengambil peluang; alternatif strategi tahun ketiga (2020) yaitu: Mendorong kemudahan investasi, termasuk menyediakan infrastruktur pendukung, pengembangan destinasi wisata skala nasional dan internasional, serta pembangunan fasilitas yang menguntungkan seperti Rumah Sakit (RS); Alternatif strategi tahun keempat yaitu Menyediakan Fasilitas transportasi dan kelengkapan infrastruktur

pendukung penajfatan mobilitas menuju dan dari Bandara Yogyakarta International Airport; dan alternatif strategi kelima yaitu Pengendalian tata ruang yang menjamin kualitas pertumbuhan yang berkedilan dan berkelanjutan

4. Pembiayaan Pembangunan.

Pembiayaan dalam arti sempit memberikan implikasi bahwa pemerintah melakukan usaha untuk menutup defisit anggaran untuk membiayai pembangunan dari sumber utang dan non-utang. Sedangkan menutup defisit pada pembiayaan dalam arti luas implikasi bahwa pemerintah menyadari pembiayaan pembangunan tidak cukup hanya dari APBN/D saja, juga harus melibatkan aktor lain di luar pemerintah bahkan asing. Tematik Pembiayaan Pembangunan sebagaimana dituangkan dalam RPJMD telah diantisipasi dan dikelola melalui target capaian, strategi dan arah kebijakan yang jelas dan terukur. Pada sisi Roadmap tematik diarahkan melalui strategi mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta

Strategi RPJMD yaitu Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta didukung dengan alternatif strategi ditahun pertama, kedua dan ketiga (2020) yaitu Mencari alternatif pembiayaan pembangunan pemerintah dan non-pemerintah; alternatif strategi tahun keempat: Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah; dan Alternatif strategi tahun kelima yaitu Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta

Implementasi pendekatan tematik pada tahun 2020 disusun dengan memenuhi kriteria:

1. Berpedoman pada sasaran Pemda, sasaran perangkat daerah, program perangkat daerah yang tertuang dalam RPJMD DIY.
2. Fokus pendekatan tematik sampai dengan level output kegiatan, sehingga memungkinkan 1 kegiatan perangkat daerah dapat menunjang lebih dari 1 output tematik.
3. Fokus pendekatan tematik disosialisasikan dan dilakukan penyelarasan kewilayahan kepada Kabupaten/ Kota melalui Forum Kewilayahan dan Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah (Trilateral Sektoral-Kewilayahan) dalam rangkaian Musrenbang RKPD DIY 2020. Penyelarasan tersebut dalam rangka mensinergikan kegiatan tematik Pemda DIY dengan kegiatan yang dilaksanakan Program Kabupaten/ Kota sebagai upaya kolektif mencapai tujuan-sasaran strategis bersama sesuai kewenangan masing-masing.

4.5 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pokok-Pokok Pikiran DPRD) untuk RKPD DIY Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mana,

- a. Penyusunan Dokumen Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD (pasal 153, huruf k).
- b. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses Proses penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY Tahun 2020 ini dilaksanakan dengan proses awal berupa pengumpulan dokumen hasil aspirasi masyarakat baik dalam bentuk laporan reses, audiensi, tamu, dan berbagai aspirasi lainnya, serta telaah terhadap APBD DIY tahun anggaran sebelumnya (pasal 178, ayat (1, 3)). Tahapan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY Tahun 2020 ini dipungkasi dengan proses finalisasi/harmonisasi melalui forum ekspose yang bersifat terbuka, dimana hasil telaahan dirumuskan dalam daftar dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD (pasal 178, ayat (4)) berupa Keputusan DPRD DIY Nomor 90/K/ DPRD/ 2018 tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
- c. Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan (pasal 178, ayat (5)). Pada proses penjadwalannya, Pokok-Pokok Pikiran DPRD diserahkan kepada Gubernur melalui Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 14 Desember 2018 setelah disepakati dalam pembahasan rapat Badan Anggaran DPRD DIY. Penyampaian secara tepat waktu dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY Tahun 2020 ini dimaksudkan agar aspirasi publik yang termuat di dalamnya dapat terintegrasi dengan dokumen-dokumen turunannya seperti RKPD, KUA dan PPAS, RKA, dan RAPBD.
- d. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran (pasal 178, ayat (2)).

- e. Pokok-pokok pikiran DPRD dimasukkan kedalam e-planning bagi Daerah yang telah memiliki SIPD ((pasal 178, ayat (6)). DPRD DIY telah menindaklanjuti Keputusan DPRD DIY Nomor 90/K/ DPRD/ 2018 dan Surat Gubernur DIY nomor 050/ 0443 tanggal 15 Januari 2019 dengan melakukan input pokok-pokok pikiran DPRD mulai 16 – 31 Januari 2019 melalui aplikasi e-planning Jogjaplan (<http://jogjaplan.com>), dimana setiap Pimpinan DPRD dan anggota DPRD DIY pada seluruh fraksi memiliki hak akses yang sama (berupa hak user-password, manual tata cara entri dan pendampingan teknis).

4.5.1 Maksud dan Tujuan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Sesuai Keputusan DPRD DIY Nomor 90/K/ DPRD/ 2018, Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY Tahun 2020 ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pengawasan dalam pencapaian visi pembangunan jangka panjang di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengedepankan aspirasi masyarakat untuk diakomodir dalam proses serta kebijakan perencanaan pembangunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY Tahun 2020 meliputi:

1. Memberikan bahan, arahan, sekaligus masukan kepada Pemerintah Daerah DIY dalam menyusun dokumen awal draf RKPD Tahun 2020.
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA dan PPAS, RKA SKPD dan RAPBD Tahun Anggaran 2020.
3. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi DIY melalui perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran Tahun 2020.
4. Mengarahkan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD DIY.
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD DIY sebagai representasi masyarakat DIY.

Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat di DIY secara komprehensif.

4.5.2 Permasalahan Pembangunan DIY dari Sudut Pandang DPRD

Menginjak tahun ketiga untuk mewujudkan Visi Gubernur DIY Tahun 2017-2022 yaitu “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”, pada tahun 2020 masih mengangkat tiga issue strategis yang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah DIY yaitu Ketimpangan Wilayah, Kemiskinan, serta Sumber dan Alokasi Dana Pembangunan. Ketiga issue tersebut secara tematik dituangkan dalam empat bidang permasalahan sebagai berikut:

4.5.2.1 Bidang Pemerintahan

Kebijakan Pemerintah Daerah DIY dalam mendorong good governance dinilai masih belum baik. Prinsip transformasi kebijakan publik, khususnya dalam aksesibilitas stakeholders, pemerhati kebijakan, maupun masyarakat masih perlu diperbaiki. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat kemajuan pengelolaan kebijakan publik perlu dilakukan dengan prinsip sharing informasi, sharing data, dan sharing kebijakan. Kemajuan teknologi informasi diyakini mampu mendorong perbaikan tata pemerintahan dimaksud.

Pemberdayaan aparatur pemerintah menjadi penting diperhatikan dengan tujuan aparatur mampu mengimplementasikan kebijakan publik dan tepat sasaran. Kendala sumberdaya aparatur harus segera diatasi dengan cara investasi pendidikan, pelatihan, maupun investasi perangkat informasi dalam bentuk program dan kegiatan yang mendukung kecepatan layanan publik dan partisipasi publik dalam kebijakan daerah.

Tahun 2020 merupakan tahun pasca pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Pemerintah Daerah DIY diharapkan mampu meminimalisir konflik atau pasca konflik yang terjadi, khususnya konflik horisontal yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Daerah DIY tentu mempunyai pengalaman dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

Dalam menyelesaikan persoalan utama DIY yaitu terkait angka kemiskinan yang tinggi, kesenjangan pendapatan masyarakat, hingga kesenjangan infrastruktur wilayah, masyarakat berharap Pemerintah Daerah DIY segera menyusun program-program untuk mengatasi persoalan tersebut. Masyarakat mengharapkan program-program Keistimewaan Yogyakarta mampu menjadi bagian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja proses tersebut penting diperhatikan agar Keistimewaan Yogyakarta mampu maksimal dalam perannya mensejahterakan masyarakat yang menjadi salah satu tujuan Keistimewaan Yogyakarta.

4.5.2.2 Bidang Ekonomi

Menurut data statistik, angka kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah penduduk miskin DIY mencapai 488,5 ribu orang pada 2017. Angka tersebut mengalami penurunan sejumlah 6,4 ribu orang dari tahun sebelumnya yang sebanyak 494,9 ribu orang. Tingkat kemiskinan DIY mengalami penurunan sejak 2012, yaitu 16,05% menjadi 13,02% Tahun 2017. Namun angka tersebut masih berada di atas tingkat kemiskinan nasional. Sebaran penduduk miskin paling banyak di kawasan pedesaan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah DIY perlu mendorong sektor-sektor ekonomi untuk bisa tumbuh dan berkembang di kawasan pedesaan.

Di sektor pertanian, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup, persoalan berkurangnya lahan produktif tiap tahun menjadi ancaman tersendiri bagi program pertanian dan ketahanan pangan. Daya dukung lingkungan yang rendah dan bencana alam lokal menjadikan masyarakat sulit untuk mengembangkan usaha-usaha sektor pertanian produktif. Masyarakat DIY banyak melakukan inovasi pertanian dan peternakan secara mandiri, akan tetapi program-program yang dilakukan belum bisa dilakukan secara massif.

Sektor pariwisata yang menjadi andalan DIY tumbuh subur. Target jumlah wisatawan yang masuk ke DIY perlu dikoreksi karena pertumbuhan wisatawan yang cepat. Pemerintah daerah perlu mendorong gerakan inovasi wisata desa ataupun wisata yang memanfaatkan sumberdaya alam seperti wisata hutan untuk mendongkrak pendapatan masyarakat pedesaan atau masyarakat sekitar hutan. Mendorong hutan dan sumberdaya alam lainnya untuk mendapatkan hasil dari jasa nonhutan sangat penting, bahkan pendapatan masyarakat sekitar hutan lebih tinggi dari sektor jasa wisata dibanding dengan hasil hutan itu sendiri.

Sektor ekonomi lain yang dikeluhkan adalah minimnya angka upah buruh di Yogyakarta dan investasi sektor formal. Minimnya upah buruh (UMR/UMK) mempengaruhi tingkat pendapatan buruh. Perlu perhatian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor perburuhan. Di sisi lain, Pemerintah Daerah juga harus mengatasi tingkat pengangguran terbuka yang tinggi di DIY. Pemerintah Daerah perlu membangun kawasan-kawasan ekonomi di luar wilayah kota dan perbatasan kota.

4.5.2.3 Bidang Pembangunan

Kesenjangan ekonomi masyarakat pedesaan lebih tinggi dikarenakan ketidakmerataan pembangunan infrastruktur antara kota dan desa. Pembangunan infrastruktur pedesaan perlu segera dilakukan untuk membuka

aksesibilitas ekonomi masyarakat desa. Kesenjangan pembangunan menjadi persoalan utama dengan tujuan membuka jalur-jalur ekonomi masyarakat desa untuk segera bangkit dan berbenah.

Dalam program perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan kawasan-kawasan pedesaan, khususnya kawasan yang berbatasan dengan propinsi Jawa Tengah. Kondisi masyarakat perbatasan yang minim pembangunan infrastruktur mestinya mendapat perhatian lebih dengan tujuan untuk memudahkan aksesibilitas ekonomi untuk perkembangannya. Selama ini fasilitas jalan khususnya jalan desa banyak yang sudah rusak dan butuh perhatian.

Upaya penanggulangan kemiskinan baik melalui jalur pembangunan sektoral, regional, maupun yang khusus masing-masing mengandung lima pokok perhatian, yaitu pengembangan kualitas manusianya, pengembangan sumberdaya sosial ekonomi, pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan sosial ekonomi, penguatan kelembagaan pembangunan, dan penguatan dukungan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Program pembangunan yang memberikan penekanan pada pendekatan pemberdayaan masyarakat memiliki dimensi (ruang masalah) dan matranya (cakupan kewilayahan) sendiri, antara lain mencakup:

1. Program penanggulangan kemiskinan. Dimensinya adalah masalah pengurangan penduduk miskin kronis, dan matranya adalah kawasan/daerah seperti daerah kumuh perkotaan, daerah pantai, daerah pedalaman, dan desa tertinggal; dan
2. Program jaring pengaman sosial. Dimensinya adalah masalah pengurangan penduduk miskin akibat krisis atau penduduk dengan kemiskinan yang parah, dan matranya adalah kawasan/wilayah daerah seperti daerah kumuh perkotaan, daerah pantai, daerah pedalaman, dan desa tertinggal.

4.5.2.4 Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pelayanan publik di DIY cukup baik, khususnya layanan kesehatan dan pendidikan yang menjadi persoalan utama dan dibutuhkan oleh masyarakat. Di bidang kesehatan ada kesenjangan jumlah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, khususnya di wilayah pedesaan. Jumlah rumah sakit ataupun puskesmas perlu ditambah di kawasan pedesaan dengan tujuan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Selama ini, aksesibilitas dan kecepatan layanan kesehatan masih di dominasi oleh kawasan perkotaan atau

pinggiran kota. Masyarakat pedesaan membutuhkan kecepatan layanan dari rumah sakit yang mampu melayani dengan cepat.

Bidang pendidikan di DIY mempunyai prestasi baik di tingkat nasional, dimana jumlah rata-rata sekolah, tinggi capaiannya. Akan tetapi, jumlah anak sekolah yang mampu melanjutkan hingga perguruan tinggi perlu di tambah karena makin turun dari tahun ke tahun. Pemerintah Daerah perlu membangun skema-skema beasiswa atau dalam bentuk kerjasama lain untuk memfasilitasi anak-anak yang mau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

Fasilitas pendidikan juga menjadi perhatian. Banyak fasilitas pendidikan khususnya di pedesaan perlu diperbaiki atau ditambah. Perhatian Pemerintah Daerah terhadap Guru Tidak Tetap (GTT) menjadi penting untuk memperbaiki kualitas pendidikan di DIY. Honor GTT perlu diperhatikan.

Kasus nikah muda perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah. Meningkatnya jumlah penduduk dengan usia nikah muda bisa menjadi faktor ledakan penduduk dalam beberapa tahun ke depan. Di sisi lain, Pemerintah Daerah perlu menggalakkan program KB untuk menekan pertumbuhan jumlah penduduk.

Angka pengangguran terbuka dan setengah terbuka banyak menyumbang angka kemiskinan di DIY. Pemerintah Daerah perlu membangun skema program penanggulangan kemiskinan untuk mencegah naiknya angka kemiskinan per tahun khususnya dengan mengatasi sektor pengangguran terbuka. Jumlah angkatan kerja baru yang semakin meningkat menjadi persolan tersendiri.

Pengembangan Pemerintah Daerah dalam program Keistimewaan Yogyakarta juga mendapatkan sejumlah kritik, dimana fokus perhatian Pemerintah Daerah DIY masih pada tahap infrastruktur budaya. Salah satu sumbangan Keistimewaan Yogyakarta selain kebudayaan adalah kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah perlu mengupayakan atau mensinkronkan antara program-program kebudayaan dalam Keistimewaan Yogyakarta dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja memusatkan perkembangan kebudayaan di kawasan pedesaan menjadi penting dalam konteks meningkatkan kesejahteraan dibandingkan dengan budaya dalam konteks seni atau hiburan rakyat.

4.5.3 Rekomendasi dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY

Berangkat dari permasalahan pembangunan di DIY dari Sudut Pandang DPRD disampaikan Rekomendasi dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY dalam ringkasan sebagai berikut:

Tabel 4-17 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

NO	IDENTIFIKAASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	BIDANG
1	Lemahnya sumberdaya aparatur Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan publik	Pelatihan ASN, khususnya penggunaan teknologi informasi untuk memperkuat tata pemerintahan dan layanan publik	Urusan Pelayanan Publik
2	Kurangnya pemanfaatan program-program (software) dalam aplikasi layanan publik, khususnya program terpadu dalam konsep big data dan one map	Pengadaan program (<i>software</i>) untuk tata kelola pemerintahan dan layanan publik berbasis IT, online, dan terbuka untuk publik. Penguatan layanan publik terpadu berbasis big data dan one map	Urusan Pelayanan Publik
3	Minimnya partisipasi publik dalam keterlibatan aplikasi program-program untuk kebijakan, layanan publik, dan lainnya	Membuka aksesibilitas public untuk terlibat aktif dalam pengembangan software dan program layanan public untuk perbaikan tata kelola Pemerintah Daerah	Urusan Pelayanan Publik
4	Adanya potensi konflik horizontal dalam masyarakat pasca pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019	Penelitian potensi konflik di masyarakat saat pemilihan presiden dan pemilu legislative 2019 Pengidentifikasian potensi konflik dan menemukan solusi penyelesaian agar tidak berkembang menjadi konflik nasional pasca pemilihan presiden dan pemilu legislative 2019 Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi penanganan konflik sosial serta fasilitasi tim terpadu penanganan konflik tingkat Provinsi pasca pemilihan presiden dan pemilu legislative 2019 Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (ormas) pasca pemilihan presiden dan pemilu legislatif 2019. Antisipasi penanganan konflik pasca pemilihan presiden dan pemilu legislatif 2019 Penanganan konflik sosial meliputi pencegahan, penghentian dan pemulihan konflik pasca pemilihan presiden 2019	Urusan Ketertiban, Ketentraman umum, dan Perlindungan Masyarakat
5	Banyaknya kasus alih fungsi lahan dari status konservasi dan lahan produktif pertanian menjadi peruntukan lainnya	Perlindungan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan pertanian produktif dari kerusakan lingkungan, khususnya perubahan peruntukan kawasan Menambah jumlah area kawasan untuk perlindungan tata kelola lingkungan yang lestari dan berkelanjutan	Urusan Pertanian

NO	IDENTIFIKAASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	BIDANG
	Makin terbatasnya lahan konservasi dibandingkan tekanan penduduk terhadap lahan konservasi	Penambahan area konservasi di DIY Penetapan kawasan baru area konservasi	Urusan Pertanahan
6	Belum maksimalnya pengintegrasian data base kependudukan untuk kepentingan kebijakan publik satu data	Membangun database kependudukan yang terintegrasi dari desa ke propvinsi Mensinkronkan kepentingan database penduduk untuk kepentingan lainnya	Urusan Administrasi Kependuduka n dan Catatan Sipil
7	Belum Terintegrasikan sistem informasi desa, khususnya bidang pemerintahan, administrasi, kependudukan, dan asset desa	Membangun database pemerintah desa yang memberikan informasi tentang pemerintahan, kependudukan, administrasi desa dan asset desa Membangun sistem database desa (SID) yang terintegrasi dari tingkat desa – kota/ kabupaten dan pemerintah daerah DIY	Urusan Pemberdayan Masyarakat Desa
8	Program data base Pemerintah Daerah mengenai informasi kebijakan publik dan program pemerintah masih belum terbuka bagi stakeholders	Pengadaan data base yang terintegrasi untuk pengembangan data base partisipatif yang melibatkan publik Memperkuat data base layanan publik yang efektif dan efisien untuk pengembangan layanan publik	Urusan Komunikasi dan Informatika
9	Adanya konflik yang muncul di masyarakat karena banyaknya kasus-kasus hoax, khususya pasca pemilihan presiden dan pemilu legislatif 2019	Pemberdayaan ASN dalam bidang persandian, khususnya penanganan kasus-kasus pasca pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019 yang melibatkan Informasi Teknologi Penanganan masalah pasca pemilihan presiden dan pemilu legislatif 2019, khususnya isu hoax yang memecah belah masyarakat	Urusan Persandian
10	Belum banyaknya perpustakaan digital yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, khususnya untuk sumber pengetahuan masyarakat	Pengadaan program dan kegiatan perpustakaan digital dan sosialisasinya kepada masyarakat Perpustakaan digital Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk sumber pengetahuan masyarakat	Urusan Perpustakaan
11	Belum adanya sistem kearsipan daerah yang diterapkan dalam bentuk program digital	Pembangunan software kearsipan daerah Digitalisasi kearsipan daerah	Urusan Kearsipan
12	Masih adanya kasus kasus yang muncul atas hasil pemeriksaan BPK	Peningkatan kapasitas ASN dalam menangani kasus-kasus otonomi daerah	Urusan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi

RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKAASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	BIDANG
	Adanya keteringgalan pembangunan antar wilaya, khususnya desa – kota	Memperkuat pemerintahan daerah dan desa untuk terus mendorong kebijakan pemerataan pembangunan wilayah	Urusan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi
		Membangun sistem data base kelurahan/desa yang terintegrasi dan terpadu.	Urusan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi
13	DIY sebagai daerah bencana belum mempunyai program penanggulangan bencana dalam bentuk software, geospasial, dan bisa melibatkan partisipasi masyarakat luas, khususnya stakeholders bencana	Pengadaan program dan kegiatan sistem kebencanaan daerah dalam bentuk geospasial dan aksesibel terhadap partisipasi public	Urusan Penanganan Bencana
	Banyak desa masih belum menjadi desa siaga bencana	Menambah program desa siaga bencana	Urusan Penanganan Bencana
	Masih dibutuhkan kelompok-kelompok relawan kebencanaan	Memperkuat relawan bencana dengan mengadakan training atau pelatihan kebencanaan untuk para relawa	Urusan Penanganan Bencana
14	Belum terbukanya mekanisme dan proses perencanaan program-program Keistimewaan Yogyakarta	Membangun kebijakan baru untuk perencanaan partisipatif dalam program- program Keistimewaan Yogyakarta	Urusan Keistimewaan Yogyakarta
	Program-program Keistimewaan Yogyakarta masih terfokus pada pembangunan infrastruktur kebudayaan	Membangun perencanaan program kesejahteraan masyarakat dalam Keistimewaan Yogyakarta	Urusan Keistimewaan Yogyakarta
15	Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian belum berjalan efektif	Memberikan insentif pada pemilik lahan (bibit tanaman, modal usaha)	Urusan Pertanian
		Melakukan tindakan- tindakan hukum untuk perlindungan tanah pertanian produktif	Urusan Pertanian
	Produksi pertanian meningkat, petani belum sejahtera	Memberikan subsidi untuk pengadaan bibit, pupuk, dan alsintan	Urusan Pertanian

NO	IDENTIFIKAASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	BIDANG
		Meningkatkan jiwa kewirausahaan petani dalam merespon permintaan dan peluang pasa	Urusan Pertanian
	Banyak komoditas penting belum bisa dicukupi sendiri oleh DIY	Memfasilitasi pengadaan sentra-sentra pengembangan komoditas pendukung industry pangan khas DIY (nangka, singkong, kacang hijau, kedelai, dll)	Urusan Pertanian
	Peningkatan populasi sejumlah ternak masih rendah	Memberikan bantuan bibit ternak kepada rumah tangga miskin	Urusan Pertanian
		Membuat sentra-sentra budidaya pakan ternak dengan penerapan inovasi teknologi dan sistem industri peternakan pedesaan	Urusan Pertanian
16	Pola konsumsi rumah tangga masih kurang beragam, masih tergantung pada beras dan/atau terigu	Masyarakat, terutama keluarga miskin, difasilitasi untuk dapat menghasilkan sendiri bahan pangan non beras dan/atau terigu, atau sumber pangan alternatif lainnya	Urusan Kesehatan Pangan
	Di DIY masih ada Desa Rawan Pangan	Meningkatkan pengadaan bahan pangan dan memperlancar distribusi pangan sampai ke seluruh rumah tangga	Urusan Kesehatan Pangan
	Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mengkonsumsi dan memproduksi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) masih rendah	Perlu secara terus menerus dilakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, dengan melibatkan lembaga-lembaga lain yang memiliki akses langsung ke masyarakat	Urusan Kesehatan Pangan
		Tingkatkan pengawasan terhadap peredaran pangan yang tidak aman dan membahayakan kesehatan terutama di lingkungan pendidikan anak	Urusan Kesehatan Pangan
17	Pengembangan perikanan budidaya belum dilakukan secara optimal	Untuk meningkatkan produksi ikan budidaya, maka harus diperluas arealnya. Potensi sawah, tambak, jaring apung, dan tenaga harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai tempat pembudidayaan ikan	Urusan Kelautan dan Perikanan
		Sungai-sungai di DIY bisa dimanfaatkan untuk sumber budidaya ikan, baik dalam bentuk keramba ataupun pelepasan benih ikan	Urusan Kelautan dan Perikanan
		Lahan tambak udang puluhan hektar yang tergusur oleh area bandara di Kulon Progo harus segera dicarikan alternatif tempat yang lebih luas dan strategis	Urusan Kelautan dan Perikanan
	Kemampuan SDM nelayan DIY masih kurang	Melatih dan memberikan kesempatan magang kepada generasi muda yang berminat bekerja di sektor pertanian	Urusan Kelautan dan Perikanan
	Banyak masyarakat yang belum mengerti manfaat ikan untuk pemenuhan gizi	Sosialisasi Gemar Makan Ikan harus terus digalakkan di tengah-tengah masyarakat. Jalur pendidikan harus dapat dimanfaatkan dengan baik, dengan jalan sosialisasi kepada para siswa di sekolah-sekolah. Bagi sekolah yang memiliki halaman yang cukup, dapat juga dimanfaatkan untuk pembuatan kolam ikan.	Urusan Kelautan dan Perikanan

RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKAASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	BIDANG
	Pemanfaatan sungai-sungai di DIY untuk budidaya ikan masih kurang	Penjagaan kelestarian sungai sungai di DIY untuk budidaya ikan	Urusan Kelautan dan Perikanan
		Pelepasan bibit ikan di sungai-sungai DIY untuk kelestarian dan sumber pangan lokal alternatif	Urusan Kelautan dan Perikanan
18	Produksi minyak kayu putih belum optimal	Untuk menjaga peran produk minyak kayu putih sebagai penyumbang PAD yang signifikan, maka harus terus dilakukan pengkayaan tegakan/populasi dan perluasan areal tanaman kayu putih produktif	Urusaan Kehutanan
	Pengelolaan hutan negara belum dilakukan secara optimal	Selain pinus, jati, dan kayu putih yang saat ini mendominasi populasi hutan negara, Pemerinta Daerah DIY perlu mempertimbangkan untuk menanam komoditas tanaman hutan lainnya, yang cepat tumbuh danberproduksi, dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan keseimbangan lingkungan	Urusaan Kehutanan
	Masyarakat sekitar hutan masih banyakyang belum sejahtera	Masyarakat sekitar hutan yang masih berpendapatan rendah, diberi akses untuk memanfaatkan hutan guna memperbaiki taraf hidup mereka. Mereka diperbolehkan untuk bercocok tanam dengan tetap menjaga kelestarian hutan, sekaligus	Urusan Kehutanan
	Membangun Inovasi pengelolaan hutan	Pengembangan hutan untuk wisata menjadi trend dan mampu secara nyata menyumbang langsung pendapatan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Pemerintah Daerah DIY perlu mengkaji ulang pemanfaatan hutan untuk eko wisata. Selain tidak merusak lahan hutan, konversi pengelolaan menjadi eko wisata mempunya prospek yang cerah untuk pendapatan ekonomi masyarakat.	Urusan Kehutanan
19	Lemahnya pengelolaan koperasi	Peningkatan kapasitas dan pengetahuan bagi pengelola koperasi	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Fasilitasi pengembangan koperasi untuk meningkatkan kemampuannya	
	Kurangnya pemasaran bagi usaha kecil menengah	Pemerinta Daerah DIY perlu membangun star-up untuk pemasaran koperasi, usaha kecil dan menengah	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Mendorong Kreativitas pemasaran melalui ekonomi kreatif	Melakukan pelatihan bagi pelaku koperasi, usaha kecil menengah untuk bisa optimal dalam bisnis melalui ekonomi kreatif seperti bisnis online, baik penguasaan software maupun hardware	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20	Kurangnya investasi di wilayah pedesaan	Membangun kebijakan baru untuk investasi di kawasan pedesaan, khususnya untuk optimalisasi mengatasi pengangguran terbuka	Urusan Penanaman Modal

NO	IDENTIFIKAASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	BIDANG
	Kurangya peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan ekonomi	Masyarakat perlu difasilitasi untuk bisa terlibat dalam kesertaan bisnis di area pusat pertumbuhan dengan prinsip terlibat kegiatan ekonomi tersebut atau multiplier effect, khususnya melalui kegiatan CSR	Urusan Penanaman Modal
	Minimnya inisiatif investasi di kawasan daerah miskin investasi	Membangun kebijakan baru tentang investasi dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam kebijakan investasi bagi kawasan pedesaan	Urusan Penanaman Modal
21	Masih minimnya pengetahuan pengelola obyek wisata	Pemerintah daerah membangun program pemberdayaan pelaku wisata, khususnya para pelaku wisata yang sedang tumbuh berkembang	Urusan Pariwisata
	Kurangya inisiatif Pengembangan pariwisata yang terintegrasi dalam teknologi informasi	Pemerintah daerah memfasilitasi sistem informasi wisata yang aksesible terhadap partisipasi pelaku wisata. Sistem informasi sebisa mungkin dapat meningkatkan pelaku wisata dalam pengelolaannya.	Urusan Pariwisata
	Infrastruktur pendukung obyek wisata masih belum maksimal	Pemerinta Daerah DIY perlu membangun infrastruktur wisata daerah yang sedang berkembang, terutama aksesibilitas jalan menuju obyek wisata	Urusan Pariwisata
	Minimnya modal dan investasi pengembangan wisata	Pemerintah Daerah DIY perlu menjembatani dan membuka ruang investasi untuk kepentingan pengembangan wisata lokal. Sifat investasi harus ramah dengan masyarakat pelaku wisata dan masyarakat sekitar obyek wisata.	Urusan Pariwisata
22	Masih kurangya ruang ekonomi pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal	Pemerintah Daerah perlu memperbaiki infrastruktur pasar tradisional untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal	Urusan Perdagangan
	Minimnya pengetahuan, keterampilan pedagang pasar tradisional	Pemerintah Daerah DIY perlu memberikan tambahan keterampilan pelaku pasar tradisional	Urusan Perdagangan
	Minimnya kekuatan pasar tradisional melawan pasar modern	Pemerintah Daerah perlu membatasi perijinan pasar modern, dan membangun kebijakan proteksi terhadap pasar tradisional	Urusan Perdagangan
	Minimnya aksesibilitas modal bagi pedagang pasar tradisional	Pemerintah Daerah memfasilitasi permodalan bagi pelaku pasar tradisional	Urusan Perdagangan
23	Masih kurangya pengembangan terhadap produk-produk IKM	Pemerintah Daerah perlu bekerjasama dengan pihak Universitas untuk melakukan penelitian dan pengembangan produk-produk lokal yang berkualitas	Urusan Perindustrian
	Lemahnya daya saing IKM	Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu memberikan proteksi dan subsidi kepada para pelaku IKM	Urusan Perindustrian
	Kurangya strategi pemasaran	Pemerintah daerah memfasilitasi dan membangun sitem pemasaran bagi pelaku IKM, khususya jaringan pasar online	Urusan Perindustrian
24	Adanya Ketidakseimbangan aksesibilitas wilayah-wilayah perbatasan terutama perbatasan antara DIY Dengan Jawa Tengah di Kabupaten Gunungkidul Dengan	Upaya untuk Peningkatan jalan dan Jembatan serta Rehabilitasi maupun pemeliharaan jalan dan jembatan merupakan hal yang prioritas untuk memberikan akses yang seluas luasnya pada masyarakat sehingga berakibat dapat meningkatkan segi sosial ekonomi. Terutama terfokus pada peningkatan jalan dan jembatan pedesaan.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKAASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	BIDANG
	kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten serta Kabupaten Sukoharjo yang pada umumnya kondisi jalan dalam keadaan rusak sedang sampai berat, oleh sebab itu perlu perhatian khusus akan kondisi tersebut walaupun status jalan kebanyakan merupakan jalan kabupaten.		
	Aksesibilitas penduduk terhadap ketersediaan air minum yang cukup dirasa masih jauh dari mencukupi. Fakta menunjukkan bahwa banyak daerah daerah yang masih saja mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan air bersih sebagai sarana kehidupan dasar	Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana sesuai dengan SPM, antara lain melalui peningkatan aksesibilitas jangkauan pelayanan sarana dan prasarana di daerah terpencil, pedalaman, perbatasan.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	a. Belum sepenuhnya masyarakat perkotaan maupun pelosok pedesaan yang katagori miskin mendapatkan akses secara penuh terhadap kebutuhan akan air minum yang layak, karena keterbatasan kesediaan air baku baru untuk mendukung PDAM ataupun SPAMDES.	Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, telaga, embung serta sumberdaya air lainnya, maupun pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya serta upaya untuk pengendalian banjir.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	b. Pengendalian , pengawasan serta penertiban pemanfaatan bagian- bagian jalan provinsi belum secara optimal.		
	Belum terpenuhinya target untuk penambahan secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap produk air baku baru, hal ini terkendala masalah kewenangan.	a. Pengembangan Sistem Pengelolaan air minum Pedesaan (SPAMDES) terutama bagi daerah daerah yang sering dilanda kekeringan.dalm rangka memperluas penyediaan air baku. b. Pengelolaan persampahan serta pengelolaan air limbah, terutama untuk limbah rumah tangga.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Dalam urusan tata ruang belum tersedianya rencana detail tata ruang	Perencanaa tata ruang dalam rangka untuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah RTRW untuk menghindari konversi lahan produktif dalam rangka mencegah gradasi ekosistem dan lain lain.	Urusan Pekerjaan

NO	IDENTIFIKAASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	BIDANG
	(RDTR) serta peraturan Zonasi(PZ) sebagai acuan untuk perijinan serta belum ditetapkan instrumen untuk pengendalian.		Umum dan Penataan Ruang
	a. Banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang harus digunakan sebagai pedoman atau landasan yuridis, jelas akan menimbulkan ketidak seimbangan baik itu lingkungan sosial, ekonomi maupun nilai nilai kultur dan lain lain. Proses alih fungsi lahan untuk kepentingan hunian atau industri yang terjadi secara massif perlu segera di hentikan kalau tidak ingin terjadi gradasi terhadap kualitas lingkungan.	Pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui anggaran pemerintah daerah diarahkan untuk mendukung langkah- langkah stimulasi terhadap perekonomian dari sisi fiskal (pro-growth), memperluas penciptaan lapangan kerja produktif (pro-job), dan mengentaskan kemiskinan (pro-poor).	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	b. Konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agro ekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin n terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agro ekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin terkikisnya lahan pertanian		Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
25	Minimnya sosialisasi rencana penyusunan RKPD kepada masyarakat, sehingga masyarakat	Masyarakat dilibatkan dalam Musrenbang mulai dari tingkat Desa	Urusan Perencanaan

RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKAASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	BIDANG
	menjadi apatis dan enggan terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan daerah karena usulan masyarakat seringkali tidak bisa direalisasikan akibat terjadinya pemotongan/pemangkasan berbagai usulan yang masuk.		Pembangunan
	Tidak ada koordinasi dan sinkronisasi antara program yang dibiayai dana community development dari perusahaan dengan program yang dibiayai APBD dan terjadi perubahan/tambahan kegiatan yang sebelumnya tidak masuk dalam usulan SKPD.	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan pembangunan ekonomi. b. Perencanaan pembangunan pemerintahan. c. Perencanaan pembangunan daerah. d. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. e. Perencanaan pengembangan wilayah tertinggal. f. Perencanaan pembangunan ekonomi, serta pengembangan kawasan. g. Evaluasi implementasi dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD). 	Urusan Perencanaan Pembangunan
	Sistem perencanaan (E-Planning) belum mengakomodir usulan yang sifatnya politis (dari DPRD).	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan data dan informasi. b. Evaluasi sistem e-planning yang belum terbuka bagi sistem perencanaan dari jalur politis (DPRD) 	Urusan Perencanaan Pembangunan
26	Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten dan kota dengan pemerintah daerah Provinsi dalam penanggulangan dan pengembangan wilayah yang berkenaan dengan kawasan kumuh serta kondisi rumah rumah yang tidak layak huni.	<ul style="list-style-type: none"> a. Ditingkatkan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah kabupaten dan kota serta dengan pemerintah pusat untuk bersama sama dalam perumusan arah kebijakan strategis dan pembuatan kesepakatan-kesepakatan, rencana dan program bersama dalam mengatasi permasalahan perumahan kumuh dan rumah yang tidak layak huni. b. Rehabilitasi perumahan kumuh dan rumah tidak layak huni. c. Ditargetkan tahun 2020 jumlah rumah tidak layak huni di bawah 6%. 	Urusan Perumahan
27	Kemacetan. Faktor-faktor penyebab kemacetan lalu lintas antara lain: tidak seimbangnya luas atau kapasitas jalan dengan jumlah kendaraan bermotor, ledakan penduduk, peningkatan penggunaan kendaraan pribadi, rendahnya kualitas angkutan umum, kurangnya disiplin dari para pengguna jalan serta	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan. b. Pembangunan Bandara Internasional di Kulon Progo. c. Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan. d. Penambahan rute layanan angkutan orang berjalan, khususnya area luar kota yang menghubungkan antarkecamatan dalam skala prioritas. e. Pengembangan sisten transportasi massaal serta penataan transportasi perkotaan. f. Penambahan armada angkutan orang di jalan (bus transportasi). g. Pengembangan transportasi berbasis keistimewaan. h. Penataan, pembinaan, maupun pengendalian angkutan non kendaraan bermotor. 	Urusan Perhubungan

NO	IDENTIFIKAASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	BIDANG
	kurangnya penanganan dari pemerintah.		
	Terjadinya polusi udara akibat asap kendaraan bermotor yang sudah tidak laik jalan, terutama angkutan umum yang tidak melakukan uji emisi secara berkala.	Peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor.	Urusan Perhubungan
	Sering terjadinya kecelakaan bagi pengguna kendaraan bermotor disebabkan kurangnya sarana dan prasarana perhubungan.	a. Peningkatan pelayanan angkutan.	Urusan Perhubungan
		b. Management rekayasa lalu lintas.	
		c. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas.	
		d. Pembangunan lampu penerangan jalan, pagar pengaman jalan serta traffic light pada daerah daerah persimpangan yang padat.	
		e. Pembinaan , pengawasan dan pengendalian transportasi antarkota antarprovinsi maupun antarkota dlam provinsi terkait dengan keselamatan penumpang.	
28	Pembangunan di bidang industri apabila tidak diikuti dengan AMDAL yang bisa dipertanggungjawabkan tentu akan semakin meningkatkan jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia.	a. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.	Urusan Lingkungan Hidup
		b. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam.	
		c. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.	
		d. Pengelolaan ruang terbuka hijau.	
		e. Kaderisasi lingkungan hidup.	
		f. Pengelolaan sampah mandiri.	
		g. Menerapkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan pada pengelolaan sumber daya alam baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperbaharui dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya.	
		h. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap dapat dilakukan dengan cara membudayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi.	
	Kelemahan sistem peraturan perundangan dan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan.	Penegakan hukum secara adil dan konsisten	Urusan Lingkungan Hidup
29	Masih banyak siswa yang tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang menengah (SMU/SMK/Sederajat)	Fasilitasi bagi warga kurang mampu untuk menempuh pendidikan menengah (SMU/SMK/Sederajat)	Urusan Pendidikan
	Angka partisipasi kasar perguruan tinggi masih rendah	Penyediaan beasiswa bagi mahasiswa (warga DIY) kurang mampu dan atau mahasiswa berprestasi	
	Kualitas sekolah menengah (SMU/SMK/Sederajat) masih belum merata	Pemerataan akses dan kualitas antarsekolah dan antardaerah	

RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKAASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	BIDANG
	Lulusan SMK kompetensi maupun jurusannya belum sesuai dengan kebutuhan pasar	Peningkatan kompetensi lulusan SMK	
	Kesejahteraan GTT dan PTT masih tergolong rendah	a. Peningkatan jumlah guru yang layak mengajar sesuai target yakni 98,39% b. Peningkatan kesejahteraan GTT/PTT	
30	Pemuda merupakan Sumberdaya potensial bagi kemajuan daerah dalam berbagai bidang	Fasilitasi bagi pemuda untuk peningkatan akses teknologi informasi	Urusan Pemuda dan Olahraga
	Optimalisasi teknologi informasi untuk kemajuan dalam kegiatan yang produktif	Pelatihan pemuda utamanya desa dan wilayah tertinggal untuk melek teknologi informasi dan menggunakannya bagi kegiatan produktif	
	Penganggur pemuda jumlahnya cukup besar	Pelatihan pemuda untuk kewirausahaan dan kemandirian	
	Wawasan Kebangsaan pemuda menurun	Peningkatan wawasan kebangsaan dan kehidupan berbangsa dalam kebhineka tunggal eka	
	Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa, dalam rangka NKRI	Fasilitasi peningkatan nilai-nilai Pancasila dan NKRI	
31	Masih adanya prevalensi gizi buruk (KEP)	Fasilitasi peningkatan gizi bagi balita	Urusan Kesehatan
	Angka kematian bayi (AKI) masih cukup tinggi	Peningkatan gizi ibu hamil	
	Angka kematian balita masih tinggi	Optimalisasi posyandu	
	Rendahnya budaya hidup sehat	a. Peningkatan cakupan jaminan kesehatan bagi warga DIY menuju total coverage b. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap budaya hidup sehat	
	Tingginya angka penyakit degenerative	a. Pemerataan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan bagi wilayah tertinggal b. Fasilitasi posyandu lansia	
32	Kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi	Pemberdayaan terhadap perempuan korban kekerasan	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Kekerasan terhadap anak juga masih sering terjadi	Peningkatan informasi, edukasi dan konsultasi kepada semua pihak agar menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	
	Pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan tentang perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan jumlah desa prima dan desa/dusun/kawasan ramah anak	

NO	IDENTIFIKAASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	BIDANG
33	Upaya penegakan perda tentang PMKS masih belum sesuai dengan harapan	Penegakan perda tentang penanganan Gepeng dan perda perlindungan anak jalanan	Usulan Urusan Sosial
	Pemberdayaan warga miskin belum sepenuhnya berhasil	Pemberdayaan keluarga miskin menuju keluarga sejahtera	
	Korban penyalahgunaan napza terus bertambah	Pencegahan terhadap napza	
	Fasilitasi penyandang disabilitas masih kurang	Fasilitasi penyandang disabilitas	
34	Jumlah penduduk usia kerja (PUK) penganggur masih cukup tinggi	Peningkatan skill dan kompetensi calon tenaga kerja	Usulan Urusan Tenaga Kerja
	Terbatasnya kemampuan BLK	Fasilitasi bagi calon tenaga kerja untuk mendapatkan kesempatan kerja (bursa tenaga kerja)	
	Masih adanya pelanggaran dalam peraturan tenaga kerja	Fasilitasi perlindungan tenaga kerja untuk melindungi hak-hak pekerja	
	Penciptaan lapangan dalam kewirausahaan kerja masih rendah	Peningkatan kewirausahaan khusus bagi pencari tenaga kerja	
	Peluang industri kreatif (start up)	Pelatihan kewirausahaan industri kreatif	
	Peluang kerja di LN	Fasilitasi naker untuk kerja di LN	
35	Perintah UUK, di Bidang Budaya masih perlu dilanjutkan	Peningkatan sosialisasi UUK dibidang Kebudayaan	Kebudayaan
	Belum ada turunan regulasi terkait tentang Budaya	Menggali Nilai-nilai Orisinilitas Budaya DIY	
	Masih minimnya Pemahaman masyarakat tentang UUK dibidang kebudayaan	Melakukan Penguatan Nilai-nilai Budaya Utama dlm seluruh aspek Kehidupan masyarakat DIY	Kebudayaan
	Kebudayaan masih dipahami dalam terminologi sempit	Peningkatan Fasilitasi perekayasa Budaya	
	Budaya, sebagai "Roh keistimewaan"	Peningkatan fasilitasi Maintenance dan Riset Budaya	
	Melahirkan "Maskot Budaya" Yogyakarta	a. "Perumusan nilai-nilai Budaya", sebagai Roh Keistimewaan. b. Merumuskan identitas Budaya yang khas Yogyakarta	
36	Masih lemahnya Pemahaman regulasi tentang Kependudukan dan KB	Peningkatan Fasilitasi untuk percepatan Implementasi UU No.52 tahun 2009	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Masih rendahnya motivasi dan skill tenaga Lapangan yg terkait Pengendalian Penduduk dan KB	Peningkatan skill dan ketrampilan tenaga lapangan Kependudukan	

RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKAASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	BIDANG
	Masih tingginya angka kelahiran dan Lajunya Pertumbuhan Penduduk	Pengendalian dan penurunan lajunya pertumbuhan Penduduk	
	Masih rendahnya minat Usia subur untuk pemasangan alat Kontrasepsi	Mendorong Penurunan angka kelahiran total (TFR) dan Peningkatan Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	
	Masih minimnya Pemahaman tentang Reproduksi, dikalangan Usia Subur dan remaja	a. Diperlukan langkah-langkah efektif untuk Menurunkan Jumlah Kehamilan yang tidak diinginkan (WUS) . Perlu tindakan konkrit untuk menurunkan jumlah kelahiran pada remaja (ASFR, 15-19 tahun)	
37	Ada Kesenjangan Pemahaman tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Transmigrasi	Diperlukan Re-aktualisasi dan re-konseptualisasi hal-hal terkait dengan Program Transmigrasi	Urusan Transmigrasi
	Calon Peserta Transmigrasi, kebanyakan belum siap utk diterjunkan kelokasi Transmigrasi	Diperlukan Penyiapan dan Pengayaan Calon Peserta Transmigrasi secara Prima	
	Ada keterputusan komunikasi antara masyarakat setempat dengan Pemerintah, selaku stakeholder	Perlu peningkatan sosialisasi secara transparan dan Akuntabel	
	Menurunnya animo masyarakat untuk ikut program transmigrasi, baik secara mandiri atau langsung dikelola Pemerintah	a. Diperlukan langkah-langkah public hearing, dengan masyarakat setempat, sebelum penempatan Calon Transmigran, agar tercipta harmoni antar warga b. Peningkatan motivasi dan stimulan para Calon transmigrasi, agar memiliki kemauan dan tekad untuk bertransmigrasi	
	Selalu terjadi kesenjangan dan kecemburuan sosial antara Penduduk pendatang dan penduduk	Diperlukan langkah-langkah strategis untuk meminimalisir unsur kesenjangan yang muncul antara warga pendatang dan setempat	

4.5.4 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran

Berikut ini disampaikan rekapitulasi awal dari Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran berdasarkan Program RPJMD DIY 2017-2022 sebagai berikut :

Tabel 4-18 Rekapitulasi dari Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Lemahnya sumberdaya aparatur Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan publik	Pelatihan ASN, khususnya penggunaan teknologi informasi untuk memperkuat tata pemerintahan dan layanan publik	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP): AA (> 90,28)	Pendukung Prioritas Pembangunan	Program informasi dan komunikasi publik	Presentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	70%
2	Kurangnya pemanfaatan program-program (software) dalam aplikasi layanan publik, khususnya program terpadu dalam konsep big data dan one map	Pengadaan program (software) untuk tata kelola pemerintahan dan layanan publik berbasis IT, online, dan terbuka untuk publik.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP): AA (> 90,28)	Pendukung Prioritas Pembangunan	Program pengembangan aplikasi informatika dan persandian	Presentse urusan yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	37,50%
		Penguatan layanan public terpadu berbasis big data dan one map		Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP): AA (> 90,28)	Pendukung Prioritas Pembangunan			
3	Minimnya partisipasi publik dalam keterlibatan aplikasi program-program untuk kebijakan, layanan publik, dan lainnya	Membuka aksesibilitas public untuk terlibat aktif dalam pengembangan software dan program layanan public untuk perbaikan tata kelola Pemerintah Daerah	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP): AA (> 90,28)	Pendukung Prioritas Pembangunan	Program Peningkatan kualitas pelayanan publik dn pengembangan standarisasi	Jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria nasional	1
4	Adanya potensi konflik horizontal dalam masyarakat pasca pemilu	Penelitian potensi konflik di masyarakat saat pemilihan presiden dan pemilu legislative 2019	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): 70,12	Pembangunan Manusia dan Pengentasan	PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI DAN	Skor/ Nilai Index Ketahanan Nasional Gatra Ideologi, Sosial Budaya dan Ekonomi	2,89

RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	legislatif dan pemilihan presiden 2019		PERLINDUNGAN MASYARAKAT			Kemiskinan Berkelanjutan	KEWASPADAAN NASIONAL		
		Pengidentifikasi potensi konflik dan menemukan solusi penyelesaian agar tidak berkembang menjadi konflik nasional pasca pemilihan presiden dan pemilu legislative 2019			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): 70,13	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN NASIONAL	Skor/ Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi, Sosial Budaya dan Ekonomi	2,89
		Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi penanganan konflik sosial serta fasilitasi tim terpadu penanganan konflik tingkat Provinsi pasca pemilihan presiden dan pemilu legislative 2019			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): 70,14	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN NASIONAL	Skor/ Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi, Sosial Budaya dan Ekonomi	2,89
		Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (ormas) pasca pemilihan presiden dan pemilu legislatif 2019.			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): 70,15	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Skor/ Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	2,88
		Antisipasi penanganan konflik pasca pemilihan presiden dan pemilu legislatif 2019			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): 70,16	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Skor/ Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	2,88
		Penanganan konflik sosial meliputi pencegahan, penghentian dan pemulihan			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): 70,17	Pembangunan Manusia dan Pengentasan	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Skor/ Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	2,88

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		konflik pasca pemilihan presiden 2019				Kemiskinan Berkelanjutan			
5	Banyaknya kasus alih fungsi lahan dari status konservasi dan lahan produktif pertanian menjadi peruntukan lainnya	Perlindungan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan pertanian produktif dari kerusakan lingkungan, khususnya perubahan peruntukan kawasan	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	% Kesesuaian Pemanfaatan Ruang :79,5	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang - Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah capaian kinerja aspek pengaturan (persen) ditambah capaian kinerja aspek pembinaan (persen)	82,73
	Makin terbatasnya lahan konservasi dibandingkan tekanan penduduk terhadap lahan konservasi	Menambah jumlah area kawasan untuk perlindungan tata kelola lingkungan yang lestari dan berkelanjutan	TATA RUANG (KEISTIMEWAAN)	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	% Kesesuaian Penataan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan: 40,70	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	32,22
		Penambahan area konservasi di DIY		Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	% Kesesuaian Penataan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan: 40,71	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	17,5
		Penetapan kawasan baru area konservasi		Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	% Kesesuaian Penataan Ruang pada Satuan Ruang Strategis	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang	62,5

RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
					Keistimewaan: 40,72		Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	strategis kasultanan dan kadipaten	
6	Belum maksimalnya pengintegrasian data base kependudukan untuk kepentingan kebijakan publik satu data	Membangun database kependudukan yang terintegrasi dari desa ke propinsi	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP): AA (> 90,28)	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	86,10%
		Mensinkronkan kepentingan database penduduk untuk kepentingan lainnya		Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP): AA (> 90,28)	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	86,10%
7	Belum Terintegrasikan sistem informasi desa, khususnya bidang pemerintahan, administrasi, kependudukan, dan asset desa	Membangun database pemerintah desa yang memberikan informasi tentang pemerintahan, kependudukan, administrasi desa dan asset desa	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP): AA (> 90,28)	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN, DAN KECAMATAN	Persentase desa tertinggal yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik	51,02%
		Membangun sistem database desa (SID) yang terintegrasi dari tingkat desa – kota/ kabupaten dan pemerintah daerah DIY		Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah	Pendukung Prioritas Pembangunan	Program Layanan Teknologi Informasi	Persentase Jaringan Infrastruktur dalam Lingkup Pemda DIY yang Terintegrasi dalam Layanan TIK	80,50%

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
					(AKIP): AA (> 90,28)				
8	Program data base Pemerintah Daerah mengenai informasi kebijakan publik dan program pemerintah masih belum terbuka bagi stakeholders	Pengadaan data base yang terintegrasi untuk pengembangan data base partisipatif yang melibatkan publik	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP): AA (> 90,28)	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	70%
		Memperkuat data base layanan publik yang efektif dan efisien untuk pengembangan layanan publik		Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP): AA (> 90,28)				70%
9	Adanya konflik yang muncul di masyarakat karena banyaknya kasus-kasus hoax, khususya pasca pemilihan presiden dan pemilu legislatif 2019	Pemberdayaan ASN dalam bidang persandian, khususnya penanganan kasus-kasus pasca pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019 yang melibatkan Informasi Teknologi	PERSANDIAN	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP): AA (> 90,28)	Pendukung Prioritas Pembangunan	Program Peningkatan Layanan Informasi Dan Persandian	Kecepatan Informasi sandi kepada pimpinan dan informasi persuratan di lingkungan Pemda DIY	100%
		Penanganan masalah pasca pemilihan presiden dan pemilu legislatif 2019, khususnya isu hoax yang memecah belah masyarakat		Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP): AA (> 90,28)				100%
10	Belum banyaknya perpustakaan digital yang disediakan oleh	Pengadaan program dan kegiatan perpustakaan	PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,08	Pembangunan Manusia dan Pengentasan	Program Layanan Perpustakaan	Jumlah Anggota Baru Perpustakaan	6000

RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Pemerintah Daerah, khususnya untuk sumber pengetahuan masyarakat	digital dan sosialisasinya kepada masyarakat				Kemiskinan Berkelanjutan			
		Perpustakaan digital Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk sumber pengetahuan masyarakat		Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,09	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan		Jumlah Perpustakaan anggota Jogja Library for All (JLA) yang menindaklanjuti kerja sama	6
11	Belum adanya sistem kearsipan daerah yang diterapkan dalam bentuk program digital	Pembangunan software kearsipan daerah	KEARSIPAN	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP): AA (> 90,28)	Pendukung Prioritas Pembangunan	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN	Peningkatan jumlah OPD/UPTD/Sekolah yang melakukan pengelolaan arsip sesuai dengan standard	70
		Digitalisasi kearsipan daerah		Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP): AA (> 90,28)	Pendukung Prioritas Pembangunan	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN	Peningkatan jumlah OPD/UPTD/Sekolah yang melakukan pengelolaan arsip sesuai dengan standard	70
12	Masih adanya kasus kasus yang muncul atas hasil pemeriksaan BPK	Peningkatan kapasitas ASN dalam menangani kasus-kasus otonomi daerah	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP): AA (> 90,28)	Pendukung Prioritas Pembangunan	Program Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama	100%
	Adanya ketertinggalan pembangunan antar wilaya, khususnya desa – kota	Memperkuat pemerintahan daerah dan desa untuk terus mendorong kebijakan pemerataan pembangunan wilayah	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP): AA (> 90,28)	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAH	Persentase desa tertinggal yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik	51,02%

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
							AN, DAN KECAMATAN		
	Belum terintegrasinya sistem pemerintahan desa-kabupaten, khususnya sistem data base kelurahan/desa	Membangun sistem data base kelurahan/desa yang terintegrasi dan terpadu.	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP): AA (> 90,28)	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN, DAN KECAMATAN	Persentase desa tertinggal yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik	51,02%
		Membangun sistem data base kelurahan/desa yang terintegrasi dan terpadu.	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP): AA (> 90,28)	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN, DAN KECAMATAN	Persentase desa tertinggal yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik	51,02%
13	DIY sebagai daerah bencana belum mempunyai program penanggulangan bencana dalam bentuk software, geospasial, dan bisa melibatkan partisipasi masyarakat luas, khususnya stakeholders bencana	Pengadaan program dan kegiatan sistem kebencanaan daerah dalam bentuk geospasial dan aksesibel terhadap partisipasi public	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH): 62,44	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana	rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana	14 menit

RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Banyak desa masih belum menjadi desa siaga bencana	Menambah program desa siaga bencana	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH): 62,45	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Peningkatan desa/kelurahan tanggap bencana di kawasan rawan bencana	25
	Masih dibutuhkan kelompok-kelompok relawan kebencanaan	Memperkuat relawan bencana dengan mengadakan training atau pelatihan kebencanaan untuk para relawa	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH): 62,46	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan		Peningkatan sekolah aman(SSB) di kawasan rawan bencana	25
14	Belum terbukanya mekanisme dan proses perencanaan program-program Keistimewaan Yogyakarta	Membangun kebijakan baru untuk perencanaan partisipatif dalam program-program Keistimewaan Yogyakarta	KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH (KEISTIMEWAAN)	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	% Capaian Program Urusan Keistimewaan: 82,61	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN URUSAN KEISTIMEWAAN	persentase rumesan bahan kebijakan urusan keistimewaan	66%
		Membangun akuntabilitas publik program-program Keistimewaan Yogyakarta		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	% Capaian Program Urusan Keistimewaan: 82,62				Pendukung Prioritas Pembangunan
	Program-program Keistimewaan Yogyakarta masih terfokus pada pembangunan infrastruktur kebudayaan	Membangun perencanaan program kesejahteraan masyarakat dalam Keistimewaan Yogyakarta	KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH (KEISTIMEWAAN)	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	% Capaian Program Urusan Keistimewaan: 82,63	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN URUSAN KEISTIMEWAAN	persentase rumesan bahan kebijakan urusan keistimewaan	266%
15	Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian belum berjalan efektif	Memberikan insentif pada pemilik lahan (bibit tanaman, modal usaha)	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	% Kesesuaian Pemanfaatan Ruang :79,5	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pengaturan dan Pembinaan	72,63%

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			PERTANIAN	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	Produksi Tanaman Pangan	2.313.050 ton
		Penghentian perijinan di lahan pertanian produktif untuk peruntukan lain	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	% Kesesuaian Pemanfaatan Ruang :79,5	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pengaturan dan Pembinaan	72,63%
		Melakukan tindakan-tindakan hukum untuk perlindungan tanah pertanian produktif	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): 70,12	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	PROGRAM PEMBINAAN PELAKSANAAN DAN PENEKAKAN PERDA DAN PERKADA	Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang Tertangani	75%
15		Melakukan tindakan-tindakan hukum untuk perlindungan tanah pertanian produktif	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): 70,13	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	PROGRAM PEMBINAAN PELAKSANAAN DAN PENEKAKAN PERDA DAN PERKADA	Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang Tertangani	175%
	Produksi pertanian meningkat, petani belum sejahtera	Memberikan subsidi untuk pengadaan bibit, pupuk, dan alsintan	PERTANIAN	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	Produksi Tanaman Pangan	2.313.050 ton

RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Meningkatkan jiwa kewirausahaan petani dalam merespon permintaan dan peluang pasar	KOPERASI DAN UKM	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n	2.046.177 Juta Rupiah
	Banyak komoditas penting belum bisa dicukupi sendiri oleh DIY	Memfasilitasi pengadaan sentra-sentra pengembangan komoditas pendukung industry pangan khas DIY (nangka, singkong, kacang hijau, kedelai, dll)	PERINDUSTRIAN	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Nilai Produksi IKM	13.238.739 Rp Juta
	Peningkatan populasi sejumlah ternak masih rendah	Memberikan bantuan bibit ternak kepada rumah tangga miskin	PERTANIAN	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN POPULASI PETERNAKAN	Populasi ternak(animal Unit)	624,874
		Membuat sentra-sentra budidaya pakan ternak dengan penerapan inovasi teknologi dan sistem industri peternakan pedesaan	PERTANIAN	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN POPULASI PETERNAKAN	Populasi ternak(animal Unit)	624,874
16	Pola konsumsi rumah tangga masih kurang beragam, masih tergantung pada beras dan/atau terigu	Masyarakat, terutama keluarga miskin, difasilitasi untuk dapat menghasilkan sendiri bahan pangan non beras dan/atau terigu, atau sumber pangan alternatif lainnya	PANGAN	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,09	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Peningkatan Ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0,08
				Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,09	Pembangunan Manusia dan Pengentasan	Program Peningkatan Ketersediaan, akses, dan	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0,08

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
						Kemiskinan Berkelanjutan	konsumsi pangan		
				Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,09	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	Konsumsi umbi meningkat	N/A
								Konsumsi sayur meningkat	N/A
	Di DIY masih ada Desa Rawan Pangan	Meningkatkan pengadaan bahan pangan dan memperlancar distribusi pangan sampai ke seluruh rumah tangga	PANGAN	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,09	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program peningkatan ketersediaan dan akses pangan	Cadangan pangan	N/A
							Program pemberdayaan daerah rawan pangan	Jumlah desa rawan pangan	4
	Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mengkonsumsi dan memproduksi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) masih rendah	Perlu secara terus menerus dilakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, dengan melibatkan lembaga-lembaga lain yang memiliki akses langsung ke masyarakat	PANGAN	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,09	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	Konsumsi umbi meningkat	N/A
Konsumsi sayur meningkat								N/A	
Tingkatkan pengawasan terhadap peredaran pangan yang tidak aman dan membahayakan kesehatan terutama di lingkungan pendidikan anak		KESEHATAN	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,09	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	Konsumsi umbi meningkat	N/A	
							Konsumsi sayur meningkat	N/A	

RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
17	Pengembangan perikanan budidaya belum dilakukan secara optimal	Untuk meningkatkan produksi ikan budidaya, maka harus diperluas arealnya. Potensi sawah, tambak, jaring apung, dan tenaga harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai tempat pembudidayaan ikan	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program peningkatan produksi perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	89,5
		Sungai-sungai di DIY bisa dimanfaatkan untuk sumber budidaya ikan, baik dalam bentuk keramba ataupun pelepasan benih ikan	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program peningkatan produksi perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	89,5
		Lahan tambak udang puluhan hektar yang tergusur oleh area bandara di Kulon Progo harus segera dicarikan alternatif tempat yang lebih luas dan strategis	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program peningkatan produksi perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	89,5
	Kemampuan SDM nelayan DIY masih kurang	Melatih dan memberikan kesempatan magang kepada generasi muda yang berminat bekerja di sektor pertanian	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	6.481 ton
Banyak masyarakat yang belum mengerti manfaat ikan untuk pemenuhan gizi	Sosialisasi Gemar Makan Ikan harus terus digalakkan di tengah-tengah masyarakat. Jalur pendidikan harus dapat dimanfaatkan dengan baik, dengan jalan sosialisasi	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	Tingkat konsumsi ikan masyarakat	25,21 kg/kapita/tahun	

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		kepada para siswa di sekolah-sekolah. Bagi sekolah yang memiliki halaman yang cukup, dapat juga dimanfaatkan untuk pembuatan kolam ikan.							
	Pemanfaatan sungai-sungai di DIY untuk budidaya ikan masih kurang	Penjagaan kelestarian sungai di DIY untuk budidaya ikan	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PROGRAM KONSERVASI EKOSISTEM DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kawasan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	14%
		Pelepasan bibit ikan di sungai-sungai DIY untuk kelestarian dan sumber pangan lokal alternatif	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan		Persentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	10%
18	Produksi minyak kayu putih belum optimal	Untuk menjaga peran produk minyak kayu putih sebagai penyumbang PAD yang signifikan, maka harus terus dilakukan pengkayaan tegakan/populasi dan perluasan areal tanaman kayu putih produktif	KEHUTANAN	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	86,64
	Pengelolaan hutan negara belum dilakukan secara optimal	Selain pinus, jati, dan kayu putih yang saat ini mendominasi populasi hutan negara, Pemerintah Daerah DIY perlu mempertimbangkan untuk menanam komoditas	KEHUTANAN	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1. Program Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 2. Program Pengelolaan	1. Rasio pemanfaatan sumber daya hutan 2. Persentase hutan konservasi terkelola 3. Persentase kawasan hutan tertata	1. 86,64 2. 76,62 % 3. 89,40 % 4. 330.000 batang

RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		tanaman hutan lainnya, yang cepat tumbuh dan berproduksi, dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan keseimbangan lingkungan					Hutan Konservasi 3. Program Perencanaan dan Bina Usaha Kehutanan 4. Program Pengembangan Pembibitan Kehutanan	4. Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam	
	Masyarakat sekitar hutan masih banyak yang belum sejahtera	Masyarakat sekitar hutan yang masih berpendapatan rendah, diberi akses untuk memanfaatkan hutan guna memperbaiki taraf hidup mereka. Mereka diperbolehkan untuk bercocok tanam dengan tetap menjaga kelestarian hutan, sekaligus	KEHUTANAN	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Perencanaan dan Bina Usaha Kehutanan a. Kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Persentase kawasan hutan tertata a. Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Rakyat	89,4% a. 4 kabupaten
	Masyarakat sekitar hutan masih banyak yang belum sejahtera	Masyarakat sekitar hutan yang masih berpendapatan rendah, diberi akses untuk memanfaatkan hutan guna memperbaiki taraf hidup mereka. Mereka diperbolehkan untuk bercocok tanam dengan tetap menjaga kelestarian hutan, sekaligus	KEHUTANAN	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Hutan Konservasi a. Kegiatan Operasional Teknis Pengelolaan Hutan Bunder b. Kegiatan Pengembangan Pelayanan	Persentase hutan konservasi terkelola a. Terlaksananya Operasional Teknis Pengelolaan Hutan Bunder b. Terlaksananya Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura Bunder	76,62% a. 100 % b. 100 %

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
							Pemanfaatan Tahura Bunder		
19	Lemahnya pengelolaan koperasi	Peningkatan kapasitas dan pengetahuan bagi pengelola koperasi	KOPERASI DAN UKM	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n	2.046.177 Juta Rupiah
		Fasilitasi pengembangan koperasi untuk meningkatkan kemampuannya		Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan					
	Kurangnya pemasaran bagi usaha kecil menengah	Pemerinta Daerah DIY perlu membangun star-up untuk pemasaran koperasi, usaha kecil dan menengah	KOPERASI DAN UKM	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN UKM	Nilai Omset UKM Tahun n	87.516 Juta Rupiah
	Mendorong Kreativitas pemasaran melalui ekonomi kreatif	Melakukan pelatihan bagi pelaku koperasi, usaha kecil menengah untuk bisa optimal dalam bisnis melalui ekonomi kreatif seperti bisnis online, baik penguasaan software maupun hardware	KOPERASI DAN UKM	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN UKM	Nilai Omset UKM Tahun n	87.516 Juta Rupiah
20	Kurangnya investasi di wilayah pedesaan	Membangun kebijakan baru untuk investasi di kawasan pedesaan, khususnya untuk optimalisasi mengatasi pengangguran terbuka	PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN	Jumlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM tahun n	18.250.500.000 Rp

RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Kurangnya peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan ekonomi	Masyarakat perlu difasilitasi untuk bisa terlibat dalam kesertaan bisnis di area pusat pertumbuhan dengan prinsip terlibat kegiatan ekonomi tersebut atau multiplier effect, khususnya melalui kegiatan CSR	PENANAMAN MODAL	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	•Indeks williamson: 0,4524	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI	pertumbuhan nilai realisasi investasi PMA & PMDN tahun n	988.910 Juta Rupiah
	Minimnya inisiatif investasi di kawasan daerah miskin investasi	Membangun kebijakan baru tentang investasi dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam kebijakan investasi bagi kawasan pedesaan	PENANAMAN MODAL	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	•Indeks williamson: 0,4525	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI	pertumbuhan nilai realisasi investasi PMA & PMDN tahun n	988.910 Juta Rupiah
21	Masih minimnya pengetahuan pengelola obyek wisata	Pemerintah daerah membangun program pemberdayaan pelaku wisata, khususnya para pelaku wisata yang sedang tumbuh berkembang	PARIWISATA	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program peningkatan SDM dan kelembagaan pariwisata	Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata	19,61
	Kurangnya inisiatif Pengembangan pariwisata yang terintegrasi dalam teknologi informasi	Pemerintah daerah memfasilitasi sistem informasi wisata yang aksesible terhadap partisipasi pelaku wisata. Sistem informasi sebisa mungkin dapat meningkatkan pelaku wisata dalam pengelolaannya.	PARIWISATA	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan		Jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	6,542,327
	Infrastruktur pendukung obyek wisata masih belum maksimal	Pemerinta Daerah DIY perlu membangun infrastruktur wisata daerah yang sedang	PARIWISATA	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan			

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		berkembang, terutama aksesibilitas jalan menuju obyek wisata		yang Berkelanjutan					
	Minimnya modal dan investasi pengembangan wisata	Pemerintah Daerah DIY perlu menjembatani dan membuka ruang investasi untuk kepentingan pengembangan wisata lokal. Sifat investasi harus ramah dengan masyarakat pelaku wisata dan masyarakat sekitar obyek wisata.	PARIWISATA	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan		Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi	150
22	Masih kurangnya ruang ekonomi pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal	Pemerintah Daerah perlu memperbaiki infrastruktur pasar tradisional untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal	PERDAGANGAN	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	1,95 milyar rupiah
	Minimnya pengetahuan, keterampilan pedagang pasar tradisional	Pemerintah Daerah DIY perlu memberikan tambahan keterampilan pelaku pasar tradisional	PERDAGANGAN	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	1,95 milyar rupiah
	Minimnya kekuatan pasar tradisional melawan pasar modern	Pemerintah Daerah perlu membatasi perijinan pasar modern, dan membangun kebijakan proteksi terhadap pasar tradisional	PERDAGANGAN	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	1,95 milyar rupiah
	Minimnya aksesibilitas modal bagi pedagang pasar tradisional	Pemerintah Daerah memfasilitasi permodalan bagi pelaku pasar tradisional	PERDAGANGAN	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	1,95 milyar rupiah

RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
				yang Berkelanjutan			PERDAGANGAN DALAM NEGERI		
	Minimnya kekuatan pasar tradisional melawan pasar modern	Pemerintah Daerah perlu membatasi perijinan pasar modern, dan membangun kebijakan proteksi terhadap pasar tradisional	PERDAGANGAN	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	1,95 milyar rupiah
	Minimnya aksesibilitas modal bagi pedagang pasar tradisional	Pemerintah Daerah memfasilitasi permodalan bagi pelaku pasar tradisional	PERDAGANGAN	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	1,95 milyar rupiah
23	Masih kurangnya pengembangan terhadap produk-produk IKM	Pemerintah Daerah perlu bekerjasama dengan pihak Universitas untuk melakukan penelitian dan pengembangan produk-produk lokal yang berkualitas	PERINDUSTRIAN	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengembangan industri kecil dan menengah	Nilai produksi IKM	13,238,739
	Lemahnya daya saing IKM	Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu memberikan proteksi dan subsidi kepada para pelaku IKM	PERINDUSTRIAN	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengembangan industri kecil dan menengah	Nilai produksi IKM	13,238,740
	Kurangnya strategi pemasaran	Pemerintah daerah memfasilitasi dan membangun sitem pemasaran bagi pelaku IKM, khususya jaringan pasar online	PERINDUSTRIAN	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengembangan industri kecil dan menengah	Nilai produksi IKM	13,238,741

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
24	Adanya Ketidakseimbangan aksesibilitas wilayah-wilayah perbatasan terutama perbatasan antara DIY Dengan Jawa Tengah di Kabupaten Gunungkidul Dengan kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten serta Kabupaten Sukoharjo yang pada umumnya kondisi jalan dalam keadaan rusak sedang sampai berat, oleh sebab itu perlu perhatian khusus akan kondisi tersebut walaupun status jalan kebanyakan merupakan jalan kabupaten.	Upaya untuk Peningkatan jalan dan Jembatan serta Rehabilitasi maupun pemeliharaan jalan dan jembatan merupakan hal yang prioritas untuk memberikan akses yang seluas luasnya pada masyarakat sehingga berakibat dapat meningkatkan segi sosial ekonomi. Terutama terfokus pada peningkatan jalan dan jembatan pedesaan.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	•Indeks williamson: 0,4525	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	Program penyelenggaraa n jalan	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	74,06
				Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,09	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Penyelenggaraa n Prasarana Sarana Utilitas Kawasan - Kegiatan Penyelenggaraa n Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman - Kegiatan Penyelenggaraa n Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Strategis	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	48 titik
							Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi	32 titik	
24	Aksesibilitas penduduk terhadap ketersediaan air minum yang cukup dirasa masih jauh dari mencukupi. Fakta menunjukkan bahwa banyak daerah daerah yang masih saja mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan air	Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana sesuai dengan SPM, antara lain melalui peningkatan aksesibilitas jangkauan pelayanan sarana dan prasarana di daerah terpencil, pedalaman, perbatasan.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,09	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Panjang jaringan distribusi SPAM regional	91.174 meter
				Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,10	Pembangunan Manusia dan Pengentasan	Program Penyelenggaraa n Prasarana	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	48 titik

RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	bersih sebagai sarana kehidupan dasar					Kemiskinan Berkelanjutan	Sarana Utilitas Kawasan - Kegiatan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman - Kegiatan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Strategis		
				Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,11	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan		Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi	32 titik
	a. Belum sepenuhnya masyarakat perkotaan maupun pelosok pedesaan yang katagori miskin mendapatkan akses secara penuh terhadap kebutuhan akan air minum yang layak, karena keterbatasan kesediaan air baku baru untuk mendukung PDAM ataupun SPAMDES.	Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, telaga, embung serta sumberdaya air lainnya, maupun pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya serta upaya untuk pengendalian banjir.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,12	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY	74,50%
	b. Pengendalian , pengawasan serta penertiban pemanfaatan			Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,13	Pembangunan Manusia dan Pengentasan		Rerata hasil penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada seluruh daerah	77,82%

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	bagian- bagian jalan provinsi belum secara optimal.					Kemiskinan Berkelanjutan		irigasi kewenangan Pemda DIY	
				Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,14	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Baku	Penyediaan Air Baku	19.5 liter/detik
	Belum terpenuhinya target untuk penambahan secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap produk air baku baru, hal ini terkendala masalah kewenangan.	a. Pengembangan Sistem Pengelolaan air minum Pedesaan (SPAMDES) terutama bagi daerah-daerah yang sering dilanda kekeringan dalam rangka memperluas penyediaan air baku.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,15	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Panjang jaringan distribusi SPAM regional	91.174 meter
		b. Pengelolaan persampahan serta pengelolaan air limbah, terutama untuk limbah rumah tangga.		Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,16	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Baku	Penyediaan Air Baku	19.5 liter/detik
				Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,17	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi	Penanganan sampah sistem regional	660 ton/hari
				Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,18	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan		Layanan Sistem air limbah terpusat	25.200 SR

RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Dalam urusan tata ruang belum tersedianya rencana detail tata ruang (RDTR) serta peraturan Zonasi(PZ) sebagai acuan untuk perijinan serta belum ditetapkan instrumen untuk pengendalian.	Perencanaan tata ruang dalam rangka untuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah RTRW untuk menghindari konversi lahan produktif dalam rangka mencegah gradasi ekosistem dan lain lain.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	% Kesesuaian Pemanfaatan Ruang : 79,5	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program pengaturan dan pembinaan tata ruang	Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan	72,63
				Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	% Kesesuaian Penataan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan: 40,69	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	32,22
	a. Banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang harus digunakan sebagai pedoman atau landasan yuridis, jelas akan menimbulkan ketidak seimbangan baik itu lingkungan sosial, ekonomi maupun nilai nilai kultur dan lain lain. Proses alih fungsi lahan untuk kepentingan hunian atau industri yang terjadi secara massif perlu segera di hentikan kalau tidak ingin terjadi gradasi	Pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui anggaran pemerintah daerah diarahkan untuk mendukung langkah-langkah stimulasi terhadap perekonomian dari sisi fiskal (pro-growth), memperluas penciptaan lapangan kerja produktif (pro-job), dan mengentaskan kemiskinan (pro-poor).	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	% Kesesuaian Pemanfaatan Ruang : 79,5	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang - Kegiatan Penyusunan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang -Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pelaksanaan dan pengawasan	82,73

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	terhadap kualitas lingkungan.								
	b. Konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agro ekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin n terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agro ekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin terkikisnya lahan pertanian		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	% Kesesuaian Pemanfaatan Ruang : 79,5	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang - Kegiatan Penyusunan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang -Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pelaksanaan dan pengawasan	82,73
25	Minimnya sosialisasi rencana penyusunan RKPD kepada masyarakat, sehingga masyarakat	Masyarakat dilibatkan dalam Musrenbang mulai dari tingkat Desa	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah	Pendukung Prioritas Pembangunan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan yang berkualitas	100

RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	menjadi apatis dan enggan terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan daerah karena usulan masyarakat seringkali tidak bisa direalisasikan akibat terjadinya pemotongan/pemangkasan berbagai usulan yang masuk.		Pemerintahan: PERENCANAAN	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP): AA (> 90,28)	Pendukung Prioritas Pembangunan		Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100
	Tidak ada koordinasi dan sinkronisasi antara program yang dibiayai dana community development dari perusahaan dengan program yang dibiayai APBD dan terjadi perubahan/tambahan kegiatan yang sebelumnya tidak masuk dalam usulan SKPD.	a. Perencanaan pembangunan ekonomi.	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan: PERENCANAAN	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP): AA (> 90,28)	Pendukung Prioritas Pembangunan	Program perencanaan pembangunan perekonomian	Persentase ketercapaian program pembangunan bidang perekonomian	86,96
b. Perencanaan pembangunan pemerintahan.		Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan		1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP): AA (> 90,28)	Pendukung Prioritas Pembangunan	Program perencanaan pembangunan pemerintahan	Persentase ketercapaian program pembangunan bidang pemerintahan	91	
c. Perencanaan pembangunan daerah.		Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan		1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP): AA (> 90,28)	Pendukung Prioritas Pembangunan	Program pengendalian pembangunan daerah	Persentase capaian kegiatan PD	90	
		Meningkatnya Kapasitas		1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas	Pendukung Prioritas Pembangunan	Persentase evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat	100		

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
				Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah (AKIP): AA (> 90,28)			waktu sesuai regulasi yang berlaku	
		d. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.		Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP): AA (> 90,28)	Pendukung Prioritas Pembangunan	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Sarana Prasarana	82,86
		e. Perencanaan pengembangan wilayah tertinggal.		Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP): AA (> 90,28)	Pendukung Prioritas Pembangunan	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Sarana Prasarana	82,86
		f. Perencanaan pembangunan ekonomi, serta pengembangan kawasan.		Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP): AA (> 90,28)	Pendukung Prioritas Pembangunan	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Sarana Prasarana	82,86
		g. Evaluasi implementasi dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD).		Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP): AA (> 90,28)	Pendukung Prioritas Pembangunan	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku	100
	Sistem perencanaan (E-Planning) belum mengakomodir usulan	a. Pengembangan data dan informasi.	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah	Pendukung Prioritas Pembangunan	Program Pengembangan Statistik Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan	100

RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	yang sifatnya politis (dari DPRD).		Pemerintahan: PERENCANAAN		(AKIP): AA (> 90,28)			pembangunan daerah	
		b. Evalueasi sistem e-planning yang belum terbuka bagi sistem perencanaan dari jalur politis (DPRD)		Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP): AA (> 90,28)	Pendukung Prioritas Pembangunan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan yang berkualitas	100
				Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP): AA (> 90,28)	Pendukung Prioritas Pembangunan		Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100
26	Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten dan kota dengan pemerintah daerah Provinsi dalam penanggulangan dan pengembangan wilayah yang berkenaan dengan kawasan kumuh serta kondisi rumah rumah yang tidak layak huni.	a. Ditingkatkan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah kabupaten dan kota serta dengan pemerintah pusat untuk bersama sama dalam perumusan arah kebijakan strategis dan pembuatan kesepakatan-kesepakatan, rencana dan program bersama dalam mengatasi permasalahan perumahan kumuh dan rumah yang tidak layak huni. b. Rehabilitasi perumahan kumuh dan rumah tidak layak huni.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	*% Angka Kemiskinan : 9,11%	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program penyelenggaraan perumahan - Kegiatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Penanganan rumah tidak layak huni	32,43%
						Pembangunan Manusia dan Pengentasan		Cakupan penanganan kawasan kumuh	72,16%

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
						Kemiskinan Berkelanjutan			
						Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program penyelenggaraan perumahan - Kegiatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Penanganan rumah tidak layak huni	32,43%
						Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Kumuh	Cakupan penanganan kawasan kumuh	72,16%
						Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Perumahan - Kegiatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Penanganan rumah tidak layak huni	32,43%
						Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan			
27	Kemacetan. Faktor-faktor penyebab kemacetan lalu lintas antara lain: tidak seimbangnya luas atau kapasitas jalan dengan jumlah kendaraan bermotor, ledakan penduduk, peningkatan penggunaan kendaraan	a. Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan.	PERHUBUNGAN	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	•Indeks williamson: 0,4525	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	PROGRAM PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI - Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana	Penurunan rasio jumlah kecelakaan	0,94 kej/km

RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	pribadi, rendahnya kualitas angkutan umum, kurangnya disiplin dari para pengguna jalan serta kurangnya penanganan dari pemerintah.						Fasilitas Keselamatan Jalan		
		b. Pembangunan Bandara Internasional di Kulon Progo.		Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	•Indeks williamson: 0,4525	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN Penyelenggara n Angkutan Orang Dalam Trayek (Kooerniasi Intergrasi antar moda mendukung Bandara Baru) Kegiatan Penyelenggara n Angkutan Barang dan Perkeretaapian (Koordinasi Penyelenggara n perkeretaapian mendukung Bandara Udara Yogyakarta International Airport (YIA) Pembangunan oleh kementerian Perhubungan,	Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	80,35%
				Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	•Indeks williamson: 0,4525	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah		Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian	50%

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
							Operasionalisasi oleh PT. KAI)		
		c. Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan.		Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	•Indeks williamson: 0,4525	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	PROGRAM PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI - Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	Penurunan rasio jumlah kecelakaan	0,94 kej/km
		d. Penambahan rute layanan angkutan orang berjalan, khususnya area luar kota yang menghubungkan antarkecamatan dalam skala prioritas.		Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	•Indeks williamson: 0,4525	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN - Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek (Penyelenggaraan Angkutan Trans Jogja)	persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	80,35%
		e. Pengembangan sisten transportasi massaal serta penataan transportasi perkotaaan.		Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	•Indeks williamson: 0,4525	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	80,35%

RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
				Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	•Indeks williamson: 0,4525	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	- Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek (Kewenangan Pemda DIY sebatas pengaturan trayek, untuk penyelenggaraan angkudes menjadi kewenangan Kab/Kota) - Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Perkeretaapian (Koordinasi pembangunan perkeretaapian Jogjakarta-Magelang)	Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian	50%
		f. Penambahan armada angkutan orang di jalan (bus transportasi).		Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	•Indeks williamson: 0,4525	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN - Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek (Kewenangan	persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	80,35%

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
							Pemda DIY sebatas pengaturan trayek, untuk penyelenggaraan angkutan menjadi kewenangan Kab/Kota)		
		g. Pengembangan transportasi berbasis keistimewaan.		Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	% Kesesuaian Penataan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan: 40,69	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	32,22
		h. Penataan, pembinaan, maupun pengendalian angkutan non kendaraan bermotor.		Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	•Indeks williamson: 0,4525	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN - Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	Peningkatan tertib perijinan angkutan tidak dalam trayek	84%
	Terjadinya polusi udara akibat asap kendaraan bermotor yang sudah tidak laik jalan, terutama angkutan umum yang tidak melakukan uji emisi secara berkala.	Peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor.	PERHUBUNGAN	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	•Indeks williamson: 0,4525	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	PROGRAM PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI - Penegakan Hukum Lalu	Penurunan rasio jumlah kecelakaan	0,94 kej/km

RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
							Lintas Angkutandi jalan		
	Sering terjadinya kecelakaan bagi pengguna kendaraan bermotor disebabkan kurangnya sarana dan prasarana perhubungan.	a. Peningkatan pelayanan angkutan.	PERHUBUNGAN	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	•Indeks williamson: 0,4525	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	80,35%
Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah				•Indeks williamson: 0,4525	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	Peningkatan tertib perijinan angkutan tidak dalam trayek		84%	
Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah				•Indeks williamson: 0,4525	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian		50%	
Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah		b. Management rekayasa lalu lintas.		Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	•Indeks williamson: 0,4525	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	PROGRAM PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI	Penurunan rasio jumlah kecelakaan	0,94 kej/km
Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah				•Indeks williamson: 0,4525	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah				
Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah				•Indeks williamson: 0,4525	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah				
Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah				•Indeks williamson: 0,4525	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah				

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		c. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas.		Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	•Indeks williamson: 0,4525	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah			
		d. Pembangunan lampu penenrangan jalan, pagar pengaman jalan serta traffic light pada daerah daerah persimpangan yang padat.		Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	•Indeks williamson: 0,4525	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah			
		e. Pembinaan , pengawasan dan pengendalian transportasi antarkota antarprovinsi maupun antarkota dlam provinsi terkait dengan keselamatan penumpang.		Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	•Indeks williamson: 0,4525	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah			
28	Pembangunan di bidang industri apabila tidak diikuti dengan AMDAL yang bisa dipertanggungjawabkan tentu akan semakin meningkatkan jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan	a. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.	LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH): 62,44	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	a. Jumlah sumber pencemar air sungai (point source) yang ditangani b. Jumlah sumber pencemar air sungai (non point source) yang ditangani c. Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani	a. 222 usaha/keg b. 96 lokasi c. 70 usaha/keg

RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	lingkungan dan kesehatan manusia.	b. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam.		Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH): 62,44	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program pengelolaan tutupan vegetasi dan konservasi sumberdaya alam	a. Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi b. Persentase Penurunan kerusakan hutan	a. 165 Ha b. 0,1 %
		c. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.		Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK: WTP 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP): AA (> 90,28)	Pendukung Prioritas Pembangunan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan a. Kegiatan Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	1. Tersusunnya dokumen statistik 2. Publikasi Lingkungan Hidup di media	1. 1 dokumen 2. 3 media
		d. Pengelolaan ruang terbuka hijau.		Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH): 62,44	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program pengelolaan tutupan vegetasi dan konservasi sumberdaya alam	a. Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi b. Persentase Penurunan kerusakan hutan	a. 165 Ha b. 0,1 %

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		e. Kaderisasi lingkungan hidup.		Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH): 62,44	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program pengembangan kapasitas lingkungan hidup	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	3 penghargaan
		f. Pengelolaan sampah mandiri.		Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH): 62,44	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program pengembangan kapasitas lingkungan hidup	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	3 penghargaan
		g. Menerapkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan pada pengelolaan sumber daya alam baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperbaharui dengan memperhatikan daya dukung dan daya tamponnya.		Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH): 62,44	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program pengelolaan tutupan vegetasi dan konservasi sumberdaya alam	a. Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi b. Persentase Penurunan kerusakan hutan	a. 165 Ha b. 0,1 %
		h. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap dapat dilakukan dengan cara membudayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi.		Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH): 62,44	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program pengelolaan tutupan vegetasi dan konservasi sumberdaya alam	a. Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi b. Persentase Penurunan kerusakan hutan	a. 165 Ha b. 0,1 %
	Kelemahan sistem peraturan perundangan dan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan.	Penegakan hukum secara adil dan konsisten	LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH): 62,44	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pengkajian dan Petaan Lingkungan Hidup	a. Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi	a. 48,75 % b. 100 %

RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
								kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda DIY b. Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota	
29	Masih banyak siswa yang tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang menengah (SMU/SMK/Sederajat)	Fasilitasi bagi warga kurang mampu untuk menempuh pendidikan menengah (SMU/SMK/Sederajat)	PENDIDIKAN	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,13	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Pendidikan Menengah	a. Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	80,3
				Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,13	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan		b. Jumlah medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional jenjang Pendidikan Menengah	40
				Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,13	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan		c. Angka putus sekolah	0,2
				Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,13	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di setiap kabupaten di DIY	86,90

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
				Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,14	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di setiap kabupaten di DIY	80,67
				Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,15	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di setiap kabupaten di DIY	75,67
				Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,16	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Pendidikan Menengah Kabupaten Gunung Kidul	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di setiap kabupaten di DIY	83,22
				Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,17	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di setiap kabupaten di DIY	85
	Angka partisipasi kasar perguruan tinggi masih rendah	Penyediaan beasiswa bagi mahasiswa (warga DIY) kurang mampu dan atau mahasiswa berprestasi		Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,18	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.53%
				Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,19	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan		Jumlah medali lomba kompetisi nasional dan internasional (satuan medali)	52 medali

RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Kualitas sekolah menengah (SMU/SMK/Sederajat) masih belum merata	Pemerataan akses dan kualitas antarsekolah dan antardaerah		Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,20	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	Prosentase Sekolah menengah dengan Akreditasi A	78,95
				Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,21	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan		Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional pendidikan menengah	37
				Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,22	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan		Angka Sekolah Putus	0,22
	Lulusan SMK kompetensi maupun jurusannya belum sesuai dengan kebutuhan pasar	Peningkatan kompetensi lulusan SMK		Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,23	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Peningkatan Pelayanan dan Pendidikan Teknik	Peserta didik yang mendatkan layanan pendidikan teknik berstandar	
	Kesejahteraan GTT dan PTT masih tergolong rendah	a. Peningkatan jumlah guru yang layak mengajar sesuai target yakni 98,39%		Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,24	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten	87,54
		b. Peningkatan kesejahteraan GTT/PTT		Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,25	Pembangunan Manusia dan Pengentasan			

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
						Kemiskinan Berkelanjutan			
30	Pemuda merupakan Sumberdaya potensial bagi kemajuan daerah dalam berbagai bidang	Fasilitasi bagi pemuda untuk peningkatan akses teknologi informasi	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,25	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Pembinaan Kepemudaan	Persentase peningktan Pemuda yang Berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan	26
	Optimalisasi teknologi informasi untuk kemajuan dalam kegiatan yang produktif	Pelatihan pemuda utamanya desa dan wilayah tertinggal untuk melek teknologi informasi dan menggunakannya bagi kegiatan produktif		Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,26	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Pembinaan Kepemudaan	Persentase peningktan Pemuda yang Berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan	26
	Penganggur pemuda jumlahnya cukup besar	Pelatihan pemuda untuk kewirausahaan dan kemandirian		Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,27	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Pembinaan Kepemudaan	Persentase peningktan Pemuda yang Berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan	26
	Wawasan Kebangsaan pemuda menurun	Peningkatan wawasan kebangsaan dan kehidupan berbangsa dalam kebhineka tunggal eka		Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,28	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Pembinaan Kepemudaan	Persentase peningktan Pemuda yang Berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan	26
	Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa, dalam rangka NKRI	Fasilitasi peningkatan nilai-nilai Pancasila dan NKRI		Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,29	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Pembinaan Kepemudaan	Persentase peningktan Pemuda yang Berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan	26

RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
31	Masih adanya prevalensi gizi buruk (KEP)	Fasilitasi peningkatan gizi bagi balita	KESEHATAN	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,29	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Kesehatan Masyarakat	Persentase balita sehat	40,06
	Angka kematian bayi (AKI) masih cukup tinggi	Peningkatan gizi ibu hamil		Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,30	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan		Persentase desa sehat mandiri	54,66
	Angka kematian balita masih tinggi	Optimalisasi posyandu		Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,31	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Kesehatan Masyarakat	Persentase balita sehat	40,06
				Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,32	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan		Persentase desa sehat mandiri	54,66
	Rendahnya budaya hidup sehat	a. Peningkatan cakupan jaminan kesehatan bagi warga DIY menuju total coverage		Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,33	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Pelayanan Kesehatan	Persentase pelayann kesehatan primer, kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan	48,08
				Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,34	Pembangunan Manusia dan Pengentasan		Program Kesehatan Masyarakat	Persentase Balita Sehat

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
						Kemiskinan Berkelanjutan			
				Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,35	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan		Persentase Desa Sehat Mandiri	52,83
	Tingginya angka penyakit degenerative	a. Pemerataan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan bagi wilayah tertinggal		Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,36	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program pencegahan dan pengendalian penyakit	Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	58,92
		b. Fasilitasi posyandu lansia		Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,36	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Pengembangan Sumberdaya Kesehatan	Persentase Fasykes Kesehatan memenuhi standar sarpras, perizinas, SDMK, dan pembiayaan	62,32
				Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	IPM : 81,36	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan		Persentase kefarmasian, perbekes, dan makanan sesuai standar	76,79
32	Kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi	Pemberdayaan terhadap perempuan korban kekerasan	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	•Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): 70.12	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program perlindungan perempuan dan anak	persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	76%

RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Kekerasan terhadap anak juga masih sering terjadi	Peningkatan informasi, edukasi dan konsultasi kepada semua pihak agar menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak		Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	•Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): 70.13	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program perlindungan perempuan dan anak	persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	76%
	Pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan tentang perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan jumlah desa prima dan desa/dusun/kawasan ramah anak		Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	•Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): 70.13	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program perlindungan perempuan dan anak	persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	76%
				Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program Pemda (Lintas Sektor) Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)	Jumlah desa mandiri budaya (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima)	10
33	Upaya penegakan perda tentang PMKS masih belum sesuai dengan harapan	Penegakan perda tentang penanganan Gepeng dan perda perlindungan anak jalanan	SOSIAL	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	•% Angka Kemiskinan : 9,11	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program perlindungan dan rehabilitasi gelandangan, pengemis, pemulung, dan eks. Psikotik	Persentase Kemandirian Warga Binaan Secara Sosial Ekonomi (Binakarya)	20%
								Persentase perubahan sosial warga binaan balai dan mampu hidup mandiri dan atau kembali ke keluarga	14,6%

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Pemberdayaan warga miskin belum sepenuhnya berhasil	Pemberdayaan keluarga miskin menuju keluarga sejahtera		Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	•% Angka Kemiskinan : 9,11	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Penanganan fakir miskin	Persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga pendapatan dan asetnya meningkat	1,01
	Korban penyalahgunaan napza terus bertambah	Pencegahan terhadap napza	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	•Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): 70.13	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT Kegiatan: Pengelolaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Skor /Nilai Index Ketahanan Nasional Gatra Sosial Politik	3,32
	Fasilitasi penyandang disabilitas masih kurang	Fasilitasi penyandang disabilitas	SOSIAL	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	•% Angka Kemiskinan : 9,11	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan Hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Orang Dengan HIV AIDS dan Korban	5,49

RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
								Tindak Kekerasan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh bimbingan keterampilan, mandiri dan mampu berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat	
34	Jumlah penduduk usia kerja (PUK) penganggur masih cukup tinggi	Peningkatan skill dan kompetensi calon tenaga kerja	TENAGA KERJA	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil	5,71
	Terbatasnya kemampuan BLK	Fasilitasi bagi calon tenaga kerja untuk mendapatkan kesempatan kerja (bursa tenaga kerja)		Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program peningkatan, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi	Jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigran	10,79
	Masih adanya pelanggaran dalam peraturan tenaga kerja	Fasilitasi perlindungan tenaga kerja untuk melindungi hak-hak pekerja		Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1488 perusahaan
	Penciptaan lapangan dalam kewirausahaan kerja masih rendah	Peningkatan kewirausahaan khusus bagi pencari tenaga kerja		Meningkatnya Aktivitas Perekonomian	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program peningkatan kualitas dan	Persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil	5,71

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
				yang Berkelanjutan			produktivitas tenaga kerja		
	Peluang industri kreatif (start up)	Pelatihan kewirausahaan industri kreatif		Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil	5,71
	Peluang kerja di LN	Fasilitasi naker untuk kerja di LN		Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Program peningkatan, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi	Jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigran	10,79
35	Perintah UUK, di Bidang Budaya masih perlu dilanjutkan	Peningkatan sosialisasi UUK dibidang Kebudayaan	KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	•% Capaian Program Urusan Keistimewaan: 82,61	Pendukung Prioritas Pembangunan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN URUSAN KEBUDAYAAN	realisasi jumlah kerjasama dengan mitra budaya	25 kerjasama
								ealisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	99,08%
	Belum ada turunan regulasi terkait tentang Budaya	Menggali Nilai-nilai Orisinilitas Budaya DIY		Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	•% peningkatan jumlah budaya benda tak benda yang diapresiasi: 11,72	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	PROGRAM SEJARAH, BAHASA, SASTRA DAN PERMUSEUMAN	Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan	9 karya
							Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi	12 sumber sejarah	
							Rasio Kunjungan Museum dibanding kunjungan ke ODTW lain	0,6 rasio	

RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Masih minimnya Pemahaman masyarakat tentang UUK dibidang kebudayaan	Melakukan Penguatan Nilai-nilai Budaya Utama dlm seluruh aspek Kehidupan masyarakat DIY		Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	•% peningkatan jumlah budaya benda tak benda yang diapresiasi: 11,72	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	PROGRAM PELESTARIAN TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA	Jumlah Desa Mandiri Budaya Tahun n	10 Desa
								Jumlah Kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	350 kelompok
								Persentase lembaga adat dan pelestari budaya yang maju	1,93%
	Kebudayaan masih dipahami dalam terminologi sempit	Peningkatan Fasilitas perekayasaan Budaya		Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	•% peningkatan jumlah budaya benda tak benda yang diapresiasi: 11,72	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA	persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing	0,1%
	Masih minimnya Pemahaman masyarakat tentang UUK dibidang kebudayaan	Melakukan Penguatan Nilai-nilai Budaya Utama dlm seluruh aspek Kehidupan masyarakat DIY	KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	•% peningkatan jumlah budaya benda tak benda yang diapresiasi: 11,72	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	PROGRAM SEJARAH, BAHASA, SASTRA DAN PERMUSEUMAN	Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan	9 karya
								Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi	12 sumber sejarah
								Rasio Kunjungan Museum dibanding kunjungan ke ODTW lain	0,6 rasio
	Kebudayaan masih dipahami dalam terminologi sempit	Peningkatan Fasilitas perekayasaan Budaya		Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	•% peningkatan jumlah budaya benda tak benda	Pembangunan Manusia dan Pengentasan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN	persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan	0,1%

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
					yang diapresiasi: 11,72	Kemiskinan Berkelanjutan	POTENSI BUDAYA	budaya daerah yang berdaya saing	
	Budaya, sebagai "Roh keistimewaan"	Peningkatan fasilitas Maintenance dan Riset Budaya		Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	•% peningkatan jumlah budaya benda tak benda yang diapresiasi: 11,73	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGA N KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA	persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing	0,1%
	Melahirkan "Maskot Budaya" Yogyakarta	a. "Perumusan nilai-nilai Budaya", sebagai Roh Keistimewaan. b. Merumuskan identitas Budaya yang khas Yogyakarta		Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	•% peningkatan jumlah budaya benda tak benda yang diapresiasi: 11,74	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	PROGRAM PELESTARIAN ADAT SENI DAN BUDAYA PROGRAM SEJARAH, BAHASA, SASTRA DAN PERMUSEUMA N	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi	84% 12 sumber sejarah
36	Masih lemahnya Pemahaman regulasi tentang Kependudukan dan KB	Peningkatan Fasilitas untuk percepatan Implementasi UU No.52 tahun 2009	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	•Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): 70.13	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	PROGRAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga	1,17
				Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	•Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): 70.13	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	0,0013

RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Masih rendahnya motivasi dan skill tenaga Lapangan yg terkait Pengendalian Penduduk dan KB	Peningkatan skill dan ketrampilan tenaga lapangan Kependudukan					merupakan urusan pusat (BKKBN)		
	Masih tingginya angka kelahiran dan Lajunya Pertumbuhan Penduduk	Pengendalian dan penurunan lajunya pertumbuhan Penduduk		Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	•Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): 70.13	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,17
	Masih rendahnya minat Usia subur untuk memasang alat Kontrasepsi	Mendorong Penurunan angka kelahiran total (TFR) dan Peningkatan Pemakaian Kontrasepsi (CPR)		Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	•Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): 70.13	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,17
	Masih minimnya Pemahaman tentang Reproduksi, dikalangan Usia Subur dan remaja	a. Diperlukan langkah-langkah efektif untuk Menurunkan Jumlah Kehamilan yang tidak diinginkan (WUS)		Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	•Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): 70.13	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,17
		. Perlu tindakan konkrit untuk menurunkan jumlah kelahiran pada remaja (ASFR, 15-19 tahun)		Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	•Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): 70.13	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,17
37	Ada Kesenjangan Pemahaman tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Transmigrasi	Diperlukan Re-aktualisasi dan re-konseptualisasi hal-hal terkait dengan Program Transmigrasi	TRANSMIGRASI	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, PERLUASAN KERJA DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja, dan Penempatan Transmigrasi	2520 orang

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
37	Calon Peserta Transmigrasi, kebanyakan belum siap utk diterjunkan kelokasi Transmigrasi	Diperlukan Penyiapan dan Pengayaan Calon Peserta Transmigrasi secara Prima	TRANSMIGRASI	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, PERLUASAN KERJA DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja, dan Penempatan Transmigrasi	2521 orang
	Ada keterputusan komunikasi antara masyarakat setempat dengan Pemerintah, selaku stakeholder	Perlu peningkatan sosialisasi secara transparan dan Akuntabel		Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, PERLUASAN KERJA DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja, dan Penempatan Transmigrasi	2522 orang
	Menurunnya animo masyarakat untuk ikut program transmigrasi, baik secara mandiri atau langsung dikelola Pemerintah	a. Diperlukan langkah-langkah public hearing, dengan masyarakat setempat, sebelum penempatan Calon Transmigran, agar tercipta harmoni antar warga		Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, PERLUASAN KERJA DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja, dan Penempatan Transmigrasi	2523 orang
		b. Peningkatan motivasi dan stimulan para Calon transmigrasi, agar memiliki kemauan dan tekad untuk bertransmigrasi		Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, PERLUASAN KERJA DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja, dan Penempatan Transmigrasi	2524 orang
	Selalu terjadi kesenjangan dan kecemburuan sosial antara Penduduk pendatang dan penduduk	Diperlukan langkah-langkah strategis untuk meminimalisir unsur kesenjangan yang muncul		Meningkatnya Aktivitas Perekonomian	Pertumbuhan Ekonomi: 5,29	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, PERLUASAN	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja, dan	2525 orang

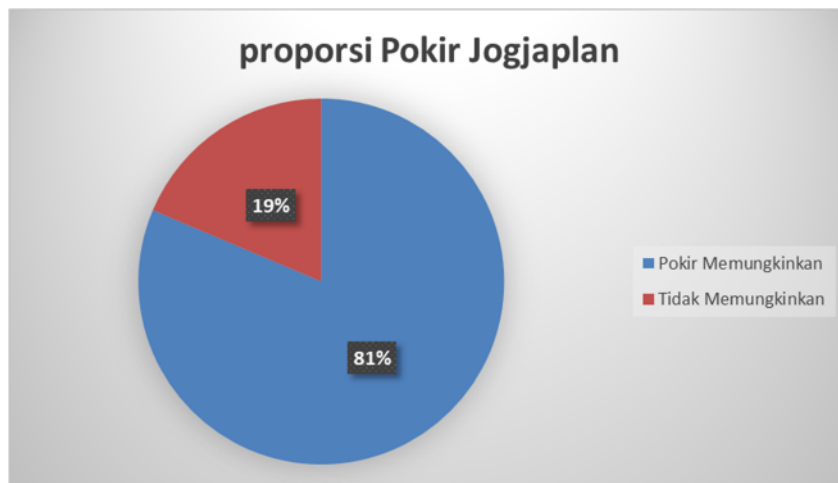
RKPD DIY 2020

NO	IDENTIFIKASI PERSOALAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	URUSAN	SASARAN	TARGET 2020	PRIORITAS 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		antara warga pendatang dan setempat		yang Berkelanjutan			KERJA DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN	Penempatan Transmigrasi	

4.5.5 Penelaahan Usulan Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran melalui E-planning/ Jogjaplan (E-Pokir)

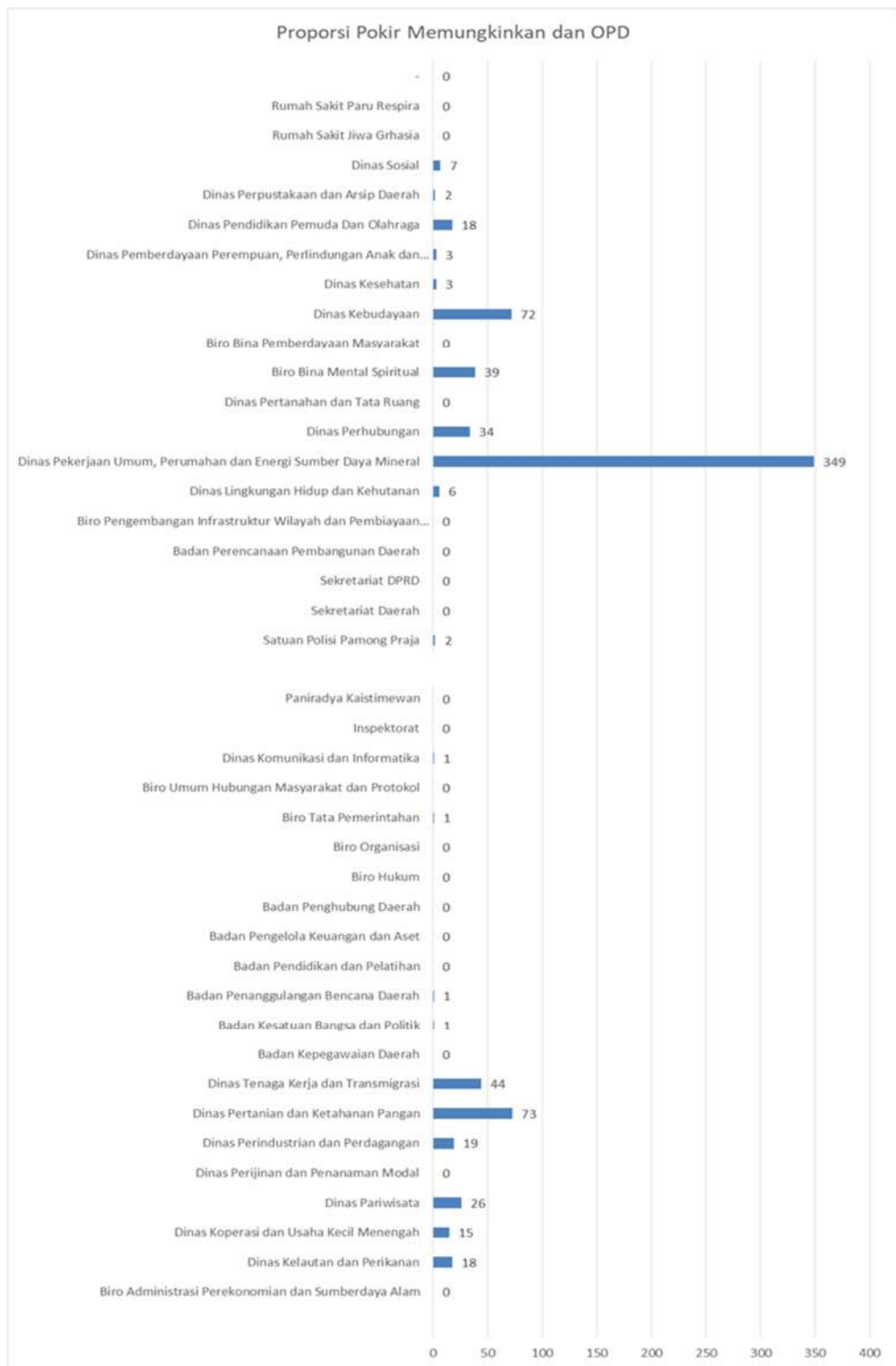
DPRD DIY telah menindaklanjuti Surat Gubernur DIY nomor 050/ 0443 tanggal 15 Januari 2019 dengan melakukan input pokok-pokok pikiran DPRD mulai 16 – 31 Januari 2019 melalui aplikasi e-planning Jogjaplan (<http://jogjaplan.com>), dimana setiap Pimpinan DPRD dan anggota DPRD DIY pada seluruh fraksi memiliki hak akses yang sama (berupa hak user-password, manual tata cara entri dan pendampingan teknis). Adapun rekapitulasi Penelaahan Usulan Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran melalui E-planning/ Jogjaplan (E-Pokir) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dapat disampaikan ihtisar sebagai berikut,

1. Jumlah Pokok Pikiran yang dientri 902 usulan kegiatan, 734 terverifikasi memungkinkan, dan 168 terverifikasi tidak memungkinkan yang dapat divisualisasikan sebagai berikut,



Gambar 4-2 Diagram Proporsi E-Pokir

2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 3 terbanyak yang memiliki usulan pokok-pokok pikiran memungkinkan antara lain, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM (DPUESDM; urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) sebanyak 349 usulan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (urusan Pangan, dan Urusan Pertanian) 73 usulan dan Dinas Kebudayaan (urusan Kebudayaan). Proporsi usulan yang memungkinkan berdasarkan OPD pengampu dapat divisualisasikan sebagai berikut,



Gambar 4-3 Grafik Proporsi Pokir Memungkinkan dan OPD

BAB 5 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Yogyakarta 2020

Tema RKPD Kota Yogyakarta tahun 2020 adalah Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk pengurangan kemiskinan dan ketimpangan wilayah melalui pembangunan berkelanjutan. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan sebagai berikut,

5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

IPM Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan masuk kategori tinggi bila diukur berdasar skala internasional. Kebijakan pembangunan sosial, karakteristik wilayah dan kondisi sosial ekonomi serta demografi penduduk merupakan faktor yang turut menjadi penentu keberhasilan capaian pembangunan manusia. Pada tahun 2020, nilai IPM Kota Yogyakarta ditargetkan sebesar 86,56.

5.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta diproyeksikan tumbuh sebesar 5,31%.⁵ Pada tahun 2019, Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta sebesar 5,68 % berdasarkan prediksi menggunakan Model Brown dengan batas bawah sebesar 5,14 % dan batas atas sebesar 6,23 %. Kontribusi pendapatan Kota Yogyakarta terhadap pendapatan DIY relatif besar. Tahun 2019, Kota Yogyakarta diprediksi menyumbang sekitar 26%, kontribusi ini merupakan kedua terbesar setelah Kabupaten Sleman yang diprediksi berkontribusi lebih dari 30 %.⁶ Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,20% pada tahun 2020 (RPJMD Kota Yogyakarta 2012-2017). Peningkatan kinerja ekonomi selama periode 2017 – 2022 antara lain didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana berupa proyek-proyek besar antara lain terkait Kawasan Malioboro, dan Kawasan Kota Baru (2018, KEKR BI Yogyakarta, 2018). Pertumbuhan ekonomi rata-rata sepanjang tahun 2017 – 2022 adalah 5,51% per tahun.

⁵ Analisis Makro Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2019, Yogyakarta: Bappeda DIY.

⁶ Analisis Makro Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2019, Yogyakarta: Bappeda DIY.

5.1.3 Kemiskinan

Angka kemiskinan Kota Yogyakarta tahun 2020 (RPJMD DIY 2017-2022) ditargetkan turun menjadi 6,15%. Adapun proyeksi RPJMD Kota Yogyakarta sebesar 7,34% (2020). Data BPS tahun 2018 menyatakan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta sebesar 6,91% dimana sebelumnya angka kemiskinan diproyeksikan sebesar 7,27% (2017) dengan penurunan sebesar 0,36%. Rendahnya penurunan tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta disebabkan telah mencapai dasar (*hard core poverty*), dimana sudah semakin sedikit penduduk miskin yang bisa dilakukan intervensi. Selain itu, penduduk miskin yang akan disasar pun sudah semakin sulit karena telah mencapai dasarnya. Penduduk miskin yang berada di level menengah masih bisa dilakukan pemberdayaan. Seperti program-program pelatihan untuk meningkatkan produktivitas, pendidikan, kewirausahaan, dan sebagainya. Tetapi bagi penduduk miskin yang berada di level paling bawah, tidak mudah untuk membuat mereka menjadi produktif. Hal yang bisa dilakukan adalah memberikan bantuan dasar yang bersifat karitatif misalnya kelompok manula, penyandang penyakit kronis, dan sebagainya.

5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bantul 2020

Tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk pengurangan kemiskinan dan ketimpangan wilayah melalui pembangunan berkelanjutan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut,

5.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2020, nilai IPM Kabupaten Bantul ditargetkan sebesar 80,56. Dalam RPJMD Kabupaten Bantul 2016-2021, IPM ditargetkan sebesar 78,21 pada tahun 2020. Capaian nilai IPM Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir terus meningkat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bantul berada di atas IPM DIY. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta, maka nilai IPM Kabupaten Bantul berada di atas Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo tetapi berada di bawah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Bantul dapat dilakukan dengan program/kegiatan yang

1. mendukung peningkatan pengeluaran riil perkapita misalnya berupa
 - a. Peningkatan akses dan peluang usaha masyarakat.
 - b. Pengurangan beban hidup warga kurang mampu.
 - c. Validasi data warga kurang mampu.

2. mendukung perluasan akses dan meningkatkan mutu pendidikan dasar termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin, pemenuhan pemenuhan standar nasional pendidikan serta mendorong peran serta keluarga dalam mendidik anak sejak dini.

5.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Bantul diproyeksikan tumbuh sebesar 5,27% pada tahun 2020.⁷ Adapun RPJMD Kabupaten Bantul 2016-2021 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9%. Pertumbuhan ekonomi Bantul didukung dengan pembangunan beberapa infrastruktur strategis berupa Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Pansela dan Outer Ringroad dan akses menuju Bandara Udara Yogyakarta International Airport (YIA), Pembangunan Kawasan Industri, Penyediaan Air Baku, Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Jaringan Distribusi Utama, Pembangunan SPAM Regional, Pengembangan Pengelolaan Sampah dan Pembangunan Stasiun Interchange. Proyek-proyek tersebut menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi kabupaten Bantul sehingga mencapai rata-rata 5,49% per tahun selama periode 2017 – 2022.

Selain itu, Bantul dapat mendorong pertumbuhan dengan

1. Peningkatan daya saing produk daerah.
2. Peningkatan kualitas produktivitas masyarakat
3. Peningkatan daya tarik dan pelayanan wisata.
4. Akselerasi pengembangan industri kreatif.
5. Akselerasi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
6. Pengembangan peternakan berbasis industri.
7. Peningkatan produksi perikanan.
8. Pengembangan investasi yang menghubungkan industri dengan kluster pendidikan. Industri pendukung tumbuhnya institusi pendidikan di Bantul, terutama di Bantul bagian Utara, yaitu di kluster Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Mercu Buana, Institut Seni Indonesia, dan di Kecamatan Pajangan untuk kluster perguruan tinggi lain untuk mendukung peningkatan daya saing Kabupaten Bantul sebagai pusat pendidikan.

5.2.3 Kemiskinan

Angka Kemiskinan di Kabupaten Bantul ditargetkan sebesar 9,59 pada tahun 2020 (RPJMD DIY 2017-2022). Kabupaten Bantul telah membuat perhitungan

⁷ Analisis Makro Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2019, Yogyakarta: Bappeda DIY.

dan perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk 5 tahun mendatang. Merujuk pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul 2016-2022, tingkat kemiskinan pada tahun 2018 sebesar 12,13%, Tahun 2019 sebesar 10,86%, tahun 2020 sebesar 9,59%, tahun 2021 sebesar 8,32 .

Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan penduduk di Kabupaten Bantul pada tahun 2016 sebesar 14.55%. Kemudian pada tahun 2017 sebesar 14.07%. Terjadi penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0.48 poin. Hasil ini menggambarkan bahwa persentase penduduk miskin di wilayah ini berada di peringkat ketiga setelah Kulon Progo dan Gunungkidul. Tingkat capaian penanggulangan kemiskinan ini masih bisa terus ditingkatkan. Peluang untuk melakukannya pun terbuka lebar sebab masih banyak masyarakat miskin yang dapat disasar dengan beragam intervensi.

Apabila ingin mencapai target penduduk miskin DIY sebesar 7% pada tahun 2022, total penurunan kemiskinan Kabupaten Bantul yang harus dicapai dalam 5 tahun sebesar 5.83%. Perincian laju penurunan kemiskinan setiap tahunnya adalah 1.13% (tahun 2018), 1.44% (tahun 2019), 1.23% (tahun 2020), 1.04% (tahun 2021), dan 0.99% (tahun 2022).

Upaya kebijakan yang dapat dilakukan oleh Kabupaten Bantul di antaranya terkait,

1. Optimalisasi program pengentasan kemiskinan dengan pengembangan dan peningkatan kualitas produk unggulan setempat
2. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan melalui pembentukan lembaga TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) sampai ditingkat pedukuhan, program pemberdayaan masyarakat, pengurangan beban KK Miskin, serta validasi data keluarga miskin
3. Implementasi Makaryo Mbangun Deso yang menjadi falsafah pembangunan desa di Bantul

5.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kulon Progo 2020

Tema RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 adalah Mempercepat Pembangunan Infrastruktur pendukung PSN Serta meningkatkan kualitas SDM dan Daya Saing Produk lokal dalam rangka revolusi industri 4.0 untuk penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan antara lain,

5.3.1 Indeks Pembangunan Manusia

IPM Kabupaten Kulon Progo senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan berada di atas level IPM Nasional. Tetapi apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, IPM Kabupaten Kulon Progo masih relatif rendah. Pada tahun 2020, nilai IPM di Kabupaten Kulon Progo ditargetkan sebesar 74,32.

Berdasarkan Analisis Makro Ekonomi 2019 (Bappeda DIY, 2019) untuk mempertahankan/ meningkatkan rerata IPM DIY di atas 79 berdasar tiga indikator acuan yakni tingkat harapan hidup, tingkat pengetahuan, dan pendapatan riil perkapita berdasarkan paritas daya beli, yang harus diintervensi oleh pemerintah DIY utamanya dari sisi pengeluaran riil per kapita dan akses pendidikan serta intervensi lebih difokuskan pada Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo.

Dalam rangka meningkatkan IPM, Kabupaten Kulon Progo dapat melaksanakan intervensi kebijakan sebagai berikut:

4. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun dan mengimplementasikan pendidikan karakter dengan pemenuhan sarana prasarana secara bertahap;
5. Meningkatkan upaya promotif, preventif dan kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat ;
6. Peningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan;

5.3.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo diproyeksikan tumbuh antara 3.36% - 7.17% pada tahun 2020, lebih rendah dari proyeksi tahun 2019 sebesar 9,11% - 10,23%.⁸ Proyeksi pertumbuhan ekonomi (Laju Pertumbuhan Ekonomi/LPE) yang merupakan perkembangan PDRB riil di Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo tumbuh paling cepat pada tahun 2018 dengan pertumbuhan sebesar 7,12%.⁹ Proyeksi Pertumbuhan ekonomi Kulonprogo mencapai tingkat paling tinggi dibandingkan ke empat daerah lainnya mengingat besaran nilai investasi proyek fisik terakumulasi paling tinggi di Kulonprogo yang berupa Pembangunan Bandara Udara Yogyakarta International Airport (YIA), Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Pansela dan akses menuju YIA, Pembangunan SPAM Regional, Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Jaringan Distribusi Utama, Pembangunan Stasiun Interchange,

⁸ Analisis Makro Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2019, Yogyakarta: Bappeda DIY.

⁹ Analisis Makro Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2018, Yogyakarta: Bappeda DIY.

Pembangunan Terminal Barang dan Pembangunan Jalan Bebas Hambatan. Proyek-proyek tersebut menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi kabupaten Kulonprogo sehingga mencapai rata-rata 6,06% per tahun selama periode 2017 – 2022. Dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2016-2022, target pertumbuhan ekonomi merupakan indikator tujuan dengan target 4,76 (2016) - 5,32 (2021), dimana pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,15%. Dari data ditemukan bahwa sektor konstruksi menyumbang besarnya pertumbuhan ekonomi ini. Hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah mengupayakan agar angka pertumbuhan yang besar ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. Dengan demikian ketimpangan antar sektor ekonomi maupun ketimpangan pendapatan masyarakat dapat diantisipasi.¹⁰

5.3.3 Kemiskinan

Angka Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo diproyeksikan sebesar 12,94% pada tahun 2020 turun dari 14,98% (2019; RPJMD DIY 2018). Dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2016-2021 target angka kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 16%. Target kemiskinan Kabupaten Kulon Progo lebih tinggi dari target yang ditetapkan DIY maupun Nasional, hal tersebut disebabkan karena tingkat kemiskinan di Kulon Progo sangat tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan DIY maupun Nasional. Apabila dicermati, tren penurunan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo per tahun sangatlah kecil walaupun telah dilakukan intervensi yang melibatkan bantuan baik dari Pemerintah Pusat, Pemda DIY, maupun pihak swasta.

Alasan mengapa tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2016 selalu berada di atas DIY antara lain disebabkan oleh kondisi alam yang tidak begitu mendukung dan kegiatan investasi yang masih relatif rendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Namun dalam rangka mendukung penurunan angka kemiskinan DIY menjadi 7% pada tahun 2022, diperlukan penyesuaian target kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota DIY, termasuk Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan hasil perhitungan angka kemiskinan yang dapat dijadikan proyeksi dalam rangka mendukung angka kemiskinan DIY menjadi 7% pada tahun 2022, maka untuk tahun 2018-2022 target kemiskinan yang harus dicapai Kabupaten Kulon Progo adalah 17,03% pada tahun 2018, 14,98% pada tahun 2019, 12,94% pada tahun 2020, 10,89% pada tahun 2021, dan 8,85% pada tahun 2022. Berdasarkan perhitungan tersebut maka rerata laju penurunan kemiskinan tiap tahunnya sejak tahun 2018 adalah sebesar 2,04%

¹⁰ Analisis Makro Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2019, Yogyakarta: Bappeda DIY.

Apabila melihat arah pembangunan di Kabupaten Kulon Progo dimana terdapat beberapa mega proyek seperti pembangunan bandara baru internasional, Pelabuhan Tanjung Adikarta, dan pabrik pengolahan pasir besi yang masuk dalam agenda pembangunan nasional dan kini sudah mulai berjalan, target angka kemiskinan tersebut diharapkan dapat tercapai. Selain itu, perlu adanya peningkatan skill (ketrampilan), peningkatan kualitas pendidikan yang memenuhi kualifikasi pasar kerja, perluasan lapangan pekerjaan yang melibatkan masyarakat sekitar, serta evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan untuk melihat efektivitas program. Program penanggulangan kemiskinan yang tidak tepat sasaran justru akan memperparah kemiskinan dengan meningkatnya disparitas pendapatan. Strategi dalam rangka penurunan kemiskinan Kabupaten Kulon Progo dapat dilaksanakan dengan,

1. Peningkatan pemberdayaan usaha industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM dengan semangat Bela Beli Kulon Progo;
2. Peningkatan kontinuitas, kuantitas dan kualitas produk pertanian dan perikanan;
3. Pengembangan pariwisata berbasis kawasan dan masyarakat ;
4. Peningkatan fasilitasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif ;
5. Peningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan;
6. Peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan masyarakat ;
7. Peningkatan upaya perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pengarusutamaan gender.

5.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul 2020

Tema RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 adalah Menguatkan pengembangan industri pariwisata dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut,

5.4.1 Indeks Pembangunan Manusia

Untuk Kabupaten Gunungkidul, dari faktor pembentuk IPM, pendidikan masih merupakan pekerjaan rumah terbesar karena berdasarkan angka IPM yang ada, diantara kabupaten/kota yang ada di DIY, pendidikan di Kabupaten Gunungkidul masih menempati urutan terbawah selain dari aspek pendapatan

riil per kapita. Oleh karena itu, fokus peningkatan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Gunungkidul harus menjadi arah tujuan yang mesti dilakukan disamping upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui jalur pendidikan informal. Pada tahun 2020, nilai IPM di Kabupaten Gunungkidul ditargetkan sebesar 70,50 atau paling rendah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di DIY tetapi sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018.

IPM Kabupaten Gunungkidul (2018) berada di bawah Provinsi, perlu dilakukan intervensi pada sisi pengeluaran riil per kapita serta akses pendidikan, dengan pertimbangan bahwa untuk aspek angka harapan hidup dan harapan lama sekolah rerata di DIY sudah relatif baik. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diharapkan dapat memberikan perhatian pada kecamatan-kecamatan dengan rerata IPM rendah antara lain, Tanjungsari, Tepus, Paliyan, Purwosari, Ngawen, Panggang, Nglipar, Girisubo, Saptosari dan Gedangsari¹¹

5.4.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul diproyeksikan sebesar 5,2%.¹² Pertumbuhan ini didorong antara lain oleh pelaksanaan proyek-proyek besar infrastruktur yaitu Pembangunan Jalan dan Jembatan berupa Pembangunan Jalur Pansela, Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Jaringan Distribusi Utama dan Pembangunan SPAM Regional. Pembangunan di berbagai sektor terutama infrastruktur diharapkan dapat mendorong pertumbuhan Kabupaten Gunungkidul selama periode 2017 – 2022.

5.4.3 Kemiskinan

Pada tahun 2018 tingkat kemiskinan D.I. Yogyakarta masih sebesar 11,8% (BPS DIY, 2018). Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan DIY diharuskan untuk dapat diturunkan menjadi 7%. Maka untuk mencapai keberhasilan target sasaran provinsi yang turun menjadi 7% di tahun 2022 harus disesuaikan dengan jumlah masyarakat miskin yang diintervensi pada tiap kabupaten/kota. Hal ini agar dapat besinergi dan berkesinambungan antara penurunan kabupaten /kota dan penurunan provinsi.

Dalam rangka mendukung sasaran provinsi tersebut, Kabupaten Gunungkidul diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2020

¹¹ Indeks Pembangunan Manusia Per Kecamatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013, BPS DIY dan BAPPEDA DIY dalam , Kemiskinan dan Ketimpangan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat (SEBERMAS) – Bappeda DIY.

¹² Analisis Makro Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2019, Yogyakarta: Bappeda DIY.

menjadi 12,56. Adapun angka kemiskinan RPJMD Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2020 adalah 16,50. Perlu dilakukan sinergi perhitungan provinsi dan Kabupaten Gunungkidul terkait angka kemiskinan. Jumlah target kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018-2022 yang tertuang di dalam RPJMD Gunungkidul adalah sebagai berikut: 18,31% (tahun 2018), 17,40% (tahun 2019), 16,50% (tahun 2020), 15,60% (tahun 2021), dengan laju sasaran penurunan kemiskinan tiap tahunnya sebesar 0,9%.

Kecamatan Saptosari, Tanjungsari, dan Gedangsari tiga kecamatan dengan status kesejahteraan terrendah Kabupaten Gunungkidul (tahun 2016 berdasar RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2016-2021) perlu mendapat intervensi yang dalam hal ini melalui program-program Pemerintah Kabupaten Gunungkidul antara lain :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia,
2. Program Penanggulangan Kemiskinan
3. Program Pengurangan Pengangguran

5.5 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sleman 2020

Tema RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2020 ialah Memantapkan Potensi ekonomi lokal daerah menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Sleman yang berbudaya. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan antara lain,

5.5.1 Indeks Pembangunan Manusia

Dari tahun ke tahun, nilai IPM Kabupaten Sleman terus mengalami kenaikan, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sleman menempati peringkat kedua tertinggi di DIY setelah Kota Yogyakarta. Nilai IPM Kabupaten Sleman termasuk dalam kategori sangat tinggi (IPM>80). Pada tahun 2020, nilai IPM Kabupaten Sleman ditargetkan sebesar 83,12.

5.5.2 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman diproyeksikan sebesar 5,81% pada tahun 2020.¹³ Proyek-proyek fisik besar dapat memberikan kontribusi besar pada pencapaian kinerja ekonomi tersebut. Proyek-proyek tersebut adalah Pembangunan Jalan dan Jembatan berupa Pembangunan JORR, Pembangunan Underpass Gejayan, Pengembangan SPAM Regional, Pembangunan Stasiun Interchange, Pembangunan Jaringan Air Bersih dan

¹³ Analisis Makro Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2019, Yogyakarta: Bappeda DIY.

Jaringan Distribusi Utama dan Pengembangan Jalan Bebas Hambatan. Pertumbuhan ekonomi rata-rata selama tahun 2017 – 2022 adalah 5,75%.

5.5.3 Kemiskinan

Kabupaten Sleman memiliki jumlah penduduk tertinggi apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya di DIY sehingga hal tersebut menjadi tantangan maupun peluang tersendiri untuk menurunkan angka kemiskinan. Selama kurun waktu 6 tahun yaitu dari tahun 2012-2017 angka kemiskinan Kabupaten Sleman menduduki peringkat kedua terbaik setelah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2017 tingkat kemiskinan Kabupaten Sleman sebesar 8,13 % telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD-RKPD Kabupaten Sleman yaitu sebesar 10,02%.

Cukup baiknya prestasi yang telah dilakukan Kabupaten Sleman terkait penurunan angka kemiskinan perlu ditingkatkan kembali, bahkan memerlukan daya ungkit yang lebih besar. Tingkat kemiskinan Sleman pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 6,36%, mengingat target angka kemiskinan yang dimuat dalam RPJMD DIY tahun 2017-2022 yaitu sebesar 7% pada akhir periode RPJMD (tahun 2022). Upaya kebijakan yang dapat dilakukan antara lain dengan

4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
5. Mengendalikan pertumbuhan penduduk
6. Memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meningkatkan pendidikannya
7. Meningkatkan pengelolaan kawasan Permukiman kumuh
8. Meningkatkan penanganan bencana melalui pemberdayaan masyarakat,

5.6 Pendekatan Fokus Tematik

Pemda DIY merencanakan program kegiatan tematik yang dapat diselaraskan dengan perencanaan kabupaten/kota sebagai berikut,

5.6.1 Program/ Kegiatan Tematik Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan

Program/kegiatan tematik untuk Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan dapat disajikan sebagai berikut,

No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Pendidikan	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah	Penyaluran Kartu Cerdas Jenjang Sekolah Menengah	13.400 siswa
2	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Kesehatan	Program Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	14. Bantuan Khusus Keuangan Jamban Sehat Untuk Masyarakat Miskin di DIY	Kota Yogyakarta (20 Unit); Bantul (350 unit); Gunungkidul (200 unit); Kulon Progo (374 unit); Sleman (200 unit)
3	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Kesehatan	Program Pelayanan Pada Blud Bapel Jamkessos	Pelayanan Jaminan Kesehatan	02. Pelayanan Pembiayaan Klaim Jamkesta sesuai anggaran	100%
4	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Tersedianya bahan bangunan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum pada kelompok SPAMDES	15 kelompok
5	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Program Penyelenggaraan Perumahan	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Gunungkidul	515 unit
						Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Kulonprogo	583 unit
6	2. Pembangunan	1.1.2. Meningkatnya Derajat	Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang	10. Perlindungan Anak Terlantar melalui LKSA	245 org

N o	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Ekonomi Masyarakat			Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial	12. Perlindungan Bagi Anak Disabilitas melalui LKS	50 org
7	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial serta Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	1. Assessment dan pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi gelandangan, Pengemis, Pemulung di Camp Assessment	160 org
8	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin	01. Pemberian bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia	1000 orang
						02. Bantuan permakanan lanjut usia terlantar	100 orang
						03. Fasilitasi Lanjut Usia melalui Home Care	700 orang
						08. Bedah Kamar Lansia	50 orang
						10. Bimtap KPM Penerima PKH	10 lokasi
9	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Sosial	Program Penanganan Fakir Miskin	Pembinaan Usaha dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH	2. Pendampingan dan koordinasi UEP PKH	5 kab/kota
						3. UEP PKH Graduasi melalui BKK	5 kab/kota (825 org)
						6. KUBE Pengembangan Kabupaten Gunung Kidul	20 KUBE
						7. KUBE Pengembangan Kabupaten Kulon Progo	20 KUBE
10	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Sosial	Program Perlindungan Dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai	Rehabilitasi mental, sosial, ketrampilan dan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas serta jaminan sosial wredha disabilitas pada BRTPD	185 orang
11	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Sosial	Program Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Perempuan Penyandang Masalah Sosial	Pelayanan Sosial bagi Perempuan Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	Perlindungan, Rehabilitasi Sosial dan Ketrampilan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (Wanita Yang Berpotensi Menjadi Wanita Tuna Susila) di Balai PRSW	70 orang

No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Sosial	Program Perlindungan Dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung Dan Eks Psikotik	Pelayanan Sosial bagi Gelandangan, Pemulung, Pengemis dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai	1. Pelayanan sosial bagi gelandangan, Pemulung dan pengemis Warga Binaan Balai 2. Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Distabilitas Mental Warga Binaan Balai	50 orang 250 orang
13	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Sosial	Program Perlindungan Dan Rehabilitasi Remaja Penyandang Masalah Sosial	Pelayanan Sosial bagi Remaja Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi 40 Anak Terlantar dan 40 Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai PRSR	80 orang
14	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Sosial	Program Perlindungan Dan Rehabilitasi Anak Penyandang Masalah Sosial	Pelayanan Sosial bagi Anak Bermasalah Sosial Warga Binaan Balai	Perlindungan, pengasuhan Balita Terlantar Perlindungan, pengasuhan dan pengembangan Sosial Anak Terlantar Perlindungan, Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	25 orang 80 anak 35 anak
15	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Sosial	Program Perlindungan Lanjut Usia Terlantar	Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Warga Binaan Balai	Perlindungan, Pelayanan dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	230 orang
16	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pembinaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat	1. Pembinaan Desa Prima 2. Hibah Kelompok	100 Desa 15 Desa
17	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Pangan	Program Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	Penanganan Desa Rawan Pangan	Desa Mandiri Pangan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) Penumbuhan	Hibah 4 desa Pendampingan 4 desa 2 gapoktan
18	3. Aktivitas Perekonomian yang	1.1.4. Meningkatkan Perekonomi	Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan	3. Pembinaan Sumber Pencemar (Point Source)	3. 207 usaha/kegiatan

No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Berkelanjutan	an yang Berkelanjutan		Kerusakan Lingkungan	Kerusakan Lingkungan Hidup		
19	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	2. Pembinaan, pembentukan dan evaluasi kelompok pengelola sampah 3. Gerakan Bersih Pantai	25 Kelompok 2 lokasi
20	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup	2. Kampanye penyadaran Lingkungan Hidup dan Ketahanan	1 kali : 2 hari
21	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Tutupan Vegetasi Dan Konservasi Sumberdaya Alam	Konservasi Sumber Daya Alam	3. Pembinaan Masyarakat di sekitar Tahura Bunder	60 orang (2 angkatan)
22	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dokumen akta kelahiran bagi penduduk miskin/marginal Dokumen akta kematian bagi penduduk miskin/marginal Dokumen akta perkawinan bagi penduduk miskin/marginal	500 akta 200 akta 100 akta
23	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Pengelolaan Rekayasa Sosial Masyarakat	Pembinaan Gotong Royong Kelompok Masyarakat	02. Jumlah kelurahan implementasi model segoro amarto	8 kelurahan
24	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	1. Bakti sosial Pelayanan KB	10 lokasi
25	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Penumbuhan Dan Pengembangan Wirausaha Baru	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah peserta pelatihan penumbuhan desa Preneur tahap 2 di 6 Desa meningkat kemampuan manajemen usaha produksi dan pemasaran	180 UKM

N o	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
26	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Statistik	Program Pengembangan Statistik Daerah	Penyediaan Data Statistik	4. Dokumen Analisis Kemiskinan Kemiskinan DIY	1 dokumen Analisis Kemiskinan
27	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Perpustakaan	Program Pengembangan Dan Pembinaan Perpustakaan	Pemasyarakatan Perpustakaan dan Minat Baca	1. Bedah buku 2. Forum Perpustakaan	1. 27 Bedah buku 2. 2 kali
28	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kelautan Dan Perikanan	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Pelatihan Teknis Perikanan Tangkap	Jumlah nelayan baru produksi kelompok nelayan	15 orang 48 ton
29	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kelautan Dan Perikanan	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Tangkap	jumlah kelompok usaha bersama yang mengalami peningkatan pendapatan	2 kelompok
30	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kelautan Dan Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	Pengolahan Hasil Perikanan	jumlah orang yang memiliki kemampuan mengolah ikan yang berkualitas produksi perikanan olahan dari kelompok pemula	750 orang 0,5 ton
31	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kelautan Dan Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	Pemasaran Hasil Perikanan	jumlah masyarakat yang memahami manfaat makan ikan	2600 orang
32	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kelautan Dan Perikanan	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya	produksi perikanan budidaya dari kelompok pemula	40 ton
33	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertanian	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Budidaya Tanaman Pangan	sarana prasarana lahan air yang dapat berfungsi dengan baik	4 km
34	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertanian	Program Peningkatan Populasi Peternakan	Budidaya peternakan	penambahan populasi ternak ayam buras	1.000 ekor

No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Berkelanjutan					
35	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertanian	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	Bimtek pengolahan pasca panen	100 orang (20 ha)
36	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kehutanan	Program Perencanaan Dan Bina Usaha Kehutanan	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	2. Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kehutanan: - Penilaian Kinerja Ganis/Wasganis (30 org x 1 angkt) - Penyegaran Ganis/Wasganis (30 org x 1 angkt) - Bimtek penatausahaan hasil hutan (30 org x 4 angkt)	2. 180 orang
37	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Energi Dan Sumber Daya Mineral	Program Penyelenggaraan Energi Dan Ketenagalistrikan	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan	Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik	2000 RT 1 dokumen (5000 RT)
38	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Energi Dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Air Tanah	Pendayagunaan Air Tanah	Terlaksananya Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Bantul Terlaksananya Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Gunungkidul	1 unit dan 20 unit 1 unit dan 20 unit
39	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Perdagangan	Program Perlindungan Dan Pengamanan Konsumen	Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok	Fluktuasi harga bahan pokok menjelang HBKN dibawah batas toleransi Stabilnya harga bahan pokok yang dipantau	5% 5%
40	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Kebudayaan (Keistimewaan)	Program Adat, Seni, Tradisi Dan Lembaga Budaya	Pengembangan Ekonomi Perempuan	inisiasi 5 Desa Prima di Desa Budaya	5 Calon Desa Prima di Desa Mandiri Budaya

No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	n Kemiskinan						
41	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan Sosial-Budaya	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)	1. Dokumen Evaluasi CSR/TSLP 2. Dokumen Evaluasi penanggulangan Kemiskinan DIY 3. Dokumen Monev TPB DIY 4. Pengembangan Aplikasi Sistem informasi Penanggulangan Kemiskinan	1 dokumen Evaluasi CSR/TSLP tahun 2020 1 dokumen Evaluasi penanggulangan Kemiskinan DIY tahun 2020 1 dokumen Monev TPB DIY tahun 2020 1 aplikasi

5.6.2 Program/ Kegiatan Tematik Penurunan Ketimpangan Wilayah

Program/ kegiatan tematik untuk Penurunan Ketimpangan Wilayah dapat disajikan sebagai berikut,

No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Peningkatan Ruas Jalan Brosot-Toyan Peningkatan Ruas Jalan Pandanan-Candirejo	2 KM 2,4 KM
2	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan Akses Kawasan Industri Piyungan Pengadaan lahan untuk pembangunan jalan Jangkarana - Pantai Congot	1 Km 1.365 m2

No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi	Pengembangan Sarana dan Prasarana Drainase	Pembangunan Saluran Drainase di Kawasan Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul (lanjutan)	300 m
						Penyusunan DED Saluran Drainase di Jalan Jogokaryan	1 dokumen, 550 meter
4	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyusunan Masterplan dan DED pengembangan SPAM Banyusoco	1 dokumen
5	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Air Baku	Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Baku	Pembangunan Embung Dlingseng Desa Banjaroya, Kec. Kalibawang, Kab. Kulonprogo	1 embung
6	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Pengembangan Jaringan Irigasi	DED Jaringan Irigasi Sumur Pompa Pampang, Gunungkidul	1 dokumen
						Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Pijenan/Kamijoro	2000 m
						Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sapon	645 m
7	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU)	Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan permukiman	16 titik

No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Permukiman		
8	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunkan Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Strategis	Penyediaan PSU di Kawasan Strategis Provinsi	2 lokasi
9	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekonomi	Fasilitasi dan Koordinasi Ketahanan Ekonomi	Tersusunnya Rekomendasi Dalam Rangka Penurunan Angka Kesenjangan Ekonomi	3 Rekomendasi (per caturwulan)
10	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Pengelolaan Kerjasama Trantibulinmas	01. Rumusan Kerjasama Satpol PP DIY dengan Satpol PP Kabupaten/ Kota	1 Dokumen Kesepakatan bersama tentang Penanganan Permasalahan Tibuntranas dan linmas
11	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	Pengelolaan Kesiapsiagaan Bencana	Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	25 SPAB/SSB
12	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Program Pengelolaan Kedaruratan Dan Logistik Bencana	Pengelolaan Kedaruratan Bencana	1. Masyarakat, relawan dan petugas kedaruratan di Daerah istimewa Yogyakarta memiliki ketrampilan dalam penanganan darurat bencana DIY	4 kali drill skil, 1 kali geladi "Tactical Floor Games", 1 kali geladi Posko dan 1 kali Geladi Lapangan

No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja	Peserta Pelatihan ketrampilan Pencari Kerja Mobile Training Unit	4 paket/80 orang
14	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan Tenaga Kerja Profesional	Peningkatan kompetensi perawat (Nurse) Standar Internasional	20 orang
15	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Tenaga Kerja	Program Pembinaan Pelatihan Standarisasi Dan Pemagangan	Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja	Sertifikasi Uji Kompetensi	400 orang
16	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Tenaga Kerja	Program Pembinaan Pelatihan Standarisasi Dan Pemagangan	Pemagangan Tenaga Kerja	Pemagangan Perusahaan bagi pencari kerja	20 orang
						Penyiapan peserta untuk mengikuti seleksi pemagangan ke Jepang	40 orang
						Penyiapan Peserta untuk mengikuti seleksi Pemagangan ke Jepang Program Caregiver	20 orang
17	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Lingkungan Hidup	Program Pengkajian Dan Petaan Lingkungan Hidup	Pengkajian Lingkungan Hidup	5. Kajian materi teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) DIY	5. 1 dokumen

No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						6. Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) DIY	1 dokumen
18	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Tutupan Vegetasi Dan Konservasi Sumberdaya Alam	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1. Dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) DIY 2021-2026	1 dokumen RPRHL DIY 2021-2026
						2. Dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT) Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY	1 Dokumen RTT Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY
						3. Penanaman Vegetasi	50 Ha
19	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Tutupan Vegetasi Dan Konservasi Sumberdaya Alam	Konservasi Sumber Daya Alam	2. Konservasi Daerah Tangkapan Air di RPH Menggoran (10 Ha)	20 Ha
20	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunkan Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Perhubungan	Program Pengembangan Keselamatan Transportasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	Pengadaan LPJU listrik Cebongan - Seyegan	75 titik
						Pengadaan suku cadang APILL	1 paket
						Pengadaan suku cadang APJ listrik	1 paket
						Rehab berat APILL (simpang Ngasem dan simpang Piyungan)	2 lokasi
						Teknisi APILL dan APJ (6 org x 312 hari)	1872 oh

No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunkan Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Perhubungan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	Studi Kelayakan Transportasi Kawasan Pariwisata DIY	Tersedia ya Studi Kelayakan Transportasi Kawasan Pariwisata DIY
22	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Penumbuhan Dan Pengembangan Wirausaha Baru	Layanan Usaha Wirausaha Baru	Akses promosi dan pemasaran UKM mitra PLUT	50 UKM
						Jumlah Peserta Inkubator Bisnis yang siap, (sudah memiliki manajemen usaha, jejaring pemasaran, produksi yang baik) menjadi wirausaha baru	35 Wub
						Jumlah wirausaha kab/kota yang dilayani dalam pojok konsultasi bisnis	300 UKM
						Jumlah wirausaha yang dilayani dalam konsultasi bisnis	600 UKM
23	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pengembangan Perkoperasian	Pelatihan SDM dan Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi peserta pelatihan (SDM dan Kelembagaan) yang meningkat kapasitas usahanya 100%	120 kop
						Jumlah peserta	30 orang

No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Bimtek Dewan Pengawas Syariah yang meningkatkan Kapasitasnya 100%	
24	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pengembangan Perkoperasian	Pemasaran Perkoperasian	Peningkatan omset koperasi yang mengikuti pameran produk Koperasi (harkopnas, Produk koperasi dan UKM)	Rp. 72.200.000
25	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pengembangan Ukm	Pelatihan Kelembagaan dan Usaha UKM	Jumlah peserta pelatihan (terkait produk) yang meningkat ketrampilannya	60 UKM
						Jumlah peserta pelatihan terkait sertifikasi yang meningkat pengetahuannya (ISO, HACCP, HAKI, MERK)	120 UKM
						Jumlah Produk UKM yang tersertifikasi halal 25 produk, PIRT	10 Produk
						Jumlah UKM peserta pelatihan (manajemen usaha dan manajemen keuangan) yang meningkat kapasitasnya	60 UKM

No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
26	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pengembangan Ukm	Pemasaran Produk UKM	Gebyar UKM DIY di Galeri SMESCO	50 UKM
						Jumlah Kontrak kerjasama yang dihasilkan dari kemitraan antara UKM dengan retail/Toko Modern	2 kontrak
						Peningkatan omset UKM di Galeri SMESCO	100 UKM
						Peningkatan Omzet UKM peserta pameran produk UKM	5%
27	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Peningkatan Akses Pembiayaan	Kemitraan Koperasi dengan Lembaga Pembiayaan	Jumlah kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari Kemitraan antara Koperasi dengan mitra	35 koperasi
						Jumlah Koperasi yang meningkat kemampuan dalam mengakses permodalan	75 koperasi
28	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Peningkatan Akses Pembiayaan	Kemitraan UKM dengan Lembaga Pembiayaan	Jumlah kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari Kemitraan antara UMKM dengan mitra	80 UKM
						jumlah UKM yang meningkat	150 UKM

No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						kemampuannya dalam mengakses permodalan	
29	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Penanaman Modal	Program Promosi Investasi	Promosi Investasi	Temu Investor	Temu investor dengan mengundang 30 investor dengan nilai investasi yang ditawarkan Rp. 500.000.000.000,-
30	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Penanaman Modal	Program Peningkatan Iklim Investasi	Penyiapan Potensi Investasi	Potensi investasi yang siap jual di kab Gunungkidul	1 dokumen kajian dengan nilai investasi yang ditawarkan Rp. 200.000.000.000
31	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Statistik	Program Pengembangan Statistik Daerah	Penyediaan Data Statistik	5. Dokumen Analisis Ketimpangan Daerah DIY	1 dokumen Analisis Ketimpangan Daerah
32	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kelautan Dan Perikanan	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya, dari kelompok madya	60 ton
33	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	2. Jumlah pembangunan akses pendukung pariwisata ([1]Kecamatan Girimulyo (Jatimulyo), Kabupaten Kulon Progo, [2]Kecamatan	2 obyek / desa wisata

No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						n Playen (Banyusoco) Kabupaten Gunungkidul	
						3. Jumlah sarana dan prasarana utama pariwisata, [1] Fasilitas Surfing di Pantai Wediombo di Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, [2] Daya Tarik Wisata Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul,[3] Desa Wisata di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, [4] Kecamatan Samigaluh (Pagerharjo), Kabupaten Kulon Progo, [5] di Kecamatan Semanu (Telaga Jonge - Pacarejo), Kabupaten Gunungkidul, [6] Sriten-Kecamatan Nglipar (Pilangrejo), Kabupaten Gunungkidul.	6 lokasi obyek wisata/desa wisata
34	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang	Pertanian	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Budidaya Tanaman Pangan	sarana pertanian yang dapat dipenuhi	36 unit

No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Berkelanjutan					
35	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertanian	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Budidaya Tanaman Hortikultura	Luas lahan yang diusahakan untuk budidaya hortikultura	176 ha
36	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kehutanan	Program Perencanaan Dan Bina Usaha Kehutanan	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	1. Pengendalian penatausahaan hasil hutan	21 unit usaha
37	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kehutanan	Program Perencanaan Dan Bina Usaha Kehutanan	Pengelolaan Perhutanan Sosial	1. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan(HKM) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	42 kelompok HKM dan 3 kelompok HTR
						2. Pembinaan Hutan Rakyat (HR)	20 kelompok HR
38	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kehutanan	Program Pengelolaan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung	Perencanaan dan Reboisasi Sumberdaya Hutan	1. Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RTT Tebangan, RTT Produksi Daun Kayu Putih, RTT Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman, RTT Pemeliharaan Jalan Produksi)	1 Dokumen
						3. Pembinaan KTH dalam	24 RPH

No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Kawasan Hutan	
						5. Tanaman Kayu Putih Baru (100 Ha tanaman baru, 200 Ha P1, 65 Ha P2)	411.600 batang
39	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kehutanan	Program Pengelolaan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung	Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	1. Produksi Hasil Hutan (minyak kayu putih dan kayu)	(minyak kayu putih 44.285 liter dan kayu 98 m3)
40	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kehutanan	Program Pengelolaan Hutan Konservasi	Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura	2. Promosi dan Publikasi Tahura Bunder	12 bulan
						5. papan nama pohon	60 buah
41	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Perdagangan	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Pelatihan dan Kemitraan Ekspor	Jumlah peserta Pelatihan dan Pendampingan IKM Ekspor Unggulan dari 150 orang peserta yang meningkat kapasitasnya 82%	123 orang
						Jumlah peserta pelatihan Ekspor baru dari 200 orang peserta pelatihan yang meningkatkan kemampuan nya 82%	160 orang
42	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Perdagangan	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Pemasaran Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha dari 200 orang peserta	160 Orang

No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Berkelanjutan	mian yang Berkelanjutan				bimtek pemasaran online yang meningkatkan kemampuannya 80%	
						Peningkatan omset peserta Pameran (Pameran Dekranas, Pameran Jakarta Fair, Pameran Tetap) semula Rp. 1.037 Juta Menjadi Rp. 1.187 Juta	Rp. 150 juta
43	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Perdagangan	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Pelatihan dan Kemitraan Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha dari 280 orang peserta bimtek (PKL dan sekolah pasar) yang meningkatkan kemampuannya 80%	224 Orang
44	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Perindustrian	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Pelatihan Industri Kecil Menengah Agro	Jumlah peserta Bemtek / Pelatihan di Kab. Gunungkidul (Mebel kayu, bahan bangunan dari kayu, kerajinan kayu, WUB IKM Kayu, WUB IKM Bambu, Olahan Pangan, Minuman Segar), Bantul (Mebel Bambu, Kerajinan Bambu, WUB IKM	208 Orang

No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Bambu, Kulonprogo (Kerajinan Bambu, Olahan Coklat) dari 320 Orang yang meningkatkan keterampilannya sebesar 65%	
						Jumlah peserta Bemtek / Pelatihan di Samigaluh (Mebel Kayu), Girimulyo (Mebel Bambu), Nglipar (Kerajinan Kayu), Gedangsari (Olahan Pangan), Kokap (Bahan Bangunan dari Kayu, WUB Kayu, Olahan Pangan, Olahan Kopi) dari 200 Orang yang meningkatkan keterampilannya sebesar 65%	130 Orang
45	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Perindustrian	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Kemitraan IKM Agro	Jumlah IKM peserta temu kemitraan dari 100 IKM yang bermitra sebanyak 12%	12 IKM
						Peningkatan Omset IKM setelah Test Pasar	Rp. 5 Juta

No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						sebanyak 50 IKM	
46	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Perindustrian	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Pelatihan Industri Kecil Menengah Logam, Sandang dan Aneka	Jumlah peserta Bemtek / Pelatihan IKM Pakaian Jadi, Produk Kulit, Kain Perca, dan Pande Besi di Kab. Bantul dan Gunungkidul dari 160 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	91 Orang
47	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Perindustrian	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Kemitraan IKM Logam, Sandang dan Aneka	Jumlah IKM peserta temu kemitraan dari 40 IKM yang bermitra sebanyak 12%	5 IKM
						Peningkatan Omset IKM setelah Test Pasar dengan komoditas: Komponen Otomotif, Mesin, Peralatan Rumah Tangga, Fashion dan Aneka semula Rp. 600 Juta menjadi Rp. 1.050 Juta)	Rp. 450 Juta
48	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Transmigrasi	Program Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja Dan Penempatan Transmigran	Pembentukan Kesempatan Kerja	Padat karya infrastruktur	3 lokasi
						Pembekalan Kewirausahaan dan Pendampingan Pola Kemitraan Tenaga	25 orang

No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	
49	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Transmigrasi	Program Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja Dan Penempatan Transmigran	Penyelenggaraan Transmigrasi	Penyelenggaraan Transmigrasi	40 KK
50	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Transmigrasi	Program Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja Dan Penempatan Transmigran	Pembentukan Usaha Mandiri bagi Tenaga Kerja Khusus	Pembekalan wirausaha baru bagi penyandang disabilitas	20 orang
51	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpeliharaan dan Berkembangnya Kebudayaan	Kebudayaan (Keistimewaan)	Program Pengelolaan Taman Budaya	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota	Pembangunan Fisik Taman Budaya Gunungkidul Tahap III	Pembangunan Fisik Taman Budaya di Gunungkidul
52	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Kebudayaan (Keistimewaan)	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	"BTI : Gamelan Perunggu"	1 set
						"KP : Gamelan, alat kesenian dan pakaian"	15 kelompok
						"SLM : 1. Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Masyarakat seni dan Budaya"	45 Kelompok seni
53	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan	1.1.3. Terpeliharaan dan Berkembangnya Kebudayaan	Kebudayaan (Keistimewaan)	Program Adat, Seni, Tradisi Dan Lembaga Budaya	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	1. pendampingan desa budaya	5 aspek

No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kemiskinan						
54	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Kebudayaan (Keistimewaan)	Program Adat, Seni, Tradisi Dan Lembaga Budaya	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	BTI : 10 Rintisan Desa Budaya Workshop Perfilman" GK: 1. Gelar Potensi Rintisan Desa Budaya 2. Pembuatan Film Dokumenter Rintisan Desa Budaya (baru mulai 2020) KP : 1. Pembinaan desa rintisan budaya 2. Potensi rintisan desa Budaya 3. Sarpras " SLM : 1. Peningkatan SDM rintisan desa Budaya (RDB) 2. Sarpras 3. Gelar Potensi "	10 desa 20 even (20 desa Rintisan Budaya) 2. 20 Desa Rintisan Budaya (20 Film)" 3 even (11 desa 21 even (11 desa) 11 Desa " 38 desa

5.6.3 Program/ Kegiatan Dukungan Pembangunan Yogyakarta International Airport (Bandar Udara Internasional Yogyakarta)

Program/ kegiatan tematik untuk Dukungan Pembangunan Yogyakarta International Airport (Bandar Udara Internasional Yogyakarta) dapat disajikan sebagai berikut,

No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Kesehatan	Program Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lain	BKK tahap III RSUD Wates	100%
2	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Strategis	Struktur, Arsitektur dan Atap Bangunan VIP Room Bandara Baru YIA	1 unit gedung
3	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	Pengelolaan Pencegahan Bencana	(1). Pembentukan Desa/Kelurahan tangguh bencana di kawasan rawan bencana baru yang terbentuk dan berkembang di DIY	(1). 25 Desa/Kelurahan
4	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan Tenaga Kerja Profesional	Pelatihan Aviation security Pelatihan Ground Staff	20 orang 20 orang
5	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Perhubungan	Program Pengembangan Keselamatan Transportasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	Pengadaan suku cadang APJ tenaga surya	1 paket
6	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi	Perhubungan	Program Pengembangan Keselamatan Transportasi	Edukasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Sosialisasi Keselamatan Transportasi Kawasan Bandara Baru	1 kali @100 peserta

No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Antar Wilayah					
7	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunkan Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Perhubungan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	Evaluasi Kinerja Angkutan AKDP	1 dokumen
8	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunkan Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Perhubungan	Program Pengembangan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas	Penerapan Rekayasa Lalu Lintas	Pengadaan dan Pemasangan APILL ATCS simpang Brosot, Kab. Kulonprogo	1 unit
9	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pariwisata	Program Peningkatan Sdm Dan Kelembagaan Pariwisata	Pelatihan dan Serifikasi SDM Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi pada tahun 2020	150 orang
10	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunkan Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata	1. Jumlah event pariwisata internasional (Jogja Air Show)	1 event
						2. Jumlah event pariwisata nasional (Perahu Naga)	1 event
11	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Kebudayaan (Keistimewaan)	Program Pengelolaan Taman Budaya	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota	2. Kulonprogo manekowar no	2. 1 Even
						3. Art For Children KP	3. 5 kesenian
						4. Pembebasan Lahan KP	4. 4,2 ha
12	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Kebudayaan (Keistimewaan)	Program Adat, Seni, Tradisi Dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	KP : 1. Pembinaan Ketoprak (workshop, Festival, audisi, pengiriman di tingkat	'1. 1 event 2. 1 event. 3. 1 event. 4. 1 event. 5. 1 event. 6. 1 event. 7. 1 event. 8. 1 event

No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						DIY) 2. Pembinaan Langen carita (Festival Langencarita , Pengiriman Kontingen langencarita) 3. Pengiriman festival dalang 4. Pembinaan Langensworo (workshop, festival Langensworo) 5. Sendratari sugriwo subali 6. Menoreh Art Festival 7. Pengiriman Festival Sendratari 8. Pembinaan Theater	
13	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Sekretariat Daerah	Program Pengelolaan Kebijakan Bina Mental Dan Pembinaan Sarana Keagamaan	Penyusunan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan	koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan embarkasi haji DIY	1 dokumen laporan

5.6.4 Program/ Kegiatan Tematik Pembiayaan Pembangunan.

Program/ kegiatan tematik untuk Tematik Pembiayaan Pembangunan dapat disajikan sebagai berikut,

No	Prioritas	Sasaran	Bidang Urusan	Nama Program	Kegiatan	Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Keuangan	Program Pendayagunaan Barang Milik Daerah	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Evaluasi pemanfaatan BMD untuk lebih berdayaguna dan berhasilguna (terhadap BMD yang telah dimanfaatkan)	10 obyek
2	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Keuangan	Program Pendayagunaan Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan hasil kajian Highest Best Use (HBU) BMD idle untuk memperoleh kegunaan yang optimal atas pemanfaatan BMD	1 laporan hasil kajian HBU
						Laporan penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan BMD untuk memperoleh nilai wajar sesuai dengan bentuk pemanfaatan BMD	6 Dokumen laporan penilaian BMD

BAB 6 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1 Strategi Pembangunan RKPD DIY 2020

Upaya pencapaian tema pembangunan dalam RKPD DIY 2020 “*Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM untuk pertumbuhan berkualitas*” dilaksanakan melalui Prioritas Pemerintah Daerah DIY sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah;
3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan;
4. Pendukung Prioritas Pembangunan;

6.1.1 Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2020

Prioritas pembangunan daerah tersebut memiliki keterkaitan dengan sasaran dan Program pembangunan daerah (program pemda; lintas sektor dan urusan) yang dapat digambarkan sebagai berikut,

Tabel 6-1 Tema RKPD DIY, Sasaran dan Program Pemda

Tema RKPD DIY 2020 “Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM untuk pertumbuhan berkualitas”		Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Program Pemda
Key Word Tema DIY	Prioritas DIY				
Peningkatan SDM	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	1.1.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,08	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
					Program Peningkatan Usia Harapan Hidup
		1.1.1.2. Indeks Pemberdayaan Gender	70,12	Program Pembangunan Sosial Masyarakat	
		1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	1.1.3.1. Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda	11,72	Program Pelestarian budaya benda dan tak benda

Tema RKPD DIY 2020 "Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM untuk pertumbuhan berkualitas"		Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Program Pemda
Key Word Tema DIY	Prioritas DIY				
			benda yang diapresiasi		
		1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	1.1.2.1. Indeks Gini	0,3776	Program Penanggulangan Kemiskinan
			1.1.2.2. Persentase Angka Kemiskinan	9,11	
Pertumbuhan Berkualitas	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	1.1.5.1. indeks Williamson	0,4524	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan
Percepatan Pembangunan Infrastruktur (**Infrasuktur: Dimaknai luas tidak hanya terkait dengan sarpras tetapi juga aspek non sarpras).	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4.4. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	40,69	Program peningkatan keterpaduan program pemanfaatan ruang
			1.1.4.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,44	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
			1.1.4.3. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	79,5	Peningkatan Keterpaduan program pemanfaatan Ruang
			1.1.4.1. Pertumbuhan Ekonomi	5,29	Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)
					Program Pembiayaan Pembangunan Non-Pemerintah
Pendukung Prioritas Pembangunan	Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	2.1.1.1. Opini BPK	WTP	Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
			2.1.1.2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah	A	Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
		2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	2.1.2.1. Persentase capaian program urusan keistimewaan	73,91	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah

Tema RKPD DIY 2020 "Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM untuk pertumbuhan berkualitas"		Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Program Pemda
Key Word Tema DIY	Prioritas DIY				
		2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	2.1.3.1. Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	13.419	Program Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa

Prioritas Pembangunan DIY tersebut dapat dicapai dengan strategi sebagai berikut:

Tabel 6-2 Strategi RKPD DIY 2020 dan Program Pemda

Prioritas DIY	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Strategi RKPD DIY 2020	Program Pemda	Sasaran Perangkat Daerah Pendukung	OPD Pendukung
Pembangunan Manusia dan Penguasaan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	1.1.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,08	Meningkatkan Kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY yang inklusif dan berkeadilan	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan non diskriminatif	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
						Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
						Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
						Terwujudnya kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat
					1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	Terwujudnya perilaku sadar sehat
					Terwujudnya pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	

Prioritas DIY	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Strategi RKPD DIY 2020	Program Pemda	Sasaran Perangkat Daerah Pendukung	OPD Pendukung
						yang bermutu	
						Terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu	Dinas Kesehatan
						Terwujudnya Pelayanan kesehatan Paru yang Bermutu	Dinas Kesehatan
						Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan khususnya pada kawasan yang belum maju, maju tertekan, dan potensi cepat tumbuh		Penduduk Berakses Sanitasi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
						Penduduk Berakses Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
		1.1.1.2. Indeks Pemberdayaan Gender	70,12	1. Memperkuat implementasi dan advokasi pengarusutamaan Gender	Program Pembangunan Sosial Masyarakat	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
				2. Mengendalikan		Meningkatnya rata-rata	Dinas Pemberday

Prioritas DIY	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Strategi RKPD DIY 2020	Program Pemda	Sasaran Perangkat Daerah Pendukung	OPD Pendukung
				pertumbuhan penduduk		usia kawin pertama perempuan	aan Perempuan , Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
				3. Peningkatan keterlindungan warga, keamanan dan ketertiban umum		Meningkatnya kepatuhan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
				4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat		Meningkatnya Ketahanan Nasional di DIY	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat
						Meningkatnya kualitas rumusan bahan Kebijakan pengelolaan Kesejahteraan Rakyat	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat
						Meningkatnya kualitas rumusan bahan Kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan	Biro Bina Mental Spiritual

Prioritas DIY	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Strategi RKPD DIY 2020	Program Pemda	Sasaran Perangkat Daerah Pendukung	OPD Pendukung
						pengelolaan bina mental spiritual	
						Meningkatnya keberdayaan Organisasi /Lembaga masyarakat	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat
	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	1.1.3.1. Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	11,72	1. Intern alisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada ketahanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan 2. Meningkatkan pemeliharaan (pelindungan secara hukum dan fisik)dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaa n untuk aman, berketahanan dan berkelanjutan	Program Pelestarian budaya benda dan tak benda	Meningkatnya pengelolaan pelestarian kebudayaan	Dinas Kebudayaan
	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	1.1.2.1. Indeks Gini	0,3776	1. Menu mbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan 2. Peme nuhan	Program Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya kontribusi wirausaha baru terhadap UMKM Terpenuhi nya	Dinas Koperasi dan UKM Dinas Sosial

Prioritas DIY	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Strategi RKPD DIY 2020	Program Pemda	Sasaran Perangkat Daerah Pendukung	OPD Pendukung
				layanan Dasar masyarakat miskin.		kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PMKS	
						Pemenuhan pangan masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Penduduk dengan hunian yang layak	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
						Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
				3. Peningkatan Pendapatan per Kapita Masyarakat		Meningkatnya kontribusi wirausaha baru terhadap UMKM	Dinas Koperasi dan UKM
		1.1.2.2. Persentase Angka Kemiskinan	9,11	4. Memperluas kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan proporsi angkatan kerja dan lulusan pendidikan tinggi.		Meningkatnya kontribusi wirausaha baru terhadap UMKM	Dinas Koperasi dan UKM
						Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Terwujudnya Hubungan Industrial yang Kondusif untuk Mengembangkan Usaha dan Meningkatkan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Prioritas DIY	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Strategi RKPD DIY 2020	Program Pemda	Sasaran Perangkat Daerah Pendukung	OPD Pendukung	
						Kesejahteraan Pekerja		
Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunkan Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	1.1.5.1. indeks Williamson	0,4524	Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan khususnya pada kawasan yang belum maju, maju tertekan, dan potensi cepat tumbuh	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan	Meningkatnya realisasi investasi	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	
						Meningkatnya jumlah belanja wisatawan	Dinas Pariwisata	
						Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan bidang infrastruktur daerah dan pembiayaan pembangunan non pemerintah	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	
						Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Dinas Perhubungan	
						Meningkatnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan	
Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4.4. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	40,69	Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan dan berkelanjutan khususnya pada kawasan yang belum maju, maju tertekan, dan potensi	Program peningkatan keterpaduan program pemanfaatan ruang	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	
		1.1.4.3. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	79,5			Peningkatan Keterpaduan program pemanfaatan Ruang	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
							Meningkatnya Kesesuaian izin pengusahaan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

Prioritas DIY	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Strategi RKPD DIY 2020	Program Pemda	Sasaran Perangkat Daerah Pendukung	OPD Pendukung
				cepat tumbuh		n air tanah dan pertambahan terhadap rencana tata ruang	
		1.1.4.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,44	1. Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Terkelolanya kawasan konservasi perairan	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				2. Pengurangan resiko bencana		Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.1.4.1. Pertumbuhan Ekonomi	5,29	Mengoptimalkan kinerja sektor Dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan dan ekonomi kreatif	Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)	Meningkatnya nilai produksi kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Meningkatnya nilai produksi perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
						Meningkatnya industri pengolahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian	Dinas Pariwisata

Prioritas DIY	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Strategi RKPD DIY 2020	Program Pemda	Sasaran Perangkat Daerah Pendukung	OPD Pendukung
						Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Terwujudnya Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Terwujudnya Hubungan Industrial yang Kondusif untuk Mengembangkan Usaha dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Meningkatnya nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Meningkatnya luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
				Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta	Program Pembiayaan Pembangunan Non-Pemerintah	Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan SDA	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam
						Optimalisasi Aset-Aset Pemda DIY	Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Prioritas DIY	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Strategi RKPD DIY 2020	Program Pemda	Sasaran Perangkat Daerah Pendukung	OPD Pendukung
						Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan bidang infrastruktur daerah dan pembiayaan pembangunan non pemerintah	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan
Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	2.1.1.1. Opini BPK	WTP	1. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparansi, akuntabel, dan partisipatif 2. Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah	Program sinergitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
						Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal	Inspektorat
						Optimalisasi Aset-Aset Pemda DIY	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
		2.1.1.2. Nilai Akuntabilitas Pemerintahan	A	Meningkatkan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan publik	Program sinergitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah	Biro Organisasi
						Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan	Biro Tata Pemerintahan
						Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama	Biro Tata Pemerintahan
Meningkatnya kualitas informasi	Sekretariat DPRD						

Prioritas DIY	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Strategi RKPD DIY 2020	Program Pemda	Sasaran Perangkat Daerah Pendukung	OPD Pendukung
						aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD	
						Meningkatnya kualitas manajemen aparatur secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional	Badan Kepegawaian Daerah
						Meningkatnya kualitas layanan kantor perwakilan daerah	Badan Penghubung Daerah
						Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan kediklatan	Badan Pendidikan dan Pelatihan
						Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik	Biro Organisasi
						Terfasilitasinya kinerja DPRD	Sekretariat DPRD
						Meningkatnya kualitas produk	Biro Hukum

Prioritas DIY	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Strategi RKPD DIY 2020	Program Pemda	Sasaran Perangkat Daerah Pendukung	OPD Pendukung
						hukum daerah	
						Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi produk hukum	Biro Hukum
						Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Badan perencanaan pembangunan daerah
						Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
						meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
						Meningkatnya kualitas pelayanan tamu dan pimpinan	Biro Umum, Humas dan Protokol
						Meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
						Meningkatnya Kualitas Informasi Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika

Prioritas DIY	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Strategi RKPD DIY 2020	Program Pemda	Sasaran Perangkat Daerah Pendukung	OPD Pendukung
						kepada masyarakat	
	2.1.2. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	2.1.2.1. Persentase capaian program urusan keistimewaan	73,91	1. Mewujudkan sinergitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota s/d Desa	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	Terfasilitasinya Pengisian Jabatan Gubernur / Wakil Gubernur sesuai undang-undang keistimewaan	Biro Tata Pemerintahan
			2. Penguatan keistimewaan dalam Perangkat Daerah, Kabupaten -Kota, Kecamatan, Desa	Terfasilitasinya Kinerja Parampara Praja		Paniradya Kaistimewaan	
						Meningkatnya kualitas implementasi urusan keistimewaan	Paniradya Kaistimewaan
	2.1.3. Meningkatkan Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	2.1.3.1. Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	13.419	1. Peningkatan Kapasitas badan hukum (Kasultanan dan Kadipaten) dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten, Desa	Program Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	Meningkatnya fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
				2. Pengembangan struktur dan pola ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

6.1.2 Internalisasi Deklarasi Musrenbangreg DIY, 2018 dalam RKPD DIY Tahun 2020

Pemda DIY menginternalisasi Deklarasi Musrenbangreg DIY, 2018 dengan tema “Strategi Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Melalui Penyiapan Sumber Daya Manusia” di Yogyakarta pada 16 - 19 Oktober 2018 ke dalam RKPD DIY Tahun 2020. Berikut ini dapat dipaparkan intervensi yang sedang berjalan tahun 2019 dan direncanakan tahun 2020 sebagai berikut,

No	Langkah Strategis Deklarasi Musrenbangreg, 2018	Intervensi 2019 dan Rencana 2020	Pengalaman Baik (Best Practise)
1	Mengintegrasikan kebijakan antar lini pemerintah dalam mendukung implementasi <i>making Indonesia 4.0</i> terutama terkait perindustrian ketenagakerjaan, teknologi informasi dan sektor-sektor terkait dalam mengantisipasi perubahan ketenagakerjaan dan kondisi perekonomian Indonesia di masa yang akan datang dan melindungi kelompok rentan terutama tenaga kerja perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a Pemerataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan b Fasilitasi Peserta didik pada program vokasi untuk dapat memperoleh sertifikasi profesi c Penetapan Perda Rencana Induk Pembangunan Perindustrian Daerah (2019) 	<ul style="list-style-type: none"> a Kerjasama antara dunia industry, perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan dalam pengembangan pendidikan vokasi. b Pengembangan teaching Industry menjadi strategi implementasi kebijakan link and match dudi dalam mengoptimalkan kompetensi SDM c Pembangunan dan revitalisasi technopark sebagai pusat sarana pembelajaran masyarakat baik untuk pendidikan formal maupun non formal
2	Mengoptimalkan 5 sektor Manufaktur <i>making Indonesia 4.0</i> dan sektor lain sesuai potensi daerah untuk menyerap angkatan kerja produktif	<ul style="list-style-type: none"> a Kegiatan 2020: b Menyasar pada sektor Industri Makanan & Tekstil melalui kegiatan Pelatihan dan Kemitraan (Dinas Perindag) c Rencana tahun 2020 : Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Pembangunan jalan dan Jembatan, Pembangunan Jalan Akses Kawasan Industri Piyungan d Intervensi tahun 2019 : menyusun <i>business plan</i> angkutan barang terkait titik rencana terminal angkutan barang di DIY 	<ul style="list-style-type: none"> a Akses jalan yang memadai menjadikan moda transportasi angkutan barang lebih lancar b Perlunya titik-titik terminal angkutan barang di sekitar kawasan industri untuk mempermudah proses bongkar muat logistik

No	Langkah Strategis Deklarasi Musrenbangreg, 2018	Intervensi 2019 dan Rencana 2020	Pengalaman Baik (Best Practise)
3	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sesuai Standard Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia	Kegiatan 2019: Sertifikasi Ketrampilan Pelaut Kapal meliputi: Basic Safety Training, simulasi radar (Dinas Kelautan dan Perikanan) Kegiatan 2020: a Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja, Pelatihan Tenaga Kerja Profesional (Disnaker) b Sertifikasi Ketrampilan Pelaut Kapal meliputi: Basic Safety Training, simulasi radar (Dinas Kelautan dan Perikanan)	
4	Meningkatkan literasi keuangan petani/ nelayan dan pelaku UMKM dengan mempermudah akses dana/ modal dan saran prasarana teknologi informasi untuk mengembangkan pasar, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing produk-produk lokal	Kegiatan 2020: a Kemitraan Koperasi dengan Lembaga Pembiayaan, Kemitraan UKM dengan Lembaga Pembiayaan (Diskop dan UKM) b Pembinaan koperasi petani dan nelayan (Diskop dan UKM) c Dalam rangka pengembangan pemasaran dan perluasan jaringan pada tahun 2019 dan dalam rencana 2020 dilakukan beberapa kegiatan antara lain: - Perjanjian kerjasama nelayan andon yang wajib mendaratkan hasil tangkapannya di DIY (Dinas Kelautan dan Perikanan) - Kerjasama Pelaku Usaha Perikanan Budidaya antara Unit Perbenihan Rakyat dengan Pembudidaya (Dinas Kelautan dan Perikanan) - Kerjasama antara nelayan dengan pedagang dan supplier (Dinas Kelautan dan Perikanan)	

No	Langkah Strategis Deklarasi Musrenbangreg, 2018	Intervensi 2019 dan Rencana 2020	Pengalaman Baik (Best Practise)
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan system informasi harga pasar yang memberikan informasi harga produk pertanian melalui media online (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan) - Pelatihan e-commerce pemasaran produk perikanan melalui media online (Dinas Kelautan dan Perikanan) - Pemasaran benih pertanian melalui website Jogja Benih (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan) <p>e Dalam rangka peningkatan daya saing produk lokal pada tahun 2019 dan dalam rencana 2020 dilakukan beberapa kegiatan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) (Dinas Kelautan dan Perikanan) - Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) produk ikan (Dinas Kelautan dan Perikanan) - Sertifikasi system pertanian organic (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan) - Sistem jaminan mutu grading packing house (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan) - Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan) - Produksi benih pertanian bersertifikat (Dinas Pertanian dan 	

No	Langkah Strategis Deklarasi Musrenbangreg, 2018	Intervensi 2019 dan Rencana 2020	Pengalaman Baik (Best Practise)
		<p>Ketahanan Pangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produksi benih perikanan bersertifikat (Dinas Kelautan dan Perikanan) <p>f. Dalam rangka perlindungan terhadap petani dan nelayan, difasilitasi asuransi petani dan nelayan yang sebagian premi-nya disubsidi oleh pemerintah</p>	
5	Memperkuat keberadaan kelembagaan ekonomi melalui peningkatan peran masjid, pesantren dan tempat ibadah lainnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi umat		
6	Menyempurnakan kurikulum pendidikan yang ada serta merevitalisasi sekolah menengah dan vokasi sesuai dengan potensi dan kebutuhan pasar melalui kolaborasi antara pemerintah dan industri	Penyelarasan dan revitalisasi kurikulum pada sekolah menengah dan vokasi sesuai dengan kebutuhan DUDI	<p>a Lulusan SMK dapat diterima dan bekerja di DUDI sesuai kompetensinya</p> <p>b Pada saat penyelenggaraan RSBI (khususnya di SMK N 2 Pengasih dan SMK N 2 Wonosari) dinas mampu memfasilitasi siswa SMK untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi (Uji Sertifikasi) sehingga siswa mendapat sertifikat atau legalitas untuk dapat diakui ketrampilan/kompetensinya di DUDI</p>
7	Membentuk ekosistem inovasi digital dan mengembangkan inkubasi bisnis/ <i>technopark</i> yang ada di setiap daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan membentuk dan menumbuhkembangkan <i>start up/creative hub</i> dan menjadikan perguruan tinggi sebagai <i>center of excellence and innovatioan</i>	a Melalui Kegiatan Pembangunan Ekosistem Kultural Berbasis Digital di Dinas Kominfo, dibangun <i>co-working space</i> sebagai <i>creative hub</i> di Dinas Kominfo yang menasar segmen <i>beneficiaries</i> (penerima manfaat) kelompok anak muda kreatif.	<i>Co-working space</i> di Dinas Kominfo menjadi wahana baru <i>creative hub</i> bagi anak-anak muda. Jumlah kunjungan anak-anak muda di fasilitas yang disediakan Pemda ini mencapai 30-50 orang per hari. Telah ada sejumlah <i>start up</i> dan kesepakatan bisnis yang terbangun dari aktivitas mereka di <i>co-working space</i> ini.

No	Langkah Strategis Deklarasi Musrenbangreg, 2018	Intervensi 2019 dan Rencana 2020	Pengalaman Baik (Best Practise)
		<p>b Pada tahun 2019 juga dibangun Gedhong Rembulan sebagai wahana <i>creative hub</i> di Desa (tingkat Komunitas) dengan <i>piloting</i> (percontohan) di Kampung Mataraman (Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul).</p> <p>c Pada tahun 2020, melalui kegiatan yang sama, terdapat alokasi <i>bandwidth</i> untuk Desa yang nantinya diorientasikan sebagai cikal bakal <i>co-working space</i> di tingkat desa serta pemanfaatan sebagai <i>market place</i> melalui <i>website</i> Desa.</p> <p>d Pemda DIY mendorong sarana PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) di Dinas Koperasi dan UKM sebagai wahana inkubasi bisnis penumbuhan wirausaha baru khususnya untuk generasi muda dan start up usaha mikro dan kecil. Beberapa layanan yang ada di tempat ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan SDM KUMKM; - Manajemen usaha; - Peningkatan kualitas produk; - Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) - Kemitraan usaha; - Pemanfaatan teknologi informasi. <p>e. Sejak tahun 2018 telah dibangun Jogja Agro Techno Park (JATP) di Wijilan, Kulon Progo dengan luas lahan</p>	

No	Langkah Strategis Deklarasi Musrenbangreg, 2018	Intervensi 2019 dan Rencana 2020	Pengalaman Baik (Best Practise)
		<p>18,28 hektar. JATP diharapkan menjadi salah satu model yang dapat berfungsi sebagai unit pembelajaran (inkubator) agribisnis dan memberi manfaat dalam menumbuhkan-kembangkan wirausahawan agribisnis melalui pengembangan usaha berbasis inovasi dan teknologi, serta sebagai lembaga pelatihan percontohan dan pertanian terpadu (Integrated Farming). Dari aspek pariwisata, keberadaan JATP yang terletak pada jalur Bandara Internasional Yogyakarta ke kawasan Borobudur merupakan salah satu alternatif wahana wisata pendidikan baru. Setelah konstruksi diselesaikan, tahapan yang dilakukan selanjutnya adalah mengoptimalkan pengelolaan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pada tahun 2019 memasuki tahapan penyusunan Final Bussiness Case</p>	

6.2 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program Prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 6-3 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.01	PENDIDIKAN													
1.01.1.01.01.00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga													
1.01.1.01.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 15.633.519.000,00	Rp. 17.838.801.975,00		
1.01.1.01.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Alat Tulis Kantor	48 Jenis barang	Dukungan terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 9.552.381.000,00	Rp. 12.032.901.975,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							02. Komponen Listrik/penerangan bangunan,	15 Jenis barang						
							03. Perangko, meterai dan benda pos lainnya(perangko,meterai dan pengiriman	400 dokumen						
							04. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14 Jenis barang						
							05. Pembelian Bendera	3 buah						
							06. Alat/alat perlengkapan untuk sarana kearsipan	20 jenis barang						
							07. Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan kawat/faksimili/internet	12 bulan						
							08. Langganan Surat kabar/majalah	12 bulan						
							09. Jasa Kebersihan	12 bulan						
							10. Ristribusi Sampah	12 bulan						
							11. KIR kendaraan roda 6 (enam)	12 bulan						
							12. Pajak Kendaraan	25 unit kendaraan Roda 2 (dua) 32 unit kendaraan roda 4(empat) 4 unit kendaraan roda 3 (tiga) 1 unit kendaraan roda 6 (enam)						
							13. Barang cetakkan	20 jenis cetakan						
							14. penggandaan dan jilid	1.289.692 lembar dan 524 jilid						
							15. Penyusutan arsip	500 berkas						
							16. Pemeliharaan arsip aktif	18.500 berkas						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga												Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							17. surat keluar dan surat masuk	29690 lembar surat keluar dan 16.605 lembar surat masuk							
							18. Sewa tanah	5 kab/kota							
1.01.1.01.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. HR pengelola keuangan	74 orang	Dukungan terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.246.619.000,00	Rp. 4.305.900.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							02. Pengurus barang	152 orang							
							03. Pengelola Administrasi kepegawaian	17 orang							
							04. Jasa Keamanan Kantor	12 bulan							
1.01.1.01.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah dan luar daerah	1 tahun	Dukungan terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 2.834.519.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							2. Penyediaan rapat-rapat koordinasi	1 tahun							
1.01.1.01.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 8.730.300.000,00	Rp. 23.475.025.280,00			
1.01.1.01.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Tanah untuk SMK Negeri 1 Samigaluh	3.961 m2	Dukungan terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 1.847.490.000,00	Rp. 10.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							2. Master Plan DED SMK Negeri 1 Samigaluh	1 dokumen							
							3. Rehab Pagar BTKP	1 unit							
1.01.1.01.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Perlengkapan kantor sesuai dengan RKBMD	12Jenis	Dukungan terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 2.993.715.000,00	Rp. 8.422.765.280,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							2. Peralatan Kantor sesuai dengan RKBMD	5 Jenis							
							3. Mebeleur sesuai dengan RKBMD	8 Jenis							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga												Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.01.1.01.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Gedung kantor Induk dan PLA	2 unit	Dukungan terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 1.998.700.000,00	Rp. 3.552.260.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							Gedung UPT	6 unit							
							Rumah Dinas	1 unit							
1.01.1.01.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Kendaraan Dinas roda 4 (empat)	32 unit	Dukungan terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 668.550.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							2. kendaraan roda 6 (enam)	1 unit							
							3. Kendaraan Roda 2 (dua)	25 unit							
							4. Kendaraan roda 3 (tiga)	4 unit							
1.01.1.01.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Alat-alat kantor	1 tahun	Dukungan terhadap pencapaian peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 1.221.845.000,00	Rp. 800.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							Pemeliharaan Alat-alat berat	1 tahun							
							Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga	1 tahun							
							Pemeliharaan Arsip	1 tahun							
							Pemeliharaan Instalasi air minum/bersih	1 tahun							
							Pemeliharaan Instalasi listrik	1 tahun							
							Pemeliharaan Instalasi Telepon	1 tahun							
		Pemeliharaan Jaringan Pos dan Telekomunikasi	1 tahun												
1.01.1.01.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 1.518.074.000,00	Rp. 2.532.000.000,00			
1.01.1.01.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2020	Nilai LKJIP dari 75,5 menjadi 75,7	Dukungan terhadap capaian terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Penyusunan laporan keuangan	3 dokumen	Dukungan terhadap capaian terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 1.099.315.000,00	Rp. 1.560.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							2. Penguatan pengelolaan keuangan	1053 orang						
							3. Penyusunan dan Penataan anggaran	69 SMAN, 49 SMKN, 9 SLBN						
							4. Penyusunan APBS	APBS 2020/2021						
							5. Penyusunan Laporan barang inventaris dan barang persediaan	296 orang						
1.01.1.01.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Sinkronisasi Kegiatan di bidang pendidikan	50 orang	Dukungan terhadap capaian terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 370.494.000,00	Rp. 900.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							2. Dokumen program dan kegiatan SKPD	3 dokumen						
1.01.1.01.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 175 kegiatan	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi	Dukungan terhadap capaian terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 33.265.000,00	Rp. 57.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.00.15	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH										Rp. 895.627.984.000,00	Rp. 267.345.735.650,00		
1.01.1.01.01.00.15.001	Penyediaan BOS/BOSDA	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	80,3%	1. BOSDA SWASTA SM	305 sekolah swasta (95 SMA, 169 SMK dan 41 MA) mendapatkan BOSDA	dukungan terhadap pengurangan angka putus sekolah 0,20% dan prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A 80,30%	100%	Rp. 659.833.213.000,00	Rp. 677.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	40medali	2. BOSNAS 3 JENJANG PENDIDIKAN : SD/SMP, SM, SLB	2.741 sekolah N/S (1.845 SD, 439 SMP, 161 SMA, 217 SMK dan 79 SLB) menerima BOSNAS						
					Angka Putus Sekolah	0,2%								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.00.15.002	Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	80.3%	Penyaluran Kartu Cerdas Jenjang Sekolah Menengah	13.400 siswa	Dukungan terhadap pengurangan angka putus sekolah 0,20%	100%	Rp. 20.288.185.000,00	Rp. 37.747.169.250,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	40medali								
					Angka Putus Sekolah	0.2%								
1.01.1.01.01.00.15.003	Pelayanan Pendidikan SMA	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Bambanglipuro Banguntapan Bantul Cangkringan Depok Dlingo Galur Gamping Girimulyo Godean Imogiri Jetis Kalasan Kalibawang Karangmojo Kasihan Kokap Kraton Kretek Lendah Minggir Mati Ngaglik Ngemplak Pajangan Pakem Panggung Patuk Pengasih Piyungan Playen Pleret Prambanan Pundong Rongkop Samigaluh Sanden Sedayu Semanu Semin Sentolo Sewon Seyegan Sleman Srandakan Tanjungsari Tegalrejo Temon Tempel Tepus Turi Umbulharjo	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	80.3%	Operasional Sekolah Menengah Negeri Operasional KKO	69 sekolah 8 sekolah	Dukungan terhadap capaian Persentase sekolah dengan Akreditasi A	100%	Rp. 80.316.500.000,00	Rp. 82.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	40medali								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga												Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Wates Wirobrajan Wonosari	Angka Putus Sekolah	0.2%									
1.01.1.01.01.00.15.004	Pelayanan Pendidikan SMK	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Bantul Cangkringan Depok Dlingo Gedang sari Girimulyo Girisubo Godean Jetis Kalasan Kasihan Kokap Nanggulan Ngawen Nglipar Pajangan Pandak Panjatan Pengasih Pleret Ponjong Pundong Purwosari Samigaluh Sanden Saptosari Sewon Seyegan Tanjung Sari Temon Tempel Tepus Umbulharjo Wonosari	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	80.3%	Operasional Sekolah Menengah Negeri Operasional Edutek Operasional Sekolah Kelautan	49 sekolah 4 sekolah 3 sekolah	Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dengan akreditasi A	100%	Rp. 116.272.800.000,00	Rp. 118.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	40medali									
					Angka Putus Sekolah	0.2%									
1.01.1.01.01.00.15.006	Pembinaan Siswa SMA	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY dan Luar DIY	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	80.3%	01. Seleksi, pembinaan, dan pengiriman OSN	peringkat 7 nasional	Dukungan terhadap capaian 40 medali	100%	Rp. 8.129.149.000,00	Rp. 11.156.256.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	40medali	02. Seleksi, pembinaan, dan pengiriman OOSN	10 besar nasional							
					Angka Putus Sekolah	0.2%	03. seleksi, pembinaan dan pengiriman FLSSN	10 besar nasional							
							04. Seleksi, pembinaan, dan pengiriman Debat Bahasa	2 medali							
							05. Lomba, Pembinaan, dan pengiriman OPSI	4 medali							
							06. Lomba, pembinaan, dan pengiriman FIKSI	6 medali							
							07. Seleksi, pembinaan, dan pengiriman LCC UUD 1945	4 besar nasional							
							08. Pengiriman Festival Literasi Sekolah	3 medali.							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							09. Lomba Cerdas Cermat Sekolah Menengah	1 bidang							
							10. Pembinaan karakter dan budaya antikorupsi	100 siswa, 80 Pengurus FKPO dan 100 orang dari Forum Waka Kesiswaan							
							11. Pembinaan minat bakat istimewa (3 bidang)	3 bidang (Sains, olahraga, seni)							
							12. Penyusunan Karya tulis penelitian 50 karya	50 karya							
							13. Pembekalan kewirausahaan siswa 6 bidang	6 (enam) bidang							
							14. Penerbitan Jurnal Sagasitas sebanyak 2 edisi	2 edisi							
							15. Penerbitan Majalah BIAS sebanyak 2 edisi	2 edisi							
1.01.1.01.01.00.15.007	Pembinaan Siswa SMK	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY dan Luar DIY	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	80.3%	1. Seleksi, pembinaan dan pengiriman lomba SMK pada kejuaraan OOSN	peringkat 3 besar nasional	Dukungan terhadap capaian 40 medali	100%	Rp. 9.232.440.000,00	Rp. 11.521.895.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	40medali	2. Seleksi, pembinaan dan pengiriman lomba SMK pada kejuaraan FLSSN al	peringkat 3 besar nasional							
					Angka Putus Sekolah	0.2%	3. Seleksi, Pembekalan/Kemah Ilmiah dan penerbitan Jurnal hasil Penelitian Siswa (Teknologi Tepat Guna)	50 karya ilmiah siswa							
							4. Seleksi, pembinaan dan pengiriman lomba SMK pada kejuaraan Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Nasional	Peringkat 3 besar nasional							
							5. Pusat Pengembangan Minat dan Bakat Istimewa Siswa SMK	15 sekolah							
1.01.1.01.01.00.15.008	Sarana Prasarana Pendidikan Menengah	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Cangkringan Piyungan Playen	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	80.3%	Terlaksananya DAK 2020	2 jenjang	Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A 80,30%	100%	Rp. 10.010.000,00	Rp. 1.296.444.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	40medali									
					Angka Putus Sekolah	0.2%									

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga												Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.01.1.01.01.00.15.010	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMA	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Kualitas SDM	DIY	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	80.3%	1. Koordinasi Pokja Pengembang Kurikulum	1 dokumen perangkat pembelajaran	Dukungan terhadap capaian Presentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A 80,30%	100%	Rp. 128.042.000,00	Rp. 1.211.584.800,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	40medali	2. Bimtek Guru Mapel	15 mapel							
					Angka Putus Sekolah	0.2%	3. Bimtek Klinik Sains	Silabus Olimpiade Sains 6 bidang							
1.01.1.01.01.00.15.011	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMK	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Sekolah dengan Akreditasi A	80.3%	1. Pengembangan Kurikulum SMK (Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum, Penyusunan Bahan Ajar, Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Teaching Factory)	6 silabus/RPP (Rencana tahun 2019 ada 6 Kompetensi Keahlian yaitu Kel Teknologi : 2 kk, kesehatan : 2 kk, pariwisata : 2 kk, Bismen : 2 kk, Seni : 2 kk, Pertanian Kelautan : 2 kk)	Dukungan terhadap capaian Presentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A 80,30%	100%	Rp. 1.417.645.000,00	Rp. 3.735.386.600,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah	40medali	2. Peningkatan dan pengembangan MGMP SMK	3 dokumen SKL untuk 6 bidang keahlian							
					Angka Putus Sekolah	0.2%	3. Pengawasan sekolah dalam Penjinan pada Satuan Pendidikan Menengah	1 dokumen perjinan pembukaan dan penutupan pada satuan pendidikan menengah							
							4. Pelaksanaan MKKS dalam penyusunan soal penjurjagan (UKK) dan pelaksanaan Magang di industri	9 soal UKK Mapel (Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Matematika, teknologi, kesehatan, bismen, pariwisata, pertanian kelautan, seni kerajinan)							
							5. Penelusuran dan keteserapan lulusan SMK di dunia kerja	1 dokumen							
1.01.1.01.01.00.16	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS										Rp. 24.892.379.000,00	Rp. 29.131.902.500,00			
1.01.1.01.01.00.16.001	Pengembangan Layanan Khusus Autis	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Sentolo	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	52.56%	Layanan terapi , Asesmen dan Pendidikan Transisi bagi Anak Autis	164 anak	Dukungan terhadap capaian persentase jumlah SLB dengan akreditasi A 52,56%	100%	Rp. 1.360.310.000,00	Rp. 1.737.350.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	9medali									

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga												Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.01.1.01.01.00.16.002	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PK-PLK	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY dan Luar DIY	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	52.56%	"Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Lomba Olahraga Khusus Anak Tuna Grahita	peringkat 3 nasional	dukungan terhadap capaian perolehan jumlah medali 9 medali	100%	Rp. 1.819.302.000,00	Rp. 2.027.735.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	9medali	ABK Berseri	peringkat 3 nasional							
							Jambore bagi anak SLB	400 siswa							
							Ketrampilan	peringkat 3 nasional							
							Literasi	peringkat 3 nasional							
							Lomba FLS2N	peringkat 3 nasional							
1.01.1.01.01.00.16.003	Bantuan Operasional Sekolah SLB	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	52.56%	1. Penyaluran Beasiswa Magang	175 Anak ABK terampil di bidang yang diminatinya	Dukungan terhadap capaian persentase jumlah SLB dengan akreditasi A 52,56%	100%	Rp. 9.572.453.000,00	Rp. 10.894.149.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	9medali	2. Bantuan Operasional Sekolah	70 SLB Swasta							
							3. Pemberian akan tambahan bagi SLB (PMTAS)	1542 siswa SLBN							
							4. Penyaluran Beasiswa Inklusi	700 siswa SD, 224 siswa SMP, 90 Siswa SMA							
							5. Penyediaan Biaya Asrama SLB Negeri	5 SLBN							
1.01.1.01.01.00.16.004	Pelayanan Pendidikan SLBN	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Bantul Danurejan Gondokusuman Pakem Playen Umbulharjo Wates Wonosari	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	52.56%	Operasional pada SLB Negeri	9 sekolah	Dukungan terhadap capaian jumlah SLB dengan Akreditasi A	100%	Rp. 10.874.218.000,00	Rp. 12.500.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	9medali									
1.01.1.01.01.00.16.005	Pembudayaan Pendidikan Inklusif	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Jumlah SLB dengan Akreditasi A	52.56%	1. Penyelenggaraan Pusat Pengembangan Minat Bakat Istimewa (PPMBI) SD dan SMP	3 bidang (olahraga, seni dan sains) SD dan SMP	Dukungan terhadap capaian persentase jumlah SLB dengan akreditasi A 52,56%	100%	Rp. 1.266.096.000,00	Rp. 1.972.668.500,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus	9medali	2. Pembinaan Pendidikan Inklusif	20 sekolah inklusi di 3 jenjang SD, SMP, SMA/SMK							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							3. Pembinaan Pusat Keberbakatan	4 bidang (tari, nyanyi, IT dan lukis), sasaran per bidang 15 anak (3 jenjang)							
1.01.1.01.01.00.17	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN										Rp. 11.178.644.000,00	Rp. 15.091.427.924,00			
1.01.1.01.01.00.17.004	Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.56%	1. Pengelolaan sistem informasi pendidikan (Dapodik SMA, Dapodik SMK, Dapodik SLB, dan Website Dikpora DIY)	4 sistem informasi	Dukungan terhadap capaian Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK, dan SLB 99,56%	100%	Rp. 1.382.125.000,00	Rp. 1.933.250.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	57medali	2. PPDB online	118 SMAN dan SMKN							
1.01.1.01.01.00.17.006	Penyelenggaraan Ujian	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.56%	Ujian Jenjang SD/MI	Siswa jenjang SD/MI/SDLB dapat mengikuti ujian nasional	Dukungan terhadap capaian angka kelulusan jenjang SMA, SMK, dan SLB 99,56%	100%	Rp. 1.658.026.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	57medali									
1.01.1.01.01.00.17.007	Penguatan Kelembagaan Bidang Pendidikan	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.56%	Fasilitasi lembaga di bidang pendidikan	6 lembaga pendidikan	Dukungan terhadap capaian Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK, dan SLB 99,56%	100%	Rp. 936.667.000,00	Rp. 1.230.722.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	57medali									
1.01.1.01.01.00.17.008	Apresiasi Prestasi dan Kreativitas Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.56%	1. Penghargaan prestasi bidang olahraga dan pendidikan	400 orang	Dukungan terhadap capaian jumlah medali lomba kompetisi nasional dan internasional 57 medali	100%	Rp. 3.793.215.000,00	Rp. 4.150.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	57medali	2. Gebyar Pendidikan	3100 orang							
1.01.1.01.01.00.17.011	Pengiriman Lomba Dikdas dan PNFI	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY dan luar DIY	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.56%	1. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman OSN SD dan SMP	10 Medali	Dukungan terhadap capaian jumlah medali lomba kompetisi nasional dan internasional	57 medali	Rp. 3.265.258.000,00	Rp. 4.527.455.924,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	57medali	2. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman O2SN SD dan SMP	20 Medali							
							3. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman FLS2N SD dan SMP	6 Medali							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga														Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)		
							4. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman LPSN SMP	5 Medali								
							5. Penyelenggaraan Lomba Dokter Kecil	5 tim dokter kecil								
							6. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman Lomba Sekolah Sehat	1 jenjang kejuaraan								
							7. Penyelenggaraan lomba MTQ Pelajar	22 Cabang lomba								
							8. Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi	Masuk dalam 3 besar Nasional								
1.01.1.01.01.00.17.012	Model Unggulan Mutu Pendidikan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	99.56%	Penyelenggaraan Professor Goes to School	5 kab/kota	Dukungan terhadap capaian Angka kelulusan jenjang SMA, SMK, dan SLB 99.56%	100%	Rp. 143.353.000,00	Rp. 1.250.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan		
					Jumlah Medali Lomba Kompetisi Nasional dan Internasional	57medali										
1.01.1.01.01.00.18	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										Rp. 48.358.527.000,00	Rp. 68.114.900.000,00				
1.01.1.01.01.00.18.005	Verifikasi Tunjangan Penghasilan Guru dan Penyediaan Insentif	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	87.54%	1. Bimtek Pemberkasan Tunjangan Profesi Guru /TPG (SMA)	69 orang/sekolah	dukungan terhadap capaian peningkatan kapasitas dan kompetensi PTK 87,54%	100%	Rp. 354.052.000,00	Rp. 614.900.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan		
							2. Bimtek Pemberkasan Tunjangan Profesi Guru /TPG (SMK DAN SLB)	58 orang/sekolah								
							3. Identifikasi, Verifikasi dan Validasi data TPG (Sosialisasi)	126 orang/sekolah dan petugas 8 org								
							4. Bimtek Pengelolaan GTK (SMA).	69 orang/sekolah								
							5. Bimtek Pengelolaan GTK SMK DAN SLB).	58 orang/sekolah								
							6. Workshop Penyusunan Pedoman Perlindungan PTK	60 orang/sekolah								
1.01.1.01.01.00.18.006	Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	87.54%	01. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.684 Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dukungan terhadap capaian pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten	87.54%	Rp. 46.770.934.000,00	Rp. 65.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan		
							02. Seleksi Anugerah Konstitusi bagi Guru PPKn Jenjang Dikdas dan Dikmen	40 Guru Jenjang Dikdas dan Menengah								
							03. Olimpiade Guru Nasional (OGN)	150 Guru Jenjang Dikdas dan Menengah								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga												Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							04. Pemilihan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Administrasi Berprestasi	75 peserta, 15 jenjang lomba							
							05. Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi	75 peserta, 15 jenjang lomba							
							06. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	127 Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB Negeri							
							07. Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru	5.150 dokumen PAK							
							08. Bimbingan Teknis Calon Asesor Penilaian Kinerja Guru	40 guru							
							09. Pemberian insentif GTY dan PTY	1.264 pendidik dan tenaga kependidikan							
							10. Pemberian Honorarium K2	520 pendidik dan tenaga kependidikan							
							11. Bimbingan Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah	40 guru							
1.01.1.01.01.00.18.007	Pembinaan Karir dan Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	87.54%	1. Penyediaan Biaya Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dikmensus Kerjasama dengan LPTK	104 Guru	Dukungan terhadap capaian pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten 87.54%	100%	Rp. 1.233.541.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							2. Pemetaan Data Kebutuhan Guru Dikmensus	457 sekolah							
							3. Peningkatan Kompetensi abad 21 GTK Dikmensus	127 guru							
1.01.1.01.01.00.20	PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)										Rp. 4.130.455.000,00	Rp. 9.429.821.440,00			
1.01.1.01.01.00.20.001	Produksi Media Pembelajaran	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK	81%	1. Peningkatan kompetensi guru bidang TIK	740 guru	Dukungan terhadap capaian Persentase sekolah menengah dan khusus yang melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK 81%	100%	Rp. 1.095.700.000,00	Rp. 2.250.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							2. Produksi media untuk jogjabelajar.org sebanyak	60 judul							
							3. Pembangunan aplikasi jogjabelajar class v.3	1 aplikasi							
							4. Produksi media pembelajaran untuk Anak Berkebutuhan Khusus	5 jenis ketunaan							
							5. Pengembangan media Virtual Reality untuk terapi respon dan fokus	2 aplikasi							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga												Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.01.1.01.01.00.20.002	Pelayanan dan Publikasi Media Pembelajaran Berbasis TIK	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK	81%	1. Pengelolaan IDC BTS dan jaringan	1 unit IDC, 65 BTS/Repeator ,	Dukungan terhadap capaian Persentase sekolah menengah dan khusus yang melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK 81%	100%	Rp. 3.034.755.000,00	Rp. 7.179.821.440,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							2. Inovasi dan kreasi bagi para guru dan siswa dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran dan gebyar anugerah khajajar	12 lomba 600 peserta							
							3. Layanan pembelajaran dan pendampingan TIK dengan Mobile Learning Service	50 Lokasi							
							4. Publikasi melalui Bulletin Warta Guru dan Jurnal Adi Karsa	3 edisi buletin dan 2 edisi Jurnal							
							5. Pengembangan Jogjabelajar	18 judul JB Tube							
1.01.1.01.01.00.21	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK										Rp. 7.715.055.000,00	Rp. 8.000.000.000,00			
1.01.1.01.01.00.21.001	Pelayanan Pendidikan pada BLUD	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Peserta Didik yang Mendapatkan Layanan Pendidikan Teknik Berstandar	2080peserta	Siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan teknik terstandar	2080 siswa	Dukungan terhadap capaian peserta didik yang mendapatkan pelayanan pendidikan teknik berstandar 2080 siswa	100%	Rp. 7.715.055.000,00	Rp. 8.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
1.01.1.01.01.00.22	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL										Rp. 1.856.587.000,00	Rp. 2.455.022.400,00			
1.01.1.01.01.00.22.002	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Bantul	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Bantul	80.67%	01. Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kabupaten	6 kejuaraan (OSN, OOSN, FLSSN, Debat Bahasa, LCC UUD, LCC SM)	Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP 80.67%	100%	Rp. 1.856.587.000,00	Rp. 2.455.022.400,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							02. Penyelenggaraan Lomba SMK tingkat Kabupaten	3 kejuaraan (OOSN dan FLSSN, FIKS)							
							03. Penyelenggaraan Lomba PTK tingkat Kabupaten	3 kejuaraan							
							04. Penyusunan soal try out ujian nasional	soal 8 mapel							
							05. Pembinaan Karakter Kebangsaan	170 siswa							
							06. Pembimbingan Penulisan Ilmiah	60 guru							
							07. Diklat Assesor Kompetensi Keahlian	50 guru							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							08. Manajemen SDM Pendidikan	4 bidang							
							09. Lomba sekolah sehat	8 sekolah							
							10. UKK	49 SMK							
1.01.1.01.01.00.23	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN										Rp. 1.796.223.000,00	Rp. 2.379.699.000,00			
1.01.1.01.01.00.23.005	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Sleman	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Sleman	85%	01. Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kabupaten	6 kejuaraan (OSN, OOSN, FLSSN, Debat Bahasa, LCC UUD, LCC SM)	Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP 85.00%	100%	Rp. 1.796.223.000,00	Rp. 2.379.699.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							02. Penyelenggaraan Lomba SMK tingkat Kabupaten	2 kejuaraan (OOSN dan FLSSN)							
							03. Penyelenggaraan Lomba PTK tingkat Kabupaten	3 kejuaraan							
							04. Penyusunan soal Try Out Ujian Nasional	60 guru							
							05. Peremajaan Data Dapodik	105 operator sekolah							
							06. Pendidikan Karakter	56 siswa							
							07. Forum Waka Kesiswaan	105 waka kesiswaan							
							08. Revitalisasi MGMP	120 guru							
							09. Bimtek SDM	105 guru							
							10. Bimbingan Forum Pengurus OSIS	105 ketua OSIS							
							11. MTQ	800 siswa							
							13. Diklat Asesmen Calon Asesor	24 guru							
							14. Pembinaan LSS	105 sekolah							
							15. Verifikasi Alat UKK	57 sekolah							
1.01.1.01.01.00.24	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO										Rp. 1.929.522.000,00	Rp. 3.191.967.900,00			
1.01.1.01.01.00.24.003	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Kulon Progo	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Kulon Progo	75.67%	01. Penyelenggaraan Lomba PTK tingkat Kabupaten	3 Kejuaraan	Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP 75.67%	100%	Rp. 1.929.522.000,00	Rp. 3.191.967.900,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							02. Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kabupaten	7 Kejuaraan							
							03. Penyelenggaraan Lomba SMK tingkat Kabupaten	2 Kejuaraan							
							04. Penyusunan soal Latihan Ujian Nasional dan kisi- kisi USBN	1 paket							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga												Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							05. Penguatan Pendidikan Karakter	50 orang							
							06. Lomba sekolah sehat	1 sek							
							07. Pembinaan akreditasi	53 sek							
							08. Bimtek Penulisan Karya Ilmiah Guru	90 orang							
							09. Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru	120 orang							
							10. Penguatan FKPO	60 orang							
							11. Penguatan WakaKesiswaan	60 orang							
							12. Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Asesor Guru SMK	24 orang							
1.01.1.01.01.00.25	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL										Rp. 1.049.025.000,00	Rp. 0,00			
1.01.1.01.01.00.25.004	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Gunungkidul	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Gunungkidul	83.22%	01. Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kabupaten	6 kejuaraan (OSN, OOSN, FLSSN, Debat Bahasa, LCC UUD, LCC SM)	Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP 83.22%	100%	Rp. 1.049.025.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							02. Penyelenggaraan Lomba SMK tingkat Kabupaten	2 kejuaraan (OOSN dan FLSSN)							
							03. Penyelenggaraan Lomba PTK tingkat Kabupaten	3 kejuaraan							
							04. MTQ	75 sekolah							
							05. Pembinaan Karakter Kebangsaan	75 sekolah							
							06. Penyusunan Soal Try Out UN	Soal Mapael UN IPA IPS dan Bahasa Bagi SMA dan Semua mata Pelajaran yang Di UN							
							07. Lomba Sekolah Sehat	1 sekolah unggulan							
							08. Lomba Inovasi Pembelajaran	1 event							
1.01.1.01.01.00.26	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA										Rp. 1.676.635.000,00	Rp. 1.954.703.500,00			
1.01.1.01.01.00.26.002	Pelayanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Kota Yogyakarta	Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kota Yogyakarta	86.9%	01. Pendidikan Karakter	56 Siswa	Dukungan terhadap capaian persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP 86.90%	100%	Rp. 1.676.635.000,00	Rp. 1.954.703.500,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga												Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							02. Penyelenggaraan Lomba SMA tingkat Kota	6 kejuaraan (OSN, OOSN, FLSSN, Debat Bahasa, LCC UUD, LCC SM)							
							03. Penyelenggaraan Lomba SMK tingkat Kota	2 kejuaraan (OOSN dan FLSSN)							
							04. Penyelenggaraan Lomba PTK tingkat Kota	2 kejuaraan							
							05. Seleksi MTQ Tingkat Kota Yogyakarta	750 Siswa							
							06. Seleksi Sekolah Sehat Tingkat Kota Yogyakarta	71 Sekolah							
							07. Lomba Inovasi Pembelajaran Tingkat Kota Yogyakarta	40 Guru							
							08. Verifikasi Tempat dan Alat Uji Kompetensi Kejuruan	30 Sekolah							
							09. Penyusunan Soal Try Out Ujian Nasional	60 Guru Mapel UN							
							10. Bimtek Pengembangan MGMP	66 Guru							
							11. Forum Waka Kesiswaan	77 Guru							
							12. Forum Waka Kurikulum	71 Guru							
							13. Workshop Pembuatan Karya Tulis	54 Guru							
1.19	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA														
1.19.1.01.01.00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga														
1.19.1.01.01.00.15	PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN										Rp. 5.946.865.000,00	Rp. 10.582.849.900,00			
1.19.1.01.01.00.15.001	Pembinaan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan	26%	1. Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor Tk Nasional	5 Perwakilan DIY	dukungan terhadap peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan 26%	100%	Rp. 606.351.000,00	Rp. 709.666.100,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							2. Seleksi dan Pengiriman Kapal Pemuda Nusantara	4 Orang peserta							
							3. Seleksi dan Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Negara	4 Orang peserta							
1.19.1.01.01.00.15.002	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Banguntapan Depok Kraton Mlati	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan	26%	1. Rehabilitasi Youth Centre	Pagar 100x1,5m dan Tempat Sampah 4x3m	Dukungan terhadap capaian persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan 26%	100%	Rp. 301.491.000,00	Rp. 4.000.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							2. Rehabilitasi Pondok Pemuda	Parkir motor 2x20m							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga												Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indikator Kinerja						(12)	(13)	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				(14)	(15)	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					OPD
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	1/2/3	1/2/3								
1.19.1.01.01.00.15.003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Kepemudaan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan	26%	1. Seleksi dan Pelatihan Calon Anggota Paskibraka	80 Siswa	dukungan terhadap peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan 26%	100%	Rp. 4.283.805.000,00	Rp. 4.196.632.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							2. Lomba Baris Berbaris	2.100 Orang							
							3. Pemuda Kader Anti Narkoba	550 Orang							
							4. Jambore Pemuda Daerah	200 Orang							
							5. Hibah kelembagaan	2 lembaga (Kwarda dan KNPI)							
1.19.1.01.01.00.15.004	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan	26%	1. Sentra Kewirausahaan Pemuda	6 SKP	dukungan terhadap peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan 26%	100%	Rp. 755.218.000,00	Rp. 1.676.551.800,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
							2. Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda Kantong Kemiskinan	60 Orang (20 kelompok)							
1.19.1.01.01.00.16	PROGRAM PEMBINAAN OLAHRAGA										Rp. 22.293.864.000,00	Rp. 34.015.401.950,00			
1.19.1.01.01.00.16.002	Pembinaan dan Pengiriman Kompetisi Olahraga Nasional	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY dan Luar DIY	Jumlah Medali dalam Kompetisi POPWIL	6medali	01. Pembinaan atlet berbakat usia 10 - 18 tahun selama 8 bulan	284 orang	Dukungan terhadap capaian Jumlah Medali dalam Kompetisi POPWIL 6 medali	100%	Rp. 22.293.864.000,00	Rp. 34.015.401.950,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan	
					Jumlah Medali dalam Kompetisi POPNAS dan PEPARPENAS	12medali	02. Pembinaan dan Pengiriman Kontingen POPWIL / POPNAS	8 cabor							
							03. Pekan Olahraga dan Seni Santri Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)	9 Cabor							
							04. Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS)	3 Cabor							
							05. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	26 cabor							
							06. Penyelenggaraan Pekan Paralimpic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)	3 cabor							
							07. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Santri Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)	8 cabor							
							08. Penyelenggaraan Kejurda Olahraga Pelajar	5 cabor							
							09. Penyelenggaraan Kejuaraan Voli Piala Raja	16 team							
							10. Penyelenggaraan Tri Lomba Juang (TLJ)	650 orang							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 1.054.333.658.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							11. Fasilitasi Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAOORNAS)	1 event						
							12. Penyelenggaraan Kejuaraan Catur / Bridge	1 event						
							13. Pengiriman Kontingen Olahraga Tradisional (Festival Olahraga Tradisional)	30 orang						
							14. KONI dan NPC	2 lembaga						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan														Jumlah Pagu : Rp. 148.224.764.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
1	Wajib																
1.02	KESEHATAN																
1.02.1.02.01.00	Dinas Kesehatan																
1.02.1.02.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.629.945.000,00	Rp. 2.585.000.000,00					
1.02.1.02.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Belanja benda pos	1 jenis	Dukungan 55,93 % Kelancaran administrasi perkantoran	100%	Rp. 1.454.594.000,00	Rp. 1.085.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan			
							10. Jasa kebersihan kantor Dinkes dan Instalasi Farmasi	1 paket									
							11. Pemeliharaan alat-alat kantor	5 jenis									
							12. Belanja ATK	67 Jenis									
							13. Belanja cetakan	8 Jenis									
							14. Belanja penggandaan	56000lembar									
							15. Belanja alat listrik	17 Jenis									
							16. Belanja alat kebersihan	12 Jenis									
							17. Surat Kabar	3 eksemplar									
							18. Pemusnahan arsip	100 Boks Dokumen									
							19. Pengisian tabung pemadam kebakaran	23 Unit									
							2. Pengiriman surat	1 paket									
							20. Logistik coldroom	1 paket									
							3. Belanja telepon, air, listrik, dan fax	12 bulan									
							4. Pulsa aduan masyarakat	1 paket									
							5. Pembayaran PBB	1 tahun									
							6. KIR R4 (mobil pick up)	2 kali									
							7. STNK R4	1 tahun									
							8. STNK R2	1 tahun									
							9. Retribusi sampah	12 Bulan									
1.02.1.02.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Honor pengelola keuangan	1. 12 orang	Dukungan 20,22 % Kelancaran Pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 911.110.000,00	Rp. 750.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan			
							2. Honorarium pengadministrasi kepegawaian	2. 12 bulan									

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan														Jumlah Pagu : Rp. 148.224.764.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan			
					Target	Target	Target	Target	Target	Target							
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)	(14)	(15)	
							3.Honorarium PTT	3. 9 jenis									
							4. Jasa Keamanan Kantor	4. 1 tahun									
1.02.1.02.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Belanja makan minum rapat	1) 3250 ob	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 264.241.000,00	Rp. 750.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan			
							2. Perjalanan Dinas dalam Daerah	2) 1 tahun									
							3. Perjalanan Dinas Luar daerah	3) 1 Tahun									
1.02.1.02.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 794.750.000,00	Rp. 523.000.000,00					
1.02.1.02.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1) Belanja pengadaan laptop;	1) 4 Unit	Kebutuhan sarana prasarana aparatur terpenuhi	100%	Rp. 228.200.000,00	Rp. 33.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan			
							2) Belanja pengadaan komputer	2) 3 Unit									
							3) Belanja pengadaan LCD	3) 2 Unit									
							4) LED Monitor	7 Unit									
							5) Scanner	1 Unit									
1.02.1.02.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Pemeliharaan lift gudang farmasi	1. 4 Kali	Kebutuhan Pemeliharaan Prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi	100%	Rp. 160.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan			
							2. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2. 1 paket									
1.02.1.02.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas/operasional terpelihara	Kendaraan roda 4 sebanyak 23 Unit dan roda 2 sebanyak 35 Unit	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/operasional terpenuhi)	100%	Rp. 322.580.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan			
1.02.1.02.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1) Belanja Pemeliharaan alat-alat kantor	1) 3 jenis	Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (perlengkapan gedung kantor) terpenuhi	100%	Rp. 83.970.000,00	Rp. 90.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan			
							2) Belanja Pemeliharaan Perlengkapan kantor;	2) 6 jenis									
							3) Belanja Pemeliharaan mebelair	3) 1 Paket									

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan												Jumlah Pagu : Rp. 148.224.764.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.02.1.02.01.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 100.175.000,00	Rp. 65.000.000,00			
1.02.1.02.01.00.03.001	Pengembangan I S O	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. laporan audit internal	1) 2 laporan	Terlaksananya penerapan ISO 9001 2015	80%	Rp. 81.130.000,00	Rp. 35.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
							2) Surveilans audit;	2) 1 rekomendasi							
							3) survei kepuasan masyarakat	3) 2 Laporan							
							4) Kajian Manajemen	4) 2 kali							
							5) Bimbingan Teknis SMM ISO	5) 35 orang							
							6) Pegawai Dinkes terorientasi	6) 140 orang							
1.02.1.02.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1)Angka kredit jabatan fungsional	1) 1 Dokumen	Kebutuhan pemahaman dan karir terkait jabatan fungsional terpenuhi	100%	Rp. 19.045.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
							2) Penilaian AK dan rekomendasi UKOM	2) 2 Dokumen PAK dan rekomendasi UKOM							
1.02.1.02.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 218.542.000,00	Rp. 226.141.000,00			
1.02.1.02.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Keuangan SKPD	1 Dolumen	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan terselesakannya Laporan Keuangan	100%	Rp. 11.141.000,00	Rp. 11.141.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
1.02.1.02.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA	1. 1 Dokumen	Dukungan 84,07 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD, kelancaran pelaksanaan penyesuaian laporan kinerja SKPD	100%	Rp. 195.404.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
							2. Dokumen Renja yang sesuai dengan Renstra 2017 - 2022	2. 1 Dokumen							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan												Jumlah Pagu : Rp. 148.224.764.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							3. Pengembangan aplikasi/software/website pendukung kinerja Dinas Kesehatan dan Puskesmas DIY	3. 1 Paket							
							4. Jumlah materi informasi tentang kesehatan yang lengkap, akurat, dan terkini	4. 180 Materi							
							5. Rekomendasi hasil Penelitian Kesehatan	5. 1 Dokumen Rekomendasi							
1.02.1.02.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan	11 program 25 kegiatan	Dukungan 7,83% terhadap penatausahaan	10%	Rp. 11.997.000,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
1.02.1.02.01.00.15	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT										Rp. 4.970.947.000,00	Rp. 3.300.000.000,00			
1.02.1.02.01.00.15.002	Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	2. Pembangunan Manusia dan Peningkatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Kabupaten Bantul Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Sleman	Persentase Balita Sehat	40.06%	01. Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ;	80 desa	1) Desa yang telah mengimplementasikan 5 pilar STBM sebanyak 18.3%	92 %	Rp. 4.416.220.000,00	Rp. 2.600.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
					Persentase Desa Sehat Mandiri	54.66%	02. Sekolah (SD, SMP, SLTA) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan	1774 sekolah	2) TTU yang memenuhi syarat 92%	18,26%					
							03. Puskesmas dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	72 puskesmas	3) Persentase Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Strata Purnama dan Mandiri 49,77%	100%					
							04. RS dilakukan IKL	45 RS	4) Pembentukan Pos UKK di wilayah Kerja Puskesmas 60.33	13,22 %					
							05. Pasar dilakukan IKL	90 pasar	5) Puskesmas yang melakukan penjarangan dini atau pembinaan kebugaran jasmani anak sekolah melalui gerakan peregangan atau bermain pada jam istirahat	49,77%					
							06. Hotel dilakukan IKL	333 hotel	6) Jumlah kab/kota jamban sehat untuk masyarakat	5 kab/kota					
							07. Kab/Kota dilakukan pembinaan Kab/Kota Sehat (KKS)	5 Kab Kota							
							08. Kampanye GERMAS	5 kab/kota							
							09. Kajian pemanfaatan media dan pembuatan media promosi kesehatan	1 dokumen							
							10. Penerbitan Majalan Mensana	1 paket							
							11. Media Promosi Film/Iklan Layanan Masyarakat	1 paket							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan												Jumlah Pagu : Rp. 148.224.764.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							12. Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja puskesmas	193 unit							
							13. Puskesmas Melaksanakan Kesehatan olahraga	121 Puskesmas							
							14. Bantuan Khusus Keuangan Jamban Sehat Untuk Masyarakat Miskin di DIY	Kota Yogyakarta (20 Unit); Bantul (350 unit); Gunungkidul (200 unit); Kulon Progo (374 unit); Sleman (200 unit)							
1.02.1.02.01.00.15.003	Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Kesehatan	Persentase Balita Sehat	40.06%	1) Pelatihan kompetensi dasar bagi petugas gizi di 54 faskes;	1) 54 petugas;	1. Penurunan Persentase Balita Kurus (0,1 %);	100%	Rp. 554.727.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
					Persentase Desa Sehat Mandiri	54.66%	2) Surveilans Gizi di 2 Kabupaten (40%);	2) 2 kabupaten;	2. Penurunan Persentase Ibu Hamil; Kurang Energi Kronik (KEK) (0,25 %);	100%					
							3) Pemenuhan Standar 69 Fasilitas Kesehatan yang memiliki Fasilitas Gizi;	3) 69 faskes;	3. Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenata minimal 4x (K4) (74 %);	100%					
							4) Pendampingan 2000 ibu hamil oleh tenaga terlatih (4,24%);	4) 1000 orang (2,12%);	4. Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) 86%	100%					
							5) Bimtek Pendampingan Ibu hamil bagi 80 orang Petugas Kesehatan ;	5) 80 orang;							
							6) Penambahan Buku 39.175 Eksemplar untuk Sarana Penunjang Pendampingan;	6) 39.175 eksemplar;							
							7) Pelaporan PWS KIA Lengkap dan Tepat Waktu oleh 2 Kabupaten/Kota	7) 2 kab/kota							
1.02.1.02.01.00.16	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT										Rp. 2.349.702.000,00	Rp. 0,00			
1.02.1.02.01.00.16.001	Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan Surveilans Penyakit Potensial Wabah	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Kesehatan	Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	58.92%	1. Anak < 1 th mendapatkan imunisasi dasar lengkap	96 %	jumlah anak baduta yang terlindungi dari PD3I / jumlah seluruh anak baduta	92.05%	Rp. 576.223.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
							2. Anak Baduta memperoleh imunisasi lanjutan (booster)	91 %	persentase penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%					
							3. Persentase Pengamatan Epidemiologi kurang dari 24 jam	100 %							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan												Jumlah Pagu : Rp. 148.224.764.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(7)
1.02.1.02.01.00.16.002	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Kesehatan	Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	58.92%	1) Jumlah kabupaten/kota yang melakukan gerakan 1R1J	1) 5 kab/kota	1) Persentase kab/ kota dengan ABJ > 80 %	1) 60 %	Rp. 1.773.479.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
							10) Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan deteksi dini kanker (Sadanis dan IVA Test)	10) 5 kabupaten/ kota	10) penerimaan hibah kelembagaan KPAD	11) 500000000					
							11) Hibah Kelembagaan KPAD	11) 500.000.000	2) Persentase kab/kota yang cakupan penemuan pnemoni lebih dari 60%	2)60 %					
							2) Persentase fasyankes yang mampu tata laksana kasus pneumonia	2) 83,76 persen	3) Persentase cakupan penemuan TB	3) 36%					
							3) Jumlah Klinik yang melaksanakan strategi DOTS	3) 75 klinik	4) Persentase Penderita HIV yang menerima pengobatan ARV	4) 68%					
							4) Jumlah DPS yang tersosialisasikan ISTC (International Standart For Tuberculosis Care)	4) 100 DPS	5) API (Annual Parasite Incidence)	5) <1 permil					
							5) Jumlah fasilitas kesehatan yang melakukan pengobatan ARV	5) 17 faskes	6) Persentase kab/ kota yang memiliki 1 posbindu per desa	6) 20%					
							6) Jumlah kab/kota yang melakukan pengendalian kasus malaria	6) 5 kab/ kota	7) Persentase kab/ kota yang memiliki 10 persen pandu PTM	7) 10%					
							7) Jumlah Kab/ Kota yang melakukan posbindu sesuai standar	7) 5 kabupaten/ kota	8) Persentase kab/ kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa	8) 10%					
							8) Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pandu PTM	8) 5 kabupten/ kota	9) Persentase Kab/ kota yang melakukan deteksi dini sadanis dan iva tes > 3 persen dari total WUS	9) 20%					
							9) Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan skrining jiwa	9) 5 kabupaten/ kota							
1.02.1.02.01.00.17	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN										Rp. 42.440.159.000,00	Rp. 436.264.950,00			
1.02.1.02.01.00.17.004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lain	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Wates	Persentase Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lainnya Sesuai Standar Pelayanan	48.08%	1) Puskesmas yang mendapatkan pembinaan pelayanan	100 puskesmas	FKTP dan FKTL yang memenuhi standar pelayanan	182 faskes	Rp. 42.181.397.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
							2) Klinik pratama yang mendapatkan pembinaan pelayanan	30 klinik	terbangunnya rumah sakit wates sesuai spesifikasi dan tepat waktu	100%					
							3) Rumah Sakit yang mendapatkan pembinaan pelayanan	60 RS							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan													Jumlah Pagu : Rp. 148.224.764.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							4) Laboratorium kesehatan yang mendapatkan pembinaan wilayah	2 lab							
							5) Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dengan sistem SPGDT	60 Faskes							
							6) BKK tahap III RSUD Wates	100%							
1.02.1.02.01.00.17.005	Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lainnya Sesuai Standar Pelayanan	48.08%	1. Puskesmas yang mendapatkan pembinaan mutu	121 puskesmas	Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL) dan pelayanan kesehatan lain yang menerapkan standar manajemen mutu dan manajemen pelayanan 120	100%	Rp. 258.762.000,00	Rp. 436.264.950,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
							2. Klinik pratama yang mendapatkan pembinaan mutu	30 klinik							
							3. RS yang mendapatkan pembinaan mutu	78 RS							
							4. Laboratorium yang mendapatkan pembinaan mutu	6 labkes							
1.02.1.02.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN										Rp. 760.175.000,00	Rp. 1.936.264.950,00			
1.02.1.02.01.00.18.001	Peningkatan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Kesehatan	Persentase Fasyankes Kesehatan Memenuhi Standar Sarpras Perijinan SDMK dan Pembiayaan	62.32%	1. FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana	1. 241 FKTP	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) memenuhi standar perijinan SDM tenaga dan sarana 83,7%	100%	Rp. 377.748.000,00	Rp. 436.264.950,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
							10. Tenaga kesehatan yang mengikuti uji kompetensi	10. 100%							
							2. Jumlah FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan) yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana dan jaminan kesehatan	2. 50 FKTL							
							3. Sistem Informasi Tenaga dan Sarana Kesehatan (SINTESA) terintegrasi dengan aplikasi kab/kota	3. 3 Kab/Kota							
							4. FKTL menerapkan pedoman pencegahan kecurangan/fraud dalam pelayanan jaminan kesehatan	4. 40 FKTL							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan														Jumlah Pagu : Rp. 148.224.764.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
							5. Tenaga kesehatan yang terpilih sebagai Tenaga Kesehatan Teladan	5. 25 tenaga kesehatan									
							6. Sarana Kesehatan mendapat visitasi untuk rekomendasi perijinan	6. 100%									
							7. Pembinaan Organisasi Profesi	7. 20 organisasi profesi									
							8. Pembinaan Wahana Program Dokter Internsip Indonesia (PIDI)	8. 17 wahana									
							9. Pembinaan perijinan tenaga dan sarana kesehatan	9. 5 kabupaten/kota									
1.02.1.02.01.00.18.002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Kesehatan	Persentase Fasyankes Kesehatan Memenuhi Standar Sarpras Perijinan SDMK dan Pembiayaan	62.32%	Jumlah Rekomendasi Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dan RS	35 sarana	Persentase sarana kefarmasian, perbekes dan makanan mengimplementasi standar 76,79%	100%	Rp. 382.427.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan			
					Persentase Kefarmasian, Perbekes dan Makanan Sesuai Standar	76.79%	Jumlah sarana produksi dan distribusi makanan yang dibina	30 sarana									
							Perbekkes (Perbekalan Kesehatan) dan obat bufferstock	1 Paket									
							Sarana produksi dan distribusi kefarmasian yang mendapatkan pembinaan	15 sarana									
1.02.1.02.01.00.19	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BALABKES										Rp. 12.448.992.000,00	Rp. 14.800.000.000,00					
1.02.1.02.01.00.19.001	Pelayanan Laboratorium Kesehatan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Mantrijeron	Jumlah Layanan Pengembangan Laboratorium untuk Mendukung Program Rujukan dan Kebutuhan Masyarakat	13layanan	1. Akreditasi Laboratorium (Surveilans ISO 17025, ISO 15189)	2 Rekomendasi	Dipertahankannya mutu pelayanan laboratorium	100%	Rp. 12.448.992.000,00	Rp. 14.800.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan			
							2. Uji Profisiensi Laboratorium	5 Sertifikat									
							3. Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	121 Sertifikat									
							4. Pengembangan SDM (Kalibrasi, ISO 17025:2005, Job Training diluar Balabkes danKalibrasi)	10 paket									
							5. Promosi Balai Labkes dan Kalibrasi	10 Jenis									
							6. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM)	1 paket									

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan												Jumlah Pagu : Rp. 148.224.764.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							7. Perjalanan dinas penunjang kegiatan Pengembangan Mutu Lab.	9 OP							
							8. Pengadaan peralatan lab	4 jenis							
							9. Pengadaan peralatan konsultasi Dokter (kursi pengambilan sampel)	1 unit							
1.02.1.02.01.00.20	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELKES										Rp. 6.775.042.000,00	Rp. 8.174.307.310,00			
1.02.1.02.01.00.20.001	Pelayanan Pelatihan SDM Kesehatan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Kalasan	Persentase Mantan Linatih yang Meningkatkan Kompetensinya	64%	Jumlah Pelatihan yang Diselenggarakan	22%	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan	82%	Rp. 6.775.042.000,00	Rp. 8.174.307.310,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
1.02.1.02.01.00.21	PROGRAM PELAYANAN PADA BLUD BAPEL JAMKESSOS										Rp. 40.493.842.000,00	Rp. 60.000.000.000,00			
1.02.1.02.01.00.21.001	Pelayanan Jaminan Kesehatan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Jetis	Jenis Layanan Jaminan Kesehatan Komplemen dan Suplemen Kesehatan	25layanan	02. Pelayanan Pembiayaan Klaim Jamkesa sesuai anggaran	100%	1. Laporan keuangan dan barang tersedia dan dikirim dengan tertib	100%	Rp. 40.493.842.000,00	Rp. 60.000.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
					Persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan	100%	03. Audit Survellans	1 kali	2. Penjaminan kesehatan kepada pasien jaminan kesehatan pada Bapel Jamkesos	100%					
							04. Peningkatan Kapasitas SDM dalam pelayanan jaminan kesehatan	1 kali	3. Indeks Kepuasan Masyarakat	85%					
							05. Data Kepesertaan Jamkes Terupdate	1 dokumen	4. Pelayanan penjaminan kepesertaan sesuai dengan peruntukannya	100%					
							06. Rekomendasi Pelayanan Kepesertaan dan Pengembangan	dokumen premi, dokumen kepuasan, SOP Penjaminan	5. Pelayanan Jamkes Kuratif (Buffer, Jamkesus), Preventif (TORCH, Garba II, Posbindu), Rehabilitatif	39.150 pasien Kuratif, 450 pasien Preventif, 400 pasien Homecare					
							07. Pengembangan dan pelayanan jamkes preventif dan rehabilitatif	2 Jenis layanan baru							
							08. Pelayanan penjangkauan khusus Disabilitas	2 lokasi pelayanan							
							1. Operasional perkantoran optimal	12 bln							
1.02.1.02.01.00.22	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSJ GRHASIA										Rp. 22.722.437.000,00	Rp. 0,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 148.224.764.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.00.22.001	Pelayanan Kesehatan Jiwa	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Pakem	Persentase Pasien yang Mampu ADL (Activity Daily Living)	88%	Pelayanan pendidikan dan pelatihan kesehatan	Jumlah praktikan : 2.700, Jumlah kunjungan diklat : 6.200 kunjungan	Kepuasan pasien	Indeks kepuasan pelanggan : 80 %	Rp. 22.722.437.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Angka Pasien Cidera karena Fiksasi	3%	Penanganan pasien	Rawat Inap : 2.300 pasien, Rawat Jalan : 49.000 pasien	Rekomendasi bagi Praktikan / Peserta Pendidikan dan Pelatihan	100 %				
					Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi kurang dari atau sama dengan 30 menit	86%								
					Rata-Rata Jam Pelatihan Karyawan Per Tahun	75%								
					Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan Jiwa kurang dari atau sama dengan 60 menit	69%								
					Tingkat Penggunaan Tempat Tidur/Bed Occupancy Rate (BOR)	62%								
					Penyelesaian Berkas Pengajuan Klaim Pasien Jaminan Kesehatan	78%								
					Penyusunan Laporan Tahunan Rumah Sakit	83%								
					Pemenuhan Sumber Daya Manusia Sesuai Analisis Beban Kerja	88%								
Kesesuaian Inventarisasi Barang Rumah Sakit	90%													
1.02.1.02.01.00.23	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RS PARU RESPIRA									Rp. 11.520.056.000,00	Rp. 13.528.666.000,00			
1.02.1.02.01.00.23.001	Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernapasan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Bantul	Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate) TB	84%	Penanganan pasien RSP Respira	11527 pasien	Indeks kepuasan pelanggan	80,69%	Rp. 11.520.056.000,00	Rp. 13.528.666.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Angka Kematian Pasien > 48 Jam	1.5%								
					Rata-Rata Kunjungan Rawat Jalan Per Hari	80kali kunjungan								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 148.224.764.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Bed Occupancy Rate (BOR)	60%								
					Length of stay (LOS)	5Hari								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

Jumlah Pagu : Rp. 256.698.127.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
															1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Wajib														
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1.03.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral														
1.03.1.03.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 15.883.984.000,00	Rp. 20.000.000.000,00			
1.03.1.03.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat Listrik	124 jenis	Dukungan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran terhadap Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 12.220.000.000,00	Rp. 12.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan	
							Alat Tulis kantor	245 jenis							
							Barang Cetak	35 jenis							
							Belanja pengisian tabung gas	12 unit							
							Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	25 unit							
							Jasa kebersihan kantor	1 tahun							
							Jasa Komunikasi, Listrik, Air	1 tahun							
							Jasa Laundry	1 tahun							
							Jasa Pembasmi tikus	1 tahun							
							jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	108 unit : 76 unit roda 2; 3 unit Roda 3; 22 unit roda 4; 7 unit roda 6							
							Jasa Surat Menyurat	7500 surat							
							Penatan Arsip	76000 arsip							
							Penggandaan	500000 lembar							
							Solar Operasional genset	1 tahun							
							Surat Kabar/Majalah	10 SKH							
1.03.1.03.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Jasa Keamanan Kantor	1 tahun	Dukungan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran terhadap Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 2.136.000.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan	
							Jasa Tenaga Pendukung	4 orang							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

Jumlah Pagu : Rp. 256.698.127.000,00

Nomor	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
1.03.1.03.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Daerah Terlaksana Dengan Baik	1 tahun - Golongan IV, 100 kali - Golongan III, 500 kali - Golongan II, 250 kali	Dukungan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi terhadap Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 1.527.984.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan		
							Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Jawa Terlaksana Dengan Baik	1 tahun - Golongan IV, 100 kali - Golongan III, 100 kali - Golongan II, 50 kali								
							Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Luar Jawa Terlaksana Dengan Baik	1 tahun - Golongan IV, 50 kali - Golongan III, 50 kali - Golongan II, 50 kali								
							Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	7500 OS								
1.03.1.03.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 3.515.000.000,00	Rp. 9.750.000.000,00				
1.03.1.03.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Tersedianya Mebeleur : - Meja Kerja	- 9 unit	Dukungan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan terhadap Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 450.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan		
							Tersedianya Peralatan Gedung Kantor : - AC - Filling Cabinet - Almari	- 12 unit - 5 unit - 2 unit								
							Tersedianya perlengkapan kantor : - Komputer - Printer - UPS - Laptop - Scanner	- 10 Unit - 9 unit - 30 unit - 5 unit - 1 unit								
1.03.1.03.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja	3 gedung :11.941 m2	Dukungan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor terhadap Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan		
							Pemeliharaan rumah jaga	4 gedung :750 m2								
1.03.1.03.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional SKPD	108 unit : 76 unit roda 2; 3 unit Roda 3; 22 unit roda 4; 7 unit roda 6	Dukungan Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional terhadap Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

Jumlah Pagu : Rp. 256.698.127.000,00

Nomor	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
1.03.1.03.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan alat-alat berat : - Generator Set - Excavator - Vibrator Roller	- 3 unit - 2 unit - 8 unit	Dukungan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan terhadap Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 365.000.000,00	Rp. 3.750.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan		
							Pemeliharaan alat-alat bermesin : - Pompa Air	1 unit								
							Pemeliharaan alat-alat kantor: - Sound System - Komputer - Laptop - Monitor - CPU - Hardisk - Printer	- 1 tahun - 80 kali - 48 kali - 10 buah - 8 buah - 8 buah - 20 buah								
							Pemeliharaan alat-alat komunikasi: - Radio Panggil	1 tahun								
							Pemeliharaan perlengkapan kantor: - AC - CCTV - Accu Solar Cell - Faksimili - Mesin Ketik	- 100 kali - 1 tahun - 1 tahun - 5 unit - 3 unit								
1.03.1.03.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 730.000.000,00	Rp. 765.000.000,00				
1.03.1.03.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Bahan penyusunan LKPJ dan LKJ Urusan PU, Perumahan & ESDM TH 2019	2 dokumen Bahan penyusunan LKPJ dan LKJ Urusan PU, Perumahan & ESDM TH 2019	Dukungan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan		
							Tersusunnya LKJIP TH 2019	1 dokumen LKJIP TH 2019								
1.03.1.03.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semesteran	2 laporan	Dukungan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Rp. 120.000.000,00	Rp. 120.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan		
							Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan	1 laporan								
							Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan	4 laporan								
							Laporan Keuangan Semester	2 laporan								
							Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	1 laporan								
							Laporan Keuangan Audited	1 laporan								
							Laporan Keuangan bulanan	12 laporan								
							Laporan Keuangan Triwulan	4 laporan								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

Jumlah Pagu : Rp. 256.698.127.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	DPA 2020	1 dokumen	Dukungan Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Rp. 565.000.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
							RKA TH 2021	1 dokumen						
							RKA-P TH 2020	1 dokumen						
							DPA-P TH 2020	1 dokumen						
							Forum PD	1 kesepakatan						
							Pengelolaan Web PU	1 tahun						
							Publikasi	Publikasi media cetak dan publikasi media elektronik						
							Renja SKPD Perubahan TH 2020	1 dokumen						
							Renja SKPD TH 2021	1 dokumen						
							ROPK 2020	1 dokumen ROPK						
							tenaga pendamping SKPD	6 bulan						
1.03.1.03.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD	12 laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD	Dukungan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.00.19	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN										Rp. 97.833.269.000,00	Rp. 226.118.416.240,00		
1.03.1.03.01.00.19.001	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunny Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	74,06%	Peningkatan Ruas Jalan Brosot-Toyan	2 KM	Dukungan kenaikan kondisi mantap jalan provinsi sebesar 0,60% (dari 73,46 % menjadi rencana sebesar 74,06 %)	100 %	Rp. 29.600.000.000,00	Rp. 116.870.706.940,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Penambahan Jaringan Jalan Baru	46,99%	Peningkatan Ruas Jalan Pandanan-Candirejo	2,4 KM						
1.03.1.03.01.00.19.002	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunny Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	74,06%	Inspeksi Kondisi Jalan	1 dokumen	Dukungan berupa dipertahankannya penurunan kondisi mantap jaringan jalan provinsi maksimal sebesar 5,0%	100 %	Rp. 20.353.512.000,00	Rp. 18.047.709.300,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Penambahan Jaringan Jalan Baru	46,99%	Inspeksi kondisi jembatan	1 dokumen						
							Terpeliharanya jalan propinsi	78 ruas (727,2 km)						
							Terpeliharanya jembatan	241 buah						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

Jumlah Pagu : Rp. 256.698.127.000,00

Nomor	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.00.19.003	Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	74.06%	Pembangunan Jalan Akses Kawasan Industri Piyungan	1 Km	Dukungan 13,55 % pembangunan jalan dan jembatan rencana penambahan aksesibilitas jalan provinsi	100 %	Rp. 47.780.000.000,00	Rp. 91.026.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Penambahan Jaringan Jalan Baru	46.99%	Pengadaan lahan untuk pembangunan jalan Jangkaran - Pantal Congot	1.365 m2						
1.03.1.03.01.00.19.005	Persetifkatan Tanah Jalan Provinsi	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	74.06%	Persetifkatan Tanah Jalan Provinsi	3 Ruas	Pengelolaan Aset BMD berupa sertifikasi jalan provinsi	100 %	Rp. 99.757.000,00	Rp. 174.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Penambahan Jaringan Jalan Baru	46.99%								
1.03.1.03.01.00.20	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA SANITASI										Rp. 25.545.000.000,00	Rp. 34.292.000.000,00		
1.03.1.03.01.00.20.007	Pengembangan Sarana Prasarana Penanganan Sampah	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Piyungan	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	25200SR	2. Drainase	965 meter	Peningkatan sampah yang dikelola di TPST Regional menjadi sebesar 660 ton/hari	100%	Rp. 14.000.000.000,00	Rp. 17.972.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Penanganan Sampah Sistem Regional	660ton/hari	3. Jalan operasional	992 meter						
					Penanganan Lokasi Genangan	1lokasi	4. Pipa lindi	920 meter						
							5. Jalan masuk	75 meter						
							Pekerjaan tanggul penahan dinding lanjutan 2019, drainase dan jalan operasional di TPA Piyungan : 1. Tanggul penahan	450 meter						
1.03.1.03.01.00.20.010	Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (Sharing Pemda DIY dan Pemkab/Kota)	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	25200SR	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL	Kualitas Air dengan BOD Max 75 mg/ltr	Dukungan kegiatan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sistem Terpusat (Sharing Pemda DIY dan PemKab/Kota) pada Layanan Sistem Air Limbah Terpusat di KPY dari 24.100 SR Menjadi 25.200 SR	100 %	Rp. 2.750.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Penanganan Sampah Sistem Regional	660ton/hari	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform	Coliform Max 10.000 JPT/100ml						
					Penanganan Lokasi Genangan	1lokasi	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara	NH3 max 1.500 ppm dan H2S max 0,010 ppm						
							Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge	Baku mutu Timbal (Pb) < 10 mg/lit						
							Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah	68 unit						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral											Jumlah Pagu : Rp. 256.698.127.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL	2 km							
1.03.1.03.01.00.20.012	Pemeliharaan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	25200SR	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan	kualitas air Baku mutu Timbal (Pb) < 10 mg/ltr	Dukungan kegiatan Pengelolaan Sistem Jaringan Air Limbah Terpusat pada Layanan Sistem Air Limbah Terpusat di KPY dari 24.100 SR Menjadi 25.200 SR	100 %	Rp. 3.270.000.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan	
					Penanganan Sampah Sistem Regional	660ton/hari	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan	kualitas air tanah dengan kadar Coliform Max 50 JPT/100 ml							
					Penanganan Lokasi Genangan	1lokasi	Pemeliharaan jaringan air Limbah	234 km							
1.03.1.03.01.00.20.013	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	25200SR	Operasional dan Pemeliharaan APLT (kap. 100M3/hari)	1 unit	Dukungan kegiatan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sistem Terpusat untuk Mempertahankan layanan pengolahan air limbah terpusat dan lumpur tinja (IPLT) sebesar 100 m3/hari pada Layanan Sistem Air Limbah Terpusat di KPY dari 24.100 SR Menjadi 25	100 %	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 1.320.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan	
					Penanganan Sampah Sistem Regional	660ton/hari	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki	PH berkisar 6-9							
					Penanganan Lokasi Genangan	1lokasi	Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja	1 Unit							
							Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT	kualitas Air dari outlet IPLT dengan BOD Max75 mg/ltr							
1.03.1.03.01.00.20.014	Pengembangan Sarana dan Prasarana Drainase	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	25200SR	Pembangunan Saluran Drainase di Kawasan Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul (lanjutan)	300 m	Dukungan pembangunan sistem saluran drainase terhadap Penanganan 1 Lokasi genangan	100 %	Rp. 3.025.000.000,00	Rp. 10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan	
					Penanganan Sampah Sistem Regional	660ton/hari	Penyusunan DED Kawasan JEC	1 dokumen							
					Penanganan Lokasi Genangan	1lokasi	Penyusunan DED Saluran Drainase di Jalan Jogokaryan	1 dokumen, 550 meter							
1.03.1.03.01.00.21	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM										Rp. 14.459.114.000,00	Rp. 74.061.600.000,00			
1.03.1.03.01.00.21.004	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Panjang Jaringan Distribusi SPAM Regional	91174meter	Penyusunan AMDAL pengembangan SPAM Banyusoco	1 dokumen	Dukungan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar terhadap penambahan panjang jaringan distribusi SPAM	100 %	Rp. 4.421.056.000,00	Rp. 10.061.600.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral											Jumlah Pagu : Rp. 256.698.127.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
					Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional	750liter/detik	Penyusunan Masterplan dan DED pengembangan SPAM Banyusoco	1 dokumen							
							Tersedianya bahan bangunan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum pada kelompok SPAMDES	15 kelompok							
1.03.1.03.01.00.21.005	Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Panjang Jaringan Distribusi SPAM Regional	91174meter	1. Pengadaan pompa dozing (PAC & kaporit) 2. Pengadaan bahan kimia utk operasional	2 unit; 1 tahun	Dukungan kegiatan Pengelolaan Sistem Distribusi Air Minum Regional Untuk Peningkatan Jumlah Air Curah yang diproduksi Spam Regional 400 lt/dtk	100 %	Rp. 10.038.058.000,00	Rp. 64.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan	
					Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional	750liter/detik	Belanja Jasa Perencana Rehabilitasi Saluran Pembuangan reservoir Guwo dan Kronggahan	1 Paket							
							Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Intake : - Pengadaan inverter serta Pompa cadangan (1 Paket)	2 unit							
							Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Prasedimentasi : - Pemeliharaan rutin - Perbaikan Gatevalve utk penguras sedimen di Prasedimentasi	- 1 tahun; - 4 unit							
							Operasi dan Pemeliharaan IPA : - Pemeliharaan pengurusan/backwass di bak koagulasi, flokulasi, sedimentasi & filtrasi (2 kali)	1 tahun							
							Operasi dan Pemeliharaan ME : - Perbaikan & pemrograman sistem otomatisasi SCADA	1 paket							
							Operasional dan Pemeliharaan Alat kerja instalasi : - O & P Peralatan kerja	10 jenis							
							Pemeliharaan Rutin Jaringan Perpipaan (sepanjang 64 km) : - Pemeliharaan rutin disepanjang jaringan perpipaan - Pengadaan Water meter Digital sistem online - Belanja Jasa konsultasi identifikasi kondisi jaringan	- 64 Km - 5 buah - 1 Paket							
							Pemeliharaan Unit Instalasi Clearweel : - Pemeliharaan rutin unit clearwell - Pengadaan pompa	1 tahun 2 unit							
							Pengadaan Alat Laboratorium Air Minum : - Pengadaan alat lab. Air & kalibrasi	4 jenis							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral											Jumlah Pagu : Rp. 256.698.127.000,00					
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
							Penyediaan Tenaga Operasi dan Pemeliharaan SPAM : - Tenaga Produksi	43 orang								
1.03.1.03.01.00.22	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BAKU										Rp. 12.150.000.000,00	Rp. 37.075.000.000,00				
1.03.1.03.01.00.22.006	Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Baku	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Penyediaan Air Baku	19,5liter/detik	Pembangunan Embung Dlingseng Desa Banjaroya, Kec. Kalibawang, Kab. Kulonprogo	1 embung	Dukungan sebesar 179 % untuk penambahan air baku terhadap Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Baku sebesar 19,5 liter/detik	100 %	Rp. 6.150.000.000,00	Rp. 24.075.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan		
					Pengelolaan Air Baku	62,4liter/detik	Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA	1 Dokumen Rekomendasi kebijakan sumber daya air								
1.03.1.03.01.00.22.007	Pengelolaan Air Baku	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Penyediaan Air Baku	19,5liter/detik	Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi	64 Pos Hidrologi	Dukungan mempertahankan air baku dari total sebesar 76,95 ltr/detik, guna mendukung Pemenuhan Ketersediaan Air Baku 62,4%)	100 %	Rp. 6.000.000.000,00	Rp. 13.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan		
					Pengelolaan Air Baku	62,4liter/detik	Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga	24 embung								
							Pengelolaan Web dan Data SISDA	1 sistem/aplikasi								
							Penyusunan AKNOP Embung kewenangan Pemda DIY	1 dokumen AKNOP untuk 11 embung								
1.03.1.03.01.00.23	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI										Rp. 19.891.600.000,00	Rp. 48.000.000.000,00				
1.03.1.03.01.00.23.001	Pengembangan Jaringan Irigasi	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Rerata Hasil Penilaian Kondisi Fisik Prasarana Jaringan Irigasi pada Seluruh Daerah Irigasi Kewenangan Pemda DIY	74,5%	DED Jaringan Irigasi Sumur Pempa Pampang, Gunungkidul	1 dokumen	Dukungan Pengembangan Jaringan Irigasi sebesar 0,5 % terhadap Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY sebesar 74,50%	100 %	Rp. 7.891.600.000,00	Rp. 30.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan		
					Rerata Hasil Penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada Seluruh Daerah Irigasi Kewenangan Pemda DIY	77,82%	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Pjenan/Kamijoro	2000 m								
							Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sapon	645 m								
							Updating PAI dan AKNPI 41 Daerah Irigasi	1 dokumen								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral											Jumlah Pagu : Rp. 256.698.127.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.00.23.002	Pengelolaan Jaringan Irigasi	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Rerata Hasil Penilaian Kondisi Fisik Prasarana Jaringan Irigasi pada Seluruh Daerah Irigasi Kewenangan Pemda DIY	74.5%	Koordinasi Tata Pengaturan SDA	Masyarakat P3A/GP3A/IP3A di 41 D.I	Dukungan untuk mempertahankan Luasan Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi sebesar 77,5 % guna mendukung Peningkatan Kinerja Sistem Irigasi (77,82%)	100 %	Rp. 12.000.000.000,00	Rp. 18.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Rerata Hasil Penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada Seluruh Daerah Irigasi Kewenangan Pemda DIY	77,82%	Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	4 DI						
							Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	41 DI						
							Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi	41 DI						
							Rekomendasi kebijakan pengelolaan irigasi di DIY melalui Komisi Irigasi	1 dokumen rekomendasi						
1.03.1.03.01.00.24	PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI										Rp. 2.370.000.000,00	Rp. 6.773.547.000,00		
1.03.1.03.01.00.24.001	Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan	800LHU	Inventarisasi data penyelenggaraan konstruksi	1 laporan	penambahan sejumlah 300 orang tenaga ahli konstruksi bersertifikat dan 3.000 orang masyarakat terlayani informasi jasa konstruksi	100 %	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 2.516.220.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Peningkatan Kinerja Tenaga Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi	75,13%	Layanan masyarakat melalui Klinik Konstruksi	60 orang						
							Pengelolaan aplikasi sistem informasi jasa konstruksi	1 laporan						
							Penyebaran informasi dan pameran teknologi ke-PU-an melalui Klinik Konstruksi	1 laporan, 50 orang						
							Penyusunan informasi harga satuan bahan bangunan	12 laporan, 2750 orang						
							Tenaga ahli konstruksi bersertifikat	150 orang						
							Terselenggaranya peningkatan kualitas jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi	80 orang						
1.03.1.03.01.00.24.002	Pelayanan Jasa Pengujian Konstruksi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan	800LHU	Laporan Hasil Uji	800 LHU	Jumlah sertifikat/ Laporan Hasil Uji yang diterbitkan sebanyak 800 LHU	100 %	Rp. 1.370.000.000,00	Rp. 4.257.327.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Peningkatan Kinerja Tenaga Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi	75,13%								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral											Jumlah Pagu : Rp. 256.698.127.000,00			
Nomor	Usuran /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
1.04.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral													
1.04.1.03.01.00.16	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN										Rp. 20.071.640.000,00	Rp. 72.384.500.000,00		
1.04.1.03.01.00.16.007	Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Kumuh	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	32.43%	Penanganan PSU Permukiman Kumuh Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo	0,825 Ha	Dukungan Berupa Penanganan PSU Kawasan Kumuh Terhadap Cakupan Kawasan Kumuh yang sudah tertangani	100 %	Rp. 500.000.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW	12%								
					Cakupan penanganan kawasan kumuh	72.16%								
1.04.1.03.01.00.16.008	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	32.43%	Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Gunungkidul	515 unit	Dukungan sebesar 4000 unit penanganan RTLH terhadap Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di DIY menjadi 32,43%	100 %	Rp. 19.271.640.000,00	Rp. 65.884.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW	12%	Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Kulonprogo	583 unit						
					Cakupan penanganan kawasan kumuh	72.16%								
1.04.1.03.01.00.16.009	Pengembangan Perumahan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	32.43%	Capaian Pendataan SPM Kawasan Rawan Bencana DIY	1 dokumen pendataan SPM kawasan rawan bencana DIY	Dukungan sebesar 12 % berupa penyediaan terhadap Dokumen RP3 sebagai Perwujudan Kawasan Perumahan sesuai RTRW sebesar 12%	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan
					Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW	12%	Monitoring dan Evaluasi (monev) Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY	1 laporan (monev dan pendataan basis data PKP)						
					Cakupan penanganan kawasan kumuh	72.16%	Rekomendasi Kebijakan PKP	1 laporan kinerja Pokja PKP						
1.04.1.03.01.00.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PRASARANA SARANA UTILITAS KAWASAN										Rp. 30.200.000.000,00	Rp. 36.000.000.000,00		
1.04.1.03.01.00.17.001	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	48titik	Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan permukiman	16 titik	Dukungan berupa Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum terhadap penyelenggaraan PSU Kawasan	100%	Rp. 3.200.000.000,00	Rp. 18.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Daya
Mineral

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral **Jumlah Pagu : Rp. 256.698.127.000,00**

Nomor	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
															1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
					Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi	32titik									
1.04.1.03.01.00.17.002	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Strategis	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	48titik	Penyediaan PSU di Kawasan Strategis Provinsi	2 lokasi	Peningkatan kualitas PSU pada 32 titik di Kawasan Strategis Provinsi	100 %	Rp. 27.000.000.000,00	Rp. 18.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan	
					Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi	32titik	Struktur, Arsitektur dan Atap Bangunan VIP Room Bandara Baru YIA	1 unit gedung							
2	Pilihan														
2.05	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL														
2.05.1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral														
2.05.1.03.01.00.17	PROGRAM PENYELENGGARAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN										Rp. 7.069.920.000,00	Rp. 16.346.088.000,00			
2.05.1.03.01.00.17.001	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	9848RT	Audit Energi	10 Gedung	Dukungan penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan sebesar 9848 Berupa Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sejumlah 2000	100 %	Rp. 5.906.640.000,00	Rp. 5.060.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan	
					bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi	72unit	Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga	2000 RT							
					Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan	45izin	Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik	1 dokumen (5000 RT)							
2.05.1.03.01.00.17.002	Pengaturan dan Pembinaan Energi dan Ketenagalistrikan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	9848RT	Monitoring Pemanfaatan EBT di DIY	1 laporan	Dukungan berupa Audit Energi 10 bangunan/gedung terhadap Penambahan Jumlah bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi sejumlah 72 unit	100 %	Rp. 450.000.000,00	Rp. 9.625.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan	
					bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi	72unit	Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota	50 unit usaha							
					Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan	45izin	Raperda Ketenagalistrikan	1 dokumen							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral												Jumlah Pagu : Rp. 256.698.127.000,00			
Nomor	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Rekomtek Izin Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota	25 unit usaha							
2.05.1.03.01.00.17.003	Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	9848RT	Pengawasan dan Pengendalian kegiatan energi baru terbarukan	2 laporan	Peningkatan Izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak 20 izin	100 %	Rp. 713.280.000,00	Rp. 1.661.088.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan	
					bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi	72unit	Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan	2 laporan							
					Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan	45izin	Pengoperasian, Identifikasi dan Pendataan pembangkit listrik EBT di wilayah Bantul dan Kulon Progo	1 dokumen							
							Pengoperasian, Identifikasi dan Pendataan pembangkit listrik EBT di wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul	1 dokumen							
							Penyusunan E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Ketenagalistrikan DIY BP3 ESDM Bantul dan Kulon Progo	1 aplikasi							
							Penyusunan E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Ketenagalistrikan DIY BP3 ESDM Sleman, Yogyakarta & Gunungkidul	1 aplikasi							
2.05.1.03.01.00.18	PROGRAM PENGELOLAAN AIR TANAH										Rp. 4.600.600.000,00	Rp. 12.018.930.000,00			
2.05.1.03.01.00.18.001	Pendayagunaan Air Tanah	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air	76dusun	Terlaksananya Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Bantul	1 unit dan 20 unit	Dukungan 4.08% berupa pembangunan sarana dan prasarana pengambilan air tanah terhadap target penyediaan air bersih di total 245 dusun yang masuk kategori daerah sulit air	100 %	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 6.269.010.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan	
					Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer	20%=<	Terlaksananya Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Gunungkidul	1 unit dan 20 unit							
					Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan	45izin									
2.05.1.03.01.00.18.003	Pengawasan Air Tanah dan Geologi	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air	76dusun	Pendataan dan Pencatatan volume air tanah untuk penghitungan NPA di wilayah Bantul dan Kulon progo	1 dokumen	Pencapaian Jumlah Pelaksanaan Izin Air Tanah Sesuai Dengan Ketentuan Sebanyak 21 Izin	100 %	Rp. 1.300.600.000,00	Rp. 1.663.750.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

Jumlah Pagu : Rp. 256.698.127.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)			(14)
					Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer	20%=<	Pendataan dan Pencatatan volume air tanah untuk penghitungan NPA di wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul	1 dokumen									
					Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan	4Sizin	Pendataan Pengguna Air Tanah Belum Berizin di Wilayah Bantul dan Kulon progo	1 dokumen									
							Pendataan Pengguna Air Tanah Belum Berizin di Wilayah Sleman	1 dokumen									
							Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan air tanah di wilayah DIY	2 laporan									
							Penyusunan E- Pelaporan Perizinan Air Tanah BP3ESDM Bantul dan Kulon progo	1 aplikasi									
							Penyusunan E- Pelaporan Perizinan Air Tanah BP3ESDM Sleman Yogyakarta dan Gunungkidul	1 aplikasi									
2.05.1.03.01.00.18.004	Peningkatan Perlindungan Air Tanah dan Geologi	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air	76dusun	Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah	1 laporan	Dukungan berupa data dan informasi rerata muka air tanah dari sumur pantau pada cekungan air tanah dari CAT di DIY terhadap upaya mempertahankan Rerata penurunan muka air tanah <20%	100 %	Rp. 2.100.000.000,00	Rp. 4.086.170.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan			
					Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer	20%=<	Pembinaan Pelaksanaan Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota	2 laporan,80 unit usaha									
					Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan	4Sizin	Pembuatan sumur pantau air tanah dalam	4 unit									
							Perbaikan/Pemeliharaan AWLR dan sumur pantau air tanah dalam	4 unit									
							Rekomtek Izin Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota	1 laporan, 120 unit usaha									
2.05.1.03.01.00.19	PROGRAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN										Rp. 2.378.000.000,00	Rp. 3.063.000.000,00					
2.05.1.03.01.00.19.001	Pengaturan dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar	26izin	Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan	60 unit usaha	Dukungan sebesar 100 % terhadap Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral pada 7,6 % pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan	100 %	Rp. 1.394.000.000,00	Rp. 1.863.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

Jumlah Pagu : Rp. 256.698.127.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)		
					Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan	7.6%	Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di 3 Kabupaten (pasir dan batu di sleman, bantul, Kulonprogo : emas di kokap, andesi dll di Gunungkidul)	3 dokumen								
							Rekomtek Izin Usaha Pertambangan	1 laporan, 60unit usaha								
							Rencana Detail Blue Print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar WIUP	1 dokumen rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar WIUP								
2.05.1.03.01.00.19.002	Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar	26izin	Identifikasi Penambangan Tanpa Ijin (PETI) wilayah Bantul dan Kulon Progo	1 dokumen berisi hasil identifikasi PETI	terlaksananya tertib izin usaha pertambangan di empat kabupaten sesuai ketentuan sebanyak 17 izin	100 %	Rp. 984.000.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Sedang Berjalan		
					Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan	7.6%	Identifikasi Penambangan Tanpa Ijin (PETI) wilayah Sleman, Yogyakarta & Gunungkidul	1 dokumen berisi hasil identifikasi PETI								
							Operasional Inspektur Tambang	1 dokumen pengawasan dan pengendalian teknis Ijin usaha pertambangan								
							Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Bantul & Kulon Progo	1 Dokumen								
							Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Sleman, Yogyakarta & Gunungkidul	1 Dokumen								
							Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan	2 Laporan								
							Penyusunan E- Pelaporan Perizinan Pertambangan Wilayah Bantul & Kulon Progo	1 aplikasi								
							Penyusunan E- Pelaporan Perizinan Pertambangan Wilayah Sleman, Yogyakarta & Gunungkidul	1 aplikasi								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang											Jumlah Pagu : Rp. 4.776.112.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1.03.1.03.02.00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang													
1.03.1.03.02.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.666.356.000,00	Rp. 1.650.000.000,00		
1.03.1.03.02.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Bahan Bacaan dan Perundang-undangan : - Surat Kabar (KR, Jawa Pos, Tempo, Kompas)	4 Jenis	Dukungan 33,56% terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 475.945.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							10. Penyediaan jasa surat menyurat : - Surat Keluar	860 surat						
							11. Penyediaan jasa surat menyurat : - Surat Masuk	970 surat						
							12. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 jenis						
							13. Penyediaan Peralatan rumah tangga dan bahan pembersih	5 jenis						
							2. Pengelolaan Arsip Dinamis Arsip Dinas OPD	12 bulan						
							3. Penyediaan alat tulis kantor	52 jenis						
							4. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	20 jenis						
							5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1600 m2						
							6. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan						
							7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Operasional : - Pembayaran Pajak /STNK kendaraan dinas / operasional roda 4	7 unit						
							8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Operasional : - Pembayaran Pajak /STNK kendaraan dinas / operasional roda 2	7 unit						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang											Jumlah Pagu : Rp. 4.776.112.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							9. Penyediaan jasa surat menyurat : - Pengiriman dokumen	680 dokumen							
1.03.1.03.02.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Jasa Tenaga Keamanan	12 bulan	Dukungan 33,56% terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.390.411.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
							Jasa Tenaga Pendukung Perangkat Daerah	32 orang							
							Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan	12 bulan							
1.03.1.03.02.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	12 bulan	Dukungan 26,85% terhadap pencapaian terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 800.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
							Konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 bulan							
							Makan dan minum rapat tersedia sesuai dengan kebutuhan	12 bulan							
							Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	5 orang							
1.03.1.03.02.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 845.591.000,00	Rp. 1.050.000.000,00			
1.03.1.03.02.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pengadaan Air Conditioner (AC) 1PK	4 unit	Dukungan 12,8% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 196.591.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
							Pengadaan Gordyn (Vertical Blind)	200 m2							
							Pengadaan Kursi Eselon IV	4 Set							
							Pengadaan Kursi Rapat	16 set							
							Pengadaan Kursi staff	15 set							
							Pengadaan Meja kerja eselon IV	4 set							
							Pengadaan Meja kerja staff	15 set							
							Pengadaan Meja rapat	1 unit							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang											Jumlah Pagu : Rp. 4.776.112.000,00			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indikator Kinerja						(12)	(13)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.03.1.03.02.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Jaringan listrik	1 jenis	Dukungan 9,8% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 129.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan Taman	12 bulan						
							Pengecatan dan perbaikan pintu jendela	1 lokasi						
							Pengecatan dinding dan plafon	1 lokasi						
1.03.1.03.02.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	7 unit	Dukungan 38,3% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 420.000.000,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	7 unit						
1.03.1.03.02.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	CCTV	12 unit	Dukungan 8,5% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Dispenser	4 buah						
							Faximili	2 buah						
							Filing Cabinet	11 buah						
							Generator Set (Genset)	1 buah						
							Jaringan Internet	1 jaringan						
							Kompur Gas	1 buah						
							Kursi Tamu	2 set						
							Laptop	10 unit						
							Partikel Meja	10 meter						
							Pemeliharaan Komputer	32 set						
							Pemeliharaan Kursi Kerja	40 buah						
							Pemeliharaan LCD Proyektor	5 unit						
							Pemeliharaan Meja Kerja	30 buah						
							Pemeliharaan Printer	27 unit						
							penggantian jaringan pabx	1 jaringan						
							Pompa Air (Jet Pump)	2 buah						
							Service AC split	20 unit						
							Servis sentral PABX	1 jaringan						
							sound system dan wireless	24 unit						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang												Jumlah Pagu : Rp. 4.776.112.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Standing AC	2 buah							
1.03.1.03.02.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 206.500.000,00	Rp. 440.000.000,00			
1.03.1.03.02.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Bahan LKJ dan LKPJ Urusan Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019	2 laporan bahan LKPJ dan LKJ	Dukungan 5,36% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
							LKJIP SKPD Tahun 2019	1 dokumen LKJIP tahun 2019							
1.03.1.03.02.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Laporan keuangan triwulan	4 laporan	Dukungan 10,71% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
							2. Laporan keuangan Bulanan	12 laporan							
							3. Laporan keuangan semester	2 laporan							
							4. Laporan keuangan tahunan gabungan	1 laporan							
							5. Laporan Keuangan Audited	1 laporan							
1.03.1.03.02.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. DPA 2021	1 Dokumen DPA 2021	Dukungan 78,57% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 146.500.000,00	Rp. 380.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
							10. RKA-P 2020	1 Dokumen RKA-P 2020							
							2. DPA-P 2020	1 Dokumen DPA-P 2020							
							3. Forum Perangkat Daerah	1 laporan berita acara sinkronisasi program kegiatan strategis dan prioritas dari hasil Forum Perangkat Daerah							
							4. Pengembangan Data pada Sistem Informasi	Data dan Informasi pada urusan tata ruang dan pertanahan pada sistem informasi							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang											Jumlah Pagu : Rp. 4.776.112.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							5. Renja Perangkat Daerah 2021	1 Dokumen Renja PD 2021							
							6. Renja Perangkat Daerah Perubahan 2020	1 Dokumen Renja PD Perubahan 2020							
							7. ROPK Perangkat Daerah 2020	1 Dokumen ROPK PD 2020							
							8. ROPK Perangkat Daerah Perubahan 2020	1 Dokumen ROPK PD Perubahan 2020							
							9. RKA 2021	1 Dokumen RKA 2021							
1.03.1.03.02.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dokumen laporan monev DPTR	1 Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2020	Dukungan 5,36% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
1.03.1.03.02.00.25	PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG										Rp. 237.115.000,00	Rp. 400.000.000,00			
1.03.1.03.02.00.25.002	Pembinaan Penataan Ruang	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Koridor Temon, Wates, Yogyakarta dan Prambanan Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi dika Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Penyeleenggaraan Penataan Ruang Aspek Pengaturan dan Pembinaan	72,63%	Pembinaan teknis penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten	3 kali/ 9 Berita Acara	Dukungan 50% terhadap Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan hingga mencapai 72,63%	100%	Rp. 237.115.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
							Rumusan bahan kebijakan penataan ruang daerah melalui TKPRD DIY sebanyak 2 dokumen dalam 1 tahun	2 dokumen dalam 1 tahun							
							Sosialisasi Rencana Tata Ruang	5 kab/ kota							
1.03.1.03.02.00.26	PROGRAM PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG										Rp. 778.890.000,00	Rp. 1.500.000.000,00			
1.03.1.03.02.00.26.001	Penyusunan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi dika	Capaian Kinerja Penyeleenggaraan Penataan Ruang Aspek Pelaksanaan dan Pengawasan	882,73%	1. Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW	1 dokumen Tahun 2020	Dukungan sebesar 50% terhadap Capaian Kinerja Penyeleenggaraan Penataan Ruang Aspek Pelaksanaan dan Pengawasan hingga mencapai 82,73%	100%	Rp. 310.764.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
							2. Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTR	1 dokumen Tahun 2020							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang											Jumlah Pagu : Rp. 4.776.112.000,00			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indikator Kinerja						(12)	(13)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				(14)	(15)
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	1/2/3	1/2/3							
1.03.1.03.02.00.26.002	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi diKa	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pelaksanaan dan Pengawasan	882.73%	Dokumen audit tata ruang	1 dokumen audit tata ruang Tahun 2020	Dukungan sebesar 50% terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Aspek Pelaksanaan dan Pengawasan hingga mencapai 82,73%	100%	Rp. 468.126.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Dokumen identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY	1 dokumen identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY						
							Dokumen monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang sudah dikeluarkan	1 dokumen monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang sudah dikeluarkan						
							Dokumen penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang di 4 kabupaten 1 kota dan di DIY	1 Dokumen						
							Lomba desa perintis penataan ruang tingkat DIY	1 Lomba desa perintis penataan ruang tingkat DIY						
							Penyebaran informasi tentang penataan ruang	peningkatan pemahaman 60 % terhadap Penataan Ruang DIY pada 5 kab/ kota di DIY						
							Tindakan non yustisi	6 ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di DIY						
1.10	PERTANAHAN													
1.10.1.03.02.00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang													
1.10.1.03.02.00.15	PROGRAM TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN										Rp. 41.660.000,00	Rp. 500.000.000,00		
1.10.1.03.02.00.15.002	Layanan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, Malioboro dan candi-candi diKa	Layanan Administrasi Pertanahan Sesuai Peraturan Perundangan	100%	Verifikasi berkas permohonan, pendataan awal, konsultasi publik dan penerbitan	1 dokumen	Dukungan 100% terhadap Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan	100%	Rp. 41.660.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik														Jumlah Pagu : Rp. 9.403.438.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Wajib														
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
1.05.1.05.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik														
1.05.1.05.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.375.000.000,00	Rp. 861.835.808,18			
1.05.1.05.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor	12 bulan	Dukungan 45.60% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 persen	Rp. 400.000.000,00	Rp. 215.056.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan	
							Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Roda 4	12 bulan							
							Cetak dan Penggandaan	12 bulan							
							Kebersihan Gedung Kantor 3 org	12 bulan							
							Kompenan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan							
							Langganan surat kabar harian, dan majalah	12 bulan							
							Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan roda 2	12 bulan							
							Pembayaran tagihan listrik, telepon, dan internet	12 bulan							
1.05.1.05.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja Driver / Pengemudi dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	3 orang	Dukungan 22.54% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 320.000.000,00	Rp. 215.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan	
							Kinerja Pengelola Barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	2 orang							
							Kinerja Pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	2 orang							
							Kinerja Pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	9 orang							
							Kinerja Penjaga Keamanan Kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK.	6 orang							
1.05.1.05.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	1 tahun	Dukungan 31.86% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 655.000.000,00	Rp. 431.779.808,18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik												Jumlah Pagu : Rp. 9.403.438.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Konsultasi dan koordinasi luar daerah	1 tahun							
							Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun							
1.05.1.05.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 980.000.000,00	Rp. 850.000.000,00			
1.05.1.05.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Almari Laci Filling Kabinet	5 bh	Dukungan 14.40% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 280.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan	
							Bendera merah putih kecil dan tiang	1000 buah							
							Bendera rontek merah putih	50 m2							
							Bendera umbul umbul merah putih	4 buah							
							Komputer	8 unit							
							Laptop	3 bh							
							Papan nama instansi/kantor	1 bh							
							Pembelian Tanaman/bunga untuk ruang rapat dan ruang kerja	12 bh							
							Pembelian Taplak meja besar ruang rapat	5 buah							
							Pembelian Tulisan untuk tiap ruangan	20 jenis							
							Printer	7 unit							
1.05.1.05.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Garasi berkanopy	1 unit	Dukungan 36.77% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan	
							Gedung bercat	197 m2							
							Kamar Mandi yang dirawat	1 unit							
							Ruangan berpatisi	1 unit							
1.05.1.05.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBM	12 bulan	Dukungan 25.04% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan	
							Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPBM	12 bulan							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													Jumlah Pagu : Rp. 9.403.438.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat kantor yang dipelihara	18 jenis	Dukungan 23,79% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
							Mebeleur yang dipelihara	4 jenis						
							Perlengkapan kantor yang dipelihara	3 jenis						
1.05.1.05.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 335.000.000,00	Rp. 20.000.000,00		
1.05.1.05.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) sesuai berbagai dokumen perencanaan, dan capaian kinerja instansi diukur dengan indikator lainnya (sesuai aturan perundangan)	2 Nilai LKJIP (A=2)			Rp. 15.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
									Dukungan 3,98% terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 persen				
1.05.1.05.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 18 kegiatan	100 %	Dukungan 10,52 % terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Rp. 40.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Dukungan 72,17 % terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan	100 %	Rp. 230.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
							ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	1 Dokumen						
1.05.1.05.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100 %	Dukungan 13,25 % terhadap capaian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.00.18	PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN NASIONAL										Rp. 2.530.200.000,00	Rp. 5.500.000.000,00		
1.05.1.05.01.00.18.001	Pembinaan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	20 Kecamatan di DIY; Badan Kesbangpol DIY;	Skor / Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	2.89angka	Rekomendasi FKUB (Forum Kerukunan Umat beragama)	6 rekomendasi	Dukungan 40% terhadap Skor/ Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi sebesar 2,89	100 %	Rp. 700.000.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik														Jumlah Pagu : Rp. 9.403.438.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Rekomendasi FPK (Forum Pembaurn kebangsaan)	6 rekomendasi							
							Terbanggunnya Pemahaman nasionalisme dan wawasan kebangsaan kepada Perwakilan Generasi Muda Milenial akan arti Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam sinau Pancasila	1 laporan							
1.05.1.05.01.00.18.002	Fasilitasi dan Koordinasi Kewaspadaan Nasional	2. Pembangunan Manusia dan Pngentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Skor / Nilai Index Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	2.89angka	Laporan Dialog Forum Kemitraan DIY	1 rekomendasi	Dukungan 60% terhadap Skor/ Nilai Indeks Ketahanan Gatra Ideologi sebesar 2,89	100%	Rp. 1.830.200.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan	
							Laporan Fasilitasi FKDM	4 rekomendasi							
							Laporan Kewaspadaan Dini Daerah dan Pusat Komunikasi dan Informasi	1 laporan							
							Laporan Penanganan Konflik Sosial (PKS) di DIY	1 laporan							
							Laporan Pengawasan Orang Asing (POA)	1 laporan							
							Perumusan Kebijakan dan Rekomendasi Forkopimda	1 rumusan							
							Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik	3 laporan							
1.05.1.05.01.00.19	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT										Rp. 3.790.000.000,00	Rp. 0,00			
1.05.1.05.01.00.19.002	Pembinaan Partai Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat	2. Pembangunan Manusia dan Pngentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Skor /Nilai Index Ketahanan Nasional Gatra Sosial Politik	3.33angka	Bantuan keuangan bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD DIY	100%	Dukungan 52.6% terhadap Skor/ Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik sebesar 3,34	100 %	Rp. 3.400.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan	
							Jumlah Peserta pendidikan politik bagi masyarakat	720 orang							
							Laporan dan rekomendasi IDI 2019	1 laporan							
1.05.1.05.01.00.19.003	Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	2. Pembangunan Manusia dan Pngentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Skor /Nilai Index Ketahanan Nasional Gatra Sosial Politik	3.33angka	Laporan Pemantauan Dinamika Politik di Daerah Dalam Tahapan Pemilu 2020 di DIY	1 Laporan	Dukungan 13% terhadap Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik sebesar 3,34	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan	
1.05.1.05.01.00.19.004	Pembinaan Organisasi Masyarakat	2. Pembangunan Manusia dan Pngentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Skor /Nilai Index Ketahanan Nasional Gatra Sosial Politik	3.33angka	Jumlah peserta FGD pengawasan organisasi kemasyarakatan	50 peserta	Dukungan 30,23 % terhadap Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik sebesar 3,34	100 %	Rp. 290.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan	
							Jumlah peserta rapat kerja organisasi kemasyarakatan	300 peserta dari elemen organisasi kemasyarakatan							
							Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan tentang organisasi kemasyarakatan	100 peserta dari elemen organisasi kemasyarakatan							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											Jumlah Pagu : Rp. 9.403.438.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Laporan pengawasan organisasi kemasyarakatan di DIY	1 laporan							
1.05.1.05.01.00.20	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI										Rp. 393.238.000,00	Rp. 1.900.000.000,00			
1.05.1.05.01.00.20.002	Fasilitasi dan Koordinasi Ketahanan Ekonomi	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	4 Kabupaten di DIY	Skor/Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya dan Ekonomi	2.88angka	Desa yang sudah diinisiasi menjadi Desa Tangguh	2 Desa/Kelurahan	Dukungan 40 % terhadap Skor/ Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya dan Ekonomi sebesar 2,88	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 700.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan	
							Tersedianya Dokumen Panduan Inisiasi Desa Tangguh	1 Dokumen							
							tersusunnya dokumen Rencana Aksi Peningkatan Ketahanan Ekonomi dan Sosial di DIY	1 Dokumen							
							Tersusunnya Rekomendasi Dalam Rangka Penurunan Angka Kesenjangan Ekonomi	3 Rekomendasi (per caturwulan)							
1.05.1.05.01.00.20.003	Fasilitasi dan Koordinasi Ketahanan Sosial Budaya	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Kabupaten/kota di DIY	Skor/Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya dan Ekonomi	2.88angka	Jumlah peserta Sosialisasi terkait Pencegahan Narkoba	225 mahasiswa/pelajar yang tersosialisasi	Dukungan 60% terhadap Skor/ Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya sebesar 2,88	100 %	Rp. 193.238.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan	
							Tersusunnya Rekomendasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)	1 rekomendasi							
							Tersusunnya Rekomendasi P4GN	1 Rekomendasi							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja											Jumlah Pagu : Rp. 4.766.210.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
1.05.1.05.02.00	Satuan Polisi Pamong Praja													
1.05.1.05.02.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.211.942.000,00	Rp. 1.405.000.000,00		
1.05.1.05.02.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Benda-benda Pos (Materai dan Perangko)	01. 2 Jenis	Dukungan 24.36% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Rp. 295.268.000,00	Rp. 375.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							02. Barang Cetak	02. 8 Jenis						
							03. Penggandaan	03. 50.000 lembar						
							04. Surat Kabar/Majalah	04. 48 Eksemplar						
							05. Pembayaran Tagihan Rekening Listrik	05. 12 Bulan						
							06. Pembayaran Tagihan Rekening Internet	06. 12 Bulan						
							07. Pembayaran Tagihan Internet	07. 12 Bulan						
							08. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	08. 5 Jenis						
							09. Pembayaran Tagihan Rekening Telepon	09. 12 Bulan						
							10. Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional yang tepat waktu	10. 31 Unit						
							11. Bukti pembayaran KIR kendaraan	11. 5 Unit						
							12. Jasa Kebersihan Kantor	12. 34.200m2						
							13. Alat Tulis Kantor	13. 43 Jenis						
							14. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14. 8 Jenis						
							15. Belanja Sertifikasi	15. 1 Kali						
1.05.1.05.02.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Kinerja tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	01. 7 Orang	Dukungan 34.60% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Rp. 419.374.000,00	Rp. 480.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Konsultasi dan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja DIY Dalam Jawa terlaksana dengan baik	01. 1 Tahun	Dukungan 41.03% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Rp. 497.300.000,00	Rp. 550.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja											Jumlah Pagu : Rp. 4.766.210.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							02. Konsultasi dan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja DIY Luar Jawa terlaksana dengan baik	02. 1 Tahun							
							03. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	03. 1 Tahun							
1.05.1.05.02.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.957.997.000,00	Rp. 1.116.000.000,00			
1.05.1.05.02.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Rehabilitasi Gedung Kantor Satpol PP DIY	01. 1 Unit	Dukungan 21.93% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Rp. 1.600.460.000,00	Rp. 600.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan	
							02. Pos Pantau SRI (SAR Rescue Istimewa) di Korwil II Parangtritis (3 lantai)	1 unit							
1.05.1.05.02.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBM	01. 15 Unit	Dukungan 71.34% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Rp. 326.718.000,00	Rp. 450.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan	
							02. Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBM	02. 19 Unit							
							03. Kendaraan dinas/operasional roda 6 sesuai RKPBM	03. 2 Unit							
1.05.1.05.02.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	01. 3 Jenis	Dukungan 6.73% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Rp. 30.819.000,00	Rp. 66.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan	
							02. Peralatan gedung kantor yang terpelihara	02. 27 Jenis							
1.05.1.05.02.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 119.203.000,00	Rp. 747.500.000,00			
1.05.1.05.02.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP : A	Dukungan 4.13% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Rp. 4.920.000,00	Rp. 6.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan	
1.05.1.05.02.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 21 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 8.72% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Rp. 10.398.000,00	Rp. 16.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja												Jumlah Pagu : Rp. 4.766.210.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.02.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Berita Acara Forum Perencanaan OPD	01. 1 BA	Dukungan 40,93% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Rp. 48.795.000,00	Rp. 550.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	02. ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	02. Dokumen Perencanaan SKPD TA. 2021 dan Perubahan TA. 2020	Dukungan 46,21% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	Rp. 55.090.000,00	Rp. 175.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.00.21	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT										Rp. 664.159.000,00	Rp. 1.800.000.000,00		
1.05.1.05.02.00.21.001	Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase gangguan tibus tranmas yang tertangani	50%	01. Data lokasi rawan gangguan tibus tranmas perbatasan	01. 2 Laporan	Dukungan 29,58% terhadap persentase gangguan tibus tranmas yang tertangani.	100%	Rp. 196.437.000,00	Rp. 600.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							02. Laporan pengendalian tibus tranmas di 5 Kab/Kota DIY	02. 60 Laporan						
							03. Data lokasi rawan gangguan tibus tranmas di 5 Kab/Kota DIY	03. 60 Laporan						
							04. Deteksi dini Potensi gejala sosial masyarakat (Permendagri No. 54 Tahun 2011)	04. 60 Laporan						
							05. Unjuk rasa yang berlangsung dengan kondusif di 5 Kab/kota	05. 96 Laporan						
1.05.1.05.02.00.21.002	Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Aset	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase gangguan tibus tranmas yang tertangani	50%	01. Aset Pemda DIY yang dijaga dari kerawanan penyimpangan penggunaan	01. 60 Titik	Dukungan 19,07% terhadap persentase gangguan tibus tranmas yang tertangani.	100%	Rp. 126.681.000,00	Rp. 250.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							02. Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kondisi aman	02. 1 Tahun						
							03. Kunjungan Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan Tamu Daerah dalam kondisi aman	03. 72 Kali						
							04. Event Pemda DIY dan sosial kemasyarakatan dalam kondisi aman	04. 6 Kali						
1.05.1.05.02.00.21.006	Pembinaan Kapasitas Aparatur Tibus tranmas	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase gangguan tibus tranmas yang tertangani	50%	01. Pembinaan fisik, kesempataan, senam/ bela diri dasar bagi anggota Satpol PP	01. 129 Orang	Dukungan 34,13% terhadap persentase gangguan tibus tranmas yang tertangani	100%	Rp. 226.674.000,00	Rp. 550.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja											Jumlah Pagu : Rp. 4.766.210.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							02. Pembinaan mental motivasi kerja bagi anggota Satpol PP	02. 129 Orang							
							03. PPNS yang terlatih dalam penegakan perda	03. 30 Orang							
1.05.1.05.02.00.21.007	Pengelolaan Kerjasama Trantibumlinmas	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani	50%	01. Rumusan Kerjasama Satpol PP DIY dengan Satpol PP Kabupaten/Kota	01. 1 Dokumen Kesepakatan bersama tentang Penanganan Permasalahan Tibumtranmas dan linmas	Dukungan 17.22% terhadap persentase gangguan tibumtranmas yang tertangani	100%	Rp. 114.367.000,00	Rp. 400.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan	
							02. Laporan hasil Penanganan Pengaduan dan Keluhan Masyarakat terhadap gangguan Tibumtranmas dan Linmas	02. 1 Dokumen							
							03. Rekomendasi Penanganan Kerjasama antara Satpol PP DIY dengan Polda	03. 1 Rekomendasi							
							04. Aplikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	04. 1 Paket							
1.05.1.05.02.00.22	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										Rp. 344.554.000,00	Rp. 5.250.000.000,00			
1.05.1.05.02.00.22.001	Pembinaan Potensi Masyarakat	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif	30%	01. Meningkatnya kapasitas bagi potensi masyarakat untuk bersinergi dengan unsur komunitas dan aparat kamtibmas	01. 700 orang	Dukungan 4.45 % terhadap persentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif.	100%	Rp. 125.404.000,00	Rp. 250.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan	
1.05.1.05.02.00.22.002	Pembinaan Satlinmas dan Satlinmas Rescue Istimewa	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Persentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif	30%	01. Meningkatnya kompetensi satlinmas untuk mewujudkan perlindungan masyarakat	30 orang Satlinmas	Dukungan 95,55% terhadap persentase SATLINMAS yang mampu melaksanakan tugas perlindungan masyarakat.	100%	Rp. 219.150.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan	
1.05.1.05.02.00.23	PROGRAM PEMBINAAN PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA										Rp. 468.355.000,00	Rp. 2.950.000.000,00			
1.05.1.05.02.00.23.001	Operasi Yustisi bagi Masyarakat Pelanggar Perda/Perkada	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang Tertangani	75%	01. Rekomendasi Optimalisasi Pelaksanaan Tugas PPNS	01. 2 Rekomendasi	Dukungan 38.63 % terhadap persentase peningkatan pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani.	100%	Rp. 180.944.000,00	Rp. 700.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan	
							02. Piket Sekretariat PPNS (PPNS Satpol PP dan PPNS OPD)	02. 40 Laporan							
							03. Pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang tertangani secara Yustisi dengan mekanisme Acara Pemeriksaan Cepat	03. 30 Laporan							
							04. Pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang tertangani secara Yustisi dengan mekanisme Acara Pemeriksaan Singkat	04. 2 Laporan							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 4.766.210.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
															1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							05. Rekomendasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Secara Terpadu	05. 2 Dokumen rekomendasi tentang Kesepahaman dan Komitmen Penegakan Hukum Terpadu oleh Aparat Penegak Hukum di Daerah							
							06. Rekomendasi Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda	06. 2 Dokumen rekomendasi penyelesaian kasus Pelanggaran Perda							
							07. Laporan Penegakan Perda/Perkada di Perbatasan	07. 6 Laporan							
1.05.1.05.02.00.23.002	Operasi Non Yustisi bagi Masyarakat Pelanggar Perda/Perkada	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang Tertangani	75%	01. Pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang tertangani secara nonyustisial	01. 72 Laporan	Dukungan 30,09% terhadap persentase peningkatan pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani.	100%	Rp. 140.926.000,00	Rp. 1.700.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan	
1.05.1.05.02.00.23.003	Internalisasi Budaya Sadar Perda dan/ Perkada	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY	Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang Tertangani	75%	01. Pembentukan dan Pengembangan Kader Penegak Perda dan Perkada	01. 1 Desa (Pembentukan Kader) dan 2 Desa (Pengembangan Kader)	Dukungan 31,28% terhadap persentase peningkatan pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani.	100%	Rp. 146.485.000,00	Rp. 550.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan	
							02. Pembinaan Kelompok Rentan Pelanggar Perda dan Perkada	02. 10 laporan							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 23.423.461.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Wajib														
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
1.05.1.05.03.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah														
1.05.1.05.03.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.531.000.000,00	Rp. 2.870.240.000,00			
1.05.1.05.03.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Bukti pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 2	1. 20 unit	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	40%	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan	
							10. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 6	10. 10 unit							
							11. Bukti pembayaran rekening air PDAM	11. 1 rekening 12 bulan							
							12. Bukti pembayaran rekening listrik	12. 4 rekening 12 bulan							
							13. Bukti pembayaran rekening telepon	13. 12 rekening 12 bulan							
							14. Bukti pembayaran surat kabar harian	14. 3 jenis 12 bulan							
							15. Bukti pembayaran tagihan internet/TV berlangganan	15. 1 rekening 1 tahun							
							2. Pembayaran jasa kebersihan Gedung Kantor BPBD DIY	2. 5 unit gedung, 12 bulan							
							3. Pembelian Alat Listrik dan Elektronik	3. 5 jenis							
							4. Pembelian Alat-Alat/Perlengkapan	4. 15 jenis							
							5. Pembelian ATK dan barang pakai habis lainnya	5. 60 jenis							
							6. Penggandaan dokumen	6. 100.000 lembar							
							7. Pengiriman paket	7. 2 kali							
							8. Tersedianya barang cetak	8. 5 jenis							
							9. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 4	9. 18 unit							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah **Jumlah Pagu : Rp. 23.423.461.000,00**

Nomor	Urusan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
1.05.1.05.03.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Kinerja tenaga kontrak Pengelola Arsip/Perpustakaan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 2. Kinerja tenaga kontrak pengemudi dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 3. Kinerja tenaga kontrak penjaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku 4. Kinerja tenaga kontrak penjaga reapipter dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1. 2 orang 2. 4 orang 3. 6 orang 4. 4 orang	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	40%	Rp. 531.000.000,00	Rp. 800.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan		
1.05.1.05.03.00.01.003	Penyediaan Rapat- Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Konsultasi dan koordinasi BPBD DIY Dalam Daerah terlaksana dengan baik 2. Perjalanan Dinas di Dalam Jawa terlaksana dengan baik 3. Perjalanan Dinas Luar Jawa terlaksana dengan baik 4. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1. 1 tahun 2. 1 tahun 3. 1 tahun 4. 1 tahun	Dukungan sebesar 30% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 570.240.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan		
1.05.1.05.03.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.140.000.000,00	Rp. 2.169.600.000,00				
1.05.1.05.03.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Kendaraan dinas operasional ATV sesuai RKPBMĐ 2. Kendaraan dinas operasional forklift sesuai RKPBMĐ 2. Kendaraan dinas operasional Mini Loader sesuai RKPBMĐ	1. 1 unit 2. 1 unit 2. 1 unit	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	35%	Rp. 840.000.000,00	Rp. 1.209.600.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 23.423.461.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							3. Kendaraan dinas operasional motor tempel/ kapal sesuai RKPBMMD	3. 6 unit							
							4. Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPBMMD	4. 20 unit							
							5. Kendaraan dinas operasional roda 4 bensin sesuai RKPBMMD	4. 10 unit							
							6. Kendaraan dinas operasional roda 4 solar sesuai RKPBMMD	6. 7 unit							
							7. Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKPBMMD	7. 9 unit							
							8. Kendaraan dinas operasional Sweeper Truck sesuai RKPBMMD	8. 1 unit							
							9. Kendaraan dinas operasional Mini Excavator sesuai RKPBMMD	9. 1 unit							
1.05.1.05.03.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Peralatan dan perlengkapan gedung kantor terawat	1.55 Jenis, 12 Bulan	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemgkat daerah	35%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 960.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan	
							2. Mebeleur kantor terpelihara sesuai kebutuhan	2. 8 jenis, 12 bulan							
							3. paket pemeliharaan bangunan tempat kerja	3. 5 gedung, 12 bulan							
1.05.1.05.03.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 148.000.000,00	Rp. 269.000.000,00			
1.05.1.05.03.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan kinerja instansi Pemerintah (LKJIP) sesuai berbagai dokumen perencanaan dan capaian kinerja instansi diukur dengan indikator lainnya (sesuai aturan perundangan)	Nilai LKJIP : A	Dukungan 25 % terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 14.000.000,00	Rp. 24.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 23.423.461.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.05.1.05.03.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada seluruh program dan kegiatan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 10 %	Dukungan 25 % terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 22.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan	
1.05.1.05.03.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. ROPK, RENJA, RKA, DPA dan DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	11 dokumen	Dukungan 25% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 190.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan	
							2. Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi BPBD DIY yang lengkap dan terkini	Pembaharuan data website BPBD DIY secara kontinyu 100%							
							3. Berita Acara Forum perencanaan PD	1 BA							
1.05.1.05.03.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan ROPK yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi ROPK 100%	Dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	Rp. 19.000.000,00	Rp. 33.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan	
1.05.1.05.03.00.15	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA										Rp. 5.717.000.000,00	Rp. 8.900.000.000,00			
1.05.1.05.03.00.15.001	Pengelolaan Pencegahan Bencana	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	25Desa/Kelurahan	(1). Pembentukan Desa/Kelurahan tangguh bencana di kawasan rawan bencana baru yang terbentuk dan berkembang di DIY	(1). 25 Desa/Kelurahan	Dukungan 60,78% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas aparaturnya dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	100%	Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 5.100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan	
							Peningkatan Sekolah Aman (SSB) di Kawasan Rawan Bencana	(2) Kerjasama FPRB untuk pengurangan risiko berbasis komunitas	(2) 6 angkatan (5 kab/kota & 1 prov)						
								(3) Profile Destana	(3) 1 paket						
								(4). Kajian Monitoring dan evaluasi terhadap pembentukan dan pengembangan Desa/Kelurahan tangguh bencana di DIY	(4) 1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 23.423.461.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.05.03.00.15.002	Pengelolaan Kesiapsiagaan Bencana	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	25Desa/Kelurahan	Fasilitasit Komponen Penanggulangan Bencana	5 kali	Dukungan 50% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	100%	Rp. 2.717.000.000,00	Rp. 3.800.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
					Peningkatan Sekolah Aman (SSB) di Kawasan Rawan Bencana	25Sekolah	Pelatihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	1 angkatan						
							Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	25 SPAB/SSB						
							Penyusunan Dokumen Renkon Tingkat Provinsi	1 dokumen						
							Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKB) di DIY	1 event						
							Peta Rawan Bencana Kebakaran se-DIY	1 laporan						
							petugas pemadam kebakaran terlatih, meningkat kompetensinya dalam pengelolaankebakaran peremukiman	35 orang						
1.05.1.05.03.00.16	PROGRAM PENGELOLAAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK BENCANA										Rp. 9.829.817.000,00	Rp. 16.451.624.610,00		
1.05.1.05.03.00.16.001	Pengelolaan Kedaruratan Bencana	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana	14menit	1. Masyarakat, relawan dan petugas kedaruratan di Daerah istimewa Yogyakarta memiliki keampilan dalam penanganan darurat bencana DIY	1. 4 kali drill skil, 1 kali geladi "Tactical Floor Games", 1 kali geladi Posko dan 1 kali Geladi Lapang	Dukungan 25% terhadap peningkatan respon kejadian bencana	100%	Rp. 2.488.000.000,00	Rp. 3.146.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							2. Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan	2. 3 kali						
							3. Kejadian Kedaruratan yang ditangani petugas/relawan	3. 360 laporan/kejadian						
							4. Tim Reaksi cepat yang siap siaga dalam penanganan darurat bencana	4. 28 Orang & 4 orang Perwira						
							5. Pendampingan, Sertifikasi ISO 45001 dan MONEV tentang K3	5. 1 set						
							7. Geladlan relawan	8. 3 hari						
							8. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pos Aju	8. 4 kali						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 23.423.461.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indikator Kinerja						(12)	(13)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				(14)	(15)
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
1.05.1.05.03.00.16.002	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana	14menit	Bimtek PUSDALOPS dan media center	2 kali	Dukungan 75 % terhadap peningkatan respon kejadian bencana.	100%	Rp. 4.457.857.000,00	Rp. 8.055.624.610,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							Kesiapsiagaan dan respon penanganan Kedaruratan di DIY didukung dengan sistem reaksi cepat di PUSDALOPS PB DIY.	1 set System terintegrasi/ terpadu.						
							Operasional media center selama 12 bulan (informasi kebencanaan kepada publik).	12 laporan dan 4 jenis.						
							PUSDALOPS PB DIY beroperasi selama 12 bulan untuk mendukung penanganan kedaruratan bencana.	12 laporan						
1.05.1.05.03.00.16.004	Pengelolaan Logistik Bencana	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana	14menit	(1) Aparat, relawan dan masyarakat mampu untuk mengelola Dapur Umum dalam Penanggulangan Bencana.	(1) 15 kelompok	Dukungan 25% terhadap peningkatan respon kedaruratan bencana	100%	Rp. 1.901.500.000,00	Rp. 3.250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							(2) Aparat, relawan dan masyarakat menjadi terampil dalam manajemen Logistik dalam Penanggulangan Bencana.	(2) 1 kelompok						
							(3) Tertatanya Administrasi Update Data Logistik secara Periodik.	(3) 1 laporan update data						
							(4) Terselenggaranya bantuan Logistik dan Peralatan dalam rangka Penanggulangan Bencana.	(4) 1200 paket logistik.						
							(5) Tersedianya paket perlengkapan untuk penanggulangan bencana	(5) 1000 bronjong, 15 000 karung, sekop panjang 400, sekop pendek 400, 500 deklit, 1000 selimut, 300 tikar, seng 500 lbr						
							(6) Terpenuhinya Pengelolaan dan pendistribusian Logistik dan Peralatan	(6) 1 laporan data Sarpras PB						
1.05.1.05.03.00.16.005	Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana	14menit	Aparat, relawan dan masyarakat menjadi terampil dalam Manajemen Peralatan Penanggulangan Bencana	1 angkatan	Dukungan 25% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas aparaturnya dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	100%	Rp. 982.460.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							Kajian kebutuhan peralatan PB	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 23.423.461.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Kesiapsiagaan Peralatan Penanggulangan Bencana sesuai kluster peruntukannya	4 angkatan							
							Tersedianya Peralatan Penanggulangan Bencana	23 jenis							
							Tertatanya Administrasi Update Data Peralatan PB secara Periodik	1 dokumen							
1.05.1.05.03.00.17	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA										Rp. 4.057.644.000,00	Rp. 3.300.000.000,00			
1.05.1.05.03.00.17.002	Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pasca Bencana	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Indeks Pemulihan Pasca-Bencana	75skor/nilai	Kajian Indek Risiko Bencana DIY tahun 2019	1 dokumen	Dukungan sebesar 67% terhadap pencapaian indeks pemulihan pasca-bencana	100%	Rp. 3.949.084.000,00	Rp. 2.100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan	
							KK yang mendapat Stimulan Perbaikan Rumah Pascabencana	20 KK							
							Monev Pasca bencana Bansor sikitat Siklon Cempaka 2017 di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul	1 dokumen							
							Pelatihan JITU-PASNA (pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) dan GIS untuk relawan	35 orang							
							Pelatihan rancang bangun tahan gempa dan huntara	60 orang							
							Pemeliharaan jembatan belly	12 bulan							
							Penguatan tebing lahan cadangan huntap plosokerep	1 lokasi							
							Rehabilitasi Barak Pengungsian Desa Donokerto dan Desa Candibinangun Sleman	2 barak							
1.05.1.05.03.00.17.003	Pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi budaya pasca bencana	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Indeks Pemulihan Pasca-Bencana	75skor/nilai	Kelompok kesenian mendapat Stimulan Pemulihan Budaya Pascabencana	5 kelompok	Dukungan sebesar 30% terhadap pencapaian indeks pemulihan pasca-bencana (DRI DIY)	100%	Rp. 108.560.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan	
							Perahu dan alat tangkap ikan untuk nelayan korban siklon Cempaka	5 unit							
							Rehabilitasi pascabencana Siklon Cempaka TPI Baron	1 unit							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Wajib														
1.06	SOSIAL														
1.06.1.06.01.00	Dinas Sosial														
1.06.1.06.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 23.852.260.000,00	Rp. 25.020.000.000,00			
1.06.1.06.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Kir roda 4 Dinas dan Balai	Dinas : 4 unit; BRSPA: 4 unit	Dukungan 100% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 14.427.153.000,00	Rp. 15.500.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan	
							02. Pembayaran Pajak STNK roda 2, dan 4 Dinas dan Balai	Dinas : 2: 20 unit; 4:43 unit; BRTPD: 10 unit; BPRSW: 2: 2 unit; 4: 2 unit; BRBSKL: 12 unit; BPRSR: 2:2 unit; 4: 2 unit; BRSPA: 10 unit; BPSTW: 6 unit							
							03. Pembayaran tagihan rekening air Dinas dan Balai	Dinas: 6 lok; BRBSKL: 2 lok; BPSTW: 1 lok							
							04. Pembayaran tagihan rekening listrik Dinas dan Balai	Dinas: 24 lok; BRTPD: 1 lok; BPRSW: 4 lok; BRBSKL: 16 lok; BPRSR: 22 lok; BPSTW: 28 lok							
							05. Pembayaran tagihan rekening telepon Dinas dan Balai	Dinas: 8 lok; BRTPD: 3 lok; BPRSW: 1 lok; BRBSKL: 2 lok; BPRSR: 1 lok; BPSTW: 4 lok							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							06. Penyediaan Alat tulis kantor Dinas dan Balai	Dinas: 37 jenis; BRTPD: 35 jenis; BPRSW: 36 jenis; BRSBKL: 42 jenis; BPRSR: 36 jenis; BRSPA: 40 jenis; BPSTW: 38 jenis						
							07. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Dinas dan Balai	Dinas: 45 buku; 60.000 lbr; BRTPD: 9 jenis; BPRSW: 2 jenis; 25.000 lbr; BRSBKL: 48 buku; 45.526 lbr; BPRSR: 2 jenis; 25.000 lbr; BRSPA: 11 jenis; 90.400 lbr; BPSTW: 6 jenis; 21.000 lbr						
							08. Penyediaan Jasa kebersihan dinas dan Balai	Dinas: 4 lok; BRTPD: 1 lok; BPRSW: 1 lok; BRSBKL: 2 lok; BPRSR: 1 lok; BRSPA: 2 lok; BPSTW: 2 lok						
							09. Penyediaan Komponen instalasi listrik dan bangunan kantor Dinas dan Balai	Dinas: 13 jenis; BRTPD: 25 jenis; BPRSW: 14 BRSBKL jenis; 10 jenis; BPRSR: 14 jenis; BRSPA: 18 jenis; BPSTW: 12 jenis						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
					(6)	(7)	(8)		(9)	(10)			(11)	(12)	
							10. Penyediaan logistik kantor dan logistik klien Balai	BRTPD: 185 org; BPRSW: 70 org; BRSBKL: 300 org; BPRSR: 80 org; BRSPA: 140 org; BPSTW: 230 org							
							11. Penyediaan Materi 3000 dan 6000 Dinas dan Balai	Dinas: 168 lbr; BPRSW: 170 lbr; BRSBKL: 450 lbr; BPRSR: 170 lbr; BRSPA: 200 lbr							
							12. Penyediaan Surat kabar lokal, regional, nasional dan Majalah untuk Dinas dan Balai	Dinas: 12 eks; 24 eks; 36 eks; 60 eks; BRTPD: 48 bln; BPRSW: 12 eks; BRSBKL: 3 eks; BPRSR: 12 eks; BRSPA: 72 eks; BPSTW: 72 eks							
							13. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Dinas dan Balai	Dinas: 27 jenis; BPRSW: 16 jenis; BRSPA: 28 jenis;							
							14. Pengisian tabung pemadam kebakaran Dinas dan Balai	Dinas: 5 bh; BRSBKL: 10 bh; BPRSR: 1 bh							
							15. Bibit tanaman Hias Dinas	12 bln							
							16. Dokumentasi Dinas	200 lbr							
							17. Dekorasi Dinas	4 kegt							
							18. Ijin Frekuensi/ Retribusi/ Pajak Dinas	1 lok							
							19. Retribusi Sampah	BRTPD: 12 bln; BPRSR: 12 bln; BRSPA: 24 bln; BPSTW: 24 bln							
							20. Pembayaran tagihan internet	BRTPD: 1 lok							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							21. Pembelian Tabung Gas Dapur	BRTPD: 468 tbg; BPRSW: 180 tbg; BRSBKL: 12 bin; BPRSR: 180 tbg; BRSPA: 386 tbg; BPSTW: 672 tbg						
							22. Penyediaan Bendera dan Umbul-umbul	BPRSW: 4 bh; BPRSR: 4 bh; BPSTW: 24 bh						
							23. Penyediaan alat perlengkapan	BPRSW: 9 jenis; BPRSR: 16 jenis; BRSPA: 11 jenis						
							24. Pakaian kerja lapangan	BPRSR: 52 bh; BRSPA: 35 bh						
1.06.1.06.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Jasa keamanan kantor dan tempat kerja Dinas dan Balai	Dinas: 35 org; BRTPD: 1 lok; BPRSW: 1 lok; BRSBKL: 2 lok; BPRSR: 1 lok; BRSPA: 2 lok	Dukungan 100% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 8.639.986.000,00	Rp. 9.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							2. Pembayaran Non PNS	BRTPD: 32 org; BPRSW: 8 org; BRSBKL: 53 org; BPRSR: 13 org; BRSPA: 6 org; BPSTW: 12 bin						
1.06.1.06.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Makanan dan Minuman rapat/sidang/ tamu 1 tahun	Dinas: 6.000 os; BRTPD: 1.220 os; BPRSW: 540 os; BRSBKL: 372 os; BPRSR: 1.015 os; BRSPA: 1.536 os; BPSTW: 600 os	Dukungan 100% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 785.121.000,00	Rp. 520.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							2. Konsultasi dan koordinasi Luar Daerah untuk Dinas dan Balai	12 bulan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							3. Konsultasi dan koordinasi Dalam daerah untuk Dinas dan Balai	12 bulan							
1.06.1.06.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 29.966.379.000,00	Rp. 31.400.000.000,00			
1.06.1.06.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Pembuatan Ruang bermain anak (1 pkt), Pembuatan Ruang Merokok (1 pkt), Pembuatan Ruang Satpam (1 pkt), Rehab/ Pembangunan Camp Assessment pada Dinas	4 kegt	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 22.418.739.000,00	Rp. 20.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan	
							2. Pembangunan Ruang Makan (1 pkt) pada BRSPA	1 kegt							
							3. Pembangunan Ruang Perawatan Khusus/ isolasi (1 unit), Pembangunan dorlog penghubung gedung (1 unit); Pembuatan tempat parkir kendaraan roda dua (1 unit) pada BPSTW	3 kegt							
							4. Pembuatan Selasar Penghubung (1 pkt), Rehabilitasi Ruang Isolasi (1 pkt) dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Tempat Kerja (1 pkt) pada BRTPD	3 pkt							
							5. Rehab Gedung ketrampilan, Pembangunan Ruang Tamu Kantor dan Pembuatan Ruang Bermain Balita BPRSW	3 pkt							
							6. Rehabilitasi Gedung Asrama (3 Asrama) BPRSR	3 pkt							
							7. Rehabilitasi Bangunan Gedung pada BRSPA	1 pkt							
							8. Rehabilitasi Bangunan Gedung pada BRSBKL	1 pkt							
							9. Rehabilitasi Bangunan Gedung Tempat Kerja pada BPSTW	1 pkt							
1.06.1.06.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Pengadaan counter desk (1 unit); almari besi (1 unit); CCTV (24 unit) pada Dinas	3 jenis	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 2.891.548.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan	
							2. AC Floor Standing (2 bh); Tangga teleskopik (2 bh); water heater (5 bh); Mesin press Sin1 (1 bh); Kasur untuk asrama klien (25 bh); Kompor gas dapur (2 bh); Handycam (1 unit); CCTV (1 set); Shortwave Diatermy (1 unit) pada BRTPD	10 jenis							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							3. Pengadaan Karpet (48 m); Genset (1 unit); Televisi (2 unit); Gordyn/Witrage/Rel aluminium (316 m); komputer PC (3 unit); printer (3 unit); kursi (71 bh); Mesin Absensi (1 unit);kulkas (1 unit); Alat-alat Perlengkapan (1 pkt); Meja 1/2 biro (20 bh); AC (2 unit);kursi Meja Tamu (4 set);sound system (1 pkt); CCTV (1 pkt) pada BPRSW	15 jenis							
							4. Pengadaan Mesin cuci (2 unit); Jet pum (1 unit); Komputer (1 unit); Printer (1 unit); CCTV (2 unit) pada BRSBKL	7 jenis							
							5. Pengadaan Gezet (1 unit); mesin absensi (1 unit); Almari (loker) (1 unit); Filing Kabinet (1 unit); Televisi (2 unit); Pengadaan PABX (1 pkt); Komputer PC (3 unit); Printer (2 unit); Laptop (2 unit); Kursi kerja (23 bh); Tabung Gas 12 kg; CCTV (3 unit); LCD (1 unit); Sound Sistem (2 set); Wireless (1 unit); Drum band; hadroh; kursi roda Jumbo pada BPRSR	18 jenis							
							6. Pengadaan Genset (1 unit); Almari arsip (10 bh); Alman Pakaian (35 bh); Komputer (5 unit); Troli makan (2 bh); Bateray laptop (5 unit); printer (4 buah); wifi/ aksespoim (1 set); Jam dinding (25 bh); setrika (30 bh); blender (2 bh); LCD proyektor (2 bh); sound sistem (2 bh); televisi (2 bh); pianika (10 bh) pada BRSPA	15 jenis							
							7. Pengadaan Generator set: 2 unit; Almari: 13 unit; AC: 1 unit; Mesin cuci: 2 unit; Kipas angin: 2 buah; Mesin cuci: 2 unit; Water Heater: 5 unit; Pompa air: 4 unit; Karpet: 30 m2; Televisi: 6 buah; Komputer PC: 2 unit; Note Book: 1 unit; Printer: 4 unit; Mesin obras: 1 unit; Kasur: 30 buah; Alas tempat tidur: 250 buah;Kompom gas: 4 buah; Dispenser: 2 buah; Blender: 4 buah; Jam dinding: 25 buah; Proyektor: 1 buah; Sound untuk wisma: 1 unit; Bel komunikasi wisma: 23 unit; Kasur Dekubitus: 5 buah; Tensi meter: 2 buah; Minor set: 2 buah; Foto presiden dan wakil presiden: 4 pasang pada BPSTW	27 jenis							
1.06.1.06.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Pemeliharaan instalasi listrik di TMP/ tambah daya (1 pkt); pemeliharaan saluran air (3 pkt); dan Pengcatan Gedung pada Dinas	3 ketg	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.591.554.000,00	Rp. 1.800.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							2. Pemeliharaan Instalasi Air Minum/ Bersih (1 lok); Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/ Kotor (12 bin); Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja (1 lok); Pemeliharaan tanaman (1 lok) pada BRTPD	4 kegt							
							3. Pemeliharaan Saluran Air Minum/Bersih (2 jenis); Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor (10 kl); pemeliharaan kamar mandi (3 bh) pada BPRSW	3 kegt							
							4. Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih (4 jenis); Pemeliharaan Instalasi air limbah/kotor (48 kl); Pemeliharaan Bangunan Gedung tempat kerja (5 jenis) pada BRSBKL	3 kegt							
							5. Pemeliharaan kantor pada BPRSR	1 kegt							
							6. Pemeliharaan gedung BRSPA 2 unit	2 lok							
							7. Pemeliharaan instalasi air limbah / kotor berupa sedot WC: 16 kali; Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja: 11 paket pada BPSTW	2 kegt							
1.06.1.06.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Roda 2, 4 Dinas dan Balai	12 bulan	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.041.443.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan	
							2. Belanja Jasa Service Roda 2,3, 4, 6	Dinas: 140 kl; BRTPD: 29 kl; BPRSW :4 unit); BRSBKL: 14 unit; BPRSR: 2 unit; BRSPA: 10 unit; BPSTW: 10 unit							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							3. Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 2, 3, 4, 6	Dinas: 40 unit; 3 unit; 12 unit; 1 unit, BRTPD: 37 jenis; BRSBKL: 15 unit; BPRSR: 2 unit; BRSPA: 10 unit; BPSTW: 10 unit							
1.06.1.06.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Pembelian BBM/ solar Genzet (510 lt); pemeliharaan lift (1 unit); pemeliharaan mesin potong rumput (2 unit); pemeliharaan CPU komputer (20 unit); pemeliharaan printer (20 unit); pemeliharaan laptop (6 unit); pemeliharaan LCD proyektor (2 unit); pemeliharaan lampu balast (2 unit); pemeliharaan mesin ketik (5 unit); isi freon AC (30 unit); servis AC (90 unit); suku cadang AC (5 unit); pemeliharaan faximile (2 unit); pemeliharaan pompa air/ jet pump (2 unit); pemeliharaan generator/ genzet (2 unit); pemeliharaan handy talky (10 unit); pemeliharaan sound sistem/ wireles (4 unit) pada Dinas	17 jenis	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 362.895.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan	
							2. Penyediaan BBM dan oli untuk genset dan pemotong rumput (1.350 lt); Service genset, diesel pump, mesin lift, dan mesin pemotong rumput (3 unit); Perbaikan komputer, printer, laptop, LCD, jaringan internet, mesin jahit (28 unit); Perbaikan AC ruangan dan pengisian freon (30 unit); Kalibrasi Alat Fisioteraphy dan alat keperawatan (1 unit) pada BRTPD	5 kegt							
							3. Tersedianya BBM untuk Genset dan Mesin Pemotong Rumput; Terpeliharanya Alat Bermesin (2 unit); Terpeliharanya Alat-alat Kantor (Komputer, Pemanas Air, Pabuson, Soundsystem, Dropcup, LCD, CCTV, Gamelan, Laptop, Faximili, Mesin Jahit, Kompor Gas, Kulkas, mesin Ketik, Steamer) (15 jenis); Terpeliharanya Pelengkapan Kantor (AC, Pompa Air)(2 jenis) pada BPRSW	4 kegt							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							4. Penyediaan bahan bakar minyak/gas Generator (2 unit); Pemeliharaan Generator (2 unit); Pemeliharaan Jetpum (6 bh); Pemeliharaan Mesin Cuci (3 bh); Pemeliharaan AC (9 unit); Pemeliharaan Komputer (12 unit); Pemeliharaan Mesin Jahit (2 unit); Pemeliharaan Note book (5 unit); Pemeliharaan Mesin Obras (2 unit); Pemeliharaan Kulkas (5 unit); Pemeliharaan Televisi (4 unit); Pemeliharaan Sound Sytem (1 unit) pada BRSBKL	12 kegt							
							5. Tersedianya BBM untuk Genset dan Mesin Pemotong Rumput (12 bln); Terpeliharanya Intalasi air bersih(6 jenis); Terpeliharanya alat kantor (9 jenis); Terpeliharanya Alat alat rumah tangga (12 jenis) pada BPRSR	4 kegt							
							6. Pemeliharaan Alat-alat Kantor(12 bln); Alat-alat Rumah Tangga (12 bln); Mebelair (12 bln)	3 kegt							
							7. BBM untuk genzet dan mesin potong rumput: 12 bulan; Instalasi air minum (penggantian kran air); 30 buah; Alat-alat kantor (mesin ketik, komputer, note book, faximili); 4 jenis; Perlengkapan kantor (AC, CCTV, PABX, pompa air, kompos gas); 5 jenis	4 kegt							
1.06.1.06.01.00.02.006	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 Dinas	1 unit	Dukungan terhadap sarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.660.200.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan	
							2. kendaraan roda 2 pada BPSTW	4 unit							
							3. Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus (Mobil Elf Long) BRSBKL	1 unit							
							4. Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans pada BPSTW	2 Unit							
1.06.1.06.01.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 17.582.000,00	Rp. 20.000.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial												Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indikator Kinerja						(12)	(13)	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
1.06.1.06.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pembinaan Pekerja Sosial dan Penilaian Angka Kredit	32 org	Dukungan terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur (peksos) bertambah/ meningkat dan kenaikan pangkat serta penyesuaian jabatan menurut angka kredit	100%	Rp. 17.582.000,00	Rp. 20.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan		
1.06.1.06.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 102.740.000,00	Rp. 171.500.000,00				
1.06.1.06.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan	1 dokumen	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 12.232.000,00	Rp. 12.500.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan		
1.06.1.06.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 1 %	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 18.435.000,00	Rp. 20.500.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan		
1.06.1.06.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Dokumen perencanaan RKA-DPA, RKAP-DPPA, ROPK, PK, Renja	5 dokumen	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 54.973.000,00	Rp. 120.500.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan		
							2. Pengelolaan website Dinas	1 kegiatan								
1.06.1.06.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rekomendasi pelaksanaan kegiatan SKPD	1 kegiatan	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 17.100.000,00	Rp. 18.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan		
1.06.1.06.01.00.15	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL										Rp. 7.674.570.000,00	Rp. 8.500.000.000,00				

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikator	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)	
1.06.1.06.01.00.15.001	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Persentase Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitas, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Orang dengan HIV AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang Terpenuhi Kebutuhan	5.91%	01. Asistensi Keluarga Penyandang Disabilitas	60 org	Kontribusi Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial terhadap Program Rehabilitasi Sosial sebanyak 1.120 penyandang disabilitas, 1 kelembagaan disabilitas dan 480 anak bermasalah sosial atau 100 %	100%	Rp. 3.235.301.000,00	Rp. 3.500.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan	
							02. Bantuan Operasional LPA DIY	1 lbg							
							03. Bantuan Operasional Rumah Singgah	7 lbg							
							04. Bantuan Operasional Yayasan Sayap Ibu	1 lbg							
							05. Bimbingan Sosial Pelayanan dan Perlindungan Anak Jalanan dan Referal Anak serta Bimbingan Sosial Anak Jalanan Hasil Penjangkauan pada Rumah Perlindungan Sosial	75 org							
							06. Family Gathering Keluarga Penyandang Disabilitas	480 org							
							07. Kampanye Sosial Penyandang Disabilitas	400 org							
							08. Komite Penyandang Disabilitas	1 kegt							
							09. Pengasramaan Murid SLB	50 org							
							10. Perlindungan Anak Terlantar melalui LKSA	245 org							
							11. Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis LKSA	30 org							
							12. Perlindungan Bagi Anak Disabilitas melalui LKS	50 org							
							13. Draf Rapergub anak dalam kondisi khusus	1 kegt							
							14. Rekomendasi Adopsi Cota	30 org							
							15. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas Mental dan Orang Tua/ Wali	40 org							
							16. Pemenuhan kebutuhan dasar Anak Balita Terlantar (ABT)	20 anak							
							17. Perlindungan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	20 anak							
							18. Kemah wawasan kebangsaan	400 anak							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Dinas Sosial												Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indikator Kinerja						(12)	(13)	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
1.06.1.06.01.00.15.002	Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial serta Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	1) Camp Assesment Karanganyar, Brontokusuman, Mergangsan, Kota YK; 1) Camp Assesment Jl. Prangtritis, Panggunharjo, Sewon, Bantul; 2) DIY-Daerah Asal/TRC/Panti/Balai; 3) Sleman, KP, GK, Bantul; 4) Kota YK; 5)Debakasi-DIY; 6) DIY; 7) DIY	Persentase Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitas, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Pemulung,Orang dengan HIV AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang Terpenuhi Kebutuhan	5.91%	1. Assessment dan pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi gelandangan, Pengemis, Pemulung di Camp Assessment	160 org	Kontribusi Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial serta Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang terhadap Program Rehabilitasi Sosial sebanyak 170 gelandangan pengemis pemulung, 7 orang ODHA dan 12 orang korban tindak kekerasan dan perdagangan	100%	Rp. 4.439.269.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan		
							2. Pemulungan PMKS ke daerah asal, perujukan ke TRC Kemensos atau panti Sosial/Balai Rehabilitasi	120 org								
							3. Institusi Penerima Wajib Laporan Yang Dimonev	5 lbg								
							4. Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dalam Shelter	7 org								
							5. Korban Tindak kekerasan dan Perdagangan Orang Dipulangkan	10 org								
							6. Software data klien camp Assessment	1 kegt								
							7. Petugas Camp Assessment mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kapasitas	48 org								
1.06.1.06.01.00.16	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										Rp. 7.448.926.000,00	Rp. 8.500.500.000,00				
1.06.1.06.01.00.16.001	Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	67.6%	01. Pemberian bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia	1000 orang	Kontribusi Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin terhadap Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebanyak 1.300 LU, peringatan HLUN atau 0.94 %	100 %	Rp. 3.754.373.000,00	Rp. 4.000.500.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan		
							02. Bantuan permakanan lanjut usia terlantar	100 orang								
							03. Fasilitasi Lanjut Usia melalui Home Care	700 orang								
							04. Pelayanan harian lanjut usia melalui Taman Werda	125 orang								
							05. Bantuan penguatan kelembagaan lansia	1 lembaga								
							06. Fasilitasi Pelayanan LUT melalui Family Support	50 orang								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							07. Peringatan HLUN dan bhakti sosial 2020	2000 orang						
							08. Bedah Kamar Lansia	50 orang						
							09. Workshop Grand Desain Kawasan Ramah Lansia DIY	1 kegiatan						
							10. Bimtap KPM Penerima PKH	10 lokasi						
							11. Penumbuhan LKS Lanjut Usia	5 lembaga						
							12. Sosialisasi Perda Kesejahteraan Lansia	5 kab/kota						
1.06.1.06.01.00.16.002	Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana serta Pemulangan dan Pemukiman Orang Terlantar	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	lokasi kejadian Bencana	Persentase Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	67.6%	01. Fasilitas perawatan (Dimakamkan) Jenazah Terlantar (20 org) dan visum (5 orang)	25 org	Kontribusi Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Serta Pemulangan dan Pemukiman Orang Terlantar terhadap Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam 1 tahun atau 33.33 %	100%	Rp. 3.694.553.000,00	Rp. 4.500.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							02. Memfasilitasi orang terlantar yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan	1 tahun						
							03. Pelayanan Bantuan Distribusi Air Bersih Bagi Korban Bencana Kekeringan	750 tanki						
							04. Pembentukan dan pelatihan KSB	1 lok						
							05. Fasilitasi Tagana	200 tagana						
							06. Pengolahan Simlog dan Data Bencana, petugas logistik	13 org						
							07. Fasilitasi Tenaga Pelopor Perdamaian	104 org						
							08. Perekrutan anggota baru Tenaga Pelopor Perdamaian	50 org						
							09. Revitalisasi Pengurus Tenaga Pelopor Perdamaian	54 org						
1.06.1.06.01.00.17	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN										Rp. 10.275.000.000,00	Rp. 9.500.000.000,00		
1.06.1.06.01.00.17.001	Pembinaan Usaha dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga meningkat ekonominya	1.01%	1. Pendampingan dan koordinasi penyaluran bantuan pangan /BPNT	5 kab/kota	Kontribusi Penyuluhan, Edukasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial Serta Pendataan PMKS dan PSKS terhadap Program penanganan fakir miskin dalam 1 tahun atau 100 %	100%	Rp. 6.176.528.000,00	Rp. 4.500.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial												Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							2. Pendampingan dan koordinasi UEP PKH	5 kab/kota						
							3. UEP PKH Graduasi melalui BKK	5 kab/kota (825 org)						
							4. Peningkatan kapasitas pengurus KUBE, LKM, USEP KM	70 org, 50 org, 50 org						
							5. Seleksi prestasi pendamping dan pengurus KUBE	5 kab/kota						
							6. KUBE Pengembangan Kabupaten Gunung Kidul	20 KUBE						
							7. KUBE Pengembangan Kabupaten Kulon Progo	20 KUBE						
							8. KUBE Pengembangan Kabupaten Bantul	20 KUBE						
							9. PKH Graduasi Tahun 2018 mampu melaksanakan fungsi sosial	100 org						
1.06.1.06.01.00.17.002	Penyuluhan, Edukasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial serta Pendataan PMKS dan PSKS	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	DIY	Persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga meningkat ekonominya	1.01%	1. Pengumpulan data PMKS dan PSKS	438 desa	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penanganan PMKS serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial	100%	Rp. 4.098.472.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
							2. Penyuluhan melalui media peragaan	75 lokasi						
							3. Penyuluhan sosial berbasis masyarakat melalui petugas penyuluh sosial masyarakat	200 orang						
							4. Penyuluhan sosial melalui media cetak	5 paket						
							5. Penyuluhan sosial melalui media elektronik	10 paket						
							6. Penyuluhan Sosial Tingkat Desa	20 lokasi						
							7. Sosialisasi Program penanganan PMKS	24 lokasi						
							8. Sosialisasi program perlindungan dan jaminan sosial	300 orang						
							9. Publikasi Informasi kesejahteraan sosial melalui media surat kabar	16 paket						
1.06.1.06.01.00.18	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS										Rp. 2.500.871.000,00	Rp. 3.000.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial												Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.06.01.00.18.001	Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Pundong	Persentase Warga Binaan yang terpenuhi dan terlindungi hak-haknya, mampu hidup amndiri dan berfungsi sosial	25.88%	Rehabilitasi mental, sosial, ketrampilan dan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas serta jaminan sosial wredha disabilitas pada BRTPD	185 orang	Kontribusi Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas sebanyak 44 orang yang mampu hidup mandiri dan berfungsi sosial atau 25.88 %	100 %	Rp. 2.500.871.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.00.19	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL PEREMPUAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL										Rp. 1.420.102.000,00	Rp. 2.000.000.000,00		
1.06.1.06.01.00.19.001	Pelayanan Sosial bagi Perempuan Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Godean	Persentase Warga Binaan yang memiliki kapasitas untuk mandiri dan berfungsi sosial	45%	Perlindungan, Rehabilitasi Sosial dan Ketrampilan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (Wanita Yang Berpotensi Menjadi Wanita Tuna Susila) di Balai PRSW	70 orang	Kontribusi Pelayanan Sosial Bagi Perempuan Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi Perempuan Penyandang Masalah Sosial sebanyak 27 orang perempuan penyandang masalah sosial yang tersertifikasi atau 45 %	100 %	Rp. 1.420.102.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.00.20	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI GELANDANGAN, PENGEMIS, PEMULUNG DAN EKS PSIKOTIK										Rp. 2.010.522.000,00	Rp. 3.000.000.000,00		
1.06.1.06.01.00.20.001	Pelayanan Sosial bagi Gelandangan, Pemulung, Pengemis dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Kalasan Tegalrejo	Persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga/masyarakat	14.4%	1. Pelayanan sosial bagi gelandangan, Pemulung dan pengemis Warga Binaan Balai	50 orang	Kontribusi Pelayanan Sosial Bagi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik sebanyak 10 orang (gelandangan pemulung pengemis yang mamp	100 %	Rp. 2.010.522.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							2. Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Distabilitas Mental Warga Binaan Balai	250 orang							
1.06.1.06.01.00.21	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI REMAJA PENYANDANG MASALAH SOSIAL										Rp. 1.432.187.000,00	Rp. 2.000.000.000,00			
1.06.1.06.01.00.21.001	Pelayanan Sosial bagi Remaja Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Sleman	Persentase Warga Binaan yang Mampu Hidup Normatif Dalam Pengasuhan Keluarga	80%	Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi 40 Anak Terlantar dan 40 Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai PRSR	80 orang	Kontribusi Pelayanan Sosial Bagi Remaja Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja Penyandang Masalah Sosial sebanyak 24 anak terlantar yang memperoleh jaminan sosial dan 40 anak berhadapan hukum ya	100 %	Rp. 1.432.187.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan	
1.06.1.06.01.00.22	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI ANAK PENYANDANG MASALAH SOSIAL										Rp. 1.452.423.000,00	Rp. 3.000.000.000,00			
1.06.1.06.01.00.22.001	Pelayanan Sosial bagi Anak Bermasalah Sosial Warga Binaan Balai	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Ngemplak Wonosari	Persentase Warga Binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial dalam pengasuhan keluarga	39,76%	Perlindungan, pengasuhan Balita Terlantar	25 orang	Kontribusi Pelayanan Sosial Bagi Anak Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai terhadap Program Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Penyandang Masalah Sosial sebanyak 15 anak balita terlantar yang memperoleh rekomendasi adopsi, 20 anak terlantar dan 12	100 %	Rp. 1.452.423.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan	
							Perlindungan, pengasuhan dan pengembangan Sosial Anak Terlantar	80 anak							
							Perlindungan, Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	35 anak							
1.06.1.06.01.00.23	PROGRAM PERLINDUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR										Rp. 1.008.997.000,00	Rp. 1.300.000.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial												Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.06.1.06.01.00.23.001	Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Warga Binaan Balai	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Kasih Pakem	Persentase Warga Binaan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar dan hak-haknya	100%	Perlindungan, Pelayanan dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	230 orang	Kontribusi Pelayanan Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar Warga Binaan Balai terhadap Program Perlindungan Lanjut Usia Terlantar sebanyak 230orang yang terpenuhi kebutuhan dasar dan hak-haknya atau 100 %	100 %	Rp. 1.008.997.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan	
1.06.1.06.01.00.24	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANAMAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN										Rp. 3.837.120.000,00	Rp. 6.950.000.000,00			
1.06.1.06.01.00.24.002	Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP, MPN dan Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS dan menguatnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakatl	51.58%	01. Terwujudnya standarisasi Pemeliharaan dan pelayanan mempertahankan TMPN, MPP dan Tetenger	6 lokasi	Dukungan terhadap Meningkatnya kerapihan dan keindahan TMPN/TMP, Monumen dan Tetenger serta kesejahteraan keluarga pahlawan terhadap program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan	100 %	Rp. 1.169.202.000,00	Rp. 3.700.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan	
							02. Pemberdayaan Kesetiakawanan Sosial bagi pelajar antar Sekolah agar tertanamnya Nilai-Nilai untuk mempertahankan kepentingan bangsa dan negara serta sikap Kesetiakawanan Sosial	100 orang							
							03. Kunjungan ke tempat-tempat Sejarah Perjuangan Bangsa	100 orang							
							05. Terfasilitasinya ziarah Rombongan di TMP dari berbagai Lembaga/Instansi se DIY maupun Luar Daerah	6000 orang							
							06. Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	100 orang							
							07. Pemberian Penghargaan bagi Keluarga Pahlawan, Pemberian Gelar Pahlawan dan Penghargaan Satya Lencana Kebhaktian	7 orang							
							08. Peringatan Hari Besar Nasional dan HKS	4000 orang							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 92.999.679.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							09. Ziarah Pengenalan Nilai-nilai Kepahlawanan	100 orang							
1.06.1.06.01.00.24.004	Pembinaan dan Jejaring Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial	Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS dan menguatnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat	51.58%	01. Bantuan Operasional Karang Taruna DIY, IPSM DIY, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKSBBKS)	3 lembaga	Kontribusi PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS terhadap Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan	100 %	Rp. 2.667.918.000,00	Rp. 3.250.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan	
							02. Pembinaan dan Rakor LK3 (40 org), Peningkatan Kapasitas Pengurus (50 org) dan Pertemuan Jejaring LK3 (50 org)	3 kegt							
							03. Pertemuan / Koordinasi NGO Asing, Mitra Lokal dan Pemerintah	30 orang							
							04. Peningkatan kapasitas TKSK	78 orang							
							05. Dialog Interaktif dan Publikasi PUB dan UGB melalui media cetak, leaflet dan radio	3 kegiatan							
							06. Bimbingan bagi LKS persiapan akreditasi	20 orang							
							07. Bimbingan teknis dasar pekerja sosial bagi pengurus panti sosial	50 orang							
							08. Fasilitasi IPSM (rakor: 100 org, Karya bakti: 250 org, penguatan kapasitas:40 org)	3 kegiatan							
							09. Fasilitasi Karang Taruna (Rakor: 100 org, Pembinaan jejaring KT: 450 org, Penguatan kapasitas pengurus: 50 org; Bulan Bakti KT: 250 org)	4 kegiatan							
							10. Fasilitasi WKSBM (Rakor: 100 org, Penguatan kapasitas pengurus:40 org)	2 kegiatan							
							11. PSKS berprestasi (Orsos, WKSBM, KT, TKSK, PSM)	5 kab/kota							
							12. Workshop Forum CSR, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, dan Instansi terkait lainnya	50 orang							
							13. Rakor pengembangan SLRT	50 orang							
							14. Penguatan kapasitas pengurus dan Pembinaan/ Rakor FK PSKS Provinsi	40 orang							
							15. Penguatan kapasitas Pekerja Sosial Profesional	40 org							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi											Jumlah Pagu : Rp. 18.595.698.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.07	TENAGA KERJA													
1.07.1.07.01.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi													
1.07.1.07.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 4.160.093.000,00	Rp. 4.300.000.000,00		
1.07.1.07.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor	50 jenis	Dukungan 57,29% terhadap administrasi perkantoran	100	Rp. 1.925.055.000,00	Rp. 2.100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
							Barang Cetakn	38 Jenis						
							Barang logistik kantor	4 jenis/62 buah						
							Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan	12 bulan						
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	47 unit						
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	15 unit						
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 6	2 unit						
							Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan						
							Kebersihan gedung kantor	6 gedung						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	44 jenis						
							Langganan surat kabar harian,majalah dan tabloid	2 jenis,12 bulan						
							Pembayaran tagihan rekening telepon,istriik,air dan internet	12 bulan (1 dinas induk,2 UPTD)						
							Pemilahan arsip keuangan in aktif	5600 berkas						
							Penggunaan	50000 lembar						
							Pengiriman dokumen	600 dokumen						
							Penjilidan	390 buku						
							Penyusutan arsip keuangan	4500 berkas						
							Peralatan rumah tangga	71 jenis,841 buah						
							Surat keluar	440 surat						
1.07.1.07.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja 31 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	31 orang	Dukungan 17,9% terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100	Rp. 1.651.998.000,00	Rp. 1.600.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi											Jumlah Pagu : Rp. 18.595.698.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Kinerja 36 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	28 Orang							
							Kinerja 5 orang pengelola kepegawalan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	5 orang							
							Kinerja 7 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	7 orang							
1.07.1.07.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Tervujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi,koordinasi dalam daerah dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun	1 tahun	Dukungan 24,57% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	Rp. 583.040.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan	
1.07.1.07.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 4.688.718.000,00	Rp. 6.700.000.000,00			
1.07.1.07.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Perlengkapan dan peralatan kantor sesuai RKPBM	1 Paket	Dukungan 2,22% terhadap kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	Rp. 1.150.000.000,00	Rp. 2.600.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan	
1.07.1.07.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	terpeliharanya rumah dan gedung kantor 3 unit	100%	dukungan 9,42% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.759.783.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan	
1.07.1.07.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas oprasional roda 4	20 unit	Dukungan 21, 32% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	Rp. 728.100.000,00	Rp. 800.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan	
							kendaraan oprasional roda 2	43 unit							
							Kendaraan roda 6	2 unit							
1.07.1.07.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	BBM operasional roda 2	200 liter	Dukungan 3,19% terhadap sarana dan prasarana aparatur	100	Rp. 1.050.835.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan	
							pemeliharaan alat kantor	10 jenis							
							pemeliharaan alat kantor	7 jenis							
1.07.1.07.01.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 286.645.000,00	Rp. 370.000.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi												Jumlah Pagu : Rp. 18.595.698.000,00				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indikator Kinerja						(12)	(13)	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)						
1.07.1.07.01.00.03.001	Pengembangan I S O	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Surveillance ISO 9001-2015	3 sertifikat	Serveillance ISO 17025	100	Rp. 281.645.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan		
1.07.1.07.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1 pengawasan ketenagakerjaan	20 orang	Kelancaran jenjang karir jabatan fungsional	100	Rp. 5.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan		
							2 Instruktur	30 orang								
							3 penguji	10 orang								
1.07.1.07.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 537.120.000,00	Rp. 918.000.000,00				
1.07.1.07.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2020	nilai lakip dari 79.00 menjadi 80.00	Dukungan 1,24% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	Rp. 10.000.000,00	Rp. 26.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan		
1.07.1.07.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi fisik dan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Dukungan 3,79% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	Rp. 29.640.000,00	Rp. 32.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan		
1.07.1.07.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Dokumen pelaksanaan anggaran	1 dokumen	Dukungan 72,06% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	Rp. 449.480.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan		
							Dokumen perencanaan renstra dan renja	2 dokumen								
							Penyusunan PTKD	1 dokumen								
							Rencana operasional/pelaksanaan kegiatan ROPK 2020	1 dokumen								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi											Jumlah Pagu : Rp. 18.595.698.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	100%	Dukungan 11,89% terhadap penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	Rp. 48.000.000,00	Rp. 160.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										Rp. 2.425.600.000,00	Rp. 4.991.934.000,00		
1.07.1.07.01.00.15.001	Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase Jumlah Lulusan Pelatihan yang Terampil	5.71%	Pelatihan Instiusional	12 akt/240 orang	Dukungan sebesar 94,25% terhadap target peningkatan persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil.	100%	Rp. 1.433.316.000,00	Rp. 3.561.934.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
							Peserta Pelatihan ketrampilan Pencari Kerja Mobile Training Unit	4 paket/80 orang						
1.07.1.07.01.00.15.002	Pelatihan Tenaga Kerja Profesional	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase Jumlah Lulusan Pelatihan yang Terampil	5.71%	Pelatihan Aviation security	20 orang	Dukungan sebesar 5,25% terhadap target peningkatan persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil	100%	Rp. 902.904.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
							Pelatihan Ground Staff	20 orang						
							Peningkatan kompetensi perawat (Nurse) Standar Internasional	20 orang						
1.07.1.07.01.00.15.003	Pengukuran Produktivitas Kerja dan Pemasaran Lulusan Pelatihan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase Jumlah Lulusan Pelatihan yang Terampil	5.71%	Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	10 perusahaan	Dukungan sebesar 0,50% terhadap target peningkatan persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil	100%	Rp. 89.380.000,00	Rp. 230.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.00.16	PROGRAM PEMBINAAN PELATIHAN STANDARISASI DAN PEMAGANGAN										Rp. 1.121.122.000,00	Rp. 1.880.000.000,00		
1.07.1.07.01.00.16.001	Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	400Orang	Sertifikasi Uji Kompetensi	400 orang	Dukungan sebesar 65,33 % terhadap target Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi dan Pemagangan sebanyak 375 orang	100%	Rp. 538.995.000,00	Rp. 825.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	82lembaga								
1.07.1.07.01.00.16.002	Pemagangan Tenaga Kerja	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	400Orang	Pemagangan Perusahaan bagi pencari kerja	20 orang	Dukungan sebesar 24 % terhadap target Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi dan Pemagangan	100%	Rp. 540.564.000,00	Rp. 980.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	82lembaga	Penyediaan peserta untuk mengikuti seleksi pemagangan ke Jepang	40 orang						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi												Jumlah Pagu : Rp. 18.595.698.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Penyiapan Peserta untuk mengikuti seleksi Pemagangan ke Jepang Program Caregiver	20 orang							
1.07.1.07.01.00.16.004	Pelatihan dan Standarisasi Lembaga Pelatihan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	4000orang	Lembaga pelatihan kerja yang terstandarisasi	85 lembaga	Dukungan 100% terhadap Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	100%	Rp. 41.563.000,00	Rp. 75.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan	
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	82lembaga									
1.07.1.07.01.00.18	PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL										Rp. 763.016.000,00	Rp. 1.078.400.000,00			
1.07.1.07.01.00.18.001	Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1488perusahaan	Bimtek Struktur dan Skala Upah	60 orang	Dukungan sebesar 50% terhadap target peningkatan jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial	100%	Rp. 382.980.000,00	Rp. 378.400.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan	
							Koordinasi Dewan Pengupahan DIY	Survey KHL 5 kab kota selama 9 bulan - Sidang Dewan Pengupahan 3 kali - Expose hasil draft Upah Minimum 1 kali							
							Pemantauan THR dan Penangguhan Upah Minimum 5 kab Kota	5 Kab kota							
							Pembinaan rusunawa	182 orang							
							Pendataan pekerja/buruh rumahan	1 dokumen							
							Penetapan Upah Minimum Provinsi	1 SK Gub							
1.07.1.07.01.00.18.003	Penanganan Permasalahan dan Pemantauan Hubungan Industrial	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1488perusahaan	Bimtek Pembinaan Hubungan Industrial (HI) bagi Siswa SMK	30 orang	Dukungan sebesar 50% terhadap peningkatan jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial	100%	Rp. 380.036.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan	
							Deteksi Dini oleh Tim Deteksi Dini Tripartit	8 perusahaan							
							Liga Pekerja Indonesia dalam rangka Peringatan Mayday	8 tim perusahaan							
							Pendataan dan Pembinaan Perusahaan di Wilayah DIY	200 perusahaan							
							Peringatan Mayday	300 orang							
							Peserta Peningkatan Pemahaman Penyelesaian Perselisihan HI bagi Mediator	30 orang							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi												Jumlah Pagu : Rp. 18.595.698.000,00			
Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit	6 sidang/6 kesepakatan							
1.07.1.07.01.00.19	PROGRAM PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN										Rp. 715.580.000,00	Rp. 1.120.000.000,00			
1.07.1.07.01.00.19.003	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase Perusahaan Nihil Kecelakaan Kerja	62%	Naskah Akademik Dokumen Raperda Ketenagakerjaan	1 dokumen	Dukungan sebesar 62,34% terhadap target peningkatan persentase jumlah perusahaan nihil kecelakaan kerja	100%	Rp. 635.580.000,00	Rp. 800.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan	
							Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma K3	400 perusahaan							
1.07.1.07.01.00.19.004	Pengawasan Norma Kerja	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase Perusahaan Nihil Kecelakaan Kerja	62%	Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma kerja	400 perusahaan	Dukungan sebesar 37,65% terhadap target peningkatan persentase jumlah perusahaan nihil kecelakaan kerja	100%	Rp. 80.000.000,00	Rp. 320.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan	
1.07.1.07.01.00.20	PROGRAM PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA										Rp. 979.319.000,00	Rp. 1.170.000.000,00			
1.07.1.07.01.00.20.002	Pengujian Lingkungan Kerja	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Perusahaan Besar dan Menengah yang Mempunyai Kondisi Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja Sesuai Standar	443perusahaan	Pengujian lingkungan kerja pada perusahaan	70 UMKM dan 35 perusahaan menengah besar	Dukungan sebesar 66,68 % terhadap target Peningkatan Jumlah Perusahaan yang Mempunyai Kondisi Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja Sesuai Standar	100%	Rp. 518.175.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan	
1.07.1.07.01.00.20.003	Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Perusahaan Besar dan Menengah yang Mempunyai Kondisi Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja Sesuai Standar	443perusahaan	Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada perusahaan	1000 orang (perusahaan besar dan menengah) 500 UMKM	Dukungan sebesar 33,32 % terhadap target Peningkatan Jumlah Perusahaan yang Mempunyai Kondisi Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja Sesuai Standar	100%	Rp. 461.144.000,00	Rp. 620.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan	
							Sertifikasi Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi tenaga kerja	240 orang							
2	Pilihan														
2.08	TRANSMIGRASI														
2.08.1.07.01.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi														
2.08.1.07.01.00.15	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, PERLUASAN KERJA DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN										Rp. 2.918.485.000,00	Rp. 8.160.000.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi												Jumlah Pagu : Rp. 18.595.698.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.1.07.01.00.15.002	Penempatan Tenaga Kerja	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10790Orang	Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) tenaga Kerja AKAD	500 orang	Dukungan 9,38% terhadap target jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan transmigran sebanyak 10.790 orang	100%	Rp. 229.950.000,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
2.08.1.07.01.00.15.003	Penyediaan Informasi Pasar Kerja dan Penyelenggaraan Bursa Kerja	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10790Orang	Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	300 orang	Dukungan 54,81 % terhadap target jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan transmigran sebanyak 10.790 orang	100%	Rp. 303.320.000,00	Rp. 420.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
							penyediaan informasi pasar kerja	12 bulan						
							Penyelenggaraan bursa kerja	2 kali						
2.08.1.07.01.00.15.004	Pembentukan Kesempatan Kerja	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10790Orang	Padat karya infrastruktur	3 lokasi	Dukungan 24,85 % terhadap terwujudnya jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan transmigran sebanyak 10.790 orang	100%	Rp. 644.200.000,00	Rp. 4.400.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
							Pembekalan Kewirausahaan dan Pendampingan Pola Kemitraan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	25 orang						
2.08.1.07.01.00.15.007	Penyelenggaraan Transmigrasi	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10790Orang	Penyelenggaraan Transmigrasi	40 KK	Dukungan 0,94 % terhadap target jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan transmigran sebanyak 10.790 orang	100%	Rp. 850.415.000,00	Rp. 1.600.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
2.08.1.07.01.00.15.010	Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10790Orang	Laporan rekomendasi PMI Unprocedural	4 laporan rekomendasi penanganan	Dukungan 5,06 % target jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan transmigran sebanyak 10.790 orang	100%	Rp. 425.400.000,00	Rp. 720.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
							Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) bagi pekerja migran Indonesia	300 orang						
							Peningkatan ketrampilan bagi Purna PMI	25 orang						
							Penyelenggaraan LTSA	12 bulan						
							Penyuluhan CPMI/PMI	120 orang						
2.08.1.07.01.00.15.012	Pembentukan Usaha Mandiri bagi Tenaga Kerja Khusus	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10790Orang	Pembekalan wirausaha baru bagi penyandang disabilitas	20 orang	Dukungan 0,28 % terhadap target jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan transmigran sebanyak 10.790 orang	100%	Rp. 407.280.000,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan
2.08.1.07.01.00.15.013	Pemantauan Lembaga Penempatan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	10790Orang	Bimtek Petugas Bursa Kerja Khusus	30 orang	Dukungan 4,69% terhadap target jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan transmigran 10.790 orang	100%	Rp. 57.920.000,00	Rp. 120.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi										Jumlah Pagu : Rp. 18.595.698.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Evaluasi Kinerja Lembaga Penempatan	50 Lembaga						
							Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan Penc	100 perusahaan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk											Jumlah Pagu : Rp. 8.545.059.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
1.08.1.08.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk													
1.08.1.08.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.580.004.000,00	Rp. 1.701.397.925,00		
1.08.1.08.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Pembayaran pajak/STNK Kendaraan operasional Dinas	Bukti pembayaran pajak/STNK 10 Unit Kendaraan Roda 2 dan 9 Unit Kendaraan Roda 4	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 55%	100%	Rp. 793.749.000,00	Rp. 935.584.085,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
							02. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15 Jenis						
							03. Kebersihan 2 Gedung	Kebersihan 2 Gedung (Kantor BPPM DIY 3.653 m2 dan Gedung RDU 415 m2)						
							04. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun						
							05. Langganan surat kabar harian , majalah dan tabloid	4 jenis						
							06. Pembayaran Tagihan Telepon, Air Dan Listrik	12 Bulan						
							07. Pengelolaan Arsip Dinamis OPD	1 Tahun						
							08. Peningkatan Sumberdaya aparatur	1 tahun						
							09. Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 tahun						
							10. Penyediaan Barang Cetak	1 tahun						
							11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500 surat masuk dan 6.200 surat keluar						
							12. Penyediaan Penggandaan	1 tahun						
							13. Pengelolaan data dan web	1 tahun						
							14. Petugas SIGA	1 tahun						
							15. Pengelolaan Arsip Inaktif OPD	3 bulan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Jumlah Pagu : Rp. 8.545.059.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)			(9)
								16. Operator Komputer	1 tahun								
1.08.1.08.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Kinerja pengelola keuangan dan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	11 orang	dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 31,41%	100%	Rp. 510.174.000,00	Rp. 534.483.620,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan			
							2. Kinerja jasa keamanan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	12 orang									
							3. Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang									
1.08.1.08.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 13,6%	100%	Rp. 276.081.000,00	Rp. 231.330.220,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan			
							2. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun									
1.08.1.08.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 725.302.000,00	Rp. 798.342.050,00					
1.08.1.08.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Perlengkapan dan Peralatan ruang kerja pegawai 1 paket	Kursi rapat, backdrop, almari asisten, sofa	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 27,55%	100%	Rp. 204.050.000,00	Rp. 220.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan			
							2. Perlengkapan sesuai RKBMD 3 jenis	Komputer, printer, UPS									
1.08.1.08.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Pemeliharaan gedung kantor sesuai RKBMD	2 gedung (RDU: 415 m2, DPPPA & PP DIY 3.653 m2)	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 25,56%	100%	Rp. 186.615.000,00	Rp. 204.066.500,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan			
1.08.1.08.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKBMD	10 unit	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 35,46%	100%	Rp. 252.237.000,00	Rp. 283.146.050,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan			
							2. Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKBMD	9 unit									

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk												Jumlah Pagu : Rp. 8.545.059.000,00		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indikator Kinerja						(12)	(13)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.08.1.08.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan 3 jenis Peralatan Kantor.	1. 42 unit AC 2. 2 Unit Pompa Air 3. 2 Unit Genset	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 11,41%	100%	Rp. 82.400.000,00	Rp. 91.129.500,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 209.139.000,00	Rp. 316.381.065,00		
1.08.1.08.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	Nilai LKJIP dari 78,48 menjadi 79	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 4,79%	100%	Rp. 13.765.000,00	Rp. 15.169.770,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan dengan deviasi 5%	100%	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 12,24%	100%	Rp. 35.200.000,00	Rp. 38.720.550,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Dokumen Renja yang sesuai Renstra 2017-2022; Dokumen draft RKA-DPA; Dokumen draft RKA-DPPA; Dokumen draft ROPK, PK, dan SBK 2. Forum OPD 3. Sinkronisasi program kegiatan dgn kab/kota	8 dokumen 1 angkatan 2 angkatan	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 79,80%	100%	Rp. 151.386.000,00	Rp. 252.476.785,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas selama 1 tahun	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 3,17%	100%	Rp. 8.788.000,00	Rp. 10.013.960,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.00.15	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK										Rp. 2.333.499.000,00	Rp. 4.430.750.000,00		
1.08.1.08.01.00.15.005	Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Kualitas SDM	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	76%	01. Fasilitasi Pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan (P2TPAKK 'RDU') - Hibah 02. Fasilitasi FPKK 03. Pendampingan korban pasca penanganan 04. Fasilitasi Gugus tugas TPPD	1 lembaga 1 lembaga 15 orang 1 lembaga	Mendukung terlayannya Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak sebesar 62%	100%	Rp. 1.559.182.000,00	Rp. 3.073.750.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk											Jumlah Pagu : Rp. 8.545.059.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							05. Penguatan Kapasitas FPKK DIY	30 orang							
							06. Kampanye Hari Anti Kekerasan	1000 orang							
							07. Advokasi pencegahan TPPO pada stakeholder di desa	500 orang							
							08. Advokasi pemenuhan hak dan perlindungan perempuan bagi pekerja informal	250 orang							
1.08.1.08.01.00.15.006	Pemenuhan Hak-hak Anak	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	76%	01. Penyelenggaraan HAN di DIY	750 orang	Mendukung meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak anak sebesar 38,05%	100%	Rp. 774.317.000,00	Rp. 1.357.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan	
							02. Pembinaan kabupaten kota layak anak	6 gugus tugas KLA							
							03. Workshop dengan Lembaga masyarakat dan Media Massa dalam rangka pemenuhan hak anak	5 dokumen							
							04. TOT Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	1 Angkatan							
							05. Inisiasi kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	83 kader							
1.08.1.08.01.00.16	PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										Rp. 1.546.711.000,00	Rp. 2.776.000.000,00			
1.08.1.08.01.00.16.003	Kelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Persentase Perempuan Pengambilan Keputusan di Ranah Publik	34.38%	1. Pendampingan PPRG oleh Focal Point	24 OPD	Mendukung meningkatnya implementasi PUG di Pemda DIY sebesar 28,42%	100%	Rp. 309.939.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan	
							2. Penilaian Anugrah Parahita Ekapraya (APE)	Predikat Mentor							
1.08.1.08.01.00.16.004	Pembinaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Persentase Perempuan Pengambilan Keputusan di Ranah Publik	34.38%	1. Pembinaan Desa Prima	100 Desa	Mendukung meningkatnya kapasitas serta keterlibatan perempuan dalam pembangunan di bidang Politik, Ekonomi, dan Sosial sebesar 47%	100%	Rp. 664.202.000,00	Rp. 1.545.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan	
							2. Hibah Kelompok	15 Desa							
							3. Advokasi Peningkatan Kapasitas Perempuan Partai Politik	1 kali							
							4. Peningkatan Kapasitas Perempuan Potensial	1 kali							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk												Jumlah Pagu : Rp. 8.545.059.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.08.1.08.01.00.16.005	Pengelolaan Data Gender dan Anak	2. Pembangunan Manusia dan Pngentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Persentase Perempuan Pengambilan Keputusan di Ranah Publik	34.38%	1. Update data gender dan anak serta data perlindungan perempuan dan anak 2. Pengembangan dan pemeliharaan sistem data dan informasi gender dan anak 3. Fasilitasi organisasi perempuan 4. Fasilitasi forum pendukung PUG PPPA	2 dokumen 2 sistem 3 organisasi 4 forum	Mendukung bahan pengambilan kebijakan gender dan anak sebesar 24,58%	100%	Rp. 572.570.000,00	Rp. 830.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
1.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
1.14.1.08.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk													
1.14.1.08.01.00.15	PROGRAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK										Rp. 1.021.579.000,00	Rp. 1.785.000.000,00		
1.14.1.08.01.00.15.003	Pembinaan dan Pengembangan Pengendalian Penduduk	2. Pembangunan Manusia dan Pngentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	1.17anak	1. Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk yang terlaksana 2. Pembuatan Sistem informasi kependudukan (dashboard kependudukan) 3. Penayangan Media Animasi Presentasi tentang Pengendalian Penduduk di televisi lokal 4. Pelatihan pengolah data kependudukan 5. Pelatihan petugas operator dashboard kependudukan 6. Pelatihan petugas perawatan dan security dashboard kependudukan	5 paket 1 paket 12 kali 1 angkatan 1 angkatan 1 angkatan	Memberikan dukungan terhadap penyebarluasan Informasi dan Edukasi mengenai pengendalian penduduk dan KB sebesar 63%	100%	Rp. 586.603.000,00	Rp. 1.135.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan
1.14.1.08.01.00.15.004	Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	2. Pembangunan Manusia dan Pngentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	1.17anak	1. Bakti sosial Pelayanan KB 2. Pelatihan Pendidik Sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja	10 lokasi 5 kali	Memberikan dukungan terhadap strategi pengendalian penduduk sebesar 37%	100%	Rp. 434.976.000,00	Rp. 650.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk											Jumlah Pagu : Rp. 8.545.059.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							3. Pendirian Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)	10 kelompok							
							4. Fasilitasi FP2KRR	1 forum							
1.14.1.08.01.00.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA										Rp. 1.128.825.000,00	Rp. 2.218.121.000,00			
1.14.1.08.01.00.16.003	Pembinaan Ketahanan Keluarga	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	0.0013kasus	1. Penyusunan Juknis Implementasi Ketahanan Keluarga	1 dokumen	Memberikan dukungan terhadap kebijakan ketahanan keluarga sebesar 35,60%	100%	Rp. 463.913.000,00	Rp. 625.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan	
							2. Penguatan jejaring legalitas keluarga	5 kali							
							3. Advokasi pembinaan Ketahanan Keluarga	10 kali							
							4. Sosialisasi kebijakan ketahanan keluarga	5 kali							
							5. Koordinasi dan sinkronisasi ketahanan keluarga di DIY	3 kali							
							6. Koordinasi Penyusunan data pilah keluarga	5 kali							
1.14.1.08.01.00.16.004	Pengelolaan Bina Keluarga Sejahtera	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	0.0013kasus	1. Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga sejahtera	20 desa	Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Bina Keluarga Sejahtera yang sudah terbentuk di DIY sebesar 64,40%	100%	Rp. 664.912.000,00	Rp. 1.593.121.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Sedang Berjalan	
							2. Fasilitasi Bina Keluarga Sejahtera	20 desa							
							3. Monitoring dan Evaluasi Desa Pelopor Prima Sejahtera	5 desa							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														Jumlah Pagu : Rp. 35.250.000.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Wajib														
1.11	LINGKUNGAN HIDUP														
1.11.1.11.01.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
1.11.1.11.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 6.373.120.000,00	Rp. 7.824.319.790,00			
1.11.1.11.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Materai (6000 & 3000)	2340 lembar & 190 lembar	Dukungan sebesar 49,47% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 1.435.173.000,00	Rp. 2.235.998.820,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan	
							Terkelolanya surat masuk	12 bulan							
							Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor	12 bulan							
							Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah	12 bulan							
							Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas - Roda 2 (induk : 79 unit, KPH : 74 unit) - Roda 3 (3 unit) - Roda 4 (induk : 18 unit, KPH : 3 unit) - Roda 6 (1 unit)	178 unit							
							Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik - induk: 7 listrik, 6 telpon, 2 air - tahura: 4 listrik, 1 air - lab: 1 listrik, 1 telp - BBH : 2 listrik, 2 telp - KPH: 33 listrik, 4 telpon, 19 air	12 bulan							
							Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor	106 jenis & 57 jenis							
							Terlaksananya pengadaan barang cetakan	31 jenis & 9 jenis							
							Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	32 jenis & 10 jenis							
							Terlaksananya penggandaan/foto copy	100.000 lembar & 20.000 lembar							
							Terlaksananya pengiriman surat keluar	12 bulan							
							Tersedianya bahan bacaan 2 SKH (Kedaulatan Rakyat dan Kompas)	12 bulan							
							Tersedianya peralatan rumah tangga	46 jenis & 20 jenis							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan											Jumlah Pagu : Rp. 35.250.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.11.1.11.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa keamanan kantor	12 bulan	Dukungan sebesar 24,40% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 3.737.947.000,00	Rp. 3.588.320.970,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan	12 bulan						
							Tersedianya jasa Pegawai Kontrak/Non PNS/Honoror/Tidak tetap	07 orang selama 12 bulan						
1.11.1.11.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	1 tahun (Gol IV 148 kali, gol III 708 kali, gol II 284 kali)	Dukungan sebesar 26,13% terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah	1 tahun (Gol IV 55 kali, gol III 110 kali)						
							Tersedianya makan dan minum rapat	1 tahun (4462 os)						
1.11.1.11.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 2.994.463.000,00	Rp. 8.721.059.400,00		
1.11.1.11.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pembangunan Pos Jaga TAHURA Bunder	1 unit	Dukungan sebesar 20% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 751.454.000,00	Rp. 5.413.291.200,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							Pembuatan Portal TAHURA Bunder	4 unit						
							Penggantian papan nama gedung	6 unit						
							Rehabilitasi Kantor BDH (Bagian Daerah Hutan) Kulon Progo - Bantul di Pengasih	1 unit						
							Terlaksananya penataan halaman kantor	204 m ²						
							Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor (Depo Arsip DLHK)	92 m ²						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 35.250.000.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur				
					(7)	(6)	(9)	(8)	(11)	(10)			(14)	(15)
1.11.1.11.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Almari Arsip Besi	1. 3 buah	Dukungan sebesar 25,81% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 457.470.000,00	Rp. 266.299.200,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							10. Printer plotter	10. 1 buah						
							11. Printer PSC	11. 1 buah						
							12. Meja kerja	12. 4 unit						
							13. Kursi kerja	13. 4 unit						
							14. LCD/ viewer	14. 4 unit						
							15. Kamera	15. 1 buah						
							2. AC 2 PK untuk Bidang	2. 8 unit						
							3. Televisi LED Uhtuk pengganti ruang rapat B	3. 1 unit						
							4. Pengadaan Komputer PC	4. 17 unit						
							5. Pengadaan Laptop/Notebook	5. 3 unit						
							6. Printer Laser Jet Umum	6. 2 buah						
							7. Printer Epson/Cannon	7. 11 buah						
							8. Printer Dot matrik LQ2190	8. 2 buah						
							9. Printer IP 110 Print Portable	9. 2 buah						
1.11.1.11.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Perbaikan Saluran Air Bersih	1. 1 tahun	Dukungan sebesar 8,06% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd 100%	100%	Rp. 644.914.000,00	Rp. 844.881.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							10. Pemeliharaan pintu kios di Tahura Bunder, Playen, Gunung Kidul	10. 8 unit						
							11. Pemeliharaan kantor argulobang	11. 70 m2						
							12. Pembuatan ruang kearsipan	12. 1 paket						
							13. Tempat parkir roda 3	13. 8 m2						
							14. Pemeliharaan pos jaga dodokan	14. 18 m2						
							15. Pemeliharaan mushola	15. 80 m2						
							16. Pemeliharaan plafon	16. 15 m2						
							17. Penggantian conblok	17. 100 m2						
							18. Pemeliharaan Saluran air hujan	18. 50 m						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														Jumlah Pagu : Rp. 35.250.000.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							19. Pemasangan pagar BRC	19. 60 m							
							2. Perbaikan Septitank Gedung Eks BP3KP	2. 2 unit							
							20. Biaya pengecatan gedung	20. 750 m2							
							21. Biaya perbaikan pintu kamar mandi	21. 2 buah							
							22. Biaya perbaikan pintu ruangan	22. 2 unit							
							23. Biaya pemeliharaan eternit	23. 20 m2							
							24. Biaya pemeliharaan dinding kaca	24. 20 m2							
							25. Terlaksananya pembayaran pengurusan IPAL kantor	25. 1 kali							
							3. Biaya pengecatan gedung AULA B dan ruang arsip	4. 725 unit							
							4. Pemeliharaan Ruang peralatan kendaraan	4. 1 unit							
							5. Biaya perbaikan pintu ruangan arsip	5. 2 unit							
							6. Pemeliharaan atap dinas induk	6. 1 unit							
							7. Pemasangan pagar pengamanan bak pengendap Persemaian Bunder	7. 1 paket							
							8. Tambah Daya Listrik Persemaian Bunder	8. 1 unit							
							9. Canopy tempat parkir	9. 30 m2							
1.11.1.11.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. kendaraan roda 2 (induk : 79 unit, KPH : 74 unit)	1. 153 unit	Dukungan sebesar 17,74% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 900.000.000,00	Rp. 1.931.838.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan	
							2. kendaraan roda 3	2. 3 unit							
							3. kendaraan roda 4 (induk : 18 unit, KPH : 3 unit)	3. 21 unit							
							4. kendaraan roda 6	4. 1 unit							
1.11.1.11.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Jaringan Listrik	1. 1 unit	Dukungan sebesar 48,39% terhadap tercapainya persentase peningkatan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 240.625.000,00	Rp. 264.750.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan	
							10. Perawatan Note Book	10. 40 unit							
							11. Perawatan TV & Monitor	11. 5 unit							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan											Jumlah Pagu : Rp. 35.250.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							12. Perawatan mesin ketik	12. 9 buah						
							13. Perawatan Camera	13. 2 buah						
							14. Pemeliharaan LCD	14. 5 buah						
							15. Perawatan Faximile	15. 2 buah						
							16. Pemeliharaan elektronik Eks. Hut.	16. 3 unit						
							17. Pemeliharaan dan perbaikan fax eks BSPMBPTKP	17. 1 unit						
							18. Pemeliharaan Printer	18. 3 unit						
							19. Perawatan TV LCD (2)	19. 2 unit						
							2. Instalasi telepon	2. 2 unit						
							20. Perawatan AC	21. 81 unit						
							21. Perbaikan AC Dinas Eks. Hut	21. 2 unit						
							22. Pemeliharaan CCTV	22. 1 unit						
							23. Perawatan sound System dan Wireles Eks. LH	23. 5 unit						
							24. Meja-Kursi Tamu	24. 1 unit						
							25. Filling Kabinet	25. 2 unit						
							26. Almari Sliding Kaca	26. 1 unit						
							27. Meja Kerja	27. 5 unit						
							28. Kursi Kerja	28. 10 unit						
							29. Pengisian tabung pemadam kebakaran (Induk dan KPH)	29. 31 buah & 6 buah						
							3. Jaringan internet	3. 3 unit						
							4. Pemeliharaan Genset	4. 4 unit						
							5. Pemeliharaan pompa air	5. 5 unit						
							6. Pemeliharaan pesawat telepon	6. 15 unit						
							7. Pemeliharaan pemotong rumput	7. 5 unit						
							8. Pemeliharaan gergaji mesin	8. 3 unit						
							9. Perawatan komputer /PC	9. 65 unit						
1.11.1.11.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 177.267.000,00	Rp. 509.790.600,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan												Jumlah Pagu : Rp. 35.250.000.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.11.1.11.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Tersusunnya LKJIP 2019	1. 1 laporan LKJIP 2019	Dukungan sebesar 100 % terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 18.172.000,00	Rp. 22.644.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
1.11.1.11.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Laporan Keuangan Bulanan	1. 12 Laporan Keuangan Bulanan	Dukungan sebesar 17,07% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 30.000.000,00	Rp. 42.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
1.11.1.11.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah	1. 1 Dokumen berita acara usulan perencanaan program/kegiatan DLHK DIY Tahun 2021	Dukungan sebesar 60,98% terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 101.852.000,00	Rp. 416.937.600,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							2. Dokumen statistik, materi laporan LKJIP dan LKPJ	2. 1 dokumen statistik dan 1 materi laporan LKJIP dan LKPJ						
							3. Tersusunnya Renja OPD 2021 dan Renja Perubahan 2020	3. 1 dokumen Renja OPD 2021 dan 1 dokumen Renja Perubahan OPD 2020						
							4. Tersusunnya RKA Th 2021 dan DPA Th 2021	4. 2 dokumen RKA Tahun 2021 dan DPA Th 2021						
							5. Tersusunnya RKA-P Th 2020 dan DPPA Th 2020	5. 2 dokumen RKA-P Tahun 2020 dan DPPA Th 2020						
							6. Tersusunnya ROPK 2020	6. 1 dokumen ROPK 2020						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan												Jumlah Pagu : Rp. 35.250.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							7. Tersusunnya data IKLH	7. 1 dokumen IKLH							
1.11.1.11.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD	12 Dokumen Laporan Movev	Dukungan sebesar 14,63% terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 27.243.000,00	Rp. 28.209.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan	
1.11.1.11.01.00.16	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAAATAN LINGKUNGAN HIDUP										Rp. 1.093.249.000,00	Rp. 4.206.000.000,00			
1.11.1.11.01.00.16.001	Pengkajian Lingkungan Hidup	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tingkat Ketaatan Usaha/ Kegiatan dengan Ijin Lingkungan dan/atau Rekomendasi Kelayakan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY	48.75%	1. Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan, Rencana dan /atau Program Kabupaten/Kota di DIY	1. 12 bulan	Dukungan 50 % terhadap tercapainya tingkat ketaatan usaha/kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda DIY dan Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota pada tahun	100%	Rp. 774.800.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan	
					Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota	100%	2. Penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan usaha dan/atau kegiatan	2. 12 bulan							
							3. Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilai/Pemeriksa Dokumen Lingkungan	3. 5 kab/kota							
							4. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) DIY	4. 1 dokumen							
							5 Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) DIY	5. 1 dokumen							
1.11.1.11.01.00.16.002	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tingkat Ketaatan Usaha/ Kegiatan dengan Ijin Lingkungan dan/atau Rekomendasi Kelayakan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY	48.75%	1. Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan	1. 160 usaha/kegiatan	Dukungan 53,05 % terhadap tercapainya tingkat ketaatan usaha/kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda DIY sebesar 3	100%	Rp. 318.449.000,00	Rp. 1.206.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 35.250.000.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)	1/2/3
					Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota	100%	2. Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan	2. 20 usaha/kegiatan							
							3. Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk	3. 12 bulan							
1.11.1.11.01.00.17	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN										Rp. 1.662.636.000,00	Rp. 4.800.000.000,00			
1.11.1.11.01.00.17.001	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Sumber Pencemar Air Sungai (Point Source) yang Ditangani di 10 Sungai	207Usaha/Kegiatan	1. Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air dan Udara (air sungai, air laut, air tanah, air limbah dan udara ambien)	1. 5 dokumen	Dukungan 66,67 % terhadap tercapainya target penanganan sumber pencemar air sungai (point source dan non point source) yang ditangani di 10 sungai dan sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 Kab/ Kota	100%	Rp. 1.411.544.000,00	Rp. 2.700.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan	
					Jumlah sumber pencemar air sungai (non point source) yang ditangani di 10 sungai	96lokasi	2. Gerakan Bersih Sungai	2. 96 lokasi							
					Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 Kab/Kota	70Usaha/Kegiatan	3. Pembinaan Sumber Pencemar (Point Source)	3. 207 usaha/kegiatan							
							4. Inventarisasi Gas Rumah Kaca	4. 1 dokumen							
							5. Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan LH Kab/Kota di DIY	5. 5 Kab/ Kota							
1.11.1.11.01.00.17.002	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Sumber Pencemar Air Sungai (Point Source) yang Ditangani di 10 Sungai	207Usaha/Kegiatan	1. Pembinaan pengelolaan sampah dan limbah B3 Kab/Kota di DIY	1. 5 kab/ kota	Dukungan 33,33 % terhadap tercapainya target penanganan pengelolaan sampah dan limbah B3 di 5 Kab/Kota pada tahun n	100%	Rp. 251.092.000,00	Rp. 2.100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan	
					Jumlah sumber pencemar air sungai (non point source) yang ditangani di 10 sungai	96lokasi	2. Pembinaan, pembentukan dan evaluasi kelompok pengelola sampah	2. 25 Kelompok							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan											Jumlah Pagu : Rp. 35.250.000.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
					Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 Kab/Kota	70Usaha/Kegiatan	3. Gerakan Bersih Pantai	3. 2 lokasi							
							4. Evaluasi pengelolaan sampah mandiri di DIY	4. 1 laporan							
1.11.1.11.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP										Rp. 2.230.037.000,00	Rp. 7.200.000.000,00			
1.11.1.11.01.00.18.001	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	3Penghargaan	1. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup	1. 5 kab/kota 12 kali @ 40 orang	Dukungan sebesar 54,56% terhadap tercapainya Penghargaan Lingkungan Hidup Nasional sebesar 3 penghargaan	100%	Rp. 902.310.000,00	Rp. 1.600.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan	
							2. Kampanye penyadaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2. 1 kali : 2 hari							
							3. Penilaian/Verifikasi Penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Proklim)	3. 5 kab/kota							
1.11.1.11.01.00.18.002	Peningkatan Mutu Laboratorium Lingkungan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	3Penghargaan	Dokumen Kendali Mutu Laboratorium untuk 19 parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi	1 dokumen	Dukungan sebesar 50 % terhadap tercapainya Penghargaan Lingkungan Hidup Nasional sebesar 3 penghargaan	100%	Rp. 228.928.000,00	Rp. 3.600.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan	
1.11.1.11.01.00.18.003	Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	3Penghargaan	1. Pelayanan jasa pengujian parameter kualitas lingkungan	1. 19 parameter	Dukungan sebesar 50 % terhadap tercapainya Penghargaan Lingkungan Hidup Nasional sebesar 3 penghargaan	100%	Rp. 1.098.799.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan	
							2. Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan	2. 61 unit							
1.11.1.11.01.00.19	PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM										Rp. 1.828.967.000,00	Rp. 12.123.682.800,00			
1.11.1.11.01.00.19.001	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	165Ha	1. Dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) DIY 2021-2026	1. 1 dokumen RPRHL DIY 2021-2026	Dukungan sebesar 25% terhadap tercapainya penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi sebesar 165 Ha dan penurunan kerusakan hutan sebesar 15,72 Ha	100%	Rp. 930.307.000,00	Rp. 10.800.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan												Jumlah Pagu : Rp. 35.250.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
					Persentase Penurunan kerusakan hutan (%)	0.1%	2. Dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT) Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY	2. 1 Dokumen RTT Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY							
							3. Penanaman Vegetasi	3. 50 Ha							
							4. Rekomendasi Pengelolaan DAS DIY	4. 1 Dokumen							
							5. Data Tutupan Lahan DIY	5. 1 Dokumen							
1.11.1.11.01.00.19.002	Konservasi Sumber Daya Alam	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	165Ha	1. Data Keaneekaragaman Hayati di Hutan Lindung RPH Mangunan	1. 1 Dokumen	Dukungan sebesar 15,65% terhadap pencapaian target Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi pada tahun 2020	100%	Rp. 700.000.000,00	Rp. 1.026.682.800,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan	
					Persentase Penurunan kerusakan hutan (%)	0.1%	2. Konservasi Daerah Tangkapan Air di RPH Menggoran (10 Ha)	2. 20 Ha							
							3. Pembinaan Masyarakat di sekitar Tahura Bunder	3. 60 orang (2 angkatan)							
							4. Rehabilitasi dan restorasi Lahan Pantai melalui penanaman seluas 10 ha (4000 btg) di Glagah	4. 10 ha							
							5. Rehabilitasi dan restorasi Lahan Pantai melalui peneliharaan tanaman 5 Ha (1600 btg + 400 Penyulaman) di Pantai Mirangan Asri, Dukuh II, Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo	5. 5 ha							
1.11.1.11.01.00.19.003	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	165Ha	1. Pembinaan Masyarakat sekitar Kawasan Hutan	1.6 angkatan @ 30 orang	Dukungan sebesar 25% terhadap tercapainya penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi sebesar 165 Ha dan penurunan kerusakan hutan sebesar 15,72Ha	100%	Rp. 198.660.000,00	Rp. 297.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan	
					Persentase Penurunan kerusakan hutan (%)	0.1%	2. Peningkatan Kapasitas SDM Pengamanan Hutan	2. 2 angkatan @ 25 orang							
							3. Pencegahan, penanggulangan dan tindak lanjut gangguan keamanan hutan - Pemeriksaan Setempat Kasus Perkara Tindak Pidana Kehutanan (1 tahun) - Identifikasi daerah rawan gangguan keamanan hutan (24 RPH) - Identifikasi Daerah Rawan Gangguan Perambahan Kawasan Hutan dan Pencurian - Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan - Patroli Gabungan Pengamanan Hutan	3. 5 BDH							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jumlah Pagu : Rp. 35.250.000.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur					
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)
1.11.1.11.01.00.20	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL											Rp. 9.500.000.000,00	Rp. 14.500.000.000,00		
1.11.1.11.01.00.20.001	Pengelolaan Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengelolaan Sampah di TPA Piyungan	660ton/hari	1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan kawasan TPA	1. 1,2 km	Dukungan kegiatan Pengelolaan Sarana Prasarana Penanganan Sampah pada TPA Regional dari 600 ton/hari menjadi sebesar 660 ton/hari	100%	Rp. 1.050.000.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan	
							2. Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang	2. 1 unit							
							3. Movev Kinerja Pengelolaan Sampah dan Penerimaan Retribusi (2 unit)	3. 2 dokumen							
1.11.1.11.01.00.20.002	Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengelolaan Sampah di TPA Piyungan	660ton/hari	1. Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill	1. 10 Ha	Dukungan kegiatan Pengelolaan Sarana Prasarana Penanganan Sampah pada TPA Regional dari 600 ton/hari menjadi sebesar 660 ton/hari	100%	Rp. 8.450.000.000,00	Rp. 12.000.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan	
							2. Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA	2. 1 unit							
							3. Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik	3. 5 unit							
							4. Tersedianya tenaga kerja operasional dan pemeliharaan TPA	4. 35 orang							
							5. Kompensasi Lingkungan Sekitar TPA (BKK)	5. 2 lokasi							
							6. Pengadaan Perlengkapan K3	6. 6 jenis							
							7. Operasi dan Pemeliharaan TPST (1 Unit)	7. 1 unit							
							8. Penyusunan Dokumen Amdal pengembangan TPA dan Pengolahan limbah B3 Medis.	8. 2 dokumen							
							9. Pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA	2 lokasi							
2	Pilihan														
2.04	KEHUTANAN														
2.04.1.11.01.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.04.1.11.01.00.18	PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN										Rp. 915.448.000,00	Rp. 1.146.000.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan												Jumlah Pagu : Rp. 35.250.000.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.04.1.11.01.00.18.001	Penataan Hutan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	persentase kawasan hutan tertata	89.4%	1. Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan di (RPH) Resort Pengelolaan Hutan Pucang Anom (BDH) Bagian Derah Hutan Panggang	1. 23 km	Dukungan 100% terhadap terwujudnya persentase kawasan hutan tertata sebesar 87,4%	100%	Rp. 414.000.000,00	Rp. 420.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
					Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat	2%	2. Penegasan Batas pada Daerah Rawan	2. 10 titik						
							3. Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan di Pansela	3. 2 lokasi						
							4. Dokumen Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan di Klayar dan Ngingrong	4. 2 dokumen						
							5. Pengadaan GPS Mapping + antena eksternal	5. 2 paket						
2.04.1.11.01.00.18.002	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	persentase kawasan hutan tertata	89.4%	1. Pengendalian penatausahaan hasil hutan	1. 21 unit usaha	Dukungan 50 % terhadap persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat sebesar 2%	100%	Rp. 102.528.000,00	Rp. 316.800.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
					Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat	2%	2. Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kehutanan: - Penilaian Kinerja Tenaga Teknis/Pengawas Tenaga Teknis (30 org x 1 angkt) - Penyegaran Tenaga Teknis/engawas Tenaga Teknis (30 org (30 org x 1 angkt) - Bimtek penatausahaan hasil hutan (30 org x 4 angkt)	2. 180 orang						
2.04.1.11.01.00.18.003	Pengelolaan Perhutanan Sosial	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	persentase kawasan hutan tertata	89.4%	1. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan(HKM) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	1. 42 kelompok HKM dan 3 kelompok HTR	Dukungan 50 % terhadap persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat sebesar 2%	100%	Rp. 398.920.000,00	Rp. 409.200.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
					Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat	2%	2. Pembinaan Hutan Rakyat (HR)	2. 20 kelompok HR						
							3. Fasilitasi Penyuluh Kehutanan	3. 60 orang						
							4. Lomba Wana Lestari tingkat DIY	4. 7 Kategori						
							5. Pelatihan Hutan Cadangan Pangan	5. 4 Kab						
2.04.1.11.01.00.19	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG										Rp. 7.525.519.000,00	Rp. 12.299.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah Pagu : Rp. 35.250.000.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indikator Kinerja						(12)	(13)	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
2.04.1.11.01.00.19.001	Perencanaan dan Reboisasi Sumberdaya Hutan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	86.64%	1. Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RTT Tebangan, RTT Produksi Daun Kayu Putih, RTT Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman, RTT Pemeliharaan Jalan Produksi)	1. 1 Dokumen	Dukungan sebesar 33,33% terhadap pencapaian target rasio pemanfaatan sumber daya hutan sebesar 86.62%	100%	Rp. 2.994.506.000,00	Rp. 3.950.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan		
							2. Penelusuran dan Pemasangan Pal Batas Dalam Kawasan	2. 1 BDH (Kulon Progo-Bantul)								
							3. Pembinaan KTH dalam Kawasan Hutan	3. 24 RPH								
							4. Operasional pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan hutan (pencurian, kebakaran hutan, dan bencana alam) dan Laporan Kerusakan Hutan	4. 2 dokumen								
							5. Tanaman Kayu Putih Baru (100 Ha tanaman baru, 200 Ha P1, 65 Ha P2)	5. 411.600 batang								
							6. Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung (10 Ha tanaman baru, 20 Ha P1, 20 Ha P2)	6. 11.200 batang								
2.04.1.11.01.00.19.002	Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	86.64%	1. Produksi Hasil Hutan (minyak kayu putih dan kayu)	1. (minyak kayu putih 44.285 liter dan kayu 98 m3)	Dukungan sebesar 33,33% terhadap pencapaian target rasio pemanfaatan sumber daya hutan sebesar 86.62%	100%	Rp. 4.531.013.000,00	Rp. 8.349.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan		
							2. Pemeliharaan Jalan Produksi	2. 2.000 m								
							3. Pemeliharaan Mesin Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih	3. 2 Unit								
2.04.1.11.01.00.20	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI										Rp. 435.862.000,00	Rp. 1.002.000.000,00				
2.04.1.11.01.00.20.001	Pengelolaan Tahura Bunder	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase hutan konservasi terkelola	76.62%	1. Pemantauan dan pemeliharaan batas luar	1. 13 km	Dukungan 50% terhadap tercapainya target persentase hutan konservasi terkelola sebesar 75,86%	100%	Rp. 186.000.000,00	Rp. 261.600.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan		
							2. Penambahan koleksi tanaman dengan penanaman dan pemeliharaan tanaman	2. 610 batang								
							3. Penyediaan pakan, perawatan kesehatan satwa koleksi 10 ekor	3. 12 bulan								
							4. Pemeliharaan arboretum	4. 5 Ha								
							5. Laporan RKL RPL Tahura	5. 2 dokumen								
2.04.1.11.01.00.20.002	Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase hutan konservasi terkelola	76.62%	1. Penyebarluasan informasi tentang Tahura Bunder: a. Sosialisasi siswa sekolah b. Leaflet dan Banner	1. a. 4 kali @ 100 orang b. 1000 lembar dan 15 unit	Dukungan sebesar 90% terhadap pencapaian target persentase hutan konservasi terkelola pada tahun 2020	100%	Rp. 249.862.000,00	Rp. 740.400.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan											Jumlah Pagu : Rp. 35.250.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							2. Pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura	2. 6 kelompok						
							3. Pengamanan Kawasan: a. Papan Informasi Pengamanan Hutan b. Pembuatan sekat bakar c. Pelatihan keamanan wisata d. Pelatihan Pengamanan hutan e. Pelatihan Pencegahan Kebakaran Hutan	3. 12 bulan a. 2 unit b. 20.000 m2 c. 30 org d. 20 org e. 20 org						
							4. papan nama pohon	4. 60 unit						
2.04.1.11.01.00.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN										Rp. 513.432.000,00	Rp. 1.583.381.600,00		
2.04.1.11.01.00.21.001	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam	330000batang	1. Tersedianya bibit tanaman kehutanan (bibit kayu putih 411.600 batang, jati 2.000 batang, sengon 5.000 batang, stek jati 2.000 batang, munggur 3.000 batang, nangka 5.000 batang, sirsat 10.000 batang, dan mahoni 4.000 batang)	1. 442.600 batang	Dukungan sebesar 50% terhadap tercapainya jumlah bibit tanaman kehutanan bersertifikat yang ditanam pada tahun 2020	100%	Rp. 365.832.000,00	Rp. 1.083.381.600,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
2.04.1.11.01.00.21.002	Sertifikasi Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam	330000batang	1. Penilaian kelayakan bibit/benih/sumber benih tanaman kehutanan sesuai dengan standar	1. 443.000 batang bibit; 2 sumber benih	Dukungan sebesar 50% terhadap tercapainya jumlah bibit tanaman kehutanan bersertifikat yang ditanam pada tahun 2020	100%	Rp. 147.600.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sedang Berjalan
							2. Pengawasan peredaran bibit/benih tanaman kehutanan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku	2. 4 kabupaten						
							3. Pembinaan dan pengawalan sumber benih tanaman kehutanan	3. 4 sumber benih						
							4. Pelatihan Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Kehutanan	4. 15 org						
							5. Bimbingan Teknis Pengelolaan Sumber Benih	5. 75 orang						
							6. Bimbingan Teknis Pengadaa dan/Pengedar Benih/Bibit	6. 20 orang						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perhubungan											Jumlah Pagu : Rp. 107.553.442.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.15	PERHUBUNGAN													
1.15.1.15.01.00	Dinas Perhubungan													
1.15.1.15.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 6.517.308.000,00	Rp. 5.900.000.000,00		
1.15.1.15.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor : 31 jenis: Kertas HVS Folio 70 gr, HVS Kwarto 70 gr, Kertas Continuous Form besar, Buku Folio isi 100 lbr, Heachmachine max 10/6, Jepitan Kertas, Binder Type 200, Tinta Stempel, Map gantung, Stopmap Folio, Stopmap Platik, Snealhechter Folio, Snealhechter platik, Isi Bolpoint Pentel, Bolpoint Top, Brip Ordner Folio, Bolpoin Pentel, CD-R, Tali Rafia sedang, Amplop Panjang Cabinet, Amplop Tanggung, Amplop kecil, cartridge PG 810, Cartridge PG 811, Toner HP 85, Toner HP 83A, Refill Ink Colour, Heachneces 10/6, Drum Unit KX FAD4 12E, IXDFAD93E, Toner KX, Toner KX FAT92E.	31 jenis	Dukungan sebesar 31,72% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran	100%	Rp. 2.004.724.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan : 4 jenis: Kompas, Kedaulatan rakyat, Radar, harian jogja	4 jenis						
							Jasa Kebersihan Kantor Induk, Terminal Jombor, dan Terminal Wates	12 Bulan						
							Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 bulan						
							Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Roda 2 : 19 unit dan Kendaraan roda 4 : 18 Unit						
							Jasa Surat Menyurat	12 bulan						
							Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: Kabel Listrik MYA,Bat Batere tanggung, Batu batere kecil, Circle 36 Watt, Lampu TL 40 Watt, CFI 110/220 Volt sif 20 watt, LED Flood Light 50 Watt 220, VCD/ WW, Kabel MYM 2 x 1,5 mm	9 Jenis						
							Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis SKPD	12 bulan						
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15 cetakan dan 14 penggandaan dan penjilidan						
							Peralatan Rumah Tangga: Pewangi Ruangan, Tisu Kotak, Tempat Sampah, Sulak Bulu, Gayung Air, Kit Black, Parfum Mobil Cair, Ember, Kaset Karpas, Lap Kendaraan Kanelo, Obat Nyamuk semprot, Hand Soap, Sapu Cemara, WD 50/40, Tong Sampah	15 Jenis						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perhubungan											Jumlah Pagu : Rp. 107.553.442.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.15.1.15.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Jasa Keamanan Kantor/tempat Kerja	28 orang selama 12 bulan	Dukungan sebesar 55,62% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran	100%	Rp. 3.354.004.000,00	Rp. 3.100.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Jasa Penjaga Perlintasan Kereta Api	12 orang selama 12 bulan						
							Jasa Tenaga Bantu	36 orang selama 12 bulan						
1.15.1.15.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Hidangan sidang/rapat	8200 os	Dukungan sebesar 12,67% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran	100%	Rp. 1.158.580.000,00	Rp. 800.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah	Konsultasi Luar Daerah 364 op Konsultasi Dalam Daerah 225 op						
1.15.1.15.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.574.745.000,00	Rp. 1.190.000.000,00		
1.15.1.15.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Genset 10,5 KVA	1 unit	Dukungan sebesar 4,37 % terhadap terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 148.500.000,00	Rp. 350.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Kursi Kerja	1 unit						
							Kursi Rapat	10 unit						
							Laptop	7 unit						
							Meja Kerja	1 unit						
							Meja Rapat	10 unit						
							PC Komputer + UPS	1 unit						
		Printer	2 unit											
1.15.1.15.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Jasa Pemeliharaan Kantor Induk, Terminal Jombor dan Terminal Wates	12 bulan	Dukungan sebesar 22,41 % terhadap terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 601.455.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perhubungan											Jumlah Pagu : Rp. 107.553.442.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.15.1.15.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	19 unit	Dukungan sebesar 100% terhadap terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 549.158.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	18 unit						
1.15.1.15.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Jasa Pemeliharaan LAN	12 bulan	Dukungan sebesar 14,55% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 275.632.000,00	Rp. 240.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Peralatan kantor: Mesin ketik manual, Kamera, Komputer, Notebook, LCD	5 jenis						
							Perlengkapan Kantor: Instalasi air minum, Instalasi listrik, LAN< Telpn dan Faximile, VHF Repeater, radio Komunikasi VHF, Sound System, AC, Alat pemadam kebakaran portable, Hidran alat pemadam kebakaran, meja kursi	11 jenis						
1.15.1.15.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 472.781.000,00	Rp. 759.000.000,00		
1.15.1.15.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Bahan LKJ dan LKPJ	2 dokumen bahan LKJ dan LKPJ	Dukungan sebesar 1,55% terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 22.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							LKJIP	1 dokumen						
1.15.1.15.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Keuangan Bulanan	12 dokumen	Dukungan sebesar 6,39% terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	100%	Rp. 63.031.000,00	Rp. 50.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Laporan Keuangan Semester	2 dokumen						
							Laporan Keuangan Tahunan	1 dokumen						
							Laporan Keuangan Tahunan audited	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perhubungan											Jumlah Pagu : Rp. 107.553.442.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Laporan Keuangan Triwulan	4 dokumen							
1.15.1.15.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Jasa Pengembangan Data pada Sistem Informasi	1 paket	Dukungan sebesar 86,59% terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan	100%	Rp. 364.750.000,00	Rp. 650.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan	
							Jasa Publikasi kepada masyarakat tentang Persoalan Umum Transportasi dan Lalu Lintas di DIY	1 paket							
							Laporan Hasil Forum Perangkat Daerah	1 kali							
							Rencana Kerja (Renja) Dishub 2021	1 dokumen							
							Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dishub 2020	1 dokumen							
							RKA 2021, DPA 2021	2 dokumen							
							RKA Perubahan 2019 dan DPA Perubahan 2020	2 dokumen							
							ROPK Dishub Tahun 2020	1 dokumen							
1.15.1.15.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	12 dokumen	Dukungan sebesar 5,47% terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	100%	Rp. 35.000.000,00	Rp. 37.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan	
1.15.1.15.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI										Rp. 7.442.884.000,00	Rp. 16.500.000.000.000,00			
1.15.1.15.01.00.16.002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perhubungan	Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	0.94(rasio)	Evaluasi Kinerja Keselamatan Jalan di DIY	1 dokumen	Dukungan penurunan rasio Jumlah kecelakaan < 1 kejadian/km	100%	Rp. 5.096.926.000,00	Rp. 14.000.000.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan	
							Pemeliharaan early warning	1 unit							
							Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan tenaga Listrik Ruas Yogya-Barongan, Pandak-Srandakan Kab Bantul	30 unit							
							Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	15 unit							
							Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Ruas Srandakan - Pandansimo, Kab Bantul	6500 m							
							Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Ruas JJLS (Pandansimo-Samas) Kab. Bantul	26 unit							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perhubungan											Jumlah Pagu : Rp. 107.553.442.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Ruas Samas-Parangtritis Kab. Bantul	8 unit							
							Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Tenaga Surya (Sentolo - Brosot; Srandakan - Pandansimo)	10 unit							
							Pengadaan LPJU listrik Cebongan - Seyegan	75 titik							
							Pengadaan suku cadang APILL	1 paket							
							Pengadaan suku cadang APJ listrik	1 paket							
							Pengadaan suku cadang APJ tenaga surya	1 paket							
							Pengadaan suku cadang rambu	100 unit							
							Rehab berat APILL (simpang Ngasem dan simpang Piyungan)	2 lokasi							
							Teknisi APILL dan APJ (6 org x 312 hari)	1872 oh							
							Tim Pengembangan Keselamatan Transportasi	12 bulan							
1.15.1.15.01.00.16.005	Penegakan Hukum Lalu Lintas	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	0.94(rasio)	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekamaya LL (Kawasan Kranggan dan terban)	1 Dokumen Laporan	Mempertahankan Kecepatan Jaringan Jalan kawasan prioritas di atas 20 km/jam	100%	Rp. 704.199.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan	
							Penegakan Hukum Lalu Lintas	12 bulan							
							Penyelenggaraan Pemantauan Hari Hari Besar	Angkutan Lebaran 16 hari Angkutan Liburan 15 Hari Angkutan Natal Tahun Baru 8 Hari							
1.15.1.15.01.00.16.006	Edukasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perhubungan	Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	0.94(rasio)	Kampanye Keselamatan Lalu Lintas	SD 10@100 peserta	Dukungan untuk menurunkan angka kecelakaan di jalan Provinsi < 1 kejadian/km	100%	Rp. 1.181.906.000,00	Rp. 2.500.000.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan	
							Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DIY tingkat SD	1 kali 40 peserta							
							Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DIY tingkat SLTP	1 kali 40 peserta							
							Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ DIY SLTA sederajat	2 kali @40 peserta							
							Sosialisasi Keselamatan Transportasi Kawasan Bandara Baru	1 kali @100 peserta							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perhubungan											Jumlah Pagu : Rp. 107.553.442.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.15.1.15.01.00.16.007	Penegakan Hukum Angkutan Jalan	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	DIY	Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	0.94(rasio)	Penegakan hukum terhadap angkutan penumpang umum, barang dan emisi gas buang	10 kali, 12 bulan	Menurunnya angka kecelakaan di jalan provinsi sebesar 0,02 kejadian/km	100%	Rp. 459.853.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.00.17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN										Rp. 85.340.473.000,00	Rp. 65.000.000.000,00		
1.15.1.15.01.00.17.010	Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perhubungan	Peningkatan Tertib Perijinan Angkutan Tidak dalam Trayek	84%	Appraisal Bus Trans Jogja Operasional Trans Jogja 2021	1 dokumen	Tersedianya layanan Angkutan Perkotaan 44% dan Angkutan AKDP 28.24%	100%	Rp. 84.935.333.000,00	Rp. 55.000.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	80.35%	Evaluasi Kinerja Angkutan AKDP	1 dokumen						
					Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian	50%	Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan	1 dokumen						
							Pembinaan Awak Kendaraan Angkutan Umum	105 peserta						
							Pengelolaan dan Pemeliharaan CCTV Bus Trans Jogja	12 bulan						
							Perhitungan Biaya Operasional Trans Jogja 2021	1 dokumen						
							Subsidi BOK	128 armada 17 jalur selama 12 bulan						
1.15.1.15.01.00.17.011	Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perhubungan	Peningkatan Tertib Perijinan Angkutan Tidak dalam Trayek	84%	Pembinaan tertib perizinan angkutan sewa khusus	100 orang	Dukungan sebesar 27% terhadap peningkatan pelayanan angkutan	100%	Rp. 380.140.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	80.35%	Studi Kelayakan Transportasi Kawasan Pariwisata DIY	Tersedianya Studi Kelayakan Transportasi Kawasan Pariwisata DIY						
					Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian	50%	Terseleenggaranya perizinan angkutan tidak dalam trayek 905 kendaraan	1 dokumen laporan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perhubungan											Jumlah Pagu : Rp. 107.553.442.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.15.1.15.01.00.17.012	Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Perkeretaapian	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perhubungan	Peningkatan Tertib Perijinan Angkutan Tidak dalam Trayek	84%	Pengendalian terhadap Pelaksanaan Rencana Perkeretaapian di DIY	1 dokumen	Dukungan penyediaan sarana dan prasarana angkutan perkeretaapian sebesar 100%	100%	Rp. 25.000.000,00	Rp. 9.500.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	80.35%								
					Penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian	50%								
1.15.1.15.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS										Rp. 3.077.392.000,00	Rp. 7.000.000.000,00		
1.15.1.15.01.00.18.004	Penerapan Manajemen Lalu Lintas	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Perkotaan Yogyakarta	Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	53%	Evaluasi kinerja ruas jalan dan simpang	Mengidentifikasi tingkat pelayanan ruas jalan dan persimpangan di DIY	Dukungan sebesar 39% terhadap pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas	100%	Rp. 498.947.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
					Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	67%	Penanganan permasalahan lalu lintas melalui Forum lalu Lintas angkutan jalan (12 bulan)	Tersusunnya rencana bersama penanganan manajemen lalu lintas di DIY						
							Penilaian dan pendampingan pelaksanaan penilaian Wahana Tata nugraha (WTN) di kabupaten/ kota	Kelengkapan dokumen dan administrasi penilaian Wahana Tata nugraha (WTN) di kabupaten/ kota						
							Rekomendasi Andalalin (12 bulan)	Tersusunnya surat pertimbangan teknis rekomendasi andalalin						
							Studi Manajemen dan rekayasa LL sekitar Bandara YIA dan Underpass Kentungan	1 laporan						
1.15.1.15.01.00.18.005	Penerapan Rekayasa Lalu Lintas	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perhubungan	Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	53%	Pemeliharaan dan Operasional CC Room ATCS	1 paket	Dukungan peningkatan pengendalian sistem simpang bersinyal di Perkotaan Yogyakarta sebesar 100%	100%	Rp. 2.578.445.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perhubungan											Jumlah Pagu : Rp. 107.553.442.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
					Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	67%	Pengadaan dan Pemasangan APILL ATCS simpang Cepit, Kab. Bantul	1 unit							
							Pengadaan dan Pemasangan APILL ATCS simpang Godean, Kab. Sleman	1 unit							
1.15.1.15.01.00.19	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SIMPUL TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN										Rp. 3.127.859.000,00	Rp. 59.027.662.100,00			
1.15.1.15.01.00.19.004	Pengelolaan Park and Ride dan Perparkiran	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perhubungan	Penumpang yang terlayani pada simpul transportasi dan perparkiran	4600orang/hari	Operasional dan Pemeliharaan Park and Ride	3 lokasi 12 bulan	Dukungan sebesar 33,95% terhadap pengembangan dan pengelolaan simpul transportasi dan perparkiran	100%	Rp. 576.909.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan	
					Kendaraan yang terlayani pada tempat khusus parkir	791SRP	Operasional dan Pemeliharaan Tempat Khusus Parkir	791 SRP							
							Operasional dan Pemeliharaan Terminal Tipe B	4600 penumpang per hari							
1.15.1.15.01.00.19.006	Pengembangan Terminal, Park and Ride dan Perparkiran	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perhubungan	Penumpang yang terlayani pada simpul transportasi dan perparkiran	4600orang/hari	DED Park and Ride Ngemplak 1 dokumen	Tersedianya dokumen rencana teknik pembangunan Park and Ride Ngemplak	Dukungan sebesar 66,05 % terhadap pengembangan simpul transportasi dan perparkiran	100%	Rp. 2.550.950.000,00	Rp. 59.027.662.100,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan	
					Kendaraan yang terlayani pada tempat khusus parkir	791SRP	DED Terminal Wates (1 dokumen)	Tersedianya dokumen rencana teknik pembangunan Terminal Wates							
							Gate Parkir	1 Paket							
							Penyediaan CCTV Terminal Jombor dan Wates	1 Paket							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 7.229.096.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
1.16.1.16.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika													
1.16.1.16.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.807.710.000,00	Rp. 1.454.894.785,40		
1.16.1.16.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor	35 jenis	Dukungan 34,26% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 513.770.000,00	Rp. 729.993.395,83	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Benda-benda Pos (Materal, Perangko)	2 jenis						
							Bendera	2 jenis						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis						
							Majalah	1 jenis						
							Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 (dua)	8 unit						
							Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 (empat)	10 unit						
							Pembayaran tagihan rekening listrik	12 bulan						
							Pembayaran tagihan rekening telepon	12 bulan						
							Pembersihan kantor Diskominfo DIY	12 bulan						
							Penggandaan dan penjiilidan	16 penggandaan						
							Pengiriman Dokumen	1 tahun						
							Penyediaan Barang cetakan	10 jenis						
							Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14 jenis						
							Surat Kabar	6 jenis						
1.16.1.16.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Jasa Keamanan Kantor/tempat Kerja	12 bulan	Dukungan 36,47% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 623.075.000,00	Rp. 348.918.901,43	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Tenaga Pengelola Pelayanan Perkantoran	12 bulan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 7.229.096.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.16.1.16.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi Diskominfo DIY Dalam Daerah terlaksana dengan baik	12 bulan	Dukungan 29,27% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 670.865.000,00	Rp. 375.982.488,14	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Konsultasi dan koordinasi Diskominfo DIY Dalam Jawa terlaksana dengan baik	12 bulan						
							Konsultasi dan koordinasi Diskominfo DIY Luar Daerah terlaksana dengan baik	12 Bulan						
							Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	12 bulan						
1.16.1.16.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 443.337.000,00	Rp. 528.987.993,39		
1.16.1.16.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	AC 1 PK	1 unit	Dukungan 23,58% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 41.067.000,00	Rp. 65.543.472,12	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Bracket	6 unit						
							Gas Tabung Pemadam Kebakaran	6 unit						
							Kursi rapat	26 unit						
1.16.1.16.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Gedung Kantor Terpelihara	12 bulan	Dukungan 14,29% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 117.320.000,00	Rp. 257.100.591,45	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.16.1.16.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas/operasional terpelihara roda 2 (dua)	8 unit	Dukungan 17,37% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 218.550.000,00	Rp. 167.004.200,25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Kendaraan dinas/operasional terpelihara roda 4 (empat)	10 unit						
1.16.1.16.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Air Conditioner	30 unit	Dukungan 3,93% terhadap meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 66.400.000,00	Rp. 39.339.729,57	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Camera	2 unit						
							Genset	3 buah						
							Komputer (PC, Monitor, Printer, Scanner)	65 unit						
							LCD Projector	2 unit						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 7.229.096.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Mesin Ketik Manual	5 unit							
							Notebook	12 unit							
							Pemeliharaan Kursi	15 buah							
							Pemeliharaan LAN	1 tahun							
							Pemeliharaan Meja	5 buah							
							Peralatan listrik, telepon dan air	1 tahun							
1.16.1.16.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 143.736.000,00	Rp. 184.209.577,46			
1.16.1.16.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Nilai LKJIP Diskominfo DIY	Nilai LKJIP A >= 75-85	Dukungan 2.27% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 8.795.000,00	Rp. 5.104.878,77	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	
1.16.1.16.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Laporan Keuangan OPD dengan deviasi 10%	Dukungan 12.83% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 38.976.000,00	Rp. 19.226.012,24	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	
1.16.1.16.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Penyusunan ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA	5 dokumen	Dukungan 50.77% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 65.230.000,00	Rp. 140.575.461,31	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	
							Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA							
1.16.1.16.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kesesuaian antara Capaian Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja	100%	Dukungan 8.27% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 30.735.000,00	Rp. 19.303.225,14	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	
1.16.1.16.01.00.15	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK										Rp. 2.079.684.000,00	Rp. 1.997.125.000,00			
1.16.1.16.01.00.15.001	Pembinaan Kelembagaan KPID	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	70%	Aduan masyarakat yang tertangani	40 aduan masuk	Dukungan 4% terhadap persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	100%	Rp. 805.866.000,00	Rp. 510.651.951,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	
							Lembaga penyiaran yang patuh ketentuan	15 lembaga penyiaran							
							Prosentase Capaian kinerja KPID DIY	100%							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 7.229.096.000,00			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indikator Kinerja						(12)	(13)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.16.1.16.01.00.15.002	Pembinaan Kelembagaan KIP	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	70%	Jumlah badan publik yang mematuhi ketentuan UU no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	36 badan publik	Dukungan 15% terhadap persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	100%	Rp. 593.000.000,00	Rp. 396.005.242,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.16.1.16.01.00.15.006	Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	70%	Keluhan masyarakat atas layanan pemda DIY yang tertangani	12 bulan	Dukungan 40% terhadap persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	100%	Rp. 74.389.000,00	Rp. 95.903.103,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.16.1.16.01.00.15.007	Pengelolaan Layanan Informasi Publik	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	70%	Masyarakat Yang Menggunakan CoWorking Space	2000 orang	Dukungan 26% terhadap persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	100%	Rp. 375.015.000,00	Rp. 315.666.464,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.16.1.16.01.00.15.008	Pembinaan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	70%	Publikasi ILM di Radio	240 kali	Dukungan 15% terhadap persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	100%	Rp. 231.414.000,00	Rp. 678.898.240,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Kelompok Informasi Masyarakat memahami pemanfaatan Teknologi Informasi	3 KIM						
							Konten Videotron	3 buah						
							Majalah Diskominfo	1500 eksemplar						
							Masyarakat memahami Internet sehat dan aman	60 orang						
							Masyarakat semakin memahami dalam menggunakan media sosial	7 kali						
							Melestarikan budaya Seni melalui pertunjukan rakyat	2 kali						
							Produk Multimedia untuk Meningkatkan Pemahaman masyarakat untuk menyebarkan konten positif melalui media visual	2 paket multimedia						
							Rekomendasi FK Metra Kab/Kota	1 rekomendasi						
1.16.1.16.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN									Rp. 1.834.064.000,00	Rp. 2.142.147.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 7.229.096.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.16.1.16.01.00.16.004	Pengaman Informasi dan Komunikasi Pemda DIY	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanian	Persentase Urusan yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	37.5%	ASN yang tersosialisasi keamanan informasi	80 ASN	Dukungan 23% terhadap prosentase urusan yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	100%	Rp. 538.450.000,00	Rp. 566.499.785,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Ketersediaan Akses Datacenter (SLA)	362 hari (99%)						
							Laporan Insiden Keamanan Informasi	1 dokumen						
							Laporan Pengujian Keamanan Informasi (Penetration Testing)	1 dokumen						
							Sertifikat ISO 27001 Datacenter	1 sertifikat						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 7.229.096.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaitimewan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Ghasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										
1.16.1.16.01.00.16.007	Pengelolaan Aplikasi Layanan Publik Pemerintah Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Urusan yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	37.5%	Aplikasi layanan publik yang dikelola	3 aplikasi	Dukungan 10% terhadap persentase urusan yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	100%	Rp. 359.400.000,00	Rp. 308.768.152,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Rekomendasi Pengembangan E-Government yang dihasilkan dari Forum Komunikasi se-DIY	1 dokumen rekomendasi						
1.16.1.16.01.00.16.008	Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Perberdayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Persentase Urusan yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	37.5%	Modul yang terintegrasi dalam IDMC	3 modul	Dukungan 49% terhadap persentase urusan yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	100%	Rp. 480.600.000,00	Rp. 930.755.121,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 7.229.096.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Panitadya Kalastimewan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grihasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD											
1.16.1.16.01.00.16.010	Pengelolaan Persandian	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Urusan yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	37.5%	Jaringan telepon PABX yang dipelihara	600 titik	Dukungan 13% terhadap prosentase urusan yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK	100%	Rp. 455.614.000,00	Rp. 336.123.942,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	
							Jumlah OPD yang sudah menggunakan tanda tangan digital	2 OPD							
							Laporan Money Jaring Komunikasi Sandi	1 dokumen							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 7.229.096.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Rekomendasi Forkomsanda	1 rekomendasi							
							Ruangan yang teramankan	44 ruangan							
1.16.1.16.01.00.17	PROGRAM LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI										Rp. 920.565.000,00	Rp. 8.077.602.500,00			
1.16.1.16.01.00.17.004	Pengelolaan Jaringan Komputer Pemerintah Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kependagangan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan	Persentase Jaringan Infrastruktur dalam Lingkungan Pemda DIY yang Terintegrasi dalam Layanan TIK	80.5%	Pengelolaan Jaringan Fiber Optik	89 titik	Dukungan 90% terhadap persentase jaringan infrastruktur dalam Lingkungan Pemda DIY yang terintegrasi dalam layanan TIK	100%	Rp. 360.000.000,00	Rp. 7.391.825.488,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	
							Pengelolaan Jaringan Virtual Private Network (VPN)	96 titik							
							Pengelolaan Jaringan Wirelless	63 titik							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 7.229.096.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Ghasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD											
1.16.1.16.01.00.17.005	Pengelolaan JITV	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Jaringan Infrastruktur dalam Lingkungan Pemda DIY yang Terintegrasi dalam Layanan TIK	80.5%	Konten paket tayangan Pemda DIY	336 konten	Dukungan 10% terhadap prosentase jaringan infrastruktur dalam Lingkungan Pemda DIY yang terintegrasi dalam layanan TIK	100%	Rp. 560.565.000,00	Rp. 685.777.012,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Pagu : Rp. 8.131.000.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)		
1	Wajib															
1.17	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH															
1.17.1.17.01.00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah															
1.17.1.17.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.558.110.000,00	Rp. 1.525.000.000,00				
1.17.1.17.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor	20 jenis	Dukungan 34.11% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 488.460.000,00	Rp. 750.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan		
							Barang Cetak dan Pengandaan	7 jenis								
							Bukti pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 dan 4	19 unit								
							Buku Perpustakaan	10 jenis								
							Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan								
							Komponen Instalasi Listrik	10 jenis								
							Pembayaran Listrik 2951 Kwh	1 tahun								
							Pembayaran Telpon 3 sambungan	1 tahun								
							Pengelolaan arsip dinamis	2 jenis								
							Penggandaan dan jilid	75.000 lembar								
							Peralatan Rumah Tangga	13 jenis								
							Retribusi Sampah	1 tahun								
							Surat Kabar	2 jenis								
							Surat Keluar	4000 surat								
							Surat Masuk	3000 surat								
1.17.1.17.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Bukti pembayaran honorarium pegawai kontrak	3 orang	Dukungan 33.40% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 479.870.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan		
							Bukti pembayaran honorarium Pengelola arsip	2 orang								
							Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawalan	2 orang/bulan								
							Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	10 orang/bulan								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Pagu : Rp. 8.131.000.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
															1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Jasa keamanan kantor	12 bulan							
1.17.1.17.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Makan dan minum sidang	1750 OS	Dukungan 32.50 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 589.780.000,00	Rp. 225.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
							Perjalanan Dinas dalam daerah	12 bulan							
							Perjalanan Dinas luar daerah dalam pulau Jawa	12 bulan							
							Perjalanan Dinas luar daerah luar pulau Jawa	12 bulan							
1.17.1.17.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 962.352.000,00	Rp. 1.965.000.000,00			
1.17.1.17.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Sumur bor	1 paket	Dukungan 0.56 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 175.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
							tempat parkir	1 paket							
1.17.1.17.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pengadaan Komputer PC (Komputer, Printer, Laptop, LCD)	4 jenis	Dukungan 93.99 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 543.923.000,00	Rp. 1.650.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
							Interior Gedung Induk	1 paket							
							Pengadaan Mebeleur (Meja, Kursi rapat Gedung induk dan PLUT, Sofa, Kursi tunggu)	5 jenis							
							Pengadaan Perlengkapan Kantor (AC Split, filling, lemari arsip, lemari besi, wastafel, kipas angin, karpet)	7 jenis							
1.17.1.17.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2 jenis	Dukungan 4.57% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 204.079.000,00	Rp. 240.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
1.17.1.17.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Peralatan Kantor	6 jenis	Dukungan 0.88% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 39.350.000,00	Rp. 75.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
							Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	6 jenis							
1.17.1.17.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 109.361.000,00	Rp. 184.000.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah													Jumlah Pagu : Rp. 8.131.000.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.17.1.17.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP dari semula 77,17 (BB) menjadi 80 (A)	Dukungan 4.57 % terhadap penata usahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 8.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
1.17.1.17.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 3 %	Dukungan 8.23% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 9.000.000,00	Rp. 11.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
1.17.1.17.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2021	Dukungan 73.48% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 80.361.000,00	Rp. 135.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
							ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan TA.2020							
1.17.1.17.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah di tetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 13.72% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
1.17.1.17.01.00.17	PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN WIRUSAHA BARU										Rp. 1.352.804.000,00	Rp. 1.150.000.000,00			
1.17.1.17.01.00.17.002	Pelatihan Kewirausahaan	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	DIY	jumlah wirausaha baru	899wirausaha	Jumlah peserta pelatihan penumbuhan desa Preneur tahap 2 di 6 Desa meningkat kemampuan manajemen usaha produksi dan pemasaran	180 UKM	Dukungan sebesar 67% (100 wub) terhadap terwujudnya peningkatan Jumlah Wirausaha Baru dari tahun 2019 ke 2020 (sebesar 150 wub) semula 749 wub menjadi 899 wub	100%	Rp. 514.468.000,00	Rp. 1.150.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
1.17.1.17.01.00.17.003	Layanan Usaha Wirausaha Baru	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat	DIY	jumlah wirausaha baru	899wirausaha	Akses promosi dan pemasaran UKM mitra PLUT	50 UKM	Dukungan sebesar 33% (50 wub) terhadap terwujudnya peningkatan Jumlah Wirausaha Baru dari tahun 2019 ke 2020 (sebesar 150 wub) semula 749 wub menjadi 899 wub	100%	Rp. 838.336.000,00	Rp. 0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
							Jumlah Peserta Inkubator Bisnis yang siap, (sudah memiliki manajemen usaha, jejaring pemasaran, produksi yang baik) menjadi wirausaha baru	35 Wub							
							Jumlah wirausaha kab/kota yang dilayani dalam pojok konsultasi bisnis	300 UKM							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah											Jumlah Pagu : Rp. 8.131.000.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Jumlah wirausaha yang dilayani dalam konsultasi bisnis	600 UKM							
1.17.1.17.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN										Rp. 1.283.619.000,00	Rp. 1.851.500.000,00			
1.17.1.17.01.00.18.002	Pengawasan dan Penilaian Koperasi	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n	2046177Juta Rupiah	Jumlah koperasi yang naik peringkat	15 koperasi	Dukungan sebesar 30% (3.024 juta rupiah) terhadap peningkatan nilai omset koperasi riil dari tahun 2019 ke 2020 (10.080 juta rupiah) semula 2.036.097 juta rupiah menjadi 2.046.177 juta rupiah	100%	Rp. 247.776.000,00	Rp. 326.500.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
							Jumlah koperasi berprestasi	15 koperasi							
							Jumlah koperasi sehat	385 koperasi							
							Jumlah koperasi yang diawasi	20 koperasi							
							Penyempurnaan aplikasi database koperasi	1 aplikasi							
1.17.1.17.01.00.18.004	Pelatihan SDM dan Kelembagaan Koperasi	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n	2046177Juta Rupiah	Jumlah koperasi peserta pelatihan (SDM dan Kelembagaan) yang meningkat kapasitas usahanya 100%	120 kop	Dukungan sebesar 30% (3.024 juta rupiah) terhadap peningkatan nilai omset koperasi riil dari tahun 2019 ke 2020 (10.080 juta rupiah) semula 2.036.097 juta rupiah menjadi 2.046.177 juta rupiah	100%	Rp. 517.329.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
							Jumlah peserta Bimtek Dewan Pengawas Syariah yang meningkat Kapasitasnya 100%	30 orang							
							meningkatnya pemahaman perkoperasian bagi generasi muda	3 kelompok							
							Pelayanan Dekopin terhadap fungsi dan aspirasi Gerakan Koperasi	1 tahun							
							Penguatan bisnis dan kelembagaan koperasi sekunder	1 koperasi							
1.17.1.17.01.00.18.005	Pemasaran Perkoperasian	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	nilai omzet koperasi sektor riil tahun n	2046177Juta Rupiah	Jumlah media publikasi Perkoperasian	4 media publikasi	Dukungan sebesar 40% (4.032 juta rupiah) terhadap peningkatan nilai omset koperasi riil dari tahun 2019 ke 2020 (10.080 juta rupiah) semula 2.036.097 juta rupiah menjadi 2.046.177 juta rupiah	100%	Rp. 518.514.000,00	Rp. 825.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan	
							Peningkatan omset koperasi yang mengikuti pameran produk Koperasi (harkopnas, Produk koperasi dan UKM)	Rp. 72.200.000							
1.17.1.17.01.00.19	PROGRAM PENGEMBANGAN UKM										Rp. 2.364.754.000,00	Rp. 4.535.000.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Pagu : Rp. 8.131.000.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.17.1.17.01.00.19.003	Pelatihan Kelembagaan dan Usaha UKM	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Nilai Omset UKM Tahun n	87516Juta Rupiah	Jumlah peserta pelatihan (terkait produk) yang meningkat ketrampilannya	60 UKM	Dukungan 50% terhadap peningkatan Nilai omzet UKM sebesar 5% (4.167 juta rupiah) dari tahun 2019 ke 2020 semula 83.349 juta rupiah menjadi 87.516 juta rupiah	100%	Rp. 644.614.000,00	Rp. 1.035.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
							Jumlah peserta pelatihan terkait sertifikasi yang meningkat pengetahuannya (ISO, HACCP, HAKI, MERK)	120 UKM						
							Jumlah Produk UKM yang tersertifikasi halal 25 produk, PIRT	10 Produk						
							Jumlah UKM peserta pelatihan (manajemen usaha dan manajemen keuangan) yang meningkat kapasitasnya	60 UKM						
1.17.1.17.01.00.19.004	Pemasaran Produk UKM	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY, Jakarta	Nilai Omset UKM Tahun n	87516Juta Rupiah	Gebyar UKM DIY di Galeri SMESCO	50 UKM	Dukungan 50% (2.083,5 juta rupiah) terhadap peningkatan Nilai omzet UKM sebesar 5% (4.167 juta rupiah) dari tahun 2019 ke 2020 semula 83.349 juta rupiah menjadi 87.516 juta rupiah	100%	Rp. 1.720.140.000,00	Rp. 3.500.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
							Jumlah Kontrak kerjasama yang dihasilkan dari kemitraan antara UKM dengan retail/Toko Modern	2 kontrak						
							Peningkatan omset UKM di Galeri SMESCO	100 UKM						
							Peningkatan Omzet UKM peserta pameran produk UKM	5%						
1.17.1.17.01.00.20	PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN										Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00		
1.17.1.17.01.00.20.005	Kemitraan Koperasi dengan Lembaga Pembiayaan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Jumlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM tahun n	18250500000Rp	Jumlah kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari Kemitraan antara Koperasi dengan mitra	35 koperasi	Dukungan 50% (Rp. 9.125.250.000) terhadap jumlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM yang dibina pada tahun 2020 sebesar Rp.18.250.500.000	100%	Rp. 250.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
					Rasio omset koperasi dan UKM terhadap jumlah pembiayaan	0%	Jumlah Koperasi yang meningkat kemampuan dalam mengakses permodalan	75 koperasi						
1.17.1.17.01.00.20.006	Kemitraan UKM dengan Lembaga Pembiayaan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Jumlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM tahun n	18250500000Rp	Jumlah kontrak pembiayaan yang dihasilkan dari Kemitraan antara UMKM dengan mitra	80 UKM	Dukungan 50% (Rp. 9.125.250.000) terhadap jumlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM yang dibina pada tahun 2020 sebesar Rp.18.250.500.000	100%	Rp. 250.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sedang Berjalan
					Rasio omset koperasi dan UKM terhadap jumlah pembiayaan	0%	jumlah UKM yang meningkat kemampuannya dalam mengakses permodalan	150 UKM						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal														Jumlah Pagu : Rp. 6.000.000.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Wajib														
1.18	PENANAMAN MODAL														
1.18.1.18.01.00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal														
1.18.1.18.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.369.660.000,00	Rp. 2.520.000.000,00			
1.18.1.18.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Jasa Keamanan	12 bulan	Dukungan 37,20 %Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 842.126.000,00	Rp. 995.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan	
							10. Pembayaran tagihan rekening listrik	12 bulan							
							11. Pembayaran tagihan rekening telpon 6 sambungan	12 bulan							
							12. Pembayaran tagihan Speedy	12 bulan							
							13. Pembayaran tagihan TV kabel	12 bulan							
							14. Penggandaan dokumen	190.000 lembar							
							15. penjiilidan dokumen	100 lembar							
							16. Peralatan rumah tangga, alat pembersih dan bahan pembersih	14 jenis							
							17. Perlengkapan/alat penanganan arsip	13 jenis							
							18. Surat kabar dan majalah	4 jenis							
							19. Surat keluar	12.000 lembar							
							2. Bahan Bakar Genset	450 liter							
							20. Surat Masuk	13.900 lembar							
							3. Materai	500 lembar							
							4. Alat tulis kantor	43 jenis							
							5. Barang cetakan	7 jenis							
							6. Bukti pembayaran pajak STNK kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	13 unit							
							7. Kebersihan gedung kantor 2 lokasi	12 bulan							
							8. Komponen instalasi listrik bangunan kantor	11 jenis							
							9. Paket pengiriman	1 paket							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal											Jumlah Pagu : Rp. 6.000.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.18.1.18.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Bukti pembayaran Pegawai non PNS	12 bulan	Dukungan 8,52% Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 192.926.000,00	Rp. 225.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							Bukti pembayaran Pengelola Barang	12 bulan						
							Bukti pembayaran Pengelola Kepegawaian	12 bulan						
							Bukti pembayaran Pengelola Keuangan	12 bulan						
1.18.1.18.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Makan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	2400 orang	Dukungan 54,28 % Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.334.608.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							Makan dan minuman tamu tersedia sesuai kebutuhan	600 orang						
							Perjalanan dinas dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun						
							Perjalanan dinas luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun						
1.18.1.18.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 759.263.000,00	Rp. 850.000.000,00		
1.18.1.18.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Mebeleur	1 jenis	Dukungan 13,71% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 97.551.000,00	Rp. 150.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							Perlengkapan Kantor	2 jenis						
1.18.1.18.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemindahan Generator Set	1 unit	Dukungan 57,82% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 459.250.000,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							Rehabilitasi kantor Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY	1 unit						
1.18.1.18.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2) 2 jenis	Terpelihara kendaraan dinas operasional sesuai standar Sarpras 100%	Dukungan 23,72% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 168.712.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal											Jumlah Pagu : Rp. 6.000.000.000,00			
Nomor	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.18.1.18.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peralatan kantor	4 jenis	Dukungan 4,74% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 33.750.000,00	Rp. 50.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							Perlengkapan kantor	1 jenis						
1.18.1.18.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 271.559.000,00	Rp. 289.000.000,00		
1.18.1.18.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2020 : 100 Nilai Lakip	Lakip Nilai A	Dukungan 5,52% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD3	100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 17.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
1.18.1.18.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan : 5 %	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 6,56% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 20.043.000,00	Rp. 25.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
1.18.1.18.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Database pada Website "Jogja Invest" yang lengkap, akurat, dan terkini	Database pada Website "Jogja Invest" yang lengkap, akurat, dan terkini	Dukungan 79,73% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 216.516.000,00	Rp. 225.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							Forum Perencanaan OPD 1 kali	Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2021						
							ROPK, Renja, RKA, DPA, Renstra yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen Perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan 2021						
1.18.1.18.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 7,36 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 20.000.000,00	Rp. 22.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
1.18.1.18.01.00.17	PROGRAM PROMOSI INVESTASI										Rp. 366.740.000,00	Rp. 400.000.000,00		
1.18.1.18.01.00.17.001	Promosi Investasi	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunkan Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Nilai Rencana Investasi yang Tercatat dalam Ijin Prinsip (Rp Juta)	1036356Juta Rupiah	Temu Investor	Temu investor dengan mengundang 30 investor dengan nilai investasi yang ditawarkan Rp. 500.000.000.000,-	Dukungan sebesar 61,92 % terhadap terwujudnya peningkatan Nilai Rencana Investasi yang tercatat dalam ijin prinsip (Rp Juta) dari tahun 2019 ke 2020 semula 1.036.356 menjadi 1.243.628 juta rupiah	100%	Rp. 226.658.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal											Jumlah Pagu : Rp. 6.000.000.000,00			
Nomor	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.18.1.18.01.00.17.005	Penanganan Kerjasama Luar Negeri	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Nilai Rencana Investasi yang Tercatat dalam Ijin Prinsip (Rp Juta)	1036356Juta Rupiah	Temu kemitraan	Temu kemitraan dengan 4 negara dengan proyek atau nilai investasi yang ditawarkan ke Luar Negeri sebesar Rp. 300.000.000.000	Dukungan sebesar 38,06 % terhadap terwujudnya peningkatan Nilai Rencana Investasi yang tercatat dalam ijin prinsip (Rp Juta) dari tahun 2019 ke 2020 semula 1.036.356 menjadi 1.243.628 juta rupiah	100%	Rp. 140.082.000,00	Rp. 150.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
1.18.1.18.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI										Rp. 877.426.000,00	Rp. 620.000.000,00		
1.18.1.18.01.00.18.003	Penanganan Permasalahan Penanaman Modal	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi PMA & PMDN	820644Juta Rupiah	Penanganan Permasalahan Penanaman Modal	Permasalahan Penanaman Modal menurun sebesar 75% permasalahan (dari 20 menjadi 5 permasalahan)	Dukungan sebesar 41,68% terhadap terwujudnya peningkatan nilai realisasi investasi PMA & PMDN dari tahun 2020 ke 2021 semula 988.910 menjadi 1.038.356 (Rp Juta rupiah)	100%	Rp. 272.963.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							Peningkatan Laporan LKPM	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) meningkat 30 perusahaan dari tahun 2020 menjadi 207 perusahaan di tahun 2021						
1.18.1.18.01.00.18.004	Percepatan Realisasi Investasi	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi PMA & PMDN	820644Juta Rupiah	Dokumen Kerjasama Investasi	2 dokumen kerjasama investasi	Dukungan sebesar 14,13 % terhadap terwujudnya peningkatan nilai realisasi investasi PMA & PMDN dari tahun 2019 ke 2020 semula 988.910 menjadi 1.038.356 (Rp Juta rupiah)	100%	Rp. 354.578.000,00	Rp. 100.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
							Dokumen Perda Insentif dan kemudahan berinvestasi	1 Dok Perda Insentif dan kemudahan berinvestasi						
1.18.1.18.01.00.18.005	Penyiapan Potensi Investasi	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi PMA & PMDN	820644Juta Rupiah	Potensi investasi yang siap jual di kab Gunungkidul	1 dokumen kajian dengan nilai investasi yang ditawarkan Rp. 200.000.000.000	Dukungan sebesar 44,19 % terhadap terwujudnya peningkatan nilai realisasi investasi PMA & PMDN dari tahun 2019 ke 2020 semula 988.910 menjadi 1.038.356 (Rp Juta rupiah)	100%	Rp. 249.885.000,00	Rp. 270.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
1.18.1.18.01.00.19	PROGRAM PELAYANAN PERIJINAN										Rp. 758.937.000,00	Rp. 1.000.000.000,00		
1.18.1.18.01.00.19.004	Penerbitan Izin dan Non Izin Sektor SDA dan Kesra	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP	97%	Jumlah Dokumen Izin terbit sektor SDA dan Kesra	Dokumen Izin terbit dari tahun 2019 ke tahun 2020 semula 1100 menjadi 1125	Dukungan sebesar 48,08 % terhadap terwujudnya Presentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP (%) dari tahun 2019 ke 2020 semula 95% menjadi 97%	100%	Rp. 365.245.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan
1.18.1.18.01.00.19.005	Penerbitan Izin dan Non Izin Sektor Perekonomian dan Infrastruktur	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pelayanan Langsung ke Masyarakat	Persentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP	97%	Jumlah Dokumen Izin terbit sektor Perekonomian dan infrastruktur	Dokumen Izin terbit dari tahun 2019 ke tahun 2020 semula 1900 menjadi 1925	Dukungan sebesar 51,92 % terhadap terwujudnya Presentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP (%) dari tahun 2019 ke 2020 semula 95% menjadi 97%	100%	Rp. 393.692.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perijinan dan Penanaman Modal											Jumlah Pagu : Rp. 6.000.000.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.18.1.18.01.00.20	PROGRAM KEMUDAHAN BERUSAHA DAN PELAYANAN PENGADUAN										Rp. 596.415.000,00	Rp. 600.000.000,00			
1.18.1.18.01.00.20.005	Percepatan Perizinan Berusaha	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Waktu penyelesaian ijin usaha	3Hari	Dokumen SOP ijin dan non ijin	Tersedianya SOP Perijinan 18 Sektor	Dukungan sebesar 50,73 % terhadap terwujudnya Waktu penyelesaian ijin usaha (hari) dari tahun 2019 ke 2020 semula 5 menjadi 3	100%	Rp. 301.515.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan	
							Pembentukan komitmen bersama percepatan pelayanan perizinan	Komitmen bersama percepatan perizinan OPD teknis DIY 18 sektor							
							Pengelolaan Data Pasca izin terbit	Tersedianya data informasi perizinan 18 sektor							
1.18.1.18.01.00.20.006	Pelayanan Pengaduan Perizinan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Waktu penyelesaian ijin usaha	3Hari	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2019 ke 2020 semula 83% menjadi 84%	Dukungan sebesar 49,27 % terhadap terwujudnya Waktu penyelesaian ijin usaha (hari) dari tahun 2019 ke 2020 semula 5 menjadi 3	100%	Rp. 294.900.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Sedang Berjalan	
							system informasi yang berbasis teknologi	Tersedianya system Informasi Perijinan 17 Sektor							
							terselesaikannya pengaduan perijinan dan non perijinan	Pengaduan Perizinan selesai 100 % (dari 10 pengaduan)							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kebudayaan											Jumlah Pagu : Rp. 7.481.628.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.22	KEBUDAYAAN													
1.22.1.22.01.00	Dinas Kebudayaan													
1.22.1.22.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 6.369.071.000,00	Rp. 7.293.877.800,00		
1.22.1.22.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor 30 jenis Barang cetakan 7 jenis Pembayaran pajak /STNK Kendaraan roda 4 : 17 unit Pembayaran retribusi sampah 12 bulan Kebersihan Gedung Kantor 4 gedung Alat listrik dan elektronik 15 jenis Langganan surat kabar harian 2 jenis 12 bulan Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet 12 bulan Penggandaan 61.140 lembar Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 jenis Meterai 600 buah Bendera merah putih 8 buah Isi gas tabung pemadam kebakaran 5 jenis	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Dukungan 63.38% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD	100	Rp. 3.778.143.000,00	Rp. 3.979.509.600,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.22.1.22.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja 30 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	Tersedianya pelayanan perkantoran yang prima 100%	Dukungan 36,95% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD	100%	Rp. 2.313.574.000,00	Rp. 3.026.698.400,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.22.1.22.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1.Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun 2.Extra fooding selama 1 tahun (720 om) 3.Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan selama 1 tahun	Kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	Dukungan 36,95% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD	100%	Rp. 277.354.000,00	Rp. 287.669.800,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.22.1.22.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 950.020.000,00	Rp. 1.067.799.700,00		
1.22.1.22.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1.Pemeliharaan air minum/bersih 15 unit 2.Pemeliharaan Air Limbah/Kotor 35 unit 3.Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 3 unit	Terpeliharanya rumah dan gedung kantor 100%	Dukungan 0,57% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD	100%	Rp. 282.440.000,00	Rp. 310.684.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kebudayaan											Jumlah Pagu : Rp. 7.481.628.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	
1.22.1.22.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan Dinas Operasional terpelihara (Kendaraan Roda 4)	17 buah		Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas / operasional) terpenuhi.	100%	Rp. 512.520.000,00	Rp. 602.466.700,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.22.1.22.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1.Instalasi telepon	3 jenis		Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (peralatan dan perlengkapan gedung kantor) terpenuhi	100%	Rp. 155.060.000,00	Rp. 154.649.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							2.Jaringan komputer	30 titik							
							3. Alat-Alat Kantor	5 Jenis							
1.22.1.22.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN											Rp. 162.537.000,00	Rp. 178.800.600,00		
1.22.1.22.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang capaian kerjanya sesuai dokumen perencanaan	Nilai LKJIP A		Dukungan 2,5% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD	100%	Rp. 7.536.000,00	Rp. 8.292.900,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.22.1.22.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Tersusunnya Laporan Keuangan	100%		Tersedianya Laporan keuangan SKPD	100%	Rp. 131.767.000,00	Rp. 144.943.700,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.22.1.22.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1.Terlaksananya Penyusunan : RKA - DPA, Renstra, Sistem Informasi, statistik budaya	1 Tahun		Tersedianya Dokumen RKA - DPA, Renstra, Statistik Budaya	100%	Rp. 16.650.000,00	Rp. 18.315.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.22.1.22.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kebudayaan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan		Kelancaran pelaksanaan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	Rp. 6.584.000,00	Rp. 7.249.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 28.934.240.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.23	PERPUSTAKAAN													
1.23.1.23.01.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah													
1.23.1.23.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 6.894.619.000,00	Rp. 7.705.679.315,00		
1.23.1.23.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor	51 jenis	Dukungan 89,22% terhadap Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 6.151.575.000,00	Rp. 7.000.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Barang cetakan	7 jenis						
							Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 2	7 unit						
							Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 4	16 unit						
							Bukti pembayaran pajak kendaraan/STNK roda 6	1 unit						
							Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan						
							Keamanan Gedung Kantor	12 bulan						
							Kebersihan gedung kantor	5 gedung/lokasi						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	31 jenis						
							Langganan surat kabar dan majalah	3 jenis 12 bulan						
							Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air, dan internet	12 bulan						
							Penataan arsip dinamis dan Penyusutan arsip yang sudah masuk masa retensi	1 daftar arsip inaktif BPAD, 1 kali penyusutan						
							Penggandaan	140.000 lembar						
							Pengiriman dokumen	12 bulan						
							Peralatan Rumah Tangga	11 jenis						
							Surat keluar	6.500 surat						
							Surat masuk	1.850 surat						
1.23.1.23.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan 10,78% terhadap Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Rp. 743.044.000,00	Rp. 705.679.315,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 28.934.240.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Konsultasi dan koordinasi dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun							
							Konsultasi dan koordinasi luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun							
							Makanan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun							
1.23.1.23.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 12.408.027.000,00	Rp. 3.976.808.910,00			
1.23.1.23.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pengadaan interior depo arsip Tahap I	1 paket	Dukungan 2,28% terhadap Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp. 8.279.000.000,00	Rp. 1.057.520.200,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan	
							Pengadaan peralatan sesuai RKBMD	1 jenis							
1.23.1.23.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Gedung kantor sesuai RKBMD	5 lokasi	Dukungan 27,39% terhadap Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp. 2.088.862.000,00	Rp. 1.019.288.710,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan	
							Rehabilitasi Minaret	1 paket							
1.23.1.23.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas roda 2 sesuai RKBMD terpelihara	7 unit	Dukungan 38,24% terhadap Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp. 837.490.000,00	Rp. 900.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan	
							Kendaraan dinas roda 4 sesuai RKBMD terpelihara	16 unit							
							Kendaraan dinas roda 6 sesuai RKBMD terpelihara	1 unit							
1.23.1.23.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan berkala meubelair sesuai RKBMD	3 jenis	Dukungan 32,08% terhadap Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp. 1.202.675.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan	
							Pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor sesuai RKBMD	10 jenis							
							Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD	16 jenis							
							Relokasi ke gedung depo arsip	100%							
1.23.1.23.01.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 292.069.000,00	Rp. 368.537.400,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 28.934.240.000,00			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indikator Kinerja						(12)	(13)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.23.1.23.01.00.03.001	Pengembangan I S O	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Surveillance ISO 9001:2015	1 kali	Dukungan 44 % terhadap Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	Rp. 127.535.000,00	Rp. 187.550.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.23.1.23.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Penilaian angka kredit arsiparis	2 kali (15 orang)	Dukungan 56 % terhadap Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	Rp. 164.534.000,00	Rp. 180.987.400,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Penilaian angka kredit pustakawan	2 kali (15 orang)						
							Rakor Arsiparis	1 kali						
							Rakor Pustakawan	1 kali						
1.23.1.23.01.00.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 336.606.000,00	Rp. 611.199.600,00		
1.23.1.23.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	1 Laporan	Dukungan 6% terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Rp. 19.000.000,00	Rp. 20.900.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Laporan Tahunan (LPPD, LKPJ)	1 Laporan						
1.23.1.23.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Fungsional	12 laporan	Dukungan 6% terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Rp. 19.636.000,00	Rp. 21.599.600,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Laporan Keuangan Tahunan	1 laporan keuangan tahunan						
							Laporan Semesteran/Prognosis	1 laporan prognosis						
1.23.1.23.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Forum OPD/Raker Penyusunan Program Kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan	1 Kali	Dukungan 76% terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Rp. 257.070.000,00	Rp. 467.830.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Melakukan Rintisan Kerjasama	1 Rintisan Kerjasama						
							Pengembangan Website BPAD	1 Paket						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 28.934.240.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Penyusunan Dokumen PK, RKT/Reja, RKA,dan DPA	1 Dokumen							
1.23.1.23.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi Penggunaan data sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan selama 1 tahun	9 program dan 22 kegiatan	Dukungan 12% terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Rp. 40.900.000,00	Rp. 100.870.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan	
1.23.1.23.01.00.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN										Rp. 1.587.721.000,00	Rp. 4.216.860.450,00			
1.23.1.23.01.00.15.001	Pembinaan Perpustakaan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah Perpustakaan yang Terstandar	49unit	1. Bimtek perpustakaan 2. workshop Akreditasi perpustakaan 3. Akreditasi perpustakaan 4. Aplikasi Penilaian Akreditasi Perpustakaan 5. Workshop NPP	1. 6 Angkatan 2. 3 kali 3. 15 Perpustakaan 4. 1 Paket 5. 2 Kali	Dukungan 26% terhadap jumlah perpustakaan terstandar	100 %	Rp. 442.805.000,00	Rp. 910.463.400,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan	
1.23.1.23.01.00.15.004	Pemasyarakatan Perpustakaan dan Minat Baca	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Gedang sari Girimulyo Girisubo Inogiri Kokap Lendah Nglipar Pajangan Playen Samigaluh Saptosari Semin Sentolo Tempel Tepus	Jumlah Perpustakaan yang Terstandar	49unit	1. Bedah buku 2. Forum Perpustakaan 3 Lomba minat baca 4. Workshop karya tulis	1. 27 Bedah buku 2. 2 kali 3. 2 kali 4. 2 kali	Dukungan 74% terhadap jumlah perpustakaan terstandar	100%	Rp. 1.144.916.000,00	Rp. 3.306.397.050,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan	
1.23.1.23.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN INFORMASI										Rp. 1.373.657.000,00	Rp. 4.527.362.675,00			
1.23.1.23.01.00.16.001	Pelestarian Bahan Pustaka	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Penambahan Jumlah Koleksi dan Pengembangan Informasi Perpustakaan	10174eksemplar	03. alih media 04. Termit Control 05. Alih Bahasa dari Bahasa Jawa ke Bahasa Indonesia 06. Alih Bahasa dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia 07. perbaikan buku rusak	03. 30.000 lembar 04. 2.250 m2 05. 1.200 lembar 06. 300 lembar 07. 2.000 eks	Dukungan 34,07% terhadap Penambahan jumlah koleksi dan pengembangan informasi perpustakaan	100%	Rp. 467.993.000,00	Rp. 1.777.362.675,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah										Jumlah Pagu : Rp. 28.934.240.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.23.1.23.01.00.16.002	Pengelolaan Bahan Pustaka dan Pengembangan Koleksi	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Penambahan Jumlah Koleksi dan Pengembangan Informasi Perpustakaan	10174eksemplar	01. Pengolahan Bahan Pustaka	01. 7.500 eks	Dukungan 65,93% terhadap Penambahan jumlah koleksi dan pengembangan informasi perpustakaan	100 %	Rp. 905.664.000,00	Rp. 2.750.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							02. Pengadaan Bahan pustaka	02. 500 judul						
							03. Pengadaan e-book	03. 1.000 judul						
							04. Pengolahan E-Deposit	04. 1 paket						
							05. pemantauan penerbit dan pengusaha rekaman	05. 200 Penerbit						
							06. Penelusuran dan Abstraksi Budaya Timur	06. 1 Terbitan						
							07. Bahan pustaka KCKR	07. 3.000 judul						
							08. Penyusunan bibliografi daerah	08. 1 terbitan						
							09. Penyusunan accession list	09. 1 terbitan						
							10. Penyusunan katalog induk daerah	10. 1 terbitan						
1.23.1.23.01.00.17	PROGRAM LAYANAN PERPUSTAKAAN										Rp. 4.611.897.000,00	Rp. 6.000.000.000,00		
1.23.1.23.01.00.17.002	Layanan Perpustakaan Menetap	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah Anggota Baru Perpustakaan	6000Orang	1. Layanan Menetap	1. 3 Lokasi	Dukungan 80,83% terhadap peningkatan Jumlah pengunjung atau pemustaka sebesar 6000 orang dan penambahan 1 perpustakaan anggota JLA yang menindaklanjuti kerjasama	100%	Rp. 3.727.917.000,00	Rp. 4.000.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
					Meningkatnya kualitas layanan JLA	6perpustakaan	2. Telaah Pustaka Budaya Jawa	2. 8 kali						
							3. Peningkatan Kreativitas, Library Trip, Wisata Pustaka, Bimbingan Pemustaka	3. 63 kali						
1.23.1.23.01.00.17.003	Layanan Perpustakaan Ekstensi	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah Anggota Baru Perpustakaan	6000Orang	1. Layanan JLA	1. Penambahan 1 Perpustakaan kerjasama silang layan	Dukungan 19,17% terhadap peningkatan Jumlah pengunjung atau pemustaka sebesar 6000 orang dan penambahan 1 perpustakaan anggota JLA yang menindaklanjuti kerjasama	100%	Rp. 883.980.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
					Meningkatnya kualitas layanan JLA	6perpustakaan	2. Layanan Keilling	2. 18 Lokasi						
							3. Layanan Pojok Baca	3. 10 Lokasi						
							4. Layanan Delivery Order	4. 400 Transaksi Peminjaman						
							5. Layanan Paket Buku	5. 18 Lokasi						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 28.934.240.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							6. Layanan Mendongeng	6. 12 kali							
1.24	KEARSIPAN														
1.24.1.23.01.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah														
1.24.1.23.01.00.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN										Rp. 694.842.000,00	Rp. 1.898.379.450,00			
1.24.1.23.01.00.16.001	Pengelolaan Arsip	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Peningkatan Jumlah SKPD yang Melakukan Pengelolaan Arsip Sesuai Standar	900PD/UPTD	1. Jumlah Arsip yang dinilai dan disusutkan	1. 16.000 berkas	Dukungan 74.81% terhadap jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan arsip sesuai standar	100 %	Rp. 519.822.000,00	Rp. 1.050.039.100,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan	
							2. Pengolahan arsip inaktif	2. 2.500 berkas							
							3. Pengolahan arsip Statis	3. 15 meter linier (4.200 berkas)							
							4. Penyusunan Inventaris Arsip	4. 1 daftar							
							5. Penelusuran arsip Jogja Sebelum Tahun 1950	5. 1 tema							
1.24.1.23.01.00.16.003	Pembinaan Kearsipan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Peningkatan Jumlah SKPD yang Melakukan Pengelolaan Arsip Sesuai Standar	900PD/UPTD	1. Pembinaan kearsipan OPD-UPTD	1. 87 Instansi	Dukungan 25.19% terhadap jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan arsip sesuai standar	100 %	Rp. 175.020.000,00	Rp. 848.340.350,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan	
							2. bimtek pengelola kearsipan	2. 80 Orang							
							3. pembinaan kearsipan LKD	3. 5 LKD							
							4. Pengawasan Internal Kearsipan	4. 3 Instansi							
							5. Penyusunan Pergub (Pengelolaan Arsip Statis)	5. 1 Draf							
1.24.1.23.01.00.17	PROGRAM PELESTARIAN DAN LAYANAN ARSIP										Rp. 734.802.000,00	Rp. 2.652.488.520,00			
1.24.1.23.01.00.17.001	Pelestarian Arsip	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	8000Berkas	1. Terdokumentasinya arsip tekstual	1. 40.000 data	Dukungan 35,29% terhadap Jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	100 %	Rp. 259.334.000,00	Rp. 1.222.488.520,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan	
							2. Terdokumentasinya arsip foto	2. 500 foto							
1.24.1.23.01.00.17.003	Layanan Kearsipan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	8000Berkas	1. Layanan arsip statis	1. 1.100 pengguna	Dukungan 64,71% terhadap Jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan	100 %	Rp. 475.468.000,00	Rp. 1.430.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan	
							2. Pengembangan Software Layanan	2. 1 paket aplikasi							
							3. Verifikasi data layanan arsip	3. 1 laporan							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 28.934.240.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							4. Entri data SIKS dan JIKN	4. 1 paket						
							5. Penyusunan Buku guide Arsip	5. 1 tema						
							6. Penyusunan Naskah Sumber Arsip	6. 1 tema						
							7. Pembuatan profil depo arsip	7. 1 buah						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan											Jumlah Pagu : Rp. 16.540.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Pilihan													
2.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN													
2.01.2.01.01.00	Dinas Kelautan dan Perikanan													
2.01.2.01.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 4.177.340.000,00	Rp. 4.649.500.000,00		
2.01.2.01.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	alat listrik dan elektronik	12 jenis	dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.954.000.000,00	Rp. 2.185.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							alat tulis kantor	50 jenis						
							Barang cetakan	16 jenis						
							Belanja pengadaan dan penjilidan	61500 lembar dan 220 eks						
							Pembayaran air bersih	12 bulan						
							pembayaran jasa kebersihan kantor	4 lokasi						
							pembayaran retribusi sampah	12 bulan						
							Pembayaran tagihan listrik	12 bulan						
							pembayaran tagihan telepon	12 bulan						
							pengiriman dokumen	12 bulan						
							peralatan kebersihan dan bahan pembersih	22 jenis						
							perangko, materai, dan benda pos	2 jenis						
							perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas roda 2	36 unit						
							perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas roda 3	4 unit						
							perawatan kendaraan bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas roda 4	21 unit						
							surat kabar dan majalah	12 jenis						
							Surat keluar	2290 buah						
							Surat masuk	1024 buah						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan												Jumlah Pagu : Rp. 16.540.000.000,00			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indikator Kinerja						(12)	(13)	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				(14)	(15)	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					OPD
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	1/2/3	1/2/3								
2.01.2.01.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Belanja Iuran BPJS PTT (INDUK)	12 bulan	dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.515.810.000,00	Rp. 2.092.500.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
							Bukti pembayaran jasa keamanan kantor	38 orang							
							Bukti pembayaran jasa pengelola arsip	3 orang							
							Bukti Pembayaran Jasa Pengelola Keuangan/Barang/Kepegawaian	36 orang							
							Honorarium PTT SK Gub (INDUK)	1 orang							
2.01.2.01.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	koordinasi dan konsultan luar daerah	12 bulan	dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 707.530.000,00	Rp. 372.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
							koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan							
							makanan dan minuman rapat	6820 OS							
2.01.2.01.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 2.031.744.000,00	Rp. 5.900.000.000,00			
2.01.2.01.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rehab kamar rmandi Dinas	1 paket	dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD	100%	Rp. 315.477.000,00	Rp. 2.950.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
							Rehab kolam BAT Sendangsari	3 unit							
							Rehab rumah genset	1 unit							
							sumur pantek BAP congot (BPTPB)	4 unit							
							Sumur pantek BAT Sendangsari	2 unit							
2.01.2.01.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pengadaan komputer	2 unit	dukungan 20% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 495.540.000,00	Rp. 1.298.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
							Pengadaan mebeleur	4 jenis							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 16.540.000.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
													1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Peralatan kantor	3 jenis							
							Perlengkapan kantor	6 jenis							
2.01.2.01.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	pemeliharaan paving blok	50 meter2	dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 310.575.000,00	Rp. 472.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
							pemeliharaan saluran air di lingkungan kantor	29 meter							
							pemeliharaan talang air	1 unit							
							Pengecatan dan perbaikan pintu kantor	10 buah							
							pengecatan dinding	2100 m2							
							pengecatan dinding pagar dan pembatas taman	300 meter persegi							
							pengecatan jendela kantor	20 buah							
							pengecatan pintu besi gerbang dan sekeliling	1 paket							
							perbaikan selokan	1300 m							
							tambah daya listrik	3 unit							
2.01.2.01.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	kendaraan roda 2 terpelihara	33 unit	dukungan 20% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 779.012.000,00	Rp. 885.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
							kendaraan roda 3	4 unit							
							kendaraan roda 4	21 unit							
2.01.2.01.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	peralatan kantor terpelihara	13 jenis	dukungan 20% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 131.140.000,00	Rp. 295.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
							perlengkapan kantor terpelihara	5 jenis							
2.01.2.01.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 158.680.000,00	Rp. 550.000.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan												Jumlah Pagu : Rp. 16.540.000.000,00			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indikator Kinerja						(12)	(13)	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				(14)	(15)	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					OPD
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	1/2/3	1/2/3								
2.01.2.01.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, IKU) paling lambat akhir Februari 2020	nilai LKJIP A dari 83,10 menjadi 84,00	dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 11.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
2.01.2.01.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 26 kegiatan	Laporan Keuangan OPD dengan deviasi 1%	dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian dan kinerja dan program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 32.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
2.01.2.01.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	data produksi perikanan dan kelautan	1 tahun	dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 75.840.000,00	Rp. 412.500.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
							forum perencanaan OPD	1 Kali							
							ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	5 dokumen							
2.01.2.01.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 26 kegiatan	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran 100%	dukungan 25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 45.840.000,00	Rp. 71.500.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
2.01.2.01.01.00.16	PROGRAM PENGELOLAAN PELABUHAN										Rp. 356.200.000,00	Rp. 700.000.000,00			
2.01.2.01.01.00.16.003	Pelayanan Pelabuhan Perikanan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Girisubo Songbanyu	Nilai Produksi Ikan yang Masuk Melalui Pelabuhan / Tempat Pelelangan Ikan	34,78milyar rupiah	Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap yang memanfaatkan pelayanan jasa kepelabuhan (PPP)	60 orang	dukungan 50% thd target peningkatan nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan / tempat pelelangan ikan sebesar Rp. 1,47 M dari tahun 2019 sebesar Rp. 33,31 M menjadi sebesar Rp. 34,78 M pada tahun 2020	100%	Rp. 225.000.000,00	Rp. 315.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
							Review Masterplan PPP Sadeng	1 dokumen							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pagu : Rp. 16.540.000.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.01.2.01.01.00.16.004	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Girisubo Songbanyu	Nilai Produksi Ikan yang Masuk Melalui Pelabuhan / Tempat Pelelangan Ikan	34.78milyar rupiah	Jumlah nelayan yang beroperasi sesuai rekomendasi pada SOP perizinan dan keselamatan pelayaran (PPP)	50 orang	dukungan 50% thd target peningkatan nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan / tempat pelelangan ikan sebesar Rp. 1,47 M dari tahun 2019 sebesar Rp. 33,31 M menjadi sebesar Rp. 34,78 M pada tahun 2020	100%	Rp. 131.200.000,00	Rp. 385.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan		
							Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap yang melaksanakan kegiatan sesuai SOP pengelolaan pelabuhan (PPP)	60 orang								
							Kajian Penyusunan Koordinat Wilayah Kerja Daratan dan Wilayah Kerja Perairan PPP	1 dokumen								
2.01.2.01.01.00.17	PROGRAM KONSERVASI EKOSISTEM DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN										Rp. 716.970.000,00	Rp. 1.926.000.000,00				
2.01.2.01.01.00.17.003	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase Kawasan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	14%	Jumlah Pengawasan Mutu Produk Perikanan	20 kali	dukungan 35% terhadap Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 14% (50 titik yang direhabilitasi dari total 350 titik) serta Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 10%	100%	Rp. 248.240.000,00	Rp. 630.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan		
					Persentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	10%	Jumlah Pengawasan terpadu di laut	4 kali								
							Jumlah Pengawasan terpadu di Perairan Umum Daratan	20 kali								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan											Jumlah Pagu : Rp. 16.540.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.01.2.01.01.00.17.004	Gerakan Konservasi ekosistem kelautan dan perikanan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase Kawasan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	14%	jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	100 orang	dukungan 15% terhadap Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 14% (50 titik yang direhabilitasi dari total 350 titik) serta Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 10%	100%	Rp. 132.970.000,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
					Persentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	10%								
2.01.2.01.01.00.17.005	Restocking Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase Kawasan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	14%	Populasi Sumberdaya kelautan dan perikanan bertambah	570000 ekor	dukungan 15% terhadap Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 14% (50 titik yang direhabilitasi dari total 350 titik) serta Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 10%	100 %	Rp. 159.440.000,00	Rp. 396.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
					Persentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	10%								
2.01.2.01.01.00.17.006	Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase Kawasan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	14%	jumlah dokumen perencanaan kawasan konservasi	1 dokumen	dukungan 35% terhadap Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 14% (50 titik yang direhabilitasi dari total 350 titik) serta Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 10%	100%	Rp. 176.320.000,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan														Jumlah Pagu : Rp. 16.540.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
					Persentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	10%											
2.01.2.01.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP										Rp. 2.224.420.000,00	Rp. 4.750.000.000,00					
2.01.2.01.01.00.18.003	Pelatihan Teknis Perikanan Tangkap	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap	6481ton	Jumlah nelayan baru	15 orang	kontribusi 60% terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 382 ton dari tahun 2018 sebesar 5.817 ton menjadi 6.199 ton pada tahun 2019	100%	Rp. 1.716.500.000,00	Rp. 2.850.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan			
							Jumlah nelayan memiliki sertifikat BST/ketrampilan simulasi radar/penggunaan alat penangkapan ikan ramah lingkungan/perbaikan dan perawatan mesin/laminasi PMT	30 orang									
							produksi kelompok nelayan	48 ton									
2.01.2.01.01.00.18.005	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Tangkap	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap	6481ton	Jumlah dokumen kerjasama kemitraan perikanan tangkap	2 dokumen	kontribusi 40% terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 282 ton dari tahun 2019 sebesar 6.199 ton menjadi 6.481 ton pada tahun 2020	100%	Rp. 507.920.000,00	Rp. 1.900.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan			
							Jumlah Kapal yang melengkapi perizinan secara OSS (Online Single Submission)	4 kapal									
							Jumlah Kapal yang memiliki Buku Kapal	4 kapal									
							jumlah kelompok usaha bersama yang mengalami peningkatan pendapatan	2 kelompok									
2.01.2.01.01.00.19	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN DAN PRODUKSI PERIKANAN										Rp. 1.675.940.000,00	Rp. 2.200.000.000,00					

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan											Jumlah Pagu : Rp. 16.540.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.01.2.01.01.00.19.001	Pengolahan Hasil Perikanan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tingkat konsumsi ikan masyarakat	25.21kg/kapita/tahun	jumlah orang yang memiliki kemampuan mengolah ikan yang berkualitas	750 orang	Dukungan 62% untuk peningkatan tingkat konsumsi makan ikan sebesar 0,66 kg/kapita/tahun dari tahun 2019 sebesar 24,55 kg/kapita/tahun menjadi 25,21 kg/kapita/tahun pada tahun 2020)	100%	Rp. 815.180.000,00	Rp. 1.364.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							jumlah rekomendasi Unit Pengolah Ikan yang akan diajukan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)	5 rekomendasi						
							persentase hasil perikanan yang memenuhi standar mutu	75%						
							produksi perikanan olahan dari kelompok madya	5,76 ton						
							produksi perikanan olahan dari kelompok pemula	0,5 ton						
2.01.2.01.01.00.19.002	Pemasaran Hasil Perikanan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tingkat konsumsi ikan masyarakat	25.21kg/kapita/tahun	jumlah masyarakat yang memahami manfaat makan ikan	2600 orang	Dukungan 38% untuk peningkatan tingkat konsumsi makan ikan sebesar 0,66 kg/kapita/tahun dari tahun 2019 sebesar 24,55 kg/kapita/tahun menjadi 25,21 kg/kapita/tahun pada tahun 2020)	100%	Rp. 860.760.000,00	Rp. 836.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							jumlah pelaku usaha yang meningkat omsetnya	10 orang/kelompok						
							Persentase penjualan produk olahan	90 %						
2.01.2.01.01.00.20	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA										Rp. 1.741.120.000,00	Rp. 3.200.000.000,00		
2.01.2.01.01.00.20.004	Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	89500ton	Jumlah unit budidaya/kelompok yang direkomendasikan untuk sertifikasi CPiB dan CBiB	10 unit pembudidaya/kelompok	Kontribusi 50% terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 100 ton dari tahun 2019 sebesar 89.400 ton menjadi 89.500 ton pada tahun 2020 (terdiri dari udang galah: 80 ton; nila: 25.550 ton; mas: 200 ton; gurami:12.800 ton; udang vaname: 3.00	100%	Rp. 880.560.000,00	Rp. 1.280.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan
							produksi perikanan budidaya dari kelompok pemula	40 ton						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan												Jumlah Pagu : Rp. 16.540.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.01.2.01.01.00.20.005	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Budidaya	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	89500ton	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha perikanan Budidaya (antar UPR dengan Pembudidaya)	2 dokumen	Kontribusi 50% terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 100 ton dari tahun 2019 sebesar 89.400 ton menjadi 89.500 ton pada tahun 2020 (terdiri dari udang galah: 80 ton; nila: 25.550 ton; mas: 200 ton; gurami:12.800 ton; udang vaname: 3.00	100%	Rp. 860.560.000,00	Rp. 1.920.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
							Produksi perikanan budidaya, dari kelompok madya	60 ton							
2.01.2.01.01.00.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERIKANAN BUDIDAYA										Rp. 3.457.586.000,00	Rp. 3.600.000.000,00			
2.01.2.01.01.00.21.001	Pelayanan Pengendalian Penyakit Ikan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Cangkringan	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi	86%	Rekomendasi Hasil Uji Hama dan Penyakit Ikan	150 sampel	"Dukungan 25% Terhadap Prosentase benih perikanan budidaya bersertifikat terdistribusi 86 % (terdiri dari benih nila 550 jt Ekor, benih lele 295 jt Ekor, benih ikan mas 12 jt Ekor, udang galah 6jt Ekor)"	100%	Rp. 220.000.000,00	Rp. 360.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
2.01.2.01.01.00.21.002	Perbanyak Induk, Benih Unggul dan Teknologi Perikanan Budidaya	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Cangkringan Argo Mulyo	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi	86%	benih ikan dan Udang	4.489.959 ekor terdiri dari: nilasa: 612.771 ekor, mas najawa: 13.508 ekor, lele: 462.604 ekor, gurami: 618.420 ekor, tawes: 925.962 ekor, bandeng: 316.000 ekor, udang galah: 1.540.694 ekor	dukungan 75% terhadap prosentase benih ikan perikanan budidaya bersertifikat terdistribusi 86% (terdiri dari benih nila 540 juts ekor, benih lele ikan mas 12 juta ekor, udang galah 6 juta ekor)	100%	Rp. 3.237.586.000,00	Rp. 3.240.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sedang Berjalan	
							calon induk ikan	5,257 kg terdiri dari: nilasa: 3.200 kg, mas najawa: 157 kg, lele: 1.650 kg, gurami:250 kg							
							petunjuk teknis perikanan budidaya	2 petunjuk teknis							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 11.925.000.000,00			
Nomor	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Pilihan													
2.02	PARIWISATA													
2.02.2.02.01.00	Dinas Pariwisata													
2.02.2.02.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.360.548.000,00	Rp. 0,00		
2.02.2.02.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata DIY	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Alat tulis kantor	50 Jenis	Dukungan 18.28% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 431.530.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							Barang cetakan	9 unit/buku						
							Bukti Pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas / operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu	6 unit roda dua dan 7 unit roda 4						
							Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan						
							Jasa KIR	2 kali						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25 jenis						
							Majalah dan Surat Kabar	5 jenis						
							Pembayaran tagihan rekening air 1 unit	12 bulan						
							Pembayaran tagihan rekening listrik 6.000 kwh	12 bulan						
							Pembayaran tagihan rekening telepon 6 sambungan	12 bulan						
							Pengelolaan arsip dinamis SKPD	1 tahun						
							Penggandaan	80.000 lembar						
							Pengiriman Dokumen	27 Dokumen						
							Penyusutan arsip	10.000 arsip						
							Peralatan Rumah Tangga	28 jenis						
							Surat Kabar	27.500 surat						
							Surat Masuk	15.000 surat						
2.02.2.02.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata DIY	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Bukti pembayaran honorarium fasilitator sarana & prasarana	1 org/bulan	Dukungan 21.14 % terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 499.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian	1 org/bln						
							Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan	9 org/bln						
							Bukti pembayaran honorarium pengemudi	2 org/bulan						
							Bukti pembayaran honorarium petugas kearsipan	3 org/bulan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 11.925.000.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Bukti pembayaran petugas administrasi dan dokumentasi	3 org/bulan							
							Jasa keamanan kantor/tempat kerja	12 bulan							
2.02.2.02.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata DIY	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan60.58% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.430.018.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan	
							2. Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun							
							3. Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun							
							4. Makan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	3333 orang							
2.02.2.02.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 676.288.000,00	Rp. 0,00			
2.02.2.02.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata DIY	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peralatan kantor	3 jenis	Dukungan 14.93% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 101.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan	
							Perlengkapan kantor	5 jenis							
							Ruang Laktasi	1 paket							
2.02.2.02.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata DIY	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Gedung Kantor & Taman	1 paket	Dukungan 39.11% terhadap sarpras aparatur yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 264.474.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan	
2.02.2.02.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata DIY	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 sesuai RKPMD	12 unit	Dukungan 35.85% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 242.459.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan	
							Mesin Generator (Genset)	3 unit							
2.02.2.02.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata DIY	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Mebeleur terpelihara	2 jenis	Dukungan 10,11% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 68.355.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan	
							Peralatan gedung kantor terpelihara	8 jenis							
							Perlengkapan gedung kantor terpelihara	3 jenis							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 11.925.000.000,00				
Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.02.2.02.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 90.000.000,00	Rp. 0,00			
2.02.2.02.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata DIY	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian Kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP dari semula 80 (A) menjadi 82 (AA)	Dukungan 5.56 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan	
2.02.2.02.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata DIY	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 7%	Dukungan 11.11 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan	
2.02.2.02.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata DIY	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1.ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan TA 2020	Dukungan 55.56 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan	
2.02.2.02.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata DIY	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan anggaran dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 27.78 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 25.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan	
2.02.2.02.01.00.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA										Rp. 2.215.762.000,00	Rp. 0,00			
2.02.2.02.01.00.15.001	Promosi Pariwisata	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Lokasi luar DIY dan dalam DIY	Jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	6542327Orang	1. Jumlah kontrak bisnis yang dihasilkan dari Jogja International Travel Mart	120 transaksi bisnis	Dukungan sebesar 60% (369.659 orang wisatawan) terhadap terwujudnya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 10,40% (616.099 orang wisatawan) semula 5.926.228 orang wisatawan menjadi 6.542.327 orang wisatawan	100%	Rp. 992.602.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan	
							2. Jumlah ulasan destinasi wisata dari Familiarization Tour 1 Tahun tamu dari Kemenlu, Kemenpar, KBRI, Kantor Perwakilan, Asosiasi pariwisata di luar negeri	30 ulasan yang terpublikasikan							
							3. Kajian analisa belanja wisatawan mancanegara dan nusantara tahun 2020	1 dokumen							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 11.925.000.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							4. Dokumen Statistik Pariwisata DIY 2020	1 dokumen							
							5. Jumlah kontrak kerjasama dengan negara anggota EATOF yang dihasilkan dari event EATOF	3 kontrak kerjasama							
2.02.2.02.01.00.15.003	Pelayanan Informasi Pariwisata	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Lokasi di DIY dan di luar DIY	Jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	6542327Orang	1. Jumlah 10 jenis bahan promosi pariwisata (balihlo, spanduk, x-banner, peta wisata, booklet, brosur kuliner, calendar event, tabloid pariwisata) yang didistribusikan dan menjadi acuan kunjungan wisatawan	34.000 eksemplar	Dukungan sebesar 40% (246.440 orang wisatawan) terhadap terwujudnya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 10,40% (616.099 orang wisatawan) semula 5.926.228 orang wisatawan menjadi 6.542.327 orang wisatawan	100%	Rp. 1.223.160.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan	
							2. Jumlah wisatawan yang menggunakan jasa Pelayanan Informasi Wisata di 4 lokasi (TIS di Bandara dan Stasiun, TIC di Malioboro dan Bali)	15.500 orang wisatawan							
							3. Pengembangan dan pengelolaan website visitingjogja.com 1 tahun; dengan pengunjung website sebanyak 2.200 org/hari	520.000 pengunjung							
2.02.2.02.01.00.16	PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA										Rp. 1.672.622.000,00	Rp. 0,00			
2.02.2.02.01.00.16.002	Pelatihan dan Serifikasi SDM Pariwisata	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Lokasi di dalam DIY	Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata	19.61%	1. Jumlah pelaku wisata yang memenuhi standar mutu SDM dan Kelembagaan Pariwisata	150 orang	Dukungan 50% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pelaku pariwisata dari tahun 2019 ke 2020 semula 17% menjadi 19.61%	100%	Rp. 438.182.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan	
							2. Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi pada tahun 2020	150 orang							
2.02.2.02.01.00.16.003	Pelatihan dan Kemitraan Kelembagaan Pelaku Pariwisata	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	5 Kabupaten/kota di DIY	Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata	19.61%	1. Jumlah desa wisata yang dibina agar naik kelas pada tahun 2020	7 desa wisata yang naik kelas	Dukungan 50% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pelaku pariwisata dari tahun 2019 ke 2020 semula 17% menjadi 19.61%	100%	Rp. 1.234.440.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan	
							2. Jumlah kemitraan yang dilakukan antara desa wisata dengan Hotel	5 kemitraan							
							3. Jumlah pokdarwis yang meningkat kapasitasnya melalui Lomba desa/kampung wisata, pokdarwis dan homestay pada tahun 2020	20 pokdarwis							
							4. Jumlah peserta sosialisasi sadar wisata yang meningkat pemahamannya	1000 orang							
2.02.2.02.01.00.17	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA										Rp. 409.780.000,00	Rp. 0,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 11.925.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.02.2.02.01.00.17.002	Pengawasan Industri Pariwisata	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	5 kabupaten/kota di DIY	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	150UJP	Jumlah UJP yang diawasi pada tahun 2020 sebanyak 8 UJP (36 usaha)	8 UJP (36 usaha)	Dukungan 40% terhadap terwujudnya peningkatan jumlah usaha jasa pariwisata yang bersertifikasi dari tahun 2019 ke 2020 semula 100 UJP menjadi 150 UJP atau meningkat sebanyak 50 UJP	100%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.00.17.003	Pelatihan dan Sertifikasi Industri Pariwisata	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	5 kabupaten/kota di DIY	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	150UJP	1. Jumlah UJP yang meningkat kemampuannya setelah mengikuti Bimbingan Teknis	6 UJP @ 40 peserta	Dukungan 60% terhadap terwujudnya peningkatan jumlah usaha jasa pariwisata yang bersertifikasi dari tahun 2019 ke 2020 semula 100 UJP menjadi 150 UJP atau meningkat sebanyak 50 UJP	100%	Rp. 309.780.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi pada tahun 2020	4 UJP terdiri dari 19 usaha						
2.02.2.02.01.00.18	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA										Rp. 4.500.000.000,00	Rp. 0,00		
2.02.2.02.01.00.18.001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	4 Kabupaten di DIY	LOS Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun n	2.22LOS	1. Masterplan Pengembangan Wisata di Nglipar - Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul	1 dokumen	Dukungan 60% (0,048 hari) terhadap terwujudnya peningkatan Lama Tinggal (LOS) Wisatawan Nusantara dan Mancanegara dari tahun 2019 ke 2020 sebesar (0,08 hari) semula 2.14 hari menjadi 2.22 hari	100%	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Jumlah pembangunan akses pendukung pariwisata ([1]Kecamatan Girimulyo (Jatimulyo), Kabupaten Kulon Progo, [2]Kecamatan Playen (Banyusoco) Kabupaten Gunungkidul	2 obyek / desa wisata						
							3. Jumlah sarana dan prasarana utama pariwisata, [1] Fasilitas Surfing di Pantai Wediombo di Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, [2] Daya Tarik Wisata Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul,[3] Desa Wisata di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, [4] Kecamatan Samigaluh (Pagerharjo), Kabupaten Kulon Progo, [5] di Kecamatan Semanu (Telaga Jonge - Pacarejo), Kabupaten Gunungkidul, [6] Sriten- Kecamatan Nglipar (Pilangrejo), Kabupaten Gunungkidul.	6 lokasi obyek wisata/desa wisata						
2.02.2.02.01.00.18.003	Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	5 kabupaten/kota di DIY	LOS Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun n	2.22LOS	1. Jumlah event pariwisata internasional (Jogja Air Show)	1 event	Dukungan 40% (0,032 hari) terhadap terwujudnya peningkatan Lama Tinggal (LOS) Wisatawan Nusantara dan Mancanegara dari tahun 2019 ke 2020 (0,08 hari) semula 2.14 hari menjadi 2.22 hari	100%	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Jumlah event pariwisata nasional (Perahu Naga)	1 event						
							3. Jumlah event pariwisata lokal (Pawai & Pameran Pembangunan, Penyelenggaraan Atraksi Kesenian Di DTW-5 titik di 5 kab/kota)	7 event						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan												Jumlah Pagu : Rp. 26.300.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Wajib														
1.09	PANGAN														
1.09.1.09.01.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan														
1.09.1.09.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 4.463.916.000,00	Rp. 5.149.200.000,00			
1.09.1.09.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa kebersihan kantor • ATK • Barang cetakan penggandaan dan penjilidan • Jasa KIR, STNK kendaraan roda 2 (174 unit), roda 4 (25 unit), dan roda 6 (1 unit) • Jasa pembayaran telepon, listrik dan internet • Komponen instalasi listrik • Majalah • Pengelolaan naskah dinas • Peralatan rumah tangga perkantoran • Retribusi sampah • Surat kabar • Surat keluar • Surat masuk 	1 tahun	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran fungsi dan tugas SKPD	100%	Rp. 1.313.216.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
1.09.1.09.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	<ul style="list-style-type: none"> Honor pengelola keuangan, pengelola barang dan pengelola kepegawaian Honor penjaga keamanan kantor Honorarium PTT 	27 orang/bulan 1 tahun 29 orang/bulan	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran fungsi dan tugas SKPD	100%	Rp. 1.938.514.000,00	Rp. 2.132.400.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
1.09.1.09.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	<ul style="list-style-type: none"> Konsultasi dan koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam daerah terlaksana dengan baik 	INDUK 1 tahun, - Gol IV, 92 kali - Gol III, 92 kali - Gol II, 92 kali BPPTDK 1 tahun, - Gol IV, 8 kali - Gol III, 8 kali - Gol II, 7 kali	Dukungan 33,33% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.212.186.000,00	Rp. 1.816.800.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan												Jumlah Pagu : Rp. 26.300.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Konsultasi dan koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam dan luar Jawa terlaksana dengan baik	INDUK 1 tahun, - Eselon II, 9 kali - Eselon III (Induk 3 kali, UPTD BPTP 1 kali, UPTD BPSDMP 1 kali) - Eselon IV (Induk 1 kali, UPTD BPTP 1 kali, UPTD BPSDMP 1 kali) - Gol III (Induk 1 kali, UPTD BPSDMP 1 kali) BPPTDK 1 tahun - Gol IV, 2 kali - Gol III, 8							
							Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	INDUK 1 tahun, 80 kali BPPTDK 1 tahun, 15 kali							
1.09.1.09.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 3.915.000.000,00	Rp. 4.427.230.000,00			
1.09.1.09.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rehab gedung A	1 paket	Dukungan 12,5% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 2.475.000.000,00	Rp. 2.250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
							Rehab gedung C	1 paket							
							Rehab kamar mandi asrama UPTD BPSDMP	1 paket							
							rehab kandang sapi UPTD BPTDK	1 paket							
1.09.1.09.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pengadaan jaringan LAN	1 paket	Dukungan 12,5% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 115.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
							Pengadaan Komputer PC	2 unit							
							Pengadaan Printer	2 unit							
							Pengadaan water heater (UPTD BPSDMP)	19 unit							
1.09.1.09.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan jaringan listrik (UPTD BPSDMP)	1 paket	Dukungan 12,5% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 433.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
							Pengecatan pagar kantor induk	1 paket							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											Jumlah Pagu : Rp. 26.300.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.09.1.09.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan berkala kendaraan dinas roda 2, roda 4, dan roda 6 1 tahun	199 unit	Dukungan 12,5% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.309.230.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
1.09.1.09.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan berkala komputer, laptop, mesin tik, AC, dan genset	5 jenis	Dukungan 12,5% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 175.000.000,00	Rp. 185.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
1.09.1.09.01.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 25.000.000,00	Rp. 40.000.000,00		
1.09.1.09.01.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional	1 tahun	Dukungan sebesar 100% terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 25.000.000,00	Rp. 40.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
1.09.1.09.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 87.256.000,00	Rp. 104.500.000,00		
1.09.1.09.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2020	Nilai LAKIP : A dari 82menjadi 82,20	Dukungan 20% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 2.941.000,00	Rp. 3.500.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
1.09.1.09.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 1%	Dukungan 20% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 12.000.000,00	Rp. 14.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah Pagu : Rp. 26.300.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur					Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.09.1.09.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Forum OPD	1 kali	Dukungan 40 % terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 54.500.000,00	Rp. 62.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
1.09.1.09.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	RKT, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku 1 tahun	Dokumen perencanaan SKPD TA.2021 dan perubahan TA. 2020	Dukungan 20% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 17.815.000,00	Rp. 25.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
1.09.1.09.01.00.17	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN										Rp. 1.024.960.000,00	Rp. 2.500.000.000,00		
1.09.1.09.01.00.17.004	Penyediaan Cadangan Pangan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0.08%	Laporan ketersediaan pangan berdasarkan prognosa, ARAM I, ARAM II, HBKN (Menjelang Pusa, Idul Fitri, Natal/Tahun Baru)	6 dokumen	Dukungan 25% terhadap persentase peningkatan ketersediaan energi dan konsumsi energi 0,08 % terdiri dari ketersediaan energi dari 3.732,2 kkal/kap/hari pada th 2019 menjadi 3.734,8 kkal/kap/hari pada th 2020 (0,07%) dan konsumsi energi dari 2.196,6 kkal	100%	Rp. 210.200.000,00	Rp. 825.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Masyarakat	10 ton						
1.09.1.09.01.00.17.005	Distribusi Pangan Masyarakat	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0.08%	Operasional TTIC	1 tahun	Dukungan 25% terhadap persentase peningkatan ketersediaan energi dan konsumsi energi 0,08 % terdiri dari ketersediaan energi dari 3.732,2 kkal/kap/hari pada th 2019 menjadi 3.734,8 kkal/kap/hari pada th 2020 (0,07%) dan konsumsi energi dari 2.196,6 kkal	100%	Rp. 410.200.000,00	Rp. 750.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Promosi pertanian dan ketahanan pangan	2 kali						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan												Jumlah Pagu : Rp. 26.300.000.000,00			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indikator Kinerja						(12)	(13)	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
1.09.1.09.01.00.17.006	Penyelenggaraan Jogja Benih	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0.08%	Informasi perbenihan dan layanan konsultasi	1 tahun	Dukungan 25% terhadap persentase peningkatan ketersediaan energi dan konsumsi energi 0,08 % terdiri dari ketersediaan energi dari 3.732,2 kkal/kap/hari pada th 2019 menjadi 3.734,8 kkal/kap/hari pada th 2020 (0,07%) dan konsumsi energi dari 2.196,6 kkal	100%	Rp. 180.080.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
							Jaringan pasar perbenihan	1 kali							
1.09.1.09.01.00.17.007	Pengawasan Keamanan Pangan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0.08%	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	95%	Dukungan 25% terhadap persentase peningkatan ketersediaan energi dan konsumsi energi 0,08 % terdiri dari ketersediaan energi dari 3.732,2 kkal/kap/hari pada th 2019 menjadi 3.734,8 kkal/kap/hari pada th 2020 (0,07%) dan konsumsi energi dari 2.196,6 kkal	100%	Rp. 113.600.000,00	Rp. 375.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
							Sertifikasi dan Register PSAT (Pangan Segar Asal Tanaman)	3 dokumen							
1.09.1.09.01.00.17.008	Gerakan Penganekaragaman Pangan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	0.08%	Gerakan penganekaragaman pangan	15 lokasi	Dukungan 25% terhadap persentase peningkatan ketersediaan energi dan konsumsi energi 0,08 % terdiri dari ketersediaan energi dari 3.732,2 kkal/kap/hari pada th 2019 menjadi 3.734,8 kkal/kap/hari pada th 2020 (0,07%) dan konsumsi energi dari 2.196,6 kkal	100%	Rp. 110.880.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
1.09.1.09.01.00.18	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAERAH RAWAN PANGAN										Rp. 439.680.000,00	Rp. 725.000.000,00			
1.09.1.09.01.00.18.004	Penanganan Desa Rawan Pangan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Gedung sari Kokap Pajangan Sedayu Turi Tegaltrejo Hargobirto Kallrejo Guwosari	Jumlah Desa Rawan Pangan	4desa rawan pangan	Desa Mandiri Pangan	Hibah 4 desa Pendampingan 4 desa	Dukungan 75% terhadap terwujudnya target penurunan jumlah desa rawan pangan dari 6 desa pada tahun 2019 menjadi 4 desa pada tahun 2020	100%	Rp. 372.840.000,00	Rp. 650.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
							Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) Penumbuhan	2 gapoktan							
1.09.1.09.01.00.18.005	Analisis Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan	4desa rawan pangan	Laporan analisis situasi pangan dan gizi	1 dokumen	Dukungan 30% terhadap terwujudnya target penurunan jumlah desa rawan pangan dari 6 desa pada tahun 2019 menjadi 4 desa pada tahun 2020	100%	Rp. 66.840.000,00	Rp. 75.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan														Jumlah Pagu : Rp. 26.300.000.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2	Pilihan						Laporan ketahanan dan kerentanan pangan	1 dokumen							
2.03	PERTANIAN														
2.03.1.09.01.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan														
2.03.1.09.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN PENYULUHAN										Rp. 610.477.000,00	Rp. 600.000.000,00			
2.03.1.09.01.00.16.006	Penyelenggaraam Penyuluhan Pertanian	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Sewon	Tingkat pengetahuan dan ketrampilan sdm pertanian	74nilai/skor	PENAS di Padang	51 orang	Dukungan 40% terhadap target peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM pertanian dan perkebunan menjadi 74 nilai/skor	100%	Rp. 186.157.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
							Penilaian Klas Kelompok	1 Dokumen							
							Programa Penyuluhan	1 Tahun							
							Temu Tugas Penyuluh	1 Kali							
2.03.1.09.01.00.16.007	Pelatihan SDM Pertanian	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Sewon	Tingkat pengetahuan dan ketrampilan sdm pertanian	74nilai/skor	Pelatihan bintek pendataan pelaku Usaha PSAT (30 orang x 2 angkatan x 2 hari)	2 angkatan	Terwujudnya dukungan sebesar 60% terhadap target peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM pertanian menjadi 74 nilai/skor	100%	Rp. 424.320.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
							Pelatihan peningkatan kapasitas P4S (non PNS), 30 orang, 2 angkatan	2 angkatan							
							Pelatihan teknis hortikultura bagi petugas (PNS+Non PNS) 30 orang x 2 angkatan	2 angkatan							
							Pelatihan teknis perkebunan bagi petugas (PNS+Non PNS) 30 orang x 1 angkatan	1 angkatan							
							Pelatihan teknis peternakan bagi petugas (PNS+Non PNS) 30 orang x 2 angkatan	2 angkatan							
							Pelatihan teknis tanaman pangan bagi Petugas (PNS+Non PNS) 30 orang x 2 angkatan	2 angkatan							
2.03.1.09.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN										Rp. 6.750.250.000,00	Rp. 1.951.000.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											Jumlah Pagu : Rp. 26.300.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.03.1.09.01.00.18.002	Budidaya Tanaman Pangan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Nanggulan Pakem Sewon Donomulyo Binangun Pendowoharjo	Produksi Tanaman Pangan	2313050ton	Luas lahan yang produktivitasnya meningkat	60 hektar (Pendampingan PTT ubikayu sebanyak 4 unit x 15ha)	Dukungan 97% (sebesar 270 ton) terhadap peningkatan jumlah produksi tanaman pangan dari tahun 2019 sebesar 2.312.780 ton menjadi 2.313.050 ton di tahun 2020 (Padi 880.376, Jagung 311.849, Kedelai 8.656, kacang Tanah 80.907, kacang hijau 301, ubi kayu 1.0	100%	Rp. 687.250.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							sarana pertanian yang dapat dipenuhi	36 unit						
							sarana prasarana lahan air yang dapat berfungsi dengan baik	4 km						
2.03.1.09.01.00.18.005	Operasionalisasi Jogja Agro Techno Park	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Jogja Agro Techno Park	Produksi Tanaman Pangan	2313050ton	Operasional JATP	1 tahun	Dukungan 2% (sebesar 270 ton) terhadap peningkatan jumlah produksi tanaman pangan dari tahun 2019 sebesar 2.312.780 ton menjadi 2.313.050 ton di tahun 2020 (Padi 880.376, Jagung 311.849, Kedelai 8.656, kacang Tanah 80.907, kacang hijau 301, ubi kayu 1.02	100%	Rp. 6.000.000.000,00	Rp. 841.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Pembangunan Fisik JATP	1 paket						
2.03.1.09.01.00.18.006	Standarisasi Mutu Produk Pertanian dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Produksi Tanaman Pangan	2313050ton	Doksistu penerapan organik komoditas tanaman pangan	1 dokumen	Dukungan 1% (sebesar 270 ton) terhadap peningkatan jumlah produksi tanaman pangan dari tahun 2019 sebesar 2.312.780 ton menjadi 2.313.050 ton di tahun 2020 (Padi 880.376, Jagung 311.849, Kedelai 8.656, kacang Tanah 80.907, kacang hijau 301, ubi kayu 1.02	100%	Rp. 63.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Ketersediaan informasi harga komoditas tanaman pangan (beras, jagung, kedelai)	3 komoditas						
2.03.1.09.01.00.19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA										Rp. 678.320.000,00	Rp. 1.150.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											Jumlah Pagu : Rp. 26.300.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.03.1.09.01.00.19.001	Budidaya Tanaman Hortikultura	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Girimulyo Kalibawang Nglipar Patuk Samigaluh	Produksi Hortikultura	399550ton	Luas lahan yang diusahakan untuk budidaya biofarmaka	3 ha	Dukungan 95% terhadap peningkatan produksi tanaman hortikultura dari tahun 2019 sebesar 397.965 ton menjadi 399.550 ton di tahun 2020 meningkat sebesar 1.585 ton (buah dan sayuran tahunan 1.435 ton; Tanaman biofarmaka 150 ton)	100%	Rp. 572.600.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Luas lahan yang diusahakan untuk budidaya hortikultura	176 ha						
							Luas lahan yang diusahakan untuk budidaya stroberi	2 ha						
							Pemeliharaan Obor Pangan Lestari (OPAL)	1 unit						
2.03.1.09.01.00.19.004	Standarisasi Mutu Produk Pertanian dan Pemasaran Hasil Hortikultura	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Produksi Hortikultura	399550ton	Jumlah sertifikat mutu hortikultura	1 dokumen	Dukungan 5% terhadap peningkatan produksi tanaman hortikultura dari tahun 2019 sebesar 397.965 ton menjadi 399.550 ton di tahun 2020 meningkat sebesar 1.585 ton (buah dan sayuran tahunan 1.435 ton; Tanaman biofarmaka 150 ton)	100	Rp. 105.720.000,00	Rp. 150.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Ketersediaan informasi harga komoditas hortikultura (cabe, bawang merah, bawang putih, tomat)	4 komoditas						
2.03.1.09.01.00.20	PROGRAM PENINGKATAN POPULASI PETERNAKAN										Rp. 1.098.500.000,00	Rp. 2.130.000.000,00		
2.03.1.09.01.00.20.003	Budidaya peternakan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	4 Kabupaten dan 1 Kota se-DIY	Populasi Ternak	624874AU (Animal Unit)	Jumlah barang atau sarana prasarana dukungan terhadap optimalisasi reproduksi melalui Inseminasi Buatan (IB) dengan angka Service per Conception (S/C) sebesar 2 kali.	(N2 cair 2000 liter, semen beku 6000 dosis, plastik sheath 6.000 buah dan plastik gloves 6.000 buah)	Dukungan 95% terhadap target peningkatan jumlah produksi ternak dari tahun 2019 sebesar 624.874 AU menjadi 624.874 AU di tahun 2020 meningkat sebesar 2.033 AU	100%	Rp. 558.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							penambahan populasi ternak ayam buras	1.000 ekor						
							Pengembangan pakan komplit ruminansia	12 kelompok						
2.03.1.09.01.00.20.005	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kabupaten/Kota	Populasi Ternak	624874AU (Animal Unit)	Fasilitasi obat dan vaksin	1.250 botol	Dukungan 3% terhadap target peningkatan jumlah produksi ternak dari tahun 2020 sebesar 624.874 AU menjadi 626.885 AU di tahun 2020 meningkat sebesar 2.011 AU	100%	Rp. 456.120.000,00	Rp. 880.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Pengawasan lalu lintas ternak	5 lokasi						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan												Jumlah Pagu : Rp. 26.300.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.03.1.09.01.00.20.006	Pengamanan Produk Pangan Asal Hewan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Populasi Ternak	624874AU (Animal Unit)	Jumlah sertifikat yang dihasilkan pada pelaksanaan audit NKV terhadap unit usaha produk asal hewan yang telah memenuhi persyaratan	1 sertifikat	Dukungan 2% terhadap target peningkatan jumlah produksi ternak dari tahun 2019 sebesar 622.841 AU di tahun 2020 meningkat sebesar 2.033 AU	100%	Rp. 84.380.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
							Ketersediaan informasi harga komoditas peternakan (daging sapi, daging kambing, daging ayam, telur)	4 komoditas							
2.03.1.09.01.00.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN										Rp. 3.984.641.000,00	Rp. 6.050.000.000,00			
2.03.1.09.01.00.21.004	Produksi Bibit Ternak	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab. Bantul	Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi	94%	Produksi HMT rata-rata pertahun untuk ternak di UPTD	824.325 kg/tahun	Dukungan 60 % terhadap persentase jumlah bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi sebesar 92% (jumlah bibit ternak bersertifikat yang dijual dibagi total jumlah bibit ternak siap dijual)	100%	Rp. 3.421.641.000,00	Rp. 4.950.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
							Produksi bibit ternak (ekor) bersertifikat SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit)	50 ekor							
							Produksi semen beku (dosis) yang sesuai SNI	24.000 dosis							
2.03.1.09.01.00.21.005	Pengujian Penyakit Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi	94%	Hasil Uji sampel produk asal hewan, penyakit hewan	400 sampel, 6.300 sampel	Dukungan 40 % terhadap persentase jumlah bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi sebesar 92% (jumlah bibit ternak bersertifikat yang dijual dibagi total jumlah bibit ternak siap dijual)	100%	Rp. 563.000.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
							Pemeliharaan Sertifikat Akreditasi laboratorium	1 paket (2 laboratorium)							
2.03.1.09.01.00.22	PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN										Rp. 307.880.000,00	Rp. 700.000.000,00			
2.03.1.09.01.00.22.003	Pengendalian OPT Tanaman Pertanian	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab. Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, Yogyakarta	Persentase Pertanaman Aman dari Serangan OPT Dan DPI	95%	Berfungsinya laboratorium LPHPT	1 tahun	Dukungan 50 % terhadap Persentase Pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI sebesar 95 % (luas tanaman pertanian aman dari serangan OPT)	100%	Rp. 215.400.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
							Gerakan pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan selama 1 tahun	padi 120 ha, jagung 10 ha, kedelai 5 ha, cabe 3 ha, bawang merah 2 ha, perkebunan 60 ha							
							Pembuatan agens hayati (untuk TPH dan perkebunan)	10 jenis							
							Penerapan PHT pada tembakau	2 unit							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan												Jumlah Pagu : Rp. 26.300.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.03.1.09.01.00.22.004	Penyediaan Data dan Informasi Perlindungan Tanaman Pertanian	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Persentase Pertanaman Aman dari Serangan OPT Dan DPI	95%	Berfungsinya laboratorium LPMT	1 tahun	Dukungan 30 % terhadap Persentase Pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI sebesar 95 % (luas tanaman pertanian aman dari serangan OPT)	100%	Rp. 92.480.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
							Dokumen data, informasi peramalan serangan OPT dan DPI sebagai dasar rekomendasi	67 kecamatan							
							Laporan pengawasan peredaran penggunaan pestisida di tingkat petani	1 dokumen							
							Rekomendasi tingkat residu pada produk	80 rekomendasi							
2.03.1.09.01.00.23	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN										Rp. 909.737.000,00	Rp. 1.550.000.000,00			
2.03.1.09.01.00.23.003	Budidaya Tanaman tembakau (cukai)	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Imogiri Ngawen	Produksi Perkebunan	69015ton	Budidaya tanaman tembakau sesuai GAP	60 orang (18 ha)	Dukungan 15% terhadap target peningkatan produksi perkebunan 138 ton, dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 68.740 ton menjadi 68.877 ton , melalui perbaikan kondisi tanaman di lapangan 94 hektar	100%	Rp. 203.520.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
2.03.1.09.01.00.23.004	Kelembagaan Petani tembakau (cukai)	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	4 Kabupaten di DIY	Produksi Perkebunan	69015ton	Bimtek Kelembagaan Usaha Petani Tembakau	30 orang (7,5 ha)	Dukungan 1% terhadap target peningkatan produksi perkebunan 138 ton, dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 68.740 ton menjadi 68.877 ton , melalui perbaikan kondisi tanaman di lapangan 94 hektar	100%	Rp. 53.040.000,00	Rp. 150.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
2.03.1.09.01.00.23.005	Budidaya Tanaman Perkebunan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Girimulyo	Produksi Perkebunan	69015ton	Budidaya tanaman perkebunan 5 komoditas (kakao, kopi, teh, tembakau, nilam)	200 orang (190 ha)	Dukungan 50% terhadap target peningkatan produksi perkebunan 138 ton, dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 68.877 ton menjadi 69.015 ton, melalui perbaikan kondisi tanaman di lapangan 94 hektar	100%	Rp. 460.060.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan	
							Pemeliharaan tanaman perkebunan 3 komoditas (kopi, kakao, kelapa)	100 orang (110 ha)							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											Jumlah Pagu : Rp. 26.300.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.03.1.09.01.00.23.006	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dlingo Girmulyo Nglipar Patuk	Produksi Perkebunan	69015ton	Bimtek pengolahan pasca panen	100 orang (20 ha)	Dukungan 35% terhadap target peningkatan produksi perkebunan 138 ton, dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 68.877 ton menjadi 69.015 ton, melalui perbaikan kondisi tanaman di lapangan 94 hektar	100	Rp. 193.117.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
							Penerapan standar mutu hasil perkebunan	2 komoditas						
							Pengelolaan lahan dan air 2 komoditas (kopi dan kakao)	50 orang (15 ha)						
							Sertifikasi mutu produk perkebunan	3 kelompok (22,5 ha)						
							Temu kemitraan pelaku usaha perkebunan	40 orang (31,25 ha)						
							Uji mutu kopi	2 kelompok tani						
2.03.1.09.01.00.24	PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERTANIAN										Rp. 1.916.383.000,00	Rp. 2.131.600.000,00		
2.03.1.09.01.00.24.004	Produksi Benih Tanaman Pangan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab. Kulon Progo, Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Gunung Kidul	Persentase Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Bersertifikat yang Terdistribusi	87%	Produksi benih sumber padi 71.500 kg, jagung 5.000 kg, kedelai 4.075 kg, kacang tanah 700 kg, kacang hijau 700 kg	Benih sumber kedelai 5,5 ha, padi 24 ha, jagung 5 ha, kacang hijau 1 ha, kacang tanah 1 ha	Dukungan sebesar 40% terhadap Benih Tanaman Pertanian bersertifikat yang terdistribusi sebanyak 87% (jumlah benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat dijual dibagi total produksi benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan)	100%	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 1.250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
2.03.1.09.01.00.24.005	Produksi Benih Tanaman Hortikultura	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab. Kulon Progo, Kab. Sleman, Kab. Bantul	Persentase Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Bersertifikat yang Terdistribusi	87%	Produksi benih cabe 35 kg, benih tomat 35 kg, benih jamur edibel 9.000 botol, bibit tanaman buah 7.000 batang, bibit tanaman hias 4.000 batang, benih hasil pemurnian cabe 250 gram dan tomat 250 gram, benih stroberi 1.000 batang, benih anggur 10 batang	benih tanaman hortikultura tersedia sesuai standar	Dukungan sebesar 35% terhadap Benih Tanaman Pertanian bersertifikat yang terdistribusi sebanyak 87% (jumlah benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat dijual dibagi total produksi benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan)	100%	Rp. 460.000.000,00	Rp. 556.600.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
2.03.1.09.01.00.24.006	Produksi Benih Tanaman Perkebunan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Kab. Kulon Progo, Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Gunung Kidul	Persentase Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Bersertifikat yang Terdistribusi	87%	Penyediaan benih unggul perkebunan (Kopi 150 batang, Kakao 8.000 batang dan Kelapa 3.000 batang)	0,7 ha	Dukungan sebesar 25% terhadap Benih Tanaman Pertanian bersertifikat yang terdistribusi sebanyak 87% (jumlah benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat dijual dibagi total produksi benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan)	100%	Rp. 256.383.000,00	Rp. 325.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											Jumlah Pagu : Rp. 26.300.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.03.1.09.01.00.25	PROGRAM PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN										Rp. 88.000.000,00	Rp. 610.000.000,00		
2.03.1.09.01.00.25.001	Sertifikasi Perbenihan Tanaman Pertanian	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Jumlah Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan	700hektar	Luas areal yang mengajukan sertifikasi untuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	400 Ha	Dukungan 50% terhadap Peningkatan jumlah sertifikat benih tanaman Pertanian sebesar 100 ha dari tahun 2019 sebesar 600 ha menjadi 700 ha pada tahun 2020	100%	Rp. 75.000.000,00	Rp. 360.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan
2.03.1.09.01.00.25.002	Pengawasan Perbenihan Tanaman Pertanian	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Jumlah Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan	700hektar	Rekomendasi produsen dan pengedar benih	15 rekomendasi	Dukungan 50% terhadap Peningkatan jumlah sertifikat benih tanaman Pertanian sebesar 100 ha dari tahun 2019 sebesar 600 ha menjadi 700 ha pada tahun 2020	100%	Rp. 13.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 9.960.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Pilihan													
2.06	PERDAGANGAN													
2.06.2.06.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan													
2.06.2.06.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.498.634.000,00	Rp. 3.280.000.000,00		
2.06.2.06.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor	62 jenis	Dukungan 54% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.020.980.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Barang cetakan	17 jenis						
							Barang cetakan untuk pengelolaan arsip	2 jenis						
							Bukti pembayaran Pajak/KIR kendaraan dinas/operasional roda 4 tepat waktu	2 unit						
							Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 tepat waktu	20 unit						
							Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan						
							Honor arsiparis	1 tahun						
							Kebersihan gedung kantor	235.920 m2						
							Komponen instalasi listrik/penerangan	20 jenis						
							Pembayaran tagihan rekening listrik	12 bulan						
							Pembayaran tagihan rekening telepon	12 bulan						
							Pengandaan	129.195 lembar						
							Pengisian tabung pemadam kebakaran	12 tabung						
							Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20 jenis						
							Surat kabar	2 jenis						
							Surat Keluar	6450 surat						
							Surat Masuk	5400 surat						
2.06.2.06.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Bukti pembayaran honorarium pengelola barang	7 orang/bulan	Dukungan 31 % Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 670.166.000,00	Rp. 780.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian	4 orang/bulan						
							Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan	20 orang/bulan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 9.960.000.000,00						
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
													(6)	(7)			(8)
							Bukti pembayaran honorarium pengemudi	1 orang/bulan									
							Bukti pembayaran jasa keamanan kantor	12 bulan									
2.06.2.06.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Makan dan minum sidang	12 bulan	Dukungan 15 % Terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 807.488.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan			
							Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 bulan									
							Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 bulan									
2.06.2.06.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.581.370.000,00	Rp. 5.780.000.000,00					
2.06.2.06.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rehab Gedung Kemasan,	1 Unit	Dukungan 22 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 4.300.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan			
2.06.2.06.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peralatan (komputer PC, laptop, printer, mic, kamera)	5 jenis	Dukungan 11 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 137.700.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan			
							Perlengkapan (filing kabinet, AC, pompa air, kipas angin)	4 jenis									
2.06.2.06.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Bangunan gedung dan tempat kerja terpelihara (Perbaikan pintu pagar halaman, pengecatan pagar halaman, pengecatan gedung kantor)	3 jenis	Dukungan 33 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 108.640.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan			
2.06.2.06.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas/operasional terpelihara sesuai RKP BMD	2 jenis	Dukungan 29% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 230.880.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 9.960.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.06.2.06.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Mebeleur terpelihara (meja, kursi, filing kabinet)	3 jenis	Dukungan 11 % terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 104.150.000,00	Rp. 180.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Peralatan gedung kantor terpelihara (komputer PC, laptop, mesin ketik, LCD, faximile, jaringan internet)	6 jenis						
							Perengkapan gedung kantor terpelihara (genset, jaringan listrik, gordyn, vertical blind, AC, CCTV)	6 jenis						
2.06.2.06.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 188.600.000,00	Rp. 392.000.000,00		
2.06.2.06.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP dari semula 79,22 (BB) menjadi 81 (A)	Dukungan 4% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 27 kegiatan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 5 %	Dukungan 4% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 9.000.000,00	Rp. 17.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Data Informasi Perencanaan yang lengkap, akurat, dan terkini 2. Forum Perencanaan OPD 1 kali 3. ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	1. Pembaharuan data secara kontinyu 100% 2. Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020 3. Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019	Dukungan 82% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 152.720.000,00	Rp. 330.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 9.960.000.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.06.2.06.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 9 program 26 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 9% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 21.880.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan	
2.06.2.06.01.00.15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR										Rp. 1.046.880.000,00	Rp. 2.800.000.000,00			
2.06.2.06.01.00.15.003	Pelatihan dan Kemitraan Ekspor	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Nilai Ekspor Perdagangan Luar Negeri Tahun n	314.76Ribu US\$	Jumlah peserta Pelatihan dan Pendampingan IKM Ekspor Unggulan dari 150 orang peserta yang meningkat kapasitasnya 82%	123 orang	Dukungan sebesar 20% (1,23 Ribu US\$) terhadap terwujudnya target peningkatan nilai net ekspor perdagangan luar negeri (RPJMD) dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 2% (6,17 Ribu US\$) semula 308,59 Ribu US\$ menjadi 314,76 Ribu US\$	100%	Rp. 192.400.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan	
							Jumlah peserta pelatihan Ekspor baru dari 200 orang peserta pelatihan yang meningkat kemampuannya 82%	160 orang							
							Jumlah SKA yang diterbitkan	19.599 SKA							
2.06.2.06.01.00.15.004	Pemasaran Perdagangan Luar Negeri	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Nilai Ekspor Perdagangan Luar Negeri Tahun n	314.76Ribu US\$	Operasional Pokja KADIN	1 Tahun	Dukungan sebesar 80% (4,9 Ribu US\$) terhadap terwujudnya target peningkatan nilai net ekspor perdagangan luar negeri (RPJMD) dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 2% (6,17 Ribu US\$) semula 308,59 Ribu US\$ menjadi 314,76 Ribu US\$	100%	Rp. 854.480.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan	
							Peningkatan omset UKM peserta Pameran Pameran Produk Unggulan Skala Ekspor sebanyak 5 Pameran (Pameran JIFFINA, Pameran IFEX, Pameran Inacraft, Pameran TEI, Jogja Trade Expo 2020) dengan komoditas : Pameran INACRAFT : Kerajinan Batik, Kerajinan kayu, Kerajina Kulit(tas, dompet, sabuk, sepatu), Kerajina Perak, Pameran JIFFINA : Mebel Kayu, Home Deco, Kerajinan Rotan, Pameran TEI : Kerajinan Batu, Kerajinan Kulit, Kerajinan Kayu, Pameran IFEX : Mebel Kayu, Kerajinan Kayu, Jogja Trade Expo 2020: Mebel, Home Deco, Kerajinan, Fashion (semula 188,6 Ribu US\$ menjadi 193,5 Ribu US\$)	4,9 Ribu US\$							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 9.960.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.06.2.06.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI										Rp. 941.128.000,00	Rp. 9.497.000.000,00		
2.06.2.06.01.00.16.002	Pemasaran Perdagangan Dalam Negeri	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	1.95milyar rupiah	Jumlah pelaku usaha dari 200 orang peserta bimtek pemasaran online yang meningkat kemampuannya 80%	160 Orang	Dukungan 95% (sebesar 190 juta rupiah) terhadap terwujudnya target peningkatan Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina (RPJMD) sebesar 12,90% (200 juta rupiah) dari tahun 2019 ke 2020 semula 1,75 milyar rupiah menjadi 1,95 milyar rupiah	100%	Rp. 817.360.000,00	Rp. 9.297.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Operasional Dekranas	1 Tahun						
							Peningkatan omset peserta Pameran (Pameran Dekranas, Pameran Jakarta Fair, Pameran Tetap) semula Rp. 1.037 Juta Menjadi Rp. 1.187 Juta	Rp. 150 juta						
2.06.2.06.01.00.16.003	Pelatihan dan Kemitraan Perdagangan Dalam Negeri	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	1.95milyar rupiah	Jumlah pelaku usaha dari 280 orang peserta bimtek (PKL dan sekolah pasar) yang meningkat kemampuannya 80%	224 Orang	Dukungan 5% (10 juta rupiah) terhadap terwujudnya target peningkatan Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina (RPJMD) sebesar 12,90% (200 juta rupiah) dari tahun 2019 ke 2020 semula 1,75 milyar rupiah menjadi 1,95 milyar rupiah	100%	Rp. 123.768.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.00.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KONSUMEN										Rp. 567.298.000,00	Rp. 650.000.000,00		
2.06.2.06.01.00.17.001	Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	5,55%	Fluktuasi harga bahan pokok menjelang HBKN dibawah batas toleransi	5%	Dukungan terhadap terwujudnya target penurunan persentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standard (RPJMD) dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 1,41% (0,08%) semula 5,69 % menjadi 5,61 %	100%	Rp. 185.060.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Fluktuasi harga beras dibawah batas toleransi	3%						
							Stabilnya harga bahan pokok yang dipantau	5%						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan												Jumlah Pagu : Rp. 9.960.000.000,00			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indikator Kinerja						(12)	(13)	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
2.06.2.06.01.00.17.002	Perlindungan Konsumen	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	5.55%	Jumlah barang yang diawasi Pengawasan barang beredar, barang berbahaya dan jasa serta tertib niaga	300 barang	Dukungan terhadap terwujudnya target penurunan presentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standar (RPJMD) dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 1,41% (0,08%) semula 5,69% menjadi 5,61%	100%	Rp. 382.238.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan	
							Jumlah Barang yang diujikan di laboratorium yang terakreditasi	1 komoditas							
							Jumlah peserta sosialisasi perlindungan konsumen dari 500 orang peserta yang meningkat pemahamannya 80%	100 orang							
							terlayannya penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK	27 sengketa							
2.07	PERINDUSTRIAN														
2.07.2.06.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan														
2.07.2.06.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN TEKNOLOGI INDUSTRI										Rp. 892.920.000,00	Rp. 2.400.000.000,00			
2.07.2.06.01.00.18.001	Perekayasaan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan	24produk ATG	Jenis Pelayanan Teknologi Perak dan Logam	4 Layanan	Dukungan Terhadap Terwujudnya Peningkatan Jumlah produk Alat Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 14,29% (3 ATG) semula 18 ATG ke 21 ATG	100%	Rp. 437.640.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan	
							Jumlah ATG yang diterapkan di sentra. Penerapan ATG Hasil Rekayasa	5 ATG							
							Jumlah Pelayanan jasa bengkel alat produksi	10 Unit							
2.07.2.06.01.00.18.002	Pelayanan Kemasan dan Produk Kulit	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan	24produk ATG	Jumlah pelayanan Teknologi Kemasan	1.200.000 unit pesanan	Dukungan Terhadap Terwujudnya Peningkatan Jumlah produk Alat Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 14,29% (3 ATG) semula 18 ATG ke 21 ATG (Jumlah pelayanan Jasa kemasan dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 10% (10.000 pesanan) sem	100%	Rp. 455.280.000,00	Rp. 900.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan	
							Jumlah pelayanan Teknologi produk Kulit	100 layanan							
2.07.2.06.01.00.19	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH										Rp. 1.987.670.000,00	Rp. 5.000.000.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 9.960.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.2.06.01.00.19.003	Pelatihan Industri Kecil Menengah Agro	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Nilai Produksi IKM	13238739Rp Juta	Jumlah peserta Bemtek / Pelatihan di Kab. Gunungkidul (Mebel kayu, bahan bangunan dari kayu, kerajinan kayu, WUB IKM Kayu, WUB IKM Bambu, Olahahan Pangan, Minuman Segar), Bantul (Mebel Bambu, Kerajinan Bambu, WUB IKM Bambu), Kulonprogo (Kerajinan Bambu, Olahahan Coklat) dari 320 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	208 Orang	Dukungan sebesar 5.851.523 juta rupiah terhadap terwujudnya target Nilai produksi IKM (RPJMD) pada tahun 2020 sebesar 13.238.739 juta rupiah	100%	Rp. 827.250.000,00	Rp. 2.750.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Jumlah peserta Bemtek / Pelatihan di Samigaluh (Mebel Kayu), Girimulyo (Mebel Bambu), Nglipar (Kerajinan Kayu), Gedangsari (Olahan Pangan), Kokap (Bahan Bangunan dari Kayu, WUB Kayu, Olahahan Pangan, Olahahan Kopi) dari 200 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	130 Orang						
2.07.2.06.01.00.19.004	Kemitraan IKM Agro	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Nilai Produksi IKM	13238739Rp Juta	Jumlah IKM peserta temu kemitraan dari 100 IKM yang bermitra sebanyak 12%	12 IKM	Dukungan sebesar 5.736.787 juta rupiah terhadap terwujudnya target Nilai produksi IKM (RPJMD) pada tahun 2020 sebesar 12.979.156 juta rupiah	100%	Rp. 185.510.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Peningkatan Omset IKM setelah Test Pasar sebanyak 50 IKM	Rp. 5 Juta						
2.07.2.06.01.00.19.005	Pelatihan Industri Kecil Menengah Logam, Sandang dan Aneka	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Dlingo Gedang sari Godean Imogiri Karangmojo Kretek Mlati Pandak Pleret Rongkop Sewon Srandakan Umbulharjo Wirobrajan Wonosari	Nilai Produksi IKM	13238739Rp Juta	Jumlah peserta Bemtek / Pelatihan IKM Pakaian Jadi dan Kuningan di Kab. Sleman serta Produk Kulit dan Aluminium di Kota Yogyakarta dari 20 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	13 Orang	Dukungan sebesar 2.753.658 juta rupiah terhadap terwujudnya target Nilai produksi IKM (RPJMD) pada tahun 2020 sebesar 13.238.739 juta rupiah	100%	Rp. 790.420.000,00	Rp. 1.250.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Jumlah peserta Bemtek / Pelatihan IKM Pakaian Jadi, Produk Kulit, Kain Perca, dan Pande Besi di Kab. Bantul dan Gunungkidul dari 160 Orang yang meningkat keterampilannya sebesar 65%	91 Orang						
2.07.2.06.01.00.19.006	Kemitraan IKM Logam, Sandang dan Aneka	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Nilai Produksi IKM	13238739Rp Juta	Jumlah IKM peserta temu kemitraan dari 40 IKM yang bermitra sebanyak 12%	5 IKM	Dukungan sebesar 2.699.664 juta rupiah terhadap terwujudnya target Nilai produksi IKM (RPJMD) pada tahun 2019 sebesar 12.979.156 juta rupiah	100%	Rp. 184.490.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
							Peningkatan Omset IKM setelah Test Pasar dengan komoditas: Komponen Otomotif, Mesin, Peralatan Rumah Tangga, Fashion dan Aneka semula Rp. 600 Juta menjadi Rp. 1.050 Juta)	Rp. 450 Juta						
2.07.2.06.01.00.20	PROGRAM PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL										Rp. 255.500.000,00	Rp. 1.300.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan											Jumlah Pagu : Rp. 9.960.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.2.06.01.00.20.002	Edukasi dan Advokasi HKI	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Jumlah HAKI terdaftar dari IKM atau Sentra dibina	120unit	Jumlah pelaku usaha sektor industri dan perdagangan yang berkonsultasi	280 Orang	Dukungan terhadap terwujudnya target peningkatan Jumlah HKI yang terdaftar (RPJMD) dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 10 buah HKI semula 90 HKI menjadi 100 HKI	280 Orang	Rp. 105.500.000,00	Rp. 1.025.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan
2.07.2.06.01.00.20.003	Pelayanan Pendaftaran HKI	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Jumlah HAKI terdaftar dari IKM atau Sentra dibina	120unit	Jumlah pelaku usaha sektor industri dan perdagangan yang difasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual	120 IKM	Dukungan terhadap terwujudnya target peningkatan Jumlah HKI yang terdaftar (RPJMD) dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 10 buah HKI semula 90 HKI menjadi 100 HKI	100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 275.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Sekretariat Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 4.178.523.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
4.01.4.01.01.00	Sekretariat Daerah													
4.01.4.01.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 4.139.273.000,00	Rp. 5.055.000.000,00		
4.01.4.01.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	karangan bunga	100 buah	dukungan 31,40% terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.300.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Makamin Gubernur dan Wakil Gubernur	1 tahun						
							Materai	2 jenis						
							Medical Checkup	4 orang						
							Pakaian Batik Gubernur dan Wakil Gubernur	8 stel						
							Pakaian Dinas Harian Gubernur dan Wakil Gubernur	6 stel						
							Pakaian Sipil Lengkap Gubernur dan Wakil Gubernur	4 stel						
							Sewa angkutan darat	1 tahun						
							souvenir/cinderamata	6 jenis						
							trophy	2 jenis						
4.01.4.01.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja Ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3 orang	Dikungan 2% terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 46.900.000,00	Rp. 55.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	5 orang						
							Kinerja Sopir Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang						
4.01.4.01.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Koordinasi dan konsultasi Setda DIY dalam daerah terlaksana dengna baik	1 tahun	Dukungan 68% terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 2.792.373.000,00	Rp. 3.500.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Koordinasi dan konsultasi Setda DIY dalam Jawa terlaksana dengna baik	1 tahun						
							Koordinasi dan konsultasi Setda DIY dalam luar Jawa terlaksana dengna baik	1 tahun						
							Koordinasi dan konsultasi Setda DIY Luar Negeri terlaksana dengna baik	1 tahun						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Sekretariat Daerah														Jumlah Pagu : Rp. 4.178.523.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4.01.4.01.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 39.250.000,00	Rp. 40.750.000,00			
4.01.4.01.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2020	Nilai LKJIP "A"	Dukungan 54,22% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 20.750.000,00	Rp. 21.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 2 program 7 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10%	Dukungan 13,37% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.500.000,00	Rp. 6.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	ROPK, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (dokumen perencanaan SKPD TA 2021 dan perubahan TA 2020)	3 dokumen	Dukungan 18,55% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 7.500.000,00	Rp. 8.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 2 program 7 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 13,85% terhadap penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 5.500.000,00	Rp. 5.750.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 14.524.112.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
1.12.4.01.02.01	Biro Tata Pemerintahan													
1.12.4.01.02.01.15	PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										Rp. 1.135.739.000,00	Rp. 1.250.000.000,00		
1.12.4.01.02.01.15.002	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	86.1%	Blangko KIA	20,000 keping	Dukungan sebesar 86,10% terhadap cakupan kepemilikan Dokumen Penting	100%	Rp. 785.869.000,00	Rp. 800.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							Dokumen akta kelahiran bagi penduduk miskin/ marginal	500 akta						
							Dokumen akta kematian bagi penduduk miskin/ marginal	200 akta						
							Dokumen akta perkawinan bagi penduduk miskin/ marginal	100 akta						
							Dokumen kependudukan bagi penduduk rentan adminduk	80 dokumen						
							Kerja sama dengan lembaga penyedia jasa/layanan publik untuk pemberian insentif	10 lembaga						
							KTP-el dan KIA yang diterbitkan dalam pelayanan terpadu	100 KTP-el 100 KIA						
1.12.4.01.02.01.15.003	Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	86.1%	Instansi yang mendapatkan hak akses data kependudukan	3 instansi	Dukungan sebesar 85% terhadap cakupan kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP-el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	100%	Rp. 349.870.000,00	Rp. 450.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							Pengembangan sistem informasi adminduk	1 sistem						
							Profil Perkembangan Kependudukan 2018	1 dokumen						
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
4.01.4.01.02.01	Biro Tata Pemerintahan													
4.01.4.01.02.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 675.625.000,00	Rp. 750.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp. 14.524.112.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indikator Kinerja						(12)	(13)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				(14)	(15)
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.02.01.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor	37 jenis	Dukungan terhadap memningkatnya Sarana Prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas & Fungsi SKPD 20,42 %	100 %	Rp. 185.625.000,00	Rp. 300.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis						
							Barang cetakan	16 jenis						
							Bukti pembayaran pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda dua	7 unit						
							Bukti pembayaran pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda empat	5 unit						
							Jasa surat-menyurat	3 jenis						
							Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	11 jenis						
							Penggandaan	80000 lembar						
							Pengisian tabung pemadam kebakaran	11 tabung						
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15 jenis											
4.01.4.01.02.01.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja 2 orang pengelola barang	1 tahun	Dukungan sebesar 6,27 % terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 90.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							Kinerja 1 orang caraka	1 tahun						
							Kinerja 1 orang fasilitasi kepegawalan	1 tahun						
							Kinerja 2 orang pengemudi	1 tahun						
		Kinerja 9 orang pengelola keuangan	1 tahun											
4.01.4.01.02.01.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	1 tahun	Dukungan terhadap Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 64%	100 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 450.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							Konsultasi dan koordinasi luar daerah	1 tahun						
							Makanan dan minuman untuk rapat koordinasi	1 tahun						
4.01.4.01.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									Rp. 338.470.000,00	Rp. 370.000.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp. 14.524.112.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
4.01.4.01.02.01.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pengadaan Peralatan Gedung kantor sesuai RKBMD	4 jenis	Dukungan terhadap Meningkatkan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 49,26%	100%	Rp. 135.750.000,00	Rp. 150.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan		
							Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor sesuai RKBMD	4 jenis								
4.01.4.01.02.01.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda dua	7 unit	Dukungan terhadap meningkatnya sarana prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 13,56 %	100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan		
							Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda empat	5 unit								
4.01.4.01.02.01.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya peralatan/perlengkapan gedung/kantor sesuai RKBMD	15 Jenis	Dukungan terhadap meningkatnya sarana prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 40,50 %	100%	Rp. 52.720.000,00	Rp. 70.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan		
4.01.4.01.02.01.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 114.511.000,00	Rp. 156.000.000,00				
4.01.4.01.02.01.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	nilai 70	Terukurinya akuntabilitas kinerja Biro selama satu tahun anggaran	100%	Rp. 7.325.000,00	Rp. 10.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan		
4.01.4.01.02.01.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Keuangan Tahunan	1 laporan	Dukungan terhadap Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 7,82%	100%	Rp. 4.380.000,00	Rp. 6.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan		
							Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu SPJ Belanja Fungsional	12 bulan								
							Laporan Realisasi Semesteran dan Prognosis 2019	1 laporan								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah Pagu : Rp. 14.524.112.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.01.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Dukungan terhadap Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 81,32%	100%	Rp. 96.244.000,00	Rp. 130.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021	1 dokumen						
							Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021	1 dokumen						
							Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021	1 dokumen						
							Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2020	1 dokumen						
4.01.4.01.02.01.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 17 kegiatan	95%	Dukungan terhadap Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 8,88 %	100%	Rp. 6.562.000,00	Rp. 10.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.01.22	PROGRAM PEMBINAAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA										Rp. 1.189.288.000,00	Rp. 1.300.000.000,00		
4.01.4.01.02.01.22.001	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama tahun n	100%	Laporan Standar Pelayanan Minimal 6 bidang SPM	1 Laporan Standar Pelayanan Minimal	Dukungan sebesar 50% terhadap persentase jumlah kebijakan yang merespon dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah	100%	Rp. 589.378.000,00	Rp. 650.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
					Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti dengan kebijakan	100%	LPPD tahun 2019	1 dokumen						
							Rekomendasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 rekomendasi tentang Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan						
							Rekomendasi penerapan NSPK	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 14.524.112.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4.01.4.01.02.01.22.003	Penanganan Kerjasama Dalam Negeri	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Propinsi di Indonesia yang bekerjasama dengan Pemda DIY	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama tahun n	100%	Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	5 Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	Dukungan terhadap persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah yang direpson dengan kebijakan sebesar 70.58 %	100%	Rp. 599.910.000,00	Rp. 650.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan	
					Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti dengan kebijakan	100%	Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU	2 SKB							
							Rekomendasi Hasil Monev Kerjasama Dalam Negeri	2 rekomendasi							
4.01.4.01.02.01.23	PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN, DAN KECAMATAN										Rp. 548.316.000,00	Rp. 725.000.000,00			
4.01.4.01.02.01.23.002	Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan dan Kecamatan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Desa Tertinggal yang memiliki Pengelolaan Keuangan yang Baik	56.25%	Desa dengan aparatur yang terbina dalam pengelolaan dokumen administrasi Pemdes	5 Desa Tertinggal	Dukungan sebesar 50% terhadap persentase desa tertinggal yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik	100%	Rp. 335.763.000,00	Rp. 425.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan	
							Desa dengan BPD yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan Musdes	5 Desa Tertinggal							
							Desa yang terdampingi dalam penyusunan APBDesa Pro Poor	5 Desa Tertinggal							
							Kecamatan dengan aparatur yang terbina sebagai pembina teknis pemerintah desa	3 Kecamatan							
4.01.4.01.02.01.23.003	Koordinasi, Monitoring, dan, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Desa Tertinggal yang memiliki Pengelolaan Keuangan yang Baik	56.25%	Pemantauan Kinerja Kecamatan	1 Laporan	Dukungan sebesar 50% terhadap persentase desa tertinggal yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik.	100%	Rp. 212.553.000,00	Rp. 300.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan	
							Pemantauan Pengelolaan Dana Desa	1 Rekomendasi							
4.01.4.01.02.01.24	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PENATAAN WILAYAH										Rp. 10.522.163.000,00	Rp. 850.000.000,00			
4.01.4.01.02.01.24.001	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Jumlah Kebijakan yang Merespon Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	Laporan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintahan umum terkait ketentraman dan ketertiban umum	1 laporan	DDukungan sebesar 64.7% terhadap persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang direpson dengan kebijakan	100%	Rp. 10.295.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan	
					Persentase Desa di Wilayah Perbatasan yang Terbina	1%	Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD Antar Waktu	2 usulan/draf SK							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 14.524.112.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Berkas usulan pengesahan pengangkatan dan pelantikan Kepala Daerah terpilih Pilkada 2020	3 surat usulan							
							Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Bantul, Gunungkidul, dan Sleman	1 laporan							
							Laporan monitoring pelaksanaan Pilkada di 3 Kabupaten (Bantul, Sleman dan Gunungkidul) kepada Menteri Dalam Negeri	1 laporan							
							Rekomendasi penyelenggaraan pemerintah daerah	1 rekomendasi							
4.01.4.01.02.01.24.002	Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Jumlah Kebijakan yang Merespon Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan	100%			Dukungan sebesar 35,29% terhadap persentase jumlah kebijakan yang merespon dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan Otonomi daerah	100%	Rp. 227.163.000,00	Rp. 500.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan	
					Persentase Desa di Wilayah Perbatasan yang Terbina	1%	Data base pilar batas untuk pengelolaan Tanda Batas Wilayah	1 Dokumen							
							Hasil koreksi koordinat Pilar Batas Wilayah DIY-Jateng Secara Geodetik	1 Dokumen hasil pengukuran 30 titik pilar batas							
							Kesepakatan bersama pemerintah Kab/Ko tentang penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan Kabupaten/Kota dan atau antar Provinsi di DIY	1 Dokumen kesepakatan bersama							
							Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kab/Kota DIY	1 Dokumen							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.892.148.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
4.01.4.01.02.02	Biro Hukum													
4.01.4.01.02.02.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 656.022.000,00	Rp. 461.687.910,00		
4.01.4.01.02.02.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Administrasi Persuratan	7000 surat	Dukungan terhadap capaian Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 123.542.000,00	Rp. 160.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Arsip Dokumen Hukum	2 dokumen						
							ATK	51 jenis						
							Barang Cetak	13 jenis						
							Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional	4 unit						
							Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	6 jenis						
							Penggandaan	1 paket						
4.01.4.01.02.02.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja 1 orang Pengelola Kepegawaian	1 tahun	Dukungan terhadap capaian Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 31.550.000,00	Rp. 35.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Kinerja 10 orang Pengelola Keuangan	1 tahun						
4.01.4.01.02.02.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan terhadap capaian Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 500.930.000,00	Rp. 266.687.910,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Makanan dan Minuman Rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun						
4.01.4.01.02.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 211.485.000,00	Rp. 325.934.000,00		
4.01.4.01.02.02.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Komputer PC	4 unit	Dukungan terhadap capaian Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 94.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Notebook	2 unit						
							Printer	3 unit						
4.01.4.01.02.02.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	4 unit	Dukungan terhadap capaian Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 42.410.000,00	Rp. 110.934.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.892.148.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.02.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	AC	20 buah	Dukungan terhadap capaian Meningkatkan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 75.075.000,00	Rp. 65.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Fumigasi ruang perpustakaan	2 kali						
							Komputer	10 buah						
							Mebeleur	10 buah						
							Mesin Ketik	3 buah						
							Notebook	10 buah						
							Pintu Kantor	12 buah						
							Printer	10 buah						
4.01.4.01.02.02.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 35.000.000,00	Rp. 47.664.438,00		
4.01.4.01.02.02.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Nilai LKJIP : A	Dukungan terhadap capaian Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.02.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	Laporan keuangan dengan deviasi maksimal 5%	Dukungan terhadap capaian Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 7.000.000,00	Rp. 7.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.02.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Dukungan terhadap capaian Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 20.000.000,00	Rp. 28.664.438,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Materi informasi yang sesuai dengan data profil dan informasi Biro Hukum yang lengkap dan terkini	100%						
							ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	1 dokumen						
4.01.4.01.02.02.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan	100%	Dukungan terhadap capaian Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 3.000.000,00	Rp. 7.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.02.15	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN										Rp. 318.781.000,00	Rp. 874.429.000,00		

**Reencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.892.148.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.02.15.001	Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perkonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	100%	Rancangan Keputusan Gubernur	100 Rancangan Keputusan	Dukungan terhadap capaian Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	100%	Rp. 278.845.000,00	Rp. 834.429.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Rancangan Peraturan Daerah	10 Raperda						
							Rancangan Peraturan Gubernur	30 Rapergub						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.892.148.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanian dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewaan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PKPD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										
4.01.4.01.02.02.15.002	Perumusan Kebijakan di Bidang Hukum	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan	Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	100%	Rekomendasi Terhadap Produk Hukum Daerah	5 rekomendasi	Dukungan terhadap capaian Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	100%	Rp. 39.936.000,00	Rp. 40.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.892.148.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Ghasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										
4.01.4.01.02.02.16	PROGRAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/ KOTA										Rp. 224.211.000,00	Rp. 396.657.750,00		
4.01.4.01.02.02.16.001	Konsultasi Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/ Kota	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY	Persentase Kewenangan, Substansi Materi, dan Legal Drafting Produk Hukum Kab/Kota yang Telah Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah	100%	Rekomendasi hasil konsultasi rancangan produk hukum Kabupaten / Kota	45 Rekomendasi	Dukungan 50% terhadap capaian Persentase Kewenangan, Substansi Materi, dan Legal Drafting Produk Hukum Kab/Kota yang Telah Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah	100%	Rp. 80.405.000,00	Rp. 112.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.892.148.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.02.16.002	Kegiatan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/ Kota	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY	Persentase Kewenangan, Substansi Materi, dan Legal Drafting Produk Hukum Kab/Kota yang Telah Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah	100%	Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi	5 Keputusan Gubernur	Dukungan 50% terhadap pencapaian Persentase Kewenangan, Substansi Materi, dan Legal Drafting Produk Hukum Kab/Kota yang Telah Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah	100%	Rp. 143.806.000,00	Rp. 284.657.750,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Nomor Register	45 Nomor Register						
							Rekomendasi Fasilitasi	45 Rekomendasi						
4.01.4.01.02.02.17	PROGRAM DOKUMENTASI HUKUM										Rp. 336.862.000,00	Rp. 482.382.500,00		
4.01.4.01.02.02.17.001	Penyebarluasan Produk Hukum	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam Biro Bina Mental Spiritual Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase Produk Hukum Daerah yang Terpublikasikan	100%	Jumlah buku informasi peraturan perundang-undangan	1.100 buku	Dukungan terhadap capaian Persentase Produk Hukum Daerah yang Terpublikasikan	100%	Rp. 231.393.000,00	Rp. 327.382.500,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Jumlah buku lembaran daerah dan berita daerah	1.100 buku						
							Laporan Legal Expo Bidang Hukum	1 laporan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 4.892.148.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Keistimewaan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Ghrasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD											
4.01.4.01.02.02.17.002	Digitalisasi Produk Hukum	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Mental Spiritual	Persentase Produk Hukum Daerah yang Terpublikasikan	100%	Produk hukum yang diunggah (upload) ke dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	260 produk hukum	Dukungan terhadap capaian Persentase Produk Hukum Daerah yang Terpublikasikan	100%	Rp. 105.469.000,00	Rp. 155.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum

Jumlah Pagu : Rp. 4.892.148.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Biro Bina Pernerdayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Keistimewaan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Ghrasia Rumah Sakit Paru											

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.892.148.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										
4.01.4.01.02.02.18	PROGRAM BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM										Rp. 3.109.787.000,00	Rp. 956.624.000,00		
4.01.4.01.02.02.18.001	Layanan Hukum Masyarakat	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sekretariat DPRD	Persentase Bantuan dan Layanan Hukum	100%	Keputusan Gubernur tentang Izin pemanfaatan Tanah Desa	50 Keputusan Gubernur	Dukungan terhadap capaian Persentase Bantuan dan Layanan Hukum	100%	Rp. 1.903.840.000,00	Rp. 13.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD	3 Keputusan Gubernur						
							Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja LO DIY 2020	1 laporan						
							Laporan Hasil Seleksi Pansel Komisioner LO DIY Periode 2020-2022	1 laporan						
							Laporan RANHAM	1 laporan						
4.01.4.01.02.02.18.002	Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penganggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan	Persentase Bantuan dan Layanan Hukum	100%	Buku panduan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas	100 buku	Dukungan terhadap capaian Bantuan dan Layanan Hukum	100%	Rp. 1.205.947.000,00	Rp. 943.624.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Laporan Hasil Penyelesaian Penanganan Kasus Perdata, Tata Usaha Negara, dan Pendampingan Hukum 2020	1 laporan						
							Putusan permasalahan hukum litigasi	1 putusan						
							Rekomendasi penanganan pengaduan tata kelola usaha beretika dan perbaikan pelayanan publik	100 rekomendasi						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.892.148.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan PPKD Rumah Sakit Jiwa Ghasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual												Jumlah Pagu : Rp. 19.682.199.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan														
4.01	SEKRETARIAT DAERAH														
4.01.4.01.02.08	Biro Bina Mental Spiritual														
4.01.4.01.02.08.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 591.389.000,00	Rp. 619.000.000,00			
4.01.4.01.02.08.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Alat Tulis Kantor	38 jenis	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 61.809.000,00	Rp. 69.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan	
							02. Barang Cetak	7 jenis							
							03. Barang Penggandaan	12500 lembar							
							04. Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 yang tepat waktu	2 unit							
							05. Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 yang tepat waktu	4 unit							
							06. Buku Referensi/Peraturan Perundangan	1 paket							
							07. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis							
							08. Surat Kabar	2 jenis							
							09. Surat Keluar	5500 surat							
							10. Surat Masuk	2160 surat							
4.01.4.01.02.08.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 529.580.000,00	Rp. 550.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan	
							2. Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun							
							3. Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun							
							4. Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun							
4.01.4.01.02.08.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 162.819.000,00	Rp. 171.590.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual

Jumlah Pagu : Rp. 19.682.199.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.08.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Pengadaan Peralatan Komputer	2 jenis	Dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 51.529.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
							2. Pengadaan Perlengkapan Kantor	1 jenis						
							3. Pengadaan Mebeulair	1 jenis						
4.01.4.01.02.08.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBD terpelihara	2 unit	Dukungan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 90.590.000,00	Rp. 90.590.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
							2. Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBD terpelihara	4 unit						
4.01.4.01.02.08.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Perengkapan Gedung Kantor sesuai RKPBD Terpelihara	8 jenis	Dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 20.700.000,00	Rp. 21.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 53.992.000,00	Rp. 49.200.000,00		
4.01.4.01.02.08.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPM, Renstra, dan IKU) paling lambat Februari 2020	Nilai LKJIP SKPD Skor A	Dukungan terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 3.500.000,00	Rp. 0,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.08.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 16 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 0%	Dukungan terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 7.137.000,00	Rp. 0,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.08.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Forum OPD	1 dokumen draf Renja 2021	Dukungan terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 36.347.000,00	Rp. 42.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
							2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021	1 dokumen DPA 2021						
							3. Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2021	1 dokumen Renja 2021						
							4. Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) 2020	1 dokumen ROPK						
4.01.4.01.02.08.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 16 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 7.008.000,00	Rp. 7.200.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual											Jumlah Pagu : Rp. 19.682.199.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.08.48	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN BINA MENTAL DAN PEMBINAAN SARANA KEAGAMAAN										Rp. 18.089.507.000,00	Rp. 22.000.000.001,00		
4.01.4.01.02.08.48.001	Penyusunan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Biro Bina Mental Spiritual	Rumusan Bahan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan yang Ditindaklanjuti	2buah	koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan embarkasi haji DIY	1 dokumen laporan	Dukungan 100% terhadap rumusan bahan kebijakan bina mental dan sarana keagamaan yang ditindaklanjuti	100%	Rp. 20.000.000,00	Rp. 1,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
					Terlayannya Lembaga Keagamaan 5 Agama	4layanan								
4.01.4.01.02.08.48.002	Penyelenggaraan Festival Keagamaan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY, Aceh, Sumatera Barat	Rumusan Bahan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan yang Ditindaklanjuti	2buah	01. MTQ Tingkat Daerah dan Nasional	1 kegiatan	Dukungan 25% terhadap terlayannya lembaga keagamaan 5 agama	100%	Rp. 11.726.837.000,00	Rp. 10.000.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
					Terlayannya Lembaga Keagamaan 5 Agama	4layanan	02. FASI Tingkat Daerah dan Nasional	1 kegiatan						
							03. Pesarawi Tingkat Daerah	1 kegiatan						
							04. Pesarani Tingkat Nasional	1 kegiatan						
							05. Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional	1 kegiatan						
							06. Swayamvara Tripitaka Gatha Tingkat Nasional	1 kegiatan						
							07. Persiapan DIY sebagai tuan rumah Pesarani Tingkat Nasional	1 kegiatan						
							08. Mukhtar NU	1 Kegiatan						
4.01.4.01.02.08.48.003	Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani Agama	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Biro Bina Mental Spiritual	Rumusan Bahan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan yang Ditindaklanjuti	2buah	01. Pengiriman TPHD	1 SK Gubernur tentang TPHD	Dukungan 75% terhadap terlayannya lembaga keagamaan 5 agama	100%	Rp. 6.342.670.000,00	Rp. 12.000.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan
					Terlayannya Lembaga Keagamaan 5 Agama	4layanan	02. Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani bagi PNS/TNI/POLRI dan Peningkatan Hari Besar Keagamaan terhadap 5 Agama	18 kali						
							03. Hibah kepada MUI DIY	1 lembaga						
							04. Hibah kepada Badan Koordinasi Gereja-Gereja Kristen DIY	1 lembaga						
							05. Hibah kepada Kevikepan DIY	1 lembaga						
							06. Hibah kepada PHDI DIY	1 lembaga						
							07. Hibah kepada Walubi DIY	1 lembaga						
							08. Hibah kepada PW NU DIY	1 lembaga						
							09. Hibah kepada PW Muhammadiyah DIY	1 lembaga						
							10. Hibah kepada BAZNAS DIY	1 lembaga						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual														Jumlah Pagu : Rp. 19.682.199.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							11. Hibah untuk tempat ibadah	35 tempat ibadah							
4.01.4.01.02.08.49	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN KESEHATAN MASYARAKAT										Rp. 486.889.000,00	Rp. 550.000.000,00			
4.01.4.01.02.08.49.001	Penyusunan Kebijakan Kesehatan Masyarakat	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Rumusan Bahan Kebijakan Kesehatan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	2buah	01. Penyusunan Kajian Kebijakan Penanggulangan Penyakit Kanker	1 dokumen kebijakan	Dukungan 50% terhadap rumusan bahan kebijakan kesehatan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	Rp. 301.523.000,00	Rp. 300.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan	
							02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1 dokumen laporan							
							03. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1 dokumen laporan							
							04. Posbundu PTM Satriya	1 dokumen laporan							
							05. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Jiwa Masyarakat	1 dokumen laporan							
							06. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Jiwa Masyarakat	1 dokumen laporan							
							07. Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS	1 dokumen laporan							
							08. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Zoonosis	1 dokumen laporan							
							09. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Zoonosis	1 dokumen laporan							
4.01.4.01.02.08.49.002	Penyusunan Kebijakan Pelayanan Kesehatan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Rumusan Bahan Kebijakan Kesehatan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	2buah	1. Penyusunan Kajian Kebijakan Penanganan Penyakit DHF (Demam Berdarah)	1 dokumen kebijakan	Dukungan 50% terhadap rumusan bahan kebijakan kesehatan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	Rp. 185.366.000,00	Rp. 250.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan	
							2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Sistem Jaminan Kesehatan Semesta	1 dokumen laporan							
							3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sistem Jaminan Kesehatan Semesta	1 dokumen laporan							
							4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Mutu & Akreditasi Pelayanan Kesehatan	1 dokumen laporan							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual

Jumlah Pagu : Rp. 19.682.199.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
															1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Primer	1 dokumen laporan							
							5. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan	1 dokumen laporan							
							7. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Primer	1 dokumen laporan							
4.01.4.01.02.08.50	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA										Rp. 297.603.000,00	Rp. 460.000.000,00			
4.01.4.01.02.08.50.002	Penyusunan Kebijakan Kebudayaan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Rumusan Bahan pengelolaan dan penguatan kebijakan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti	2buah	1. Kajian Penguatan Budaya Lokal untuk peningkatan apresiasi di Perguruan Tinggi DIY	1 dokumen kebijakan	Dukungan 50% terhadap rumusan bahan kebijakan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti	100%	Rp. 136.681.000,00	Rp. 160.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan	
							2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Budaya Lokal	1 dokumen laporan							
							3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1 dokumen laporan							
							4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Apresiasi Masyarakat Terhadap Budaya Lokal	1 dokumen laporan							
							5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Terciptanya Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1 dokumen laporan							
4.01.4.01.02.08.50.003	Penyusunan Kebijakan Sumber Daya Manusia	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Rumusan Bahan pengelolaan dan penguatan kebijakan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti	2buah	1. Kajian Perlindungan dan Jaminan Atlit Berprestasi Daerah	1 dokumen kebijakan	Dukungan 50% terhadap rumusan bahan kebijakan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti	100%	Rp. 160.922.000,00	Rp. 300.000.000,00	Biro Bina Mental Spiritual	Sedang Berjalan	
							2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perpustakaan dan Kearsipan di OPD DIY	1 dokumen laporan							
							3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Zonasi Mutu Pendidikan	1 dokumen laporan							
							4. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Inklusi DIY	1 dokumen laporan							
							5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Tim Pengembang UKS Tingkat Provinsi	1 dokumen laporan							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Mental Spiritual											Jumlah Pagu : Rp. 19.682.199.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pojok Baca Bagi instansi Pemerintah dan Lembaga Swasta	1 dokumen laporan							
							7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Optimalisasi Forum Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI)	1 dokumen laporan							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam											Jumlah Pagu : Rp. 3.000.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
4.01.4.01.02.03	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam													
4.01.4.01.02.03.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 399.615.000,00	Rp. 540.000.000,00		
4.01.4.01.02.03.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor	21 jenis	Dukungan 33,33% terhadap Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 84.640.000,00	Rp. 95.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
							Barang cetakan	2 jenis						
							Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda dua yang tepat waktu	2 unit						
							Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda empat yang tepat waktu	4 unit						
							Buku ekonomi dan keuangan	5 buku						
							Buku Peraturan Perundang-undangan	8 buku						
							Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	1 jenis						
							Majalah	3 jenis						
							Pengandaan	80.000 lembar						
							Peralatan Kebersihan Kantor	15 jenis						
							Surat Kabar	4 jenis 12 bulan						
							Surat Keluar	1000 surat						
							Surat Masuk	3000 surat						
4.01.4.01.02.03.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Bukti pembayaran honorarium pengelolaan keuangan	12 bulan	Dukungan 33,33% terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 38.400.000,00	Rp. 45.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.03.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	12 bulan	Dukungan 33,33% terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 276.575.000,00	Rp. 400.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
							Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	12 bulan						
							Makanan dan minuman rapat	1250 os						
4.01.4.01.02.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 299.707.000,00	Rp. 200.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam											Jumlah Pagu : Rp. 3.000.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.03.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pengadaan gorden kantor	50 m x 1.5 m	Dukungan 33,33% terhadap Meningkatkan Sarana Prasarana Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 191.892.000,00	Rp. 75.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
							Pengadaan komputer	8 unit						
							Pengadaan laptop	3 unit						
							Pengadaan printer warna	8 unit						
							Pengadaan TV LED	3 unit						
4.01.4.01.02.03.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan Dinas /Operasional Roda Empat Terpenuhi	4 unit	Dukungan 33,33% terhadap Meningkatkan Sarana Prasarana Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 89.815.000,00	Rp. 100.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
							Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua Terpelihara	2 unit						
4.01.4.01.02.03.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara	11 jenis	Dukungan 33,33% terhadap Meningkatkan Sarana Prasarana Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 18.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.03.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 119.160.000,00	Rp. 28.000.000,00		
4.01.4.01.02.03.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2020	Nilai LAKIP : A dengan nilai 80,00	Dukungan 25% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.860.000,00	Rp. 3.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.03.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 6 program 16 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 0%	Dukungan 25% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.984.000,00	Rp. 5.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.03.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Forum Perencanaan Perangkat Daerah	1 kali	Dukungan 25% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 109.412.000,00	Rp. 15.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
							ROPK, Renja, RKA, DPA, A yang sesuai dengan aturan yang berlaku 1 tahun	4 dokumen						
							Updating Sistem website biro yang sesuai dengan tuisi dan terintegrasi dengan website lain	1 paket						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam											Jumlah Pagu : Rp. 3.000.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.03.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 16 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 25% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.904.000,00	Rp. 5.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.03.34	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN STABILITAS PEREKONOMIAN DAERAH										Rp. 779.256.000,00	Rp. 1.450.000.000,00		
4.01.4.01.02.03.34.001	Pengendalian Inflasi Daerah	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Bahan rumusan kebijakan	Rumusan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	40%	Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	1 dokumen rekomendasi	Dukungan 20% terhadap rumusan kebijakan stabilitas perekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan	100%	Rp. 568.309.000,00	Rp. 1.250.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
							Kebijakan Perencanaan Pusat Grosir Pangan	1 dokumen rekomendasi						
4.01.4.01.02.03.34.002	Penyusunan Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Bahan rumusan kebijakan	Rumusan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	40%	Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah	2 dokumen	Dukungan 20% terhadap rumusan kebijakan stabilitas perekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan	100%	Rp. 210.947.000,00	Rp. 200.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.03.35	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN REKAYASA PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN BERKEADILAN										Rp. 803.702.000,00	Rp. 1.850.000.000,00		
4.01.4.01.02.03.35.001	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Bahan rumusan kebijakan	Rumusan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian Berkeadilan yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	30%	Rekomendasi Bahan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	3 dokumen	Dukungan sebesar 20% terhadap Rumusan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian yang menjadi dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	100%	Rp. 803.702.000,00	Rp. 1.850.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.03.39	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA PEREKONOMIAN										Rp. 598.560.000,00	Rp. 650.000.000,00		
4.01.4.01.02.03.39.002	Penyusunan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Bahan rumusan kebijakan	Rumusan Kebijakan Perlindungan Sumberdaya Perekonomian yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	30%	Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di DIY	1 dokumen	Dukungan 15% terhadap peningkatan prosentase dokumen hasil analisis kebijakan yang menjadi bahan kebijakan	100%	Rp. 271.960.000,00	Rp. 250.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.03.39.003	Penyusunan Kebijakan Green Economic	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Bahan rumusan kebijakan	Rumusan Kebijakan Perlindungan Sumberdaya Perekonomian yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan	30%	Kajian Valuasi Jasa Lingkungan	1 dokumen	Dukungan 15% terhadap peningkatan prosentase dokumen hasil analisis kebijakan yang menjadi bahan kebijakan	100%	Rp. 326.600.000,00	Rp. 400.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Sedang Berjalan
							Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam											Jumlah Pagu : Rp. 3.000.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Naskah Akademik Ekonomi Hijau	1 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan												Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan														
4.01	SEKRETARIAT DAERAH														
4.01.4.01.02.04	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan														
4.01.4.01.02.04.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.710.854.500,00	Rp. 896.500.000,00			
4.01.4.01.02.04.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : - Penggandaan	110.000 lembar	Dukungan sebesar 60% terhadap tercapainya presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%	100%	Rp. 185.394.500,00	Rp. 242.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan	
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Surat keluar	2500 surat							
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Surat masuk	2500 surat							
							Terlaksananya Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional	Roda 2 (Zunit) Roda 4 (5 Unit)							
							Tersedianya Alat Tulis Kantor: 1. Amplop Tanggung 2. Toner HP 3. Kertas HVS kuarto 70 gr 4. Kertas HVS folio 70 gr 5. Kertas HVS kuarto 80 gr 6. Kertas HVS folio 80 gr 7. Refil cartridge HP Black 8. Refil cartridge HP Color 9. Stopmap Folio 10. Spidol Whiteboard 11. Hechneices 10/6 12. Kertas Facsimili 13. Penghapus Cair 14. Lem Kental Besar 15. Kertas Casing 16. Gunting besar 17. binder tipe 560 18. binder tipe 260 19. Paperclips 20. Pentel 21. boks arsip 22. Hectneices Max 24/6 23. Isi Ballpoint	23 jenis							
							Tersedianya Barang Cetak: 1. Amplop persegi putih 2. Amplop coklat berkop 3. Amplop coklat berkop (46x35 cm) 4. Kartu kendali masuk 5. Buku Tanda Bukti Pengeluaran 6. Stopmap berkop 7. Snelhcter berkop 8. Lembar Daftar Pengendai 9. Kartu Lembar Disposisi 10. Kartu Kendali Keluar 11. Kartu lembar pengantar	11 jenis							
							Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: 1. LED A60 10/13 W 2. LED A60 7 W 3. Isolasi 4. Roll kabel 15 m 5. Kabel 2 x 2,5 mm2	5 jenis							
							Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor: 1. Spray 400 gram 2. Tissue Toilet 3. Kamfer toilet 4. Kapur Barus 5. Handsoap cair botol 6. Black Magic 7. Kreolin Wangi 8. Ember Plastik 9. Lap Kendaraan 10. Tissue basah besar 11. Tissue 12. Pewangi ruangan 13. Pewangi Closet 14. Kesen Karpas	14 jenis							
							Tersedianya Surat kabar, Majalah dan Buku Perpustakaan: 1. Harian KR 2. Harian Jawa Pos 3. Harian Tribun 4. Majalah	4 Jenis							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan												Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4.01.4.01.02.04.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Terlaksananya pembayaran pegawai non PNS 14 orang	12 bulan	Dukungan sebesar 15% terhadap tercapainya presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 473.200.000,00	Rp. 49.500.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.02.04.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan - Eselon III/Golongan IV, 15 kali - Eselon IV, 21 kali - Golongan III, 82 kali	Dukungan sebesar 25 % terhadap tercapainya persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.052.260.000,00	Rp. 605.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan	
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah (Luar Jawa)	12 bulan - Eselon II, 1 orang 4 kali - Eselon III/Golongan IV, 12 kali - Eselon IV, 4 kali - Golongan III, 12 kali							
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah (Jawa)	12 bulan - Eselon II, 1 orang 20 kali - Eselon III/Golongan IV, 17 kali - Eselon IV, 24 kali - Golongan III, 54							
							Tersedianya makan dan minuman rapat	3.000 os							
4.01.4.01.02.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 304.043.000,00	Rp. 283.800.000,00			
4.01.4.01.02.04.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Terlaksananya pengadaan mebeulair	1 paket Partisi ruang laktasi	Dukungan sebesar 40 % terhadap pencapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 100%	100%	Rp. 169.973.000,00	Rp. 126.500.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan	
							Terlaksananya Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung Kantor: 1. AC 2. PC 3. Notebook 4. Printer 5. UPS/Stabilizer 6. Pointer 7. Dispenser 8. Hardisk External 9. Mesin Ketik 10. Karpet 11. Sofa 12. Rak 13. Kulkas	13 jenis							
4.01.4.01.02.04.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional	7 unit (2 unit kendaraan roda dua dan 5 unit kendaraan roda empat)	Dukungan sebesar 20 % terhadap pencapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 101.600.000,00	Rp. 121.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan												Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.04.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor : 1. Komputer 2. Mainboard PC 3. Mainboard notebook 4. Laptop/Notebook 5. Printer 6. Hard disk 7. Mesin ketik manual 8. LCD Proyektor 9. Lampu Balast 10. Lensa 11. Stabilizator 12. Bateray	12 jenis	Dukungan sebesar 40% dalam pencapaiannya peningkatan sarana prasarana aparatur	100%	Rp. 32.470.000,00	Rp. 36.300.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.04.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 86.820.000,00	Rp. 155.320.000,00		
4.01.4.01.02.04.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Tersusunnya Bahan LKPJ dan LKJ	2 laporan bahan LKPJ dan LKJ	Dukungan sebesar 25 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 7.000.000,00	Rp. 7.700.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
							Tersusunnya LKJJP	1 Laporan						
4.01.4.01.02.04.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan keuangan tahunan Audited	1 Laporan	Dukungan sebesar 25 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 13.000.000,00	Rp. 14.520.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
							Laporan keuangan Bulanan	12 Laporan						
							Laporan keuangan semester	2 Laporan						
							Laporan keuangan tahunan gabungan	1 Laporan						
							Laporan keuangan triwulan	4 Laporan						
4.01.4.01.02.04.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Forum Perangkat Daerah	1 Berita Acara Forum PD	Dukungan sebesar 25 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 50.640.000,00	Rp. 113.740.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
							Pengembangan Sistem Informasi	1 aplikasi						
							Tersusunnya Renja Biro PIWP2 Perubahan Th 2020	1 dokumen						
							Tersusunnya Renja Biro PIWP2 Th 2021	1 dokumen						
							Tersusunnya RKA dan DPA 2021	1 dokumen						
							Tersusunnya RKA-P dan DPA-P 2020	1 dokumen						
							Tersusunnya ROPK 2020	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan												Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.04.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Biro PIWP2	4 dokumen	Dukungan sebesar 25 % terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 16.180.000,00	Rp. 19.360.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.04.28	PROGRAM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA										Rp. 1.579.751.500,00	Rp. 4.300.000.000,00		
4.01.4.01.02.04.28.001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan	100%	Terlaksanannya Pemantauan dan Evaluasi pengadaan barang/jasa	4 dokumen	Dukungan sebesar 95% terhadap Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan sebesar 100 %	100%	Rp. 424.017.500,00	Rp. 3.900.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
							Terselenggaranya Pelayanan pengadaan barang/jasa terintegrasi	12 bulan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perjinaan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewaan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD											
4.01.4.01.02.04.28.002	Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang Terselesaikan	100%	Laporan kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	1 dokumen	Dukungan 5% terhadap Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan sebesar 100 %	100%	Rp. 705.734.000,00	Rp. 400.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan	
							Laporan Strategi Pengadaan	1 dokumen							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Bencana Daerah			Peningkatan Kinerja UKPBJ	2 kali						
				Badan Pendidikan dan Pelatihan			Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa	2kali						
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			Tersedianya 16 Jabatan Fungsional	12 bulan						
				Badan Penghubung Daerah										
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										
				Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam										
				Biro Bina Pembedayaan Masyarakat										
				Biro Hukum										
				Biro Organisasi										
				Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan										
				Biro Tata Pemerintahan										
				Biro Umum										
				Hubungan Masyarakat dan Protokol										
				Dinas Kebudayaan										
				Dinas Kelautan dan Perikanan										
				Dinas Kesehatan										
				Dinas Komunikasi dan Informatika										
				Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah										
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan										
				Dinas Pariwisata										
				Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral										
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk										
				Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga										
				Dinas Perhubungan										

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan												Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD											
4.01.4.01.02.04.28.003	Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan	100%	Terlaksananya pelayanan pengadaan secara elektronik	12 bulan	Dukungan sebesar 95% terhadap Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan sebesar 100 %	100%	Rp. 450.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.02.04.30	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR DAERAH										Rp. 1.065.000.000,00	Rp. 1.650.000.000,00			
4.01.4.01.02.04.30.001	Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Infrastruktur Daerah yang Ditindaklanjuti	65%	Dokumen rumusan Kebijakan Pembangunan Bidang IPTEKS oleh DRD DIY	1 dokumen	Dukungan 50 % terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti sebesar 65 %.	100%	Rp. 565.000.000,00	Rp. 935.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan	
							Dokumen Bahan rumusan Kebijakan Sektoral	2 dokumen							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan												Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Pertanahan dan Tata Ruang			Dokumen Rumusan Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Kawasan Parsela DIY	1 dokumen						
4.01.4.01.02.04.30.002	Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan infrastruktur daerah	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Infrastruktur Daerah yang Ditindaklanjuti	65%	Dokumen Kajian Evaluasi Monev Keterpaduan Infrastruktur Wilayah pada Kawasan Strategis di DIY	1 dokumen	Dukungan 50 % terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti sebesar 65 %.	100%	Rp. 500.000.000,00	Rp. 715.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.04.31	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN										Rp. 427.180.000,00	Rp. 750.000.000,00		
4.01.4.01.02.04.31.001	Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Biro Hukum	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Ditindaklanjuti	65%	Pemetaan (Mapping) Pemangku Kepentingan SDGs Non Pemerintah	1 dokumen	Dukungan 50 % terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang ditindaklanjuti sebesar 65 %.	100%	Rp. 268.500.000,00	Rp. 400.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
							Strategi percepatan Pelaksanaan Program PPAS	1 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kalistimewan											

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan												Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Ghasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										
4.01.4.01.02.04.31.002	Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Ditindaklanjuti	65%	Laporan hasil Monev dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	1 dokumen	Dukungan 50 % terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang ditindaklanjuti sebesar 65 %.	100%	Rp. 158.680.000,00	Rp. 350.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewaan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Ghrasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD											
4.01.4.01.02.04.32	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NON PEMERINTAH										Rp. 392.344.000,00	Rp. 1.014.000.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan												Jumlah Pagu : Rp. 5.565.993.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.04.32.001	Perumusan Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang Ditindaklanjuti	60%	Dokumen Rumusan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah (1 Dokumen)	1 dokumen	Dukungan 50 % terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang ditindaklanjuti sebesar 60%	100%	Rp. 160.980.000,00	Rp. 550.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.04.32.002	Monitoring dan evaluasi Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	1. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang Ditindaklanjuti	60%	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah (1 Dokumen)	1 dokumen	Dukungan 50 % terhadap Persentase rumusan bahan kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang ditindaklanjuti sebesar 60%	100%	Rp. 231.364.000,00	Rp. 464.000.000,00	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Organisasi														Jumlah Pagu : Rp. 1.970.947.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan														
4.01	SEKRETARIAT DAERAH														
4.01.4.01.02.05	Biro Organisasi														
4.01.4.01.02.05.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 695.130.000,00	Rp. 436.157.852,00			
4.01.4.01.02.05.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor	32 jenis	Dukungan sebesar 10,74% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 70.867.000,00	Rp. 98.157.852,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan	
							Barang cetakan	7 jenis							
							Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	11 jenis							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	3 unit							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	5 unit							
							Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 jenis							
							Langganan surat kabar harian dan majalah	4 jenis 12 bulan							
							Penggandaan	30.000 lembar							
							Pengiriman dokumen	1 paket							
							Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2 buah							
							Perangko, Material, benda pos	420 buah							
							Surat keluar	2.700 lembar							
							Surat Masuk	2.500 lembar							
4.01.4.01.02.05.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah	1 kegiatan	Dukungan terhadap 71,43% administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran dan fungsi SKPD	100%	Rp. 624.263.000,00	Rp. 338.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan	
							Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	2.000 os							
4.01.4.01.02.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 128.585.000,00	Rp. 160.000.000,00			
4.01.4.01.02.05.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKPMBD	3 unit	Dukungan terhadap 63,01% sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 79.235.000,00	Rp. 100.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Organisasi												Jumlah Pagu : Rp. 1.970.947.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKPMBD	5 unit							
4.01.4.01.02.05.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	AC ruangan	15 unit	Dukungan terhadap 22,17% sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 49.350.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan	
							CPU	13 unit							
							Faximile	1 unit							
							LCD	2 unit							
							Mesin Ketik	4 unit							
							Monitor	7 unit							
							Notebook	10 unit							
							Printer	16 unit							
							Suku cadang CPU	13 unit							
							Suku cadang Notebook	7 unit							
							Suku cadang printer	13 unit							
							Suku cadang printer dotmatrik	6 unit							
							Suku cadang UPS	10 unit							
							Suku cadang wireless	1 unit							
4.01.4.01.02.05.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 77.337.000,00	Rp. 166.000.000,00			
4.01.4.01.02.05.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	Nilai LKJIP : A (>80)	Dukungan 4,01% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.800.000,00	Rp. 7.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.02.05.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 7 program 17 kegiatan	Laporan keuangan SKPD deviasi 5%	Dukungan 9,97% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 8.500.000,00	Rp. 17.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.02.05.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Dukungan 76,32% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 60.537.000,00	Rp. 135.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan	
							Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA TA.2021 dan Perubahan TA. 2020	6 dokumen							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 1.970.947.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.05.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 7 program 17 kegiatan	100%	Dukungan 9,68% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 4.500.000,00	Rp. 7.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.05.19	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI										Rp. 154.966.000,00	Rp. 725.110.000,00		
4.01.4.01.02.05.19.002	Koordinasi, monitoring dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perkonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Persentase Jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik	76%	Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada 37 OPD	1 (satu) laporan	Dukungan 82,34% terhadap persentase jumlah OPD yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan baik	100%	Rp. 105.794.000,00	Rp. 525.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
							Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada 5 kab/kota	1 (satu) laporan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 1.970.947.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewan Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD											
4.01.4.01.02.05.19.003	Perumusan kebijakan, koordinasi, dan monitoring akuntabilitas kinerja	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan	Persentase Jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik	76%	Dokumen LKJIP, PK dan BA serah terima	37 dokumen LKJIP, PK dan BA	Dukungan 17,66% terhadap persentase jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik	100%	Rp. 49.172.000,00	Rp. 200.110.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 1.970.947.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Infrastruktur Wilayah dan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektoria Panirdya Kaistimewan Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD											

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 1.970.947.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4.01.4.01.02.05.21	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN STANDARISASI										Rp. 914.929.000,00	Rp. 1.351.900.000,00			
4.01.4.01.02.05.21.001	Perumusan Kebijakan Standarisasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kegewawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional	1inovasi	Pemeliharaan dan Updating e-SHBJ	1 Aplikasi	Dukungan 65,65% terhadap jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria nasional	100%	Rp. 589.218.000,00	Rp. 351.900.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan	
							Rapergub Pemberian Dana Operasional, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Kesejahteraan Berupa Tunjangan Perumahan, Belanja Rumah Tangga, Tunjangan Transportasi dan Uang Pembelian Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD	1 Rapergub							
							Rapergub SB	1 Rapergub							
							Rapergub SHBJ	1 Rapergub							
							Review SOP Internal Perangkat Daerah Penda DIY	37 SK Kepala Perangkat Daerah							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 1.970.947.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Pendukung Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektoria Panirdya Kaistimewan Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										
4.01.4.01.02.05.21.002	Perumusan Kebijakan Pelayanan Umum	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional	1inovasi	Jumlah Inovasi pelayanan publik yang dibina (sesuai Pergub Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi)	15 inovasi	Dukungan 34,35% terhadap jumlah inovasi pelayanan publik sesuai kriteria nasional	100%	Rp. 325.711.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
							Jumlah inovasi yang diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan Kementerian PAN dan RB RI	10 inovasi						
							Rekomendasi hasil Monev Indeks Kepuasan Masyarakat	95 unit pelayanan publik						
							Rekomendasi Monev Kepatuhan Standar Pelayanan	95 unit pelayanan publik						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 1.970.947.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewaan Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol													Jumlah Pagu : Rp. 15.675.327.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan														
4.01	SEKRETARIAT DAERAH														
4.01.4.01.02.06	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol														
4.01.4.01.02.06.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 5.956.484.000,00	Rp. 6.685.000.000,00			
4.01.4.01.02.06.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	3 Surat kabar harian	12 bulan	Dukungan 89,61% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 4.621.524.000,00	Rp. 6.000.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan	
							Alat tulis kantor	83 jenis							
							Alat-alat/perlengkapan petugas arsip	2 jenis							
							Arsip Inaktif tertata	9.000 berkas							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2	30 unit							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 3	1 unit							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4	41 unit							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 6	2 unit							
							Cetak Kalender 2021	4825 bh							
							Cetakan Umum	25 jenis							
							Ekstra fooding 9 orang petugas arsip	12 bulan							
							Jasa keamanan kantor 2 orang	12 bulan							
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan							
							Jasa KIR	3 kendaraan							
							Jasa pengiriman pos dalam dan luar daerah	12 bulan							
							Kelestarian arsip inaktif	900 m3							
							Ketertiban Administrasi Pengurusan Naskah Dinas TU Sekda	25.000 berkas							
							Komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor	30 jenis							
							Pembayaran rekening telepon, air, dan listrik	12 bulan							
							Pemeliharaan aquarium air laut dan air tawar 4 unit	12 bulan							
							Pemeliharaan taman	12 bulan							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol												Jumlah Pagu : Rp. 15.675.327.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Pengandaan	85.000 lembar							
							PNS Terampil Kearsipan Dinamis	30 orang							
							PNS Terampil Sisminkada	100 orang							
							Tenaga angkut arsip	12 oh							
4.01.4.01.02.06.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku	3 orang	Dukungan 1,27% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.500.000,00	Rp. 85.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan	
							Kinerja pengelola kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang							
							Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	10 orang							
4.01.4.01.02.06.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan 9,12% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.333.460.000,00	Rp. 600.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan	
							Konsultasi dan Koordinasi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Dalam Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun							
							Konsultasi dan Koordinasi Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Luar Jawa terlaksana dengan baik	1 tahun							
							Makanan dan Minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun							
							Pelayanan kehumasan untuk koordinasi/peliputan/dokumentasi kegiatan KDH/WKDH di dalam daerah dan luar daerah	1 tahun							
							Pelayanan keprotokolan untuk koordinasi persiapan kunjungan Pejabat Negara dan memandu kegiatan KDH/WKDH di dalam daerah dan luar daerah	1 tahun							
4.01.4.01.02.06.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 3.083.875.000,00	Rp. 2.575.000.000,00			
4.01.4.01.02.06.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Sound System	1 Paket	Dukungan terhadap pencapaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10%	Rp. 420.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol													Jumlah Pagu : Rp. 15.675.327.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.06.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Gedung bersejarah	13 unit	Dukungan 17,65% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 750.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							Gedung tempat kerja	11 unit						
							Pagar Kepatihan	1 paket						
4.01.4.01.02.06.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Biaya retribusi parkir	12 bulan	Dukungan 45,64% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.150.000.000,00	Rp. 1.325.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							Kelengkapan kendaraan	22 jenis						
							Kendaraan dinas/operasional roda 2	30 unit						
							Kendaraan dinas/operasional roda 3	1 unit						
							Kendaraan dinas/operasional roda 4	40 unit						
							Kendaraan dinas/operasional roda 6	2 unit						
							Kendaraan tidak bermotor sepeda roda 2	10 unit						
							Pengecatan kendaraan	12 bulan						
4.01.4.01.02.06.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	BBM operasional genset	12 bulan	Dukungan 12,43% terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 138.875.000,00	Rp. 500.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan alat-alat kantor	10 jenis						
							Pemeliharaan barang bercorak kesenian	1 set						
							Pemeliharaan instalasi air limbah/kotor 53 m ³	12 bulan						
							Pemeliharaan instalasi Air minum/bersih 533 m ³	12 bulan						
							Pemeliharaan jaringan listrik	12 bulan						
							Pemeliharaan perlengkapan kantor	11 jenis						
4.01.4.01.02.06.02.006	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas roda 4	2 unit	Mendukung capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10%	Rp. 975.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.06.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 67.850.000,00	Rp. 135.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol												Jumlah Pagu : Rp. 15.675.327.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.06.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) yang capaiannya kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2020	Nilai LKJIP "A"	Dukungan 2,98% terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.400.000,00	Rp. 8.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.06.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10% ditetapkan pada 7 program 19 kegiatan	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 10% ditetapkan pada 7 program 19 kegiatan	Dukungan 5,96% terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 2.550.000,00	Rp. 15.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.06.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Berita Acara hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPD	1 dokumen BA	Dukungan 85,68% terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 59.250.000,00	Rp. 100.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							ROPK, RKT, Renja, RKA, dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	5 dokumen						
							Upgrade system	1 paket						
4.01.4.01.02.06.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan untuk 7 program 17 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 5,37% terhadap terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 2.650.000,00	Rp. 12.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.06.25	PROGRAM PELAYANAN KERUMAH TANGGAAN										Rp. 2.777.690.000,00	Rp. 3.500.000.000,00		
4.01.4.01.02.06.25.001	Penyelenggaraan Layanan Kerumaha tanggan Pimpinan dan Tamu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumaha tanggan terhadap Pimpinan dan Tamu	83skor	Pelayanan kerumaha tanggan kepada Pimpinan: Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Staf Ahli Guebunur, Asisten Sekda	12 bulan	Dukungan 70% terhadap pencapaian skor dan indeks kepuasan pelayanan kerumaha tanggan terhadap pimpinan dan tamu	100%	Rp. 2.683.972.000,00	Rp. 3.300.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							Pelayanan kerumaha tanggan penerimaan tamu Pemda DIY	12 bulan						
4.01.4.01.02.06.25.003	Penyediaan sarana dan prasarana kerumaha tanggan pimpinan dan tamu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumaha tanggan terhadap Pimpinan dan Tamu	83skor	Alat/Perlengkapan	5 jenis	Dukungan 30% terhadap pencapaian skor dari indeks kepuasan pelayanan kerumaha tanggan terhadap pimpinan dan tamu	100%	Rp. 93.718.000,00	Rp. 200.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							pengisian tabung gas 12 kg	55 kali						
							Pengisian tabung pemadam kebakaran	4 jenis						
							peralatan kebersihan dan bahan pembersih	19 jenis						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol											Jumlah Pagu : Rp. 15.675.327.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.06.26	PROGRAM PELAYANAN KEPROTOKOLAN										Rp. 2.714.858.000,00	Rp. 3.700.000.000,00		
4.01.4.01.02.06.26.001	Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan Pimpinan dan Tamu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Protokol terhadap Pimpinan dan Tamu	83skor	Pelayanan keprotokolan kepada Pimpinan: Gubernur, Wakil Gubernur, Staf Ahli Gubernur, Sekda, Asisten Sekda	12 bulan	Dukungan 70% terhadap pencapaian skor dari indeks kepuasan pelayanan protocol terhadap pimpinan dan tamu	100%	Rp. 1.006.408.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							Pelayanan keprotokolan penerimaan tamu pmda DIY	12 bulan						
							Rapat Kerja Regional Jawa Staf Ahli Gubernur	1 kali						
							Rapat koordinasi daerah Staf Ahli Gubernur, Staf Ahli Bupati, Staf Ahli Walikota Se-DIY	5 kali						
4.01.4.01.02.06.26.002	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara lainnya	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Skor dari Indeks Kepuasan Pelayanan Protokol terhadap Pimpinan dan Tamu	83skor	Korps Musik Pemda DIY	1 tahun	Dukungan 30% terhadap skor dari indeks kepuasan pelayanan protocol terhadap pimpinan dan tamu	100%	Rp. 1.708.450.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							Pelaksanaan Upacara / Acara lainnya tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	40 kali						
							Pelaksanaan Upacara Bendera Lainnya tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	2 upacara						
							Pelaksanaan Upacara PHBN tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	10 upacara						
4.01.4.01.02.06.27	PROGRAM PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT										Rp. 1.074.570.000,00	Rp. 3.250.000.000,00		
4.01.4.01.02.06.27.002	Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Peningkatan Jumlah Pengakses Informasi Pemda	283860pengunjung	Buku kerja	700 eksemplar	Dukungan 60% terhadap peningkatan jumlah pengakses informasi pemda	100%	Rp. 513.770.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan
							Penyebarluasan informasi melalui media cetak	13 kali						
							Penyebarluasan informasi melalui media luar ruang	74 buah						
							Penyebarluasan informasi melalui media radio	9 kali						
							Penyebarluasan informasi melalui media sosial	7 paket						
							Penyebarluasan informasi melalui media TV	55 kali						
							Penyebarluasan informasi melalui SPD Jogjawara	6.000 eksemplar						
4.01.4.01.02.06.27.003	Pembinaan Kemitraan Media dan Pers	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Peningkatan Jumlah Pengakses Informasi Pemda	283860pengunjung	Analisis Intelligence Media Management (IMM)	48 laporan IMM	Dukungan 40% terhadap tercapainya peningkatan jumlah pengakses informasi pemda	100%	Rp. 560.800.000,00	Rp. 1.250.000.000,00	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol											Jumlah Pagu : Rp. 15.675.327.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Berita hasil pers tour	2 pemberitaan pers tour						
							Jumpa pers	10 kali						
							Meningkatnya kemitraan Pemda DIY dengan Media Massa melalui forum pemred	1 Laporan pelaksanaan forum pemred						
							Meningkatnya kemitraan Pemda DIY dengan Media Massa melalui Gathering pers	1 laporan pelaksanaan gathering pers						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat													Jumlah Pagu : Rp. 5.418.508.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Wajib														
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
1.13.4.01.02.07	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat														
1.13.4.01.02.07.19	PROGRAM PENGELOLAAN REKAYASA SOSIAL MASYARAKAT										Rp. 350.000.000,00	Rp. 707.000.000,00			
1.13.4.01.02.07.19.002	Pembinaan Gotong Royong Kelompok Masyarakat	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Kota Yogyakarta	Desa/kelurahan model gerakan gotong royong	8Desa/Kelurahan	02. Jumlah kelurahan implementasi model segoro amarto	8 kelurahan	01. Mendukung terbentuknya kelompok masyarakat desa/kelurahan	100%	Rp. 350.000.000,00	Rp. 707.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan	
									02. Mendukung terbentuknya kelompok masyarakat desa dengan model segoro amarto	100%					
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan														
4.01	SEKRETARIAT DAERAH														
4.01.4.01.02.07	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat														
4.01.4.01.02.07.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 439.201.000,00	Rp. 300.000.000,00			
4.01.4.01.02.07.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Surat masuk	2160 surat	Dukungan 21,53% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 68.385.000,00	Rp. 70.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan	
							02. Surat Keluar	5500 surat							
							03. Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4	4 unit							
							05. Alat Tulis Kantor	39 jenis							
							06. Barang Cetak	8 jenis							
							07. Barang Penggandaan	12500 lembar							
							08. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis							
							09. Surat Kabar	2 jenis							
							10. Buku Referensi/Peraturan Perundangan	1 paket							
4.01.4.01.02.07.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dan Barang 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	11 orang	Dukungan 12,58% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 43.116.000,00	Rp. 50.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat												Jumlah Pagu : Rp. 5.418.508.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							02. Kinerja Pengelola Kepegawalan 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 orang							
4.01.4.01.02.07.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Makan dan minum sidang 2000 orang	4000 orang	Dukungan 65,87% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 327.700.000,00	Rp. 180.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan	
							02. konsultasi dan koordinasi dalam daerah	12 bulan							
							03. konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 bulan							
4.01.4.01.02.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 419.097.000,00	Rp. 1.162.000.000,00			
4.01.4.01.02.07.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Pengadaan almari 2 unit	100%	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 262.347.000,00	Rp. 300.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan	
							02. Pengadaan filling kabinet 1 unit	100%							
							03. Pengadaan komputer 1 unit	100%							
							04. Pengadaan printer 1 unit	100%							
							05. Pengadaan meja kursi tamu 1 unit	100%							
							06. Pengadaan kamera digital 1 unit	100%							
							07. Pengadaan faximile 1 unit	100%							
4.01.4.01.02.07.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBMMD terpelihara	4 unit	Dukungan 12,66% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 90.590.000,00	Rp. 95.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan	
							02. Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBMMD terpelihara	2 unit							
4.01.4.01.02.07.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Perengkapan Gedung Kantor sesuai RKPBMMD Terpelihara : 8 jenis	100%	Dukungan 49,77% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 16.160.000,00	Rp. 17.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.02.07.02.006	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	02. pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2 = 2 unit	100%	Dukungan terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 750.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat													Jumlah Pagu : Rp. 5.418.508.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.02.07.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 76.291.000,00	Rp. 79.708.800,00		
4.01.4.01.02.07.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	100%	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 4.000.000,00	Rp. 4.500.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.07.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 5 program 14 kegiatan	100%	Dukungan 12,59% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 7.137.000,00	Rp. 7.500.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.07.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	01. Renstra 2018-2022	1 dokumen	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 58.146.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
							02. Dokumen Renja 2020	1 dokumen						
							03. DPA 2020	1 dokumen						
							04. ROPK 2019	1 dokumen						
4.01.4.01.02.07.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 6 program 16 kegiatan	100%	Dukungan 10,42% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 7.008.000,00	Rp. 7.708.800,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
4.01.4.01.02.07.38	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MASYARAKAT										Rp. 1.489.829.000,00	Rp. 1.800.000.000,00		
4.01.4.01.02.07.38.001	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Girimulyo Girisubo Lendah Nglipar Sewon Tempel	Rumusan Bahan Pengelolaan kebijakan penguatan sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti	4dokumen	01. Jumlah kebijakan sektor sosial yang disusun	3 dokumen	Dukungan pada penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat	100%	Rp. 980.000.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan
							02. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektor PM yang terlaksana	1 dokumen						
							03. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektor sosial yang terlaksana	1 dokumen						
							04. Jumlah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor sosial yang terlaksana	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat													Jumlah Pagu : Rp. 5.418.508.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4.01.4.01.02.07.38.003	Perumusan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Masyarakat	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Rumusan Bahan Pengelolaan kebijakan penguatan sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti	4dokumen	01. Penyusunan kajian pemenuhan hak anak	1 dokumen	Dukungan pada penyusunan kebijakan kapasitas sumberdaya masyarakat	100%	Rp. 509.829.000,00	Rp. 600.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan	
							02. Rapergub Pengarusutamaan Gender	1 dokumen							
							03. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektor KB-KS yang terlaksana	1 laporan							
							04. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sektor PP-PA yang terlaksana	1 laporan							
							05. Jumlah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor KB-KS yang terlaksana	1 laporan							
							06. Jumlah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor PP-PA yang terlaksana	1 dokumen							
4.01.4.01.02.07.41	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN SUMBER DAYA MASYARAKAT										Rp. 2.644.090.000,00	Rp. 1.800.000.000,00			
4.01.4.01.02.07.41.003	Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	DIY	Jumlah pembinaan dan fasilitas lembaga kemasyarakatan	4kegiatan	01. Bantuan Kelembagaan LPMD/LPMK pada lokasi TMMD	15 lokasi	Dukungan terhadap penguatan 4 jenis lembaga kemasyarakatan	100%	Rp. 2.556.462.000,00	Rp. 1.700.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan	
							02. Bantuan Kelembagaan TP PKK	1 lembaga							
4.01.4.01.02.07.41.004	Pembinaan pengelola lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Cangkringan Gondomanan Imogiri Mantrijeron Panggang Panjatan Prambanan Imogiri Mantrijeron Gotakan Panjatan	Jumlah pembinaan dan fasilitas lembaga kemasyarakatan	4kegiatan	01. Jumlah fasilitas TMMD	15 lokasi	dukungan terhadap penguatan 4 jenis lembaga kemasyarakatan	100%	Rp. 87.628.000,00	Rp. 100.000.000,00	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Sedang Berjalan	
							02. Jumlah fasilitas TP PKK	1 paket							
							03. Jumlah fasilitas pokjanal posyandu	1 paket							
							04. Jumlah fasilitas perancangan BBGRM dan HKG PKK tingkat provinsi	1 paket							
							05. Jumlah fasilitas evaluasi desa/kelurahan melalui lomba desa/kelurahan	1 paket							
							06. Bantuan kelembagaan pada lokasi TMMD	15 lokasi							
							07. Bantuan kelembagaan kepada TP PKK	1 lembaga							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penghubung Daerah												Jumlah Pagu : Rp. 3.996.555.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
4.01.4.01.04.00	Badan Penghubung Daerah													
4.01.4.01.04.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 945.683.000,00	Rp. 1.700.000.000,00		
4.01.4.01.04.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	BANHUBDA DIY	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Arsip Dinamis SKPD	35.000 berkas	Dukungan 52,78% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 499.113.000,00	Rp. 500.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
							ATK	43 jenis						
							Barang cetakan	10 jenis						
							Barang penggandaan	80.000 lembar						
							Bukti pembayaran air 2 sambungan	12 bulan						
							Bukti pembayaran internet 2 jaringan	12 bulan						
							Bukti pembayaran listrik 14.038 kwh	12 bulan						
							Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas operasional yang tepat waktu	11 unit						
							Bukti pembayaran telepon 5 saluran	12 bulan						
							Kebersihan Anjungan DIY LT: 6.308m2 ;LB:5.227,5 m2	1 tahun						
							Kebersihan Kantor Menteng LT: 1.420m2 ;LB: 1.087m2	1 tahun						
							Kebersihan mess Pedati LT1.200 m2 ; LB:978 m2	1 tahun						
							Pengiriman	1 tahun						
							Pengisian tabung gas	6 kali						
							Pengisian tabung pemadam kebakaran	10 tabung						
							Peralatan listrik	7 jenis						
							Surat kabar	720 eks						
							Surat keluar	660 lembar						
							Surat masuk	600 lembar						
4.01.4.01.04.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Bahubda	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Tersedianya jasa pengelolaan keuangan, pengelola barang, dan pengelola kepegawaian	12 bln	Dukungan 0.60 % terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 5.700.000,00	Rp. 700.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penghubung Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 3.996.555.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.4.01.04.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi Badan Penghubung Daerah dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan 46,62% terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 440.870.000,00	Rp. 500.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
							Konsultasi dan koordinasi Badan Penghubung Daerah luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun						
							Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun						
4.01.4.01.04.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 368.372.000,00	Rp. 257.075.000,00		
4.01.4.01.04.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peralatan gedung kantor sesuai RKBM	3 jenis	Dukungan 8,77% terhadap persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	100%	Rp. 32.296.000,00	Rp. 0,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Gedung sesuai RKBM 3 unit ; Anjungan DIY di TMII LB:5.227,5 m2, gedung kantor di Menteng LB: 1.087m2, gedung di Pedati LB: 978 m2	3 unit	Dukungan 53,86% terhadap persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 198.419.000,00	Rp. 76.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Kendaraan dinas operasional roda dua	2 unit	Dukungan 32,01% terhadap persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	100%	Rp. 117.897.000,00	Rp. 150.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
							Kendaraan dinas operasional roda empat	9 unit						
4.01.4.01.04.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peralatan gedung kantor sesuai RKBM	10 jenis	Dukungan 5,36% terhadap persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 19.760.000,00	Rp. 31.075.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 20.260.000,00	Rp. 118.600.000,00		
4.01.4.01.04.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) dilaksanakan triwulan I tahun 2020	Nilai LKJIP SKPD A	Dukungan 18,02% terhadap persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 3.650.000,00	Rp. 3.650.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi anggaran SKPD sesuai dokumen yang telah ditetapkan	laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan 26,95% terhadap persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 5.460.000,00	Rp. 7.800.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Berita Acara Forum perencanaan OPD	1 BA	Dukungan 41,21% terhadap persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 8.350.000,00	Rp. 103.950.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Penghubung Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 3.996.555.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA.2020 dan Perubahan TA 2020)	Tersusunnya rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi sesuai standar 100%							
4.01.4.01.04.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran aliran kas yang telah ditetapkan	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi	Dukungan 13,82% terhadap persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 2.800.000,00	Rp. 3.200.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.04.00.43	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN TAMU KANTOR PERWAKILAN DAERAH										Rp. 1.628.716.000,00	Rp. 884.650.000,00			
4.01.4.01.04.00.43.002	Pelayanan Pimpinan dan Tamu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung Daerah	Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah	86angka indeks	Tamu yang memberikan apresiasi positif terhadap pelayanan	87%	Dukungan 98,93% terhadap peningkatan kualitas layanan tamu Bdan Penghubung Daerah	100%	Rp. 1.611.336.000,00	Rp. 770.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.04.00.43.004	Pelayanan Informasi dan Kemitraan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung Daerah	Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah	86angka indeks	Kesepakatan bersama dengan BANHUBDA se Indonesia dan masyarakat DIY di Jakarta	2 kali	dukungan 1,07% terhadap peningkatan kualitas layanan tamu Badan Penghubung Daerah	100%	Rp. 17.380.000,00	Rp. 114.650.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.04.00.44	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI POTENSI DAERAH DAN SENI BUDAYA DAERAH						Kesepakatan bersama dengan mitra	2 kesepakatan			Rp. 1.033.524.000,00	Rp. 1.545.000.000,00			
4.01.4.01.04.00.44.001	Perluasan Jaringan Pemasaran Potensi Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung Daerah	Persentase peningkatan kualitas pelaksanaan promosi potensi dan budaya daerah	1Even	Kajian potensi perluasan jaringan promosi	1 kajian	Dukungan 94,19 % terhadap peningkatan kualitas layanan promosi potensi dan seni budaya	100%	Rp. 973.524.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.04.00.44.002	Promosi Seni dan Budaya Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penghubung Daerah	Persentase peningkatan kualitas pelaksanaan promosi potensi dan budaya daerah	1Even	Persentase kepuasan mitra yang difasilitasi promosi melalui Jakarta Fair dan Pekan Raya Indonesia	90 %	Dukungan 5,81% terhadap peningkatan promosi potensi dan seni budaya daerah	100%	Rp. 60.000.000,00	Rp. 245.000.000,00	Badan Penghubung Daerah	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Sekretariat DPRD											Jumlah Pagu : Rp. 73.559.889.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.02	SEKRETARIAT DPRD													
4.02.4.01.06.00	Sekretariat DPRD													
4.02.4.01.06.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 9.108.298.000,00	Rp. 5.005.000.000,00		
4.02.4.01.06.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor	20 Jenis	Dukungan 40,53% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran pelayanan dewan dan kegiatan dewan	40,53%	Rp. 3.165.738.000,00	Rp. 2.475.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							Barang cetakan	21 jenis						
							General Check Up pimpinan dan anggota DPRD	55 Orang						
							Jumlah Surat Keluar	4000 surat						
							Jumlah Surat Masuk	3000 surat						
							Kebersihan gedung kantor 163.932m2	12 Bulan						
							Kinerja tenaga keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	25 orang						
							Komponen Peralatan Listrik dan penerangan kantor	10 Jenis						
							Pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional	33 Unit						
							Pembayaran Rek. Air 3 sat sambungan (300m3)	12 Bulan						
							Pembayaran Rek. listrik 2 sat sambungan (197.500 VA & 147.000 VA) (375 Kwh)	12 Bulan						
							Pembayaran Rek. telepon 6 sat sambungan,	12 Bulan						
							Pembayaran SMS gateway	12 Bulan						
							Penggandaan	5 materi/bahan						
							Pengiriman dokumen	12 Paket						
							Retribusi sampah perkotaan	12 Bulan						
							Tertatanya arsip aktif dan dinamis	10.000 Berkas (5 bagian)						
4.02.4.01.06.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja Tenaga Pelayanan Kantor (Pramuadi) dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	2 Orang	Dukungan 6,10% terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran OPD	6,10%	Rp. 476.542.000,00	Rp. 1.804.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							Kinerja tenaga pengelola arsip dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	8 Orang						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Sekretariat DPRD												Jumlah Pagu : Rp. 73.559.889.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4.02.4.01.06.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kegiatan konsultasi/koordinasi dan Kunjungan Kerja DPRD dapat terfasilitasi dengan baik	1 Tahun	Dukungan 53,37% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas OPD	53,37%	Rp. 5.466.018.000,00	Rp. 726.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
							Konsultasi dan koordinasi sekretariat DPRD DIY dalam daerah terlaksana dengan baik	1 Tahun							
							Konsultasi dan koordinasi sekretariat DPRD DIY luar daerah terlaksana dengan baik	1 Tahun							
							Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 Tahun							
							Makan minum tamu Sekretariat DPRD DIY tersedia sesuai kebutuhan	1 Tahun							
4.02.4.01.06.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 2.299.884.000,00	Rp. 3.236.200.000,00			
4.02.4.01.06.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	6 Jenis	Dukungan 47,57% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	47,57%	Rp. 1.094.065.000,00	Rp. 810.700.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
4.02.4.01.06.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Gedung kantor	6750 m2	Dukungan 8,66% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	8,66%	Rp. 199.150.000,00	Rp. 1.122.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
4.02.4.01.06.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKPBM	12 Unit	Dukungan 30,02% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	30,02%	Rp. 690.387.000,00	Rp. 880.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
							Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKPBM	21 Unit							
4.02.4.01.06.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peralatan gedung kantor	2 Jenis	Dukungan 13,75% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	13,75%	Rp. 316.282.000,00	Rp. 423.500.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
							Perlengkapan Gedung Kantor	5 Jenis							
4.02.4.01.06.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 192.950.000,00	Rp. 210.000.000,00			
4.02.4.01.06.00.03.004	Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pelatihan pengembangan softskill SDM	90 orang	Dukungan 100 % terhadap capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	Rp. 192.950.000,00	Rp. 210.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Sekretariat DPRD												Jumlah Pagu : Rp. 73.559.889.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4.02.4.01.06.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 184.759.000,00	Rp. 203.230.900,00			
4.02.4.01.06.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Nilai LAKIP SKPD Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP "A"	Dukungan 9,74 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	9,74 %	Rp. 18.000.000,00	Rp. 19.800.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
4.02.4.01.06.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan keuangan sesuai dengan Realisasi Penggunaan Anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi.	18 Dokumen	Dukungan 20,83 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	20,83 %	Rp. 38.480.000,00	Rp. 42.328.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
4.02.4.01.06.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Hasil Forum OPD untuk musrenbang RKPD	1 dokumen	Dukungan 50,25% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	50,25%	Rp. 92.839.000,00	Rp. 102.122.900,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
4.02.4.01.06.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Renstra, ROPK, Renja, PK, RKA, dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2021 dan Perubahan TA. 2020)	10 Dokumen	Dukungan 19,18% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	19,18%	Rp. 35.440.000,00	Rp. 38.980.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
4.02.4.01.06.00.15	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERAKHIBAH RAKYAT DAERAH										Rp. 29.404.797.000,00	Rp. 51.854.000.000,00			
4.02.4.01.06.00.15.001	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Bahan Acara yang Selesai dengan Fasilitas Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan Agenda Program Kerja DPRD DIY	95%	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD pada 4 kali Kegiatan Bimbingan Teknis	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 55 orang 4 kali	Dukungan 11,76% terhadap pencapaian persentase bahan acara yang selesai dengan fasilitas Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda program kerja DPRD DIY	11,76%	Rp. 2.324.968.000,00	Rp. 3.575.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
4.02.4.01.06.00.15.004	Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Bahan Acara yang Selesai dengan Fasilitas Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan Agenda Program Kerja DPRD DIY	95%	Jumlah produk hukum yang dibahas	20 BA Pansus/AKD	Dukungan 69,82% terhadap pencapaian persentase bahan acara yang selesai dengan fasilitas Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda Program Kerja DPRD	69,82%	Rp. 22.766.906.000,00	Rp. 42.097.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
							Laporan hasil kerja Badan Kehormatan	3 laporan rekomendasi BK kepada Pimpinan DPRD							
							Laporan hasil kerja DPRD	1 laporan kinerja DPRD kepada Kemendagri							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Sekretariat DPRD														Jumlah Pagu : Rp. 73.559.889.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Laporan hasil kerja komisi	4 Laporan Kinerja Komisi kepada Pimpinan DPRD							
							Program Kerja DPRD	2 Kewpan tentang Program Kerja DPRD							
							Seleksi Anggota baru KPID periode 2020-2023	1 Keputusan DPRD tentang KPID 1 rekomendasi DPRD DIY tentang TIMSEL Calon Anggota KPID							
4.02.4.01.06.00.15.005	Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD DIY	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Bahan Acara yang Selesai dengan Fasilitas Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan Agenda Program Kerja DPRD DIY	95%	PA Fraksi	88 PA	Dukungan 9,71% terhadap pencapaian persentase bahan acara yang selesai dengan fasilitas Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda Program Kerja DPRD	9,71%	Rp. 1.919.071.000,00	Rp. 2.084.500.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
							PU Fraksi	88 PU							
							Rekomendasi Fraksi	11 Rekomendasi x 8 Fraksi							
4.02.4.01.06.00.15.006	Penyelenggaraan Kinerja Anggaran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Bahan Acara yang Selesai dengan Fasilitas Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan Agenda Program Kerja DPRD DIY	95%	Kepwan pokok pikiran DPRD	1 Bahan Acara	Dukungan 8,71% terhadap pencapaian persentase bahan acara yang selesai dengan fasilitas Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda Program Kerja DPRD	8,71%	Rp. 2.393.852.000,00	Rp. 4.097.500.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
							Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2021	1 Bahan Acara							
							Nota Kesepakatan KUPA-PPASP 2020	1 Bahan Acara							
							Persetujuan Bersama raperda APBD 2021	1 Bahan Acara							
							Persetujuan Bersama raperda APBD P 2020	1 Bahan Acara							
							Persetujuan Bersama raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019	1 Bahan Acara							
4.02.4.01.06.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN REGULASI DAERAH										Rp. 10.861.723.000,00	Rp. 16.016.000.000,00			
4.02.4.01.06.00.16.005	Penyelenggaraan Kinerja Legislasi DPRD DIY	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	Draft Raperda/ Raperdais inisiatif 5 NA, 5 draf raperda Inisiatif, dan 8 Rekomendasi Kelayakan Raperda untuk dibahas sesuai dengan Propemperda	18 draft	Dukungan 45,32 % terhadap Pencapaian Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	45,32 %	Rp. 5.124.852.000,00	Rp. 6.820.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
							Draft Raperwan, Draft Rakepwan, Draft Rakeppim, Draft Rakep BK	180 draft							
4.02.4.01.06.00.16.006	Penyelenggaraan Kinerja Pengawasan DPRD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	Info kajian kebijakan	4 Info Kajian Kebijakan	Dukungan 24,82 % terhadap Pencapaian Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	24,82 %	Rp. 1.996.203.000,00	Rp. 2.717.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Sekretariat DPRD												Jumlah Pagu : Rp. 73.559.889.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Kajian Kebijakan untuk penguatan fungsi dewan di Alat kelengkapan dewan	4 Kajian AKD							
							Rekomendasi bahan pengawasan	4 Kajian/Rekomendasi							
4.02.4.01.06.00.16.007	Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	Pengundangan/ pengadministrasian produk hukum	180 produk hukum	Dukungan 29,86 % terhadap Pencapaian Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang Diselesaikan Tepat Waktu	29,86 %	Rp. 3.740.668.000,00	Rp. 6.479.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
							Sosialisasi perda	1 x 4 bidang komisi							
							Sosialisasi perUJAn	6 produk hukum							
4.02.4.01.06.00.18	PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN										Rp. 21.507.478.000,00	Rp. 27.016.000.000,00			
4.02.4.01.06.00.18.001	Pembentahan DPRD dan Sekretariat DPRD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informais Publik dan Keprotokoleran	85%	Kemitraan Wartawan	4 Kegiatan	Dukungan 19,52 % terhadap Pencapaian Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informasi Publik dan Keprotokoleran	19,52 %	Rp. 3.010.489.000,00	Rp. 5.830.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
							Publikasi kinerja DPRD pada 10 jenis media	3000 share konten							
4.02.4.01.06.00.18.002	Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informais Publik dan Keprotokoleran	85%	Laporan Audiensi	24 audiensi	Dukungan 28,20 % terhadap Pencapaian Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informasi Publik dan Keprotokoleran	28,20 %	Rp. 6.104.387.000,00	Rp. 6.600.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
							Laporan Hearing/Dialog	22 Hearing							
							Laporan kaukus parlemen	10 forum kaukus							
							Laporan Reses	3 x 55 x 4 lokasi reses							
							Laporan Unjukrasa	48 (12 x 4) laporan rekomendasi terhadap hasil audiensi							
4.02.4.01.06.00.18.003	Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informais Publik dan Keprotokoleran	85%	Fasilitasi tugas dinas Pimp Dewan	15 laporan hasil tugas dinas	Dukungan 47,59% terhadap Pencapaian Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informasi Publik dan Keprotokoleran	47,59 %	Rp. 11.669.849.000,00	Rp. 13.640.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	
							Fasilitasi 6 Rapur DPRD yang bersifat pengumuman	6 rapur berjalan dengan lancar (dibuktikan laporan)							
							Fasilitasi Kunker LN bagi 55 pimpinan/ anggota dewan	11 Laporan rekomendasi hasil perjalanan dinas luar negeri							
							Layanan tamu DPRD terhadap 2400 orang yang terlayani dengan baik	Kepuasan terhadap layanan tamu oleh Setwan 70% (70% sari sampel)							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Sekretariat DPRD											Jumlah Pagu : Rp. 73.559.889.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Penyediaan pakaian Berciri Khas Daerah dan Pakaian Dinas beserta atributnya bagi 55 pimpinan/anggota dewan	305 pakaian dinas dan atribut sesuai peraturan yang berlaku							
4.02.4.01.06.00.18.004	Pengelolaan Data dan TI	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Layanan Aspirasi Masyarakat, Aksesibilitas Informatika Publik dan Keprotokoleraan	85%	Tersedianya layanan PPID berupa Data yang dibutuhkan masyarakat	3 jenis data (Wajib, Reguler dan Serta Merta)	Dukungan 4.69 % capaian Persentase layanan aspirasi masyarakat, aksesibilitas informasi publik dan keprotokoleraan.	4,69 %	Rp. 722.753.000,00	Rp. 946.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Inspektorat												Jumlah Pagu : Rp. 25.824.668.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan														
4.03	INSPEKTORAT														
4.03.4.01.07.00	Inspektorat														
4.03.4.01.07.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 4.045.086.000,00	Rp. 1.870.000.000,00			
4.03.4.01.07.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor	13 jenis	Dukungan 24.19% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 376.983.000,00	Rp. 450.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
							Barang cetakan	9 jenis							
							Komponen peralatan kelistrikan dan bangunan kantor	6 jenis							
							Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 2	4 unit							
							Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 4	13 unit							
							Paket pengiriman	12 bulan							
							Pembelian Meterai	320 lembar							
							Penggandaan dokumen dokumen	71.360 lembar							
							Pengisian tabung pemadam kebakaran	3 buah							
							Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6 jenis							
							Retribusi sampah kantor	12 bulan							
							Tagihan rekening telepon 5 sambungan, rekening listrik 500 Kwh, rekening air 10 m3	12 bulan							
							Tertatanya Arsip Aktif / In Aktif	12 bulan							
4.03.4.01.07.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja pelayanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	7 orang	Dukungan 35.81% terhadap terwujudnya Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 601.763.000,00	Rp. 670.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
							Kinerja pengelola kepegawain dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 orang							
							Kinerja pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 orang							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Inspektorat											Jumlah Pagu : Rp. 25.824.668.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Kinerja keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	10 orang							
							Kinerja Non PNS dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	2 orang							
							Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	9 orang							
							Kinerja penyimpanan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 orang							
4.03.4.01.07.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Koordinasi dan pemeriksaan OPD dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan 39,71% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.066.340.000,00	Rp. 750.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
							Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun							
4.03.4.01.07.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 20.013.633.000,00	Rp. 845.000.000,00			
4.03.4.01.07.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Tersedianya Gedung Tempat Kerja seluas 3.675 m2	Terselesainya gedung pembangunan gedung tempat bekerja Tahap II 100%	Dukungan 93,96% terhadap terwujudnya meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 18.750.001.000,00	Rp. 0,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
4.03.4.01.07.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Komputer sesuai RKBMD 2 jenis	11 unit	Dukungan 4,99% terhadap tercapainya meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 1.053.912.000,00	Rp. 620.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
							Meubelair sesuai RKBMD 7 Jenis	8 unit							
							Meubelair sesuai RKBMD 7 Jenis	479 buah							
4.03.4.01.07.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKBMD	4 unit	Dukungan 0,84% terhadap terwujudnya meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 168.620.000,00	Rp. 180.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
							Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKBMD	13 unit							
4.03.4.01.07.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD	8 jenis	Dukungan 0,21% terhadap terwujudnya meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 41.100.000,00	Rp. 45.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Inspektorat												Jumlah Pagu : Rp. 25.824.668.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keeluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Perengkapan gedung kantor sesuai RKBMD	1 jenis							
4.03.4.01.07.00.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 177.834.000,00	Rp. 210.000.000,00			
4.03.4.01.07.00.03.002	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui Bimtek	4 angkatan 70 orang	Dukungan 78.80 terhadap terwujudnya meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 171.650.000,00	Rp. 180.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
							Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat	10 orang							
4.03.4.01.07.00.03.003	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Daftar Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis JFA dalam 1 tahun	2 periode @ 70 orang	Dukungan 21.20% terhadap terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 6.184.000,00	Rp. 30.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
4.03.4.01.07.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 86.324.000,00	Rp. 107.000.000,00			
4.03.4.01.07.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan	Nilai LKJIP A	Dukungan 1.91% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 2.114.000,00	Rp. 3.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
4.03.4.01.07.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan pada 5 program 18 kegiatan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 2%	Dukungan 3.13% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.468.000,00	Rp. 4.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
4.03.4.01.07.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2021 dan Perubahan TA 2020	Dukungan 81.56% terhadap terwujudnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 77.028.000,00	Rp. 95.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
							Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA							
4.03.4.01.07.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 5 program 18 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Dukungan 3.35% terhadap terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Rp. 3.714.000,00	Rp. 5.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
4.03.4.01.07.00.16	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN										Rp. 1.501.791.000,00	Rp. 8.950.000.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Inspektorat											Jumlah Pagu : Rp. 25.824.668.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.03.4.01.07.00.16.001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	85%	Evaluasi LKJIP Pemerintah Daerah DIY	37 LHE	Dukungan 71.29% terhadap prosentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana an Prasarana sebesar 85%	100%	Rp. 274.573.000,00	Rp. 6.800.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	85%	Laporan Cash Opname dan Stock Opname SKPD	37 Laporan						
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	85%	Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	190 LHP						
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	85%	Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	37 Laporan						
							Laporan Review Dokumen Perencanaan SKPD DIY	37 Laporan						
							Laporan telaah sejawat kabupaten/kota	2 laporan						
							Pengelolaan Dana Keistimewaan	1 Laporan						
		Telaah sejawat antar Inspektorat Provinsi	1 Laporan											
4.03.4.01.07.00.16.002	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan K D H	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	85%	Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT Tahun 2021	1 SK Gubernur	Dukungan 17.68% terhadap prosentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana an Prasarana sebesar 85%	100%	Rp. 713.531.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	85%	Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi	1 Laporan						
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	85%	Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah	1 Laporan						
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	85%	Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY tahun 2019	1 Laporan						
							Laporan Sekretariat Bersama Pengawasan Dana Desa	4 Laporan						
							Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1 Laporan						
							Laporan Triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat waktu	4 Laporan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Inspektorat												Jumlah Pagu : Rp. 25.824.668.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4.03.4.01.07.00.16.004	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	85%	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 5 daerah kabupaten/kota	5 Laporan	Dukungan 2.77% terhadap persentase Kinerja perangkat daerah Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana sebesar 85%	100%	Rp. 30.540.000,00	Rp. 350.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	85%									
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	85%									
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	85%									
4.03.4.01.07.00.16.005	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	85%	Rekapitulasi hasil pengawasan	1 laporan	Dukungan 1.56% terhadap persentase Kinerja perangkat daerah Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana sebesar 85%	100%	Rp. 99.407.000,00	Rp. 110.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	85%	Rekapitulasi hasil tindak lanjut pengawasan	3 laporan							
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	85%									
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	85%									
4.03.4.01.07.00.16.006	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	85%	Tindak lanjut temuan hasil pengawasan	2 laporan	Dukungan 0.38% terhadap persentase kinerja perangkat daerah Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana sebesar 85%	100%	Rp. 11.170.000,00	Rp. 40.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	85%									
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	85%									
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	85%									
4.03.4.01.07.00.16.007	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	85%	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus	50 LHP	Dukungan 6.31% terhadap persentase Kinerja perangkat daerah Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana sebesar 85%	100%	Rp. 372.570.000,00	Rp. 450.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan	
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	85%									
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	85%									

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Inspektorat										Jumlah Pagu : Rp. 25.824.668.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	85%								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Paniradya Kaistimewan											Jumlah Pagu : Rp. 755.500.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
4.01.4.01.02.09	Paniradya Kaistimewan													
4.01.4.01.02.09.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 380.272.000,00	Rp. 1.145.000.000,00		
4.01.4.01.02.09.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Tervujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat tulis kantor	22 jenis	Dukungan 18,93% terhadap kelancaran pelayanan administrasi kantor yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 72.000.000,00	Rp. 115.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan
							Barang cetakan	15 jenis						
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu roda dua	7 unit						
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu roda empat	9 unit						
							Buku/ Kepustakaan	1 tahun						
							Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis						
							Majalah	2 jenis						
							Pengandaan	19992 lembar						
							Peralatan Rumah Tangga	6 jenis						
							Surat Kabar	4 SKH						
4.01.4.01.02.09.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Tervujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 orang	Dukungan 18,23% terhadap kelancaran pelayanan administrasi kantor yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 69.300.000,00	Rp. 480.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan
							Kinerja pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 orang						
							Kinerja penyimpan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 orang						
							Kinerja pegawai honorer/non PNS/tidak tetap dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	2 orang						
							Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	10 orang						
4.01.4.01.02.09.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Tervujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan 62,84% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 238.972.000,00	Rp. 550.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Paniradya Kaistimewan											Jumlah Pagu : Rp. 755.500.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Konsultasi dan koordinasi luar daerah terlaksana dengan baik	1 tahun							
							Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun							
4.01.4.01.02.09.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 347.928.000,00	Rp. 470.000.000,00			
4.01.4.01.02.09.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peralatan gedung kantor	4 jenis	Dukungan 21,25% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 73.919.000,00	Rp. 100.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.02.09.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas / operasional roda dua	7 unit	Dukungan 74,91% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 260.634.000,00	Rp. 350.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan	
							Kendaraan dinas / operasional roda empat	9 unit							
4.01.4.01.02.09.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peralatan gedung kantor	3 jenis	Dukungan 3,84% terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 13.375.000,00	Rp. 20.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.02.09.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 27.300.000,00	Rp. 40.000.000,00			
4.01.4.01.02.09.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKJIP: A	Dukungan 17,58% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 4.800.000,00	Rp. 7.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.02.09.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Laporan keuangan OPD dengan deviasi kurang dari 10%	Dukungan 21,98% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 6.000.000,00	Rp. 7.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan	
4.01.4.01.02.09.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Dukungan 32,97% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 9.000.000,00	Rp. 18.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan	
							ROPK, RKT, Renja, RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Dokumen perencanaan SKPD TA. 2021 dan Perubahan TA. 2020)	2 Dokumen							
4.01.4.01.02.09.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran 99%	Dukungan 27,47% terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 7.500.000,00	Rp. 8.000.000,00	Paniradya Kaistimewan	Sedang Berjalan	

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													Jumlah Pagu : Rp. 11.614.306.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.20	STATISTIK													
1.20.4.02.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													
1.20.4.02.01.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH										Rp. 1.147.910.000,00	Rp. 2.800.000.000,00		
1.20.4.02.01.00.16.004	Penyediaan Data Statistik	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Analisis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	1. Dokumen Analisis PDRB DIY sebagai bahan penyusunan RKPD 2021	1 dokumen Analisis PDRB DIY Tahun 2020	Dukungan 100% terhadap persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah sebesar 100%	100%	Rp. 936.513.000,00	Rp. 1.900.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
					Tingkat Kepuasan Pelanggan	70%	2. Dokumen Analisis ICOR DIY sebagai bahan penyusunan RKPD 2021	1 dokumen Analisis ICOR DIY Tahun 2020						
							3. Dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY sebagai bahan penyusunan RKPD 2021	1 dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY Tahun 2020						
							4. Dokumen Analisis Kemiskinan DIY	1 dokumen Analisis Kemiskinan						
							5. Dokumen Analisis Ketimpangan Daerah DIY	1 dokumen Analisis Ketimpangan Daerah						
							6. Penyediaan Data Statistik Sektoral Perencanaan dan Pengendalian	1 dokumen data statistik						
							7. Penyediaan Data Geospasial Perencanaan dan Pengendalian	1 dokumen data geospasial						
1.20.4.02.01.00.16.005	Penyajian dan Informasi Data Statistik	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Analisis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	1. DIY dalam angka	85 buku DIY dalam angka	Dukungan 100% terhadap persentase tingkat kepuasan pelanggan sebesar 70%	100%	Rp. 211.397.000,00	Rp. 900.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
					Tingkat Kepuasan Pelanggan	70%	2.Update Aplikasi : Jogja dataku	1 aplikasi : Up date interface, dan pengembangan manajemen data dan alat analisisnya						
							3. Update aplikasi : Geoportal DIY	1 aplikasi : Pengembangan link services antar geoportal, Pengembangan fungsi analisis query dan overlay						
							4. Update dan verifikasi data statistik	1 paket konten data jogja dataku						
							5. Update dan verifikasi data geospasial	1 paket konten data geospasial						
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.04	PERENCANAAN													

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah												Jumlah Pagu : Rp. 11.614.306.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4.04.4.02.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah														
4.04.4.02.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 3.038.332.000,00	Rp. 2.771.084.248,00			
4.04.4.02.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Bahan bacaan dan Perundang-undangan: - Buku Ilmu Pengetahuan terkait Litbang	1 Paket	Dukungan 76,92% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 575.286.000,00	Rp. 1.158.084.248,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28 jenis							
							11. Penyediaan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih	34 jenis							
							12. Penyediaan alat-alat/perengkapan	2 jenis							
							13. Penyediaan jasa sewa sewa tanaman	12 bulan							
							14. Bahan bacaan dan Perundang-undangan: - surat kabar	8 jenis							
							15. Bahan bacaan dan Perundang-undangan: - Buku Perundang-undangan	1 paket							
							16. Penyediaan Jasa surat menyurat : - Surat keluar	3.500 surat							
							17. Pengelolaan Arsip Dinamis Arsip Dinas SKPD: - Penataan Arsip	175 boks							
							18. Pembayaran tagihan rekening Telepon	12 bulan							
							19. Penyediaan Jasa surat menyurat : - Surat masuk	5.500 surat							
							2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional: - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4	12 unit							
							20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional: - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	5 unit							
							3. Penyediaan Jasa surat menyurat : - Pengiriman dokumen	240 kali							
							4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor: - Pembersihan kantor BAPPEDA dan BPPSD	12 bulan							
							5. Penyediaan Jasa surat menyurat : - benda pos	2550 lembar							
							6. Pengelolaan Arsip Dinamis Arsip Dinas SKPD: - Penilaian dan Penyusutan Arsip	150 boks							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													Jumlah Pagu : Rp. 11.614.306.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							7. Penyediaan Alat Tulis Kantor: - Alat tulis kantor	168 jenis							
							8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan: - Barang cetakan	30 jenis							
							9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan: - Penggandaan surat-surat/dokumen lainnya	155.390 lembar							
4.04.4.02.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan	12 bulan	Dukungan 7,69 % terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 436.088.000,00	Rp. 248.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							Tenaga Pendukung Perangkat Daerah	10 orang							
4.04.4.02.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Tersedianya makan dan minuman rapat	6900 os	Dukungan 15,38% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 2.026.958.000,00	Rp. 1.365.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							2. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	12 bulan : Gol IV/Es III: 3 org 20 kali Gol III, 4 org 12 kali Gol II, 5 org 24 kali							
							3. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar Daerah (Jawa)	12 bulan : Eselon II/Gol IV, 5 org 21 kali Eselon IV/Gol III, 7 org 21 kali							
							4. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar Daerah (Luar Jawa)	12 bulan : Eselon II/Gol IV, 4 org 4 kali Eselon IV/Gol III, 2 org 4 kali							
							5. Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu : - Penilaian Angka Kredit	2 kali penilaian							
							6. Fasilitasi kegiatan pejabat fungsional tertentu : - Penerbitan Journal	1 kali penerbitan							
							7. Fasilitasi kegiatan pejabat fungsional tertentu: - Pelaksanaan workshop/ rapat kerja	1 kali							
							8. Motivasi Kerja Pegawai Bappeda meningkat	150 orang							
4.04.4.02.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.059.002.000,00	Rp. 1.548.868.295,00			
4.04.4.02.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program 01-06	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rehabilitasi Depo Arsip	1 unit	Dukungen 20 % terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 35.000.000,00	Rp. 297.228.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah														Jumlah Pagu : Rp. 11.614.306.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4.04.4.02.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Pengadaan komputer Note Book	4 unit	Dukungan 20 % terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 317.127.000,00	Rp. 401.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							10. Pengadaan LCD	1 unit							
							2. Pengadaan Air Conditioner	4 unit							
							3. Pengadaan Printer	7 unit							
							4. Pengadaan Almari	2 unit							
							5. Pengadaan Komputer PC	12 unit							
							6. Pengadaan CCTV	1 paket							
							7. Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	2 unit							
		8. Pengadaan Pompa Air	1 unit												
4.04.4.02.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Gedung kantor terpelihara	4 unit	Dukungan 20 % terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 239.000.000,00	Rp. 259.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
4.04.4.02.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas/operasional terpelihara: 1. Kendaraan dinas roda 4	12 unit	Dukungan 20 % terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 328.300.000,00	Rp. 433.220.855,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							Kendaraan dinas/operasional terpelihara: 2. Kendaraan dinas roda 2	5 unit							
4.04.4.02.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Pemeliharaan Jaringan komputer & internet	2 paket	Dukungan 20 % terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	Rp. 139.575.000,00	Rp. 158.419.440,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							10. Pemeliharaan CCTV	1 unit							
							11. Pemeliharaan AC split	61 unit							
							12. Pemeliharaan AC floor standing	4 unit							
							13. Pemeliharaan Tabung pemadam kebakaran	6 buah							
							14. Pemeliharaan Almari	21 buah							
							15. Pemeliharaan Filling cabinet	18 buah							
							16. Pemeliharaan Meja Kerja	30 buah							
							17. Pemeliharaan Kursi Kerja	30 buah							
							18. Pemeliharaan meja kursi tamu	2 set							
							2. Pemeliharaan Generator set	1 unit							
							3. Pemeliharaan Komputer PC	60 unit							
							4. Pemeliharaan Printer	30 unit							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah														Jumlah Pagu : Rp. 11.614.306.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
							5. Pemeliharaan Komputer note book	19 unit									
							6. Pemeliharaan Mesin Tik manual	10 unit									
							7. Pemeliharaan LCD proyektor	10 unit									
							8. Pemeliharaan Sound system	5 unit									
							9. Pemeliharaan Faksimile	2 unit									
4.04.4.02.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 474.247.000,00	Rp. 533.686.670,00					
4.04.4.02.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	bahan LKJ dan LKPJ Perangkat Daerah Tahun 2019	2 dokumen bahan laporan kinerja LKJ dan LKPJ Tahun 2019	Dukungan 12,50% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	100%	Rp. 19.600.000,00	Rp. 21.560.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan			
							LKJIP Perangkat Daerah Tahun 2019	1 dokumen LKJIP tahun 2019									
4.04.4.02.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan Keuangan Semester	2 laporan	Dukungan 12,50% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan			
							Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	1 laporan									
							Laporan Keuangan Audited	1 laporan									
							Laporan Keuangan bulanan	12 laporan									
4.04.4.02.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. RKA-P 2020	1 Dokumen RKA-P 2020	Dukungan 37,50% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	100%	Rp. 390.147.000,00	Rp. 441.726.670,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan			
							10. Forum Perangkat Daerah	1 dokumen berita acara usulan perencanaan program/kegiatan Bappeda DIY Tahun 2021									
							11. Pengembangan sistem informasi internal	1 aplikasi									
							12. Profil Bappeda DIY	1 Paket									
							2. RKA 2021	1 Dokumen RKA 2021									
							3. DPA-P 2020	1 Dokumen DPA-P 2020									
							4. DPA 2021	1 Dokumen DPA 2021									
							5. Renja Perangkat Daerah 2021	1 Dokumen Renja PD 2021									

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah														Jumlah Pagu : Rp. 11.614.306.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							6. Renja Perangkat Daerah Perubahan 2020	1 Dokumen Renja PD Perubahan 2020							
							7. ROPK Perangkat Daerah 2020	1 Dokumen ROPK PD 2020							
							8. ROPK Perangkat Daerah Perubahan 2020	1 Dokumen ROPK PD Perubahan 2020							
							9. Pengelolaan Teknologi Informasi (pengelolaan jaringan internet)	12 bulan							
4.04.4.02.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	1. Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) BAPPEDA bulanan	12 dokumen laporan monev BAPPEDA bulanan	Dukungan 12,50% terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA	100%	Rp. 14.500.000,00	Rp. 15.400.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							2. Dokumen Laporan Timbal Balik Trivulan I-IV	4 dokumen laporan timbal balik							
							3. Dokumen Laporan Monev Bappeda Tahunan	1 dokumen laporan monev tahunan							
4.04.4.02.01.00.15	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										Rp. 2.169.027.000,00	Rp. 2.765.000.000,00			
4.04.4.02.01.00.15.004	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Perencanaan yang Berkualitas	100%	1. Dokumen RKPDP 2021 sbg dasar penyusunan KUA PPAS	1 dokumen RKPDP 2021	Dukungan 50 % terhadap persentase perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100%	Rp. 1.987.510.000,00	Rp. 2.450.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							Persentase Perencanaan yang Tepat Waktu Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	100%	2. Dokumen RKPDP sebagai dasar penyusunan KUPA PPASP	1 dokumen RKPDP 2020					
									Dukungan 50 % terhadap persentase perencanaan yang berkualitas	100%					
4.04.4.02.01.00.15.005	Perencanaan Pembangunan Lintas Sektoral dan Lintas Wilayah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Perencanaan yang Berkualitas	100%	1. Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2020 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat-daerah	1 dokumen sinkronisasi perencanaan Tahun 2020	Dukungan 50 % terhadap persentase perencanaan yang berkualitas	100%	Rp. 181.517.000,00	Rp. 315.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							Persentase Perencanaan yang Tepat Waktu Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	100%	2. Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2021 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat daerah	1 dokumen sinkronisasi perencanaan Tahun 2021					
									Dukungan 50% terhadap persentase perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100 %					
4.04.4.02.01.00.16	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN										Rp. 406.058.000,00	Rp. 1.375.500.000,00			

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah														Jumlah Pagu : Rp. 11.614.306.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4.04.4.02.01.00.16.004	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pertanian dan Kelautan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Perekonomian	88.37%	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pertanian dan Kelautan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPd dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPd dan KUPA-PPAS Tahun 2020	1 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2020 dan Tahun 2021	Dukungan 45,65 % terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang perekonomian sebesar 86,96%	100%	Rp. 206.824.000,00	Rp. 908.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							2. Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2019	1 Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2019							
							3. Dokumen perencanaan 2022	1 Dokumen Perencanaan Tahun 2022							
							4. Dokumen hasil Monev RAD Pangan dan Gizi	1 Dokumen hasil Monev RAD Pangan dan Gizi Tahun 2020							
							5. Dokumen RAD PG 2020-2025	1 Dokumen RAD PG 2020-2025							
4.04.4.02.01.00.16.005	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dunia Usaha	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Perekonomian	88.37%	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Dunia Usaha Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPd dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPd dan KUPA-PPAS Tahun 2020	1 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Dunia Usaha Tahun 2020 dan 2021	Dukungan 54,35 % terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang perekonomian sebesar 86,96%	100%	Rp. 199.234.000,00	Rp. 467.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							2. Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2019	1 Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2019							
							3. Dokumen perencanaan 2022	1 Dokumen Perencanaan 2022							
							4. Dokumen Kajian Penyusunan Percepatan Pertumbuhan Inklusi	1 Dokumen Kajian Penyusunan Percepatan Pertumbuhan Inklusi							
4.04.4.02.01.00.17	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL-BUDAYA										Rp. 746.686.000,00	Rp. 1.700.000.000,00			
4.04.4.02.01.00.17.005	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan SDM	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kebudayaan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya	91.14%	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang SDM sebagai bahan masukan Penyusunan RKPd dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPd dan KUPA-PPAS tahun 2020	1 dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang SDM tahun 2020 dan 2021	Dukungan 42,42% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sosial budaya sebesar 91,14%	100%	Rp. 83.355.000,00	Rp. 250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra subbidang SDM tahun 2019	1 dokumen evaluasi capaian program OPD mitra subbidang SDM tahun 2019							
							3. Dokumen perencanaan 2022	1 dokumen perencanaan 2022							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													Jumlah Pagu : Rp. 11.614.306.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.04.4.02.01.00.17.006	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kesra	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Sosial Rumah Sakit Jiwa Grihasia Rumah Sakit Paru Respira	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya	91,14%	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS tahun 2020 2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Kesra tahun 2019 3. Dokumen perencanaan 2022	1 dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra tahun 2020 dan 2021 1 dokumen evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Kesra tahun 2019 1 dokumen perencanaan 2022	Dukungan 43,94% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sosial budaya sebesar 91,14%	100%	Rp. 133.450.000,00	Rp. 700.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.4.02.01.00.17.007	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya	91,14%	1. Dokumen Evaluasi CSR/TSLP 2. Dokumen Evaluasi penanggulangan Kemiskinan DIY 3. Dokumen Monev TPB DIY 4. Pengembangan Aplikasi Sistem informasi Penanggulangan Kemiskinan	1 dokumen Evaluasi CSR/TSLP tahun 2020 1 dokumen Evaluasi penanggulangan Kemiskinan DIY tahun 2020 1 dokumen Monev TPB DIY tahun 2020 1 aplikasi	Dukungan 13,64% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sosial budaya sebesar 91,14%	100%	Rp. 529.881.000,00	Rp. 750.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.4.02.01.00.18	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA										Rp. 216.740.000,00	Rp. 1.500.000.000,00		
4.04.4.02.01.00.18.005	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Perhubungan	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sarana Prasarana	82,86%	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPAPPAS Tahun 2020 2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun 2019 3. Dokumen perencanaan 2022	1 dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM tahun 2020 dan 2021 1 dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun 2019 1 dokumen perencanaan 2022	Dukungan 54,29% terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sarana prasarana sebesar 82,86%	100%	Rp. 74.840.000,00	Rp. 592.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.04.4.02.01.00.18.006	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sarana Prasarana	82,86%	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2020	1 dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup tahun 2020 dan 2021	Dukungan 45,71 % terhadap persentase ketercapaian program pembangunan bidang sarana Prasarana sebesar 82,86 %	100%	Rp. 141.900.000,00	Rp. 907.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													Jumlah Pagu : Rp. 11.614.306.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2019	1 dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2019							
							3. Dokumen perencanaan 2022	1 dokumen perencanaan 2022							
							4. Dokumen Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	1 dokumen Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2020							
4.04.4.02.01.00.19	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN										Rp. 300.709.000,00	Rp. 965.000.000,00			
4.04.4.02.01.00.19.003	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan Umum	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Inspektorat Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Pemerintahan	91%	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pemerintahan Umum Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2020	1 dokumen perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2020 dan 2021	Dukungan kegiatan 61,76 % Terhadap Presentase ketercapaian program pembangunan Bidang pemerintahan sebesar 91%	100%	Rp. 161.379.000,00	Rp. 615.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2019	1 dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2019							
							3. Dokumen perencanaan 2022	1 dokumen perencanaan 2022							
4.04.4.02.01.00.19.004	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Administrasi Publik	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Paniradya Kaistimewan Sekretanat DPRD	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Pemerintahan	91%	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Administrasi Publik Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2020	1 dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Administrasi Publik Tahun 2020 dan 2021	Dukungan kegiatan 38,24 % Terhadap Presentase ketercapaian program pembangunan Bidang pemerintahan sebesar 91%	100%	Rp. 139.330.000,00	Rp. 350.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Administrasi Publik Tahun 2019	1 dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Administrasi Publik Tahun 2019							
							3. Dokumen perencanaan 2022	1 dokumen perencanaan 2022							
4.04.4.02.01.00.20	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH										Rp. 1.879.801.000,00	Rp. 2.850.000.000,00			
4.04.4.02.01.00.20.001	Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan	Persentase Capaian Kegiatan SKPD	90%	Laporan Evaluasi Hasil RKPD DIY	2 dokumen Laporan Evaluasi Hasil RKPD DIY Tahun 2019 dan Tahun 2020	Dukungan 50 % terhadap Persentase capaian kegiatan SKPD sebesar 89%	100%	Rp. 1.454.935.000,00	Rp. 2.200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 11.614.306.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			(14)	(15)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan	Persentase Evaluasi Hasil Dokumen Perencanaan Tepat Waktu Sesuai Regulasi yang Berlaku	100%	Laporan Evaluasi Hasil Program Pemda	1 dokumen Laporan Evaluasi Hasil Program Pemda Tahun 2019	Dukungan 50 % terhadap Persentase Evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku sebesar 100%	100%				
							Laporan Evaluasi Hasil Renja OPD DIY	2 dokumen Laporan Evaluasi Hasil Renja OPD DIY Tahun 2019 dan Tahun 2020						
							Laporan Evaluasi Hasil Renstra OPD DIY Tahun 2019	1 dokumen Laporan Evaluasi Hasil Renstra OPD DIY Tahun 2019						
							Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kab/Kota	2 dokumen Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kab/Kota Tahun 2019 dan Tahun 2020						
							Laporan evaluasi hasil RPJMD DIY Tahun 2019	1 dokumen Laporan evaluasi hasil RPJMD DIY Tahun 2019						
							Laporan Evaluasi Hasil RPJMD Kab/Kota Tahun 2019	1 dokumen Laporan Evaluasi Hasil RPJMD Kab/Kota Tahun 2019						
							Laporan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan (10 buku)	1 dokumen Laporan Evaluasi Kebijakan RKPD Tahun 2019						
							Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TW IV/ Tahun 2019	1 dokumen Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TW IV/ Tahun 2019						
							Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TWI-III/ Tahun 2020	3 dokumen Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TWI-III/ Tahun 2020						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													Jumlah Pagu : Rp. 11.614.306.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewaan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD			Update e-Monev/ web SENGUHU	1 aplikasi e-Monev / web SENGUHU							
4.04.4.02.01.00.20.002	Penilaian Kinerja Pembangunan Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Penghubung Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Biro Tata Pemerintahan Biro Umum Hubungan Masyarakat dan	Persentase Capaian Kegiatan SKPD	90%	Dokumen LKJ Pemda DIY Tahun 2019	1 dokumen LKJ Pemda DIY Tahun 2019	Dukungan 50% terhadap Persentase capaian kegiatan SKPD sebesar 89% Dukungan 50% terhadap Persentase Evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku sebesar 100%	100%	Rp. 424.866.000,00	Rp. 650.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
					Persentase Evaluasi Hasil Dokumen Perencanaan Tepat Waktu Sesuai Regulasi yang Berlaku	100%	Dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2019	1 dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2019							
							Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2019	1 dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2019							
							Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur Tahun 2020	1 dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur Tahun 2020							
							Draft Rapergub Pengendalian Pembangunan	1 dokumen draft Rapergub Pengendalian Pembangunan							
							Laporan Kinerja APBN Tahun 2019 dan 2020	1 dokumen Laporan Kinerja APBN Tahun 2019 dan 2020							
							Penyerahan DIPA APBN 2021	1 kali							
							Video Akuntabilitas Kinerja DIY	1 Video							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah												Jumlah Pagu : Rp. 11.614.306.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Perhubungan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertahanan dan Tata Ruang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Sosial Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Paniradya Kaistimewaan Pelayanan Langsung ke Masyarakat PPKD Program 01-06 Rumah Sakit Jiwa Grhasia Rumah Sakit Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD										
4.07	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah												Jumlah Pagu : Rp. 11.614.306.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4.07.4.02.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah														
4.07.4.02.01.00.16	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										Rp. 175.794.000,00	Rp. 630.000.000,00			
4.07.4.02.01.00.16.001	Penelitian Pembangunan Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Hasil Kelitbangan yang Terpilih untuk Mendukung Pembangunan Daerah	70%	Dokumen Hasil Penelitian	2 dokumen Hasil Penelitian	Dukungan 60% terhadap persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah sebesar 70%	100%	Rp. 123.360.000,00	Rp. 300.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
4.07.4.02.01.00.16.003	Penyelenggaraan Kegiatan Kelitbangan Pendukung	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Hasil Kelitbangan yang Terpilih untuk Mendukung Pembangunan Daerah	70%	1. Inventarisasi hasil penelitian Tahun 2020	1 dokumen inventarisasi hasil penelitian Tahun 2020	Dukungan 40% terhadap persentase hasil kelitbangan yang terpilih	100%	Rp. 52.434.000,00	Rp. 330.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan	
							2. Rekomendasi hasil penelitian Tahun 2020	1 dokumen rekomendasi hasil penelitian Tahun 2020							
							3. Laporan Monitoring Evaluasi Hasil Litbang	1 dokumen laporan money hasil litbang Tahun 2019							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset												Jumlah Pagu : Rp. 57.323.742.000,00			
Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan														
4.05	KEUANGAN														
4.05.4.03.01.00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset														
4.05.4.03.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 11.411.102.000,00	Rp. 10.774.740.000,00			
4.05.4.03.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor	44 Jenis	Dukungan 63.49% terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 6.807.824.000,00	Rp. 7.024.740.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
							Barang cetakan	15 Jenis							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2	21 unit							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4	29 unit							
							Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 6	1 unit							
							Bukti pembayaran retribusi sampah	12 bulan							
							Kebersihan gedung kantor	10 gedung 2 depo							
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14 jenis							
							Langganan surat kabar harian, majalah dan tabloid	8 jenis 12 bulan							
							Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan langganan internet	12 bulan							
							Pemilahan arsip keuangan in aktif	5000 berkas							
							Penggandaan	660000 berkas							
							Pengiriman dokumen	114 berkas							
							Penjilidan	770 buku							
							Penyusutan arsip keuangan	2.540 berkas							
							Surat keluar	13.000 dokumen							
							Surat masuk	7.600 dokumen							
4.05.4.03.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	58 orang	Dukungan 24.69% terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 2.403.278.000,00	Rp. 2.450.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset												Jumlah Pagu : Rp. 57.323.742.000,00					
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
																	(6)
							Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun	14 orang									
							Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun	14 orang									
							Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun	64 orang									
							Kinerja pengemudi dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	6 orang									
4.05.4.03.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik	12 Bulan	Dukungan 11.80% terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp. 2.200.000.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan			
							Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	12 Bulan									
4.05.4.03.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 21.702.031.000,00	Rp. 9.240.200.000,00					
4.05.4.03.01.00.02.001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Bantul Sleman Wates	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pembangunan ruang BPKB, Kanopi, kamar mandi, selasar (KPPD Bantul), Kanopi selasar lantai 3 KPPD kulon progo, Rehap ruang pelayanan, Pagur di Samsat pembantu Maguwoharjo	3 unit	Dukungan 26% terhadap sarana prasana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	Rp. 5.680.417.000,00	Rp. 2.450.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan			
4.05.4.03.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Mebeleur sesuai RKBMD	3 jenis	Dukungan 41,65% terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 3.350.000.000,00	Rp. 3.750.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan			
							Peralatan kantor sesuai RKBMD	8 jenis,									
							Perlengkapan kantor sesuai RKBMD,	10 jenis,									
4.05.4.03.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Depo kantor terpelihara sesuai RKBMD	2 unit	Dukungan 9.17% terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 1.950.000.000,00	Rp. 1.250.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan			
							Gedung kantor terpelihara sesuai RKBMD	11 unit									
							Mushola terpelihara sesuai RKBMD	6 unit									
							Ruang laktasi terpelihara sesuai RKBMD	6 unit									
							Smoke area terpelihara sesuai RKBMD	6 unit									

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset												Jumlah Pagu : Rp. 57.323.742.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Tempat parkir terpelihara sesuai RKBMD	6 unit							
4.05.4.03.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKBMD,	27 Unit,	Dukungan 6.66% terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 851.718.000,00	Rp. 950.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
							Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKBMD	26 Unit,							
							Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKBMD	1 unit							
4.05.4.03.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Peralatan kantor terpelihara sesuai RKBMD 32 jenis selama 12 bulan	32 jenis selama 12 bulan,	Dukungan 13,33% terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp. 2.032.996.000,00	Rp. 840.200.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
							AC terpelihara sesuai RKBMD	60 unit selama 12 bulan							
							Jaringan terpelihara sesuai RKBMD	4 jenis selama 12 bulan							
							Perlengkapan kantor terpelihara sesuai RKBMD	9 jenis selama 12 bulan							
4.05.4.03.01.00.02.007	Pengadaan Tanah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Karangmojo Wonosari	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Tanah untuk KPPD Gunungkidul	5200 m2	Dukungan 54,25 % terhadap sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd	100 %	Rp. 7.836.900.000,00	Rp. 0,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
4.05.4.03.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 153.450.000,00	Rp. 246.257.000,00			
4.05.4.03.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	LKJIP tahun 2019 yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja, IKU) paling lambat bulan Maret 2020	1 dokumen LKJIP dengan capaian kinerja sesuai dokumen perencanaan dengan mempertahankan nilai A	Dukungan 20% terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 9.720.000,00	Rp. 9.800.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
4.05.4.03.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi keuangan sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan pada 11 program 38 kegiatan	laporan keuangan dengan deviasi 5%	Dukungan 20% terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 25.000.000,00	Rp. 29.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
4.05.4.03.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Dukungan 50% terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 97.980.000,00	Rp. 186.510.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset												Jumlah Pagu : Rp. 57.323.742.000,00			
Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Informasi OPD yang akurat dan up to date	12 bulan							
							Renja, ROPK, RKA, DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	8 dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan tata kala waktu dan peraturan yang berlaku							
4.05.4.03.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi penggunaan anggaran sesuai dengan dengan anggaran kas yang ditetapkan pada 11 program 38 kegiatan	12 laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan sesuai DPA BPKA DIY	Dukungan 10% terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Rp. 20.750.000,00	Rp. 20.947.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
4.05.4.03.01.00.16	PROGRAM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH										Rp. 689.300.000,00	Rp. 2.374.000.000,00			
4.05.4.03.01.00.16.001	Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Ketepatan Waktu penyampaian dan Kelengkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Raperda Pertanggungjawaban APBD	100%	Laporan keuangan dana dekonsentrasi dan TP di DIY TA.2019 disusun paling lambat Februari dan Agustus 2020	2 dokumen laporan keuangan dekon dan TP di DIY	Dukungan 40% terhadap ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah serta Raperda pertanggungjawaban APBD	100%	Rp. 159.300.000,00	Rp. 1.697.850.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
							Laporan keuangan Pemda DIY TA.2019 Un audited selesai Maret 2020	1 dokumen laporan keuangan Pemda Un audited	Dukungan 40% terhadap ketepatan waktu penyampaian kelengkapan laporan keuangan pemda serta pertanggungjawaban APBD	100%					
							Laporan realisasi pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD selesai bulan Juli 2020	1 dokumen laporan realisasi pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis							
							Raperda Pertanggungjawaban APBD TA.2019 disampaikan paling lambat Juni 2020 sesuai dengan Perda PAPBD TA.2019	1 dokumen Raperda Pertanggungjawaban APBD							
4.05.4.03.01.00.16.002	Pengelolaan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Ketepatan Waktu penyampaian dan Kelengkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Raperda Pertanggungjawaban APBD	100%	Sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan lancar untuk 3 (tiga) jenis tahapan pengelolaan keuangan daerah (Penyusunan APBD, Penatausahaan Keuangan daerah, penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan)	1 sistem aplikasi SIPKD (penanganan aduan dalam waktu 4 hari)	Dukungan 60% terhadap ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah serta Raperda pertanggungjawaban APBD	100%	Rp. 530.000.000,00	Rp. 676.150.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
4.05.4.03.01.00.17	PROGRAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH										Rp. 374.630.000,00	Rp. 487.201.000,00			

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset												Jumlah Pagu : Rp. 57.323.742.000,00		
Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.05.4.03.01.00.17.002	Pengendalian Belanja Langsung	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Keakuratan dalam Penatausahaan Keuangan Daerah	100%	1. Penerbitan dokumen SP2D Belanja langsung seluruh PA dan KPA dari sektor Perekonomian, Pemerintahan, Sarana Prasarana dan Kesra	Paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM belanja langsung diterima dan dinyatakan lengkap dan sah	Dukungan 60% terhadap penatausahaan keuangan daerah yang akurat	100%	Rp. 210.390.000,00	Rp. 215.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
4.05.4.03.01.00.17.003	Pengendalian Belanja Tidak Langsung	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Keakuratan dalam Penatausahaan Keuangan Daerah	100%	BA Rekonsiliasi dgn Taspem dan BPJS	3 dokumen Berota Acara Rekonsiliasi dengan PT Taspem dan BPJS Kesehatan	Dukungan 40% terhadap penatausahaan keuangan daerah ysgn akurat	100%	Rp. 164.240.000,00	Rp. 272.201.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
								Penerbitan dokumen SP2D Belanja Tidak Langsung Gaji seluruh PA dan KPA Pemda DIY dari sektor Perekonomian, Pemerintahan, Sarana Prasarana dan Kesra (Paling lambat hari Pertama masuk kerja setiap bulan) Rekonsiliasi anggaran non kas	paling lambat hari pertama masuk kerja BUD setiap bulannya setelah dokumen SPP/SPM belanja tidak langsung gaji dinyatakan dan sah					
								Penerbitan dokumen SP2D Belanja Tidak Langsung Non seluruh PA dan KPA Pemda DIY dari sektor Perekonomian, Pemerintahan, Sarana prasarana dan kesra	Paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM belanja tidak langsung non gaji diterima dan dinyatakan lengkap dan sah					
4.05.4.03.01.00.18	PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										Rp. 917.970.000,00	Rp. 978.250.000,00		
4.05.4.03.01.00.18.001	Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100%	Hasil evaluasi paling lama 15 hari kerja setelah Raperda APBD Kab/Kota TA.2020 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri ttg Pedoman Penyusunan APBD TA. 2020,	5 Kep Gub ttg evaluasi APBD Kab/Kota	Dukungan 20% terhadap kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100%	Rp. 97.570.000,00	Rp. 98.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
								Hasil evaluasi paling lama 15 hari kerja setelah Raperda Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota 2018 diterima secara lengkap,	5 Kep Gub ttg evaluasi APBD Kab/Kota					
								Hasil evaluasi paling lama 15 hari setelah Raperda Perubahan APBD Kab/Kota TA.2019 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri ttg Pedoman Penyusunan APBD TA.2019,	5 Kep Gub ttg evaluasi APBD Kab/Kota					
								Hasil pencermatan kembali atas Perda APBD Kab/Kota 2019 dan Perubahan APBD Kab/Kota TA.2019	10 surat Sekda tentang hasil pencermatan kembali atas Perda APBD Kab/Kota					

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset												Jumlah Pagu : Rp. 57.323.742.000,00		
Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.05.4.03.01.00.18.002	Bina Pengelolaan Keuangan Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100%	Keputusan Gubernur tentang penetapan bendahara dan KPA/KPB APBD	2 Keputusan Gubernur tentang Bendahara dan KPA/KPB APBD	Dukungan 40% kinerja terhadap pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100%	Rp. 80.400.000,00	Rp. 90.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bendahara Dana Keistimewaan	4 Keputusan Gubernur tentang Bendahara Dana Keistimewaan						
							Keputusan Gubernur tentang Penetapan KPA/KPB Dana Keistimewaan	4 Keputusan Gubernur tentang KPA/KPB Dana Keistimewaan						
							Naskah akademik Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	1 naskah akademik						
							Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kelompok Sasaran Pengelola Keuangan	Pengelola Keuangan pada 32 OPD dan Pengelolan Administrasi Keuangan pada 6 BLUD						
							Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PMK dan Permendagri)	Peraturan Gubernur terkait Pengelolaan Keuangan Daerah						
4.05.4.03.01.00.18.003	Bina Administrasi BUMD dan BUKP	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100%	BUMD Ekspo	1 kegiatan	Dukungan 40% terhadap kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100%	Rp. 740.000.000,00	Rp. 790.250.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Dana bergulir BUKP(rekening pembiayaan)	Rp10.000.000.000,00						
							Deviden BUMD dan BUKP	1. BUMD: Deviden Tahun Buku 2018 Rp81.405.897.417,00 menjadi Rp89.305.897.417,80 ditahun 2019						
							Deviden BUMD dan BUKP	BUKP Tahun buku 2018: a. deviden 5.340.468.682,72 b. dana perimbangan Rp279.866.929,38 c. Jasa produksi Rp209.900.179,04 ditahun buku 2019 menjadi : a. deviden Rp5.500.000.000,00 b. dana perimbangan Rp280.000.000,00 c. Jasa produksi sebesar Rp210.000.000,						
							Kajian investasi BUMD Pengelolaan Aset	1 dokumen kajian						
							Keputusan Gubernur tentang pembagian laba bersih BUKP Tahun buku N-1	1 Keputusan						
							Keputusan Gubernur tentang pengesahan Laporan tahunan BUKP tahun buku N-1	1 keputusan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset												Jumlah Pagu : Rp. 57.323.742.000,00			
Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Keputusan Kepala BPKA tentang pengesahan RKAT BUKP Tahun Buku 2020 berdasarkan SE Pedoman penyusunan RKAT N+1 selambat-lambatnya akhir Nopember	1 Keputusan							
							Naskah akademik penyertaan modal daerah pada BUMD Pengelolaan Aset	1 dokumen Naskah Akademik							
							Penurunan NPL BUKP	semula 15,36% menjadi 15,00%							
							Penyertaan modal daerah pada BUMD Air Bersih (Rekening pembiayaan)	Rp12.500.000.000,00							
							Penyertaan modal pada PT AMI (Rekening Pembiayaan)	Rp18.855.090.000,00							
							Penyertaan modal pada PT Bank BPD DIY (Rekening Pembiayaan)	Rp145.000.000.000 (kekurangan tahun 2019), Rp222.040.000.000,00 (sesuai Perda untuk tahun 2020) sehingga total sebesar Rp367.040.000.000,00							
							Penyertaan modal pada PT Taru Martani (Rekening Pembiayaan)	Rp34.157.000.000,00 (APBD TA.2019 telah disetor Rp6.000.000.000,00)							
4.05.4.03.01.00.19	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH										Rp. 2.429.060.000,00	Rp. 4.385.500.000,00			
4.05.4.03.01.00.19.001	Perencanaan Pendapatan Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Kontribusi Pendapatan Paajak, Retribusi, BUMD, PAD Lain yang Sah Terhadap Belanja Daerah	31.47%	Rencana Target Pendapatan Daerah	Target pendapatan daerah terdiri dari: PAD: Rp2.105.928.128.299,55 Perimbangan:Rp2.354.158.090.300,00 LLPD: Rp9.295.119.190,00	Dukungan 30% terhadap meningkatnya Pendapatan daerah	Meningkatnya pendapatan daerah semula Rp5.669.061.394.455,20 menjadi Rp5.799.905.338.237,76	Rp. 107.470.000,00	Rp. 220.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
4.05.4.03.01.00.19.002	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Persentase Kontribusi Pendapatan Paajak, Retribusi, BUMD, PAD Lain yang Sah Terhadap Belanja Daerah	31.47%	Laporan Dana transfer sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku: 1. laporan DAK 2. Laporan DBH CHT 3. Laporan DID 4. Laporan BID 5. Laporan Danais 6. Lembar konfirmasi transfer (truwulan, semester dan pertahap)	20 dokumen tepat waktu sesuai PMK tentang pengelolaan dana transfer ke daerah dan dana desa	Dukungan 70% terhadap meningkatnya PAD	pendapatan daerah semula Rp5.6969.061.394.455,20 menjadi Rp5.799.905.338.237,76	Rp. 2.321.590.000,00	Rp. 4.165.500.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 57.323.742.000,00

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
							Peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: 1. Kenaikan pendapatan pajak semua Rp1.693.249.366.202,43 (2019) menjadi Rp1.872.103.158.467,48 2. Retribusi semua Rp39.290.207.422,50 (2019) menjadi 39.904.262.771,63 (2020) 3. Kenaikan pendapatan dari HPKYD (BUMD), semua Rp87.043.497.015,- (2019) menjadi Rp95.627.571.865,- (2020) 4. Lain-lain PAD yang sah semua Rp96.692.424.024,95 (2019) menjadi Rp100.462.045.226,20 (2020)	PAD semua Rp1.920.155.378.658,69 (2019) menjadi Rp2.112.170.916.524,54 (2020) = Rp192.015.537.865 (atau sebesar 10%)								
4.05.4.03.01.00.25	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD											Rp. 11.409.969.000,00	Rp. 5.993.137.500,00			
4.05.4.03.01.00.25.001	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	KPPD Kota Yogyakarta	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	10904924328Rupiah	Peningkatan pendapatan daerah dari BBNKB KPPD Kota Yogyakarta terdiri dari: Sedan 563 unit, Jeep 455 unit, minibus 4.799 unit, bus microbus 89 unit, truck 100 unit, pick up 474 unit sepeda motor 18.837 unit	Naik Rp. 2.111.402.000	Dukungan Rp. 26.404.785.000 terhadap target kenaikan pajak daerah di KPPD Kota Yogyakarta	100%		Rp. 1.810.830.000,00	Rp. 0,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	10771392391Rupiah	Peningkatan pendapatan daerah dari PKB KPPD Kota Yogyakarta terdiri dari : sedan 6.056 unit, jeep 3.683 unit, Minibus 42.408 unit, bus microbus 911 unit, Truck 2.906 unit, Pick up 6.025 unit, sepeda motor 227.958 unit	Naik Rp, 31.658.067.000								
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4030233356Rupiah										
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	2927347090Rupiah										
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	23250359836Rupiah										
4.05.4.03.01.00.25.002	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kota Yogyakarta	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	KPPD Kota Yogyakarta	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	10904924328Rupiah	1. Pembekalan 200 petugas pendataan. 2. Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi Pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 20.00 WP	1 dokumen data statistik kepemilikan KBM yang belum mendaftar	Dukungan Rp. 26.404.784.539 terhadap kenaikan pajak daerah di KPPD Kota Yogyakarta	100%		Rp. 416.250.000,00	Rp. 391.387.500,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset												Jumlah Pagu : Rp. 57.323.742.000,00			
Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	10771392391Rupiah	Pendapatan dari tertajahnya potensi pajak KBM status dimiliki, dari Data poptensi wajib pajak dengan status dimiliki 7.100 KBM	Penagihan potensi pajak dengan status di miliki KPPD kota sebesar Rp. 1.200.000.000							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4030233356Rupiah									
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	2927347090Rupiah									
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	23250359836Rupiah									
4.05.4.03.01.00.25.003	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	KPPD Bantul Yogyakarta	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	10904924328Rupiah	Peningkatan pendapatan daerah dari PKB Kabupaten Bantul terdiri dari : sedan 6.916 unit, jeep 3.412 unit, station wagon 37.495 unit, bus 144 unit, microbus 718 unit, truck 4.346 unit, pick up 9.568 unit, sepeda motor 389.968 unit.	Naik Rp. 29.338.434.578,64	Dukungan Rp. 29.087.871.974 terhadap kenaikan pajak daerah KPPD DIY di Kabupaten Bantul	100%	Rp. 1.871.668.000,00	Rp. 1.465.136.712,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	10771392391Rupiah	Peningkatan pendapatan daerah dari BBNKB Kabupaten Bantul terdiri dari : sedan 994 unit, jeep 536 unit, station wagon 6.656 unit, bus 21 unit, microbus 217 unit, truck 484 unit, pick up 1.057 unit, sepeda motor 37.197 unit	Naik Rp. 9.794.665.909,26							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4030233356Rupiah									
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	2927347090Rupiah									
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	23250359836Rupiah									
4.05.4.03.01.00.25.004	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Bantul	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	KPPD Bantul Yogyakarta	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	10904924328Rupiah	Data potensi PAP yang terbayar	Data potensi PAP Rp. 72.600.000.	Dukungan Rp. 789.000.000 terhadap kenaikan pendapatan pajak daerah KPPD DIY di Kabupaten Bantul	100%	Rp. 326.000.000,00	Rp. 320.513.288,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset												Jumlah Pagu : Rp. 57.323.742.000,00			
Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	10771392391Rupiah	1. Pembekalan 132 petugas pendataan 2. Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari data potensi pajak KBM yang belum mendaftarkan sejumlah 14.000 WP	1 dokumen data kepemilikan KBM							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4030233356Rupiah	Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki dari data potensi wajib pajak dengan status dimiliki 5.000 KBM	Pajak KBM Rp. 822.150.000							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	2927347090Rupiah									
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	23250359836Rupiah									
4.05.4.03.01.00.25.005	Pelayanan Kesamatsan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	KPPD Kulonprogo DIY	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	10904924328Rupiah	Peningkatan pendapatan daerah dari PKB Kabupaten Kulonprogo terdiri dari : Sedan 1.587 unit, jeep 595 unit, station wagon 10.717 unit, bus/microbus 322 unit, truck 1.716 unit, pick up 3.345 unit sepeda motor 150.575 unit	Naik sebesar Rp. 8.195.807.576	Dukungan Rp. 13.157.180.000 terhadap kenaikan pajak daerah KPPD Kabupaten Kulonprogo	100%	Rp. 1.349.930.000,00	Rp. 734.419.802,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	10771392391Rupiah	Peningkatan pendapatan daerah dari BBNKB Kabupaten Kulonprogo terdiri dari Sedan 216 unit, jeep 74 unit, station wagon 1.439 unit, Microbus/bus 18 unit, Truck 177 Unit, Pick Up 470 unit sepeda motor 15.151 unit	Naik sebesar Rp. 2.866.267.594							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4030233356Rupiah									
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	2927347090Rupiah									
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	23250359836Rupiah									
4.05.4.03.01.00.25.006	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Kulon Progo	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	KPPD Kulonprogo DIY	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	10904924328Rupiah	Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki dari Data potensi wajib pajak dengan status dimiliki 4.100 KBM	Potensi KBM Rp. 850.000.000	Dukungan Rp. 834.300.000 terhadap target kenaikan pajak daerah KPPD Kulonprogo	100%	Rp. 310.740.000,00	Rp. 237.830.198,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset												Jumlah Pagu : Rp. 57.323.742.000,00			
Nomor	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	10771392391Rupiah	1. Pembekalan 120 petugas pendata 2. Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftarkan sejumlah 9.000 WP	1 dokumen data status kepemilikan KBM 10.000 unit							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4030233356Rupiah	Data potensi PAP yang terbayar	Data potensi PAP Rp. 102.300.000							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	2927347090Rupiah									
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	23250359836Rupiah									
4.05.4.03.01.00.25.007	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	KPPD Gunungkidul Yogyakarta	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	10904924328Rupiah	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor : sedan (pribadi) 317 unit, jeep (pribadi) 219 unit, station wagon (pribadi) 2.286 unit, microbus (pribadi) 34 unit, microbus (umum) 8 unit, truck (pribadi) 249 unit, Pick Up (pribadi) 600 unit, truck (umum) 14 unit, Pick up (umum) 3 unit, sepeda motor (pribadi) 18.305 unit, sedan (dinas) 4 unit, jeep (dinas) 1 unit, station wagon (dinas) 23 unit, microbus (dinas) 2 unit, truck (dinas) 1 unit, pick up (dinas) 3 unit, sepeda motor (dinas) 131 unit	Naik Rp. 3.300.000.000	Dukungan Rp. 4.870.000.000 terhadap kenaikan pajak daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	100%	Rp. 1.529.720.000,00	Rp. 729.207.054,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	10771392391Rupiah	Pajak kendaraan bermotor : sedan (pribadi) 1.724 unit, jeep (pribadi) 630 unit, station wagon (pribadi) 12.183 unit, station wagon (umum) 74 unit, Microbus (pribadi) 131 unit, Microbus (umum) 378 unit, Truck (pribadi) 2.113 unit, Pick Up (pribadi) 2.192 unit, truck (umum) 436 unit, pick up (umum) 13 unit sepeda motor (pribadi) 168.000 Unit, sedan (dinas) 5 unit, jeep (dinas) 13 unit, station wagon (dinas) 212 unit, micro bus (dinas) 8 unit, truck (dinas) 38 unit, pick up (dinas) 40 unit sepeda motor (dinas) 1.082 unit.	Naik Rp. 4.294.000.000							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 57.323.742.000,00			
Nomor	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4030233356Rupiah								
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	2927347090Rupiah								
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	23250359836Rupiah								
4.05.4.03.01.00.25.008	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Gunungkidul	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	KPPD Gunungkidul Yogyakarta	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	10904924328Rupiah	1. Pembekalan 180 petugas pendata 2. Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini Data potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 15.000 WP	1 dokumen data status kepemilikan KBM 17.000	Dukungan Rp. 1.691.100.000 terhadap target kenaikan pajak daerah KPPD Gunungkidul	100%	Rp. 485.392.000,00	Rp. 256.042.946,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	10771392391Rupiah	Data potensi PAP yang terbayar	Data potensi PAP Rp. 134.310.000						
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4030233356Rupiah								
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	2927347090Rupiah								
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	23250359836Rupiah								
4.05.4.03.01.00.25.009	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	KPPD Sleman Yogyakarta	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	10904924328Rupiah	Balik Nama Kendaraan Bermotor sedan 1.207 unit, jeep 976 unit, station wagon 12.511 unit, bus 84 unit, microbus 83 unit, truck 376 unit, pick up 1.500 unit, sepeda motor 52.154 unit	Naik sebesar Rp. 18.347.849.000	Dukungan Rp. 59.175.201.213 terhadap kenaikan pajak daerah KPPD DIY Kab Sleman	100%	Rp. 2.642.910.000,00	Rp. 1.275.930.955,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	10771392391Rupiah	Peningkatan pendapatan daerah dari PKB Kabupaten Sleman terdiri dari : sedan 15.373 unit, jeep 7.374 unit, station wagon 82.572 unit, bus 336 unit, microbus 635 unit, truck 5.040 unit, pick up 12.400 unit sepeda motor 666.052 unit	Naik sebesar Rp. 46.889.153.000						
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4030233356Rupiah								
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	2927347090Rupiah								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset												Jumlah Pagu : Rp. 57.323.742.000,00			
Nomor	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	23250359836Rupiah									
4.05.4.03.01.00.25.010	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Sleman	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	KPPD Sleman Yogyakarta	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Yogyakarta	10904924328Rupiah	Data potensi PAP yang terbayar	Data potensi PAP Rp. 99.000.000	Dukungan Rp. 70.491.079.000 terhadap pencapaian peningkatan pendapatan daerah KPPD DIY di Kabupaten Sleman	100%	Rp. 666.529.000,00	Rp. 582.669.045,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Bantul	10771392391Rupiah	1. Pembekalan 110 petugas pendataan 2. Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotorterkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftarkan sejumlah 38.000 WP	1 dokumen data status kepemilikan 23.400 KBM							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Kulon Progo	4030233356Rupiah	Pendataan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki dari Data potensi wajib pajak	Pendapatan pajak KBM Rp. 9.954.052.000							
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	2927347090Rupiah									
					Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kabupaten Sleman	23250359836Rupiah									
4.05.4.03.01.00.27	PROGRAM PERENCANAAN PENGANGGARAN BELANJA DAERAH										Rp. 4.775.170.000,00	Rp. 4.790.000.000,00			
4.05.4.03.01.00.27.001	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100%	DPA PD disyahkan paling lambat 15 hari kerja setelah APBD TA.2021 ditetapkan sesuai dengan Perda APBD TA.2021	37 dokumen DPA PD	Dukungan 60% terhadap kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dan APBD	100%	Rp. 3.850.000.000,00	Rp. 4.010.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
					Kesesuaian Program dan Kegiatan antara KUA PPAS dan APBD	100%	Perda APBD TA.2021 ditetapkan paling lambat Desember 2020 yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (KUA PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku)	1 dokumen	Dukungan 60% terhadap ketepatan dalam penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100%					
							Pergub penjabaran APBD TA.2021 ditetapkan paling lambat bulan Desember 2020 yang sesuai dengan dokumen perencanaan (KUA PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku)	1 dokumen							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset													Jumlah Pagu : Rp. 57.323.742.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPA PD TA.2021 yang telah disahkan paling lambat hari kerja terakhir sebelum triwulan tersebut dimulai	333 Dokumen							
4.05.4.03.01.00.27.002	Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Danurejan	Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100%	DPPA PD disahkan paling lambat 15 hari kerja setelah Perubahan APBD TA.2020 sesuai dengan Perda PAPBD TA.2020	37 dokumen DPPA PD	Dukungan 40% terhadap kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dan APBD	100%	Rp. 925.170.000,00	Rp. 780.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
					Kesesuaian Program dan Kegiatan antara KUA PPAS dan APBD	100%	Perda PAPBD TA.2020 ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (KUA PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku)	1 dokumen Perda PAPBD TA.2020	Dukungan 40% terhadap ketepatan dalam penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100%					
							Pergub Penjabaran PAPBD TA.2020 ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang mendukung (KUA PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku)	1 dokumen Pergub Penjabaran PAPBD TA.2020							
							SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPPA PD paling lambat hari kerja terakhir sebelum triwulan tersebut dimulai	111 dokumen SPD							
4.05.4.03.01.00.28	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH										Rp. 2.614.500.000,00	Rp. 1.618.852.500,00			
4.05.4.03.01.00.28.002	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Presentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	100%	Penjualan dan Penghapusan Bangunan Gedung kantor sesuai dengan Keputusan Gubernur	5 Unit Gedung	Dukungan 30% terhadap Pengelolaan BMD sesuai dengan prosedur.	100%	Rp. 238.670.000,00	Rp. 240.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
							Penjualan dan penghapusan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan Keputusan Gubernur	5 jenis peralatan							
							Penjualan dan penghapusan kendaraan dinas sesuai dengan Keputusan Gubernur	10 Kend rd 2, 5 kend rd 4							
4.05.4.03.01.00.28.004	Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Presentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	100%	Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah menjadi pedoman penyusunan RKA	1 Dokumen	Dukungan 40% terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan prosedur	100%	Rp. 343.400.000,00	Rp. 350.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset												Jumlah Pagu : Rp. 57.323.742.000,00			
Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Laporan Semesteran Barang Milik Daerah bulan Juli dan bulan Maret	2 Laporan							
4.05.4.03.01.00.28.006	Pengamanan, Pemeliharaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Presentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	100%	Terbitnya polis Asuransi Barang Milik Daerah (Polis asuransi bangunan gedung dan kendaraan roda 4 ke atas)	4 Jenis polis	Dukungan 30% terhadap pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan prosedur	100%	Rp. 2.032.430.000,00	Rp. 1.028.852.500,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
							Terlaksanakannya pensertifikatan terhadap bidang tanah BMD	7 Dokumen							
							Penagihan Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi semula Rp. 427.512.806	Rp.425.512.806							
							Rumah dinas yang siap untuk di operasionalkan	5 unit							
4.05.4.03.01.00.29	PROGRAM PENDAYAGUNAKAN BARANG MILIK DAERAH										Rp. 846.560.000,00	Rp. 848.000.000,00			
4.05.4.03.01.00.29.001	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Jumlah potensi BMD yang didayagunakan	71.43%	Evaluasi pemanfaatan BMD untuk lebih berdayaguna dan berhasiguna (terhadap BMD yang telah di manfaatkan)	10 obyek	Dukungan 60% terhadap pendayagunaan barang milik daerah yang optimal	100%	Rp. 324.060.000,00	Rp. 325.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
4.05.4.03.01.00.29.002	Penilaian Barang Milik Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	DIY	Jumlah potensi BMD yang didayagunakan	71.43%	Laporan hasil kajian Highest Best Use (HBU) BMD idle untuk memperoleh kegunaan yang optimal atas pemanfaatan BMD	1 laporan hasil kajian HBU	Dukungan 40% terhadap pendayagunaan barang milik daerah yang optimal	100%	Rp. 522.500.000,00	Rp. 523.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan	
							Laporan penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan BMD untuk memperoleh nilai wajar sesuai dengan bentuk pemanfaatan BMD	6 Dokumen laporan penilaian BMD							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah													Jumlah Pagu : Rp. 12.315.873.000,00		
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan														
4.06	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
4.06.4.04.01.00	Badan Kepegawaian Daerah														
4.06.4.04.01.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 3.061.211.000,00	Rp. 2.135.000.000,00			
4.06.4.04.01.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat Tulis Kantor	82 jenis	Dukungan 60% Terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 918.152.000,00	Rp. 1.250.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	
							Bahan Bacaan (Langganan Surat Kabar BKD dan Balai PKP)	4 jenis							
							Barang cetakan dan penggandaan	20 jenis							
							Fumigasi ruang arsip	3 ruang arsip							
							Jasa kebersihan kantor (Cleaning servise)	1 tahun							
							Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun							
							Jasa surat menyurat dan paket pengiriman	1 tahun							
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25 jenis							
							Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (STNK) roda dua 4 unit dan roda empat 7 unit	1 tahun							
							Pengelolaan arsip dinamis SKPD	6 bidang							
							Perjinaan frekwensi radio, pulsa aplikasi si manja	1 tahun							
4.06.4.04.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja Tenaga Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja Selama 1 Tahun	9 orang	Dukungan 20% Terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 320.738.000,00	Rp. 385.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	
4.06.4.04.01.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah terlaksana dengan baik	1 tahun	Dukungan 20% Terhadap Terwujudnya Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 1.822.321.000,00	Rp. 500.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah												Jumlah Pagu : Rp. 12.315.873.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Konsultasi dan koordinasi Luar Daerah terlaksana dengan baik	1 tahun							
							Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun							
4.06.4.04.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.487.535.000,00	Rp. 2.790.000.000,00			
4.06.4.04.01.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Bendera Merah Putih dan Umbul-umbul	4 jenis	Dukungan 15% Terhadap Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 584.535.000,00	Rp. 1.090.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	
							Komputer (PC Branded 3 unit, Printer 3 unit)	5 jenis							
							Mebeleur (Meja 72 buah, Kursi 50 buah)	5 jenis							
							Perlengkapan Perkantoran (AC Split 2 unit)	10 unit							
4.06.4.04.01.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Gedung Kantor (Pemeliharaan Rutin Genteng dan Talang BKD DIY; Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin Genteng, Talang Ruang Rehat dan Ruang Makan Assese; dan Pemeliharaan Rutin Gedung dan Sarpras lainnya Balai PKP).	5 paket	Dukungan 60% Terhadap Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 665.000.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	
							Pemeliharaan Jaringan Air	1 paket							
							Pemeliharaan Jaringan Listrik/Genset	1 paket							
							Pemeliharaan Taman dan Halaman	1 paket							
4.06.4.04.01.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua selama 1 tahun	4 unit	Mendukung 15% Terhadap Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 86.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	
							Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat selama 1 tahun	7 unit							
4.06.4.04.01.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan Mebeleur selama 1 tahun	4 jenis	Dukungan 10% Terhadap Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Rp. 152.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	
							Pemeliharaan Peralatan Kantor selama 1 tahun	31 jenis							
							Pengisian Tabung Pemadam kebakaran selama 1 tahun	25 unit							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 12.315.873.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.06.4.04.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 94.180.000,00	Rp. 185.000.000,00		
4.06.4.04.01.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	LKI-IP BKD DIY Tahun 2018	1 laporan	Dukungan 10% Terhadap Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 12.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
4.06.4.04.01.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi Sesuai Dengan Anggaran Kas Yang Telah Ditetapkan 8 Program dan 21 Kegiatan	Laporan Keuangan SKPD Deviasi 5%	Dukungan 10% Terhadap Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 13.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
4.06.4.04.01.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Dukungan 70% Terhadap Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 61.220.000,00	Rp. 120.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							ROPK, Renja, Renstra, RKA, DPA Yang Sesuai Aturan Yang Berlaku	Dokumen Perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA 2019						
4.06.4.04.01.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100%	Dukungan 10% Terhadap Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD 100%	100%	Rp. 7.960.000,00	Rp. 20.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
4.06.4.04.01.00.15	PROGRAM PERENCANAAN, PENGADAAN PEGAWAI DAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN										Rp. 1.514.254.000,00	Rp. 3.500.000.000,00		
4.06.4.04.01.00.15.001	Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Pegawai sesuai kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezetting)	81%	Formasi Pegawai	1 dokumen	Dukungan 100% Terhadap Persentase Pegawai Sesuai kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezetting)	100%	Rp. 1.086.065.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 12.315.873.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
					Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi, Valid, dan Update	90.4%	Pegawai Rekrutmen Sesuai Formasi	200 orang							
							Pengembangan aplikasi CAT si seksi	1 aplikasi							
							Proyeksi Kebutuhan Pegawai	1 dokumen							
4.06.4.04.01.00.15.002	Pengelolaan Sistem Informasi Aparatur	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Pegawai sesuai Kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezzeting)	81%	Aplikasi kepegawaian (simpeg, sistem presensi online, simanja/sistem layanan kepegawaian)	2 aplikasi	Dukungan 100% Terhadap Prosentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi, Valid, dan Update	100%	Rp. 428.189.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	
					Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi, Valid, dan Update	90.4%	ID Card Pegawai	700 ID Card							
							Laporan data movev kepegawaian Pemda DIY/Kab/Kota	12 laporan data movev kepegawaian Pemda							
							Mesin Presensi	19 unit							
							Pemeliharaan Mesin Presensi	225 mesin presensi							
4.06.4.04.01.00.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI										Rp. 3.541.810.000,00	Rp. 7.550.000.000,00			
4.06.4.04.01.00.16.002	Pengembangan Profesionalisme Aparatur	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	82%	ASN yang lulus ujian dinas	100 orang	Dukungan 70% Terhadap Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	100%	Rp. 2.421.975.000,00	Rp. 5.300.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	
							ASN yang mendapat beasiswa tugas belajar, ijin belajar dan ikatan dinas	Seleksi Tubel 35 orang, Tubel Bappenas 6 orang, Tubel APBD 20 orang, Ijin Belajar Bantuan APBD 100 orang, Ijin Belajar Mandiri 50 orang, Ikatan dinas 119 orang							
							Ijin dinas luar negeri	50 surat							
							Laporan Rencana Pengembangan Kompetensi	1 laporan							
							Peserta pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang dikirim ke diklat	Diklatpim II: 24 org, Diklatpim III: 30 org, Diklatpim IV: 40 org, RLA: 3 org, Diklat TF: 250 org							
							Surat ijin/keterangan belajar	50 surat							
4.06.4.04.01.00.16.003	Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	82%	Jabatan Administrator (esl III) , Pengawas (esl IV dan V)	889 jabatan	Dukungan 30% Terhadap Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	100%	Rp. 1.119.835.000,00	Rp. 2.250.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah													Jumlah Pagu : Rp. 12.315.873.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Jabatan Fungsional dan Kepala Sekolah	219 jabatan						
							Jabatan Pelaksana	150 jabatan						
							Jabatan Pimpinan Tinggi	1 JPT Madya, 46 JPT Pratama						
							Perpindahan Aparatur (mutasi PNS)	60 PNS						
4.06.4.04.01.00.17	PROGRAM PEMBINAAN KEDUDUKAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI										Rp. 758.967.000,00	Rp. 2.300.000.000,00		
4.06.4.04.01.00.17.001	Pengelolaan Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%	Fasilitasi JKK/JKM	10 orang	Dukungan 80% Terhadap Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu 91%	100%	Rp. 651.707.000,00	Rp. 1.900.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Jumlah ASN yang paham tentang penilaian TPP	220 orang UP, pengelola perencanaan, Kasubbag, Umum / Ka.Tu OPD/UPT						
							Pegawai yang menerima satya lancana karya satya	500 orang						
4.06.4.04.01.00.17.003	Penegakan Disiplin Aparatur	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%	Penetapan hukum pegawai dan pejabat negara	250 surat	Dukungan 20% Terhadap Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu 91%	100%	Rp. 107.260.000,00	Rp. 400.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							PNS yang paham pengisian LHKPN	180 orang						
							PNS yang paham tentang peraturan kepegawaian	150 orang						
							Terselesaikannya kasus pelanggaran disiplin PNS	14 kasus						
4.06.4.04.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAERAH										Rp. 597.310.000,00	Rp. 1.700.000.000,00		
4.06.4.04.01.00.18.001	Pengelolaan Mutu Layanan dan Dokumentasi Kepegawaian	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian	79nilai	Alih Media Kepegawaian Ke Arsip Elektronik	1 paket	Dukungan 60% Terhadap tertib administrasi pengelolaan kepegawaian daerah 97,76%	100%	Rp. 306.764.000,00	Rp. 700.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Kartu Identitas (Karis/Karsu dan Karpeg)	200 kartu						
							Pengembangan Aplikasi Arsip	1 Aplikasi						
							Sertifikasi Layanan Mutu	1 sertifikat						
							SKM	1 laporan						
							Sosialisasi/Bimtek Arsip	240 Org (OPD, UPT, Sekolah)						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 12.315.873.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Tata Kelola Dokumen Kepegawaian Perorangan dan Kolektif	400 SK							
4.06.4.04.01.00.18.002	Pengelolaan Kepangkatan dan Penslun	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian	79nilai	SK Kenaikan Pangkat Akurat, Tepat Orang dan Tepat Gaji	900 PNS	Dukungan 60% Terhadap tertib administrasi pengelolaan kepegawaian daerah	100%	Rp. 290.546.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	
4.06.4.04.01.00.19	PROGRAM PENGELOLAAN PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI										Rp. 1.260.606.000,00	Rp. 3.450.000.000,00			
4.06.4.04.01.00.19.001	Pengukuran Kompetensi Pegawai	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Kompetensi Individu yang Terpetakan	45,57%	Aparatur yang mengikuti Bimbingan Kelompok	100 orang	Dukungan 70% Terhadap tertib administrasi pengelolaan kepegawaian daerah	100%	Rp. 1.106.060.000,00	Rp. 2.650.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	
							Aparatur yang mengikuti Bimbingan Pribadi	40 orang							
							Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi dalam DIY	836 orang							
							Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi luar DIY	300 orang							
							Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil potensi dalam DIY	300 orang							
							Pembuatan Alat Ukur	1 paket							
4.06.4.04.01.00.19.002	Pembiinan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi Pegawai	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Kompetensi Individu yang Terpetakan	45,57%	Kabupaten/Kota DIY yang terkoordinir dalam kerja sama pengukuran	5 kabupaten/kota	Dukungan 30% Terhadap 47,57% kompetensi individu yang terpetakan	100%	Rp. 154.546.000,00	Rp. 800.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	
							Kesepakatan kerja sama pengukuran	1 kesepakatan dan 5 PKS							
							Laporan Survey Kepuasan Masyarakat dan Evaluasi Kemitraan	1 laporan							
							OPD dan UPTD yang terkoordinir dalam pengujian sertifikasi kompetensi	20 OPD dan 20 UPTD							
							SDM Asesor dan Non Asesor yang berkompeten dengan diklat, pelatihan dan bimtek selama 1 tahun	19 orang							
							Spesial Lecture/ Sharing Session SDM Asesor dan Non Asesor	25 orang							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan													Jumlah Pagu : Rp. 14.727.583.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan													
4.06	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
4.06.4.04.02.00	Badan Pendidikan dan Pelatihan													
4.06.4.04.02.00.01	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.235.847.000,00	Rp. 2.650.900.000,00		
4.06.4.04.02.00.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Alat - Alat perlengkapan	7 Jenis	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	53%	Rp. 1.060.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Alat listrik dan elektronik	24 jenis						
							ATK	39 jenis						
							Cetak	13 jenis						
							Jasa Kebersihan	3 asrama, 2 Gedung kantor, 1 Laboratorium, 1 masjid, 2 kelas, 6 rumah dinas, 1 gedung menza						
							KIR kendaraan Roda empat	1 unit						
							langganan surat kabar, majalah	12 bulan						
							pembayaran telpon, listrik, air, dan TV	12 bulan						
							Penggandaan	61.250 lembar						
							pengisian tabung pemadam kebakaran	5 buah						
							peralatan kebersihan dan bahan pembersih	16 jenis						
							terbayarnya pajak STNK	Roda dua 6 unit dan STNK Roda empat 6 unit						
							Terkelolanya arsip dinamis	1 tahun						
							Transfer Non Tunai	12 bulan						
4.06.4.04.02.00.01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kinerja Keamanan Kantor 15 orang	1 tahun	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	32 %	Rp. 650.900.000,00	Rp. 750.900.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Kinerja Pegawai tidak Tetap 1 orang	1 tahun						
							Kinerja Pengelola Barang 2 orang	1 tahun						
							Kinerja Pengelola Kepegawaian 2 orang	1 tahun						
							Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang	1 tahun						
							Pembelian Materai 1100 buah	1 tahun						
							Pengiriman	1 tahun						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan													Jumlah Pagu : Rp. 14.727.583.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.06.4.04.02.00.01.003	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Belanja makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun	Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	15 %	Rp. 524.947.000,00	Rp. 400.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Laporan Pembinaan Angka Kredit	1 laporan						
							Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	1 tahun						
							Penyusunan Karya Tulis	1 laporan						
							perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah	1 tahun						
4.06.4.04.02.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.130.655.000,00	Rp. 8.250.000.000,00		
4.06.4.04.02.00.02.002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Computer PC	5 unit	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	27%	Rp. 388.845.000,00	Rp. 2.400.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Kursi Futura	148 buah						
							Laptop	15 unit						
							Pembelian Computer AC (2 PK)	4 unit						
							Printer A3	1 unit						
							Proyektor LCD	2 unit						
							UPS	5 unit						
4.06.4.04.02.00.02.003	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laundry (sprei, gordyn, taplak meja, cover kursi)	35.000 kg	Dukungan terhadap terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	69%	Rp. 516.810.000,00	Rp. 5.500.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Penyedotan Air limbah	6 titik						
							perawatan taman dan perawatan kebun lingkungan	15.058 meter persegi						
							perawatan taman lingkungan asrama	28.340 meter persegi						
							perbaikan atap	300 meter persegi						
							perbaikan kamar mandi/WC	25 buah						
							perbaikan lantai	50 meter persegi						
							Perbaikan pintu dan jendela	25 buah						
4.06.4.04.02.00.02.004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Kendaraan dinas/operasional terpelihara (roda 2 dan roda 4)	13 unit	Dukungan terhadap terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	2%	Rp. 125.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.02.005	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Pemeliharaan mebeler	4 jenis	Dukungan terhadap terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	2%	Rp. 100.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Peralatan gedung kantor terpelihara	10 jenis						
							perlengkapan gedung kantor terpelihara	5 jenis						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan											Jumlah Pagu : Rp. 14.727.583.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.06.4.04.02.00.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN										Rp. 339.850.000,00	Rp. 482.000.000,00		
4.06.4.04.02.00.04.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) sesuai berbagai dokumen perencanaan, dan capaian kinerja instansi diukur dengan indikator lainnya (sesuai aturan perundangan)	nilai A	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	2%	Rp. 7.000.000,00	Rp. 9.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.04.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi sesuai dengan Anggaran Kas yang telah ditetapkan pada 7 program 21 kegiatan	Laporan keuangan SKPD dengan deviasi 5%	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	5%	Rp. 21.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.04.003	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Berita Acara Forum Perencanaan OPD	1 BA	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	88%	Rp. 285.850.000,00	Rp. 420.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA.2019						
4.06.4.04.02.00.04.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPEK	100%	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	6%	Rp. 26.000.000,00	Rp. 28.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.20	PROGRAM PENDIDIKAN PENJENJANGAN										Rp. 7.876.026.000,00	Rp. 15.600.000.000,00		
4.06.4.04.02.00.20.001	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	12.5%	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	60 orang	Dukungan terhadap 12% ASN Peserta Diklat Penjenjangan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	30%	Rp. 1.815.660.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.20.002	Pelatihan Dasar CPNS	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	12.5%	Pelatihan Dasar CPNS	160 orang	Dukungan 39,96,20% terhadap 12,5% ASN Peserta Diklat Penjenjangan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	100%	Rp. 2.180.955.000,00	Rp. 6.500.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.20.003	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	12.5%	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	80 orang	Dukungan 24% terhadap 10% ASN Peserta Diklat Penjenjangan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	100%	Rp. 1.343.785.000,00	Rp. 1.600.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.20.004	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	12.5%	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	160 orang	Dukungan 46% terhadap 10% ASN Peserta Diklat Penjenjangan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	100%	Rp. 2.535.626.000,00	Rp. 5.500.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.21	PROGRAM PENDIDIKAN TEKNIS FUNGSIONAL										Rp. 1.791.996.000,00	Rp. 4.800.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan													Jumlah Pagu : Rp. 14.727.583.000,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.06.4.04.02.00.21.001	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	13.3%	Diklat AKIP	30 orang	Dukungan 84% terhadap 10% ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	100%	Rp. 1.445.296.000,00	Rp. 4.000.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Diklat Bendahara Daerah	30 orang						
							Diklat Jabatan Administrator	30 orang						
							Diklat Jabatan Pengawas	30 orang						
							Diklat Media Informasi	30 orang						
							Diklat Perencanaan dan Penganggaran	30 orang						
							Diklat Teknologi Informasi dan Komunikasi	30 orang						
4.06.4.04.02.00.21.002	Diklat Fungsional	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	13.3%	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	30 orang	Dukungan 16% terhadap 10% ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	100%	Rp. 346.700.000,00	Rp. 800.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Diklat Perpustakaan	30 orang						
4.06.4.04.02.00.22	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN KERJASAMA KEDIKLATAN										Rp. 247.767.000,00	Rp. 295.000.000,00		
4.06.4.04.02.00.22.001	Promosi dan Pembinaan Kemitraan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama	84%	Cetak Profil Lembaga dan Tas promosi	450 set	Dukungan 75% terhadap 81% Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama	100%	Rp. 182.325.000,00	Rp. 220.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Data Calon Peserta Hasil Promosi dengan 1 laporan data calon peserta diklat kemitraan untuk tahun berjalan	1 laporan						
							Promosi Diklat Kemitraan dengan 10 kesepakatan dengan instansi pengirim peserta diklat	10 PKS						
							Publikasi Kediklatan di Mass Media (Cetak)	4 paket						
							Terkirimnya Surat Penawaran ke kabupaten/kota/instansi/embaga	400 kali						
4.06.4.04.02.00.22.004	Koordinasi dan Fasilitasi Kemitraan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama	84%	Rekomendasi Rapat Kerja Monitoring Pelatihan Kemitraan	1 dokumen laporan	Dukungan 25% terhadap 81% Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama	100%	Rp. 65.442.000,00	Rp. 75.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Sosialisasi Pelatihan Struktural Kemitraan (Mentor)	120 orang						
4.06.4.04.02.00.23	PROGRAM PENINGKATAN STANDARISASI DAN PENJAMINAN MUTU										Rp. 1.105.442.000,00	Rp. 1.490.000.000,00		
4.06.4.04.02.00.23.002	Pengembangan Kurikulum dan Silabus Diklat	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	79 indeks survei	Pedoman penyelenggaraan diklat (kurikulum)	4 kurikulum diklat	Dukungan 12% terhadap Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat sebesar 78 skor	100%	Rp. 180.000.000,00	Rp. 180.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
4.06.4.04.02.00.23.003	Pengelolaan Mutu Penyelenggaraan Diklat	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	79 indeks survei	Dokumen Akreditasi Latsar CPNS	1 dokumen	Dukungan 58% terhadap Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat sebesar 78 skor	100%	Rp. 700.000.000,00	Rp. 900.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Dokumen usulan rintisan LSP	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan											Jumlah Pagu : Rp. 14.727.583.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Laporan audit eksternal ISO 9001:2015	1 laporan							
							Laporan hasil evaluasi pasca diklat	10 laporan							
							Laporan penjamin mutu	1 laporan							
							Sertifikat ISO 9001:2015	1 sertifikat							
4.06.4.04.02.00.23.004	Penelitian Kediklatan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	79indeks survei	Laporan hasil penelitian dan laporan hasil kajian	2 laporan	Dukungan 13% terhadap Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat sebesar 78 skor	100%	Rp. 160.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan	
4.06.4.04.02.00.23.005	Pengelolaan Pustaka dan Penerbitan Buletin Diklat	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	79indeks survei	Penerbitan buletin diklat	4 edisi	Dukungan 16% terhadap Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat sebesar 78 skor	100%	Rp. 65.442.000,00	Rp. 210.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan	
							Terpeliharanya bahan pustaka	12.730 buku							

**Tabel 6-4 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertasi Kebutuhan
Pendapatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD													Jumlah Pagu : Rp. 19.853.786.800,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Keistimewaan													
3.02	KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DIY (KEISTIMEWAAN)													
3.02.4.01.01.00	Sekretariat Daerah													
3.02.4.01.01.00.15	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN										Rp. 4.596.999.400,00	Rp. 5.056.699.340,00		
3.02.4.01.01.00.15.001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Sekretariat Parampara Praja	persentase capaian realisasi pelaksanaan program keistimewaan	69%	Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2021	1 dokumen	dukungan 47% terhadap persentase capaian kinerja fisik terhadap target capaian kinerja fisik pembangunan urusan keistimewaan	100%	Rp. 1.750.000.000,00	Rp. 1.925.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2022	1 dokumen						
							Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2020	1 dokumen						
3.02.4.01.01.00.15.003	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Sekretariat Daerah	persentase capaian realisasi pelaksanaan program keistimewaan	69%	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan tahun 2020	4 dokumen	dukungan 53% terhadap persentase capaian kinerja fisik terhadap target capaian kinerja fisik pembangunan urusan keistimewaan	100%	Rp. 2.846.999.400,00	Rp. 3.131.699.340,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Penyelenggaraan Forum Desentralisasi Asimetris	1 dokumen						
3.02.4.01.01.00.17	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN										Rp. 5.530.000.000,00	Rp. 6.083.000.000,00		
3.02.4.01.01.00.17.001	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Organisasi	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proporsional	87%	1. Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan UPT	1 laporan	dukungan sebesar 40% terhadap penataan kelembagaan perangkat daerah	100%	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							2. Draf Peraturan Gubernur tentang Tugas dan Fungsi, dan Pola Hubungan antar Lembaga Pemerintah	15 rapergub						
							3. Draf Peraturan Gubernur tentang Lembaga Non Struktural	1 rapergub						
3.02.4.01.01.00.17.002	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proporsional	87%	Evaluasi dan pendampingan penataan kelembagaan di Kabupaten/Kota	1 Rekomendasi Gubernur tentang Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 5 Kabupaten/Kota	Dukungan sebesar 15% terhadap 87% persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	100%	Rp. 330.000.000,00	Rp. 363.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Rekomendasi Pendayagunaan Aparatur Negara DIY meliputi 3 Aspek (Kelembagaan, Ketatalaksanaan, SDM aparatur)	1 Rekomendasi						
3.02.4.01.01.00.17.004	Perumusan kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proporsional	87%	Sistem Informasi Analisis Jabatan yang terintegrasi dengan sistem evaluasi jabatan dan kepegawaian.	1 aplikasi	dukungan sebesar 15% terhadap 87% persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	100%	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Dokumen Reviu Analisis Jabatan dan Beban Kerja	2 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 19.853.786.800,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Dokumen Standar Kompetensi Sosio Kultural	1 dokumen						
3.02.4.01.01.00.17.005	Penataan Bentuk Kelembagaan Asil Kota Yogyakarta	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proposional	87%	ASN Pemerintah Kota Yogyakarta yang memahami Perda Daerah dan Perwal Tugas Fungsi Perangkat Daerah	150 ASN	dukungan 10% terhadap 87% persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	100%	Rp. 200.000.000,00	Rp. 220.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Evaluasi Anjab Kemantren	1 Dokumen Anjab						
3.02.4.01.01.00.17.006	Penataan Bentuk Kelembagaan Asil Kab. Kulon Progo	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proposional	87%	ASN Pemkab Kulon Progo yang memahami Perda Kelembagaan Perangkat Daerah, Perda Desa, dan Perbup/Tugas Fungsi Perangkat Daerah	150 ASN	Dukungan sebesar 10% terhadap 87% persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 440.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Draf Regulasi mengenai Desa	88 draf regulasi						
							Evaluasi Anjab Kapanewon dan Desa	1 Dokumen Anjab						
3.02.4.01.01.00.17.007	Penataan Bentuk Kelembagaan Asil Kab. Gunung Kidul	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proposional	87%	ASN Pemkab Gunungkidul yang memahami Perda Kelembagaan Perangkat Daerah, Perda Desa, dan Perbup Tugas Fungsi Perangkat Daerah	150 ASN	Dukungan sebesar 10% terhadap 87% persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 440.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Draf Regulasi mengenai Desa	144 draf regulasi						
							Evaluasi Anjab Kapanewon dan Desa	1 Dokumen Anjab						
3.02.4.01.01.00.17.008	Penataan Bentuk Kelembagaan Asil Kab. Sleman	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proposional	87%	ASN Pemkab Sleman yang memahami Perda Kelembagaan Perangkat Daerah, Perda Desa, dan Perbup Tugas Fungsi Perangkat Daerah	150 ASN	Dukungan sebesar 10% terhadap 87% persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 440.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Draf Regulasi mengenai Desa	86 Draf Regulasi						
							Evaluasi Anjab Kapanewon dan Desa	1 Dokumen Anjab						
3.02.4.01.01.00.17.009	Penataan Bentuk Kelembagaan Asil Kab. Bantul	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proposional	87%	ASN Pemkab Bantul yang memahami Perda Kelembagaan Perangkat Daerah, Perda Desa, dan Perbup Tugas Fungsi Perangkat Daerah	150 ASN	Dukungan sebesar 10% terhadap 87% persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 440.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Draf Regulasi mengenai Desa	75 draf regulasi						
							Evaluasi Anjab Kapanewon dan Desa	1 dokumen anjab						
3.02.4.01.01.00.17.010	Pengawasan rancangan produk hukum dan produk hukum kab/kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proposional	87%	Kajian dan Monitoring terhadap Produk Hukum DIY Terkait Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan DIY	1 Laporan Pengkajian atas 5 Produk Hukum DIY	dukungan sebesar 5% terhadap 87% persentase kelembagaan perangkat daerah yg proporsional	100%	Rp. 400.000.000,00	Rp. 440.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Konsultasi, Fasilitasi dan Monev terhadap produk hukum kabupaten/kota terkait tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaaan DIY	1 Laporan Monev atas 5 Produk Hukum Kabupaten Kota						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD													Jumlah Pagu : Rp. 19.853.786.800,00	
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.02.4.01.01.00.17.011	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Biro Organisasi	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proposional	87%	1. Monitoring dan Evaluasi Fisik dan Keuangan yang berkelanjutan	1 dokumen	dukungan sebesar 40% terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan bidang kelembagaan	100%	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
3.02.4.01.01.00.18	PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN										Rp. 3.976.787.400,00	Rp. 4.196.966.140,00		
3.02.4.01.01.00.18.001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	78%	ASN yang meningkat pemahamannya tentang nilai budaya pemerintahan SATRIYA	150 ASN mempunyai pemahaman baik terhadap Budaya Pemerintahan Satriya.	dukung 17,5% terhadap 78% tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	100%	Rp. 1.150.000.000,00	Rp. 1.150.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Monitoring dan Evaluasi kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan	1 dokumen						
							ASN Kab/Kota yang terlatih menyusun rencana aksi Budaya Pemerintahan	200 ASN						
							Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Pemerintahan di Kabupaten/Kota	1 dokumen						
							Pemenang Kompetisi Budaya Pemerintahan SATRIYA (OPD, UPTD, Sekolah)	9 KBP berprestasi						
							Rencana Aksi Tahunan Budaya Pemerintahan DIY	1 dokumen						
							Tersedia dan terdistribusinya 12.000 pin SATRIYA untuk Kab/Kota	12.000 buah						
3.02.4.01.01.00.18.002	Implementasi Budaya Pemerintahan Sleman	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	78%	ASN yang memahami Budaya Pemerintahan SATRIYA	150 orang	mendukung 12,5% terhadap 78% tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	100%	Rp. 125.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP) di Kabupaten Sleman	48 KBP						
							Monev Budaya Pemerintahan SATRIYA	1 Laporan						
							Rencana Aksi Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP)	1 Dokumen						
3.02.4.01.01.00.18.003	Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	78%	ASN yang memahami Budaya Pemerintahan SATRIYA	150 orang	mendukung 12,5% terhadap 78% tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	100%	Rp. 125.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP) di Kota Yogyakarta	44 KBP						
							Monev Budaya Pemerintahan SATRIYA	1 Laporan						
							Rencana Aksi Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP)	1 Dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD													Jumlah Pagu : Rp. 19.853.786.800,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
3.02.4.01.01.00.18.004	Implementasi Budaya Pemerintahan Kab. Bantul	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	78%	ASN yang memahami Budaya Pemerintahan SATRIYA	150 orang	mendukung 12,5% terhadap 78% tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	100%	Rp. 125.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan		
							Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP) di Kabupaten Bantul	54 KBP								
							Monev Budaya Pemerintahan SATRIYA	1 Laporan								
							Rencana Aksi Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP)	1 Dokumen								
3.02.4.01.01.00.18.005	Implementasi Budaya Pemerintahan Kab. Kulon Progo	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	78%	Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP) di Kabupaten Kulon Progo	42 KBP	mendukung 12,5% terhadap 78% tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	100%	Rp. 125.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan		
							ASN yang memahami Budaya Pemerintahan SATRIYA	150 ASN								
							Monev Budaya Pemerintahan SATRIYA	1 lapran								
							Rencana Aksi Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP)	1 dokumen								
3.02.4.01.01.00.18.006	Implementasi Budaya Pemerintahan Kab. Gunungkidul	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	78%	Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP) di Kabupaten Gunungkidul	47 KBP	mendukung 12,5% terhadap 78% tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	100%	Rp. 125.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan		
							ASN yang memahami Budaya Pemerintahan SATRIYA	150 orang								
							Monev Budaya Pemerintahan SATRIYA	1 laporan								
							Rencana Aksi Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP)	1 dokumen								
3.02.4.01.01.00.18.007	Pembekalan Keistimewaan Bagi PNS Mutasi Luar Daerah	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	78%	Internalisasi ASN mutasi yang memahami Keistimewaan DIY	240 orang (4 angkatan)	mendukung 10% terhadap 78% tingkat penerapan budaya SATRIYA pada ASN Pemda DIY	100%	Rp. 525.895.000,00	Rp. 578.484.500,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan		
3.02.4.01.01.00.18.008	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Bagi Aparatur	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	78%	Aparatur Pemda DIY yang terinternalisasi keistimewaan DIY melalui Diklat Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Keistimewaan	30 orang	dukungan 100% terhadap persentase penyelenggaraan diklat yang sesuai dengan analisis kebutuhan diklat	100%	Rp. 1.675.892.400,00	Rp. 1.843.481.640,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan		
							ASN yang siap menjadi pelatih keistimewaan	40 orang								
							pejabat eselon II yang terinternalisasi keistimewaan yogyakarta	3 angkatan (120 orang)								
3.02.4.01.01.00.19	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PARAMPARA PRAJA										Rp. 1.800.000.000,00	Rp. 1.980.000.000,00				
3.02.4.01.01.00.19.001	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Sekretariat Daerah	Indeks kepuasan layanan kepada Paramparapraja	74indeks	Bahan Rekomendasi kepada Parampara Praja	15 rekomendasi	dukungan terhadap peningkatan pelayanan parampara praja sebesar 100%	100%	Rp. 1.800.000.000,00	Rp. 1.980.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan		
							Rekomendasi hasil koordinasi Parampara Praja dengan OPD Teknis	1 laporan								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 19.853.786.800,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.02.4.01.01.00.21	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN TATA CARA										Rp. 800.000.000,00	Rp. 880.000.000,00		
3.02.4.01.01.00.21.001	Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Sekretariat Daerah	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Berkualitas	80%	Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara tahun 2020	1 dokumen	dukungan 40% terhadap persentase capaian kinerja fisik terhadap target capaian kinerja fisik pembangunan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara	100%	Rp. 350.000.000,00	Rp. 385.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara tahun 2021	1 dokumen						
							Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara tahun 2022	1 dokumen						
3.02.4.01.01.00.21.002	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Sekretariat Daerah	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Berkualitas	80%	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara tahun 2020	4 dokumen	dukungan 60% terhadap persentase capaian kinerja fisik terhadap target capaian kinerja fisik pembangunan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara	100%	Rp. 450.000.000,00	Rp. 495.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
3.02.4.01.01.00.22	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN										Rp. 800.000.000,00	Rp. 880.000.000,00		
3.02.4.01.01.00.22.001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Paniradya Kaistimewaan	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan Urusan Kebudayaan yang Berkualitas	80%	1) Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan tahun 2020	1 dokumen	dukungan 40 % terhadap persentase capaian kinerja fisik terhadap target capaian kinerja fisik pembangunan keistimewaan urusan kebudayaan	100%	Rp. 350.000.000,00	Rp. 385.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							2) Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan tahun 2021	1 dokumen						
							3) Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan tahun 2022	1 dokumen						
3.02.4.01.01.00.22.002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Paniradya Kaistimewaan	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan Urusan Kebudayaan yang Berkualitas	80%	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Kebudayaan tahun 2020	4 dokumen	dukungan 60 % terhadap persentase capaian kinerja fisik terhadap target capaian kinerja fisik pembangunan keistimewaan urusan kebudayaan	100%	Rp. 450.000.000,00	Rp. 495.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
3.02.4.01.01.00.23	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEISTIMEWAAN URUSAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG										Rp. 1.600.000.000,00	Rp. 1.760.000.000,00		
3.02.4.01.01.00.23.001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Paniradya Kaistimewaan	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan Urusan Pertanahan yang Berkualitas	80%	1) Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan tahun 2021	1 dokumen	dukungan 20% terhadap persentase capaian kinerja fisik terhadap target capaian kinerja fisik pembangunan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang	100 %	Rp. 350.000.000,00	Rp. 385.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan
							2) Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan tahun 2020	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD												Jumlah Pagu : Rp. 19.853.786.800,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							3) Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan tahun 2022	1 dokumen							
3.02.4.01.01.00.23.002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Paniradya Kaistimewaan	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan Urusan Pertanahan yang Berkualitas	80%	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Pertanahan tahun 2020	4 dokumen	dukungan 30% terhadap persentase capaian kinerja fisik terhadap target capaian kinerja dfisik pembangunan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang	100%	Rp. 450.000.000,00	Rp. 495.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan	
3.02.4.01.01.00.23.003	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Paniradya Kaistimewaan	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan Urusan Pertanahan yang Berkualitas	80%	1) Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang tahun 2020	1 dokumen	dukungan 20% terhadap persentase capaian kinerja fisik terhadap target capaian kinerja fisik pembangunan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang	100%	Rp. 350.000.000,00	Rp. 385.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan	
							2) Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang tahun 2021	1 dokumen							
							3) Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang tahun 2022	1 dokumen							
3.02.4.01.01.00.23.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Paniradya Kaistimewaan	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan Urusan Pertanahan yang Berkualitas	80%	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan Urusan Tata Ruang tahun 2020	4 dokumen	dukungan 30% terhadap persentase capaian kinerja fisik terhadap target capaian kinerja fisik pembangunan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang	100%	Rp. 450.000.000,00	Rp. 495.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan	
3.02.4.01.01.00.24	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KEISTIMEWAAN										Rp. 750.000.000,00	Rp. 825.000.000,00			
3.02.4.01.01.00.24.001	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Paniradya Kaistimewaan	Persentase Efektivitas Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	94%	- Dokumen Hasil koordinasi dan pembinaan Lembaga Pelaksana Keistimewaan	1 dokumen	dukungan terhadap pembinaan kelembagaan pelaksana keistimewaan sebesar 100%	100%	Rp. 750.000.000,00	Rp. 825.000.000,00	Sekretariat Daerah	Sedang Berjalan	
							- Dokumen Hasil monitoring dan evaluasi Lembaga Pelaksana Keistimewaan	1 dokumen							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Keistimewaan													
3.03	KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)													
3.03.1.22.01.00	Dinas Kebudayaan													
3.03.1.22.01.00.15	PROGRAM SEJARAH, BAHASA, SASTRA DAN PERMUSEUMAN										Rp. 49.003.000.000,00	Rp. 0,00		
3.03.1.22.01.00.15.001	Pembinaan dan pengembangan kesejarahhan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi	12sumber sejarah	BTI : 1. Penyusunan Kajian sejarah 2. kompetisi Sejarah (dialog sejarah, . LCC Sejarah, Lawatan, Penulisan cerpen sejarah) 3. Sarasehan Kesejarahhan	1 dokumen (Diponegoro), 500 Eks 1 event ; 800 peserta 1 sarasehan	Dukungan 14,80% Terhadap Capaian Jumlah Sumber Sejarah Yang Direvitalisasi Dengan Target Capaian 11 Sumber Sejarah	100	Rp. 9.970.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan	9karya	GK: 1. Lomba Penulisan Sejarah 2. Inventarisasi sumber sejarah 3. Lawatan Sejarah 4. Sosialisasi Buku Bangsal Sewokoprojo 5. Teriaksananya Penulisan Sejarah	1. 22 desa @ 4 orang 3 hari 2. 1 Dokumen 3. 6 angkatan x 2 hari (teori dan lapangan)x 40 orang = 480 orang 4. 5 Kecamatan 5. 1 buku (jejak Jendral Sudirman di GK)						
					Rasio Kunjungan Museum dibandingkan kunjungan ke ODTW lain	0.6rasio	Induk: 1.Kajian Sejarah Lokal (Publikasi dan Launching Kajian Sejarah lokal) . 2. Kompetisi Sejarah 3.Dialog Jelajah Sejarah 4.Seleksi Lawatan Sejarah 5.Pembinaan komunitas Sejarah	1. 1 Dokumen dengan tema perjuangan 2. 500 peserta DIY 3). 100 peserta 4). 500 peserta berpartisipasi 5. 5 kab/kota (komunitas medsos)						
							KP : 1. Peningkatan Kapasitas tentang Sejarah Lokal 2. Lomba cerdas cermat Sejarah 3. Lawatan Sejarah 4. Penulisan Sejarah lokal	1. 200 Orang 2. 24 Grup 3. 150 Orang 4. 2 Dokumen						
							SLM : 1.Penulisan Sejarah Lokal 2. Kompetisi (Dialog, Lawatan Sejarah Penulisan sejarah)	1. 3 Judul (Plataran, Kentungan, Gua Jepang) 2. 100 Peserta						
							YK : 1. Kajian Sejarah (Tema Perjuangan) 2. Jambore sejarah (Lawatan Sejarah, Kemah, Teatrikal, Seminar Sejarah) 3. Pembinaan Komunitas Sejarah 4. Peningatan Hari-hari Sejarah	1. 2 kajian(Perjuangan P. Diponegoro), 2. 1 even 3. 3 komunitas 4. 2 even (SO 1 , Serangan Kota Baru)						
3.03.1.22.01.00.15.002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi	12sumber sejarah	1. Pelatihan Trampil BerBahasa dan Sastra	1.a. Sesorah 3 akt @ 75 orang b. Jurnalistik 2 akt @ 75 orang	Dukungan 31,54% Terhadap Capaian Jumlah Karya Bahasa dan Sastra Yang Dilestarikan Dengan Target Capaian 6 Karya	100%	Rp. 13.433.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan	9karya	2. Kajian Bahasa dan Sastra	2. a. Kebiasaan 2 kajian b. kesastraan 3 kajian						
					Rasio Kunjungan Museum dibandingkan kunjungan ke ODTW lain	0.6rasio	3. Kompetisi Bahasa	3. 9 jenis lomba (alih manuskrip jawa, alih bahasa, cerkak, sesorah, geguritan, macapat, pranatacara, penulisan novel, alih bahasa)						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							4. Pergelaran karya bahasa dan sastra	4. 10 kali macapat rutin, 2 kali macapat masal							
							5. Promosi dan Publikasi melalui media elektronik dan cetak	5. 4 media cetak dan 2 media elektronik (majalah, tabloid, buku, surat kabar, radio dan TV)							
							6. Even kesusastraan	6. 4 even a. Festival sandiwara berbahasa Jawa b. Temu Karya sastra c. Pentas sastra d. Festival "dramatic reading"							
							7. Fasilitasi Lembaga Bahasa	7. 2 lembaga Bahasa							
							BTI : 1. Kompetisi Kebahasaan Tingkat Kabupaten : 2. Gelar Macapat (Macapat rutin, Macapat Masal) 3. Cetak Buku Antologi Geguritan dan Cerkak 4. Pelatihan Bahasa dan sastra Jawa	1. 9 jenis lomba 2. 17 Kecamatan 3. 200 Eks 4. 3 wilayah (barat, timur, tengah)@ 30 Orang							
							GK: 1. Pembinaan dan lomba Bahasa dan sastra (Macapat, Pranatacara, geguritan, Sesorah, dongeng alih aksara dan kaligrafi Jawa) 2. Pembinaan macapat. (macapat rutin dan masal)	1. 1300 peserta 2. 10 even (8 even di desa, 1 even di GK, 1 even di DIY)							
							KP : 1. Pelatihan Bahasa dan Sastra 2. Kompetisi bahasa dan sastra 3. Pembinaan Macapat (Macapat Rutin, Macapat Masal)	1. 100 Orang 2. 5 (sesorah, pranatacara, geguritan, macapat, alih aksara) 3. 12 even							
							SLM : 1. Pembinaan Macapat (Rutin dan masal) 2. Pelatihan Bahasa dan sastra Jawa 3. Kompetisi Bahasa dan sastra (Lomba Macapat antar kecamatan, lomba pranatacara, lomba sesorah, lomba geguritan, lomba mendongeng antar kecamatan)	1. 19 Macapat 2. 17 Kecamatan @ 5 orang 3. 5 Jenis Lomba							
							YK : 1. Kompetisi Bahasa dan sastra (Geguritan Macapat, Baca Cerkak, Alih Aksara Jawa, Lomba Sesorah) 2. Pelatihan bahasa dan sastra Jawa 3. pembinaan Macapat	1. 4 Jennis lomba 2. 1 even 3. 14 Kecamatan							
3.03.1.22.01.00.15.003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.3. Terpilihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi	12sumber sejarah	"BTI : 1. Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat SMP Se Kabupaten. 2. Kajian Museum 3. Promosi Museum Bantul "	"1. 1 Kegiatan 2. 1 Dokumen 3. 16 Museum "	Dukungan 15,78% Terhadap Rasio Kunjungan Museum Dibanding Kunjungan ke ODTW Lain Dengan Target Capaian 0,55 Rasio	100 %	Rp. 25.600.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
					Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan	9karya	"GK: 1. Pembebasan Tanah untuk Museum Gunungkidul (MUSEUM GUNUNGKIDUL) 2. Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat SMP Se Kabupaten. "	" 1. 2000 m2 2. 1 even "							
					Rasio Kunjungan Museum dibanding kunjungan ke ODTW lain	0.6rasio	"KP : 1. Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat SMP Se Kabupaten. 2. Pameran Koleksi Museum "	"1. 13 Grup 2. 1 even"							
							"SLM : 1. Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat SMP se Kabupaten 2. Promosi Museum "	"1. 1 even 2. 14 Museum "							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00					
Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
							"YK : 1. Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan 2. Ekspo Museum di Kota "	"1. 1 even 2. 18 Museum "								
							1. Gebyar Museum Sejarah Purbakala Pleret	1. 1 event								
							2. pendampingan akreditasi museum	2. 30 Museum								
							3. Pendampingan museum	3. 30 Museum								
							4. pameran museum	4. 5 even								
							5. Wajib Kunjung Museum :	5. 3600 Peserta								
							7. Cerdas Cermat Permuseuman	7. 1 tim								
3.03.1.22.01.00.16	PROGRAM PENGUATAN MUSEUM SONOBUDOYO										Rp. 17.425.071.100,00	Rp. 0,00				
3.03.1.22.01.00.16.001	Pengelolaan Museum Sonobudoyo	2. Pembangunan Manusia dan Peningkatan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Museum Sonobudoyo	Indeks Kepuasan Pengunjung Museum Sonobudoyo	0.7Indeks	01. Pagelaran Wayang Durasi Singkat Museum Sonobudoyo	01. 275 even	-	-	Rp. 7.141.717.600,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan		
					Persentase Benda Koleksi Museum (BK ^M) yang diinventarisasi dan didokumentasi dibanding seluruh koleksi	69.05%	02. Pameran Temporer Museum Sonobudoyo	02. 2 even pameran								
							03. Pameran Lokal Museum Sonobudoyo	03. 3 even pameran								
							04. Pameran Nasional Museum Sonobudoyo	04. 5 even pameran								
							05. Gelar Wisata Museum Sonobudoyo	05. 2 event								
							06. Edukasi Komunitas Museum	06. 4 kali penyelenggaraan								
							07. Alih aksara dan Alih Bahasa Koleksi Naskah	07. masing-masing 2000 halaman jadi								
							08. Pemeliharaan/Konservasi Koleksi Museum	08. 50 buah koleksi batu, 100 buah koleksi kayu, 50 bilah keris, 300 uang kepeng, 60 buah wayang kulit dan 2 Lukisan								
							09. Kajian Koleksi	09. Bangunan Karsten								
							10. Inventarisasi dan Dokumentasi Koleksi Museum	10. 7.000 koleksi dari 63.000 koleksi								
							11. Penyusunan Storyline Pameran Temporer Tahun 2021	11. 2 dokumen								
							12. Promosi Museum Sonobudoyo	12. 5 even dan 1 billboard								
3.03.1.22.01.00.16.002	Pengembangan Museum Sonobudoyo	2. Pembangunan Manusia dan Peningkatan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Museum Sonobudoyo	Indeks Kepuasan Pengunjung Museum Sonobudoyo	0.7Indeks	1. Penataan Ruang Pamer Museum Sonobudoyo	1. 1 paket	-	-	Rp. 10.283.353.500,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Semua OPD												Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00			
Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
					Persentase Benda Koleksi Museum (BKM) yang diinventarisasi dan didokumentasi dibanding seluruh koleksi	69.05%	2. Penataan Lansekap Museum Sonobudoyo Unit II	2. 1 paket							
							3. Penataan Lansekap Museum Sonobudoyo Unit I"	3. 1 paket"							
3.03.1.22.01.00.17	PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA										Rp. 234.113.500.000,00	Rp. 0,00			
3.03.1.22.01.00.17.001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	persentase cagar budaya dan Warisan Budaya yang dilestarikan	13.2%	A. Pemberian Legalitas WBCB	A. 1. Inventarisasi dan dokumentasi WBCB (50 CB) 2. Penetapan WBCB (TACB DIY 10 WBCB) 3. Penyusunan regulasi WBCB (1 draft) 4. Rekomendasi pelestarian WBCB (DP2WB DIY 10 rekomendasi)	persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan. 13,2 % target tahun 2020. dari 11,22 % ditahun 2019.	100 %	Rp. 6.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							B. Pembinaan pelestarian WBCB	B. Pelatihan WBCB (4 kali)							
							C. Penelitian WBCB	C. 1. Kajian WBCB (5 dokumen) 2. Perencanaan teknis WBCB (5 dokumen)							
							D. Pengelolaan WBCB	D. Badan/embaga Pengelola 2 KCB							
							E. Penyebarluasan informasi WBCB	E. 1. Sosialisasi sadar lestari (1 kegiatan) 2. Penerbitan buletin Mayangjara (2 edisi) 3. Travel Heritage (2 lokasi) 4. Penerbitan buku pelestarian WBCB (2 judul)							
3.03.1.22.01.00.17.002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya.	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	persentase cagar budaya dan Warisan Budaya yang dilestarikan	13.2%	"BTI : 1. Penetapan 20 Cagar Budaya 2. Rehab Cagar Budaya Los Pasar Ngangkrusari dan Pelataran Budaya Krapyak 3. Kajian Warisan Budaya Tak Benda "	"1. 20 Rekomendasi 2. 2 Cagar Budaya 3. 4 WBTB (Bakmi pedes, Kajian Upacara aday grebeg gua selarong, nguras sendang pancuran ndlingo, adrem sanden.)"	Dukungan 62,73% Terhadap Capaian Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Yang Dilestarikan Dengan Target 12,21%	100 %	Rp. 225.363.500.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							1. Rehabilitasi WBCB	1. a. 2 Bangunan aset Kraton yang terehab b. 2 Bangunan aset Puro Pakualaman yang terehab c. 3 Bangunan aset Pemerintah yang terehab							
							2. Perawatan WBCB	2. Perawatan WBCB a. 7. Bangunan aset pemerintah terawat b. Juru Pelihara : 1. 50 Kapasitas SDM Jupel meningkat 2. 25 Bangunan dan situs terpelihara							
							3. Revitalisasi Situs dan Kawasan WBCB	3. a. 2 situs (Situs Pleret dan Mlangi) b. 1 kawasan sumbu filosofi c. Revitalisasi WBCB pojok benteng timur							
							4. Pembinaan WBCB	4. 75 pengelola WBCB							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00				
Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							5. Kajian dampak ekonomi pada kawasan cagar budaya DIY	1. 1 dokumen							
							6.Kajian Kekuatan bangunan Benda Cagar Budaya di DIY	1. 1 dokumen							
							GK: 1. Pengembangan Situs Stasiun Radio ALURI (Playen) 2. Pemugaran Bangsal Sewokoprojo Tahap II 3. Promosi Cagar Budaya 4.TACB	1. 1 CB 2. 1 CB 3. 1 even 4. 1 Tahun							
							KP : 1. Pengamanan Benda-benda Cagar Budaya di Dinas kebudayaan 2. a. Juru Pelihara b. Pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya (Media Center) 3. a. Penataan Lingkungan Aset PA (pesangarah PA) b. Penataan Lingkungan Geo heritage "	1. 64 CB 2. a. 1 juru pelihara b. 1 CB 3. a. 1 kawasan b. 1 kawasan							
							SLM : tercapainya program pelestarian warisan budaya dan cagar budaya"	1.Registrasi Nasional 2.Tim Ahli Cagar Budaya 3. Tenaga Administrasi"							
							YK : 1. TACB 2. rehab fisik (Ndalem kaneman) 3. Perencanaan /DED/kajian/ 2 paket (DED ndalem Pujokusuman) 5. Rehab Fisik Fasade dari pesar-watugateng	1. 10 Rekomendasi 2. 1 CB 3. 2 dokumen 4. 1 paket "							
3.03.1.22.01.00.17.003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	persentase cagar budaya dan Warisan Budaya yang dilestarikan	13.2%	1. Penyiapan Yogyakarta Warisan Dunia	1. Tim Penyiapan (1 kali)	Dukungan 4,52% Terhadap Capaian Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Yang Dilestarikan Dengan Target 12,21%	100%	Rp. 2.750.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
3.03.1.22.01.00.18	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA										Rp. 266.360.399.000,00	Rp. 100.000.000.000,00			
3.03.1.22.01.00.18.001	Pengelolaan dan pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Jumlah even budaya tingkat Provinsi, nasional, internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya	7.79%	01. Bimbingan SeniAnak	01. Bimbingan 40 kali pertemuan selama 1 th	-	-	Rp. 114.957.666.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
					Jumlah Taman Budaya di Kab/Kota	1Taman	02. Terselenggaranya Pameran Seni Rupa	02. Nandur strawung 6 hari							
							03. Pentas Seni di Taman Budaya	03. 5 cabang seni							
							04. Tuan Rumah Temu Karya Taman Budaya	04. Tuan Rumah Temu Karya Taman Budaya se Indonesia selama 6 hari							
							05. Majalah Mata Jendela dan 3 judul Buku Profil seni yang terdistribusikan	05. 2000 eksemplar majalah dan 1500 buku hektar							
							06. Pendokumentasian dan Publikasi kegiatanTaman Budaya	06. 11 bulan							
							07. Revitalisasi dan Eksperimentasi	07. a. Revitalisasi b. Eksperimentasi							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							08. Pasar Kangen	08. a. Pasar Kangen b. Pentas Tradisi Pasar Kangen							
							09. Terpeliharanya Taman Budaya 1 tahun	09. Plafon selasar CH 1 paket dan Peralatan 5 jenis (alat musik, gamelan, wayang, pangung, benda koleksi)							
							10. Pembangunan Taman Budaya Tahap I"	10. Struktur bangunan 2							
3.03.1.22.01.00.18.002	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	gk dan KP	Jumlah even budaya tingkat Provinsi, nasional, internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya	7.79%	1. Terpeliharanya Taman Budaya	1. 12 Bulan	terbangunnya taman budaya KP dan GK	100 %	Rp. 151.402.733.000,00	Rp. 100.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
					Jumlah Taman Budaya di Kab/Kota	1Taman	2. Kulonprogo manekowarno	2. 1 Even							
							3. Art For Children KP	3. 5 kesenian							
							4. Pembebasan Lahan KP	4. 4,2 ha							
							Pembangunan Fisik Taman Budaya Gunungkidul Tahap III	Pembangunan Fisik Taman Budaya di Gunungkidul							
3.03.1.22.01.00.19	PROGRAM SARANA PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN										Rp. 39.494.029.100,00	Rp. 0,00			
3.03.1.22.01.00.19.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Dinas Kebudayaan	realisasi jumlah pelayanan	20jumlah pelayanan	Sarpras perkantoran	15 jenis	Lancarnya aktivitas perkantoran di Dinas Kebudayaan dan KPA	100%	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
3.03.1.22.01.00.19.002	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Dinas Kebudayaan	realisasi jumlah pelayanan	20jumlah pelayanan	"BTI : Gamelan Perunggu"	1 set	-	-	Rp. 9.650.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							"KP : Gamelan, alat kesenian dan pakalan "	15 kelompok							
							"SLM : 1. Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Masyarakat seni dan Budaya "	45 Kelompok seni							
							Fasilitas lembaga seni dan budaya	35 lembaga							
3.03.1.22.01.00.19.003	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Dinas Komunikasi dan Informatika	realisasi jumlah pelayanan	20jumlah pelayanan	1. Langganan WIFI Pemberdayaan Masyarakat	1. 80 lokasi	-	-	Rp. 27.844.029.100,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							2. Langganan bandwidth desa	2. 300 desa							
							3. Pemeliharaan Peralatan Wifi Acces Point Jalan Maliboro dan CCTV	3. 30 CCTV; 10 AP							
							4. Pemeliharaan Peralatan Videotron	4. 2 unit							
							5. Pemeliharaan Peralatan Ruang Command Center IDMC	5. 1 ruang							
							6. Pengadaan CCTV Pendukung Aplikasi Jogja Istimewa	6. 5 lokasi							
							7. Pengadaan Backup UPS dan AC Central Data Center Pemda DIY	7. 2 unit							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD												Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							8. Jogja Smart Province	8. 1 paket							
3.03.1.22.01.00.20	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN URUSAN KEBUDAYAAN										Rp. 7.500.000.000,00	Rp. 5.000.000.000,00			
3.03.1.22.01.00.20.001	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Dinas Kebudayaan	realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	99,08%	1. Dokumen Perencanaan urusan Kebudayaan	3 Dokumen	Dukungan 16,67% Terhadap Capaian Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Kebudayaan Dengan Target 99,08%	100%	Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
					realisasi jumlah kerjasama dengan mitra budaya	25kerjasama									
3.03.1.22.01.00.20.002	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Dinas Kebudayaan	realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	99,08%	1. Dokumen Monitoring dan evaluasi : 0 dokumen dari 1 dokumen .	1 Dokumen	Dukungan 10,00% Terhadap Capaian Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Kebudayaan Dengan Target 99,08%	100%	Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
					realisasi jumlah kerjasama dengan mitra budaya	25kerjasama									
3.03.1.22.01.00.20.003	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Dinas Kebudayaan	realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	99,08%	1. Kerjasama luar daerah	1. 3 daerah	terselenggaranya kemitraan antar kelompok/lembaga	25 lembaga	Rp. 4.000.000.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
					realisasi jumlah kerjasama dengan mitra budaya	25kerjasama	2. MSO Youth Music Camp	2. 1 even							
							3. Residensi	3. 20 even							
							4. Kerjasama MPU	4. 2 even							
							5. Penguatan dan pembinaan lembaga budaya	5. 15 lembaga budaya							
3.03.1.22.01.00.23	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI ARSIP KRATON DAN KADIPATEN										Rp. 22.379.511.800,00	Rp. 0,00			
3.03.1.22.01.00.23.001	Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan arsip bernilai sejarah Kasultanan dan Kadipaten	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Jumlah arsip kraton dan kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi	2000Berkas	*14. Cakupan Alih Media dari tekstual ke digital arsip Kraton & Puro	14. 30000 lembar	-	-	Rp. 22.379.511.800,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							01. Terolahnya arsip tekstual dan arsip foto Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman	01. 3000 berkas tekstual dan 1000 lembar foto							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							02. Cakupan dokumen arsip tekstual Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman yang dirawat dengan penghilangan asam dan laminasi	02. 7.500 lembar dan 7.500 lembar							
							03. Naskah Kuno yang sudah diputrani	03. 600 lembar							
							04. Cakupan fumigasi ruang arsip dan perpustakaan Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman	04. 1800 m3							
							05. Cakupan termitt control ruang arsip dan perpustakaan di Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman	05. 731 m2							
							06. Pembangunan Diorama Kearsipan sejak Panembahan senopati sd Keistimewaan	06. 1 unit diorama							
							07. Cakupan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Diorama	07. 1 Dokumen							
							08. Jumlah bahan pustaka di perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten yang dirawat	08. 50.000 buku							
							09. Kotak Pelindung	09. 1500 buah							
							10. Perbaikan buku rusak koleksi Kraton	10. 1000 Buku							
							11. Reproduksi naskah kraton	11. 500 lembar							
							12. Tersusunya data penelusuran & Akuisisi Arsip HB I, HB II, Ketokohan, & Tradisi Mitoni dan kelahiran putri raja	12. 5 data							
							13. Launching dan Sosialisasi Naskah Sumber Arsip Fajar Dari Langit PA VIII dan Laskar Rakyat	13. 2 buku							
							15. Dokumen Sejarah Lisan & Backsound Jumenengan PA X	15. 2 dokumen							
							16. Promosi dan Sosialisasi Kearsipan melalui Pameran Kearsipan	16. 2 event							
							17. Cakupan Arsip Kraton & Puro Pakualaman yang dialihutulkan dari Jawa ke Latin	17. 500 lembar							
							18. Cakupan Cetak Manuskrip Arsip Kuno hasil Akuisisi dari British Library	18. 1750 lembar							
							19. Cakupan Arsip Kraton Yogyakarta (Tahun 2014) yang dialihbahasakan Jawa ke Indonesia	19. 30.000 lembar							
							20. Sosialisasi SOP Pengelolaan Arsip Kraton	20. 335 lembar							
							21. Terlaksananya Bimtek Tata Kelola Kearsipan di Kraton	21.100 orang							
							22. Terlaksananya Bimtek Tata Kelola Kearsipan di Kadipaten PA	22. 30 orang							
							23. Penyusunan Pedoman Tata Kelola Perpustakaan Keraton Yogyakarta	23.1 pedoman							
							24. DED Cafe Library di Gedung Jogja Library Center"	24. 1 dokumen							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD												Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
3.03.1.22.01.00.24	PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA										Rp. 34.859.694.000,00	Rp. 0,00			
3.03.1.22.01.00.24.001	Pembinaan Muatan Lokal	2. Pembangunan Manusia dan Penguasaan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berkarakter	45.07%	1. Jumlah peserta didik yang mendapat pelatihan seniman masuk sekolah 2. Pembangunan sekolah seni (rehab SMK 1, 2 dan 3 Kasihan Bantul untuk jadi sekolah percontohan) 3. Gladi Kawruh 4. Ngudat tembang kawruh 5. Festival Budaya Pendidikan Khusus 6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan berbasis budaya di sekolah/madrasah	1. 20 desa 2. 35 desa 3. 10 Kelompok 4. 1 even 5. 10 kelompok 6. 7 komoditas	-	-	Rp. 7.348.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
3.03.1.22.01.00.24.002	Pendidikan Kepramukaan	2. Pembangunan Manusia dan Penguasaan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berkarakter	45.07%	Jogja International Scout Camp	3500 peserta	-	-	Rp. 20.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
3.03.1.22.01.00.24.003	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	2. Pembangunan Manusia dan Penguasaan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berkarakter	45.07%	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	Penyelenggaraan operasional Akademi Komunitas Seni dan budaya 3 prodi, rehab gedung dan perlengkapan	-	-	Rp. 7.511.694.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
3.03.1.22.01.00.25	PROGRAM PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA										Rp. 41.420.370.000,00	Rp. 0,00			
3.03.1.22.01.00.25.001	Pengembangan Lumbung Mataraman	2. Pembangunan Manusia dan Penguasaan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing	0.1%	1. Lumbung Mataraman tahap penumbuhan 2. Lumbung Mataraman tahap pengembangan 3. Budidaya Tanaman di Lahan Surjan 4. Pekan Tani Mataram 5. Budidaya Tanaman Sistem Sabuk Gunung 6. Pelestarian tanaman varietas lokal"	1. 20 desa " 2. 35 desa 3. 10 Kelompok 4. 1 even 5. 10 kelompok 6. 7 komoditas	-	-	Rp. 4.950.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
3.03.1.22.01.00.25.002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	2. Pembangunan Manusia dan Penguasaan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Pariwisata	persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing	0.1%	1.Event Skala Lokal (5 Event) : Menoreh Festival, Pameran Sekaten, Atraksi wisata budaya di kawasan strategis, Gelar Atraksi Seni Budaya, Ketoprak Conthong	1. 23.700 peserta	-	-	Rp. 23.255.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							2. Event Skala Nasional (8 Event) : Royal Mataram Festival, Festival Geopark, Jogja Heritage Trail, Parade Gamelan, Festival Nusantara, Ngayogjazz, Festival Sumbu Filosofi, Stand Up Hutan	2. 19.350 peserta; 25 peserta asing							
							3.Event Skala Internasional (5 Event) : Jogja Fashion Carnival, Yogyakarta International Folklore Festival, Jogja Night, Jogja International Street performance, Jogja International Heritage Walk	3. 4.250 peserta ; 150 peserta asing							
3.03.1.22.01.00.25.003	Pengembangan Industri Kreatif	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpilihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saling	0.1%	01. Jogja batik bienale (roadshow Batik; Simposium Batik; workshop Batik; pameran batik)	01. 1 event (5 kota; 250 peserta; 300 peserta; 150 IKM)	-	-	Rp. 12.400.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							02. Pelatihan IKM Batik, Blangkon, kerj. Keris, dan surjan (4 akt @ 20 orang)	02. 80 orang							
							03. Fasilitasi hak cipta dan merk (batik 2 kelompok, kesenian 2 kelompok, dan kuliner 2 kelompok)	03. 6 kelompok							
							04. Sosialisasi Pembuatan Moulding Gamelan	04. 50 orang							
							05. Produksi Gamelan	05. 1 perangkat gamelan							
							06. Pelatihan Produksi Gamelan bagi IKM 3 akt @ 20 orang	06. 60 orang							
							07. Pameran seni kriya	07. 150 IKM							
							08. Pameran Jogja Fashion Week	08. 150 IKM							
							09. Peningkatan Pengolahan dan Kemasan Produk Jamu sebanyak 3 akt, @20 IKM	09. 60 IKM							
							10. Peningkatan Pengolahan dan Kemasan Produk Aromaterapi sebanyak 2 akt @ 20 IKM	10. 40 IKM							
							11. Peningkatan Pengolahan dan Kemasan Produk Spa Tradisional sebanyak 2 akt @ 20 IKM	11. 40 IKM							
							12. Kemitraan Usaha Produk IKM Biofarmaka dengan Fasyankes sebanyak 2 akt @ 50 IKM	12. 100 IKM							
							13. Sertifikasi produk IKM Biofarmaka	13. 3 jenis							
							14. Galery UMKM di NYIA	14. 1 Tahun (sewa)							
3.03.1.22.01.00.25.004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpilihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kesehatan	persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saling	0.1%	1. RS Dikembangkan menjadi Fasyankes Integrasi	1. 3 Fasyankes Integrasi	-	-	Rp. 815.370.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							2. Puskesmas dikembangkan menjadi Fasyankes Integrasi	2. 15 Fasyankes Integrasi							
							3. Puskesmas Membina Kelompok Asuhan Mandiri	3. 15 Kelompok							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							4. Penyehat Tradisional (Hatra)terlatih (Herbals, pijat refleksi, akupresure)	4. 180 penyehat tradisional							
							5. Penyehat Tradisional mendapatkan pembinaan legalitas pelayanan	5. 180 penyehat tradisional							
							6. Perawat terlatih akupresure dan dokter terlatih akupunktur	6. 20 dokter, 15 perawat							
3.03.1.22.01.00.26	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA										Rp. 245.586.427.000,00	Rp. 0,00			
3.03.1.22.01.00.26.001	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.3. Terpilihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Bambanglipuro Cangkringan Dlingo Galur Girmulyo Kalibawung Karangmojo Kokap Lendah Minggir Nanggulan Ngaglik Ngemplak Nglipar Pajangan Paliyan Panggang Patuk Pengasih Pundong Samigaluh Sanden Semanu Semin Sentolo Srandakan Tanjungsari Temon Tempel Turi Wonosari	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	1. pendampingan desa budaya	5 aspek	2. Peningkatan SDM	56 desa	Rp. 11.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
										3. Sarpras Desa Budaya	56 desa				
3.03.1.22.01.00.26.002	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.3. Terpilihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Kabupaten & Kota	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	BTI : 10 Rintisan Desa Budaya Workshop Perfilman*	10 desa	-	-	Rp. 10.600.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							GK: 1. Gelar Potensi Rintisan Desa Budaya 2. Pembuatan Film Dokumenter Rintisan Desa Budaya (baru mulai 2020)	1. 20 even (20 desa Rintisan Budaya) 2. 20 Desa Rintisan Budaya (20 Film)*							
							KP : 1. Pembinaan desa rintisan budaya 2. Potensi rintisan desa Budaya 3. Sarpras "	1. 3 even (11 desa) 2. 21 even (11 desa) 3. 11 Desa "							
							SJM : 1. Peningkatan SDM rintisan desa Budaya (RDB) 2. Sarpras 3. Gelar Potensi "	38 desa							
							YK: 1. Pentas Seni 2. Peningkatan SDM (*Manajemen Pementasan, Pelestarian Seni Tari) 3. Fasilitas Sarpras "	1. 21 Rintisan Kelurahan Budaya (RKB) 2. 21 RKB 3. 3 RKB (Gamelan)*							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Semua OPD												Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
3.03.1.22.01.00.26.003	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	"BTI : 1. Lomba Lukis Kyoto-DIY, 2. Pembinaan Perfilman (Workshop pembuatan Film, Lomba Film)"	"1. 300 peserta Lomba Lukis, 2. 100 Peserta Workshop"	Dukungan 5,88% Terhadap Capaian Persentase Nilai Adat, Tradisi dan Seni Yang Sudah Direvitalisasi Dengan Target 27,35%	100%	Rp. 14.405.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							"GK: 1. Lomba Lukis Kyoto-DIY tkt. Gunungkidul 2. Pembinaan Seni Rupa di Gunungkidul "	" 1. 1 even; 400 orang 2. 1 even; 6 hari "							
							"KP : 1. Lomba Lukis DIY Koyto 2. Pembinaan seni rupa 3. Pelatihan Perfilman "	" 1. 1 even 2. 1 even 3. 8 Kelompok (8 Film) "							
							"SLM : 1. Apresiasi Masyarakat Terhadap Seni Budaya Kontemporer dan Tradisi 2. Lomba Lukis Kyoto-DIY, 3. Pembinaan dan Pengembangan Perfilman "	"1. Pembinaan Sanggar (10 Kelompok) 2. Lomba Lukis DIY-Kyoto (500 Peserta) 3. 30 Regu"							
							"YK : 1. Lomba Lukis DIY - Kyoto 2. Gelar Seni Lukis "	"1. 20 Karya Terseleksi 2. 300 Lukisan "							
							Pembinaan Seni Rupa, Seni Pertunjukan dan Perfilman	"- Pengembangan SDM - Pameran tingkat Nasional/ Internasional - Festival tingkat Nasional/ Internasional - Kompetisi Seni							
3.03.1.22.01.00.26.004	Misi Kebudayaan ke dalam dan luar Negeri dalam rangka diplomasi Budaya	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	"BTI: Terlaksananya Promosi Budaya keluar BTL"	5 daerah (GSBY, APKASI, Lombok, Kalbar, Sulteng)	Dukungan 3,50% Terhadap Capaian Persentase Nilai Adat, Tradisi dan Seni Yang Sudah Direvitalisasi Dengan Target 27,35%	100%	Rp. 12.100.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							"GK: Terlaksananya Promosi Budaya keluar GK "	5 event (Jakarta GSBY, Jawa Timur, Bali, Luar Jawa 2 kali)							
							"KP: Terlaksananya Promosi Budaya keluar KP"	5 event (GSBY, Sulut, Kalbar, Bali, Banten)							
							"SLM : 1. Terapresiasinya Produk-Produk Seni Budaya DIY di Kancan Nasional "	4 Daerah. Hading Nagari (GSBY), Sulawesi selatan, Sumatera Barat, Banyuwangi, Jakarta dalam HUT slemang marunggal sembada, Surabaya Juang, APKASI)							
							"YK: Terlaksananya Promosi Budaya keluar Yogyakarta "	4 tempat (pesona budaya nusantara kota menjadi tuan rumah), festival khatulistiwa pontianak, festival krakatau lampung, Festival Tabot Bengkulu)							
							Misi Kebudayaan Ke Dalam Dan Luar Negeri	"A. 5 Provinsi (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, Bali) B. 5 Negara (Kyoto Jepang dalam rangka 45 th Kerjasama DIY-Kyoto, Asean, eropa, asia dan Australia dalam Rangka promosi wisata dengan dinas pariwisata)							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD

Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
3.03.1.22.01.00.26.005	Penghargaan Seniman dan Budayawan	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	"BTI : 1. Pnggiat Seni Budaya 2. Pnggiat adat dan tradisi 3. Pelestari WBCB "	"1. 3 Orang 2. 2 Orang 3. 1 orang "	Dukungan 1,71% Terhadap Capaian Persentase Nilai Adat, Tradisi dan Seni Yang Sudah Direvitalisasi Dengan Target 27,35%	100%	Rp. 3.666.240.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan		
							"GK: Penghargaan untuk pelestari adat tradisi, pedalangan, karawitan, seni tari, ketoprak, WBCB "	6 Penerima								
							"KP : penerima Penghargaan 7 Kategori (Pelestari/pelaku seni, Pelestari/pelaku adat tradisi, Pelestari/pelaku WBCB, Budayawan, Pencipta Karya/ kreator, Maestro Budaya, Anak dan Remaja)"	7 Penerima								
							"SLM : Terharganya prestasi kreatif dan pemerhati pelestari warisan budaya 1. pelestari cagar budaya 2. pelaku tradisi budaya 3. pelaku seni budaya "	"1. 1 orang 2. 3 orang 3. 2 orang"								
							"YK : Penghargaan Seniman dan Budayawan "	"6 orang untuk semua kategori "								
							1. Jumlah Penerima Penghargaan sebanyak 7 kategori yakni Pelestari dan atau Pelaku Seni, Pelestari dan/atau Pelaku Adat Tradisi, Pelestari dan/atau Pelaku Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Budayawan (Pemikir, Pemerhati, Pengamat, Analis Sosial Budaya), Kreator (Pelopor dan/atau Pencipta Karya), Maestro Budaya, Kategori lainnya (Anak dan Remaja),	1. 7 Kategori								
							2. Penilaian Penghargaan Seniman Budayawan dan wabcbb untuk Penerima 2021	2. 7 Kategori								
3.03.1.22.01.00.26.006	Festival Kebudayaan Yogyakarta	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	"BTI : Dukungan untuk : 1. Pentas Seni 2. Pawai 3. pasar seni "	"1. 1 Bulan 2. 1 pawai 3. 1 bulan pasar seni"	Dukungan 5,55% Terhadap Capaian Persentase Nilai Adat, Tradisi dan Seni Yang Sudah Direvitalisasi Dengan Target 27,35%	100%	Rp. 9.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan		
							"GK: Dukungan untuk : 1. Pentas Seni 2. Pawai 3. pasar seni "	"1. 1 Bulan 2. 1 pawai 3. 1 bulan pasar seni"								
							"KP : Dukungan untuk : 1. Pentas Seni 2. Pawai 3. pasar seni "	"1. 1 Bulan 2. 1 pawai 3. 1 bulan pasar seni"								
							"SLM : Dukungan untuk : 1. Pentas Seni 2. Pawai 3. pasar seni "	"1. Gelar Seni 2. pameran seni 3. Pasar seni"								
							"YK : Dukungan untuk : 1. Pentas Seni 2. Pawai 3. pasar seni "	"1. 1 Bulan 2. 1 pawai 3. 1 bulan pasar seni"								
							1. Pentas Seni	1. 1 Bulan								
							2. Pameran	2. 3 event pameran								
							3. Pawai	3. 1 pawai								
							4. pasar seni	4. 1 bulan pasar seni								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Semua OPD												Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
3.03.1.22.01.00.26.007	Gelar Budaya Jogja	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Girimulyo	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	"BTI : 1. Pengiriman Teater Tradisional 2. Festival dan Pengiriman Jathilan 3. Festival dan Pengiriman Kethoprak 4. Pengiriman Reog 5. Seleksi dan Pengiriman Sendratari "	"1. 1 event 2. 1 event 3. 1 event. 4. 1 event. 5. 1 event."	tergelarnya potensi seni dan budaya DIY	100	Rp. 21.700.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							"GK: 1. Pembinaan Kethoprak 2. Pembinaan Reog Klasik Gunungkidul tkt Gunungkidul 3. Pembinaan Seni Tradisi tkt Gunungkidul 4. Pembinaan Langen Carita 5. Pengiriman Tim seni Sendratari Daerah tkt. DIY 6. Pembinaan Festival Teater Tradisi tkt. DIY "	" 1. 1. event (festival dan pengiriman) 2. 1 event Festival Reog Klasik Gunungkidul tk Gunungkidul 3. 1 event Festival Seni Tradisi tkt Gunungkidul 4. 1. event (festival dan pengiriman) 5. 1 Tim seni Sendratari Daerah tkt. DIY 6. 1. event (festival							
							"SLM : 1. Pembinaan Teater Tradisional TK Kabupaten dan DIY 2. Pembinaan Sendratari TK Kabupaten dan DIY 3. Pembinaan Kethoprak TK Kabupaten dan DIY 4. Pembinaan Langen Carito TK Kabupaten dan DIY 5. Festival Garis Imajiner "	"1. 1 event 2. 1 event. 3. 1 event. 4. 1 event. 5. 1 event."							
							"YK : 1. Festival Langencarita Tk. Kota 2. Festival Teater Tk. Kota 3. Festival Kethoprak Tk. Kota . 4. Festival Godong Opo-Opo 5. Festival Tari Klasik 6. Pengiriman Festival Sendratari TK DIY "	"1. 14 Kecamatan 2. 14 Kecamatan 3. 14 Kecamatan 4. 1 event 5. 1 event 6. 1 event"							
							DISBUD DIY 1. Kethoprak Sayembara 2. Festival Kethoprak 3. Festival Sendratari 4. Jogja Gamelan Festival 5. Pergelaran Langen Mondrowanaran 6. Pergelaran Wayang Menak 7. Festival Teater 8. Gelar Budaya Catur Sagatra 9. Pergelaran Langendriyan 10. Festival Langencarita 11. Kethoprak Mataram 12. Kethoprak Tobong 13. Kethoprak RRI	1. 20 Episode. 2. 1 event. 3. 1 event. 4. 1 event. 5. 1 event. 6. 1 event. 7. 1 event. 8. 1 event. 9. 1 event. 10. 1 event. 11. 5 event 12. 5 event 13. 5 event							
							KP : 1. Pembinaan Kethoprak (workshop, Festival, audisi, pengiriman di tingkat DIY) 2. Pembinaan Langen carita (Festival Langencarita, Pengiriman Kontingen langencarita) 3. Pengiriman festival dalang 4. Pembinaan Langensworo (workshop, Festival Langensworo) 5. Sendratari sugriwo subali 6. Menoreh Art Festival 7. Pengiriman Festival Sendratari 8. Pembinaan Theater	"1. 1 event 2. 1 event 3. 1 event. 4. 1 event. 5. 1 event. 6. 1 event. 7. 1 event. 8. 1 event							
3.03.1.22.01.00.26.008	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	"BTI : 1. . Publikasi melalui media elektronik, cetak, website "	1. 5 siaran Publikasi media elektronik , 2 kali cetak, 1 tahun website.	Dukungan 2,99% Terhadap Capaian Persentase Nilai Adat, Tradisi dan Seni Yang Sudah Direvitalisasi Dengan Target 27,35%	100%	Rp. 7.403.632.500,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							"SLM : 1. Publikasi melalui media elektronik, 2. Repertoar Tari HUT Kab. Sleman 3. Apresiasi Seni Di area publik "	"1. 4 event 2. 1 Event 3. 44 event di museum dan 30 di Gedung Kesenian sleman "							
							1. Kethoprak Sayembara	20 event							
							10. Suplemen Budaya	1 Paket							
							11. Sarasehan Media Budaya	2 kali							
							2. Citra Jogja	12 event							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							3. Jogja Semesta	10 event						
							4. Kunci Bawuk	24 event						
							5. Angkringan	12 event						
							6. Muhibah Budaya	3 event						
							7. Majalah Budaya	8 Edisi						
							8. Ketoprak Radio	20 event						
							9. Digitalisasi Film	1 paket						
							Kulon Progo : 1. Siaran TV indoor dan outdoor	1. 8 siaran						
3.03.1.22.01.00.26.009	Selendang Sutera	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	a. Dialog Budaya Nasional	a. 1event	Dukungan 1,71% Terhadap Capaian Persentase Nilai Adat, Tradisi dan Seni Yang Sudah Direvitalisasi Dengan Target 27,35%	100	Rp. 2.280.804.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							b. Gelar Budaya Etnis	b. 5 hari						
							c. Karnaval Budaya	c. 1 event						
							d. Kemah Budaya	d. 5 hari						
							e. Enkulturasi Budaya	e. 1 event						
							f. Jelajah Budaya	f. 1 event						
							g. Terbentuknya Kader Pembauran Budaya di DIY	150 Mahasiswa						
3.03.1.22.01.00.26.010	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	"BTI : 1. Himpunan Penghayat 2. Dewan Kebudayaan Bantul "	" 1. 6 Sarasehan 2. 8 kali"	Dukungan 1,60% Terhadap Capaian Persentase Nilai Adat, Tradisi dan Seni Yang Sudah Direvitalisasi Dengan Target 27,35%	100%	Rp. 8.550.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							"GK: 1. Fasilitasi dan penguatan MLKI 2. Gladen Jemparingan 3. Sarasehan dan jamasan tosan aji 4. Festival Upacara Adat "	"1. 4 event 2. 1 event 3. 1 event 4. 1 event"						
							"KP : 1. Upacara adat dan tradisi 2. Fasilitasi Himpunan Penghayat 3. Peningkatan SDM Upacara adat "	"1. 1 Sadran agung, 2. 4 event 3. 1 event"						
							"SLM : a. Upacara adat yang merupakan kalender event kabupaten b. kegiatan tradisi yang bersifat keagamaan C. fasilitasi dan pembinaan terhadap Penghayat Kepercayaan D. Festival Upacara "	" á. 6 event (bekakak, mbah Demang, Batok Boli, Wonolelo, Labuhan Merapi, Tunggul Wulung) b. 3 (ploso kuning, miangi, sultoni) c. 4 even dialog/sarasehan d. 17 Kecamatan "						
							1. Sarasehan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	1. 1 event.						
							2. Festival Upacara Adat	1. 1 event.						
							3. Fasilitasi Ritual Kepercayaan Adat dan Tradisi	1. 20 event.						
							4. Gelar Adat dan Tradisi di. Jawa Timur	1. 1 event.						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							5. Fasilitasi Puncak Ritual/Wayang Kulit di. Kab/Kota	1. 5 event.							
							6. Fasilitasi Puncak Ritual/Wayang Kulit (di. Keparthian)	1. 1 event.							
							Kota Yogyakarta: 1.Gelar Upacara adat 2. Sarasehan MLKI	1. 30 Kelurahan 2. 1 even"							
3.03.1.22.01.00.26.011	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam masyarakat	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.3. Terpilihnya dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	"BTI : a. Pagelaran wayang kulit di bantu 2. Pembinaan wayang kulit di bantu "	"1. 22 even (pepadi dan sukrokaasih) 2. 1 even festival dan pengiriman dalang anak dan remaja "	Dukungan terhadap Kelestarian Tata Nilai Budaya DIY	100%	Rp. 19.500.750.500,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							"KP : 1. Festival dalang anak dan Remaja 2 . Pembinaan Wayang/dalang (workshop, pentas wayang) 3 . Pentas Apresiasi 4. Dewan Kebudayaan KP "	" 1. 12 Grup 2. 15 dalang 3. 3 even 4. 4 even "							
							"SLM : a. Dewan Kebudayaan Sleman b. Pembinaan Wayang Kulit c. Revitalisasi seni "	"a. 1 tahun b. 25 even/Pentas, 34 Wayang Siswa, 1 even festival c. 2 Materi seni tradisi (Jeber Juwes, Emprak)"							
							"YK : 1. Pagelaran Wayang 2. Fes. Dalang Anak dan Remaja Tk. Kota 3. Peningkatan Kapasitas DKKY	1. 15 even 2. 1 even 3. 1 even							
							A. PENTAS SENI ADI LUHUNG: 1 Pepadi DIY 2. Pepadi DIY Keluar DIY 3. Pepadang 4. Sukrokaasih 5. Wayang Orang Panca Budaya B. PEMBINAAN PEDALANGAN: 1. Workshop Pedalangan 2. Seleksi Dalang Se- DIY 3. Pengiriman Dalang dalam Festival Tingkat Nasional 4. Penyusunan dan Penerbitan Buku Pedalangan 5. Sanding Dalang C. PELESTARIAN TATA NILAI BUDAYA DIY 1. Sosialisasi tata Nilai Budaya DIY 2. Kajian dan Regulasi Tata Nilai 3. Publikasi Tata Nilai Budaya DIY D. WARISAN BUDAYA TAK BENDA 1. Registrasi, Inventarisasi, Penyusunan Kajian WBTB 2. 2. Perayaan WBTB di DIY dan Jakarta E. JIHF F. DEWAN KEBUDAYAAN DIY	A. 12 even 1 even 12 even 10 even 5 even B. 10 even 2 even 3. Pengiriman Dalang dalam Festival Tingkat Nasional 4. 1 Jdl/300 eks 5. 1 event C. 5 Kab/Kota 1 Dokumen 2 event E. 1 Event F. 1 Tahun							
							GK: 1. Pembinaan Pedalangan (Workshop, pentas, Festival dalang) 2. Pentas Ketoprak 3. Penguatan Dewan Kebudayaan"	1. 40 even, 1 festival, 1 even workshop) 2. 9 even 3. 4 even"							
3.03.1.22.01.00.26.012	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	2. Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1.1.3. Terpilihnya dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	"BTI : Terbina dan Terfasilitasinya Organisasi Budaya di Kab Bantul"	250 organisasi budaya	Dukungan 7,61% Terhadap Capaian Persentase Nilai Adat, Tradisi dan Seni Yang Sudah Direvitalisasi Dengan Target 27,35%	100	Rp. 24.355.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							"GK: 1. Karawitan Jumat Legi 2. Gelar Seni Tradisi di Kab. Gunungkidul 3. Pementasan Seni di Hari Jadi Kab. Gunungkidul 4. Fasilitasi Saka Budaya Bakti "	" 1. 10 even 2. 45 even 3. 6 hari 4. 12 Bulan "							
							"KP : 1. Pentas even Seni 2. Fasilitasi Saka widya Budaya bakti 3. Jemparring Mataram 4. Nglarak Blarak "	"1. 25 even 2. 12 Bulan 3. 1 even 4. 1 even "							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Semua OPD												Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00			
Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							"SLM : Terbina dan Terfasilitasinya Organisasi Budaya di Kab Sleman "	150 Kelompok							
							"YK : Event Penggiat Seni"	15 even							
							1. Pentas Seni Budaya Event kecil	1. 100 kelompok.							
							2. Pentas Seni Budaya 5 Kab/Kota	2. 100 kelompok.							
							3. Pentas Seni Budaya Paket Sedang	3. 80 kelompok.							
							4. Pentas Seni Budaya Paket Besar	4. 100 kelompok.							
3.03.1.22.01.00.26.013	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	"BTI : Terbinanya Lembaga Adat dan Tradisi di Kab Bantul"	50 even	-	-	Rp. 92.275.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							"GK: 1. Fasilitasi upacara adat "	"1. 50 paket "							
							"KP : Terbinanya lembaga adat dan tradisi di kp "	80 upacara adat masyarakat							
							"SLM : a. Terlaksananya kegiatan tradisi budaya Masyarakat "	1. 86 kelompok							
							Dukungan pelestarian budaya di Kraton dan PA	1 tahun							
3.03.1.22.01.00.26.014	Gelar Seni Budaya Daerah	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Badan Penghubung Daerah	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	1. Gelar seni Budaya	41 kali	-	-	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							2. Stakeholder yang paham seni budaya Karawitan, Seni Tari, Ketoprak Gaya Yogyakarta "	140 orang							
3.03.1.22.01.00.26.015	Pembinaan Jagawarga	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	1. Jumlah Kelompok JW terbina dan mampu menjalankan fungsinya	1. 400 Desa/Kelurahan/kelompok JW	-	-	Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							2. Sosialisasi dan pembentukan jaga warga di kecamatan	2. 5 Kab x 4 Kec x 50 orang							
							3. Pendampingan Pembinaan Kapasitas Jaga Warga	3. 50 kali							
							4. Rakor movev	4. 5 Kab x 3 kl							
							5. Sosialisasi Revisi Pergub ke kabupaten/kota dan provinsi	5. 6 kali							
3.03.1.22.01.00.26.016	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Pariwisata	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	1. Pelatihan SDM dan Lembaga Wisata Budaya (Tahap Penumbuhan Desa Mandiri Budaya) 2. Pendampingan SDM dan Lembaga Wisata Budaya (Tahap Pengembangan Desa Mandiri Budaya)	1. 5 lokasi 2. 5 lokasi	-	-	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
3.03.1.22.01.00.26.017	Pengembangan Kewirausahaan Desa	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	1. Sosialisasi Kewirausahaan (Tahap Penumbuhan)	1. 5 lokasi	-	-	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan	
							2. Pelatihan/Diklat Peningkatan Kapasitas UKM di Desa Mandiri Budaya (Desa Tahap Penumbuhan dan Pengembangan)	2. 20 akt (10 akt Tahap Penumbuhan dan 10 akt bagi Tahap Pengembangan)							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 958.142.002.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							3. Bimbingan Teknis Peningkatan Daya Saing Produk UKM (desa tahap pengembangan)	3. 10 akt (5 desa tahap Penumbuhan dan Pengembangan)						
							4. Pendampingan UKM pada (tahap Penumbuhan dan Pengembangan) ,	4. 5 desa						
							5. Publikasi dan Pemasaran (Tahap Pengembangan)	5. Publikasi 2 kali melalui media elektronik , 2 kali media cetak dan Pameran 1 kali"						
3.03.1.22.01.00.26.018	Pengembangan Ekonomi Perempuan	2. Pembangunan Manusia dan Pentantasan Kemiskinan	1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Peningkatan kualitas Pelestarian Adat, Seni dan Budaya	84%	Implementasi Pengasuhan Berbasis Budaya	5 Desa Mandiri Budaya	-	-	Rp. 750.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							inisiasi 5 Desa Prima di Desa Budaya	5 Calon Desa Prima di Desa Mandiri Budaya						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 64.582.792.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
3	Keistimewaan														
3.04	PERTANAHAN (KEISTIMEWAAN)														
3.04.1.03.02.00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang														
3.04.1.03.02.00.15	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN										Rp. 56.725.987.000,00	Rp. 7,00			
3.04.1.03.02.00.15.001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	DIY	bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	11419bidang tanah	- Patok batas bidang Tanah Desa di 330 desa - Papan nama sebagai tanda kepemilikan Tanah Desa di 330 desa - Pemasangan patok dan papan nama Tanah Desa - Terbitnya Surat Ukur Tanah Desa di 330 desa	Tersedianya penanda Bidang tanah desa dan Surat Ukur Tanah Desa di 330 desa	Dukungan 22,25% terhadap bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN untuk peningkatan tertib administrasi tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa hingga mencapai 11.419 bidang	100%	Rp. 52.291.412.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
					Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara	37dokumen	1 Dokumen hasil identifikasi 100 bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta	Data Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 100 bidang tanah yang teridentifikasi							
					Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	55bidang tanah	1. Terdaftarannya 100 bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di BPN dan Pemberkasan 50 bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kepastian hak Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta sejumlah 150 bidang tanah							
							batas wilayah desa jelas	penegasan batas 5 desa							
							batas wilayah desa jelas	penegasan batas 5 desa							
							batas wilayah desa jelas	penegasan batas 5 desa							
							Data hasil verifikasi Sertifikat Tanah Desa 3000 bidang di Kabupaten Bantul	Tersedianya data tanah desa yang akan disertifikatkan atas nama kasultanan dan kadipaten							
							Pemasangan Tanda Identitas berupa Papan Nama untuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta sebanyak 120 papan nama	Terpasangnya sebanyak 120 papan nama untuk kepastian Identitas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta							
							Pendaftaran Tanah Desa sebanyak 500 bidang di Kabupaten Bantul	Terdaftarannya tanah desa yang disertifikatkan atas nama kasultanan atau kadipaten							
							Pendaftaran Tanah Desa sebanyak 500 bidang di Kabupaten Gunungkidul	Terdaftarannya tanah desa yang disertifikatkan atas nama kasultanan atau kadipaten							
							Pendaftaran Tanah Desa sebanyak 500 bidang di Kabupaten Kulonprogo	Terdaftarannya tanah desa yang disertifikatkan atas nama kasultanan atau kadipaten							
							Pendaftaran Tanah Desa sebanyak 500 bidang di Kabupaten Sleman	Terdaftarannya tanah desa yang disertifikatkan atas nama kasultanan atau kadipaten							

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 64.582.792.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Terdaftarkanya 400 bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di BPN	Kepastian hak Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kabupaten Kulon Progo sejumlah 400 bidang tanah							
							Terdaftarkanya 500 bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di BPN	Kepastian hak Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kabupaten Sleman sejumlah 500 bidang tanah							
							Terdaftarkanya 500 bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di BPN	Kepastian hak Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kabupaten Gunungkidul sejumlah 500 bidang tanah							
							Terdaftarkanya 600 bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di BPN	Kepastian hak Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kabupaten Bantul sejumlah 600 bidang tanah							
							Tersedianya 45 Peta Kelurahan di Kota Yogyakarta	Tersedianya Peta batas administrasi wilayah Kelurahan dan Peta Sarana Prasarana Kelurahan 45 Kelurahan di Kota Yogyakarta							
3.04.1.03.02.00.15.002	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.3. Meningkatkan Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	DIY	bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	11419bidang tanah	10.000 lembar dokumen administrasi pertanahan yang terawat dan terpelihara.	Terawatnya dokumen administrasi pertanahan	Dukungan 5,30% terhadap Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara untuk peningkatan tertib administrasi tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa hingga mencapai 37 dokumen	100%	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
					Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara	37dokumen									
					Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	55bidang tanah									
3.04.1.03.02.00.15.003	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.3. Meningkatkan Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	DIY	bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	11419bidang tanah	1. Updating data Spasial bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di 20 Desa, dan Tanah Desa di 10 Desa	Basis data tanah kasultanan di 20 Desa kabupaten Bantul dan tanah desa di 10 Desa di 4 kabupaten yang telah terupdate	Dukungan 8,59% terhadap bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN untuk peningkatan tertib administrasi tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa hingga mencapai 11.419 bidang	100%	Rp. 763.580.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
					Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara	37dokumen	2. Updating basis data pertanahan dalam Sistem Informasi Pertanahan :- Tanah Kasultanan 41 Desa di kabupaten Sleman - Tanah Desa di wilayah Kabupaten Sleman - Tanah Desa di wilayah Kabupaten Bantul	Basis data tanah kasultanan di 41 desa kabupaten Sleman dan tanah desa di 2 kabupaten yang telah terupdate							
					Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	55bidang tanah	3. Upgrade Sistem Informasi Pertanahan terintegrasi Tata Ruang	Upgrade Sistem Informasi Pertanahan terintegrasi Tata Ruang							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 64.582.792.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.04.1.03.02.00.15.004	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.3. Meningkatkan Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	DIY	bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	11419bidang tanah	Pendampingan Pelayanan Operasional Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	Meningkatnya pelayanan Operasional Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	Dukungan 1,14% terhadap bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN untuk peningkatan tertib administrasi tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa hingga mencapai 11.419 bidang	100%	Rp. 270.995.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara	37dokumen								
					Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	55bidang tanah								
3.04.1.03.02.00.15.005	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.3. Meningkatkan Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	DIY	bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	11419bidang tanah	1. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di DIY	Kesesuaian terhadap pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di DIY	Dukungan 1,77% terhadap Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten untuk peningkatan tertib administrasi Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa hingga mencapai 55%	100	Rp. 700.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara	37dokumen								
					Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	55bidang tanah								
3.04.1.03.02.00.15.006	Perencanaan Program/Kegiatan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.3. Meningkatkan Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	DIY	bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	11419bidang tanah	1. Hasil pembahasan usulan perubahan tahun n, rencana n+1 dan rencana n+2 urusan pertanahan 2. Rumusan Penanganan Urusan Pertanahan	Tersedianya bahan usulan perubahan tahun n, rencana n+1 dan rencana n+2 urusan pertanahan serta bahan untuk penanganan urusan pertanahan	Dukungan 5,05% terhadap Bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN untuk peningkatan tertib administrasi tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa hingga mencapai 11.419 bidang	100%	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara	37dokumen								
					Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	55bidang tanah								
3.04.1.03.02.00.15.007	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Keistimewaan (Pertanahan)	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.3. Meningkatkan Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	DIY	bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	11419bidang tanah	Tersedianya 1 Dokumen Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Pertanahan	Kinerja realisasi fisik pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan 100%	Dukungan 3,13% terhadap Bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN untuk peningkatan tertib administrasi tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa hingga mencapai 11.419 bidang	100%	Rp. 500.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
					Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara	37dokumen								
					Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	55bidang tanah								

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 64.582.792.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
3.04.1.03.02.00.16	PROGRAM PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN										Rp. 7.856.805.000,00	Rp. 2,00			
3.04.1.03.02.00.16.002	Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	DIY	peningkatan fasilitasi penerbitan dokumen acuan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	0%	~ 375 rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten	Kepastian hukum pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sejumlah 375 rekomendasi	Dukungan 8,27% terhadap Persentase desa yang sudah mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa hingga mencapai sebesar 10,20% dan Persentase pengajuan permohonan serat kekancingan yang ditindaklanjuti hingga mencapai 100%	100 %	Rp. 5.287.640.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
					Bidang Tanah Desa yang Didaftarkan di BPN	2000bidang tanah	120 Penyiapan berkas Rekomendasi Izin Penggunaan Tanah Desa.	Kelengkapan pemberkasan pengajuan penggunaan Tanah Desa sejumlah 120 berkas rekomendasi							
					Persentase Desa yang sudah Mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa	10.2%	30 rekomendasi penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Gunungkidul	Kepastian Hukum Penggunaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang dikeluarkan oleh Kabupaten Gunungkidul sejumlah 30 rekomendasi							
					Persentase Pengajuan Permohonan Serat Kekancingan yang Ditindaklanjuti	100%	30 rekomendasi penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Kulon Progo	Kepastian Hukum Penggunaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kulon Progo sejumlah 30 rekomendasi							
							300 rekomendasi penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kota Yogyakarta	Kepastian hukum penggunaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sejumlah 300 rekomendasi							
							40 rekomendasi penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Bantul	Kepastian Hukum Penggunaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang dikeluarkan oleh Kota Yogyakarta sejumlah 40 rekomendasi							
							50 rekomendasi penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Sleman	Kepastian Hukum Penggunaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sleman sejumlah 50 rekomendasi							
							Tersusunnya 330 RaPerDes Pemanfaatan Tanah desa di 330 desa	Tersedianya bahan untuk peraturan desa							
3.04.1.03.02.00.16.003	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	4. Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	DIY	peningkatan fasilitasi penerbitan dokumen acuan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	0%	1 Dokumen hasil inventarisasi permasalahan tanah desa di 26 Desa	Tersedianya data permasalahan tanah desa	Dukungan 15,77% terhadap peningkatan pemanfaatan tanah desa untuk mendukung persentase desa yang sudah mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa hingga mencapai 10,2%	100%	Rp. 2.569.165.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
					Bidang Tanah Desa yang Didaftarkan di BPN	2000bidang tanah	Bimbingan teknis penanganan permasalahan tanah desa di 26 desa	Peningkatan kemampuan penanganan permasalahan tanah desa							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD					Jumlah Pagu : Rp. 64.582.792.000,00										
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
					Persentase Desa yang sudah mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa	10.2%	Penanganan permasalahan keberatan dan sengketa dalam hal pengelolan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Tertangannya aduan permasalahan tanah Kasultanan dan Kadipaten							
					Persentase Pengajuan Permohonan Serat Kekancingan yang Ditindaklanjuti	100%	Pendampingan Penanganan Sengketa Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	1 Putusan							
							Rekomendasi penanganan permasalahan tukar-menukar Tanah Desa dengan Tanah warga di 3 desa di Kulon Progo	Tersedianya bahan untuk memberikan Kepastian Hak atas Tanah Desa							
							Rekomendasi penanganan permasalahan tukar-menukar Tanah Desa dengan Tanah warga di 3 desa di Sleman	Tersedianya bahan untuk memberikan Kepastian Hak atas Tanah Desa							
							Rekomendasi penanganan permasalahan tukar-menukar Tanah Desa dengan Tanah warga di 5 desa di Bantul	Tersedianya bahan untuk memberikan Kepastian Hak atas Tanah Desa							
							Rekomendasi penanganan permasalahan tukar-menukar Tanah Desa dengan Tanah warga di 5 desa di Gunungkidul	Tersedianya bahan untuk memberikan Kepastian Hak atas Tanah Desa							
							Verifikasi permohonan tukar menukar tanah desa dengan tanah warga	Tersedianya rekomendasi penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah warga							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 1.547.488.996.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Keistimewaan													
3.05	TATA RUANG (KEISTIMEWAAN)													
3.05.1.03.02.00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang													
3.05.1.03.02.00.15	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN										Rp. 6.313.241.000,00	Rp. 5,00		
3.05.1.03.02.00.15.001	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	32,22%	Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di DIY	100 %	Dukungan sebesar 9,01% terhadap Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten sebesar 32,22%	100	Rp. 2.263.241.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Tersedianya bahan untuk penetapan Rapergub DIY tentang Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RPWP3K)	Tersedianya bahan penetapan pergub						
							Tersedianya Matek/Raperda RTR : Satuan Ruang Strategis Imogiri	Tersedianya 1 dokumen bahan untuk penetapan raperda RTR KSP Sosial Budaya						
							Tersedianya Matek/Raperda RTR : Satuan Ruang Strategis Kerto-Pleret	Tersedianya 1 dokumen bahan untuk penetapan raperda RTR KSP Sosial Budaya						
							Tersedianya Matek/Raperda RTR : Satuan Ruang Strategis Prambanan - Candi Ijo	Tersedianya 1 dokumen bahan untuk penetapan raperda RTR KSP Sosial Budaya						
							Tersedianya Matek/Raperda RTR : Satuan Ruang Strategis Pusat Kota Wates	Tersedianya 1 dokumen bahan untuk penetapan raperda RTR KSP Sosial Budaya						
3.05.1.03.02.00.15.002	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	32,22%	Tersedianya dokumen RTBL Kawasan Banyusumurup	1 Dokumen RTBL	Dukungan sebesar 12,61% terhadap Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten sebesar 32,22%	100%	Rp. 750.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							Tersedianya dokumen RTBL Kawasan Giriloyo	1 Dokumen RTBL						
							Tersedianya dokumen RTBL Kawasan Segoroyoso	1 Dokumen RTBL						
3.05.1.03.02.00.15.003	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	32,22%	Dokumen pra Outline Business Case (OBC) TOD Wates	Tersedianya bahan rencana implementasi TOD Wates	Dukungan sebesar 14,41% terhadap Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten sebesar 32,22%	100%	Rp. 2.250.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 1.547.488.996.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
							Dokumen Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Pantai Samas - Parangtritis	Tersedianya bahan sebagai acuan dalam pembangunan dan penataan satuan ruang strategis Pantai Samas - Parangtritis							
							Dokumen Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kawasan Perbukitan Menoreh	Tersedianya bahan sebagai acuan dalam pembangunan dan penataan satuan ruang strategis Kawasan Perbukitan Menoreh							
							Dokumen Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulonprogo	Tersedianya bahan sebagai acuan dalam pembangunan dan penataan satuan ruang strategis Pantai selatan Kulonprogo							
3.05.1.03.02.00.15.004	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	32,22%	Penyebarluasan informasi dokumen tata ruang berupa: Perdals Tata Ruang Keistimewaan	Peningkatan pemahaman tentang regulasi penataan ruang keistimewaan pada Desa / Kelurahan di 9 satuan ruang strategis	Dukungan sebesar 12,61% terhadap peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten sebesar 32,22%	100 %	Rp. 350.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
							Terlaksananya penyebaran informasi tata ruang di Kawasan Siung-Wediombo berupa : Cetak buku informasi sebanyak 500 buku	Tersosialisasikannya peraturan tata ruang kawasan siung - wediombo							
							Terlaksananya penyebaran informasi tata ruang di Kawasan Siung-Wediombo berupa : Pembuatan papan informasi tata ruang sebanyak 10 buah	Tersosialisasikannya peraturan tata ruang kawasan siung - wediombo							
							Terlaksananya penyebaran informasi tata ruang di Kawasan Siung-Wediombo berupa : Sosialisasi 5 kali @100 orang	Tersosialisasikannya peraturan tata ruang kawasan siung - wediombo							
3.05.1.03.02.00.15.007	Perencanaan Program/Kegiatan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	32,22%	Hasil pembahasan usulan perubahan tahun 2020, rencana 2021 dan rencana 2022 urusan tata ruang	Tersedianya bahan usulan perubahan tahun 2020, rencana 2021 dan rencana 2022 urusan tata ruang	Dukungan sebesar 12,61% terhadap peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten sebesar 32,22%	100%	Rp. 700.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
3.05.1.03.02.00.16	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN										Rp. 1.539.352.200.000,00	Rp. 10,00			
3.05.1.03.02.00.16.001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	17,5%	1. Dokumen Kesepakatan Bersama Penataan Komunitas Kawasan Malioboro antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan PKL	Tertatanya Komunitas di Kawasan Malioboro	Dukungan 54,47% terhadap Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten hingga mencapai 15,50% dan tercapainya pembangunan infrastruktur di Pemda DIY	100 %	Rp. 182.724.900.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
							1. Dokumen DED Pembangunan Ruang Parkir Bawah Tanah Kompleks Kepatihan 2. Rehab Gedung Kantor (Suryatmajan)	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam rangka tertatanya kawasan perkantoran Kompleks Kepatihan							
							Apprisei Tanah Eks UPN (TKP Beskalan)	Dokumen Apprisei Tanah Eks UPN (TKP Beskalan)							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD											Jumlah Pagu : Rp. 1.547.488.996.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							DED Pedestrian Senopati	700m1						
							Operasional dan Pemeliharaan sarana dan prasarna Kawasan Malioboro sepanjang 1,5 km secara baik selama 12 bulan	terpeliharanya sarana dan prasarna pada kawasan Malioboro 1,5 km						
							Operasional dan Pemeliharaan Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra	Terjaganya fungsi Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra						
							Operasionalisasi Sekretariat Bersama Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Budaya (18 SRS)	Tersedianya bahan rumusan kebijakan dalam rangka penataan dan pengelolaan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten						
							Pedestrian Jalan KHA Dahlan DED Pedestrian Jalan KHA Dahlan	1400m1						
							Pembangunan kawasan pojok beteng wetan	Pembangunan kawasan pojok beteng wetan dalam rangka mengembalikan dan menguatkan karakteristik kawasan						
							Pembangunan Konstruksi Jogja Planning Gallery (JPG) meliputi : a. sub structure = 2 Basement b. upper structure = Lantai 1 sampai dengan 5 c. Atap Bangunan	Tersedianya Konstruksi Bangunan Jogja Planning Gallery meliputi : a. sub structure = 2 Basement b. upper structure = Lantai 1 sampai dengan 5 c. Atap Bangunan						
							Pembangunan TKP Pasar Sore	Pembangunan Kantong Parkir Pasar Sore						
							Penataan kawasan Kraton - Panggung Krapyak	Terlaksananya penataan kawasan kraton - panggung krapyak						
							Penataan lalu lintas di Kawasan Heritage City (Malioboro);Petugas Jogo Margo 72 org Forum lalu lintas satuan ruang Strategis Sumbu Filosofis	Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas di Kawasan Harritage						
							Pengadaan dan Pemasangan Marka Biku-Biku 10.000 meter	Penyediaan fasilitas untuk rencana implementasi semi pedestrian						
							Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol	Terjaganya fungsi toilet titik nol						
							Studi Perencanaan kawasan Jalan Perwakilan	Dokumen Studi Perencanaan kawasan Jalan Perwakilan						
3.05.1.03.02.00.16.004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	17.5%	Andal dan Andalalin Pasar Kotagede	dokumen lingkungan untuk pasar kotagede	Dukungan 54,47% terhadap Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten hingga mencapai 17,50% dan tercapainya pembangunan infrastruktur di Pemda DIY	100 %	Rp. 7.500.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan
							SAH Kawasan Kotagede (Jl. Kemasari)	260 meter						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD													Jumlah Pagu : Rp. 1.547.488.996.000,00			
Nomor	Urusan/Pbidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
3.05.1.03.02.00.16.005	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	17.5%	1. Perencanaan dan Persiapan pengadaan tanah ruas Bedah Menoreh (24 KM) 2. Pengadaan tanah dan peningkatan jalan jalur Bedah Menoreh	1 Dokumen terbebaskannya lahan untuk peningkatan jalur bedah menoreh	Dukungan 54,47% terhadap Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten hingga mencapai 17,50% dan tercapainya pembangunan infrastruktur di Pemda DIY	100 %	Rp. 57.190.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan		
							2. Pembangunan Jembatan (Prangkoken - Ngori)	1 Unit								
							3. Pembangunan Jalan (Prangkoken - Ngori)	2,3 KM								
							4. Pembangunan Jalan Pasar Bendo - Beku (Kawasan Makro Tonogoro)	1,35 KM								
3.05.1.03.02.00.16.007	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	17.5%	Peningkatan Jalan Ruas Dawung (Barongan) - Makam Imogiri (1,65 KM)	Terlaksananya Pembangunan Jalan Ruas Dawung (Barongan) - Makam Imogiri (1,65 KM)	Dukungan 54,47% terhadap Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten hingga mencapai 17,50% dan tercapainya pembangunan infrastruktur di Pemda DIY	100 %	Rp. 18.200.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan		
							Terlaksananya pembayaran pelepasan tanah untuk gapura	400m2								
3.05.1.03.02.00.16.008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	17.5%	Luas lapangan parkir kawasan Pleret dan Lansekap terbangun	2477m2	Dukungan 54,47% terhadap Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten hingga mencapai 17,50% dan tercapainya pembangunan infrastruktur di Pemda DIY	100%	Rp. 2.276.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan		
3.05.1.03.02.00.16.009	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	17.5%	Pembebasan Tanah untuk jalan lemahabang-prambanan	329.219,20 m2	Dukungan 54,47% terhadap Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten hingga mencapai 17,50% dan tercapainya pembangunan infrastruktur di Pemda DIY	100 %	Rp. 330.000.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan		
3.05.1.03.02.00.16.010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	17.5%	Boulevard Jl. FM. Noto dan Jl. Nyoman Oka Sarpras pendukung pemeliharaan (Tangki air)	1. FM Noto - Nyoman Oka : 1350 m2 2. 4 Unit	Dukungan 54,47% terhadap Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten hingga mencapai 17,50% dan tercapainya pembangunan infrastruktur di Pemda DIY	100 %	Rp. 52.800.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan		
					Penataan Pedestrian dan Pemasangan PJU Galeria-Gramedia DED Pedestrian lingk. Kridosono SAH Galeria - Wahidin - SMP 5 - Code		900 meter pedestrian dan 30 titik PJU 1258 m									

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama OPD : Semua OPD												Jumlah Pagu : Rp. 1.547.488.996.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
3.05.1.03.02.00.16.014	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	17.5%	'- Land clearing dan Kontruksi Pembangunan Tempat Parkir Wisatawan di Desa Wisata Nglanggrn, Patuk, Gunungkidul seluas 7000 m2 dengan Satuan Ruang Parkir: 1.Mobil Penumpang I 2.Mobil Penumpang II 3.Mobil Penumpang III 4.Bus 5.Sepeda Motor	70 SRP 40 SRP 40 SRP 80 SRP 500 SRP	Dukungan 2,5 % terhadap Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten hingga mencapai 17,50%	100%	Rp. 391.900.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
							Pembangunan Jembatan di Ruas Tawang Ngalang (480 M)	Terlaksananya Pembangunan Jembatan di Ruas Tawang Ngalang (480 M)							
							Pembangunan Ruas Jalan Tawang - Ngalang (9,020 KM)	Terlaksananya Pembangunan Ruas Jalan Tawang - Ngalang (9,020 KM)							
							Pembebasan lahan untuk pembangunan jalur Tawang-Ngalang, Ngoro-oro	112.000 m2							
							Pengembangan aminitas dan ruang terbuka hijau Kali Ngalang: Pembuatan ruang terbuka hijau, lansekap Pembuatan toilet, parkir dan fasilitas lainnya	1.000 m ²							
3.05.1.03.02.00.16.015	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	17.5%	'Pembebasan Tanah JLS untuk: Segmen Ngremang - Congot (Garongan) (104.582 M2)	'Tersedianya Lahan untuk Pembangunan JLS Ngremang-Garongan (Congot) 4 lajur 7 Km	Dukungan 54,47% terhadap Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten hingga mencapai 15,83% dan tercapainya pembangunan infrastruktur di Pemda DIY	100 %	Rp. 279.162.300.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
							'Penyusunan Dokumen Penilaian Harga Tanah JLS untuk: Segmen Garongan - Congot (137.772 M2)	'Tersedianya Data Harga Ganti Kerugian Tanah JLS Segmen Garongan - Congot							
							'perencanaan pembangunan embarkasi Haji	'Dokumen perencanaan pembangunan embarkasi Haji							
3.05.1.03.02.00.16.021	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunung Kidul	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	17.5%	Kontruksi Kawasan Pantai Baron di Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul	1 paket	Dukungan 2,5 % terhadap Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten hingga mencapai 17,50-%	100%	Rp. 217.599.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan	
							Pelebaran dan pengaspalan jalan menuju gunung Batur peninggalan Sunan Kalijaga untuk Memperlancar akses jalan menuju Gunung Batur peninggalan Sunan Kalijaga	5,36 km							
							Pelestarian kawasan peninggalan sejarah Sunan Kalijaga di Gunung Batur	1 kawasan							
							Pembebasan Tanah JLS untuk: Segmen Tepus - Jerukwudel (250.402 M2)	Tersedianya Lahan untuk Pembangunan JLS Segmen Tepus - Jerukwudel							
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah JLS untuk: Segmen Girijati - Legundi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah JLS untuk: Segmen Girijati - Legundi							
							Proses Pensertifikatan Tanah JLS segmen Tepus - Jerukwudel 1300 bidang (spliting dan ukur gabung); segmen Planjan - Tepus (ukur gabung dan permohonan hak)	pemberkasas sertifikat tanah JLS 1300 bidang							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama OPD : Semua OPD														Jumlah Pagu : Rp. 1.547.488.996.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				OPD	Jenis Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
							tanah untuk konservasi	7.450 m ²									
3.05.1.03.02.00.17	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS										Rp. 1.823.555.000,00	Rp. 2,00					
3.05.1.03.02.00.17.001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	62.5%	'1.satu dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap arahan tata ruang pada satuan ruang kawasan strategis 2. satu dokumen keterpaduan program pada satuan ruang strategis tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Tersedianya data/informasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dibanding dengan rencana sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang	Dukungan sebesar 38,46% terhadap Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten sebesar 62,50%	100 %	Rp. 1.123.555.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan			
							Penertiban pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis: 1. Sumbu Filosofis 2. Samas - Parangtritis 3. Kotabaru 4. Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede 5. Kerto - Pleret 6. Makam Raja Mataram di Imogiri	Penurunan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis									
3.05.1.03.02.00.17.005	Monitoring dan Evaluasi Pekaksanaan Keistimewaan Tata Ruang	3. Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	DIY	peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	62.5%	Tersedianya 1 Dokumen Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Tata Ruang	Kinerja realisasi fisik pelaksanaan keistimewaan urusan tata ruang 100%	Dukungan Sebesar 38,46% terhadap Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten sebesar ...%	100%	Rp. 700.000.000,00	Rp. 1,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sedang Berjalan			

6.3 Pendekatan Tematik di Kabupaten/ Kota

Pemerintah Kabupaten/ Kota di DIY bersama Pemda DIY telah menyelaraskan perencanaan kewilayahan dengan fokus pendekatan tematik melalui Forum Kewilayahan dan Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah (Trilateral Sektoral-Kewilayahan) Musrenbang RKPD DIY 2020.

Implementasi pendekatan tematik pada tahun 2020 disusun dengan memenuhi dengan kriteria:

1. Berpedoman pada sasaran Pemda, sasaran perangkat daerah, program perangkat daerah yang tertuang dalam RPJMD DIY.
2. Fokus pendekatan tematik sampai dengan level output kegiatan, sehingga memungkinkan 1 kegiatan perangkat daerah dapat menunjang lebih dari 1 output tematik.
3. Fokus pendekatan tematik disosialisasikan dan dilakukan penyelarasan kewilayahan kepada Kabupaten/ Kota melalui Forum Kewilayahan dan Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah (Trilateral Sektoral-Kewilayahan) dalam rangkaian Musrenbang RKPD DIY 2020.

6.3.1 Kegiatan Tematik Kota Yogyakarta

Implementasi penyelarasan Tematik Kota Yogyakarta memiliki fokus pada tematik:

1. Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan,
2. Penurunan Ketimpangan Wilayah,
3. Dukungan Pembangunan Yogyakarta International Airport (Bandar Udara Internasional Yogyakarta)

Kegiatan tematik Kota Yogyakarta yang telah dibahas pada Musrenbang dalam rangka Penyusunan RKPD DIY Tahun 2020 adalah sebagai berikut,

Tabel 6-5 Kegiatan Tematik Kota Yogyakarta

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						Kab-Kota	
						Tolok Ukur	Target
1	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Drainase	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	Program : Peningkatan Dan Pemeliharaan Saluran Pengairan Dan Drainase Kegiatan : Peningkatan Dan Pembangunan Saluran Pengairan Dan Drainase Tuk : Penanganan Genangan	2100 Meter
						Program : Peningkatan Dan Pemeliharaan Saluran Pengairan Dan Drainase Kegiatan : Peningkatan Dan Pembangunan Saluran Pengairan Dan Drainase Tuk : Pembangunan Sah	2545 Meter
2	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Penyelenggaraan Perumahan	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	Program: Penataan Perumahan Dan Permukiman Dan Tata Bangunan Kegiatan: Penataan Perumahan Dan Permukiman Tuk: Ipal Komunal Di Prenggan Kotagede	1 Unit
						Program: Penataan Perumahan Dan Permukiman Dan Tata Bangunan	8 Unit

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						Kab-Kota	
						Tolok Ukur	Target
						Kegiatan: Penataan Perumahan Dan Permukiman Tuk: Septictank Komunal	
						Program: Penataan Perumahan Dan Permukiman Dan Tata Bangunan Kegiatan: Penataan Perumahan Dan Permukiman Tuk: Mck Umum	2 Unit
3	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Penyelenggara-an Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Biro Tata Pemerintah-an	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program: Pelayanan Pelayanan Pencatatan Sipil Kegiatan: Pelayanan Pelayanan Kelahiran Dan Kematian Tuk: Pelayanan Pencatatan Kelahiran Kerjasama Dengan Rumah Sakit	15 RS
						Program: Pelayanan Pelayanan Pencatatan Sipil Kegiatan: Pelayanan Pelayanan Kelahiran Dan Kematian Tuk: Percepatan Pelayanan Akta Di Wilayah	35 Kelurahan
4	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan	Program Pembinaan Administrasi	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi	Biro Tata Pemerintah-an		Program: Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kegiatan: Pelayanan	20 Orang

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						Kab-Kota	
						Tolok Ukur	Target
	Antar Kelompok Pendapatan	Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Identitas Penduduk Tuk: Jumlah Pemberian Dok Kk/Ktp-El Bagi Pemegang Skot (Surat Keterangan Orang Terlantar/Penduduk Rentan)	
						Program: Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kegiatan: Pelayanan Identitas Penduduk Tuk: Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk	5 Lokasi
						Program: Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kegiatan: Pelayanan Identitas Penduduk Tuk: Jumlah Lokasi Pelaksanaan Mobile Ktp-El Bagi Lansia Dan Keterbatasan Fisik	45 Kelurahan
						Program: Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kegiatan: Pelayanan Identitas Penduduk Tuk: Sekolah Dasar Dikunjungi Pelayanan Mobile Kia	15 Sekolah Dasar
						Program: Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kegiatan: Pelayanan Identitas Penduduk	15 Sita

RKPD DIY 2020

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						Kab-Kota	
						Tolok Ukur	Target
						Tuk: Pelayanan Perekaman Ktp-El Bagi Pelajar Slta	
5	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian dan Pangan	Program: Pembinaan Kehewan dan Perikanan Kegiatan: Pembinaan Usaha Budidaya Kehewan dan Perikanan Tuk: Pembudidaya Ikan Hias	1 Kelompok
6	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian dan Pangan	Program: Pembinaan Kehewan dan Perikanan Kegiatan: Pengawasan Mutu Komoditas Kehewan dan Perikanan Tuk: Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Hasil Mutu Komoditas Kehewan dan Perikanan (Gerakan Gemar Makan Ikan Dan Uji Mutu Perikanan)	2 Kegiatan
7	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Penumbuhan Dan Pengembangan Wirausaha Baru	Pelatihan Kewirausahaan	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Program: Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Kegiatan: Pembinaan, Pengembangan Dan Pemberdayaan Umk	300 Umkm

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						Kab-Kota	
						Tolok Ukur	Target
						Tuk: Meningkatkan Kualitas Sdm Dan Produk Ukm	
						Program: Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Kegiatan: Pembinaan, Pengembangan Dan Pemberdayaan Umk Tuk: Mendukung Wirausaha Baru Dan Wirausaha Baru Yang Naik Kelas	125 Orang
						Program: Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Kegiatan: Pembinaan, Pengembangan Dan Pemberdayaan Umk Tuk: Peningkatan Wawasan Member Dekranas	260 Orang
8	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pelayanan Dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar Serta Keluarga Rentan Dan Miskin	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Program: Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kegiatan: Jaminan Dan Bantuan Sosial Tuk: Seleksi Dan Bimbingan Teknis Calon Penerima Pkh Graduasi	150 Kpm

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						Kab-Kota	
						Tolok Ukur	Target
9	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Penyelenggaraan Perumahan	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	Program: Penataan Perumahan Dan Permukiman Dan Tata Bangunan Kegiatan: Penataan Bangunan Dan Lingkungan Tuk: Rumah Tidak Layak Huni (Rumah Terdampak Penataan Kawasan S. Winongo, M3k)	215 Unit
						Program: Penataan Perumahan Dan Permukiman Dan Tata Bangunan Kegiatan: Penataan Bangunan Dan Lingkungan Tuk: Penanganan Kawasan Kumuh (Sungai Gajah Wong Prenggan Kotagede; Sungai Winongo ...)	3 Kawasan
10	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyehatan Lingkungan Dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Program: Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kegiatan: Penyehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Tuk: Pengadaan Bahan Pemasangan Jamban	20 Unit

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						Kab-Kota	
						Tolok Ukur	Target
11	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan	Program: Pengembangan Pendidikan Kegiatan: Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah Tuk: Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Dana Jaminan Pendidikan Daerah (Jpd)	3208 Siswa
12	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Budidaya Tanaman Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Program: Pembinaan Pertanian Kegiatan: Pembinaan Usaha Dan Budidaya Pertanian Tuk: Pendampingan Kampung Pangan Lestari: Rintisan Kampung Pangan Lestari Kel. Kadipaten Dan Patehan; Kampung Pangan Lestari Mandiri Di Kel. Tompeyan, Giwangan Dan Kricak	5 Lokasi
	Program: Pembinaan Pertanian Kegiatan: Pembinaan Usaha Dan Budidaya Pertanian Tuk: Bimbingan Teknis Tanaman Pangan					5 Kali	
	Program: Pembinaan Pertanian Kegiatan: Pembinaan					2 Kali	
	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan						

RKPD DIY 2020

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						Kab-Kota	
						Tolok Ukur	Target
						Usaha Dan Budidaya Pertanian Tuk: Gerakan Panen Raya	
						Program: Pembinaan Pertanian Kegiatan: Pembinaan Usaha Dan Budidaya Pertanian Tuk: Sarana Prasarana Rintisan Kampung Pangan Lestari	3 Lokasi
						Program: Pembinaan Pertanian Kegiatan: Pembinaan Usaha Dan Budidaya Pertanian Tuk: Kebun Yang Terkelola Dengan Baik	2 Lokasi
						Program: Pembinaan Pertanian Kegiatan: Pembinaan Usaha Dan Budidaya Pertanian Tuk: Kelompok Tani Yang Terbina	120 Kelompok
13	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Kemitraan Ikm Logam, Sandang Dan Aneka	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program: Pembinaan Perindustrian Kegiatan: Pembinaan Sarana Produksi Tuk: Monitoring Dan Pendampingan Lapangan Ikm Oleh Fasilitator Lokasi Sasaran	540 Ikm

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						Kab-Kota	
						Tolok Ukur	Target
						Kec. Kotagede Dan Umbulharjo	
						Program: Pembinaan Perindustrian Kegiatan: Pembinaan Sarana Produksi Tuk: Pameran/Expo Industri Kreatif Lokasi Kec. Kotagede Dan Umbulharjo	47 Ikm
						Program: Pembinaan Perindustrian Kegiatan: Pembinaan Sarana Produksi Tuk: Pendataan Industri Mikro Kecil	2000 Ikm
14	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Pelatihan Industri Kecil Menengah Logam, Sandang Dan Aneka	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program: Pengembangan Industri Logam Kegiatan: Pendukung Pelayanan Upt Logam Tuk: Kerjasama Dengan Industri Besar Untuk Market Share Produk Ikm Logam	2 Perusahaan
						Program: Pengembangan Industri Logam Kegiatan: Pendukung Pelayanan Upt Logam Tuk: Pelatihan Casting Injeksi Ikm Logam Lokasi Kec. Umbulharjo Dan Kotagede	20 Ikm

RKPD DIY 2020

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						Kab-Kota	
						Tolok Ukur	Target
						Program: Pengembangan Industri Logam Kegiatan: Pendukung Pelayanan Upt Logam Tuk: Penataan Sumber Daya Manusia Dan Layanan Pemesinan Upt Logam Lokasi Kotagede Dan Umbulharjo	12 Bulan
15	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Pelatihan Industri Kecil Menengah Agro	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program: Pembinaan Perindustrian Kegiatan: Pembinaan Teknis Perindustrian Tuk: Pelatihan Teknis Industri Bagi Ikm (Pengolahan Makanan)	1 Jenis
16	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian dan Pangan	Program: Pembinaan Kehewan dan Perikanan Kegiatan: Pembinaan Usaha Budidaya Kehewan dan Perikanan Tuk: Restocking Ikan	20000 Jenis Bibit
						Program: Pembinaan Kehewan dan Perikanan Kegiatan: Pembinaan Usaha Budidaya Kehewan dan Perikanan Tuk: Pembinaan	45 Kelurahan

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						Kab-Kota	
						Tolok Ukur	Target
						Kelompok Peternakan Dan Perikanan (Lele)	
17	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja Dan Penempatan Transmigran	Penyelenggara-an Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Program: Pengembangan Dan Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kegiatan: Penempatan Transmigrasi Tuk: Calon Transmigran Terampil Pra Pdu Pertanian	10 Kk
						Program: Pengembangan Dan Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kegiatan: Penempatan Transmigrasi Tuk: Kie Ketransmigrasian	14 Kali
						Program: Pengembangan Dan Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kegiatan: Penempatan Transmigrasi Tuk: Calon Transmigran Yang Terealisasi Penempatannya	10 Kk
						Program: Pengembangan Dan Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kegiatan: Penempatan Transmigrasi	10 Kk

RKPD DIY 2020

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						Kab-Kota	
						Tolok Ukur	Target
						Tuk: Perbekalan Calon Transmigran	
18	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja Dan Penempatan Transmigran	Pembentukan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Program: Pengembangan Dan Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kegiatan: Pembinaan Dan Penempatan Tenaga Kerja Tuk: Padat Karya Infrastruktur 2. Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (Tkm)	68 Orang
19	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Program: Pengembangan Dan Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kegiatan: Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja Dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Tuk: Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	18 Jenis
						Program: Pengembangan Dan Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kegiatan: Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja Dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Tuk: Peningkatan	20 Ukm/Perusahaan

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						Kab-Kota	
						Tolok Ukur	Target
						Produktivitas Perusahaan Dan Ukm	
20	Respon Terhadap Pembangunan Bandara YIA	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan Tenaga Kerja Profesional	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Program: Pengembangan Dan Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kegiatan: Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja Dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Tuk: Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja (Airport Operation Officer 20 Orang)	1 Jenis
21	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Ukm	Pemasaran Produk Ukm	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Tuk : Pendampingan Wirausaha Muda (Home Bussines Camp)	100 Umkm
						Program: Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Kegiatan: Kemitraan Dan Pembiayaan Umk Tuk: Pameran Dan Promosi Produk Ukm	17 Kali
						Program: Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Kegiatan: Kemitraan Dan Pembiayaan Umk Tuk: Kerjasama Dan	4 Kali

RKPD DIY 2020

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						Kab-Kota	
						Tolok Ukur	Target
						Promosi Umkm Dengan Media Elektronik Dan Media Cetak	

6.3.2 Kegiatan Tematik Kabupaten Bantul

Implementasi penyalarsan Tematik Kabupaten Bantul memiliki fokus pada tematik:

1. Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan,
2. Penurunan Ketimpangan Wilayah,
3. Dukungan Pembangunan Yogyakarta International Airport (Bandar Udara Internasional Yogyakarta)

Kegiatan tematik Kabupaten Bantul yang telah dibahas pada Musrenbang dalam rangka Penyusunan RKPD DIY Tahun 2020 adalah sebagai berikut,

Tabel 6-6 Kegiatan Tematik Kabupaten Bantul

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						Kab-Kota	
						Tolok Ukur	Target
1	Respon Terhadap Pembangunan Bandara YIA	Program Pengembangan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas	Penerapan Rekayasa Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Program : Pengembangan Kelalu-Lintasan Kegiatan : Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas TUK : Pengadaan APILL ATCS (Banguntapan)	1 Unit
2	Penurunan Kemiskinan Dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyehatan Lingkungan Dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jamban Sehat Untuk Masyarakat Miskin	100 Unit
3	Penurunan Kemiskinan Dan Ketimpangan Antar	Program Peningkatan Populasi Peternakan	Budidaya Peternakan	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	TUK Pelatihan Peternakan Unggas (Ayam) 2 Kelp, Kelp Ternak Subur Sejahtera, Nogosari I, Wukirsari	2 Lokasi

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						Kab-Kota	
						Tolok Ukur	Target
	Kelompok Pendapatan					Imogiri; Kelp Ternak Ngudi Rejeki Kembanggede, Guwosari Pajangan	
						Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Kegiatan Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah, TUK Pelatihan Peternakan Unggas (Itik) 1 Kel, Lokasi : Kelp. Wijilestari Kowang, Desa Trimulyo, Kec. Jetis	1 Lokasi
4	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Pelatihan Dan Kemitraan Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor, Kegiatan Pengembangan Pasar Dan Ekspor Daerah, TUK Jumlah Pameran Yang Diikuti Sehingga Dapat Meningkatkan Omzet Peserta Pameran (Furniture, JIFFINA, Inacraft, Jakarta Fair, Pameran Manado, Bantul Expo)	6 Pameran
5	Penurunan Kemiskinan Dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Biro Tata Pemerintahan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan Peningkatan Kebijakan Mutu Publik Dalam Bidang SDM TUK Penataan Administrasi Kependudukan 92.370 Set KK	92370 Set KK

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						Kab-Kota	
						Tolok Ukur	Target
6	Penurunan Kemiskinan Dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Biro Tata Pemerintahan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan, Kegiatan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, TUK Pendataan Penduduk Rentan	75 Data
7	Penurunan Kemiskinan Dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Biro Tata Pemerintahan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan, Kegiatan Pelayanan Mutasi Penduduk, TUK Pelayanan Mutasi Penduduk	12000 Pemohon
8	Penurunan Kemiskinan Dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Biro Tata Pemerintahan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan, Kegiatan Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak), TUK Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)	47500 Keping
9	Penurunan Kemiskinan Dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Biro Tata Pemerintahan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan, Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan, TUK Penerbitan Akta Perkawinan, Perceraian, Talak Dan Rujuk	4500 Akta
10	Penurunan Kemiskinan Dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Biro Tata Pemerintahan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan, Kegiatan Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Dan Akta Kematian, TUK Penerbitan	4500 Akta

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						Kab-Kota	
						Tolok Ukur	Target
						Akta Kelahiran Dan Kematian	
11	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Air Minum Dan Air Limbah TUK : Jumlah Wilayah Terbangun Infrastruktur Air Minum Perkotaan (Sewon, Kasihan, Sedayu)	3 Wilayah
	Penurunan Kemiskinan Dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan						
12	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Drainase	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Program : Pembangunan Dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/Gorong-Gorong Kegiatan : Pembangunan Dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-Gorong TUK : Pembangunan Dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/Gorong-Gorong Terlaksana (Nglebeng Banjardada	400 Meter
13	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Program : Pembangunan Dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	2.85 Km

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						Kab-Kota	
						Tolok Ukur	Target
						TUK : Jalan Terbangun (Jogoragan - Pleret) Peningkatan Struktur Jalan	
14	Penurunan Kemiskinan Dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Penyelenggaraan Perumahan	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program : Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Bantuan Sosial, Kegiatan : Bantuan RTLH (Pendampingan, Pemantauan Dan Penyaluran Bantuan) TUK : Jumlah RTLH Yang Diterimakan Pada Belanja Tidak Langsung Melalui PPKD	100 RTLH
15	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	TUK : Pelepasan Persil SG 20 Dengan Luas 2267 M2 Untuk Akses Jalan Masuk KPI Piyungan (Rp.1,6 M) Program : Kegiatan : OPD : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	2267 M ²
						Program : Pembangunan Dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Kegiatan : Peningkatan Jalan Dan Jembatan TUK : Pembebasan Lahan Jalan Cinomati (Terong - Wonolelo) Rp. 10 M	1.2 Hektar

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						Kab-Kota	
						Tolok Ukur	Target
16	Penurunan Ketimpangan Wilayah Penurunan Kemiskinan Dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Pengelolaan Tutupan Vegetasi Dan Konservasi Sumberdaya Alam	Konservasi Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup	Program: Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan: Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA TUK: Pengadaan Bibit Lahan Kritis (Imogiri)	10000 Batang
17	Penurunan Kemiskinan Dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	Penanganan Desa Rawan Pangan	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan, Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMTP) Trimurti Srandakan, Guwosari Pajangan Dan Wukirsari Imogir	3 Desa
18	Respon Terhadap Pembangunan Bandara YIA Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan Tenaga Kerja Profesional	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kegiatan Uji Kompetensi, TUK Jumlah Peserta Uji Kompetensi	16 Orang
19	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja Dan Penempatan Transmigran	Pembentukan Usaha Mandiri Bagi Tenaga Kerja Khusus	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Program Perluasan Kerja, Pemanduan Dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Lansia Dan Penyandang Cacat, Jumlah Peserta Pembinaan	60 Orang

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						Kab-Kota	
						Tolok Ukur	Target
20	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja Dan Penempatan Transmigran	Pembentukan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Program Perluasan Kerja, Kegiatan Kegiatan Padat Karya Produktif Dan Infrastruktur, TUK Jumlah Lokasi Dilakukan Padat Karya Lokasi Di Kec Pajangan, Imogiri, Pandak, Sewon	195 Lokasi
21	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pembinaan Pelatihan Standarisasi Dan Pemagangan	Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kegiatan Pelatihan Menjahit Dan Pelatihan Software, TUK Jumlah Peserta Pelatihan	40 Orang
22	Penurunan Kemiskinan Dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	Penanganan Desa Rawan Pangan	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan, Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Pangan Dan Penanganan Daerah Rawan Pangan, TUK Pendampingan Desa Mandiri Pangan (Trimurti Srandakan, Guwosari Pajangan)	2 Desa
23	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Pengembangan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Program : Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	0 0

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						Kab-Kota	
						Tolok Ukur	Target
						TUK Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 3 DI (Sambeng Dlingo, Mojo Kretek, Titang Sewon)	3 Daerah Irigasi
24	Penurunan Kemiskinan Dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan	Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Kegiatan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan, TUK : Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah 3 R	1 Kali @ 25 Org
						Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Kegiatan : Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan, TUK : Jumlah Pembangunan Rumah Pilah Sampah Tipe C (Kec. Kretek Dan Kec.Sedayu)	2 Unit
						Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Kegiatan : Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan, TUK : Jumlah Pembangunan Rumah Pilah Sampah Tipe B (Kec. Pajangan (2 Unit), Kec.	5 Unit

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						Kab-Kota	
						Tolok Ukur	Target
						Bambanglipuro (1 Unit), Kec. Kasihan (1 Unit), K	
25	Penurunan Kemiskinan Dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Penyelenggaraan Perumahan	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Program : Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Bantuan Sosial Kegiatan : Bantuan RTLH (Pendampingan, Pemantauan Dan Penyaluran Bantuan) TUK : Jumlah RTLH Yang Diterimakan (Pandak 126 Unit, Piyungan : 216 Unit)	342 RTLH
26	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah Kegiatan : Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Air Minum Dan Air Limbah TUK : Jumlah Desa Tersedia Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (Hibah Air Minum Perdesaan) (Di	9 Desa
	Penurunan Kemiskinan Dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan					Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah Kegiatan : Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Air Minum Dan Air Limbah TUK : Pembangunan	2 Pamsimas

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						Kab-Kota	
						Tolok Ukur	Target
						Pamsimas (Srimulyo Kec. Piyungan, Seloharjo Kec. Pundong)	
27	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Pemasaran Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Dinas Perdagangan	Program Penataan Pasar Rakyat, Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Pasar Rakyat, TUK Jumlah Pasar Yang Direhab Lokasi, Pasar Piyungan, Barongan, Dlingo	3 Unit
28	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Pelatihan Dan Kemitraan Ekspor	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor, Kegiatan Pengembangan Pasar Dan Ekspor Daerah, TUK Jumlah Peserta Pelatihan Kemasan, Pemasaran Online, Dan Manajemen Pemasaran Luar Negeri	120 Orang
29	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Kemitraan IKM Logam, Sandang Dan Aneka	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Dan Perindustrian	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah, Kegiatan Pengembangan Pemberdayaan IKM, TUK Peningkatan Jumlah Kerjasama Utk Peningkatan Sentra IKM Lokasi Kec. Imogiri (2 Sentra) Dan Pandak (1 Sentra)	3 Sentra IKM

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						Kab-Kota	
						Tolok Ukur	Target
30	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Pelatihan Industri Kecil Menengah Agro	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Dan Perindustrian	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Kegiatan Pengembangan Dan Pemberdayaan IKM TUK : Pelatihan Produksi Kipas Bambu Di Jipangan Bangujiwo, Kec. Kasihan	20 Orang
						Program Penataan Struktur Industri, Kegiatan Pengembangan Kebijakan Dan Kerjasama TUK: Pelatihan Produksi Sangkar Burung Di Argosari Sedayu	20 Orang
						Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Kegiatan Pengembangan Dan Pemberdayaan IKM, TUK Jumlah IKM Olahan Sepohon Pisang Non Sentra Yang Dikembangkan Lokasi Muloyodadi Kec. Bambanglipuro	20 Orang
31	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Perkoperasian	Pelatihan SDM Dan Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Dan Perindustrian	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Kegiatan Peningkatan Manajemen Perkoperasian, TUK Peningkatan Kriteria Kesehatan Koperasi (Pelatihan Pengurus Dan	150 Orang

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						Kab-Kota	
						Tolok Ukur	Target
						Pengawas Koperasi (5 Angkatan X 30 Peserta))	
32	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Ukm	Pelatihan Kelembagaan Dan Usaha UKM	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Dan Perindustrian	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Kegiatan Pelatihan Bisnis Online, Jumlah Peserta Pelatihan Yang Meningkatkan Kemampuan Bisnis Online Sebanyak 40 Orang 2 Angkatan.	80 Orang
33	Penurunan Kemiskinan Dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Penumbuhan Dan Pengembangan Wirausaha Baru	Pelatihan Kewirausahaan	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Dan Perindustrian	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Kegiatan Pengambangan Kewirausahaan, TUK Jumlah Peserta Pelatihan Yang Meningkatkan Ketrampilannya Sebanyak 20 Orang (1 Kali Pelatihan Manajemen Kewirausahaan).	20 Orang
34	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengelolaan Tutupan Vegetasi Dan Konservasi Sumberdaya Alam	Konservasi Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup	Program : Perlindungan Dan Konservasi SDA, Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem, TUK : Bibit Penghijauan Lingkungan (Lahan Kritis Di	20000 Batang
	Penurunan Kemiskinan Dan Ketimpangan Antar						

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						Kab-Kota	
						Tolok Ukur	Target
	Kelompok Pendapatan					Kec. Sanden Dan Kec. Srandakan)	
35	Penurunan Kemiskinan Dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan	Pengendalian Pencemaran Air, Udara Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup	Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, TUK : Gerakan Bersih Sungai (Sungai Bedog, Sungai Winongo, Sungai Celeng, Sungai Code)	12 Kali
						Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, TUK : Gropyok Sampah Di 5 Lokasi (Kec Jetis, Pandak, Sanden, Srandakan Dan Imogiri)	5 Lokasi
36	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Keselamatan Transportasi	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Program : Pengembangan Kelalu-Lintasan Kegiatan : Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas TUK : Pengadaan Rambu	100 Unit

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						Kab-Kota	
						Tolok Ukur	Target
	Respon Terhadap Pembangunan Bandara YIA					Program : Pengembangan Kelalu-Lintasan Kegiatan : Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas TUK : Pengadaan RPPJ	10 Unit
37	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Keselamatan Transportasi	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Program : Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan : Pengadaan Lampu Penerangan Jalan TUK : Pemasangan LPJU Solar Cell Di Wilayah Srandakan	20 Unit
	Program : Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan : Pengadaan Lampu Penerangan Jalan TUK : Pemasangan Deliniator Di Jalan Kab. Wilayah Sanden, Kretek Dan Bambanglipuro					3 Kecamatan	
	Program : Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan : Pengadaan Lampu Penerangan Jalan TUK : Pemasangan LPJU LED Di Jalan Kab. Wilayah					40 Unit	

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						Kab-Kota	
						Tolok Ukur	Target
						Sanden Dan Bantul	
38	Penurunan Kemiskinan Dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Penanganan Fakir Miskin	Pembinaan Usaha Dan Jejaring Ekonomi Bagi Keluarga Fakir Miskin Dan RTSM PKH	Dinas Sosial	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Dan Desa	Program: Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT Dan Bantuan Sosial. Kegiatan: Pendampingan Dan Pemantauan Bantuan Sosial TUK : Verifikasi, Seleksi Dan Pendampingan	300 KPM
39	Penurunan Kemiskinan Dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Biro Tata Pemerintahan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan, Kegiatan Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil, TUK Digitalisasi Akta Catatan Sipil	7500 Dokumen
40	Penurunan Kemiskinan Dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Pengembangan Statistik Daerah	Penyediaan Data Statistik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Program : Pembinaan Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Mediasi Kegiatan : Pengolahan Data Statistik Sektoral TUK : Penyediaan Data Statistik (IPM, ICOR, PDRB)	3 Dokumen
	Penurunan Ketimpangan Wilayah						
41	Penurunan Kemiskinan Dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Pengembangan Statistik Daerah	Penyediaan Data Statistik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Program : Pembinaan Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Mediasi Kegiatan : Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan	1 Aplikasi

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						Kab-Kota	
						Tolok Ukur	Target
	Penurunan Ketimpangan Wilayah					Informasi TUK : Jumlah Pemeliharaan Aplikasi	

6.3.3 Kegiatan Tematik Kabupaten Kulon Progo

Implementasi penyalarsan Tematik Kulon Progo memiliki fokus pada tematik:

1. Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan,
2. Penurunan Ketimpangan Wilayah,
3. Dukungan Pembangunan Yogyakarta International Airport (Bandar Udara Internasional Yogyakarta)

Kegiatan tematik Kabupaten Kulon Progo yang telah dibahas pada Musrenbang dalam rangka Penyusunan RKPD DIY Tahun 2020 adalah sebagai berikut,

Tabel 6-7 Kegiatan Tematik Kabupaten Kulon Progo

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
1	penurunan Ketimpangan wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program :Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan: Pembangunan Jalan Kabupaten TUK: Pembangunan Jalan Kabupaten Kemiri III	1 Paket
2	penurunan Ketimpangan	Program Pengembangan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Program : Peningkatan Tertib Lalu Lintas Jalan	139 tiik

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
	wilayah	Keselamatan Transportasi	Fasilitas Keselamatan Jalan			Kegiatan : Pembangunan LPJU Pembangunan PJU di 11 Kecamatan	
	respon Terhadap Pembangunan Bandara YIA						
3	penurunan Ketimpangan wilayah	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Pengembangan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program : Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi SDA Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi TUK : Pembangunan saluran irigasi Ngangin-Angin Kec. Nanggulan	1 Paket
4	penurunan Ketimpangan wilayah	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Pelatihan Industri Kecil Menengah Logam, Sandang dan Aneka	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perdagangan	Pendampingan/peningkatan kapasitas (Nanggulan, Lendah, Wates, Samigaluh)	4 sentra
						Program Pengembangan Industri Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri berbasis Logam Kimia dan Aneka Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri berbasis sandang kulit dan	
						Peningkatan pemanfaatan bahan baku local 20 Orang / Jenis	20 orang / jenis
						Program Pengembangan Industri Kegiatan Penumbuhan dan	

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Pengembangan Industri berbasis sandang kulit dan kerajinan	
						Peningkatan kapasitas pelaku industri sandang kulit dan kerajinan Program Pengembangan Industri Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri berbasis sandang kulit dan kerajinan	30 Orang
						peningkatan kemampuan penguasaan teknologi produksi Program Pengembangan Industri Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri berbasis Logam Kimia dan Aneka Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri berbasis sandang kulit dan kerajinan	5 kelompok
						peningkatan mutu dan desain produk Program Pengembangan Industri Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri	25 Orang

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						berbasis Logam Kimia dan Aneka Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri berbasis sandang kulit dan kerajinan	
						pengembangan inovasi dan produk kreatif Program Pengembangan Industri Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri berbasis Logam Kimia dan Aneka Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri berbasis sandang kulit dan kerajinan	10 produk
						Pengembangan jaringan usaha/temu usaha Program Pengembangan Industri Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri berbasis Logam Kimia dan Aneka Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri berbasis sandang kulit dan kerajinan	20 Orang
						Peningkatan penguasaan teknologi informasi	25 Orang

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Program Pengembangan Industri Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri berbasis Logam Kimia dan Aneka Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri berbasis sandang kulit dan kerajinan	
						Pengembangan kerajinan tenun Program Pengembangan Industri Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri berbasis sandang kulit dan kerajinan	15 Orang
						Sosialisasi legalitas usaha Program Pengembangan Industri Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri berbasis Logam Kimia dan Aneka Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri berbasis sandang kulit dan kerajinan	90 Orang

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA		
						KAB-KOTA		
						Tolok Ukur	Target	
5	penurunan Ketimpangan wilayah	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Pelatihan Industri Kecil Menengah Agro	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perdagangan	Peningkatan Kemampuan Pengemasan	15 Orang	
						Program Pengembangan Industri Kegiatan Pengembangan dan Penumbuhan Usaha Industri Berbasis Agro Makanan dan Minuman		
						Peningkatan kapasitas Pelaku usaha industri Agro Makanan Minuman		15 Orang
						Program Pengembangan Industri Kegiatan Pengembangan dan Penumbuhan Usaha Industri Berbasis Agro Makanan dan Minuman		
Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi produksi	15 Orang							
Program Pengembangan Industri Kegiatan Pengembangan dan Penumbuhan Usaha Industri Berbasis Agro Makanan dan Minuman								
						Peningkatan mutu dan desain produk	10 Orang	
						Program Pengembangan Industri		

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Kegiatan Pengembangan dan Penumbuhan Usaha Industri Berbasis Agro Makanan dan Minuman	
						Pengembangan jaringan usaha Program Pengembangan Industri Kegiatan Pengembangan dan Penumbuhan Usaha Industri Berbasis Agro Makanan dan Minuman	20 Orang
						Peningkatan penguasaan teknologi infomasi Program Pengembangan Industri Kegiatan Pengembangan dan Penumbuhan Usaha Industri Berbasis Agro Makanan dan Minuman	20 Orang
						Sosialisasi Legalitas Usaha Program Pengembangan Industri Kegiatan Pengembangan dan Penumbuhan Usaha Industri Berbasis Agro Makanan dan Minuman	50 Orang
						Peningkatan Pemanfaatan Bahan Baku Lokal Program Pengembangan Industri	20 Orang

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Kegiatan Pengembangan dan Penumbuhan Usaha Industri Berbasis Agro Makanan dan Minuman	
						Pembinaan manajemen produksi	25 Orang
						Program Pengembangan Industri Kegiatan Pengembangan dan Penumbuhan Usaha Industri Berbasis Agro Makanan dan Minuman	
						Pemberian bantuan peralatan produksi	15 kelompok
						Program Pengembangan Industri Kegiatan Pengembangan dan Penumbuhan Usaha Industri Berbasis Agro Makanan dan Minuman	
						Fasilitasi Sertifikasi Produk Edar dan Halal	11 bulan
						Program Pengembangan Industri Kegiatan Pengembangan dan Penumbuhan Usaha Industri Berbasis Agro Makanan dan Minuman	
						Pendampingan penumbuhan dan pengembangan usaha industri	11 bulan

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Program Pengembangan Industri Kegiatan Pengembangan dan Penumbuhan Usaha Industri Berbasis Agro Makanan dan Minuman	
						Pendampingan Sentra usaha industri berbasis Agro Makanan dan Minuman	11 bulan
						Program Pengembangan Industri Kegiatan Pengembangan dan Penumbuhan Usaha Industri Berbasis Agro Makanan dan Minuman	
6	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Budidaya Tanaman Hortikultura	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Pemeliharaan tanaman durian lokasi samigaluh	30 Ha
						Program peningkatan produksi dan mutu hasil hortikultura, kegiatan peningkatan produksi hortikultura	
						Pembangunan JUT	1 Paket
						Pengembangan kawasan durian	1 lokasi
						Pendampingan kelompok pelaksana kegiatan PLKSDA BM	1 kelompok
						Gerakan pengendalian OPT Hortikultura 36 kali	36 Kali
Pengembangan pepaya unggul	1 Paket						

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Terlaksananya bantuan saprodi dan peremajaan papaya	1 Paket
						Saprodi pengembangan cabe merah	1 Paket
						Saprodi pengembangan bawang merah	1 Paket
						Tersalurnya bantuan alsintan budidaya bawang merah (light trap)	1 Paket
						SL GAP	1 Paket
						Tersedianya dan tersalurnya bibit kelengkeng di Tawang Sari Pengasih	1 Paket
						Booster untuk tanam kelengkeng	1 Paket
						Terwujudnya pemeliharaan tanaman kelengkeng	1 Paket
						Terwujudnya uji keunggulan dan kebenaran varietas bawang merah lokal gotakan	1 Paket
						Pengembangan tanaman jahe	20 Ha
						Pengembangan tanaman melon	1 Paket
						Fasilitasi sarpras budidaya 15 unit	0
7	penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan	Pelatihan dan Kemitraan Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perdagangan	Terfasilitasi Lomba Pasar Sehat Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, kegiatan Manajemen Usaha bagi pedagang pasar	1 Even

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
		Perdagangan Dalam Negeri				Terlatihnya pedagang di dalam pasar kategori miskin produktif tentang usaha dan kewirausahaan	140 Orang
						pendampingan dan penataan PKL (Kecamatan Wates)	25 PKL
						Terlatihnya pedagang pasar tentang manajemen usaha	220 Orang
8	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Peningkatan Populasi Peternakan	Budidaya peternakan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan (klinik,reproduksi,laboratorium) di UPTD puskesmas wilayah selatan Program Kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, kegiatan pelayanan kesehatan hewan diwilayah utara	12 bulan
						Tersedianya peralatan pendukung pengobatan (1 paket), obat-obatan (1 paket), wearpack (1 paket) wilayah tengah	3 Paket
						Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan (klinik,reproduksi,laboratorium) di UPTD puskesmas wilayah tengah	12 bulan
						Tersedianya peralatan pendukung pengobatan (1 paket), obat-obatan (1 paket),	3 Paket

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						wearpack (1 paket) Wilayah Utara	
						Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan (klinik, reproduksi, laboratorium) di UPTD puskesmas wilayah utara	12 bulan
						Terlaksananya Pengendalian Anthraks	4450 ekor
						Sosialisasi Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMSZ)	3 Kali
						Terlaksananya pemantauan penyakit hewan menular	20 Kali
						Terlaksananya pengawasan pos lalu lintas ternak	4 Kali
						Terlaksananya pemantauan peredaran obat hewan	6 Kali
						Jumlah sampel uji kualitas produk PAH	110 Sampel
						Sosialisasi penyakit zoonosa	1 Kali
						Sosialisasi peduli ASUH	1 Kali
						Sosialisasi penanganan hewan qurban	1 Kali
						Pemantauan hewan qurban dan pemantauan peredaran pangan asal hewan	24 Kali
						Pelatihan masyarakat dalam pengolahan hasil peternakan	1 Kali
						Uji Produk pangan asal hewan dari pemalsuan dan cemaran mikroba 65 sampel	65 Sampel
						Pembangunan Pasar Klangan	1 unit

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Penyusunan DED Pasar Klangon	1 dokumen
						Tersedianya alat-alat kebersihan, obat-obatan, dan pakaian kerja	1 Paket
						Terfasilitasinya operasional RPH dan Pasar Hewan	12 bulan
						Kontes burung	1 Kali
						Temu Usaha Peternakan	1 Kali
						Monev Kelompok Ternak	12 kecamatan
						Bimtek Kelompok	0 0
						Pendampingan Perijinan	18 Kali
						Kontes Ternak Sapi dan Kambing	0 0
						Bantuan Hibah bahan Kandang	0 0
						Bantuan Hibah Unggas (Ayam)	0 0
						Bantuan Hibah Unggas (Itik)	0 0
						Bantuan Hibah Domba	60 ekor
						Bantuan Hibah Kambing	120 ekor
						Bantuan Hibah Sapi	50 ekor
						Semen beku	3000 dosis
						Tersedianya peralatan pendukung pengobatan (1 paket), obat-obatan (1 paket), wearpack (1 paket) wilayah selatan	3 Paket
9	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Peningkatan Populasi Peternakan	Budidaya peternakan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan (klinik, reproduksi, laboratorium) di UPTD puskesmas wilayah selatan	12 bulan

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Tersedianya peralatan pendukung pengobatan (1 paket), obat-obatan (1 paket), wearpack (1 paket) wilayah tengah	3 Paket
						Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan (klinik, reproduksi, laboratorium) di UPTD puskesmas wilayah tengah	12 bulan
						Tersedianya peralatan pendukung pengobatan (1 paket), obat-obatan (1 paket), wearpack (1 paket) Wilayah Utara	3 Paket
						Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan (klinik, reproduksi, laboratorium) di UPTD puskesmas wilayah utara	12 bulan
						Terlaksananya Pengendalian Anthraks	4450 ekor
						Sosialisasi Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMSZ)	3 Kali
						Terlaksananya pemantauan penyakit hewan menular	20 Kali
						Terlaksananya pengawasan pos lalu lintas ternak	4 Kali
						Terlaksananya pemantauan peredaran obat hewan	6 Kali
						Jumlah sampel uji kualitas produk PAH	110 Sampel
						Sosialisasi penyakit zoonosa	1 Kali

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Sosialisasi peduli ASUH	1 Kali
						Sosialisasi penanganan hewan qurban	1 Kali
						Pemantauan hewan qurban dan pemantauan peredaran pangan asal hewan	24 Kali
						Pelatihan masyarakat dalam pengolahan hasil peternakan	1 Kali
						Uji Produk pangan asal hewan dari pemalsuan dan cemaran mikroba 65 sampel	65 Sampel
						Pembangunan Pasar Klangan	1 unit
						Penyusunan DED Pasar Klangan	1 dokumen
						Tersedianya alat-alat kebersihan, obat-obatan, dan pakaian kerja	1 Paket
						Terfasilitasinya operasional RPH dan Pasar Hewan	12 bulan
						Kontes burung	1 Kali
						Temu Usaha Peternakan	1 Kali
						Monev Kelompok Ternak	12 kecamatan
						Bimtek Kelompok	0 0
						Pendampingan Perijinan	18 Kali
						Kontes Ternak Sapi dan Kambing	0 0
						Bantuan Hibah bahan Kandang	0 0
						Bantuan Hibah Unggas (Ayam) Program peningkatan produksi dan pemasaran hasil peternakan, kegiatan peningkatan produksi peternakan	0 0

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Bantuan Hibah Unggas (Itik)	0 0
						Bantuan Hibah Domba	60 ekor
						Bantuan Hibah Kambing	120 ekor
						Bantuan Hibah Sapi	50 ekor
						Semen beku	3000 dosis
						Tersedianya peralatan pendukung pengobatan (1 paket), obat-obatan (1 paket), wearpack (1 paket) wilayah selatan	3 Paket
10	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penyediaan dan penyaluran sarana produksi lele (terpal, benih, pakan) Program Peningkatan produksi perikanan budidaya, kegiatan pengembangan perikanan budidaya	4 kelompok
						Penyediaan dan penyaluran sarana produksi gurami (terpal, benih, pakan) 2 kelompok	2 kelompok
						Pelatihan pembudidaya ikan dalam CBIB dan CPIB.	100 Orang
						Penyediaan dan penyaluran sarana perbenihan lele (terpal, benih, pakan)	1 kelompok
						Dem/ kaji terap pengembangan perikanan (budidaya ikan gabus)	1 Paket
						Benih ikan unggul lele, gurami, nila	350000 ekor

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Pelatihan pembudidaya ikan dalam pengendalian hama penyakit ikan (HPI)	90 Orang
						Uji sampel kandungan residu logam berat	12 Sampel
						Sosialisasi vaksinasi ikan bagi	30 Orang
						Pemantauan Hama Penyakit Ikan (HPI) dan lingkungan budidaya ikan	250 RTP
						Pemantauan peredaran dan perdagangan obat ikan dan bahan biologis 12 kecamatan	12 Kali
						Penyediaan stock obat ikan	1 Paket
						Uji sampel ikan dan air	12 Sampel
						Sosialisasi penyediaan obat ikan legal	1 Kali
						Pelatihan pembudidaya ikan dalam pengelolaan limbah perikanan	1 Kali
						Uji probiotik	1 Sampel
						Terwujudnya kolam bulat	200 unit
						Pelatihan Sekolah lapang	100 Orang
11	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tersedia dan tersalurkannya sarpras penangkapan ikan kecamatan galur, panjatan, wates temon program peningkatan produksi perikanan tangkap dan pengendalian sumberdaya perikanan dan perikanan kegiatan pengembangan	4 Paket

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						sarana dan prasarana nelayan kecil dan pelela	
						Terlaksananya Penyampaian sistem informasi pelelangan ikan	1 dokumen
						Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Pelelangan Ikan	1 Kali
						Tersedia dan tersalurnya peralatan TPI	4 unit
						Tersedia dan tersalurnya alat bantu navigasi dan radio komunikasi	4 unit
						Terlaksananya pembangunan/ rehab TPI??	1 unit
						Pencatatan data produksi perikanan tangkap	1 dokumen
						Pembinaan Kelompok Nelayan Kecil	175 Orang
						Bimtek Kaderisasi nelayan kecil	20 Orang
						Bimtek Rancang Bangun Pembuatan Alat Tangkap Jaring	15 Orang
						Bimtek alih teknologi penangkapan ikan (perbengkelan mesin PMT)	15 Orang
						Bimtek Metereologi Kelautan Perikanan dan Alat Bantu Navigasi Kapal perikanan	30 Orang
						Penumbuhan pokmaswas	1 Pokmaswas
						Bimtek pokmaswas	30 Orang
						Operasi terpadu di perairan umum	4 Kali
						Restocking perairan umum	111200 ekor

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Sosialisasi peraturan perundang pelestarian sumberdaya perikanan	30 Orang
						Penyelenggaraan pelelangan ikan	4 TPI
12	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	program = Peningkatan Kesehatan Masyarakat kegiatan = Penyehatan sanitasi lingkungan Pembangunan jamban sehat @ 2 Juta	750 unit
13	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Penanganan Fakir Miskin	Pembinaan Usaha dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH	Dinas Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	prog = Pemberdayaan Sosial Keg = pemberdayaan Ekonomi bagi PMKS Output = Seleksi dan validasi KPM PKH Graduasi	200 KPM
14	Penurunan ketimpangan Wilayah Respon terhadap Pembangunan Bandara YIA	Program Pengembangan Keselamatan Transportasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Program : Peningkatan Tertib Lalu Lintas Jalan Kegiatan : Pembangunan Perlengkapan Jalan TUK : Pengadaan dan pemasangan alat pengaman jalan dan marka jalan di jalan Kabupaten	33 titik
15	Penurunan ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Keselamatan Transportasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Program : Peningkatan Tertib Lalu Lintas Jalan Kegiatan : Pembangunan LPJU TUK : Pembangunan PJU di Ruas Jalan Sekitar YIA	22 titik

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
	Respon terhadap Pembangunan Bandara YIA						
16		Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program : Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan : Pembangunan Jembatan Kabupaten Tapen TUK : Peningkatan Jembatan Tapen	1 Paket
17	penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program : Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan : Peningkatan Jalan Kabupaten Peningkatan Jalan Mlangsen - Sp. Palihan 1.01.03.003	1 Paket
						Peningkatan Jalan Joglo Glagah - Macanan 1.01.04.006 (Temon)	1 Paket
18	penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	Pengelolaan Pencegahan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pengurangan resiko Bencana Berbasis Masyarakat pertemuan PRB	50 Orang
						Temu Relawan se Kulon Progo	100 Orang
						Sosialisasi PRB	50 Orang
						Terbentuknya Satuan Pendidikan aman bencana	4 Sekolah
						Terbentuknya Desa Tangguh	6 Desa

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
19	penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi	Pengembangan Sarana dan Prasarana Drainase	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program : Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat Kegiatan : Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Lingkungan Permukiman TUK : Pembangunan drainase permukiman relokasi warga terdampak Bandara di Kebonrejo	1 Paket
20	penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Air Baku	Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Baku	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program : Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi SDA Kegiatan : Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya TUK : Pembangunan Embung Ngruno, Kec.Pengasih	1 Paket
21	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	Penanganan Desa Rawan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Koordinasi dewan ketahanan pangan	2 Kali
						Penumbuhan dan pelatihan kelompok afinitas	1 kelompok
						Penyusunan pola pangan harapan	1 dokumen
						Penyediaan alat uji sampel (kualitatif) hasil panen dan olahan pangan primer	1 unit
						Uji mutu dan keamanan pangan	200 Sampel
						Sosialisasi B2SA	2 Kali
						Fasilitasi dan pendampingan pemanfaatan pekarangan lokasi kalirejo kokap, banjarsari samigaluh,	25 kelompok

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						kebonharjo, ngargosari samigaluh, salamrejo dan sukoreno sentolo, pengasih dan karangsari pengasih, hargomulyo, hargowilis kokap, krembangan panjatan, kedundun	
						Pengembangan kelompok afinitas lama	4 kelompok
						Jumlah kelompok lumbung/cadangan pangan	20 kelompok
						Pemantauan gapoktan LDPM dan Toko Tani Indonesia	20 Gapoktan
						Penyusunan Neraca Bahan Makanan	1 dokumen
						penyusunan peta rawan pangan	1 dokumen
						Penumbuhan dan atau pendampingan Lembaga keuangan desa dan lumbung pangan masyarakat	4 kelompok
22	Respon terhadap Pembangunan Bandara YIA	Program Adat, Seni, Tradisi Dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	Dinas Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	-	0 0
23	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	fasilitasi pembangunan café dan peralatannya (kopi) Program peningkatan produksi dan mutu produk perkebunan kegiatan penanganan pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan	1 Paket
						rehab café dan penataan kawasan kopi	1 kelompok

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						pembangunan showroom coklat	1 kelompok
						Rehab/pembangunan rumah produksi coklat	0 0
						Terlaksananya temu kemitraan sebanyak	4 Kali
						Terlaksananya pelatihan/bimtek pengolahan dan pemasaran cengkeh	4 Kali
						Terlaksananya pelatihan pengolahan teh	1 Kali
						Terlaksananya pelatihan pengolahan dan pemasaran kakao	5 Kali
						Ketersediaan alat pengolahan dan pemasaran cengkeh	4 kelompok tani
						Ketersediaan alat penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran kakao	5 kelompok tani
						Fasilitasi pengolahan teh sangan, KT Tegal Subur, Nglingsgo Timur, Samigaluh	0 0
						Fasilitasi pengolahan kakao KWT Pawon Gendis, SalakMalang, Banjarharjo, Kalibawang	0 0
						promosi dan pengembangan aktivitas wisata	0 0
24	Penurunan ketimpangan Wilayah	Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekonomi	Fasilitasi dan Koordinasi Ketahanan Ekonomi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan pembinaan pertahanan	8 Fasitasi

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						wilayah, Persami, Pembinaan Komunikasi Sosial, Monitoring KKN, FKDM, Rapat Koordinasi Forkopimda, Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten, Ti	
						Koordinasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	1 Kali
						Pembinaan ormas, rapat koordinasi FKUB tingkat Kabupaten, FKUB tingkat Kecamatan, FPK dan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula	5 fasilitasi
25	penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Budidaya Tanaman Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Fasilitasi Petani PAH program peningkatan produksi dan mutu pangan, kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan	3 kelompok
						Pelatihan UPJA/Alsintan	3 Kali
						Jalan Usaha Tani	2 unit
						Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya air (Dam parit, JIAT, Embung, dll)	9 unit
						Belanja Rumah Burung Hantu/Kandang Karantina	20 unit
	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan					Pembangunan Saluran Tersier	1 unit
						Pembangunan Gedung Klinik PHT/Fasilitasi Klinik PHT	2 unit
						Fasilitasi Pengawasan Kebijakan Pupuk dan Pestisida	4 Kali
						Pemberdayaan UPJA	12 kecamatan
						Fasilitasi Alat dan Mesin Pertanian (traktor, alat tanam,	5 kelompok

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						kendaraan roda tiga, lightrap, dll)	
						Pemerdayaan Kelembagaan P3A/GP3A	30 P3A/GP3A
						Fasilitasi opcup rasda	2 Gapoktan
						Pengembangan pelayanan informasi harga tanaman pangan	12 bulan
						Studi banding dalam rangka bimbingan teknis peningkatan mutu hasil tanaman pangan	1 Kali
						Thresher bermotor dan terpal/deklit 12 unit	12 unit
						Inventarisasi sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan	12 kecamatan
						Studi banding ke Gapoktan PUAP di luar propinsi	1 Kali
						Pendampingan Gapoktan PUAP (88 Gapoktan)	88 gapoktan desa
						Inventarisasi pelaku usaha pengolahan hasil tanaman pangaan	12 kecamatan
						benchmarking peningkatan produksi/peningkatan kualitas tanaman pangan	1 Kali
						Penyusunan dan evaluasi rencana luas tanam, panen, produksi dan produktivitas tanaman pangan	4 Kali
						Pelestarian Padi Lokal	20 Ha
						Fasilitasi Lokasi Percontohan Pertanian Modern	0 Ha

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Fasilitasi Sarana Produksi Cetak sawah Baru	44 Ha
						Fasilitasi Gerakan mendukung Peningkatan IP dan Luas Tambah Tanam Tanaman Pangan	13 Kali
						Fasilitasi mendukung perbenihan Tanaman Pangan 2 kali	2 Kali
						Fasilitasi Penerapan Teknologi Baru Budidaya Tanaman Pangan	1 Kali
						Fasilitasi Peningkatan Produksi Aneka Tanaman Kacang dan Umbi 20 ha	20 Ha
						Fasilitasi Sarana dan Gerakan untuk Perlindungan Tanaman Pangan dari OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan DPI (Dampak Perubahan Iklim)	60 Kali
						pengadaan pestisida	1 Paket
						Sertifikasi organic	1 Paket
						pengembangan padi menuju beras premium organik.	200 Ha
						Benchmarking pengelolaan sarana prasarana mendukung tanaman pangan	1 Kali
						Fasilitasi alat metrologi (alat ubinan, soil tester, jangka sorong, ombro meter, dll)	6 unit

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
26	penurunan ketimpangan Wilayah	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Pengelolaan Kerjasama Trantibumlinmas	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya kerjasama dalam rangka keamanan dan ketertiban umum	12 Kali
27	penurunan ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Pemasaran Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perdagangan	Tersosialisasinya keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan bangunan dan fasilitas pasar Orang Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, kegiatan pembinaan ketertiban keindahan dan kebersihan pasar Terbayarnya honor petugas kebersihan, keamanan, dan ketertiban di 32 pasar Tertibnya pedagang pasar Penyediaan tabung pemadam kebakaran Isi ulang tabung pemadam kebakaran Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih (19 pasar) Unit Terbitnya ljin penggunaan tempat dasaran (kios, los,	120 Orang 12 bulan 12 pasar 10 unit 38 tabung 613 unit 3000 ijin

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						bango, dan tempat mendirikan bango)	
						Terawasinya aktivitas pedagang sesuai ketentuan perijinan(19 pasar)	8 Kali
						Pemeliharaan ringan pasar	8 pasar
						Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih (11 pasar) kaos (22 buah) Unit	296 unit
						Terawasinya aktivitas pedagang sesuai ketentuan perijinan (11 pasar)	8 Kali
						Terbitnya Ijin penggunaan tempat dasaran (kios, los, bango, dan tempat mendirikan bango)	1950 ijin
						Terpeliharanya 5 Pasar tradisional UPTD wilayah Utara	5 pasar
						Pemeliharaan ringan pasar	4 pasar
						Terpungutnya retribusi pasar dan tempat khusus parkir di 13 pasar Bulan	12 bulan
						Terpungutnya retribusi pasar dan tempat khusus parkir di 19 pasar Bulan	12 bulan
						Terbayarnya upah pemungut retribusi	12 bulan
						Pembangunan pasar Pasar	2 pasar
						Rehabilitasi pasar	3 pasar
						Pemantauan kegiatan Pasar	12 bulan
						Penyusunan DED	2 dokumen

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Penyusunan UKL-UPL; penyusunan Amdalalin	2 dokumen
						Tersusunnya database pasar tradisional/updating data dan informasi pasar Dokumen	1 dokumen
28	penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Pengembangan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program : Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi SDA Kegiatan : Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya TUK : Perencanaan Jaringan Embung Dlingseng	1 dokumen
						Program : Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi SDA Kegiatan : Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya TUK : Pembangunan saluran irigasi kiri dari Embung Blubuk	1 Paket
29	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	TUK : Hibah Air Minum Perkotaan melalui penyertaan modal daerah ke PDAM	1 Paket
	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan					TUK : Hibah Air Minum Perdesaan melalui PPKD berupa hibah uang	1 Paket
						Program : Pembangunan Pengembangan Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi Kegiatan : Penyediaan Sarana Air Bersih	1 Paket

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						TUK : Optimalisasi Spandes Giripurwo	
						Optimalisasi SPAM Salamrejo (Hibah Khusus Pamsimas) melalui PPKD berupa hibah uang	620 jiwa
						Optimalisasi SPAM Banjarsari (Hibah Khusus Pamsimas) melalui PPKD berupa hibah uang	780 jiwa
30	penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengembangan Perikanan Budidaya Lele	43 kelompok
						Pengembangan Perikanan Budidaya Gurami	24 kelompok
						Pengembangan Perikanan Budidaya Minapadi	3 kelompok
						Jumlah unit budidaya/ kelompok yang direkomendasikan untuk sertifikasi CPIB dan CBIB	25 kelompok
31	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Penyelenggaraan Energi Dan Ketenagalistrikan	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program : Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat Kegiatan : Penyediaan PSU Lingkungan Permukiman TUK : Bantuan SR Listrik di lingkungan permukiman	150 unit
32	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Strategis	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program : Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat Kegiatan : Penyediaan PSU Lingkungan Permukiman	1 Paket

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	KINERJA	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
	Respon terhadap Pembangunan Bandara YIA					TUK :Pembangunan PSU Relokasi Kebonrejo	
33	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Penyelenggaraan Perumahan	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program : Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat Kegiatan : Pemberdayaan Peningkatan Infrastruktur oleh Komunitas TUK : Terbangunnya Rumah Tidak Layak Huni bagi KK Miskin (melalui bansos)	250 KK

6.3.4 Kegiatan Tematik Kabupaten Gunungkidul

Implementasi penyalarsan Tematik Gunungkidul memiliki fokus pada tematik:

1. Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan,
2. Penurunan Ketimpangan Wilayah,
3. Dukungan Pembangunan Yogyakarta International Airport (Bandar Udara Internasional Yogyakarta)

Kegiatan tematik Kabupaten Gunungkidul yang telah dibahas pada Musrenbang dalam rangka Penyusunan RKPD DIY Tahun 2020 adalah sebagai berikut,

Tabel 6-8 Kegiatan Tematik Kabupaten Gunungkidul

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
1	penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Pendapatan	Program Penyelenggaraan Perumahan	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Program:Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan: Pembinaan Penyediaan Perumahan Swadaya TUK: Penyusunan data KK tempel Kabupaten Gunungkidul;	1 dok
						Program:Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan: Pembinaan Penyediaan Perumahan Swadaya TUK: Pembangunan Perumahan untuk Penanggulangan Kemiskinan	100 unit
2	penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Pendapatan	Program Penyelenggaraan Perumahan	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Program:Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan: Pembinaan Penyediaan Perumahan Formal TUK: Jumlah pembinaan terhadap pengembang perumahan formal dan bank pembiayaan perumahan	16 Orang
						Program:Peningkatan Kualitas Perumahan dan	4 dokumen

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Kawasan Permukiman Kegiatan: Pembinaan Penyediaan Perumahan Formal TUK : Tersusunnya Dokumen verifikasi PSU Perumahan Formal	
						Program:Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan: Pembinaan Penyediaan Perumahan Formal TUK : Tersusunnya Buku Profil perumahan formal tahun 2020	75 ekemplar
						Program:Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan: Pembinaan Penyediaan Perumahan Formal TUK: Jumlah PSU yang terbangun di Perumahan Formal Kec Wonosari, Karangmojo dan Semanu	4 lokasi
3	penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Pendapatan	Program Penyelenggaraan Perumahan	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Program:Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan: Pembinaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan permukiman TUK: Tersusunnya	1 dokumen

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Dokumen Perencanaan Studi Kebutuhan PSU Kawasan Permukiman	
4	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Keselamatan Transportasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Program: Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Perparkiran Kegiatan: Pengelolaan PJU Terlaksananya pemasangan PJU solar cell	200 unit
	Respon Terhadap Pembangunan Bandara YIA					Program: Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Perparkiran Kegiatan: Pengelolaan PJU Terlaksananya meterisasi lampu PJU di Karangrejek dan Nglipar	250 unit
5	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengkajian Dan Pnaatan Lingkungan Hidup	Pengkajian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup	Program: Pengendalian pencemaran dan pengembangan kapasitas kelembagaan LH Kegiatan: Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA Meningkatnya pengetahuan pokdarwis tentang pariwisata yang berwawasan lingkungan hidup di Dengok	2 lokasi
						Pengembangan ekowisata di pantai Greweng	1 Paket

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
6	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Pembinaan ekowisata	1 Kali
						Program: Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan Kegiatan: Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan Peningkatan kapasitas jalan (ruas Tepus-Pok Tunggal)	2.5 km
						Pembangunan jalan lingkar Pantai Sepanjang	2 km
						Pembangunan jalan Ruas Nglolan-Pantai Porok	400 m
						Pembangunan jalan Kepek-Pantai Ngobaran	3.5 km
7	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Program: Pengelolaan penerangan jalan umum dan perparkiran Kegiatan: Pengelolaan perparkiran Jumlah lokasi parkir yang dikelola	54 lokasi
8	penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Pendapatan	Program Pelayanan Pada Blud Bapel Jamkessos	Pelayanan Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Program: Pelayanan Jaminan Kesehatan Kegiatan: Pelayanan Jaminan Kesehatan Penduduk Miskin Output: Jumlah Penduduk Miskin yang menerima JKN di Kabupaten Gunungkidul	159192 jiwa

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
9	penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Pendapatan	Program Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Program = Peningkatan penyelenggaraan peningkatan pelayanan kecamatan Kegiatan = Pembinaan sosial dan kemsyarakatan (penyediaan jamban sehat untuk kk miskin) Output : 1. penyediaan jamban sehat bagi KK miskin @ 3.000.000. 2. Penampungan Air Hujan	712 KK
10	penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Pendapatan	Program Penyelenggaraan Perumahan	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Program:Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan: Penanganan Kawasan Kumuh TUK: Terlaksananya pengentasan kawasan kumuh di kepek dan siyono wetan	2 lokasi
						Program:Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan: Penanganan Kawasan Kumuh TUK: Tersusunnya dokumen inventarisasi PSU Kawasan Kumuh	3 dokumen
						Program:Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 dokumen

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Kegiatan: Penanganan Kawasan Kumuh TUK: Tersusunnya dokumen laporan kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh	
11	penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Pendapatan	Program Penanganan Fakir Miskin	Pembinaan Usaha dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Program : Peningkatan kesejahteraan sosial Kegiatan : Pelayanan perlindungan dan jaminan sosial Output : Seleksi Penerima PKH Graduasi	200 Orang
12	Respon Terhadap Pembangunan Bandara YIA	Program Pengelolaan Taman Budaya	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota	Dinas Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Terbangunnya taman budaya di Gunungkidul	1 Taman Budaya
	Penurunan Ketimpangan Wilayah						
13	penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Pendapatan	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Biro Tata Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Kegiatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan Jumlah pencatatan perubahan status anak dan pewarganegaraan	15 akta
						Jumlah pencatatan perceraian	30 akta

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Jumlah pencatatan perkawinan	100 akta
14	penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Pendapatan	Program Pengembangan Dan Pembinaan Perpustakaan	Pemasyarakatan Perpustakaan dan Minat Baca	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program: Pengembangan Budaya Baca dan Pengembangan Perpustakaan Kegiatan: pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Output: Bedah buku	1 Kali (50 orang peserta)
15	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Pemasaran Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah pasar yang direhabilitasi (Ngalang, Hargomulyo, Tepus dan satu lagi)	4 pasar
16	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Pelatihan dan Kemitraan Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah PKL yang dibina (Program Perdagangan Dalam Negeri kegiatan Pelatihan dan Kemitraan Perdagangan Dalam Negeri)	20 Orang
						Jumlah peserta pembinaan penataan pedagang yang dibina	20 Orang
						Jumlah peserta sosialisasi pasar sehat yang di bina	20 Orang
17	penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Pendapatan	Program Perlindungan Dan Pengamanan Konsumen	Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah pedagang yang dibina	50 Orang
18	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Perkoperasian	Pelatihan SDM dan Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Jumlah peserta diklat dewan pengawas syariah (Program pengembangan perkoperasian, kegiatan	20 Orang

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						pelatihan SDM dan kelembagaan koperasi)	
19	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Pelatihan Industri Kecil Menengah Agro	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1. Jumlah sentra/calon sentra yang dibina (PIWK) (Program Pengembangan industri kecil dan menengah, kegiatan pelatihan indutri kecil menegah agro	1 sentra
						2. Jumlah IKM yang terfasilitasi PIRT: - Fasilitasi penerbitan PIRT lokasi di saptosari, gedangsari,	2 kelompok
						3. Pendampingan Kelompok IKM di Kec. Gedangsari dan Nglipar	2 kelompok IKM
20	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Pelatihan Industri Kecil Menengah Logam, Sandang dan Aneka	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah sentra/ calon sentra yang dibina (program pengembangan IKM kegiatan pelatihan industri kecil menengah logam sandang dan aneka)	1 sentra
21	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Ukm	Pelatihan Kelembagaan dan Usaha UKM	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Jumlah UMKM yang mendapatkan sosialisasi permodalan (program pengembangan UKM, kegiatan Kelembagaan dan usaha UKM)	30 Orang
						Jumlah UMKM yang terbina di daerah wisata	30 Orang

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Jumlah UMKM yang mengikuti temu usaha	60 Orang
						Jumlah peserta pelatihan bussiness Plan	30 Orang
						Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	90 Orang
22	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Program: Penyehatan Lingkungan Permukiman Kegiatan: Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyediaan Sarpras SPAM, Drainase dan Air Limbah Pembangunan saluran drainase permukiman di Kec Wonosari	6 Jaringan
	penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Pendapatan					Penyediaan IPAL Komunal di 5 Kecamatan (Playen, Paliyan, Saptosari, Purwosari, Wonosari)	5 lokasi
						Pengembangan pelayanan air minum perpipaan di 3 kecamatan (Tepus, Tanjungsari, Saptosari)	3 kecamatan
						Pengembangan pelayanan air minum perpipaan di Desa Botodayakan, Kec Rongkop	1 Desa
23	bendera tdk ijo	Program Pengembangan Industri Pariwisata	Pelatihan dan Sertifikasi Industri Pariwisata	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	pelaku usaha wisata yang diberi sertifikasi (Program Peningkatan dan	25 Orang

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Pengembangan Industri dan kelembagaan pariwisata kegiatan pengembangan industri pariwisata)	
						lomba kuliner, kebersihan pedagang, toilet	4 Kali
						seminar pengembangan industri pariwisata	2 Kali
						pembinaan, sosialisasi dan peningkatan SDM Pelaku usaha pariwisata	6 Kali
24	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Ukm	Pemasaran Produk UKM	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Jumlah peserta yg mengikuti pameran produk UMKM (Program Peningkatan kualitas UMKM, Kegiatan Pembinaan, Promosi dan pemasaran Produk UMKM)	4 Kali
25	Respon Terhadap pembangunan Bandara YIA	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	4. event lokal	36 event
						3. Gunungkidul Tourism Festival	1 event
						2. Festival Geo Park Gunungsewu di Nglanggeran	1 event nasional
						1. penyelenggaraan event Baron Festival : - Baron 10 K - Tour de Gunung Sewu (masuk di program pengembangan destinasi pariwisata, kegiatan	1 event internasional

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						penyelenggaraan atraksi pariwisata)	
26	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	1. pembangunan lahan parkir seluas 400 m2 di Embung Sriten (masuk di program pengembangan destinasi pariwisata, kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana destinasi pariwisata)	400 m2
						2. Pembangunan talut lahan seluas lahan parkir di pantai Krakal	1 Paket
						3. Krakal ; pembangunan kios wisata	1 Paket
						4.Pembanguna Gapura kawasan Embung Betara Sriten, Nglipar	1 Paket
						5. Baron dan Krakal; pemeliharaan pos retribusi	1 Paket
27	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Budidaya ikan hias (program peningkatan produksi perikanan budidaya, kegiatan pembangunan rehabilitasi dan penyediaan sarana prasarana perikanan budidaya)	2 Paket
						Budidaya lele	18 Paket
						Budidaya gurami	3 Paket
						Budidaya minapadi	5 Paket
						Budidaya nila	5 Paket

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
28	penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Pendapatan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	Pengolahan Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pembinaan poklhasar (Program Pengembangan Agribisnis Perikanan, Kegiatan Pembinaan penanganan Pasca panen Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan)	8 angkatan
						Pelatihan pengolahan hasil perikanan	2 Paket
29	penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Pendapatan	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Pelatihan Teknis Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pelatihan keterampilan nelayan untuk perbaikan mesin kapal (Program pemberdayaan nelayan, kegiatan pembinaan dan pendampingan kelompok nelayan perikanan tangka)	1 angkatan
						Magang untuk nelayan	1 angkatan
						Pendampingan KUB	10 angkatan
30	penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Pendapatan	Program Peningkatan Populasi Peternakan	Budidaya peternakan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Pendampingan budidaya ternak unggas di kec. panggang (Program Peningkatan produksi peternakan, kegiatan pembinaan budidaya ternak)	6 angkatan
31	Penurunan Ketimpangan Wilayah penurunan Kemiskinan dan	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Budidaya Tanaman Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Pengadaan hand sprayer	50 unit

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/ Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
	Peningkatan Pendapatan						
32	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Budidaya Tanaman Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Pengadaan pompa air (program peningkatan produksi tanaman pangan, kegiatan penyediaan dan pengelolaan sarana produksi pertanian)	25 unit
	penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Pendapatan					Rehabilitasi jaringan irigasi tersier lokasi playen, pathuk, nglipar, semin, karangmojo, wonosari, purwosari	1000 meter
33	penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Pendapatan	Program Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	Penanganan Desa Rawan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Pelatihan teknis desa mandiri pangan (manajemen usaha, dinamika kelompok, pengembangan usaha ekonomi produktif) lokasi Girikerto dan Tegalrejo (Program peningkatan ketahanan pangan, kegiatan peningkatan kewaspadaan dan mutu pangan)	2 Kali

6.3.5 Kegiatan Tematik Kabupaten Sleman

Implementasi penyalarsan Kabupaten Sleman memiliki fokus pada tematik:

1. Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan,
2. Penurunan Ketimpangan Wilayah,
3. Dukungan Pembangunan Yogyakarta International Airport (Bandar Udara Internasional Yogyakarta)

Kegiatan tematik Kabupaten Sleman yang telah dibahas pada Musrenbang dalam rangka Penyusunan RKPD DIY Tahun 2020 adalah sebagai berikut,

Tabel 6-9 Kegiatan Tematik Kabupaten Sleman

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
1	Penurunan Ketimpangan wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Kegiatan : Peningkatan jalan TUK : peningkatan jalan di 14 lokasi	14 ruas jalan
2	Penurunan Ketimpangan wilayah	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	Program Pengembangan destinasi pariwisata kegiatan peningkatan Pembangunan Sarana dan prasarana pariwisata output : pembenahan dan penataan kawasan dan lingkungan candi- candi	1 kawasan
3	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	paket induk gurami	50 Paket
						paket induk Lele	10 Paket
						paket induk Nila	20 Paket
						paket budidaya UGADI	5 Paket
						paket budidaya minapadi	10 Paket
paket budidaya ikan hias	5 Paket						

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						paket budidaya gurami	10 Paket
						paket budidaya nila	20 Paket
						PROGAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Paket Budidaya lele	10 Paket
						PROGAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Pembinaan dan Pengembangan Perikanan - Prosentase Peningkatan Produksi Ikan	9 %
4	Penurunan Ketimpangan wilayah	Program Pengembangan Keselamatan Transportasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Program : Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan : Pembangunan LPJU Pemasangan LPJU baru di ruas jalan kabupaten Terpasangannya LPJU baru di ruas jalan kabupaten (12.047.835.500)	4 Paket
	Respon Terhadap Pembangunan Bandara NYIA						
5	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Pengelolaan Air Tanah	Pendayagunaan Air Tanah	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program : Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Kegiatan : pengembangan distribusi air minum TUK: pengembangan spamdes (tempel, pakem, ngaglik)	5 kelompok

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
6	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Biro Tata Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Asistensi TSKS dalam pelayanan KK dan KTP-el bagi gakin	17 Orang
						Asistensi PKH dalam pelayanan KK dan KTP-el bagi gakin	35 Orang
						KIA	200 dokumen
						KK	300 dokumen
						KTP el	200 dokumen
						PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Pelayanan KTP, KK bagi warga miskin	300 KK
						-Tertib administrasi kependudukan	
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Pelayanan akta catatan sipil bagi keluarga miskin	200 Orang						
						-Penyelesaian akta pencatatan sipil bagi keluarga miskin	
7	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup	Program : PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1 Paket
						Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan TUK : Terbangunnya TPS dan TPS 3R	
						Pengadaan Gerobak sampah	1 Paket

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
8	Penurunan Ketimpangan wilayah	Program Pengembangan Ukm	Pemasaran Produk UKM	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengadaan Genset	1 Paket
						PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi - Promosi bersama Sleman 2020	5 UMKM
						Pameran Majapahit di Surabaya	5 UMKM
						Fasilitasi aplikasi pemasaran online Sleman mart (pengembangan dan operasional)	12 bulan
						Pameran PRPP Jateng di Semarang	4 UMKM
						Fasilitasi UMKM non pertanian pada pasar	5 UMKM
						Pameran APKASI	5 UMKM
						Pelatihan pemasaran online	50 Orang
Pelatihan internet marketing wirausaha muda se-kabupaten Sleman	20 Orang						
9	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Pengembangan Dan Pembinaan Perpustakaan	Pemasyarakatan Perpustakaan dan Minat Baca	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program: PENGEMBANGAN BUDAYA BACA Kegiatan: Pemasyarakatan Minat Baca Output: Bedah buku di 5 desa, roadshow minat baca di 5 desa	10 Desa

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
10	Respon Terhadap Pembangunan Bandara NYIA Penurunan Ketimpangan wilayah	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan Tenaga Kerja Profesional	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bidang Jasa Konstruksi - Meningkatnya kemampuan tenaga terampil dan penyedia jasa	15 LOKASI @ 30 ORANG
11	Penurunan Ketimpangan wilayah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi	Pengembangan Sarana dan Prasarana Drainase	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM : PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG Kegiatan : Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong TUK : pembangunan drainase	40 lokasi
12	Penurunan Ketimpangan wilayah	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Pengembangan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM : PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA Kegiatan : Pembangunan/peningkatan Jaringan Irigasi TUK : Peningkatan jaringan irigasi	52 DI
13	Penurunan Ketimpangan wilayah Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM : PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH Kegiatan : Pengembangan distribusi air minum TUK: Jaringan distribusi SPAM Regional Kartamantul di Trimulyo	1 SPAM

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
	Kelompok Pendapatan						
14	Penurunan Ketimpangan wilayah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN LIMBAH Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	1 Paket
						- Pembangunan jaringan servis dan SR di Kecamatan Depok	
	- Pembangunan jaringan servis dan SR di Kecamatan Ngaglik					1 Paket	
	Pembangunan IPAL Ponpes					1 IPAL	
	Pembangunan SPALD-S Skala Individual					1 Paket	
	Pembangunan SPALD-S Skala Permukiman					1 Paket	
Pembangunan SPALD-S Skala Permukiman Kecil 5 - 10 KK	1 Paket						
15	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM : PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Kegiatan : Peningkatan jembatan TUK : Pembangunan Jembatan salakan gamping, rejdani ngaglik, pancoh 1, sayidan depok	4 unit
		Program Penyelenggaraan Perumahan	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM : PENGEMBANGAN PERUMAHAN Kegiatan : Pembinaan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu TUK : 1. Fasilitasi penanganan	600 RTLH
16	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Penyelenggaraan Perumahan	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM : PENGEMBANGAN PERUMAHAN Kegiatan : Pembinaan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu TUK : 1. Fasilitasi penanganan	600 RTLH

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						RTLH 2. Bansos uang untuk penanganan rumah tidak layak huni melalui belanja tidak langsung (Rp.9 M)	
17	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Penyelenggaraan Perumahan	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM : LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN Kegiatan : Penataan kawasan kumuh TUK : 1. Tersedianya RPP (5) 2. Fisik 6 lokasi di caturtunggal dan condongcatur 3. Penataan Kalibuntung	7 lokasi
18	Penurunan Ketimpangan wilayah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM : PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH Kegiatan : Pengembangan distribusi air minum TUK : Pembangunan SPAMDES (Tempel, Ngaglik, Pakem)	5 kelompok
	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan						
19	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Perlindungan Dan Pngamanan Konsumen	Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN Pemantauan Informasi dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting - Laporan monitoring harga	12 dok

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						barang kebutuhan pokok dan barang penting: 12 dokumen (Pasar Prambanan, Pasar Pakem, Pas	
						Kajian tata niaga barang kebutuhan pokok: 1 dokumen (Kab. Sleman)	1 dok
20	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Perlindungan Dan Pengamanan Konsumen	Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	1 dok
						- Laporan monitoring barang rusak dan kadaluwarsa: 1 dokumen (Kab. Sleman)	
						Laporan monitoring barang dalam pengawasan: 1 dokumen (Kab. Sleman)	1 dok
						Pengawasan pangan dan bahan berbahaya: 27 pasar dan 2 lokasi PKL (Kab. Sleman)	27 pasar
						Laporan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai hasil tembakau ilegal: 1 dokumen (Kab. Sleman)	1 dok
						Peserta kegiatan tindak lanjut pengawasan pangan dan bahan berbahaya: 25 orang x 5 angkatan (Kab. Sleman)	25 orang x 5 Angkatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI Pengembangan Kapasitas	2 angkatan @20 orang						

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Pranata Pengukuran, Standarisasi, pengujian dan Kualitas - Peserta workshop sertifikasi produk halal : 2 A @20 orang (Kab. Sleman)	
						Peserta bimtek kemasan bagi IKM pangan (PUPM): 7 A @20 orang (Kecamatan Kalasan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Godean, Desa Maguwoharjo, Desa Merdikorejo (Bening, Sokamartani, Womorejo, Dermo, Seloharjo, Kenditen), Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Pakem)	7 angkatan @20 orang
						Pendataan industri: 86 desa (Kab. Sleman)	86 Desa
						Workshop P3DN: 1 A @30 orang (Kab. Sleman)	1 angkatan @30 orang
						Laporan monev P3DN: 1 dokumen (Kab. Sleman)	1 dok
						PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri - Peserta bimtek batik lanjutan (PUPM): 120 orang (Banyuraden (Modinan), Sumberarum, Sendangagung (Nastiti Agung	120 Orang

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Tengahan 11), Condong-catur, Bokoharjo (Dawung), da	
21	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Pemasaran Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR Promosi Produk Daerah	4 UKM
						- Peserta pameran IFEX (Indonesian International Furniture Expo): 4 UKM di Sleman	
						Peserta gelar potensi produk inacraft: 10 IKM di Kab. Sleman	10 IKM
						Peserta pameran batik: 4 IKM di Kab. Sleman	4 IKM
						Keikutsertaan dalam promosi Bersama 2020: 1 kali di Kab. Sleman	1 Kali
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENATAAN PEDAGANG PASAR Pembinaan Perdagangan Tradisional	5 UPT
						- Pembinaan pedagang pasar: 5 UPT Pelayanan Pasar di Kab. Sleman	
						Pengembangan potensi peguyuban pedagang pasar: 10 paguyuban di Kab. Sleman	10 PAGUYUBAN
Kewirausahaan Sekolah Pasar: 135 pedagang di Kab. Sleman	135 pedagang						
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENATAAN PEDAGANG PASAR Penataan Perdagangan	22 pasar						

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Tradisional - Penataan pedagang pasar, tempat dagangan dan monitoring evaluasi 22 pasar di Kab. Sleman	
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENATAAN PEDAGANG PASAR Promosi Pasar Tradisional - Undian belanja berhadiah di pasar: 22 pasar, 2 kali Pengundian (Pasar Prambanan, Pasar Potrojayan, Pasar Tegalsari, Pasar Gamping, Pasar Godean, Pusat Kuliner Belut Godean, Pasar	22 pasar
						Promosi Pasar di media massa: 8 kali Kab. Sleman	8 Kali
						Pengelolaan Radio Pasar: 3 pasar (Pasar Cebongan, Pasar Sleman Unit 2, Pasar Prambanan)	3 pasar
						Pemasaran pasar pasar tradisional: 5 UPT Pelayanan Pasar Kab. Sleman	5 UPT
						Pengelolaan aplikasi belanja online di pasar tradisional: 12 bulan Kab. Sleman	12 bulan
						PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	200 ijin

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Pembinaan Organisasi Pedagang Kali Lima dan Asongan	
						- Penerbitan izin PKL: 200 ijin, Kab. Sleman	
						Pembinaan paguyuban PKL: 5 kelompok, Kab. Sleman	5 kelompok
						Pembinaan PKL: 5 lokasi, Kab. Sleman	5 lokasi
22	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Pelatihan dan Kemitraan Eksportir	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR Membangun jejaring dengan eksportir	20 UKM
- UKM Peserta jejaring dengan eksportir: 20 UKM di Kab. Sleman							
- UKM peserta pelatihan manajemen ekspor impor (PUPM Desa Sumberrahayu, Kec. Moyudan: 20 orang di Sumberrahayu, Moyudan)						20 Orang	
- Fasilitasi Paguyuban eksportir: 1 Paguyuban di Kab. Sleman						1 PAGUYUBAN	
						- UKM yang mengikuti temu bisnis: 6 UKM di Kab. Sleman	6 UKM
23		Program Pengolahan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	Pengolahan Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN Peningkatan kapasitas pengolah dan pemasar hasil perikanan	2 ANGKATAN (50 ORANG)

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						- Pelatihan pengolahan hasil perikanan 2 angkatan 50 orang	
24	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN Evaluasi pelaku usaha perikanan	17 kelompok
						- Pembinaan kelompok usaha perikanan 17 kelompok	
						PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Pelatihan Petani dan Pelaku Agrobisnis Tanaman Pangan	20 kelompok
						- Pendataan, pembinaan dan pelatihan UPJA 20 kelompok	
						- Pembinaan pertanian organik 2 kelompok	2 kelompok
						- Penyaluran dana penguatan modal 60 kelompok	60 kelompok
25	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Peningkatan Iklim Investasi	Penyiapan Potensi Investasi	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI Kajian Kebijakan Penanaman Modal	1 Dok (30 buku)
						- Dokumen pemetaan potensi investasi 1 dok (30 buku)	
						- Analisis ekonomi terhadap investasi baru 1 dok (30 buku)	1 Dok (30 buku)

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						- Peta potensi kegiatan ekonomi masyarakat dalam rangka investasi daerah 3 kecamatan	3 kecamatan
						- Draft Perbup pemberian insentif dan kemudahan investasi 1 dok"	1 dok
26	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Promosi Investasi	Promosi Investasi	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	PROGRAM PENINGKATAN DAN KERJASAMA INVESTASI Promosi investasi Apkasi/AITIS 1 kali	1 Kali
						- Gelar potensi investasi daerah di luar daerah 1 kali	1 Kali
						- Materi promosi (pemeliharaan sistem aplikasi) 1 kali	1 Kali
						- Pameran potensi daerah 1 kali	1 Kali
						- Promosi bersama Pemkab Sleman 1 kali	1 Kali
						PROGRAM PENINGKATAN DAN KERJASAMA INVESTASI Peningkatan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	1 Kali
						- Investor gathering di luar daerah 1 kali	
						- Perencanaan dan pengembangan penanaman modal ke provinsi 10 kali	10 Kali
- perencanaan dan pengembangan penanaman modal ke pusat 3 kali	3 Kali						

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Temu kemitraan 5 PMA-PMDN 15 UKM	15 UKM
27	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Ukm	Pelatihan Kelembagaan dan Usaha UKM	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM	21 IKM
						Peserta Pameran Jakarta Fair: 21 IKM di Kab. Sleman	
						Penyelenggaraan pameran PPD: 1 kali di Kab. Sleman	1 Kali
						Promosi tetap produk IKM di showroom dinas: 120 IKM di Kab. Sleman	120 IKM
						Penyelenggaraan Gelar Potensi Mitra RKS: 1 kali di Kab. Sleman	1 Kali
						PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL Pembinaan Sentra Industri	5 sentra
						- Sentra yang dikukuhkan berdasarkan SK Bupati 5 sentra	
						Sentra yang di dampingi 2 sentra indutri	2 sentra
						Peserta pendampingan kelompok industri pengolahan salak, 1 kelompok industri Purwobinangun Pakem	1 kelompok
Peserta pendampingan sentra indutri kerajinan lurik 1 industri Sumberahayu, Moyudan	1 INDUSTRI						
Peserta pendampingan sentra industri kerajinan Brajan,	1 sentra						

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Sendang agung, Minggu 1 sentra industri	
28	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Perkoperasian	Pemasaran Perkoperasian	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM KOPERASI Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi - Pameran pada hari koperasi (NASIONAL, PROPINSI, KABUPATEN)	66 UMKM
29	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Ukm	Pelatihan Kelembagaan dan Usaha UKM	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam memperkuat Jaringan Kluster Industri - Forum komunikasi sentra IKM: 60 IKM di kabupaten Sleman	60 IKM
						Temu usaha industri: 30 warga rentan miskin di Kabupaten Sleman	30 Orang
						Pelayanan rumah kreatif Sleman: 12 bulan di Kabupaten Sleman	12 bulan
						PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Pemanfaatan Sumber daya bagi Industri Kecil dan Menengah - Peserta Bimtek batik pemula (PUPM dan Pokir): 80 orang	80 Orang

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Margorejo, Girikerto (Padukuhan Kloposawit), Donoharjo, Berbah (Ngentak, Mejing, Jogotirto)	
						Peserta bimtek kue basah dan kering (PUPM, Pokir): 60 orang di Donokerto (Kelompok Lestari Gading Kulon), Depok (PKK RT 03, RT 04, Ambarukmo), Wukirsari	60 Orang
						Peserta bimtek sablon (PUPM): 40 orang di Tlogoadi, Sindumartani	40 Orang
						Peserta bimtek kerajinan rajut (PUPM): 20 orang di Sumberrahayu	20 Orang
						Peserta bimtek fiberglass cinderamata (PUPM): 20 orang di Margodadi	20 Orang
						Peserta bimtek mebel bambu laminasi (PUPM): 20 orang di Glagaharjo	20 Orang
						Bimtek packing produk makanan (PUPM) 20 orang di Merdikorejo, Tempel	20 Orang
						Pembinaan usaha retail lokal (PUPM) 25 orang di Pondokrejo, Tempel	25 Orang
						Pembinaan usaha dagang (PUPM) 20 orang di Mororejo, Tempel	20 Orang
30	penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Perkoperasian	Pelatihan SDM dan Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	60 orang (2 angkatan)

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Pengembangan Kapasitas SDM Koperasi - Peserta pelatihan pengelolaan koperasi	
						Peserta pelatihan pengelola koperasi bagi pengurus dan karyawan 40 orang 2 angkatan	40 orang (2 angkatan)
						PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KONDUSIF Pemberdayaan koperasi - Jumlah penyuluhan perkoperasian yang dilakukan di masyarakat 10 kali	10 Kali
						Pelayanan akta pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar dan surat ijin usaha Simpan pinjam koperasi 10 koperasi	10 koperasi
						Pemahaman perkoperasian 40 orang	40 Orang
31	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja Dan Penempatan Transmigran	Pembentukan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja	PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja - Pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja 1 kall	1 Kali
						pembinaa bursa kerja khusus 1 kali 50 BKK	1 Kali

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Forkom BKK 1 kali	1 Kali
						Penerbitan tanda BKK 8 BKK	8 BKK
32	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja Dan Penempatan Transmigran	Penyelenggaraan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja	PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL Penyuluhan Transmigrasi Regional Penyuluhan transmigrasi 30 kali 1200 orang	30 KALI (1200 ORANG)
						PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL Penyiapan Pelayanan Penempatan Transmigran - Seleksi calon transmigran 30 KK	30 KK
						-Pembinaan pendaftar terseleksi 1 angkatan yang terseleksi	1 angkatan
						PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL Pembinaan Kemkitraan Mitra Makarya Muktitama - Pra dan pasca penempatan calon transmigran 4 lokasi 4 kab 4 prop	4 LOKASI 4 KAB 4 PROP
						- Terselenggaranya kerjasama antar daerah pengirim dan penerima 4 lokasi 4 kab 4 prop	4 LOKASI 4 KAB 4 PROP
33	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja Dan Penempatan Transmigran	Pembentukan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA Pelayanan Antar Kerja	900 Orang
						Pelayanan penempatan tenaga kerja 900 orang	
						Dokumen AK I	2000 lembar
						Dokumen AK II	2000 lembar

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Dokumen AK III	2000 lembar
						Informasi Pasar Kerja Keliling	40 lokasi
						Audit Internal Sertifikasi ISO 9001:2015	1 Kali
						Forum Komunikasi Petugas Penempatan Tenaga Kerja DIY	1 Kali
						Peningkatan Kapasitas Aparatur tentang Pelayanan Ketenagakerjan	4 kecamatan
						Monitoring pengembalian dana penguatan modal TKI	30 Kali
						Rekomendasi pinjaman dana penguatan modal TKI	8 Orang
						PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	500 Orang
						Penyiapan dan seleksi calon tenaga kerja 500 orang	
						Pembekalan calon tenaga kerja yang lolos seleksi 300 orang	300 Orang
						- Forum komunikasi pencari kerja dengan perusahaan 1 kali	1 Kali
34	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pembinaan Pelatihan Standarisasi Dan Pemagangan	Pemagangan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA Pemagangan dan Kerjasama Pelatihan Kerja	40 Orang
						Pemagangan bagi peserta pasca pelatihan kerja 40 orang	

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Kerjasama penyelenggaraan pelatihan bagi pencari kerja pada LPK terakreditasi 5 paket 100 orang	5 paket (100 orang)
35	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pembinaan Pelatihan Standarisasi Dan Pemagangan	Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Peningkatan Profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	4 Orang
						PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi	3 kejuruan
						Uji kompetensi pada 3 kejuruan	
36	Respon terhadap pembangunan Bandara NYIA	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan Tenaga Kerja Profesional	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pelayanan Produktivitas Kerja Penyuluhan 2 kali 80 orang	2 kali (80 orang)
						bimbingan teknis	2 angkatan (@ 50 orang @3 hr)
						pengukuran produktivitas kerja	2 perusahaan
37	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja Non Institusional A. Pelatihan pencari kerja pada 11 sub kejuruan:	11 sub kejuruan

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Bordir (Kalasan, Banyurejo, Umbulmartani)	3 Paket
						Jahit (Ambarketawang, Bangunkerto, Kalasan, Tamanmartani, Selomartani, Widodomartani, Margomulyo, Sendangadi, Sendangagung, Madurejo, Ponpes Triharjo)	13 Paket
						Tata Rias Pengantin (Girikerto, Margoluwih, Margodadi)	3 Paket
						Tata Rias lanjutan (Gayamharjo, Prambanan)	1 Paket
						Operator Komputer (Nogotirto, Sumberrejo)	2 Paket
						Internet Marketing (Gamping, Tempel)	2 Paket
						Sepeda Motor (Tamanmartani, Caturtunggal)	2 Paket
						Tata Boga (Bangunkerto, Margoagung, Margodadi, Margoluwih, Merdikorejo, Sendangadi, Madurejo)	7 Paket
						Design Grafis (Tegaltiro Berbah)	1 Paket
						Stir Mobil (Sendangtirto, Bimomartani, Margodadi)	3 Paket
						Las Listrik (Gayamharjo, Prambanan)	1 Paket
						Pelatihan untuk Disabilitas Jahit (Godean)	1 Paket
						Pelatihan untuk Disabilitas Tata Boga (Kalasan)	1 Paket
						PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pendidikan dan	11 sub kejuruan

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Pelatihan bagi Pencari Kerja	
						A. Pelatihan pencari kerja pada 11 sub kejuruan:	
						Mesin logam	2 Paket
						Las listrik	2 Paket
						Sepeda Motor	2 Paket
						Mobil Bensin	2 Paket
						Meubelair	3 Paket
						Desaign Grafis	1 Paket
						Operator Komputer	1 Paket
						Teknisi HP	3 Paket
						Instalasi Penerangan	1 Paket
						Teknik Pendingin	1 Paket
						Internet Marketing	1 Paket
38	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Budidaya Tanaman Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Pelatihan Petani dan Pelaku Agrobisnis Tanaman Peternakan	1 angkatan
	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan					Kursus Manajerial Kelompok	
						Peningkatan kapasitas pengolah pakan mandiri	13 Orang
						Bimbingan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	1 angkatan
						Peningkatan kapasitas pengolah pakan mandiri Kursus Budidaya ikan (PUPM Depok)	1 angkatan 25 orang
						Pelatihan budidaya perikanan PUPM Minomartani, Ngaglik	1 angkatan 25 orang

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Kursus Budidaya ikan (PUPM Plalangan, Pandowoharjo, Sleman)	1 angkatan 25 orang
						Pelatihan pembuatan pakan ikan PUPM Anggota Linmas Mlati	1 angkatan 25 orang
						Pelatihan budidaya lele PUPM Pemuda Banyuraden, Gamping	1
						Kursus Budidaya ikan bawal dan nila (PUPM Sidoluhur, Godean)	1 angkatan 25 orang
						Pelatihan pembuatan pakan ikan alternatif PUPM Sidomulyo, Godean)	1 angkatan 25 orang
						Kursus Budidaya perikanan (PUPM Sendangarum, Minggir)	1 angkatan 25 orang
						Pelatihan budidaya perikanan PUPM Jurangjero, Trojayan dan Ngelo, Harjobinangun, Pakem)	1 angkatan 25 orang
						Kursus Budidaya ikan (PUPM Candibinangun, Pakem)	1 angkatan 25 orang
						Pelatihan budidaya ikan gurami PUPM Margodadi, Seyegan	1 angkatan 25 orang
						Pelatihan pembuatan pakan ikan PUPM Margokaton, Seyegan	1 angkatan 25 orang
						PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Pelatihan petani dan pelaku agrobisnis tanaman peternakan - Pelatihan Budidaya Ternak Sapi Potong (Desa Wukirsari)	1 angkatan (25 orang)

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Pelatihan Budidaya Ternak Kambing Domba (Desa Lumbungrejo)	1 angkatan 25 orang
						Pelatihan Pembuatan Pakan ternak (Desa Bokoharjo)	1 angkatan 25 orang
						Pelatihan pembuatan Pakan ternak PUPM (Kelompok ternak sembada, Sanggrahan, Condongcatur, Depok)	1 angkatan 25 orang
						Pelatihan budidaya peternakan kambing (PUPM Wukirsari, Cangkringan)	1 angkatan 25 orang
						Pelatihan budidaya peternakan bebek (PUPM Wukirsari, Cangkringan)	1 angkatan 25 orang
						Pelatihan pembuatan pakan ternak (PUPM Wukirsari, Cangkringan)	1 angkatan (25 orang)
						Pelatihan budidaya sapi (PUPM Kepuharjo, Cangkringan)	1 angkatan 25 orang
						Pelatihan budidaya sapi potong PUPM KT Ngudi Makmur, Berkisan Pandowoharjo, Sleman	1 angkatan 25 orang
						Pelatihan budidaya sapi potong PUPM Tegaltirto	1 angkatan 25 orang
						Pelatihan pembuatan pakan ternak (PUPM Linmas Sendangadi, Mlati)	1 angkatan 25 orang
						Pelatihan budidaya ayam kampung super (PUPM Nogotirto, Gamping)	1 angkatan 25 orang
						Pelatihan budidaya kambing domba (PUPM Sumberarum, Moyudan)	1 angkatan 25 orang

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Pelatihan budidaya kambing domba (PUPM Banyurejo, Tempel)	1 angkatan 25 orang
						Pelatihan budidaya kambing domba (PUPM harjobinangun, Pakem)	1
						Pelatihan budidaya sapi potong PUPM Bimomartani, Ngemplak	1 angkatan 25 orang
						Pelatihan budidaya sapi PUPM Bokoharjo, Prambanan	1 angkatan 25 orang
						PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Pelatihan petani dan pelaku agrobisnis tanaman hortikultura dan perkebunan - Pelatihan budidaya jamur tiram	100 Orang
						Pelatihan jamur merang	1 angkatan 25 orang
						Pelatihan jamur kuping	1 angkatan 25 orang
						Pelatihan Jamur Tiram (PUPM Maguwoharjo, Depok)	1 angkatan 25 orang
						Pelatihan Budidaya Jamur Tiram (PUPM Jetak, kalasan)	1 angkatan 25 orang
						Pelatihan Budidaya Jamur Tiram (PUPM Sumpalsari, Moyudan)	1 angkatan 25 orang
						Pelatihan Budidaya Jamur Tiram (PUPM KWT Tanjung, Sumberrejo, Tempel)	1 angkatan 25 orang
						Pelatihan Budidaya Jamur Kuning (PUPM Pondokrejo, Tempel)	1 angkatan 25 orang

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
39	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA Peningkatan kapasitas pengolah dan pemasar hasil perikanan	3 angkatan (75 orang)
						- Pelatihan pengolahan hasil perikanan (PUPM Condongcatur, Maguwoharjo, Caturtunggal, Depok)	
						Pelatihan pengolahan hasil perikanan (PUPM Argomulyo, Cangkringan)	1 angkatan (25 orang)
						Pelatihan pengolahan hasil perikanan (PUPM KWT Trihanggo, Gamping)	1 angkatan (25 orang)
						Pelatihan pengolahan hasil perikanan air tawar (PUPM Sidoarum, Godean)	1 angkatan (25 orang)
						Pelatihan pengolahan hasil perikanan (PUPM Sumberrahayu, Moyudan)	1 angkatan (25 orang)
						Pelatihan pengolahan hasil perikanan (PUPM Mororejo, Tempel)	1 angkatan (25 orang)
						Pelatihan pengolahan hasil perikanan (PUPM Gondang, Donokerto, Turi)	1 angkatan (25 orang)
						Pelatihan budidaya perikanan	0 (belum diketahui)
40	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar	Program Pengolahan Dan Pemasaran	Pengolahan Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Pelatihan Bagi Pengolah dan pemasar hasil perikanan	2 angkatan

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
	Kelompok Pendapatan	Produksi Perikanan					
41	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Pelatihan Teknis Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	PROGRAM KONSERVASI EKOSISTEM DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Restocking Perairan Umum - Penebaran benih di perairan umum	2000 kg
42	Penurunan Ketimpangan Wilayah	Program Pengembangan Ukm	Pelatihan Kelembagaan dan Usaha UKM	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah	60 UMKM
						Jumlah UMKM yang didampingi/dibina	0
43	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Penumbuhan Dan Pengembangan Wirausaha Baru	Pelatihan Kewirausahaan	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	655 orang (33 Angkatan)
						Bimtek IKM pemula	

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Jumlah pelaku usaha mikro peserta pelatihan kewirausahaan	
						Jumlah pelaku usaha mikro peserta inkubator kewirausahaan	20 orang (1 Angkatan)
						Jumlah pelaku usaha mikro peserta pelatihan manajemen usaha	100 orang (5 angkatan)
						Jumlah pelaku usaha mikro peserta kelas bisnis UMKM	300 orang (10 Angkatan)
						Jumlah pelaku usaha mikro peserta workshop pengembangan UKM	90 orang (3 angkatan)
						Program penciptaan iklim usaha kecil dan menengah dan kondusif Pemberdayaan koperasi - Kerjasama magang/internship corporation bagi warga miskin	10 Orang
44	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Output : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Jamban Sehat 200 unit x Rp 4.000.000 di desa Margoluwih Seyegan dan Sendangagung Minggir) - Cakupan desa yang masyaratnya te	200 penerima

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
45	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Penanganan Fakir Miskin	Pembinaan Usaha dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH	Dinas Sosial	Dinas Sosial	PROGRAM : PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA KEGIATAN : PEMBINAAN USAHA SOSIAL EKONOMI PRODUKTIF (USEP/KUBE) OUTPUT : - BIMTEK BKK KPM PKH GRADUASI (TERMASUK ASSESMENT DAN SE	150 KPM
46	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan	Program: Manajemen Pelayanan Pendidikan Kegiatan: Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu dan Siswa Berprestasi Output: Jaminan pendidikan bagi siswa miskin dan rentan miskin	9000 Siswa SMA/MA/SMK
47	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan	Program Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	Penanganan Desa Rawan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	PROGAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN Penangan Daerah Rawan Pangan	30 Orang
						Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	
						Penanganan daerah potensi rawan pangan	3 lokasi
						Workshop SKPG	1 Kali

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						PROGAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN Pengembangan Desa Mandiri Pangan Pembinaan pengembangan demapan	8 Desa
						Pelatihan manajemen kelembagaan demapan Evaluasi demapan	75 Orang 8 Desa
						PROGAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN Pengembangan Lumbung Pangan Desa Pembinaan kelembagaan lumbung pangan	12 bulan
						Pelatihan pengelola lumbung pangan Gledekan/troli Tester kadar air Timbangan digital	2 angk (50 orang) 6 unit 6 unit 6 unit
						Evaluasi lumbung pangan masyarakat Pembinaan KWT Pemanfaatan pekarangan	1 Kali 46 lokasi
						Pelatihan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Pendampingan pekarangan untuk lahan pangan	8 lokasi 10 lokasi

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Pelatihan pemanfaatan pekarangan PUPM Kepuharjo, Cangkringan	1 angk (25 orang)
						Pelatihan pemanfaatan pekarangan vertikultur PUPM Minomartani, Ngaglik	1 angk (25 orang)
						Pelatihan pemanfaatan pekarangan sayuran vertikultur PUPM Sucen, Triharjo, Sleman	1 angk (25 orang)
						Pelatihan pemanfaatan pekarangan PUPM KWT Sedyo Makmur Dukuh Banyuraden, Gamping	1 angk (25 orang)
						Pelatihan pemanfaatan pekarangan PUPM Sidorejo, Godean	1 angk (25 orang)
						Pelatihan Budidaya sayuran pekarangan PUPM Lestari dan Sedyo Rukun Jarakan dan Ngagul-agulan Sendangrejo, Minggir	1 angk (25 orang)
						PROGAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Lomba Diversifikasi Pengolahan Hasil Pertanian tingkat kabupaten	1 unit
						Bimbingan pengemasan produk olahan	1 angk (25 orang)

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman pangan	2 angk (50 orang)
						Bimbingan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan/olahan basah dan kering jagung (PUPM Maguwoharjo, Depok)	1 angk (25 orang)
						Bimbingan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan/olahan basah dan kering ubi kayu (PUPM Condongcatur dan Caturtunggal, Depok)	2 angk (50 orang)
						Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman pangan umbi-umbian (PUPM Argomulyo, Cangkringan)	1 angk (25 orang)
						Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman pangan beras (PUPM Difabel Mlati)	1 angk (25 orang)
						Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman pangan beras (PUPM PKK Tlogoadi, Mlati)	1 angk (25 orang)
						Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman pangan beras hitam dan merah (PUPM Candibinangun, pakem)	1 angk (25 orang)
						Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman pangan jagung (PUPM Wedomartani, Ngemplak)	1 angk (25 orang)
						Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman pangan	1 angk (25 orang)

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						kedelai (PUPM Bokoharjo, Prambanan)	
						Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman pangan ubi jalar (PUPM Subur Makmur, Gunung gebang, Sumberharjo, Prambanan)	1 angk (25 orang)
						Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman pangan beras (PUPM Donokerto, Turi)	1 angk (25 orang)
						Pelatihan olahan garut PUPM KWT Makmur, Sembung, Balecatur, Gamping	1 angk (25 orang)
						PROGAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura dan Perkebunan Pelatihan pengolahan hasil hortikultura	5 angk (125 orang)
						Bimbingan pengemasan produk olahan	1 angk (25 orang)
						Pelatihan pengolahan hasil perkebunan	1 angk (25 orang)
						Kunjungan ke sumber teknologi pengolahan	1 kali / 50 orang
						Bimbingan penanganan pasca panen hortibun	1 angk (25 orang)
						Diversifikasi pengolahan hortikultura	1 Kali
						Bimbingan pengolahan hasil pertanian hortikultura (olahan	1 angk (25 orang)

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						basah dan kering pepaya) PUPM Condongcatur, Depok	
						Bimbingan pengolahan hasil pertanian hortikulturakomoditas kelor (PUPM Condongcatur, Depok)	1 angk (25 orang)
						Bimbingan pengolahan hasil pertanian hortikultura komoditas jahe (PUPM Condongcatur, Depok)	1 angk (25 orang)
						Pelatihan pengolahan hasil pertanian sayuran (PUPM Argomulyo, Cangkringan)	1 angk (25 orang)
						Pelatihan pengolahan hasil pertanian pisang (PUPM Umbulharjo, Cangkringan)	1 angk (25 orang)
						Pelatihan pengolahan pasca panen cabai PUPM KWT Guyub Rukun, Kebonagung, Tridadi, Sleman	1 angk (25 orang)
						Pelatihan budidaya dan olahan toga PUPM Kalasan	1 angk (25 orang)
						Pelatihan olahan cabe PUPM KWT Tunas Mekar, Biru, Trihanggo, Gamping	1 angk (25 orang)
						Pelatihan Packaging hasil olahan hortikultura PUPM KWT Timbul Lestari, baturan, Trihanggo, Gamping	1 angk (25 orang)
						Pelatihan olahan pepaya PUPM KWT Karyabunda, Patukan, Ambarketawang, Gamping	1 angk (25 orang)
						Pelatihan olahan pisang dan bonggol pisang PUPM KWT	1 angk (25 orang)

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
						Ngudi Makmur, Perengdawe, Balecatur, Gamping	
						Pelatihan pengolahan hasil pertanian terong dan tomat (PUPM Sidoarum)	1 angk (25 orang)
						Pelatihan pengolahan hasil pertanian pepaya (PUPM Lumbungrejo, Tempel)	1 angk (25 orang)
						Pelatihan pengolahan hasil pertanian jmaur tiram (PUPM Tambakrejo, Tempel)	1 angk (25 orang)
						SL- GHP Kopi PUPM Kaliurang timur, Hargobinangun, Pakem	1 angk (25 orang)
						Bimtek pengolahan hasil Toga PUPM KWT Pakembinangun, Pakem	1 angk (25 orang)
						Pelatihan pengolahan hasil pertanian pisang dan lidah buaya (PUPM KWT Candibinangun, Pakem)	1 angk (25 orang)
						Pelatihan pengolahan hasil pertanian salak (PUPM Margorejo, Tempel)	1 angk (25 orang)
						Pelatihan pengolahan hasil pertanian salak (PUPM Wonokerto, Turi)	1 angk (25 orang)
						Pelatihan pasca panen dan olahan hortikultura di KWT Girikerto	1 angk (25 orang)
						Fasilitasi sarana titik kumpul lelang cabai	1 Paket
48	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar	Program Perencanaan	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA Kegiatan : Monitoring dan	1 dok

RKPD DIY 2020

No	Tematik	Program	Kegiatan	OPD Pemda DIY	OPD Kab/Kota	Kinerja	
						KAB-KOTA	
						Tolok Ukur	Target
	Kelompok Pendapatan	Pembangunan Sosial-Budaya	Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)		Pembangunan Daerah	evaluasi program penanggulangan kemiskinan	
						- Dokumen laporan evaluasi program penanggulangan kemiskinan	
						Dokumen hasil monev SLRT 2020	1 dok

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (early warning) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Tabel 7-1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,72	81,08	81,68
2	Indeks Gini	0,3846	0,3776	0,3635
3	Persentase Angka Kemiskinan	10,19%	9,11%	7,00%
4	Indeks Pemberdayaan gender	70,02	70,12	70,32
5	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	11.68%	11.72%	12.04%
6	Pertumbuhan Ekonomi	5,26%	5,29%	5,34%
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,51	62,44	66,15
8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	78%	79,5%	82.5%
9	Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	30,42%	40,69%	54,44%
10	Indeks Williamson	0,4552	0,4524	0,4489
11	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
12	Nilai Akuntabilitas Pemerintah	A	A	A
13	Persentase capaian program urusan keistimewaan	65,22	73,91	82,61
14	Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	9.419	13.419	21.877

Tabel 7-2 Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)
Urusan Pendidikan				
1	Rata-rata hasil ujian nasional SMA	58,03	58,22	58,41
2	Rata-rata hasil ujian nasional SMK	57,89	58,02	58,29
3	Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	97,25%	98,39%	98,63%
4	Capaian APK pendidikan Menengah	96,72	98,41	99,74
5	Capaian APK pendidikan khusus	81,78	83,36	86,50
Urusan Kesehatan				
1	Persentase puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga	100%	100%	100%
2	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Terakreditasi	66,84%	69,08%	73,28%
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi	91,58%	92,47%	94,25%
2	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	88,71%	90,49%	94,14%
3	Peningkatan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	84%	84,75%	86,25%
4	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	64,66%	71,41%	87,81%
5	Peningkatan kinerja penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan	27,69 %	35,38%	44,49 %
6	Peningkatan aksesibilitas Jalan	95,76%	96,74%	100%
7	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	64,29%	73,14%	99,49%
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1	Persentase Penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak	95,49%	96,16%	97,50%
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
1	Skor Indeks Ketahanan Nasional DIY di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya	2,97	2,99	3,01
2	Jumlah Desa/kelurahan yang Melakukan Upaya Menjaga Keamanan Lingkungan	335	340	360
3	Indeks Ketahanan Daerah	71	74	80
Urusan Sosial				
1	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	40,97%	42,17%	44,28%
2	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan	51,57%	51,58%	51,60%

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)
	kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial			
Urusan Tenaga Kerja				
1	Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan	1050	1575	2625
2	Jumlah kesempatan kerja	2.020.452	2.061.962	2.149.001
3	Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial	20	30	50
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak	0.47	0.46	0.45
Urusan Pangan				
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,22	90,52	91,12
2	Pengeluaran makanan	40,29%	39,74%	38,65%
Urusan Pertanahan				
1	persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi	100%	100%	100%
2	persentase fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	46,51%	59,45%	88,67%
Urusan Lingkungan Hidup				
1	persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah bidang lingkungan hidup	91,47 %	94,39 %	100 %
Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				
1	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	7	10	15
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan	4	N/A	N/A
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1	Umur menikah pertama perempuan	24.40	24.40	24.40
2	Persentase legalitas keluarga (perkawinan dan kelahiran)	98.00%	98.00%	98.00%
Urusan Perhubungan				
1	Kinerja Penyediaan Layanan Angkutan Umum dan tingkat pelayanan jalan	44,92%	45,54%	49,79%
Urusan Komunikasi dan Informatika				
1	Peringkat Keterbukaan Informasi Bagi Badan Publik level Provinsi	7	6	4
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
1	Omzet koperasi (Rp)	3.716.227	3.734.809	3.772.250

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)
	Juta)			
2	Omzet UKM (Rp Milyar)	10.692	10.906	11.347
3	Kontribusi jumlah WUB terhadap jumlah UKM	0,3%	0,3%	0,4%
Urusan Penanaman Modal				
1	Nilai PMTB dalam PDRB DIY	38.698.221,-	40.633.132,-	44.798.028,-
2	Nilai indeks Kepuasan Masyarakat	83	84	85
Urusan Kepemudaan dan Olahraga				
1	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	10%	10,9%	11,8%
2	Prestasi cabang olah raga	Peringkat 2 POPWIL	Peringkat 9 POPWIL	Peringkat 8 POPNAS
Urusan Statistik				
1	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%
2	Tingkat kepuasan pelanggan	69	69	72
Urusan Kebudayaan				
1	Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan	618	668	768
2	meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	5,71 %	6,27 %	7,40 %
3	peningkatan penyelenggaraan even budaya tingkat Provinsi, nasional, internasional ydi Taman Budaya	5,79 %	7,79 %	12,79 %
4	Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya DIY	4,28 %	4,44 %	4,75 %
5	jumlah desa budaya yang naik status menjadi desa mandiri budaya	5	10	20
Urusan Perpustakaan				
1	Prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan	24%	25%	27%
2	Jumlah perpustakaan anggota Jogja Library For All (JLA) yang menindaklanjuti kerjasama	5	5	8
Urusan Kearsipan				
1	Peningkatan arsip yang dimanfaatkan	6300	6850	7500
Urusan Pariwisata				
1	spending money wisatawan	7.672.683,-	8.123.974,-	8.830.595,-
2	nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY	9.855.064,-	10.446.367,-	11.737.538,-
Urusan Pertanian				

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)
1	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB	7.112.249,-	7.183.372,-	7.327.757,-
Urusan Kehutanan				
1	nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY	742.060,-	749.480,-	764.545,-
Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral				
1	Presentase Rumah Tangga berakses listrik	95,60%	98,14%	100,00%
2	Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan sesuai ketentuan	49	71	115
Urusan Perdagangan				
1	Nilai Sektor Perdagangan dalam PDRB DIY	8.528.946,-	8.955.393,-	9.873.321,-
Urusan Perindustrian				
1	Nilai Industri Pengolahan dalam PDRB DIY	12.637.626	13.143.131	14.215.611
Urusan Kelautan dan Perikanan				
1	Nilai Subsektor Perikanan dalam PDRB DIY	322.136	325.357	331.897
2	Peningkatan Status Kawasan Konservasi	30%	60%	100%
Perencanaan Pembangunan				
1	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	84,00%	84,50%	85,50%
Keuangan				
1	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan	100%	100%	100%
2	Optimalisasi aset di Pengelola Barang Milik Daerah	6.234.617.858	6.453.519.026	6.967.568.518
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan				
1	Persentase kualitas manajemen SDM Aparatur	79,50%	81,50%	85,00%
2	Akreditasi Badan Diklat	91	92	93
Penelitian dan Pengembangan				
1	Persentase rumusan bahan kebijakan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	55%	60%	70%
Pengawasan				
1	Persentase penyelesaian LHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)	82%	85%	90%
Sekretariat Dewan				
1	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD Skor Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD	80%	85%	90%

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)
2	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	96,00%	96,00%	96,50%
Sekretariat Daerah				
1	persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	85%	90%	100%
2	Persentase bahan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang menjadi rumusan kebijakan	N/A	N/A	N/A
3	Persentase bahan kebijakan pengelolaan pembangunan masyarakat yang menjadi rumusan kebijakan	N/A	N/A	N/A
4	Nilai rerata pimpinan dan tamu terhadap layanan keprotokoleran, kerumahtanggan, dan persandian serta persuratan	86%	87%	88%
5	Jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau	16	16	31
6	Persentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	100 %
7	Persentase Kualitas produk hukum, layanan hukum dan layanan informasi produk hukum	100 %	100 %	100 %
8	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	79,7%	80,5%	83%
9	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	100 %	100 %	100 %
10	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi bidang infrastruktur daerah dan pembangunan berkelanjutan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	65%	65%	80%
11	Persentase rumusan bahan Kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	75%	84%	100%
12	Rumusan bahan Kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat	4	4	4

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2022)
13	Lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan	4	4	4
14	Skor Indeks kepuasan masyarakat terhadap informasi pemerintah daerah	82	84	88
15	Peningkatan kepuasan jumlah stakeholder yang mendapatkan layanan kaperda	N/A	N/A	N/A
16	Peningkatan kualitas layanan kaperda	87	88	90
17	Rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan	98	98,1	98,2
18	Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai Prosedur	-	-	100

BAB 8 PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan yang mengemban misi pelaksanaan pembangunan tahun ketiga RPJMD 2017-2022 yang merupakan RPJMD periode keempat dari 5 tahapan RPJP. RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA-APBD), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPAS-APBD).

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2020 perlu diupayakan secara kolektif dengan semangat Budaya Kerja "SATRIYA"¹⁴ *Sawiji* (bersatu padu-menyatu terpadu), *Greget* (gigih, semangat, kerja keras dan dinamis), *Sungguh* (percaya diri), *Ora Mingkuh* (konsisten bertanggungjawab terhadap semua keputusan)¹⁵ segenap aparatur Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, aparat Pemerintah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia pendidikan perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD DIY Tahun 2020 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹⁴ Budaya kerja SATRIYA (Selaras, Akal budi Luhur, Teladan-keteladanan, Rela Melayani, Inovatif, Yakin dan percaya diri, Ahli-profesional) bentuk komitmen Pemerintah Provinsi DIY dalam mencapai keberhasilan transformasi birokrasi yang berbasiskan pada nilai nilai kearifan lokal DIY yang menjwai semangat kerja aparatur Pemda DIY. Budaya kerja SATRIYA telah diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta

¹⁵ *Sawiji, Greget, Sungguh, Ora Mingkuh* merupakan filosofi yang berasal dari *sesanti* luhur dari pendiri Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono I kepada seluruh Ksatriya Mataram Jogja dalam menjalankan dharma bakti kepada negara

Lebih lanjut lagi, dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan baik dari pemerintah, dunia usaha dan stakeholder lain yang terkait, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

Yogyakarta, 27 Juni 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ttd.

HAMENGKU BUWONO X

RKPD DIY 2020

Rencana Kerja
Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2020



BAPPEDA DIY

Kompleks Kepatihan Danurejan Yogyakarta

☎ (0274) 589583

Fax. (0274) 586712

💻 <http://www.bappeda.jogjaprov.go.id>

✉ bappeda@bappeda.pemda-diy.go.id